PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



RENCANA KERJA

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dipandang perlu untuk diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, dengan menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana di maksud Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan.:
1. Wakil Wali Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
7.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
9.	Dinas Sosial Kota Makassar
10.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
12.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
13.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Makassar
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
22.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
23.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
24.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
25.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
26.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
27.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
28.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
29.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar

31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
32.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
34.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
35.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
36.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
37.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
38.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
39.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
40.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
43.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
44.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
45.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
46.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
47.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
58.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
49.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
50.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar
51.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

WALIKOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran Tahun 2025 yang merupakan rencana kerja tahunan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar telah tersusun, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi dan UKM tahun 2025 adalah merupakan perbaikan dari penjabaran Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran kebijakan dan Program Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Didalamnya memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator *output* kegiatan sebagai Upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Dalam penyusunan PerubahanRencana Kerja (Renja) ini mungkin ditemui data, informasi dan cara penyajian yang belum optimal, untuk itu atas kekurangan dan kelemahan Renja Dinas Koperasi dan UKM masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari semua pihak terhadap Perubahan Rencana Kerja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan Upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Makassar, 12 Agustus 2025

Kepala Dinas,

Arlin Ariesta S.STP.,M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19770411 199511 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	**i**
DAFTAR ISI	**ii**
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	7
2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2025	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	32
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar	34
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir P-RKPD 2025	36
BAB III :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA MAKASSAR	49
BAB IV: PENUTUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Koperasi Usaha Kecil,, dan Menengah Kota Makassar merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peranan penting dalam memperkuat perekonomian daerah. Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini berfungsi dalam upaya peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi serta Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berkomitmen untuk mewujudkan demokratisasi ekonomi dan memberikan pelayanan publik yang optimal. Melaui berbagai Program dan kegiatan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan yang berkualitas sekaligus mengurangi kesenjangan antara kebijakan yang ditempuh dengan pelaksanaan dilapangan.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) OPD merupakan rangkaian dari sistem perencanaan pembangunan daerah Kota Makassar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguna Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Daerah. Perencanaan ini disusun dan mengacu pada arah kebijakan rencana strategis. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Dokumen penyusuan Perencanaan Pembanguna Daerah mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS), serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Menindak lanjuti Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang Menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka organisasi perangkat daerah termasuk Dinas Koperasi UKM Kota Makassar berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada rancangan perubahan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Koperasi UKM Kota Makassar dilaksanakan berdasarkan pada hasil evaluasi tahun berjalan (sampai dengan triwulan II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Dinas Koperasi UKM Kota Makassar Tahun 2025 dalam Upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan pengganggaran menyusun Rencana Kerja yang mengakomodir Program prioritas pemerintah pusat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) tahun 2025 serta menjadi dasar perubahan Kebijakan Umum Anggararan (KUA) dan Perubahan Prioritas Platform Anggaran Sementara (Perubahan PPAS). Program prioritas bidang Koperasi dan UMKM yang termasuk dalam Asta Cita Pemerintahan Prabowo Gibran yaitu pembentukan Koperasi Merah Putih di 153 Kelurahan dan program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang diakomodir dalam perubahan rencana kerja (RENJA) Perubahan 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2025 yang disusun dengan berbagai masukan dan pertimbangan baik yang bersumber dari dokumen perencanaan maupun penjabaran dari isi dan pokok pikiran pembangunan yang secara umum Penjabaran dari RPJMD Kota Makassar serta SDG's dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar pada tahun 2025. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah
- Terdapat rumusan program dan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan yang tidak terdapat di rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Pokok 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Pengentasan Kemiskinan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 111);
16. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 14).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2025 adalah untuk menetapkan program dan kegiatan yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif, yang mencerminkan tingkat pencapaian sasaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, perubahan rencana kerja ini juga bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan kinerja Dinas Koperasi dan UKM dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, guna menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai. Penyusunan perubahan ini merupakan bagian dari upaya mensinergikan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia, sehingga mampu memperkuat peran strategis Dinas Koperasi dan UKM dalam mendukung pembangunan Kota Makassar secara berkelanjutan.

Perubahan dapat dimaksudkan untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta sebagai upaya mensinergikan dengan program prioritas yang termaktub dalam rancanagan akhir RPJMD Kota Makassar yaitu sebagai berikut :

a. Program Nasional Presiden R.I, percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih melalui penyuluhan, Fasilitasi Akta Pendirian Koperasi serta melakukan pembinaan melalui kemitraan Akses Pembiayaan, Sosialisasi Pembuatan AD-ART KKMP, Bimtek Pembuatan Laporan Keuangan (RAT) KKMP yang masuk dalam kegiatan Penguatan tata kelola Kelembagaan Koperasi
b. Pemberdayaan ekonomi wilayah tempat pembuangan akhir (Program Pemberdayaan UMKM) salah satu Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar
c. Gerakan Masyarakat Sadar Berkoperasi (GEMASKOP) salah satu Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar masuk dalam *Makassar Creatif Hub (MCH)* (Program Pemberdayaan Perlindungan Koperasi Wilayah daerah Kab/Kota)

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN, berisi tentang:

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN, berisi tentang:

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2025
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir P-RKPD 2025

Bab III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI dan UKM KOTA MAKASSAR

Bab IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II TAHUN 2025

Untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi, maka dilakukan reviu dan evaluasi pada pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar tahun 2025 Triwulan II, kemudian dibandingkan dengan Capaian Rencana Kerja SKPD Tahun 2025.

Realisasi anggaran tahun 2025 sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 6.041.547.317; (enam miliar empat puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) atau 32,23 persen dari pagu anggaran pokok sebesar Rp. 18.747.825.961 (delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah). Uraian realisasi capaian target kinerja terdiri dari 7 (tujuh) program utama dan 1 (satu) program pendukung, hasil evaluasi dari indikator kinerja setiap program tersebut adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PENDUKUNG

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator pertama Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas tahun 2025 ditargetkan 90 persen dengan realisasi triwulan II sebesar 45 persen, indikator kedua Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025 ditargetkan 100 persen dengan realisasi triwulan II sebesar 50 persen .

1.1 **Adapun Capaian indikator kinerja kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah** dengan indikator yaitu persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dengan target kinerja sebesar 100 persen dengan realisasi kinerja sebesar 20 persen di triwulan II dan Capaian realisasi kinerja terhadap target tersebut mencapai 45 persen dari target anggaran sebesar Rp. 115.723.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.400.000; atau 17,63 persen adapun sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah** dengan indikator yaitu Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target kinerja 3 dokumen dan realisasi kinerja 1 dokumen dari target anggaran sebesar Rp. 50.452.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.033.500; atau 52,39 persen.

2. **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** dengan indikator yaitu Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan target kinerja 1 dokumen dan belum ada realisasi kinerja dari target anggaran sebesar Rp. 8.483.000; di triwulan II belum ada realisasi anggaran.

3. **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** dengan indikator yaitu jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dengan target kinerja 1 dokumen dan belum ada realisasi kinerja dari target anggaran sebesar Rp. 9.139.000; di triwulan II belum ada realisasi anggaran.

4. **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** dengan indikator yaitu Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan target kinerja 1 dokumen dan belum ada realisasi kinerja dari target anggaran sebesar Rp. 7.907.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.168.000; atau 40,07 persen.

5. **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD** dengan indikator yaitu Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD dengan target 1 dokumen dan belum ada realisasi kinerja dari target anggaran sebesar Rp. 7.128.000; di triwulan II belum ada realisasi anggaran.

6. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** dengan indikator yaitu Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dengan target kinerja 2Laporan dan belum ada realisasi kinerja dari target anggaran sebesar Rp. 7.366.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.488.000; atau 33,78persen.

7. **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan indikator yaitu Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan target kinerja 4 Laporan dan belum ada realisasi kinerja dari target anggaran sebesar Rp. 12.648.000; di triwulan II belum ada realisasi anggaran.

1.2 Adapun Capaian indikator kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja yaitu Terlaksananya dokumen administrasi keuangan dengan target kinerja sebesar 100 persen dengan realisasi capaian kinerja sebesar 15 persen dari target anggaran sebesar Rp. 7.405.512.441; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.202.540.780; atau 16,24 persen adapun sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** dengan indikator, Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target 42 orang/bulan dengan realisasi kinerja sebesar 30 orang/bulan dari target anggaran sebesar Rp. 6.921.326.441; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.366.373.935; atau 35,44 persen

2. **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** dengan indikator, Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan target 12 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 3 dokumen dari target anggaran sebesar Rp. 292.185.000; dengan realisasi sebesar Rp. 70.740.000; atau 48,42 persen

3. **Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD** dengan indikator, Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD dengan target 1418 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 400 dokumen dari target anggaran sebesar Rp. 181.345.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.915.000; atau 50,13 persen

4. **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD** dengan indikator, Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD dengan target 2 dokumen dan belum ada realisasi kinerja dari target anggaran sebesar Rp. 2.025.000; di triwulan II belum ada realisasi anggaran.

5. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD** dengan indikator, Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan target 6 Laporan dan belum ada realisasi kinerja dari target anggaran sebesar Rp. 1.115.000; di triwulan II belum ada realisasi anggaran.

6. **Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan** dengan indikator, Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan dengan target 4 dokumen dan belum ada realisasi kinerja

dari target anggaran sebesar Rp. 3.420.000; di triwulan II belum ada realisasi anggaran.

7. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD** dengan indikator, Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan target 12 Laporan dan belum ada realisasi kinerja dari target anggaran sebesar Rp. 1.115.000; di triwulan II belum ada realisasi anggaran.

8. **Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran** dengan indikator, Jumlah Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan target 2 dokumen dan belum ada realisasi kinerja dari target anggaran sebesar Rp. 2.981.000; di triwulan II belum ada realisasi anggaran

1.3 **Adapun Capaian indikator kinerja kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja yaitu tersedianya administrasi barang milik daerah dengan target kinerja sebesar 4 Laporan dan belum ada realisasi kinerja dari target anggaran sebesar Rp. 140.245.400; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.613.400; atau 22,54persen, adapun sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD** dengan indikator, Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan target 4 laporan dengan realisasi kinerja sebesar 1 dokumen dari target anggaran sebesar Rp. 140.245.400; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.561.800; atau 45,76 persen.

1.4 **Adapun Capaian indikator kinerja kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja yaitu tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target kinerja sebesar 4 Dokumen dan belum ada realisasi kinerja dari target anggaran sebesar Rp. 612.820.200; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.097.200,- atau 5,40 persen adapun sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian** dengan indikator, Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dengan target 4 dokumen dengan realisasi kinerja sebesar 1 dokumen dari target anggaran sebesar Rp. 120.820.200; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.194.400; atau 44,94 persen

2. **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi** dengan indikator, Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan target kinerja 95 orang dengan realisasi kinerja sebesar 6 orang dari target anggaran sebesar Rp. 492.000.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.602.465; atau 9,88persen.

1.5 **Adapun Capaian indikator kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja yaitu Tersedianya administrasi umum perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 7 Laporan dan belum ada realisasi kinerja dari target anggaran sebesar Rp. 575.270.840; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.468.715,- atau 6,34 persen adapun sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** dengan indikator, Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan dengan target 1 paket dan belum ada realisasi kinerja dari target anggaran sebesar Rp. 10.335.000; di triwulan II belum ada realisasi anggaran

2. **Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor** dengan indikator, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan target 4 paket dengan realisasi kinerja sebesar 1 Paket dari target anggaran sebesar Rp. 121.710.040; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.645.000; atau 3,82 persen.

3. **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** dengan indikator, Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan target 2 paket dengan dengan realisasi capaian kinerja 1 paket dari target anggaran sebesar Rp. 27.421.800 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.877.500; atau 28,73 persen.

4. **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** dengan indikator, Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan dengan target 1 paket dengan realisasi capaian kinerja belum ada realisasi dari target anggaran sebesar Rp. 25.984.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.485.000; atau 40,35 persen.

5. **Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan** dengan indikator, jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target kinerja 23 dokumen dengan realisasi capaian kinerja sebesar 2 dokumen dari target anggaran sebesar

Rp. 36.420.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 780.000,- atau 3,57 persen.

6. **Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD** dengan indikator, Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target kinerja 21 laporan dengan realisasi capaian kinerja sebesar 10 laporan dari target anggaran sebesar Rp. 173.400.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 72.299.876,- atau 50,55 persen.

7. **Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD** dengan indikator, jumlah dokumen pelaksanaan berbasis elektronik pada SKPD dengan target kinerja 1 dokumen dengan realisasi capaian kinerja 9 dokumen dari target anggaran sebesar Rp. 118.000.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 88.100.000; atau 74,66 persen

1.6 Adapun Capaian indikator kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja yaitu terlaksananya jasa administrasi perkantoran yang tersedia dengan target kinerja sebesar 14 Laporan dan belum ada realisasi capaian dari target anggaran sebesar Rp. 193.864.800; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 43.034.399,- atau 29,54 persen. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Penyediaan jasa surat menyurat** dengan indikator, Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan target 2 laporan dengan realisasi capaian kinerja belum ada realisasi dari target anggaran sebesar Rp.181.864.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.759.200,- atau 41,46 persen.

2. **Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik** dengan indikator, Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dengan target 1 laporan dengan realisasi capaian kinerja belum ada realisasi dari target anggaran sebesar Rp.12.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.748.265,- atau 34,47 persen.

1.7 Adapun Capaian indikator kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja yaitu Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah dengan target kinerja sebesar 4 laporan dan belum ada realisasi capaian kinerja dari target anggaran sebesar Rp. 364.480.000,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 40.239.600,- atau 11,04 persen adapun sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan, perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan** dengan indikator, Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan target kinerja sebesar 1unit dan belum ada realisasi capaian kinerja dari target anggaran sebesar Rp. 43.130.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.507.300,- atau 22,75 persen.
2. **Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan** dengan indikator, Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara atau dibayarkan pajak dan perizinannya dengan target kinerja 12 unit dan belum ada realisasi capaian kinerja dari target anggaran sebesar Rp. 236.980.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.500.000; atau 7,81 persen.
3. **Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya** dengan indikator, Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target kinerja 57 unit dan belum ada realisasi capaian kinerja dari target anggaran sebesar Rp. 39.370.000; di triwulan II belum ada realisasi anggaran.
4. **Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya** dengan indikator, Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target kinerja 1 unit dengan realisasi capaian kinerja 1 unit dari target anggaran sebesar Rp. 45.000.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.250.000; atau 50 persen.

Adapun faktor pendorong sebagai berikut:
a. Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang
b. Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Memadai
Adapun faktor penghambat sebagai berikut:
Adanya keterlambatan berkas dari pihak penyedia.
Adapun tindak lanjut sebagai berikut:
Mempercepat Proses Administrasi.

B. PROGRAM UTAMA

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 91.078.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah). Hingga Triwulan II, realisasi anggaran mencapai Rp 66.240.000,- (enam puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), atau sebesar 72,73persen dari total anggaran. Capaian ini dikategorikan sedang.

Persentase BPR/LKM aktif dengan ditargetkan sebesar 15,20persen dan belum ada realisasi kinerja sampai dengan triwulan II.

1.1. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja yaitu jumlah fasilitasi izin usaha simpan pinjam yang tersedia dengan target kinerja sebesar 210 Unit Usaha dengan realisasi kinerja 150 Unit Usaha dari target anggaran sebesar Rp. 45.912.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.120.000. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota** dengan indikator Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dengan target 210 Unit Usaha dengan realisasi kinerja 150 Unit Usaha dari target anggaran sebesar Rp. 45.912.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.120.000.

1.2. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yaitu persentase koperasi yag terfasilitasi izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang tersedia dengan target kinerja sebesar 210 Unit Usaha dengan realisasi kinerja 150 Unit Usaha dari target anggaran sebesar Rp. 45.166.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.120.000. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah**

Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja sebesar 210 Unit Usaha dengan realisasi kinerja 150 Unit Usaha dari target anggaran sebesar Rp. 45.166.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.120.000.

Adapun faktor pendorong sebagai berikut:
Tersedianya anggaran dalam hal pelaksanaan kegiatan pada program pelayanan izin usaha simpan pinjam serta kemudahan dalam hal memperoleh perizinan melalui Online Singgle Submission - Risk Basic Approach (OSS-RBA)

Adapun faktor penghambat sebagai berikut:
a. Pengurus Koperasi Belum Mengetahui terkait prosedur dalam hal memperoleh izin usaha dan izin operasional koperasi pada sistem OSS-RBA;
b. Adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal kepada pelaku koperasi dan UMKM yang membutuhkan;

Adapun Tindak Lanjut sebagai berikut:
Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait prosedur penerbitan izin usaha dan izin operasional melalui OSS-RBA.

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran APBD sebesar Rp 368.873.400 (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 250.137.050,- (dua ratus lima puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) atau sebesar 67,81 persen dengan kategori Rendah.

Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa ditargetkan sebesar 15,20persen, dengan realisasi kinerja sebesar 20,27 persen. Capaian realisasi kinerja terhadap target tersebut mencapai 44,34 persen.

2.1. Adapun Capaian indikator kinerja kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah/kabupaten kota dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi dengan target kinerja sebesar 425 unit usaha dengan realisasi kinerja sebesar 178 unit usaha dari target anggaran Rp. 368.873.400; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.636.000; atau 67,81 persen, adapun sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi** dengan indikator, Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi dengan target 400 unit usaha dan belum ada realisasi kinerja di triwulan II dari target anggaran sebesar Rp. 205.606.000; dan belum ada realisasi anggaran di triwulan II.
2. **Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator, Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan dengan target 25 unit usaha dengan realisasi capaian kinerja 178 unit usaha dari target anggaran sebesar Rp. 163.267.400; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.636.000; atau 33,07 persen.

Adapun Faktor Pendorong sebagai berikut:
Kebijakan prioritas dari OPD untuk mempercepat pengawasan Koperasi guna mendukung pertumbuhan koperasi yang sehat dan berjalan sesuai regulasi, termasuk memantau perkembangan 153 Koperasi Kelurahan Merah Putih yang baru terbentuk

Adapun Faktor Penghambat sebagai berikut:

Keterbatasan dukungan anggaran serta jumlah sdm, khususnya pejabat fungsional pengawas koperasi tidak sebanding dengan jumlah koperasi yang harus diperiksa, terutama dengan adanya 153 koperasi baru Koperasi Kelurahan Merah Putih". Kedua, kurangnya kesadaran beberapa pengurus koperasi terhadap pentingnya pengawasan, menyebabkan keterlambatan atau hambatan dalam proses pemeriksaan.

Adapun Tindak Lanjut sebagai berikut:

Memberikan pelatihan bagi pengurus KSP/USP koperasi dan internal Dinas Koperasi dan UKM terkait metode penilaian kesehatan koperasi

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran APBD sebesar Rp 763.905.600,- (tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 535.728.500,- (lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 70,13 persen dengan kategori Sedang.

Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat ditargetkan sebesar 72,84 persen, dengan realisasi kinerja sebesar 13,74persen. Capaian realisasi kinerja terhadap target tersebut mencapai 15,66 persen.

3.1 **Adapun Capaian indikator kinerja kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota** dengan indikator kinerja yaitu jumlah penilaian kesehatan KSP/USP dengan target kinerja sebesar 660 unit usaha dan belum ada realisasi kinerja di triwulan II dari target anggaran sebesar Rp. 763.905.600; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 178.686.300; atau 70,13 persen. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota** dengan indikator, Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan dengan target kinerja 180 unit usaha dan belum ada realisasi kinerja triwulan II dari target anggaran sebesar Rp. 212.546.200; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.686.300; atau 24,83 persen.
2. **Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan** dengan indikator, Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan dengan target 480 unit usaha dan belum ada realisasi kinerja triwulan II dari target anggaran sebesar Rp. 551.359.400; dengan realisasi anggaran Rp. 153.000.000 atau 87,59 persen.

Adapun Faktor Pendorong sebagai berikut:

Pengawasan dan pemeriksaan menggunakan standar yang sama berbasis potensi risiko sehingga memudahkan dalam melakukan pemeriksaan koperasi antara koperasi besar dan koperasi kecil berdasarkan pada klasifikasi usaha koperasi (KUK) 1234, bagi KUK 3 dan 4 dilakukan fit and proper test

Adapun Faktor Penghambat sebagai berikut:

a. Kurangnya kesadaran koperasi dalam melakukan penilaian kesehatan;
b. Terbatasnya jumlah SDM/PNS pengawas koperasi baik secara kuantitas maupun kualitas yang berwenang untuk melakukan penilaian kesehatan koperasi;
c. Adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan penilaian kesehatan koperasi hanya dilaksanakan 1 angkatan pada tahun anggaran 2025 yang menyebabkan tidak dapat terpenuhi kebutuhan peserta sebanyak 180 unit usaha;
d. Kegiatan belum terlaksana menunggu pengesaha DPPA

Adapun Tindak Lanjut sebagai berikut:

Memberikan pelatihan bagi pengurus KSP/USP koperasi dan internal Dinas Koperasi dan UKM terkait metode penilaian kesehatan koperasi.

4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dari 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran APBD sebesar Rp 51.556.000 (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dan belum ada realisasi anggaran sampai dengan triwulan II.

Persentase SDM koperasi yang mendapat pendidikan dan Pelatihan ditargetkan sebesar 1,95 persen dan belum ada realisasi kinerja sampai dengan triwulan II

4.1 Adapun Capaian indikator kinerja kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja yaitu jumlah pengurus dan pengelola yang terfasilitasi Pendidikan dan pelatihan perkoperasian dengan target kinerja sebesar 100 orang dan belum ada realisasi kinerja triwulan II dari target anggaran sebesar Rp. 51.556.000; belum ada realisasi anggaran di triwulan **II**. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi** dengan indikator, Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian dengan target kinerja sebesar 100 orang dan belum ada realisasi kinerja triwulan II dari target anggaran sebesar Rp. 51.556.000; belum ada realisasi anggaran di triwulan II.

Adapun Faktor Pendorong sebagai berikut:

a. Identifikasi koperasi aktif dan potensial yang memang membutuhkan pelatihan perkoperasian.
b. Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pengawas Koperasi, memudahkan dalam penjaringan calon peserta kegiatan identifikasi permasalahannya

Adapun Faktor Penghambat sebagai berikut:

Dikarenakan adanya refocusing anggaran, kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan 1 kali untuk tahun anggaran 2025, yang mana tidak dapat menutupi jumlah kebutuhan peserta di 730 Unit Koperasi aktif Kota Makassar

Adapun Tindak Lanjut sebagai berikut:

Memaksimalkan Identifikasi calon peserta kegiatan melalui monitoring dan evaluasi

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran APBD sebesar Rp 1.135.831.900,- (satu millar seratus tiga puluh

lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dengan realisasi anggaran di triwulan II sebesar Rp. 29.800.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 2,62 persen dengan kategori sangat rendah.

Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas ditargetkan sebesar 28,71persen, dengan realisasi kinerja sebesar 2,85persen. Capaian realisasi kinerja terhadap target tersebut mencapai 17,43 persen.

5.1 Adapun Capaian indikator kinerja kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja yaitu jumlah koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan target kinerja 360 unit usaha dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 unit usaha dari target anggaran sebesar Rp. 1.135.831.900 dengan realisasi anggaran Rp. 29.800.000; atau 2,62 persen. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturasi Usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota** dengan indikator Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target kinerja 360 unit usaha dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 unit usaha dari target anggaran sebesar Rp. 1.135.831.900 dengan realisasi anggaran Rp. 29.800.000; atau 2,62 persen.

Adapun Faktor Pendorong sebagai berikut:

Upaya OPD dalam mengedukasi pengurus koperasi melalui sosialisasi tentang pentingnya RAT sebagai bagian dari tata kelola yang baik serta pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan Laporan RAT bagi pengurus koperasi

Adapun faktor penghambat sebagai berikut:

a. Rendahnya kesadaran sebagian pengurus dan anggota koperasi, terutama di koperasi kecil, tentang pentingnya RAT.
b. Sebanyak 153 Koperasi "Kelurahan Merah Putih" belum melaksanakan RAT karena baru terbentuk.

Adapun Tindak Lanjut sebagai berikut:

Mentapkan target prioritas untuk koperasi yang belum melaksanakan RAT dengan pendampingan oleh OPD khususnya Koperasi "Kelurahan Merah Putih" yang baru terbentuk.

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) Sub kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran APBD Rp 3.776.296.600,- (tiga millar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.209.553.603,- (satu millar dua rus sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tiga rupiah) atau sebesar 32,12 persen dengan kategori sangat rendah.

Indikator kinerja program terdiri 2 indikator yaitu:

1) Jumlah peserta pelatihan skill training gratis sektor UMKM ditargetkan sebesar 520 UMKM dengan realisasi kinerja sebesar 180 UMKM. Capaian realisasi kinerja terhadap target tersebut mencapai 270 UMKM

2) Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha ditargetkan sebesar 91,99 persen dengan realisasi kinerja sebesar 0,66persen. Capaian realisasi kinerja terhadap target tersebut mencapai 13,53 persen

6.1. Adapun Capaian indikator kinerja kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan indikator jumlah fasilitasi pemberdayaan UMKM dengan target 1670 unit usaha, dengan realisasi kinerja 80 unit usaha dari target anggaran sebesar Rp. 3.766.296.600 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.060.150.605; atau 32,12 persen. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro** dengan indikator Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro dengan target 374 unit usaha dengan realisasi kinerja 80 unit usaha dari target anggaran sebesar Rp. 1.045.456.000; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 465.260.000; atau 53,81 persen.

2. **Fasilitasi Kemudahan Perizinan usaha mikro** dengan indikator Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapatkan perizinan dengan target 45 Unit usaha dan belum ada realisasi kinerja di triwulan II dari target anggaran sebesar Rp. 146.896.000; belum ada realisasi anggaran di triwulan II.

3. **Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro** dengan indikator Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan dengan target 500 unit usaha dengan realisasi kinerja 100 unit

usaha dari target anggaran sebesar Rp. 1.460.600.600; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 594.890.605; atau 42,28 persen

4. **Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro** dengan indikator Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro dengan target 153 Orang dan belum ada realisasi kinerja di triwulan II dari target anggaran sebesar Rp. 32.338.000; dan belum ada realisasi anggaran di triwulan II.

5. **Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan** dengan indikator Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan dengan target kinerja sebesar 600 orang dengan realisasi capaian belum ada realisasi kinerja di triwulan II dari target anggaran sebesar Rp. 1.081.006.000; belum ada realisasi anggaran di triwulan II.

Adapun Faktor Pendorong sebagai berikut:

Kegiatan Pelatihan Barista, Fasilitasi Merek dan Sertifikat Halal sudah masuk pada tahapan pengumpulan UMKM yang akan difasilitasi

Adapun Faktor Penghambat sebagai berikut:

a. UMKM yang akan mengikuti kegiatan fasilitasi masih dalam proses verifikasi administrasi dan kunjungan lapangan.
b. Tidak tersedianya anggaran untuk pengganti transport kegiatan kunjungan lapangan dalam rangka verifkasi UMKM.

Adapun Tindak Lanjut sebagai berikut:

a. Menunggu SPD terbit untuk segera melaksanakan kegiatan yang telah dijadwalkan.
b. Mempersiapkan dokumen dan melakukan koordinasi dengan pihak pihak yang terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan

7. Program Pengembangan UMKM

Program Pengembangan UMKM terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran APBD sebesar Rp 3.236.967.780,- (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 724.986.457,- (tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) atau sebesar 22,40 persen dengan kategori sangat rendah.

Indikator kinerja program terdiri 2 indikator yaitu:

1) Jumlah wirausaha baru (Start-Up) ditargetkan sebesar 10 UMKM dan belum ada realisasi kinerja sampai dengan triwulan II.

2) Persentase usaha mikro dan kecil ditargetkan sebesar 81 persen dengan realisasi kinerja sebesar 98,49 persen. Capaian realisasi kinerja terhadap target tersebut mencapai 196,99 persen

7.1. Adapun Capaian indikator kinerja kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan indikator kinerja yaitu jumlah usaha yang berkembang menjadi usaha kecil dengan target kinerja sebesar 1340 unit usaha dengan realisasi kinerja sebesar 488 unit usaha dari target anggaran sebesar Rp. 3.236.967.780; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 434.529.260; atau 22,40 persen. Adapun sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi** dengan indikator Jumlah unit usaha mikro yang telah terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi dengan target kinerja sebesar 1340 unit usaha dengan realisasi kinerja sebesar 488 unit usaha dari target anggaran sebesar Rp. 3.236.967.780; dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 434.529.260; atau 22,40 persen.

Adapun Faktor Pendorong sebagai berikut:
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung UMKM untuk bisa Naik Kelas dari segi Pengembangan SDM, Packaging serta Pemasaran Produk UMKM.

Adapun Faktor Penghambat sebagai berikut:
Kegiatan Inkubator Center dilaksanakan berdasarkan jumlah pendaftar yang masuk untuk dilakukan proses Pra-Inkubasi sehingga harus menunggu perserta untuk mendaftar kemudian melaksanakan pra inkubasi

Adapun Tindak Lanjut sebagai berikut:
Memaksimalkan peran inkubator center dengan menarik pelaku UMKM yang belum masuk ke inkubator untuk bergabung

Adapun Evaluasi Hasil Renja perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1 sesuai format Formulir E.81 berikut:

FORMULIR E.1.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KOTA MAKASSAR

PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN III TAHUN 2025

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RPJMD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PENANGGUNG JAWAB
											I		II		III		IV										
								T	Rp. (RIBU)	Rp. (RIBU)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2				3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 8+10+11+12		12 = 11/6 * 100%		13 = 7+11		14 = 13/6 *100%		15
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				31.138.192.179,0	18.747.825.961,0		2.429.610.941,0		3.621.933.876,0		0,0		0,0		6.051.542.817,0		32,23		6.041.547.817,0		11,72		
	2	17			URUSAN WAJIB PERTAHANAN DIBIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				31.138.192.179,0	18.747.825.961,0		2.429.610.941,0		3.621.933.876,0		0,0		0,0		6.051.542.817,0		32,23		6.041.547.817,0		11,72		
	2	17			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				31.138.192.179,0	18.747.825.961,0		2.429.610.941,0		3.621.933.876,0		0,0		0,0		6.051.542.817,0		32,23		6.041.547.817,0		11,72		
	2	17	02		PROGRAM PEMBINAAN KOPERASI PERMODALAN DAERAH BAUPATEN/KOTA	Persentase koperasi aktif yang melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan	%	50,0	23.443.185.179,0	9.300.536.681,0	0,0	2.398.700.494,0	0,0	3.626.891.215,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.025.180.709,0	0,0	34,56	0,0	3.325.101.795,0	0,0	10,06	Kepala Bagian, Unit Kerja Kecil dan Menengah	
						Persentase koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota dan Laporan Kinerja Pengurus Tahunan	%	100,0			25,0		0,0		0,0		50,0		50,0		100,0		50,0				
						Persentase Aset Perangkat Daerah yang teridentifikasi pengelolaan koperasi	%	90,0			70,0		0,0		0,0		45,0		50,0		46,0		50,0				
	2	17	05	2.05	Penyusunan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Persen	100,0	13.443.185.179,0	1.851.120.668,0	25,0	36.450.000,0	100,0	23.809.980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	31.009.580,0	49,0	30,12	45,0	32.088.780,0	0,0	18,96		
	2	17	01	2.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3,0	26.730.000,0	10.457.000,0	3,0	20.400.300,0	0,0	6.083.581,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	26.483.580,0	33,33	52,39	0,0	26.483.580,0	0,0	34,89		
	2	17	01	2.05	0001	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,0	10.466.000,0	8.468.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	17	01	2.05	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,0	16.264.000,0	1.988.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	17	01	2.05	0003	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,0	10.466.000,0	7.824.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	17	02	2.05	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2,0	8.315.807,0	3.360.200,0	0,0	0,0	0,0	2.488.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.488.900,0	0,0	30,78	0,0	2.488.900,0	0,0	20,70		
	2	17	05	2.05	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4,0	14.727.000,0	12.648.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

PERUBAHAN

18 IV 23

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RANJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI PUBLIKASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PENANGGUNG JAWAB
												I		II		III		IV									
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2					3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15,16 * 100%		15
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggara administrasi keuangan	Perkara	800,0	18.007.350.640,0	2.406.512.664,0	25,0	6.202.540.760,0	25,0	1.443.5091.935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	2.585.589.715,0	96,25	96,25	50,0	2.585.589.715,0	0,0	14,36	
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0,0	11.989.543.243,0	6.921.336.441,0	30,0	1.084.380.780,0	30,0	1.366.373.945,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	2.450.174.715,0	142,86	38,64	60,0	2.450.174.715,0	0,0	14,08	
	2	17	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,0	690.320.000,0	252.195.800,0	3,0	70.744.000,0	3,0	70.740.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	141.484.000,0	50,0	44,61	6,0	141.484.000,0	0,0	13,71	
	2	17	01	2.02	0005	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1.418,0	108.215.000,0	181.545.000,0	364,0	45.000.000,0	400,0	45.915.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	764,0	90.915.000,0	53,07	56,13	764,0	90.915.000,0	0,0	37,54	
	2	17	01	2.02	0006	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2,0	3.797.000,0	2.025.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,0	8.245.000,0	6.315.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	17	01	2.02	0008	Pengelolaan dan Penyusun Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Hasil Laporan Pemeriksaan	Dokumen	4,0	8.164.000,0	3.420.000,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	17	01	2.02	0009	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koreksi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,0	265.318.700,0	1.915.000,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	17	01	2.02	0010	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Pegawai Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Program Perihal Anggaran	Dokumen	2,0	2.981.800,0	2.981.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Pengelola Daerah	Tersedianya administrasi barang milik daerah pada pengelola daerah	Laporan	4,0	148.245.400,0	148.245.400,0	1,0	31.613.400,0	1,0	32.161.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	64.175.300,0	50,0	43,76	2,0	64.175.300,0	0,0	22,62	
	2	17	01	2.03	0001	Pembukuan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembukuan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4,0	148.245.400,0	148.245.400,0	1,0	31.613.400,0	1,0	32.561.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	64.175.300,0	25,0	43,76	2,0	64.175.300,0	0,0	22,62	

PERUBAHAN

18 M 24

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2025) [Triwulan ke-1]		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERMASALAHAN DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												I		II		III		IV									
									K	Rp. (RENJA)	Tgl. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2					3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 9+10+11+12		12 = 11/6 * 100%		13 = 7+13		14 = 13/6*100%		15
	2	17	01	2.05		Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	Terselenggara administrasi kependudukan perangkat daerah	Laporan	4,0	525 105 000,0	832 830 200,0	1,0	33 057 200,0	1,0	48 756 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	108 894 865,0	50,0	86,74	2,0	882 894 865,0	0,0	8,52	
	2	17	01	2.05	0003	Penataan dan Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Dokumen	4,0	137 395 000,0	830 830 200,0	1,0	27 057 200,0	1,0	27 194 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	54 251 600,0	50,0	44,04	2,0	54 251 600,0	0,0	21,05	
	2	17	01	2.05	0009	Pendataan dan Pelayanan Pegawai Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berkaitan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendataan dan Pelayanan	Orang	95,0	192 000 000,0	652 000 200,0	2,0	6 000 000,0	0,0	42 602 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	48 602 465,0	4,12	9,84	0,0	48 602 465,0	0,0	2,41	
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggara pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Laporan	1,0	2 257 325 376,0	10 313 970 840,0	1,0	36 488 215,0	2,0	148 587 376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306 056 381,0	42,86	30,98	0,0	290 056 381,0	0,0	5,04	
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,0	6 760 000,0	10 325 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	17	01	2.06	0002	Pemeliharaan Pemiliaraan dan Perlengkapan Gedung	Jumlah Paket Pemeliharaan dan Perlengkapan Gedung yang Disediakan	Paket	4,0	548 520 350,0	824 710 040,0	1,0	1 000 000,0	0,0	3 645 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	4 645 000,0	50,0	3,02	2,0	4 645 000,0	0,0	1,38	
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,0	87 304 000,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2,0	92 540 800,0	27 425 800,0	0,0	0,0	1,0	7 877 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	7 877 500,0	50,0	28,73	1,0	7 877 500,0	0,0	5,09	
	2	17	01	2.06	0007	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,0	36 825 000,0	25 964 000,0	0,0	0,0	0,0	17 485 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 485 000,0	0,0	40,35	0,0	10 485 000,0	0,0	39,38	
	2	17	01	2.06	0008	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	35,0	87 345 000,0	36 423 300,0	2,0	525 300,0	2,0	786 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	1 311 300,0	17,35	3,57	4,0	1 306 000,0	0,0	3,42	
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24,0	1 368 360 000,0	878 400 000,0	2,0	15 548 715,0	10,0	32 299 870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	47 848 585,0	57,14	58,55	12,0	47 646 590,0	0,0	8,16	
	2	17	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,0	481 540 000,0	1 000 000 000,0	2,0	35 000 300,0	9,0	68 500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	98 100 000,0	1 100,0	14,56	12,0	98 100 000,0	0,0	33,42	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG SEDANG DIEVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENSTRA)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					K	Rp. (REALO)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV											
						6		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2				6			7		8		9		10		11 = 8+ 10+11+12		12 = 13/9 * 100%		13 = 7+11		14 = 15/6*100%		15
	2 17 80 2.07		Penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah Perumahan Umum Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan barang milik daerah pemerintah umum pemerintah daerah	Laporan	6,0	9.301.840.000,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
	2 17 01 2.07	0086	Pengadaan Pemeliharaan Aset Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan dan Aset Lainnya yang Diadakan	Unit	0,0	3.361.840.000,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
	2 17 80 2.08		Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	2,0	1.538.632.900,0	893.894.800,0	0,0	48.834.999,0	0,0	36.527.965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79.541.964,0	0,0	44,82	0,0	79.541.864,0	0,0	4,44		
	2 17 01 2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2,0	80.000.000,0	182.864.900,0	1,0	40.845.800,0	0,0	34.759.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75.605.000,0	50,0	41,46	0,0	75.605.000,0	0,0	17,65		
	2 17 01 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1,0	221.172.000,0	12.000.000,0	0,0	2.388.599,0	0,0	1.748.265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.136.864,0	0,0	34,47	0,0	4.136.864,0	0,0	1,10		
	1 17 01 2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0,0	1.791.462.800,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
	1 17 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah	Laporan	6,0	307.198.000,0	564.450.000,0	1,0	31.295.800,0	2,0	38.719.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70.015.070,0	20,0	18,57	2,0	69.795.270,0	0,0	9,45		
	2 17 01 2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dan Dipelihara dan Kendaraan Pejabat	Unit	1,0	44.380.000,0	43.118.950,0	0,0	5.386.900,0	0,0	4.547.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.934.200,0	0,0	22,75	0,0	9.934.200,0	0,0	13,21		
	2 17 01 2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan dan dikelola dan Pajak dan Perizinannya	Unit	12,0	871.248.000,0	194.900.000,0	9,0	14.526.082,0	7,0	13.961.870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28.487.952,0	100,0	12,18	12,0	28.487.952,0	0,0	7,42		
	2 17 02 2.09	0006	Penyediaan Perlengkapan dan Biaya Lainnya	Jumlah Perlengkapan dan Biaya Lainnya yang Disediakan	Unit	57,0	43.450.000,0	16.191.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2 17 01 2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0,0	42.132.000,0	45.000.900,0	1,0	11.250.300,0	1,0	11.250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.500.000,0	200,0	50,0	2,0	22.500.000,0	0,0	25,00		
	2 17 01		JUMLAH CAPAIAN RENJA (%)															33,33	38,55			33,33	12,50		
	1 17 01		JUMLAH KINERJA															SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

PERUBAHAN

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN KOMA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KOMA SKPD YANG DIEVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d Tahun n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RPJMD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												I		II		III		IV								
									Fisik	Rp. (RIBUAN)	Rp. (RIBUAN)	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	Fisik	Rp.	
1	2					3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 9+10+12+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+12		14 = 15/6 * 100%		15
	3	17	02			PROGRAM PELAYANAN DAN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase BPR/LKM Aktif	%	66,51	142.879.000,0	81.678.000,0	0,0	0,0	0,0	66.340.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66.340.000,0	0,0	72,73	0,0	66.340.000,0	0,0	57,78	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3	17	04	2.04		Pemberian Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbitnya surat Izin usaha simpan pinjam koperasi	unit usaha	2 804,0	71 882.000,0	45.912.000,0	0,0	0,0	108,0	33 330.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	33.330.000,0	54,0	72,14	865,0	33.330.000,0	0,0	57,88	
	3	17	04	2.04	0003	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pendirian Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pendirian Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang Berizin dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	210,0	71.882.000,0	45.912.000,0	0,0	0,0	106,0	33.330.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0	33.330.000,0	50,5	72,14	865,0	33.330.000,0	0,0	57,88	
	3	17	01	2.02		Penyelenggaraan Pembelajaran Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koperasi yang Terfasilitasi dan Pendirian Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	unit usaha	2 804,0	71.618.000,0	45.166.000,0	0,0	0,0	105,0	33.330.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	33.330.000,0	50,0	72,14	865,0	33.330.000,0	0,0	57,87	
	2	17	02	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pendirian Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang Berizin dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	210,0	71.618.000,0	45.166.000,0	0,0	0,0	106,0	33.330.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0	33.330.000,0	50,0	72,33	865,0	33.330.000,0	0,0	57,67	
	3	17	02			NILAI-KATA CAPAIAN KINERJA (%)																0,0	66,84			0,0	0,00	
	2	17	01			PREDIKAT KINERJA																SANGAT RENDAH	SEDANG			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	
	4	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Yang Diperiksa Dan Diperiksa	%	45,28	381 367.000,0	368.873.000,0	24,07	284.591.000,0	38,27	25.836.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,84	310.427.000,0	89,51	67,81	44,34	258.137.850,0	272,53	34,33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Jasa Keuangan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Unit Usaha	425,0	380.367.000,0	368 873.000,0	575,0	284.591.000,0	128,0	25.836.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	703,0	310.427.000,0	177,40	67,81	75,40	258.137.850,0	0,0	34,32	
	2	17	03	2.01	0002	Pengesahan Hasil Rapat Penyelenggaraan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Pengesahan Hasil Rapat Penyelenggaraan	Unit Usaha	400,0	206 686.000,0	205.806.000,0	400,0	996.647.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	156 147.000,0	100,0	96,40	400,0	156 147.000,0	0,0	97,40	
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Penerimaan dan Pengesahan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Penyelesaian Permasalahan	Unit Usaha	25,0	174 681.000,0	163 267.000,0	175,0	78 354.000,0	176,0	25 836.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	351,0	52 990 850,0	1 404,0	33,07	351,0	52 956.000,0	0,0	32,50	
	2	17	03			NILAI-NILAI CAPAIAN KINERJA (%)																350,0	96,79			350,0	98,00	
	2	17	03			PREDIKAT KINERJA																SANGAT TINGGI	SEDANG			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	

PERUBAHAN

NO	KODE					INDIKATOR/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERHITUNGAN DASAR PENGUKURAN/PENJELASAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN BELANJA SEBELUM PERUBAHAN (SEBELUM)			PERUBAHAN SEBAGIAN YANG TIDAK MENGUBAH KINERJA DAN ANGGARAN BELANJA SATUAN PERANGKAT DAERAH (Bukan di Ri)												PERUBAHAN KINERJA DAN ANGGARAN BELANJA SATUAN PERANGKAT DAERAH (SESUDAH)				PENJELASAN PERUBAHAN DI SEBELAH KIRI
												I		II		III		IV										
1	2					3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 6+7+8+9+10		12 = 11/6 * 100%		13 = 7+9+11		14 = 15/6*100%		15
	1	17	04			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD/UPT yang mitra	%	72,84	888.380.348,0	968.686.648,0	1,42	287.862.300,0	15,94	138.888.388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,36	533.723.348,0	21,39	76,13	88,84	526.738.388,0	90,96	29,82	Revisi Seperti Semula Kmh dan Keterangan
	2	17	04	2.04		Penataan pemanfaatan Ekosistem Strategis, Pengendalian Strategis Pelaku Ekonomi yang strategis ekosistemnya dan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kaji Usaha Ekosistem yang Telah Ditetapkan, Pendapat Gubernur	Lokasi usaha	888,0	338.888.888,0	968.968.648,0	42,0	287.862.300,0	0,0	138.888.388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	526.738.388,0	8,36	76,13	42,0	365.738.388,0	0,0	29,82	
	2	17	04	2.04	0004	Pada Lainnya Pendapat Pemerintah KOPERASI Ekosistem Pengendalian Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Ekosistem yang Telah Ditetapkan Pendapat Gubernur	Unit Usaha	168,0	232.388.300,0	232.388.298,0	0,0	27.862.298,0	0,0	28.888.388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52.762.588,0	0,0	24,89	0,0	52.762.588,0	0,0	0,89	
	2	17	04	2.04	0004	Pendapat Pemerintah Pengelolaan Lain-Kolola Pendapatan, Pendapat Pemerintah, dan Pemerintah	Jumlah Kabupaten yang Dimanfaat Pendapat Kabupaten	Unit Usaha	888,0	488.888.888,0	553.388.488,0	42,0	328.888.388,0	0,0	328.888.888,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	488.388.888,0	8,75	87,39	42,0	488.388.888,0	0,0	36,86	
	3	17	04			KODE-BARU CADANGAN KEUANGAN (PK)																23,38	72,81			38,38	28,38	
	3	17	04			PAGU-BARU KEGIATAN																SANGAT mengapa	BERUBAH			SANGAT dipindah	SEMUDAH BERUBAH	
	2	17	04			PROGRAM PENGEMBANGAN Jalan KABUPATEN yang sesuai dengan	Persentase JUMLAH Ekosistem yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan	%	1,88	88.388.888,0	98.388.888,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		Revisi Seperti, Semula Kmh dan Keterangan
	3	18	08	2.08		Pengembangan dan Lainnya Perlindungan Hak Sosial yang Tidak Sesuai Kebutuhan dalam Rangka Penanganan	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan yang Terlindungi Kebutuhan dalam Pelaksanaan	Orang	788,0	32.338.888,0	88.388.888,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
	2	17	08	2.08	0004	Pengembangan Perlindungan dan Pengelolaan Pelayanan untuk Kebutuhan dan Kompetensi yang Sesuai	Jumlah SDM yang Memahami Pengembangan Perlindungan	Orang	188,0	38.338.888,0	98.338.888,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		
	3	19	08			KODE-BARU CADANGAN KEUANGAN (PK)																0,0	0,0			0,0	0,0	
	3	17	08			PAGU-BARU KEGIATAN																SANGAT mengapa	SEMUDAH BERUBAH			SANGAT dipindah SEMUDAH	SEMUDAH BERUBAH	
	2	17	08			Pengembangan Perlindungan Anak Terlantar yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Meningkatnya Layanan Terpadu yang Terlaksana	%	38,18	488.888.388,0	8.338.838.388,0	58,68	0,0	8,86	28.888.888,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,48	28.388.888,0	61,87	2,88	88,48	78.888.888,0	88,88	8,87	Revisi Seperti, Semula Kmh dan Keterangan
	3	18	08	2.08		Pemberdayaan dan Perlindungan Keluarga yang Rentan/Lemah dan Kelompok Masyarakat Lainnya	Terlaksananya Unit Usaha yang Produktif, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Pengelolaan Keuangan, Pemberian Keterampilan, Pendidikan Manajemen, Standar Usaha, dan Pendampingan Usaha	Unit Usaha	168,0	838.888.888,0	7.338.888.388,0	0,0	0,0	188,0	25.888.888,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,0	88.888.888,0	87,78	2,62	188,0	88.888.888,0	0,0	8,38	
	2	17	08	2.08	0004	Pemberdayaan Perempuan, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Permodalan, Pengelolaan Keuangan, Pelayanan Manajemen, Standar Usaha, dan Pendampingan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Memiliki Tempat, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Pengelolaan Keuangan, Pelayanan Manajemen, Standar Usaha, dan Pendampingan Usaha	Unit Usaha	368,0	838.888.888,0	1.338.838.388,0	0,0	0,0	208,0	38.888.888,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,0	28.888.888,0	27,38	7,62	188,0	88.888.888,0	0,0	2,38	
	3	18	08			KODE-BARU CADANGAN KEUANGAN (PK)																48,89	38,87			37,33	25,38	
	3	17	08			PAGU-BARU KEGIATAN																MEMUDAH	SANGAT BERUBAH			PENUDAH	DI MUAT PERUBAH	

PERUBAHAN

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												I		II		III		IV										
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2					3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 9+10+0.15+12		12 = 11/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 13/6 * 100%		15
	2	13	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	%	90,99	6.158.643.526,0	3.766.296.600,0	52,87	191 469 600,0	0,66	1.068 156 695,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,53	1.309.553.805,0	54,21	32,13	53,53	1.299.553.605,0	54,71	34,17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
							Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor UMKM	UMKM	520,0			90,0		180,0		0,0		0,0		270,0		51,92		720,0		51,92		
	2	13	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Penataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Pengaturan Keterlibatan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terfasilitasinya Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Penataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Pengaturan Keterlibatan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	unit usaha	1.617,0	4.158.843.526,0	3.766.296.600,0	90,0	149 488 000,0	80,0	1.068 156 695,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	1.309.553.805,0	10,51	32,13	170,0	1.299.553.605,0	0,0	34,17	
	2	13	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	270,0	1.310.000.000,0	3.045.456.000,0	90,0	97.322.300,0	80,0	465.250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	562.582.300,0	63,05	53,80	170,0	562.582.000,0	0,0	25,62	
	2	13	07	2.01	0003	Fasilitasi Sertifikasi Produk Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Fasilitasi	Unit Usaha	45,0	235.476.000,0	146.836.000,0	0,0	29.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29.500.000,0	0,0	20,00	0,0	29.500.000,0	0,0	4,35	
	2	13	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kewirausahaan Koperasi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Mendapat Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	500,0	1.559.777.574,0	1.460.960.600,0	0,0	22.561.200,0	100,0	594.000.625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	617.471.825,0	20,0	42,28	100,0	617.471.825,0	0,0	35,08	
	2	13	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	153,0	44.529.000,0	32.336.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
	2	13	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Sosialisasi Usaha Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	800,0	1.306.006.000,0	1.081.006.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
	2	13	07			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																33,92	32,77			33,21	34,17	
	2	13	08			PREDIKAT KINERJA																SANGAT KURANG	SANGAT KURANG			SANGAT KURANG	SANGAT KURANG	

PERUBAHAN

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD TAHUN n-1 S/D TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD n		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PENANGGUNG JAWAB
												I		II		III		IV										
									K	Rp. (RENAH)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2					3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/8*100%		15
	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	82,0	3.498.967.700,0	3.236.967.700,0	58,59	290.457.197,0	58,68	434.529.266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196,59	724.986.457,0	240,20	22,40	196,59	724.986.457,0	240,23	9,38	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
							Jumlah Wirausaha Baru (Start-Up)	UNIT/M	10,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	17	08	2.08.		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Mikro yang Terfasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	unit usaha	1.340,0	3.498.967.700,0	3.236.967.700,0	165,0	290.457.197,0	600,0	434.529.266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	595,0	724.986.457,0	44,25	22,40	595,0	724.986.457,0	0,0	9,38	
	2	17	08	2.08	0805	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Skala UMKM yang Memanfaatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	1.340,0	3.498.967.700,0	3.236.967.700,0	165,0	290.457.197,0	600,0	434.529.266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	595,0	724.986.457,0	44,25	22,40	595,0	724.986.457,0	0,0	9,38	
	2	17	08			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																121,60	35,83			120,12	36,52	
	2	17	08			PREDIKAT KINERJA																SANGAT TINGGI	SANGAT BERDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT BERDAH	
						RATA-RATA CAPAIAN KINERJA OPD (%)																KEMDAH	32,23					
						PREDIKAT KINERJA OPD																KEMDAH	SANGAT KEMDAH					

PERUBAHAN

Nama Program	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Adanya keterlambatan berkas dari pihak penyedia	a Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang, b. Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Memadai.	Mempercepat Proses Administrasi
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	1. Pengurus Koperasi Belum Mengetahui terkait prosedur dalam hal memperoleh izin usaha dan izin operasional koperasi pada sistem OSS-RBA; 2. Adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal kepada pelaku koperasi dan UMKM yang membutuhkan; 3 Kegiatan belum terlaksana, menunggu jadwal anggaran kas pada bulan April.	Tersedianya anggaran dalam hal pelaksanaan kegiatan pada program pelayanan izin usaha simpan pinjam serta kemudahan dalam hal memperoleh perizinan melalui Online Singgle Submission - Risk Basic Approach (OSS-RBA)	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait prosedur penerbitan izin usaha dan izin operasional melalui OSS-RBA
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Keterbatasan dukungan anggaran serta jumlah sdm, khususnya pejabat fungsional pengawas koperasi tidak sebanding dengan jumlah koperasi yang harus diperiksa, terutama dengan adanya 153 koperasi baru Koperasi Kelurahan Merah Putihâ€Œdua, kurangnya kesadaran beberapa pengurus koperasi terhadap pentingnya pengawasan, menyebabkan keterlambatan atau hambatan dalam proses pemeriksaan	Kebijakan prioritas dari OPD untuk mempercepat pengawasan Koperasi guna mendukung pertumbuhan koperasi yang sehat dan berjalan sesuai regulasi, termasuk memantau perkembangan 153 Koperasi Kelurahan Merah Putih yang baru terbentuk	Memaksimalkan SDM yang ada serta mengintensifkan sosialisasi kepada pengurus koperasi akan pentingnya pengawasan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1. dikarenakan adanya relocusing anggaran, kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan 1 kali untuk tahun anggaran 2025, yang mana tidak dapat menutupi jumlah kebutuhan peserta di 730 Unit Koperasi aktif Kota Makassar 2. Pelaksanaan Kegiatan masih menunggu Jadwal Anggaran Kas dibulan Mei 2025	1. Identifikasi koperasi aktif dan potensial yang memang membutuhkan pelatihan perkoperasian. 2. Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pengawas Koperasi, memudahkan dalam penjaringan calon peserta kegiatan identifikasi permasalahannya	Memaksimalkan identifikasi calon peserta kegiatan melalui monitoring dan evaluasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1. UMKM yang akan mengikuti kegiatan fasilitasi masih dalam proses verifikasi administrasi dan kunjungan lapangan 2 Tidak tersedianya anggaran untuk penggantı transport kegiatan kunjungan lapangan dalam rangka verifikasi UMKM.	Kegiatan Pelatihan Barista, Fasilitasi Merek dan Sertifikat Halal sudah masuk pada tahapan pengumpulan UMKM yang akan difasilitasi	1. Menunggu SPD terbit untuk segera melaksanakan kegiatan yang telah dijadwalkan. 2. Mempersiapkan dokumen dan melakukan koordinasi dengan pihak pihak yang terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kegiatan Inkubator Center dilaksanakan berdasarkan jumlah pendaftar yang masuk untuk dilakukan proses Pra-Inkubasi sehingga harus menunggu peserta untuk mendaftar kemudian melaksanakan pra inkubasi	Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung UMKM untuk bisa Naik Kelas dari segi Pengembangan SDM, Packaging serta Pemasaran Produk UMKM.	Memaksimalkan peran inkubator center dengan menarik pelaku UMKM yang belum masuk ke inkubator untuk bergabung
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1. Kurangnya kesadaran koperasi dalam melakukan penilaian kesehatan, 2 Terbatasnya jumlah SDM/PNS pengawas koperasi baik secara kuantitas maupun kualitas yang berwenang untuk melakukan penilaian kesehatan koperasi, 3 Adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan penilaian kesehatan koperasi hanya dilaksanakan 1 angkatan pada tahun anggaran 2025 yang menyebabkan tidak dapat terpenuhi kebutuhan peserta sebanyak 180 unit usaha; 4. Kegiatan belum terlaksana menunggu pengesahan DPPA	Pengawasan dan pemeriksaan menggunakan standar yang sama berbasis potensi risiko sehingga memudahkan dalam melakukan pemeriksaan koperasi antara koperasi besar dan koperasi kecil berdasarkan pada klasifikasi usaha koperasi (KUK) 1234, bagi KUK 3 dan 4 dilakukan fit and proper test	Memberikan pelatihan bagi pengurus KSP/USP koperasi dan internal Dinas Koperasi dan UKM terkait metode penilaian kesehatan koperasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rendahnya kesadaran sebagian pengurus dan anggota koperasi, terutama di koperasi kecil, tentang pentingnya RAT. Sebanyak 153 Koperasi â€œKelurahan Merah Putihâ€belum melaksanakan RAT karena baru terbentuk	Upaya OPD dalam mengedukasi pengurus koperasi melalui sosialisasi tentang pentingnya RAT sebagai bagian dari tata kelola yang baik serta pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan Laporan RAT bagi pengurus koperasi	Menetapkan target prioritas untuk koperasi yang belum melaksanakan RAT dengan pendampingan oleh OPD khususnya Koperasi â€œKelurahan Merah Putihâ€yang baru terbentuk

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Menganalisis kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan sesuai dengan tujuan, tugas dan fungsi, dalam pelaksanaan rencana kerja dan juga mengetahui kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dengan demikian merupakan suatu keadaan yang lebih baik ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan tujuan menunjukkan arah kemana kinerja harus dilakukan, atas dasar arah tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan,diperlukan kinerja individu, kelompok dan organisasi.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 2.2 sesuai format Formulir Matriks TC.30 berikut :

Tabel 2.2 (Tabel T.C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Kota Makassar

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Koperasi Aktif			64,23	67,54	72,84	76,15	64,15	133	72,84	76,15	
2	Presentase Bpr/Lkm Aktif			48,27	58,62	65,51	72,41	48,27	51,72	65,51	72,41	
3	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil			79	81	81	82	98,99	99	81	82	

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir P-RKPD 2025

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) Program prioritas pembangunan daerah c) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar berdasarkan RKPD Kota Makassar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD Se-Kota Makassar.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir Perubahan RKPD. Telaahan teradap rancangan akhir Perubahan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan akhir Perubahan RKPD.

Adapun disajikan perbandingan rancangan akhir dan analisis kebutuhan pada tabel 2.4 sesuai format Formulir T-C.31 berikut :

Tabel 2.3 (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025
Kota Makassar

Nama SKPD : Dinas Koperasi dan UKM

Lembar ... dari ...

No	Rancangan Akhir Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				**18.643.848.101**					**19.049.378.920**	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**9.407 918.481**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	90	**9.388.950.920**	**Laporan Nomor 1 Tahun 2024 tentang efektivitas belanja negara dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara**
			Daerah Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	**90%**				**Daerah Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas**	100		
I	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**	**115.723.000**	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**	**76.463 000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	63.052 000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	43.192.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8 483 000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.483.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	9.139 000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6 139.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	7.907 000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4 907.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	7.128 000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.128 000	

No	Rancangan Akhir Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	7.366.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4 366 000	
	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12 648.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	8 248 000	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Terlaksananya Dokumen Administrasi Keuangan**	**100%**	**7.405.512.441**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Terlaksananya Dokumen Administrasi Keuangan**	**100%**	**7.399.395.180**	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	6.921.326 441	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	6.921.329.180	
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	292 185.000	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	286 065.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan /SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1418 Dokumen	181.345.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan /SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1418 Dokumen	181.345.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Koperasi dan UKM kota Makassar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2.025.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2.025.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1 115.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1.115.000	

No	Rancangan Akhir Perubahan					Hasil Asistasi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	3.420.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	3.420.000	
	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.115.000	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	1.115.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.981.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.981.000	
3	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4 Dokumen**	**140.245.400**	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4 Dokumen**	**122.148.200**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	140.245.400	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	122.148.200	
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**6 Laporan**	**612.820.200**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**6 Laporan**	**597.674.400**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	77 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	77 Paket	-	

No	Rancangan Akhir Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	Pendataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	129.820.200	Pendataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	93.674.400	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	492.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	96 Orang	504.000.000	
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4 Laporan**	**575.270.840**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7 Laporan**	**499.808.340**	
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.335.000	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.335.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	121.710.040	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	126.210.040	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	

No	Rancangan Akhir Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	27.421.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	27.421.800	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	25.984.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	26.021.500	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	36.420.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	36.420.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	235.400.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	173.400.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	118.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000	
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Laporan**	-	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Laporan**	**38.577.000**	
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	38.577.000	

No	Rancangan Akhir Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**193.864.800**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**193.864.800**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	181.864.800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	181.864.800	
	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumberdaya Air,dan listrik	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumberdaya Air,dan listrik	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000	
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4 Laporan**	**364.430.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4 Laporan**	**361.020.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.130.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.630.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Pembayaran, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	236.980.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Pembayaran, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	213.020.000	
	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	39.370.000	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan UKM kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	63.370.000	
	Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	45.000.000	Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	45.000.000	

No	Rancangan Akhir Perubahan					Hasil Asistensi Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Persentase BPR/LKM Aktif**	**65,51%**	**142.978.000**	**Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Persentase BPR/LKM Aktif**	**65,51%**	**76.278.000**	Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
1	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Jumlah Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi**	**420 Unit Usaha**	**71.862.000**	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Jumlah Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi**	**210Unit Usaha**	**38.512.000**	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	210 Unit Usaha	71.862.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	210 Unit Usaha	38.512.000	
2	**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Terlaksananya Koperasi yang Terfasilitasi Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas**	**210 Unit Usaha**	**71.116.000**	**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Terlaksananya Koperasi yang Terfasilitasi Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas**	**210 Unit Usaha**	**37.766.000**	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	210 Unit Usaha	71.116.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/kota	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	210 Unit Usaha	37.766.000	

No	Rancangan Akhir Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Presentase Koperasi yang diperiksa dan diawasi**	**15,20%**	**373.223.400**	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Presentase Koperasi yang diperiksa dan diawasi**	**15,20%**	**350.776.200**	Lapran Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
1	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi**	**425 Unit Usaha**	**373.223.400**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi**	**425 Unit Usaha**	**350 776 200**	
	Penguatan Tata Kelola Kelembangaan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	400 Unit Usaha	205.606.000	Penguatan Tata Kelola Kelembangaan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM Kota makassar	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	400 Unit Usaha	205.606.000	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	25 Unit Usaha	167.617.400	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	25 Unit Usaha	145.170.200	
4	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Persentase KSP/USP Koperasi yang Sehat**	**72,84%**	**838.305.600**	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Persentase KSP/USP Koperasi yang Sehat**	**72,84%**	**653 540.800**	Lapran Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
1	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Terlaksananya Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan**	**800 Unit Usaha**	**838.305.600**	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Terlaksananya Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan**	**620 Unit Usaha**	**653 540.800**	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian kesehatan	180 Unit Usaha	237 346.200	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan UKM kota Makassar	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	180 Unit Usaha	140.481.400	

No	Rancangan Akhir Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Koperasi yang diberikan Penilaian Kesehatan	300 Unit Usaha	600.959.400	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Koperasi yang diberikan Penilaian Kesehatan	440 Unit Usaha	513.059.400	
5	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Persentase SDM koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan**	1.95%	**51.556.000**	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Persentase SDM koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan**	1.95	**25.156.000**	Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
2	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Terlaksananya Pengurus dan Pengelola yang terfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian**	**110 Orang**	**51.556.000**	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Terlaksananya Pengurus dan Pengelola yang terfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian**	**100 Orang**	**25.156.000**	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	110 Orang	51.556.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 Orang	25.156.000	
6	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**	**28.17%**	**624.031.900**	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**	**28.17%**	**1.127.731.900**	Program Prioritas Asta Cita, Koperasi Merah Putih
1	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Terlaksananya Unit Usaha yang Produktifitas, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Pengatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha**	**400 Unit Usaha**	**624.031.900**	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Terlaksananya Unit Usaha yang Produktifitas, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Pengatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha**	**400 Unit Usaha**	**1.127.731.900**	

No	Rancangan Akhir Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	9	5	11	12
	Peningkatan Produktivitas ,nilai tambah ,akses pasar ,akses pembiayaan,Penguatan Kelembagaan ,Penataan Manajemen,Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	360 Unit Usaha	624.031.900	Peningkatan Produktivitas ,nilai tambah ,akses pasar ,akses pembiayaan,Penguatan Kelembagaan ,Penataan Manajemen,Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	400 Unit Usaha	1.127.731.900	
7	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	**Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor UMKM**	520 UMKM	4.158.866.600	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	**Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor UMKM**	520 UMKM	4.488.493.000	Program Prioritas Walikota, Urban Farming, Gerai UMKM, 10 Titik Akses PKL
			Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	91.99%				**Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha**	91.99%		
1	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan ,Kemitraan, Kemudahan Perizinan,Penguatan,Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	**Terlaksananya Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	1664 Unit Usaha	4.158.866.600	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan ,Kemitraan, Kemudahan Perizinan,Penguatan,Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	**Terlaksananya Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	1622 Unit Usaha	4.488.493.000	
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	376 Unit Usaha	1.110.056.000	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	504 Unit Usaha	1.644.504.000	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	45 Unit Usaha	239.476.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	45 Unit Usaha	119.596.000	

No	Rancangan Akhir Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro	500 Unit Usaha	1.559.800.600	Pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro	540 Unit Usaha	1.352.852.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	153 Orang	44.528.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100 Orang	32.338.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	600 Orang	1.205.006.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	600 Orang	1.309.203.000	
3	**Program Pengembangan UMKM**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Jumlah Wirausaha Baru (Start - Up)**	**10 UMKM**	**3.046.970.000**	**Program Pengembangan UMKM**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Jumlah Wirausaha Baru (Start - Up)**	**10 UMKM**	**3.038.452.000**	Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
			Persentase Usaha Mikro dan Kecil	**81%**				**Persentase Usaha Mikro dan Kecil**	**81%**		
1	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi**	**720 Unit Usaha**	**3.046.970.000**	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi**	**2260 Unit Usaha**	**3.038.452.000**	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	720 Unit Usaha	3.046.970.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	1660 Unit Usaha	3.038.452.000	

No	Rancangan Akhir Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11	12
UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu											
	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Wirausaha Baru (Start - Up)	10 UMKM	369.997.750	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Wirausaha Baru (Start - Up)	10 UMKM	342.949.180	Belanja Tenaga Administrasi
			Persentase Usaha Mikro dan Kecil	81%				Persentase Usaha Mikro dan Kecil	81%		
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi		369.997.750	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	103 Unit Usaha	342.949.180	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	369 997.750	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	103 Unit Usaha	342 949 180	
TOTAL PAGU INDIKATIF					19.013.845.961					19.392.328.000	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA MAKASSAR

3.1. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menyusun rencana operasional teknis yang diimplementasikan dalam 7 (tujuh) Program Strategik dan 1 (satu) Program Operasional yang dijabarkan dalam 15 (Lima Belas) kegiatan dan 45 sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029. Program Nasional, Visi dan Misi Kepala Daerah serta program prioritas pemerintah Kota Makassar yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Makassar menjadi acuan dalam menentukan isu isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kota Makassar. Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM di dalamnya terdapat pelaksanaan Program Nasional dan program Prioritas untuk mewujudkan visi dan misi Walikota Makassar. Adapun program Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar sesuai dengan tugas dan fungsi yang masuk dalam program Nasional dan misi Walikota Makassar adalah:

1. Program Nasional yaitu Pembentukan Koperasi Merah Putih melalui penyuluhan dan Fasilitasi Akta Pendirian Koperasi
2. Misi Kepala Daerah yaitu Misi I (Pertama) yaitu: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah dan Penciptaan Lapangan kerja melalui Program Pemberdayaan UMKM dan Program Pengembangan UMKM
3. Program Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Program Strategis MULIA dan Nomenklatur Program (Pendekatan Teknokratik) diantaranya:
    a. Pemberian Akses Modal Usaha UMKM (Program Pengembangan UMKM)
    b. Membentuk Gerai UMKM pada 15 Kecamatan (Program Pemberdayaan UMKM)
    c. Pembinaan Kelompok Usaha Unggulan berbasis RW (Program Pemberdayaan UMKM)
    d. Pemberdayaan ekonomi wilayah tempat pembuangan akhir (Program Pemberdayaan UMKM)

3.1 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pada tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Rencana Kerja SKPD tahun 2025 dan tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD dinas koperasi dan UKM tahun anggaran 2025, menjalankan 7 (tujuh) program utama dan 1 (satu) program pendukung dan 15 kegiatan dan 45 sub kegiatan dengan pagu anggaran pokok sebesar Rp. 18.643.848.181,- (delapan belas miliar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu

rupiah) pada perubahan Rencana Kerja tahun 2025, anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 19.049.378.820,- (Sembilan Belas Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Dua Puluh Ratus Rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 405.530.639,- (Empat Ratus Lima Juta Lima Ratus Tiga puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), sebagian besar Program dan Kegiatan mengalami pergeseran anggaran dan perubahan rincian, adapun rincian kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam rekening kegiatan yaitu sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan yang direncanakan mengalami pengurangan dan pergeseran anggaran antara rekening belanja, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan:

a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 63.052.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi sebesar Rp. 19.860.000,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp. 43.192.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)
b. **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.483.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) menjadi Rp. 5.483.000,- (Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)
c. **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 9.139.000,- (Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) menjadi Rp. 6.139.000,- (Enam Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
d. **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.907.000,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) menjadi Rp. 4.907.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Rupiah)
e. **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.128.000,- (Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) menjadi Rp. 4.128.000,- (Empat Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)

f. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.366.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) menjadi Rp. 4.366.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

g. **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 12.648.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 4.400.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp. 8.248.000,- (Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)

h. **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 292.185.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 6.120.000,- (Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp. 286.065.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

i. **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 140.245.400,- (Seratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 18.097.200,- (Delapan Belas Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) menjadi Rp. 122.148.200,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah)

j. **Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 120.820.200,- (Seratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 27.145.800,- (Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) menjadi Rp. 93.674.400,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah)

k. **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 492.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) sebelum perubahan bertambah sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) menjadi Rp. 504.000.000,- (Lima Ratus Empat Juta Rupiah)

l. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 121.710.040,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Empat Puluh Rupiah) sebelum perubahan bertambah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp. 126.210.040,- (Seratus

Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Empat Puluh Rupiah)

m. **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 25.984.000,- (Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) sebelum perubahan bertambah sebesar Rp. 37.500,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) menjadi Rp. 26.021.500,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)

n. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 235.400.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 62.000.000,- (Enam Puluh Dua Juta Rupiah) menjadi Rp. 173.400.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

o. **Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 118.000.000,- (Seratus Delapan Belas Juta Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) menjadi Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

p. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 43.130.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp. 39.630.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

q. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 236.980.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 23.960.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp. 213.020.000,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)

r. **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 39.370.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sebelum perubahan bertambah sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) menjadi Rp. 63.370.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

2. **Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan Sub Kegiatan:**

   a. **Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 71.862,000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 33.350.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp. 38.512.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)

   b. **Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 71.116.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 33.350.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp. 37.766.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

3. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan sub kegiatan:**

   a. **Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 167.617,400,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 22.447.200,- (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) menjadi Rp. 145.170.200,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah)

4. **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan Sub Kegiatan:**

   a. **Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 237.346.200,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 96.864.800,- (Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) menjadi Rp. 140.481.400,- (Seratus Empat Puluh Juta Emapat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah)

b. **Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 600.959.400,- (Enam Ratus Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 87.900.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp. 513.059.400,- (Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah)

5. **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN dengan sub kegiatan :**

   a. **Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 51.556.000,- (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 26.400.000,- (Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp. 25.156.000,- (Dua Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

6. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan Sub Kegiatan: Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 624.031.900,- (Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sebelum perubahan bertambah sebesar Rp. 503.700.000 (Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp. 1.127.731.900,- (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

7. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan Sub Kegiatan:**

   a. **Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.110.056.000,- (Satu Milyar Seratus Sepuluh Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 534.448.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) menjadi Rp. 1.644.504.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah)
   b. **Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 239.476.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 119.880.000,- (Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus

Delapan Puluh Ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp. 119.596.000,- (Seratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

c. **Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.559.800.600,- (Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Enam Ratus Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 176.948.600,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.382.852.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)

d. **Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 44.528.000,- (Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 12.190.000,- (Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp. 32.338.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)

e. **Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.205.006.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Lima Juta Enam Ribu Rupiah) sebelum perubahan bertambah sebesar Rp. 104.197.000,- (Seratus Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.309.203.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah)

8. **Program Pengembangan UMKM dengan Sub Kegiatan:**

a. **Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.046.970.000,- (Tiga Miliar Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.518.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) menjadi Rp. 3.038.452.000,- (Tiga Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)

b. **Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi pada Unit kerja UPT Pusat Layanan Usaha Lorong** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.046.970.000,- (Tiga Miliar Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sebelum perubahan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 27.048.600,- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus

Rupiah) menjadi sebesar Rp. 342.949.180 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah)

Adapun matriks Tabel TC.33 yang disajikan dari tarikan data SIPD yang telah disesuaikan dengan Perubahan RKPD:

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN2026
KOTA MAKASSAR

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Kondisi Tahun 2024								Perkiraan Mulai Berlaku Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Kumulan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2.17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH											18.643.848.131	20.049.272.820					22.409.349.820
	2	2.17	01		Program Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Intermediasi kepatuhan Pelanggaran dan kepatuhan kinerja Perangkat Daerah			Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	100%	100%					9.407.916.881	9.269.950.930	APBD				13.111.085.008
						Jumlah Pemenuhan ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas			Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	90%	90%											
	3	2.17	01	2.01	Pemenuhan Pengelolaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Dokumen Perencanaan, Pengelolaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar					100%	100%	318.720.000	76.453.000	APBD			4	291.410.000
	4	2.17	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengelolaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			9 Dokumen	9 Dokumen	100%	100%	53.052.000	43.192.000	APBD			4	121.193.000
	4	2.17	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	8.463.000	5.463.000	APBD			4	15.000.000
	4	2.17	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	9.139.000	6.139.000	APBD			4	15.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2026								Sumber Dana	Catatan Penting	Perubahan Atas Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Telah Ubah	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	2.17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koreksian Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Penerimaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diterima	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	7.907.000	4.907.000	APBD				15.194.000
2	2.17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koreksian Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Penerimaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diterima	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	7.128.000	4.128.000	APBD				15.300.000
2	2.17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koreksian Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penerimaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diterima	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			2 Laporan	2 Laporan	100%	100%	7.366.000	4.366.000	APBD				135.558.000
2	2.17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penerimaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diterima	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			4 Laporan	4 Laporan	100%	100%	12.648.000	8.248.000	APBD				13.665.000
2	**2.17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Terlaksanannya Dokumen Administrasi Keuangan**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**	**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**7.405.512.441**	**7.399.398.180**	**APBD**				**7.951.768.000**
2	2.17	01	2.02	03	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksanannya Dokumen Administrasi Keuangan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			32 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	100%	100%	6.921.336.441	6.921.329.180	APBD				7.449.156.000

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Capaian Program	Indikator Kinerja: Kuantitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Hasil Kegiatan	Indikator Kinerja: Lokasi Output Kegiatan	Rancangan Tahun 2026: Target Capaian Kinerja: Program: Sebelum	Rancangan Tahun 2026: Target Capaian Kinerja: Program: Sesudah	Rancangan Tahun 2026: Target Capaian Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan: Sebelum	Rancangan Tahun 2026: Target Capaian Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan: Sesudah	Rancangan Tahun 2026: Target Capaian Kinerja: Hasil Kegiatan: Sebelum	Rancangan Tahun 2026: Target Capaian Kinerja: Hasil Kegiatan: Sesudah	Rancangan Tahun 2026: Pagu Indikatif (Rp.): Sebelum	Rancangan Tahun 2026: Pagu Indikatif (Rp.): Sesudah	Rancangan Tahun 2026: Sumber Dana	Rancangan Tahun 2026: Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026: Target Capaian Kinerja: Tahun Ulur	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026: Target Capaian Kinerja: Target	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026: Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	2.17	01	2.02	02	Penyelenggaraan pelaksanaan bagan Akh			Terlaksananya Dokumen Hasil Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			12 Dokumen	12 Dokumen	100%	100%	292.185.000	286.065.000	APBD				277.560.000
2	2.17	01	2.02	03	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Dokumen Administrasi Keuangan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar		1418 Dokumen	1418 Dokumen	100%	100%	181.345.000	181.345.000	APBD				146.227.000
2	2.17	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Dokumen Administrasi Keuangan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	3.605.000	3.035.000	APBD				15.000.000
2	2.17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Dokumen Administrasi Keuangan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar		6 Laporan	6 Laporan	100%	100%	1.115.000	1.115.000	APBD				15.625.000
2	2.17	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Terlaksananya Dokumen Administrasi Keuangan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	3.420.000	3.420.000	APBD				16.500.000
2	2.17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Dokumen Administrasi Keuangan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar		12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	1.115.000	1.115.000	APBD				16.000.000
2	2.17	01	2.02	08	Penyelenggaraan Pelaporan dan Analisis Tingkat Kinerja Keuangan			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Program Realisasi Anggaran	Terlaksananya Dokumen Administrasi Keuangan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	2.961.000	2.961.000	APBD				16.500.000

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program Tahun 2025						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tahun Lalu	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	2.17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar					4 Dokumen	4 Dokumen	140.344.400	122.149.200	APBD			1	228.147.000
2	2.17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			4 Laporan	4 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	140.345.400	122.148.200	APBD			1	225.167.000
2	2.17	01	2.08		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar					5 Laporan	5 Laporan	612.820.200	597.674.400	APBD			1	803.989.000
2	2.17	01	2.08	02	Pengelolaan Fakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			77 Paket	77 Paket	-	-	-	-	APBD			1	40.700.000
2	2.17	01	2.08	03	Penataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Penataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			4 Dokumen	4 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	120.820.200	93.674.400	APBD			1	255.739.000
2	2.17	01	2.08	04	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			6 Orang	96 Orang	5 Laporan	5 Laporan	492.000.000	504.000.000	APBD			1	492.000.000
2	2.17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar					6 Laporan	7 Laporan	575.276.040	469.868.360	APBD			1	1.000.723.648
2	2.17	01	2.06	01	Pengadaan Komputer beserta Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Kelengkapan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dipasang	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			1 Paket	1 Paket	6 Laporan	7 Laporan	10.335.000	10.335.000	APBD			1	8.268.000
2	2.17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			4 Paket	4 Paket	4 Laporan	7 Laporan	121.710.040	126.710.040	APBD			1	185.095.688

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Pemerintah Kota Makassar Tahun 2024								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
2	2.17	01	2.06	03	Pengelolaan Perolahan Rumah Tangga		Jumlah Paket Pengelolaan Rumah Tangga yang Dilaksanakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			-	-	-	-	-	-	APBD			a	35.000.000
2	2.17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			3 Paket	3 Paket	4 Laporan	7 Laporan	27.421.800	27.421.800	APBD			a	30.000.000
2	2.17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			1 Paket	1 Paket	4 Laporan	7 Laporan	25.494.000	26.021.500	APBD			a	32.000.000
2	2.17	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			5 Dokumen	5 Dokumen	4 Laporan	7 Laporan	35.420.000	35.420.000	APBD			a	16.360.000
2	2.17	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan komunikasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			30 Laporan	30 Laporan	4 Laporan	7 Laporan	235.400.000	173.400.000	APBD			a	574.000.000
2	2.17	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			1 Dokumen	1 Dokumen	4 Laporan	7 Laporan	118.000.000	100.000.000	APBD			a	100.000.000
2	**2.17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**					**1 Laporan**	**1 Laporan**	-	**39.877.000**	**APBD**			**a**	**446.735.000**
2	2.17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			-	2 Unit			-	39.577.000	APBD			a	446.735.000

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	2.17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar					2 Laporan	2 Laporan	193.864.800	193.864.800	APBD			1	202 400.012
2	2.17	01	2.08	01	Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	181.864.800	181 864.800	APBD			1	200 000.000
2	2.17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dialokasikan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	12.000.000	12 000 000	APBD			1	2.400.012
2	2.17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar					4 Laporan	4 Laporan	364 480 000	341.020.000	APBD			1	389.842.100
2	2.17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			1 Unit	1 Unit	4 Laporan	4 Laporan	43.130 000	39.630.000	APBD			1	35 758.000
2	2.17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perbaikan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			11 Unit	11 Unit	4 Laporan	4 Laporan	236.980 000	213.000.000	APBD			1	240 084 100

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	2.17	01	2.09	05	Pengawasan Peralatan Ukur Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diawasi	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			77 Unit	77 Unit	4 Laporan	4 Laporan	38 320.000	63 270.000	APBD			4	65 040 000
2	2.17	01	2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Berhasil Untuk	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			1 Unit	1 Unit	4 Laporan	4 Laporan	45 000 000	95 000.000	APBD			4	45 000.000
2	2.17	02			Program Pelayanan Info Usaha Simpan Pinjam	Persentase KPR/LKM Aktif			Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	68,61%	68,61%					142.978.600	76 278.000	APBD			4	243.349.800
6	2.17	02	2.01		Pendataan Info Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Fasilitasi Info Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar					630 Unit Usaha	216Unit Usaha	71 662.000	39.812 000	APBD			4	39.454.800
2	2.17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Info Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Info Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			330 Unit Usaha	240 Unit Usaha	420 Unit Usaha	210 Unit Usaha	71 662.000	38 512 000	APBD			4	39 458.800
2	2.17	02	2.01		Pembinaan Info Pendirian Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			Terfasilitasinya Koperasi yang Terfasilitasi Info Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar					210 Unit Usaha	210 Unit Usaha	73 176 000	37.786.000	APBD			4	283 823 000
2	2.17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Info Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Koperasi yang Terfasilitasi Info Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			210 Unit Usaha	210 Unit Usaha	210 Unit Usaha	210 Unit Usaha	73 176.000	37 786.000	APBD			4	283.823 000

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rancana Tahun 2025								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	2.17	03			Program Pengawasan dan Pemeriksaan	Presentase Koperasi yang diperiksa dari diawasi			Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	15,20%	18,20%					373.223.400	380.776.200	APBD			a	1 448.230 000
2	2.17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar					425 Unit Usaha	428 Unit Usaha	373.223.400	380 776.200	APBD			a	1 448.230 000
2	2.17	03	2.01	01	Pengawasan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		Jumlah Koperasi yang Dilakukan Pengawasan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	425 Unit Usaha	425 Unit Usaha	205.606 080	208.606.000	APBD			a	457.151 700
2	2.17	03	2.01	02	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			25 Unit Usaha	28 Unit Usaha	425 Unit Usaha	425 Unit Usaha	167.617.400	143.170.200	APBD			a	991.078 300
2	2.17	04			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang Sehat			Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	72,84%	72,84%					838 306 600	653.540.800	APBD			a	867.215.000
2	2.17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Terlaksananya Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar					800 Unit Usaha	630 Unit Usaha	838 306.600	653.540.800	APBD			a	867.215.000
2	2.17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Terlaksananya Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			180 Unit Usaha	180 Unit Usaha	800 Unit Usaha	620 Unit Usaha	237 346.200	149 481.400	APBD			a	562.055 000

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Kinerja Tahun 2025						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja										Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	2.17	04	2.01	03	Pembinaan Kesehatan Koperasi Meliputi Tata kelola, Profil Sdm, Kinerja Keuangan dan Pemodalan		Jumlah Koperasi yang diberikan Penilaian Kesehatan	Terlaksananya Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			300 Unit Usaha	440 Unit Usaha	500 Unit Usaha	600 Unit Usaha	600 959.400	613.059.400	APBD			#	305 160.000
2	2.17	05			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pemerataan SDM koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan			Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	1 85%	1 95					61.586.000	25 186.000	APBD			#	741.683.000
2	2.17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			Terlaksananya Pengurus dan Pengelola yang terfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar					110 Orang	100 Orang	51.546.000	25 186.000	APBD			#	741 683.000
2	2.17	05	2.01	01	Penyelenggaraan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	Terlaksananya Pengurus dan Pengelola yang terfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			110 Orang	100 Orang	110 Orang	100 Orang	51 856.000	25 186.000	APBD			#	741 683.000
2	2.17	06			Program Pemberdayaan dan Pendampingan Koperasi	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas			Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	28.17%	28 17%					624.031.900	1 127.731 900	APBD			#	1.695.833.000
2	2.17	06	2.01		Pemberdayaan dan Pendampingan Koperasi yang Kompetensinya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Terlaksananya Unit Usaha yang Produktifitas, Kemitraan Tumbuh, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Pengurus Kelembagaan, Pengelola Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			400 Unit Usaha	440 Unit Usaha			624.031 900	1 127 731 900	APBD			#	1.695.831 000

Kode					Uraian / Nilong Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	2.17	05	2.01	01	Peningkatan Produktivitas usaha tumbuh ,akses pasar ,akses pembiayaan,Pengaturan Kelembagaan ,Penataan Manajemen,Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Berskala Tumbuh Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Terlaksananya Unit Usaha yang Produktifitas, Berskala Tumbuh, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			300 Unit Usaha	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	624 031 900	1 127 731 900	APBD			a	1 605 231 000
2	2.17	07			Program Pembinaan Usaha Menengah,Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Bekter UMKM			Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	520 UMKM	520 UMKM					4.188 846.600	4.446.493.000	APBD				6.536.317.000
						Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha			Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	91.99%	91.99%										
2	2.17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendirian ,Kemitraan, Kemudahan Perizinan,Pelatihan,Edukasi dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			Terlaksananya Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendirian, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Pelatihan Edukasi dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar					1664 Unit Usaha	1622 Unit Usaha	4.188 846.600	4.446.493.000	APBD			a	4.335.317.000
2	2.17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			376 Unit Usaha	504 Unit Usaha	1664 Unit Usaha	1622 Unit Usaha	1 110.050.000	1 644.504.000	APBD			a	2.051 756.250
2	2.17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			45 Unit Usaha	43 Unit Usaha	1664 Unit Usaha	1622 Unit Usaha	239 476 000	119.586.000	APBD			a	120 464 000

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Capaian Program	Indikator Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2026: Target Capaian Kinerja: Program: Sebelum	Rencana Tahun 2026: Target Capaian Kinerja: Program: Sesudah	Rencana Tahun 2026: Target Capaian Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2026: Target Capaian Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan: Sesudah	Rencana Tahun 2026: Target Capaian Kinerja: Hasil Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2026: Target Capaian Kinerja: Hasil Kegiatan: Sesudah	Rencana Tahun 2026: Pagu Indikatif (Rp.): Sebelum	Rencana Tahun 2026: Pagu Indikatif (Rp.): Sesudah	Sumber Dana	Catatan Penting	Proyeksi Nilai Renstra Tahun 2026: Target Capaian Kinerja: Tolak Ukur	Proyeksi Nilai Renstra Tahun 2026: Target Capaian Kinerja: Target	Proyeksi Nilai Renstra Tahun 2026: Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	2.17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Memenuhi Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro	Terfasilitasinya Fasilitasi Pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			500 Unit Usaha	540 Unit Usaha	1664 Unit Usaha	1622 Unit Usaha	1 559 000 000	1 382 652 000				a	1 827 881 676
2	2.17	07	2.01	05	Kemitraan dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Fasilitasi Pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			153 Orang	100 Orang	1664 Unit Usaha	1622 Unit Usaha	44 520 000	32 330 000	APBD			a	490 387 000
2	2.17	07	2.01	05	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan sesuai Peraturan dan Perundang-undangan		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Terfasilitasinya Fasilitasi Pemberdayaan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			600 Orang	600 Orang	1664 Unit Usaha	1622 Unit Usaha	1 305 806 000	1 304 703 000	APBD			a	45 886 074
2	2.17	08			Program Pengembangan Usaha	Jumlah Wirausaha Baru (Start - Up)			Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	10 Usaha	10 UMKM					3 046 970 000	3 038 452 000	APBD			a	956 641 000
						Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil			Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	81%	81%										a	
2	2.17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Kelas Usaha Menjadi Usaha Kecil			Terbinanannya Usaha Mikro yang Terfasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar					720 Unit Usaha	2360 Unit Usaha	3 046 970 000	3 038 452 000	APBD			a	956 641 000
2	2.17	08	2.01	06	Proses dan Pengelolaan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Terlaksananya Usaha Mikro yang Terfasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			720 Unit Usaha	1660 Unit Usaha	720 Unit Usaha	2360 Unit Usaha	3 046 970 000	3 038 452 000	APBD			a	956 641 000

PERUBAHAN

18 IV 67

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Kelurahan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
UPT Pusat Layanan Usaha Lorong																						
2	2.17	08			Program Pengembangan UMKM	Jumlah Wirausaha Baru (Start - Up)			Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	-	10 UMKM					369.997.760	342.949.190	APBD			A	406.997.556
						Persentase Usaha Mikro dan Kecil			Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	-	81%											
2	2.17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Kelas Usaha Menjadi Usaha Kecil			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar					-	103 Unit Usaha	369.997.760	342.949.190	APBD			A	406.997.556
2	2.17	08	2.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Terlaksanannya Usaha Mikro yang Terfasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar			103 Unit Usaha	103 Unit Usaha			369 997 760	342.949.190	APBD			A	406 997 556
JUMLAH																19.013 845.961	19 382.328.000	APBD				21 807.347 358

3.2 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses usulan program/kegiatan diperoleh dari penyelenggaraan musrenbang yang diselenggarakan oleh kelurahan dengan menampung aspirasi masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya dengan menetapkan prioritas kegiatan yang sudah dirangkum prioritas kegiatan yang disepakati memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum.

Kesesuian usulan di forum musyawarah yang paling bawah untuk menampung aspirasi masyarakat mengenai perencanaan pembangunan apa yang diinginkan sehingga bisa dijadikan prioritas kegiatan tahunan. Setelah diperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta sumber pendanaannya maka tim penyelenggara musrenbang dan delegasi kelurahan membantu kepala lurah mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.

Dari hasil musrenbang dapat dianalisa bahwa penetapan prioritas program/kegiatan yang diusulkan oleh warga pada dasarnya memang menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Program tersebut terdiri dari berbagai bidang, baik dalam bidang sosial, ekonomi, transportasi, infrastruktur maupun keagamaan.

Prioritas kegiatan hasilnya disampaikan kepada forum SKPD dan forum gabungan SKPD, usulan prioritas program kegiatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah maka dari itu Dinas koperasi dan UKM Kota Makassar memfasilitasi setiap usulan yang masuk sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Adapun disajikan usulan musrenbang dan pokir pada tabel TC. 32 sebagai berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Provinsi/Kabupaten/Kota Makassar
Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

MUSRENBANG

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jl.Barukang II No.33 Makassar, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diskomodir
2	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jl. Barukang II No.33 Makassar, Kota Makassar	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diskomodir
3	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Barukang II No.33 Makassar, Kota Makassar	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1 Angkatan	Diskomodir
4	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	AULA KANTOR LURAH BONTOALA TUA JL..KANDEA II LR.116 A NO.4 RT.005/RW 005 , Kota Makassar	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diskomodir
5	Pengembangan usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala usaha menjadi usaha kecil	JL. SERDA USMAN ALI NO. 12 RT.002 RW.002 KANTOR LURAH TOTAKA, Kota Makassar	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1 Angkatan	Diskomodir
6	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jl.Bandang No. 10, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diskomodir
7	Pengembangan usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala usaha menjadi usaha kecil	RW. 001, RW 002 dan RW. 003 Kelurahan Pattingalloang Baru, Kota Makassar	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1 Angkatan	Diskomodir
8	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jl.Bandang No. 10, Kota Makassar	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diskomodir
9	Pengembangan usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala usaha menjadi usaha kecil	Jl Bandang No. 10, Kota Makassar	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1 Angkatan	Diskomodir
10	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl.Bandang No 10, Kota Makassar	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1 Angkatan	Diskomodir

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
11	Pengembangan usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala usaha menjadi usaha kecil	Jl. Andalas Lr.126 F (RW.01), JL. Bandang XII (RW.02), Jl. Sembilan I Lr.1 (RW.03), Kota Makassar	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1 Angkatan	Diakomodir
12	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jl. Kakatua II No. 26 RT. 01 RW. 02, Kota Makassar	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
13	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jl. Kakatua II No. 26 RT. 01 RW. 02, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
14	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jalan Tamalate 1 No.2, Kota Makassar	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
15	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Ditentukan oleh SKPD terkait, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
16	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Kantor Kelurahan Parang Layang, Kota Makassar	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
17	Pengembangan usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala usaha menjadi usaha kecil	Kantor Kelurahan Parang Layang, Kota Makassar	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1 Angkatan	Diakomodir
18	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jl. Datuk Ditiro III RT.003 RW. 003 , Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
19	Pengembangan usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala usaha menjadi usaha kecil	Jl. Landak I No 21, Kota Makassar	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1 Angkatan	Diakomodir
20	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Kantor Lurah Baji Mappakasunggu Jl.Baji Ati I No.2 Rt.01 RW 02, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Provinsi/Kabupaten/Kota Makassar
Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

POKJR

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	DIAKOMODIR/ TIDAK DIAKOMODIR
1	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jl. Sungai Poso No.31 RT.001/RW.006 Kel. Pisang Utara Selatan, Kec.Ujung Pandang, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
2	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jl. Abubakar Lambogo 1 No.2, RT.002/RW.001 Kel.Bara-baraya Selatan Kec.Makassar, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
3	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Kelurahan Pattingalloang – Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
4	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jl. Barukang III RT 03 RW 03 Kelurahan Pattingalloang – Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
5	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jl. Barukang II RT. 03 RW. 02 Kelurahan Pattingalloang – Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
6	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jl Bolu LR RT. 03 RW. 01 Kelurahan Pattingalloang – Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
7	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jl. G. Bulusaraung, Lr. 257/6X, RT 001/RW 001, Kel. Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
8	Warga ingin anak remaja yang putus sekolah di adakan UMKM semacam kelompok usaha di RT. 002, RW 003 Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo Kota Makassar	Jl. Gulangan Kapal RT. 002, RW. 003 Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo Kota Makassar, Kota Makassar	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
9	Pengembangan usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala usaha menjadi usahu kecil	Pendopo Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Seni Desain dan Teknologi	1 Angkatan	Diakomodir
10	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jl. Bonto DG. Ngirate Blok 20/60 Kel Bonto Makkio, Kec. Rappocini, Kota Makassar	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	DIAKOMODIR/ TIDAK DIAKOMODIR
11	Pengembangan usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala usaha menjadi usaha kecil	Jl. WR Supratman (Samping Taman) Kel. Bulogading, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1 Angkatan	Diakomodir
12	Pengembangan usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala usaha menjadi usaha kecil	BTN. Minasa Upa Blok K16 Kel. Minasa Upa, Kec. Rappocini, Kota Makassar	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1 Angkatan	Diakomodir
13	Pengembangan usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala usaha menjadi usaha kecil	Jl. Tamalate IX Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini, Kota Makassar	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1 Angkatan	Diakomodir
14	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl Veteran Selatan Lr. 297-295 Inpeksi Kanal RT. 1, 2, 3 RW. 5 Kel. Maricaya Baru Kec. Makassar, Kota Makassar	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1 Angkatan	Diakomodir
15	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jl. Merdeka/ Kumala 2 No. 7 RW 001 / RT 001, Kelurahan Pa'baeng-Baeng Kecamatan Tamalate, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
16	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	JL ANDI MANGERANGI LR 07 RT04, RW04 KEL. BUNGAYYA, KEC. TAMALATE, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
17	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	JL MANUNGGAL 22 LR SYA'BAN 2 MUSHALLAH AL IKHLAS RT 08 RW 06 KEL. MACCINI SOMBALA, KEC. TAMALATE, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
18	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	JL DG TATA 1 BLOK B24 NO 4 TURT 04 RW 04 KEL BONTO DURI, KEC. TAMALATE, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
19	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	JL BAJI ATI NO 1 RT 06 RW 04, KEL. BAJI MAPPAKASUNGGU, KEC. TAMALATE, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
20	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	JL. RAJAWALI 1 LR 13 B RT 02. RW 08 KEL. PANNAMBUNGAN, KEC. MARISO, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	DIAKOMODIR/ TIDAK DIAKOMODIR
21	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jl. Buhu Dua Stp. 2 RT.008 RW.03 Kel. Lariangbangi Kec. Makassar, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
22	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	JL. Ina Saudari RT. 01 RW. 03 Kel. Pisang Selatan Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
23	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1 Angkatan	Diakomodir
24	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	RT.04/RW.02, Kel. Bontoala Parang, Kec. Bontoala, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
25	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	RT.04/RW.04, Kel. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
26	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	RT.02/RW.01, Kel. Mampu, Kec. Wajo, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
27	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	RT.3/RW.3, Kel. Cambayya, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALAMAT LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	DIAKOMODIR/ TIDAK DIAKOMODIR
28	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	RT.04/RW.01, Kel. Kaluku Bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
29	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jl. Bontoduri 7, RT. 007 RW. 007 007 Kel. Bontoduri Kec. Tamalate, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
30	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	RT.1/RW.1, Kel. Lakkang, Kec. Tallo, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
31	Pengembangan usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala usaha menjadi usaha kecil	Jl. Sultan Alauddin 2 / Pa'bentengan No. 21 A RT. 002 RW. 008 Kel. Mangasa Kec. Tamalate, Kota Makassar	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1 Angkatan	Diakomodir
32	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jl. Muh. Tahir No. 81 Kel. Jongaya Kec Tamalate, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
33	Pengembangan usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala usaha menjadi usaha kecil	JL. PERMADIAN RT.06 RW.02 Kel BAROMBONG, Kec. Tamalate, Kota Makassar	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1 Angkatan	Diakomodir
34	Pengembangan usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala usaha menjadi usaha kecil	Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1 Angkatan	Diakomodir
35	Pengembangan usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala usaha menjadi usaha kecil	Jl. Ujung Bori RT. 02 RW. 3 Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala, Kota Makassar	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1 Angkatan	Diakomodir
36	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jl. Dg. Hayo Lor 08 RW.02 RT.03 Kel. Bitowa Kec. Manggala., Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
37	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jln. Bangkala Raya Lrg 11 no 133 RT 002 RW 003 Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar	Fasilitasi Kemudahan Penzinan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir
38	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan, kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Kampung Bugis RT.04 RW.04 Kelurahan Biringromang Kecamatan Manggala, Kota Makassar	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1 Angkatan	Diakomodir



PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Dinas Kebudayaan



RENCANA KERJA

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dipandang perlu untuk diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, dengan menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana di maksud Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan.:
1. Wakil Wali Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
7.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
9.	Dinas Sosial Kota Makassar
10.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
12.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
13.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Makassar
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
22.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
23.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
24.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
25.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
26.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
27.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
28.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
29.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar

31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
32.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
34.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
35.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
36.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
37.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
38.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
39.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
40.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
43.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
44.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
45.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
46.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
47.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
58.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
49.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
50.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar
51.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

WALIKOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KEBUDAYAAN
Jl. Balaikota No. 11 Makassar 90111 Email: dkbd2017@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR :430 /103 /DISBUD/SK/VI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) 2025 DALAM LINGKUP DINAS KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA-P) Dinas Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2025, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusunan agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah,terukur dan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.

b. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaqimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim penyusunan Perubahan RENJA Dinas Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepalas Dinas.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republim Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nompr 4725);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaa Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2028 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61178);

6. Peraturah Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengeloalaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1312);
12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6);

19 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4);

20 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor .... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor .....);

21 Peraturan Walikota Makassar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025);

22 Peraturan Walikota Makassar No. 14 Tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan Walikota No. 26 Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA-P) 2025 dalam lingkup Dinas Kebudayaan Kota Makaassar sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan RENJA Dinas Kebudyaan Kota makassar Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terkait oleh ketentuan/peraturan perundang – undangan yang berlaku

KETIGA : Tim Penyusun Perubahan RENJA 2025 Dinas Kebudayaan Kota makassar dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkapkan di Makassar
Pada tanggal, 23 Juni 2025

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Makassar

Andi Patiware, S.STP, M.M
Pangkat : Pembina TK I
Nip. 198304022001121001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR
NOMOR :
TANGGAL ;
TENTANG ; PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2025 DINAS KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) 2025 DINAS KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR

Jabatan dalam tim	:	Nama/Jabatan
Penanggung jawab	:	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar
Ketua	:	Sekretaris Dinas Kebudayaan
Anggota	:	1. Kabid Kekayaan,Warisan dan Promosi Budaya 2. Kabid Penerapan Budaya dan Kesenian 3. Kabid Cagar Budaya 4. Kabid Pelestarian Sejarah, Tradisonal, Adat Dan Istiadat 5. Kepala UPTD Museum 6. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan 7. Kasubag Kepegawaian 8. Kasubag Keuangan 9. Staf PNS dan Non PNS bagian Perencanaan

Ditetapkapkan di Makassar
Pada tanggal, 23 Juni 2025

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Makassar

Andi Patiware, S.STP, M.M
Pangkat : Pembina TK I
Nip. 198304022001121001

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2025 ini merupakan Acuan Perencanaan Kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Makassar selama 1 (Satu) Tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (RENSTRA) 2022-2026. Adapun penyusunan Perubahan Renja SKPD merupakan amanat dari UNdang-undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD).

Penyusunan Perubahan Renja SKPD merupakan faktor mendasar dalam pencapaian sasaran, program dan kegiatan serta lokasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami harapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Makassar untuk masa mendatang

Makassar, 26 Juli 2025

Makassar, 12 Agustus 2025

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Makassar

Andi Patiware, S.STP, MM
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 198304022001121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR ISI iii
BAB.I. PENDAHULUAN 4
1.1. Latar Belakang 4
1.2. Landasan Hukum 5
1 3 Maksud Dan Tujuan 9
1.4. Sistematika Penulisan 10
BAB.II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 11
2 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Triwulan I Tahun Berjalan 11
2 2 Analisis Kinerja Pelayanan 42
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 47
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 47
BAB.III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH. 55
BAB IV PENUTUP 73

DAFTAR TABEL

Tabe TC 2 9 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/d Tahun 2024 (Tahun N-1 Dinas Kebudayaan Kota Makassar ... 31

Tabel TC 30. Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ... 43

Tabel TC 31. Review Terhadap Rancangan Awal P-RKPD ... 49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2025. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2025 memuat program/kegiatan tahun 2025, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif

Mengacu pada dokumen Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2025 pada arah kebijakan ekonomi daerah yang fokus terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik serta Peningkatan Sosial Ekonomi lokal masyarakat, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2025 mengalami beberapa penyesuaian dan perubahan rencana maupun target. Demikian pula halnya dengan arah kebijakan keuangan daerah berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan kedua tahun 2025 diperlukan perbaikan dengan asumsi-asumsi logis dan terukur.

Berdasarkan evaluasi tersebut diatas, maka pada tahun 2025 perlu disusunperubahan terhadap RKPD sebagai akibat dari:

1 Penyesuaian target Pendapatan Daerah (Pendapatan Transfer dan PendapatanAsli Daerah);
2 Penyesuaian Belanja Daerah;
3 Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan triwulan kedua tahun 2025;
4 Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Makasar Tahun 2025 dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2025, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2025. Sebagai keberlanjutan pelaksanaan Program/Kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ada asumsi keadaan yang harus dilakukan pergeseran anggaran karena ada program/kegiatan untuk mendukung program prioritas pemerintah Kota Makassar dengan menggunakan anggaran program/kegiatan yang belum terealisasi sampai dengan triwulan ke 2.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Makassar Tahun2025.

Tujuan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2025 dibuat karena:

1. Penyesuaian target Pendapatan Daerah (Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Daerah);
2. Penyesuaian Belanja Daerah;
3 Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan triwulan kedua tahun 2025;

1.2 Dasar Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Perubahan Rencana KerjaTahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No.41 tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah di ubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia No.41 tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856);

5 Undang-undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, tamabahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

6 Undang-undang nomor 134 tahun 2024 tentang kota makssar di provinsi sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7071);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Pemeliharaan dan pemanfaatan Benda cagar Budaya di Museum;

8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia tahun 2016 Nomor 114 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintahNomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah di ubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor

2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No.41 tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856);

10 Peraturan Persiden No. 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

13 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencan Strategis Perangkat Daerah 2025-2029.

14 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340)

15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4)

18 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Thun 2016);

19. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 (Lembaran daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6)

20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar

21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas peraturan walikota makassar nomor 26 tahun 2024 tentang rencana kerja pemerintah daerah Kota Makassar Tahun 2025; Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 57 ditetapkan Tanggal 31 Desember 2024)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2025 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kota Makassar di tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Perubahan RENJA Dinas Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2025 adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahun 2025 yang operasional:

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kebudayaan Kota Makassar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Kebudayaan Kota Makassar dan RPJMD Kota Makassar di tahun 2025.
b. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematka Dokumen Perubahan

Sistematika penulisan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) DinasKebudayan Kota Makassar disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1 1 Latar Belakang

Menjelaskan Tentang Latar belakang Penyusunan Perubahan

1 2. Dasar hukum Penyusunan

Menjelaskan tetang dasr hukum penyusunan dokumen perubahanperencanaan

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumenperubahan perencanaan

1 4 Sistematika Dokumen Perubahan

Memuat sistematika penulisan perubahan perencanaan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TRIWULAN I TAHUN BERJALAN

2 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Hasil Triwulan I Tahun berjalan Menjelaskan realisasi,hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan

dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2025 selama 1 Triwulan yang dilengkapi dengan permasalahan dan rekomendasi.

2 2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2 3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SK

BABIII. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEBUDAYAAN KOTAMAKASSAR

Mengemukakan Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2025 yang disusun berdasarkan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Kinerja yang direncanakan dalam RPJMD serta Pagu Indikatifnya.

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2025, sebagai pedoman bagi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,serta pengendalian dan kesimpulan evaluasi dan tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN ITAHUN BERKENAAN (2025)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Triwulan I Tahun Berjalan

Evaluasi pelaksanaan penyusunan Perubahan Renja tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan target dan raealisasi kinerja Program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Dinas Kebudayaan Kota Makassar telah melaksanakan 6 program (15 kegiatan), terdiri dari 1 program penunjang /pendukung (7 kegiatan) dan 5 program utama (9 kegiatan).

Anggaran Dinas Kebudayaan Kota Makassar sebesar **Rp. 21.438.163.439,-**, realisasi keuangan sampai dengan triwulan satu sebesar **Rp. 1.741.669.705,** atau **7,9%** , capaian kinerja **20%**.

Program Penunjang/Pendukung

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota terbagi empat indikator kinerja yaitu (1). persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah pencapaian kinerja sampai dengan triwulan I mencapai 10,30% dengan target 100% (2). Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik realisasi kinerja sampai triwulan I mencapai 10,29%. Dengan target 90 % Dan yang terakhir (3). Persentase ASN Perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitasmencapai kinerja 10,29%, dengan target kinerja 90% tercapainya realisasi Kinerja tersebut program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota berasal dari 7 (Tujuh)

dengan alokasi anggaran Program **Rp. 11.546.339.771** dengan realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar **Rp. 1.266.769.705**,-.atau **10,29%..**

Rincian realisasi keuangan dan capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah**

Alokasi Anggaran **Rp. 115.030.006,-**, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar **Rp. 26.360.000,-** atau **22,92%**, target kinerja 9 Dokumen

realisasi kinerja 3 Dokumen capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I 11.11%.

Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran Rp. 54.900.000,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 26.360.000,-, atau 48.01%.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah, target kinerja 3 dokumen, dengan realisasi 1 Dokumen atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I 33.33%.

1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Alokasi anggaran Rp. 12.000.000,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0,-, atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD yaitu jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 0 Dokumen atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan II0%.

1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Alokasi anggaran Rp. 12.000.000,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0,-, atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD yaitu jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 0 Dokumen atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I 0%.

1 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Alokasi anggaran Rp. 10.000.000,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0,-, atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD yaitu jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 0 Dokumen atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I0%.

1 5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Alokasi anggaran Rp. 10.000.000,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,-, atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yaitu jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 0 Dokumen atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I 0%.

1.6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi anggaran Rp. 16.130.000,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0,-, atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target kinerja 2 Laporan dengan realisasi 1 Dokumen atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I 50%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan

Alokasi Anggaran **Rp. 9.414.667.411,-**, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar **Rp. 1.126.132.167,- atau 11.96%, %.**, target kinerja 12 Bulan, realisasi kinerja 3 Bulan capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I **25%.**

Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

2.1. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN

Alokasi anggaran Rp. 8.679.180.731,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 972.562.167,-, atau 11.21%.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN

yaitu jumlah Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN, target kinerja 35 Orang/bulan, dengan realisasi 35 Orang/Bulan atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I 8.57%.

2 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

Alokasi anggaran sebesar Rp. 368.280.000,- realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp.86.070.000-, atau 23,37%.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yaitu jumlah dokumen hasil penyedian administrasi pelaksanaan tugasASN , target kinerja 12 dokumen, dengan Realisasi 6 Dokumen atau capaian kinerja dengan triwulan I 25% (3 dokumen).

2 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Alokasi anggaran sebesar Rp. 306.480.400,- realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 67.500.000-,atau 22.02%.

Indikator kinerja sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yaitu jumlah dokumen penatausahaandan pengujian/verifikasi keuangan yang disediakan, target kinerja 12 dokumen , dengan realisasi 3 dokumen atau capaian kinerja sampai dengandengan triwulan I 25% .

2 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 61.926.280,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0-, atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yaitu jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun, target kinerja 12 Laporan, dengan realisasi Kinerja 0 Lporan atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I 0%.

3. Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 58.500.000,-**. realisasi keuangan sampai dengantriwulan I sebesar **Rp. 3.390.000,-** atau **5.79%,.**

Indikator kinerja kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah Presentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun,target 2 Jenis, capaian kinerja sampai triwulan I 15% (1 Jenis).

Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

3 1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Alokasi anggaran sebesar Rp. 58.500.000,- , realisasi keuangan sampai dengan dengan triwulan I sebesar Rp. 3.390.000,-, atau 5,79%.Indikator kinerja sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi yaitu jumlah pendidikan

dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang dilaksanakan, target kinerja 7 orang, dengan realisasi 1 Orang capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I 14.29%.

Indikator kinerja sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yaitu jumlah dokumen penatausahaandan pengujian/verifikasi keuangan yang disediakan, target kinerja 12 dokumen , dengan realisasi 3 dokumen atau capaian kinerja sampai dengandengan triwulan I 25% .

3 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 61.926.280,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0-, atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yaitu jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun, target kinerja 12 Laporan, dengan realisasi Kinerja 0 Lporan atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I 0%.

4. Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 58.500.000,-**. realisasi keuangan sampai dengantriwulan I sebesar **Rp. 3.390.000,-** atau **5.79%,.**

Indikator kinerja kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah Presentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun,target 2 Jenis, capaian kinerja sampai triwulan I 15% (1 Jenis).

Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

4 1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Alokasi anggaran sebesar Rp. 58.500.000,- , realisasi keuangan sampai dengan dengan triwulan I sebesar Rp. 3.390.000,-, atau 5,79%.Indikator kinerja sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yaitu jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang dilaksanakan, target kinerja 7 orang, dengan realisasi 1 Orang capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I 14.29%.

5. Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar **Rp.1.770.261.136 ,-**. realisasi keuangan

sampai dengan triwulan I sebesar **Rp0,-** atau **0%,**Indikator kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah persentase administrasi umum perngkat daerah yang disediakan, target kinerja 12 bulan, dengan realisasi 0 bulan capaian kinerja sampai triwulan I 0%

6. Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar **Rp.1.770.261.136 ,-.** realisasi keuangan sampai dengan triwulan **I** sebesar **Rp0,-** atau **0%,**Indikator kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah persentase administrasi umum perngkat daerah yang disediakan, target kinerja 12 bulan, dengan realisasi 0 bulan capaian kinerja sampai triwulan I 0% .

Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut·

6.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Alokasi anggaran sebesar Rp. 8.256.000,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0,-, atau 0%.
Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, target kinerja 5 paket, dengan realisasi 0 paket capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I 0%.

6 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran sebesar Rp. 398.540.400,- , realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0,-, atau 0%.
Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, target kinerja 7 paket, dengan realisasi 0 paket atau capaian kinerja sampai triwulan I 0%.

6 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Alokasi anggaran sebesar Rp. 81.661.400,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0, atau 0%.
Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan logistik kantor yaitu jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan, target kinerja 400 paket, dengan realisasi 60 paket atau capaian kinerja triwulan I 17%.

6 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan

Alokasi anggaran sebesar Rp. 3.600.000,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0, atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Bahan Bacaan dan peraturan perundang- undangan yaitu Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang di sediakan target kinerja 2 dokumrn, dengan realisasi 0 capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I 0%.

6 5. Fasilitas Kunjungan Tamu;

Alokasi anggaran sebesar Rp. 21.000.000,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0, atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu yaitu jumlah Jumlah makanan dan minuman yang disediakan, target kinerja 200 Tamu, dengan realisasi 10 Tamu capaian kinerja sampai triwulan I 10% .

6 6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD;

Alokasi anggaran sebesar Rp. 223.430.000,-, realisasi keuangan sampaidengan triwulan I sebesar Rp. 0,-, atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dankonsultasi SKPD, target kinerja 52 laporan , dengan realisasi 0 laporan ataucapaian kinerja sampai triwulan I 0%.

7. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 821.462.560,-**. realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar **Rp. 98.137.538,-**, atau **11,95**

Indikator kinerja kegiatan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan, target kinerja **3 Laporan** , dengan realisasi 1 Laporan capaian kinerjasampai dengan triwulan **I 33% .**

Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

7 1 Penyediaan Jasa surat menyurat;

Alokasi anggaran sebesar Rp. 298.888.800,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 64.750.000,-, atau 21,66%.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat yaitu jumlah laporan penyedian jasa surat menyurat, target kinerja

12 Laporan, dengan realisasi 3 laporan capaian kinerja sampai triwulan I 25% .

7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

Alokasi anggaran sebesar Rp. 219.973.760,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 31,387,538,-, atau 14.27%. Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yaitu jumlah laporan penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan yang diadakan, target kinerja 12 Laporan, denga realisasi 3 Laporan atau capaian kinerja sampai triwulan I25%.

7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 302.600.000,-, realisasi keuangan sampai dengan dengan triwulan II sebesar Rp. 2.000.000- , atau 0.66%.Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu

Jumlah Laporan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan, target kinerja 10 laporan, dengan realisasi 1 laporan capaian kinerja sampai triwulan I 10%.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 400.192.000,-.** realisasi keungan sampai dengandengan triwulan **I** sebesar **Rp.12.750.000,-**, atau **3.9%**. Indikator kinerja kegiatan Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendapatkan pemeliharaan, target **4 jenis**,dengan realisasi **2 Jenis** atau capaian kinerja sampai triwulan I **15,3%.**

Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

Alokasi anggaran sebesar Rp. 177.360.000,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I adalah Rp. 0,- atau 0 %.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yaitu jumlah kendaraan dinas

operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya , target kinerja 4 unit , capaiankinerja sampai dengan triwulan II 0%.

8.2 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;

Alokasi anggaran sebesar Rp. 15.550.000,- , realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0, atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan Aset tetap Lainnya yaitu jumlah aset tetap lainnya yang yang dipelihara, target kinerja 10 unit, capaian kinerja sampai dengan triwulan I 0% (0 unit).

8 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

Alokasi anggaran sebesar Rp. 162.902.000,- realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 12.750.000., capaian 7.83%.

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yaitu jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, target kinerja 1 unit , dengan realisasi kinerja0%capaian kinerja sampai triwulan I 0%.

*** Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja**

1. SK Kegiatan yang masih Berproses di bagian Hukum setda Makassar,dengan rincian 9 (sembilan) SK Kegiatan yang keluar baru 3 (Tiga).
2. Lambatnya Proses E-katalog Versi 6

***Tindak Lanjut :**

1. Koordinasi dengan bagian hukum untuk penyelesaian SK kegiatan
2. Koordinasi dengan bagian ULP dan Pihak Ke Tiga

PROGRAM UTAMA

2. Program Pengembangan Kebudayaan

Pencapaian target indikator kinerja Program Pengembangan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan sampai triwulan I dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.732.226.200**- dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 295.300.000** atau **11.42%.** Dan target kinerja **55,55%** dan realisasi kinerja sebesar **5.90%** atau dengan capaian **11.07%.**

Rincian realisasi keuangan dan capaian kinerja kegiatan dan subkegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. **Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalamdaerah kab/kota**

   Alokasi Anggaran **Rp. 1.153.564.800,-**, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar **Rp 265.300.000,-** atau **23%**, target kinerja 25 Opk, realisasi kinerja 6 Opk atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I **24%**.

   Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

   1.1. Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan

   Alokasi anggaran **Rp. 1.055.600.800,-**, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar **Rp. 265.300.000,-**, atau **25.13%.**

   Indikator kinerja sub kegiatan Pelindungan Pengembangan pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan yaitu jumlah Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan pelindungan,pengembangan,pemanfaatan, target kinerja 25 Opk, dengan realisasi 4 Objek pemajuan kebudayaan atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan 1 15%.

   1.2. Pembinaan Sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan

   Alokasi anggaran **Rp. 97.964.000,-**, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar **Rp. 0,-**, atau **0%.**

   Indikator kinerja sub kegiatan Pelindungan Pengembangan pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan yaitu jumlah Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan pelindungan,pengembangan,pemanfaatan, target kinerja 350 Orang, dengan realisasi 0 Objek pemajuan kebudayaan atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I 0%.

2. **Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunyadalam daerah kab/kota**

Alokasi Anggaran **Rp. 1.405.967.800,-**, realisasi keuangan sampai dengantriwulan I sebesar **Rp 30.000.000,-** atau **2%**, target kinerja 25 Opk, realisasi kinerja 2 Opk atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I **8.0%**. Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

2.1 Pelindungan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

Alokasi anggaran **Rp. 1.032.558.800,-**, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar **Rp. 0,-**, atau **0%.**

Indikator kinerja sub kegiatan Pelindungan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya yaitu jumlah objek pemajuan Tradisi budaya yang dilakukan pelindungan,pengembangan dan pemanfaatan target kinerja 2 Opjek Pemajuan kebudayaan, dengan realisasi 0 Objek pemajuan kebudayaan atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I 0%.

2.2. Pembinaan Sumber daya manusia lembaga dan pranata tradisional Alokasi anggaran **Rp. 373.409.000,-**, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar **Rp. 30.000.000,-** , atau **8.03%.**

Indikator kinerja sub kegiatan Pembinaan Sumber daya manusia lembaga dan pranata tradisional yaitu jumlah Pembinaan sumber daya manusia,Lembaga dan pranata tradisional target kinerja 30 Lembaga , dengan realisasi 3 Lembaga atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I 10%.

2.3. Pemberian Penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalampemajuan kebudayaan

Alokasi anggaran **Rp. 20.007.800,-**, realisasi keuangan sampai dengantriwulan II sebesar **Rp. 0,-**, atau **0%.**

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan yaitu jumlah Jumlah Orang Atau Lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam

pemajuan kebudayaan target kinerja 5 Sertifikat , dengan realisasi 0 sertifikat atau capaian kinerja sampai dengan triwulan I 0%.

3. **Kegiatan Pembinaan Lembaga adat yang penganutnya dalam daerahkab/kota**

Alokasi Anggaran **Rp. 26.893.600,-**, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar **Rp 0,-** atau **0%**, target kinerja 1 Lembaga , realisasi kinerja 0 Lembaga atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I **0%**.

Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

3.1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat

Alokasi anggaran **Rp. 26.893.600,-**, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar **Rp. 0,-**, atau **0%**.Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat yaitu jumlah Sarana dan prasarana Lembaga adat yang disediakan/difasilitasi target kinerja 1 unit, dengan realisasi 0 unit atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I 0%.

***Faktor pendorong keberhasilan kinerja**

1. Jalannya Kerja sama antar panitia
2. Adanya koordinasi dengan lintas Sektoral dengan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Kebudayaan,Dinas Kebudayaan dan kepariwisataan Sulsel, Balai pelestarian Kebudayaan wilayah XIX dan Balai Bahasa sulawesi selatan serta akademisi dari Uneversitas Negeri yaitu Unhasdan UNM

***Faktor Penghambat kinerja**

1. Adanya Penerapan aplikasi baru inaproc versi 5 ke versi 6 pada LPSE yang menyebabkan terhambatnya proses penawaran sehingga pencairan anggaran belum bisa terlaksana.

***Tindak Lanjut yang dilakukan untuk mengoptimalkan Realisasi capaian kinerja di Triwilan Berikutnya**

1. Koordinasi dengan ULP dan Pihak Ketiga
2. Mendisiplinkan pegawai untuk melaporkan kegiatan dan pertanggung jawaban

2.Program Pengembangan kesenian Tradisional

Pencapaian target indikator kinerja Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan Indikator Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan budaya sampai triwulan I

dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 4.282.042.000**- dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 22.500.000** atau **0.53%.** Dan target kinerja **3 festival** dan realisasi kinerja sebesar **0** atau dengan capaian **0%**

Rincian realisasi keuangan dan capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. **Kegiatan Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kab/kota**

Alokasi Anggaran **Rp. 4.282.042.000,-**, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar **Rp 22.500.000,-** atau **0.53%.**, target kinerja 275 Orang, capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan **I 0%**

Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

1.1. Peningkatan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenianTradisional

Alokasi anggaran **Rp. 139.320.000** realisasi keuangan sampai dengantriwulan II sebesar **Rp. 0,-**, atau **0%.**

Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian Tradisional yaitu jumlah Sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat Pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya), target kinerja 275 Orang, dengan realisasi 0 Orang atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I 0%.

1.2. Peningkatan Kapasitas Tata kelola Lembaga kesenian Tradisional Alokasi anggaran **Rp. 4.142.722.000** realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar **Rp. 22.500.000,-**, atau **0.54.%.**

Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata kelola Lembaga kesenian Tradisional yaitu Jumlah Lembaga kesenian tradisional yang (ditingkatkan kompetensinya), target kinerja 15

Lembaga, dengan realisasi 1 Lembaga atau capaian kinerja sampaidengan dengan triwulan I 6.67%.

***Faktor pendorong keberhasilan kinerja**

1 Tingginya minat lembaga/sanggar/kelompok kesenian untuk mendaftarkan komunitas atau lembaganya di Dinas Kebudayaan

2. Tingginya peran serta dan pelibatan sanggar yang ada di kota makassar Khususnya yang telah terdaftar di Dinas Kebudayaan dala, Tingginya peran serta dan pelibatan sanggar yang ada di Kota makassar khususnya yang telah terdaftar di Dinas Kebudayaan dalam setiap Event atau kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kota makassar

3 Peran serta sanggar seni baik bergerak di bidang kesenian tradisional dan perfileman dalam mempromosikan budaya daerah berbagai event maupun produksi film

3. Program Pembinaan Sejarah

Pencapaian target indikator kinerja Program Pembinaan Sejarah dengan Indikator Jumlah Persentase Sejarah Lokal yang di lestarikan sampai triwulan I dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 773.556.760**- dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 27.000.000** atau **3.49%.** Dan target kinerja **100%** dan realisasi kinerja sebesar **3.34%** atau dengan capaian **3.34%**

Rincian realisasi keuangan dan capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan **I** tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. **Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam satu daerah kab/Kota**

Alokasi Anggaran **Rp. 773.556.760,-**, realisasi keuangan sampai dengan triwulan **I** sebesar **Rp 27.000.000,-** atau **3.49%** target kinerja 7 Sejarah lokal, dengan realisasi **3,34%** atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan **I 3.34%**

Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

1.1. Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kab/kota. Alokasi anggaran **Rp. 333.179.280** realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar **Rp. 27.000.000,-**,

atau **8.10%.**

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kab/kota yaitu jumlah Sumber daya manusia dan Lembaga Sejarah Lokas kab/kota, target kinerja 17 Lembaga, dengan realisasi 2 Lembaga atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I 11.76 %.

1.2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
Alokasi anggaran **Rp. 189.032.000** realisasi keuangan sampai dengantriwulan I sebesar **Rp. 0,-**, atau **0%.**
Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah yaitu jumlah Jumlah Sarana dan Prasarana pembinaan sejarah, target kinerja 5 Sarana dan Prasarana, dengan realisasi 0 Lembaga atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I 0%.

1.3. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap data dan informasi sejarah Alokasi anggaran **Rp. 251.342.480** realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar **Rp. 0,-**, atau **0%.**
Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap data dan informasi sejarah yaitu Jumlah dokumen data dan informasi Sejarah yang dapat di akses target kinerja 4 Unit, dengan realisasi 0 Unit atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I 0%.

*** Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja**

1. Lambatnya Proses administrasi pengerjaan di ULP Mengenai Versi 6
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk sejarah Lokal

***Tindak Lanjut yang di lakukan untuk mengoptimalkan Realisasi capaian kinerja di Triwulan Berikutnya**

1. Perlunya Koordinasi dengan ULP dan Pihak Ketiga
2. Perlunya sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya sejarah lokal

3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Pencapaian target indikator kinerja Program Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan Indikator Persentase Cagar Budaya yang di lestarikan dan jumlah cagar budaya yang di kelola secara terpadu sampai triwulan I dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 861.611.168-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 53.600.000** atau **6.22%.** Dan

target kinerja **79%** dan realisasi kinerja sebesar **1,54%** atau dengan capaian **1.95%**

Rincian realisasi keuangan dan capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan **I** tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. **Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota**

Alokasi Anggaran **Rp. 323.862.640,-**, realisasi keuangan sampai dengan triwulan **I** sebesar **Rp 50.600.000,-** atau **15.62%**, target kinerja 32 Objek, dengan realisasi 1 atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I **3.13%**.

Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

1 1 Pendaftaran Objek di duga cagar budaya

Alokasi anggaran **Rp. 270.625.000** realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar **Rp. 50.600.000,-**, atau **18,70%.**

Indikator kinerja sub kegiatan Pendaftaran diduga cagar budaya yaitu Jumlah Objek diduga cagar budaya yang didaftarkan,target kinerja 32 Objek dengan realisasi 2 Objek atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan **I** 6.25%.

1.2. Penetapan cagar budaya

Alokasi anggaran **Rp. 53.237.640** realisasi keuangan sampai dengantriwulan I sebesar **Rp. 0,-**, atau **0%.**

Indikator kinerja sub kegiatan Penetapan cagar budaya yaitu Jumlah cagar budaya yang ditetapkan,target kinerja 15 Objek dengan realisasi 0 Realisasi atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I 6.67%.

2. **Kegiatan Pengelolaan Cagar budaya peringkat kab/ kota**

Alokasi Anggaran **Rp. 520.822.000,-**, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar **Rp 3.000.000,-** atau **0,58%**, target kinerja 9 Objek, dengan realisasi 0 atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I **0%**.

Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

2 1 Pelindungan cagar budaya

Alokasi anggaran **Rp. 520.822.000** realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar **Rp. 3.000.000,-**, atau **0.58%.**

Indikator kinerja sub kegiatan Perlindungan cagar budaya yaitu Jumlah Objek diduga cagar budaya yang dilindungi,target kinerja 2 Objek dengan realisasi 0 Objek atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I 0%.

3. **Kegiatan Penerbitan Izin membawa cagar budaya ke luar daerahkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota**

Alokasi Anggaran **Rp. 16.926.528,-**, realisasi keuangan sampai dengan triwulan **I** sebesar **Rp 0,-** atau **0%**, target kinerja 6 objek, dengan realisasi 0 atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan 0%.

Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

3 1 Penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah kabupaten/kotadalam 1 (satu) daerah Kab/kota
Alokasi anggaran **Rp. 16.926.528** realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar **Rp. 0,-**, atau **0%**.Indikator kinerja sub kegiatan Penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Kab/kota,target kinerja 6 Objek dengan realisasi 0 Realisasi atau capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan II 0%.

***pendorong keberhasilan kinerja**

1 Adanya regulasi tentang pelestarian cagar budaya, Undang-undang no 11 tahun 2010 tentang pelestarian cagar budaya dan peraturan daerah kota makassar tentang pelestarian cagar budaya kota makassar.
2 Adanya kordinasi dengan instansi vertikal seperti kemendisbud, Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah XIX, Badan arkeologi sul-sel dan akademisiuniversitas tinggi.
3 Adanya program pelestarian cagar budaya menjadi program proritas walikota makassar
4 Adanya kesadaran masyarakat dan kerja sama yang baik bagi pemilik atau pengelola objek di duga cagar budaya untuk dilakukanpendataan objek cagar budaya , sehinga membedakan untuk melakukan penetapan dan oprasional cagar budaya di lapangan
5. Adanya aplikasi system informasi cagar budaya

*** Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja**

1. Belum memadainya alat ukur untuk melakukan pendataan objek diduga cagar budaya
2. Masih kurangnya koordinasi pemilik atau pengelolah bangunan yang telah ditetapkan menjadi objek cagar budaya apabila melakukan revitalisasi atau rehabilitasi bangunannya
3. Belum terbentuknya tim pemugaran cagar budaya
4. Lambatnya surat Keputusan kegiatan pada bagian hukum
5. Lambatnya Proses administrasi pengerjaan di ULP

*** Tindak Lanjut yang dilakukan untuk mengoptimalkan Realisasi capaian kinerja di Triwilan Berikutnya**

1. Lebih membangun koordinasi dan kerja sama yang baik antar pemilik ataupengelola objek diduga cagar budaya
2. Percepatan kegiatan lebih diperhatikan dan focus
3. tersedianya sarana dan prasarana yang lebih memadai dalammengoptimalkan kegiatan oprasional

4. Program Pengelolaan Permuseuman

Pencapaian target indikator kinerja Program Pengelolaan Permuseuman dengan Indikator Persentase Koleksi Museum Kota Makassar yang terawat dengan baik dengan target kinerja 55 koleksi 92,49% realisasi **6,62,16%** (12 Koleksi) atau capaian **7.16%** dan Persentase kenaikan jumlah pengunjung museum kota makassar dengan target kinerja 5.800 Orang atau **100%** realisasi **157%** (9.111 Orang) atau capaian **157%** sampai triwulan I dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.001.363.540**- dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 76.500.000** atau **7%.**

Rincian realisasi keuangan dan capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. **Pengelolaan Museum Kab/Kota**

Alokasi Anggaran **Rp. 2.324.519.745,-**, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar **Rp 157.770.110,-** atau **6,62%**, target kinerja 1 unit, dengan capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I **7.16%**.

Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

1.1. Pelindungan, Pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu Alokasi anggaran **Rp. 607.191.100** realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar **Rp. 0,-**, atau **0%.**

Indikator kinerja sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu yaitu Jumlah koleksi museum yang dilakukan Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu target kinerja 56 Unit dengan realisasi 0 Koleksi atau capaian sampai dengan dengan triwulan I 0%.

1.2. Pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman

Alokasi anggaran **Rp. 364.936.040** realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar **Rp. 76.500.000,-**, atau **20,96%.**

Indikator kinerja sub kegiatan Pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman yaitu Jumlah sumber daya manusia permuseuman yang ditingkatkan mutu dan kapasitasnya target kinerja 17 Orang dengan realisasi 10 Orang atau capaian sampai dengan dengan triwulan I 20.96%.

1.3. Peningkatan Pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum Alokasi anggaran **Rp. 880.648.200** realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar **Rp. 0,-**, atau **0%.**

Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum yaitu Jumlah pelayanan dan akses Masyarakat terhadap museum target kinerja 5.800 Orang dengan realisasi 9.111 Orang atau capaian sampai dengan dengan triwulan I 157%.

1.4. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Museum

Alokasi anggaran **Rp. 47.520.000** realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar **Rp. 0,-**, atau **0%.**

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Museum yaitu Jumlah sarana dan Prasarana museum yang tersedia dan terpelihara target kinerja 3 Unit dengan realisasi 0 Orang atau capaian sampai dengan dengan triwulan I 0%.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja

1. Banyaknya Koleksi yang di registrasi
2. Register koleksi sebagai Tupoksi Museum (wajib sesuai undang – undang No66 Tahun 2017)
3. Pengkajian Hasil Registrasi Koleksi oleh Narasumber
4. Adanya kerja sama yang baik di museum kota makassar
5. Adanya bahan-bahan kimia alat penunjang kegiatan

***Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja**

1. Tidak adanya Tenaga registrer dan konservator Provesional(Pendidikan penunjang registrator yang bersertifikat)
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan registrasi koleksi
3. Lambatnya surat Keputusan kegiatan pada bagian hukum
4. Terhambatnya surat penyediaan dana (SPD) yang tidak sesuai dengan alurkas
5. Lambatnya Proses administrasi pengerjaan di ULP

*** Tindak Lanjut yang di lakukan untuk mengoptimalkan Realisasi capaian kinerja di Triwulan Berikutnya**

1. Menyediakan tenaga register dan konservator yang bersertifikat danmenyediakan ruang/laboratorium untuk melakukan konservasi
2. Perlunya pengadaan sarana dan prasaran penunjang pelaksanaan kegiatan
3. Perlunya sosialisasi lebih terarah kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan museum kota makass

Tabel TC.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra perangkat daerah S/d Tahun 2024
Dinas Kebudayaan Kota Makassar

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N -1) 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	1	URUSAN WAJIB									
	1 22	Kebudayaan									
		Dinas Kebudayaan									
2	22 01	Program Pelayanan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	90	90	90	1	100	190	1,9
			Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	1	100	200	2

						Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	100	90	90	90	1	100	190	1,9
2	**2 2**	**0 1**	**2. 0 1**		**Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerahyang disusun**	100	6	6	6	1	9	15	**0,15**
2	2 2	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3 Dokumen	1	1	1	1	3	4	**1,3**
2	2 2	0 1	2 0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	1	1	1	1	2	3	**3,0**
2	2 2	0 1	2 0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	3 Dokumen	1	1	1	1	1	2	**0,7**
2	2 2	0 1	2,0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1	1	1	1	1	2	**2,0**

4 & R 32

2	2 2	0 1	2,0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1	1	1	1	1	**2**	**2,0**
2	2 2	0 1	2,0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	1	1	1	1	1	**2**	**2,0**
2	**2 2**	**0 1**	**2, 0 2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun**	**100 %**	**5**	**5**	**5**	**1**	**66**	**71**	**71**
2	2 2	0 1	2,0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yangdisediakan	35 Orang	**35**	**35**	**35**	**1**	35	**70**	**2,0**
2	2 2	0 1	2,0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	23 Orang	**25**	**25**	**25**	**1**	25	**50**	**2,2**
2	2 2	0 1	2,0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasiyang disiapkan	8 Orang	8	8	8	**1**	8	**16**	**2,0**
2	2 2	0 1	2,0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semiateran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semiateran SKPD	10 Orang	10	10	10	**1**	8	**18**	**1,8**
2	**2 2**	**0 1**	**2, 0 5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Jumlah jasa adminitrasi umumyang tersedia**	1 Tahun	80	80	80	1	1	81	**81**

2	22	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Jasa Surat Menyurat dan ekspedisi yang disediakan	70 pasang /atell	70	70	70	**1**	1	**71**	**1,0**
2	22	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdaarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang disediakan	20 Orang	15	15	15	**1**	1	**16**	**0,8**
2	**22**	**01**	**2.06**		**Administrasi UmumPerangkat daerah**	**Jumlah jasa administrasi umumyang tersedia**	9 unit	9	9	9	1	9	18	**2**
2	22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Jenis	5	5	5	**1**	5	**10**	2
2	22	01	2 0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Jenis	7	7	7	**1**	7	**14**	2
2	22	01	2 0 6	04	Penyediaan BahanLogistik Kantor	Jumlah Bahan LogistikKantor yang disediakan	1 Tahun	1	1	1	**1**	1	**2**	2
2	22	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undanganyang disediakan	2 Jenis	**2**	**2**	**2**	**1**	**2**	**4**	**2**
2	22	01	2 06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan danMinuman yang disediakan	200 Orang	100	200	100	0,5	150	250	1,25

2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-RapatKordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang diadakan	52 Orang	52	52	52	1	52	104	2
					Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	1 Unit	1	1	1	1	1	2	2
2	22	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 tahun**	3	3	3	1	1	4	4
2	22	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1	1	1	1	1	2	2
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	1 Tahun	1	1	1	1	1	2	2
2	22	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	2 Jenis	2	2	2	1	10	12	6
2	22	01	2.09		**Pemeliharaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah kebutuhan pengadaan pakaiankerja dan peningkatan kapasitas SDM**	1 tahun	9	9	9	1	1	10	10

2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatanyang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	1 Tahun	1	1	1	1	1	2	2
2	22	01	2.09	07	Pemeliharaan asetTetap Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	10 Unit	10	10	10	1	10	20	2
2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilita s gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	1 Tahun	1	1	1	1	1	2	2
2	22	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**CAKUPAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN YANG DILESTARIKAN**	**5 OPK**	**100**	**100**	**100**	1	5	**105**	21
						PERSENTASE KESENIAN TRADISIONAL YANG DILESTARIKAN	**100%**	100	100	100	1	43.8	**102**	1 44
2	22	02	2.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Kota Makassar yangdilaksanakan**	**25 OPK**	25	25	25	1	25	**50**	2
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	25 OPK	**26**	**26**	**26**	1	25	**51**	2 04

2	2 2	0 2	2.0 1	0 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan yang dibina	3 Kegiatan	3	3	3	1	3	6	2
2	**2 2**	**0 2**	**2. 0 2**		**Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Kota Makassar yang dilestarikan**	**10 0**	**30**	**30**	**30**	**1**	30	**60**	**0,6**
2	2 2	0 2	2.0 2	0 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	5 Objek pemajuan tradisi budaya	25	25	25	1	5	**30**	**6**
2	2 2	0 2	2 0 2	0 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional yang dibina	*30 sanggar*	30	30	30	30	30	60	2
2	2 2	0 2	2 0 2	0 3	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan yang diberi penghargaan	5 Orang Maestro	1	1	1	1	5	6	1 25
2	2 2	0 2	2.0 3		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Kota Makassar yang dibina**	**1 Lembaga**	100	100	100	1	1	**101**	**202**

2	2 2	0 2	2.0 3	0 3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat yagn disediakan	1 Lembaga	1	1	1	1	1	101	101
2	**2 2**	**0 3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**JUMLAH PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI DAN BUDAYA**	**4 festival**	1	1	1	1	2	1	0
2	**2 2**	**0 3**	**2. 0 1**		**Pembinaan Kesenianyang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Kota Makassar yangdibina**	30 Kelompok Pelaku seni	30	30	30	1	30	400	13.33
2	2 2	0 3	2 0 1	0 1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber DayaManusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber DayaManusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikandan Pelatihan	50 SDM	30	30	30	30	50	195	3 9
2	2 2	0 3	2.0 1	0 3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional yang mendapat peningkatan kapasitas	30 Kelompok							6,5
2	2 2	0 4			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**PERSENTASE SEJARAH LOKAL YANG DILESTARIKAN**	**100%**	15	100	15	15	100	30	30
2	**2 2**	**0 4**	**2. 0 1**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sejarah Lokal Kota Makassaryang dibina**	7	5	5	5	15	15	6	0,85714285 7
2	**2 2**	**0 4**	**2. 0 1**	**0 1**	Pemberdayaan SumberDaya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan LembagaSejarah Lokal Kota Makassar yang diberdayakan	15 Penjaga makam dan situs	3	3	3	3	3	**6**	0.4

2	2 2	0 4	2. 0 1	0 2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah yang disediakan	3 makam bersejarah 1 bangunan bangunan bersejarah 1 situs bersejarah	3	3	3	3	3	6	1 2
2	2 2	0 4	2. 0 1	0 3	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah yang dilaksanakan	4 Papan Informasi Sejarah	4	4	4	4	4	8	2
2	2 2	0 5			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**TERLESTARINY ACAGAR BUDAYA**	100%	7	100	7	7	100	107	107
						JUMLAH CAGAR BUDAYA YANG DIKELOLA SECARA TERPADU	0	0	0	0	0	0	0	
2	2 2	0 5	2 0 1		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kot a**	**Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kota Makassar yang ditetapkan**	34 objek	10	10	10	10	34	44	1 29
2	2 2	0 5	2. 0 1	0 1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		34 objek	10	10	10	10	34	44	1.29
2	2 2	0 5	2. 0 1	0 2	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		34 objek	10	10	10	10	34	44	1.29
2	2 2	0 5	2. 0 2		**Pengelolaan CagarBudaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kota Makassar yangdikelola**	9 Objek	9	9	9	9	9	18	2
2	2 2	0 5	2.0 2	0 1	Perlindungan Cagar Budaya		6 Objek	6	6	6	6	6	12	2

2	2 2	0 5	2 0 3		**Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Daerah kabupaten / Kota**	**Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kota Makassar yang dikelola**	9 Objek	9	9	9	9	9	**18**	2
2	2 2	0 5	2 0 3	0 1	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota		3 Objyek	3	3	3	3	3	**6**	2
2	2 2	0 6			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**PERSENTASE KOLEKSI MUSEUM KOTA MAKASSAR YANG TERAWAT DENGAN BAIK**	**100%**	100	100	100	100	100	140	140
						PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH PENGUNJUNG MUSEUM KOTA MAKASSAR	**6400 Orang**							
2	2 2	0 6	2.0 1		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Jumlah Museum Kota Makassar yangdikelola**	**1 Museum**	40	40	40	100	100	**140**	140
2	2 2	0 6	2 0 1	0 1	Pelindungan, Pengembangan, danPemanfataan KoleksiSecara Terpadu	Jumlah koleksi yangdilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan secaraterpadu	56 Koleksi	56	56	56	100	56	**112**	2
2	2 2	0 6	2 0 1	0 2	Peningkatan Mutu danKapasitas Sumber DayaManusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang mendapat peningkatanmutu dan kapasitas	17 Orang	17	17	17	100	17	**34**	2
2	2 2	0 6	2 0 1	0 3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah PeningkatanAkses Masyarakat Terhadap	700	40	40	40	100	40	**80**	0,11428571 4

2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Museum	Museum yang dilaksanaka n	3 Paket	1	1	1	100	1	2	0.667
2	22	06	2.01	05	Revitalisasi Sarana danPrasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang disediakan dan mendapat pemeliharaa n	1Museu m						2	2
												Rata-rata capaian kinerja (%)	0	0
												Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Analisis kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan Kota Makassar di tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 triwulan 1 pencapaian kinerja pelayanan dinas kebudayaan menjelaskan bahwa indikator Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dengan capaian di triwulan I 10%, indikator Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah dengan capaian 25%, Indikator Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas dengan Capaian 10%, Indikator Cakupan objek pemajuan kebudayaan dengan capaian 11,7% , indikator Jumlah Penyelengaraan Festival Seni dan Budaya dengan capaian Masih 0% Festival,Indikator Persentase Sejarah Lokal Yang dilestarikan dengan capaian 3,34%, indikator Terlestarinya Cagar Budaya dengan capaian 1,95%,indikator Persentase Koleksi Museum Kota Makassar yang terawat dengan baik dengan capaian sampai dengan triwuan I tahun 2025 0% dan Indikator Persentase kenaikan Jumlah Pengunjung Museum Kota Makassar dengan triwuan 1 tahun 2025 7,16%.

Pencapaian Kinerja Dinas Kebudayaan Kota Makassar pada dasarnya menyajikan Pengukuran Terhadap hasil Kinerja kegiatan yang telah di laksanakan selama tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 Triwulan I.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kota Makassar

Provinsi : Sulawesi Selatan Kota Makassar

No	Indikator	SPM/Norma standar SKPD	IKK	target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(10)	(12)	(13)
1	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			100%	100%	100%	100%	32,62%	74,08	100%	
2	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan Kinerja Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	Tahun 2024	50,0	100%	

No	Indikator	SPM/Norma standar SKPD	IKK	target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas			100%	100%	100%	100%	27,78%	4,94	100%	
4	Cakupan objyek pemajuan kebudayaan			46,7%	48,88 %	51,11 %	55,5%	24,92%	44,0	55,5%	
5	Jumlah Penyelengaraan Festival Seni dan Budaya			3 festival	3 festival	4 festival	4 festival	1 Festival	0	4 festival	

No	Indikator	SPM/Norma standar SKPD	IKK	target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
6	Persentase Sejarah Lokal Yang dilestarikan			44,8%	63 %	81 %	100 %	38,5%	57,14	100 %	
7	Terlestarinya Cagar Budaya			39,4%	59,1 %	78,8%	100%	43,7%	55,56	100%	
8	Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola secara terpadu			0	0	0	0	0	0	0	
9	Persentase Koleksi Museum Kota Makassar yang terawat dengan baik			76,3%	84,5 %	92,4%	100%	23%	0	100%	

No	Indikator	SPM/Norma standar SKPD	IKK	target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun2026	
10	Persentase kenaikan Jumlah Pengunjung Museum Kota Makassar			4.500	5.2 00	5.800	6.400	49%	8,30	6.400	

2.3. 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD 2021-2026, dapat diidentifikasi beberapaisu-isu strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tupoksi Dinas kebudayaan
Kota Makassar yaitu sebagai berikut:

a. Pembentukan kegiatan zonasi Kota Lama
b. Penyusunan Buku sejarah
c. Pengembangan Kesenian dan Budaya

Isu-isu strategis di atas, jika tidak diantisipasi saat ini akan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan di bidang Pembinaan, dan Pengelolaan keragaman Budaya dan Seni. Untuk mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka Dinas Kebudayaan Kota Makassar telah menyiapkan 2 program utama, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Program Keragaman Budaya diharapkan dapat lebih dalam untuk melibatkan masyarakat dalam memliharan keragaman Budaya;
b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan adanya peluang yang muncul berupaketerbatasan SDM, dana dan fasilitas kegiatan.

Hambatan dan tantangan pelaksanaan kegiatan dan inovasi dinas kebudayaan kurangnya SDM pada sub bagian perencanaan yang bisa mengelola Inovasi dan tidak terpenuhinya persyartan untuk mengikuti lomba Inovasi,

Dampak dari isu yang muncul adalah kurangnya persyaratan yang bisa mendukng berkembangnya aplikasi inovasi yang sudah berjalan , harapan kami kedepannya aplikasi yang di rencanakan untuk pelaksanaan Inovasi kedepannya bisa terhendel dengan baik.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan

dalam rancangan awal RKPD.Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang

telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas.

program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkataderahberdasarkan rancangan awal RKPD Sebagai Berikut.

Table TC. 31
Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2025

KODE					RENCANA AWAL SKPD				HASIL ANALISIS KESEPAKATAN					
					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	Catatan Perubahan
DINAS KEBUDAYAAN									16.129.700.000					16.129.700.000	
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	MAKASSAR	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerahterhadap pelayanan housekeeperian (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	100%	7.555.584.560	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	MAKASSAR	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerahterhadap pelayanan housekeeperian (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	100%	7.555.584.560	
							Persentase sarana dan prasarana aparaturdalam kondisi baik	100%				Persentase sarana dan prasarana aparaturdalam kondisi baik	100%		
							Persentase Intermediasi laporan keuangandan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%				Persentase Intermediasi laporan keuangandan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%		
							Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	100%				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	100%		
2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	MAKASSAR	Terwujudnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100	150.370.060	Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	MAKASSAR	Terwujudnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100	150.370.060	
2	22	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	MAKASSAR	Jumlah dokumen perencanaan perangkatdaerah yang disusun	3 Dokumen	91.528.560	Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	MAKASSAR	Jumlah dokumen perencanaan perangkatdaerah yang disusun	3 Dokumen	91.528.560	
2	22	01	2.01	02	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA- SKPD	MAKASSAR	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	9.250.000	Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA- SKPD	MAKASSAR	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkatdaerah yang disusun	1 Dokumen	9.250.000	
2	22	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	MAKASSAR	Jumlah Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	9.250.000	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD	MAKASSAR	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA	1 Dokumen	9.250.000	
2	22	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	MAKASSAR	Jumlah Koordinasi dan PenyusunanDokumen DPA SKPD	1 Dokumen	9.250.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	MAKASSAR	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DokumenDPA SKPD	1 Dokumen	9.250.000	
2	22	01	2.01	05	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD	MAKASSAR	Jumlah Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.250.000	Koordinasi dan Penyusunan PerubahanDPA SKPD	MAKASSAR	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.250.000	
2	22	01	2.01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MAKASSAR	Jumlah Evaluasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	27.841.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	MAKASSAR	Jumlah Evaluasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	27.841.500	

KODE					RENCANA AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	Catatan Perubahan
DINAS KEBUDAYAAN									**18.129.700.000**					**18.129.700.000**	
2	22	01	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**MAKASSAR**	**Tersedianya dengan baik Dokumen Administrasi Keuangan**	12 Bulan	5 390 953.740	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**MAKASSAR**	**Tersedianya dengan baik Dokumen Administrasi Keuangan**	12 Bulan	5 390 953.740	
2	22	01	2 02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	MAKASSAR	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yangdisediakan	35 Orang	4 658 257 060	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	MAKASSAR	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yangdisediakan	35 Orang	4 658 257 060	
2	22	01	2 02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	MAKASSAR	Jumlah Administrasi Pelaksanaan TugasASN yang disediakan	23 Orang	365 880.000	Penyediaan Administrasi PelaksanaanTugas ASN	MAKASSAR	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNyang disediakan	23 Orang	365.880 000	
2	22	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKP	MAKASSAR	Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasiyang disiapkan	8 Orang	305 230.400	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	MAKASSAR	Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasi yangdisiapkan	8 Orang	305.230 400	
2	22	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	MAKASSAR	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPDdan laporan koordinasi penyusunan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 Laporan	61 585 280	Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	MAKASSAR	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 Laporan	61 585 280	
2	22	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**MAKASSAR**	**Terlaksananya Peningkatan SDM Pegawai Lingkup Dinas Kebudayaan**	81 Orang	100 000 000	**Administrasi Kepegawaian Perangkatdaerah**	**MAKASSAR**	**Terlaksananya Peningkatan SDM PegawaiLingkup Dinas Kebudayaan**	81 Orang	100 000 000	
2	22	01	2 05	03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapa	MAKASSAR	Jumlah Jasa Surat Menyurat dan ekspedisi yang disediakan	81 Paang/Stel	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	MAKASSAR	Jumlah Jasa Surat Menyurat dan ekspedisiyang disediakan	81 Paang/Stel	0	
2	22	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan PegawaiBerdasarkan Tugas dan Fungsi	MAKASSAR	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber DayaAir dan Listrik yang disediakan	1 Tahun	100 000 000	Pendidikan dan Pelatihan PegawaiBerdasarkan Tugas dan Fungsi	MAKASSAR	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Aardan Listrik yang disediakan	1 Tahun	100 000 000	
2	22	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**MAKASSAR**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Adrah**	12 Jenis	863 981 800	**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**MAKASSAR**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Aderah**	12 Jenis	863 981 800	
2	22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	MAKASSAR	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang disediakan	5 Jenis	8.250.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	MAKASSAR	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/PenerangandBangunan Kantor yang disediakan	5 Jenis	8 250 000	
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MAKASSAR	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Jenis	44 184 400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	MAKASSAR	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang disediakan	7 Jenis	44 184 400	
2	22	01	2 06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	MAKASSAR	Jumlah Bahan Logistik Kantor yangdisediakan	1 Tahun	76 981 400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	MAKASSAR	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Tahun	76 981 400	
2	22	01	2 06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	MAKASSAR	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Jenis	5 400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	MAKASSAR	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Jenis	5 400 000	
2	22	01	2 06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	MAKASSAR	Jumlah Makanan dan Minuman yangdisediakan	150 Orang	6 000 000	Fasilitas Kunjungan Tamu	MAKASSAR	Jumlah Makanan dan Minuman yangdisediakan	150 Orang	6 000 000	

KODE					RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	Catatan Perubahan
DINAS KEBUDAYAAN									16.129.700.000					16 129 700.000	
2	22	01	2 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	MAKASSAR	Terlaksanannya Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusa Pemerintah daerah	8 Unit	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	MAKASSAR	Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusa Pemerintah daerah	8 Unit	0	
2	22	01	2 07	01	Pengadaan Kendaraan PerorangandDinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	MAKASSAR	Jumlah Kendaraan Perorangan DinasAtau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	MAKASSAR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas AtauKendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1 Unit	0	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MAKASSAR	Jumlah Unit Kendaraan Dinas OperasionalAtau Lapangan yang diadakan	1 unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MAKASSAR	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional AtauLapangan yang diadakan	1 unit	0	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	MAKASSAR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnyayang diadakan	4 unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	MAKASSAR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yangdiadakan	4 unit	0	
2	**22**	**01**	**2.0 5**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**MAKASSAR**	**Terseranya Jasa Penunjang UrusanPemerintah daerah**	**3 Layanan**	**733.102.860**	**Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah daerah**	**MAKASSAR**	**Terselenggaranya Jasa Penunjang UrusanPemerintah daerah**	**3 Layanan**	**733 102.860**	
2	**22**	**01**	**2.0 6**	**01**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	MAKASSAR	Jumlah Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	298 048.800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	MAKASSAR	Jumlah Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	298 048 800	
2	**22**	**01**	**2.0 6**	**02**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	MAKASSAR	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	1 Tahun	149 453.760	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	MAKASSAR	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yangmendapat pemeliharaan rutin/berkala	1 Tahun	149 453.760	
2	**22**	**01**	**2.0 6**	**03**	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	MAKASSAR	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yangmendapat pemeliharaan rutin/berkala	2 Unit	285 600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	MAKASSAR	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yangmendapat pemeliharaan rutin/berkala	2 Unit	285.600 000	
2	**22**	**01**	**2.0 9**		**Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan pemerintahan daerah**	**MAKASSAR**	**Terpeliharanya Dengan Baik Barang Milik Daerah**	1 Tahun	311 196 700	**Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan pemerintahan daerah**	**MAKASSAR**	**Terpeliharanya Dengan Baik Barang MilikDaerah**	1 Tahun	311 196 700	
2	**22**	**01**	**2.09**	**01**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	MAKASSAR	Jumlah Mobil Jabatan yang mendapatpemeliharaan rutin/berkala	1 Tahun	44 380 000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	MAKASSAR	Jumlah Mobil Jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	1 Tahun	44 380 000	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan Kendaraan dinasOperasional atau lapangan	MAKASSAR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang dipelihara dan dibayarkanpajak dan perlengkapannya	3 Unit	182 466.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya,pemeliharaan ,pajak dan perizinan Kendaraan dinasOperasional atau lapangan	MAKASSAR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang dipelihara dan dibayarkanpajak dan perlengkapannya	3 Unit	182 466 700	
2	**22**	**01**	**2.09**	**07**	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	MAKASSAR	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	10 Unit	15 550 000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	MAKASSAR	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yangmendapat pemeliharaan rutin/berkala	10 Unit	15.550 000	
2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitas gedunglkantor dan bangunan lainnya		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yangmendapat pemeliharaan rutin/berkala	1 Unit	68 800 000	Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantordan bangunan lainnya		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yangmendapat pemeliharaan rutin/berkala	1 Unit	68 800 000	

KODE					RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	Catatan Penting
DINAS KEBUDAYAAN									16 129.700.000					16.129.700.000	
1	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	MAKASSAR	CAKUPAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN YANG DILESTARIKAN	5 OPK	1.565.784.400	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	MAKASSAR	CAKUPAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN YANG DILESTARIKAN	5 OPK	1.565 784 40 0	
						MAKASSAR	PEMERINTAH KEBENIAN TRADISIONAL YANG DILESTARIKAN	53.3%			MAKASSAR	PEMERINTAH KEBENIAN TRADISIONAL YANG DILESTARIKAN	53.3%		
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	MAKASSAR	Terlaksanya dengan baik Objek Pemajuan Kebudayaan	25 OPK	674.864.800	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam DaerahKabupaten/Kota	MAKASSAR	Terlaksanya dengan baik Objek Pe majuanKebudayaan	25 OPK	674.864.800	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek PemajuanKebudayaan	MAKASSAR	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaanyang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	25 OPK	586 600 800	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek PemajuanKebudayaan	MAKASSAR	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dikembangkan dan dimanfaatkan	25 OPK	586 600 800	
2	22	02	2 01	03	Pembinaan Sumber Daya Manusia,Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	MAKASSAR	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga,dan Pranata Kebudayaan yang dibina	3 Kegiatan	88 264 000	Pembinaan Sumber Daya Manusia,Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	MAKASSAR	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, danPranata Kebudayaan yang dibina	3 Kegiatan	88 264 000	
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalamDaerah Kabupaten/Kota	MAKASSAR	Jumlah Kesenian tradisional yangMasyarakat Pelakunya dalam Kota Makassar yang dilestarikan	25 OPK	1.157 630.000	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	MAKASSAR	Jumlah Kesenian tradisional yangMasyarakat Pelakunya dalam Kota Makassar yang dilestarikan	25 OPK	1.157.630.000	
2	22	02	2 02	01	Pelindungan Pengembangan, Pemanfaatan Objek PemajuanTradisi Budaya	MAKASSAR	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilindungi dikembangkan dan dimanfaatkan	5 Objek pemajuan tradisibudaya	783 635.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan TradisiBudaya	MAKASSAR	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yangdilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	5 Objek pemajuan tradisi budaya	783 635.000	
2	22	02	2 02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia,Lembaga, dan Pranata Tradisional	MAKASSAR	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional yang dibina	30 sanggar	373 395.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	MAKASSAR	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional yang dibina	30 sanggar	373.395 000	
2	22	02	2 02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinyadalam Pemajuan Kebudayaan	MAKASSAR	Jumlah Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan yang diberi penghargaan	5 Orang Macam	0	Pemberian Penghargaan Kepada Pihakyang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	MAKASSAR	Jumlah Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai DengnPrestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan yang diberi penghargaan	5 Orang Macam	0	
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Pengaturnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	MAKASSAR	Jumlah Lembaga Adat yang Pengaturnya dalam Kota Makassaryang dibina	1 Lembaga	26.893 600	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengaturnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	MAKASSAR	Jumlah Lembaga Adat yang Pengaturnya dalam Kota Makassar yang dibina	1 Lembaga	26.893.600	
2	22	02	2 03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	MAKASSAR	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat yang disediakan	1 Lembaga	26 893.600	Penyediaan Sarana dan PrasaranaPembinaan Lembaga Adat	MAKASSAR	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat yang disediakan	1 Lembaga	26 893.600	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	MAKASSAR	JUMLAH PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI DAN BUDATA	4 Festival	4.282.131 000	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	MAKASSAR	JUMLAH PENYELENGGARAAN FESTIVALSENI DAN BUDATA	4 Festival	4 282 131 000	
2	22	03	2 01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	MAKASSAR	Terlaksanaanya Pembinaan Kesenianyang masyarakat pelakunya dalam daerah Kab/Kota	30 Kelompok Seni Orang	4 282 131 000	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam DaerahKabupaten/Kota	MAKASSAR	Terlaksanaanya Pembinaan Kesenian, yangmasyarakat pelakunya dalam daerah Kab/Kota	30 Kelompok Seni Orang	4 282 131 000	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	MAKASSAR	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (di tingkat Kompetensinya)	50 SDM	137 160 000	Peningkatan Pendidikan dan PelatihanSumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	MAKASSAR	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan (di tingkat Kompetensinya)	50 SDM	137 160.000	

KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
						LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
DINAS KEBUDAYAAN									**16.129.700.000**					**16.129.700.000**	
2	22	03	2 01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	MAKASSAR	Jumlah Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional yang mendapat peningkatan kapasitas	30 Kelompok	4 144 951 000	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	MAKASSAR	Jumlah Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional yang mendapat peningkatan kapasitas	30 Kelompok	4 144 951 000	
2	22	04			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**MAKASSAR**	**PERSENTASE SEJARAH LOKAL YANG DILESTARIKAN**	**28,5%**	**$15 378.560**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**MAKASSAR**	**PERSENTASE SEJARAH LOKAL YANG DILESTARIKAN**	**28,5%**	**$15.378.560**	
2	22	04	2.01		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**MAKASSAR**	**Jumlah Sejarah Lokal Kota Makassaryang dibina**		**$15 378.560**	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**MAKASSAR**	**Jumlah Sejarah Lokal Kota Makassar yang dibina**		**$15.378.560**	
2	22	04	2 01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah LokalKabupaten/Kota	MAKASSAR	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kota Makassaryang diberdayakan	15 Penjaga makam dan situs	342 695 080	Pemberdayaan Sumber Daya Manusiadan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	MAKASSAR	Jumlah Sumber Daya Manusia dan LembagaSejarah Lokal Kota Makassar yang diberdayakan	15 Penjaga makam dan situs	342 695 080	
2	22	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	MAKASSAR	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah yang disediakan	3 makam bersejarah 1 bangunan bangunan bersejarah 1 situs bersejarah	421 788 000	Penyediaan Sarana dan PrasaranaPembinaan Sejarah	MAKASSAR	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah yang disediakan	3 makam bersejarah 1 bangunan bangunan bersejarah 1 situs bersejarah	421 788 000	
2	22	04	2 01	03	Peningkatan Akses MasyarakatTerhadap Data dan Informasi Sejarah	MAKASSAR	Jumlah Peningkatan Akses MasyarakatTerhadap Data dan Informasi Sejarah yang dilaksanakan	4 Papan Informasi Sejarah	50 895.480	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	MAKASSAR	Jumlah Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah yangdilaksanakan	4 Papan Informasi Sejarah	50 895.480	
2	22	05			**PROGRAM PELESTARIAN DANPENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**MAKASSAR**	**TERLESTARINYA CAGAR BUDAYA**	59,1%	706 165	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**MAKASSAR**	**TERLESTARINYA CAGAR BUDAYA**	59,1%	706 165 640	
						MAKASSAR	**JUMLAH CAGAR BUDAYA YANGDIKELOLA SECARA TERPADU**	0			MAKASSAR	**JUMLAH CAGAR BUDAYA YANGDIKELOLA SECARA TERPADU**	0		
2	22	05	2 01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**MAKASSAR**	**Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya**	32 objek	212 278 640	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**MAKASSAR**	**Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya**	32 objek	212.278.640	
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	MAKASSAR	Jumlah Pendaftaran Objek diduga cagarbudaya	32 objek	158 246.000	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	MAKASSAR	Jumlah Pendaftaran Objek diduga cagarbudaya	32 objek	158 246 000	

KODE					RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	Catatan Penting
DINAS KEBUDAYAAN									16 129 700 000					16 129 700 000	
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya Peringkat	MAKASSAR	Jumlah Penetapan cagar budaya	9 Objek	54 032 640	Penetapan Cagar Budaya Peringkat	MAKASSAR	Jumlah Penetapan cagar budaya	9 Objek	54 032 640	
2	22	05	2.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**MAKASSAR**	**Terkelolanya cagar budaya**	9 Objek	475 668 000	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**MAKASSAR**	**Terkelolanya cagar budaya**	9 Objek	475 668 000	
2	22	05	2 0 2	01	Perlindungan Cagar Budaya	MAKASSAR	Jumlah perlindungan cagar budaya	9 Objek	475 668 000	Perlindungan Cagar Budaya	MAKASSAR	Jumlah perlindungan cagar budaya	9 Objek	475 668 000	
2	22	05	2 0 3		**Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Daerah kabupaten / Kota**	**MAKASSAR**	**Terbitnya Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Daerah kabupaten / Kota**	9 Objek	18.219 000	**Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Daerah kabupaten / Kota**	**MAKASSAR**	**Terbitnya Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Daerah kabupaten / Kota**	9 Objek	18 219 000	
2	22	05	2 0 3	01	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penerbitan izin membawa cagarbudaya keluar daerah kabupaten/kota	9 Objek	18.219 000	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah kabupaten/kota	9 Objek	18 219 000	
2	22	06			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**MAKASSAR**	**PERSENTASE KOLEKSI MUSEUM KOTA MAKASSAR YANG TERAWATDENGAN BAIK**	100%	911.681.640	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**MAKASSAR**	**PERSENTASE KOLEKSI MUSEUM KOTA MAKASSAR YANG TERAWAT DENGAN BAIK**	100%	911.681.640	
							PERSENTASE KENAIKAN JUMLAHPENGUNJUNG MUSEUM KOTA MAKASSAR	8800 Orang				**PERSENTASE KENAIKAN JUMLAH PENGUNJUNG MUSEUM KOTA MAKASSAR**	8800 Orang		
2	22	06	2 0 1		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**MAKASSAR**	**Jumlah Museum Kota Makassar yangdikelola**	1 Museum	911.681.640	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**MAKASSAR**	**Jumlah Museum Kota Makassar yangdikelola**	1 Museum	911.681.640	
2	22	06	2 0 1	01	Pelindungan Pengembangan danPemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	MAKASSAR	Jumlah koleksi yang dilindungi dikembangkan dan dimanfaatkan secaraterpadu	56 Koleksi	134 324 300	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	MAKASSAR	Jumlah koleksi yang dilindungi dikembangkandan dimanfaatkan secara terpadu	56 Koleksi	134 324 300	
2	22	06	2 0 1	02	Peningkatan Mutu dan KapasitasSumber Daya Manusia Permuseuman	MAKASSAR	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang mendapat peningkatan mutu dan kapasitas	17 Orang	293 356 040	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	MAKASSAR	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang mendapat peningkatan mutu dan kapasitas	17 Orang	293 356 040	
2	22	06	2 0 1	03	Peningkatan Pelayanan dan AksesMasyarakat Terhadap Museum	MAKASSAR	Jumlah Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap	700	294 203 200	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	MAKASSAR	Jumlah Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap	700	294 203 200	
2	22	06	2 0 1	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	MAKASSAR	Museum yang dilakukan	3 Paket	187 847 000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	MAKASSAR	Museum yang dilakukan	3 Paket	187 847 000	
2	22	06	2 0 1	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	MAKASSAR	Jumlah Sarana dan Prasarana Museumyang direvitalisasi dan mendapat pemeliharaan	1Museum	1 921 000	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	MAKASSAR	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yangdirevitalisasi dan mendapat pemeliharaan	1Museum	1 921 000	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kerja Dinas Kebudayaan tahun Anggaran 2025 adalah penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun dengan memperhatikan visi, misi dan kondisi strategis lingkup organisasi Pemerintah Kota Makassar.

Program dan kegiatan dijabarkan sesuai arah Kebijakan PokokPemerintah Kota Makassar tahun 2022-2026 yang mencakup tujuan, sasaran, strategis dan Kebijakan.Oleh karena itu Untuk merealisasikan visi dan misi, pada lingkup Dinas Kebudayaajn ditetapkan tujuan dan sasaran yang menjadi ukuran pelaksanaan misi dan ketercapaian visi Berikut penjabaran program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kota makassar :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Kota
   - Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkat daerah
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah
2. Program Pengembangan Kebudayaan
   - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerahkab/Kota
   - Pelestarian Kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalamdaerah kab/kota
   - Pembinaan Lembaga adatyang penganutnya dalam daerah kab/kota
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
   - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat pelakunya dalam daerahkab/kota
4. Program Pembinaan sejarah

- Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota

5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
   - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kab Kota
   - Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya keluar daerah kab/kota dalamsatu daerah kab/kota
   - Pengelolaan Cagar Budaya
6. Program Pengelolaan Permuseuman
   - Pengelolaan Museum Kab/Kota
   - Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

Perumusan Program dan kegiatan di dinas Kebudayaan Kota Makassar di arahkan untuk mencapai visi dan misi Walikota Makassar Terpilih nantinya.Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Dinas kebudayaan Kota Makassar merupakan implementasi dari upaya Pencapaian Visi dan Misi Walikota Terpilih .

Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana pemerintah kota yang memiliki tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang Kebudayaan.

Pencapaian SDGS

Sustainable Development Goals Merupakan Kesepakatan dari Negara negaradi dunia untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dunia, Khususnya Masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih di bawah standar,dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit Membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini di tuangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menandatangani SDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50% , Meningkatkan derajat kesehatan, Meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga di tuntut untuk dapat memenuhi Pencapaian Target SDGs. Sebagai Konsekuensinya maka Pemerintah diSeluruh Indonesia juga berkuwajiban untuk mencapai target- target SDGs ini. Program dan kegiatan yang di Rancang dalam RENJA Dinas Kebudayaan Kota Makassar diimplentasikan untuk mencapai target- target SDGs itu dalam Lingkup Dinas Kebudayaan. Dan berikut program dan kegiatan yang menjadi Rencana Aksi Tujuan Pembangunan berkelanjutan beserta pencapaianya.

PENCAPAIAN SDGs TAHUN 2025 SEMESTER 1

Nama Tujuan SDGs																	
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Target tahun 2024		Alokasi Anggaran tahun 2024(Rp Juta)	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Rp Juta)		Target Tahun 2025	Realisasi Target tahun 2025		Alokasi Anggaran tahun 2025 (Rp Juta)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp Juta)		Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Instansi Pelaksana
			Sem I	Sem II		Sem I	Sem II		Sem I	Sem II		Sem I	Sem II			
1	2	3	4		5	6		7	8		9	10		11	12	
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH																
8.9.1 (a) Jumlah wisatawan manca negara (b) Jumlah wisatan nusantara (c) Devisa sektor pariwisata																
2.22.03 Program Pengembangan Kebudayaan																
2.22.02.2.02	Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kab/kota	2.22.02.2.02.01	Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Sanggar	54	15 Sanggar	35 Sanggar	1.856.857.200	589.704.784	1.182.894.960	5 Objek	0		989.916.500	0	0	APBD	Makassar	DISBUD
11.4.1.(a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan, kota besar, kota sedang dan kota kecil																
2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya																
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota	2.22.05.2.01.02	Penetapan CagarBudaya	Objek	4	0	1	548.888.000	45.828.400	172.935.700	32 Objek	0		227.510.000	8.730.780		APBD	Makassar	DISBUD

11.4.1 Jumlah belanja konservasi pada sumun warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintah (nasional dan sub nasional)																		
2.22.06 Program Pengelolaan Permuseuman																		
2 22 06 2 01	Pengelolaa nMuseum Kab/Kota	2.22.06 2 .01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Koleksi	60	30 Koleksi	10 Koleksi	239 366 000	127 773.0 0 0	83 563 000	50 koleksi	0		466.440.500	0		DAK NON FISIK	Makassar	DISBUD
17.1. (a) Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi Terhadap PDB menurut Sumbernya																		
2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional																		
2 22.03 . 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	2.22 03. 2 .01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SumberDaya Manusia kesenian Tradisional	Orang	30	0	30	56.694 000	20 796 00 0	34 554 50 0	90 Orang	0		106. 011 000	0		APBD	Makassar	DISBUD

3.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Penyusunan RENJA Perubahan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025. Penyusunan RENJA Perubahan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPDP, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBDP.

Anggaran Dinas Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2025 sebesar **Rp. 22.051.339.439,-** dan pada APBDP tahun 2025 bertambah sebesar **Rp. 2.490.196.261,-** sehingga menjadi **Rp. 23.928.360.000,-** .

Untuk lebih jelasnya program dan kegiatan serta pendanaan yang dilaksanakan di Renja Perubahan Dinas Kebudayaa Kota Makassar Tahun 2025 dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang semulatelah dianggarkan pada DPA Pokok sebesar **Rp. 11.809.349.771,-** Bertambah sebesar **Rp.63.357.961,-** sehingga menjadi **Rp.11.872.725.732,-**.

❖ **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

  Pada sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran pokok dari Rp. 67.500.000 Menjadi Rp. 44.980.000, dikegiatan ini berkurang karena adanya perubahan Anggaran Lain-lain.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

  Pada sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran pokok dari Rp. 12.000.000 Menjadi Rp. 8.000.000, dikegiatan ini berkurang karena adanya perubahan Anggaran Lain-lain.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

  Pada sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran pokok dari Rp. 12.000.000 Menjadi Rp. 8.000.000, dikegiatan ini berkurang

karena adanya perubahan Anggaran Lain-lain.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

  Pada sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan anggaran pokok dari Rp. 10.000.000 Menjadi Rp. 7.000.000, dikegiatan ini berkurang karena adanya perubahan Anggaran Lain-lain.

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

  Pada sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran pokok dari Rp. 10.000.000 Menjadi Rp. 6.500.000, dikegiatan ini berkurang karena adanya perubahan Anggaran Lain-lain.

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

  Pada sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran pokok dari Rp. 16.130.000 Menjadi Rp. 7.330.000, dikegiatan ini berkurang karena adanya perubahan Anggaran Lain-lain.

❖ **Administrasi Keuangan Perangkat daerah**

- Sub Kegiatan Penyediaan Pelaksanaan Penetausahaan dan pengujian/verifikasiKeuangan SKPD.

  Pada sub Kegiatan Penyediaan Pelaksanaan Penetausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran pokok dari Rp. 306.480.400 Menjadi Rp. 297.480.400, dikegiatan ini berkurang karena adanya Anggaran Lain-lain sebanyak Rp. 9.000.000.

- Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan /semisteran SKPD

  Pada sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan /semisteran SKPD dengan anggaran pokok dari Rp. 60.726.280 menjadi Rp 41.726.280 dikegiatan ini terjadi perubahan atau Pengurangan anggaran Karena Adanya anggaran Lain-lain sebanyak Rp.19.000.000

❖ **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi .

  Pada sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran pokok dari Rp. 81.000.000 Menjadi Rp. 553.500.000, dikegiatan ini bertambah karena adanya Peningkatan SDM.

❖ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor.

  Pada sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan anggaran pokok dari Rp. 398.540.400 Menjadi Rp. 265.308.600, dikegiatan ini berkurang karena adanya Anggaran Lain-lain sebanyak Rp. 133.231.800.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik.

  Pada sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik dengan anggaran pokok dari Rp. 81.661.400 Menjadi Rp. 81.799.400, dikegiatan ini berkurang karena adanya Anggaran Lain-lain sebanyak Rp. 138.00.000.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

  Pada sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran pokok dari Rp. 450.140.000 Menjadi Rp. 373.430.000, dikegiatan ini berkurang karena adanya Rasionalisasi Anggaran.

❖ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan,Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

  Pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan,Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran pokok dari Rp. 44.380.000 Menjadi Rp. 40.800.000, dikegiatan ini berkurang karena adanya Anggaran Lain-lain sebanyak Rp. 3.500.000.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan kendaraan dinas Oprasional

  Pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan,Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran pokok dari Rp. 177.360.000 Menjadi Rp. 171.080.000, dikegiatan ini berkurang karena adanya Anggaran Lain-lain sebanyak Rp. 6.280.000.

2. Program Pegembangan Kebudayaan

Program Pengembangan Kebudayaan yang semula telah dianggarkan pada DPA Pokok sebesar **Rp. 2.677.226.200,-** Bertambah sebesar **Rp. 1.567.772.600,-** sehingga menjadi **Rp. 4.244.998.800**,-.

❖ **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota**

- Sub kegiatan Perlindungan, pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan

  Sub kegiatan Perlindungan, pemanfaatan Objek Pemajuan kebudayaan dengan anggaran pokok Rp1.146.400.800, terjadi perubahan Anggaran menjadi Rp.1.536.219.200. di kegiatan ini Terjadi perubahan Karena adanya Penambahan hider baru yaitu kegiatan duta budaya dengan Anggaran sebanyak Rp. 389.818.400.

- Sub kegiatan Pembinaan sumber daya manusia, Lembaga dan pranatakebudayaan

  Sub kegiatan Sub kegiatan Pembinaan sumber daya manusia, Lembaga dan pranata kebudayaan dengan anggaran pokok Rp. 97.964.000, terjadi perubahan Anggaran menjadi Rp. 84.252.000. di kegiatan ini Terjadi perubahan Karena adanya rasionalisasi di beberapa sub hider kegiatan sebanyak Rp. 13.712.000.

❖ **Pelestarian kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam DaerahKabupaten/kota**

- Sub kegiatan Perlindungan, pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Subkegiatan Perlindungan, pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya dengan Anggaran Pokok Rp. 1.032.558.800 menjadi Rp.2.159.821.600 di kegiatan bertambah Karena adanya kegiatan

baru seperti Pagelaran Budaya dan wedding Tradisional sebanyak Rp. 1.127.262.800.

- Sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan PranataTradisional

  Sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional dengan Anggaran Pokok Rp. 373.409.000 menjadi Rp. 464.706, di kegiatan ini adanya perubahan Karena adanya anggaranLain-lain sebanyak Rp. 8.703.000.

❖ **Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat dengan Anggaran Pokok 26.893.600, terjadi perubahan Anggaran menjadi Rp. 0. di kegiatan ini Terjadi perubahan Karena adanya Pergeseran anggaran ke sub kegiatan lain Rp. 26.893.600.

3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program Pengembangan Kesenian Tradisional yang semula telah dianggarkan pada DPA Pokok sebesar **Rp. A**

❖ **Pembinaan Kesenian yang Msyarakat Pelakunya dalam daerah kab/kota**

- Sub kegiatan Peningkatan Peningkatan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional

  Sub kegiatan Peningkatan Peningkatan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional dengan anggaran pokok Rp. 139.320.000 terjadi perubahan Anggaran menjadi Rp.119.944.000 Terjadi perubahan anggaran karena adanya Anggaran Lain-lain sebanyak Rp. 19.376.000

- Sub kegiatan Peningkatan kapasitas Tata kelola Lembaga Kesenian Tradisional

  Sub kegiatan Peningkatan kapasitas Tata kelola Lembaga Kesenian Tradisional dengan anggaran pokok Rp. 4.142.722.000 menjadi Rp. 4.138.472.000, terjadi perubahan anggaran karena Pengurangan Pada anggaran lain-lain sebanyak Rp. 4.250.000.

4. Program Pembinaan Sejarah

Program Pembinaan Sejarah yang semula telah dianggarkan pada DPA Pokok sebesar **Rp. 773.556.760,-** berkurang sebesar **Rp. 106.532.000,-** sehingga menjadi **Rp.667.024.760,-**.

❖ **Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kab/kota**

- Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kab/Kota

  Sub kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kab/Kota dengan Anggaran Pokok Rp. 333.179.280 menjadi Rp.296.847.280 terjadi perubahan anggaran karena adanya Anggaran Lain-lain sebanyak Rp. 36.332.000.
- Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap data

  Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan prasarana Pembinaan Sejarah dengan Anggaran Pokok Rp. 251.345.480 menjadi Rp.181.145.480 terjadi perubahan anggaran karena adanya Anggaran lain-lain Rp. 70.200.000.

5. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang semula telah dianggarkan pada DPA Pokok sebesar **Rp. 861.611.168,-** berkurang sebesar **Rp. 16.900.000,-** sehingga menjadi **Rp.844.711.168**,-.

❖ **Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kab/ Kota**

- pendaftaran objek diduga cagar budaya

  Sub kegiatan pendaftaran objek diduga cagar budaya dengan Anggaran PokokRp. 270.625.000 menjadi Rp.245.225 terjadi perubahan anggaran karena di alihkan ke sub kegiatan lain belanja jasa iklan sebanyak Rp. 25.400.000
- Penetapan cagar budaya

  Sub kegiatan Penetapan Cagar budaya dengan anggaran pokok Rp. 53.237.640 menjadi Rp.70.237.640 terjadi Penmabhan anggaran karena adanya penambahan belanja Jasa Tenaga ahli dan Makan Minum sebanyak Rp. 17.000.000.

❖ **Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab/ Kota**

- Perlindungan Cagar Budaya

Sub kegiatan Perlindungan Cagar budaya dengan Anggaran Pokok Rp. 520.822.000 terjadi penambahan Anggaran sebanyak 1.498.776.000 sehingga menjadi Rp. 2.015.098.000,terjadi penambahan karena adanya Pemeliharaan Gereja GPIB Immanuel.

❖ **Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke luar Daerah Kab/kota dalam satu daerah kbupaten/Kota**

- Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke luar Daerah Kab/kota dalam satu daerah kbupaten/Kota

dengan Anggaran Pokok Rp. 16.926.528 terjadi perubahan Anggaran menjadi Rp.12.926.528, terjadi perubahan anggaran karena adanya Pengurangan Anggaran sebanyak Rp. 4.000.000

6. Program Pengelolaan Permuseuman

Program Pengelolaan Permuseuman yang semula telah dianggarkan pada DPA Pokok sebesar **Rp. 2.001.363.540,-** berkurang sebesar **Rp. 77.656.000,-** sehingga menjadi **Rp.1.923.707.540**,-.

❖ **Pengelolaan Museum Kab/Kota**

- Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu

Sub kegiatan Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu dengan anggaran pokok Rp. 607.191.100 terjadi perubahan Anggaran menjadi Rp. 589.124.100 adanya pengurangan Anggran Karena adanya Anggaran lain-lain sebanyak Rp. 18.067.000.

- Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sub kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman dengan anggaran pokok Rp. 364.936.040 terjadi perubahan Anggaran menjadi Rp. 358 936.040 adanya Pengurangan Anggaran kerana adanya anggaran lain-lain sebanyak Rp. 6.000.000

- Sub kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum

Sub kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum dengan anggaran pokok Rp. 880.648.200 terjadi perubahan anggaran menjadi Rp. 827.123.200, adanya Pengurangan Anggaran pada Perjalanan Dinas dalam daerah sebanyak Rp. 53.525.000.

- Sub kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Museum Sub kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Museum dengan anggaran pokok Rp. 148.588.200 terjadi perubahan Anggaran menjadi Rp. 148.524.200 adanya Pengurangan Anggaran karena adanya anggaran lain-lain sebanyak Rp. 64.000.

Table TC. 33

PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

Unit Organisasi :

Sub Unit Organisasi : **DINAS KEBUDAYAAN**

Kode					Uraian Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rincian Tahun 2025									Perubahan Atas Rincian Tahun 2025			
						Capaian Program	Kelurahan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Level Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
										Program		Kelurahan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01				**URUSAN KEBUDAYAAN**											21.438.162.639	23.926.380.000					16.300.729.000
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah** **Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik** **Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas**			**Keluaran**	**100 %** **90 %** **90 %**	**100 %** **90 %** **90 %**					11.609.349.771	11.972.725.732					9.764.691.000
2	02	01	2.01		Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	**Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah** **Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik** **Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas**			**Keluaran**	**100 %** **90 %** **90 %**	**100 %** **90 %** **90 %**					127.530.000	81.810.000					268.772.184
2	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Keluaran	100 % 90 % 90 %	100 % 90 % 90 %	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	57.500.000	44.980.000			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	136.425.864
2	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Keluaran	100 % 90 % 90 %	100 % 90 % 90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	12.000.000	8.800.000			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	19.149.888
2	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Keluaran	100 % 90 % 90 %	100 % 90 % 90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	12.000.000	8.800.000			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	19.134.000
2	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Keluaran	100 % 90 % 90 %	100 % 90 % 90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	10.800.000	7.000.000			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.400.000

2	22	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Persentase keterwadilan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen penyimpangan dan evaluasi kinerja perangkat	Makassar	100 % 90 % 90 %	100 % 90 % 90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	6 500.000			Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	13.314 000
2	22	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterwadilan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Makassar	100 % 90 % 90 %	100 % 90 % 90 %	3 Laporan	3 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	16 130 000	7 330.000		Adanya penambahan Anggaran Karena adanya kegiatan SKM Dan SOP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	35.352.295
2	22	01	2.01 2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase keterwadilan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah			Makassar	100 % 90 % 90 %	100 % 90 % 90 %					9.415.867 411	9 386 667.172					7 240 113.000
2	22	01	2 02	0002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase keterwadilan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya dengan baik dokumen administrasi keuangan	Makassar	100 % 90 % 90 %	100 % 90 % 90 %	38 Orang/bu lan	38 Orang/bu lan	12 Bulan	12 Bulan	8.679 180 731	8.679 180.492		Adanya penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN di karenakan adanya penyesuaian nilai TPP ASN pada Dinas Kebudayaan Kota Makassar TA. 2024	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bula n	9.471 783.384
2	22	01	2.02	0012	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase keterwadilan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya dengan baik dokumen administrasi keuangan	Makassar	100 % 90 % 90 %	100 % 90 % 90 %	23 Dokumen	23 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	368 280.000	360 280.000			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23 Dokumen	405.309.280
2	22	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase keterwadilan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Terlaksananya dengan baik dokumen administrasi keuangan	Makassar	100 % 90 % 90 %	100 % 90 % 90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	306.480.400	297 480.400			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	1 Dokumen	264 967 542
2	22	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase keterwadilan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	Terlaksananya dengan baik dokumen administrasi keuangan	Makassar	100 % 90 % 90 %	100 % 90 % 90 %	19 Laporan	19 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	53 926.280	43 726 280		Adanya perubahan anggaran pada Sub Kegiatan ini dikarenakan dibutuhkannya biaya penggandaan dan cetak minum rapat pada saat penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	97 993 544
2	22	01	2.03 6		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas**			**Makassar**	**100 % 90 % 90 %**	**100 % 90 % 90 %**					83.000.000	553 500 000					**360.843.000**
2	22	01	2.03	0006	Pembinaan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Peningkatan SDM Pegawai Lingkup Dinas Kebudayaan	Makassar	100 % 90 % 90 %	100 % 90 % 90 %	20 Orang	20 Orang	81 Orang	81 Orang	81 000 000	553 500 000			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	199.650.000
2	22	01	2.03 6		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksana dasar dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**			**Makassar**	**100 % 90 % 90 %**	**100 % 90 % 90 %**					963 197 800	753 394.000					**1 180 184 348**

2	22	01	2.01	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan secara dan penunjang operasional dalam kondisi baik	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya dengan baik barang milik daerah	Makassar	100 % 90 % 90 %	100 % 90 % 90 %	10 Unit	10 Unit	4 Jenis	4 Jenis	15 550 000	15 550.000			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 238 200
2	22	01	2 09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan secara dan penunjang operasional dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya dengan baik barang milik daerah	Makassar	100 % 90 % 90 %	100 % 90 % 90 %	1 Unit	1 Unit	4 Jenis	4 Jenis	162 902 000	162 902.000		selainya pemeliharaan rutinnya lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	42.800 000
2	29	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilestarikan**			**Makassar**	**88 5 %**	**90 1 %**					**2.677 224 800**	**4 244 196 800**					**5.681 791.694**
2	29	02	2.0 1		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah**	**Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang**			**Makassar**	**88 5 %**	**90 1 %**					**1 244 364.000**	**1 820.471.300**					**1 804 793 113**
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilestarikan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan,	Terfasilitasinya dengan baik Objek Pemajuan Kebudayaan	Makassar	55.5 %	55.5 %	25 Objek	25 Objek	25 Objek	25 Objek	**1 148.488.000**	**1 536.219.200**		Bertambah Karena adanya Kegiatan Baru yaitu Data Pemuda	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan	25 Objek	1.272.536.935
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prosesa Kebudayaan	Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilestarikan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Prosesa Kebudayaan	Terfasilitasinya dengan baik Objek Pemajuan Kebudayaan	Makassar	55.5 %	55.5 %	350 Orang	350 Orang	25 Objek	25 Objek	**87 954.000**	**84.252.000**		berkurang karena anggaran lain lainya di alihkan ke sub pelindungan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prosesa Kebudayaan	350 Orang	514.208.177
2	28	02	2.0 3		**Pelestarian Kawasan Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah**	**Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang**			**Makassar**	**88 5 %**	**88.5 %**					1 405 967.800	2.624.527 600					**1 041 794.145**
2	22	02	2 02	0001	Pelindungan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilestarikan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan	terfasilitasinya Kearifan Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Kota Makassar yang Dilestarikan	Makassar	55.5 %	55.5 %	5 Objek	5 Objek	26 Objek	25 Objek	1 052 558.800	2.159.521 600		Bertambah Karena adanya kegiatan baru atau heder kegiatan baru	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	1.317 591 824
2	23	02	2 02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Prosesa Tradisional	Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Prosesa Tradisional	terfasilitasinya Kearifan Tradisional Yang Masyarakat Pelaku-nya Dalam Kota Makassar yang Dilestarikan	Makassar	55.5 %	55.5 %	30 Laporan	30 Laporan	25 Objek	25 Objek	373.409 000	464 706.000		bertambah karena adanya penambahan antara Seni	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga, dan Prosesa Tradisional	30 Laporan	510.261.477
2	29	02	2.0 3		**Pembinaan Lembaga Adat yang Pengurusnya dalam Daerah**	**Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang**			**Makassar**	**88 5 %**	**88.8 %**					26.893 000	0					**173 196.375**
2	23	02	2 03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilestarikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Tersedianya Adanya	terfasilitasinya Lembaga Adat yang Pengurusnya Dalam Kota Makassar yang	Makassar	56.5 %	55.5 %	1 Unit	1 Unit	1 Lembaga	1 Lembaga	**26 893 000**	0,00		Berkurang Karena anggarannya di alihkan ke sub kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Unit	173 196 375
2	23	03			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI TRADISIONAL**	**Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya**			**Makassar**	**4 Festival**	**4 Festival**					**4 282 042 000**	**4 258.416.000**					**758.877 262**

2	20	03	2.01		Pembinaan Generasi Muda Masyarakat Pelestarian dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya			Makassar	4 Festival	4 Festival					4 282.042.000	4.258 416.000					769 872 368
2	20	03	2.01	0001	Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pembinaan dan Pelatihan	Terlaksananya pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kab/kota	Makassar	4 Festival	4 Festival	275 Orang	275 Orang	275 Orang	275 Orang	138.338.000	119 944.000			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pembinaan dan Pelatihan (Orang/tahun) Kompetensinya	275 Orang	300.660 329
					Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kearifan Tradisional	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	Jumlah Lembaga Kearifan Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kab/kota	Makassar	4 Festival	4 Festival	15 Lembaga	15 Lembaga	275 Orang	275 Orang	4 142 722.000	4 138 472.000			Jumlah Lembaga Kearifan Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Lembaga	483.269.042
2	20	04			**PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA**	**Pemanfaatan Sejarah Lokal Yang Dilestarikan**			**Makassar**	**100 %**	**100 %**					807 556.760	667 024 760					**969.881.010**
2	22	04	2.01		**Pembinaan Sejarah lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemanfaatan Sejarah Lokal Yang Dilestarikan**		**Terlaksananya Sejarah Lokal Kota Makassar yang Dibina**	**Makassar**	**100 %**	**100 %**					807.556.760	667 024 760					**727.081.010**
2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Sejarah Lokal Yang Dilestarikan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Prioritas yang Ditingkatkan	Terlaksanya Sejarah Lokal Kota Makassar yang Dibina	Makassar	100 %	100 %	17 Orang	17 Orang	7 Objek	7 Objek	333.179 280	296 847 280			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Prioritas yang Ditingkatkan	17 Orang	312 167 115
2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Pemanfaatan Sejarah Lokal Yang Dilestarikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Terlaksanya Sejarah Lokal Kota Makassar yang Dibina	Makassar	100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	7 Objek	7 Objek	158 032 000	185.032.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	6 Unit	454.069 187
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Pemanfaatan Sejarah Lokal Yang Dilestarikan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Terfasilitasinya Sejarah Lokal Kota Makassar yang Dibina	Makassar	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	7 Objek	7 Objek	276.345 480	181 145.480			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	161.864.691
2	22	05			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Pelestarian Cagar Budaya Yang Dilestarikan. Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu**			**Makassar**	**98 7%**	**98 7%**					919.291 168	861 487 168					**893 483 784**
2	22	05	2.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Pelestarian Cagar Budaya Yang Dilestarikan n Jumlah Cagar Budaya**			**Makassar**	**98 7%**	**98 7%**					382 142 640	315.462 640					**466.614 628**
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Pelestarian Cagar Budaya Yang Dilestarikan n Jumlah Cagar Budaya Yang	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Terlaksananya pendaftaran objek diduga cagar budaya Terlaksananya penetapan cagar budaya	Makassar	98 7%	98 7%	33 Objek	33 Objek	33 Objek	33 Objek	278 905.000	245.225.000		Adanya Pergeseran anggaran dan sub kegiatan	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	33 Objek	216 253.628
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Pelestarian Cagar Budaya Yang Dilestarikan n Jumlah Cagar Budaya Yang	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Terlaksananya pendaftaran objek diduga cagar budaya Terlaksananya penetapan cagar budaya	Makassar	98 7%	98.7%	15 Objek	15 Objek	32 Objek	32 Objek	103.237 640	70.237 640			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	15 Objek	250 251.000
2	22	05	2.01		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Pelestarian Cagar Budaya Yang Dilestarikan n Jumlah Cagar Budaya Yang**			**Makassar**	**98.7%**	**98 7%**					520 822.000	633.098 000					**379.818.217**

2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan = Jumlah Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Terlaksananya cagar budaya yang di lindungi	Makassar	98.7%	98.7%	2 Objek	2 Objek	32 Objek	32 Objek	520 822.000	633 098.000		selanya pergeseran antar sub kegiatan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	2 Objek	276.516.517
2	**22**	**05**	**2.02 0**		**Penetapan Isu Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan = Jumlah Cagar Budaya Yang Dilakukan Secara Terpadu**			**Makassar**	**98.7%**	**98.7%**					16.926 528	12 926.528					**147.447.847**
2	22	05	2.02	0001	Penetapan Isu Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan = Jumlah Cagar Budaya Unit	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Penetapan Ke Luar Daerah Provinsi	Terlaksananya isu membawa Cagar Budaya Keluar Daerah Kab/Kota Dalam Satu Daerah	Makassar	98.7%	98.7%	6 Objek	6 Objek	6 Objek	6 Objek	16.926 528	12 926 528			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Penetapan ke Luar Daerah Provinsi	6 Objek	147 447.847
2	22	06			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase Koleksi Museum Kota Makassar Yang Tersusun Dengan Baik Persentase Kenaikan Jumlah Pengunjung Museum Kota Makassar**			**Makassar**	**84,5% 100 %**						**942.097.540**	**1 923.707 540**					**2 386.645 117**
2	**22**	**06**	**2.0 1**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kot a**	**Persentase Koleksi Museum Kota Makassar Yang Tersusun Dengan Baik Persentase Kenaikan Jumlah Pengunjung Museum Kota Makassar**			**Makassar**	**84,5% 100 %**	**84,5% 100 %**					942.097 540	1 923 707 540					**2 386.645 117**
2	22	06	2 01	0001	Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Persentase Koleksi Museum Kota Makassar Yang Tersusun Dengan Baik Persentase Kenaikan Jumlah Pengunjung Museum Kota Makassar	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Museum Kota Makassar yang Dikelola.	Makassar	84 5% 100 %	84 5% 100 %	56 Unit	56 Unit	1 Museum	1 Museum	325 924.300	589.124.100			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	56 Unit	446.267 150
2	22	06	2 01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Persentase Koleksi Museum Kota Makassar Yang Tersusun Dengan Baik Persentase Kenaikan Jumlah Pengunjung Museum Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Jumlah Museum Kota Makassar yang Dikelola.	Makassar	84 5% 100 %	84,5% 100 %	17 Orang	17 Orang	1 Museum	1 Museum	412 936.040	358.936.040		selanya pergeseran anggaran dari sub kelatan lain karena adanya penambahan untuk honor kegiatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	17 Orang	212 189.388
2	**22**	**06**	**2.01**	**0003**	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Persentase Koleksi Museum Kota Makassar Yang Tersusun Dengan Baik Persentase Kenaikan Jumlah Pengunjung Museum Kota Makassar	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Museum Kota Makassar yang Dikelola.	Makassar	84 5% 100 %	84,5% 100 %	4500 Orang	4500 Orang	1 Museum	1 Museum	355 717 200	827 123.200		berkurang karena adanya pergeseran anggaran ke sub kegiatan lain	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	4500 Orang	896.864 156
2	22	06	2 01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentase Koleksi Museum Kota Makassar Yang Tersusun Dengan Baik Persentase kenaikan Jumlah Pengunjung Museum Kota Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Jumlah Museum Kota Makassar yang Dikelola	Makassar	84 5% 100 %	84,5% 100 %	3 Unit	3 Unit	1 Museum	1 Museum	47 520.000	148.524.200			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit	314 849 452

BAB IV

PENUTUP

Disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2025 yang didalamnya mencakup tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaa Kota Makassar Tahun 2021-2026, ini dimaksudkan sebagai acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Kebudayaan pada tahun 2025.

Tindak lanjut dari permasalahan yang menjadi faktor penghambat sehingga realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tidak sesuai dengan target yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- Koordinasi yang intens ke Bagian ULP untuk penyelesaian E-katalog Versi 6

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kebudayaan Kota Makassar diharapkan agar seluruh staf dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Makassar, 26 Juli 2025
Makassar, 12 Agustus 2025

Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Makassar

Andi Patiware, S.STP, MM
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 198304022001121001



PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



RENCANA KERJA

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dipandang perlu untuk diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, dengan menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana di maksud Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan.:
1. Wakil Wali Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
7.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
9.	Dinas Sosial Kota Makassar
10.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
12.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
13.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Makassar
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
22.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
23.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
24.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
25.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
26.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
27.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
28.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
29.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar

31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
32.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
34.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
35.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
36.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
37.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
38.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
39.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
40.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
43.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
44.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
45.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
46.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
47.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
58.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
49.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
50.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar
51.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

WALIKOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik hingga kini masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi dari berbagai aspek pembangunan daerah. Kondisi ini perlu segera ditindaklanjuti secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan dimana diperlukan konsep sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi dan acuan perilaku. Salah satu aspek permasalahan pembangunan daerah dalam urusan pemerintahan penanaman modal yaitu penyediaan fasilitasi sarana dan prasarana bagi masyarakat untuk pelayanan berusaha perizinan dan non perizinan pada layanan terpadu satu pintu. Salah satu kewajiban penyelenggara pelayanan publik yakni memberikan fasilitas sarana, prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan publik.

Maka dari itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik yang tertera dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik didalam lingkup instansi pemerintah, maka Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai salah satu pedoman pelaksanaan kinerja instansi Perangkat Daerah dan mendukung seluruh aktivitas pelayanan publik yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

Substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama II Triwulan dengan memonitoring dan mengevaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran yang diperlukaan untuk mencapai Sasaran Strategis Perangkat Daerah periode pelaksanaan selama 1 (satu) tahun. Pelaksanaan kinerja program dan

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum memenuhi target kinerja dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor pendukung /pendorong, faktor penghambat serta rencana tindak lanjut perangkat daerah atas faktor-faktor tersebut. Perubahan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan pada periode Triwulan yang menunjukkan pencapaian kinerja Program Strategis Perangkat Daerah serta ketidaksesuaian pencapaian kinerja terhadap prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);
16. Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

18. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembar berita daerah kota makassar tahun 2025 Nomor 14).
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari dibuatnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (Satu) tahun dan mengakomodir perubahan-perubahan yang akan terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta perubahan teknis berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

Adapun tujuan dari perubahan rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

- Menyelaraskan Perubahan Rencana Kerja terhadap perubahan RKPD tahun 2025;
- Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025;
- Sebagai pedoman untuk menyusun KUPA dan PPAS.

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Penelahaahan Usulan Proram dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II

Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja. Evaluasi yang dilakukan adalah pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan dikaitkan dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam tahapan Rencana Strategis terdiri dari 5 (lima) program utama dan 1 (satu) program penunjang dan 12 jumlah seluruh kegiatan yang tersedia.

Program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2025, terdiri dari 5 program utama dan 1 program pendukung. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil Laporan Kinerja tahunan atau Evaluasi Rencana Kerja yang tertuang dalam tabel E-Monev yaitu:

Tabel 2.1
FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA
KOTA MAKASSAR (E.81)
PERIODE PELAKSANA : TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TAHUNAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
								I		II											
	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				22.778.643.631,0	21.889.184.935,0		3.040.173.813,0		4.410.931.188,0		7.451.105.001,0		34,04		7.451.105.001,0		14,94		
	2 1 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				22.778.643.631,0	21.889.184.935,0		3.040.173.813,0		4.410.931.188,0		7.451.105.001,0		34,04		7.451.105.001,0		14,94		
	2 1 8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				22.778.643.631,0	21.889.184.935,0		3.040.173.813,0		4.410.931.188,0		7.451.105.001,0		34,04		7.451.105.001,0		14,94		
	2 1 8 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90,0	19.205.438.199,0	16.365.184.660,0	18,0	2.745.000.813,0	10,0	3.759.481.705,0	28,0	6.504.481.516,0	31,11	38,75	28,0	6.504.481.516,0	31,11	15,91	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase tersedianya laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0			20,0		20,0		40,0		40,0		40,0		40,0			
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90,0			18,0		20,0		38,0		42,22		38,0		42,22			

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II											
									K	Rp (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	2	1 8	0 1	2 .03		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12,0	256 996 945,0	75 355.0 80,0	4,0	22 400 0 00 0	1 0	4.160.00 0,0	5,0	26.580.0 00 0	41, 67	35, 25	5,0	26 560 0 00 0	0 0	6,7 1		
	2	1 8	0 1	2 .03	0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	6,0	102 958. 333,0	47 110 0 00 0	3 0	22.400.0 00,0	0,0	2 645.00 0 0	3,0	25.045.0 00,0	50,0	53,1 6	3,0	25.045.0 00,0	0,0	11,7 1		
	2	1 8	0 1	2 01	0 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Doku men	1 0	26.479 4 13,0	5 788 00 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0 0			
	2	1 8	0 1	2 01	0 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Doku men	1,0	25.876.6 19,0	5 788.00 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	2	1 8	0 1	2 .01	0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Doku men	1,0	22 529 7 16,0	4.730.00 0,0	0,0	0,0	0,0	1 515.00 0 0	0,0	1.515 00 0,0	0,0	31,7 6	0,0	1.515 00 0,0	0,0	5 69		

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II											
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.		
	2	1 8	0 1	2 .01	0 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,0	21.958.285,0	4.729 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	2	1 8	0 1	2 .01	0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4,0	47 294 579,0	7 170 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	2	1 8	0 1	2 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,0	14 191 683.587,0	11 058 752.028,0	33,33	2.078.417 685,0	11,0	2 721 763 949,0	26,33	4.800.181 644,0	26,33	43,40	26,33	4.800.181 644,0	0,0	20,86		
	2	1 8	0 1	2 .02	0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	66,0	13.031.603.568,0	10 544 094.920,0	11,0	1 962 977.695,0	11,0	2 605 172 949,0	22 0	4.568 150.644,0	33,33	43,32	22 0	4.568.150 644,0	0,0	21 35		
	2	1 8	0 1	2 .02	0 002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,0	735 822 600,0	333 240 000 0	4 0	70.440.000,0	4,0	73.140,000,0	8,0	143 580 000,0	66,67	43,09	8,0	143.580.000,0	0,0	13,89		

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II											
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.		
	2	1 8	0 1	2 .02	0 003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,0	180.000.000,0	182 398 000,0	4,0	45 000 000,0	4,0	43.500.000,0	8,0	88 500.000,0	66 67	48,52	8 0	36 500.000,0	0,0	24 58		
	2	1 8	0 1	2 .02	0 005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,0	29 507 111,0		0,0		0,0		0 0		0,0		0,0		0,0				
	2	1 8	0 1	2 .02	0 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,0	204 750.308,0		0,0		0 0		0,0		0,0		0,0		0,0				
	2	1 8	0 1	2 05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			4,0	792 000 000 0	516.000.000,0	1,0	120 000 000,0	1,0	23.637.676,0	2,0	143 637 676,0	50,0	27,84	2,0	143.637.676,0	0,0	12,36		
	2	1 8	0 1	2 .05	0 009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	34,0	792 000 000,0	516 000 000,0	10,0	120 000.000,0	3,0	23 637 676,0	13,0	143 637 676 0	38 24	27,84	13,0	143.637 676,0	0,0	12,36		

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II											
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.		
	2	1 8	0 1	1 .06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,0	2 368.95 7.918,0	636 990 748,0	5,52	85.556.743,0	6,0	120.499 378,0	11,52	206.056 621,0	11,52	32,35	11,52	206 056 621,0	0,0	5,23		
	2	1 8	0 1	2 .06	0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2,0	19 556 383,0	4 800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	2	1 8	0 1	2 .06	0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8,0	842 018.584,0	85 441 240,0	1,0	5.727 000,0	1,0	7.830.000,0	2,0	13 557 000,0	25,0	15,87	2,0	13 557 000,0	0,0	1,15		
	2	1 8	0 1	2 .06	0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	15,0	52 476.000 0	52 476.000,0	0,0	0,0	0,0	20.812 500,0	0,0	20 812 500 0	0,0	39 66	0,0	20 812 500 0	0,0	26,01		
	2	1 8	0 1	2 .06	0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2 0	92 540 800 0	89 907 500,0	0,0	0,0	0,0	22.500.500,0	0,0	22 500 500,0	0,0	25,03	0,0	22 500 500,0	0,0	12,45		

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II											
									K	Rp. (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp		
	2	1 E	0 1	2 .06	0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,0	264.491 151,0	1 480.00 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	2	1 B	0 1	2 06	0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	5 0	33.600.0 00,0	33.600.0 00,0	0,0	890.000 0	0,0	1.335 00 0,0	0,0	2.225 00 0,0	0,0	6,62	0 0	2 225.00 0,0	0,0	6,62		
	2	1 B	0 1	2 .06	0 006	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	15,0	84 375.0 00,0	29 160.0 00,0	1,0	375.000, 0	0,0	0,0	1,0	975.000, 0	6,67	3,32	1,0	375 000, 0	0,0	0,93		
	2	1 A	0 1	2 .06	0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	28,0	795 000 000,0	133 934 000,0	7,0	61.575.4 37,0	4,0	58.895 8 36,0	11 0	120 471 273,0	39,2 9	89 9 5	11 0	120 471 273,0	0,0	11,2 1		
	2	1 A	0 1	2 .06	0 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12,0	103 500. 000,0	103.500. 000,0	0 0	16 389 3 06,0	0,0	9.126.04 2,0	0,0	25 515 3 48,0	0,0	24 6 5	0,0	25.515 3 48,0	0,0	24,6 5		

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II											
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.		
	2	1 3	0 1	2 .06	0 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12,0	81.000 000,0	102 500 000,0	0,0	0 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	2	1 6	0 1	2 .07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			182, 0	239 260 000,0		0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0			
	2	1 4	0 1	2 07	0 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20,0	238 260. 000,0		0,0		0,0		0 0			0,0		0 0		0,0			
	2	1 4	0 1	2 07	0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	182 0			0 0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0			
	2	1 4	0 1	2 .08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			30,0	274 788. 080 0	3 634.66 4.108,0	16, 67	417 234 888,0	17 0	857.880 948,0	33, 67	1.275.03 3 756,0	112 ,29	35, 08	33, 67	1 275 02 3.756,0	0,0	77, 51		

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II											
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	2	1 6	0 1	2 08	0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 0	20.000.000,0	460 593 400,0	4,0	106.602 600 0	2.0	97 500.000,0	6,0	204 102 600,0	50-0	44,31	6,0	204. 102. 600,0	0,0	36,45		
	2	1 6	0 1	2 08	0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Dipelihara	Laporan	12 0	79.200.000,0	108 244 500,0	2,0	10.625 1 08 0	3 0	9.126.948,0	5,0	19 752 056,0	41,67	18,25	5,0	19.752 056,0	0,0	7,65		
	2	1 6	0 1	2 08	0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6,0	175 500 000,0	3.065.82 6.000,0	1,0	299 907 100,0	2,0	751 262 000,0	3,0	1.051 16 9 100,0	50,0	34,29	3 0	1.051.16 9.100,0	0,0	127, 18		
	2	1 0	0 1	2 09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**12,0**	**1.082.23 9 749,0**	**442 436 800,0**	**5 6 5**	**21.500.5 67,0**	**6,0**	**31 452.2 52,0**	**11, 65**	**52.952.8 19,0**	**97, 08**	**21, 97**	**11, 66**	**52 952 8 19,0**	**0,0**	**3,7 7**		
	2	1 6	0 1	2 09	0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,0	60 921 3 60 0	43.630 0 00,0	1 0	3.550.40 0,0	0,0	5 492 90 0,0	1,0	13 043 3 00,0	100, 0	29,9 0	1,0	13.043.3 00,0	0,0	12 4 8		

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II											
	K	Rp. (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.										
	2	1 8	0 1	2 .09	0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	59,0	930.418. 389,0	325 006 000 0	10. 0	17 950 1 67,0	8.0	21 959 3 52,0	18 0	39.909 5 19,0	30,5 1	12,2 3	18 0	39.909 5 19,0	0,0	3,83		
	2	1 8	0 1	2 .09	0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	43,0	90 900 0 00 0	73 800 0 00 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	2	1 8	0 1			RATA RATA CAPAIAN KINERJA (%)												37, 78	44, 67			37, 78	17, 84		
	2	1 8	0 1			PREDIKAT KINERJA												SAN GAT KEND AH	SAN GAT KEND AH			SAN GAT KEND AH	SAN GAT KEND AH		
	2	1 8	0 2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi Di Kota Makassar	%	100, 0	431 838. 130,0	608 436. 300,0	8,3 3	58 864.5 00,0	5,0	46.049 7 00,0	13, 33	96 914 2 00,0	13, 33	16, 14	13, 33	96.914.2 00,0	13, 33	9 8 2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

PERUBAHAN

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN JANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II											
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp	K	Rp								
	2	1 E	D 2	2 .01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2,0	176.750. 338,0	214.284. 000,0	0,0	8.492.00 0 0	0,0	0,0	0,0	8.492.00 0,0	0,0	3,9 6	0,0	8.492.00 0,0	0,0	1,4 7		
	2	1 E	D 2	2 .01	0 001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	2,0	65.399 6 49,0	11 445.0 00,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0				
	2	1 E	D 2	2 .01	0 004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Dokumen	12,0	111 330 669,0	202 839 000,0	1,0	8.492 00 0,0	0,0	0,0	1,0	8 492 00 0,0	8,33	4 19	1,0	8 492.00 0,0	0 0	1,81		
	2	1 E	B 2	2 .02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			1,0	255 107 792,0	386 152 300,0	0,0	42.372.5 00,0	0,0	46.049.7 00,0	0,0	88.422.2 00,0	0,0	22, 90	0,0	88.422 2 00,0	0,0	21 64		
	2	1 E	D 2	2 .02	0 004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1 0	255.107 792 0	386.152. 300 0	0,0	42 372 5 00,0	0,0	46.049 7 00,0	0,0	88.422 2 00,0	0,0	22,9 0	0,0	88.422.2 00,0	0,0	21 6 4		

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II											
									K	Rp. (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp		
	2	1 B	0 2			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												13,33	21,51			13,33	20,90		
	2	1 B	0 2			PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	1 B	0 3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN)	Investor	300,0	295.479.000,0	2.202.449.920,0	0,0	4.545.000,0	0,0	125.591.785,0	0,0	130.136.785,0	0,0	5,91	28 0,0	130.136.785,0	0.0	7,99	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
							Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA)	Juta US$	90,0			0,0		0,0		0,0		0,0		28,40		0.0			
							Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA)	Investor	100,0			0,0		0,0		0,0		0,0		90 0		0,0			
							Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	Triliun Rp	2,30			0,0		0,0		0,0		0,0		1,59		0,0			
	2	1 B	0 3	2 01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			3,0	295.479.000,0	2.202.449.920,0	0,0	4.545.000,0	0,0	125.591.785,0	0,0	130.136.785,0	0,0	5,91	0,0	130.136.785,0	0.0	7,99		

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-2 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II											
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	2	1 8	0 3	2 01	0 002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1 0	243.626.500,0	1 703 412.640,0	0,0	2 760 000,0	0,0	75 581 785,0	0,0	78.351 785,0	0,0	4,60	0,0	78.351 785,0	0,0	5,82		
	2	1 8	0 3	2 01	0 003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	2 0	53.852 300,0	499.037 280,0	0,0	1 785.000,0	0,0	50.000.000,0	0,0	51 785.000,0	0,0	10,33	0,0	51 785.000,0	0,0	18,33		
	2	1 8	0 3			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												0,0	6,84			0,0	7,98		
	2	1 8	0 3			PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	1 8	0 4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan	%	100,0	1.103.143.541,0	1.415.915.400,0	8,75	186 145 800,0	5,0	219.830.100,0	8,75	406 075 180,0	8 75	28,68	8,75	406.075.100,0	8,75	13,91	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PEMANGKU GUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II											
									K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.		
	2	1 8	0 4	2 01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			100 0	1.103.14 9 541,0	1.415.91 5 400 0	0,0	186.245. 000,0	1,0	219 830 180,0	1,0	406.075. 100,0	1,0	28, 68	1,0	406.075. 100,0	0,0	33, 91		
	2	1 8	0 4	2 01	0 005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	12,0	53.124 5 00,0	248 153 000,0	0,0	0,0	4,0	22 388.5 00 0	4,0	22.388 5 00,0	33,3 3	9 02	4,0	22.388.5 00,0	0,0	6,48		
	2	1 8	0 4	2 01	0 006	Penyelenggaran Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	25.0 00,0	128.425. 027 0	1.013.55 8.400,0	2 5 00,0	183.000. 000,0	2 5 00,0	197 441 600,0	5.0 00,0	380.441 600,0	20,0	37,5 4	5.0 00,0	380 441 600,0	0,0	26.6 0		
	2	1 8	0 4	2 01	0 007	Penyelenggaraan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	100. 0	519 639 110 0	150 204 000,0	5,0	3 245.00 0,0	0,0	0,0	5,0	3.245 00 0,0	5,0	2,16	5 0	3 245.00 0,0	0,0	0 44		

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II													
	K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.										
	2	1 6	0 4	2 .01	0 008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanaman berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang menerapkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Untuk Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dan Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	50,0	401 960. 904,0	4 000 00 0,0	0 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0					
	2	1 8	0 4			RATA RATA CAPAIAN KINERJA (%)												8,7 5	33. 33			8,7 5	16, 14				
	2	1 6	0 4			PREDIKAT KINERJA												SAN GAT REND AH	SAN GAT REND AH			SAN GAT REND AH	SAN GAT REND AH				
	2	1 8	0 5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miyar Rupiah)	Triliun Rp	2,30	1.547 56 1 361 0	478.542 080,0	0,0 3	7 108.00 0,0	0,0 3	7.382 50 0,0	0,0 6	14.500.5 00,0	2,6 1	3,0 3	2,1 6	14 500.5 00,0	2,3 1	0,6 3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II											
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp		
	2	1 8	0 5	2 01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			100 0	1 547 58 1 361,0	472 542 000,0	0,0	7 188 00 0,0	0,0	7.392.50 0,0	0,0	14 500 5 00,0	0,0	3,0 3	0,0	14 500 5 00,0	0,0	0,6 3		
	2	1 8	0 5	2 .01	0 004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiat an Usaha	12 0	672 343. 265 0	119.165. 000,0	0,0	1.080 00 0,0	1,0	2 862 50 0,0	1,0	3.942 50 0,0	8,33	3,33	1,0	3 942 50 0,0	0,0	0 52		
	2	1 8	0 5	2 .01	0 005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	200, 0	233 286. 296,0	249 372. 000,0	2,0	1.835 00 0,0	0,0	0,0	2,0	1.835,00 0,0	1 0	0,74	2,0	1 835 00 0,0	0,0	0,31		
	2	1 8	0 5	2 .01	0 006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Telah Diperiksa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dan Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiat an Usaha	200, 0	642 931. 300,0	310 005 000,0	6,0	4.193.00 0,0	0,0	4 530.00 0,0	6 0	8.723.00 0,0	3,0	7,93	6,0	8 723.00 0.0	0,0	0,90		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
								I		II											
					K	Rp (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp		
	2 1 0 5	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												2,61	4,34			2,31	0,89		
	2 1 0 5	PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2 1 0 5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	100,0	195 177 400,0	826 654 855,0	8,0	46.401 500,0	10,0	252.665 400,0	18,0	299.066. 900,0	18	36,18	18,0	299.066 900,0	18.0	33,13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2 1 0 5 2 01	Pengelolaan Data dan Informasi Pertanian dan Non Pertanian yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100,0	195.177. 400,0	826 654. 855,0	8,0	46.401 500,0	5,0	252.665. 400,0	5,0	299 066 900,0	5,0	36,18	5,0	299 066 900,0	0,0	33,13		

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II											
									K	Rp (RENJA)	Rp. (BPA)	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.		
	2	1.0	0.6	2.01	0.002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	12,0	195 177 400,0	876 654 055,0	1,0	46.401 500	4 0	252 665 400,0	5,0	299 066 900,0	41,67	36,11	5,0	299 066 900,0	0,0	33 13		
	2	1.K	0.6			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											18,0	37,63			18,11	54,46		
	2	1.B	0.6			PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
						RATA RATA CAPAIAN KINERJA OPD (%)											19,14	34,04						
						PREDIKAT KINERJA OPD											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH						

PERUBAHAN

Urusan Penanaman Modal diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar dengan 5 Program Utama dan 1 Program Penunjang dengan Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 pada triwulan II menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja output sebesar **34,04%** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 7,451,105,001.00,-** atau **34,04%** dari total rencana anggaran Pokok sebesar **Rp.21.889.184.335,-**. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan Penanaman Modal

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program pengembangan iklim penanaman modal memiliki keluaran kegiatan untuk mengukur kenaikan/penurunan nilai investasi PMA dan PMDN serta rata-rata capaian jumlah investor PMA dan PMDN di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Indikator kinerja program pengembangan iklim penanaman modal terdiri dari Realisasi Total terhadap Target investasi (Nilai Investasi) Realisasi Total Terhadap Target Investasi (Jumlah
Investor). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam urusan penanaman modal melalui program pengembangan iklim penanaman modal ini terdapat 2 (Dua) kegiatan dan (Tiga) Sub kegiatan sebagai berikut:

1) **Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota**

   a. **Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**

      Kegiatan ini memiliki *output* jumlah kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal dan kemudahan penanaman modal dengan target kinerja 2 Kebijakan. Sub kegiatan ini menetapkan kebijakan daerah terkait pemberian fasilitas/insentif terhadap pelaku usaha PMA/PMDN di Kota Makassar. Sehingga realisai anggaran pada sub kegiatan ini sampai dengan triwulan II adalah Rp 0 (0%) dari alokasi anggaran senilai Rp 11.445.000'-

   b. **Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharmonisasi terkait perizinan Berusaha Berbasis Resiko**

      Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perizinan berusaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar perlu menerapkan kebijakan berbasis risiko yang terintegrasi dan harmonis. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, mengoptimalkan pengawasan, dan mendorong iklim investasi yang sehat. Realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini yaitu senilai Rp 8.492.000,- (4,19%) dari alokasi anggaran senilai Rp 202.839.000 ,-

2) **Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**

   a. **Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota**

      Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota memberikan gambaran serta informasi mengenai data perkembangan

investasi dan potensi investasi yang ada di setiap kecamatan. Indikator *output* dari kegiatan ini adalah tersedianya data potensi investasi target 0 laporan potensi investasi realisasi fisik 0 laporan (0%), alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 386.152.300,00 dengan realisasi anggaran Rp. 88.422.200,00 atau 22,90%.

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{0\ \text{laporan}}{15\ \text{laporan}} x\ 100 = 0\%$$

Realisasi anggaran program pengembangan iklim penanaman modal hingga Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 96.914.200,00- atau 16,14% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 600.436.300,-. Persentase capaian kinerja program pengembangan iklim penanaman modal untuk memenuhi 4 indikator *output* program pada Tahun 2025 yaitu 0% dari target 100%. sedangkan pelaksanaan pemenuhan penyusunan peta potensi investasi yang disediakan persentase capaian kinerja 0% dari target.

a. **Faktor-faktor pendorong** pelaksanaan program Pengembangan Iklim penanaman modal sebagai berikut:
   1. Tersedianya anggaran penyusunan peta potensi;
   2. Terlaksananya kegiatan Klinik LKPM dan aplikasi Sipana'mamo;
   3. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan.
b. **Faktor-faktor penghambat** pelaksanaan program Pengembangan Iklim penanaman modal sebagai berikut:
   1. Belum disusunnya regulasi/ kebijakan terkait pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal dan kemudahan investasi di Kota Makassar;
   2. Belum tersedianya peta potensi investasi secara digital;
   3. Kegiatan pengawasan perizinan belum seluruhnya diikuti oleh dinas teknis terkait;
   4. Terlambatnya penerbitan SK (surat Keputusan) Kegiatan di bagian hukum.
c. **Tindak Lanjut:**
   1. Penyusunan peraturan daerah/peraturan walikota tentang pemberian fasilitasi/insentif penanaman modal bagi PMDN di Kota Makassar;
   2. Perancangan anggaran penyusunan Perda tentang penanaman modal dan strategi promosi investasi daerah untuk menarik daya tarik calon investor untuk mengetahui potensi investasi di Kota Makassar;
   3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis/ Diklat Penanaman Modal baik melalui fasilitasi BKPM ataupun pelaksanaan mandiri oleh DPMPTSP Kota Makassar;
   4. Meningkatkan koordinasi antara bagian hukum, dinas teknis, dan sekretariat daerah.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Untuk mewujudkan peningkatan investasi di Kota Makassar, tentunya pelaksanaan promosi penanaman modal menjadi salah satu program utama yang harus dilaksanakan untuk mendukung program pengembangan iklim penanaman modal dalam meningkatkan jumlah investor PMA/PMDN dan nilai investasi PMA/PMDN dalam lima (5) tahun kedepan. Pelaksanaan promosi investasi dilakukan dalam dua (2) tahap yakni penyusunan strategi promosi penanaman modal dan penyelenggaraan promosi penanaman modal.

Penyusunan strategi promosi dimaksudkan untuk menyusun rencana strategi investasi apa saja yang dibutuhkan untuk membangun Kota Makassar ***Unggul Inklusif, Aman dan Berkelanjutan***. terutama tahapan pelaksanaan mendorong peningkatan minat investasi calon investor PMA dan PMDN dan menyusun analisis negara-negara apa saja yang mendukung potensi investasi pemerintah daerah. Penyediaan sarana promosi dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan promosi investasi serta kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan promosi penanaman modal di Kota Makassar. Untuk melaksanakan seluruh rangkaian tahapan diatas, program promosi penanaman modal menyusun 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan pendukung sebagai berikut:

1) **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator output jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah Kota Makassar yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal memiliki indikator *output* jumlah pelaksanaan strategi penanaman modal yang disusun. Strategi promosi penanaman modal bertujuan untuk mendorong peningkatan promosi investasi daerah melalui pelaksanaan kegiatan Dewan Investasi Kota Makassar. Dewan Investasi Kota Makassar merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk memonitoring dan mengendalikan kenaikan/penurunan investasi PMA/PMDN di Kota Makassar.

a. **Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**

Memiliki indikator *output* jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah Kota Makassar yang dilaksanakan dan jumlah pelaksanaan promosi media cetak, digital dan elektronik. Kegiatan promosi penanaman modal menyelenggarakan *event* pameran yang diikuti sebanyak 5 kegiatan dan pelaksanaan promosi melalui media cetak dan media online sebanyak 9 laporan. Sub kegiatan ini memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 1.703.412.640,- dengan realisasi anggaran senilai Rp 78.351.785,- (4,60%) dengan persentase capaian kinerja sebagai berikut :

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{0\ \text{Dokumen}}{1\ \text{Dokumen}} x\ 100 = 0\%$$

b. **Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota**

Merupakan langkah awal yang penting dalam mendorong peningkatan investasi daerah. Keluaran utama dari sub kegiatan ini adalah satu dokumen strategi promosi penanaman modal yang memuat arah kebijakan, sasaran promosi, serta metode pendekatan yang akan digunakan dalam menarik investor, kegiatan ini juga dapat mencakup penyusunan materi promosi pendukung seperti brosur, profil investasi, dan video promosi. Sub kegiatan ini memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 499.037.280,- dengan realisasi anggaran senilai Rp 51.785.000,- (10,38%) dengan persentase capaian kinerja sebagai berikut :

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{0\ \text{Dokumen}}{1\ \text{Dokumen}} x\ 100 = 0\%$$

Realisasi anggaran program promosi penanaman modal hingga Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 130.136.785,- atau 5,91% dari alokasi anggaran sebesar Rp 2.525.497.920,-.

Pelaksanaan promosi investasi daerah dilaksanakan dengan berbagai kegiatan promosi dan pengembangan investasi. Penyelenggaraan promosi investasi daerah didukung dengan adanya data pilah potensi investasi yang ada di Kota Makassar mencakup jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang berinvestasi di Kota Makassar dan jumlah investasi PMA dan PMDN yang terdata dalam laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) Kota Makassar. Pengertian data potensi investasi adalah data yang menginformasikan ketersediaan sumber daya yang disediakan oleh pemerintah daerah terutama potensi-potensi yang ada di 15 kecamatan Kota Makassar, namun hingga saat ini belum optimalnya potensi-potensi yang dapat dikelola secara lebih detail yang dapat disediakan sebagai informasi promosi kepada calon investor. Sedangkan data peluang investasi adalah data potensi investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor. Dalam data peluang investasi tersirat komitmen daerah dalam mendukung pengembangan peluang investasi tersebut. Dalam konsep pemasaran bauran, promosi adalah satu dari empat bauran pemasaran yaitu *product* (produk), *price* (harga), *place* (tempat), dan *promotion* (promosi). Dalam konsep pemasaran bauran tersebut, keberhasilan promosi investasi dipengaruhi oleh penguatan informasi tentang produk, harga/biaya, serta penentuan secara cerdas dan tepat terhadap target pasar dari sisi sasaran investor dari dalam maupun luar negeri dan pemetaan secara akurat lokasi potensi dan peluang investasi yang ditawarkan.

Selain tersedianya data potensi investasi, pengembangan investasi dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang belum dioptimalkan oleh pemerintah daerah sehingga masih kurangnya penyebaran informasi terkait peluang investasi yang ada di Kota Makassar. Penyebaran informasi secara digital juga memudahkan bagi pemerintah daerah terutama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar sebagai instansi urusan pemerintahan penanaman modal agar calon investor dapat menerima informasi potensi investasi di Kota Makassar ke beberapa benua. Penjabaran pada Makassar Investment Forum (MIF) untuk mewujudkan **program prioritas** Kepala Daerah.

a. **Faktor-faktor pendukung** pelaksanaan program promosi penanaman modal sebagai berikut:
    1. Adanya rekomendasi dari Kemenperin untuk mendorong perluasan Kawasan Industri Makassar (KIMA) untuk memberikan akses kepada investor PMA/PMDN yang akan berinvestasi di Kota Makassar;
    2. Tersedianya tenaga pendamping fasilitasi penanaman modal.
b. **Faktor-faktor penghambat** pelaksanaan program promosi penanaman modal sebagai berikut :
    1. Kegiatan Makassar Invesment Forum (MIF) akan dilaksakana pada akhir triwulan III tahun 2025 mengikuti dengan HUT Kota Makassar.

wawancara langsung kepada pemohon. Data hasil pengisian survey akan menghasilkan indeks atau nilai pemenuhan kepuasan masyarakat dengan 9 unsur penilaian sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.Survey Kepuasan Masyarakat mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan juga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pengembangan pelayanan publik.

Indikator tingkat kepuasan masyarakat atas layanan DPMPTSP merupakan wujud dari penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagai salah satu instansi penyelenggaraan pelayanan publik diwajibkan untuk terus memperbaiki fasilitas pelayanan baik sarana maupun sarana pelayanan publik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan PTSP. Salah satu kegiatan pendukung program peningkatan pelayanan perizinan adalah pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) dengan penentuan indikator dan unit variabel pertanyaan kuesionerdalam survey yang mengacu kepada standar penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana ditetapkan dalamPeraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentangPedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan sehingga terdapat 1 nilai indeks kepuasan masyarakat pada semester 2. Nilai indeks ini menjadi acuan untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan tabel indeks kepuasan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.Target nilai indeks kepuasan masyarakat Tahun 2021 yaitu 88 sedangkan realisasi nilai indeks kepuasan masyarakat yaitu 88,33 dengan kategori Sangat Baik.

Untuk melaksanakan seluruh rangkaian tahapan diatas, program pelayanan penanaman modal menyusun 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan pendukung sebagai berikut:

1) **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

   a. **Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Secara dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**

      Memiliki indikator *output* jumlah pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal yang dilayani oleh perangkat daerah. Pemenuhan komitmen yang diberikan berupa rekomendasi atau standar sertifikasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan pengefektifan perizinan terutama perizinan berusaha di OSS serta perizinan dan non perizinan yang diterbitkan di DPMPTSP Kota Makassar. Jumlah pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik yang disediakan dengan capaian kinerja 11.430 Izin dari target 21.000. Penyediaan pelayanan terpadu menyediakan layanan perizinan berusaha OSS dan perizinan Non OSS diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini senilai Rp 380.441.600,00 (26,60%) dengan alokasi anggaran senilai Rp 1.013.558.400,00. Berikut realisasi capaian kinerja yaitu :

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{11.430\ \text{Izin}}{21.000\ \text{Izin}} x\ 100 = 54{,}43\%$$

b. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

Memiliki indikator *output* jumlah pelaksanaan standarisasi operasional prosedur dengan target 1 Paket, jumlah pelaksanaan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan target 1 Paket, jumlah pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 1 Paket dan jumlah pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan dengan target 1.000 Izin. Pemenuhan komitmen yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah salah satu bentuk pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas kegiatan usaha dengan adanya peninjauan langsung kegiatan usaha sesuai dengan perizinan berusaha dan penindakan dilakukan untuk menegakkan peraturan perizinan berusaha yang dianggap *illegal* atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemenuhan atas kewajiban pelaku usaha selain melaporkan kegiatan pada pelaporan LKPM, juga memenuhi efektivitas perizinan berusaha seperti pemenuhan rekomendasi atau sertifikat standar yang diperlukan bagi perizinan berusaha dengan risiko menengah-tinggi. Untuk itu, target kinerja yang akan dipenuhi terkait jumlah penerbitan sertifikat standar atau Izin Operasional sebagai salah satu pencapaian atas pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan di Tahun 2025. Alokasi anggaran sub kegiatan ini senilai Rp. 0,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp 4.000.000,00 atau 0%. Berikut capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu :

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{0\ \text{Kegiatan Usaha}}{50\ \text{Kegiatan Usaha}} x\ 100 = 0\%$$

c. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

Memiliki indikator *output* jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan yang disediakan. Layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan telah dibuatkan loket tersendiri untuk melayani pemohon yang memiliki permasalahan terkait perizinan dan non perizinan dan prosedur layanan lainnya. Tim layanan informasi dan pengaduan bertugas membuat laporan setiap bulannya untuk mengetahui jumlah pemohon yang mendapatkan layanan informasi dan layanan pengaduan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga menjadi tolak ukur indicator penilaian kepuasan masyarakat terhadap layanan DPMPTSP. Target kinerja sub kegiatan yaitu jumlah layanan konsultasi perizinan dan non

perizinan dengan target 200 layanan. Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini senilai Rp 150.204,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp 3.245.000,00 atau 2,16%. Berikut capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu :

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{26\ \text{Layanan}}{200\ \text{Layanan}} x\ 100 = 13\%$$

d. Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah

Memiliki indicator *output* yaitu jumlah pelaksanaan diseminasi peraturan dan kebijakan OSS-RBA terhadap perizinan berusaha dengan target 12 kegiatan, jumlah pelaksanaan mekanisme pelaksanaan OSS-RBA dan pengintegrasian data dengan target 9 kegiatan dan jumlah pemberian fasilitas/insentif layanan mandiri dengan target 4 kegiatan. Sub kegiatan ini melaksanakan kegiatan diseminasi dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha terutama UMKM terkait kebijakan-kebijakan daerah dalam urusan penyelenggaraan perizinan berusaha di Kota Makassar serta memberikan pendampingan bagi pelaku usaha UMKM dalam menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui system OSS. Pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha UMKM yang hingga saat ini belum melakukan *updating* terhadap administrasi legalitas usaha untuk berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar yang akan didampingi oleh Tenaga Pendamping layanan Mandiri OSS tersertifikasi oleh BKPM/Kementrian Investasi juga memberikan kemudahan berusaha bagi setiap pelaku usaha UMKM yang akan mengembangkan bidang usahanya. Alokasi anggaran perubahan untuk sub kegiatan ini senilai Rp 248.153.000,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp 22.388.500,00 atau 9,02%. Berikut capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu:

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{0\ \text{Dokumen}}{12\ \text{Kegiatan}} x\ 100 = 100\%$$

Realisasi anggaran program pelayanan penanaman modal hingga Triwulan II Tahun 2025 senilai Rp. 352.075.100,00- atau 24,87 % dari alokasi anggaran senilai Rp 1.495.715.400,00 Persentase capaian kinerja program pelayanan penanaman modal untuk memenuhi indikator *output* program pada Tahun 2025 yaitu 24,87 % dari target 100% hingga Triwulan II.

Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan perizinan berdasarkan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, Bagian keempat, pasal 28 tentang waktu. Jangka ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan yang dimaksud jika seluruh administrasi dinyatakan lengkap dan benar dikecualikan bagi dokumen yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan peraturan. Capaian kinerja terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan yang dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan standarisasi operasional prosedur dan standar pelayanan yang berlaku pada Tahun 2024 sebanyak 59.945 izin yang telah terbit dari target 21.000 izin, dan jumlah perizinan pada tahun 2025 yang telah terbit 22.502 dari target 25.000 izin . Peningkatan atas realisasi jumlah izin yang terbit sesuai dengan waktu penyelesaian pelayanan juga didukung dengan tersedianya tenaga pendamping

layanan OSS, terbentuknya Satgas (Satuan Petugas) Lontara, loket layanan informasi dan penanganan pengaduan serta kegiatan diseminasi dan bimbingan teknis bagi masyarakat terutama pelaku usaha UMKM di lorong. Pencapaian ini tidak lepas dari peran koordinator pelaksanaan kegiatan dan kerja sama Tim Teknis PTSP dalam menyelenggarakan perizinan berusaha di Kota Makassar dan dipantau langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar.

Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan perizinan juga memberikan dampak terhadap kepuasan masyarakat atas layanan di DPMPTSP. Pelaksanaan survey bertujuan untuk mengetahui gambaran pemberian layanan oleh DPMPTSP apakah sesuai dengan standarisasi prosedur ataukah tidak. Survey yang dilaksanakan dapat berupa pengisian kuisioner maupun wawancara langsung kepada pemohon. Data hasil pengisian survey akan menghasilkan indeks atau nilai pemenuhan kepuasan masyarakat dengan 9 unsur penilaian sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Survey Kepuasan Masyarakat mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan juga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pengembangan pelayanan publik.

Indikator tingkat kepuasan masyarakat atas layanan DPMPTSP merupakan wujud dari penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagai salah satu instansi penyelenggaraan pelayanan publik diwajibkan untuk terus memperbaiki fasilitas pelayanan baik sarana maupun sarana pelayanan publik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan DPMPTSP. Salah satu kegiatan pendukung program peningkatan pelayanan perizinan adalah pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) dengan penentuan indikator dan unit variabel pertanyaan kuesionerdalam survey yang mengacu kepada standar penyusunan ***Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)*** sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

a. **Faktor-faktor pendukung** pelaksanaan program pelayanan penanaman modal sebagai berikut:
   1. Tersedianya tenaga pendamping layanan OSS
   2. Tersedianya Tim Satgas LONTARA
   3. Tersedianya loket layanan informasi dan penanganan pengaduan bagi Masyarakat.

b. **Faktor-faktor penghambat** pelaksanaan program pelayanan penanaman modal sebagai berikut :
   1. Belum memenuhinya kapasitas sarana dan prasarana di DPMPTSP Kota Makassar untuk menempatkan Tim Teknis
   2. Pelaksanaan kegiatan survey kepuasan masyarakat masih dilaksanakan 2x dalam setahun belum memenuhi rekomendasi KemenpanRB dilaksanakan 4x dalam setahun
   3. Terlambatnya penerbitan SK (Surat Keputusan) kegiatan dibagian hukum.

c. Tindak lanjut pelaksanaan kegiatan :

1. Menyusun penerimaan reward The Best Investment dan Duta Usaha sebagai bentuk pemberian fasilitas/insentif bagi pelaku usaha yang telah berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah dan perekonomian daerah
2. Menyusun master plan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) sesuai dengan rekomendasi KemenpanRB dan penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Berkoordinasi dengan Bapenda Kota Makassar dan Direktorat Jenderal Pajak terkait konfirmasi wajib pajak bagi setiap pelaku usaha
4. Melakukan revisi terhadap kebijakan daerah tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.
5. Meningkatkan koordinasi antara bagian hukum, dinas teknis, dan sekretariat daerah.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melaksanakan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim pengendalian pelaksanaan penanaman modal dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang dikoordinir oleh Kepala Bidang dan dievaluasi oleh Kepala Dinas. Kegiatan pelaksanaan pengendalian penanaman modal dimulai dari Januari s/d Desember Tahun 2025 dengan mengunjungi lokasi usaha sesuai dengan alamat tempat usaha yang tertera pada Perizinan yang telah dimiliki. Pada saat kegiatan pengendalian, tim memverifikasi kelengkapan dokumen perizinan seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), Izin Lokasi, IMB dan izin terkait lainnya, serta melakukan pembinaan terhadap kewajiban yang harus disampaikan oleh pelaku usaha termasuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal memiliki tugas mengevaluasi dan memonitoring realisasi investasi PMA/PMDN dan jumlah investor PMA/PMDN di Kota Makassar. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal yang dihadapi oleh investor, memberikan bimbingan dan/atau sosialisasi kebijakan di bidang penanaman modal dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta perusahaan penanaman modal.

1) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan Usahanya

Memiliki indikator *output* jumlah Penyelesaian masalah penanaman modal yang dilaksanakan dengan target kinerja 12 laporan. Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk mengevaluasi pelaporan LKPM yang dilaporkan oleh pelaku usaha PMA/PMDn Alokasi anggaran senilai Rp. 119.165.000,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp. 3.942.500,00 atau 3,31%.

b. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha

Indikator *output* jumlah pelaksanaan Bimbingan Teknis terhadap pelaku usaha dan perusahaan PMA dan PMDN dalam pemberian sosialisasi terkait penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah berbasis risiko dan bimbingan teknis penyusunan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) setiap triwulan. Target kinerja terhadap jumlah pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal sebanyak 8 laporan dan jumlah pelaksanaan diseminasi prosedur pemenuhan komitmen dan pemberian fasilitas/insentif bagi PMA dan PMDN sebanyak 4 laporan. Alokasi anggaran sub kegiatan ini senilai Rp. 249.372.000,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II senilai Rp. 1.835.000,00 atau 0,74% dari total alokasi anggaran.

c. Pengawasan Penanaman Modal

Memiliki indikator *output* jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan dengan target kinerja 12 laporan. Kegiatan ini melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap aktivitas usaha perusahaan PMA dan PMDN di Kota Makassar yang telah memiliki perizinan berusaha berbasis risiko. Evaluasi yang dilakukan untuk meninjau pelaksanaan pelaporan LKPM yang merupakan kewajiban bagi seluruh PMA dan PMDN dan melakukan penindakan baik berupa surat teguran atau meninjau lokasi usaha untuk segera melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal di setiap triwulan. Untuk itu, sub kegiatan ini mengalokasikan anggaran senilai Rp. 110.005.000,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II senilai Rp.8.723.000,00 atau 7,93%.

Realisasi anggaran program pengendalian pelaksanaan penanaman modal hingga Triwulan II Tahun 2025 senilai Rp. 14.500.500,00,- atau 3,03% dari alokasi anggaran senilai Rp. 478.542.000,00,-. Persentase capaian kinerja program pengendalian pelaksanaan penanaman modal untuk memenuhi indikator *output* yaitu kenaikan/penurunan nilai investasi penanaman modal (Milyar Rupiah). Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melaksanakan kegiatan Penyelesaian Permasalahan, Bimbingan Teknis dan pengawasan terhadap aktivitas penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim pengendalian pelaksanaan penanaman modal dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang dikoordinir oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal dan dievaluasi oleh Kepala Dinas. Kegiatan pelaksanaan pengendalian penanaman modal dimulai dari Januari s/d Desember Tahun 2025 dengan mengunjungi lokasi usaha sesuai dengan alamat tempat usaha yang tertera pada izin usaha dan izin lainnya yang diterbitkan di DPMPTSP kota Makassar.

Pada saat kegiatan pengendalian, tim memverifikasi kelengkapan dokumen perizinan seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), Izin Lokasi, Tanda Daftar Gudang (TDG) dan izin terkait lainnya, serta melakukan pembinaan terhadap kewajiban yang harus disampaikan oleh pelaku usaha yaitu laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Hasil pelaporan LKPM oleh PMA dan PMDN selama 4 Triwulan akan menghasilkan jumlah nilai investasi yang telah diakumulasi dan verifikasi langsung oleh BKPM RI/kementrian investasi di awal Tahun 2026.

a. **Faktor-faktor pendukung** pelaksanaan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagai berikut:
   1. Terbentuknya Satuan Tugas Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar dan Kepala DPMPTSP bertindak sebagai Koordinator Satgas;
   2. Adanya pendampingan layanan berbantuan dan kemudahan penanaman modal oleh tenaga pendamping fasilitasi penanaman modal;
   3. Tersedianya data potensi-potensi investasi dan peluang usaha.
   4. Telah terlaksananya kegiatan bimbingan teknis dan penyelesaian masalah kepada pelaku usaha di Kota Makassar
b. **Faktor-faktor penghambat** pelaksanaan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagai berikut:
   1. Masih kurangnya minat investor PMA/PMDN yang melaporkan LKPM tepat waktu;
   2. Kurangnya persediaan lahan Kawasan industri bagi calon investor PMA/PMDN
   3. Belum adanya regulasi/kebijakan terkait pemberian fasilitas/insentif bagi pelaku usaha dan perusahaan PMA & PMDN yang berkontribusi dalam pendapatan daerah.
   4. Banyaknya laporan pengaduan yang diterima oleh Satgas Pengawasan Perizinan terkait dengan indikasi dugaan pelanggaran oleh pelaku usaha di Kota Makassar.
c. **Tindak lanjut** pelaksanaan kegiatan :
   1. Berkoordinasi dengan ikatan pengusaha untuk memudahkan sosialisasi dan kondolidasi terkait OSS dan pelaporan LKPM
   2. Memberikan pelatihan secara rutin setiap triwulannya kepada pelaku usaha agar memudahkan dalam pelaporan LKPM
   3. Berkoordinasi dengan BKPM RI/Kementrian Investasi untuk meningkatkan nilai investasi berskala nasional.
   4. Melaksanakan koordinasi secara rutin dan berkala dengan ikatan pengusaha untuk memudahkan sosialisasi dan kondolidasi terkait OSS dan pelaporan LKPM

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pengelolaan data perizinan dan non perizinan yang dikelola berdasarkan penginputan data perizinan dan non perizinan yang terdaftar dalam sistem. Pengolahan data merupakan rangkaian pengolahan untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan data yang telah diidentifikasi dan diverifikasi. Proses identifikasi data dilakukan oleh tim pelayanan yang kemudian diolah dan diverifikasi oleh Tim Teknis dan admin atau operator. Pengklasifikasian data perizinan dan non perizinan berdasarkan nama perusahaan, jenis perusahaan, alamat perusahaan, jumlah investasi dan jumlah tenaga kerja.

Admin/operator bertugas merekapitulasi seluruh penginputan data perizinan dan non perizinan setiap bulan melalui pelaporan kegiatan. Seluruh

data perizinan dan non perizinan yang telah disusun dan diolah akan di update dalam website tersedia sebagai layanan informasi masyarakat terkait realisasi perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kota Makassar. sebanyak 59.945 izin dari target 21.000 izin. Untuk itu, program pengelolaan data dan sistem informasi layanan didukung 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut : Tim pengelolaan data dan sistem informasi layanan dibentuk dalam Surat Keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dikoordinir oleh Kepala Bidang dan dievaluasi oleh Kepala Dinas. Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola disusun dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Jumlah perizinan dan non perizinan yang dikelola berjumlah 59.945 izin dari target 21.000 izin.

Pengelolaan data dan sistem informasi layanan didukung dengan pemutakhiran aplikasi perizinan dan website. Pemutakhiran aplikasi perizinan dalam bentuk maintenance dan hosting untuk integritasi antara aplikasi yang satu dan lainnya. Sesuai dengan rekomendasi Kemenpan RB dan KPK seluruh aplikasi yang berhubungan dengan layanan perizinan wajib terintegrasi melalui aplikasi perizinan dan dapat diakses melalui website. Sehingga masyarakat dapat mengakses layanan perizinan dan non perizinan serta layanan lainnya melalui website dan terintegrasi ke aplikasi perizinan. Untuk itu, program pengelolaan data dan sistem informasi layanan didukung 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1) **Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

   a. **Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik**

      Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik memiliki indikator *output* jumlah pengelolaan data perizinan dan non perizinan yang dikelola, dikaji dan pemanfaatan data oleh perangkat daerah. Jumlah perizinan dan non perizinan yang dikelola saat ini terbagi atas 11 sektor yaitu sektor kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, perindustrian, perdagangan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan, obat dan makanan, pariwisata, ketenagakerjaan, pendidikan dan kebudayaan. Target kinerja sub kegiatan ini 12 laporan dan alokasi anggaran senilai Rp. 826. 654.055,00 dengan realisasi anggaran hingga Triwulan I senilai Rp. 299.066.900,00 atau 33,13%.

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{3\ laporan}{12\ laporan} x\ 100 = 25\%$$

Pengelolaan data perizinan dan non perizinan yang dikelola berdasarkan penginputan data perizinan dan non perizinan yang terdaftar dalam sistem. Pengolahan data merupakan rangkaian pengolahan untuk menghasilkan

informasi atau menghasilkan data yang telah diidentifikasi dan diverifikasi. Proses identifikasi data dilakukan oleh tim pelayanan yang kemudian diolah dan diverifikasi oleh Tim Teknis dan admin atau operator. Pengklasifikasian data perizinan dan non perizinan berdasarkan nama perusahaan, jenis perusahaan, alamat perusahaan, jumlah investasi dan jumlah tenaga kerja.

a. **Faktor-faktor pendukung** pelaksanaan program pengelolaan data dan sistem informasi layanan sebagai berikut:
   1. Terlaksananya inovasi layanan SOLATA'BOSS (Sistem Online Layanan Terpadu Bukan OSS) untuk kemudahan layanan perizinan dan non perizinan yang tidak termasuk dalam system OSS;
   2. Tersedianya SDM pengelolaan data;
   3. Kemudahan layanan perizinan dan non perizinan melalui website dan system OSS.

b. **Faktor-faktor penghambat** pelaksanaan program pengelolaan data dan sistem informasi layanan sebagai berikut:
   1. Masih lemahnya integrasi jaringan internet yang disediakan;
   2. Belum terintegrasinya aplikasi perizinan dengan beberapa aplikasi mandiri pemerintah;
   3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas layanan.

c. **Tindak lanjut** pelaksanaan kegiatan:
   1. Menganggarkan *maintenance* dan pemeliharaan sistem informasi manajemen
   2. Mengoptimalkan kinerja *server* dengan penganggaran tenaga ahli jaringan dan instalasi server
   3. Membentuk tim pengolahan data perizinan dan non perizinan.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi kantor dapat diukur melalui 3 hal yaitu administrasi kepegawaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas, ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja serta ketersediaan sarana dan prasarana aparatur. Cakupan pelayanan administrasi didukung oleh 7 kegiatan pendukung yaitu kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, kegiatan administrasi umum perangkat daerah, kegiatan pengadaan barang milik daerah, kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah. Realisasi persentase capaian indikator output program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota untuk persentase ASN perangkat daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas senilai 8,70%, persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah senilai 20,50% dan persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik senilai 25%.

Pencapaian kinerja oleh kegiatan dan sub kegiatan pendukung pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat dihitung berdasarkan rumus dibawah ini sebagai berikut:

$$\textit{Persentase capaian kinerja}\ (\%) = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} x\ 100$$

Pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota didukung dengan 6 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Berikut pencapaian kinerja dari kegiatan pendukung yaitu:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah indikator *output* yaitu jumlah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dengan target 100 Orang, jumlah penyusunan dokumen RENJA Perangkat Daerah dengan target 1 dokumen, dan jumlah penyusunan dokumen RENSTRA Perangkat Daerah dengan target 1 dokumen. Penyusunan dokumen perencanaan sebagai pelaksanaan awal perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun berjalan. Pelaksanaan penyusunan dokumen Renstra-SKPD. Sub kegiatan ini memiliki alokasi anggaran pokok Rp. 75.355.000,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp. 26.560.000,00 atau 35,25%. Persentase untuk capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu :

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{1\ \text{Dokumen}}{2\ \text{Dokumen}} x\ 100 = 50\%$$

b. Koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD indikator *output* yaitu jumlah dokumen RKA-SKPD yang disediakan oleh perangkat daerah. Penyusunan RKA-SKPD sebagai langkah awal pelaksanaan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah dengan target kinerja 1 dokumen dan realisasi kinerja 1 dokumen. Alokasi anggaran sub kegiatan ini senilai Rp. 5.788.000,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp 0,00 atau 0,00% dan persentase realisasi capaian kinerja sub kegiatan 0% dari target 100% hingga Triwulan II Tahun 2025. Berikut persentase capaian kinerja sub kegiatan yaitu :

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{0\ \text{Dokumen}}{1\ \text{Dokumen}} x\ 100 = 0\%$$

c. Koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD memiliki indikator *output* yaitu jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disediakan oleh perangkat daerah. Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD disusun berdasarkan hasil *refocussing* dan evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan perangkat daerah Alokasi anggaran sub kegiatan ini senilai Rp. 5.788.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,00 atau 0%. Sub kegiatan ini memiliki target kinerja 1 dokumen dengan realisasi capaian kinerja 1 dokumen atau persentase capaian kinerja sebesar 100% dari target 100%. Berikut persentase capaian kinerja sub kegiatan yaitu :

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{0\ \text{Dokumen}}{1\ \text{Dokumen}} x\ 100 = 0\%$$

d. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD memiliki indikator *output* yaitu jumlah dokumen DPA-SKPD yang disediakan oleh perangkat daerah. Penyusunan dokumen DPA-SKPD disusun untuk menyusun anggaran program dan kegiatan perangkat daerah tahun berjalan dengan alokasi anggaran senilai Rp. 4.770.000,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp 1,515,000,00 dengan target kinerja 1 dokumen. Persentase capaian kinerja sub kegiatan ini 100% dari target 100%

hingga Triwulan II Tahun 2025 dan persentase realisasi anggaran yaitu 31,76%. Berikut persentase capaian kinerja sub kegiatan yaitu:

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{0\ \text{Dokumen}}{1\ \text{Dokumen}} x\ 100 = 0\%$$

e. indikator *output* yaitu jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disediakan oleh perangkat daerah. Penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD dilaksanakan untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan daerah selama tahun berjalan dan pelaksanaan *refocussing* anggaran untuk mengefektifkan pelaksanaan kinerja program dan kegiatan perangkat daerah. Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini senilai Rp. 4.729.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0%. Berikut persentase capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu:

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{0\ \text{Dokumen}}{1\ \text{Dokumen}} x\ 100 = 0\%$$

f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki indikator *output* jumlah dokumen evaluasi kinerja (Lakip, Perjanjian Kinerja, Evaluasi Renja, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas) yang disediakan oleh perangkat daerah. Penyusunan dokumen evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi dan monitoring program dan kegiatan perangkat daerah tahun berjalan. Alokasi anggaran sub kegiatan ini senilai Rp. 7.170.000 0,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp 0,00 atau 0% Berikut persentase capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu:

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{0\ \text{Dokumen}}{4\ \text{Dokumen}} x\ 100 = 0\%$$

Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah memiliki indikator *output* yaitu persentase ketersediaan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja prangkat daerah yang disediakan. Ketersediaan laporan perencanaan meliputi penyusunan dokumen Renstra dan dokumen Renja, dimana pada Tahun 2025. Selain penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, juga dilaksanakan Forum Perangkat Daerah (FPD) sebagai bentuk koordinasi antar SKPD dan masyarakat untuk pelaksanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Tahun 2025-2026. Dokumen pelaksanaan anggaran dilaksanakan dalam penyusunan RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA yang dievaluasi dan monitoring langsung oleh Tim TAPD. Evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan kinerja program dan kegiatan perangkat daerah didalam dokumen LAKIP/LKjIP dan dokumen Evaluasi Renja, perjanjian pelaksanaan kinerja pejabat struktural yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja serta pelaksanaan PMPRB dan Zona Integritas untuk mendukung pelaksanaan birokrasi yang efektif, efisien, berkelanjutan serta birokrasi yang bersih melayani dari indikasi korupsi.

Persentase capaian kinerja untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah hingga periode Triwulan I Tahun 2025

senilai 25,47% dari target 100% dengan realisasi anggaran senilai Rp 22.400.000 atau 25,47% dari alokasi anggaran senilai Rp 87.955.000,00.

a. **Faktor-faktor pendukung** pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebagai berikut :
   1. Terbentuknya tim penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
   2. Tersedianya tenaga ahli pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;

b. **Faktor-faktor penghambat** kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah:
   1. Terjadinya perubahan anggaran disertai perubahan target kinerja program dan kegiatan;
   2. Adanya perubahan kebijakan terkait analisis standar biaya;

c. **Tindak lanjut** terhadap pelaksanaan kegiatan :
   a. Menyusun dokumen KAK dan RKA manual pada rancangan awal perencanaan dan penganggaran;
   b. Berkoordinasi dengan Tim TAPD terkait pemutakhiran berbagai kode rekening belanja berdasarkan peraturan yang berlaku;
   c. Menyusun dokumen evaluasi dan monitoring realisasi program.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang memiliki indikator *output* jumlah administrasi keuangan bagi aparatur yang disediakan. Penyediaan gaji dan tunjangan meliputi tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan BPJS Kesehatan, BPJS Kematian dan Kecelakaan dan tunjangan beban kerja ASN. Alokasi anggaran sub kegiatan ini senilai Rp. 10.544.094.820,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp. 4.800.180.644,00 atau 43,40%. Berikut persentase capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu :

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{6\ Bulan}{12\ Bulan} x\ 100 = 50\%$$

b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN memiliki indikator *output* jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan. Penyediaan administrasi meliputi pengadministrasi keuangan serta pelaksanaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Alokasi anggaran sub kegiatan ini senilai Rp 333.240.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 143.580.000,00 atau 43,09%. Berikut persentase capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu:

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{6\ Bulan}{12\ Bulan} x\ 100 = 50\%$$

c. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD memiliki indikator *output* jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan. Sub kegiatan ini menyediakan jasa untuk melakukan penatausahaan serta pengujian/verifikasi terhadap dokumen pelaksanaan anggaran SKPD selama 12 bulan Alokasi anggaran sub kegiatan ini senilai Rp 182.398.000,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp 88.500.0000,00 atau 48,52%. Berikut persentase capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu :

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{6\ \text{Bulan}}{12\ \text{Bulan}} x\ 100 = 50\%$$

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dilaksanakan selama 12 bulan terdiri dari 3 sub kegiatan pendukung untuk pelaporan keuangan perangkat daerah. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN memiliki realisasi anggaran senilai Rp 4.800.180.644,00 atau 43,40% dari alokasi anggaran senilai Rp 11.059.732.820,00. Rencana tindak lanjut untuk melakukan penyesuaian terhadap jumlah pegawai yang mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) yang disesuaikan dengan aplikasi SIMPEG.

a. **Faktor-faktor pendukung** pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sebagai berikut :
   1. Tersedianya aplikasi SIMPEG, E-NIAJA, dan BIPANG untuk merekapitulasi kehadiran dan kinerja pegawai;
   2. Tersedianya operator aplikasi SIMPEG disetiap SKPD;
b. **Faktor-faktor penghambat** kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sebagai berikut :
   1. Terjadinya keterlambatan pelaporan KGB dan KP4 pegawai;
   2. Sering terjadi maintenance pada aplikasi E-NIAJA dan BIPANG
c. **Tindak lanjut** terhadap pelaksanaan kegiatan:
   1. Berkoordinasi dengan Kasubag. Umum dan Kepegawaian terhadap jumlah pegawai yang mendapatkan gaji dan tunjangan ASN;
   2. Berkoordinasi dengan Tim TAPD terkait penganggaran gaji dan tunjangan ASN;

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan kompetensi profesi. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 143.637.676,00 atau 27,84% dengan persentase capaian kinerja sebesar 25%.

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{1\ \text{Kegiatan}}{4\ \text{Kegiatan}} x\ 100 = 100\%$$

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah menyusun pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas apparatur SDM melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur. Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan dilakukan dalam 6 kegiatan terkait peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan penyusunan pelaporan keuangan perangkat daerah. Diklat yang dilaksanakan diharapkan mampu meningkatkan kualitas aparatur dalam meningkatkan pelaporan akuntabilitas perangkat daerah. Selain kegiatan Pendidikan dan pelatihan, juga pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dilaksanakan untuk melaporkan hasil capaian kinerja seluruh aparatur baik dari segi kehadiran maupun pelaksanaan tupoksi disetiap bulannya untuk itu adanya pelaporan rekapitulasi kinerja aparatur menjadi tolak ukur terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) disetiap tahunnya. Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kerja aparatur, juga dilaksanakan pengadaan pakaian dinas harian beserta atributnya bagi aparatur.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini senilai Rp 143.637.676,00 atau 27,84% dari alokasi anggaran senilai Rp 516.000.000,00. Persentase capaian kinerja untuk kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah senilai 25% dari target 100% hingga periode Triwulan **II** Tahun 2025.

a. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sebagai berikut:
1. Tersedianya agenda bimbingan teknis untuk aparatur;

b. Faktor-faktor penghambat kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sebagai berikut:
1. Terjadinya perubahan anggaran disertai perubahan target kinerja program dan kegiatan;

c. Tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan :
1. Memberikan *Reward* dan *Punishment* kepada aparatur yang tidak menjalankan kode etik pegawai.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor memiliki indikator *output* jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan. Penyediaan komponen listrik/penerangan menyediakan 9 jenis komponen dengan alokasi anggaran senilai Rp. 4.800.000,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp. 0,00 atau 0%.

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{0\ Jenis}{9\ Jenis} x\ 100 = 0\%$$

b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor memiliki indikator *output* menyediakan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (ATK, bahan cover/kertas, bahan komputer, belanja modal alat rumah tangga (Home Use), belanja modal peralatan jaringan computer, belanja modal peralatan video/film dan peralatan lainnya yang disediakan oleh perangkat daerah Alokasi anggaran sub kegiatan ini senilai Rp. 85.441.240,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.557.000,00 atau 15,87%. Target kinerja sub kegiatan ini adalah peralatan dan perlengkapan kantor dengan persentase realisasi capaian kinerja 0% dari target 100% hingga Triwulan **II** Tahun 2025.

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{0\ Unit}{23\ Unit} x\ 100 = 0\%$$

c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan memiliki indikator *output* jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan oleh perangkat daerah. Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi pengadministrasian perkantoran dalam penyediaan barang cetakan seperti map, amplop dinas serta kebutuhan perkantoran lainnya Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. ,480.000,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp. 0,00 atau 0%. Target kinerja jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan senilai 7 jenis dengan persentase capaian kinerja 100%

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{0\ Jenis}{7\ Jenis} x\ 100 = 0\%$$

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk penyediaan bahan bacaan kantor dengan output yaitu jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan yang disediakan dengan target kinerja 7 jenis bahan bacaan. Alokasi anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 33.600.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 2.225.000,00 atau 6,62%.

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{1\ Jenis}{7\ Jenis} x\ 100 = 100\%$$

e. Fasilitasi kunjungan tamu memiliki indikator *output* jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan oleh perangkat daerah. Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk menyediakan dan memfasilitasi tamu yang berkunjung dalam bentuk paket makan dan minum rapat untuk 645 Orang. Alokasi anggaran sub kegiatan ini senilai Rp. 29.360.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 975.000,00 atau 3,32%.

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{100\ paket}{645\ paket} x\ 100 = 6\%$$

f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD memiliki indikator output adalah jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan dengan target sebesar 29 Orang dan alokasi anggaran senilai Rp. 133.934.000,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp 120.471.273,00 atau 89,95%.

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{5\ Orang}{29\ Orang} x\ 100 = 25\%$$

g. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD memiliki indikator *output* jumlah penatausahaan arsip dinamis pada SKPD yang disediakan dengan target kinerja 1 Paket. Pelaksanaan kegiatan ini menata, mengolah dan mengarsipkan dokumen-dokumen administrasi kantor yang telah masa periodenya. Alokasi anggaran pada sub kegiatan ini senilai Rp 103.500.000,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp 25.515.348,00 atau 24,65%.

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{0\ Paket}{1\ Paket} x\ 100 = 0\%$$

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah melaksanakan kegiatan penyediaan administrasi umum kantor seperti peralatan dan perlengkapan kantor, bahan bacaan, bahan cetakan, fasilitasi tamu rapat, perjalanan dinas dalam dan luar kota serta penatausahaan arsip perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan administrasi kantor. Realisasi anggaran pada kegiatan ini senilai Rp 206.056.621,00 atau 32,35% dari alokasi anggaran Rp 636.998.740,00.

a. **Faktor-faktor pendukung** pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah sebagai berikut:
   1. Penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan koordinasi seperti makan dan minum rapat dan penyediaan bahan bacaan bagi pemohon di ruang pelayanan;
   2. Tersedianya perjalanan dinas dalam dan luar kota untuk kegiatan koordinasi dan sinkronisasi bagi aparatur
b. **Faktor-faktor penghambat** pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya tenaga pendukung pengarsipan dokumen-dokumen pengadministrasi yang tersertifikasi;
2. Belum memenuhinya spesifikasi barang yang tersedia pada e-katalog sesuai dengan kebutuhan SKPD;

c. **Tindak lanjut** pelaksanaan kegiatan :
1. Membuat kajian teknis spesifikasi belanja modal yang dibutuhkan oleh SKPD;
2. Bekerjasama dengan Arsiparis untuk mengolah dan mengarsipkan dokumen administrasi kantor

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan surat menyurat. Penyediaan surat menyurat berdasarkan kegiatan untuk pendistribusian persuratan di kantor dengan baik. Dengan output terlaksananya administrasi perkantoran, dengan target 12 laporan dengan alokasi anggaran senilai Rp 460.593.600,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp 204.102.600 atau 44,31%.

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{3\ \text{Laporan}}{12\ \text{laporan}} x\ 100 = 25\%$$

b. Penyediaan jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik merupakan kegiatan penggunaan jasa telepon, listrik dan internet dengan output pengelolaan jasa komunikasi dan listrik. Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini senilai Rp 108.244.500,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp 19.752.056,00 atau 41,67%.

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{3\ \text{Laporan}}{12\ \text{Laporan}} x\ 100 = 25\%$$

c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor menyediakan jasa layanan seperti tenaga kebersihan, jasa keamanan maupun jasa tenaga lainnya yang memiliki kompetensi untuk mendukung pelayanan kantor Alokasi anggaran untuk kegiatan ini senilai Rp 3.065.826.000,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp 1,051,169,100,00 atau 34,29%.

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{3\ \text{Laporan}}{12\ \text{laporan}} x\ 100 = 25\%$$

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah memiliki indikator *output* yaitu persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan. Layanan jasa penunjang yang disediakan oleh perangkat daerah terkait jasa surat menyurat, penyediaan jasa internet/listrik/air dan penyediaan jasa kebersihan kantor. Penyediaan layanan untuk meningkatkan indeks kepuasan aparatur dan indeks kepuasan masyarakat terhadap kondisi sarana dan prasarana perangkat daerah. Realisasi anggaran kegiatan ini senilai Rp 417.134.808,00 atau 11,48% dari alokasi anggaran senilai Rp .634.664.100,00.

6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

merupakan kegiatan pemeliharaan rutin dari mobil jabatan kepala dinas dengan output pemeliharaan mobil jabatan target sebesar 1 unit, realisasi fisik 1 unit dengan realisasi anggaran Rp. 43,630,000,00 atau 29,90 % dari alokasi anggaran senilai Rp 60.921.360,00.

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{0\ unit}{1\ unit} x\ 100\ = 0\%$$

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan merupakan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional kantor dengan output 63 unit kendaraan dinas operasional. Alokasi anggaran perubahan sub kegiatan ini senilai Rp. 325.006.000,00 dengan realisasi anggaran senilai Rp 39.909.519,00 atau 12,28%.

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{2\ unit}{63\ unit} x\ 100\ = 3\%$$

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya merupakan kegiatan pemeliharaan rutin perlengkapan alat rumah tangga, peralatan komputer, peralatan komputer lainnya dengan target kinerja 41 unit peralatan dan mesin lainnya. Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 73.800.000,00 dengan realisasi anggaran Rp.0,00 atau 0%.

$$Persentase\ capaian\ kinerja\ (\%) = \frac{0\ unit}{41\ unit} x\ 100\ = 0\%$$

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah memiliki indikator *output* yaitu persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan. Layanan pemeliharaan yang disediakan untuk kendaraan dinas jabatan berjumlah 1 unit, kendaraan dinas operasional/lapangan berjumlah 63 unit, peralatan dan mesin lainnya berjumlah 41 unit dan bangunan Gedung berjumlah 1 gedung. Pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi barang yang rusak atau perlu pemulihan untuk dapat digunakan kembali sebagai penunjang administrasi kantor. Realisasi anggaran kegiatan ini senilai Rp 442.436.000,00 atau 11,97% dari alokasi anggaran senilai Rp 52.952.819,00.

a. **Faktor-faktor pendukung** pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah urusan penunjang kab/kota sebagai berikut:
   1. Tersedianya kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional/lapangan bagi aparatur;
   2. Terpeliharanya kondisi barang untuk meningkatkan kinerja administrasi kantor.
b. **Faktor-faktor penghambat** pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah urusan penunjang kab/kota sebagai berikut :
   1. Adanya perubahan pagu anggaran;
   2. Adanya perubahan harga barang di pasaran;
   3. Adanya Pergeseran Anggaran dan Perubahan Anggaran.
c. **Tindak lanjut** pelaksanaan kegiatan :
   1. Membuat RAB pemeliharaan barang;
   2. Membuat daftar KIB BMD.
   3. Mempercepat proses administrasi dan pencairan anggaran sesuai alur kas untuk mengurangi birokrasi yang menghambat pelaksanaan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Tujuan dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih dan Efektif diatur dalam sasaran strategis yaitu mewujudkan pelayanan publik yang *Sombere* dan *Smart*. Pelaksanaan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik diukur melalui persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya.

Untuk itu, perlu adanya target capaian kinerja Perangkat Daerah untuk mewujudkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik melalui penyusunan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2025 dengan analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Makassar Tahun 2025 terhadap RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dituangkan seperti pada tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar (T-C.30)

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Investor PMDN Berskala Nasional		✓	PMDN : 1205	PMDN : 1455	PMDN : 1735	PMDN : 2035	PMDN : 7394	PMDN : 10.218	PMDN : 1735	PMDN : 1000	Kinerja investasi dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Birokrasi, pelayanan, dan kondisi ekonomi global adalah beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan investasi.
	Jumlah Investor PMA Berskala Nasional		✓	PMA : 414	PMA : 499	PMA : 589	PMA : 689	PMA : 772	PMA : 1.053	PMA : 589	PMA :	
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		✓	2 Triliun US$ 50 Juta	2 Triliun US$ 50 Juta	2 Triliun US$ 50 Juta	2 Triliun US$ 50 Juta	2 Triliun US$ 50 Juta	3 Triun US$ 36 Juta	1.8 Triliun US$ 68Juta	2 Triun US$ 50 Juta	
3	Rasio daya serap tenaga kerja		✓	4,25	4,89	5,36	5,76	0,82	3,11	5,36	5,76	
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliyar rupiah) (%)		✓	46,69%	56,69%	69,73%	82,73%	50,39%	47,50%	69,73%	82,73%	

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar memiliki indikator indikator terkait investasi berskala nasional di suatu daerah, termasuk target, pencapaian, dan proyeksi. Jumlah investor PMDN berskala nasional memiliki target sebanyak 1.205 pada tahun 2022, 1.455 pada tahun 2023, 1.735 pada tahun 2024, dan 2.035 pada tahun 2025. Realisasi pada tahun 2022 mencapai 2.129, dengan proyeksi sebanyak 7.394 pada tahun 2023, 1.735 pada tahun 2024, dan 2.035 pada tahun 2025. Untuk jumlah investor PMA berskala nasional, targetnya adalah 414 pada tahun 2022, 499 pada tahun 2023, 589 pada tahun 2024, dan 689 pada tahun 2025. Realisasi pada tahun 2022 adalah 523, dengan proyeksi sebanyak 772 pada tahun 2023, 589 pada tahun 2024, dan 689 pada tahun 2025.

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) memiliki target sebesar 2 triliun Rupiah setiap tahunnya dari 2022 hingga 2025. Realisasi tahun 2022 mencapai Rp 3.483.455.700.000,00, dengan proyeksi sebesar 1,8 triliun Rupiah pada tahun 2023 dan 2 triliun Rupiah pada tahun 2024 dan 2025. Dalam US Dollar, target nilai investasi adalah US$ 50 juta setiap tahun dari 2022 hingga 2025. Realisasi tahun 2022 mencapai US$ 31.650.000, dengan proyeksi sebesar US$ 68 juta pada tahun 2023 dan US$ 50 juta pada tahun 2024 dan 2025.

Rasio daya serap tenaga kerja memiliki target sebesar 4,25% pada tahun 2022, 4,89% pada tahun 2023, 5,36% pada tahun 2024, dan 5,76% pada tahun 2025. Realisasi pada tahun 2022 hanya mencapai 1,01%, dengan proyeksi sebesar 5,02% pada tahun 2023, 5,36% pada tahun 2024, dan 5,76% pada tahun 2025. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (miliar Rupiah) memiliki target sebesar 46,69% pada tahun 2022, 56,69% pada tahun 2023, 69,73% pada tahun 2024, dan 82,73% pada tahun 2025. Realisasi tahun 2022 menunjukkan penurunan sebesar -53,99% dikarenakan dengan proyek strategis nasional yang berada di tahun 2021, dengan proyeksi kenaikan sebesar 50,39% pada tahun 2023, 69,73% pada tahun 2024, dan 82,73% pada tahun 2025.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi kemampuannya untuk menyelenggarakan pelayanan investasi dan administrasi publik dengan baik. Beberapa isu kunci yang perlu diatasi meliputi:

Proses perizinan di Kota Makassar sering kali dianggap rumit dan memakan waktu. Meskipun tujuan dari PTSP adalah menyederhanakan proses ini, realitas di lapangan menunjukkan bahwa birokrasi yang masih berlangsung bisa menjadi penghalang signifikan bagi para investor. Prosedur yang panjang dan tidak hanya memperlambat alur investasi, tetapi juga dapat menurunkan minat investor potensial. Kendala ini sering kali dipengaruhi oleh kurangnya integrasi antara berbagai tahap perizinan dan sistem yang belum sepenuhnya optimal.

Ketidakpastian dalam regulasi dan kebijakan sering kali menambah tantangan bagi investor. Perubahan kebijakan yang tidak terencana atau tidak konsisten dapat menciptakan ketidakstabilan yang merugikan iklim investasi.

Belum adanya regulasi yang mengatur Pemanfaatan Ruang melalui Rencana Detail tata Ruang juga membuat proses perizinan menjadi lambat. Demikian dengan pemberian fasilitas insentif dan kemudahan investasi yang belum ditetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah.

Kualitas sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan PTSP menjadi isu penting. Staf yang terlibat dalam proses perizinan dan pelayanan publik perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Namun, sering kali terdapat kekurangan pelatihan yang memadai, yang dapat mempengaruhi kemampuan staf dalam menangani kasus dengan efisien dan profesional. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang berkala dan perencanaan yang baik terkait pengembangan potensi Sumber Daya Manusia di Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Koordinasi yang belum efektif antara Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan lembaga-lembaga terkait lainnya sering kali menjadi penghambat. Sinergi yang tidak optimal dan kurangnya integrasi data antara berbagai lembaga menyebabkan tumpang tindih dalam proses perizinan dan administrasi. Hal ini bisa mempersulit pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan, serta menghambat alur investasi yang lancar.

Transparansi dalam proses perizinan dan pelayanan publik merupakan isu krusial. Masalah terkait pungli atau gratifikasi bisa merusak kepercayaan publik dan mengurangi integritas sistem. Pengawasan yang tidak memadai juga bisa menyebabkan praktik-praktik tidak adil yang merugikan pihak-pihak yang mematuhi aturan.

Kemajuan teknologi sangat penting dalam memfasilitasi proses perizinan dan pelayanan. Namun, keterbatasan dalam infrastruktur teknologi dan sistem informasi yang tidak memadai sering kali menjadi kendala. Masalah teknis atau kurangnya pemahaman mengenai sistem teknologi yang ada dapat menghambat efisiensi pelayanan, baik bagi staf Dinas Penanaman Modal dan PTSP maupun bagi pelaku usaha.

Kecepatan dan efisiensi pelayanan publik merupakan aspek yang sangat diperhatikan. Layanan yang lambat atau tidak efisien dapat mengurangi kepuasan masyarakat dan investor. Keterjangkauan informasi mengenai prosedur perizinan dan investasi juga sering kali menjadi masalah yang mengakibatkan kebingungan dan kesulitan bagi pengguna layanan.

Promosi potensi investasi di Kota Makassar sering kali kurang efektif. Kurangnya informasi yang jelas dan strategi promosi yang tidak memadai dapat menghambat daya tarik kota ini bagi investor. Masih kurangnya kajian-kajian terkait potensi investasi yang akurat Selain itu, dukungan yang kurang memadai setelah investasi dimulai juga bisa mempengaruhi keputusan investor untuk melanjutkan atau memperluas usaha mereka di kota ini.

Evaluasi dan pemantauan terhadap proses perizinan dan pelayanan perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik. Namun, kurangnya penilaian yang efektif dan sistem umpan balik yang tidak memadai sering kali menghambat identifikasi dan perbaikan masalah yang ada. Menangani isu-isu ini secara komprehensif dan strategis akan sangat penting untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar. Dengan memperbaiki proses perizinan, meningkatkan kualitas sumber daya

manusia, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi investasi dan pelayanan publik.

Dalam konteks layanan yang mudah, ramah dan cepat inilah peranan aplikasi perizinan online di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dalam proses penyusunan program menjadi sangat vital artinya baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal.

Aplikasi Perizinan ini juga dapat menjawab isu permasalahan yang ada di masyarakat terkait kualitas layanan perizinan dimana kemudahan dan transparansi sangat diperlukan dalam hal meningkatkan kualitas layanan publik. Sistem tracking dokumen perizinan juga menjadi salah satu keluhan masyarakat dimana mereka tidak dapat mengetahui atau mengakses status perizinan yang dimohonkan. Sistem Online Pelayanan Terpadu Bukan OSS jika diakronimkan dapat menjadi SOLATA' BOSS yang mengandung makna "kawan atau teman" kata boss bisa juga diartikan sebagai sapaan kepada orang yang akrab jadi diharapkan aplikasi ini dapat menjadi layanan yang mendekatkan pemohon perizinan dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar. Dengan sistem perizinan yang inovatif, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan sempurna.

2.4 Reviu terhadap Rancangan RKPD

Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengacu pada Rancangan Awal yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja SKPD. Berdasarkan isu-isu strategis yang saat ini terkait penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar mampu memenuhi sasaran indikator yaitu Peningkatan Investasi Daerah.

Rencana Kerja juga merupakan dokumen perencanaan untuk periode pelaksanaan selama 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kebutuhan akan program dan kegiatan untuk periode pelaksanaan 1 (satu) tahun, tidak semua memuat kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar, melainkan penyusunan kegiatan dibutuhkan untuk indikator kinerja SKPD selama setahun.

Program dan kegiatan pendukung Rencana Kerja Tahunan kemudian disesuaikan oleh pagu indikatif yang telah ditentukan dalam dokumen Renstra SKPD. Kebutuhan pagu menyesuaikan dengan target capaian yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun. Sehingga beberapa kegiatan pendukung yang disusun dalam Rencana Kerja Tahunan akan ditemui kegiatan tambahan atau pengurangan jumlah kegiatan disebabkan oleh penyesuaian target kinerja, pagu indikatif berdasarkan hasil analisis kebutuhan.

Berikut lampiran tabel T-C.31 terhadap hasil analisis kebutuhan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya, dalam proses penyempurnaan

Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan penyesuain terhadap kebutuhan Perangkat Daerah.

KOTA MAKASSAR

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan SKPD Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar (T-C.31)

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu indikatif (RP.0000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.0000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Makassar			**Rp 53.140.966.388**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	Makassar			**Rp 22.373.068.000**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Makassar			**Rp 53.140.966.388,00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	Makassar			**Rp 22.373.068.000,00**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	Makassar	Persentase ketepatan waktu pelayanan		**Rp 49.404.525.225,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	Makassar	Persentase ketepatan waktu pelayanan		**Rp 17.132.870.325,00**	
	Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Yang disusun		**Rp 273.358.033,00**	**Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Yang disusun		**Rp 87.955.000,00**	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu indikatif (RP.0000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.0000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun	100%	Rp 103 238 145,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun	100%	Rp 39.850.000,00	
	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	Rp 27.307.054,00	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	Rp 3.788.000,00	
	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	Rp 26.572 061,00	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	Rp 3.788.000,00	
	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	Rp 22.923.468,00	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	Rp 2.770.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (RP.0000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.0000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	Rp 22.923.468,00	Kordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	Rp 2.729.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 70.393 837,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 2.770.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Makassar			**Rp 15.357.545.631,00**	**Administrasi Keungan Perangkat Daerah**	Makassar			**Rp 11.059.732.820,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	100%	Rp 14 334.763.925,00	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	100%	Rp 10.544 094.820,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Makassar	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	100%	Rp 785.287.884,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Makassar	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	100%	Rp 333.240.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keungan SKPD	Makassar	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan	100%	Rp 180.000 000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keungan SKPD	Makassar	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan	100%	Rp 182 398 000,00	
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Akhir Tahun SKPD	Makassar	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	100%	Rp 33 638 822,00	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keungan Akhir Tahun SKPD	Makassar	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	100%	Rp	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu indikatif (Rp.0000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.0000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/Triwulan/Semesteran yang disusun	100%	Rp 23 855 000,00	Kordinat dan Penyusunan Laoran Keungan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/Triwulan/Semesteran yang disusun	100%	Rp -	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Makassar			**Rp 30.000.000.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Makassar			Rp 688 500.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	Rp 30.000.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	Rp 516 000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Makassar			**Rp 2.409.907.218,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Makassar			**Rp 776.648.740,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	Rp 21.512.021,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	Rp 4.800.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu indikatif (RP.0000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.0000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Rp 1.061.423.742,00	Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Rp 85.441.240,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Makassar	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang Disediakan	100%		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Makassar	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang Disediakan	100%	Rp 52.476.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Makassar	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	Rp 287.336.455,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Makassar	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	Rp 1.480.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makassar	Tersedianyabahan logistik yang disediakan	100%		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makassar	Tersedianyabahan logistik yang disediakan	100%	Rp 89.907.500,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Makassar	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	Rp 27.885.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Makassar	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	Rp 33.600.000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu indikatif (RP.0000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.0000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Makassar	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	Rp 108.750.000,00	Fasilitas Kunjungan Tamu	Makassar	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	Rp 29.360.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	Rp 795.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	Rp 133 934.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	Rp 108.000 000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	Rp 103 500.000,00	
	Dukungan Pelaksaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Makassar	tersedianya Dukungan Pelaksaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang disediakan	100%		Dukungan Pelaksaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Makassar	tersedianya Dukungan Pelaksaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang disediakan	100%	Rp 102.500 000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makassar			**Rp** -	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Makassar			**Rp** -	

KOTA MAKASSAR

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu indikatif (RP.0000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.0000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Mebel	Makassar	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			Pengadaan Mebel	Makassar	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp -	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar			Rp 896.778 750,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar			**Rp 277.250.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Makassar			**Rp 3.634.664.100,00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100%	**Rp 20.000.000,00**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100%	Rp 460.593.600,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Makassar	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100%	Rp 79 200 000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Makassar	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100%	Rp 108 244.500,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100%	Rp 178.050.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100%	Rp 2 964.576.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Makassar			**Rp 1.086.464.343,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	Makassar			**Rp 442.436.000,00**	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu indikatif (RP.0000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.0000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintah Daerah					**Urusan Pemerintah Daerah**					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp 65.145.954,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp 40 130 000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Makassar	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp 930.418 389,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Makassar	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp 320.320 000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp 90 900.000,00	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Makassar	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp 73 800.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Makassar			**Rp 364.818.307,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Makassar			**Rp 555.136.300,00**	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu indikatif (RP.0000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.0000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Makassar			**Rp 167.204.915,00**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Makassar			**Rp 242.184.000,00**	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Makassar	Tersedianya penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	100%	Rp 68.982 707,00	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Makassar	Tersedianya penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	100%	Rp 11.445.000,00	
	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Makassar	Tersedianya penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	100%	Rp 118.222 208,00	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Makassar	Tersedianya penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	100%	Rp 157.539 000,00	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif (RP.0000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.0000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Makassar			**Rp 177.610.392,00**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Makassar			**Rp 386.152.300,00**	
	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Peta Potensi dan Usaha Kota Makasaar yang Tersedia		Rp 177.610.392,00	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Peta Potensi dan Usaha Kota Makasaar yang Tersedia		Rp 386.152 300,00	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Makassar			**Rp 300.000.000,00**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Makassar			**Rp 2.124.449.920,00**	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Makassar			**Rp 300.000.000,00**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Makassar			**Rp 2.525.497.920,00**	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Makassar			Rp 58 373.500,00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Makassar			Rp 1.625 412 640,00	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Makassar			Rp 241 626.500,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Makassar			Rp 499 037.280,00	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Makassar		100%	**Rp 1.213.464.494,00**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Makassar		100%	**Rp 1.295.015.400,00**	

PERUBAHAN

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu indikatif (RP.0000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.0000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Makassar			**Rp 1.213.464.494,00**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Makassar			**Rp 1.495.715.400,00**	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Makassar	Tersedianya pelaku usaha yang mendapatkan layanan perizinan dan non perizinan A/B/C berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100%	Rp 566 523.240,00	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Makassar	Tersedianya pelaku usaha yang mendapatkan layanan perizinan dan non perizinan A/B/C berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	100%	Rp 1.013.558 400,00	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Makassar	Terpenuhinya pelaksanaan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan dari kegatan usaha	100%	Rp 444 354 864,00	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Makassar	Terpenuhinya pelaksanaan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan dari kegatan usaha	100%	Rp 4.000.000,00	

2. Terlambatnya penerbitan SK (surat Keputusan) Kegiatan di bagian hukum.

3. **Tindak lanjut:**
   1. Meningkatkan koordinasi di tingkat pusat terkait potensi-potensi investasi di Kota Makassar;
   2. Menyediakan media/ruang forum investasi publik bagi investor PMA/PMDN;
   3. Menyusun *master plan* promosi investasi daerah untuk mendukung pelaksanaan program prioritas dan 10 investasi Kota Makassar Unggul Inklusif, Aman dan Berkelanjutan.
   4. Meningkatkan koordinasi antara bagian hukum, dinas teknis, dan sekretariat daerah.

3. Program pelayanan penanaman modal

Program pelayanan penanaman modal memiliki indikator output Jumlah perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Makassar yang dilayani. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kota Makassar disusun dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Serta Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar yang dimana seluruh jenis perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan oleh SKPD terkait dilimpahkan secara administratif oleh DPMPTSP Kota Makassar. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana setiap instansi atau Lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib memenuhi persyaratan penyelenggaraan DPMPTSP yang tertera dalam peraturan tersebut serta dapat mengukur indeks kepuasan masyarakat atas layanan PTSP.

Seluruh penyelenggaraan pelayanan perizinan dimuat dalam standarisasi operasional prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) sebagai dokumen penunjang dalam penyelenggaraan pelayanan di DPMPTSP Kota Makassar. Penyusunan SOP memuat rangkaian aktivitas/prosedur pelayanan yang diawali dari proses pendaftaran hingga penerbitan. Rangkaian prosedur pelayanan juga diatur dengan ketepatan waktu pelaksanaan sehingga dapat memberikan arahan kepada masyarakat terhadap tahapan prosedur perizinan. Selain itu, seluruh persyaratan terkait jenis-jenis perizinan berusaha diatur dalam dokumen SP dengan memuat landasan aturan hukum, persyaratan hingga jenis produk perizinan yang diterbitkan. Penyusunan dokumen SOP dan SP ini menjadi pemenuhan indikator penilaian penyelenggaraan publik yang wajib dilaksanakan oleh DPMPTSP selaku instansi penyelenggara pelayanan publik yang monitoring dan dievaluasi oleh KemenpanRB.

Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan perizinan juga memberikan dampak terhadap kepuasan masyarakat atas layanan di DPMPTSP. Pelaksanaan survey bertujuan untuk mengetahui gambaran pemberian layanan oleh DPMPTSP apakah sesuai dengan standarisasi prosedur ataukah tidak. Survey yang dilaksanakan dapat berupa pengisian kuisioner maupun

KOTA MAKASSAR

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu indikatif (RP.0000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.0000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Makassar	Tersedianya laporan jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	100%	Rp 138 652 690,00	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Makassar	Tersedianya laporan jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	100%	Rp 108 204 000,00	
	Koordinasi dan Sinkronasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Makassar	Tersedianya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan berusaha	100%	Rp 63 933.700,00	Koordinasi dan Sinkronasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Makassar	Tersedianya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan berusaha	100%	Rp 169 253.000,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Makassar			**Rp 1.647.561.362,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Makassar			**Rp 438.942.000,00**	
	Pengendalian Pelaksnaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Makassar			**Rp 1.647.561.362,00**	**Pengendalian Pelaksnaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Makassar			**Rp 555.642.000,00**	

KOTA MAKASSAR

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu indikatif (RP.0000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.0000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan UsahanyaPenanaman Modal	Makassar	Terlaksananya pengendalian penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	100%	Rp 632.934 252,00	Koordinasi dan Sinkronasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Makassar	Terlaksananya pengendalian penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	100%	Rp 112 565.000,00	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Modal	Makassar	Terlaksananya pengendalian penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	100%	Rp 411 873 790,00	Koordinasi dan Sinkronasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Makassar	Terlaksananya pengendalian penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	100%	Rp 216 372.000,00	
	Pengawasan Penanaman Modal	Makassar	Terlaksananya pengendalian penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	100%	Rp 602 753.320,00	Koordinasi dan Sinkronasi Pengawasan Pelakanaan Penanaman Modal	Makassar	Terlaksananya pengendalian penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	100%	Rp 110 005 000,00	

KOTA MAKASSAR

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu indikatif (RP.0000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.0000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Makassar			**Rp 210.600.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Makassar			**Rp 826.654.055,00**	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pengendalian penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		**Rp 210.600.000,00**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Makassar	Terlaksananya pengendalian penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		**Rp 826.654.055,00**	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Tersedianya layanan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis elektronik		Rp 210.600.000,00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Makassar	Tersedianya layanan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis elektronik	100%	Rp 826.654.055,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tujuan pelayanan publik adalah untuk menyediakan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Layanan yang terbaik adalah yang memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik yang terbaik adalah yang dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat, bahkan melebihi harapan publik.

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakikatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Pada Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal menyusun 5 Program utama dan 1 program penunjang dan terdiri dari 45 sub kegiatan pendukung. Terkait usulan program/kegiatan kegiatan masyarakat, hingga pada pelaksanaan Musrembang tingkat kota dan pembahasan pokok pikiran DPRD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak memiliki usulan dari masyarakat terkait urusan penanaman modal dan layanan terpadu akan tetapi terdapat beberapa rekomendasi dari DPRD Kota Makassar terkait prosedur layanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kota Makassar agar menyederhanakan alur peta bisnis permohonan dan penerbitan izin karena banyaknya keluhan dari masyarakat.

Terkait isu-isu untuk mempermudah prosedur pelayanan terkait pendaftaran dan jangka waktu penerbitan izin telah diatur dalam Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa seluruh mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan disusun dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SP (Standar Pelayanan) yang dikukuhkan dalam Surat Keputusan Walikota Makassar dan disusun dalam kegiatan pendukung Rencana Kerja Perangkat Daerah. Saat ini semakin banyaknya regulasi atau aturan dari pusat terkait pelaksanaan penanaman modal dan layanan terpadu satu pintu yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjabarkan seluruh urusan penanaman modal dan investasi yang masuk dalam daftar prioritas investasi sehingga Pemerintah Pusat memberikan arahan pada seluruh Pemerintah Daerah untuk semakin *update* terkait aturan-aturan baru dan secara langsung mempengaruhi beberapa aturan tentang persyaratan atau mekanisme perizinan dan non perizinan. Terlebih lagi, telah diterapkannya Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana seluruh proses pengolahan, pemantauan, pengawasan dan pengkajian teknis izin telah sepenuhnya dilaksanakan oleh SKPD Teknis dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar hanya memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak administrasi permohonan izin dan menerbitkan izin yang telah memenuhi syarat pemenuhan komitmen dari SKPD Teknis.

Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi antara seluruh *stakeholder* dan SKPD terkait untuk pelaksanaan layanan terpadu satu pintu

dan dapat disosialisasikan kepada masyarakat untuk terkait mekanisme atau alur perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Kota Makassar (T-C.32)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1		NIHIL			

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar tidak terdapat usulan program dan pokok-pokok pikiran Anggota DPRD sebagaimana disajikan pada tabel diatas.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun 2025. Sebagaimana yang dimaksud dalam surat keputusan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain dengan adanya ketentuan dari regulasi tersebut, tentunya mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan SKPD dalam mencapai target kinerja SKPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Makassar namun juga sumber pendanaan lainnya (pajak daerah, APBN, DAK, DID dan sumber-sumber lainnya).

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan menyatakan seluruh penyusunan neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan operasional tahun anggaran 2024, sehingga Pemerintah Daerah melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian dari peraturan tersebut. Rancangan awal program dan kegiatan SKPD Tahun 2025 yang disesuaikan berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 kemudian dilakukan pemetaan program dan kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019.

Penyesuaian klasifikasi program dan kegiatan berdasarkan indikator output kinerja antara permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri 90 Tahun

2020 dengan beberapa perbedaan nomenklatur dan indikator output kinerja. Program wajib yang ada pada klasifikasi Permendagri 90 Tahun 2020 untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 5 program dengan 1 program pendukung. Program wajib terdiri dari Program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal, program pelayanan penanaman modal, program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan program pengelolaan data sistem informasi penanaman modal.

Berdasarkan fungsi utama tersebut maka dijabarkan misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja

Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan Layanan dasar bidang Pendidikan dan kesehatan

Misi 3 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan

Misi 4 : Mengembangkan pusat inovasi seni budaya serta pariwisata

Misi 5 : Mewujudkan Kualitas tata Kelola pemerintahan yang Bersih dan Berdaya saing serta menegakkan ketertiban umum

Misi 6 : Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta Pembangunan kepemudaan dan olahraga

Misi 7 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mitigasi bencana

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar sesuai tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal melaksanakan tugas-tugas yang meliputi:

1. penyusunan dan perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun dua (2) program prioritas penunjang untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Kepala Daerah pada Tahun 2025 sebagai berikut:

- Kemudahan Berusaha dan Peluang Usaha *One on One Meeting business* dan *StartUp* UMKM
- Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)
- Layanan inovasi LONTARA (Layanan *Mobile* Perizinan Terpadu Untuk Rakyat) dan SOLATA' BOSS dalam kemudahan layanan OSS dan kemudahan berusaha serta inovasi layanan GASSINTA dan

SIPANA'MAMO untuk mengendalikan realisasi investasi PMA dan PMDN di Kota Makassar

Pelaksanaan program prioritas Layanan Mandiri OSS mendukung 6 Program Prioritas Kepala Daerah dalam hal kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dan UMKM di Kota Makassar sehingga mampu mendorong pemulihan dan pendapatan daerah. Layanan Mandiri OSS disusun dalam Program Pelayanan Penanaman Modal dengan 4 sub kegiatan pendukung indikator program. Keluaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Layanan Mandiri OSS mampu memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan UMKM untuk mendapatkan legalitas berusaha serta memberikan pengetahuan tambahan bagi masyarakat terkait penyelenggaraan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Penetapan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memberikan kewenangan bagi DPMPTSP Kota Makassar untuk melaksanakan layanan perizinan berusaha melalui sistem OSS (*One Single Submittion*) tanpa perlu menerbitkan jenis izin-izin usaha lainnya. Jadi, setiap pelaku usaha yang memiliki aktivitas usaha diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan berlaku hingga aktivitas usaha masih dilaksanakan. Setiap aktivitas usaha dilaksanakan berdasarkan tingkat risiko (kecil, menengah dan tinggi) sehingga perlu adanya sosialisasi bagi masyarakat terkait penyelenggaraan perizinan berusaha. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kewenangan menyelenggarakan perizinan berusaha juga didukung oleh ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah sehingga perlunya diterbitkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pelaksanaan kewenangan dari Walikota Makassar kepada DPMPTSP Kota Makassar.

Kegiatan penunjang dari pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang disusun dalam RKA SKPD dan DPA SKPD yaitu;

- Sewa Lisensi Omnichannel
- Pengadaan Pemeliharaan sistem informasi
- Penyediaan tenaga pendamping

Selain penyelenggaraan perizinan berusaha, realisasi investasi PMA dan PMDN di Kota Makassar Pemberian legalitas perizinan berusaha diupayakan mampu memberikan bantuan kepada setiap pelaku usaha baik dalam perbantuan perbankan maupun sebagai keabsahan kegiatan usaha bagi pelaku usaha di Kota Makassar. Keluaran pelaksanaan program ini selain meningkatkan perekonomian Kota Makassar juga memberikan ruang bagi UMKM agar dapat berkolaborasi dengan Perusahaan PMA dan PMDN untuk menanamkan investasinya di setiap kegiatan usaha UMKM agar produknya dapat bersaing secara nasional maupun internasional. Adanya koordinasi dan kolaborasi UMKM dan Perusahaan PMA dan PMDN juga dapat membuka akses ketersediaan peluang kerja serta peluang bisnis baru bagi masyarakat yang telah memiliki *Planning Project Bussiness* untuk ikut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah Kota Makassar. Pelaksanaan program layanan

mandiri OSS didukung oleh tiga (3) program wajib yang dianggarkan melalui pendanaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Makassar, berikut program wajib yang mendukung pelaksanaan Layanan Mandiri OSS yaitu:

- Program pelayanan penanaman modal;
- Program pengelolaan data dan sistem informasi layanan dan;
- Program penunjang urusan pemerintahan daerah.

Selain pemberian layanan perizinan berusaha bagi pelaku usaha, perlunya dibentuk sebuah organisasi atau lembaga dibawah kewenangan Walikota Makassar untuk mengendalikan pelaksanaan realisasi investasi PMA dan PMDN di Kota Makassar, salah satu penyelenggaraan pembentukan organisasi atau lembaga yaitu **Dewan Investasi Kota Makassar.** Meningkatnya jumlah investor PMA dan PMDN yang menanamkan investasinya di Kota Makassar juga perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Makassar untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan realisasi investasi serta kegiatan usaha seluruh perusahaan PMA dan PMDN. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan bagi PMA dan PMDN ini diupayakan juga dapat membantu dalam penyusunan Perda OMNIBUS *Law* salah satunya terkait urusan penanaman modal yang menjadi kewenangan Kota serta pelaksanaan perjanjian kerjasama atau penandatanganan *MoU* antara Pemerintah Kota Makassar dan perusahaan PMA/PMDN. Setelah dibentuknya Dewan Investasi Kota Makassar kemudian akan dilanjutkan dengan penyelenggaraan strategi promosi investasi dalam bentuk penyelenggaraan *One on One Meeting Bussiness.* Keluaran pelaksanaan program ini diharapkan mampu meningkatkan realisasi investasi PMA dan PMDN di Kota Makassar serta sebagai mediator dalam pelaksanaan kerjasama yang dapat membantu peningkatan pendapatan daerah Kota Makassar. Pelaksanaan program ini didukung oleh dua (2) program wajib yaitu:

- Program pengembangan iklim penanaman modal dan
- Program Pelayanan penanaman modal.

Berikut rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif tertuang dalam table 3.1 TC-33 sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKOTA MAKASSAR
TAHUN 2025 (T-C.33)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							17.856 100.000,00	22.721.782 335,00	22 373.068 000,00	4 516 968 000,00							10.473.144.464,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.856 100.000,00	22.721.782.335,00	22.373 068.000,00	4 516.968 000,00							10.473.144.464,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							17.856 100.000,00	22.721.782 335,00	22.373 068.000,00	4 516 968 000,00							10.473.144 464,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas**				100 90 90 Persen persen Persen	100 90 90 Persen persen Persen	13.629.330.125,00	16.669.936.660,00	17.132.870.325,00	-6.892.658.824,00							6.736.673.301,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*				12 Dokumen	12 Dokumen	185.035.000,00	87.955.000,00	55.695.000,00	-129.340.000,00			-	- -	SKPD		272.643.899,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	142 710 000,00	59 710 000,00	39 650 000,00	- 102 880 000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			103 238 145,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2 01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10 106 000,00	5 788 000,00	3 788 000,00	- 6 320 000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27 307 054,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2 .01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9 308 000,00	5 788 000,00	3 788 000,00	- 5 520 000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26 572 061,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 18 01 2 01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7 090 000,00	4 770 000,00	2 770 000,00	- 4 320 000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22 923 468 00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01.2 01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7 449 000,00	4 729 000,00	2 729 000,00	- 4 720.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22 209 334,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01.2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	8 370 000,00	7 170 000,00	2 770 000,00	- 5 600 000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70 393 837,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading							SATU PINTU
	2 18 01 2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun Berjalan*				12 Bulan	12 Bulan	9 650 33 2 685,00	11 059 7 32 820,0 0	11 059 7 33 735,0 0	1 409 401 05 0,00			-	- -	SKPD		1 013 26 1 469,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2 .02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	9 137 69 2 685,00	10 544 0 94 820,0 0	10 544 0 95 735,0 0	1 406 403.05 0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			14 334 7 63,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													ng Bulogading							
	2 18 01 2 02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	328 440 000,00	333 240 000,00	333 240 000,00	4 800 000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			785 287 884,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2 02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	180 000 000,00	182 398 000,00	182 398 000,00	2 398 000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			180 000 000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2 02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2 100 000 00	0,00	0,00	- 2 100.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			33 638 822,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01.2 .02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	12 Dokumen	2 100 000 00	0,00	0,00	- 2 100 000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																				SATU PINTU
	2 18 01 2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun Berjalan*				12 Bulan	12 Bulan	96 000 000,00	688 500 000,00	516 000 000 00	420 000 000,00			-	–	SKPD		445 165 515,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2 05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				160 Paket	160 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			145.165.515,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2 05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	14 Orang	96 000 000,00	688 500 000,00	516 000 000,00	420 000 000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300 000 000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	776 863 240 00	776 648 740,00	636 998 740 00	- 139 864 500,00			-	-	SKPD		2 110 217 186,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01.2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	1 080 000,00	4.800 000,00	4 800 000,00	3 720.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.512 021,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 18 01 2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlangkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	185 541 240,00	85 441 240,00	85 441 240,00	- 100 100 000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			156 283 682,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2 06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	1 329 000,00	52 476 000,00	52 476 000,00	51 147.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2 .06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20 647 000 00	89 907 500,00	89 907 500,00	69 260 500,00	Kota Makassar Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50 000 000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																				SATU PINTU
	2 18 01 2 .06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			287 336 455,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2 .06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokuman Bahan Bacaan dan Peraturan Perundeng-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	33 600 000,00	33 600 000,00	33 600 000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27 935 028,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													ng, Bulogading							
	2 18 01 2 06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3000 Laporan	3000 Laporan	20 000 000 00	29 360 000,00	29 360 000 00	9 360 000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			108 750 000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	300 586 000,00	273 584 000,00	133.934.000,00	- 166 652 000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			795 000 000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2 06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	110 100 000,00	103 500 000,00	103.500 000,00	- 6 600.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35 100 000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2 06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	102 500 000,00	102 500 000,00	102 500 000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			628 300 000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01.2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemennta h Daerah	*Jumlah Barang Penunjang Pemerintah daerah*				80 Unit	80 Unit	0 00	0,00	896 778 750,00	896 778 750 00			-	- -	SKPD		1 256 71 5 500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2 .07 0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			268 474 700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Pandang, Bulogading							
	2 18 01 2 .07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				60 Unit	60 Unit	0,00	0,00	896 778 750,00	896 778 750,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	–			970 240 900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				3 Jenis	3 Jenis	2 548 753 200,00	3.634 664 100,00	3 533 414 100,00	984 660 900,00			-	- -	SKPD		277 250. 000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2 08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	535 508 400,00	460 593 600 00	460 593 600,00	- 74 914 800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20 000 000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	102 244 800,00	108 244 500,00	108 244 500,00	5 999 700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			79 200 000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1 911 000 000,00	3 065 826 000,00	2 964 576 000 00	1 053 576 000 00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			178 050 000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Makassar, Ujung Pandang, Bulogading							
	2 18 01 2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Secara Rutin / Berkala*				12 Bulan	12 Bulan	372 346 000 00	442 436 000,00	434 250 000,00	61 904 000,00			-	- -	SKPD		1 359 419 632,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2 09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43 630 000 00	43 630 000,00	40 130 000,00	- 3 500 000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			65 145 954,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01.2 09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	50 Unit	254 916 000,00	325 006 000,00	320.320. 000,00	65 404 000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -				1 070 373 675 00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2 09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	41 Unit	73 800 000,00	73 800 000,00	73 800 000.00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -				90 900,000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 01 2 09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar Ujung Pandang Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			133.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Investor PMA Berskala Nasional Jumlah Investor PNDM Berskala Nasional Jumlah Investasi PNDM Berskala Nasional**				**120 200 2 Investor Investor Trilyun**	**120 200 2 Investor Investor Trilyun**	**1 814 203.920,00**	**2 525 497.920,00**	**2.124.449 920,00**	**- 1.514 173 920,00**							**364.815.307,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 18 02 2 .01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	*Jumlah Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Makassar yang ditetapkan*				2 Kegiatan	2 Kegiatan	195 174 000,00	242 184 000,00	168 984 000,00	- 26 190 000,00			-	- -	SKPD		187 204 915,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 02 2 01 0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				2 Dokumen	2 Dokumen	63 445 000,00	11 445 000,00	11.445 000,00	- 52 000 000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			68 982 707,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 02 2 01 0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	KPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				4 Dokumen	4 Dokumen	131 729 000,00	230 739 000,00	157 539 000,00	25 810 000,00	Kota Makassar Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar Ujung Pandang Bulog ading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			118 222 208,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 02 2 02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	*Jumlah Peta Potensi Investasi Kota Makassar yang disusun*				15 Laporan	15 Laporan	216 508 000,00	386 152 300,00	386 152 300,00	169 644 300,00			-	- -	SKPD		177 610 392,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 02.2 02 0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	216 508 000,00	386 152 300,00	386 152 300,00	169 644 300,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			177 610 392,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Jumlah Investor serta Investasi PMA dan PMDN Berskala Nasional**				**100 Persen**	**100 Persen**	**411 682 000,00**	**628.336.300,00**	**555 136.300,00**	**- 46.866 693,00**							**300.030 000,00**	
	2 18 03 2 .01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	*Jumlah Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kota Makassar yang Diselenggarakan*				3 Kegiatan	3 Kegiatan	1 814 203 920,00	2.525.497.920,00	2 124 449 920,00	310 246 000,00			-	–	SKPD		300 030 000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 03 2 01 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	1 575 606 640,00	2 026 460 640,00	1 625 412 640,00	49 806 000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			241 656 500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 03 2 01 0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	238 597 280,00	499 037 280,00	499 037 280,00	260 440 000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			58.373 500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	**2 18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Presentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.155.480.400,00**	**1.495.715.400,00**	**1.295.015.400,00**	**57.984 094,00**							**1.213 464.494,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2 18 04.2 01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	*Presentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*				100 Persen	100 Persen	1 155 480 400,00	1 495 715 400,00	1 295 015 400,00	139 535 000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	- -	-		1 213 464 494 00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 04 2 .01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	144 953. 000,00	267 953 000,00	169 253 000,00	24 300 000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)	- -			63 933 700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 04 2 .01 0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				21000 Pelaku Usaha	21000 Pelaku Usaha	956 323 400,00	1 073 558 400,00	1 013 558 400,00	57 235 000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	- -			566 523. 240,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 04 2 01 0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				250 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	50 204 000,00	150 204 000,00	108 204 000,00	58 000 000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			138 652 690,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 04 2 01 0008	Pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	PBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanaman berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dan Pelaku Usaha				1000 Kegiatan Usaha	1000 Kegiatan Usaha	4 000 000,00	4.000 000,00	4 000 000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	- -			444 354 864 00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Presentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Dilaksanakan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**23 069.500,00**	**555.642.000,00**	**438 942.000,00**	**1.624 491.862,00**							**1.647.561.362,00**	
	2 18 05 2 .01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi	*Jumlah Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota*				12 Bulan	12 Bulan	23 069 500 00	555 642 000,00	438.942 000,00	415 872 500,00			-	- -	SKPD		1 647 56 1 362,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	*Makassar yang Dikendalikan*																	DU SATU PINTU
	2 18 05 2 .01 0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	9 517 500,00	138 965 000,00	112 565 000 00	103 047 500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			632 934 252,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 05 2 01 0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Penzinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasa				12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	3 272 000 00	269 172 000,00	216 372 000.00	213 100 000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			411 873 790,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			n Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																	
	2 18 05 2 .01 0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dan Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan , serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	10 280 000 00	147 505 000,00	110 005 000,00	99 725 000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			602 753 320,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Presentase Kebutuhan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Terpenuhi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**822 334.055,00**	**826.654.055,00**	**826 654.055,00**	**-611.734.055,00**							**210.600.000,00**	
	2 18 06 2 01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat Kota Makassar yang dikelola*				12 Bulan	12 Bulan	822 334 055 00	826 654 055,00	826 654 055,00	4 320 000,00			-	- -	SKPD		210 600 000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2 18 06 2 01 0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara				12 Dokumen	12 Dokumen	822 334 055.00	826 654 055,00	826 654 055.00	4 320 000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			210 600 000 00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan																	
	JUMLAH								17.856.100.000,00	22.721.782.335,00	22.373.068.000,00	4.516.968.000,00							10.473.144.464,00	

BAB IV
PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar diharapkan prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran visi dan misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan dokumen Perubahan RKA dan DPPA SKPD. Dalam kaitan ini maka kerjasama SKPD dengan Tim TAPD Kota Makassar sangat diperlukan sehingga program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. SKPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Rencana Kerja merupakan Tolak ukur dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar di masa yang akan datang. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Kota Makassar Tahun 2025. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan yang lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan sasaran tugas dan wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dalam memajukan Pelaksanaan program prioritas perangkat daerah yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan percepatan visi dan misi Kepala Daerah. Dari perencanaan ini bertujuan agar terwujudnya efektifitas dan efisiensi anggaran. BAPPEDA Kota Makassar mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Kepala SKPD mengevaluasi program-program yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

4.1 Catatan Penting

Dalam upaya menciptakan lingkungan yang mendukung investasi dan pelayanan publik yang efisien, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar memerlukan perencanaan yang matang. Penyusunan rencana kerja yang baik bukan hanya tentang menetapkan jadwal dan anggaran, tetapi juga tentang memahami kebutuhan, menetapkan tujuan yang jelas, dan melibatkan semua pihak terkait. Berikut adalah beberapa catatan penting dalam proses penyusunan rencana kerja untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan inisiatif ini.

Pertama-tama, analisis kebutuhan dan tujuan menjadi langkah awal yang krusial. Setiap perubahan atau inisiatif baru harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi dan kebutuhan yang

harus dipenuhi. Dengan melakukan analisis menyeluruh, DPMPTSP dapat menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu.

Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan menjadi inti dari rencana kerja. DPMPTSP perlu mengidentifikasi program-program utama yang akan dilaksanakan, seperti peningkatan pelayanan perizinan dan promosi investasi. Setiap program harus dipecah menjadi kegiatan-kegiatan rinci yang mencakup langkah-langkah spesifik, tanggung jawab yang jelas, dan waktu pelaksanaan yang realistis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap aspek dari program dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai rencana.

Perencanaan anggaran adalah elemen tak kalah penting. Estimasi biaya untuk setiap program dan kegiatan harus dihitung secara akurat, mencakup semua kebutuhan seperti sumber daya manusia, peralatan, dan teknologi. Selain itu, identifikasi sumber pendanaan baik dari anggaran pemerintah daerah, hibah, atau sumber lainnya harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan memiliki dukungan finansial yang memadai.

Jadwal dan tenggat waktu juga harus dirancang dengan cermat. Membuat jadwal yang jelas dan realistis untuk setiap program dan kegiatan akan membantu dalam manajemen waktu yang efektif. Tenggat waktu yang ditetapkan harus sesuai dengan kapasitas sumber daya yang ada untuk menghindari penundaan yang dapat mempengaruhi keseluruhan kegiatan.
Pengorganisasian sumber daya merupakan langkah berikutnya. Sumber daya manusia, peralatan, dan teknologi harus dialokasikan dengan tepat. DPMPTSP harus memastikan bahwa staf yang terlibat memiliki keterampilan dan kapasitas yang sesuai, serta memastikan semua sumber daya lain tersedia sesuai kebutuhan.

Kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Semua program dan kegiatan harus mematuhi kebijakan, peraturan, dan regulasi yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun nasional. Jika perlu, usulkan revisi kebijakan untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja dengan lebih efektif.

Untuk memastikan bahwa rencana kerja berjalan sesuai dengan harapan, sistem monitoring dan evaluasi harus diterapkan. Tentukan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur kemajuan dan hasil dari setiap program. Sistem pelaporan dan evaluasi yang teratur akan memungkinkan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan hasil dan dampak dari pelaksanaan rencana kerja.

Koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder adalah kunci untuk keberhasilan pelaksanaan rencana kerja. Identifikasi pihak-pihak terkait, termasuk instansi pemerintah lain, investor, dan masyarakat, serta pastikan adanya koordinasi yang baik dengan mereka. Kerjasama yang efektif akan mendukung pencapaian tujuan dan meningkatkan efektivitas program.

Penanganan risiko harus menjadi bagian integral dari perencanaan. Identifikasi risiko potensial yang dapat mempengaruhi pelaksanaan rencana kerja strategi ini akan membantu dalam mengurangi dampak risiko dan memastikan kelancaran pelaksanaan.

Terakhir, fokus pada peningkatan berkelanjutan adalah kunci untuk keberhasilan jangka panjang. Kumpulkan umpan balik secara teratur dari

pengguna layanan dan stakeholder untuk meningkatkan proses. Selain itu, terus lakukan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta pertimbangkan penerapan teknologi terbaru atau metode baru yang dapat mendukung tujuan DPMPTSP.

Dengan mengikuti catatan-catatan penting ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dapat menyusun rencana kerja yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan investasi. Perencanaan yang matang akan memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan pertimbangan yang tepat, mendukung pencapaian tujuan, dan memberikan manfaat maksimal bagi Kota Makassar.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan Pembangunan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2025 bertujuan untuk melaksanaan program prioritas perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan percepatan visi dan misi Kepala Daerah.

Hal-hal penting yang menjadi catatatn maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan SKPD sebagai berikut:

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang bersifat penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja SKPD
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.
4. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Pada proses perencanaan yang aspiratif keterlibatan Masyarakat dalam proses perencanaan perlu ditingkatkan dari tahapan perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan Pembangunan, sehingga Masyarakat memiliki rasa dan tanggungjawab terhadap hasil-hasil Pembangunan yang telah dilaksanakan.
6. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makasar adalah dokumen perencanaan tahunan dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan dari Pemerintah Kota Makassar, kebijakan Propinsi Sulawesi Selatan dan Kebijakan pemerintah pusat.
7. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar harus memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen

perencanaan diantaranya RPJMD Kota Makassar, RKPD Kota Makassar, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

8. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembagunan tahun berikutnya.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Makassar yang tertuang dalam RKPD Perubahan Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melaksanakan serangkaian langkah tindak lanjut terhadap dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025. Perubahan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis, antara lain hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, penyesuaian terhadap indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan, serta perubahan alokasi anggaran yang terjadi di tengah tahun berjalan.

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan reviu menyeluruh terhadap dokumen Renja eksisting dengan memperhatikan hasil forum konsultasi publik dan forum perangkat daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan untuk memastikan bahwa setiap perubahan telah sesuai dengan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021–2026 dan prioritas dalam RKPD Perubahan Tahun 2025. Selanjutnya, dilakukan pemutakhiran terhadap indikator kinerja yang digunakan oleh perangkat daerah. Beberapa indikator kinerja, baik pada level outcome maupun output, disesuaikan agar lebih relevan dan terukur dalam menggambarkan capaian pembangunan khususnya di sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Sebagai bagian dari tindak lanjut teknis, dilakukan koordinasi intensif dengan Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menjamin sinkronisasi program dan kegiatan prioritas dalam dokumen Perubahan APBD 2025. Langkah akhir dari seluruh proses ini adalah penginputan dokumen Renja Perubahan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai jadwal yang ditentukan.

Makassar, 12 Agustus 2025
Mengetahui,
Kepala Dinas

H.Muhammad Mario Said, S.IP., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda. IV/c
NIP : 1973 0523 199202 1 00 1



PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Dinas Pendidikan



RENCANA KERJA

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dipandang perlu untuk diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, dengan menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana di maksud Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan.:
1. Wakil Wali Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
7.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
9.	Dinas Sosial Kota Makassar
10.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
12.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
13.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Makassar
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
22.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
23.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
24.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
25.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
26.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
27.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
28.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
29.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar

31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
32.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
34.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
35.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
36.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
37.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
38.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
39.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
40.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
43.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
44.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
45.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
46.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
47.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
58.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
49.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
50.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar
51.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

WALIKOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas Berkat dan Rahmat-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kota Makassar telah selesai disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 343 ayat (1) tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2025 memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2025 triwulan I dan uraian mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025. Dan juga mengenai rencana usulan program dan kegiatan perubahan pada tahun berjalan.

Dengan selesainya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2025 ini diiharapkan dapat memberikan gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar selama tahun 2025. Semoga Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya di Kota Makassar dan menjadi bahan evaluasi perencanaan program dan anggaran serta perumusan kebijakan di tahun yang akan datang. Akhir kata, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini.

Makassar, 12 Agustus 2025

KEPALA DINAS

ACHI SOLEMAN, S.STP.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19770831 199511 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025
2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 53
2.2.1 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 53
2.2.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal 53
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 65
2.4 Review terhadap Rancangan Akhir P-RKPD Tahun 2025..... 69

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Makassar 129

BAB IV PENUTUP
4.1. Kesimpulan 175

DAFTAR TABEL

Tabel E.81	Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2025	14
Tabel T.C 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2021-2026	57
Tabel T.C 31	Rancangan Akhir P-RKPD Dinas Pendidikan Tahun 2025	72
Tabel T.C 33	Rencana Usulan Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2025	129

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2025 adalah tahapan penyusunan perubahan Rencana Kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2025-2029. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Dinas Pendidikan Kota Makassar menyusun perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai langkah untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja sesuai tuntutan perubahan dari masyarakat maupun stakeholder.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah memperhatikan perkembangan serta kebutuhan masyarakat pada sektor Pendidikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiaatan Tahun 2025 sampai pada triwulan I dan perhitungan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini dilakukan agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Prinsip Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas pemerintah Kota Makassar.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
4. Perubahan Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalannya rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perubahan Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar Kota Makassar Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun guna mengoptimalkan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Makassar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Landasan hukum

Bagian ini memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6398);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Mininal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 534);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Invertarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
29. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2025);
31. Peraturan Walikota Makassar Nomor 84 Tahun 2023 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 85);
32. Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas peraturan walikota makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025
33. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2025).

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud kegiatan penyusunan perubahan Renja adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan pendidikan pada tahun 2025.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Makassar adalah :

- Mengevaluasi terhadap program dan kegiatan tahun sebelumnya sehingga dapat ditentukan apakah program dan kegiatan tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan untuk tahun berikutnya;
- Mengumpulkan rancangan/usulan perubahan program dan kegiatan dari unit-unit dalam lingkup kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Memilih, memilah dan menelaah rancangan/usulan perubahan program dan kegiatan dan disusun berdasarkan skala prioritas;

- Sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada APBD perubahan tahun 2025 bagi Dinas Pendidikan Kota Makassar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan pendidikan Kota Makassar.
- Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2025 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Menguraikan Mengenai gambaran umum penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan rencana kerja perangkat daerah, proses penyusunan perubahan rencana kerja, dan rincian perubahan rencana kerja tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN (2025)

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan triwulan I dan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja terhadap Renstra SKPD.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Makassar
Bab ini berisikan penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, serta uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa :

4.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan
4.3 Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Secara umum Dinas Pendidikan Kota Makassar telah melaksanakan tugasnya dengan indikator input (masukan), output (keluaran), dan outcome (hasil/pengaruh). Hasil evaluasi triwulan I capaian kinerja Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 terdapat 5 (lima) program yang terdiri atas 1 Program rutin yang terdiri dari 7 kegiatan dengan total 26 sub kegiatan dan 4 (empat) Program utama Dinas Pendidikan Kota Makassar yang terdiri dari 7 kegiatan dengan 56 sub kegiatan dengan rincian realisasi pelaksanaan APBD hingga triwulan I (akhir bulan Maret) anggaran Dinas Pendidikan Kota Makassar 2025 sebesar 1.349.271.934.378 atau 100 persen dengan proporsi realisasi sebesar Rp.206.461.510.524 atau 15,30 persen sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 15,30 persen. Dan persentase capaian kinerja dan realisasi keuangan setiap program dapat dilihat sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG/PENDUKUNG

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No.	Program/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (%)
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1.	Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	**90**	**6,35%**	**Rp.192.963.024.024 (20,56%)**
2.	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	**100**	**21,07%**	
3.	persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	**90**	**8,33%**	

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari :

1) **Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat Peningkatan Kapasitas** dengan target kinerja 90 persen. Indikator kinerja ini didukung 1 kegiatan yaitu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar **6,35** persen sehingga capaian realisasi kinerja sebesar **6,35** persen.

2) **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah** dengan target kinerja 100 persen. Indikator kinerja program ini didukung 2 kegiatan yaitu 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, 2) Administrasi keuangan perangkat daerah. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar **21,07** persen sehingga capaian realisasi kinerja sebesar **21,07**persen.
3) **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik** dengan target kinerja 90 persen. Indikator kinerja program ini didukung 2 kegiatan yaitu 1) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 2) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar **8,33** persen sehingga capaian realisasi kinerja sebesar **8,33** persen.

Rata-rata Capaian Realisasi kinerja hingga Triwulan I sebesar persen dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.192.963.024.024**,- atau **15,30** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp.1.349.271.934.378,-** atau **100** persen dengan predikat kinerja program hingga triwulan I adalah Sangat Rendah.

Faktor Pendukung :

1. Tersedianya anggaran yang memadai dalam pelaksanaan program rutin setiap bulannya
2. Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan pegawai dengan proporsi realisasi sebesar 20,77 persen

Faktor Penghambat :

1. Adanya revisi Surat Keputusan KPA Masing-masing kegiatan sesuai rotasi jabatan yang baru

Tindak Lanjut :

1. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan melakukan koordinasi dengan bidang teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar perihal anggaran kas yang tidak sesuai.

II. PROGRAM UTAMA

1. Program Pengelolaan Pendidikan

No	Program/Indikator Program	Target Kinerja	Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (%)
	Program Pengelolaan Pendidikan			
1.	Angka Harapan Lama Sekolah	16,56 tahun	0	**Rp.13.498.486.500 (3,11%)**
2.	Angka Partisipasi Kasar			
	PAUD	65,52%	34,29%	

	SD	100%	93,09%	
	SMP	100%	86,32%	
3.	Angka Partisipasi Murni			
	PAUD	59,63%	32,23%	
	SD	100%	85,36%	
	SMP	100%	73,99%	
4.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	12 tahun	0	
5.	Jumlah Penerima Beasiswa "Anak Lorong Berprestasi"	400 orang	0	
6.	Persentase Ketuntasan Pendidikan Kesetaraan (A,B,C)	94,26%	0%	
7.	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan			
	PAUD	92%	0%	
	SD	78%	0%	
	SMP	92%	0%	

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa :

1) **Angka Harapan Lama Sekolah** dengan target kinerja 16,56 tahun. Indikator kinerja progran ini didukung 3 kegiatan yaitu 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan 3) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 0 persen sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 0 persen.
2) **Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD** dengan target kinerja 65,52 persen. Indikator kinerja program ini didukung 1 kegiatan yaitu pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 34,29 persen sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 52,34 persen.
3) **Persentase Angka Partisipasi Kasar (SD)** dengan target kinerja 100 persen. Indikator kinerja program ini didukung 2 kegiatan yaitu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan 2) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 93,09 persen sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 93,09 persen.

4) **Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP** dengan target kinerja 100 persen. Indikator kinerja program ini didukung 2 kegiatan yaitu 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan 2) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 86,32 sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 86,32 persen.
5) **Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD** dengan target kinerja 59,63 persen. Indikator kinerja program ini didukung 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 32,23 persen sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 54,05 persen.
6) **Persentase Angka Partipasi Murni (APM) SD** dengan target kinerja 100 persen. Indikator kinerja program ini didukung 2 kegiatan yaitu 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan 2) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 85,36 persen sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 85,36 persen.
7) **Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP** dengan target kinerja 100 persen. Indikator kinerja program ni didukung 2 kegiatan yaitu 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan 2) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 73,99 sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 73,99 persen.
8) **Angka Rata-rata Lama Sekolah** dengan target kinerja 12,20 Tahun. Indikator kinerja program ini didukung 3 kegiatan yaitu 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, 3) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 0 tahun sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 0 persen.
9) **Jumlah Penerima Beasiswa "Anak Lorong Berprestasi"** dengan target kinerja 400 orang. Indikator Kinerja program ini didukung 2 kegiatan yaitu 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Capaian realisasi untuk indikator ini telah dianggap tuntas karena telah memenuhi target renstra di tahun 2023 sebesar 2000 orang atau 500 persen. Tapi melihat dari hasil analis kebutuhan maka tahun 2025 masih dianggarkan untuk kebutuhan siswa yang kurang mampu
10) **Persentase Ketuntasan Pendidikan Kesetaraan (A,B,C)** dengan target kinerja 94,26 persen. Indikator kinerja program ini didukung 1 kegiatan yaitu 1) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 94,26 persen sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 0 persen.
11) **Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD dalam Kondisi Baik** dengan target kinerja 78 persen. Indikator kinerja program ini didukung 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 0 persen sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 0 persen.
12) **Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dalam Kondisi Baik** dengan target kinerja 78 persen. Indikator kinerja program ini didukung

1 kegiatan yaitu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 0 persen sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 0 persen.

13) **Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP dalam Kondisi Baik** dengan target kinerja 92 persen. Indikator kinerja program ini didukung 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Realisasi sampai dengan triwulan I sebesar 0 persen sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 0 persen.

Rata-rata Capaian Realisasi kinerja hingga Triwulan I sebesar **34,24 persen** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.13.498.486.500,-** atau **3,12 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp.433.920.195.360,-** dengan predikat kinerja program hingga triwulan I adalah **Sangat Rendah**.

Faktor Pendukung :

1. Terlaksananya pencairan Dana BOS SD, SMP, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Tahap I tepat waktu
2. Ada kegiatan yang mendukung program prioritas walikota seperti pengadaan seragam sekolah gratis untuk jenjang SD dan SMP

Faktor Penghambat/Permasalahan :

1. Adanya revisi surat keputusan KPA masing-masing kegiatan sesuai rotasi jabatan yang baru

Tindak Lanjut :

1. Berkordinasi dengan bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah Kota Makassar
2. Berkordinasi di Bagian Hukum

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	
			Kinerja	Anggaran
	Pengembangan Kurikulum			
1.	Persentase Kebutuhan Kurikulum yang Dikembangkan	90%	0	0

Program Pengembangan Kurikulum dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. **Persentase kebutuhan kurikulum yang dikembangkan** dengan target kinerja 90 persen dan realisasi kinerja sebesar 0 persen sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 0 persen.

   Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dalam program ini. Pencapaian target indikator kinerja Program Pengembangan Kurikulum didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.048.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0,- atau

0% sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 0 persen. Rata-rata capaian kinerja 0% dan rata-rata capaian keuangan 0% dengan predikat **sangat rendah** karena program ini belum dilaksanakan sehingga belum ada realisasi anggaran dan capaian kinerja pada triwulan I.

3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No.	Program/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Kinerja	Anggaran (%)
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
1.	**Persentase Guru Bersetifikasi**			**0**
	PAUD	39,49%	0%	
	SD	47,83%	0%	
	SMP	47,88%	0%	
2.	**Rasio Guru-Murid**			
	PAUD	1:18	0	
	SD	1:30	0	
	SMP	1:32	0	

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. **Persentase Guru Yang Bersertifikasi** dengan target kinerja **PAUD** sebesar 39,49 persen dan realisasi kinerja sebesar 0 persen sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 0 persen. Untuk target kinerja pada jenjang **SD** sebesar 47,83 persen dan realisasi kinerja sebesar 0 persen sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 0 persen dan untuk target kinerja pada jenjang **SMP** sebesar 47,88 persen dan realisasi kinerja sebesar 0 persen sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 0 persen.
2. **Rasio Guru-Murid** dengan target kinerja **PAUD** sebanyak 1:18 guru-murid dan realisasi kinerja sebesar 0 persen sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 0 persen. Untuk target kinerja pada jenjang **SD** sebanyak 1:30 guru-murid dan realisasi kinerja sebesar 0 persen sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 0 persen dan untuk target kinerja pada jenjang **SMP** sebanyak 1:32 guru-murid dan realisasi kinerja sebesar 0 persen sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 0 persen.

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dalam program ini. Pencapaian target indikator kinerja Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 95.680.000,- atau 100 persen dengan realisasi Rp 0,- atau 0% sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 0 persen. Rata-rata capaian kinerja masih 0 persen dan rata-rata capaian keuangan 0% dengan predikat kinerja **Sangat Rendah** karena program ini belum dilaksanakan sehingga belum ada realisasi anggaran dan capaian kinerja pada triwulan I.

4. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN

No.	Program/Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi	
				Kinerja	Anggaran
	Pengendalian Perizinan Pendidikan				
1.	Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Lembaga Pendidikan yang Diawasi Perizinannya	38,15%	0%	0

Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. **Persentase Lembaga Pendidikan yang Diawasi Perizinannya** dengan target kinerja 38,15% dan realisasi kinerja sebesar 0 persen sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 0 persen

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dalam program ini. Pencapaian target indikator kinerja Program Pengendalian Perizinan Pendidikan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.182.000,- atau 100 persen dengan realisasi sebesar Rp 0,- atau 0% sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 0 persen. Rata-rata capaian kinerja masih 0 persen dan rata-rata capaian keuangan 0 persen dengan predikat kinerja **Sangat Rendah** karena program ini belum dilaksanakan sehingga belum ada realisasi anggaran dan capaian kinerja pada triwulan I.

Secara ringkas realisasi pelaksanaan program/kegiatan pada Perubahan Renja-PD Tahun 2025 hingga triwulan I ditunjukkan pada tabel T.C 29 berikut ini :

Tabel E.81
Evaluasi Hasil Renja
Dinas Pendidikan Kota Makassar
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
2	3	4	5																				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				432.441.824.699	1.349.271.934.378		206.461.510.524		0,0		0,0		0,0		206.461.510.524		15,30		206.461.510.524		11,88	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				432.441.824.699	1.349.271.934.378		206.461.510.524		0,0		0,0		0,0		206.461.510.524		15,3		206.461.510.524		11,88	
1.01	Dinas Pendidikan				432.441.824.699	1.349.271.934.378		206.461.510.524		0,0		0,0		0,0		206.461.510.524		15,3		206.461.510.524		11,88	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	21.470.861.379	938.434.971.058	8,33	192963024024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,33	192.963.024.024	9,26	192.963.024.024	8,33	192.963.024.024	9,26	23,19	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	%	100			21,07		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,07		21,07		21,07		21,07		
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90			6,35			0,0		0,0			6,35		7,06		6,35		7,06		
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	93.882.800	251.553.000	32,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,14	0,0	32,14		32,14	0,0	0,0		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	26.734.600	64.213.000	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	25		1	0,0	0,0		
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	10.460.000	20.795.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	12.100.000	11.460.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	11.098.000	23.865.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	100		1	0,0	0,0		
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	10.466.400	18.555.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	1	8.316.800	41.400.000	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	100	0,0	1	0,0	0,0		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.										
		SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar																						
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	14.707.000	71.265.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**13.009.357.443**	**933.992.262.098**	**10**	**192.792.024.024**							**10**	**192.792.024.024**	**10**	**20,64**	**10**	**192.792.024.024**		**23,54**		
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	8290	11.939.543.243	926.429.040.298		192.399.894.024								192.399.894.024		20,77		192.399.894.024		23,72		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	690.120.000	650.788.5000	3	279.630.000							3	279.630.000	25	4,3	3	279.630.000		4,5	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	109.215.000	1.037.526.800	3	112.500.000							3	112.500.000	25	10,84	3,0	112.500.000		9,49	
1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	12	5.164.000		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0			0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
1.01.01.2.02.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	Laporan	1	265.315.200	17.810.000	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	%	**100**	**925.845.000**	**166.000.000**	**7,14**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,14**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,14**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Paket	0	133.845.000		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
		Kelengkapan																					
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	14	792.000.000	138.000.000	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	7,14		1,0	0,0	0,0	0,0	
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	%	**100**	**1.727.877.136**	**547.443.960**	**5,56**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,56**	**0,0**	**5,56**	**0,0**	**5,56**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.760.000	2.520.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	216.520.336	27.867.560	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	92.540.800	20.048.400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	26.616.000	30.888.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	Dokumen	6	17.280.000	157.120.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
		Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan																					
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	1.368.160.000	309.000.000	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0,0	33,33	0,0	1	0,0	0,0	0,0	
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**0,0**	**3.201.848.000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	1	3.201.848.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
		Disediakan																					
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Capaian Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**1.502.632.000**	**3.120.912.000**	**16,67**	**171.000.000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,67**	**171.000.000**	**16,67**	**5,48**	**16,67**	**171.000.000**	**0,0**	**3,71**	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	231.172.000	976.452.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	3	1.271.460.000	2.144.460.000	1	171.000.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	171.000.000	33,33	7,97	1	171.000.000	0,0	5,29	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
		Disediakan																					
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	%	100	1.009.419.000	356.800.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	31	44.380.000	286.800.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	65	43.450.000	70.000.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.										
		yang Dipelihara																						
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	921.589.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																**12,46**	**55,77**						
	PREDIKAT KINERJA																**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
1.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Jumlah Penerima Beasiswa "Anak Lorong Berprestasi"**	**Orang**	**400**	**410.797.053.320**	**433.920.195.360**	**0,0**	**13.498.486.500**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13.498.486.500**	**0,0**	**3,11**	**0,0**	**13.198.486.500**	**0,0**	**0,0**		
		Angka Harapan Lama Sekolah	**Tahun**	**16,56**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
		Angka Rata-Rata	**Tahun**	**12,20**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
		Lama Sekolah																					
		Angka Partisipasi Murni (PAUD)	%	59,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Angka Partisipasi Murni (SD)	%	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Angka Partisipasi Murni (SMP)	%	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Angka Partisipasi Kasar (PAUD)	%	65,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Angka Partisipasi Kasar (SD)	%	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Angka Partisipasi Kasar (SMP)	%	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Persentase Sarana Dan Prasana Pendidikan (SD)	%	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
		Dalam Kondisi Baik																					
		Persentase Sarana Dan Prasana Pendidikan (PAUD) Dalam Kondisi Baik	%	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Persentase Sarana Dan Prasana Pendidikan (SMP) Dalam Kondisi Baik	%	92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Persentase Ketuntasan Pendidikan Kesetaraan (A, B, C)	%	94,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pengelolaan	%	100	256.994.539.580	261.796.760.780	5,26	1.683.000.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,26	1.683.000.000	5,26	0,64	5,26	1.683.00	0,0	0,30	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.										
		Sekolah Dasar yang Tersedia																		0.000				
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru Yang Telah dibangun	Ruang	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	324.008.640	324.008.640	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.02.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.02.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	4	109.368.203.940	109.368.203.940	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	5	5.498.252.000	5.498.252.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	12.150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
		yang Tersedia																					
1.02.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	950	299.163.000	299.163.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	496	7.491.748.400	7.491.748.400	0,0	1.683.000.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.683.000.000	0,0	22,46	0,0	1.683.000.000	0,0	7,75	
1.02.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	Orang	942	733.200.000	733.200.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
		Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi																					
1.02.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	240	164.130.000	164.130.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	456	118.165.100.000	118.165.100.000	456	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	456	0,0	100	0,0	456	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan	Jumlah Tenaga Pengelola	Orang	456	165.417.00	149.417.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
	Dana BOS Sekolah Dasar	yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																					
1.02.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	8	259.169.000	243.169.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	15	8.712.199.800	8.712.199.800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,	Jumlah Sarana, Prasarana	Unit	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
	Prasarana dan Utilitas Sekolah	dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat																					
1.02.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	430	86.855.800	86.855.800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	25	5.727.092.000	5.727.092.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Jumlah Pengelolaan Sekolah Menengah**	**%**	**100**	**127.573.722.980**	**133.680.600.020**	**5,56**	**11.743.486.500**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,56**	**11.743.486.500**	**5,56**	**8,78**	**5,56**	**11.743.486.500**	**0,0**	**4,33**	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
		yang Tersedia																					
1.02.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	5	43.318.382.400	43.318.382.400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	14	4.348.842.740	4.348.842.740	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	1	4.785.000	4.785.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
		Sedang/Berat																					
1.02.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	799.632.300	799.632.300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	4	328.761.500	328.761.500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	4	2.020.636.400	2.020.636.400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik	8400	643.855.000	635.855.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
		yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik																						
1.02.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	945	537.812.000	537.812.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada	Orang	295	6.164.052.000	6.164.052.000	0,0	1.372.500.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.372.500.000	0,0	22,27	0,0	1.372.500.000	0,0	9,13		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
	Menengah Pertama	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																					
1.02.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	650	336.970.000	336.970.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan	Satuan Pendidikan	190	180.080.000	172.080.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
		Pembinaan																					
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	211	65.555.507.000	65.555.507.000	211	10.370.986.500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,60	72.000.000	18,60	0,24	18,60	72.000.000	0,0	0,12	
1.02.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	222	76.175.000	76.175.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan	Dokumen	9	228.515.000	228.515.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
		di Bidang Pendidikan																					
1.02.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	8500	123.955.000	115.955.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	6	2.905.761.640	2.905.761.640	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Jumlah Pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia DIni (PAUD) yang Tersedia**	**%**	**100**	**18.342.069.880**	**30.555.993.680**	**18,60**	**72.000.000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18,60**	**72.000.000**	**18,60**	**0,24**	**18,60**	**72.000.000**	**0,0**	**0,12**	
1.02.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	20	2.751.240.280	2.751.240.280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
1.02.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	22.750	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	16	317.587.200	317.587.200	16	72.000.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16	72.000.000	100	22,67	16	72.000.000	0,0	11,35	
1.02.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga	Orang	450	2.065.992.000	2.065.992.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
	pada Satuan Pendidikan PAUD	Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi																					
1.02.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	600	241.309.400	241.309.400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	666	12.541.793.000	12.541.793.000	573	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	573	0,0	86,04	0,0	573	0,0	0,0	0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
1.02.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	500	113.633.000	113.633.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	4	310.515.000	260.515.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
1.02.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Jumlah Pengelolaan Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan Yang Tersedia**	**%**	**100**	**7.886.720.880**	**7.886.840.880**	**8,33**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,33**	**0,0**	**8,33**	**0,0**	**8,33**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
1.02.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	36	84.518.000	84.518.000	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	0,0	5,56	0,0	2	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	36	7.421.702.000	7.421.702.000	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10	0,0	27,78	0,0	10	0,0	0,0	0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
1.02.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	5	183.410.000	183.410.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyeleng	Peserta Didik	5.870	197.090.880	197.090.880	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.										
		garakan Proses Belajar																						
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																0,0	5,89						
	PREDIKAT KINERJA																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH						
1.02.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Kebutuhan Kurikulum yang Dikembangkan**	**%**	**90**	**46.048.000**	**46.048.000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
1.02.03.2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Jumlah Kurikulum Yang Dikembangkan Oleh Satuan PAUD dan Satuan PNF**	**Kurikulum**	**3**	**46.048.000**	**46.048.000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
1.02.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian	Dokumen	2	46.048.000	46.048.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
	Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun																					
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																0,0	0,0					
	PREDIKAT KINERJA																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH					
1.02.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rasio Guru-Murid (PAUD)**	%	1:18	95.680.000	95.680.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Rasio Guru-Murid (SD)	%	1:30			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
		Rasio Guru-Murid (SMP)	%	1:32			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
		Persentase Guru Yang Bersertifikasi (PAUD)	%	39,49			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
		Persentase Guru Yang Bersertifikasi (SD)	%	47,83			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
		Persentase Guru Yang Bersertifikasi (SMP)	%	47,88			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
1.02.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Jumlah Kegiatan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Dilaksanakan	Kegiatan	2	95.680.000	95.680.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
	Nonformal/Kesetaraan																						
1.02.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	12	47.840.000	47.840.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik	Laporan	3	47.840.000	47.840.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																					
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																0,0	0,0					
	PREDIKAT KINERJA																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH					
1.02.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Lembaga Pendidikan Yang Diawasi Perizinannya**	%	38,15	32.182.000	32.182.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.02.05.2.02	**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal**	**Jumlah Izin Penyelenggaraan**	**Satuan PAUD**	150	32.182.000	32.182.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.									
	yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	**Satuan PAUD dan PNF Yang Diawasi dan Diterbitkan Izin Penyelenggaraannya**	**dan PNF**																				
1.02.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	32.182.000	32.182.000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																**0,0**	**46,80**					
	PREDIKAT KINERJA																**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**					
	RATA-RATA CAPAIAN																**6,32**	**15,04**					

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP.										
	KINERJA OPD (%)																							
	PREDIKAT KINERJA OPD																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH						

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Makassar sampai dengan triwulan ke-1 Tahun 2025 sebesar **Rp.1.349.271.934.378**,- dan terealisasi sebesar **Rp.206.461.510.524**,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar **15,30** persen.

Realisasi capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Makassar menunjukkan bahwa terdapat 5 program dengan tingkat capaian kinerja yaitu kategori rendah. Dan 13 kegiatan yang terdiri dari 79 sub kegiatan dengan tingkat capaian kinerja kategori rendah.

Kondisi diatas dinilai dari proses pengukuran kinerja terhadap capaian kegiatan maupun jumlah anggaran yang ditargetkan. Pada tahun 2025, indikator pencapaian kinerja program dinas pendidikan tersebut terdiri :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat Peningkatan Kapasitas
   2. Persentase ketersediaan laporan keuagandan laporan kinerja perangkat daerah.
   3. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
B. Program Pengelolaan Pendidikan
   1. Persentase jumlah penerima beasiswa "Anak Lorong Berprestasi
   2. Persentase Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
   3. Persentase Angka Rata-rata lama Sekolah
   4. Persentase APM PAUD, SD, dan SMP
   5. Persentase APK PAUD, SD, dan SMP
   6. Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan (PAUD, SD dan SMP) dalam kondisi baik
   7. Persentase Ketuntasan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C
C. Program Pengembangan Kurikulum
   1. Persentase kebutuhan kerikulum yang dikembangkan
D. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   1. Persentase Ratio Guru-murid (RGM) PAUD, SD, dan SMP
   2. Persentase Guru Bersertifikat
E. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
   1. Persentase lembaga pendidikan yang diawasi perizinannya.

2.2.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada pencapaian indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kota Makassar sudah dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Namun ada beberapa hal yang masih memerlukan perhatian Pemerintah Kota Makassar selaku pelaksana atas pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025. Karena bagaimanapun juga pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut tidak mungkin terlepas dari pencapaian atas standar pelayanan minimal pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan dan pendidikan anak usai dini. Perlu dijelaskan bahwa ada 3 indikator pencapaian jenis pelayanan dasar. Berikut kami jelaskan

hasil evaluasi pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

1. **Jumlah penduduk usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar per jumlah penduduk usia 7-15 tahun**.
   Data pencapaian SPM sampai triwulan 1 bulan maret 2025 sebesar 91,61 persen. Data ini didapat dari jumlah total yang terlayani sebanyak 218.554 orang dari jumlah total yang harus dilayani sebanyak 238.568 orang sehingga jumlah yang belum terlayani sebanyak 20.014 orang.
2. **Jumlah penduduk usai 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.**
   Data pencapaian SPM sampai triwulan 1 bulan maret tahun 2025 sebesar 90,62 persen. Data ini didapat dari jumlah total yang terlayani sebanyak 7.419 orang dari jumlah total yang harus dilayani sebanyak 8.187 orang sehingga jumlah yang belum terlayani sebanyak 768 orang.
3. **Jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.**
   Data pencapaian SPM sampai triwulan 1 bulan maret tahun 2025 sebesar 61,10 persen. Data ini didapat dari jumlah total yang terlayani sebanyak 31.715 orang dari jumlah total yang harus dilayani sebanyak 51.903 orang sehingga jumlah yang belum terlayani sebanyak 20.188 orang.
4. **Jumlah Angka Putus Sekolah jenjang SD/Mi** pada tahun 2024 sebesar 062. Capaian tersebut diukur dari jumlah capaian kinerja APS SD/MI sebanyak 919 dibagi dengan jumlah seluruh APS SD/Mi sebanyak 147.300.
5. **Jumlah Angka Putus Sekolah jenjang SMP/MTs** pada tahun 2024 sebesar 3,50. Capaian tersebut diukur dari jumlah capaian kinerja APS SMP/MTs sebanyak 2424 dibagi dengan jumlah seluruh APS SMP/MTs sebanyak 69.349.

2.2.3 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi agenda pembangunan global untuk melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Developmnet Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Dinas Pendidikan Kota Makassar memiliki 2 tujuan dalam mendukung capaian TPB yaitu :

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
   a. Target TPB pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khusunya masyarkat miskin dan rentan, memiliki hal yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. Capaian Indikator SDGs tahun 2024 yaitu :
      - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat sebesar 99,63 persen dengan capaian target sebesar 85,36 persen.

- Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat sebesar 89,01 dengan capaian target sebesar 73,99 persen.

2. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
   a. Target TPB pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Capaian Indikator target SDGs tahun 2024 yaitu :
      - Persentase SD/MI berakreditasi minimal B sebesar 82,35 persen dengan capaian target sebesar 86,47 persen
      - Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B sebesar 75,20 persen dengan capaian target sebesar 72,5 persen.
      - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat sebesar 100 persen dengan capaian target sebesar 93,09 persen.
      - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat sebesar 100 persen dengan capaian target sebesar 86,32 persen
      - Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun sebesar 12 persen dengan capaian sebesar 11,57 persen.
   b. Target pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka sipa untuk menempuh pendidikan dasar. Capaian Indikator target SDGs tahun 2024 yaitu :
      - Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) sebesar 50,91 persen dengan capaian target sebesar 34,29 persen.
   c. Target pada tahun 2023, menghilangkan disparitas gender dalalm pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli dan anak-anak dalam kondisi rentan. Capaian Indikator target SDGs tahun 2024 yaitu :
      - Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD,SMP,SMA dan Rasio Angka Partisipasi Kasar perempuan/laki-laki di perguruan tinggi dengan capaian target untuk SD/MI sebesar 101,49 dan untuk SMP sebesar 105,50
   d. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasu dan numerasi. Capaian Indikator target SDGs tahun 2024 yaitu :
      - Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun sebesar 100 persen dengan capaian target sebesar 98,84 persen
      - Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun sebesar 100 persen dengan capaian target sebesar 100 untuk usia 15-24.

e. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil. Capaian Indikator target sampai dengan triwulan I tahun 2025 yaitu :
   - Persentase guru TK,SD,SMP,SMK dan PLB yang bersertifikat pendidik sebesar 38,49 persen dengan capaian target sebesar 35,46 persen untuk PAUD, sebesar 45,83 persen dengan capaian target 35,23 persen untuk SD dan sebesar 47,03 persen dengan capaian target sebesar 41,33 persen untuk SMP.

f. Pada tahun 2030 membangun dan meningkatkan fasilitas Pendidikan yang ramah anak, ramah menyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.
   - Proporsi sekolah dengan akses ke (a) listrik sebesar 5 persen terealisasi 100 persen (b) internet untuk tujuan pengajaran sebesar 91,5 persen terealisasi sebesar 98,14 persen, (c) computer untuk tujuan pengajaran sebesar 30 persen terealisasi sebesar 73,93 persen, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas sebesar 3,5 persen terealisasi sebesar 8,6 persen, (e) air minum layak sebesar 82,5 persen terealisasi 100 persen, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin sebesar 65 persen terealisasi 93,27, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (wash) sebesar 20 persen terealisasi 100 persen.

TABEL TC.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2021-2026

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik			90%	90%	90%	90%	90%	90%	88,83 %	92,25 %	87,50%	90%		Terjadi fluktuasi capaian selama periode 2021-2024
2	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	92,75 %	95,61 %	99,06 %	100%		Capaian terus meningkat dari tahun 2021 sampai tahun 2024
3	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat Peningkatan Kapasitas			90%	90%	90%	90%	90%	90%	90,37 %	85,23 %	90%	90%		Capaian menurun pada tahun 2023 dan meningkat kembali pada tahun 2024
4	Jumlah Penerima Beasiswa			-	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang		200 orang	2000 orang	400 orang	400 orang		Capaian Renstra telah

	"Anak Lorong Berprestasi"													dianggap tuntas di tahun 2023 namun tetap dianggarkan karena kebutuhan siswa kurang mampu
5	Angka Harapan Lama Sekolah				15,96 Tahun	16,16 Tahun	16,36 Tahun	16,56 Tahun	15,58 Tahun	15,59 Tahun	15,61 Tahun	15,62 Tahun	16,56 Tahun		HLS menunjukkan peningkatana dari 2021 ke tahun 2026
6	Angka Rata-rata Lama Sekolah			11,2 Tahun	11,5 Tahun	11,8 Tahun	12 Tahun	12,2 Tahun	11,43 Tahun	11,55 Tahun	11,56 Tahun	11,57 Tahun	12,2 Tahun		Capaian meningkat stabil dari tahun 2021 ke tahun 2024
7	Angka Partisipasi Murni PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisip	Paud= 21,10%	Paud= 30,26	Paud= 36,93 %	Paud= 46,33 %	Paud= 59,63 %	Paud= 29,42 %	Paud= 34,32 %	Paud= 37,7%	Paud= 32,23 %	Paud = 59,63 %		APM PAUD meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2023 menurun pada

			asi dalam PAUD												tahun 2024
8	Angka Partisipasi Kasar PAUD			Paud= 24,72%	Paud= 33,25 %	Paud= 40,59 %	Paud= 50,91 %	Paud= 65,52 %	Paud= 30,77 %	Paud= 35,58 %	Paud= 39,49 %	Paud= 34,29 %	Paud = 65,52 %		APK PAUD meningkat dari 2021 ke tahun 2026
9	Angka Partisipasi Murni SD	Pengelolaan Pendidikan Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	SD= 96,79%	SD= 100%	SD= 100%	SD= 100%	SD= 100%	SD= 89,95 %	SD= 92,41 %	SD= 98,06 %	SD= 85,36 %	SD= 100%		Capaian APK SD menurun di tahun 2024
9	Angka Partisipasi Kasar SD			SD= 103,54 %	SD= 100%	SD= 100%	SD= 100%	SD= 100%	SD= 98,68 %	SD= 102,30 %	SD= 105,51 %	SD= 93,09 %	SD= 100%		Capaian APK SD meningkat dari tahun 2021 sampai 2023 dan menurun di tahun 2024
10	Angka Partisipasi Murni SMP	Pengelolaan Pendidkan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	SMP= 80,27%	SMP = 100%	SMP = 100%	SMP = 100%	SMP = 100%	SMP= 71,25 %	SMP= 72,06 %	SMP= 79,51 %	SMP= 73,99 %	SMP = 100%		Capaian APM SMP menurun pada tahun 2024
11	Angka Partisipasi Kasar SMP			SMP= 93,77%	SMP = 100%	SMP = 100%	SMP = 100%	SMP = 100%	SMP= 89,39 %	SMP= 89,56 %	SMP= 90,85	SMP= 86,32	SMP = 100%		Capaian APK SMP meningkat dari tahun 2021 sampai

															tahun 2023 namun menurun di tahun 2024
12	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan (PAUD, SD, SMP) dalam Kondisi Baik	Standar Sarana dan Prasarana		Paud=70%	Paud= 72%	Paud= 74%	Paud= 76%	Paud= 78%	Paud= 67,03 %	Paud= 74,02 %	Paud= 75,03 %	Paud= 76,07 %	Paud = 78%		Capaian Sarana Prasarana PAUD ,SD dan SMP dalam kondisi baik mengalami peningkatan
				SD=70 %	SD= 72%	SD= 74%	SD= 76%	SD= 78%	SD= 82,02 %	SD= 76,33 %	SD= 75,97 %	SD= 77,14 %	SD= 78%		
				SMP =85%	SMP = 87%	SMP = 89%	SMP = 91%	SMP = 92%	SMP = 81,39 %	SMP = 89,01 %	SMP= 92,28	SMP= 92,48 %	SMP = 92%		
13	Persentase Ketuntasan Pendidikan Kesetaraan (A,B,C)		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidika	84,26 %	88,26 %	90,26 %	92,26 %	94,26 %	100%	100%	97%	95,85 %	94,26 %		Capaian mengalami peningkatan yang signifikan

			n kesetaraan												
14			Persentase Kebutuhan Kurukulum yang Dikembangkan	3 Kurikulum	45%	60%	75%	90%	2 Kurikulum	66,67 %	50%	66,67 %	90%		
15	Rasio Guru-Murid PAUD		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		Paud= 1:21	Paud= 1:20	Paud= 1:19	Paud= 1:18		Paud= 1:13	Paud= 1:15	Paud= 1:15	Paud = 1:18		Capaian Rasio guru murid telah sesuai standar SNP
	Rasio Guru-Murid SD		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		SD= 1:40	SD= 1:36	SD= 1:33	SD= 1:30		SD= 1:22	SD= 1:19	SD= 1:19	SD= 1:30		Capaian rasio guru murid hampir mencapai SNP
	Rasio Guru-Murid SMP		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama		SMP = 1:34	SMP = 1:33	SMP = 1:33	SMP = 1:32		SMP = 1:19	SMP = 1:18	SMP = 1:18	SMP = 1:32		Capaian rasio guru murid membaik tapi belum ideal
16	Persentase Guru yang Bersertifikat Paud	Standar Pendidik	Persentase pendidik PAUD (Negeri dan		Paud= 36,49 %	Paud= 37,49 %	Paud= 38,49 %	Paud= 39,49 %		Paud= 34,88 %	Paud= 46,65 %	Paud= 34,46 %	Paud = 39,49 %		Capaian Guru PAUD yang bersertifik

			Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini												at meningkat di tahun 2023 namun menurun di 2024
17	Persentase Guru yang Bersertifikat SD	Standar Pendidik	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki		SD= 42,18 %	SD= 43,83 %	SD= 45,83 %	SD= 47,83 %		SD= 38,87 %	SD= 36,23 %	SD= 35,23 %	SD= 47,83 %		Capaian Guru SD yang bersertifikat menurun dari tahun 2022 sampai 2024

			ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik												
18	Persentase Guru yang Bersertifikat SMP	Standar Pendidik	Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		SMP = 45,43 %	SMP = 46,23 %	SMP = 47,03 %	SMP = 47,88 %		SMP= 47,34 %	SMP= 42,00 %	SMP= 41,33 %	SMP = 47,88 %		Capaian Guru SMP yang bersertifikat menurun dari tahun 2022 sampai 2024
19	Persentase Lembaga Pendidikan yang Diawasi Perizinannya			65%	14,63 %	22,47 %	30,31 %	38,15 %	70,54 %	69,33 %	96,34 %	36,38 %	38,15 %		
	Jumlah Penduduk usia 7-15	Pengelolaan Pendidikan dasar		100%	100%	100%	100%	100%	95,91 %	99,91 %	100	100%	100%		

	Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar														
	Jumlah penduduk 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan		100%	100%	100%	100%	100%	94,42 %	98,33 %	100%	100%	100%		
	Jumlah Penduduk usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini		100%	100%	100%	100%	100%	59,00 %	96,81 %	100%	100%	100%		

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pendidikan sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 84 Tahun 2023 tentang organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Pendidikan, sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan
b. Melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan
c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pendidikan
d. Melaksanakan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pendidikan

Dalam merumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Makassar, dilakukan gambaran pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja pelayanan yaitu dari kelompok indikator yang dikembangkan perangkat daerah secara mandiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi. Terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Makassar, tingkat kinerja pelayanan dengan kategori baik. Hal ini tergambar dari rata-rata capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator	Kegiatan	Target	Realisasi sampai dengan triwulan I
Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	- Administtasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	8,33%
Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	- Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi keuangan perangkat daerah	100%	21,07%
Persentase sarana dan prasarana aparatur	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	8,33%

dalam kondisi baik	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		

Permasalahan capaian kinerja triwulan I :

- Menunggu regulasi implementasi E-katalog versi 6;
- Menunggu proses penyelesaian SK KPA;
-

2. Program Pengelolaan Pendidikan

Indikator	Kegiatan	Target	Realisasi sampai dengan triwulan I
Angka Partisipasi Kasar (PAUD,SD, dan SMP)	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Sekolah - Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	PAUD=65,52% SD=100% SMP=100%	PAUD=34,29% SD=93,09% SMP=86,32%
Angka Partisipasi Murni (PAUD,SD dan SMP)		PAUD=59,63% SD=100% SMP=100%	PAUD=32,23% SD=85,36% SMP=73,99%
Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan (PAUD,SD dan SMP) dalam Kondisi Baik		PAUD=92% SD=78% SMP=94,26%	PAUD=0% SD=0% SMP=0%
Angka Harapan Lama Sekolah		16,56	0
Jumlah Penerima Beasiswa "Anak Lorong Berprestasi"	-	400 orang	0

Angka Rata-rata lama sekolah		12,20 tahun	0
Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan (A,B,C)		92,26	0

Permasalahan capaian kinerja triwulan I :

- Menunggu regulasi implementasi E-katalog versi 6
- Menunggu proses penyelesaian SK KPA

3. Program Pengembangan Kurikulum

Indikator	Kegiatan	Target	Realisasi sampai dengan triwulan I
Persentase kebutuhan kurikulum yang dikembangkan	- Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	90%	0%

Permasalahan capaian kinerja triwulan I :

- program ini belum dilaksanakan sehingga belum ada realisasi anggaran dan capaian kinerja pada triwulan I.

1. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indikator	Kegiatan	Target	Realisasi sampai dengan triwulan I
Persentase guru yang bersertifikat (PAUD,SD, dan SMP)	- Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan Dasar,PAUD dam Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	PAUD=39,49% SD=47,83% SMP=47,88%	PAUD=0% SD=0% SMP=0%
Rasio Guru-Murid		PAUD=1:18 SD=1:30 SMP=1:32	PAUD=0 SD=0 SMP=0

Permasalahan capaian kinerja triwulan I :

- program ini belum dilaksanakan sehingga belum ada realisasi anggaran dan capaian kinerja pada triwulan I.

2. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Indikator	Kegiatan	Target	Realisasi sampai dengan triwulan I
Persentase lembaga pendidikan yang diawasi perizinannya	- Penertiban izin PAUD dan Pendidikan	38,15%	0%

Permasalahan capaian kinerja triwulan I :

1. Program ini belum dilaksanakan sehingga belum ada realisasi anggaran dan capaian kinerja pada triwulan I.

Secara garis besar permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

A. Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan penyelenggaraan PAUD;
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
4. Belum optimalnya kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui guru penggerak
5. Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan PAUD,SD, SMP dan Pendidikan Nonformal
6. Belum optimalnya pelayanan sekretariat dalam menunjang kualitas pelayanan pendidikan.

B. Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi

1. Tingkat pemahaman aparatur pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal;
2. Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas yang belum terwujud dengan baik;
3. Kurangnya pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

C. Dampak terhadap pencapaian visi dan Misi Kepala Daerah

1. Tanggung jawab terhadap kemajuan daerah melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan mengalami proses yang panjang untuk terlaksana

2. Jaminan kemudahan sebagai bentuk menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah dan masyarakat belum maksimal dikarenakan hal ini sangat menentukan penilaian masyarakat tentang pelayanan dari aparatur negara dan keberhasilan kepala daerah khususnya.

D. Tantangan dan peluang dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di kota makassar adalah :

1. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di jenjang PAUD yang disebabkan karena belum terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap PAUD bagi pengembangan potensi anak seusia PAUD
2. Kompetensi pendidikan formal guru belum optimal, belum semua pendidik memiliki sertfikat pendidik
3. Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan

Sedangkan **peluang** sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan adalah :

1. Dukungan pemerintah Kota Makassar terhadap Bantuan Pendidikan melalui Beasiswa anak lorong untuk peserta didik yang berprestasi dan kurang mampu.
2. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat
3. Pelatihan penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Makassr, rumusan isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan pendidikan jangka menengah menjadi perhatian yang diprioritaskan agar pelaksanaan pembangunan mencapai hasil yang diharapkan dengan efektif dan efisien, termasuk dalam menangani permasalahan dalam lingkup pendidikan di Kota Makassar.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir P-RKPD

Dalam melaksanakan review rancangan akhir RKPD, proses yang dilakukan adalah membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang terdapat banyak perbedaan antara lain :

- Terdapat beberapa indikator kinerja yang harus disesuaikan;
- Banyaknya kegiatan yang anggarannya dikurangi
- Adanya penambahan anggaran untuk program prioritas walikota

Sebagaimana diketahui bahwa dengan ditetapkannya dokumen RPJMD Tahun 2025-2030 Kota Makassar, maka visi pembangunan daerah Kota Makassar, adalah :

"Makassar Unggul,Inklusif, Aman dan Berkelanjutan"

Untuk mewujudkan visi tersebut, disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijkan untuk mencapai visi tersebut. Maka dari salah satu misi yang dapat mewujudkan visi pembangunan Kota Makassar khususnya pembangunan di bidang pendidikan adalah

Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan dasar bidang Pendidikan dan kesehatan Dalam misi ini terdapat 2 (dua) Program Strategis Makassar terkait Dinas Pendidikan Kota Makassar yaitu :

1. Gratis seragam dan peralatan sekolah bagi siswa-siswi SD;
2. Evaluasi kebijakan PPDB pada system Pendidikan berbasis kebutuhan lokal;
3. Penyediaan ambulance secara gratis;
4. Penambahan insentif Nakes pada fasilitas kesehatan pemerintah di setiap kecamatan;
5. Layanan gratis pemeriksaan dan pergantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien;
6. Penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir dan pulau;
7. Pembangunan Gedung dewan guru makassar;
8. Pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi;
9. Pemberian tunjangan bagi wali kelas SD dan SMP
10. Pembangunan sekolah terintegrasi PAUD/SD di setiap kecamatan.

Berikut adalah arah kebijakan berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang mendukung visi misi walikota dan wakil walikota terpilih periode 2025-2030 yang dituangkan dalam perubahan rencana kerja Dinas Pendidikan tahun 2025 yaitu :

1. Pemantapan ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan
2. Peningkatan aksesbilitas Pendidikan melalui pemberian seragam gratis untuk siswa SD dan SMP terdapat pada Program Pengelolaan Pendidikan di kegiatan :
   - Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik dengan besaran pagu perubahan 6.536.800.000
   - Penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik dengan besaran pagu perubahan 4.956.455.000
3. Kebutuhan SDM dan tenaga kependidkan yang berkualitas terdapat pada Program pengelolaan Pendidikan di kegiatan :
   - Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan sekolah dasar dengan besaran pagu perubahan Rp.749.640.000
   - Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan sekolah Menengah Pertama dengan besaran pagu perubahan Rp.685.170.000
   - Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan PAUD dengan besaran pagu perubahan Rp.5.279.092.000

   Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan di kegiatan :
   - Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan nonformal/kesetaraan dengan besaran pagu perubahan Rp.5.840.000

- Penataan pedistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan besaran pagu perubahan Rp. 5.840.000

4. Urusan Pendidikan merupakan urusan wajib yang masuk pelayanan dasar sehingga jenis pelayanan dan indicator kinerjanya telah diataur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan target kinerja harus 100 persen.
5. Peningkatan sarana prasarana kurikulum tenaga pendidik disertai dengan upaya pemerataan layanan untuk PAUD dan Pendidikan dasar guna menjamin semua anak bersekolah. Upaya mengembalian anak tidak sekolah dengan melibatkan elemen masyarakat dengan memanfaatkan TIK. Peningkatan aksebilitas Pendidikan di pulau-pulau di Kota Makassar berupa peningkatan sarana prasarana Pendidikan berupa meningkatkan sarana utilitas sekolah

Dalam hasil dari pemuktahiran data dalam penyusunan P-RKPD Tahun 2025 terdapat 5 (lima) program yang terdiri atas 1 Program rutin yang terdiri dari 7 kegiatan dengan total 26 sub kegiatan dan 4 (empat) Program utama Dinas Pendidikan Kota Makassar yang terdiri dari 7 kegiatan dengan 56 sub kegiatan dengan sumber dana berasal dari APBD tahun 2025. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap rancangan akhir P-RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel T.C 31 terlampir.

Tabel T.C 31
RANCANGAN AKHIR P-RKPD
DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1					DINAS PENDIDIKAN			1.372.529.076.418						1.308.137.824.000			
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur	90%	938.434.971.058	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	1.005.807.126.880			
						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	100%					Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	100%				

RANCANGAN AWAL RKPD											HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	**90%**					**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan dan perangkat daerah**	**100%**				
1	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**251.553.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassar**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**265.653.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassar**	
1	1	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	64.213.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	23.313.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	1	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.795.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13.795.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	
1	1	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.460.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.460.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	
1	1	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	23.865.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	16.865.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					
1	1	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	18.555.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11.555.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	
1	1	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	41.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	39.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
1	1	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	71.265.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	155.865.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	
1	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**933.992.262.098**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassar**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**998.815.763.720**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassar**	
1	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan	6773 org/bulan	926.429.040.298	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan	6773 org/bulan	991.726821.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Tunjangan ASN						Tunjangan ASN					
1	1	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	6.507.885.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	6.384.045.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	
1	1	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.037.526.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	701.086.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	
1	1	1	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	1	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	17.810.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	3.810.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	
1	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Layanan Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**166.000.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassar**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Layanan Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**168.000.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassar**	
1	1	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-			

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Kelengkapannya												
1	1	1	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	28.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	
1	1	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	138.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	168.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	
1	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase capaian layanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**547.443.960**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassar**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase capaian layanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**796.523.960**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassar**	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	1	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	2.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	2.520.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	
1	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	27.867.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	27.867.560	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	
1	1	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	-	-			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	
1	1	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	20.048.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	20.048.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	1	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	30.888.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	30.888.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	
1	1	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 Dokumen	157.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 Dokumen	146.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	
1	1	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	309.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	569.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	

RANCANGAN AWAL RKPD												HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	
1	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**2.271.384.200**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassar**	
1	1	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-			

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						yang disediakan						yang disediakan					
1	1	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	-			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	-			
					Pengadaan Aset tetap lainnya						Pengadaan Aset tetap lainnya						
1	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit dan Peralatan Mesin Lainnya	-	-			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit dan Peralatan Mesin Lainnya	35 unit	2.271.384.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	
1	1	1	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dikelola	-	-			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dikelola	-	-			
1	1	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor (Gedung) dan Bangunan Lainnya yang diadakan	-	-			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor (Gedung) dan Bangunan Lainnya yang diadakan	-	-			

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Capaian Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**3.120.912.000**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Capaian Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**3.172.912.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassar**	
1	1	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
1	1	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	976.452.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	976.452.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	
1	1	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	2.144.460.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	2.196.460.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Umum Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang disediakan						Pelayanan Umum Kantor yang disediakan					
1	1	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**356.800.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**316.890.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar**	
1	1	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit	286.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit	246.890.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Dinas Jabatan	Dibayarkan Pajaknya					Kendaraan Dinas Jabatan	Dibayarkan Pajaknya					
1	1	1	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang direparasi		-			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang direparasi					
1	1	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara	1 unit	70.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara	1 unit	70.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
1	1	1	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset tak berwujud yagn digunakan	-	-			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset tak berwujud yagn digunakan	-	-			
1	1	1	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	-		Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
1	1	2			**PROGRAM PENGELOLA**	**Jumlah Penerima**	**400 Orang**				**PROGRAM PENGELOLAA**	**Jumlah Penerima**	**400 Orang**		**Pendapatan Asli**		

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
			TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	AN PENDIDIKAN	Beasiswa "Anak Lorong Berprestasi"		433.920.195.360			N PENDIDIKAN	Beasiswa "Anak Lorong Berprestasi"		302.251.637.120	Daerah (PAD)		
		Angka Harapan Lama Sekolah	16,56 Tahun					Angka Harapan Lama Sekolah	16,56 Tahun				
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	12,20 Tahun					Angka Rata-rata Lama Sekolah	12,20 Tahun				
		Angka Partisipasi Murni (PAUD, SD dan SMP)	PAUD = 46,33%					Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	PAUD = 46,33%				
			SD = 100%						SD = 100%				
			SMP = 100%						SMP = 100%				
		Angka Partisipasi Kasar (PAUD, SD dan SMP)	PAUD = 65,52%					Angka Partisipasi Kasar (PAUD, SD dan SMP)	PAUD = 65,52%				
			SD = 100%						SD = 100%				
			SMP = 100%						SMP = 100%				

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan (PAUD, SD dan SMP) dalam Kondisi Baik	**PAUD = 78%** **SD = 78%** **SMP = 92%**					**Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan (PAUD, SD dan SMP) dalam Kondisi Baik**	**PAUD = 78%** **SD = 78%** **SMP = 92%**				
						Persentase Ketuntasan Pendidikan Kesetaraan (A,B,C)	**94,26%**					**Persentase Ketuntasan Pendidikan Kesetaraan (A,B,C)**	**94,26%**				
1	1	2	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Jumlah Pengelolaan Sekolah Dasar yang Tersedia**	**100%**	**261.796.760.780**			**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Jumlah Pengelolaan Sekolah Dasar yang Tersedia**	**100%**	**164.186.059.540**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	
1	1	2	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang telah dibangun	1 Ruang	507.191.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang telah dibangun	1 Ruang	495.191.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	1	2	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Yang Telah dibangun	1 Ruang	324.008.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Yang Telah dibangun	1 Ruang	273.243.140	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar	
1	1	2	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Unit Sarana, Prasarana dan Utilitas Yang Telah dibangun	134 unit	109.368.203.940	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Unit Sarana, Prasarana dan Utilitas Yang Telah dibangun	4 unit	969.536.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/ Berat ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang telah direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	734.548.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Rehabilitasi Sedang/ Berat ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang telah direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	723.548.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.01	11	Rehabilasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-				Rehabilasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-				

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia	5 Paket	5.495.752.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia	5 Paket	7.076.226.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba akademik dan non Akademik	950 peserta didik	299.163.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba akademik dan non Akademik	950 peserta didik	256.163.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	361 Orang	7.491.748.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	481 Orang	7.491.748.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	942 Orang	733.200.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan	600 Orang	749.640.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	yang mendapat fasilitas kenaikan pangkat/golongan pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi					Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	yang mendapat fasilitas kenaikan pangkat/golongan pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi					
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang melaksanakan pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah	240 Satuan Pendidikan	164.130.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang melaksanakan pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah	240 Satuan Pendidikan	113.130.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang	465 Satuan Pendidikan	118.165.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang	465 Satuan Pendidikan	118.165.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						mengelola Dana BOS						mengelola Dana BOS					
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	465 Orang	149.417.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	465 Orang	69.417.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.01	38	Koordinasi,Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 dokumen	243.169.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Koordinasi,Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 dokumen	179.169.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.	47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas	15 ruang	8.712.199.800	Pendapatan Asli	Kota Makassa	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas	15 ruang	8.692.449.800	Pendapatan Asli	Kota Makassa	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			01			Baru yang Bertambah			Daerah (PAD)			Baru yang Bertambah			Daerah (PAD)		
1	1	2	2.01	48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarara, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD	Kota Makassa	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarara, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat	16 unit	2.917.518.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.01	50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	430 satuan pendidikan	86.855.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	430 satuan pendidikan	6.623.655.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.01	51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah Direhabilitasi sedang/berat	25 ruang	5.727.092.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah Direhabilitasi sedang/berat	25 ruang	5.700.842.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	1	2	2.01	54	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12150 Peserta Didik	645.793.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12150 Peserta Didik	566.793.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.01	55	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket	2.946.188.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket	3.122.688.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	**1**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Jumlah pengelolaan sekolah menengah pertama yang tersedia**	**100%**	**133.680.600.020**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassa**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Jumlah pengelolaan sekolah menengah pertama yang tersedia**	**100%**	**101.258.628.620**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassa**	
1	1	2	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang telah dibangun	1 Ruang	594.999.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU yang telah dibangun	1 Ruang	579.014.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	1	2	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	-			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-				
1	1	2	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium Yang Telah Dibangun	1 Ruang	880.873.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium Yang Telah Dibangun	1 Ruang	868.373.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Unit Sarana, Prasarana dan Utilitas Yang Telah dibangun	56 unit	43.302.382.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Unit Sarana, Prasarana dan Utilitas Yang Telah dibangun	56 unit	1.494.682.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.02	14	Rehabillitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 ruang	4.348.842.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Rehabillitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 ruang	4.325.342.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.02	17	Rehabillitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah	1 Ruang	4.785.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Rehabillitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah	1 Ruang	4.785.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Perpustakaan Sekolah	Direhabilitasi Sedang/Berat						Direhabilitasi Sedang/Berat					
1	1	2	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ruang	799.632.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ruang	785.632.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat	4 unit	328.761.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat	4 unit	2.521.871.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia	4 Paket	2.020.636.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia	4 Paket	4.40.020.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima	8.400 Peserta Didik	635.855.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima	8.400 Peserta Didik	616.355.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Biaya Personil Peserta Didik						Biaya Personil Peserta Didik					
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba akademik dan non Akademik	945 Peserta Didik	537.812.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba akademik dan non Akademik	945 Peserta Didik	488.812.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	280 Orang	6.164.052.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	340 Orang	6.153.252.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidika	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	650 Orang	336.970.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	300 Orang	685.170.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					n pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	mendapat fasilitas kenaikan pangkat/golongan pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi					pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	mendapat fasilitas kenaikan pangkat/golongan pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi					
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah	190 satuan pendidikan	172.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah	190 satuan pendidikan	111.080.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang	222 Satuan Pendidikan	65.555.507.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang	222 Satuan Pendidikan	65.555.507.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Menengah Pertama	mengelola Dana BOS					Menengah Pertama	mengelola Dana BOS					
1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menegah Pertama	Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	222 Orang	76.175.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menegah Pertama	Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	222 Orang	28.175.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.02	51	Koordinasi,Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	9 Dokumen	228.515.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Koordinasi,Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	9 Dokumen	174.515.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	1	2	2.02	58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	8500 Satuan Pendidikan	115.955.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	8500 Satuan Pendidikan	4.956.455.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.02	59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	2.905.761.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	2.897.261.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.02	64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	3.037.466.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	3.020.466.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.02	67	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	1.617.538.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	1.950.858.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	**1**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Jumlah Pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia**	**100%**	**30.555.993.680**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassa**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Jumlah Pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia**	**100%**	**28.970.108.080**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassa**	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Dini yang tersedia						Dini yang tersedia					
1	1	2	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Unit Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Yang Telah dibangun	20 Paket	2.751.240.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Unit Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Yang Telah dibangun	20 Paket	3.517.464.080	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi sedang/Berat	-	-			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi sedang/Berat	-	-			
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang mengikuti proses Belajar	-	-			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang mengikuti proses Belajar	-	-			
1	1	2	2.03	14	Penyiapan dan tindak Lanjut Evaluasi	Jumlah Satuan PAUD yang siap dievaluasi dan	-	-			Penyiapan dan tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Satuan PAUD yang siap dievaluasi dan	-	-			

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Satuan PAUD	melaksanakan rekomendasi						melaksanakan rekomendasi					
1	1	2	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia Pada PAUD	16 Orang	317.587.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia Pada PAUD	16 Orang	317.587.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapat fasilitas kenaikan pangkat/golongan pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	450 Orang	2.065.992.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapat fasilitas kenaikan pangkat/golongan pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	450 Orang	5.279.092.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang melaksanakan pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah	600 Satuan Pendidikan	241.309.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang melaksanakan pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah	600 Satuan Pendidikan	241.309.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pengelolaan Dana BOP PAUD	666 Satuan Pendidikan	12.541.793.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pengelolaan Dana BOP PAUD	666 Satuan Pendidikan	12.541.793.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOP PAUD	500 Orang	113.633.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOP PAUD	500 Orang	61.133.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.	25	Koordinasi,Perencanaan, Supervisi	Jumlah Dokumen Hasil	4 Dokumen	260.515.000	Pendapatan Asli	Kota Makassa	Koordinasi,Perencanaan, Supervisi dan	Jumlah Dokumen Hasil	4 Dokumen	202.915.000	Pendapatan Asli	Kota Makassa	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			03		dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			Daerah (PAD)		Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			Daerah (PAD)		
1	1	2	2.03	28	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah Dibangun	-	-			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah Dibangun	-	-			
1	1	2	2.03	30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Bertambah	2 Ruang	5.190.584.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Bertambah	2 Ruang	113.474.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.03	47	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang mengikuti proses Belajar	22750 peserta didik	7.073.339.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang mengikuti proses Belajar	22750 peserta didik	6.695.339.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	**1**	**2**	**2.**		**Pengelolaan Pendidikan**	**Jumlah Pengelolaan Satuan**	**100%**	**7.886.840.880**	**Pendapatan Asli**	**Kota Makassa**	**Pengelolaan Pendidikan**	**Jumlah Pengelolaan Satuan**	**100%**	**7.836.840.880**	**Pendapatan Asli**	**Kota Makassa**	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			04		**Nonformal/ Kesetaraan**	**Pendidikan Nonfromal/Kesetaraan**			**Daerah (PAD)**		**Nonformal/Kesetaraan**	**Pendidikan Nonfromal/Kesetaraan**			**Daerah (PAD)**		
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang melaksanakan pembinaan kelembagaan dan Manajemen	36 Satuan Pendidikan	84.518.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang melaksanakan pembinaan kelembagaan dan Manajemen	36 Satuan Pendidikan	79.518.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Nonformal/Kesetaraan yang mengelola Dana BOP	36 Satuan Pendidikan	7.421.702.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Pengelolaan Dana BOP Sekolah nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Nonformal/Kesetaraan yang mengelola Dana BOP	36 Satuan Pendidikan	7.376.702.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.04	27	Koordinasi,Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	5 Dokumen	183.410.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Koordinasi,Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	5 Dokumen	183.410.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Layanan di Bidang Pendidikan						Layanan di Bidang Pendidikan					
1	1	2	2.04	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitasi Sekolah	Jumlah Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 Unit	60.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitasi Sekolah	Jumlah Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 Unit	60.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.04	46	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	5870 Peserta Didik	197.090.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	5870 Peserta Didik	197.090.880	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	1	2	2.04	48	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	8 Paket	60.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	8 Paket	60.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	**1**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN**	**Persentase Kebutuhan Kurikulum Yang**	**90%**	**46.048.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassa**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Kebutuhan Kurikulum Yang**	**90%**	**41.198.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassa**	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					KURIKULUM	Dikembangkan						Dikembangkan					
1	1	3	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi dasar muatan lokal pendidikan nonformal yang tersusun	3 kurikulum	46.048.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi dasar muatan lokal pendidikan nonformal yang tersusun	3 kurikulum	41.198.000	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi dasar muatan lokal pendidikan nonformal yang tersusun	
1	1	3	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan		-			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan					

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Dini dan Pendidkan nonformal	Pendidkan nonformal yang tersusun					Pendidkan nonformal	Pendidkan nonformal yang tersusun					
1	1	3	2.02	06	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendiidkan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	2 Dokumen	46.048.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendiidkan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	2 Dokumen	41.198.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	**1**	**4**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rasio Guru-Murid (PAUD, SD, SMP)**	**PAUD = 1:18** **SD = 1:30** **SMP = 1:32**	**95.680.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassa**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rasio Guru-Murid (PAUD, SD, SMP)**	**PAUD = 1:18** **SD = 1:30** **SMP = 1:32**	**11.680.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassa**	
						Persentase Guru Yang Bersertifikasi	**PAUD = 39,49%** **SD = 47,83 %**					**Persentase Guru Yang Bersertifikasi**	**PAUD = 39,49%** **SD = 47,83 %**				

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						(PAUD, SD, SMP)	SMP = 47,88%					(PAUD, SD, SMP)	SMP = 47,88%				
1	**1**	**4**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**Jumlah kegiatan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan**	**2 kegiatan**	**95.680.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassa**	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Jumlah kegiatan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan**	**2 kegiatan**	**11.680.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassa**	
1	1	4	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan	12 Dokumen	47.840.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan	12 Dokumen	5.840.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
1	1	4	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Laporan	47.840.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Laporan	5.840.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassa	
1	**1**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN**	**Persentase Lembaga Pendidikan**	**38,15%**	**32.182.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassa**	**PROGRAM PENGENDALIAN**	**Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan**	**38,15%**	**26.182.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassa**	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE					URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
							TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					PENDIDIKAN	**yang diawasi Perizinan**					**PERIZINAN PENDIDIKAN**	**yang Diterbitkan/ Diperbaharui**					
1	**1**	**5**	**2.02**		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Jumlah izin penyelenggaraan satuan paud dan PNF yang diawasi dan diterbitkan izin penyelenggaraannya**	**133 satuan pendidikan**	**32.182.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassa**	**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Jumlah izin penyelenggaraan satuan paud dan PNF yang diawasi dan diterbitkan izin penyelenggaraannya**	**133 satuan pendidikan**	**26.182.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**Kota Makassa**	
1	1	5	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	100 Dokumen	32.182.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	100 Dokumen	26.182.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kota Makassar/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN P-RKPD						
KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	KET
			TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
JUMLAH				1.372.529.076.418						1.308.137.824.000			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Makassar

Pada Tahun 2025, Dinas Pendidikan Kota Makassar Melaksanakan 5 (lima) program. Adapun 5 Program yang dimaksud adalah :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Pendidikan;
3. Program Pengembangan Kurikulum;
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan.

Perubahan tersebut meliputi penambahan/pengurangan pagu indikatif sub kegiatan. Berikut adalah uraian Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan kegiatan tahun 2025 di Dinas Pendidikan Kota Makassar :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Tahun 2025 sebesar **Rp.938.434.971.958,-** setelah perubahan berubah menjadi **Rp.1.005.807.126.880,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.67.372.155.822** atau **7,18 persen**.

2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi anggaran pada kegiatan ini Tahun 2025 sebesar **Rp.251.553.000,-** setelah perubahan berubah menjadi **Rp.115.653.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.135.900.000** atau **54,02 persen**.

2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 4 dokumen. Anggaran pada sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya sebesar **Rp. 64.213.000,-** menjadi **Rp.23.313.000** dengan total pengurangan sebesar **Rp.40.900.000**,- atau **63,69 persen**. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada rekening belanja makanan dan minuman rapat dan honorarium tim pelaksana kegiatan.

2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA yang disusun sebanyak 1 Dokumen. Anggaran pada sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya sebesar **Rp.20.795.000,-** menjadi **Rp.13.795.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.7.000.000** atau **33,66 persen.** Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada honorarium tim pelaksana kegiatan.

2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun sebanyak 1 Dokumen. Anggaran pada sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya sebesar **Rp.11.460.000,-**

menjadi **Rp.4.460.000,-.** dengan total pengurangan sebesar **Rp.7.000.000** atau **61,08 persen.** Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada honorarium tim pelaksana kegiatan.

2.02.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator Kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen DPA Perubahan yang disusun sebanyak 1 Dokumen. Anggaran pada sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya sebesar **Rp.23.865.000,-** menjadi **Rp.16.865.000,** dengan total pengurangan sebesar **Rp. 7.000.000** atau **29,33 persen**. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada honorarium tim pelaksana kegiatan.

2.02.05 Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Indikator Kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen DPA Perubahan yang disusun sebanyak 1 Dokumen. Anggaran pada sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya sebesar **Rp.18.555.000,-** menjadi **Rp.11.555.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.7.000.000** atau **37,73 persen**. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada honorarium tim pelaksana kegiatan.

2.02.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhitisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 1 laporan. Anggaran pada sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya sebesar **Rp.41.400.000,-** menjadi **Rp.39.800.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.1.600.000** atau **3.86 persen**. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada honorarium tim pelaksana kegiatan.

2.02.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja sub Kegiatan ini Adalah Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat Daerah, sebanyak 5 laporan. Anggaran pada sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.71.265.000,-** menjadi **Rp.155.865.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.84.600.000,-** atau **118,71 persen.** Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada honorarium tim pelaksana kegiatan.

2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran pada kegiatan ini Tahun 2025 sebesar **Rp.933.992.262.098,-** setelah perubahan berubah menjadi **Rp.998.815.763.720,-** dengan total penambahan sebesar **Rp.64.823.501.622,-** atau **6,94 persen**.

2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah gaji dan tunjangan yang tersedia dengan target kinerja sebanyak 6773 Orang/Bulan. Anggaran pada sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya sebesar

Rp.926.429.040.298,- menjadi **Rp.991.726.821.920,-** dengan total penambahan sebesar **Rp.65.297.781.622,-** atau **7,05** persen. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian pada gaji dan tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD

2.02.02 Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen. Anggaran pada sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya sebesar **Rp.6.507.885.000,-** menjadi **Rp.6.384.045.000,-** dengan total penambahan sebesar **Rp.123.840.000,-** atau **1,90** persen. Hal ini dikarenakan penghapusan rincian belanja yang tidak digunakan

2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sebanyak 12 dokumen. Anggaran pada sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya sebesar **Rp.1.037.526.800,-** menjadi **Rp.701.086.800,-** dengan total penambahan sebesar **Rp.336.440.000,-** atau **32,43** persen. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada rekening belanja makanan dan minuman rapat dan honorarium tim pelaksana kegiatan.

2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan lapopran keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD sebanyak 1 laporan. Anggaran pada sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya sebesar **Rp.17.810.000,-** menjadi **Rp.3.810.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.14.000.000,-** atau **78,61** persen. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada honorarium tim pelaksana kegiatan.

2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi anggaran pada kegiatan ini sampai dengan parsial 2 Tahun 2025 sebesar **Rp.166.000.000,-** setelah perubahan berubah menjadi **Rp.168.000.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.2.000.000,-** atau **1,20 persen**.

2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Indikator Kinerja sub Kegiatan ini adalah Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian sebanyak 4 dokumen berubah menjadi 0 dokumen. Anggaran pada sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.28.000.000,-** menjadi **Rp.0,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.28.000.000,-** atau **100 persen.** Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada honorarium tim pelaksana kegiatan.

1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
Indikator Kinerja sub Kegiatan ini adalah jumlah pegawai berdasarkan tigas dan fungsi sebanyak 14 orang. Anggaran pada sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.138.000.000,-** menjadi **Rp.168.000.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.30.000.000,-** atau **21,74 persen.** Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada honorarium tim pelaksana kegiatan.

2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran pada kegiatan ini Tahun 2025 sebesar **Rp.547.443.960,-** setelah perubahan berubah menjadi **Rp.796.523.960,-** dengan total penambahan sebesar **Rp.249.080.000,-** atau **45,50 persen**.

2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Indikator Kinerja sub Kegiatan ini Adalah jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan sebanyak 6 dokumen. Anggaran pada sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.157.120.000,-** menjadi **Rp.146.200.000-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.10.920.000,-** atau **6,95 persen.** Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian rincian belanja pada media cetak.

2.06.09 Penyelenggaraan Rapat dan Peraturan dan Konsultasi SKPD
Indikator Kinerja sub Kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 3 laporan. Anggaran pada sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.309.000.000,-** menjadi **Rp.569.000.000-** dengan total penambahan sebesar **Rp.260.000.000,-** atau **84,14 persen.** Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian kebutuhan untuk perjalanan dinas.

2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran pada kegiatan ini Tahun 2025 sebesar **Rp.0,-** setelah perubahan berubah menjadi **Rp.2.271.384.200,-** dengan total penambahan sebesar **Rp. 2.271.384.200,-** atau **0 persen**.

2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator Kinerja sub Kegiatan ini Adalah Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan, sebanyak 0 unit berubah menjadi 35 unit. Anggaran pada sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.0,-** menjadi **Rp. 2.271.384.200,-** dengan total penambahan sebesar **Rp. 2.271.384.200,-** atau **2.271.384.200 persen.** Hal ini dikarenakan pengusulan belanja modal personal komputer dan perangkat unit lainnya untuk operasional kantor.

2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran pada kegiatan ini Tahun 2025 sebesar **Rp.3.120.912.000,-** setelah perubahan berubah menjadi **Rp.3.172.912.000,-** dengan total penambahan sebesar **Rp.52.000.000.,-** atau **1,67 persen**.

1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Kinerja sub Kegiatan ini Adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 3 laporan. Anggaran pada sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.2.144.460.000,-** menjadi **Rp.2.196.460.000,-** dengan total penambahan sebesar **Rp. 52.000.000,-** atau **2,24 persen.** Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada rekening belanja honorarium tim pelaksana kegiatan.

2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran pada kegiatan ini sampai dengan parsial 2 Tahun 2025 sebesar **Rp.356.800.000,-** setelah perubahan berubah menjadi **Rp.316.890.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp. 39,910.000,-** atau **11,19 persen**.

2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Indikator kinerja sub ini adalah jumlah kendaraan Perorangan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 1 unit. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.286.800.000,-** menjadi **Rp.246.890.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp. 39.910.000,-** atau **13,92 persen**. Hal ini dikarenakan penghapusan rincian belanja yang tidak digunakan.

2. Program Pengelolaan Pendidikan

Alokasi anggaran pada program pengelolaan pendidikan sampai dengan parsial 2 Tahun 2025 sebesar **Rp.433.920.195.360,-** setelah perubahan berubah menjadi **Rp.302.251.637.120,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.131.668.558.240,-** atau **30,34 persen**.

2.01 Pengelolaan Pendidikan Dasar

Alokasi anggaran pada kegiatan pengelolaan pendidikan dasar sampai dengan parsial 2 Tahun 2025 sebesar **Rp.261.796.760.780,-** setelah perubahan berubah menjadi **Rp.164.186.059.540,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.97.610.701.240,-** atau **37,28 persen**.

2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah dibangun sebanyak 1 ruang. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.507.191.600,-** menjadi **Rp.495.191.600,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.12.500.000,-** atau **2,46 persen.** Hal ini disebabkan karena

adanya efisiensi anggaran pada rekening belanja honorarium tim pelaksana kegiatan.

2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang telah dibangun dengan target kinerja sebanyak 1 ruang. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.324.008.640,-** menjadi **Rp.273.243.140,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.50.765.500,-** atau **15,67 persen.**Hal ini dikarenakan penghapusan rincian belanja yang tidak digunakan.

2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun dengan target kinerja sebanyak 134 unit berubah menjadi 4 unit dan Anggaran sub kegiatan ini juga berubah yang sebelumnya **Rp.109.350.703.940,-** menjadi **Rp.952.036.200,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.108.398.667.740,-** atau **99,11 persen.** Alasan pengurangan ini akibat alokasi yang dibutuhkan untuk pembangunan tidak tercukupi dengan pagu anggaran yang tersedia.

2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah direhabilitasi sedang/berat dengan target kinerja sebanyak 3 ruang dan Anggaran sub kegiatan ini juga berubah yang sebelumnya **Rp.734.548.000,-** menjadi **Rp.723.548.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.11.000.000,-** atau **1,50 persen.** Alasan pengurangan ini akibat alokasi yang dibutuhkan untuk pembangunan tidak tercukupi dengan pagu anggaran yang tersedia.

2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah mebel sekolah yang tersedia dengan target kinerja sebanyak 5 paket. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.5.495.752.000,-** menjadi **Rp.7.073.726.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.1.577.974.000,-** atau **28,71** persen. Pengadaan Meubelair untuk sekolah-Sekolah dipulau di butuhkan kerena menjadi atensi Pimpinan (Walikota Makassar), dan di prioritaskan sebab sejak 2020 khusus SD Negeri/Inpres Di pulau tidak di interfensi

2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifiktas Siswa

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik dengan target kinerja sebanyak 950 peserta didik. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.299.163.000,-** menjadi **Rp.256.163.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.43.000.000,-** atau **14,37 persen.** Hal ini dikarenakan adanya efiesiensi anggaran pada rekening belanja honorarium tim pelaksana kegiatan.

2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan target kinerja sebanyak 361 orang berubah menjadi 481 orang. Anggaran sub kegiatan ini tidak berubah **Rp.7.491.748.400,-** menjadi **Rp. 7.491.748.400,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.0,-** atau **0 persen.** Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian jumlah pendidik dan tenaga kependidikan untuk jenjang sekolah dasar

2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Dasar

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi dengan target kinerja sebanyak 942 orang berubah menjadi 600 orang. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.733.200.000**,- menjadi **Rp.749.640.000,-** dengan total penambahan sebesar **Rp.16.440.000,-** atau **2,24 persen**. Hal ini dikarenakan adanya penguranga pada jumlah orang/kegiatan pada kegiatan pengembangan kompetensi dan asesmen kinerja dan kompetensi guru

2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah sekolah dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan target kinerja sebanyak 240 satuan pendidikan. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.164.130.000**,- menjadi **Rp.113.130.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.51.000.000,-** atau **31,07 persen**. Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada beberapa rincian belanja pada honorarium narasumber.

2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS sekolah dasar dengan target kinerja sebanyak 465 orang. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.149.417.000**,- menjadi **Rp.69.417.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.80.000.000,-** atau **53,54 persen**. Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada beberapa rincian belanja pada honorarium narasumber.

2.01.38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervise dan evaluasi layanan di Bidang Pendidikan dengan target kinerja sebanyak 8 dokumen. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.243.169.000**,- menjadi **Rp.179.169.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.64.000.000,-** atau **26,32 persen**. Hal ini dikarenakan adanya

rasionalisasi pada beberapa rincian belanja pada honorarium narasumber.

2.01.47 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah ruang kelas baru yang bertambah. Target kinerja pada kegiatan ini berubah dari 15 ruang, demikian pula Anggaran sub kegiatan ini sebesar **Rp.8.712.199.800 menjadi Rp.8.692.229.800,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.19.750.000,-** atau **0,23 persen.** Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada rincian belanja pada honorarium tim pelaksana kegiatan

2.01.48 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat sebanyak **0** unit berubah menjadi **16 unit**. Anggaran sub kegiatan ini sebesar **Rp.0** menjadi **Rp.2.917.518.000,-** dengan total penambahan sebesar **Rp.2.917.518.000,-** atau **0 persen.** Alokasi anggaran tambahan untuk Rehabilitasi Utilitas adalah untuk Rehabilitasi Toilet Sekolah yang menjadi salah satu Program Prioritas Walikota Terpilih, sehingga di upayakan kegiatan ini bisa berproses dalam tahun anggaran 2025, karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk pelaksanaan pekerjaan

2.01.50 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar dengan target kinerja sebanyak 430 satuan pendidikan. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.86,855.800**,- menjadi **Rp.6.623.655.800,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.6.536.800.000,-** atau **persen**. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran untuk pengadaan seragam sekolah gratis untuk SD sebagai salah satu program prioritas walikota.

2.01.51 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat. Target kinerja pada kegiatan ini berubah dari 25 ruang menjadi... Ruang. Demikian pula Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.5.727.092.000,-** menjadi **Rp.5.700.842.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.26.250.000,-** atau **0,46 persen.** Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada rincian belanja pada honorarium tim pelaksana kegiatan.

2.01.54. Penyediaan Biaya Personil Didik Sekolah Dasar

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peserta didik sekolah dasar yang menerima biaya personil peserta didik dengan target kinerja sebanyak 12150 orang. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.645.793.000**,- menjadi **Rp.566.793.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.79.000.000,-** atau **12,23 persen**. Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada rincian belanja pada honorarium tim pelaksana kegiatan

2.01.55 Pengadaan Alat Praktik Peraga Peserta Didik

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah alat praktik dan peraga peserta didik yang tersedia dengan target kinerja sebanyak 5 paket. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.2.946.188.600**,- menjadi **Rp.3.122.688.600,-** dengan total penambahan sebesar **Rp.176.500.000,-** atau **5,99 persen**. Hal ini Hal ini dikarenakan adanya efisiensi untuk honorarium tim pelaksana kegiatan dan alokasi anggaran untuk pengadaan media pembelajaran digital literasi dan numerasi.

2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Alokasi anggaran pada kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama sampai dengan parsial 2 Tahun 2025 sebesar **Rp.133.680.600.020,-** setelah perubahan berubah menjadi **Rp.101.258.628.620,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.32.421.971.400,-** atau **24,25 persen**.

2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah dibangun dengan target sebanyak 1 Ruang. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.594.999.440,-** menjadi **Rp.579.014.440,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.15.985.000,-** atau **2,69 persen.** Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada rincian belanja pada honorarium tim pelaksana kegiatan.

2.02.06 Pembangunan Laboratorium

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah runag laboratorium yang telah dibangun dengan target sebanyak 1 Ruang. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.880.873.600,-** menjadi **Rp.868.373.600,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.12.500.000,-** atau **1,42 persen.** Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada rincian belanja pada honorarium tim pelaksana kegiatan.

2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun dengan target sebanyak 56 unit. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.43.318.382.400,-** menjadi **Rp.1.494.682.500,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.41.823.699.900,-** atau **96,55 persen.** Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada rincian belanja pada honorarium tim pelaksana kegiatan.

2.02.14 Rehabilitaasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah ruang kelas yang telah direhabilitasi sedang/berat dengan target sebanyak 14 Ruang. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.4.348.842.740,-** menjadi **Rp.4.325.342.740,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.23.500.000,-** atau **0,54 persen.** Hal ini

dikarenakan adanya rasionalisasi pada rincian belanja pada honorarium tim pelaksana kegiatan.

2.02.18 Rehabilitasi Sedang/berat Laboratorium

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah ruang laboraturium yang telah direhabilitasi sedang/berat dengan target sebanyak 1 Ruang. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.799.632.300,-,** menjadi **Rp.786.632.300,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.13.000.000,-** atau **1.63 persen.** Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada rincian belanja pada honorarium tim pelaksana kegiatan.

2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat dengan target sebanyak 4 unit. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.327.761.500,-** menjadi **Rp.2.521.871.000,-** dengan total penambahan sebesar **Rp.2.194.109.500,-** atau **669,42 persen.** Hal ini dikarenakan adanya alokasi anggaran untuk rehabilitasi toilet pada SMP.

2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah mebel pada satuan pendidik SMP Negeri dengan target sebanyak 4 paket. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.2.020.636.400,-,** menjadi **Rp.4.040.020.400,-** dengan total penambahan sebesar **Rp.2.019.384.000,-** atau **99,94 persen.** Hal ini dikarenakan adanya alokasi anggaran untuk pengadaan meja dan kursi guru.

2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peserta didik sekolah menengah pertama yang menerima biaya personil peserta didik dengan target sebanyak 8.400 peserta didik. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.635.855.000,-,** menjadi **Rp.616.355.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.19.500.000,-** atau **3,07 persen.** Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada beberapa rincian belanja honorarium narasumber dan honorarium tim pelaksana kegiatan.

2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifiktas Siswa

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik dan non akademik dengan target kinerja sebanyak 945 peserta didik. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.537.812.000,-** menjadi **Rp.488.812.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.49.000.000,-** atau **9,11 persen.** Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada beberapa rincian belanja honorarium narasumber.

2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama sebanyak 280 orang menjadi 340 orang. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.6.164.052.000,-,** menjadi **Rp.6.153.252.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.10.800.000,-** atau **0,18 persen.** Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian jumlah kebutuhan guru dan tenaga administrasi Non ASN.

2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi sebanyak 650 orang berubah menjadi 300 orang. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.336.970.000,-,** menjadi **Rp.685.170.000,-** dengan total penambahan sebesar **Rp.348.200.000,-** atau **103,33 persen.** Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada beberapa rincian belanja pada honorarium narasumber dan makan minum kegiatan.

2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pembinaan sebanyak 190 satuan pendidikan. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.172.080.000,-,** menjadi **Rp.111.080.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.61.000.000,-** atau **35,45 persen.** Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada beberapa rincian belanja pada honorarium narasumber.

2.02.43 Peningkatan kapasitas pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama sebanyak 222 orang. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.76.175.000,-,** menjadi **Rp.28.175.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.48.000.000,-** atau **63,01 persen.** Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada beberapa rincian belanja pada honorarium narasumber dan perjalanan dinas biasa.

2.02.51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervise dan evaluasi layanan di Bidang Pendidikan sebanyak 9 dokumen. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.228.515.000,-** menjadi **Rp. 174.515.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.54.000.000,-** atau **23,63 persen.** Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada beberapa rincian belanja pada honorarium narasumber.

2.02.58 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar sebanyak 8500 satuan pendidikan. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.115.955.000,-**, menjadi **Rp.4.956.455.000,-** dengan total penambahan sebesar **Rp.4.840.500.000,-** atau **4.174,46 persen.** Hal ini dikarenakan alokasi anggaran untuk pengadaan seragam sekolah gratis untuk SMP sebagai salah satu program prioritas walikota.

2.02.59 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah ruang kelas baru yang bertambah sebanyak 6 Ruang. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.2.905.761.640,-**, menjadi **Rp.2.897.261.640,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.8.500.000,-** atau **0,29 persen.** Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada beberapa rincian belanja pada honorarium Tim pelaksana kegiatan.

2.02.64 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang telah direhabilitasi sedang/berat sebanyak 6 ruang. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.3.037.466.000,-**, menjadi **Rp.3.020.466.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.17.000.000,-** atau **0,56 persen.** Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada beberapa rincian belanja pada honorarium Tim pelaksana kegiatan dan transport tim survey dan monitoring.

2.02.67 Pengadaan Alat Paktik dan Peraga Siswa

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah Alat Praktik dan Alat Peraga Siswa yang tersedia dengan target kinerja sebanyak 1 Paket. Demikian pula Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.1.617.538.000,-**, menjadi **Rp.1.950.858.000,-** dengan total penambahan sebesar **Rp.333.320.000,-** atau **20,61 persen.** Hal ini dikarenakan adanya alokasi anggaran untuk belanja modal seperti pengadaan LCD proyektor, AC, Sound System dan Komputer

2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Alokasi anggaran pada kegiatan pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan parsial 2 Tahun 2025 sebesar **Rp.30.555.993.680,-** setelah perubahan berubah menjadi **Rp.28.970.108.080,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.1.585.885.600,-** atau **5,19 persen**.

2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang telah dibangun dengan target kinerja 20 paket. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.2.751.240.280,-**, menjadi **Rp.3.517.464.080,-** dengan total penambahan sebesar **Rp.766.223.800,-** atau **27,85 persen.**

Perubahan anggaran ini dilakukan untuk mendukung proses belajar mengajar, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan ramah anak dan dapat mengembangkan wawasan dan keterampilan motorik halus pada anak usia dini.

2.03.15 Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi dengan target kinerja 450 orang. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.2.065.992.000,-**, menjadi **Rp.5.279.092.000,-** dengan total perubahan sebesar **Rp.3.213.100.000,-** atau **155,52 persen.** Hal ini dikarenakan adanya alokasi anggaran untuk tunjangan guru dan tenaga kependidikan di pulau serta penyesuaian kebutuhan anggaran untuk kegiatan pengembangan karir lainnya

2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOP PAUD dengan target kinerja 500 orang. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.113.633.000,-**, menjadi **Rp.61.133.000,-** dengan total perubahan sebesar **Rp.52.500.0000,-** atau **46,20 persen.** Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada rincian belanja pada honorarium tim pelaksana kegiatan.

2.03.25 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, perencanaan, supervise dan evaluasi layanan di Bidang pendidikan dengan target kinerja 4 dokumen. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.260.515.000,-**, menjadi **Rp.202.915.000,-** dengan total perubahan sebesar **Rp.57.600.000,-** atau **22,11 persen.**

2.03.30 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah ruang kelas baru yang bertambah dengan target kinerja 2 ruang. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.5.190.584.000,-**, menjadi **Rp.113.474.600,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.5.077.109.400,-** atau **97,81 persen.** Perubahan dilakukan karena ketersediaan anggaran untuk pembangunan Paud negeri 2 paket tidak sesuai dengan nilai anggaran pada dokumen perencanaan.

2.03.47 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah peserta didik PAUD yang mengikuti proses belajar dengan target kinerja 22.750 orang. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.7.073.339.800,-**, menjadi **Rp.6.695.339.800,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.378.000.000,-** atau **5,34 persen.** Hal ini

dikarenakan adanya penyesuaian anggaran pada honorarium untuk guru jenjang PAUD Negeri

2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Alokasi anggaran pada program pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai dengan parsial 2 Tahun 2025 sebesar **Rp.7.886.840.880,-** setelah perubahan berubah menjadi **Rp. 7.836.840.880,-** dengan total perubahan sebesar **Rp.50.000.000,-** atau **0,63 persen**.

2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah sekolah nonformal/kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemenn sebanyak 36 satuan pendidikan. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.84.518.000,-**. menjadi **Rp. 79.518.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.5.000.000,-** atau **5,92 persen.** Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada rincian belanja pada honorarium tenaga administrasi.

2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah sekolah nonformal/kesetaraan yang mengelola dana BOP dengan target kinerja 36 satuan pendidikan. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.7.421.702.000,-**, menjadi **Rp. 7.376.702.000,-** dengan total penambahan sebesar **Rp.45.000.000,-** atau **0,61 persen.** Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada pada honorarium tim pelaksana kegiatan.

3. Program Pengembangan Kurikulum

Alokasi anggaran pada program pengembangan kurikulum sampai dengan parsial 2 Tahun 2025 sebesar **Rp.46.048.000,-** setelah perubahan berubah menjadi **Rp.41.198.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.4.850.000,-** atau **10,53 persen**.

2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Alokasi anggaran pada kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sampai dengan parsial 2 Tahun 2025 sebesar **Rp.46.048.000,-** setelah perubahan berubah menjadi **Rp. 41.198.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp. 4.850.000,-** atau **10,53 persen**.

2.02.06 Penyusunan kompetensi dasar/capaian pembelajaran muatan local pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah kompetensi dasar/capaian pembelajaran muatan local pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang tersusun dengan target kinerja 2 dokumen. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.46.048.000,-**, menjadi **Rp.41.198.000,-** dengan total

pengurangan sebesar **Rp. 4.850.000,-** atau **10,53 persen.** Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada pada rekening belanja honorarium narasumber.

4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Alokasi anggaran pada program pendidik dan tenaga kependidikan sampai dengan parsial 2 Tahun 2025 sebesar **Rp.95.680.000,-** setelah perubahan berubah menjadi **Rp.11.680.000,-** dengan total perubahan sebesar **Rp.84.000.000,-** atau **87,79 persen**.

2.01 Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Alokasi anggaran pada kegiatan Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sampai dengan parsial 2 Tahun 2025 sebesar **Rp.95.680.000,-** setelah perubahan berubah menjadi **Rp. 11.680.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.0,-** atau **0 persen**.

2.01.01 Perhitungan dan Penataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemataan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/kesetaran dengan target kinerja 12 dokumen. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.47.840.000,-**, menjadi **Rp.5.840.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.42.000.000,-** atau **87,79 persen.** Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada pada rekening belanja honorarium tim pelaksana kegiatan

2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pelaksanaan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/kesetaran dengan target kinerja 3 laporan. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.47.840.000,-**, menjadi **Rp.5.840.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp. 42.000.000,-** atau **87,79 persen.** Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada pada rekening belanja honorarium tim pelaksana kegiatan.

5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Alokasi anggaran pada program pengendalian perizinan pendidikan sampai dengan parsial 2 Tahun 2025 sebesar **Rp.32.182.000,-** setelah perubahan

berubah menjadi **Rp.26.182.000-** dengan total perubahan sebesar **Rp.6.000.000,-** atau **18,64 persen**.

2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat

Alokasi anggaran pada kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat sampai dengan parsial 2 Tahun 2025 sebesar **Rp. 32.182.000,-** setelah perubahan berubah menjadi **Rp. 26.182.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.6.000.000,-** atau **18,64 persen**.

2.02.04 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan target kinerja 100 dokumen. Anggaran sub kegiatan ini berubah yang sebelumnya **Rp.32.182.000,-**, menjadi **Rp.26.182.000,-** dengan total pengurangan sebesar **Rp.6.000.000,-** atau **18,64 persen.** Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi pada pada rekening belanja perjalanan dinas dalam kota.

Tabel TC.33
Rencana Usulan Perubahan Program dan Kegiatan
Dinas Pendidikan Kota Makassar
Tahun 2025

Unit Organisasi : Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi: Dinas Pendidikan Kota Makassar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025								Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											1.372.529.076.418	1.308.137.824.000						1.227.015.573.000
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah			Kota Makassar/Pannakkukang/Paropo	90%	100%					938.434.971.058	1.005.807.126.880	67.372.155.822			Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	946.570.341.473,00
		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah				100%	100%										Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	
		Persentase ketersediaan				90%	90%										Persentase Ketersed	90%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
		administrasi sarana dan prasarana															**iaan Sara7na dan Prasarana aparatur**		
1.01.01.2.01	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Persentase capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**						**100%**	**100%**	**251.533.000**	**265.653.000**	**14.100.000**			Persentase Capaian Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**100 %**	**71.034.900**
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen			64.213.000	23.313.000	40.900.000			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	42.335.300
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordina					1 Dokumen	1 Dokumen			20.795.000	13.795.000	7.000.000			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordina	1 Dokumen	3.965.800

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025								Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
			si Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														si Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
1.01.1.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen			11.460.000	4.460.000	7.000.000			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.910.700
1.01.1.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen			23.865.000	16.865.000	7.000.000			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	3.982.400

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
			DPA-SKPD														DPA-SKPD		
1.01.1.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen			18.555.000	11.555.000	7.000.000			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.938.300
1.01.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan					1 Laporan	1 Laporan			41.400.000	39.800.000	1.600.000			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	0 Laporan	0,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
1.01.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 Laporan	5 Laporan			71.265.000	155.865.000	84.600.000			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12.902.400
1.01.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**100%**	**100%**	**933.992.262.098**	**998.815.763.720**	**64.823.501.622**			**Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**939.300.006.838**
1.01.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					6773 Orang/Bulan	6773 Orang/Bulan			926.429.040.298	991.726.821.920	65.297.781.622			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8290 Orang/bulan	931.940.540.238
1.01.1.2.	Penyediaan Adminis		Jumlah Dokumen Hasil					12 Dokumen	12 Dokumen			6.507.885.000	6.384.045.000	123.840.000			*Jumlah Dokumen Hasil*	12 Dok	6.673.800.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025								Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
02.02	trasi Pelaksanaan Tugas ASN		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	umen	
1.01.1.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen			1.037.526.800	701.086.800	336.440.000			Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	682.672.200
1.01.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan					1 Laporan	1 Laporan			17.810.000	3.810.000	14.000.000			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12 Dokumen	2.994.400

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD														Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD		
1.01.0 1.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**																	**1 Laporan**	**336.000.000**
1.01.0 1.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	336.000.000
1.01.0	**Administrasi Kepega**			**Persentase Capaian Layanan**						**100%**	**100%**	**166.000.000**	**168.000.000**	-			**Persentase Capaian**	**100 %**	**318.000.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025								Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
1.2.05	**waian Perangkat Daerah**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**													**Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dians yang tersedia									-	-	-			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	280 paket	210.000.000
1.01.01.2.05.02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					4 Dokumen	0			28.000.000	0	28.000.000			-	-	0,00
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut					14 orang	14 orang			138.000.000	168.000.000	30.000.000			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut	14 Orang	108.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
	dan fungsi		i Pendidikan dan Pelatihan														i Pendidikan dan Pelatihan		
1.01.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Persentase Capaian Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**100%**	**100%**	**547.443.960**	**796.523.960**	**249.080.000**			**Persentase Capaian Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**687.513.700,00**
1.01.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket			2.520.000	2.520.000	0			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.561.500
1.01.1.2.06.02	Penyediaan Peralan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang					3 paket	3 paket			27.867.560	27.867.560				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3 Paket	173.806.700

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025								Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
			Disediakan														Disediakan		
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 paket	1 paket			20.048.400	20.048.400	0			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	72.489.600
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 paket	1 paket			30.888.000	30.888.000	**0**			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	9.915.900
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					6 Dokumen	6 Dokumen			157.120.000	146.200.000	10.920.000			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	262.740.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025								Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1.01.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					3 laporan	3 laporan			309.000.000	569.000.000	260.000.000			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	165.000.000
1.01.1.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						-	**100%**	**0**	**2.271.384.200**	**2.271.384.200**			**Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**1.787.287.600**
1.01.1.2.07.05	Pengadaan Mebel																Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	92 unit	497.970.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1.01.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Makassar/Pannakkukang/Paropo			-	35 unit			-	2.271.384.200	2.271.384.200			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	92 unit	1.289.317.600
1.01.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Persentase Capaian Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**100%**	**100%**	**3.120.912.000**	**3.072.912.000**	**48.000.000**			**Persentase Capaian Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**3.571.785.135**
1.01.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 Laporan	3 Laporan			976.452.000	976.452.000	**0**			**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**3 laporan**	1.016.472.000
1.01.1.2.	Penyediaan Jasa		Jumlah Laporan Penyedia					3 Laporan	3 Laporan			2.144.460.000	2.196.460.000	52.000.000			Jumlah Laporan Penyedia	12 Laporan	2.555.313.135

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
08.04	Pelayanan Umum Kantor		an Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan														an Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Tersedia**						**100%**	**100%**	**356.800.000**	**316.890.000**	**39.910.000**			**Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**498.714.000**
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayark					1 unit	1 unit			286.800.000	246.890.000	39.910.000			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayark	31 unit	269.690.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
			an Pajaknya														an Pajaknya		
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					1 unit	1 unit			70.000.000	70.000.000	0			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 unit	29.220.000
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi														Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	199.804.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Jumlah Penerima Beasiswa "Anak Lorong Berprestasi"**				**400 orang**	**400 orang**					**433.920.195.360**	**302.251.637.120**	**131.668.558.240**			**Angka Partisipasi Sekolah (5-6 tahun)**	**72,19**	**280.112.708.127**
		Angka Harappan Lama Sekolah				**16,56 Tahun**	**16,56 Tahun**										**Angka Partispasi Sekolah (7-15 tahun)**	**99,80**	
		Angka Rata-rata				**12,20 Tahun**	**12,20 Tahun**										**Angka Partispas**	**12,98**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
		Lama Sekolah															i Sekolah (7-18 tahun) Kesetaraan		
		Angka Partisipasi Murni (PAUD, SD, SMP)				PAUD = 46,33%	PAUD = 46,33%										Iklim Inklusivitas SD	65,15	
						SD = 100%	SD = 100%										Iklim Inklusivitas SMP	63,42	
						SMP = 100%	SMP = 100%										Iklim Keamanan SD	77,03	
		Angka Partispasi Kasar (PAUD, SD, SMP)				PAUD = 65,52%	PAUD = 65,52%										Iklim Keamanan SMP	73,02	
						SD = 100%	SD = 100%										Iklim Kebinekaan SD	75,50	
						SMP = 100 %	SMP = 100 %										Iklim Kebinekaan SMP	72,62	
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidkan (PAUD, SD dan SMP) dalam kondisi baik				PAUD = 78 %	PAUD = 78 %										Proporsi jumlah satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	81,45	
						SD = 78%	SD = 78%										Skor Kemampuan	67,86	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
																	Literasi SD		
						SMP = 100 %	SMP = 100 %										Skor Kemampuan Literasi SMP	73,86	
		Persentase Ketuntasan Pendidikan Kesetaraan (A,B,C)				94,26 %	94,26 %										Sokr Kemampuan Numerasi SD	60,18	
																	Skor Kemampuan Numerasi SMP	65,85	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			Persentase Sekolah Dasar yang Dikelola						100%	100%	261.796.760.780	164.186.059.540	97.610.701.240			Persentase Sekolah Dasar yang Dikelola	100	91.773.337.567
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																Sekolah Baru yang dibangun	-	0,00
1.01.02.2.	Pembangunan Ruang		Jumlah Ruang Guru/Ke					1 Ruang	1 Ruang			507.691.600	495.191.600	12.500.000			Jumlah Ruang Guru/Ke	2 Ruang	575.383.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
01.03	Guru/Kepala Sekolah/TU		pala Sekolah/ TU yang Telah Dibangun														pala Sekolah/ TU yang Telah Dibangun		
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun					1 Ruang	1 Ruang			324.008.640	273.243.140	50.765.500			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	384.625.500
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	574.493.300
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					134 Unit	4 Unit			109.368.203.940	969.536.200	108.398.667.740			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	25 unit	2.646.309.300

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat					3 Ruang	3 Ruang			734.548.000	723.548.000	11.000.000			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	4 Ruang	967.455.700
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat														Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	2 Ruang	0
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat														Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	2 Ruang	488.351.600

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia					5 Paket	5 Paket			5.498.252.000	7.076.226.000	1.577.974.000		Prioritas untuk pengadaan meubelair sekolah dipulau	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	4 paket	5.248.925.900
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba non akademik					950 Peserta Didik	950 Peserta Didik			299.163.000	256.163.000	43.000.000			Jumlah Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba non akademik	950 peserta didk	500.298.100
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					361 Orang	481 Orang			7.491.748.400	7.491.748.400	0			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	481 orang	6.627.381.660

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025								Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					942 Orang	600 Orang			733.200.000	749.640.000	16.440.000			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golonga, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3060 orang	1.259.361.500
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Dasar yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah					240 Satuan Pendidikan	240 Satuan Pendidikan			164.130.000	113.130.000	51.000.000			Jumlah Sekolah Dasar yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	480 satuan pendidikan	361.209.200

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025								Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS					465 Satuan Pendidikan	465 Satuan Pendidikan			118.165.100.000	118.165.100.000	0			Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS	480 Satuan Pendidikan	45.639.833.107
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasa					465 Orang	465 Orang			149.417.000	69.417.000	80.000.000			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasa	400 orang	157.229.500
1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang					8 Dokumen	8 Dokumen			243.169.000	179.169.000	64.000.000			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	8 Dokumen	463.981.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
			Pendidikan														Pendidikan		
1.01.02.2.01.39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan														Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0	1.629.800
1.01.02.2.01.40	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 paket	6.551.705.100
1.01.02.2.01.47	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					15 Ruang	15 Ruang			8.712.199.800	8.692.449.800	19.750.000			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	26 Ruang	8.428.425.900
1.01.02.2.01.48	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan		Jumlah sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang					0	16 unit			0	2.917.518.000	2.917.518.000		Alokasi anggaran untuk rehabilitasi	Jumlah sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang	30 unit	1.873.190.300

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
	Utilitas Sekolah		Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat													toilet sekolah (program prioritas)	Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat		
1.01.02.2.01.50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar					430 Satuan Pendidikan	430 Satuan Pendidikan			86.855.800	6.623.655.800	6.536.800.000		Alokasi anggaran untuk pengadaan seragam gratis SD (program prioritas)	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	400 Satuan Pendidikan	133.036.700
1.01.02.2.01.51	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat					25 Ruang	25 Ruang			5.727.092.000	5.700.842.000	26.250.000			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	40 Ruang	5.712.682.400

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1.01.02.2.01.54	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					12.150 Peserta Didik	12.150 Peserta Didik			645.793.000	566.793.000	79.000.000			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	18880 Peserta didik	715.764.200
1.01.02.2.01.55	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia					5 Paket	5 Paket			2.946.188.600	3.122.688.600	176.500.000			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 paket	2.470.063.800
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**			**Persentase Sekolah Menengah Pertama yang Dikelola**						**100%**	**100%**	**138.445.800.020**	**103.562.170.620**	**34.883.629.400**			**Persentase Sekolah Menengah Pertama yang Tersedia**	**100 %**	**147.702.077.080**
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah		Jumlah sekolah baru yang														Jumlah sekolah baru yang	1 unit	25.503.973.700

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025								Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
	Baru (USB)		telah dibangun														telah dibangun		
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					1 Ruang	1 Ruang			594.999.440	579.014.440	15.985.000			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	1.151.983.300
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun														Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	565.838.500
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun														Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1.009.970.800
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium		Jumlah laboratorial sekolah yang					1 Ruang	1 Ruang			880.873.600	868.373.600	12.500.000			Jumlah laboratorial sekolah yang	4 Ruang	2.146.304.700

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
			telah dibangun														telah dibangun		
1.01.02.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun					56 unit	56 unit			43.318.382.400	1.494.682.500	41.823.699.900			Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun	25 unit	3.865.162.600
1.01.02.02.14	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas yang telah direhabilitasi sedang/berat					14 Ruang	14 Ruang			4.348.842.740	4.325.342.740	23.500.000			Jumlah Ruang Kelas yang telah direhabilitasi sedang/berat	40 Ruang	7.630.044.400
1.01.02.02.16	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat	2 Ruang	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025								Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi sedang/ berat perpustakaan sekolah		Jumlah ruang laboratorium yang telah direhabilitasi sedang/berat					1 Ruang	1 Ruang			4.785.000	4.785.000	-			Jumlah ruang laboratorium yang telah direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	0
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium		Jumlah ruang laboratorial yang telah direhabilitasi sedang/berat					1 Ruang	1 Ruang			799.632.300	786.632.300	13.000.000			Jumlah ruang laboratorial yang telah direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	1.282.552.300
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah sarana,prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat					4 unit	4 unit			328.761.500	2.521.871.000	2.193.109.500			Jumlah sarana,prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	30 unit	2.336.886.000
1.01.02.2.	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah mebel sekolah					4 paket	4 paket			2.020.636.400	4.040.020.400	2.019.384.000			Jumlah Mebel Sekolah	4 Paket	5.260.128.300

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
02.25			yang tersedia														yang Tersedia		
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah peserta didik sekolah menengah pertama yang mnerima biaya perosnil peserta didik					8400 peserta didik	8400 peserta didik			635.855.000	616.355.000	19.500.000			Jumlah peserta didik sekolah menengah pertama yang mnerima biaya perosnil peserta didik	19000 peserta didik	721.283.200
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik					945 Peserta didik	945 Peserta didik			537.812.000	488.812.000	49.000.000			Jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik	8500 peserta didik	896.713.200
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan		Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan					280 orang	340 orang			6.164.052.000	7.355.004.000	1.190.952.000			Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan	340 orang	3.952.012.680

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		pendidikan sekolah menengah pertama														pendidikan sekolah menengah pertama		
1.01.02.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					650 Orang	300 Orang			336.970.000	685.170.000	348.200.000			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3400 orang	1.284.322.500
1.01.02.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manaje		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang					190 Satuan Pendidkan	190 Satuan Pendidkan			172.080.000	111.080.000	61.000.000			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang	250 Satuan Pendidikan	324.484.100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025								Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
	men Sekolah		Dilaksanakan Pembinaan 190 Satuan Pendidikan														Dilaksanakan Pembinaan		
1.01.02.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					222 satuan pendidikan	222 satuan pendidikan			65.555.507.000	65.555.507.000	0			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	250 Satuan Pendidikan	65.555.507.000
1.01.02.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					222 Orang	222 Orang			76.175.000	28.175.000	48.000.000			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	250 orang	119.711.800
1.01.02.2.	Koordinasi, Perenca		Jumlah Dokumen Hasil					9 Dokumen	9 Dokumen			228.515.000	174.515.000	54.000.000			Jumlah Dokumen Hasil	9 Dok	463.569.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
02.51	naan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	umen	
1.01.02.2.02.58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar					8500 Satuan Pendidikan	8500 Satuan Pendidikan			115.955.000	4.956.455.000	4.840.500.000		Alokasi anggaran untuk pengadaan seragam sekolah gratis SMP (Program prioritas Walikota)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	213 satuan pendidikan	172.880.500
1.01.02.2.	Pembangunan Ruang		Jumlah Ruang Kelas Baru					6 Ruang	6 Ruang			2.905.761.640	2.897.261.640	8.500.000			Jumlah Ruang Kelas Baru	24 Ruang	14.103.019.100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025								Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
02.59	Kelas Baru		yang Bertambah														yang Bertambah		
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis,Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah peserta bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan														Jumlah peserta bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 orang	320.822.500
1.01.02.2.02.62	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia														Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	5.003.976.200
1.01.02.2.02.64	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/K		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU yang					6 Ruang	6 Ruang			3.037.466.000	3.020.466.000	17.000.000			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU yang	4 Ruang	1.539.047.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
	epala Sekolah /TU		telah direhabilitasi sedang/berat														Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat		
1.01.02.2.02.67	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang tersedia					1 paket	1 paket			1.617.538.000	1.950.858.000	333.320.000			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	2.491.883.700
1.01.02.2.03	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini**			**Persentase Lembaga PAUD yang Dikelola**						**100%**	**100%**	**30.555.993.680**	**28.970.108.080**	**1.585.885.600**			**Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Dikelola**	**100 %**	32.605.207.980
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan utilitas PAUD yang telah Dibangun					20 Paket	20 Paket			2.751.240.280	3.517.464.080	766.223.800			Jumlah Sarana, Prasarana dan utilitas PAUD yang telah Dibangun	0	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia														Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	5 Paket	187.992.000
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD					16 orang	16 orang			317.587.2000	317.587.2000	0			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	16 orang	299.394.900
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompete					450 orang	450 orang			2.065.992.000	5.279.092.000	3.213.100.000		Alokasi anggaran untuk Tunjangan guru dan tenaga kependidikan di Pulau	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompete	2380 orang	8.344.305.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
			nsi dan kualifikasi														nsi dan kualifikasi		
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					600 satuan pendidikan	600 satuan pendidikan			241.309.400	241.309.400	0			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	572 satuan pendidikan	571.295.400
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP					666 satuan pendidikan	666 satuan pendidikan			12.541.793.000	12.541.793.000	0			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	572 satuan pendidikan	12.588.829.500
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD					500 orang	500 orang			113.633.000	61.133.000	52.500.000			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	572 Orang	177.575.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1.01.02.2.03.25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					4 Dokumen	4 Dokumne			260.515.000	202.915.000	57.600.000			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50 dokumen	210.534.800
1.01.02.2.03.30	Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					2 Ruang	2 Ruang			5.190.584.000	113.474.600	5.077.109.400			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	0
1.01.02.2.03.32	Penataan RuangSudut Baca																Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	30 Ruang	63.800.000
1.01.02.2.03.34	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativit		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang														Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang	300 peserta didik	169.692.200

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
	as Peserta Didik		Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik														Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
1.01.02.2.03.37	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	86.787.800
1.01.02.2.03.40	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Jumlah sekolah baru yang telah dibangun														Jumlah sekolah baru yang telah dibangun	0 unit	7.361.954.500
1.01.02.2.	Pengadaan Perlengk		Jumlah perlengkapan														Jumlah perlengkapan	0 paket	6.460.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
03.41	apan Peserta Didik		peserta didik yang tersedia														peserta didik yang tersedia		
1.01.02.2.03.46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia														Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2 paket	465.834.700
1.01.02.2.03.47	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang mengikuti Proses Belajar					22.750 Peserta Didik	22.750 Peserta Didik			7.073.339.800	6.695.339.800	378.000.000			Jumlah Peserta Didik PAUD yang mengikuti Proses Belajar	668 satuan pendidikan	2.070.752.180
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan**			**Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dikelola**						**100%**	**100%**	**7.886.840.880**	**7.836.840.880**	**50.000.000**			**Persentase Pendidikan Nonformal/Keseteraan yang Dikelola**	**100**	8.032.085.500
1.01.02.2.	Penyediaan Biaya		Jumlah peserta didik														Jumlah peserta didik	5700 pese	698.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025								Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
04.10	Personil Peserta Didik Nonfromal/Keseteraan		nonformal//kesetaraan yang menrima biaya personil peserta didik														nonformal//kesetaraan yang menrima biaya personil peserta didik	rta didik	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Keseteraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					36 satuan pendidikan	36 satuan pedidikan			84.518.000	79.518.000	5.000.000			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	32 satuan pendidikan	174.439.900
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Keseteraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP					36 satuan pendidikan	36 satuan pedidikan			7.421.702.000	7.376.702.000	45.000.000			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	32 satuan pendidikan	7.414.609.800
1.01.02.2.	Peningkatan Kapasitas																Jumlah Tenaga yang Meningka	120 orang	69.763.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
04.18	Pengelolaan Dana BOP Sekolah NonformalKesetaraan																t Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
1.01.02.2.04.27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					5 Dokumen	5 Dokumen			183.410.000	183.410.000	0			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100 dokumen	153.074.000
1.01.02.2.04.41	Rehabilitasi sedang/ berat sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabili					I unit	1 unit			60.000	60.000	0			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabili	0 unit	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025								Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
			tasi Sedang/ Berat														tasi Sedang/ Berat		
1.01.02.2.04.46	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar					5870 peserta didik	5870 peserta didik			197.090.880	197.090.880	0			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	5700 peserta didik	219.500.800
1.01.02.2.04.48	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia					8 paket	8 paket			60.000	60.000	0			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 paket	0
1.01.03.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal**				**90%**	**90%**					**46.048.000**	**41.198.000**	**0**			**Persentase satuan Pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal**	**100 %**	111.195.400
1.01.03.2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidi**			**Jumlah Kurikulum yang Dikembangkan**						**3 kurikulum**	**3 kurikulum**	**46.048.000**	**41.198.000**	**0**			**Jumlah Kurikulum yang Dikembangkan**	**2 kurikulum**	**111.195.400**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
	kan PAUD dan Pendidikan Nonformal																		
1.01.03.2.02.06	Penyusunan Kompetensi Dasar/capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun					2 Dokumen	2 Dokumen			46.048.000	41.198.000	0			Jumlah kompetensi dasar/capaian pembelajaran muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang tersusun	50 dokumen	111.195.400
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rasio Guru-Murid (PAUD,SD, SMP)**				**PAUD=1:18**	**PAUD=1:18**					**95.680.000**	**11.680.000**	**84.000.000**			**Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik**	**100 %**	**123.015.000**
						SD=1:30	**SD=1:30**												
						SMP=1:32	**SMP=1:32**												
		Persentase Guru yang				**PAUD=39,49**	**PAUD=39,49**										**Proporsi Guru**	**77,22%**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025								Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Bersetifikat (PAUD, SD, SMP)				SD=47,83	SD=47,83										PAUD dengan kualifikasi S1/D4		
						SMP=47,88	SMP=47,88												
1.01.04.201	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Kegiatan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Dilaksanakan							2 kegiatan	2 kegiatan	95.680.000	11.680.000	84.000.000			Jumlah Kegiatan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Dilaksanakan	2 kegiatan	123.015.000
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan					12 Dokumen	12 Dokumen			47.840.000	5.840.000	42.000.000			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan	12 Dokumen	51.010.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025								Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
	Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
1.01.04.201.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonform		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan					3 Laporan	3 Laporan			47.840.000	5.840.000	42.000.000			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	12 laporan	72.005.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
	al/Kesetaraan		Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Kebutuhan Kurikulm yang dikembangkan**				**38,15%**	**38,15%**					**32.182.000**	**26.182.000**	**6.000.000**			**Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang diterbitkan/Diperbaharui**	**38,3%**	98.313.000
1.01.05.202	**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Oleh Masyarakat**			**Jumlah izin penyelenggaraan satuan PAUD dan PNF yang diawasi dan diterbitkan izin penyelenggaraannya**						**133 Satuan Pendidikan**	**133 Satuan Pendidikan**	**32.182.000**	**26.182.000**	**6.000.000**			**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Oleh Masyarakat**	**150 lembaga**	**98.313.000**
1.01.05.202.03	Penmbinaan PAUD dan Pendidik		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD					100 Dokumen	100 Dokumen			32.182.000	26.182.000	6.000.000			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD	100 dokumen	98.313.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Kerja 2025								Bertambah/(-Berkurang)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
	an Nonformal yang diselenggarakan Oleh Masyarakat		dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2025 merupakan Rencana kerja yang disesuaikan dengan adanya beberapa perubahan baik dari perubahan anggaran, peralihan, maupun penambahan yang terjadi selama pelaksanaan Dinas Pendidikan Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar pada Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (P-RKPD) Kota Makassar Tahun 2025. Dinas Pendidikan Kota Makassar pada Tahun 2025 akan melaksanakan 5 (lima) program yang terdiri atas 1 Program rutin yang terdiri dari 7 kegiatan dengan total 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dan 4 (empat) Program utama yang terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan dengan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, peraturan-peraturan baru atau adanya kebutuhan, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan berlaku.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Kota Makassar dan menjadi kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka unsur-unsur organisasi, mulai dari Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh pelaksana Dinas Pendidikan Kota Makassar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

1. Melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
2. Menjaga konsistensi antara dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar, Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Makassar.
3. Dalam rangka efektivitas pelaksanaanya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2025.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2025 dengan tetap berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD)

tahun berkenaan, dan sebagai pedoman/acuan melanjutkan tugas yang belum terselesaikan maupun belum terlaksana sampai akhir tahun 2025 untuk dapat mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan, serta sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan tahun mendatang.

Makassar, 12 Agustus 2025

KEPALA DINAS

ACHI SOLEMAN, S.STP.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19770821 1995112 2 001

PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Dinas Sosial



RENCANA KERJA

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 1799/188 4 45/TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188 4 45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dipandang perlu untuk diubah,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4 45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485),

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, dengan menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana di maksud Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah

KETIGA Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan :
1. Wakil Wali Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar,
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar,
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar,
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 1799/188.4 45/TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4 45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

No.	Perangkat Daerah
1	2
1	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
7	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
9.	Dinas Sosial Kota Makassar
10.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
12.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
13	Dinas Pertanahan Kota Makassar
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
17	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Makassar
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
22	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
23	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
24.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
25.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
26	Dinas Pariwisata Kota Makassar
27.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
28	Sekretariat Daerah Kota Makassar
29	Sekretariat DPRD Kota Makassar
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar

31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
32	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
34.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
35.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
36	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
37.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
38	Kecamatan Makassar Kota Makassar
39	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
40	Kecamatan Manggala Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
43	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
44.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
45.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
46	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
47.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
58	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
49.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
50.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar
51.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

WALIKOTA MAKASSAR,

ASWAPRI ANIFUDDIN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga dokumen *Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025* ini dapat disusun sebagai bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan akuntabel.

Dokumen ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Makassar hingga Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Renja Perubahan ini didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang menunjukkan bahwa dari 6 program utama dan 1 program penunjang yang dilaksanakan, terdapat 16 kegiatan dan 62 sub kegiatan yang telah berjalan dengan capaian keuangan sebesar 12% dan capaian kinerja sebesar 28,55% per akhir Maret 2025.

Dengan disusunnya dokumen Renja Perubahan ini, kami berharap dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan Dinas Sosial tetap sejalan dengan arah kebijakan strategis Pemerintah Kota Makassar, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga rencana yang tertuang dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Kota Makassar.

Makassar, 12 Agustus 2025
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar



H. A. Bukti Djufrie, S.P., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda/IVC
NIP. 196903301999031006

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025 disusun sebagai penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi hingga Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini menjadi bagian dari siklus perencanaan tahunan yang bersifat adaptif dan responsif terhadap capaian kinerja, kondisi aktual, serta arah kebijakan strategis Pemerintah Kota Makassar.

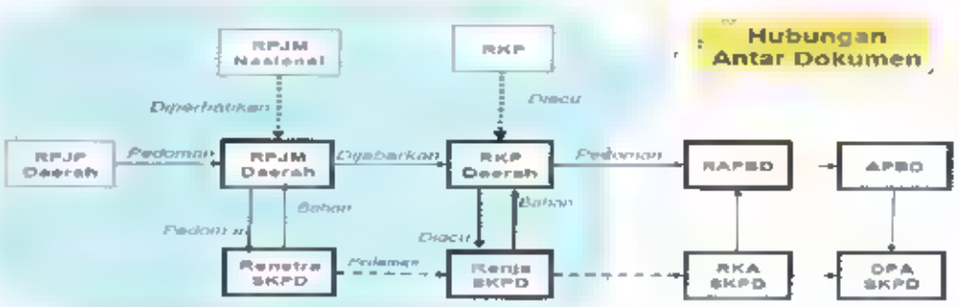
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025, Dinas Sosial telah melaksanakan 6 program utama dan 1 program penunjang, dengan total 16 kegiatan dan 62 sub kegiatan. Realisasi keuangan hingga akhir Maret 2025 mencapai 12%, sementara capaian kinerja mencapai 28,55%. Beberapa program menunjukkan capaian yang cukup signifikan dari sisi output, seperti Program Penanganan Bencana dan Rehabilitasi Sosial, namun masih terdapat ketimpangan antara realisasi fisik dan keuangan yang perlu segera direspons melalui penyesuaian kegiatan, target, dan pendanaan.

Sejumlah faktor penghambat telah diidentifikasi, antara lain keterbatasan aliran kas pada Triwulan I, proses pengadaan yang belum selesai, serta belum optimalnya peran lintas perangkat daerah dalam mendukung pelayanan sosial di lapangan. Di sisi lain, terdapat pula faktor pendorong seperti terbentuknya tim reaksi cepat dan keterlibatan aktif UPTD dalam pelayanan PPKS, yang memberikan peluang strategis untuk peningkatan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

Renja Perubahan ini disusun untuk memastikan ketercapaian target jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025–2029. Terdapat program prioritas kepala daerah baru yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial yaitu Makassar Bebas Anak Jalanan menjadikan perlu dilakukan perubahan pada Renja tahun 2025 karena akan menyebabkan perubahan strategi pelaksanaan kegiatan dan tentunya perubahan anggaran. Selain itu, di awal tahun 2025 kejadian bencana alam lebih dari yang telah diperkirakan di Renja Pokok sehingga perlu disesuaikan kembali target korban bencana dan juga anggaran yang akan digunakan.

Dengan mempertimbangkan dinamika pelaksanaan dan kebutuhan percepatan kinerja, penyusunan Renja Perubahan ini menjadi instrumen penting untuk mengarahkan kembali fokus program dan kegiatan agar lebih tepat sasaran, efisien, dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat.

Gambar 1.1.1
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPPD) yang dijabarkan ke Renja Perubahan SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPPD dan Renja Perubahan SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rencana kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana strategis, RKPPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD Perubahan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Makassar 2025 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Nomor 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Disabilitas;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 menegenai Standar Pelayanan Minimal Sosial;
17. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tahun Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting; (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
22. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyendang Disabilitas;
29. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
30. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
31. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Makassar adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam mewujudkan efisiensi dalam pembangunan daerah. Tujuan dari penyusunan renja perubahan ini yaitu untuk menyesuaikan atau memperbaharui rencana kerja sehingga rencana kerja tetap relevan dengan kondisi terkini dan dapat mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, Renja Perubahan juga bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah dan memastikan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang disusunnya Renja Perubahan, yang umumnya didasarkan pada dinamika kebijakan, hasil evaluasi triwulan, perubahan kondisi aktual, atau adanya penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah. Selain itu, disampaikan pula dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dokumen, serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD dan Renstra.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I, mencakup capaian kinerja, serapan anggaran, kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikannya. Evaluasi ini menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian atau perubahan target kinerja, lokasi kegiatan, atau alokasi pendanaan pada Renja Perubahan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, termasuk target kinerja dan pagu anggarannya. Perubahan yang terjadi (jika ada) dijelaskan secara ringkas, baik dari sisi sasaran, indikator kinerja, maupun pendanaannya. Penyesuaian ini harus tetap sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memberikan penegasan kembali terhadap pentingnya dokumen Renja Perubahan sebagai pedoman operasional pelaksanaan kegiatan perangkat daerah. Disampaikan pula harapan agar seluruh pihak dapat mendukung pelaksanaan rencana yang telah disusun sesuai perubahan yang telah ditetapkan.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra-PD

Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial Kota Makassar telah melaksanakan 6 (enam) program utama dan 1 (satu) program penunjang, yang terdiri atas 16 kegiatan dan 62 sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp23.882.326.011,-. Realisasi keuangan hingga akhir Triwulan I mencapai Rp2.866.306.432,- atau sebesar 12%, sementara realisasi kinerja mencapai 28,55%.

Meskipun terdapat beberapa capaian yang signifikan dari sisi kinerja, namun masih terdapat ketimpangan dengan realisasi keuangan yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah berjalan namun proses administrasi dan pencairan anggarannya masih dalam tahap penyelesaian.

A. Evaluasi Program

1. Program Pemberdayaan Sosial

Realisasi anggaran program baru mencapai 3,74%, sementara capaian kinerja mencapai 22,28%. Pada program ini terdapat 2 kegiatan yaitu :

a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target 30 kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah dan telah realisasi 9 kegiatan dengan bentuk kegiatan berupa pengawasan kepada pelaksana pengumpul sumbangan. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan target 30 dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan dan hingga triwulan I telah menghasilkan 9 dokumen hasil pengawasan pengumpulan sumbangan.

b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota memiliki target kinerja yaitu 103 PSKS yang mendapatkan pengembangan potensi namun hingga triwulan I, kinerja yang dihasilkan yaitu 15 PSKS yang telah diberikan peningkatan kompetensi. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dan yang telah realisasi yaitu sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 15 LKS yang telah diterbitkan izin lembaganya melalui verifikasi dan validasi sebelumnya. Sub kegiatan lainnya belum dapat terlaksana karena terhambat proses pengadaan barang terkait pemberian bantuan bagi LKS dan LKSA, serta beberapa pelaksanaan pelatihan peningkatan

kompetensi bagi PSKS terhambat karena adanya kebijakan terkait efisiensi anggaran dalam hal ini pemangkasan anggaran transport dalam daerah bagi peserta peningkatan kompetensi.

2. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini memiliki 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

a. Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dengan target 100% dan realisasi kinerja yaitu 48.01%. Realisasi tersebut diperoleh dari 311 orang penyandang disabilitas terlantar yang telah mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti dari target 600 orang.
b. Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dengan target 100% dan realisasi kinerja yaitu 25.48%. Realisasi tersebut diperoleh dari 26 orang anak terlantar yang telah mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti dari target 100 orang.
c. Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan target 100% dan realisasi kinerja yaitu 26%. Realisasi tersebut diperoleh dari 8 orang lanjut usia terlantar yang telah mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti dari target 30 orang.
d. Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti dengan target 100% dan realisasi kinerja yaitu 9.67%. Realisasi tersebut diperoleh dari 8 orang gelandangan dan pengemis yang telah mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti dari target 80 orang.

Realisasi anggaran hingga triwulan I untuk program ini yaitu Rp. 242.766.000 atau 6.67% dari total anggaran program. Kondisi ini tentunya belum sesuai dengan target yang telah direncanakan karena terjadi kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa akibat perubahan sistem pengadaan dan penyesuaian terhadap beberapa aturan seperti pemberian transport dan honor bagi tenaga ASN dan Non ASN Pemerintah Kota Makassar. Meskipun terjadi beberapa kendala dalam realisasi anggaran, namun kinerja tetap harus dilaksanakan untuk merespon segala bentuk aduan dari masyarakat sebagai bentuk dari pelaksanaan standar pelayanan minimal.

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan 12 (dua belas) sub kegiatan yang menunjang pencapaian target pelaksanaan kegiatan. Hingga triwulan I capaian

kegiatan ini yaitu 27,3% dari target 100% yang mana telah melebih dari target pelaksanaan untuk triwulan I.

b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan 8 (delapan) sub kgeiatan. Hingga triwulan I capaian kegiatan ini yaitu 6% dari target 100% karena dari target 100 orang yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi sosial, realisasi berada di angka 6 orang PMKS lainnya. Kendala yang terjadi pada sub kegiatan di dalam kegiatan ini yaitu belum dilaksanakan penertiban tuna sosial sehingga kinerja berasal dari aduan masyarakat terkait orang terlantar yang memerlukan rehabilitasi sosial.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Dengan realisasi anggaran sebesar 17,61% dan kinerja 11,40%, kegiatan ini telah mencakup pendataan fakir miskin, pemberian bantuan perlengkapan pemakaman, serta pendataan calon penerima bantuan ekonomi. Tahap verifikasi dan validasi menjadi faktor penghambat yang harus ditindaklanjuti agar bantuan dapat disalurkan tepat waktu.

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dengan target 200 orang anak, namun hingga triwulan I belum ada kinerja yang terealisasi karena masih dalam proses verifikasi dan validasi data anak yang akan menerima bantuan perlengkapan sekolah dan bantuan tambahan makanan.
b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan target 30.000 KK fakir miskin yang dikelola dan hingga triwulan I data yang dikelola yaitu 6.843 KK. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat pada proses verifikasi dan validasi data yang terhenti karena peralihan sistem dari DTKS ke DTSEN.

4. Program Penanganan Bencana

Capaian kinerja program ini tergolong tinggi (96%), meskipun realisasi anggaran masih rendah (5,05%). Ketersediaan stok bantuan dan respon cepat terhadap laporan bencana menjadi faktor pendukung utama. Kegiatan seperti pelayanan psikososial belum dilaksanakan karena belum ada urgensi kasus.

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan target 4.000 Jiwa dan hingga triwulan I realisasi kinerja telah mencapai 5.801 jiwa, kondisi ini menyebabkan bantuan makanan, sandang dan bantuan khusus kelompok rentan yang disalurkan

telah melebih target sehingga perlu mendapatkan anggaran tambahan agar bantuan tetap dapat tersalurkan sesuai dengan kejadian bencana yang terjadi.

b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan target 2 kegiatan, namun hingga triwulan I belum ada realisasi karena direncanakan akan dilaksanakan pembentukan kelurahan siaga bencana di 4 (empat) titik rawan banjir namun karena masing menunggu konfirmasi Kementerian Sosial sehingga belum terlaksana.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Belum terdapat realisasi anggaran maupun kinerja, karena kegiatan baru dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Triwulan III. Perlu dipastikan bahwa seluruh persiapan administratif dan pengadaan dapat diselesaikan tepat waktu.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini memiliki realisasi anggaran 14,33% dengan capaian kinerja 36,25%. Beberapa kegiatan seperti pelatihan ASN, penyusunan laporan, dan pemeliharaan sarana aparatur telah terlaksana. Namun, belanja modal belum optimal karena masih dalam proses pemilihan penyedia.

B. Permasalahan Umum dan Faktor Penghambat

Beberapa faktor penghambat utama yang ditemukan dalam evaluasi ini antara lain:

1. Keterbatasan kas daerah pada Triwulan I menyebabkan keterlambatan realisasi anggaran.
2. Proses pengadaan dan pemilihan penyedia yang memerlukan waktu panjang.
3. Belum optimalnya peran lintas perangkat daerah seperti Satpol PP dalam mendukung pelayanan sosial lapangan.
4. Kegiatan yang dijadwalkan pada triwulan selanjutnya belum memiliki persiapan teknis dan administrasi yang matang.
5. Terjadi kejadian bencana yang jumlah korbannya melebihi perkiraan dan persiapan anggaran sehingga jika tetap menggunakan anggaran pokok maka akan ada kejadian bencana nantinya yang tidak dapat diberikan bantuan.
6. Program prioritas kepala daerah baru yaitu Makassar Bebas Anak Jalanan perlu untuk mendapat dukungan pelaksanaan kegiatan yang lebih maksimal agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan pelaksananaan berjalan optimal.

C. Tindak Lanjut dan Implikasi terhadap Renja Perubahan

Berdasarkan hasil evaluasi ini, maka untuk penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025, beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian antara lain:

1. Penyesuaian target indikator dan realokasi anggaran pada kegiatan dengan capaian sangat rendah dan potensi tidak tercapai.
2. Percepatan pengadaan dan verifikasi administrasi, khususnya untuk kegiatan rehabilitasi sosial, bantuan sosial ekonomi, dan pemeliharaan TMP.
3. Penguatan koordinasi lintas OPD serta optimalisasi peran tim lapangan dan pekerja sosial.
4. Penambahan kegiatan pendukung seperti pelatihan, koordinasi teknis, serta penguatan sistem pelaporan dan pengawasan kegiatan.
5. Revisi skenario waktu pelaksanaan kegiatan, terutama untuk program yang pelaksanaannya tertunda atau baru akan dimulai pada Triwulan III dan IV.
6. Penabahan anggaran pada program rehabilitasi sosial dan penanganan bencana untuk mensupport pelaksanaan tugas-tugas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat realisasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program/kegiatan sehingga target kinerja tahunan Dinas Sosial dapat tercapai secara efektif dan akuntabel.

TABEL E.01 FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA

KOTA MAKASSAR

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRWULAN I		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2					3	4	5	8			7		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/8*100%		15	16
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				45,865,737,178	22,483,287,611		2,866,306,432		2,866,306,432		13		2,866,306,432		4		
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				45,865,737,178	22,483,287,611		2,866,306,432		2,866,306,432		13		2,866,306,432		4		
	1	06				Dinas Sosial				45,865,737,178	22,483,287,611		2,866,306,432		2,866,306,432		13		2,866,306,432		4		
							Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90			14		14		15		14		15			
	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterseddiaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	%	100	35,848,701,778	13,885,323,611	35	1,995,522,432	35	1,995,522,432	35	14	35	1,995,522,432	35	4	Dinas Sosial	
							Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90			13		13		14		13		14			
	1	06	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Persen	100	93,882,900	116,196,500	23	38,380,000	23	38,380,000	23	26	23	38,380,000	0	16		

	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	26 734,600	67,713,000	0	30 380 000	0	30,380 000	0	45	0	30,380 000	0	47		
	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	10,460,000	8,320 000	0	0	0	0	0		0	0	0			
	1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	12 100,000	5,867 000	0	0	0	0	0		0	0	0			
	1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	11 098,000	9 865,000	0	0	0	0	0		0	0	0			
	1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	10 468,400	8,035,000	0	0	0	0	0		0	0	0			
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	8,316,800	7,836 500	2	0	2	0	100		2	0	0			
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	14 707 000	11,740 000	1	0	1	0	25		1	0	0			
	1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**Tahun**	**1**	**12.049,756,243**	**11,542,626,938**	**3**	**1,744,284,031**	**3**	**1,744,284,631**	**300**	**15**	**3**	**1,744,284,631**	**0**	**9**		
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	60	11 939 543,243	11 069 386,938	50	1 626 704 631	50	1 625,704 631	83	15	50	1 625,704 631	0	9		

	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	100	109,216,000	474 240 000	25	118,560,000	25	118 560,000	25	25	25	118 560,000	0	21		
	1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**0**	**792,000,000**	**31,500,000**	**13**	**6 000,000**	**13**	**6,000 000**	**0**	**19**	**13**	**6 000,000**	**0**	**1**		
	1	06	01	2 05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	792 000,000	31 500,000	2	6,000 000	2	6,000 000	13	19	2	6,000 000	0	1		
	1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Person**	**100**	**1,814 181,736**	**357 193,840**	**4**	**37,998,200**	**4**	**37,998,200**	**4**	**11**	**4**	**37,998,200**	**0**	**1**		
	1	06	01	2 06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	6 760,000	2 100,000	0	0	0	0	0		0	0	0			
	1	06	01	2 06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	216,520 336	95,449 240	0	0	0	0	0		0	0	0			
	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	17,304,600	4 820 400	0	0	0	0	0		0	0	0			
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	92 540 800	51 909 000	0	0	0	0	0		0	0	0			
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	26 616,000	19 488,200	0	0	0	0	0		0	0	0			
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	17 280,000	3 960,000	0	0	0	0	0		0	0	0			

	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	11	89 000,000	16 467,000	0	0	0	0	0		0	0	0			
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	23	1,368 160,000	163 000,000	7	37,908 200	7	37 908,200	30	23	7	37,908,200	0	2		
	1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Paket**	**169**	**10,406,580,00 0**	**9,370,800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**			
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	44	15 206,740 00 0		0		0		0		0		0			
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	3,201 840,000	9 370,800	0	0	0	0	0		0	0	0			
	1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tahun**	**1**	**1,508 632,000**	**700 867,532**	**3**	**149,524,000**	**3**	**149,524,000**	**300**	**19**	**3**	**149,524,000**	**0**	**1**		
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	231 172,000	183 172,732	3	28,145 080	3	28 145,080	25	16	3	28,145 080	0	7		
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1,271 460,000	606 534,800	3	121,379 800	3	121,379 800	25	20	3	121,379 800	0	6		
	1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tahun**	**1**	**1,190 650,000**	**1,030 626,000**	**3**	**27,444,741**	**3**	**27,444,741**	**300**	**3**	**3**	**27,444,741**	**0**	**1**		

	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	44 380 000	42 130,000	1	5,192 000	1	5,192,000	100	12	1	5,192,000	0	6		
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	171,240 000	324,198,000	4	22,252,741	4	22,252,741	40	7	4	22,252,741	0	3		
	1	06	01	2.09	0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	84	43,460,000	40,440 000	0	0	0	0	0		0	0	0			
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	921,589 000		0		0		0		0		0			
	1	06	01			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										22	22			22	7		
	1	06	01			PREDIKAT KINERJA										SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Masyarakat Miskin Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	%	70	943,211,400	700,536,400	22	34,679,400	22	34,679,400	32	5	22	34,679,400	30	1	Dinas Sosial	
	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	30	44,155,000	33,366,000	9	0	9	0	30		9	0	0			
	1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	30	44 155,000	33 366,000	9	0	9	0	30		9	0	0			

	1	06	02	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**PSKS**	103	**669,823,400**	**669,158,400**	15	**34,679,400**	15	**34,679,400**	15	5	15	**34,679,400**	0	1		
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	233,345,400	188 265,400	0	34,679,400	0	34,679 400	0	15	0	34,679 400	0	0		
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	383 756,000	195 756,000	0	0	0	0	0		0	0	0			
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	100	281 822,000	251 822,000	15	0	15	0	15		15	0	0			
	1	06	02			**RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)**										**32**	**6**			**30**	**2**		
	1	06	02			**PREDIKAT KINERJA**										**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**			**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**		
	1	06	04			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti**	%	100	3,681,315,700	3,383,883 700	48	242,766,000	48	242 766,000	48	7	48	242,766,000	48	3	Dinas Sosial	
							Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100			25		25		25		25		25			
							Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100			26		26		26		26		26			

							Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial luna sosial diluar panti	%	100			10		10		10		10		10			
	1	06	04	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persen**	**100**	**3,111,158,700**	**3,841 578,700**	**27**	**100,744 000**	**27**	**100,744,000**	**27**	**8**	**27**	**100,744,000**	**8**	**3**		
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Pemakaman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakaman Sesuai dengan Standar Gib Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.2 70	688 015 000	686 765,000	43	0	43	0	3		43	0	0			
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	84 360 000	84,360,000	43	0	43	0	17		43	0	0			
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	80 229 000	78 979,000	0	0	0	0	0		0	0	0			
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	118,086 000	68 606 000	49	4,952 000	49	4,952 000	49	7	49	4,952 000	0	2		
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	610	477,600,000	465,600 000	43	99,000 000	43	99,000,000	5	21	43	99,000 000	0	11		
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	101,246,000	101 246 000	47	24,771 000	47	24 771 000	24	24	47	24 771 000	0	12		

	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Akta Kelahiran Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	48	2,718,000	718 000	31	0	31	0	66		31	0	0			
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	2,218,000	718 000	0	0	0	0	0		0	0	0			
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	125,817 200	125,817 200	59	24 771 000	59	24,771 000	30	20	59	24,771 000	0	10		
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	1 021,213,500	1,021 213,500	59	37 250,000	59	37 250 000	30	4	59	37 250 000	0	2		
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	1,718,000	718 000	0	0	0	0	0		0	0	0			
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	26	407,936,000	407 936 000	19	0	19	0	76		19	0	0			
	1	06	04	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Persen	100	559,157,000	542,165,000	6	52,822,000	6	52,822,000	6	10	6	52,822,000	0	5		
	1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100,246 000	100,246,000	6	24 771 000	6	24,771,000	6	25	6	24 771,000	0	12		
	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	259,325,000	259,325,000	6	0	6	0	15		6	0	0			

	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Pemakaman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakaman Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	52,925,000	52,425 000	6	0	6	0	30		6	0	0			
	1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perlindungan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perlindungan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	1,319 000	1,319 000	41	0	41	0	21		41	0	0			
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	99,946 000	99 946 000	6	24 041 000	6	24,041 000	18	24	6	24,041 000	0	12		
	1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	638,000	138 000	0	0	0	0	0		0	0	0			
	1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	24,000 000	24,000 000	1	2,000,000	1	2,000,000	5	8	1	2 000,000	0	4		
	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	11 758 000	4,786 000	6	1,210,000	6	1 210,000	18	26	6	1,210,000	0	4		
	1	06	04			**RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)**										27	7			27	3		
	1	06	04			**PREDIKAT KINERJA**										SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	1	06	06			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Penerima Rumah Tangga Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	%	100	2,905,829,200	2,620,548,200	11	585,708,200	11	585,708,200	11	19	11	585,708,200	11	18	Dinas Sosial	

	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan perlindungan/ pemeliharaan	Orang	200	328,195,200	320,195,200	0	28,725,200	0	28,725,200	0	5	0	28,725,200	0	5		
	1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	328,195,200	320,195,200	0	28 725,200	0	28,725 200	0	5	0	28 725 200	0	6		
	1	06	06	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	Orang	30,000	2,577,734,000	2,306,354,000	6,843	478 863,000	6,843	478,863,000	23	21	6,843	478,863 000	0	11		
	1	06	06	2.02	0001	Pendataan Faker Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	30,000	756,738,000	756,738,000	6,843	74 313,000	6 843	74,313,000	23	10	6,843	74 313 000	0	7		
	1	06	06	2 02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengelolaan Faker Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	30,000	481 656 000	235,986 000	30,000	22,500,000	30,000	22 500,000	100	10	30,000	22 500,000	0	3		
	1	06	06	2.02	0003	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	100	1,174,240 000	1,130,720 000	218	379,250,000	218	379 250,000	218	34	218	379,250,000	0	17		
	1	06	06	2.02	0004	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	184 900 000	182,900 000	0	0	0	0	0		0	0	0			
	1	06	06			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										11	21			11	11		
	1	06	06			PREDIKAT KINERJA										SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kota	%	100	2 020,836,100	1,838,156,100	95	77,550,400	50	77,550,400	95	4	95	77,550,400	95	2	Dinas Sosial	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan perlindungan/ pertolongan	Jiwa	4,000	1 421,886,100	1,421,886,100	5,801	59,450,400	5,801	59,450,400	145	4	5,801	59,450,400	0	2		
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4,000	820,627 600	820,627 600	5,801	14,862 600	5,801	14,862 600	145	2	5,801	14 862,600	0	1		
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250	173,181 600	173,181 600	5,801	14,862 600	5,801	14,862 600	2 320	9	5 80 1	14,862 600	0	4		
	1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	3	134,147 600	134,147 600	2	14,862 600	2	14,862 600	87	11	2	14 862,600	0	8		
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	259,586 600	259,586 600	1,031	14,862,600	1,031	14,862 600	516	6	1 03 1	14,862 600	0	4		
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	300	34,252 500	34,252 500	0	0	0	0	0		0	0	0			
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	2	398,850 000	414,250,000	0	18,100,000	0	18,100 000	0	4	0	18,100 000	0	2		

	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	586,850,000	414,350,000	0	18,100,000	0	18,100,000	0	4	0	18,100,000	0	2		
	1	06	06			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										100	10			100	5		
	1	06	06			PREDIKAT KINERJA										SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		
	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Mendapat Pengelolaan Secara Baik	%	100	513,923,000	511,923,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	2	0	10,000,000	0	1	Dinas Sosial	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan	Lokasi	1	513,923,000	511,923,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	2	0	10,000,000	0	1		
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1	513,923,000	511,923,000	1	10,000,000	1	10,000,000	100	2	1	10,000,000	0	1		
	1	06	07			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)										0	4			0	2		
	1	06	07			PREDIKAT KINERJA										SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
						RATA-RATA CAPAIAN KINERJA OPD (%)										57.83	12.38						
						PREDIKAT KINERJA OPD										RENDAH	SANGAT RENDAH						

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengukur pencapaian kinerja tahun 2025 pada Dinas Sosial Kota Makassar didasarkan pada pengukuran Kinerja Sasaran dan bukan kepada kinerja hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Makassar di dasarkan pada keberhasilan memenuhi target indikator kinerja yang telah di tetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala Dinas Sosial Kota Makassar dengan Wali kota Makassar.

Berdasarkan hasil analisa terhadap pencapaian kinerja Dinas Sosial hingga triwulan I tahun 2025 sesuai NSPK, SPM dan IKK nya termuat pada table berikut :

Tabel TC. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kota Makassar

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025 (TW I)	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	12	17	18	19
1	Persentase penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	48.01%	100%	
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	25.48%	100%	
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	26.00%	100%	
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	9.67%	100%	
5	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100%	87.84%	86,4%	100%	
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		70%	60%	60%	60%	70%	76.4%	77.75%	70%	

8	Persentase pengelolaan data kemiskinan		100%	100%	100%	100%	100%	97.72%	71.03%	100%	
9	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	100%	

Berdasarkan tabel TC.30, secara umum capaian utama kinerja Dinas Sosial pada triwulan I Tahun 2025 yaitu :

a. Pelayanan Publik
   Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 87,84%, meskipun target yang ditetapkan adalah 100%. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
b. Kualitas Laporan
   Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah meningkat menjadi 79,70%, yang melebihi target yang ditetapkan sebesar 70%. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Dinas Sosial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan kinerja.
c. Perlindungan Sosial
   Capaian sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya perlindungan sosial masyarakat miskin, dengan tiga IKU yaitu :
   1. Persentase pengelolaan data kemiskinan dengan target 100%. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, data yang dikelola Dinas Sosial Kota Makassar triwulan I pada tahun 2025 yaitu 6.843 Jiwa dan 30.000 KK. Dari data tersebut terdata 30.000 KK yang menjadi penerima bantuan PKH dan BPNT, 41.085 Jiwa yang menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan APBN.
   2. Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan target 100%. Capaian hingga triwulan I 2025 yaitu 65 orang PMKS telah mendapatkan rehabilitasi sosial.
   3. Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana dengan target 100%. Capaian hingga triwulan I 2025 yaitu 5.801 orang korban bencana yang menerima pelayanan dan perlindungan sosial.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu penting yang berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi Dinas Sosial Kota Makassar yaitu sebagai berikut:

a. Kemiskinan di Kota Makassar merupakan isu penting pertama yang sangat terkait dengan pelaksanaan tupoksi Dinas Sosial Kota Makassar. Pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial diharapkan mampu menyajikan data kemiskinan yang valid sehingga penerima bantuan sosial dapat tepat sasaran.
b. Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di luar panti belum dapat terlaksana dengan optimal karena Kota Makassar belum memiliki tempat rehabilitasi sosial yang representatif untuk mendukung pelaksanannya. Diharapkan pada tahun mendatang, pembangunan tempat rehabilitasi sosial dapat dilakukan.
c. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar yang belum terlaksana sehingga masyarakat Kota Makassar yang memberi uang di jalanan belum diberikan sanksi dan

mengakibatkan jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen semakin meningkat.

d. Dinas Sosial akan semakin aktif mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar dan dengan dukungan Satpol PP sebagai aparat penegak perda untuk menerapkan sanksi bagi masyarakat yang memberikan uang di jalan dan diharapkan pelaksanaan tersebut dapat menurunkan jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
e. Pelaksanaan penanganan pasca bencana belum optimal karena sarana dan prasarana belum memadai. Sehingga pada tahun depan, Dinas Sosial akan menambah kelengkapan alat untuk penanganan bencana termasuk penyediaan tempat penampungan pengungsi yang layak.
f. Pada daerah rawan bencana, masyarakat belum memiliki kesadaran dan upaya dalam tanggap bencana sehingga belum terbentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, akan dibentuk kampung siaga bencana di daerah rawan bencana dan melatih masyarakat sekitar terkait mitigasi bencana.
g. Optimalisasi Fungsi dan Peran Dinas: yaitu Peningkatan Manajemen, Kemampuan Aparatur, Jabatan Fungsional serta Sarana dan Prasarana.
h. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
i. Kemitraan Sinergis dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui Optimalisasi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program disusun dengan memerhatikan sub bidang urusan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber saya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sedangkan Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Guna mencapai target kinerja yang telah disusun, maka Dinas Sosial Kota Makassar menyusun rincian Sub Kegiatan yang terjabarkan mulai dari Program dan Kegiatan. Pada renja kerja perubahan Dinas Sosial tahun 2025, terjadi beberapa penyesuian program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Kota Makassar. Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial tahun 2025 tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Makassar

Tahun 2025

Unit Organisasi : Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
1	0 5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											23,882,328,011	24,955,470,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				23,452,413,463
1	0 5	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian Perlengkapan dan Keuangan)			Kota Makassar	90%	80%					13,825,329,611	13,868,815,660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	13,946,479,907
						Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik			Kota Makassar	90%	90%							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	
						Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah			Kota Makassar	100%	100%							- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	
						Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas			Kota Makassar	90%	90%							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

1	0 6	0 1	2 0 1 0 0		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Makassar					100%	100%	120,696,60 0	96,196 680	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	13 Dokumen	54 000 000
1	0 6	0 1	2 0 1 0 0	0 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Makassar			2 Dokumen	3 Dokumen			70,213,000	67,713 000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25,000,000
1	0 6	0 1	2 0 1 0 0	0 0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokuman RKA-SKPD		Kota Makassar			1 Dokumen	1 Dokumen			3 320,000	3,320 000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4 000 000
1	0 6	0 1	2 0 1 0 0	0 0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kota Makassar			1 Dokumen	1 Dokumen			5,887 000	2 887 000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,000,000
1	0 6	0 1	2 0 1 0 0	0 0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Kota Makassar			1 Dokumen	1 Dokumen			9 865,000	5,865 000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4 000,000
1	0 6	0 1	2 0 1 0 0	0 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokuman Perubahan DPA-SKPD		Kota Makassar			1 Dokumen	1 Dokumen			9 035,000	5,035 000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,000 000

1	08	01	2010 00	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Makassar			1 Dokumen	2 Laporan			7 836 500	2.836 500	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
1	08	01	2010 00	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Makassar			4 Laporan	4 Laporan			11 740,000	8,740 000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	13,000,000
1	08	01	2020 00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Makassar					100%	100%	11 542 628 939	11 542 627 424	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	11,248,386 939
1	08	01	2020 00	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Makassar			53 Orang/bul an	96 Orang/Bul an			11,088 386 939	11086387424	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penambahan 46 Orang CASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/Bula n	11 088 386 939
1	08	01	2020 00	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kota Makassar			100 Dokumen	5 Dokumen			474 240,00 0	474240000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	180,000,00 0
1	08	01	2050 00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar					100%	100%	69 000,000	31 500,000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Laporan	120,000 00 0
1	08	01	2050 00	0005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kota Makassar			15 Orang	7 Orang			69 000 000	31 500 000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	120 000 00 0
1	08	01	2050 00		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kota Makassar					100%	100%	357 193 84 0	421 118,24 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Laporan	412 748,64 0

1	0 8	0 1	2 0 6 0 0	0 0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kota Makassar			1 Paket	3 Paket			2 100,000	3,408,000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10 000 000
1	0 8	0 1	2 0 6 0 0	0 0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Makassar			6 Paket	5 Paket			95,448,240	85,448 240	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	95 448 240
1	0 8	0 1	2 0 6 0 0	0 0 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kota Makassar			4 Paket	1 Paket			4 820,400	8 475,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	101,322 40 0
1	0 8	0 1	2 0 6 0 0	0 0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Makassar			3 Paket	2 Paket			61 909,000	44,740 400	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000
1	0 8	0 1	2 0 6 0 0	0 0 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Makassar			5 Paket	1 Paket			19,488 200	18 908 200	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,110 000
1	0 8	0 1	2 0 6 0 0	0 0 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kota Makassar			12 Dokumen	12 Dokumen			3 960,000	3 960,000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	14,400,000
1	0 8	0 1	2 0 6 0 0	0 0 0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kota Makassar			12 Laporan	12 Laporan			16,467 000	16,180 400	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	16 467 000
1	0 8	0 1	2 0 6 0 0	0 0 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Makassar			36 Laporan	24 Laporan			193,000 000	230,000 000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	155 000 000
1	0 8	0 1	2 0 7 0 0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Tersedianya layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar					100%	100%	9 370 800	13,558 000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Barang Milik Daerah yang Disediakan	7 Unit	199,325 000

1	0 5	0 1	2 0 7 0 0	0 0 0 4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Makassar			1 Unit	1 Unit			8,370,800	13,556 000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit CCTV untuk Kantor Dinas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	168 325,00 0
1	0 5	0 1	2 0 5 0 0 0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar					1 Tahun	1 Tahun	788 807 53 2	806,788,88 8	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	864 588 32 8
1	0 5	0 1	2 0 5 0 0	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Makassar			12 Laporan	12 Laporan			183 172 73 2	146 770,88 8	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	163,161 32 8
1	0 5	0 1	2 0 5 0 0	0 0 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Makassar			12 Laporan	12 Laporan			606 634 80 0	660 027 80 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	601 438,00 0
1	0 5	0 1	2 0 5 0 0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar					1 Tahun	1 Tahun	1 036,828,0 00	957,017 00 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	110 Unit	858 420 00 0
1	0 5	0 1	2 0 5 0 0	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kota Makassar			1 Unit	1 Unit			42 130,000	38 630 000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42 130 000
1	0 5	0 1	2 0 5 0 0	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kota Makassar			47 Unit	47 Unit			324 199 00 0	381 508,00 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	658,450,00 0
1	0 5	0 1	2 0 5 0 0	0 0 0 5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Makassar			80 Unit	80 Unit			40,440 000	40,440 000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99 Unit	44 000 000

1	0 5	0 1	2 0 9 0 0	0 0 1 0	Penelitianan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kec. Tallo dan Kec. Panakukang			2 Unit	2 Unit			629 880,000	508,438,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	215 840,000
1	0 5	0 2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Masyarakat Yang Menerima Pemberdayaan Sosial			Kota Makassar	70%	70%					928 418,400	696,610,232	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pekerja Sosial/Relawan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Persentase Pekerja Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kab/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	- 50% - 50%	51 588 000
1	0 5	0 2	2 0 2 0 0		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Pengumpulan Sumbangan dalam Kota	Kota Makassar					50 Keg	30 Keg	44 188,000	38 788 000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah lembaga bidang kesejahteraan sosial yang melakukan penyaluran hasil pengumpulan sumbangan	38 Lembaga	51 588,000
1	0 5	0 2	2 0 2 0 0	0 0 0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Kota Makassar			30 Dokumen	30 Dokumen			44 188,000	38 788,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	38 Dokumen	51,588 000
1	0 5	0 2	2 0 3 0 0		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kota Makassar yang Dikembangkan	Kota Makassar					103 PSKS	103 PSKS	664,230 400	580,022,232	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah relawan sosial yang mendapatkan peningkatan kompetensi	400 Orang	

1	0 6	0 2	2 0 3 0 0	0 0 0 1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			200 Orang	100 Orang			233,345,400	181 777 232	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	393 950 400
1	0 6	0 2	2 0 3 0 0	0 0 0 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			15 Orang	15 Orang			335,758 000	200,758 000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		
1	0 6	0 2	2 0 3 0 0	0 0 0 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			100 Lembaga	100 Lembaga			281 922 000	234 282,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Lembaga	458,239,000
1	0 6	0 2	2 0 3 0 0	0 0 0 5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Jumlah Sertifikat yang dan Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			100 Sertifikat	100 Sertifikat			33,207 000	33,207 000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sertifikat yang dan Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota		

1	0 6	0 4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			Kota Makassar	100%	100%					3,638,075 700	4,498 230,6 86	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti - Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti - Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	4 739 080, 256
1	0 6	0 4	2 0 1 0 0		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Kota Makassar					100%	100%	3,090 242 700	3 731 318 106	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	20 Orang	3 139 371 256
								Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Kota Makassar					100%	100%					Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	75 Orang	
								Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Kota Makassar					100%	100%					Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	15 Orang	
								Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Kota Makassar					100%	100%					Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	30 Orang	

1	06	04	2 1 0 0	0 0 0 1	Penyediaan Pemakaman		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakaman Sesuai dengan Standar Gak Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			1270 Orang	250 Orang			586,015 000	324 494 000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Program prioritas Makassar Bebas Anak Jalanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakaman Sesuai dengan Standar Gak Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	240 520,00 0
1	06	04	2 1 0 0	0 0 0 2	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			250 Orang	250 Orang			84 380 000	93 780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Program prioritas Makassar Bebas Anak Jalanan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	82 110,000
1	06	04	2 1 0 0	0 0 0 3	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			28 Orang	28 Orang			80,228 000	80 628 000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Program prioritas Makassar Bebas Anak Jalanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	137 878,00 0
1	06	04	2 1 0 0	0 0 0 4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			100 Orang	40 Orang			97 170,000	72,656 000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Program prioritas Makassar Bebas Anak Jalanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	38 968 000
1	06	04	2 1 0 0	0 0 0 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			810 Orang	200 Orang			477 600 00 0	999,505 80 8	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Program prioritas Makassar Bebas Anak Jalanan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	1 063,081 856

1	0 8	0 4	2 1 0 0	0 0 0 6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			200 Orang	250 Orang			101,248,000	101 248,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Program prioritas Makassar Bebas Anak Jalanan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang	173,948 000
1	0 8	0 4	2 1 0 0	0 0 0 7	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			40 Orang	40 Orang			2,718 000	2,718 000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Program prioritas Makassar Bebas Anak Jalanan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	2,718,000
1	0 8	0 4	2 1 0 0	0 0 0 8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			100 Orang	50 Orang			2,218 000	3,718 000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Program prioritas Makassar Bebas Anak Jalanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	4 270,000
1	0 8	0 4	2 1 0 0	0 0 0 9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			200 Orang	250 Orang			125 817 200	118,532 200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Program prioritas Makassar Bebas Anak Jalanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	120 585,400

1	08	04	2 0 1 0 0	0 0 1 0	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			200 Orang	250 Orang			1 021,213,500	1 535,911,000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Program prioritas Makassar Bebas Anak Jalanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	1 186 486 000
1	08	04	2 0 1 0 0	0 0 1 1	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			5 Orang	40 Orang			1 716,000	2 336,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Program prioritas Makassar Bebas Anak Jalanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	26 659,000
1	08	04	2 0 1 0 0	0 0 1 2	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			25 Orang	40 Orang			407 936 000	406,810 000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Program prioritas Makassar Bebas Anak Jalanan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	42 630 000
1	08	04	2 0 2 0 0		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			Penyandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Kota Makassar					100%	100%	547 833 000	788,912,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Penerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	600 Orang	1 583 709 000
1	08	04	2 0 2 0 0	0 0 0 1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			100 Orang	50 Orang			100 246,000	100 246,000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	101.246 000
1	08	04	2 0 2 0 0	0 0 0 2	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			40 Orang	50 Orang			259 325 000	43 325,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	187,808,000

1	0 8	0 4	2 0 2 0 0	0 0 0 3	Penyediaan Pemakaman		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakaman Sesuai dengan Standar Gak Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			50 Orang	880 Orang			52 925 000	400,082 50 0	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakaman Sesuai dengan Standar Gak Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	800 Orang	462,120,00 0
1	0 8	0 4	2 0 2 0 0	0 0 0 5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			200 Orang	280 Orang			1 319 000	1,319 000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	11 519,000
1	0 8	0 4	2 0 2 0 0	0 0 0 7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			40 Orang	40 Orang			99 946,000	99,946 000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	899 946 00 0
1	0 6	0 4	2 0 2 0 0	0 0 1 0	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			20 Orang	58 Orang			638 000	1 138,000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	2,270,000
1	0 6	0 4	2 0 2 0 0	0 0 1 2	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			20 Orang	25 Orang			24 000 000	44 318 000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	15,670,000
1	0 6	0 4	2 0 2 0 0	0 0 1 3	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			40 Orang	14 Orang			8 434,000	78 536,000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	103 130,00 0

1	0 8	0 5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial			Kota Makassar	100%	100%					2,871 639,200	2 939.480,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		- Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar - Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi - Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin - Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	-100% - 80% 90% - 2 7%	2 425 963 900
1	0 8	0 5	2 0 1 0 0		Pemeriksaan Anak-Anak Terlantar			Jumlah Anak Anak Terlantar yang Mendapat Perlindungan/Pemeliharaan	Kota Makassar					200 Orang	200 Orang	328 195,200	329 795,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah anak terlantar yang keluar dari keterlantaran	3 Orang	3 027 900
1	0 8	0 5	2 0 1 0 0	0 0 0 3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			200 Orang	200 Orang			328 195,200	327 795,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3,027 900
1	0 8	0 5	2 0 2 0 0		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Data Fakir Miskin Kota Makassar yang Dikelola	Kota Makassar					30000 KK	30000 KK	2,543 734 000	2,608 585,000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Keluarga yang mendapatkan Bantuan Sosial	1500 Keluarga	2,422 956, 000
1	0 8	0 5	2 0 2 0 0	0 0 0 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		Kota Makassar			30000 Orang	30000 Orang			758,738,000	758,738 00 0	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	5000 Orang	848 538 00 0
1	0 8	0 5	2 0 2 0 0	0 0 0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		Kota Makassar			30000 Keluarga	30000 Keluarga			427 856 000	223,977,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	5000 Keluarga	115 358,000

1	0 8	0 5	2 0 2 0 0	0 0 0 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			100 Keluarga	1130 Keluarga			1 174,240 000	1 430 120 000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1310 Keluarga	1 125 460 000
1	0 8	0 5	2 0 2 0 0	0 0 0 4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			100 Orang	100 Orang			184 900 000	188,850 000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	333 600 000
1	0 8	0 8			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam/Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah/Kota			Kota Makassar	100%	100%					2 004 656,100	2 427,870 100	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Korban Bencana Alam Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100%	2,587 771 400
1	0 8	0 8	2 0 1 0 0		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			Jumlah Korban Bencana Alam/Sosial yang mendapat perlindungan/pe rangan	Kota Makassar					4 000 Jiwa	7 000 Jiwa	1 421,806 100	2,013,630 100	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	5000 Orang	2 188 371 400
1	0 8	0 8	2 0 1 0 0	0 0 0 1	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			4000 Orang	7000 Orang			820 827,80 0	1,412 441 6 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Stock bantuan perlu ditambahkan karena banyak dipunakan saat bencana banjir di awal tahun	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	5000 Orang	1 232,817 600

1	0 5	0 6	2 0 1 0 0	0 0 0 2	Penyelesaian Sengketa		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			250 Orang	7000 Orang			173,181 80 0	173 181 80 0	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	5000 Orang	319 783 80 0
1	0 6	0 8	2 0 1 0 0	0 0 0 3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			3 Unit	3 Unit			134 147,80 0	134.147 80 0	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Unit	214,263,60 0
1	0 4	0 6	2 0 1 0 0	0 0 0 4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			200 Orang	1500 Orang			259 586 80 0	259 586,80 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	336 363,80 0
1	0 6	0 4	2 0 1 0 0	0 0 0 5	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		Kota Makassar			300 Orang	300 Orang			34,252 500	34 252 500	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	85 163,000
1	0 6	0 6	2 0 2 0 0		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kec. Manggala dan Kec. Biringkanaya					2 Kegiatan	2 Kegiatan	582 850,00 0	414,360,00 0	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Taruna Siaga Bencana yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan becana	100 Orang	419,400,00 0
1	0 6	0 4	2 0 2 0 0	0 0 0 2	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		Kec. Manggala dan Kec. Biringkanaya			100 Orang	100 Orang			582 850 00 0	414,350 00 0	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	419 400,00 0

1	0 6	0 7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang Mendapat Pengelolaan Secara Baik			Kel Melayu Baru Kec. Wajo	1 Lokasi	1 Lokasi					513.923.000	522163000	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Taman Makam	100%	107.500.000
1	0 6	0 7	2 0 1 0 9		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kota Makassar yang Mendapat Pemeliharaan	Kel Melayu Baru Kec. Wajo					1 Lokasi	1 Lokasi	513.923.000	522163000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional yang Dipelihara	1 Makam	107.500,000
1	0 6	0 7	2 0 1 0 0	0 0 0 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		Kel Melayu Baru Kec Wajo			1 Makam	1 Makam			513,923.000	522163000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	107,500.000

Berdasarkan tabel di atas, terjadi penambahan anggaran pada beberapa program yaitu :

1. Program Rehabilitasi Sosial
   Pada program ini terjadi penambahan kegiatan yang berkaitan dengan program prioritas kepala daerah terpilih yaitu Makassar Bebas Anak Jalanan. Kegiatan ini telah memiliki kegiatan dan anggaran khusus di Renja Pokok 2025, namun perlu untuk mendapatkan penambahan dukungan pelaksanaan kegiatan sehingga diberikan penambahan berupa :
   a. Penyewaan gedung yang lebih representatif untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS khususnya anak jalanan dan juga PPKS terlantar. Penyewaan ini juga disertai dengan belanja barang dan jasa pendukung untuk memaksimalkan penggunaan gedung tersebut.
   b. Pelaksanaan pelatihan vokasional bagi anak jalanan yang berada pada usia produktif baik laki-laki dan Perempuan juga untuk pengemis agar setelah mendapatkan rehabilitasi sosial dapat mempunyai keterampilan untuk bisa mandiri dan tidak lagi mencari uang di jalanan.
   c. Melaksanakan posko di titik-titik rawan adanya anak jalanan dan pengemis sesuai dengan hasil rapat koordinasi antar SKPD yang terlibat dalam mendukung program Makassar Bebas Anak Jalanan.
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
   Terjadi penambahan kegiatan pada program ini yang berkaitan dengan pemenuhan hak setiap masayarakat yaitu untuk memfasilitasi masyarakat miskin yang sudah menikah tapi belum memiliki buku nikah melalui isbat nikah massal. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pemberian perlindungan bagi masyarakat miskin karena salah satu akar dari anak-anak jalanan tidak bersekolah karena tidak memiliki akte kelahiran, dan akte kelahiran tidak dapat mereka miliki karena orang tuanya tidak memiliki dokumen pernikahan yang sah berupa buku nikah. Diharapkan melalui kegiatan ini, terjalin sinergi program dan semakin menurunkan jumlah anak jalanan dan anak tidak sekolah.
3. Program Penanganan Bencana
   Pada awal tahun 2025, jumlah kejadian bencana telah melebihi ekspektasi yang telah diperkirakan sehingga capaian kinerja telah lebih dari yang ditargetkan yaitu 4.000 jiwa. Hal tersebut berdampak pada ketersediaan supply bantuan yang juga habis untuk digunakan pada kejadian bencana selanjutnya. Oleh karena itu dilakukan penambahan jumlah item barang bantuan bencana sehingga menambah anggaran pada program ini.

BAB IV
PENUTUP

Dalam upaya pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan untuk menjamin hak setiap warga Negara Indonesia dalam rangka mencapai harkat, martabat dan kualitas hidup yang lebih baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar di dalam kehidupan dan penghidupannya bahkan mampu berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Rencana Kerja Perubahan (Rencana Kerja-P) pada Dinas Sosial Kota Makassar selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Sosial Kota Makassar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa mendatang.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025, yang telah disusun dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Kota Makassar. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 ini menjadi dasar bagi optimalisasi pencapaian sasaran dan kegiatan menuju kesejahteraan masyarakat Kota Makassar di masa akan datang.

PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Satuan Polisi Pamong Praja



RENCANA KERJA

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dipandang perlu untuk diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, dengan menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana di maksud Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan.:
1. Wakil Wali Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
7.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
9.	Dinas Sosial Kota Makassar
10.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
12.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
13.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Makassar
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
22.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
23.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
24.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
25.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
26.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
27.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
28.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
29.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar

31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
32.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
34.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
35.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
36.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
37.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
38.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
39.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
40.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
43.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
44.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
45.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
46.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
47.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
58.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
49.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
50.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar
51.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

WALIKOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Dokumen Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2025** ini dapat tersusun.

Sebagaimana kita pahami, dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat terus berkembang. Berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seringkali memerlukan penyesuaian terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang kita jalankan tetap relevan, efektif, dan mampu menjawab tantangan serta peluang yang ada, maka perubahan atas Rencana Kerja Tahun 2025 ini menjadi suatu keharusan.

Perubahan ini didasari oleh evaluasi menyeluruh terhadap capaian dan kendala yang dihadapi pada periode sebelumnya, serta antisipasi terhadap kebijakan baru, prioritas nasional/daerah yang berkembang, dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Melalui dokumen perubahan ini, kami berharap seluruh pemangku kepentingan, baik di lingkungan internal maupun eksternal, dapat memahami arah dan prioritas baru yang akan kita jalankan. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam menyusun rencana aksi yang lebih operasional dan terukur, demi tercapainya target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

Semoga Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga setiap langkah dan upaya yang kita lakukan dapat memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Makassar, 12 Agustus 2025

Hasanuddin, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda/ IVc
19760110 199511 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....

KATA PENGANTAR .....

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja 42

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 49

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal dan Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2024 54

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 65

3.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 65

3.2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan 66

BAB IV PENUTUP 89

4.1 Catatan Penting 89

4.2 Kaidah Pelaksanaan 89

4.3 Rencana Tindak Lanjut 90

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
MAKASSAR NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi penting untuk menjamin keberhasilan pencapaian rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan konsistensi antar dokumen rencana pembangunan daerah dan penganggaran dengan pelaksanaannya, serta memastikan agar keberhasilan pembangunan daerah dapat dicapai sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan untuk mengukur sejauh mana target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan untuk mengidentifikasi kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) guna memastikan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan selanjutnya dijabarkan dalam RKPD. Dokumen RKPD merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang berisi program/kegiatan perangkat daerah dan atau lintas perangkat daerah. Dokumen RKPD dapat digunakan dalam menjaga konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD, dan juga merupakan landasan penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara untuk menyusun R-APBD serta merupakan pedoman dalam mengevaluasi peraturan daerah tentang APBD.

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P–APBD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Perubahan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 343 ayat (1) disebutkan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi: (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selain aspek pengendalian dan evaluasi, hal lain yang menjadi pertimbangan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Hal ini berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bertujuan mengurangi pengeluaran negara sebesar Rp306,69 triliun, atau sekitar 8% dari total belanja yang telah disetujui sebesar Rp. 3.621,3 triliun. Kebijakan efisiensi mencakup pengurangan anggaran di berbagai Kementerian dan Lembaga, termasuk Pemerintah Daerah berdampak pada 16 pos belanja, termasuk pengurangan biaya alat tulis kantor, perjalanan dinas, sewa kendaraan, dan kegiatan seremonial.

Efisiensi tersebut berdampak langsung pada kemampuan instansi pemerintah dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan. Beberapa program ditunda pelaksanaannya karena terbatasnya anggaran, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Makassar dalam menyikapi kebijakan efisiensi ini, melakukan konsolidasi internal terkait efisiensi dalam belanja APBD 2025. Selain itu perlu dilakukan identifikasi terhadap komponen beberapa belanja yang selaras dengan amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2025, penataan ulang belanja daerah dengan prioritas untuk pelayanan publik, menjaga mandatory spending, serta permasalahan pembangunan di daerah, termasuk arah kebijakan dan tentunya menyesuaikan dengan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar sesuai Visi Pemerintah Kota Makassar yakni Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan.

Surat Edaran Nomor 900/833/SJ mengamanatkan Kepala Daerah untuk melakukan identifikasi atas efisiensi belanja dengan tetap memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian delapan misi atau Asta Cita dan pencapaian tujuh belas program prioritas, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen. Kepala Daerah juga diminta untuk memperhatikan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu dilakukan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja melalui pergeseran anggaran dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai Penjabaran APBD TA 2025 dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah (Perda) mengenai Perubahan APBD TA 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam Perubahan RKPD Kota Makassar adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 259 Tahun 2020, Lembaran Lepas Sekretaris Negara Nomor 27);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
38. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);

39. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
41. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
42. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
43. Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
44. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025
45. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
46. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar adalah untuk menyesuaikan kondisi dan keadaan yang terjadi beberapa bulan terakhir dengan tetap mengacu pada perumusan kebijakan dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar pada tahun 2024 agar senantiasa terwujud komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan secara konsekuen berdasarkan prinsip-prinsip prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan daerah.

Tujuan

Adapun Tujuan Penyusunan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar :

1. Menyelaraskan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD ke Perubahan Renja Perangkat Daerah;
3. Menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melakukan penyesuain program prioritas dan kegiatan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen perubahan Renja sebagai berikut :

1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja, latar belakang, penyusunan Perubahan Renja serta proses penyusunan Perubahan Renja.

1.2 Landasan Hukum
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja, baik berskala Nasionalm Provinsim maupun Kota.

1.3 Maksud dan Tujuan
Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan perubahan renja perangkat daerah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan
Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam perubahan renja perangkat daerah tahun 2025.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

Menguraikan hasil evaluasi renja sampai triwulan I Tahun 20255, selain itu juga memperhatikan rancangan RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 sebagai bahan acuan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berkenaan (tahun N), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja;

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan pemerintah 13 Tahun 2019 dan Permendagri 18 Tahun 2020.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Berisikan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun bila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN (TAHUN 2025)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian kinerja Triwulan I Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah.

Target kinerja dimaksud menunjukan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Kinerja sampai dengan Triwulan I pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan terakhir pelaksanaan Renja Perangkat Daerah untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan, maka capaian kinerja Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar pada triwulan I Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA S/D TRIWULAN I TAHUN 2025 (Tabel E.81)

emonevmakassarkota.e-planning.id

KODE REKENING					JENIS RINCIAN BELANJA	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BULAN MARET			REALISASI BULAN S/D BULAN MARET			SISA DANA / BELUM DICAIRKAN SAMPAI DENGAN BULAN MARET
							KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)	
1.05.0.00.0.00.01.0000					**Satuan Polisi Pamong Praja**	**46.982.529.144,0**	**3.334.045.912,0**	**7,10**	**16,04**	**7.500.100.787,0**	**15,96**	**16,04**	**39.482.428.357,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**18.131.956.864,0**	**980.229.212,0**	**5,41**	**10,33**	**1.835.784.087,0**	**10,12**	**10,33**	**16.296.172.777,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**134.769.620,0**	**18.800.000,0**	**13,95**	**28,49**	**22.300.000,0**	**16,55**	**28,49**	**112.469.620,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.01**	**1.05.01.2.01.0001**		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**79.316.080,0**	**18.800.000,0**	**23,70**	**48,41**	**22.300.000,0**	**28,12**	**48,41**	**57.016.080,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0001	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.913.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.913.080,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.028.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.028.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0001	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.175.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.175.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0001	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.240.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.240.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0001	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.200.000,0	6.200.000,0	46,97	46,97	6.200.000,0	46,97	46,97	7.000.000,0

1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0001	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.560.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.560.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0001	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0001	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32.200.000,0	12.600.000,0	39,13	100,0	16.100.000,0	50,0	100,0	16.100.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.01**	**1.05.01.2.01.0002**		**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**9.193.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9.193.500,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0002	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.918.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.918.500,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0002	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	345.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0002	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.450.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0002	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.400.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0002	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.080.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.080.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.01**	**1.05.01.2.01.0003**		**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**9.241.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9.241.000,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0003	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.971.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.971.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0003	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	690.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	690.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0003	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.160.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.160.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0003	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800.000,0

1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0003	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.620.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.620.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.01**	**1.05.01.2.01.0004**		**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**	**8.661.440,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8.661.440,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0004	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.616.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.616.440,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0004	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.035.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.035.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0004	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	870.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	870.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0004	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0004	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.540.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.540.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.01**	**1.05.01.2.01.0005**		**Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD**	**8.062.400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8.062.400,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0005	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.962.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.962.400,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0005	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.035.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.035.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0005	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	725.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	725.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0005	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0005	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.540.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.540.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.01**	**1.05.01.2.01.0007**		**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**20.295.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20.295.200,0**

1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0007	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.350.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.350.200,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0007	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.725.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.725.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0007	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.900.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.900.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0007	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.400.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.01	1.05.01.2.01.0007	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.920.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.920.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16.220.802.884,0**	**907.397.422,0**	**5,59**	**10,30**	**1.670.765.187,0**	**10,30**	**10,30**	**14.550.037.697,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.02**	**1.05.01.2.02.0001**		**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**15.648.829.804,0**	**875.867.422,0**	**5,60**	**9,90**	**1.549.815.187,0**	**9,90**	**9,90**	**14.099.014.617,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.010.014.294,0	350.854.700,0	11,66	23,26	700.276.800,0	23,26	23,26	2.309.737.494,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	5.097.924.150,0	18.532.000,0	0,36	0,73	37.064.000,0	0,73	0,73	5.060.860.150,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	307.376.686,0	39.471.836,0	12,84	25,71	79.030.956,0	25,71	25,71	228.345.730,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	713.740.650,0	571.760,0	0,08	0,16	1.143.520,0	0,16	0,16	712.597.130,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	184.030.000,0	19.000.000,0	10,32	20,65	38.000.000,0	20,65	20,65	146.030.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	22.960.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.960.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.262.520.000,0	2.820.000,0	0,22	0,45	5.640.000,0	0,45	0,45	1.256.880.000,0

1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	172.364.000,0	11.575.000,0	6,72	13,43	23.150.000,0	13,43	13,43	149.214.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	163.217.520,0	19.987.920,0	12,25	24,63	40.193.100,0	24,63	24,63	123.024.420,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	461.112.624,0	579.360,0	0,13	0,25	1.158.720,0	0,25	0,25	459.953.904,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	30.091.900,0	10.658.628,0	35,42	38,21	11.498.022,0	38,21	38,21	18.593.878,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	51.214.000,0	326.842,0	0,64	0,64	326.842,0	0,64	0,64	50.887.158,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	144.000,0	4.258,0	2,96	6,20	8.926,0	6,20	6,20	135.074,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	164.980,0	335,0	0,20	0,37	525,0	0,37	0,37	164.455,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	281.445.000,0	21.698.439,0	7,71	16,03	45.105.182,0	16,03	16,03	236.339.818,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	303.428.000,0	1.076.747,0	0,35	0,64	1.953.697,0	0,64	0,64	301.474.303,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	16.887.000,0	422.741,0	2,50	7,47	1.261.345,0	7,47	7,47	15.625.655,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	18.210.000,0	22.239,0	0,12	0,37	66.717,0	0,37	0,37	18.143.283,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	50.661.000,0	1.268.232,0	2,50	7,47	3.784.070,0	7,47	7,47	46.876.930,0

1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	54.627.000,0	66.715,0	0,12	0,37	200.145,0	0,37	0,37	54.426.855,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	696.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	696.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	37.001.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37.001.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.073.500.000,0	346.058.670,0	11,26	17,0	522.640.920,0	17,0	17,0	2.550.859.080,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	112.000.000,0	15.956.800,0	14,25	14,25	15.956.800,0	14,25	14,25	96.043.200,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0001	5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	223.500.000,0	14.914.200,0	6,67	9,55	21.354.900,0	9,55	9,55	202.145.100,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.02**	**1.05.01.2.02.0002**		**Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**329.806.000,0**	**16.530.000,0**	**5,01**	**23,03**	**75.950.000,0**	**23,03**	**23,03**	**253.856.000,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0002	5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	15.600.000,0	1.300.000,0	8,33	25,0	3.900.000,0	25,0	25,0	11.700.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0002	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.006.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.006.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0002	5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	25.200.000,0	2.100.000,0	8,33	25,0	6.300.000,0	25,0	25,0	18.900.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0002	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	288.000.000,0	13.130.000,0	4,56	22,83	65.750.000,0	22,83	22,83	222.250.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.02**	**1.05.01.2.02.0003**		**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**180.914.000,0**	**15.000.000,0**	**8,29**	**24,87**	**45.000.000,0**	**24,87**	**24,87**	**135.914.000,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0003	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	51.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51.000,0

1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0003	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	138.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0003	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	725.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	725.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0003	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	180.000.000,0	15.000.000,0	8,33	25,0	45.000.000,0	25,0	25,0	135.000.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	**1.05.01.2.02.0004**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**	**8.892.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8.892.000,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0004	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.502.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.502.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0004	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.665.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.665.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0004	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.525.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.525.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0004	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.200.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	**1.05.01.2.02.0005**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	**16.874.480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16.874.480,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0005	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.954.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.954.480,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0005	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.280.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.280.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0005	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.040.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.040.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0005	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600.000,0

1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.02**	**1.05.01.2.02.0006**		**Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan**	**18.714.600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18.714.600,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0006	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.434.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.434.600,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0006	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.330.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.330.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0006	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.350.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.350.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0006	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.02**	**1.05.01.2.02.0007**		**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD**	**16.772.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16.772.000,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0007	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.947.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.947.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0007	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.725.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.725.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0007	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.900.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.900.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.02	1.05.01.2.02.0007	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.200.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.03**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**11.251.960,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11.251.960,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.03**	**1.05.01.2.03.0001**		**Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**4.916.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4.916.000,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.03	1.05.01.2.03.0001	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	338.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338.000,0

1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.03	1.05.01.2.03.0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.680.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.680.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.03	1.05.01.2.03.0001	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.998.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.998.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.03	1.05.01.2.03.0001	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.03**	**1.05.01.2.03.0006**		**Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**6.335.960,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6.335.960,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.03	1.05.01.2.03.0006	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	360.960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360.960,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.03	1.05.01.2.03.0006	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.035.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.035.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.03	1.05.01.2.03.0006	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.740.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.740.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.03	1.05.01.2.03.0006	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.200.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**190.540.000,0**	**3.000.000,0**	**1,57**	**1,58**	**3.000.000,0**	**1,57**	**1,58**	**187.540.000,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	**1.05.01.2.05**	**1.05.01.2.05.0009**		**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**165.000.000,0**	**3.000.000,0**	**1,82**	**1,82**	**3.000.000,0**	**1,82**	**1,82**	**162.000.000,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	**1.05.01.2.05**	1.05.01.2.05.0009	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	82.500.000,0	3.000.000,0	3,64	3,64	3.000.000,0	3,64	3,64	79.500.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.05	1.05.01.2.05.0009	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82.500.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.05**	**1.05.01.2.05.0010**		**Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**	**25.540.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25.540.000,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.05	1.05.01.2.05.0010	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	340.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340.000,0

1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.05	1.05.01.2.05.0010	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.200.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.05	1.05.01.2.05.0010	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.000.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**303.688.400,0**	**16.950.790,0**	**5,58**	**20,37**	**39.785.940,0**	**13,10**	**20,37**	**263.902.460,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	**1.05.01.2.06**	**1.05.01.2.06.0001**		**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**2.610.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2.610.000,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.06	1.05.01.2.06.0001	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.610.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.610.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.06**	**1.05.01.2.06.0002**		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**56.494.400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**56.494.400,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.06	1.05.01.2.06.0002	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.762.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.762.400,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.06	1.05.01.2.06.0002	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17.430.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.430.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.06	1.05.01.2.06.0002	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.06	1.05.01.2.06.0002	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	18.112.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.112.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.06	1.05.01.2.06.0002	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	11.190.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.190.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.06**	**1.05.01.2.06.0003**		**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	**13.538.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**13.538.000,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.06	1.05.01.2.06.0003	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	13.538.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.538.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.06**	**1.05.01.2.06.0005**		**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**45.324.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45.324.000,0**

1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.06	1.05.01.2.06.0005	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	45.324.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45.324.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	**1.05.01.2.06**	**1.05.01.2.06.0006**		**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**	**7.560.000,0**	**1.200.000,0**	15,87	**15,87**	**1.200.000,0**	**15,87**	**15,87**	**6.360.000,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.06	1.05.01.2.06.0006	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.560.000,0	1.200.000,0	15,87	**15,87**	1.200.000,0	15,87	**15,87**	6.360.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.06**	**1.05.01.2.06.0008**		**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**6.000.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6.000.000,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.06	1.05.01.2.06.0008	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.000.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	**1.05.01.2.06**	**1.05.01.2.06.0009**		**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**172.162.000,0**	**15.750.790,0**	9,15	**35,24**	**38.585.940,0**	**22,41**	35,24	**133.576.060,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.06	1.05.01.2.06.0009	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	172.162.000,0	15.750.790,0	9,15	35,24	38.585.940,0	**22,41**	**35,24**	133.576.060,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	**1.05.01.2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**195.864.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**195.864.000,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	**1.05.01.2.08**	**1.05.01.2.08.0002**		**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**35.664.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35.664.000,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.08	1.05.01.2.08.0002	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	35.664.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35.664.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.08**	**1.05.01.2.08.0004**		**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**160.200.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**160.200.000,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.08	1.05.01.2.08.0004	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.000.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.08	1.05.01.2.08.0004	5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	16.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.200.000,0

1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.08	1.05.01.2.08.0004	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	8.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.000.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.08	1.05.01.2.08.0004	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.000.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.08	1.05.01.2.08.0004	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	50.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.08	1.05.01.2.08.0004	5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	25.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.000.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.08	1.05.01.2.08.0004	5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	25.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25.000.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.075.040.000,0**	**34.081.000,0**	**3,17**	**9,30**	**99.932.960,0**	**9,30**	**9,30**	**975.107.040,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.09**	**1.05.01.2.09.0001**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**45.130.000,0**	**2.112.000,0**	**4,68**	**13,44**	**6.067.200,0**	**13,44**	**13,44**	**39.062.800,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.09	1.05.01.2.09.0001	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	28.112.000,0	2.112.000,0	7,51	21,53	6.067.200,0	21,58	21,58	22.044.800,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.09	1.05.01.2.09.0001	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.09	1.05.01.2.09.0001	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	14.018.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.018.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.09**	**1.05.01.2.09.0002**		**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**1.012.060.000,0**	**31.969.000,0**	**3,16**	**9,28**	**93.865.760,0**	**9,27**	**9,28**	**918.194.240,0**

1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.09	1.05.01.2.09.0002	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	505.176.000,0	31.969.000,0	6,33	18,35	92.681.000,0	18,35	18,35	412.495.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.09	1.05.01.2.09.0002	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	63.150.000,0	0,0	0,0	1,88	1.184.760,0	1,88	1,88	61.965.240,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.09	1.05.01.2.09.0002	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	383.706.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	383.706.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.09	1.05.01.2.09.0002	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	60.028.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60.028.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.01**	**1.05.01.2.09**	**1.05.01.2.09.0006**		**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**17.850.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17.850.000,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.09	1.05.01.2.09.0006	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.950.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	1.05.01.2.09	1.05.01.2.09.0006	5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.900.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.900.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02				**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**28.850.572.280,0**	**2.353.816.700,0**	**8,16**	**19,63**	**5.664.316.700,0**	**19,63**	**19,63**	**23.186.255.580,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.02**	**1.05.02.2.01**			**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**28.335.743.880,0**	**2.353.816.700,0**	**8,31**	**19,99**	**5.664.316.700,0**	**19,99**	**19,99**	**22.671.427.180,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.02**	**1.05.02.2.01**	**1.05.02.2.01.0003**		**Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota**	**135.450.600,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**135.450.600,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0003	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.796.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.796.400,0

1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0003	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.359.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.359.200,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0003	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	435.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0003	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.600.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0003	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	32.760.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32.760.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0003	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.400.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0003	5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0003	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.000.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0003	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.000.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0003	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	49.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49.600.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.02**	**1.05.02.2.01**	**1.05.02.2.01.0004**		**Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**3.986.011.040,0**	**580.750.000,0**	**14,57**	**14,57**	**580.750.000,0**	**14,57**	**14,57**	**3.405.261.040,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0004	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.096.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.096.040,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0004	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.755.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.755.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0004	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.160.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.160.000,0

1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0004	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.800.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0004	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.600.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0004	5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.900.000.000,0	580.750.000,0	14,89	14,89	580.750.000,0	14,89	14,89	3.319.250.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0004	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.000.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0004	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	49.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49.600.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.02**	**1.05.02.2.01**	**1.05.02.2.01.0005**		**Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia**	**505.848.040,0**	**82.000.000,0**	**16,21**	**16,21**	**82.000.000,0**	**16,21**	**16,21**	**423.848.040,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0005	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.425.840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.425.840,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0005	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.395.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.395.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0005	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.536.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.536.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0005	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.291.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.291.200,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0005	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	94.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94.200.000,0

1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0005	5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	36.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.000.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0005	5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	360.000.000,0	82.000.000,0	22,78	22,78	82.000.000,0	22,78	22,78	278.000.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.02**	**1.05.02.2.01**	**1.05.02.2.01.0015**		**Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan**	**11.204.339.000,0**	**734.513.100,0**	**6,56**	**19,49**	**2.183.513.100,0**	**19,49**	**19,49**	**9.020.825.900,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0015	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.678.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.678.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0015	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.070.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.070.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0015	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.625.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.625.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0015	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	438.900.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	438.900.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0015	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	102.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102.000.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0015	5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	691.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	691.600.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0015	5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.916.000.000,0	201.000.000,0	6,89	20,52	598.500.000,0	20,52	20,52	2.317.500.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0015	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.390.000.000,0	525.000.000,0	8,22	24,67	1.576.500.000,0	24,67	24,67	4.813.500.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0015	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	621.960.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	621.960.000,0

1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0015	5.1.02.02.00.06	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	15.336.000,0	3.783.600,0	24,67	24,67	3.783.600,0	24,67	24,67	11.552.400,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0015	5.1.02.02.00.07	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	19.170.000,0	4.729.500,0	24,67	24,67	4.729.500,0	24,67	24,67	14.440.500,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.02**	**1.05.02.2.01**	**1.05.02.2.01.0016**		**Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa**	**12.482.715.200,0**	**956.553.600,0**	**7,66**	**22,57**	**2.818.053.600,0**	**22,58**	**22,57**	**9.664.661.600,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0016	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.400.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0016	5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.400.000.000,0	417.000.000,0	7,72	22,69	1.225.500.000,0	22,69	22,69	4.174.500.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0016	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.408.000.000,0	531.000.000,0	8,29	24,72	1.584.000.000,0	24,72	24,72	4.824.000.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0016	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	623.712.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	623.712.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0016	5.1.02.02.00.06	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	15.379.200,0	3.801.600,0	24,72	24,72	3.801.600,0	24,72	24,72	11.577.600,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0016	5.1.02.02.00.07	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	19.224.000,0	4.752.000,0	24,72	24,72	4.752.000,0	24,72	24,72	14.472.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.02**	**1.05.02.2.01**	**1.05.02.2.01.0017**		**Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah**	**21.380.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**21.380.000,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0017	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.280.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.280.000,0

1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0017	5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.300.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0017	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.800.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.01	1.05.02.2.01.0017	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.000.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.02**	**1.05.02.2.02**			**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**514.828.400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**514.828.400,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	**1.05.02.2.02**	**1.05.02.2.02.0010**		**Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**73.637.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**73.637.800,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0010	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.502.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.502.800,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0010	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	645.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	645.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0010	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	290.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.02**	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0010	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.600.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0010	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	49.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49.600.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.02**	**1.05.02.2.02**	**1.05.02.2.02.0011**		**Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah**	**345.772.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**345.772.800,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0011	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	570.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0011	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.868.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.868.800,0

1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0011	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0011	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.780.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.780.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0011	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	454.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	454.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0011	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.800.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0011	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.000.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0011	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	108.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108.000.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0011	5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	144.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144.000.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0011	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	64.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64.800.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	**1.05.02**	**1.05.02.2.02**	**1.05.02.2.02.0012**		**Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**95.417.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**95.417.800,0**
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0012	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	689.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	689.800,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0012	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.693.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.693.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0012	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.395.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.395.000,0

1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0012	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.040.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.040.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0012	5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	54.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54.000.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0012	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.600.000,0
1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	1.05.02.2.02	1.05.02.2.02.0012	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.000.000,0

Berdasarkan Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 diatas, diperoleh evaluasi hasil sebagai berikut:

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang dibebankan APBD tahun 2025, sebesar Rp. 46.982.529.144,- Realisasi anggaran sampai bulan Maret sebesar Rp 7.500.100.787,-. Atau sebesar 15,96 % Untuk melaksanakan semua kegiatan ini telah dianggaran belanja masing – masing yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dianggarkan sebesar Rp. 17.984.180.864,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 1.835.784.087.-. atau 10,12%.

Indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah

- Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas target 90% dengan capaian kinerja 9%.
- Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah target 100% dengan capaian kinerja 16%.
- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik target 90% dengan capaian kinerja 54%.

2. **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dianggarkan sebesar Rp. 28.752.517.280,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 5.664.316.700,-. atau 19,63%. Indikator program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut :

- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada dengan target kinerja 100%. Berdasarkan pendataan di lapangan pada tahun 2023, jumlah warga negara yang berhasil didata yang berada pada radius kurang 50 meter dari lokasi penegakan perda sebanyak 299 warga negara, semuanya harus terlayani dengan menjamin tidak ada warga negara yang mengalami kerugian material atau cidera akibat penegakan perda serta memberikan layanan ganti rugi materil atau pengobatan apabila ada warga negara yang terkena dampak.
- Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan dengan target kinerja 100%. Sampai triwulan I jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sebanyak 80 laporan dari target 325 laporan. Sehingga persentase capaian tersebut sebesar 24%.
- Persentase perda dan perkada yang ditegakkan dengan target kinerja 100%. Jumlah perda dan perkada yang akan ditegakkan tahun 2025 sebanyak 24 Perda dan Perkada. Sampai triwulan I jumlah perda dan perkada yag ditegakkan sebanyak 10 dari target 24 perda dan perkada.

Meskipun capaian kinerja program tersebut tinggi, tetapi masih terdapat beberapa catatan dan faktor penghambat diantaranya belum adanya fasilitas bagi petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) ditiap kelurahan seperti pakaian dinas lengkap, tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan Perwali yang masih kurang sehingga masih terus terjadi pelanggaran perda maupun perkada, Adanya pembagian kewenangan yang berbasis resiko antara pemerintah kota dan provinsi dalam aturan perizinan OSS (*online single submission*), serta kurangnya kesepahaman hukum oleh lembaga-lembaga Non Pemerintah / LSM terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Selain itu adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan adalah adanya kegiatan patroli rutin wilayah di seluruh kecamatan kota makassar untuk meminimalisir gangguan ketentraman dan ketertiban umum, tersedianya sarana dan prasarana dengan baik, Adanya kebijakan pimpinan untuk membentuk Tim Penegakan Perda dan Perwali yang melibatkan unsur TNI POLRI, serta hubungan koordinasi dengan Instansi terkait telah terjalin dengan baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat faktor pendukung keberhasilan kinerja dan faktor penghambat sebagai berikut:

Faktor pendukung

1. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam realisasi anggaran adalah dukungan SDM yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran sehingga terlaksananya beberapa kegiatan sesuai jadwal.
2. Adanya kegiatan sosialisasi Perda dan Peraturan Walikota kepada masyarakat Kota Makassar untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Pelanggaran Perda dan Perwali.
3. Adanya kegiatan patrol rutin wilayah di seluruh kecamatan kota makassar untuk meminimalisir gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Tersedianya sarana dan prasarana dalam kondisi baik.
5. Hubungan koordinasi dengan Instansi terkait telah terjalin dengan baik.

Faktor Penghambat

1. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada sampai triwulan ke 1 ini belum ada realisasi anggaran karena tidak ada warga negara yang mengalami kerugian materil dan / atau mengalami cidera atas dampak dari penegakan perda. Kendala lain adalah belum ada peraturan kepala daerah terkait petunjuk teknis ganti rugi materil atas dampak penegakan perda dan perkada.
2. Masih sering terjadi pelanggaran yang berulang khususnya pelanggaran pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan.
3. Ada pergantian pengguna anggaran sehingga pengadaan belanja

Adapun review hasil pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan realiasisai renstra perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan realisasi APBD tercantum pada tabel berikut :

TABEL 2.2 (T.C-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (Tahun berjalan) Kota Makassar

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelurahan Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7+9	11 = 10/4
	Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan dasar									
	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN perangkat daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas	90%	90%	90%	100%	111%	100%	100%	111%
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	98%	96%	96%
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	90%	97,37%	108%	98,32%	98,32%	109,00%

						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	91 dokumen	15 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	100%	12 dokumen	28 dokumen	30,77%
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 dokumen	5 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	3 dokumen	7 dokumen	35,00%
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggran (RKA) SKPD dan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	20,00%
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	20,00%
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	20,00%
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	20,00%
						Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 dokumen	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	37,00%
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 dokumen	6 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	3 dokumen	7 laporan	23,00%
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	111%

					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disesiakan	70 kali	14 kali						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			61 orang/bulan	61 orang/bulan	100%	50 orang/bulan	111 orang/bulan	
					Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah penerima jasa pengolahan keuangan SKPD	135 orang	27 orang						
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	24 dokumen	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penerima jasa pengelolaan keuangan SKPD	50 orang	10 orang						
						Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD			1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 dokumen	12 dokumen	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	3,00%
					Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Hasil koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	30,00%
					Pengolahan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	16 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	8 dokumen	50%
					Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesterasn SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	90 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100%	14 laporan	28 dokumen	31,00%
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	-	12 dokumen	33,00%

					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	111%
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	40,00%
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	1 dokumen	20,00%
					Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	40,00%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	111%
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pengawai	4 unit	-	-	-	-	-	-	0%
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1167 pasang	509 pasang	293 paket	293 paket	100%	655 paket	948 paket	81%
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasrkan tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	71 orang	14 orang	15 orang	15 orang	100%	35 orang	50 orang	70%
					Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah anggota satpol pp yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan	450 orang	70 orang	-	-	-	-	70 orang	15%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	67,33%	100%	100%	100%	89,47%	94,5%	105%
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Kantor yang disediakan	100 jenis	20 paket				1 paket	1 paket	1%
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25 jenis	5 paket	4 paket	1 paket	25%	3 paket	4 paket	16%

					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6 unit	-	-	-	-	2 paket	2 paket	33%
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jasa barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	5 tahun	0						
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan			1 paket	1 paket	100%	3 paket	4 paket	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedinya bahan bacaan	60 eksamplar	12 eksamplar						
						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan			12 dokumen	12 dokumen	100%	3 dokumen	15 dokumen	
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum yang disediakan	6250 orang	24,17%						
						Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu			12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi yang akan dilaksanakan	140 kali	28 kali						
						Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			26 laporan	26 laporan	100%	43 laporan	69 laporan	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	2 unit							
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	5 unit							

						Bangunan lainnya yang disediakan									
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	100%	100%	100%	100%	28%	64%	71%
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	5 tahun	1 tahun	12 laporan	12 laporan	100%	0	12 laporan	
					Penyediaan Layanan Umum Kantor	Jumlah Publikasi/Penyebarluasan Informasi Pencegahan Peraturan Daerah	5 tahun	1 tahun	12 laporan	12 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90%	100%	100%	100%	100%	98,32%	99%	110%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 tahun	100%	1 unit	1 unit	100%	1 unit	2 unit	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 tahun	100%	68 unit	68 unit	100%	61 unit	61 unit	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 tahun	100%	49 unit	49 unit	100%	55 unit	55 unit	
					Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	100%	97,14%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah data Potensi Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	100%	97,14%	82%	100%	121%	90,44%	100%	100%
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Kewaspadaan Dini Potensi Konflik	1500 orang	300 orang						
		Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1500 orang	300 orang						
		Pelibatan TNI/Polri dan Anggota Satpol PP dalam Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4060 orang	802 orang						
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan			300 laporan	300 laporan	100%	303 laporan	603 laporan	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Pelibatan TNI/POLRI dan Anggota Satpol PP dalam penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada	3235 orang	633 orang						
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			25 laporan	75 laporan	300%	50 laporan	125 laporan	

					Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan Data Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu wilayah Kota Makassar	48 dokumen	0						
						Jumlah Anggota Sat. Pol PP yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Hut PolPP Tingkat Prov Sul-Sel	300 orang	-						
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			12 dokumen	12 dokumen	100%	1 dokumen	13 dokumen	
					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Sat. Perlindungan Masyarakat(LINMAS) yang diberdayakan	1500 orang	300 orang	300 orang	300 orang	100%			
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (LINMAS) yang diberdayakan			1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Cakupan Jumlah Sat. LINMAS (1 Linmas / RT)	1500 orang	300 orang						
						Jumlah Anggta Sat. POL PP yang mendapatkan pembinaan dalam Korps Musik Gita Praja wibawa	350 orang	70 orang						
						Jumlah Anggota Sat. POLPP yang mendapatkan pembinaan Fisik, Mental, Etika dan Disiplin	3860 orang	772 orang						
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5710 orang		765 orang	765 orang	100%	691 orang	1456 orang	25%

						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20 unit	18 unit	4 unit	1 unit	25,00%	6 unit	7 unit	30,00%
						Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketertiban dan Ketenteraman yang tersedia/diperbaharui	24 SOP	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	1 dokumen	4,00%
						Penyediaan Layanan dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang mendapatkan Penanganan dalam Rangka Penegakan Perda dan Perkada	20 orang							
							Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan perda dan perkada yang terlayani			1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	
						Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Jumlah Perda Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar yang ditegakkan	87%	100%	85%	100%	117%	100%	100%	114%
						Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Makassar	1800 orang	300 orang	-	-	-	-		
						Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Intensitas Pengawasan atas Kepatuhan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	3000 jam	600 jam						
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	
						Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan walikota makassar yang ditangani	1250 kasus	250 kasus						

						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP			12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	
					Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Peningkatan SDA yang mengikuti diklat PPNS	5 orang	2 orang	1 laporan	1 laporan	100%	3 laporan	4 laporan	
					Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mendapat pengembangan karir	5 orang	2 orang						
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada			1 laporan	1 laporan	100%	3 laporan	4 laporan	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dapat dilihat dari indikator kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dan terlaksananya penegakan hukum peraturan daerah. Capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja tercantum pada tabel T-C 30 berikut ini:

Tabel 2.3 (Tabel T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Makassar

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Terlaksanana nya penegakan hukum peraturan daerah			83%	85%	85%	87%	100%	100%	100%	100%	
2	Pelayanan Ketenteram an dan Ketertiban Umum	100%		85%	87%	87%	83%	100%	100%	100%	100%	

Tingkat keberhasilan kinerja pelayanan suatu perangkat daerah dapat diukur dari realisasi program-program dan kegiatan-kegiatan perangjat daerah tersebut. Adapun rincian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar sebagai berikut :

- Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan dengan target kinerja 100%. Sampai triwulan ke dua tahun 2024 jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan sebanyak 85 laporan dan terselesaikan dengan persentase 100%.
- Persentase perda dan perkada yang ditegakkan dengan target kinerja 100%. Jumlah perda dan perkada yang akan ditegakkan tahun 2024 sebanyak 16 perda dan 8 perkada. Sampai triwulan ke dua jumlah perda dan perkada yag ditegakkan sebanyak 14 dari 24 perda dan perkada.

Terdapat satu jenis layanan dasar bidang urusan ketertiban umum yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar sesuai yang

ditetapkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yaitu Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.

➢ **Target Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja**

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah mengacu kepada penerapan dan pencapaian SPM berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

1. **Jenis Pelayanan Dasar**

Terdapat satu jenis layanan dasar bidang urusan ketertiban umum yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar sesuai yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yaitu Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.

2. **Target Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja**

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah mengacu kepada penerapan dan pencapaian SPM berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini

Tabel 2.4

Target Pencapaian SPM Bidang urusan Ketertiban Umum

	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target RKPD	Target SPM (%)
	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di kabupaten/kota	100%	100%

Indikator pelayanan SPM Satpol PP adalah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kota Makassar dengan target 100%. Berdasarkan pendataan di lapangan oleh personil Satpol PP Kota Makassar bahwa jumlah warga negara yang berada di radius 0-50 meter dari lokasi penegakan perda dan perkada Kota Makassar sebanyak 299 orang.

3. **Anggaran**

Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan sebagai berikut :

Tabel 2.5

Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas

Tahun 2025

Program	Anggaran Program	Anggaran SPM
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	28.850.572.280	527.228.040
Jumlah	**28.850.572.280**	**527.228.040**

Penganggaran SPM tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas dianggarkan sebesar Rp. 505.848.040
- Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dianggarkan sebesar Rp. 21.380.000

4. **Dukungan Personil**

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan standar pelayanan minimal urusan bidang ketertiban umum yaitu :

Tabel 2.6

Jumlah dukungan personil SATPOL PP Kota Makassar

No.	Personil	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1.	**SATPOL PP KOTA MAKASSAR**	**756 Orang**		
1.1	**Pegawai Negeri Sipil (PNS)**	**45**	**41**	**7**
-	Eselon 2b	0	0	0
-	Eselon 3a	1	1	0
-	Eselon 3b	4	4	0
-	Eselon 4a	8	6	2
-	Staf Pelaksana	35	30	5
1.2	**PPPK**	**3**	**0**	**3**
1.3	**Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)**	**708 Orang**		
-	Tenaga Kontrak	708 Orang		
Total		**708**	555	153

➢ **Hasil Capaian**

Realisasi pencapaian SPM urusan Trantibumlinmas bidang Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban Umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Tabel Realisasi SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum
Triwulan I Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)**					**94,93%**	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80%**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	**0**	**0.00%**	Jumlah warga negara yang berada di radius kurang 50 meter dari lokasi penegakan perda
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**14,93%**	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani /Terpenuhi**	**74,67%**	
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	unit	63	63	**0**	**100%**	Jumlah kendaraan operasional, roda 2, roda 4 dan dalmas
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*	dokumen	1	1	**0**	**100%**	SOP ketertiban umum dibuat dalam 1 dokumen yang didalamnya terdiri dari beberapa SOP kegiatan
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan	orang	770	55	**710**	**7,14%**	Peningkatan kapasitas SDM Kesamaptaan, Korsik, Satlinmas

perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***						
4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen	0	0	**0**	**0.00%**	Belum ada warga negara yang terkena dampak
5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	orang	0	0	**0**	-	Tidak ada warga yang mengalami kerugian materil
6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	orang	0	0	**0**	-	Tidak ada warga yang mengalami cidera baik cidera ringan, sedang atau berat.

1. **Kendala, Permasalahan dan Solusi**

a. Pengumpulan Data

Kendala :

1) Tidak semua warga negara yang berada di radius 0-50 meter dari lokasi penegakan perda memberikan data-data lengkap seperti NIK dan Nomor KK. alasannya karena data pribadi.

Permasalahan :

1) Tidak ada pengaduan layanan ganti rugi materil maupun pengaduan layanan pengobatan akibat penegakan Perda dan Perkada sehingga untuk isian capaian mutu pada indikator tersebut tidak ada

Solusi :

1) Melakukan identifikasi data baik dengan verifikasi dan validasi ke lokasi pelanggaran gangguan ketertiban umum atau konfirmasi kepada masyarakat;

b. Penghitungan Kebutuhan

Kendala :

1) Belum adanya data awal yang valid sehingga sulit melakukan penghitungan kebutuhan khusunya data pengaduan ganti rugi materil dan layanan pengobatan.

Permasalahan :

1) warga negara yang berada di radius 0-50 meter dari lokasi penegakan perda terkadang tidak memberikan data-data lengkap seperti NIK dan Nomor KK. alasannya karena data pribadi

Solusi :

1) Melakukan perkiraan anggaran ganti rugi materil dan layanan pengobatan atas dampak akibat penegakan perda dan perkada;

c. Perencanaan dan Penganggaran

Kendala :

1) Sulit menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan karena belum ada warga negara yang mengalami kerugian materil atas dampak penegakan perda.

Permasalahan :

1) Perencanaan dan penganggaran hanya berpedoman pada asumsi jumlah ganti rugi materil yang akan datang.

Solusi :

1) Melakukan analisa kebutuhan dan jumlah orang yang membutuhkan untuk diajukan pada saat perencanaan dan penganggaran.

d. Pelaksanaan

Kendala :

Tidak ada serapan anggaran pada kegiatan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkada karena tidak ada warga negara yang mengalami kerugian materil maupun cidera akibat dari penegakan perda dan perkada.

Tidak ada warga negara yang melakukan pengaduan kerugian materil dan cedera fisik akibat penegakan perda dan perkada.

Solusi :

Melaksanakan Patroli rutin wilayah dalam hal mengantisipasi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

➢ **PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Ketertiban Umum dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar masing-masing sebagai berikut:

Tabel 2.8

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Satpol PP dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketertiban Umum

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Alokasi Anggaran	Realisasi	Sumber
Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan kapasitas SDM Satuan polisi pamong praja dan Satlinmas	770 orang	505.848.040	82.000.000	APBD
		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1 Laporan	21.380.000	0	APBD
			Jumlah	**527.228.040**	**82.000.000**	

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) triwulan I tahun 2025 ini merupakan dokumen hasil pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Khusus Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar menangani SPM urusan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban umum. Laporan SPM ini juga sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan SPM berikutnya.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar. Hal ini sesuai dengan visi Walikota yaitu pemenuhan Hak Dasar dan Pelayanan Dasar. Dapat diartikan bahwa pemerintah Kota Makassar telah mampu menerjemahkan dengan baik perintah konstitusi yang mana proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang mandiri dan berhasil apabila suatu daerah sudah mampu mengelolah sendiri daerahanya dengan penguatan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan hak dasar dan pelayanan dasar sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar.

Terkait beberapa target capaian SPM yang belum dicapai, tetapi perlu disadari bahwa keberhasilan pencapaian target SPM memerlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak. Selain dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga dari aparatur pemerintah daerah kota makassar pemangku kepentingan serta masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Sehingga diharapkan pencapaian target standar pelayanan minimal dapat tercapai sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dasar yang wajib diterima oleh masyarakat.

Pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) akan selalu dimonitor dan evaluasi untuk mengetahui hambatan-hambatan dan kekurangan yang harus segera diatasi dan dicari penyebabnya untuk mencapai

target yang ditentukan dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Makassar. Selama pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2025 terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dan belum memuaskan semua pihak. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar akan selalu melakukan inovasi untuk meningkatkan mutu pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar merupakan salah satu perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 87 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat. Berdasarkan identifikasi permasalaha tugas pokok dan fungsi maka dapat ditentukan beberapa isu-isu strategis yang harus ditindak lanjuti oleh Satuan Polisi PamongPraja Kota Makassar yaitu :

1) Implementasi penegakan Perda dan perwali yang belum optimal;
2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan daerah dan peraturan walikota khususnya dalam hal ketertiban umum, seperti masih banyaknya pelanggran perda oleh pedagang kaki lima (PK5) yang menggunakan daerah milik jalan.
3) Penanganan aksi unjuk rasa/demo di Kantor Pemerintahan.
4) Pemanfaatan lahan parkir liar yang mengganggu ketertiban umum.
5) Maraknya anak jalanan, gelandangan pengemis serta pengatur lalu lintas illegal yang menggangu ketertiban umum di jalanan. Penanganan tersebut terus laksanakan bersama dinas sosial.

Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa yang akan dating dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Pada dasarnya berbagai hambatan dan permasalahan yang ada tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, karena semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan tetap tercapai dengan kualifikasi sangat baik yang ditunjukkan oleh pencapaian output, outcome dan capaian indikator kinerja utama SKPD.

Secara umum pemerintah Kota Makassar telah memiliki program dari tahun ketahun, sedangkan masyarakat memiliki aktivitas rutin dalam mengendalikan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mengurangi pelanggaran Perda.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Makassar yang terjadi di masyarakat pada saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Makassar, baik secara represif non yustisi dan pro yustisi serta putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk memberikan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda.

Selain itu penggunaan bahu jalan protokol sebagai tempat berjualan para Pedagang Kaki Lima (PKL) juga merupakan salah satu permasalahan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, seperti Jalan Pettarani dan Hertasning karena menimbulkan kemacetan yang disebabkan oleh kendaraan pengunjung Pedagang Kaki Lima (PKL). Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan melanggar Perda Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan secara persuasif dengan mengutamakan sentuhan hati.

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan tantangan yang signifikan dan terus-menerus bagi Satpol PP Kota Makassar. Isu-isu utama meliputi penggunaan bahu jalan oleh PKL yang secara langsung menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah , serta pendudukan jalur pedestrian yang menghambat akses dan fungsi ruang publik. Faktor penyebab yang mendasar adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman di kalangan PKL mengenai peraturan yang relevan. Meskipun Satpol PP telah melakukan upaya penertiban, penegakan hukum seringkali dinilai "kurang tegas" atau tidak konsisten, karena para pedagang seringkali kembali ke lokasi ilegal mereka tak lama setelah petugas pergi. Selain itu, kritik internal menunjukkan kurangnya pemahaman yang komprehensif tentang tugas di antara beberapa petugas, kadang-kadang menyebabkan kesalahan prosedur di lapangan atau bahkan praktik diskriminatif. Faktor utama yang berkontribusi pada siklus ketidakpatuhan ini adalah sosialisasi Perda yang tidak memadai dan tidak efektif oleh Pemerintah Kota Makassar. Meskipun Satpol PP telah mencoba mengadopsi pendekatan humanis dan persuasif dalam interaksi mereka , metode ini seringkali dianggap tidak efektif dalam mencapai kepatuhan yang berkelanjutan, bahkan terkadang meningkatkan eskalasi menjadi bentrokan fisik antara petugas dan pedagang.

Tantangan terkait PKL secara langsung memengaruhi ketertiban kota, kelancaran lalu lintas, aksesibilitas dan penggunaan ruang publik yang dimaksudkan, serta estetika kota secara keseluruhan. Isu ini berfungsi sebagai indikator penting efektivitas operasional Satpol PP dan hubungannya dengan sektor informal.

Satpol PP Makassar secara aktif melakukan patroli dan tindakan penegakan hukum untuk mengatasi berbagai gangguan ketertiban umum. Ini termasuk memantau dan menangani perilaku tidak pantas di ruang publik, terutama selama periode sensitif seperti Ramadan, dan mengambil tindakan tegas terhadap tempat hiburan malam (THM) yang melanggar peraturan operasional, termasuk penyegelan. Selain itu, Satpol PP melakukan operasi yang

menargetkan kelompok rentan seperti anak jalanan (anjal), gelandangan, dan pengemis. Dalam kasus-kasus ini, mereka sering memprioritaskan pendekatan humanis dan persuasif, berkoordinasi erat dengan Dinas Sosial (Dinsos) untuk rehabilitasi dan pembinaan selanjutnya. Keberadaan peraturan daerah spesifik, seperti Perda No. 2 Tahun 2008 tentang "Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen" , menggarisbawahi kerangka hukum untuk intervensi ini. Namun, terlepas dari upaya-upaya ini, tantangan tetap ada, dibuktikan dengan terus berlanjutnya keberadaan kelompok seperti "manusia silver" dan pengemis di ruang publik. Isu ketidakpatuhan yang lebih luas juga terlihat dalam anggapan pengabaian terhadap "Perda Gudang Dalam Kota", yang berkontribusi pada kemacetan lalu lintas dan kecelakaan, menunjukkan tantangan sistemik dalam menegakkan berbagai peraturan daerah.

Isu-isu ini secara langsung memengaruhi kualitas hidup warga Makassar, memengaruhi keselamatan publik, estetika kota, dan rasa ketertiban dan ketenteraman secara keseluruhan di dalam kota. Penanganan yang efektif terhadap gangguan-gangguan ini merupakan indikator utama keberhasilan Satpol PP.

Meskipun Satpol PP menekankan pendekatan humanis untuk anjal/gepeng dan berkolaborasi dengan Dinsos untuk "pembinaan" atau rehabilitasi , dan didukung oleh Perda spesifik , keberlanjutan kehadiran "manusia silver" dan pengemis secara eksplisit dicatat. Ini menunjukkan bahwa niat kebijakan untuk menangani masalah sosial ini secara manusiawi melalui rehabilitasi dan dukungan, daripada hanya tindakan hukuman, belum cukup untuk secara berkelanjutan menghilangkan mereka dari jalanan atau mencegah mereka kembali. Kesenjangan yang terus-menerus antara niat dan hasil ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor: skala masalah sosial yang sangat besar, yang mungkin melebihi kapasitas rehabilitasi yang ada; potensi keterbatasan dalam efektivitas atau keberlanjutan program rehabilitasi saat ini; kurangnya alternatif ekonomi jangka panjang yang layak bagi individu-individu ini; atau praktik masyarakat yang terus memberikan uang di jalanan, yang secara tidak sengaja mempertahankan aktivitas tersebut meskipun ada peringatan resmi. Situasi ini menyoroti tantangan sistemik di mana penegakan hukum saja, bahkan dengan pendekatan humanis, tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah sosial-ekonomi yang kompleks. Hal ini menggarisbawahi kebutuhan kritis akan program kesejahteraan sosial jangka panjang yang lebih kuat, didanai secara memadai, dan komprehensif, ditambah dengan kampanye kesadaran publik yang intensif untuk mencegah praktik-praktik yang melanggengkan masalah. Ini menggeser fokus dari sekadar mengelola gejala menjadi menangani akar penyebab, membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi di berbagai lembaga pemerintah dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas.

Hambatan signifikan dan meluas terhadap penegakan Perda yang efektif dan pemeliharaan ketertiban umum adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan di kalangan masyarakat umum. Hal ini jelas ditunjukkan oleh pelanggaran berulang yang dilakukan oleh PKL, bahkan

setelah menerima berbagai peringatan dan intervensi , serta terus berlanjutnya keberadaan individu seperti "manusia silver" dan pengemis meskipun ada patroli rutin Satpol PP. Faktor kunci yang berkontribusi pada kurangnya kepatuhan ini secara eksplisit diidentifikasi sebagai sosialisasi peraturan daerah (Perda) yang tidak memadai dan tidak efektif oleh Pemerintah Kota Makassar. Meskipun Satpol PP memang terlibat dalam kegiatan "Sosialisasi Peraturan" , efektivitas keseluruhan mereka dalam mengubah perilaku publik secara nyata dan mendorong kepatuhan yang luas masih dipertanyakan, menunjukkan adanya kesenjangan antara upaya dan hasil yang diinginkan.

Kepatuhan publik adalah elemen yang sangat diperlukan dalam tata kelola yang efektif dan prasyarat untuk masyarakat yang tertib. Kepatuhan yang rendah menunjukkan tantangan mendasar dalam hubungan timbal balik antara otoritas yang memerintah dan yang diperintah, seringkali mengarah pada siklus penegakan hukum dan ketidakpatuhan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas ketentraman, ketertibanumum dan ketentraman masyarakat, selain membutuhkan kompetensi aparatur penegak peraturan perundang-undangan, dalam hal ini fungsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, juga diperlukan kontribusi, partisipasi, dan dukungan semua unsur baik institusi terkait mau pun dari segala komponen lapisan masyarakat.

Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal lainnya sebagai berikut:

1) Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
2) Penyalahgunaan fungsi Pedestrian Oleh Pedagang Kaki Lima (PK5)
3) Keterbukaan Informasi Pelayan Publik
4) Anak Jalanan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya (PMKS)
5) Penyalahgunaan Aset Daerah, Fasilitas Umum dan Fisilitas Sosial

Untuk menghadapi dan menangani persoalan gangguan Ketentraman dan Ketertiban tersebut diatas, juga sangat bergantung seberapa baik kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Oleh karena itu dengan perangkat Peraturan yang tersedia yang dipandang memadai, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar diharapkan dapat proaktif dalam mengantisipasi gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dimaksud. Tugas lain adalah pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah yang diharapkan dapat mengoptimalkan upaya meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman ditengah masyarakat.

Masalah Internal yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar antara lain :

1. Terbatasnya Kemampuan SDM Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar bila diperhadapkan pada dinamika, Kompleksitas dan Ketertiban Umum serta Pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA) sehingga optimilisasi kinerja masih jauh dari apa yang diharapkan.

2. Minimnya jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga penanganan masalah penertiban dan Pengamanan serta Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara tuntas baik berupa tindakan prepentif maupun represif.
3. Belum terbentuknya sekretariat PPNS
4. Standarisasi pendidikan dan latihan kurang memadai baik menyangkut Kurikulum, metode dan waktu latihan sehingga belum sepenuhnya membekali kecakapan dan keahlian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional di lapangan.

Adapun masalah eksternal yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar antara lain:

1. Munculnya berbagai bentuk pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi terus menerus dari waktu kewaktu dengan Frekuensi dan Intesitas yang relatif cukup tinggi sehingga terdapat kerawanan sosial di berbagai tempat;
2. Lemahnya koordinasi antar unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional di lapangan guna mengantisipasi terjadinya Pelanggaran Peraturan Daerah secara dini dan untuk mengambil langkah lebih lanjut.
3. Kurangnya kesepahaman Hukum oleh Lembaga-Lembaga non Pemerintah/ Lembaga sosial masyarakat (LSM) terhadap Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Menyikapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal, disampingtantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar serta Isu-isu penting terkait Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah,makahal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk mengatasi kondisi tersebut diatas antara lain :

1. Perlunya peningkatan wawasan SDM Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota makassar dan PPNS melalui kegiatan diklat yang memadai terkait standar kurikulum dan metode penanganan dini, pemeriksaan dan penindakan (Prepentif dan Represif) terhadap pelaku gangguan trantibum dan Pelanggar Perda dan Peraturan Walikota;
2. Perlunya penambahan sarana dan prasarana disertai penganggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasional di lapangan;
3. Peningkatan koordinasi kemitraan antara Aparat Penegak Perda dan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar.
4. Perlunya pealtihan dasar dan pelatihan teknis anggota Satpol PP dan perlindungan masyarakat.
5. Perlunya penambahan pos-pos penjagaan pada titik-titik rawan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dijalan raya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal dan Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar berdasarkan RKPD Kota Makassar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kota Makassar

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Perubahan RKPD. Telaahan teradap rancangan awal Perubahan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal Perubahan RKPD.

Hasil review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan, setelah proses perbandingan antara rancangan awal Perubahan RKPD dengan analisis kebutuhan dimana antara rumusan kegiatan dalam rancangan awal Perubahan RKPD kesemuanya terdapat dalam rancangan Perubahan RENJA SKPD.

Adapun rancangan awal usulan Perubahan RENJA tahun 2025 sebesar Rp 46.982.529.144- (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan seratus empat puluh empat rupiah) dan mengalami perubahan pada rancangan akhir usulan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 sebesar Rp 46.623.826.744,- (empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) sebagaimana disajikan pada tabel 2.9 sesuai format Formulir T-C.31 berikut :

Tabel 2.9 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025
Kota Makassar

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**46.982.529.144**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**46.623.826.744**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	18.131.956.864	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	18.144.097.864
		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%			Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	
		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%			Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	134.769.620	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	84.009.620
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	79.316.080	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	51.256.080

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.193.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.113.500
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.241.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.621.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.661.440	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.121.440
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.062.400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.522.400
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	20.295.200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	8.375.200
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	90%	16.220.802.884	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	90%	16.248.522.884
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	15.648.829.804	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	53 Orang/bulan	15.648.829.804

		Kelurahan					Kelurahan			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	329.806.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	357.526.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	180.914.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	180.914.000
	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	8.892.000	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	8.892.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16.874.480	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16.874.480
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	18.714.600	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	18.714.600
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/T	14 Laporan	16.772.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/Tri	14 Laporan	16.772.000

			riwulanan /Semest SKPD					wulanan/Semest SKPD		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	90%	11.251.960	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	90%	9.651.960
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.916.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.916.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.335.960	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.735.960
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	121.540.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	90%	178.455.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 orang	105.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 orang	161.915.000
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 orang	25.540.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 orang	16.540.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	241.012.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	470.432.400

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	2.610.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	2.610.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	56.494.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	285.914.400
	Penyedia Peralatan rumah tangga	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	13.538.000	Penyedia Peralatan rumah tangga	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	13.538.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 Paket	45.324.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 Paket	45.324.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undanganyang disediakan	12 Dokumen	7.560.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undanganya ng disediakan	12 Dokumen	7.560.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	172.162.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	109.486.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta	Kota Makassar, Semua Kecamatan,	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	195.864.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan,	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	170.916.000

	han Daerah	Semua Kelurahan					Semua Kelurahan			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	35.664.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.916.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	160.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	162.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90%	1.075.040.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90%	982.110.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	1 Unit	45.130.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	1 Unit	41.630.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	63 Unit	1.012.060.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	63 Unit	916.630.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	25 Unit	17.850.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	26 Unit	23.850.000

	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	28.850.572.280	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	28.479.728.880
		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan	100%			Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan	100%	
		Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan	100%			Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan	100%	
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah dan Potensi Gangguan Ketertiban dan dan Ketentraman Masyarakat	82%	28.335.743.880	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah dan Potensi Gangguan Ketertiban dan dan Ketenteraman Masyarakat	82%	28.081.001.880
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 dokumen	135.450.600	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 dokumen	82.390.600
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentera	12 dokumen	3.986.011.040	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenterama	12 dokumen	3.983.211.040

			man dan Ketertiban Umum					n dan Ketertiban Umum		
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	770 orang	535.848.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	352 orang	505.848.040
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	300 Kasus	11.204.339.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	300 Kasus	11.056.640.600
	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	25 Kasus	12.482.715.200	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang	25 Kasus	12.261.167.600

	Kerusuhan Massa		Massa yang Dilakukan Penindakan			Kerusuhan Massa		Dilakukan Penindakan		
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	21.380.000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	18.680.000
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	-	-	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	6 Unit	173.064.000
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah Perda Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar yang ditegakkan	86%	514.828.400	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah Perda Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar yang ditegakkan	86%	398.727.000
	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1 Laporan	73.637.000	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1 Laporan	40.041.800
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	345.772.800	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	255.772.800

			yang Dapat Ditangani Sesuai SOP							
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	95.417.800	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	102.912.400

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

- Evaluasi capaian kinerja pada level kegiatan dapat digambarkan pada tabel berikut:

No	Perangkat daerah	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian		
			<8%	8-16%	>16%
			(R)	(S)	(T)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	9	7	0	2

Sumber : Bappeda Kota Makassar,2025

Tabel yang ada menunjukkan bahwa jumlah kegiatan yang terealisasi adalah 9 kegiatan, yang terdiri atas kategori rendah (<8%) yakni sebanyak 7 kegiatan dan kategori sangat tinggi (>16%) yakni sebanyak 2 kegiatan.

- Evaluasi Standar pelayanan (SPM)

Evaluasi terhadap pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) memberikan gambaran pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar menerapkan sebanyak 1 jenis pelayanan dasar. Pencapaian penerapan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar hingga triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

NO	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Target RKPD 2025	Indikator Kinerja dan Realisasi				Capaian Tahun 2025	SKPD penanggung jawab
			Penerima layanan (80%)		Mutu minimal layanan (20%)			
			Indikator	Realisasi	Indikator	Realisasi		
V. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat								
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	80%	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	14,93 %	94,33 %	Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk SPM yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) capaian SPM 94,33% dengan jumlah yang terlayani sebesar 299 0rang atau sebesar 100% dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kota Makassar. Hal ini di dukung

dengan aktifnya satpol PP dalam melaksanakan patrol rutin di seluruh wilayah Kota Makassar untuk mengantisipasi gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Namun kendala yang dihadapi juga dalam melakukan pelayanan standar minimal ini tidak semua warga negara yang berada di radius 0-50 meter dari Lokasi penegakan perda yang memberikan data-data lengkap baik NIK dan KK.

3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang dibebankan APBD tahun 2025, sebesar Rp 46.982.529.144- (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan seratus empat puluh empat rupiah) dan mengalami perubahan pada rancangan akhir usulan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 sebesar Rp 46.771.526.000,- (empat puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah). Program dan kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahun 2025 dijabarkan pada tabel 3.1 rencana program dan kegiatan pada perubahan Renja perangkat daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							37.308.900.000,00	46.982.529.144,00	46.771.526.000,00	9.462.626.000,00							41.730.889.205,00	
	1	URUSANPEMERINTAHAN WAJIBYANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR							37.308.900.000,00	46.982.529.144,00	46.771.526.000,00	9.462.626.000,00							41.730.889.205,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							37.308.900.000,00	46.982.529.144,00	46.771.526.000,00	9.462.626.000,00							41.730.889.205,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah - Persnetase sarana dan Prasana dalam kondisi baik -Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas				100 % 90 % 90 %	100 % 90 % 90 %	9.601.703.720,00	18.131.956.864,00	18.144.098.720,00	4.619.259.225,00							14.220.962.945,00	

1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerag				10 Dok	10 Dok	127.769.620,00	134.769.620,00	84.009.620,00	-43.760.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR		372.480.151,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	72.316.080,00	79.316.080,00	51.256.080,00	-21.060.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR		161.884.226,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.193.500,00	9.193.500,00	6.113.500,00	-3.080.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR		20.812.912,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
		Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD danLaporanHasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.241.000,00	9.241.000,00	4.621.000,00	-4.620.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR		20.812.912,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.661.440,00	8.661.440,00	7.121.440,00	-1.540.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR		20.812.912,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.062.400,00	8.062.400,00	6.522.400,00	-1.540.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR		20.812.912,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	20.295.200,00	20.295.200,00	8.375.200,00	-11.920.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR		107.344.277,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				90 %	90 %	7.804.819.740,00	16.220.802.884,00	16.248.523.740,00	8.443.704.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar		11.437.303.871,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.00 0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	7.224.286.660,00	15.648.829.804,00	15.648.830.660,00	8.424.544.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan	- -	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR		10.775.087.003,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

														industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
1.05.01.2.02.00.0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	333.720.000,00	329.806.000,00	357.526.000,00	23.806.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR		364.124.610,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.00.0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	180.914.000,00	180.914.000,00	914.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	-	-	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR		180.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

														mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.				
1.05.01.2.02.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	12.452.000,00	8.892.000,00	8.892.000,00	-3.560.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR		11.817.842,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	16.874.480,00	16.874.480,00	16.874.480,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.01.2.02.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	4 Dokumen	18.714.600,00	18.714.600,00	18.714.600,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	18.772.000,00	16.772.000,00	16.772.000,00	-2.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				90 %	90 %	11.251.960,00	11.251.960,00	9.651.960,00	-1.600.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	- -	SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

														serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
1.05.01.2.03.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.916.000,00	4.916.000,00	4.916.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.03.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.335.960,00	6.335.960,00	4.735.960,00	-1.600.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				90 %	90 %	121.540.000,00	190.540.000,00	178.455.000,00	56.915.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar		315.061.057,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	11 Orang	96.000.000,00	165.000.000,00	161.915.000,00	65.915.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR		135.061.057,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05.001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	50 Orang	25.540.000,00	25.540.000,00	16.540.000,00	-9.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	- -	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

														serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi umum Perangkat daerah			90 %	90 %	299.668.400,00	303.688.400,00	470.432.400,00	170.764.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar		490.603.714,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			20 Paket	1 Paket	2.610.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	- -	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR		8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

												peran aktif koperasi.					
1.05.01.2.06.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	74.636.400,00	56.494.400,00	285.914.400,00	211.278.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			3 Paket	1 Paket	13.538.000,00	13.538.000,00	13.538.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	- -	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

												agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
1.05.01.2.06.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	45.324.000,00	45.324.000,00	45.324.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	12 Dokumen	7.560.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	-	-	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	14.991.777,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

													mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
1.05.01.2.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR		28.137.720,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		28 Laporan	21 Laporan	150.000.000,00	172.162.000,00	109.486.000,00	-40.514.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	- -	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR		219.474.217,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

														produksi melalui peran aktif koperasi.				
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90 %	90 %	145.864.000,00	195.864.000,00	170.916.000,00	25.052.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar		132.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	35.664.000,00	35.664.000,00	8.916.000,00	-26.748.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR		32.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4 Laporan	110.200.000,00	160.200.000,00	162.000.000,00	51.800.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				90 %	90 %	1.090.790.000,00	1.075.040.000,00	982.110.000,00	-108.680.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR		1.445.636.154,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	45.130.000,00	45.130.000,00	41.630.000,00	-3.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim	- -	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR		61.381.648,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

														industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
1.05.01.2.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		63 Unit	63 Unit	1.027.810.000,00	1.012.060.000,00	916.630.000,00	-111.180.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	1.384.254.506,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25 Unit	26 Unit	17.850.000,00	17.850.000,00	23.850.000,00	6.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MAKASSAR	0,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2,	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**- Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan** **-Persentase Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan** **- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada**		**100 %** **100 %** **100%**	**100 %** **100 %** **100%**	**27.707.196.280,00**	**28.850.572.280,00**	**28.627.427.280,00**	**-197.270.020,00**					**27.509.926.260,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Data Potensi Gangguan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat		83 %	83 %	27.189.383.880,00	28.335.743.880,00	28.228.700.280,00	1.039.316.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar	26.878.879.428,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan		12 Dokumen	12 Dokumen	136.250.600,00	135.450.600,00	82.390.600,00	-53.860.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	- -	Masyarakat Kota Makassar	122.994.622,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

			Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota										serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.				
1.05.02.2.01.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1 Dokumen	12 Dokumen	3.986.811.040,00	3.986.011.040,00	3.983.211.040,00	-3.600.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar	1.012.957.929,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		770 Orang	352 Orang	535.848.040,00	505.848.040,00	505.848.040,00	-30.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar	662.655.692,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.02.2.01.001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			300 laporan	300 laporan	10.052.539.000,00	11.204.339.000,00	11.204.339.000,00	1.151.800.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar	10.381.813.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.001	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			25 Laporan	25 Laporan	12.461.355.200,00	12.482.715.200,00	12.261.167.600,00	-200.187.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar	14.245.887.804,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.001	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Pencgakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																

		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	1 Laporan	16.580.000,00	21.380.000,00	18.680.000,00	2.100.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar	12.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.001	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																
		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				0 Unit	24 Unit	0,00	0,00	173.064.000,00	173.064.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar	440.069.581,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Jumlah Perda Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar yang ditegakkan				87 %	87 %	517.812.400,00	514.828.400,00	398.727.000,00	-119.085.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan	- -	Masyarakat Kota Makassar	546.633.672,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

																industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	1.05.02.2.02.001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																				
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			1 Laporan	1 Laporan	76.821.800,00	73.637.800,00	40.041.800,00	-36.780.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	Masyarakat Kota Makassar		81.823.368,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.001	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP			12 Laporan	12 Laporan	345.572.800,00	345.772.800,00	255.772.800,00	-89.800.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	-	-	Masyarakat Kota Makassar		394.475.008,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

														peran aktif koperasi.					
	1.05.02.2.02.001	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	95.417.800,00	95.417.800,00	102.912.400,00	7.494.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat Kota Makassar		70.335.296,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB IV
PENUTUP

➢ Catatan Penting

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar tahun 2025 ini merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang akan dipakai sebagai acuan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran prioritas rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Makassar, Khususnya kebijakan penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturann Kepala Daerah yang tertuang ke dalam 2 (dua) Program diantaranya :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
- **Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

  Keberhasilan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai Renja Perubahan ini sangat tergantung dari peran serta masyarakat dan aparatur Pemerintah yang memiliki sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin sehingga akan tercermin pada kualitas dan Profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

  Kesemuanya ini merupakan suatu mata rantai yang saling berkesinambungan, berkaitan dan saling mempengaruhi, sehingga keterpaduannya merupakan persyaratan bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berkelanjutan.

  Demikian Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2025 yang pada pokoknya merupakan kelanjutan dari kegiatan 2025 dan penjabaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

➢ Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Untuk Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran- sasaran pembangunan tahun 2025, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang.

2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan dari Pemerintah Kota Makassar

4. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

- **Rencana Tindak Lanjut**

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan janji dalam memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan publik.
3. Seluruh bidang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Ketenteraman dan ketertiban Umum yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja tahun 2025 wajib mengupayakan agar setiap target kinerja sesuai indikator dapat tercapai.
4. Melakukan upaya perbaikan yang berkesinambungan dengan melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja.



PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



RENCANA KERJA

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dipandang perlu untuk diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, dengan menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana di maksud Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan.:
1. Wakil Wali Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
7.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
9.	Dinas Sosial Kota Makassar
10.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
12.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
13.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Makassar
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
22.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
23.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
24.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
25.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
26.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
27.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
28.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
29.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar

31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
32.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
34.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
35.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
36.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
37.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
38.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
39.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
40.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
43.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
44.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
45.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
46.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
47.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
58.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
49.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
50.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar
51.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

WALIKOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenan-Nya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini pada dasarnya merupakan amanat dari :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evalusasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja merupakan satuan yang tidak terpisah atas Renja Pokok Tahun 2025, dan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja Perubahan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Makassar, 12 Agustus 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Drs. Muhammad Dakhlan, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19740925.199311.1.005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

Daftar Tabel ..... **iii**

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 2
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 2
1.4 Sistematika Penulisan 4

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Triwulan II Tahun 2025..... 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah . 14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025 17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 23

Bab III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah 24

Bab IV Penutup 40

DAFTAR TABEL

Tabel E.81	:	Realisasi Triwulan II Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025
Tabel T-C 30	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tabel T-C 31	:	Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025
Tabel T-C 32	:	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Tabel 3.1	:	Target Perubahan Pendapatan BPKAD Tahun 2025
Tabel 3.2	:	Target Perubahan Pembiayaan BPKAD Tahun 2025
Tabel 3.3	:	Perubahan Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencanan kerja pemerintah daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dilakukan evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan sampai dengan triwulan I dan rencana yang menunjukkkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Daya serap anggaran dan kegiatan yang menurut waktu dan jadwalnya sudah tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
2. Efisiensi anggaran yang targetnya dan realisasinya dipandang mencukupi dalam pelaksanaan anggarannya;

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar kemudian akan dituangkan dalam Rancangan Perda APBD (RAPBD) Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Renja BPKAD Tahun 2025 tetap mengacu pada Rencana Strategis BPKAD Tahun 2021-2026. Perubahan Renja BPKAD Tahun 2025 merupakan masa peralihan ke Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Dengan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 BPKAD mendukung Program Strategis yaitu pemberian insetif dan pencairan TPP bagi pegawai secara proporsional dan tepat waktu dengan program prioritas yaitu Program Pengelolaan Keuangan. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, dalam Perencanaan Pembangunan Daerah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perubahan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Walikota Makassar Tahun 732 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 98);
16. Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 14).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan serta review pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar tahun 2025.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah untuk menyelaraskan Perubahan RKPD dengan Perubahan Renja, untuk menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan dalam perubahan RKPD ke Perubahan Renja, serta sebagai pedoman untuk menyusun Perubahan Kebijakan Perubahan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan RAPBD Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Makassar, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang, bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD serta Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum, bagian ini memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan panganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan, bagian ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan, bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Triwulan II, bagian ini menggambarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah triwulan II dan pencapaian tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, bagian ini berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD Perubahan dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Pemerintah Kota Makassar yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun

berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari temuan hasil pemantauan dilapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kota.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rakapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun 2025 triwulan II, sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:

Tabel E.81 Realisasi Triwulan II
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
								I		II											
					K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				102.709.188.919	91.467.777.659		8.020.421.372		7.301.536.796		15.321.958.168		16,75		15.321.958.168		10,06		
	5 02	KEUANGAN				102.709.188.919	91.467.777.659		8.020.421.372		7.301.536.796		15.321.958.168		16,75		15.321.958.168		10,06		
	5 02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				102.709.188.919	91.467.777.659		8.020.421.372		7.301.536.796		15.321.958.168		16,75		15.321.958.168		10,06		
	5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90	37.755.133.179	31.824.230.219	20	5.219.171.798	20	6.319.078.987	40	11.538.250.785	44,44	36,26	40	11.538.250.785	44,44	17,77	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	%	100			25		25		50		50		50		50			
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90			20		20		40		44,44		40		44,44			
	5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	11	93.882.800	223.919.550	3	15.184.600	0	17.352.900	3	32.537.500	27,27	14,53	3	32.537.500	23,08	15,07		
	5 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	26.734.600	111.813.550	0	13.548.600	0	15.252.900	0	28.801.500	0	25,76	0	28.801.500	0	35,22		
	5 02 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	10.460.000	18.498.000	0	0	0	248.000	0	248.000	0	1,34	0	248.000	0	1,12		
	5 02 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	12.100.000	18.477.000	0	0	0	372.000	0	372.000	0	2,01	0	372.000	0	1,52		
	5 02 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	11.098.000	12.482.000	1	1.636.000	0	314.000	1	1.950.000	100	15,62	1	1.950.000	0	8,69		
	5 02 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	10.466.400	12.482.000	0	0	0	314.000	0	314.000	0	2,52	0	314.000	0	1,44		
	5 02 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	8.316.800	34.187.000	0	0	0	620.000	0	620.000	0	1,81	0	620.000	0	3,78		
	5 02 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	14.707.000	15.980.000	2	0	0	232.000	2	232.000	100	1,45	2	232.000	0	0,87		

	5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan SPJ yang disusun**	**dokumen**	**1**	**13.014.269.443**	**23.459.181.305**	**0**	**3.587.204.279**	**0**	**5.461.940.047**	**0**	**9.059.144.326**	**0**	**38,62**	**0**	**9.059.144.326**	**0**	**38,29**		
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	66	11.939.543.243	17.864.229.915	66	2.875.041.934	66	4.078.023.147	132	6.953.065.081	200	38,88	132	6.953.065.081	0	38,20		
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	690.120.000	3.691.050.000	3	349.672.895	3	834.250.000	6	1.183.922.895	50	32,08	6	1.183.922.895	0	99,95		
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	109.215.000	1.686.351.000	1	345.392.250	1	504.854.100	2	850.246.350	40	50,42	2	850.246.350	0	49,77		
	5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	5	3.797.000	22.247.000	1	0	1	0	2	0	40		2	0	0				
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	1.115.000	5.095.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0				
	5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	5.164.000	38.280.000	1	0	0	17.667.000	1	17.667.000	50	46,15	1	17.667.000	0	24,92		
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	265.335.250	331.128.890	3	27.097.350	3	27.145.800	6	54.243.000	50	41,06	6	54.243.000	0	14,41		
	5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun**	**laporan**	**2**	**20.741.000**	**20.741.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**				
	5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	20.741.000	20.741.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0				
	5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang mendapatkan pakaian dinas dan pelatihan**	**orang**	**55**	**925.845.000**	**397.500.000**	**2**	**6.000.000**	**25**	**200.652.060**	**27**	**206.652.060**	**49,09**	**51,99**	**27**	**206.652.060**	**28,13**	**13,88**		
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	133.845.000		0		0		0		0		0		0				
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	792.000.000	397.500.000	2	6.000.000	25	200.652.060	27	206.652.060	67,50	51,99	27	206.652.060	0	15,25		
	5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Persentase Sarana dan prasarana yang disediakan**	**%**	**80**	**2.534.355.916**	**4.793.760.524**	**20**	**1.434.592.375**	**20**	**308.404.541**	**40**	**1.722.996.916**	**50**	**35,94**	**40**	**1.722.996.916**	**50**	**36,56**		
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.760.000	25.860.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0				
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	216.520.336	470.567.920	0	0	2	103.003.000	2	103.003.000	40	21,89	2	103.003.000	0	25,35		
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	28.900.800	28.900.800	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0				
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	92.540.800	461.671.100	1	39.970.400	1	19.890.000	2	59.860.400	50	12,97	2	59.860.400	0	24,95		
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	26.616.000	161.875.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0				
	5	02	02	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	17.280.000	93.280.000	3	2.800.000	3	4.200.000	6	7.000.000	50	19,84	6	7.000.000	0	16,86		
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	69.000.000	69.000.000	3	0	3	3.217.500	6	3.217.500	50	4,66	6	3.217.500	0	3,02		
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	126	1.368.160.000	880.110.000	15	115.511.975	19	114.094.041	34	229.606.016	27	26,09	34	229.606.016	0	8,91		
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	216.638.000	605.910.000	1	199.260.000	0	0	1	199.260.000	100	65,14	1	198.260.000	0	37,18		
	5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	492.560.000	2.354.585.704	3	1.057.050.000	3	64.000.000	6	1.121.050.000	50	47,61	6	1.121.050.000	0	180,66		

	5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Persentase Realisasi Barang Milik Daerah SKPD yang diadakan**	**%**	**80**	**18.408.588.000**	**194.357.600**	**20**	**0**	**20**	**0**	**40**	**0**	**50**		**40**	**0**	**50**			
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	15.206.740.000		0		0		0		0		0		0			
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	96	3.201.848.000	194.357.600	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
	5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah persentase jasa penunjang kantor yang disediakan**	**%**	**80**	**1.520.632.000**	**1.643.292.240**	**20**	**147.073.594**	**20**	**154.657.839**	**40**	**301.731.433**	**50**	**18,36**	**40**	**301.731.433**	**50**	**9,82**		
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	18.000.000	2.800.000	3	0	3	0	6	0	50		6	0	0			
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	231.172.000	612.152.640	3	41.879.194	3	66.366.239	6	108.245.433	50	17,68	6	108.245.433	0	14,37		
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.271.460.000	1.028.339.600	3	105.194.400	3	88.291.600	6	193.486.000	50	18,82	6	193.486.000	0	8,41		
	5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang dipelihara**	**%**	**80**	**1.236.219.000**	**1.091.278.000**	**20**	**39.116.950**	**20**	**176.071.600**	**40**	**215.188.550**	**50**	**19,72**	**40**	**215.188.550**	**50**	**9,46**		
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	44.380.000	43.130.000	0	6.822.000	0	3.801.600	0	10.623.600	0	24,63	0	10.623.600	0	11,96		
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	53	171.240.000	577.008.000	7	32.294.950	26	16.170.000	33	48.464.950	62	8,40	33	48.464.950	0	6,10		
	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	168	13.440.000	13.440.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	135	43.450.000	117.700.000	0	0	0	6.100.000	0	6.100.000	0	5,18	0	6.100.000	0	3,77		
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	921.589.000	340.000.000	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	100	44,12	1	150.000.000	0	13,40		
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	42.120.000		0		0		0		0		0		0			
	5	**02**	**01**			**RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)**												**46,30**	**41,54**			**46,30**	**19,88**		
	5	**02**	**01**			**PREDIKAT KINERJA**												**SANGAT**	**SANGAT**			**SANGAT**	**SANGAT**		
	5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Ketepatan Waktu Penetapan Waktu**	**% WTP Tepat Waktu**	**100 100**	**56.829.194.140**	**52.421.736.640**	**0**	**2.069.933.434**	**# # #**	**819.669.109**	**100**	**2.889.602.543**	**100**	**5,51**	**100**	**2.889.602.543**	**100**	**3,89**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan**	
	5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun**	**perda**	**2**	**8.174.751.540**	**5.915.294.040**	**0**	**319.949.522**	**0**	**339.035.118**	**0**	**658.984.640**	**0**	**11,14**	**0**	**658.984.640**	**0**	**5,48**		
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	606.129.600	344.129.600	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	621.918.000	263.918.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	51	135.323.000	45.323.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	51	131.994.500	41.994.500	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	51	96.458.000	51.458.000	51	0	0	0	51	0	100		51	0	0			

	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	31	92.135.000	92.135.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0									
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	1.094.972.400	1.094.972.400	0	97.019.910	0	71.135.718	0	118.155.840	0	11,04	0	118.155.840	0	7,30									
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	1	968.337.680	882.337.680	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0									
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Belanja Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Belanja Anggaran	Dokumen	9	1.021.235.520	606.185.520	0	0	0	25.447.500	0	25.447.500	0	4,20	0	25.447.500	0	2,80									
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	12	3.583.333.360	2.011.393.360	3	182.928.600	3	331.154.400	8	454.124.000	50	12,67	8	454.124.000	0	11,36									
	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	1	118.688.000	71.688.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0									
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	2.035	734.575.900	470.218.690	250	0	0	91.257.500	250	91.257.500	14,35	10,90	250	91.257.500	0	9,58									
	5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Jumlah Persentase SP2D yang diterbitkan**	**%**	**100**	**2.903.014.000**	**2.013.014.000**	**25**	**385.654.599**	**25**	**60.827.700**	**50**	**356.462.409**	**50**	**17,65**	**50**	**356.462.409**	**50**	**7,52**									
	5	02	02	2.02	0003	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	13	1.210.943.600	1.190.944.600	3	153.678.909	4	60.827.700	6	214.506.809	50	18,01	6	214.506.809	0	10,13									
	5	02	02	2.02	0003	Penyusunan, Pelaksanaan Penyesuaian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengestakan dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	12	313.615.000	137.525.000	3	0	3	0	4	0	50		4	0	0									
	5	02	02	2.02	0004	Pelaksanaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	2			0		0		0		0		0		0									
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	13	868.574.200	299.774.200	3	108.600.000	3	0	6	108.600.000	50	36,23	6	108.600.000	0	13,84									
	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan Bukan Bank	Dokumen	2			0		0		0		0		0		0									
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Penunjukan/ Pemotongan dan Penyetoran Pemotongan Pihak Ketiga (PPK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Penunjukan/Pemotongan dan Penyetoran Pemotongan Pihak Ketiga (PPK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemotongan/Pemotongan dan Penyetoran Pemotongan Pihak Ketiga (PPK)	Laporan	12	349.155.200	48.555.200	3	0	3	0	6	0	50		6	0	0									
	5	02	02	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Pinjaman dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Pemanfaatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Pinjaman dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Pemanfaatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	2	11.158.000	11.158.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0									
	5	02	02	2.03	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12	109.268.200	59.268.200	3	0	3	0	6	0	50		6	0	0									
	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pertanggungjawaban Bendahara	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pertanggungjawaban Bendahara	Dokumen	1			0		0		0		0		0		0									
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	453	613.938.800	294.239.800	121	33.178.200	0	0	121	33.178.000	26,71	11,44	121	33.178.000	0,0	3,86									
	5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dikoordinasikan dan disusun**	**dokumen**	**3**	**3.219.671.000**	**2.706.671.000**	**0**	**1.338.075.003**	**1**	**418.806.291**	**1**	**1.757.885.294**	**33,33**	**64,95**	**1**	**1.757.885.294**	**33,33**	**21,37**									
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah dan Pengelolaan Kas Daerah	Laporan	12	314.380.000	80.380.000	3	0	3	50.706.078	6	50.706.078	50	16,13	6	50.706.078	0	12,64									
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban	Dokumen	54	215.718.300	215.718.000	51	21.341.000	51	21.171.500	102	45.702.500	100	17,77	102	45.702.500	0	10,20									
	5	02	02	2.04	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	51	53.570.000	13.570.000	51	0	51	0	102	0	100		102	0	0									
	5	02	02	2.05	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	1	171.660.000	137.600.000	1	0	0	90.721.000	1	90.721.000	100	65,92	1	90.721.000	0	27,38									
	5	02	02	2.05	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	3	949.310.000	334.310.000	0	0	2	157.720.000	2	157.720.000	100	47,16	2	157.720.000	0	16,66									

	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	12	551.383.000	437.383.000	3	0	3	18.000.000	6	18.000.000	50	4,11	6	18.000.000	0	1,64		
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	149.250.000	99.250.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	773	1.715.362.000	1.510.362.000	0	1.315.498.003	0	81.447.715	0	1.396.945.718	0	81,81	0	1.396.945.718	0	27,68		
	5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Jumlah kegiatan penunjang urusan yang dilaksanakan**	**kegiatan**	**2**	**40.057.939.000**	**40.007.939.000**	**0**	**116.250.000**	**0**	**0**	**0**	**116.250.000**	**0**	**0,29**	**0**	**116.250.000**	**0**	**0,26**		
	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	2	57.939.000	7.939.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	12	40.000.000.000	40.000.000.000	0	116.250.000	0	0	0	116.250.000	0	0,29	0	116.250.000	0	0,26		
	5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan**	**laporan**	**12**	**2.373.918.600**	**1.776.318.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**			
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	12	1.646.313.600	1.506.313.600	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	300	727.605.000	270.605.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
	5	**02**	**02**			**RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)**												**100**	**5,88**			**100**	**4,13**		
	5	**02**	**02**			**PREDIKAT KINERJA**												**SANGAT TINGGI**	**SANGAT RENDAH**			**SANGAT TINGGI**	**SANGAT RENDAH**		
	5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Barang Milik Daerah Yang Diyakini Kewajarannya Oleh BPK**	**%**	**100**	**8.124.861.600**	**7.221.810.800**	**0**	**731.316.140**	**8**	**162.788.700**	**100**	**894.104.840**	**100**	**12,38**	**100**	**894.104.840**	**100,0**	**6,79**	**Badan Pengelolaan**	
	5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi pengelolaan barang milik daerah**	**dokumen**	**10**	**8.124.861.600**	**7.221.810.800**	**5**	**731.316.140**	**4**	**162.788.700**	**8**	**894.104.840**	**10**	**12,38**	**8**	**894.104.840**	**10,84**	**6,79**		
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	97.332.000	97.332.000	0	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12,33	0	12.000.000	0	8,26		
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	65.260.000	65.260.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	48.120.000	48.120.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1.251.258.000	1.125.258.000	0	40.370.340	1	101.670.000	1	142.040.340	50	12,62	1	142.040.340	0	6,26		
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1	393.640.000	393.640.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	81.260.000	81.260.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	12	3.018.643.600	3.038.492.900	3	40.645.800	3	37.718.700	6	78.364.500	50	2,58	6	78.364.500	0	1,68		
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	4	577.640.000	557.640.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1	87.020.000	87.020.000	1	0	0	0	1	0	100		1	0	0			
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	1.452	1.904.688.000	1.192.788.000	1.400	660.300.000	0	11.400.000	1.400	661.700.000	96,47	55,48	1.400	661.700.000	0	19,54		
	5	**02**	**03**			**RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)**												**100**	**21,88**			**100**	**11,72**		
	5	**02**	**03**			**PREDIKAT KINERJA**												**SANGAT TINGGI**	**SANGAT RENDAH**			**SANGAT TINGGI**	**SANGAT RENDAH**		
						RATA-RATA CAPAIAN KINERJA OPD (%)												**43,30**	**16,75**						
						PREDIKAT KINERJA OPD												**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**						

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun 2025, total belanja yang dikelola adalah Rp 91.467.777.659,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.15.321.958.168 atau 16,75% dengan kategori sangat rendah dan realisasi kinerja sebesar 45% atau termasuk kategori tinggi, yang terdiri dari 3 (tiga) program antara lain:

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 8 (delapan) kegiatan. Total Anggaran pada Program ini sebesar Rp.31.824.230.219 dengan realisasi anggaran pada triwulan I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.11.538.254.597 atau 36,26% dengan kategori sedang. Adapun capaian kinerja triwulan II dari indikator Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik sebesar 44,44% atau termasuk kategori tinggi dari target kinerja 90%. Capaian kinerja indikator Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebesar 50% atau termasuk kategori sangat tinggi dari target kinerja 100%. Capaian kinerja persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas sebesar 44,44% atau termasuk kategori tinggi dari target kinerja 90%. Adapun faktor pendorongnya adalah anggaran kas sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. Faktor Penghambatnya adalah adanya perubahan pengadaan barang jasa dari versi 5 ke versi 6 yang selanjutnya menggunakan Mbizmarket dan terlambatnya dokumen pencairan dibuat apabila kegiatan telah dilaksanakan. Tindak lanjutnya adalah segera melakukan penyesuaian pada sistem pengadaan barang jasa, segera mempersiapkan dokumen pencairan apabila kegiatan telah dilaksanakan serta memantau pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan terdiri dari 5 (lima) kegiatan. Total anggaran pada program ini sebesar Rp.52.421.736.640 dengan realisasi anggaran pada triwulan II Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.2.889.602.543 atau 5,51% dengan kategori sangat rendah. Capaian kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan sebesar 100% atau termasuk kategori sangat tinggi dari target kinerja 100%. Capaian kinerja Ketepatan Waktu Penetapan APBD sebesar 0% atau termasuk kategori sangat rendah dari target kinerja 100%. Adapun faktor pendorongnya adalah adanya dukungan dan komitmen pimpinan dan staf untuk melaksanakan kegiatan serta adanya dukungan sistem aplikasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Faktor penghambatnya adalah keterlambatan SKPD dalam menyampaikan dokumen penganggaran dan penatausahaan serta laporan keuangannya dan kurangnya pemahaman pengelola keuangan di SKPD dalam menyusun dokumen penganggaran, penatausahaan dan laporan keuangan serta adanya perubahan kebijakan/regulasi dari Pemerintah Pusat untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga ada beberapa kagiatan yang tidak dapat dilaksanakan serta kebijakan/regulasi yang berubah. Tindak lanjutnya adalah selalu melakukan koordinasi dengan para pengelola keuangan di SKPD, melaksanakan bimbingan kepada pengelola keuangan di SKPD, segera melakukan penyesuain terhadap kebijakan/regulasi yang berubah serta memantau pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 (satu) kegiatan. Total anggaran pada program ini sebesar Rp.7.221.810.800 dengan realisasi anggaran pada triwulan II Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.894.104.840 atau 12,38% dengan kategori sangat rendah. Capaian kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang diyakini Kewajarannya oleh BPK sebesar 100% atau termasuk kategori sangat tinggi dari target kinerja 97%. Adapun faktor pendorongnya adalah Sumber Daya Manusia pengelola barang yang telah memahami tugas dan fungsinya seta adanya perhatian dari pimpinan yang menekankan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan. Faktor penghambatnya adalah kegiatan sementara dilaksanakan dan tidak ada faktor penghambat yang berarti. Tindak lanjutnya adalah tetap melakukan koordinasi serta upaya percepatan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah dibuat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sesuai dengan tabel berikut :

Tabel TC-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Keuangan		✔	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Berdasarkan Renstra BPKAD 2021-2026
2	Ketepatan Waktu Penetapan APBD		✔	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	IKU Berdasarkan Renstra BPKAD 2021-2026
3	Persentase Barang Milik Daerah yang diyakini kewajarannya oleh BPK		✔	97%	97%	98%	100%	97%	97%	98%	100%	IKU Berdasarkan Renstra BPKAD 2021-2026

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan perma, maka dapat ditentukan beberapa isu-isu penting :

1. Faktor Internal :

No.	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (weakness)
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang jelas & Komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi	Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur belum sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan unit kerja
2	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi	Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah
3	Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi dan pengembangan kompetensi	Belum maksimalnya penggunaan SOP organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi
4	Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku	Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah
5	Sinkronisasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan BMD serta perencanaan	Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen/arsip

2. Faktor Eksternal :

No.	Peluang (Oppurtunities)	Ancaman / Tantangan (Threats)
1	Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah;	Dinamisnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
2	Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik	Adanya perbedaan persepsi atau interpretasi kebijakan pengelolaan keuangan dan BMD antara pengawas dan pemeriksa dengan pengelola
3	Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh PD dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset/barang daerah	Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta mempertahankan Opini WTP
4	Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif	Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin melek teknologi informasi menuntut kecepatan, ketepatan dan kepraktisan pelayanan publik
5	Lembaga/Instansi non Pemerintah giat menyelenggaraan diklat dan pendidikan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan aset yang handal	Adanya mutasi atau perpindahan jabatan para pengelola keuangan dan barang milik daerah SKPD

Analisis SWOT yang dilakukan diharapkan dapat mendukung penyusunan Renstra BPKAD Kota Makassar. Analisis SWOT akan menghasilkan informasi faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan organisasi sehingga dapat digunakan sebgai dasar dalam mengambil serangkaian keputusan strategis antara lain: tujuan, sasaran dan strategi yang tepat dilakukan dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tabel Analisis Swot

Faktor Eksternal / **Faktor Internal**	**Peluang (O) :**	**Tantangan (T):**
	1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah; 2. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik 3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh PD dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset/barang daerah 4. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif 5. Lembaga/Instansi non Pemerintah giat menyelenggaraan diklat dan pendidikan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan aset yang handal	1. Dinamisnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan barang milik daerah 2. Adanya perbedaan persepsi atau interpretasi kebijakan pengelolaan keuangan dan BMD antara pengawas dan pemeriksa dengan pengelola 3. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta mempertahankan Opini WTP 4. Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin melek teknologi informasi menuntut kecepatan, ketepatan dan kepraktisan pelayanan public 5. Adanya mutasi atau perpindahan jabatan para pengelola keuangan dan barang milik daerah
Kekuatan (S)	**Alternatif Strategi (S-O):**	**Alternatif Strategi (S-T):**
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang jelas 2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi 3. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi dan pengembangan kompetensi 4. Adanya sistem dan prosetur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Sinkronisasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan BMD serta perencanaan	1. Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah dengan memperbatikan asas keadilan, kepatuhan, dan bermanfaat untuk masyarakat;	1. Peningkatan kualitas penganggaran belanja dan pendapatan daerah secara tertib, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab; 2. Mendorong SDM aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan 3. Peningkatkan pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi yang modern 4. Perlu adanya pelatihan bagi para perencana dalam memahami peraturan-peraturan terkait perencanaan
Kelemahan (W):	**Alternatif Strategi (W-O):**	**Alternatif Strategi (W-T):**
1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur belum sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan unit kerja 2. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah 3. Belum maksimalnya penggunaan SOP organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi 4. Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah 5. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen/arsip	1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan pengelolaan APBD 2. Peningkatan Akuntabilitas keuangan dan barang milik daerah; 3. Peningkatan Koordinasi baik instansi vertikal maupun horizontal 4. Pengembangan sistem pengeloaan barang milik daerah yang terintegrasi; 5. Melakukan kerjasama dengan penyedia untuk layananan penyimpanan arsip maupun gudang BMD.	1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta SDM yang memadai 2. Peningkatan Kualitas Dokumen perencanaan dan pelaporan 3. Penguatan agenda reformasi birokrasi, dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Berdasarkan analisa diatas, maka dapat ditentukan beberapa isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang harus ditindaklanjuti oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar yaitu :

1. Penetapan Perda APBD Kota Makassar yang beresiko terlambat, serta Perda APBD Perubahan yang tidak mencapai kesepakatan.

2. Upaya untuk meraih dan mempertahankan Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3. Peningkatan koordinasi dan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP, termasuk didalamnya penyelesaian atas temuan kerugian daerah, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kota Makassar.

4. Pengelolaan aset dan barang milik daerah Pemerintah Kota Makassar yang belum sepenuhnya terintegritas dan terinventarisasi, serta perlunya perhatian seluruh OPD dalam merencanakan, mengusulkan dan melaporkan data barang milik daerah serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap barang-barang yang dikuasainya.

5. Terbitnya Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang batasan alokasi anggaran belanja pegawai. Proporsi belanja pegawai pemerintah Kota Makassar cenderung melebihi 30 persen dari total belanja APBD. Jika melihat angka rata-rata nasional berada pada kisaran sebesar 37,4 persen pada tahun 2022. Komponen Belanja pegawai pada pemerintah daerah sendiri meliputi : belanja gaji dan tunjangan ASN, termasuk juga belanja pegawai untuk kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPR. Berdasar data dari Ditjen Perimbangan Keuangan, pada tahun 2022, sebagian besar dana transfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), digunakan untuk belanja pegawai dengan range antara 30% - 65%. Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian besar Pemda masih tergantung dari Dana Transfer untuk membayarkan biaya operasionalnya. Besarnya persentase belanja pegawai dalam APBD membuat celah fiskal daerah semakin sempit.

6. Terbitnya Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang batasan alokasi anggaran infrastruktur layanan publik. Proporsi belanja infrastruktur pelayanan publik cenderung menurun dari angka ideal 40 % dari total APBD. Secara nasional persentase belanja infrastruktur sangat Dengan menggunakan penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik berdasarkan KMK Nomor 11 Tahun 2024 pada APBD murni, diperoleh data rata-rata pemenuhan belanja wajib infrastruktur pelayanan publik pada tahun 2022 – 2024 sebagai berikut:

   Tahun 2022 : 25% (rata-rata dari 542 daerah)

   Tahun 2023 : 28,6% (rata-rata dari 542 daerah)

   Tahun 2024 : 33,9% (rata-rata dari 546 daerah)

7. Jumlah SiLPA yang besar mengindikasikan belum optimalnya penggunaan instrumen APBD untuk meningkatkan perekonomian daerah dan memberikan layanan publik yang lebih baik. Meskipun belum ada persentase pasti berapa nilai SiLPA yang ideal yang dapat disimpan sebagai bentuk motif berjaga-jaga yang diatur dalam regulasi, termasuk untuk mengatasi persoalan kebutuhan kas di awal tahun anggaran. Namun, akumulasi SiLPA yang tinggi dapat menimbulkan opportunity cost meskipun disimpan dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Jumlah simpanan yang cukup tinggi sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah, pembangunan infrastruktur yang diproyeksikan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Idealnya, SiLPA di akhir tahun anggaran setidaknya bernilai nol karena nilai SiLPA dihasilkan dari penjumlahan surplus/defisit selisih pendapatan dan belanja pemerintah dengan pembiayaan netto. Jika terjadi defisit anggaran maka entitas yang bersangkutan akan melakukan pembiayaan

untuk menutupi kekurangan. Dalam kejadian ini, nilai SiLPA positif apalagi dengan nilai cukup besar dapat dianggap sebagai ketidakefisienan dalam menarik pembiayaan. Inefisiensi penarikan pembiayaan selanjutnya membawa dampak pada tingginya biaya yang harus ditanggung di penganggaran tahun berikutnya.

8. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Makassar belum terintegrasi dan terinventarisasi dengan baik. Diperlukan perhatian seluruh OPD dalam perencanaan, penatausahaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi seluruh Barang Milik Daerah yang menjadi tanggungjawab kewenangannya. Disisi lain ketiadaan bangunan gudang barang milik daerah dan tenaga penilai menjadi factor belum efektifnya pemanfaatan dan pengamamanan Barang milik daerah.

9. Belum optimalnya pelayanan administrasi Perkantoran, penyediaan dokumen perencanaan, dokumen pelaporan keuangan, sarana prasarana pendukung serta kualitas SDM serta perlu dilakukan optimalisasi dan Modernisasi secara digital pelayanan lingkup BPKAD, melalui peremajaan sarana prasarana perkantoran, peningkatan fasilitas pendukung layanan perkantoran, arsip digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar.

10. Terjadinya Perang Tarif yang dipicu oleh kebijakan perdagangan Presiden Amerika Serikat yang mengenakan tarif bea masuk baru untuk semua negara mitra dagang Amerika "tarif Trump" termasuk dengan Indonesia yang mencapai 32 % yang memberi pengaruh terhadap eksport barang komoditas unggulan Indonesia ke negara Amerika Serikat. Untuk mengantisipasi hal ini Pemerintah telah mengumumkan kebijakan untuk melakukan deregulasi terhadap pajak pengenaan biaya eksport. Kebijakan ini sedikit banyaknya memberi pengaruh terhadap pendapatan negara dari komponen pajak eksport yang boleh jadi juga berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan negara yang akan berimplikasi terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer.

11. Terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang berimplikasi kepada pemotongan belanja transfer ke daerah serta pembatasan belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, study banding, cetak, publikasi, focus Group Discusion serta belanja perjalanan dinas telah memberi dampak pada struktur APBD Kota Makassar sehinngga kedepannya diperlukan penyesuaian pola penganggaran yang lebih efisien dan komprehensi lagi dalam mewujudkan APBD yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

12. Transformasi digital dan kecerdasan AI di era yang semakin cepat dan maju telah menjadi kunci dalam mempercepat transformasi dan reformasi birokrasi di sektor pemerintahan. Dengan kemampuan untuk mengotomatisasi berbagai proses, menganalisis data besar, dan meningkatkan efisiensi layanan publik, teknologi ini menawarkan solusi sekaligus tantangan bagi organisasi pemerintah. Kemampuan AI untuk menganalisis data dalam waktu singkat, mengenali pola, dan mengambil keputusan otomatis mengubah cara kerja dan pengambilan keputusan dalam lingkungan pemerintah. Dalam konteks pelayanan publik, pemanfaatan AI diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam berbagai aspek kedepannya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2025

Adapun perbandingan antara RKPD perubahan Tahun 2025 dengan rancangan awal usulan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel TC-31
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							CATATAN PENTING
KODE		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	KODE		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH							BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
		PELAYAAN UMUM							PELAYAAN UMUM					
		KEUANGAN							KEUANGAN					
		UNSUR PENUNJANG							UNSUR PENUNJANG					
		KEUANGAN				96.078.335.159			KEUANGAN				90.055.706.299	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Makassar	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	31.899.430.219			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Makassar	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	32.817.974.059	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%		
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%						Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%		
2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun**	**11 Dokumen**	**223.919.550**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun**	**11 Dokumen**	**161.349.550**	
2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	111.810.550	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	94.443.550	
2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	18.495.000	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	14.998.000	
2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	18.477.000	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	14.977.000	
2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.482.000	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.182.000	
2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.482.000	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.982.000	
2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	34.187.000	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10.187.000	
2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	15.960.000	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	11.580.000	
2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Laporan SPJ yang disusun**	**1 Laporan**	**23.459.391.305**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Laporan SPJ yang disusun**	**1 Laporan**	**23.447.961.305**	
2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	17.884.229.915	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	17.790.229.915	
2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3.691.000.000	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3.649.830.000	
2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	1.686.251.000	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1700 Dokumen	2.124.251.000	
2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	32.247.000	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	8.247.000	
2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	9.095.000	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	9.095.000	
2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	38.280.000	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	38.280.000	
2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	132.128.390	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	132.128.390	

2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun**	**2 Dokumen**	**20.741.000**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun**	**2 Dokumen**	**20.741.000**	
2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	20.741.000	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	20.741.000	
2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Pegawai yang mendapatkan pakaian dinas dan pelatihan**	**55 Orang**	**472.500.000**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Pegawai yang mendapatkan pakaian dinas dan pelatihan**	**55 Orang**	**472.500.000**	
2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	472.500.000	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	55 Orang	472.500.000	
2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Persentase Sarana dan prasarana yang disediakan**	**80%**	**4.738.960.524**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Persentase Sarana dan prasarana yang disediakan**	**80%**	**5.190.742.224**	
2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.860.000	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.860.000	
2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	470.567.900	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	465.567.900	
2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Makassar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	28.900.800	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Makassar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	
2.06	04	Penyediaan bahan logistik Kantor	Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	461.671.100	2.06	04	Penyediaan bahan logistik Kantor	Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	461.671.100	
2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	161.675.000	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	120.243.000	
2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	35.280.000	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	35.280.000	
2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	69.000.000	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	69.000.000	
2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171 Laporan	875.310.000	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171 Laporan	1.206.110.000	
2.06	10	Pelaksanaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	305.910.000	2.06	10	Pelaksanaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	305.910.000	
2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	2.354.582.704	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	2.492.360.224	
2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Persentase Realisasi Barang Milik Daerah SKPD yang diadakan**	**80%**	**194.357.600**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Persentase Realisasi Barang Milik Daerah SKPD yang diadakan**	**80%**	**927.485.100**	
2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	109 Unit	194.357.600	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	130 Unit	927.485.100	
2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Makassar**	**Jumlah persentase jasa penunjang kantor yang disediakan**	**80%**	**1.648.292.260**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Makassar**	**Jumlah persentase jasa penunjang kantor yang disediakan**	**80%**	**1.501.724.680**	
2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.800.000	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.800.000	
2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	812.152.640	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	470.385.280	
2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.028.339.900	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.028.339.600	
2.09		**Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang dipelihara**	**80%**	**1.091.270.000**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang dipelihara**	**80%**	**965.470.000**	
2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.100.000	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.800.000	
2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	112 Unit	577.008.000	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	112 Unit	501.140.000	
2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Makassar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	13.440.000	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Makassar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	160 Unit	13.440.000	
2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135 Unit	117.700.000	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135 Unit	117.700.000	
2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	340.000.000	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	292.310.000	

		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Makassar**	**OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN**	**WTP**	**56.104.154.140**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Makassar**	**OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN**	**WTP**	**51.282.609.440**	
				KETEPATAN WAKTU PENETAPAN APBD	**Tepat Waktu**						**KETEPATAN WAKTU PENETAPAN APBD**	**Tepat Waktu**		
2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun**	**2 Perda**	**7.774.751.540**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun**	**2 Perda**	**5.319.044.040**	
2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Makassar	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	548.129.600	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Makassar	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	284.129.600	
2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	663.918.000	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	203.918.000	
2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Makassar	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	135.323.000	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Makassar	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	97.823.000	
2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	131.984.500	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	34.484.500	
2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Makassar	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	86.458.000	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Makassar	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	43.958.000	
2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	82.125.000	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dokumen	44.625.000	
2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Makassar	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daeran tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	1.078.572.400	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Makassar	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	918.322.400	
2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan KepalaDaerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Makassar	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	908.207.680	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan KepalaDaerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Makassar	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	732.337.680	
2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Makassar	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	869.235.500	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Makassar	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen	486.335.500	
2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dokumen	2.463.393.960	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dokumen	2.012.383.960	
2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	116.488.000	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	41.488.000	
2.02	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2535 Orang	724.775.930	2.02	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1000 Orang	479.218.420	
2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Persentase SP2D yang diterbitkan**	**100%**	**2.805.914.000**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Persentase SP2D yang diterbitkan**	**100%**	**1.645.928.000**	
2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	1.210.943.600	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	900.543.600	
2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 Dokumen	111.525.000	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	800 Dokumen	59.125.000	
2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	680.924.200	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	263.724.200	
2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK)	Makassar	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	148.166.200	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK)	Makassar	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	111.166.200	

2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dokumen	11.158.000	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas,Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dokumen	11.158.000	
2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	109.268.800	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	12.668.200	
2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1436 Orang	614.939.900	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1000 Orang	405.954.500	
2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dikoordinasikan dan disusun**	**3 Dokumen**	**3.229.671.600**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dikoordinasikan dan disusun**	**3 Dokumen**	**2.592.939.600**	
2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	114.380.000	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	90.380.000	
2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	51 Dokumen	115.716.000	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,Pendapatan-LO dan Beban	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	9 Dokumen	115.716.000	
2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Makassar	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	51 Laporan	53.570.000	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Makassar	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	11.270.000	
2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	171.500.000	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	117.100.000	
2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	446.210.000	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang PenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	396.210.000	
2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12 Dokumen	551.380.000	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12 Dokumen	437.380.000	
2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Makassar	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	59.250.000	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Makassar	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	59.250.000	
2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1950 Orang	1.715.562.000	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1950 Orang	1.485.330.000	
2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Makassar**	**Jumlah kegiatan penunjang urusan yang dilaksanakan**	**2 Kegiatan**	**40.057.939.000**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Makassar**	**Jumlah kegiatan penunjang urusan yang dilaksanakan**	**2 Kegiatan**	**40.007.935.000**	
2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2 Laporan	57.939.000	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2 Laporan	7.935.000	
2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	40.000.000.000	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	40.000.000.000	
2.05		**Pengelolaan data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan**	**12 Laporan**	**2.154.918.600**	**2.05**		**Pengelolaan data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan**	**12 Laporan**	**1.716.818.600**	
2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	1.540.313.600	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	1.476.313.600	
2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	833 Orang	614.605.000	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	240.505.000	

		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Makassar	PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG DIYAKINI KEWAJARANYA OLEH BPK	98%	8.074.710.800			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Makassar	PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG DIYAKINI KEWAJARANYA OLEH BPK	98%	5.955.062.800	
2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Administrasi pengelolaan barang milik daerah**	**30 Dokumen**	**8.074.710.800**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Administrasi pengelolaan barang milik daerah**	**30 Dokumen**	**5.955.062.800**	
2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Makassar	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	97.302.000	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Makassar	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	73.032.000	
2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Makassar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	65.260.000	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Makassar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	47.500.000	
2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Makassar	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	48.120.000	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Makassar	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	39.710.000	
2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.197.358.000	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.237.358.000	
2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	977.640.000	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	0 Laporan	0	
2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	81.260.000	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	63.500.000	
2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	3.008.490.800	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	2.830.932.800	
2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	577.640.000	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	477.340.000	
2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	67.020.000	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	60.452.000	
2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2.067 Orang	1.904.688.000	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1500 Orang	1.135.038.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sampai saat ini, usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat dan pemangku kepentingan berasal dari hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai tingkat kota yang ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar melalaui system SIPD.kemendagri.go.id belum ada.

Tabel T-C 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No.	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Pendapatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar yang mengelola pendapatan. Dalam Perubahan Renja BPKAD Kota Makassar tahun 2025 Pendapatan daerah yang dikelola melakukan beberapa penyesuaian dengan beberapa pertimbangan khsususnya kemampuan realisasi pada Triwulan I di tahun 2025. Adapun perubahan pendapatan yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Target Perubahan Pendapatan BPKAD Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	Persen
		Sebelum	Setelah		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.014.556.583.188,00**	**2.810.643.231.532,07**	**(203.913.351.655,93)**	**(6,76)**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**114.274.886.188,00**	**62.834.715.532,07**	**(51.440.170.655,93)**	**(45,01)**
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	51.027.054.575,00	24.368.548.085,07	(26.658.506.489,93)	(52,24)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	63.247.831.613,00	38.466.167.447,00	(24.781.664.166,00)	(39,18)
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.900.281.697.000,00**	**2.747.808.516.000,00**	**(152.473.181.000,00)**	**(5,26)**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.442.281.697.000,00	2.469.808.516.000,00	27.526.819.000,00	1,13
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	458.000.000.000,00	278.000.000.000,00	(180.000.000.000,00)	(39,30)
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**			-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah yang terdiri dari beberapa sumber mengalami penyesuaian. Pendapatan Daerah yang dikelola BPKAD Kota Makassar berkurang senilai Rp.203.913.351.655,93 atau sebesar 6,76% dari tari target perubahan senilai Rp.2.810.643.231.532,07. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkurang senilai Rp.51.440.170.655,93 atau sebesar 45,01% dari target perubahan senilai Rp.62.834.715.532,07. Pendapatan Transfer berkurang senilai Rp.152.473.181.00,00 atau sebesar 5,26% dari target perubahan senilai Rp.2.747.808.516.000,00.

3.2 Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Untuk APBD perubahan Tahun 2025 dilakukan penyesuaian Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) sesuai dengan Perhitungan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Makassar tahun 2024 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Tabel 3.2
Target Perubahan Pembiayaan BPKAD Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN	POKOK TAHUN 2025	PERUBAHAN TAHUN 2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**300.000.000.000,00**	**230.243.575.021,13**	**(69.756.424.978,87)**	**(23,25)**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**300.000.000.000,00**	**230.243.575.021,13**	**(69.756.424.978,87)**	**(23,25)**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	300.000.000.000,00	230.243.575.021,13	(69.756.424.978,87)	(23,25)
6.2	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**0,00**	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	-	-
	JUMLAH PEMBIYAAN NETTO	**300.000.000.000,00**	**230.243.575.021,13**	**(69.756.424.978,87)**	**(23,25)**

Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Makassar Tahun 2025 mencatatakan Penerimaan Pembiayaan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) senilai Rp. 230.243.575.021,13, dan ini juga sekaligus merupakan Pembiyaan Netto untuk Perubahan Pembiayaan Kota Makassar Tahun 2025.

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, yang digunakan untuk menutup defisit atau mengelola surplus dalam anggaran. Pada APBD Perubahan Kota Makassar Tahun 2025, jumlah pembiayaan netto mengalami Penurunan sebesar 23,25%, dari Rp 300.000.000.000,00 pada APBD Pokok menjadi Rp. 230.243.575.021,13 Penurunan ini terutama disebabkan oleh Berkurangnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya (SILPA), yang menurun sebesar Rp 69.756.424.978.87. Tidak ada penerimaan dari sumber lain seperti pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, atau pinjaman daerah, sehingga pembiayaan netto sepenuhnya bergantung pada SILPA. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk penyesuaian anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih hati-hati untuk menjaga keseimbangan fiskal.

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar merencanakan program dan kegiatan pada perubahan tahun 2025 tetap memiliki 2 program utama dan 1 program penunjang.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja BPKAD Tahun 2025 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 3.3
Perubahan Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-11)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**91.410.000.000,00**	**90.078.335.159,00**	**90.088.985.000,00**	**-5.989.350.159,00**								
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**91.410.000.000,00**	**90.078.335.159,00**	**90.088.985.000,00**	**-5.989.350.159,00**								
	5.02	**KEUANGAN**							**91.410.000.000,00**	**90.078.335.159,00**	**90.088.985.000,00**	**-5.989.350.159,00**								
1	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah** **Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**				**100 %** **100 %**	**100 %** **100 %**	**28.836.092.144,00**	**31.899.430.219,00**	**32.817.974.360,00**	**916.544.141,00**							**29.803.444.802,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun* *Persentase capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				13 Dokumen	100 Persen 13 Dokumen	226.024.550,00	223.919.550,00	181.549.550,00	-62.570.000,00			Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		Perangkat Daerah		711.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	121.373.550,00	111.813.550,00	94.443.550,00	-17.370.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				283.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17.805.000,00	18.498.000,00	14.998.000,00	-3.500.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				31.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17.605.000,00	18.477.000,00	14.977.000,00	-3.500.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				29.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17.347.000,00	12.482.000,00	8.183.000,00	-6.300.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				19.950.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	17.347.000,00	12.482.000,00	8.982.000,00	-3.500.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				19.950.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	18.847.000,00	34.197.000,00	10.187.000,00	24.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	17.900.000,00	15.950.000,00	11.580.000,00	-4.400.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				27.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan SPJ yang disusun Persentase capaian administrasi keuangan Perangkat Daerah				1 Laporan	100 Persen 1 Laporan	15.480.968.294,00	23.459.361.306,00	23.447.961.606,00	-11.419.886,00			Memantapkan sistem pertanahan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		Perangkat Daerah		15.894.095.217,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN																							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/Bl dan	84 Orang/Bl dan	16.104.842.694,00	17.084.229.918,00	17.790.230.214,00	-53.899.689,00	Kota Makassar. Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertanahan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				16.775.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	499.442.000,00	3.951.050.000,00	3.349.630.000,00	-341.420.000,00	Kota Makassar. Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertanahan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				582.226.920,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD				5 Dokumen	1100 Dokumen	1.583.958.400,00	1.886.581.000,00	2.124.381.000,00	438.800.000,00	Kota Makassar. Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertanahan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				1.785.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																							
			Jumlah Dokumen koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	9.765.000,00	32.247.000,00	8.247.000,00	-14.950.000,00	Kota Makassar. Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertanahan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				26.350.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																							
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.112.000,00	8.096.000,00	8.096.000,00	0,00	Kota Makassar. Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertanahan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				14.928.417,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan																							
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	34.930.550,00	94.290.000,00	94.290.000,00	0,00	Kota Makassar. Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertanahan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				31.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																							
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	116.089.200,00	132.128.880,00	132.128.880,00	0,00	Kota Makassar. Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertanahan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				147.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100 Persen 2 Laporan	20.741.000,00	20.741.000,00	20.741.000,00	0,00			Memantapkan sistem pertanahan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		Perangkat Daerah		24.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																							
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.741.000,00	20.741.000,00	20.741.000,00	0,00	Kota Makassar. Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertanahan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				24.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pelatihan Diklat dan Pelatihan Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 % 98 Orang	860.000.000,00	472.900.000,00	472.900.000,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Perangkat Daerah		1.093.029.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																						
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				198.450.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																						
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	55 Orang	860.000.000,00	472.500.000,00	472.500.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				194.576.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana yang disediakan Persentase Capaian Administrasi umum Perangkat Daerah				80 %	100 % 80 %	2.736.332.860,00	4.788.980.524,00	5.320.742.224,00	531.761.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Perangkat Daerah		3.560.313.187,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																						
			Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.550.000,00	25.880.000,00	25.880.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				18.081.283,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor																						
			Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	251.489.860,00	470.587.920,00	465.287.920,00	5.280.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				286.880.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0003	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga																						
			Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	0 Paket	28.900.800,00	28.936.800,00	0,00	28.900.800,00	Kota Makassar Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																						
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	2 Paket	434.407.100,00	461.871.100,00	461.871.100,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				570.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.01.2.05.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	154.875.006,00	161.874.(illegible),00	138.243.000,00	32.631.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memerintahkan unsur pertahanan keamanan negara dan mendorong, kemandirian bangsa, melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				218.791.135,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																							
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				17 Dokumen	17 Dokumen	35.280.000,00	35.280.(illegible),00	35.280.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memerintahkan unsur pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				48.510.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kabupaten Temi																							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kabupaten Temi				12 Laporan	12 Laporan	69.000.(illegible),00	69.000.(illegible),00	69.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memerintahkan unsur pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				73.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.00 Laporan	2.25 Laporan	1.150.540.(illegible),00	971.110.(illegible),00	1.345.118.(illegible),00	480.(illegible),00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memerintahkan unsur pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				1.472.(illegible),00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	365.910.000,00	389.910.(illegible),00	205.470.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memerintahkan unsur pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				418.185.780,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																							
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	286.800.(illegible),00	2.(illegible),(illegible),304,00	2.493.(illegible),304,00	132.764.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memerintahkan unsur pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				319.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																							
			Jumlah Pemanfaatan Gedung Barang Milik Daerah SKPD yang dididikan Pemanfaatan Gedung Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				80 %	100 % 80 %	168.337.706,00	164.357.865,00	921.459.190,00	7.817.(illegible),00					Perangkat Daerah		1.828.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002																								
			Jumlah Unit Peralatan Dinas Operasional dan Lapangan yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	5,00	0,00	0,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memerintahkan unsur pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				560.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0003	Pengadaan Mebel																							
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	5,00	0,00	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memerintahkan unsur pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				90 Unit	138 Unit	164.337.(illegible),00	164.357.(illegible),00	927.425.(illegible),00	7.817.(illegible),00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memerintahkan unsur pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				924.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Alat Tetap Lainnya																							
			Jumlah Unit Alat Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memerintahkan unsur pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Alat Tak Berwujud																							
			Jumlah Unit Alat Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memerintahkan unsur pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru				100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																					
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui ekosembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																					
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui ekosembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	340.000.000,00	340.006.300,00	292.310.000,00	-47.690.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui ekosembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui ekosembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui ekosembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
2	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Penerimaan SILPA Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketepatan Waktu Penetapan APBD Opini Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan**				**Tepat Waktu WTP**	**100 % 15 29,69 40,59 91 Tepat Waktu WTP % % % % %**	**58.560.340.256,00**	**58.104.194.192,00**	**51.315.847.848,00**	**-6.788.346.352,00**						**181.340.715.091,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rancana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan Dasarah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Disusun Pemerintah sebelum Koordinasi dan Penyusunan Rancana Anggaran Daerah				2 Perda	100 % 2 Perda	9.692.316.656,00	7.714.751.540,00	5.352.322.440,00	-2.423.429.100,00			Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui ekosembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Perempat Daerah		12.372.780.317,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																					
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	972.196.600,00	548.124.800,00	292.978.000,00	-287.751.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui ekosembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			926.211.121,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																					
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	579.194.000,00	563.918.000,00	179.018.000,00	-384.900.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui ekosembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			916.183.827,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																					
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	51 Dokumen	149.598.000,00	135.323.000,00	32.304.000,00	-103.019.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui ekosembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			156.380.464,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																					
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	51 Dokumen	149.598.100,00	131.694.500,00	32.989.500,00	-98.305.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui ekosembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			156.380.464,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang dipelihara Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				80 %	100 % 80 %	1.068.178.000,00	1.091.278.000,00	965.470.000,00	-125.808.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Perangkat Daerah		1.723.001.398,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.130.000,00	43.139.000,00	40.880.000,00	-2.250.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			49.750.671,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				53 Unit	112 Unit	577.008.000,00	577.008.000,00	501.140.000,00	-75.868.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			253.250.727,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																					
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	168 Unit	13.440.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				135 Unit	135 Unit	94.600.000,00	117.709.000,00	117.700.000,00	-0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			420.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																				
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	51 Dokumen	114.748.100,00	96.458.000,00	42.153.000,00	-54.305.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-			158.380.464,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																				
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	51 Dokumen	116.288.760,00	52.125.000,00	42.820.000,00	-9.305.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-			158.380.464,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																				
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.236.521.200,00	1.078.572.400,00	881.660.400,00	-196.912.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-			1.407.547.729,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																				
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.274.211.496,00	908.337.680,00	695.556.680,00	-212.781.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-			1.551.032.184,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.92.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																				
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				5 Dokumen	5 Dokumen	1.895.018.000,00	955.235.500,00	470.773.500,00	-484.462.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-			2.511.626.090,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	2.537.305.800,00	2.463.393.960,00	1.998.111.960,00	-465.282.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-			2.712.471.481,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	149.052.000,00	116.488.000,00	240.000.000,00	123.512.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-			1.145.857.742,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1100 Orang	1000 Orang	923.644.800,00	724.775.900,00	476.857.400,00	-247.918.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-			1.386.368.317,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Jumlah Persentase SP2D yang diterbitkan Persentase capaian koordinasi dan pengelolaan perbendaharaaan*				100 %	100 %	2.758.864.000,00	2.886.914.000,00	1.845.928.800,00	-1.240.985.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Perangkat Daerah		3.699.651.952,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	1.021.278.600,00	1.210.943.600,00	900.543.600,00	-310.400.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			1.116.716.466,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				12 Dokumen	800 Dokumen	220.000.000,00	111.525.000,00	39.125.000,00	-72.400.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			240.125.691,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			29.613.379,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	153.124.200,00	680.924.200,00	263.724.200,00	-417.200.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			51.191.046,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																			
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	12 Laporan	294.355.200,00	148.155.200,00	11.755.200,00	-136.400.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			147.614.726,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				2 Dokumen	2 Dokumen	11.158.000,00	11.158.000,00	11.158.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirianbangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			111.526.345,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penunjuan dan Penolongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																					
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penunjuan dan Penolongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	12 Dokumen	177.868.206,00	109.268.206,00	13.668.206,00	-95.600.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirianbangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			150.165.318,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Pelaporan Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pertanggungjawaban dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																					
			Jumlah Pelaporan Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirianbangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			472.089.981,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				453 Orang	1100 Orang	891.079.800,00	814.874.800,00	405.954.600,00	-208.985.200,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirianbangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			1.300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah																					
			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Dikoordinasikan dan disusun Pemerintah Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				3 Dokumen	100 % 3 Dokumen	3.322.081.860,00	3.229.671.000,00	2.682.939.000,00	-404.732.000,00			Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirianbangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Perangkat Daerah		3.163.398.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																					
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	12 Laporan	114.380.900,00	114.380.000,00	90.380.000,00	-24.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirianbangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			280.565.453,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																					
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				59 Dokumen	3 Dokumen	95.626.800,00	113.716.000,00	115.716.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirianbangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			190.801.806,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																					
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				51 Laporan	17 Laporan	53.570.000,00	53.570.000,00	11.570.000,00	-42.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirianbangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			105.120.827,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																					
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	171.600.000,00	171.600.000,00	117.100.000,00	-54.500.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan kemanan negara dan mendorong kemandirianbangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			116.163.009,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																					
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	448.210.000,00	448.210.000,00	296.210.000,00	-152.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				736.051.025,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	551.383.000,00	551.383.000,00	437.383.000,00	-114.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				407.705.106,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																					
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	149.250.000,00	59.250.000,00	59.250.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				262.066.794,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																					
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				109.203.513,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				772 Orang	1950 Orang	1.736.082.000,00	1.715.982.000,00	1.465.330.000,00	-250.232.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				750.720.970,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																					
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				25 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan yang dilaksanakan* *Persentase capaian penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah*				2 Kegiatan	100 % 2 Kegiatan	40.057.939.000,00	40.057.939.000,00	40.007.939.000,00	-50.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Perangkat Daerah			177.921.467.665,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																					
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	57.939.000,00	57.939.000,00	7.939.000,00	-50.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				100.429.988,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																					
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	1 Laporan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -				133.101.367.967,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Persentase capaian penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah*				-	100 % 12 Laporan	2.660.138.800,00	2.154.918.600,00	1.716.818.600,00	-438.100.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	Perangkat Daerah		3.888.236.754,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah																						
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-			583.443.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																						
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	1.712.033.800,00	1.540.313.800,00	1.476.313.600,00	-64.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-			2.624.231.805,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				300 Orang	200 Orang	957.105.000,00	814.805.000,00	240.505.000,00	-374.100.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-			680.561.949,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persentase Barang Milik Daerah Yang Diyakini Kewajaranya Oleh BPK**				**98 %**	**4** **98 %** **%**	**7.873.577.600,00**	**8.074.710.800,00**	**5.955.062.800,00**	**-2.119.648.000,00**									**6.211.382.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase capaian pengelolaan barang milik daerah*				83 Dokumen	100 % 83 Dokumen	7.873.577.600,00	8.074.710.800,00	5.955.062.800,00	-2.119.648.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-	Perangkat Daerah		6.211.382.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																						
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				3 Dokumen	2 Dokumen	98.432.000,00	97.332.000,00	73.032.000,00	-24.300.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-			301.375.186,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																						
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	65.500.000,00	65.260.000,00	47.500.000,00	-17.760.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	-			144.169.113,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																										
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	47.190.000,00	48.120.000,00	30.710.000,00	-17.410.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			140.757.707,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.205.838.000,00	1.197.258.000,00	1.237.258.000,00	40.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			377.240.972,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																										
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	0 Laporan	999.040.000,00	977.640.000,00	0,00	-977.640.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																										
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			393.895.682,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																										
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	81.500.000,00	81.260.000,00	63.500.000,00	-17.760.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			272.669.192,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																										
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	3.129.503.800,00	3.036.492.800,00	2.830.232.800,00	-206.260.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			451.007.736,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																										
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	572.726.000,00	577.640.000,00	477.340.000,00	-100.300.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			823.886.806,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																										
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	2 Laporan	87.260.000,00	87.020.000,00	60.452.000,00	-26.568.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			92.085.536,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1482 Orang	1500 Orang	1.585.788.000,00	1.994.688.000,00	1.135.038.000,00	-769.650.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			3.214.294.088,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		JUMLAH							**91.410.000.000,00**	**95.073.335.150,00**	**90.088.985.000,00**	**-5.889.350.150,00**													**193.081.888.803,00**	

Penjelasan :

1. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun 2025 direncanakan berkurang sebesar Rp.5.989.350.159,00 menjadi Rp.90.088.985.000,00.
2. Dari 3 (tiga) program yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, terdapat kenaikan dan penurunan anggaran pada setiap program dengan rincian sebagai berikut :
   - Program penunjang urusan pemerintahan daerah bertambah sebesar Rp.918.544.141,00. Program ini terdiri dari:
     - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berkurang sebesar Rp.62.570.000,00 menjadi Rp.161.349.550,00. Pada Kegiatan ini hampir seluruh Sub Kegiatan dilaksanakan rasionalisasi untuk mengefisiensikan anggaran terkhusus pada belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan karena tahapan kegiatan telah selesai serta belanja honorarium pelakanaaan kegiatan yang tidak bisa untuk dicairkan.
     - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berkurang sebesar Rp.11.419.000,00 menjadi Rp.23.447.961.606,00. Pada Kegiatan dilaksanakan rasionalisasi untuk mengefisiensikan anggaran terkhusus pada belanja honorarium pengelolaan keuangan.
     - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tetap dengan jumlah anggaran sebesar Rp.20.741.000,00.
     - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tetap dengan jumlah anggaran sebesar Rp.472.500.000,00.
     - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah bertambah sebesar Rp.531.781.700,00 menjadi Rp.5.320.742.224,00. Pada Kegiatan ini ada penambahan anggaran pada belanja perjalanan dinas dan belanja jasa konsultansi non kontruksi.
     - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bertambah sebesar Rp.733.127.500,00 menjadi Rp.927.485.100,00. Pada Kegiatan ini terjadi penambahan anggaran pada belanja pengadaan peralatan dan mesin lainnya karena menyesuaikan dengan jumlah pegawai yang bertambah yang belum memiliki komputer.
     - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berkurang sebesar Rp.146.567.360,00 menjadi Rp.1.501.724.880,00 . Pada Kegiatan ini dilakukan rasionalisasi anggaran pada belanja internet.
     - Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berkurang sebesar Rp.125.808.000,00 menjadi Rp.965.470.000,00. Pada Kegiatan ini dilakukan rasionalisasi anggaran pada sub kegiatan pemeliharaan kendaraan operasional dan belanja tukang.

   - Program pengelolaan keuangan daerah berkurang sebesar Rp.4.788.246.300. Program ini terdiri dari:
     - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah berkurang sebesar Rp.2.422.429.100,00. Pada Kegiatan ini seluruh sub kegiatan dilakukan rasionalisasi beberapa belanja khususnya pada belanja honorarium pelaksanaan kegiatan, belanja ATK, belanja perjalanan dinas dan belanja bahan komputer.

- Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah berkurang sebesar Rp.1.240.985.200,00. Pada Kegiatan ini seluruh sub kegiatan dilakukan rasionalisasi beberapa belanja khususnya pada belanja honorarium pelaksanaan kegiatan, belanja perjalanan dinas dan belanja makan minum.
- Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah berkurang sebesar Rp.636.732.000,00. Pada Kegiatan ini seluruh sub kegiatan dilakukan rasionalisasi beberapa belanja khususnya pada belanja honorarium pelaksanaan kegiatan dan belanja perjalanan dinas.
- Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah berkurang sebesar Rp.50.000.000,00. Pada Kegiatan ini terjadi pengurangan pada sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah yaitu belanja perjalanan dinas.
- Kegiatan Pengelolaan data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah Lingkup Keuangan Daerah berkurang sebesar Rp.438.100.000,00. Pada Kegiatan ini seluruh sub kegiatan dilakukan rasionalisasi beberapa belanja khususnya pada belanja honorarium pelaksanaan kegiatan dan belanja perjalanan dinas.

➢ Program Pengelolaan Barang Milik Daerah berkurang sebesar Rp.2.119.648.000,00. Program ini terdiri dari:
- Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah berkurang sebesar Rp.2.119.648.000,00. Pada Kegiatan ini seluruh sub kegiatan dilakukan rasionalisasi beberapa belanja khususnya pada belanja honorarium pelaksanaan kegiatan, belanja perjalanan dinas, belanja bahan komputer, belanja jasa konsultasi non kontruksi, dan belanja perjalanan dinas.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan-Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan dan telah disesuaikan dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar Tahun 2021- 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kota Makassar serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar Tahun 2021-2026 dimana ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan program semester I (Pertama) Rencana Kerja Tahun 2025.

4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kota Makassar Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
2. Menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Renja dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun 2025, maka dapat mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi berupa penambahan dan pengurangan anggaran serta untuk menyelaraskan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Makassar, 12 Agustus 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Drs. Muhammad Dakhlan, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19740925.199311.1.005



PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Dinas Pariwisata



RENCANA KERJA

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dipandang perlu untuk diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, dengan menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana di maksud Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan.:
1. Wakil Wali Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
7.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
9.	Dinas Sosial Kota Makassar
10.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
12.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
13.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Makassar
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
22.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
23.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
24.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
25.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
26.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
27.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
28.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
29.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar

31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
32.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
34.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
35.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
36.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
37.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
38.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
39.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
40.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
43.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
44.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
45.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
46.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
47.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
58.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
49.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
50.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar
51.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

WALIKOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Pariwisata Kota Makassar ini dapat disusun.

Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Pariwisata Kota Makassar ini menggambarkan Rencana Kerja Perubahan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh masing-masing bidang dalam lingkup Dinas Pariwisata Kota Makassar. Selain itu Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini adalah rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2025, yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Kota Makassar.

Demikian Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2025 ini dibuat untuk menjadi bahan sesuai ketentuan perundangan.

Makassar, 12 Agustus 2025
KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA MAKASSAR,

DRS. A. HENDRA HAKAMUDDIN, S.STP, M.PA
Pangkat: Pembina Utama Muda/ IVc
N I P: 19781117 199711 1 001

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA s/d TRIWULAN II	6
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB IV	PENUTUP	75

LAMPIRAN :
Lampiran 1 : Evaluasi Rencana kerja Tahun 2025 s/d Triwulan II

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Perubahan Renja (Perubahan Renja Perangkat Daerah) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kota Makassar, Renstra Perangkat Daerah, serta dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rancangan Akhir RKPD Kota Makassar Tahun 2025 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Perubahan Renja Dinas Pariwisata, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan akhir perubahan RKPD. Renstra Dinas Pariwisata menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal perubahan RKPD Tahun 2025 yang disusun ke dalam rancangan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan baru untuk tercapainya sasaran Renstra Dinas pariwisata berdasarkan pelaksanaan Perubahan Renja tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Perubahan Renja Dinas Pariwisata dapat menjawab berbagai isu- isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata.

Perubahan Renja Tahun 2025 dilaksanakan karena berbagai alasan utama yang mendasarinya diantaranya kebijakan rasionalisasi akibat defisit penerimaan PAD, hasil monitoring dan evaluasi program kegaitan, dan adanya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan renja dilakukan guna pemenuhan visi misi walikota dan menyeduaikan tujuan dan sasaran Renstra 2025 – 2029.

1.2 Landasan Hukum.

1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Thaun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentan g Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11);
5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPN) Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 125);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
13) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
14) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 270);
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 157);
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 630);
22) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 5);
23) Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Pengentasan Kemisikinan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 111);
24) Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 14).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Renja Dinas Pariwisata Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu satu tahun kedepan, dengan maksud untuk;

1. Mengakomodir perubahan yang terjadi dengan asumsi makro perubahan perekonomian nasional dan daerah serta perubahan kebijakan keuangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan aspirasi masyarakat; dan
2. Adanya penyesuaian anggaran melalui penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan/sub kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 adalah ;

1. Sebagai pedoman/tolak ukur dan dokumen dalam menentukan perencanaan yang strategis untuk jangka waktu satu tahun yang akan datang;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Kota Makassar dengan seluruh potensi, kebutuhan dan pemecahan permasalahan yang ada di wilayah Kota Makassar;

3. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah;
4. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun berkenaan;
5. Sebagai pedoman untuk penyusunan KUPA dan Perubahan PPAS.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Kota Makassar disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN. Bab Ini memuat uraian tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI RENJA s/d TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN. Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Triwulan II) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH. Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, dan Program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP. Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA s/d TRIWULAN II

2.1 **Evaluasi Pelaksanaan Renja DISPAR Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025** Pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata tahun 2025 secara umum selaras dengan Renja Dinas Pariwisata Tahun 2025, begitupun pada Perubahan Renja tahun ini. Pada Perubahan Renja ini ada beberapa kegiatan yang mengalami perubahan anggaran baik itu dengan pergeseran anggaran maupun yang mengalami penambahan anggaran. Adapun secara rinci evaluasi perencanaan Renja Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2025
sampai triwulan II diuraikan sebagai berikut:

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Pariwisata sampai triwulan II tahun 2025 dapat diuraikan pada tabel 2.1 dimana Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dapat kita lihat terbagi ke dalam tiga bagian penting yakni;

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Selama tahun 2025, Dinas Pariwisata Kota Makassar melaksanakan 5 program dan 14 kegiatan, terdiri dari 1 program pendukung (7 kegiatan dan 27 sub kegiatan) dan 4 program utama (7 kegiatan dan 18 sub kegiatan). Sampai dengan Triwulan II, Realisasi Kinerja 45,02% kategori **Sangat Rendah** dan Realisasi Keuangan Dinas Pariwisata adalah 28,54% merupakan kategori **Sangat Rendah**. Adapun secara rinci evaluasi program utama dan pendukung sampai triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENDUKUNG

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yakni; a) persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat Peningkatan kapasitas dengan target kinerja 90%, b) Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dengan target Kinerja 100%, dan c) Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik dengan Target

Kinerja 90%,. Total anggaran yang mendukung program ini adalah sebesar Rp. 14.986.861.892. Adapun capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 41%, 50%, dan 41% dengan realisasi anggaran Rp. 5.907.521.383,- atau 39,42% *dengan kategori Rendah.*

Adapun **faktor Pendorong** adalah adanya kerjasama yang baik antar pejabat teknis dan pihak ketiga yang berjalan maksimal serta motivasi dari pimpinan dan segenap staf Dinas Pariwisata, sedangkan **faktor penghambat** adalah proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi dan beberapa permintaan SPD yang belum disetujui oleh BUD. **Tindak lanjut** yang diperlukan dalam triwulan berikutnya adalah semua kegiatan dan sub kegiatan harus terus dioptimalkan dalam upaya pencapaian target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

PROGRAM UTAMA

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Indikator kinerja program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yaitu a) Tingkat Hunian Akomodasi dengan target kinerja 54%, dan b) Jumlah Destinasi yang Berstandar Nasional target kinerja 1 Destinasi. Total anggaran yang mendukung program ini adalah sebesar Rp.6.548.665.714,-. Adapun capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 0% dan 0% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.516.142.656,- atau 23,15% *dengan kategori Sangat Rendah.*

Adapun **faktor Pendorong** adalah Adanya dukungan dari stakeholder kepariwisataan baik pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, sedangkan **faktor penghambat** adalah akurasi data industri pariwisata yang perlu ditingkatkan serta pemahaman masyarakat tentang sadar wisata masih perlu disosialisasikan secara masif. **Tindak lanjut** yang diperlukan ialah dengan memperhatikan percepatan pencairan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan Rencana Aksi dan Anggaran Kas serta menyusun dan mengupdate data industri secara berkesinambungan.

2. Program Pemasaran Pariwisata

Indikator kinerja program Pemasaran Pariwisata yaitu a) Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota Makassar dengan target kinerja 8,5%, b) Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan dengan target kinerja 4,5%. Total anggaran yang mendukung program ini sebesar Rp.5.385.587.400,-. Adapun capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 0% dengan realisasi

anggaran sebesar Rp.1.142.113.741,- atau 21,21%. *dengan kategori Sangat Rendah.*

Adapun **faktor Pendorong** adalah adanya digital tourism menjadi cara efektif dalam melakukan promosi dan pemasaran pariwisata, Co Branding siap membantu meningkatkan angka kunjungan wisatawan melalui kerjasama terpadu dengan pemerintah kota, dan kerjasama yang baik antar pejabat teknis dan pihak ketiga yang berjalan maksimal. sedangkan **faktor penghambat** adalah masih lemahnya dukungan sumber daya manusia yang berkompeten, keterbatasan kegiatan /akses dan proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi, dan adanya pergantian pejabat pengadaan. **Tindak lanjut** yang diperlukan dalam triwulan berikutnya adalah kerjasama dengan brand-brand yang telah menjadi mitra Co Branding Kemenpar, memaksimalkan fungsi TIC (Tourism Information Centre) yang dimiliki, dan kegiatan dimaksimalkan terus dalam upaya pencapaian target kinerja Dinas pariwisata.

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatn dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Indikator kinerja program yakni a) Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi mendapatkan HAKI dengan target 150 orang dan b) PAD Sektor Ekonomi Kreatif dengan target kinerja 17,15%. Total anggaran yang mendukung program ini sebesar Rp.9.923.386.172,-. Adapun capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 0% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.180.085.027,- atau 11,89% *dengan kategori Sangat Rendah.*

Adapun **faktor Pendorong** adalah adanya kerja sama yang baik antar pejabat teknis dan pihak ketiga yang berjalan maksimal, motivasi dari pimpinan dan segenap staf Dinas Pariwisata, sedangkan **faktor penghambat** adalah masih lemahnya dukungan sumber daya manusia yang berkompeten, keterbatasan kegiatan /akses dan proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi. **Tindak lanjut** yang diperlukan dalam triwulan berikutnya adalah adalah semua kegiatan dan sub kegiatan harus terus dioptimalkan dalam upaya pencapaian target kinerja Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Indikator kinerja program yaitu, a) Jumlah peserta pelatihan skill training gratis sektor pariwista target kinerja jumlah peserta 900 orang, b) Persentase SDM Pariwisata yang mendapatkan sertifikasi dengan target kinerja sebesar 6,4% dan c) Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang

mendapat peningkatan kapasitas dengan target kinerja 10 %. Total anggaran yang mendukung program ini sebesar Rp.2.406.545.000,-. Adapun capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 0% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.254.214.120,- atau 10,56% *dengan kategori Sangat Rendah*.

Adapun **faktor Pendorong** adalah adanya kerja sama yang baik antar pejabat teknis dan pihak ketiga yang berjalan maksimal, motivasi dari pimpinan dan segenap staf Dinas Pariwisata, dan tingginya antusias tenaga kerja untuk mengikuti sertifikasi kompetensi tenaga kerja kepariwisataan, sedangkan **faktor penghambat** adalah masih lemahnya dukungan sumber daya manusia yang berkompeten, keterbatasan kegiatan /akses dan proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi. **Tindak lanjut** yang diperlukan dalam triwulan berikutnya adalah adalah semua kegiatan dan sub kegiatan harus terus dioptimalkan dalam upaya pencapaian target kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SATU-AN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
						I		II									
			K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				45.758.153.993	38.186.865.178		3.842.207.298		6.154.461.129		9.996.668.427		26,2		9.996.668.427		4,5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				45.758.153.993	38.186.865.178		3.842.207.298		6.154.461.129		9.996.668.427		26,2		9.996.668.427		4,5
Dinas Pariwisata				45.758.153.993	38.186.865.178		3.842.207.298		6.154.461.129		9.996.668.427		26,2		9.996.668.427		4,5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90,0	20.044.005.779	14.986.861.892	20,50	2.579.017.858	20,50	3.328.503.525	41	5.907.521.383	45,6	39,4	41,0	5.907.521.383	45,6	10,4
	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0			25,0		25,0		50		50,0		50,0		50,0	
	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90,0			20,50		20,50		41		45,6		41,0		45,6	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen	13,0	93.882.800	123.700.000	4,0	25.300.000	1,0	9.093.500	5	34.393.500	38,5	27,8	5,0	34.393.500	7,7	4,7

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,0	26.734.600	67.500.000	1,0	25.300.000	1,0	3.828.500	2	29.128.500	100,0	61,1	2,0	29.128.500	0,0	5,7
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,0	10.460.000	12.000.000	0,0	0	0,0	2.770.000	0	2.770.000	0,0	23,1	0,0	2.770.000	0,0	7,4
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,0	12.100.000	12.000.000	0,0	0	1,0	2.495.000	1	2.495.000	100,0	20,8	1,0	2.495.000	0,0	7,7
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,0	11.098.000	10.000.000	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0		0,0	0	0,0	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,0	10.466.400	10.000.000	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0		0,0	0	0,0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3,0	8.316.800	16.000.000	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0		0,0	0	0,0	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4,0	14.707.000	16.000.000	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0		0,0	0	0,0	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	JumlahDokumen Administrasi Keuangan yang Disusun	Dokumen	18,0	12.738.878.243	11.846.714.292	5,0	2.117.918.577	5,0	2.734.327.017	10	4.852.245.594	55,6	41,0	10,0	4.852.245.594	11,1	13,3

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	61,0	11.939 543 243	11.274 985 292	61,0	1.983 218.577	0,0	2.599.627.017	61	4.582.845.594	100,0	40,7	61,0	4 582.845.594	0,0	13,5
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Doku-men	1,0	690.120.000	385.320.000	0,0	89.700.000	1,0	89.700.000	1	179.400.000	100,0	46,6	1,0	179.400 000	0,0	9,2
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Doku-men	12,0	109.215 000	186.409.000	3,0	45.000.000	3,0	45 000.000	6	90.000.000	50,0	48,3	6,0	90.000.000	0,0	19,2
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Jasa Administrasi Kepegawaian yang Tersedia	Jenis	3,0	792.000 000	165.000 000	1,0	3 000.000	1,0	30.163.300	2	33.163.300	66,7	20,1	2,0	33.163.300	14,3	3,4
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	17,0	792.000.000	165.000.000	1,0	3.000.000	5,0	30.163.300	6	33.163.300	35,3	20,1	6,0	33.163.300	0,0	3,4
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Jasa Administrasi Umum yang Tersedia	Jenis	8,0	1.787.565.736	704.727.600	2,0	59.131.823	2,0	203.549.735	4	262 681.558	50,0	37,3	4,0	262 681.558	10,0	4,7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,0	6.760.000	23.756.000	0,0	0	1,0	10.210.750	1	10.210.750	100,0	43,0	1,0	10.210.750	0,0	13,4
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,0	216.520.336	165.866.000	0,0	0	2,0	35.558.000	2	35 558.000	33,3	21,4	2,0	35.558.000	0,0	4,0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,0	17.304.600	76.650 600	0,0	0	1,0	38.317.000	1	38.317.000	100,0	50,0	1,0	38.317.000	0,0	22,6
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2,0	92.540.800	149.919.000	0,0	10.000.000	1,0	48.027.100	1	58.027.100	50,0	38,7	1,0	58.027.100	0,0	6,0

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1,0	17.280.000	15.600.000	0,0	2.950.000	1,0	3.450.000	1	6.410.000	100,0	41,1	1,0	6.410.000	0,0	10,2
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1,0	69.000.000	59.694.000	0,0	4.600.000	1,0	13.665.000	1	18.265.000	100,0	30,6	1,0	18.265.000	0,0	4,3
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,0	1.368.160.000	180.742.000	3,0	41 581 823	3,0	54.311.885	6	95 893.708	50,0	53,1	6,0	95.893.706	0,0	3,2
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Tersedia**	**Jenis**	**3,0**	**3.201.848.000**		**0,0**		**0,0**		**0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	58,0	3.201.848.000		0,0		0,0		0		0,0		0,0		0,0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia**	**Jenis**	**3,0**	**249.172.000**	**1.577.840.000**	**1,0**	**339.362.608**	**1,0**	**305.667.121**	**2**	**645.029.729**	**66,7**	**40,9**	**2,0**	**645.029.729**	**13,3**	**13,3**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,0	18 000 000	1.205.951.000	3,0	292.728.441	3,0	254.690.282	6	547.418.723	50,0	45,4	6,0	547 418 723	0,0	22,2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3,0	231.172.000	371 688 000	1,0	46 634.167	1,0	50.976 839	2	97.611.006	66,7	26,3	2,0	97.611.006	0,0	9,2
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jenis Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Tersedia**	**Jenis**	**5,0**	**1.180.659.000**	**869.080.000**	**1,0**	**34.304.850**	**1,0**	**45.702.852**	**2**	**80.007.702**	**40,0**	**14,1**	**2,0**	**80.007.702**	**3,0**	**2,7**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,0	44.380.000	45 130 000	0,0	5.359.200	1,0	6.640 500	1	11.999.700	100,0	26,6	1,0	11 999.700	0,0	7,0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24,0	171.240.000	412.290.000	2,0	28.945.650	3,0	24.682.352	5	53 628.002	20,8	13,0	5,0	53.628.002	0,0	5,8
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	81,0	43.450.000	55 610.000	0,0	0	15,0	14 380.000	15	14.380.000	18,5	25,9	15,0	14.380.000	0,0	5,9
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,0	921.589.000	56 050.000	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0		0,0	0	0,0	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												47,0	45,5			47,0	12,0
PREDIKAT KINERJA												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Tingkat Hunian Akomodasi**	%	54,0	7.000.515.714	6.548.650.714	0,0	555.406.593	0,0	560.736.063	0	1.516.142.656	0,0	23,2	0,0	1.516.142.656	0,0	2,4
	Jumlah Destinasi Wisata yang berstandar Nasional	Destinasi	1,0			0,0		0,0		0		0,0		0,0		0,0	
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dibenahi**	DTW	100,0	515.998.794	515.998.794	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0		0,0	0	0,0	
Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen	100,0	515.998.794	515.998.794	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0		0,0	0	0,0	

Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Dibenahi**	**Kawasan**	**1,0**	**2.124.636.240**	**2.124.636.240**	**0,0**	**375.391.393**	**1,0**	**390.504.563**	**1**	**765.895.956**	**100,0**	**36,1**	**1,0**	**765.895.956**	**20,0**	**7,9**
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	1,0	2.124.636.240	2.124.636.240	0,0	375.391.393	1,0	390.504.563	1	765.895.956	100,0	36,1	1,0	765.895.956	0,0	7,9
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah Destinasi yang Dikelolah**	**Destinasi**	**1,0**	**4.298.994.880**	**3.874.644.880**	**0,0**	**280.015.200**	**0,0**	**470.231.500**	**0**	**750.246.700**	**0,0**	**19,4**	**0,0**	**750.246.700**	**0,0**	**1,9**
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	2,0	193.002.000	166.402.000	0,0	0	1,0	60.000.000	1	60.000.000	50,0	36,1	1,0	60.000.000	0,0	2,1
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	1,0	2.967.248.880	2.967.248.880	0,0	280.015.200	0,0	410.231.500	0	690.246.700	0,0	23,3	0,0	690.246.700	0,0	2,3
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	12,0	1.032.950.000	635.200.000	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0		0,0	0	0,0	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	12,0	105.794.000	105.794.000	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0		0,0	0	0,0	
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah TDUP yang Difasilitasi**	**TDUP**	**200,0**	**60.885.800**	**33.385.800**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**		**0,0**	**0**	**0,0**	

Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	Dokumen	12,0	60.885.800	33.385.800	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0		0,0	0	0,0	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												**0,0**	**29,0**			**0,0**	**3,0**

PREDIKAT KINERJA												**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**			**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara**	%	**8,50**	**7.491.387.400**	**5.385.587.400**	**0,0**	**246.567.560**	**0,0**	**895.546.181**	**0**	**1.142.113.741**	**0,0**	**21,2**	**0,0**	**1.142.113.741**	**0,0**	**2,7**
	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara	%	**4,50**			**0,0**		**0,0**		**0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Perkebangsaan**	**Orang**	**1.841.738**	**7.491.387.400**	**5.385.587.400**	**0,0**	**246.567.560**	**0,0**	**895.546.181**	**0**	**1.142.113.741**	**0,0**	**21,2**	**0,0**	**1.142.113.741**	**0,0**	**2,7**
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	3,0	471.193.400	426.293.400	0,0	12.430.000	1,0	14.370.000	1	26.800.000	33,3	6,3	1,0	26.800.000	6,7	1,2
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	10,0	4.737.995.000	2.677.095.000	1,0	155.537.560	1,0	447.976.181	2	603.513.741	20,0	22,5	2,0	603.513.741	0,0	2,4

Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	12,0	2.282.199.000	2.282.199.000	3,0	78.600.000	3,0	433.200.000	6	511.800.000	50,0	22,4	6,0	511.800.000	0,0	3,5
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												**0,0**	**28,6**			**0,0**	**3,5**
PREDIKAT KINERJA												**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**			**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	**PAD Sektor Ekonomi Kreatif**	%	**17,15**	**9.608.881.100**	**9.923.386.172**	**0,0**	**197.696.067**	**0,0**	**985.988.960**	**0**	**1.183.685.027**	**0,0**	**11,9**	**0,0**	**1.183.685.027**	**0,0**	**2,6**
	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Mendapatkan HAKI		**150,0**			**0,0**		**0,0**		**0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	
Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ	**Jumlah kegiatan yang Mendukung Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Kegiatan**	**3,0**	**9.608.881.100**	**9.923.386.172**	**0,0**	**197.696.067**	**1,0**	**985.988.960**	**1**	**1.183.685.027**	**33,3**	**11,9**	**1,0**	**1.183.685.027**	**6,3**	**2,6**
Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	Unit	1,0	95.000.000	808.405.072	0,0	0	1,0	81.500.000	1	81.500.000	100,0	10,1	1,0	81.500.000	0,0	19,4
Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	1,0	9.461.381.100	9.062.481.100	0,0	197.696.067	0,0	904.488.960	0	1.102.185.027	0,0	12,2	0,0	1.102.185.027	0,0	2,4
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	1,0	52.500.000	52.500.000	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0		0,0	0	0,0	

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												**0,0**	**13,3**			**0,0**	**2,8**
PREDIKAT KINERJA												**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**			**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Pariwisata**	**Orang**	**900,0**	**1.613.364.000**	**2.406.545.000**	**0,0**	**163.519.220**	**0,0**	**90.694.900**	**0**	**254.214.120**	**0,0**	**10,6**	**0,0**	**254.214.120**	**0,0**	**1,5**
	Persentase SDM Pariwisata Yang Mendapat Sertifikasi	**%**	**6,40**			**0,0**		**0,0**		**0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	
	Persentase Sdm Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	**%**	**10,0**			**0,0**		**0,0**		**0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Tersedia**	**Kegiatan**	**4,0**	**1.613.364.000**	**1.440.464.000**	**0,0**	**163.519.220**	**1,0**	**83.686.400**	**1**	**247.205.620**	**25,0**	**17,2**	**1,0**	**247.205.620**	**3,1**	**1,5**
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	12,0	459.448.000	459.448.000	3,0	149.000.000	3,0	83.686.400	6	232.686.400	50,0	50,6	6,0	232.686.400	0,0	11,4
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	850,0			0,0		0,0		0		0,0		0,0		0,0	
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	200,0	853.916.000	615.416.000	0,0	14.519.220	0,0	0	0	14.519.220	0,0	2,4	0,0	14.519.220	0,0	0,5

Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	305,0	300.000.000	300.000.000	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0		0,0	0	0,0	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												**0,0**	**11,9**			**0,0**	**1,7**
PREDIKAT KINERJA												**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**			**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA OPD (%)												**28,6**	**25,5**				
PREDIKAT KINERJA OPD												**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**				

Nama Program	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Masih lemahnya dukungan sumber daya manusia yang berkompeten, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi	Adanya digital tourism menjadi cara efektif dalam melakukan promosi dan pemasaran pariwisata	Kerjasama dengan brand yang telah menjadi mitra branding Kemenpar serta memaksimalkan fungsi TIC (Tourism Information Center)
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Masih tertahannya pengajuan SK kegiatan serta proses pencairan dana yang terhambat	Adanya kerjasama yang baik antar pejabat teknis dan pihak ketiga (Stakeholder)	Membuka link peserta dan verifikasi data peserta serta memperhatikan percepatan pencairan anggaran dengan tetap memperhatikan rencana aksi dan anggaran kas
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Proses pencairan yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi serta adanya beberapa permintaan SPD yang ditolak oleh SBU	Adanya kerjasama yang baik antar pejabat teknis dan pihak ketiga yang berjalan maksimal serta motivasi dari pimpinan dan segenap staf Dinas Pariwisata	Memperhatikan percepatan pencairan anggaran dengan tetap memperhatikan rencana aksi anggaran kas, serta mengoptimalkan sub kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja program
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Manajemen waktu pelaksanaan pekerjaan perlu ditinjau ulang, akurasi data indistri pariwisata yang perlu ditingkatkan,	Adanya dukungan dari stakeholder kepariwisataan baik pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan serta kolaborasi tim kerja dinas pariwisata kota makassar	Memperhatikan percepatan pencairan anggaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan rencana aksi dan mengupdate data industri secara berkesinambungan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Birokrasi HAKI yang dianggap sulit oleh pelaku Ekonomi Kreatif, masih lemahnya dukungan sumber daya manusia yang berkompeten	Adanya kerjasama yang baik antar pejabat teknis dan poihak ketiga (Pelaku ekonomi kreatif)	Terus mendorong dan memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif yang mendaftarkan HAKI dan memperhatikan percepatan pencairan anggaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan dari lampiran 1, Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat kita lihat, semua program yang telah direncanakan dalam Renja belum terealisasi dengan maksimal. Secara keseluruhan dari lampiran 1 dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja Dinas Pariwisata Kota Makassar sampai triwulan II tahun 2025 masih terealisasi di bawah rata-rata.

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Berdasarkan fungsi serta kewenangan Dinas Pariwisata Kota Makassar maka indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kota Makassar berdasarkan analis standar kebutuhan pelayanan yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan dari program dan kegiatan adalah;

1. Meningkatnya daya tarik wisata dengan indikator persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dan persentase peningkatan pergerakan wisatawan nusantara;
2. Meningkatnya daya saing wisata dengan indikator lama tinggal wisatawan; dan
3. Meningkatnya pendapatan daerah dengan indikator persentase PAD dari sektor pariwisata.

Dinas Pariwisata Kota Makassar tahun 2025 mengadakan pengukuran capaian kinerja pada kegiatan yang dananya bersumber dari R- APBD. Dengan memperhatikan Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kota Makassar maka pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Makassar

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PERANGKAT DAERAH	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 (TW II)	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan		√	4,96%	6,45%	7,93%	8,43%	27,25%	24.88%	--	8,43%	9,92%	Pencapaian kinerja diukur di akhir periode
2	Lama Tinggal Wisatawan		√	3 Hari	3,25 Hari	3,50 Hari	3,75 Hari	1,6 Hari	1,6 Hari	--	3,75 Hari	4 Hari	Pencapaian kinerja diukur di akhir periode
3	Persentase PAD dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		√	19,70%	19,83%	20,07%	22,11%	25.59%	25.53%	--	22,11%	24,22%	Pencapaian kinerja diukur di akhir periode

Berdasarkan tabel 2.1.T-C.30 dapat dilihat tiga Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata berdasarkan Dokumen Perencanaan yang telah disusun (Renstra Tahun 2021 s/d 2026) yakni;

1. Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan; tahun 2023 target persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan sebesar 6,45% dan terealisasi sebesar 27,25%. Sementara di tahun 2024 target sebesar 6,45% dan realisasi di Triwulan II Tahun 2024 sebesar 0% karena pencapaian kinerja diukur di akhir periode, untuk proyeksi realisasi kinerja tahun 2025 dan 2026 yakni sebesar 8,43% dan 9,92%.
2. Lama tinggal wisatawan; tahun 2023 target lama tinggal wisatawan sebesar 3,25 hari dan terealisasi hanya 1,6 hari, realisasi ini masih sangat rendah dari target yang telah ditentukan mengingat dampak Covid-19 masih berimbas di sektor pariwisata khususnya lama tinggal wisatawan yang mau menetap di kota Makassar. Sementara di tahun 2024 target lama tinggal sebesar 3,50 hari dan terealisasi di Triwulan II Tahun 2024 sebesar 1,74 hari, dan untuk proyeksi realisasi kinerja tahun 2025 dan 2026 yakni sebesar 3,75 hari dan 4 hari.
3. Persentase PAD dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; target persentase PAD dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2023 sebesar 19,83% dan terealisasi sebesar 29,11%, realisasi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (2022) yang hanya sebesar 24,27%. Sementara di tahun 2024 target PAD dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebesar 20,07% dan terealisasi sebesar 31,22% di Triwulan II Tahun 2024, untuk proyeksi realisasi kinerja tahun 2025 dan 2026 yakni sebesar 22,11% dan 24,22%.

2.2 Isu-isu penting penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Makassar sebagaimana dituangkan dalam RKPD tahun 2025, dapat diidentifikasi beberapa isu-isu strategis d alam kaitannya dengan pelaksanaan tupoksi Dinas Pariwisata Kota Makassar.

Dari beberapa isu yang saat ini berkembang, ada beberapa isu strategis yang dianggap prioritas pada penentuan fokus arah kegiatan sektor Pariwisata, yang harus menjadi perhatian Dinas Pariwisata Kota Makassar dalam penentuan strategi dan kebijakan untuk mewujudkan peran pembangunan Pariwisata di wilayah Kota Makassar. Isu strategis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya dampak promosi dan pemasaran pariwisata

Upaya promosi dan pemasaran pariwisata yang dilakukan selama ini terlihat belum berdampak signifikan karena pemanfaatan media promosi yang belum optimal sehingga promosi serta informasi pariwisata yang ingin disampaikan pun tidak dapat dijangkau secara luas oleh para wisatawan. Selain itu pelaksanaan berbagai bentuk kegiatan baik yang berskala lokal, nasional dan internasional yang dilaksanakan tidak diawali dengan perencanaan yang matang sehingga konten yang disajikan kurang menarik, selain itu kegiatan yang dilaksanakan kurang variatif dan beragam sehingga tujuan utama pelaksanaan kegiatan tersebut yakni meningkatkan angka kunjungan wisatawan menjadi sulit terwujud.

2. Rendahnya kualitas dan daya saing destinasi pariwisata dan produk wisata

Kota Makassar memiliki daya tarik wisata yang sangat beragam, baik pantai, pulau, sungai, kuliner, hiburan dan lain sebagainya. Keragaman daya tarik wisata yang ada saat ini tentu membutuhkan sarana dan prasana pendukung dalam pemanfaatannya. Masih rendahnya kualitas aksesibiltas tentu akan mempengaruhi kemampuan wisatawan untuk menjangkau destinasi pariwisata yang ada, selain itu masih terbatasnya sarana akomodasi yang ada pada destinasi menjadi masalah tersendiri yang harus dapat dipecahkan secara bersama, karena ketersediaan sarana dan prasarana pada daya tarik wisata tentu akan mempengaruhi angka kunjungan wisatawan.

3. Masih rendahnya pengembangan ekonomi kreatif

Dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sampai dengan terbentuknya kementerian baru yang mengurusi ekonomi kreatif secara khusus, yaitu Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif telah menjadi sektor baru dalam menggerakkan perekonomian Negara. Dari data yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata bahwa pada periode 2002-2010, eknomi kreatif memberikan kontribusi yang signifikan

2002-2010, eknomi kreatif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, baik dalam nilai tambah atau PDB, penyerapan tenaga kerja, jumlah perusahaan maupun ekspor. Kontribusi rata-rata PDB tahun 2002- 2010 terhadap PDB nasional mencapai 7,74%, tingkat partisipasi tenaga kerja sebesar 7,76%, kontribusi jumlah usaha mencapai 6,77%, kontribusi ekspor mencapai 9,77% dengan kontribusi impor hanya sebesar 1,3%, dan net trade barang sebesar 33,14%. Dengan melihat data tersebut menujukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif menjadi sebuah keniscayaan, data tersebut menjadi sebuah peluang bagi kota Makassar yang memiliki potensi ekonomi kreatif yang menjanjikan sekaligus menjadi sebuah tantangan khususnya bagi Dinas Pariwisata yang baru saja dibentuk agar mampu memberikan interfensi program dan kegiatan yang efektif dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.

4. Belum optimalnya kompetensi dan kapabilitas SDM Pariwisata

Pembangunan kepariwisataan memerlukan peran aktif SDM, baik aparatur, pelaku usaha dan tenaga kerja, maupun masyarakat. Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah bidang pariwisata disebabkan minimnya pengetahuan kepariwisataan dan sering terjadinya perpindahan aparatur. Sedangkan tingkat profesionalisme SDM sangat ditentukan oleh kualitas dari pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan serta tidak jelasnya uraian tugas masing-masing staf membuat pembagian tugas menjadi tidak jelas sehingga pekerjaan masih bertumpuk pada beberapa orang staf saja.

5. Belum optimalnya sinergitas dan kemitraan

Kemitraan dan kerjasama Antara pemerintah pusat dam pemerintah daerah, antar pemerintah, swasta (industri pariwisata) dan masyarakat, sangat diperlukan dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan. Sektor publik atau pemerintah berperan dalam menyediakan infrastruktur dan kerangka regulasi yang dapat mendorong swasta dan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan kepariwisataan.

Dampak lain yang dapat memicu menurunnya angka kunjungan wisatawan mancanegara akibat perang Rusia-Ukraina ini adalah meningkatnya harga tiket yang diakibatkan dari melonjaknya harga minyak dan gas karena terbatasnya produsen dan ekspor dari Rusia sebagai negara produsen dan pengekspor bahan bakar fosil terbesar di dunia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Pariwisata Kota Makassar menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, seperti dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Makassar

No	Misi dan Program Walikota & Walikota Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	**Misi 1 : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan Lapangan Kerja**	1. Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Belum Optimal	Pemilik usaha belum memahami betul tentang pentingnya sertifikasi kompetensi dan manfaat tenaga kerja yang berkompeten	Koordinasi dan sosialisasi lebih luas kepada pemilik usaha agar dapat mendukung program pemerintah dan bersinergi untuk kompentensi tenaga kerja
			Masih minimnya perlindungan HAKI dari setiap produk pelaku ekonomi kreatif	Tersedianya perlindungan hasil kreativitas bagi pelaku ekonomi kreatif
		2. Pemberdayaan Masyarakat yang Masih Belum Optimal	Pemahaman masyarakat tentang pengembangan pariwisata melalui sadar wisata dan sapta pesona masih minim	Pelatihan, sosialisasi, bimtek, dan pendampingan guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan sadar wisata dan sapta pesona
		3. Belum Optimalnya Pemahaman Aparatur terhadap Tugas dan Fungsinya	Masih kurang memadainya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas	Adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya
2	**Misi 4 : Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni Budaya dan Pariwisata**	1. Belum Sinerginya Program Pengelolaan Kepariwisataan antar Sektor yang Terkait	Kurangnya destinasi wisata yang baru	Berkembangnya destinasi digital
				Kerjasama dengan brand-brand yang telah menjadi mitra Co Branding Kemenpar
				Memaksimalkan fungsi TIC
			Air Connectivity yang kurang	Memaksimalkan kerjasama stakeholder terkait untuk membuka rute perjalanan yang baru
		2. Masterplan Daya Tarik Wisata Masih Minim	Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPPARDA) Kota Makassar perlu dikaji ulang	Update data daya tarik wisata sebagai bahan review draft RIPPARDA Kota Makassar

Isu-isu strategis tersebut, jika tidak diantisipasi saat ini akan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Makassar. Untuk mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Makassar, maka Dinas Pariwisata Kota Makassar telah menyiapkan 4 program utama, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata diharapkan dapat mengantisipasi hambatan yang muncul berupa belum optimalnya dampak promosi dan pemasaran pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata diharapkan dapat mengantisipasi adanya tantangan/hambatan berupa belum tersedianya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) dengan melaksanakan kegiatan berupa Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Makassar dan diharapkan program ini dapat menyelesaikan isu terhadap rendahnya kualitas dan daya saing destinasi pariwisata.
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat mengantisipasi hambatan berupa masih rendahnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.
4. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan adanya hambatan yang muncul berupa masih kurang memadainya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 ditetapkan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022, 2023 dan 2024 serta capaian kinerja dalam RPJMD Kota Makassar 2021-2026, Peraturan Daerah Kota Makasssar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2025- 2045.

Penyusunan RKPD Kota Makassar tahun 2025 juga berpedoman pada Permendagri No 90 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Permendagri 100 tentang penerapan SPM dan serta mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2024. Sedangkan untuk sistematika dan tata cara penyusunan RKPD Kota Makassar Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Arah kebijakan pembangunan sebagai urusan perencanaan daerah di Kota Makassar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 s/d 2045 dan RPJMD Kota Makassar Tahun 2025 s/d 2029. Berdasarkan, Visi Kota Makassar 2025 s/d 2029 adalah: " **Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan**" sehingga untuk menjamin konsistensi serta kesinambungan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang menjadi arahan RPJMD untuk periode 2025-2029.

Berdasarkan tabel 2.2 Arah kebijakan ekonomi Kota Makassar pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2025 s/d 2029 yang diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Makassar, maka Dinas pariwisata memiliki posisi di;
Misi 4 yakni *"Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni Budaya, dan Pariwisata"* **Tujuan 4.2** *Meningkatnya Daya Saing Pariwisata pada* **Sasaran 4.2.1** *Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kunjungan Wisatawan* dan **Sasaran 4.2.3** *Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Ekonomi Kreatif.*

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD. Review Rancangan awal RKPD dapat disajikan pada Tabel 2.3.T-C.31 berikut

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal
RKPD Tahun 2025 Kota Makassar

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata

Lembar ... dari .....

No (Kode)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Makassar	*1. Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik*	90%	15.220.971.892	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Makassar	*1. Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik*	90%	14.764.282.354	
			2. Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%				*2. Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah*	100%		
			3. Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90%				*3. Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas*	90%		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun*	13	143.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun*	13	123.700.000	

No (Kode)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	67.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	47.700.000	Refocusing anggaran terhadap belanja Paket Meeting dalam Kota
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	12.000.000	
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	12.000.000	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	10.000.000	
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	10.000.000	

No (Kode)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	16.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	16.000.000	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	16.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	16.000.000	
01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Makassar**	***Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun***	**18**	**11.846.714.292**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Makassar**	***Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun***	**18**	**11.846.714.354**	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	11.274.985.292	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93	11.274.985.354	
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	385.320.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	385.320.000	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	186.409.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	186.409.000	

No (Kode)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Makassar**	***Jumlah Jasa Adminitrasi Kepegawaian yang Tersedia***	**1**	**217.500.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Makassar**	***Jumlah Jasa Adminitrasi Kepegawaian yang Tersedia***	**1**	**165.000.000**	
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24	217.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24	165.000.000	Refocusing anggaran terhadap belanja Perjalan dinas luar daerah
01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Makassar**	***Jumlah Jasa Administrasi Umum yang Tersedia***	**8**	**866.537.600**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Makassar**	***Jumlah Jasa Administrasi Umum yang Tersedia***	**8**	**713.543.600**	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	23.756.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	23.756.000	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	165.866.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	168.566.000	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Makassar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	76.650.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Makassar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	76.650.600	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik/Kantor	Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	149.919.000	Penyediaan Bahan Logistik/Kantor	Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	138.035.000	

No (Kode)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	32.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	32.500.000	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	15.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	21.600.000	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	59.694.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	59.694.000	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	342.552.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	192.742.000	Refocusing anggaran terhadap belanja Perjalan dinas luar daerah
01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Makassar**	***Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia***	**3**	**1.577.640.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Makassar**	***Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia***	**2**	**1.397.174.400**	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.205.952.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.032.158.400	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	371.688.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	365.016.000	

No (Kode)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Makassar**	***Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Tersedia***	**5**	**569.080.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Makassar**	***Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Tersedia***	**4**	**518.150.000**	
01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	45.130.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	41.630.000	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	412.290.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24	364.860.000	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	81	55.610.000	Pemeliharaan Mebel	Makassar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	81	55.610.000	
01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	56.050.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si	1	56.050.000	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Makassar**	***1. Tingkat Hunian Akomodasi***	**54%**	**4.875.879.474**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Makassar**	***1. Tingkat Hunian Akomodasi***	**54%**	**4.824.115.534**	
			2. Jumlah Destinasi yang Berstandar	**1 Destinasi**				***2. Jumlah Destinasi yang Berstandar***	**1 Destinasi**		

No (Kode)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Nasional					***Nasional***			
02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota**	**Makassar**	***Jumlah Daya Tarik Wisata yan Dibenahi***	**100**	**515.998.794**	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota**	**Makassar**	***Jumlah Daya Tarik Wisata yan Dibenahi***	**1**	**845.444.854**	
02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Makassar	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	100	515.998.794	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1	845.444.854	Penyesuaian kebutuhan anggaran dalam mendukung program strategis Pemerintah Kota Makassar
02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Makassar**	***Jumlah Kawasan strategis pariwisata yang dibenahi***	**1**	**2.124.636.240**	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Makassar**	***Jumlah Kawasan strategis pariwisata yang dibenahi***	**1**	**2.104.783.040**	
02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/Kota	4	2.124.636.240	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/Kota	4	2.104.783.040	Penyesuaian Kebutuhan anggaran terhadap PJLP tenaga kebersihan
02.2.03	**Pengelolaan Destinasi**	**Makassar**	***Jumlah Destinasi yang Dibenahi***	**1**	**4.298.994.880**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata**	**Makassar**	***Jumlah Destinasi yang Dibenahi***	**1**	**3.945.284.880**	

No (Kode)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pariwisata Kabupaten/Kota					**Kabupaten/Kota**					
02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2	193.002.000	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2	166.402.000	Refocusing anggaran terhadap belanja Paket meeting dalam kota
02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1	2.967.248.880	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1	2.967.248.880	
02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12	1.032 950.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6	635.200.000	Refocusing anggaran terhadap belanja Paket meeting dalam kota
02.2.03.10	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12	105.794.000	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12	176.434.000	Penyesuaian kebutuhan anggaran
02.2.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah**	**Makassar**	***Jumlah TDUP yang Difasilitasi***	**200**	**60.885.800**	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah**	**Makassar**	***Jumlah TDUP yang Difasilitasi***	**200**	**33.385.800**	

No (Kode)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kabupaten/Kota					**Kabupaten/Kota**					
02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	12	60.885.800	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	12	33.385.800	Refocusing anggaran terhadap belanja Paket meeting dalam kota
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Makassar**	***1. Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kota Makassar***	**8,5 %**	**6.789.387.400**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Makassar**	***1. Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kota Makassar***	**8,5 %**	**5.478.127.400**	
			2. Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Perkebangsaan	**4,5 %**				***2. Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Perkebangsaan***	**4,5 %**		
03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Makassar**	***Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Perkebangsaan***	**4.879.162**	**6.789.387.400**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Makassar**	***Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Perkebangsaan***	**4.879.162**	**5.478.127.400**	
03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata	2	471.193.400	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata	2	426.293.400	Refocusing anggaran terhadap belanja Paket meeting dalam kota

No (Kode)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri					Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			
03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan luar Negeri	10	4.035.995.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan luar Negeri	10	2.791.595.000	Refocusing anggaran terhadap belanja Perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri
03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	12	2.282.199.000	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	12	2.260.239.000	Penyesuaian Anggaran Belanja
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Makassar**	***1. PAD Sektor Ekonomi Kreatif***	**17,15%**	**9.518.881.100**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Makassar**	***1. PAD Sektor Ekonomi Kreatif***	**17,15%**	**12.818.873.672**	
			2. Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Mendapatkan HAKI	**150**				***2. Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Mendapatkan HAKI***	**150**		
04.2.02	**PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF**	**Makassar**	***Jumlah Kegiatan yang Mendukung Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif***	**10**	**9.518.881.100**	**PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF**	**Makassar**	***Jumlah Kegiatan yang Mendukung Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif***	**3**	**9.209.981.100**	

No (Kode)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
04.2.02.04	Penyediaan Infrastruktur	Makassar	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	1	95.000.000	Penyediaan Infrastruktur	Makassar	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	1	3.603.892.572	Mendukung Program Strategis Pemerintah Kota Makassar
04.2.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1	9.371.381.100	Pengembangan Sistem Pemasaran	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kr eatif	1	9.162.481.100	Refocusing anggaran terhadap belanja paket meeting dalam kota dan belanja Perjalanan dinas
04.2.02.22	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1	52.500.000	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1	52.500.000	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Makassar**	***1. Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Pariwisata***	**900 Orang**	**2.385.997.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Makassar**	***1. Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Pariwisata***	**900 Orang**	**2.246.437.000**	

No (Kode)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2. Persentase SDM Pariwisata yang Mendapatkan Sertifikasi	**6,4%**				***2. Persentase SDM Pariwisata yang Mendapatkan Sertifikasi***	**6,4%**		
			3. Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	**10%**				***3. Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Mendapat Peningkatan Kapasitas***	**10%**		
05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Makassar**	***Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Tersedia***	**6**	**1.285.916.000**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Makassar**	***Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Tersedia***	**4**	**1.116.166.000**	
05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	12	459.448.000	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	12	506.888.000	Penyesuaian Kebutuhan Anggaran Belanja Honorarium Bongkar Pasang Tenda
05.2.01.06	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Makassar	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Masyarakat	150	845.916.000	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Makassar	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Masyarakat	320	594.186.000	Refocusing anggaran terhadap belanja paket meeting dalam kota dan belanja Perjalanan dinas luar daerah dan

No (Kode)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											luar negeri
05.2.01.10	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	200	300.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	200	397.500.000	Penyesuaian kebutuhan anggaran/ harga untuk belanja sertifikasi
05.2.01 11	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi KReatif	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	140.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	124.480.000	Refocusing anggaran terhadap belanja paket meeting dalam kota
05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Makassar**	**Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Ekonomi Kreatif yang Tersedia**	**2**	**1.100.081.000**	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Makasar**	**Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Ekonomi Kreatif yang Tersedia**	2	**1.130.271.000**	
05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50	476.081.000	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	160	506.271.000	Penyesuaian kebutuhan anggaran dalam mendukun program strategis Pemerintah Kota Makassar

No (Kode)	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
05.2.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Makassar	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	50	624.000.000	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang ekonomi Kreatif	Makassar	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	208	624.000.000	
Total					**41.375.201.106**					**42.743.507.000**	

2.1 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kota, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pariwisata maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota diuraikan pada tabel 2.4 berikut;

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2024 & 2025
Kota Makassar

Nama SKPD : Dinas Pariwisata Kota Makassar

NO	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
POKIR					
1	Perancanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jl. Tinumbu Lorong 132 RT 005 RW 003 Kel. Bunga Eja Kec. Bontoala. Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	Diakomodir, Pelaksanaan di tahun 2025
2	Perancanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jl. Yos Sudarso Lorong 152 RT 002 RW 003 Kel. Parang Layang Kec. Bontoala. Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	Diakomodir, Pelaksanaan di tahun 2025
3	Perancanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jl. Bakung 1 RT 02 RW 08 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya, Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	Diakomodir, Pelaksanaan di tahun 2025
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jl. Pinrang 7 RT 04 RW 06 , Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	Diakomodir, Pelaksanaan di tahun 2025

NO	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Keterangan
5	Pengembagan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jl. Jambu No. 35 Perum. Taman Losari Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate. Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Kegiatan	Diakomodir, Pelaksanaan di tahun 2025
6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jl. Somba Opu RT 001 RW 002 Kel. Bulo Gading Kec. Ujung Pandang. Kota Makassar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan	Diakomodir, pelaksanaan di tahun 2024
7	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jl. Monumen Emmy Saelan Lorong 5 RT 003 RW 002 Kelurahan Tidung Kec. Rappocini. Kota Makassar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1 Kegiatan	Diakomodir, pelaksanaan di tahun 2024
ASPIRASI					
No	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Besaran/ Volume**	**Catatan**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kel. Pisang Utara, Kec. Ujung Pandang. Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Angkatan (25 Orang), Anggaran Rp. 8.200.000	Diakomodir, Pelaksanaan di tahun 2025
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kel. Parang Layang, Kec. Bontoala. Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Kegiatan (20 Orang), Anggaran 16.400.000	Diakomodir, Pelaksanaan di tahun 2025
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi	Jl. Landak I No. 21, Kel. Labuang Baji, Kec. Mamajang. Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	1 Angkatan (20 Orang), Anggaran Rp. 8.200.000	Diakomodir, Pelaksanaan di tahun 2025

NO	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Keterangan
	Pariwisata Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota		
4	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jl. Barukang II No.33, Kel. Patingalloang, Kec. Ujung Tanah. Kota Makassar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	2 Angkatan, Anggaran Rp. 16.400.000	Diakomodir, pelaksanaan di tahun 2024
5	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jl. Bandang No. 10 Kec. Bontoala. Kota Makassar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1 Angkatan, Anggaran Rp. 8.200.000	Diakomodir, pelaksanaan di tahun 2024
6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kel. Pisang Utara, Kec. Ujung Pandang. Kota Makassar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	2 Angkatan (50 Orang), Anggaran Rp. 16.400.000	Diakomodir, pelaksanaan di tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.4 dapat diketahui bahwa kegiatan yang diusulkan di Musrenbang tahun 2024 untuk dilaksanakan di tahun 2024 dan 2025 terdiri atas dua kategori yakni berdasarkan Pokir (Reses) dan usulan Masyarakat. Dari kedua kategori tersebut, untuk Pokir (Reses) dan Aspirasi semua usulan dapat diakomodir. Terdapat 2 (dua) usulan pokir dan 3 (tiga) usulan aspirasi yang pelaksanaannya di tahun 2024. Adapun usulan yang dapat diakomodir adalah;

Pokir (Reses) :

1. Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota dengan alamat Jl. Tinumbu Lorong 132 RT 005 RW 003 Kel. Bunga Eja Kec. Bontoala. Kota Makassar (pelaksanaan di tahun 2025).
2. Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota dengan alamat Jl. Yos Sudarso Lorong 152 RT 002 RW 003 Kel. Parang Layang Kec. Bontoala. Kota Makassar (pelaksanaan di tahun 2025).
3. Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota dengan alamat Jl. Bakung 1 RT 02 RW 08 Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya, Kota Makassar (pelaksanaan di tahun 2025).
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan alamat Jl. Pinrang 7 RT 04 RW 06 , Kota Makassar.

5. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan alamat Jl. Jambu No. 35 Perum. Taman Losari Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate. Kota Makassar (pelaksanaan di tahun 2025).
6. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan alamat Jl. Somba Opu RT 001 RW 002 Kel. Bulo Gading Kec. Ujung Pandang. Kota Makassar (pelaksanaan di tahun 2024).
7. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan alamat Jl. Monumen Emmy Saelan Lorong 5 RT 003 RW 002 Kelurahan Tidung Kec. Rappocini. Kota Makassar (pelaksanaan di tahun 2024).

Usulan Masyarakat :

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan alamat Kel. Pisang Utara, Kec. Ujung Pandang. Kota Makassar (pelaksanaan di tahun 2025).
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan alamat Kel. Parang Layang, Kec. Bontoala. Kota Makassar (pelaksanaan di tahun 2025).
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan alamat Jl. Landak I No. 21, Kel. Labuang Baji, Kec. Mamajang. Kota Makassar (pelaksanaan di tahun 2025).
4. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan alamat Jl. Barukang II No.33, Kel. Patingalloang, Kec. Ujung Tanah. Kota Makassar (pelaksanaan di tahun 2024).
5. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan alamat Jl. Bandang No. 10 Kec. Bontoala. Kota Makassar (pelaksanaan di tahun 2024).
6. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dengan alamat Kel. Pisang Utara, Kec. Ujung Pandang. Kota Makassar (pelaksanaan di tahun 2024).

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kota Makassar

Adapun Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja yakni:

a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi di masing-masing bidang dan seksi Dinas Pariwisata Kota Makassar.
b. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi di masing-masing bidang dan seksi Dinas Pariwisata Kota Makassar.
c. Penyelarasan program dan kegiatan dalam mengoptimalkan pencapaian sasaran sesuai visi dan misi dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Makassar.
d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas pagu indikatif Dinas Pariwisata Kota Makassar.

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja-Perubahan) Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2025 sebagai penjabaran dari Rencana Kerja yang telah disempurnakan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 Pemerintah Kota Makassar yang disusun dengan memperhatikan visi, misi dan kondisi strategis lingkup organisasi Pemerintah Kota Makassar.

Program dan kegiatan dijabarkan sesuai arah kebijakan pokok Pemerintah Kota Makassar yang berfokus pada kebijakan pengembangan kawasan, tata ruang dan lingkungan dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Utama

Program Dinas Pariwisata Kota Makassar yang terkait dengan Program Utama terdiri dari :

- **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dilakukan dengan kegiatan indikatif antara lain :**
  1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabuapten/Kota, dengan sub kegiatan :
     - Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
  2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
     - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota
  3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
     - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
     - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
     - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
   - Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota

- **Program Pemasaran Pariwisata dilakukan dengan kegiatan indikatif:**
  1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis pariwisata Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
     - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
     - Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
     - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri

- **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dengan kegiatan indikatif:**
  1. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dengan sub kegiatan :
     - Penyediaan Infrastruktur
     - Pengembangan Sistem Pemasaran
     - Fasilitasi Kekayaan Intelektual

- **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilakukan dengan kegiatan indikatif:**
  1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, dengan sub kegiatan:
     - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
     - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembnagan Kemitraan Pariwisata
     - Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
     - Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
     - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif

B. Program Pendukung

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dilakukan dengan kegiatan indikatif antara lain :**
  1. Penyusunan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
     - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah, dengan sub kegiatan:
   - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah , dengan sub kegiatan :
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Untuk dapat memahami jenis dan pilihan program dan kegiatan yang diajukan untuk ditampung dalam R-APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, maka seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan pada Tabel 3.1 berikut;

Tabel 3.1
Matriks Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Tahun Rencana 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah (+/-)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas			90%	90%					15.220.971.892	14.764.282.354	(456.689.358)	APBD		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	12.087.470.315
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah			100%	100%										Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Tahun Rencana 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah (+/-)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			**90%**	**90%**										**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**90%**	
3.3.26.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**					**13 Dokumen**	**13 Dokumen**	**143.500.000**	**123.700.000**	**(19.800.000)**	**APBD**		**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**13 Dokumen**	**159.360.000**
3.3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen			67.500.000	47.700.000	(19.800.000)	APBD		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	67.500.000
3.3.26.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen			12.000.000	12.000.000	-	APBD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Tahun Rencana 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah (+/-)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.3.26.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen			12.000.000	12.000.000	-	APBD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13.220.000
3.3.26.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen			10.000.000	10.000.000	-	APBD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	18.500.000
3.3.26.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen			10.000.000	10.000.000	-	APBD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Tahun Rencana 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah (+/-)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan			16.000.000	16.000.000	-	APBD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	16.140.000
3.3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan			16.000.000	16.000.000	-	APBD		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	16.000.000
3.3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun**					**18 Dokumen**	**18 Dokumen**	**11.846.714.292**	**11.846.714.354**	**62**	**APBD**		**Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun**	**18 Dokumen**	**8.482.908.115**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Tahun Rencana 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah (+/-)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan				64 Orang	93 Orang			11.274.985.292	11.274.985.354	62	APBD		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	93 Orang	7.854.108.115
3.3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen			385.320.000	385.320.000	-	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	448.800.000
3.3.26.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen			186.409.000	186.409.000	-	APBD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	180.000.000
3.3.26.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Jumlah jenis jasa administrasi kepegawaian yang tersedia**					**2 Jenis**	**1 Jenis**	**217.500.000**	**165.000.000**	**(52.500.000)**	**APBD**		**Jumlah jenis jasa administrasi kepegawaian yang tersedia**	**1 Jenis**	**262.500.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Tahun Rencana 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah (+/-)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.3.26.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan				24 Orang	24 Orang			217.500.000	165.000.000	(52.500.000)	APBD		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	23 Orang	262.500.000
3.3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Jumlah jenis jasa administrasi umum yang tersedia**					**8 Jenis**	**8 Jenis**	**866.537.600**	**713.543.600**	**(152.994.000)**	**APBD**		**Jumlah jenis jasa administrasi umum yang tersedia**	**8 Jenis**	**922.476.200**
3.3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket			23.756.000	23.756.000	-	APBD		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.868.000
3.3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6 Paket	6 Paket			165.866.000	168.566.000	2.700.000	APBD		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Paket	141.161.400

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Tahun Rencana 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah (+/-)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			yang Disediakan													yang Disediakan		
3.3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket			76.650.600	76.650.600	-	APBD		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	47.053.800
3.3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket			149.919.000	138.035.000	(11.884.000)	APBD		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	131.125.000
3.3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket			32.500.000	32.500.000	-	APBD		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.000.000
3.3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				1 Dokumen	1 Dokumen			15.600.000	21.600.000	6.000.000	APBD		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	15.600.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Tahun Rencana 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah (+/-)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			yang Disediakan													yang Disediakan		
3.3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan			59.694.000	59.694.000	-	APBD		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	58.500.000
3.3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan			342.552.000	192.742.000	(149.810.000)	APBD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	465.418.000
3.3.26.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang tersedia**			-	-			-	-	-	**APBD**		**Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang tersedia**	**1 Jenis**	**586.696.000**
3.3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	-			-	-	-	APBD		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	586.696.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Tahun Rencana 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah (+/-)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**					**2 Jenis**	**2 Jenis**	**1.577.640.000**	**1.397.174.400**	**(180.465.600)**	**APBD**		**Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**2 Jenis**	**1.293.012.000**
3.3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan			1.205.952.000	1.032.158.400	(173.793.600)	APBD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.034.460.000
3.3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan			371.688.000	365.016.000	(6.672.000)	APBD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	258.552.000
3.3.26.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Jumlah jenis jasa pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia**					**4 Jenis**	**4 Jenis**	**569.080.000**	**518.150.000**	**(50.930.000)**	**APBD**		**Jumlah jenis jasa pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia**	**4 Jenis**	**380.518.000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Tahun Rencana 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah (+/-)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit			45.130.000	41.630.000	(3.500.000)	APBD		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.130.000
3.3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraaan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangannya ng Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit			412.290.000	364.860.000	(47.430.000)	APBD		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangannya ng Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	24 Unit	229.618.000
3.3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				81 Unit	81 Unit			55.610.000	55.610.000	-	APBD		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	55.610.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Tahun Rencana 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah (+/-)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit			56.050.000	56.050.000	-	APBD		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	50.160.000
3.3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah Destinasi Wisata yang berstandar Nasional**			**1 DTW**	**1 DTW**					**7.000.515.714**	**6.928.898.574**	**(71.617.140)**	**APBD**		**Jumlah Destinasi Wisata yang berstandar Nasional**	**1 DTW**	**10.722.057.000**
		Tingkat Hunian Akomodasi			**54%**	**54%**										**Tingkat Hunian Akomodasi**	**54%**	
3.3.26.02.2.01	**Pengelolaan DayaTarik Wisata Kabupaten/Kota**			**Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dibenahi**					**100 DTW**	**1 DTW**	**515.998.794**	**845.444.854**	**329.446.060**	**APBD**		**Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dibenahi**	**100 DTW**	**515.998.865**
3.3.26.02.2.01.09	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata				1 Dokumen	1 Dokumen			515.998.794	845.444.854	329.446.060	APBD		Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata	1 Dokumen	515.998.865

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Tahun Rencana 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah (+/-)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Unggulan Kabupaten/Kota													Unggulan Kabupaten/ Kota		
3.3.26.02.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**			**Jumlah Kawasan strategis Pariwisata yang dikelola**					**1 Kawasan**	**1 Kawasan**	**2.124.636.240**	**2.104.783.040**	**(19.853.200)**	**APBD**		**Jumlah Kawasan strategis Pariwisata yang dikelola**	**1 Kawasan**	**2.124.539.240**
	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota (Unit)				4 Unit	4 Unit			2.124.636.240	2.104.783.040	(19.853.200)	APBD		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota (Unit)	4 Unit	2.124.539.240
3.3.26.02.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata**			**Jumlah Destinasi yang Dikelolah**					**1 Destinasi**	**1 Destinasi**	**4.298.994.880**	**3.945.284.880**	**(353.710.000)**	**APBD**		**Jumlah Destinasi yang Dikelolah**	**1 Destinasi**	**1.878.994.880**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Tahun Rencana 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah (+/-)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Kabupaten/Kota																	
3.3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen			193.002.000	166.402.000	(26.600.000)	APBD		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	193.002.000
3.3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)				1 Lokasi	1 Lokasi			2.967.248.880	2.967.248.880	-	APBD		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang,Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	1 Lokasi	1.457.248.880

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Tahun Rencana 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah (+/-)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				12 Laporan	1 Laporan			1.032.950.000	635.200.000	(397.750.000)	APBD		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 Laporan	122.950.000
3.3.26.02.2.03.10	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan			105.794.000	176.434.000	70.640.000	APBD		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 Laporan	105.794.000
3.3.26.02.2.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**			**Jumlah TDUP yang difasilitasi**					**200 TDUP**	**200 TDUP**	**60.885.800**	**33.385.800**	**(27.500.000)**	**APBD**		**Jumlah TDUP yang difasilitasi**	**200 TDUP**	**60.885.800**
3.3.26.02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran		Jumlah Dokumen Layanan				12 Dokumen	12 Dokumen			60.885.800	33.385.800	(27.500.000)	APBD		Jumlah Dokumen Layanan	12 Dokumen	60.885.800

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Tahun Rencana 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah (+/-)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota		Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kabupaten/Kota													Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kabupaten/ Kota		
3.3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kota Makassar**			**8,5%**	**8,5%**					**6.789.387.400**	**5.478.127.400**	**(1.311.260.000)**	**APBD**		**Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kota Makassar**	**8,5%**	**4.449.887.400**
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Perkebangsaan			**4,5%**	**4,5%**										**Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Perkebangsaan**	**4,5%**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Tahun Rencana 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah (+/-)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**			**Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Perkebangsaan**					**4.879.162 Orang**	**4.879.162 Orang**	**6.789.387.400**	**5.478.127.400**	**(1.311.260.000**	**APBD**		**Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Perkebangsaan**	**4.879.162**	**4.449.887.400**
3.3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabuapten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen			471.193.400	426.293.400	(44.900.000)	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	538.589.400
3.3.26.03.2.01.06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah KegiatanPemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				10 Kegiatan	10 Kegiatan			4.035.995.000	2.791.595.000	(1.244.400.000)	APBD		Jumlah KegiatanPemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Kegiatan	3.108.830.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Tahun Rencana 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah (+/-)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				12 promosi	12 dokumen			2.282.199.000	2.260.239.000	(21.960.000)	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Promosi	802.468.000
3.3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Mendapatkan HAKI**			**150 Orang**	**150 Orang**					**9.518.881.100**	**12.818.873.672**	**3.299.992.572**	**APBD**		**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Mendapatkan HAKI**	**150 Orang**	**4.608.881.100**
		PAD Sektor Ekonomi Kreatif			**17,15%**	**17,15%**										**PAD Sektor Ekonomi Kreatif**	**17,15%**	
3.3.26.04.2.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**			**Jumlah kegiatan yang mendukung pengembangan ekosistem**					**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**9.518.881.100**	**12.818.873.672**	**3.299.992.572**	**APBD**		**Jumlah kegiatan yang mendukung pengembangan ekosistem**	**3 Kegiatan**	**4.608.881.100**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Tahun Rencana 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah (+/-)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				ekonomi kreatif												**ekonomi kreatif**		
3.3.26.04.2.02.04	Penyediaan Infrastruktur		Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif (Unit)				1 Unit	1 Unit			95.000.000	3.603.892.572	3.508.892.572	APBD		Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif (Unit)	1 Unit	95.000.000
3.3.26.04.2.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen			9.371.381.100	9.162.481.100	(208.900.000)	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	4.461.381.100
3.3.26.04.2.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual		Jumlah Produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi				1 Produk	1 Produk			52.500.000	52.500.000	-	APBD		Jumlah Produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku	1 Produk	52.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Tahun Rencana 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Kaluaran Sub		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	
		Capaian Program	Kaluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah (+/-)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif													Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif		
3.3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Pariwisata			900 Orang	900 Orang					2.845.445.000	2.753.325.000	(92.120.000)	APBD		Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Pariwisata	900 Orang	1.794.642.400
		Persentase Sdm Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			10%	10%										Persentase Sdm Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10%	
		Persentase SDM Pariwisata Yang Mendapat Sertifikasi			6,40%	6,40%										Persentase SDM Pariwisata Yang Mendapat Sertifikasi	6,4%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Tahun Rencana 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah (+/-)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**			**Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar**					**2 Kegiatan**	**4 Kegiatan**	**1.745.364.000**	**1.623.054.000**	**(122.310.000)**	**APBD**		**Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar**	**4 Kegiatan**	**1.070.516.400**
3.3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)				12 Laporan	12 Laporan			459.448.000	506.888.000	47.440.000	APBD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	12 Laporan	385.046.400

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Tahun Rencana 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah (+/-)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.3.26.05.2.01.09	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata		Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				50 Orang	160 Orang			845.916.000	594.186.000	(251.730.000)	APBD		Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	150 Orang	390.280.000
3.3.26.05.2.01.10	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)				50 Orang	208 Orang			300.000.000	397.500.000	97.500.000	APBD		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	500 Orang	261.000.000
3.3.26.05.2.01.11	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi		Jumlah laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan				1 Laporan	1 Laporan			140.000.000	124.480.000	(15.520.000)	APBD		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang	600 Orang	261.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Tahun Rencana 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah (+/-)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Ekonomi Kreatif (laporan)													Pariwisata (Orang)		
3.3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**			**Jumlah kegiatan yang mendukung Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**					**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**1.100.081.000**	**1.130.271.000**	**30.190.000**	**APBD**		**Jumlah kegiatan yang mendukung Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**4 Kegiatan**	**1.070.516.400**
3.3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi KReatif		Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif (Orang)				50 Orang	160 Orang			476.081.000	506.271.000	30.190.000	APBD		Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif (Orang)	12 Laporan	385.046.400

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Tahun Rencana 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah (+/-)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.3.26.05.2.02.07	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif		Jumlah Orang yang difasilitasi sertifikasi kompetensi subsector ekonomi kreatif				50 Orang	208 Orang			624.000.000	624.000.000	-	APBD		Jumlah Orang yang difasilitasi sertifikasi kompetensi subsector ekonomi kreatif	150 Orang	390.280.000
TOTAL											41.375.201.106	42.743.507.000	1.368.305.894					42.058.492.000

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat diketahui bahwa total pagu yang dianggarkan pada Perubahan Renja Tahun 2025 mengalami penambahan sebesar Rp.1.368.305.894,- dari Pagu DPA Pokok tahun 2025 yakni sebesar Rp.41.375.201.106,- sehingga total pagu pada Perubahan Renja tahun 2025 sebesar Rp.42.743.507.000,- yang terdiri atas 4 program utama dan 1 program Penunjang. Program utama terdiri dari 8 kegiatan dengan 19 sub kegiatan dan program penunjang terdiri atas 6 kegiatan dengan 25 sub kegiatan.

Pada program utama dan Penunjang terdapat beberapa kegiatan yang mengalami penambahan dan pengurangan anggaran, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yakni adanya penyesuaian kebutuhan anggaran berdasarkan hasil rasionalisasi sehingga anggaran harus berubah dalam rangka mendukung program strategis pemerintah kota Makassar khususnya terkait Program **Makassar Creative Hub**. Berikut ini beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang membutuhkan penjelasan yakni;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota mengalami pergeseran anggaran terhadap kegiatan/sub kegiatan masing-masing, kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran adalah:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, berkurang sebesar (Rp.19.800.000) dari pagu awal Rp. 67.500.000 berkurang menjadi Rp. 47.700.000. sub kegiatan ini berkurang pada belanja paket meeting dalam daerah;
b. Pendidikan dan Pelatihan Oegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya, berkurang sebesar (Rp. 52.500.000) dari pagu awal sebesar Rp. Rp. 217.500.000 menjadi Rp. 165.000.000. sub kegiatan ini berkurang pada rekening belanja perjalan dinas luar daerah;
c. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, bertambah sebesar Rp. 2.700.000. sub kegiatan ini bertambah pada belanja bahan untuk kegiatan kantor-benda pos;
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, berkurang sebesar (Rp.11.884.000) dari pagu awal sebesar Rp.149.919.000 menjadi Rp.138.035.000. Sub kegiatan ini berkurang pada rekening belanja natura;
e. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, bertambah sebesar Rp. 6.000.000, sub kegiatan ini bertambah pada belanja koran;
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; berkurang sebesar (Rp. 149.810.000), sub kegiatan ini berkurang pada belanja perjalanan dinas luar daerah dan perjalan dinas luar negeri;
g. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, berkurang sebesar (Rp.173.793.600) dari pagu awal sebesar Rp.1.205.952.000 menjadi Rp.1.032.158.400. Sub kegiatan ini berkurang pada rekening belanja jasa tenaga admnistrasi dan iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, dan jaminan kematian bagi Non ASN;
h. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, berkurang sebesar (Rp.6.672.000) dari pagu awal sebesar Rp.371.688.000 menjadi Rp. 365.016.000. sub kegiatan ini berkurang pada rekening belanja tagihan air dan listrik;

i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, berkurang sebesar (Rp. 3.500.000), sub kegiatan ini berkurang pada belanja lain-lain;
j. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, berkurang sebesar (Rp. 47.430.000). sub kegiatan ini berkurang pada belanja lain-lain;
k. Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota, bertambah sebesar Rp.329.446.060 dari pagu awal sebesar Rp.515.998.794 menjadi Rp. 845.444.854. sub kegiatan ini bertambah pada rekening belanja modal bahan-bahan bangunan dan konruksi serta belanja modal bangunan fasilitas umum;
l. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis, berkurang sebesar (Rp.19.853.200) pada belanja jasa teanga administrasi;
m. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, berkurang sebesar (Rp.26.600.000) dari pagu awal sebesar Rp.193.002.000 menjadi Rp. 166.402.000. sub kegiatan ini berkurang pada rekening belanja paket meeting dalam kota;
n. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, berkurang sebesar (Rp. 397.750.000) pada belanja paket meeting dalam kota
o. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, bertambah sebesar Rp. 70.640.000 pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor/souvenir, belanja jasa juri perlombaan, dan belanja hadiah yang bersifat perlombaan;
p. Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota, berkurang sebesar (Rp.27.500.000) pada belanja paket meeting dalam kota;
q. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri, berkurang (Rp.44.900.000) pada belanja paket meeting dalam kota;
r. Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, berkurang sebesar (Rp.1.244.400.000) dari pagu awal sebesar Rp.4.035.995.000 menjadi Rp. 2.791.595.000. sub kegiatan ini berkurang pada rekening belanja makassar direct sale dan perjalanan dinas dalam dan luar negeri;
s. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, berkurang sebesar (Rp.21.960.000) dari pagu awal sebesar Rp2.282.199.000 menjadi Rp. 2.260.239.000. sub kegiatan ini berkurang pada rekening belanja jasa publikasi media;
t. Penyediaan Infrastruktur, bertambah sebesar Rp. 3.508.892.572 pada beberapa rekening belanja seperti belanja modal alat rumah tangga lainnya (Home use) guna mendukung **makassar creative hub;**
u. Pengembangan Sistem Pemasaran, berkurang sebesar (Rp.208.900.000) dari pagu awal sebesar Rp.9.371.381.100 menjadi Rp. 9.162.481.100. sub kegiatan ini berkurang pada rekening belanja home use, penari pemusik, dll;

v. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif, bertambah sebesar Rp.47.440.000 pada belanja jasa tenaga administrasi dan belanja lain-lain;
w. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata, berkurang sebesar (Rp.251.730.000) pada belanja paket meeting dalam kota;
x. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata, bertambah sebesar Rp. 97.500.000 pada rekening belanja sertifikasi;
y. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berkurang sebesar (Rp.15.520.000) pada rekening belanja paket meeting dan perjalan dinas luar daerah;
z. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, bertambah sebesar Rp.30.190.000 dari pagu awal sebesar Rp.476.081.000 menjadi Rp.506.271.000. Sub kegiatan ini bertambah pada rekening belanja sertifikasi dan belanja makan minum rapat.

Total keseluruhan program utama dan penunjang yang mengalami perubahan bertambah sebesar **Rp.1.368.305.894.** Penambahan ini untuk mengakomodir beberapa kegiatan yang terkait dalam pencapaian program strategis Pemerintah Kota Makassar. Terdapat beberapa sub kegiatan juga mengalami pengurangan, hal ini dilakukan guna berdasarkan Instruksi President No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Beberapa rekening yang dilakukan efisiensi yakni belanja paket meeting dalam kota dan luar daerah serta belanja perjalan dinas dalam dan luar daerah serta perjalanan dinas luar negeri.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Pariwisata Kota Makassar merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Rencana kerja Perubahan ini disusun dengan tetap berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan-RKPD) Kota Makassar Tahun 2025.

Rencana kerja ini terkait dengan kebijakan pokok Pemerintah Kota Makassar yang arah kebijakannya berfokus pada sasaran Meningkatnya Kualitas Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan (4.2.1) dan Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Ekonomi Kreatif (4.2.3).

Dengan adanya Penambahan dan Perubahan sub kegiatan pada Renja Dinas Pariwisata Tahun 2025 yang sebagian besar disebabkan karena adanya pencapaian program strategis Pemerintah Kota Makassar, Instruksi President Nomor 1. Tahun 2025, kebijakan rasionalisasi akibat defisit penerimaan PAD, hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan, dan adanya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan ini dilaksanakan guna mengoptimalkan output kegiatan dan outcome program prioritas Pemerintah Kota sehingga penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari tujuan dan sasaran Perangkat Daerah diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan.

Program dan kegiatan indikatif yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 akan dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar oleh karena itu komitmen pimpinan dan segenap staf Dinas Pariwisata Kota Makassar harus didukung oleh segenap aparatur daerah dan legislatif serta dukungan partisipasi masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan Perubahan Rencana Kerja ini.

Perubahan Renja Tahun 2025 ini merupakan pedoman atau aturan yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu kegiatan, program, atau kebijakan selama tahun berkenaan yang memastikan bahwa pelaksanaan dilakukan dengan cara yang konsisten, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Semoga rencana yang ditetapkan dalam perubahan Renja ini dapat dianalisis dan dipertimbangkan penuangannya dalam R-APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 mendatang.

12 Agustus

Makassar, 25 Juli 2025
KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA MAKASSAR,

DRS. A. HENDRA HAKAMUDDIN, S.STP, M.PA
Pangkat: Pembina Utama Muda/ IVc
N I P: 19781117 199711 1 00

PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

RENJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MAKASSAR TAHUN 2025



makassar I ♥ MC

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2025 merupakan rencana pengendalian dan evaluasi program pengawasan tahunan yang disusun untuk mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar. Selain dari pada itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pengawasan penyelenggaran Pemerintah di Kota Makassar, disamping itu peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2025 selain mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Kami menyadari dokumen ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 terdiri dari 1) Pendahuluan; 2) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu; 3) Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; 4) Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; 5) Penutup.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2025 dan semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Makassar, 5 Agustus 2024
Kepala Badan,

H. ANDI BUKTI DJUFRIE, S.P., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690330 199903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			**ii**
DAFTAR ISI			**iii**
DAFTAR TABEL			**iv**
BAB I	**PENDAHULUAN**		**1**
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Landasan Hukum	2
	1.3.	Maksud dan Tujuan	5
	1.4.	Sistematika Penulisan	6
BAB II	**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**		**7**
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategi Perangkat Daerah	7
	2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	74
	2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	76
	2.4.	Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah	79
	2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	94
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**		**102**
	3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	102
	3.2.	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	103
	3.3.	Program dan Kegiatan	104
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**		**125**
BAB V	**PENUTUP**		**153**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode Pelaksanaan Tahun 2023	31
Tabel 2.2	Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun 2023	51
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Makassar	67
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar	75
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Makassar	81
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Makassar	95
Tabel T-C 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026	110
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025	132

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan dan mengatasi tantangan yang dihadapi Kota Makassar pada tahun 2025, diperlukan adanya keselarasan dan kesinambungan antara program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada tema visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar, yaitu **"Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere' & Smart City dengan Imunitas Kuat Untuk Semua."**

Penyusunan RKPD Kota Makassar Tahun 2025 mempertimbangkan berbagai faktor penting untuk memastikan perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi. Faktor-faktor tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2023. Selain itu, RKPD juga mengintegrasikan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030, serta memasukkan masukan dan aspirasi dari berbagai pelaku pembangunan berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kota Makassar. Evaluasi terhadap pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan turut menjadi bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memastikan bahwa perencanaan ini relevan dan responsif terhadap kebutuhan nyata.

Dalam konteks ini, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2025 adalah suatu kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Renja ini bertujuan untuk menerjemahkan rencana strategis lima tahun ke dalam perencanaan tahunan yang lebih operasional, serta berfungsi sebagai pedoman kerja selama satu tahun bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah. Beberapa hal penting dalam penyusunan Renja ini antara lain: (1) Renja Perangkat Daerah sebagai penjabaran substansial dari RKPD Kota Makassar, (2) Renja yang menjadi acuan dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta dalam perencanaan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025, dan (3) Renja yang berfungsi sebagai instrumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan, termasuk evaluasi dari kinerja tahun 2023 serta evaluasi triwulan pertama tahun 2024.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah), penting untuk mengikuti tata cara dan alur yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan tahap awal yang harus diselesaikan sebelum dokumen definitif dibuat. Proses penyusunan Renja mencakup perumusan rancangan serta penyajian rancangan tersebut.

Alokasi anggaran dalam Renja Perangkat Daerah harus didasarkan pada ketersediaan dana dan mempertimbangkan prinsip efisiensi serta urgensi program dan kegiatan yang direncanakan. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dengan efektif, diperlukan sumber daya yang berkualitas, sarana dan fasilitas yang memadai, serta anggaran yang sesuai dengan kemampuan daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar memiliki peran krusial dalam koordinasi, pembinaan, dan pelayanan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan Walikota Makassar dapat dilaksanakan secara efisien, ekonomis, dan akuntabel oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Makassar.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 26).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 bertujuan untuk menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana jangka pendek yang lebih operasional selama satu tahun, serta menyelaraskan rencana strategis dengan pelayanan Perangkat Daerah (PD), usulan masyarakat, dan hasil evaluasi kinerja tahun lalu untuk menghasilkan rencana kerja yang komprehensif. Selain itu, Renja juga bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga memastikan keterpaduan dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Tujuan :

1. Sebagai pedoman penyusunan RKA dan DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025.
2. Sebagai parameter penilaian keberhasilan maupun ketidakberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Sebagai parameter penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Menjadi instrumen bagi masyarakat dan stakeholder dalam pengawasan terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan;

Menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja-PD yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja-PD dan sistematika penyusunan.

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu;

Membahas evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun sebelumnya dan capaian Renstra SKPD, termasuk evaluasi Renja-PD tahun 2023 dan 2024 (Triwulan I). Diliputi pula analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting dalam tugas dan fungsi SKPD, review rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja-PD, program dan kegiatan SKPD yang berisikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dan uraian garis besar program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

Mengemukakan Rencana Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahunan, kedudukan tahun Rencana Kerja tahun 2025 dan Capaian Kinerja yang direncanakan serta Pagu Indikatifnya

Bab V Penutup;

Merupakan penutup yang berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategi Perangkat Daerah.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar tahun 2023, serta perkiraan capaian tahun 2024, mencakup penilaian terhadap kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana, serta selaras dengan prioritas daerah dan kebijakan strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

Untuk memantapkan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025, diperlukan evaluasi capaian tahun 2023 dan perkiraan hasil tahun 2024. Secara keseluruhan, capaian kinerja dan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar tahun 2023 menunjukkan predikat kinerja **sangat tinggi** dengan persentase capaian kinerja sebesar **94,57%**.

Adapun alokasi anggaran APBD tahun 2023 adalah **Rp. 59.918.697.655**, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.57.459.660.516** atau **94,57%**.

Selama tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melaksanakan 6 (Enam) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan serta 42 (empat puluh dua) sub kegiatan yang terbagi sebagai berikut :

1) Program pendukung sebanyak 1 (satu) program
2) Kegiatan pendukung sebanyak 7 (tujuh) kegiatan
3) Sub Kegiatan pendukung 31 (tiga puluh satu) kegiatan
4) Program Utama (Urusan Wajib) sebanyak 5 (lima) program
5) Kegiatan utama sebanyak 5 (lima) kegiatan
6) Sub Kegiatan utama 11 (sebelas) kegiatan

Adapun program pendukung (urusan pilihan) adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan

Program Utama (urusan wajib) adalah sebagai berikut :

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.
b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Adapun capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan rencana kerja tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

A. PROGRAM PENDUKUNG (URUSAN PILIHAN)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terbagi atas beberapa indikator kinerja program yaitu :

1) Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah yaitu :
   a. Realisasi kinerja tahun 2023 : 95,00% dari target 100,00%.
   b. Tingkat capaian kinerja : 95,00% atau termasuk dalam kategori sangat tinggi.
2) Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yaitu :
   a. Realisasi kinerja tahun 2023 : 86,00 % dari target 90,00%.
   b. Tingkat capaian kinerja : 95,56% atau termasuk dalam kategori sangat tinggi.
3) Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas yaitu :
   a. Realisasi kinerja tahun 2023 : 90,00 % dari target 90,00%.
   b. Tingkat capaian kinerja : 100,00% atau termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 6.849.095.135,-** dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut :

a) Realisasi anggaran tahun 2023 : **Rp. 5.776.496.796,-**
b) Tingkat capaian realisasi anggaran : **84,34%** atau termasuk dalam kategori **tinggi**
c) Rata-rata capaian keuangan **87,59%** dengan **predikat tinggi**

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Adanya kekompakan dan motivasi kerja aparatur lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diberikan
2) Ketersediaan anggaran yang cukup sehingga setiap kegiatan yang menunjang pelayanan administrasi perkantoran dapat terlaksana dengan baik
3) Koordinasi antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dengan staf sehingga dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik
4) Terjalinnya komunikasi antara antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dengan Pejabat Kepala Bidang dan Sub Bidang dan Kasubag, dan staf sehingga dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dan tidak mengakibatkan kegiatan menjadi terhambat/deadlock
5) Tingginya semangat bekerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar beserta pejabat dan staf lainnya, sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan lancar dan baik.

A. PROGRAM UTAMA

Realisasi capaian target kinerja 5 (lima) program utama adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	TAHUN 2023		
	REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	13,00% atau 470 Orang	16,00% atau 480 Orang	20,39% atau 950 Orang	48,00% atau 1260 Orang dari 100,00% atau 6180 Orang	89,21% atau 1124 Orang dari 100,00% atau 6180 Orang	89,21%

Untuk mendapatkan hasil realisasi kinerja Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, digunakan indikator kinerja program yaitu Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Penguatan Ideologi Pancasila

dan Karakter Kebangsaan. Adapun formula perhitungan yang digunakan adalah :

$$(x = \frac{\textit{Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan tahun ini}}{\text{jumlah kelompok masyarakat tahun ini}} x\ 100\%)$$

atau

$(x = \frac{1124\ Orang}{1260\ orang} x\ 100\%)$ = 89,21% terealisasi, dari target 1260 Orang

Atau dengan capaian $(x = \frac{89{,}21\%}{100\ \%} x\ 100\%)$ = 89,21%

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan berhasil mencapai persentase realisasi sebesar 89,21% (1124 orang) dari target 48,00% (1260 orang), menunjukkan capaian sebesar 89,21% dan termasuk dalam kategori tinggi berdasarkan indikator kinerja utama.

Dalam pelaksanaan program, beberapa kelompok masyarakat yang telah menerima penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan antara lain:

NO	SASARAN PESERTA	JUMLAH
1.	Tokoh masyarakat / Bassi Barania/RT/RW	100 orang
2.	Pelajar	100 Orang
3.	Mahasiswa	125 Orang
4.	Tokoh Masyarakat	700 Orang (14 Kecamatan)
5.	Paguyuban	100 Orang
Jumlah		**1125 orang**

Pada tahun 2023, Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan di Kota Makassar berhasil berjalan lancar. Efektivitas rapat koordinasi turut berkontribusi, menciptakan situasi tanpa konflik antar umat beragama atau etnis sepanjang tahun tersebut. Badan Kesbangpol berhasil menangani potensi konflik dengan melibatkan tokoh agama aktif dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setiap bulan. Melalui forum ini, isu-isu krusial dibahas, mempererat kerukunan hidup umat beragama, dan mengurangi potensi konflik dengan pendekatan persuasif. Realisasi kinerja Program mencapai 89,21%, mencerminkan keberhasilan dalam mencegah konflik fisik yang lebih besar dengan cara yang proaktif dan kooperatif.

a. Faktor Penghambat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan di Kota Makassar :

1. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak terkait perkembangan teknologi yang berpotensi memengaruhi pola hidup sosial.

2. Penyesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan anggaran SKPD dapat berdampak signifikan pada kelancaran dan kualitas program.
3. Masih terdapat kurangnya pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan umat beragama dan moderasi beragama di sebagian elemen masyarakat.
4. Masih minimnya pemahaman nilai-nilai kearifan lokal, yang seharusnya diterapkan untuk membentuk sikap toleransi antar umat beragama.
5. Menurunnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dikalangan generasi muda.

b. Faktor Pendukung dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan di Kota Makassar:

1. FKUB melalui Program Makassar Sikatutui menggunakan pendekatan kearifan budaya lokal untuk melakukan penyuluhan moderasi beragama di lorong wisata, bertujuan meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan, nasionalisme, moderasi beragama, dan toleransi masyarakat lorong wisata.
2. Insiden konflik sosial di beberapa kecamatan di Kota Makassar berhasil ditangani melalui kerjasama dengan Tripika dan masyarakat.
3. Keberhasilan program-program didukung oleh partisipasi masyarakat seperti Bassi Barania, serta terbentuknya Punggawa Ta beberapa tahun lalu.
4. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar memungkinkan peran tokoh agama dalam membangun dialog antar umat dan mendirikan rumah ibadah, menghindari pengaruh pemberitaan kelompok tertentu yang dapat menimbulkan konflik di kalangan pemeluk agama.
5. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan di Kota Makassar, dengan anggota terdiri dari tokoh masyarakat dan etnis, berkomunikasi dengan warga agar tidak mudah terprovokasi oleh isu hoaks yang dapat menimbulkan konflik etnis.
6. Koordinasi intensif Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan (PAKEM) melalui rapat Tim PAKEM untuk mendeteksi aliran kepercayaan yang menyimpang atau penodaan agama.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melakukan rapat koordinasi rutin dengan FKUB Kota Makassar dan FPK Kota Makassar untuk deteksi dini, pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap ancaman yang mungkin timbul di Kota Makassar.

8. Kesadaran umat tentang pentingnya toleransi umat beragama secara umum.
9. Penegakan sanksi dan hukum terhadap oknum yang terbukti melakukan provokasi atau tindakan yang memicu konflik dan mengganggu kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Kota Makassar.

c. Tindak Lanjut :

1. Pentingnya penguatan integrasi dan integritas bangsa.
2. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens dan akurat kepada masyarakat agar mereka mengutamakan budaya saling menghormati dan menghargai. Tujuannya adalah menjaga kedamaian dan ketertiban di Kota Makassar.
3. Diperlukan upaya penguatan integrasi dan integritas bangsa karena masih terjadi penggunaan cara penyampaian pendapat yang mengabaikan atau melecehkan simbol-simbol negara. Beberapa tindakan bahkan bersifat anarkis, dengan kecenderungan lebih memprioritaskan kepentingan kelompok daripada kepentingan umum.
4. Pentingnya meminimalkan potensi konflik dengan memberdayakan masyarakat melalui forum kemitraan pemerintah dan masyarakat, seperti FKDM, FKUB, FPK, dan lainnya. Hal ini bertujuan mengatasi potensi aksi terorisme, perang kelompok, kriminalitas, dan berbagai tindakan melawan hukum lainnya.

d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Rencana Kerja berikutnya :

1. Penguatan fungsi koordinasi seluruh stakeholders perlu diimplementasikan.
2. Diperlukan persamaan persepsi antara seluruh pemangku kepentingan.
3. Penting untuk mengikis ego sektoral guna menciptakan kolaborasi yang lebih efektif.
4. Memberdayakan dan meningkatkan peran lembaga budaya sambil menghormati kearifan lokal dapat memperkuat kewaspadaan nasional dalam kehidupan masyarakat.
5. Diperlukan dorongan terhadap pemberdayaan masyarakat melalui forum kemitraan pemerintah dan masyarakat seperti FKDM, FKUB, FPK, dan lainnya.
6. Menjaga iklim yang kondusif dapat dicapai melalui peningkatan peran koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan adalah sebagai berikut :

1. Aktualisasi Empat Pilar Kebangsaan Bagi Pelajar
2. Dialog Kebangsaan Bagi Masyarakat Lorong Wisata
3. Dialog Kebangsaan Dan Bela Negara
4. Dialog Pembauran Kebangsaan
5. Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Masyarakat RT/RW, Tokoh Masyarakat Dan Bassi Barania
6. Tim Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
7. Tim Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Makassar
8. Rekrutmen Dan Pembinaan Paskibraka

Pencapaian target indikator kinerja Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.304.385.300,- dengan realisasi sebesar Rp.2.149.697.000,- atau 93,29%.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	TAHUN 2023		
	REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI	%
Persentase Partai Politik yang mendapat Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	100%	100% (2230) Orang	21,05% (2172) Orang	100,00% (2172) Orang	100,00%

Badan Kesbangpol Makassar berhasil mencapai keberhasilan yang luar biasa dalam Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Indikator kinerja program, yaitu Persentase Partai Politik yang mendapat Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, diukur dari Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Data Badan Kesbangpol Makassar tahun 2023 mencatat partisipasi sebanyak 2172 tokoh masyarakat dalam kegiatan ini, melebihi target yang

ditetapkan sebesar 2172 orang. Persentase capaian realisasi sebesar 100,00%, menunjukkan kategori yang sangat tinggi.

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program dalam memberikan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik kepada masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat yang tinggi, capaian persentase yang melebihi target, dan kategori capaian yang sangat tinggi, program ini dapat dianggap sukses dalam meningkatkan pemahaman politik, etika, dan budaya politik di kalangan masyarakat.

Evaluasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor keberhasilan ini dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam, sementara dampak jangka panjang dari program ini diharapkan dapat memperkuat peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam masyarakat. Adapun perhitungan realisasi kinerja sebagai berikut :

$$\left(x = \frac{\textit{Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik}}{\text{jumlah target kelompok masyarakat}} x\ 100\%\right)$$

$\left(x = \frac{2172}{2172} x\ 100\%\right)$ = 100,00 % realisasi, dari target 21,05 % atau 2172 Orang

Atau dengan capaian kinerja $\left(x = \frac{100\%}{100\%} x\ 100\%\right)$ = 100,00%

Pada pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik diatas, terdapat kelompok masyarakat yang telah diberi Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yaitu :

NO	SASARAN PESERTA	JUMLAH
1.	Tokoh masyarakat (14 Kecamatan)	2172 orang

a. Faktor Penghambat :

1. Diperlukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan Anggaran Kas yang telah disusun oleh SKPD untuk memastikan keteraturan keuangan.
2. Diperlukan aturan yang menyertakan sanksi administrasi bagi organisasi politik yang tidak memenuhi kewajiban sebagai organisasi politik.
3. Terdapat kurangnya kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan tentang mengeluarkan pendapat dan berkumpul.
4. Sering terjadi konflik internal di dalam partai politik.
5. Pemahaman pengurus partai politik terhadap aturan dan regulasi terkait partai politik masih minim.
6. Kapasitas organisasi partai politik belum optimal dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, seperti kurangnya peran lembaga politik dalam

melakukan fungsi artikulasi kepentingan masyarakat dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

b. Faktor Pendukung :

1. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil merupakan faktor pendukung utama dalam menjalankan program dan kegiatan OPD.
2. Kekompakan dan motivasi kerja aparatur Badan Kesbangpol menjadi pendorong efektivitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar menunjukkan prakarsa positif dengan menjalin kerjasama dan koordinasi rutin dengan LSM/Ormas dan Partai Politik, yang bertujuan memperkuat hubungan antarlembaga untuk mencapai tujuan bersama.
4. Tingginya perhatian politik terhadap penyelenggaraan kepemimpinan nasional mencerminkan sikap yang mengarah pada kedewasaan berpolitik, memastikan stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan.
5. Terlihat dari pelaksanaan pemilu yang aman, langsung, umum, bebas, dan rahasia, menunjukkan peningkatan kesadaran politik masyarakat dalam proses demokrasi.

c. Tindak Lanjut :

1. Meskipun terdapat kemajuan dalam proses demokratisasi, permasalahan yang muncul menunjukkan perlunya pemantapan demokratisasi melalui konsolidasi secara bertahap.
2. Perlu ditetapkan sanksi administrasi bagi Organisasi Masyarakat/Organisasi Politik yang tidak memenuhi kewajibannya, baik saat perpanjangan administrasi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) maupun dalam penyusunan laporan berkala kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.
3. Pemeriksaan lapangan yang akurat terhadap dokumen kelengkapan LSM yang mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sangat diperlukan dan harus dilakukan oleh Tim Verifikasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.

d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Rencana Kerja berikutnya :

1. Melakukan penguatan fungsi koordinasi dengan melibatkan semua stakeholders untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas mencapai tujuan bersama.
2. Menciptakan persamaan persepsi antar pemangku kepentingan guna memperkuat kerjasama dan menghindari potensi konflik.

3. Upaya optimalisasi kapasitas organisasi partai politik dan lembaga demokrasi agar mampu melaksanakan fungsi-fungsinya secara efisien dan efektif.
4. Fokus pada langkah-langkah yang dapat meningkatkan konsolidasi untuk memantapkan proses demokratisasi, termasuk pembenahan regulasi, partisipasi masyarakat, dan transparansi.
5. Peningkatan peran koordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga iklim kondusif, dengan memberikan perhatian khusus pada komunikasi terbuka dan partisipasi aktif.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik adalah sebagai berikut:

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Makassar
2. Dialog Peningkatan Partisipasi Dan Kesadaran Politik Bagi Perempuan
3. Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Di Lorong Wisata
4. Pendidikan Politik Bagi Pemilih Muda
5. Pendidikan Politik Bagi Tokoh Masyarakat
6. Pendidikan Politik Terhadap Prosedur Dan Mekanisme Pengawasan
7. Pengenalan Potensi Dan Etika Politik Bagi Remaja
8. Peningkatan Kapasitas Perempuan Di Lembaga Politik Dalam Rangka Kesetaraan Gender
9. Satgas Peningkatan Partisipasi Pemilih Dan Pengawasan Partisipatif
10. Tim Dukungan Elemen Satuan Kinerja (DESK) Pemilihan Umum
11. Verifikasi Kelengkapan Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik
12. Verifikasi Kelengkapan Pengajuan Permohonan Dan Pencairan Hibah Yang Bersumber Dari APBD
13. Workshop Nilai-Nilai Pendidikan Politik Terhadap Penguatan Kesatuan Bangsa Untuk ORPOL, ORMAS Dan LSM
14. Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan.
15. Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Pencapaian target indikator kinerja Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik didukung dengan alokasi anggaran sebesar **Rp 45.777.453.420,-** dengan realisasi sebesar **Rp 45.471.598.920,-** atau **99,33%.**

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

INDIKATOR KINERJA	2022	2023		
	REALISASI	TARGET	REALISASI	%
Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar Dan Mendapat Pembinaan	83,10% (59) Ormas	100,00% (142) Ormas	45,07% (64) Ormas	45,07%

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator kinerja program yaitu persentase organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan mendapat pembinaan, diukur dari jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan. Dari data diatas, terealisasi sebanyak 64 Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik yang diberi pembinaan oleh badan Kesbangpol, atau 45,07% dari target 100,00% atau 142 organisasi. Adapaun persentase capaian realisasi sebesar 45,07% atau termasuk dalam kategori sangat rendah, dengan perhitungan realisasi kinerja sebagai berikut :

$$(x = \frac{\text{Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar Dan Mendapat Pembinaan}}{\text{jumlah keseluruhan organisasi kemasyarakatan/politik mitra yang aktif,terdaftar dan terawasi tahun ini}} x\ 100\%)$$

$(x = \frac{64\ organisasi}{142\ organisasi} x\ 100\%)$ = 45,07 % realisasi, dari target 100,00 % (142) Ormas

Atau dengan capaian kinerja $(x = \frac{45{,}07\%}{100\%} x\ 100\%)$ = 45,07 %

Dapat di jelaskan bahwa terdapat empat jenis organisasi yang memperbarui data organisasi dan aktif pada Badan Kesatauan Bangsa dan Politik Kota Makassar tahun 2023 yaitu:

1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dengan jumlah 3 (tiga) LSM yang didalamnya berjumlah total 85 (delapan puluh lima) orang anggota pengurus.
2. Perkumpulan/Komunitas dengan jumlah 24 (dua puluh Empat) Perkumpulan/Komunitas yang didalamnya berjumlah total 340 (tiga ratus empat puluh) orang anggota pengurus.
3. Yayasan dengan jumlah 26 (dua puluh enam) yayasan yang didalamnya berjumlah total 220 (dua ratus dua puluh) orang anggota pengurus.
4. Partai Politik dengan jumlah 11 (sebelas) Partai Politik yang didalamnya berjumlah total 854 (delapan ratus lima puluh empat) orang anggota pengurus.

Jadi jumlah total organisasi yaitu 64 (enam puluh empat) organisasi dan 1.499 (seribu empat ratus sembilan puluh sembilan) orang pengurus.

Berikut data jumlah organisasi, sebagai pendukung pencapaian kinerja Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan :

1. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)

NO.	NAMA	JUMLAH ANGGOTA	KETERANGAN
1	DPD LSM BARISAN PATRIOT PEDULI INDONESIA	15	
2	DPD LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LINTAS PEMBURU KEADILAN (LSM-LPK) (Perubahan Struktur anisasi dan Domisili Lembaga)	6	
3	DPC LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BALADHIKA ADHYAKSA NUSANTARA	6	
JUMLAH KESELURUHAN		27	

2. PERKUMPULAN/KOMUNITAS

NO.	NAMA	JUMLAH ANGGOTA	KETERANGAN
1	PERKUMPULAN RELAWAN MILENIAL MAKASSAR		
2	PERKUMPULAN MAKASSAR KEKUATAN BARU NEW KOKOH		
3	PERKUMPULAN KELUARGA PEDAGANG BAKSO NUSANTARA		
4	BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KOTA MAKASSAR		
5	KERUKUNAN KELUARGA WUAMESU ENDE MAKASSAR		
6	LEMBAGA DAKWAH NAHDLATUL ULAMA KOTA MAKASSAR		
7	PERKUMPULAN SISTIM KOMUNIKASI PENGEMUDI NUSANTARA	6	
8	DPC PEMUDA BATAK BERSATU KOTA MAKASSAR	46	
9	PERKUMPULAN HONDA TIGER CLUB MAKASSAR		
10	DHARMA WANITA PERSATUAN KOTA MAKASSAR	44	
11	DPC KOMANDO INVESTIGASI NASIONAL PROJAMIN (Perubahan Domisili Lembaga)	7	
12	PEKUMPULAN LEMBAGA INVESTIGASI NEGARA	12	
13	PC MUSLIMAT NAHDATUL ULAMA KOTA MAKASSAR	20	
14	JARINGAN INDONESIA POSITIF (JIP)	6	
15	PAGUYUBAN RONGGOLAWE MAKASSAR	11	
16	PAGUYUBAN WARGA LAMONGAN MAKASSAR	9	
17	LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KOTA MAKASSAR	37	
18	XMAX RIDER INDONESIA MAKASSAR CHAPTER	12	
19	LEMBAGA CINTA KASIH	8	
20	DPC PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM LEMBAGA IMPARSIAL NEGARA	15	
21	IKATAN PEMUDA PELAJAR MAHASISWA SANGALLA' (IPPMS) MAKASSAR	35	

NO.	NAMA	JUMLAH ANGGOTA	KETERANGAN
22	LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK DAERAH (LP3KD) KOTA MAKASSAR	50	
23	PERKUMPULAN GANJAR INDONESIA SATU LONTARA KOTA MAKASSAR	32	
24	PERKUMPULAN PERSATUAN MASYARAKAT BUKIT BATU	48	
JUMLAH KESELURUHAN		398	

3. YAYASAN

NO.	NAMA	JUMLAH ANGGOTA	KETERANGAN
1	YAYASAN LEMBAGA STUDI KEBIJAKAN PUBLIK (LSKP)		
2	YAYASAN AL-IMAM ASHIM		
3	YAYASAN TEKNOLOGI TANAH AIR		
4	YAYASAN IMAM MALIK		
5	YAYASAN AL FITYAH MAKASSAR		
6	YAYASAN PENDIDIKAN ASMAUL HUSNA MAKASSAR		
7	YAYASAN AL FARUQ PENGAWAL PERADABAN		
8	YAYASAN MAJELIS TAKLIM PERMATA MAMAJANG LUAR		
9	KETUA YAYASAN SAMRAH PEDULI YATIM		
10	YAYASAN NURUL QUR'AN		
11	YAYASAN KEMANUSIAAN KOTA MAKASSAR		
12	YAYASAN PERTANIAN NURUL AL AQSHA	52	
13	YAYASAN PELANGI INDONESIA MINISTRY	14	
14	YAYASAN DARUL AHSAN HIDAYATULLAH	8	
15	KETUA YAYASAN DEDIKASI TJIPTA INDONESIA	10	
16	YAYASAN ABDUL RACHIM UNRENG	14	
17	YAYASAN AS SUNNAH HAFAYU MAKASSAR	9	
18	YAYASAN KHADIMUL UMMAH MAKASSAR	10	
19	YAYASAN PEDULI KELOMPOK DUKUNGAN SEBAYA SULAWESI SELATAN	11	
20	KETUA YAYASAN PENDIDIKAN RIFFAT UMMUL MUKMININ	8	
21	YAYASAN IMAM BUKHORI SULAWESI	13	
22	YAYASAN BAITUL QUR'AN AMAL JARIYAH MAKASSAR	11	
23	YAYASAN YASHKA NERI NUSANTARA	16	
24	YAYASAN PERJUANGAN WAHIDIYAH DAN PONDOK PESANTREN KEDUNGLO		
25	YAYASAN SIPAKATAU ANAK HARAPAN	34	
26	YAYASAN TAAWUN NAIM NUSANTARA	10	
JUMLAH KESELURUHAN		220	

4. PARTAI POLITIK

NO.	NAMA	JUMLAH ANGGOTA	KETERANGAN
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	37	
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	50	
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	16	
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	335	
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	28	
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	27	
7	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	33	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	127	
9	PARTAI DEMOKRAT	124	
10	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	6	
11	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	71	
JUMLAH KESELURUHAN		854	

a. Faktor Penghambat :

1. Diperlukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan Anggaran Kas yang telah disusun oleh SKPD.
2. Masih kurangnya pemahaman pengurus ormas/orpol tentang penetapan aturan dan landasan hukum yang baru kepada organisasi di daerah khususnya pada proses pendaftaran organisasi di pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yakni Permendagri No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
3. Kurang lengkapnya alamat detail sekretariat organisasi yang akan diverifikasi oleh tim verifikator dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, sehingga lokasi atau sekretariat yang ada pada dokumen pemberkasan ormas/orpol tersebut tidak jelas dan tidak ditemukan.
4. Terdapat kekurangan aturan yang mencakup sanksi administrasi bagi ormas/orpol yang tidak memenuhi kewajibannya.

b. Faktor Pendukung:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan

Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

5. Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
9. Dukungan Sistem Unit Layanan Administrasi (ULA) yang melibatkan pendaftaran online ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Melalui Direktorat Ormas.
10. Meningkatkan kesadaran pengurus Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk mendaftarkan atau memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar setelah masa berlaku habis.
11. Koordinasi yang intens dengan Pengurus LSM/Ormas dan Pengurus Partai Politik dalam setiap kegiatan.
12. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil di dalam Badan Kesbangpol.
13. Kekompakan dan motivasi kerja aparatur Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
14. Kerjasama dan koordinasi rutin dengan LSM/Ormas dan Partai Politik dalam setiap kegiatan lembaga.
15. Kesadaran pengurus Organisasi Masyarakat (ORMAS) untuk mendaftarkan atau memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar setelah masa berlaku habis.
16. Keinginan masyarakat untuk bermitra atau mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan setiap program pemerintah sehingga membentuk sebuah organisasi atau lembaga.

c. Tindak Lanjut :

1. Meskipun proses demokratisasi sudah terlihat, permasalahan yang muncul menegaskan perlunya pemantapan demokratisasi melalui konsolidasi demokrasi secara bertahap.

2. Perlu menetapkan sanksi administrasi kepada Organisasi Masyarakat/Organisasi Politik yang tidak melaksanakan kewajibannya, baik pada saat perpanjangan administrasi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) maupun dalam pelaksanaan administrasi penyusunan laporan berkala organisasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.
3. Diperlukan pemeriksaan lapangan yang akurat terhadap dokumen kelengkapan organisasi LSM yang akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Tim Verifikasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.

d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Rencana Kerja berikutnya :

1. Mengidentifikasi dan memperkuat mekanisme pemberdayaan yang sudah ada.
2. Menyusun program pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk pengurus Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) guna meningkatkan keterampilan dan pemahaman mereka.
3. Meningkatkan frekuensi dan ketepatan pengawasan terhadap Ormas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku.
4. Melibatkan Tim Verifikasi yang terlatih untuk melakukan pemeriksaan lapangan secara akurat terhadap kelengkapan dokumen Ormas.
5. Mengevaluasi keberlanjutan peraturan dan kebijakan terkait Organisasi Kemasyarakatan.
6. Menetapkan atau memperbarui sanksi administrasi yang jelas dan proporsional bagi Ormas yang melanggar kewajiban administratif.
7. Mengoptimalkan sistem pendaftaran online ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Melalui Direktorat Ormas untuk mempermudah proses administrasi Ormas.
8. Melakukan kampanye sosialisasi secara intensif untuk meningkatkan kesadaran Ormas terkait dengan aturan dan prosedur pendaftaran serta kewajiban administratif.
9. Mengadakan pertemuan rutin atau workshop untuk membangun pemahaman yang lebih baik di antara pengurus Ormas.
10. Membangun kemitraan yang erat dengan stakeholder untuk mendapatkan dukungan dan pendampingan dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan pengawasan Ormas.

11. Melakukan pemantauan yang teratur terhadap pelaksanaan program pemberdayaan dan pengawasan Ormas.
12. Melakukan evaluasi periodik untuk menilai efektivitas program dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
13. Menyelenggarakan konsultasi dan dialog rutin dengan perwakilan Ormas untuk mendengar masukan, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi oleh mereka.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Bimtek Pendaftaran Ormas Sesuai Permendagri Nomor 57 Tahun 2017
2. Jambore Organisasi Kemasyarakatan
3. Pemantauan dan Pendataan Ulang Organisasi Kemasyarakatan
4. Tim Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Tim Verifikasi dan Pengawasan Kegiatan Keramaian dalam Wilayah Kota Makassar
6. Verifikasi Administrasi Izin Penelitian
7. Verifikasi Keabsahan Administrasi Pendaftaran Ormas

Pencapaian target indikator kinerja Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.518.569.400,- dengan realisasi sebesar Rp.409.583.900,- atau 78,98%.

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023		
	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI	%
Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Pembinaan Dan Pengembangan Katahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	0,59%	63% (600) Orang	100% (1260) Orang	55,56% (700) Orang	55,56%

Dalam mengukur kinerja pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, digunakan indikator Persentase Kelompok Masyarakat yang Berpartisipasi dan Mendapat Pembinaan serta Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan terkait program ini adalah pengambilan tes urine kepada masyarakat di lokasi yang telah ditentukan atau dianggap rawan

peredaran narkotika. Dengan demikian, realisasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dapat dihitung berdasarkan partisipasi dan pembinaan yang diterima oleh kelompok masyarakat. Sehingga dapat dihitung realisasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dapat dihitung sebagai berikut :

$$(x = \frac{\begin{matrix}Jumlah\ Kelompok\ Masyarakat\ Yang\ Berpartisipasi \\ dan\ Mendapat\ Pembinaan\ Dan\ Pengembangan \\ Ketahanan\ Ekonomi,Sosial\ Dan\ Budaya\end{matrix}}{jumlah\ target\ kelompok\ masyarakat\ tahun\ ini} x\ 100\%)$$

$(x = \frac{700\ Orang}{1260\ Orang} x\ 100\%)$ = 55,56% realisasi, dari target 100% (1260 orang)

Atau dengan capaian kinerja $(x = \frac{55,56\%}{100\%} x\ 100\%)$ = 55,56%

Berikut data jumlah peserta, sebagai pendukung pencapaian kinerja program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya:

NO.	SASARAN PESERTA	JUMLAH
1	Tokoh Masyarakat dan Pelajar (14 Kecamatan)	700 Orang

a. Faktor Penghambat :

1. Perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.
2. Masih terdapat potensi terjadinya peredaran narkotika yang perlu diatasi atau diminimalkan.
3. Krisis ekonomi yang belum pulih sepenuhnya menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini memudahkan masyarakat untuk terpengaruh dan mencari solusi salah satunya dengan menyalahgunakan narkoba sebagai jalan pintas untuk keuntungan cepat.
4. Beberapa remaja dan masyarakat memiliki anggapan bahwa penggunaan narkotika merupakan bagian dari gaya hidup yang dianggap biasa.
5. Sebagian remaja dan masyarakat percaya bahwa narkotika dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi ketegangan, kecemasan, dan depresi yang disebabkan oleh stres dari masalah pribadi atau keluarga.

b. Faktor Pendukung :

1. Memastikan adanya dukungan anggaran yang memadai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan program pencegahan peredaran narkotika.
2. Memastikan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam program memiliki kompetensi dan kesiapan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka.
3. Melakukan peningkatan koordinasi yang lebih efektif dengan mitra terkait, seperti kepolisian, lembaga penegak hukum, dan instansi terkait lainnya, guna memperkuat upaya penanganan peredaran narkotika.
4. Meningkatkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dengan memperkuat kerjasama antar tokoh agama, suku, dan golongan dalam deteksi dini dan pencegahan peredaran narkotika. Ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah.

c. Tindak Lanjut :

1. Melakukan koordinasi intensif dengan stakeholder terkait untuk meminimalisir peredaran dan penggunaan narkotika serta zat adiktif lainnya.
2. Melakukan kampanye anti penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif sebagai upaya pencegahan.
3. Melakukan pembinaan dan memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada pelajar, remaja/pemuda, dan tokoh masyarakat di setiap kecamatan/kelurahan.
4. Melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap lokasi yang berpotensi menjadi tempat beredarnya narkotika dan zat adiktif lainnya.
5. Mengimplementasikan program rehabilitasi dan pencegahan ketergantungan bagi individu yang terdampak penggunaan narkotika, dengan melibatkan pihak terkait seperti lembaga rehabilitasi dan kesehatan mental.
6. Menyelenggarakan forum diskusi dan pelatihan berkala untuk membahas isu-isu terkini terkait penyalahgunaan narkotika, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.
7. Berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan sekolah untuk mengintegrasikan materi anti-narkotika ke dalam kurikulum pendidikan guna memberikan pengetahuan yang lebih baik kepada generasi muda.

8. Meningkatkan pengawasan terhadap daerah perbatasan yang memiliki potensi tinggi sebagai jalur masuk narkotika, bekerjasama dengan instansi terkait dan aparat keamanan.

d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Rencana Kerja berikutnya :

1. Meningkatkan pengawasan atau pemantauan terhadap lokasi yang berpotensi menjadi tempat beredarnya narkotika dan zat adiktif lainnya.
2. Meningkatkan pelaksanaan program pemeriksaan dan deteksi dini pengguna narkoba dengan melibatkan pihak kesehatan dan keamanan
3. Menyusun pedoman dan protokol yang lebih terperinci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan.
4. Mengoptimalkan peran Tim FKUB dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dengan menyelenggarakan pertemuan rutin dan dialog antarumat beragama
5. Melakukan pendataan secara berkala untuk memperoleh data yang akurat dan terkini terkait pengguna narkoba.
6. Membuat laporan periodik dengan analisis data yang komprehensif untuk mendukung perencanaan tindakan pencegahan yang lebih terarah

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Dan Deteksi Dini Pengguna Narkoba
2. Pencegahan Bahaya Narkoba Pada Masyarakat Lorong Wisata
3. Pendataan Dan Penyajian Data Pengguna Narkoba
4. Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Siswa Dan Pelajar
5. Tim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
6. Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Kota Makassar
7. Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar

Pencapaian target indikator kinerja Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.349.232.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.250.147.000,- atau 92,66%.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023		
	REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI	%
Persentase Kelompok Masyarakat yang berpartispasi dan mendapat pemahaman terhadap pencegahan konflik sosial	80% (92) Orang	80% (92) Orang	80% (92) Orang	100% (80) Orang	76,25% (61) Orang	76,25 %

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan indikator kinerja program persentase kelompok masyarakat yang berpartispasi dan mendapat pemahaman terhadap pencegahan konflik sosial. Data pada badan Kesbangpol menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan terkait Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial lebih kepada koordinasi secara rutin dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Makassar, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) terkait informasi yang berkembang ditengah masyarakat sebagai bentuk deteksi dini sebagai pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap ancaman yang mungkin timbul khususnya di Kota Makassar, dan telah terlaksana dengan baik dengan melibatkan sebanyak 61 orang anggota atau terealisasi 76,25% dari target 100%, dengan persentase capaian realisasi sebesar 76,25% atau termasuk dalam kategori tinggi.

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan menggunakan indikator kinerja program persentase kelompok masyarakat yang berpartispasi dan mendapat pemahaman terhadap pencegahan konflik sosial. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi rutin dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Makassar, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), yang bertujuan mendeteksi dini dan mencegah potensi konflik sosial, yang didalam timnya melibatkan sebanyak 61 orang anggota yang terdiri dari beberapa institusi negara seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara, BAIS, dan stakeholder lainnya yang terkait. Dalam tahun 2023 realisasi mencapai 76,25% dari target 100%. Meskipun mencapai 76,25%, capaian

realisasi tersebut masih termasuk dalam kategori tinggi, yang menunjukkan pelaksanaan program yang baik dan efektif.

Dengan perhitungan realisasi sebagai berikut :

$$(x = \frac{Jumlah\ Kelompok\ Masyarakat\ yang\ berpartisipasi\ dan\ mendapat\ pemahaman\ terhadap\ pencegahan\ konflik\ sosial}{jumlah\ target\ Kelompok\ Masyarakat\ tahun\ ini} x\ 100\%)$$

$(x = \frac{61\ orang}{80\ orang} x\ 100\%)$ = 76,25% realisasi, dari target 100% (80 orang)

Atau dengan capaian kinerja $(x = \frac{76{,}25\%}{100\%} x\ 100\%)$ =76,25%

a. Faktor Penghambat :

1. Masih terdapat potensi munculnya aksi terorisme dan gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban umum, termasuk tindakan melawan hukum lainnya.
2. Keberadaan kejadian kekerasan yang melanggar hukum di antara kelompok masyarakat menjadi hambatan utama yang perlu diatasi.
3. Masih adanya potensi terjadinya perang kelompok atau konflik horizontal sosial di masyarakat, menunjukkan adanya ketegangan yang perlu diatasi.
4. Keberadaan potensi tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh sekelompok remaja, yang masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius.
5. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi dan risiko dari tindakan kekerasan dapat menjadi penghambat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai.

b. Faktor Pendukung :

1. Keberadaan sumber daya manusia yang terampil di dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar menjadi landasan penting dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memberikan fondasi finansial yang diperlukan untuk melaksanakan program-program pencegahan konflik.
3. Peran aktif tokoh masyarakat dalam memberikan arahan, musyawarah, dan pemantauan kepada masyarakat dalam membantu mencegah pengaruh dan provokasi terhadap isu-isu yang dapat menimbulkan konflik, menciptakan suasana kondusif di Kota Makassar.

4. Komitmen yang kuat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dalam mengkoordinasikan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat menunjukkan keseriusan dalam menjaga keamanan.
5. Terjalinnya sinergitas antara Pemerintah dan TNI/POLRI dalam penanganan konflik menciptakan kekuatan bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
6. Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan dengan baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan.
7. Para tokoh masyarakat yang senantiasa memberikan arahan, musyawarah, dan pemantauan kepada masyarakat berkontribusi positif dalam mencegah terpengaruh dan terprovokasi terhadap isu-isu konflik.
8. Penegakan sanksi dan hukum terhadap oknum yang terbukti melakukan provokasi atau tindakan yang memicu konflik menunjukkan komitmen untuk menjaga kondisi keamanan dan ketertiban di Kota Makassar.

c. Tindak Lanjut :

1. Meminimailisir potensi konflik dengan pemberdayaan masyarakat melalui forum forum kemitraan pemerintah dan masyarakat yaitu FKDM, FKUB, FPK dan lainnya sehingga gejala terorisme, perang kelompok, kriminalitas geng motor, dan berbagai bentuk tindakan melawan hukum lainnya dapat diatasi.
2. Melaksanakan sosialisasi yang lebih intens dan akurat kepada masyarakat agar mengedepankan budaya saling menghormati, menghargai demi terjaganya kedamaian dan ketertiban di Kota Makassar, agar tercipta suasana kondusif di Kota Makassar.
3. Penguatan integrasi dan intergritas bangsa, yang disebabkan karena masih adanya penggunaan cara-cara penyampaian pendapat yang mengabaikan/melecehkan simbol-simbol negara, bahkan ada yang cenderung anarkis dan masih adanya kecenderungan lebih mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum.

d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Rencana Kerja berikutnya :

1. Penguatan fungsi koordinasi seluruh stakeholders.
2. Persamaan persepsi antar seluruh pemangku kepentingan
3. Mengikis ego sektoral.

4. Memberdayakan dan meningkatkan peran lembaga budaya dan menghormati kearifan lokal dalam memperkuat kewaspadaan nasional dalam kehidupan masyarakat.
5. Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui forum forum kemitraan pemerintah dan masyarakat yaitu FKDM, FKUB, FPK dan lainnya.
6. Menjaga iklim yang kondusif melalui peningkatan peran koordinasi pemerintah dan masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial adalah sebagai berikut :

1. Pengendali Kegiatan Unjuk Rasa
2. Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri
3. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
4. Kerjasama Intelijen Daerah
5. Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah

Pencapaian target indikator kinerja Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.119.962.400,- dengan realisasi sebesar Rp 2.402.136.900,- atau 76,99%. Adapun evaluasi rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Makassar tahun 2023, sebagaimana pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.1
EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2023

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (%)	
												I		II		III		IV					
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
2		3	4	4.a	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100	
						182.694.523.000		15.878.806.671		33.445.162.900	30.918.867.855		2.941.836.476		4.432.400.537		7.543.332.260		42.542.091.243		57.458.660.516		85,8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	38.436.931.000	100	4.891.736.871	100	8.273.159.100	8.849.085.135	25	745.454.876	25	1.463.000.537	25	1.524.821.760	19	2.043.822.423	94	5.776.499.796	85,00%	94,34%
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	100		100		80			22		22		25		17		86		95,56%	
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Persen	100		100		90			22		22		30		16		90		100,00%	
1		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Renja, Renstra, Dokumen RKA, Dokumen DPA dan LAKIP Perangkat Daerah	Dokumen	36	1.875.703.658	8	123.124.500	8	182.589.000	74.300.000	1	25.549.000	2	12.000.000	1	12.181.000	1	8.425.500	8	58.155.500	100%	78,30%
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	1.617.557.105	4	109.115.000	1	158.574.500	40.254.500	0	25.549.000	1	4.000.000	0	-	0	-	1	29.549.000	100%	73,41%
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	6	86.139.724	1	5.816.000	1	9.506.500	9.506.500	0	-	0	2.000.000	1	5.874.000	0	-	1	7.874.000	100%	82,83%
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	5	40.896.927	1	3.224.500	1	4.986.000	4.986.000	0	-	0	-	1	-	0	4.644.500	1	4.644.500	100%	93,15%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (%)	
												I		II		III		IV					
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
2		3	4	4a	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100	
			Perubahan RKA-SKPD																				
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Laporan	5	40.805.337	1	2.750.500	1	5.877.000	5.877.000	0	-	0	2.400.000	1	2.061.000	0	-	1	4.461.000	100%	75,91%
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun	Laporan	5	8.713.955	1	1.218.500	1	5.327.000	5.327.000	0	-	0	-	1	1.160.000	0	3.781.000	1	4.941.000	100%	92,76%
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	-	1	-	1	3.672.000	3.672.000	0	-	0	1.200.000	1	926.000	0	-	1	2.126.000	100,00%	57,90%
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	-	1	-	1	4.646.000	4.646.000	0	-	0	2.400.000	1	2.160.000	0	-	1	4.560.000	100,00%	98,15%
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**34**	**22.180.815.391**	**5**	**3.180.881.354**	**5**	**4.340.495.800**	**3.922.676.185**	**1**	**504.224.068**	**1**	**1.019.183.815**	**2**	**896.909.767**	**1**	**968.420.933**	**5**	**3.388.837.571**	**100,00%**	**78,07%**
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	135	19.976.158.054	27	2.889.407.854	24	4.116.379.800	3.494.832.185	0	491.044.068	0	823.493.815	24	802.228.787	0	773.740.933	24	2.710.507.571	100,00%	77,56%
	2	Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	2.035.267.955	1	304.200.000	1	251.900.000	255.720.000	0	51.480.000	0	53.080.000	1	52.080.000	0	50.960.000	1	208.530.000	100,00%	81,55%
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	109.479.382	1	17.280.700	1	172.126.000	172.126.000	0	41.700.000	0	41.700.000	1	41.700.000	0	41.700.000	1	165.800.000	100,00%	96,91%
5		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**10**	**911.920.230**	**2**	**150.916.520**	**2**	**160.700.000**	**139.700.000**	**1**	**11.224.010**	**0**	**120.526.230**	**0**		**1**	**36.100.000**	**2**	**167.910.300**	**100,00%**	**82,82%**
	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pasul	380	259.186.780	76	40.450.000	76	45.700.000	45.700.000	0	-	0	-	0	-	76	36.160.000	76	36.160.000	100,00%	79,12%
	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan	Orang	63	552.731.450	10	110.466.520	10	135.000.000	135.000.000	3	11.224.010	7	120.526.230	0	-	0	-	10	131.750.300	100,00%	97,96%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 202 (%)	
												I		II		III		IV					
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
2		3	4	4.a	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100	
		Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan																				
6		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**30**	**2.034.588.318**	**4**	**403.830.562**	**5**	**705.573.000**	**417.011.189**	**1**	**121.528.629**	**1**	**86.394.000**	**0**	**135.388.983**	**3**	**230.305.890**	**5**	**582.827.100**	**100,00%**	**94,43%**
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	20.373.380	3	3.115.000	3	5.195.200	5.195.200	0	-	2	5.195.200	0	-	1	-	3	5.195.200	100,00%	100,00%
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	-	0	-	1	95.510.900	95.510.900	0	44.363.500	0	-	1	48.994.500	0	-	1	91.358.000	100,00%	95,65%
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	150	382.157.948	30	47.268.300	1	28.425.000	28.425.000	1	13.777.000	0		0	-	0	5.800.000	1	19.577.000	100,00%	68,87%
	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	-	0	-	1	86.562.500	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	30	187.986.658	6	32.200.000	5	56.880.000	56.880.000	0	425.000	0	12.860.000	5	6.075.000	0	19.650.000	5	39.000.000	100,00%	68,57%
	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1.444.168.334	12	321.247.262	1	431.000.000	431.000.000	0	62.983.129	0	68.350.968	1	82.327.093	0	213.855.890	1	427.496.980	100,00%	99,19%
7		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dokumen**	**15**	**9.494.962.512**	**15**	**670.188.199**	**2**	**1.457.137.000**	**1.895.861.600**		-	**1**	**28.800.000**		**484.440.900**	**1**	**513.747.200**	**2**	**1.026.987.700**	**100,00%**	**96,21%**
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit		-		-	1	-	500.000.000	0	-	0	-		-	1	483.200.000	1	483.200.000	100,00%	96,64%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 202 (%)	
												I		II		III		IV					
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
2		3	4	4.a	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100	
			Jabatan Yang Disediakan																				
	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		-		-	1	468.830.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0
	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	55	9.494.982.512	11	670.188.199	11	888.307.000	555.861.600	0	-	5	28.800.000	3	494.440.500	3	30.547.200	11	553.787.700	100,00%	99,63%
	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit		-		-	1	100.000.000	-	0	-	0	-		-	0	-	0	-	0,00%	0
8		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen**	**18**	**1.723.183.831**	**20**	**292.679.586**	**3**	**678.983.200**	**777.677.600**	**1**	**82.928.381**	**1**	**94.980.664**		**145.151.500**	**1**	**330.704.600**	**3**	**653.765.145**	**100,00%**	**84,07%**
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	1.624.224.303	1	285.171.900		-	-		-		-		-	0	-	0	-	-	0
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	78.730.292	1	5.543.186	1	14.474.400	14.474.400	0	1.343.581	0	1.355.864	1	1.336.500	0	1.336.000	1	5.371.945	100,00%	37,11%
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	-	0	-	1	18.000.000	18.000.000	0	4.500.000	0	4.500.000	1	4.500.000	0	4.500.000	1	18.000.000	100,00%	100,00%
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penerima Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	5	20.229.236	4	1.964.500	12	846.508.800	745.203.200	3	77.084.800	3	89.124.800	3	139.315.000	3	324.868.600	12	630.393.200	100,00%	84,59%
9		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen**	**19**	**1.409.539.660**	**2**	**70.160.250**	**2**	**317.770.500**	**220.897.650**	**0**	-	**1**	**101.211.700**		**41.743.400**	**1**	**48.258.300**	**2**	**191.213.400**	**100,00%**	**86,56%**
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan/operasional yang Dipelihara dan	Unit	5	216.470.226	1	42.839.250	4	200.890.500	180.422.650	0	-	2	101.211.700	1	37.738.400	1	19.358.300	4	158.308.400	100,00%	86,31%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (%)	
												I		II		III		IV					
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
2		3	4	4.a	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100	
			dibayarkan Pajaknya																				
	8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	76	1.044.518.635		-	0	-	-	0	-	0	-		-		-	0		-	-
	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	-		-	3	38.960.000	37.475.000	0	-	0	-	3	4.005.000	0	28.500.000	3	32.505.000	100,00%	67,81%
	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	-		-	3	38.960.000	-	0	-	0	-		-			0	-	0,00%	-
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	148.550.799	1	27.261.000	3	38.960.000	-	0	-	0	-		-		-	0	-	0,00%	-
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00%	67,81%
																					Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Persentase Kelompok Masyarakat yang yang Mendapat Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persen**	**100**	**6.705.054.000**	**100**	**566.902.800**	**48**	**2.243.852.500**	**2.304.385.300**	**12**	**50.560.800**	**12**	**103.924.800**	**12**	**948.296.000**	**7**	**1.045.985.600**	**43**	**2.149.667.000**	**89,58%**	**93,29%**
1		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Dokumen**	**10**	**6.705.054.000**	**2**	**566.902.800**	**2**	**2.243.852.500**	**2.304.385.300**	**0**	**50.560.800**	**1**	**103.924.800**		**948.296.000**	**1**	**1.045.985.600**	**2**	**2.149.667.000**	**100%**	**93,29%**
	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara	Dokumen	10	6.705.054.000	2	566.902.800	2	349.507.000	345.307.000	0	-	0	-	1	70.128.000	1	248.256.600	2	318.384.600	100%	92,21%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (%)	
											I		II		III		IV					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp
2	3	4	4.a	5		6		7			8		9		10		11		12 = 5+8+10+11		13 = 12/7*100	
	Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Dijiwai																				
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	90	-	19	-	18	1.864.345.500	1.959.018.300	4	50.590.800	4	103.924.800	4	879.160.000	6	797.627.000	18	1.831.302.400	100%	93,48%
																					Rata-rata capaian kinerja (%)	99,58%	93,29%
																					Predikat kinerja	Tinggi	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai Politik yang mendapat Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persen	100	14.647.743.000	100	3.185.512.200	100	19.934.898.100	46.777.453.420	0	2.096.113.000	25	1.888.678.000	25	4.724.345.000	50	36.962.361.720	100	45.471.986.920	100,00%	98,33%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan																				
1	Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta	Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Dokumen	2	14.647.743.000	2	3.185.512.200	2	19.934.898.100	46.777.453.420	0	2.096.113.000	1	1.888.678.000		4.724.345.000	1	36.962.361.720	2	45.471.986.920	100%	98,33%

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (%)	
											I		II		III		IV					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
	3	4	4.a	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100	
	Pemantauan Situasi Politik	a. Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																				
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	10	7.877.539.615	2	1.042.892.000	2	1.130.336.000	1.129.103.000	0	-	0	-	1	605.751.000	1	434.000.000	2	1.039.751.000	100%	92,09%
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	222	8.770.203.185	50	2.152.620.200	22	17.904.562.100	44.648.350.420	5	2.096.113.600	5	1.668.878.800	5	4.118.494.000	7	36.529.361.720	22	44.431.847.920	100%	99,52%
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		165%	96,33%
																					Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar Dan	Persen	100	38.208.407.000	82	4.875.895.300	100	527.045.000	518.568.400	25	47.453.400	25	151.490.000	15	148.629.500	10	92.002.000	75	439.583.900	75,00%	78,96%



ode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (%)	
											I		II		III		IV					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp
2	3	4	4.a	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100	
	KESBANGPOLARAKYAT AN	Meningkat Pembinaan																				
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata n	Dokumen	2	38.288.407.000	2	4.875.885.300	2	537.041.800	518.569.400	0	17.453.400	0	151.499.000	1	148.629.500	1	92.002.000	2	409.583.900	100,00%	76,98%
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	10	2.070.240.914	2	164.643.300	2	502.018.800	493.542.400	0	17.453.400	1	151.499.000	1	148.629.500	0	92.002.000	2	409.583.900	100,00%	82,99%
2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	10	34.138.166.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah [illegible] yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan	Orang	-	-	2	4.511.342.000	6	25.027.000	25.027.000	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (%)	
											I		II		III		IV					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp
2	3	4	4 a	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100	
		Omas Aging di Daerah																				
																		Rata-rata capaian kinerja (%)			78,00%	78,98%
																		Predikat kinerja			Sedang	Tinggi
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	**Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya**	**Persen**	**100**	**2.212.045.000**	**83**	**682.668.700**	**100**	**2.765.844.000**	**1.349.232.000**	**0**	**-**	**50**	**933.203.000**	**25**	**54.246.500**	**21**	**262.697.500**	**96**	**1.250.147.000**	**96,00%**	**82,66%**
	Penurunan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Dokumen**	**2**	**2.212.045.000**	**2**	**682.668.700**	**2**	**2.765.844.000**	**1.349.232.000**	**0**	**-**	**1**	**933.203.000**	**1**	**54.246.500**	**1**	**262.697.500**	**2**	**1.250.147.000**	**100,00%**	**82,66%**
2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dibutuh	Dokumen	10	201.462.580	100	33.535.700	2	1.382.932.000	Rp -	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	-
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat	Orang	500	2.010.562.320	100	649.131.000	114	1.382.932.000	1.349.232.000	0	-	80	933.203.000	20	54.246.500	14	262.697.500	114	1.250.147.000	100,00%	92,66%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (%)	
											I		II		III		IV					
				K	Rp (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA	Rp (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	4.a	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100	
	Kepercayaan di Daerah	Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																				
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		98,00%	92,98%
																				Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Kelompok Masyarakat yang Mendapat Pemahaman Terhadap Pencegahan Konflik Sosial	Persen	100	3.480.343.000	80	1.665.906.900	100	600.343.600	3.119.962.400	0	32.224.600	25	91.798.900	25	142.003.500	50	2.136.112.000	100	2.402.139.000	100%	76,99%
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penanganan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Penyusunan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penanganan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen	2	3.480.343.000	100	1.665.906.900	2	600.343.600	3.119.962.400	0	32.224.600	1	91.798.900		142.003.500	1	2.136.112.000	2	2.402.139.000	100%	76,99%
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	10	1.219.980.855	1	1.315.779.300	2	180.837.000	1.210.907.000	0	-	1	37.350.000	1	49.650.500	0	983.059.000	2	1.080.059.500	100%	89,19%
2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing	Dokumen	10	2.260.362.145	1	350.129.600	2	419.706.600	1.909.055.400	0	32.224.600	0	54.448.800	1	92.353.000	1	1.143.053.000	2	1.322.077.400	100%	69,25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (%)	
											I		II		III		IV					
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	4.a	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100	
	Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun																				
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00%	76,99%
																					Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							33.445.162.900	59.918.697.655		2.941.836.476		4.432.400.537		7.543.332.260		42.542.091.243		57.459.660.516	94,57%	
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		94,57%	92,35%
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Tinggi

2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Triwulan I Tahun 2024

Capaian target kinerja merupakan hasil capaian yang dilakukan secara sistematik dan berkesinambungan yang mencakup indikator kinerja, target, realisasi kinerja, dan persentase capaian serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan serta alternatif solusi yang telah dilakukan dengan menggunakan tabel pengukuran kinerja, yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar pada tahun 2024 mencakup 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan serta 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan total anggaran pada tahun ini adalah sebesar Rp.102.482.856.696,-

Adapun program pendukung (urusan pilihan) adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan

Program Utama (urusan wajib) adalah sebagai berikut :

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.
b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Capaian Target Kinerja dan Penyerapan dana Program/kegiatan Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar sebagai berikut :

1. <u>PROGRAM PENDUKUNG (URUSAN PILIHAN)</u>

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1) Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas yaitu:
   a. Realisasi Triwulan I : 22% dari target 100%
   b. Tingkat capaian kinerja : 22,00% atau termasuk dalam kategori sangat rendah
2) Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah yaitu :

a. Realisasi Triwulan I :25% dari target 100%

b. Tingkat capaian kinerja : 25,00% atau termasuk dalam kategori sangat rendah

3) Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik yaitu :

a. Realisasi Triwulan I : 22% dari target 100%

b. Tingkat capaian kinerja : 22,00% atau termasuk dalam kategori sangat rendah

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi keuangan perangkat daerah
3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
4. Administrasi umum perangkat daerah
5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Pencapaian target indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.955.153.716,- dengan realisasi triwulan I sebesar Rp. 985.704.242,- atau 14,17% atau termasuk dalam kategori sangat rendah.

Rata-rata capaian kinerja seluruh kegiatan/sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 23,00% atau dengan predikat sangat rendah dan rata-rata capaian keuangan 11,43% atau dengan predikat sangat rendah

➢ **Faktor pendorong keberhasilan capaian kinerjanya yaitu :**

1) Adanya kekompakan dan motivasi kerja aparatur lingkup Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diberikan
2) Ketersediaan anggaran yang cukup sehingga setiap kegiatan yang menunjang pelayanan administrasi perkantoran dapat terlaksana dengan baik
3) Koordinasi antara pimpinan dengan staf sehingga dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik
4) Terjalinnya komunikasi antara pimpinan sehingga tidak mengakibatkan kegiatan menjadi deadlock
5) Tingginya semangat bekerja pegawai sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan lancar dan baik.

- **PROGRAM UTAMA (URUSAN WAJIB)**

❖ Realisasi capaian target kinerja 5 (lima) program utama adalah sebagai berikut :

1. **Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**

Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi Triwulan I	Tingkat Capaian Kinerja
Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	64% (1270 Orang)	3,53% (70 Orang)	5,51%

Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan indikator kinerja program yaitu Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Adapun formula perhitungannya sebagai berikut :

X = jumlah kelompok masyarakat yang mendapat penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan tahun ini dibagi jumlah kelompok masyarakat tahun ini di kali 100%.

Realisasi indikator kinerja program diatas, adalah sebagai berikut :

1) Realisasi Triwulan I : 3,53 % atau (70 Orang dari target 64% atau (1270 Orang)
2) Tingkat capaian kinerja : 5,51%, atau termasuk dalam kategori sangat rendah
3) Rata-rata capaian kinerja seluruh kegiatan/sub kegiatan : 5,51%

Tingkat capaian kinerja pada program di atas masih termasuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan I, yaitu penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi paskibraka, yang masih dalam tahap pengukuran dan proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan.

Pencapaian target indikator kinerja Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.182.365.900,- dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

a. Realisasi anggaran triwulan I : Rp. 22.500.000,-
b. Tingkat capaian realisasi anggaran : 0,71% atau termasuk dalam kategori sangat rendah
c. Rata-rata capaian keuangan 0,71% dengan predikat sangat rendah

➢ **Faktor pendorong keberhasilan capaian kinerjanya yaitu :**

1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melakukan rapat koordinasi secara rutin dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Makassar terkait informasi yang berkembang ditengah masyarakat sebagai bentuk deteksi dini sebagai pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap ancaman yang mungkin timbul khususnya di Kota Makassar.

2) Tercapainya kegiatan Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) yang dilaksanakan dengan seleksi yang ketat dan adil, pemberian pelatihan yang intensif dan komprehensif, dalam pembinaan karakter dan disiplin, serta adanya peran pelatih dan pembina yang kompeten.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Triwulan I	Tingkat Capaian Kinerja
Persentase Partai Politik yang mendapat Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100% (2715) Orang	14,51% (394) Orang	14,51%

Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dengan indikator kinerja program Persentase Partai Politik yang mendapat Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

X = jumlah Partai Politik yang mendapat Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dibagi jumlah keseluruhan partai politik, lembaga pendidikan dan budaya politik yang aktif di kali 100 %

Realisasi indikator kinerja program diatas, adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Triwulan I : 14,51% dari target 100%
b. Tingkat capaian kinerja : 14,51%atau termasuk dalam kategori sangat rendah
c. Rata-rata capaian kinerja seluruh kegiatan/sub kegiatan : 14,51% dengan predikat sangat rendah.

Pada program diatas, tingkat capaian kinerjanya termasuk kategori rendah, hal ini disebabkan karena masih sementara dilakukan pengukuran dan proses pelaksanaan kegiatan masih sementara berjalan.

pencapaian target indikator kinerja program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 89.224.754.180,- dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

a. Realisasi anggaran triwulan I : Rp. 4.328.275.000,-
b. Tingkat capaian realisasi anggaran : 4,85% atau termasuk dalam kategori sangat rendah
c. Rata-rata capaian keuangan 4,85% dengan predikat sangat rendah

➢ **Faktor pendorong keberhasilan capaian kinerjanya yaitu :**

1) Anggaran bantuan hibah keuangan untuk Kodim 1408/Makassar telah berhasil direalisasikan dengan baik
2) Aparatur di lingkup Badan Kesbangpol menunjukkan kekompakan dan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan.
3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar secara rutin dan berkala melakukan koordinasi dengan Partai Politik untuk memastikan kelancaran setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut.
4) Antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi pada berbagai kegiatan, dengan keterlibatan yang aktif dalam setiap acara yang diselenggarakan.
5) Kesadaran politik masyarakat semakin meningkat, yang tercermin dalam pelaksanaan pemilu yang berlangsung dengan aman, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Triwulan I	Tingkat Capaian Kinerja
Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar Dan Mendapat Pembinaan	100% (213) Ormas	5,16% (11) Ormas	5,16%

Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dengan indikator kinerja program Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar Dan Mendapat Pembinaan dengan menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

X = jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar Dan Mendapat Pembinaan dibagi jumlah keseluruhan organisasi kemasyarakatan/politik mitra yang aktif, terdaftar dan terawasi di kali 100 %

Realisasi indikator kinerja program diatas, adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Triwulan I : 5,16% dan target 100%
b. Tingkat capaian kinerja : 5,16%atau termasuk dalam kategori sangat rendah
c. Rata-rata capaian kinerja seluruh kegiatan/sub kegiatan : 5,16%dengan predikat sangat rendah

Pada program diatas, tingkat capaian kinerjanya termasuk kategori sangat rendah, hal ini disebabkan karena masih sementara dilakukan pengukuran dan proses pelaksanaan kegiatan masih sementara berjalan. Adapun kegiatan yang

dilaksanakan pada triwulan I ini adalah pemantauan, pendataan ulang, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

Pencapaian target indikator kinerja program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.332.336.000,- dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

a. Realisasi anggaran Triwulan I : Rp. 34.400.000,-
b. Tingkat capaian realisasi anggaran : 10,35% atau termasuk dalam kategori sangat rendah
c. Rata-rata capaian keuangan 10,35% dengan predikat sangat rendah

➢ **Faktor pendorong keberhasilan capaian kinerjanya yaitu :**

1) Aparatur di lingkup Badan Kesbangpol menunjukkan kekompakan dan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan.
2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar bekerjasama melakukan koordinasi secara rutin dan berkala dengan LSM/Ormas dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut.
3) Adanya kesadaran para pengurus Organisasi Masyarakat (ORMAS) untuk melakukan pendaftaran atau perpanjangan Surat Keterangan Terdaftaranya yang telah habis masa berlakunya
4) Keinginan masyarakat untuk melakukan kemitraan atau pendampingan dengan Pemerintah Daerah untuk menjalankan setiap program pemerintah sehingga membentuk sebuah organisasi atau lembaga

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Triwulan I	Tingkat Capaian Kinerja
Persentase Kelompok Masyarakat Yang Berpartisipasi dan Mendapat Pembinaan Dan Pengembangan Katahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	100% (1270) Orang	0% (0) Orang	0,00%

Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan indikator kinerja program jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Pembinaan Dan Pengembangan Katahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya dengan menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

X = jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Pembinaan Dan Pengembangan Katahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya dibagi jumlah Kelompok Masyarakat Yang terdaftar di kali 100 %

Realisasi indikator kinerja program diatas, adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Triwulan I : 0,00% dari target 100%
b. Tingkat capaian kinerja : 0,00% atau termasuk dalam kategori sangat rendah
c. Rata-rata capaian kinerja seluruh kegiatan/sub kegiatan : 0,00% dengan predikat sangat rendah.

Pada program diatas, tingkat capaian kinerjanya termasuk kategori sangat rendah, hal ini disebabkan karena masih sementara dilakukan pengukuran dan proses pelaksanaan kegiatan masih sementara berjalan.

Pencapaian target indikator kinerja program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.090.311.000,- dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

a. Realisasi anggaran Triwulan I : Rp. 4 200.000,-
b. Tingkat capaian realisasi anggaran : 0,39% atau termasuk dalam kategori sangat rendah.
c. Rata-rata capaian keuangan 0,39% dengan predikat sangat rendah.

- **Faktor pendorong keberhasilan capaian kinerjanya yaitu :**
  1) Keberadaan atau dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar, maka peran tokoh agama melalui FKUB ini secara intens melakukan atau membangun dialog antar umat dan pendirian rumah ibadah. Agar tidak mudah terpengaruh dengan pemberitaan oleh kelompok tertentu yang bisa menimbulkan konflik ditengah para pemeluk agama.
  2) Koordinasi yang intensif Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM), melalui rapat Tim Pakem untuk mengetahui adanya aliran kepercayaan yang menyimpang dari ajaran agama, serta penodaan agama atau penistaan suatu agama.
  3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melakukan rapat koordinasi secara rutin dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar untuk membicarakan terkait informasi berkembang ditengah masyarakat sebagai bentuk deteksi dini sebagai pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap ancaman yang mungkin timbul khususnya di Kota Makassar.
  4) Inpres Nomor 2 Tahun 2021 Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

5) Terbentuknya Satgas Sekolah Bersinar Untuk Memerangi Narkoba di kalangan Pelajar dan Lingkungan Sekolah.
6) Aktifnya Lembaga-Lembaga dan Instansi Penyuluhan/Sosialisasi Anti Narkoba dan Peredarannya.

5. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tw I	Tingkat Capaian Kinerja
Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapat pemahaman terhadap pencegahan konflik sosial	100% (1260) Orang	8,82% (112) Orang	8,82%

Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial dengan indikator kinerja program Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan dengan menggunakan formula perhitungan sebagai berikut :

X jumlah konflik dan gangguan keamanan horizontal yang diselesaikan dibagi jumlah konflik dan gangguan keamanan horizontal yang terjadi di kali 100 %

Realisasi indikator kinerja program diatas, adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Triwulan I : 8,82% dari target 100%
b. Tingkat capaian kinerja : 8,82% atau termasuk dalam kategori sangat rendah
c. Rata-rata capaian kinerja seluruh kegiatan/sub kegiatan : 8,82% dengan predikat sangat rendah

Pada program diatas, tingkat capaian kinerjanya termasuk kategori sangat rendah, hal ini disebabkan karena masih sementara dilakukan pengukuran dan proses pelaksanaan kegiatan masih sementara berjalan.

Pencapaian target indikator kinerja program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.697.935.900,- dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

a. Realisasi anggaran Triwulan I : Rp. 28.092.000,-
b. Tingkat capaian realisasi anggaran : 1,65% atau termasuk dalam kategori sangat rendah.
c. Rata-rata capaian keuangan 1,65% dengan predikat sangat rendah.

➢ **Faktor pendorong keberhasilan capaian kinerjanya yaitu :**

1) Aparatur di lingkup Badan Kesbangpol menunjukkan kekompakan dan motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan

Adapun evaluasi rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Makassar Triwulan I Tahun 2024, sebagaimana pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.2
EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD sampai dengan RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA		Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	4.a	5		6		7				8		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				102.684.523.000		57.459.660.516		20.103.137.000		102.482.856.696		5.403.171.242		5 403.171.242		5,27		62.862.831.758		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	39.430.931.000	95	5.776.496 796	100	7.719.619.000	100	6.955.153.716	25	985.704.242	25	985.704.242	25,00%	14,17%	120	6.762.201.038	120,00%	17,15 %
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	100		86		100		100		22		22		22,00%		108		108,00%	
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Persen	100		90		100		100		22		22		22,00%		112		112,00%	
I	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Renja, Renstra, Dokumen RKA, Dokumen DPA dan LAKIP Perangkat Daerah	Dokumen	36	1.675.703.058	5	58.155.500	3	333.173.380	3	74.140.500	1	25.325.000	1	25.325.000	13%	34,16%	6	83.480.500	16,67%	4,98 %
	1 Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	11	1 517.557.105	1	29.549.000	2	301.729.848	2	40.808 200	1	25.325.000	1	25.325.000	50%	62,06%	2	54.874.000	18,18%	3,62%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD sampai dengan RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA		Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	4.a	5		6		7				8		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
		Perangkat Daerah																			
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	68.139.724	1	7.874.000	1	13.547.951	1	5.162.400	0	-	0	-	0%	0,00%	1	7.874.000	20,00%	11,56 %
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	40.686.927	1	4.644.500	1	8.089.620	1	4.338.200	0	-	0	-	0%	0,00%	1	4.644.500	20,00%	11,42 %
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Laporan	5	40.605.337	1	4.461.000	1	8.073.398	1	6.582.900	0	-	0	-	0%	0,00%	1	4.461.000	20,00%	10,99 %
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun	Laporan	5	8.713.965	1	4.941.000	1	1.732.563	1	5.071.400	0	-	0	-	0%	0,00%	1	4.941.000	20,00%	56,70 %
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	-	1	2.126.000	1	-	1	4.628.800	0	-	0	-	0,00%	0,00%	1	2.126.000	20,00%	-
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	-	1	4.560.000	1	-	1	7.548.600	0	-	0	-	0,00%	0,00%	1	4.560.000	20,00%	-

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD sampai dengan RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA		Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2		3	4	4.a	5		6		7				8		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**37**	**22.180.915.391**	**5**	**3.085.837.571**	**8**	**4.410.143.250**	**8**	**4.814.693.466**	**0**	**812.832.146**	**1**	**812.832.146**	**12,50%**	**16,88%**	**6**	**3.898.669.717**	**16,22%**	**17,58 %**
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	135	19.976.168.054	24	2.710.507.571	24	3.971.782.100	24	4.279.312.166	0	691.652.146	0	691.652.146	0,00%	16,16%	24	3.402.159.717	17,78%	17,03 %
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	2.095.267.955	1	208.530.000	1	416.593.800	1	363.720.000	0	79.480.000	0	79.480.000	0,00%	21,85%	1	288.010.000	20,00%	13,75 %
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	109.479.382	1	166.800.000	1	21.767.350	1	171.661.300	0	41.700.000	0	41.700.000	0,00%	24,29%	1	208.500.000	20,00%	190,45%
5		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**10**	**911.920.230**	**2**	**167.910.300**	**2**	**181.313.475**	**2**	**180.000.000**	**1**	**7.987.780**	**1**	**7.987.780**	**50,00%**	**4,44%**	**3**	**175.898.080**	**30,00%**	**19,29 %**
	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	380	259.188.780	76	36.160.000	76	51.533.475	76	-	0	-	0	-	0,00%	-	76	36.160.000	20,00%	13,95 %
	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	63	652.731.450	10	131.750.300	13	129.780.000	15	180.000.000	3	7.987.780	3	7.987.780	23,08%	4,44%	13	139.738.080	20,63%	21,41 %
6		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum**	**Dokumen**	**30**	**2.034.686.318**	**5**	**582.627.180**	**6**	**404.548.594**	**6**	**645.738.150**	**1**	**30.232.455**	**1**	**30.232.455**	**16,67%**	**4,68%**	**6**	**612.859.635**	**20,00%**	**30,12 %**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD sampai dengan RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA		Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	4 a	5		6		7				8		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
		Perangkat Daerah																			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	20.373.380	3	5.195 200	1	4.050.758	1	3.195.100	0	-	0	-	0,00%	0,00%	3	5 195 200	42,86%	25,50 %
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	-	1	91 358.000	1	-	1	73.169.050	0	-	0	-	0,00%	0,00%	1	91.358 000	20,00%	-
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	382.157.946	1	19.577.000	1	75 982.946	1	8.374.000	0	-	0	-	0,00%	0,00%	1	19.577.000	20,00%	5,12%
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	-	0	-	1	-	1	72.800 000	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	-
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	30	187.986.658	6	39 000,000	6	37.376.640	6	52.200.000	0	2 200.000	0	2.200.000	0,00%	4,21%	6	41.200 000	20,00%	21,92 %
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1 444.168.334	1	427.496 980	1	287.138 250	1	436.000.000	0	28.032.455	0	28.032.455	0,00%	6,43%	1	455.529.435	20,00%	31,54 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Dokumen**	**15**	**9.494.982.512**	**2**	**1.036.987.700**	**4**	**1.720.793.111**	**4**	**76.424.400**	**0**	-	**0**	-	**0,00%**	**0,00%**	**2**	**1.036.987.700**	**13,33%**	**10,92 %**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD sampai dengan RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA		Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	4 a	5		6		7				8		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	Unit	5	-	1	483.200.000	1	-	1	-	0	-	0	-	0,00%	-	1	483 200.000	0,2	-
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	-	0	-	1	-	1	-	0	-	0	-	0,00%	0	0	-	0	-
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	55	9 494 982 512	11	553.787.700	11	1 720 793.111	11	76 424.400	0	-	0	-	0,00%	0,00%	11	553.787.700	20,00%	5,83%
8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	5	-	0	-	1	-	1	-	0	-	0	-	0,00%	0	0	-	0	-
8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen**	**18**	**1.723.183.831**	**9**	**653.765.145**	**4**	**342.613.793**	**4**	**889.427.200**	**1**	**79.337.361**	**1**	**79.337.361**	**25,00%**	**8,92%**	**4**	**733.102.506**	**22,22%**	**42,54 %**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	1.624.224 303	0	-	1	322.938 063	1		0	-	0	-	0	0	0	-	0,00%	0,00%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	78.730.292	1	5.371.945	1	15.653 631	1	12.000.000	0	1.337.361	0	1.337.361	0,00%	11,14%	1	6.709.306	20,00%	8,52%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	-	1	18.000.000	1		1	-	0	-	0	-	0,00%	-	1	18 000.000	20,00%	-
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penerima Jasa	Laporan	5	20.229.236	12	630.393.200	1	4.022.099	1	877.427.200		78.000 000	0	78.000.000	0,00%	8,89%	12	708.393 200	240,00%	3501, 69%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD sampai dengan RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA		Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	4.a	5		6		7				8		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
		Pelayanan Umum Kantor																			
I	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dokumen**	**19**	**1.409.539.660**	**2**	**191.213.400**	**5**	**327.035.397**	**5**	**274.730.000**	**0**	**29.989.500**	**0**	**29.989.500**	**0,00%**	**10,92%**	**2**	**221.202.900**	**10,53%**	**15,69%**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan/operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	216.470.226	4	158.308.400	1	43.039.915	1	247.330.000	1	29.989.500	1	29.989.500	100,00%	12,13%	5	188.297.900	100,00%	86,99%
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	76	1.044.518.635	0	-	19	254.457.717	19	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	-	3	32.905.000	3	-	3	27.400.000	0	-	0	-	0,00%	0,00%			0,00%	-
8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	-	0	-	3	-	3	-	0	-	0	-	0,00%	-	0	-	0,00%	-
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	148.550.799	0		3	29.535.765	3	-	0	-	0		0,00%	-	0		0,00%	0,00%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD sampai dengan RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)	
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA		Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2		3	4	4.a	5		6		7				8		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
															Rata-rata capaian kinerja (%)		23,00%	11,43%			18,42%	20,16 %
															Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Persentase Kelompok Masyarakat yang yang Mendapat Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persen**	**100**	**6.705.054.000**	**43**	**2.149.697.000**	**64 %**	**1.312.687.000**	**64 %**	**3.182.365.900**	**7,06 %**	**22.500.000**	**7,06 %**	**22.500.000**	**11,02%**	**0,71%**	**4307,06%**	**2.172.197.000**	**43,07%**	**32,40 %**
				Orang	**6180**				**1270**		**1270**		**140**		**140**							
1		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Dokumen**	**10**	**6.705.054.000**	**2**	**2.149.697.000**	**2**	**1.312.687.000**	**2**	**3.182.365.900**	**1**	**22.500.000**	**1**	**22.500.000**	**50%**	**0,71%**	**3**	**2.172.197.000**	**30,00%**	**32,40 %**
	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	10	6.705.054.000	2	318.394.600	2	1.312.687.000	2	506.733.400	0	22.500.000	0	22.500.000	0%	4,44%	2	340.894.600	20,00%	5,08%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD sampai dengan RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA		Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	4 a	5		6		7				8		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	90	-	18	1.831.302.400	18	-	18	2.675.632.500	0	-	0	-	0%	0,00%	18	1.831.302.400	20,00%	-
														Rata-rata capaian kinerja (%)		11,02%	0,71%			43,07%	32,40 %
														Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partai Politik yang mendapat Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persen	100	14.647.743.000	155	45.471.598.920	100 %	2.867.672.000	100 %	89.224.754.180	14,51%	4.328.275.000	14,51%	4.328.275.000	14,51%	4,85%	15514,51%	49.799.873.920		
			Orang	10917				2715		2715		394		394							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD sampai dengan RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA		Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	4 a	5		6		7				8		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
I	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Dokumen**	**10**	**14 647.743.000**	**2**	**45 471.598.920**	**2**	**2.867.672.000**		**89.224.754.180**	**1**	**4.328.275.000**	**1**	**4.328.275.000**	**50%**	**4,85%**	**3**	**49.799.873.920**	**30,00%**	**339,98%**
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di	Dokumen	10	7.877.539.815	2	1.039 751.000	2	1.224.323.684	2	-	0	-	0	-	0%	-	2	1.039.751.000	20,00%	13,20 %

ode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD sampai dengan RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA		Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	4.a	5		6		7				8		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 * 12		15 = 14/5*100	
		Daerah yang Disusun																			
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	222	6.770.203.185	22	44.431.847.920	50	1.643.348.316	50	89.224.754.180	5	4.328.275.000	5	4.328.275.000	10%	4,85%	27	48.760.122.920	12,16%	720,22%
															Rata-rata capaian kinerja (%)	14,51%	4,85%			30,00%	339,98%
															Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar Dan Mendapat Pembinaan**	**Persen**	**100**	**36.208.407.000**	**75**	**409.583.900**	**100 %**	**7.088.727.000**	**100 %**	**332.336.000**	**5,16 %**	**34.400.000**	**5,16 %**	**34.400.000**	**5,16%**	**10,35%**	**11**	**443.983.900**	**11,00%**	**1,23 %**
			Ormas	**355**				**213**		**213**		**11**		**11**							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD sampai dengan RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	4 a	5		6		7			8		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Dokumen**	**10**	**36.206.407.000**	**2**	**409 583.900**	**2**	**7.088.727.000**	**2 332.336.000**	**0**	**34 400.000**	**0**	**34.400.000**	**0,00%**	**10,35%**	**2**	**443.983.900**	**20,00%**	**1,23 %**
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	10	2.070 240.914	2	409.583.900	2	313.382.865	2 332.336 000	0	34.400.000	0	34.400 000	0,00%	10,35%	2	443.983.900	20,00%	21,45 %
2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	10	34.138.166.086	0	-		-	0 -	0	-	0	-	-	-	0	-	0,00%	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD sampai dengan RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA		Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	4.a	5		6		7				8		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang		-	0	-		6.775.344.135	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-
														Rata-rata capaian kinerja (%)		5,16%	10,35%			20,00%	1,23 %
														Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	**Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Pembinaan Dan Pengembangan Katahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya**	**Persen**	**100**	**2.212.045.000**	**96**	**1.250.147.000**	**100 %**	**433.065.000**	**100 %**	**1.090.311.000**	**7,40 %**	**4.200.000**	**7,40 %**	**4.200.000**	**7,40%**	**0,39%**	**9607,40%**	**1.254.347.000**	**96,07%**	**56,71 %**
			Orang	**6180**				**1270**		**1270**		**94**		**94**							
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Dokumen**	**10**	**2.212.045.000**	**2**	**1.250.147.000**	**2**	**433.065.000**	**2**	**1.090.311.000**	**0**	**4.200.000**	**0**	**4.200.000**	**0,00%**	**0,39%**	**2**	**1.254.347.000**	**20,00%**	**56,71 %**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD sampai dengan RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA		Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	4 a	5		6		7				8		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	10	201.482.680	0	-	2	39 987 927	2	-	0	-	0	-	0,00%	-	0	-	0,00%	0,00%
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di	Orang	500	2.010.562.320	114	1.250.147.000	100	393 077 079	100	1 090.311.000	0	4 200.000	0	4.200 000	0,00%	0,39%	114	1.254.347 000	22,80%	62,39 %
														Rata-rata capaian kinerja (%)		7,40%	0,39%			20,00%	56,71 %
														Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD sampai dengan RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA		Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	4.a	5		6		7				8		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase Kelompok Masyarakat yang Mendapat Pemahaman Terhadap Pencegahan Konflik Sosial**	**Persen**	**100**	**3.480.343.000**	**100**	**2.402.136.900**	**100 %**	**681.367.000**	**100 %**	**1.697.935.900**	**8,82 %**	**28.092.000**	**8,82 %**	**28.092.000**	**8,82%**	**1,65%**	**10008, 82%**	**2.430.228.900**	**100,09%**	**69,83 %**
			Orang	**6180**		**100**		**1270**		**1270**		**112**		**112**							
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Dokumen**	**10**	**3.480.343.000**	**2**	**2.402.136.900**	**2**	**681.367.000**	**2**	**1.697.935.900**	**0**	**28.092.000**	**0**	**28.092.000**	**0%**	**1,65%**	**2**	**2.430.228.900**	**20,00%**	**69,83 %**
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan	Dokumen	10	1.219.990.855	2	1.080.059.500	2	232.758.729	2	248.186.300	0	-	0	-	0%	0,00%	2	1.080.059.500	20,00%	88,53 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD sampai dengan RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA		Rp (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	4 a	5		6		7				8		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
		Konflik di Daerah yang Disusun																			
2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	Dokumen	10	2.260.352.145	2	1.322.077.400	2	448.608.271	2	275.933.500	0	28.092.000	0	28 092.000	0%	10,18%	2	1.350.169 400	20,00%	59,73 %
	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10	-	1	-	2	-	1	1.173.816.100	0	-	0	-	0%	0,00%	1	-	10,00%	-
															Rata-rata capaian kinerja (%)	8,82%	1,65%			15,86%	28,96 %
															Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD sampai dengan RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.
2	3	4	4.a	5		6		7			8		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								20.103.137.000	102.482.856.696		5.403.171.242		5.403.171.242				62.962.831.758		
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														18,65%	4,90%			24,56%	79,31 %
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Tinggi

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Makassar

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2023				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) / 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
0	0	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	95	Persen	95%		100	Persen	295	Persen	295%
						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	Persen	100	Persen	90	Persen	86	Persen	96%		100	Persen	286	Persen	286%
						Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	100	Persen	100	Persen	90	Persen	90	Persen	100%		100	Persen	290	Persen	290%
0	0	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen RENJA, RENSTRA, Dokumen RKA, Dokumen DPA dan LAKIP Badan Kesbangpol	36	Dokumen	36	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	100%		6	Dokumen	49	Dokumen	136%
0	0	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	11	Dokumen	11	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%		2	Dokumen	17	Dokumen	155%
0	0	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	5	Dokumen	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%		1	Dokumen	7	Dokumen	140%
0	0	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	5	Dokumen	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%		1	Dokumen	7	Dokumen	140%

Kode					Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) / 2024		Perluasan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7	8 = (7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
0	0	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	5	Dokumen	5	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	100%	1	Dokumen	7	Dokumen	140%
0	0	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	5	Dokumen	5	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	100%	1	Dokumen	7	Dokumen	140%
0	0	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan		Laporan		Laporan	Laporan	0	1	Laporan	1	Laporan	0
0	0	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		Laporan		Laporan	Laporan	0	1	Laporan	1	Laporan	0
0	**0**	**1**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**34**	**Dokumen**	**34**	**Dokumen**	**5**	**Dokumen**	**5 Dokumen**	**100%**	**8**	**Dokumen**	**47**	**Dokumen**	**138%**
0	0	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135	Orang/Bulan	135	Orang/Bulan	27	Orang/Bulan	27 Orang/Bulan	100%	24	Orang/Bulan	186	Orang/Bulan	138%
0	0	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dokumen	5	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	100%	1	Dokumen	7	Dokumen	140%
0	0	1	02.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun	5	Dokumen	5	Dokumen	1	Dokumen	1 Dokumen	100%	1	Dokumen	7	Dokumen	140%
0	**0**	**1**	**02.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**10**	**Dokumen**	**10**	**Dokumen**	**2**	**Dokumen**	**2 Dokumen**	**100%**	**2**	**Dokumen**	**14**	**Dokumen**	**140%**
0	0	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Tersedia	380	Pasang	380	Pasang	76	Pasang	76 Pasang	100%	76	Pasang	532	Pasang	140%
0	0	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	63	Orang	63	Orang	10	Orang	10 Orang	100%	13	Orang	86	Orang	137%
0	**0**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**30**	**Dokumen**	**30**	**Dokumen**	**4**	**Dokumen**	**4 Dokumen**	**100%**	**6**	**Dokumen**	**40**	**Dokumen**	**133%**
0	0	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	7	Jenis	7	Jenis	3	Jenis	3 Jenis	100%	1	Paket	11	Jenis	157%
0	0	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		Paket		Paket	Paket	0	1	Paket	1	Paket	0
0	0	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	5	Jenis	5	Jenis	30	Jenis	30 Jenis	100%	1	Paket	36	Jenis	720%
0	0	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket		Paket		Paket	Paket	0	1	Paket	1	Paket	20%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2023				Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) / 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
0	0	1	02.06	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	30	Eksemplar	30	Eksemplar	6	Eksemplar	6	Eksemplar	100%	6	Dokumen	42	Eksemplar	140%
0	0	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi yang di laksanakan	5	Laporan	5	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	1	Laporan	18	Laporan	360%
0	**0**	**1**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**15**	**Dokumen**	**15**	**Dokumen**	**20**	**Dokumen**	**15**	**Dokumen**	**75%**	**4**	**Dokumen**	**34**	**Dokumen**	**227%**
0	0	1	02.07	2	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan**		**Unit**		**Unit**		**Unit**		**Unit**	**0**	**1**	**Unit**	1	**Unit**	**0**
0	0	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55	unit	55	unit	11	unit	11	unit	100%	11	unit	77	unit	140%
0	0	1	02.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		Unit		Unit		Unit		Unit	0	1	Unit	1	Unit	0
0	**0**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**18**	**Dokumen**	**18**	**Dokumen**	**20**	**Dokumen**	**20**	**Dokumen**	**100%**	**4**	**Dokumen**	**42**	**Dokumen**	**233%**
0	0	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diterima dan diproses	1000	Surat	1000	Surat	2000	Surat	2000	Surat	100%	1	Laporan	3001	Surat	300%
0	0	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	bulan	60	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	1	Laporan	73	bulan	122%
0	0	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	0	1	Laporan	1	Laporan	0
0	0	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor Yang Tersedia	20	Jenis	20	Jenis	4	Jenis	4	Jenis	100%	1	Laporan	25	Jenis	125%
0	**0**	**1**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**19**	**Dokumen**	**19**	**Dokumen**	**2**	**Dokumen**	**2**	**Dokumen**	**100%**	**5**	**Dokumen**	**18**	**Dokumen**	**95%**
0	0	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional kantor yang terpelihara secara berkala	5	unit	5	unit	1	unit	1	unit	100%	1	unit	7	unit	140%
0	0	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah alat angkutan darat bermotor yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	76	unit	76	unit	0	unit	0	unit	0	19	unit	95	unit	125%



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) / 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6	7	8 = (7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
0	0	1	03.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit		Unit	Unit	Unit	0	3	Unit	3	Unit	0
0	0	1	04.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		Unit		Unit	Unit	Unit	0	3	Unit	3	Unit	0
0	0	1	05.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung yang terpelihara	5	unit	5	unit	1 unit	1 unit	100%	3	unit	9	unit	180%
8	**1**	**2**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100%**	**Persen**	**100%**	**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**	**64%**	**Persen**	**101,6**	**Persen**	**10164%**
8	**1**	**2**	**01.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Yang Dirumuskan**	**10**	**Dokumen**	**10**	**Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**100%**	**2**	**Dokumen**	**14**	**Dokumen**	**140%**
8	1	2	01.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dirumuskan	10	Dokumen	10	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2	Dokumen	14	Dokumen	140%
8	1	2		4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Orang		Orang	Orang	Orang	0	18	Orang	18	Orang	0
8	**1**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Partai Politik yang mendapat Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100 Persen**	**123 Persen**	**123%**	**100**	**Persen**	**323**	**Persen**	**323%**
8	**1**	**3**	**01.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan**	**Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi**	**10**	**Dokumen**	**10**	**Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**100%**	**2**	**Dokumen**	**14**	**Dokumen**	**140%**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) / 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6	7	8 = (7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
					Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Yang dirumuskan**												
8	1	3	01.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	10	Dokumen	10	Dokumen	2	Dokumen	2 Dokumen	**100%**	2	Dokumen	14	Dokumen	**140%**
8	1	3	01.01	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10	Koordinasi	10	Koordinasi	2	Koordinasi	2 Koordinasi	**100%**	50	Koordinasi	62	Koordinasi	**620%**
8	**1**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar Dan Mendapat Pembinaan**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**62% Persen**	**62%**	**100**	**Persen**	**262**	**Persen**	**262%**
						Jumlah organisasi kemasyarakatan/politik mitra yang aktif, terdaftar dan terawasi keberadaannya	**100**	**Ormas**	**100**	**Ormas**	**100**	**Ormas**	**61 Ormas**	**61%**	**213**	**Ormas**	**374**	**Ormas**	**374%**
8	**1**	**4**	**01.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**10**	**Dokumen**	**10**	**Dokumen**	**2**	**Dokumen**	**2 Dokumen**	**100%**	**2**	**Dokumen**	**14**	**Dokumen**	**140%**
8	1	4	01.01	1	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Jumlah Dokumen Program kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	10	Dokumen	10	Dokumen	2	Dokumen	2 Dokumen	**100%**	2	Dokumen	14	Dokumen	**140%**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) / 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7	8 = (7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
					Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dirumuskan													
8	1	4	01 01	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10	Kebijakan	10	Kebijakan	2	Kebijakan	2 Kebijakan	100%	0	Orang	12	Kebijakan	120%
8	1	5			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**63 Persen**	**63%**	**100**	**Persen**	**263**	**Persen**	**263%**
8	1	5	01.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Yang Dirumuskan**	**10**	**Dokumen**	**10**	**Dokumen**	**2**	**Dokumen**	**2 Dokumen**	**100%**	**2**	**Dokumen**	**14**	**Dokumen**	**140%**
8	1	5	01 01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya yang dirumuskan	10	Dokumen	10	Dokumen	2	Dokumen	2 Dokumen	100%	2	Dokumen	14	Dokumen	140%
8	1	5	01.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500	Orang	500	Orang	100	Orang	100 Orang	100%	100	Orang	700	Orang	140%
8	1	6			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapat pemahaman terhadap pencegahan konflik sosial**	**80**	**Persen**	**80**	**Persen**	**80**	**Persen**	**80 Persen**	**100%**	**100**	**Persen**	**260**	**Persen**	**325%**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelurusan Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) / 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) / 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
						Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan		Persen		Persen		Persen		Persen	0		Persen	0	Persen	0
6	1	6	01.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Aksi Unjuk Rasa Yang Tertangani	80	Unras	80	Unras	80	Unras	366	Unras	458%	0	Unras	446	Unras	558%
						Jumlah Konflik Horizontal Yang Tertangani	80	konflik	80	konflik	80	konflik	35	konflik	44%	0	konflik	115	konflik	144%
						Jumlah Konflik Sosial Yang Tertangani	80	Konflik	80	Konflik	80	Konflik	10	Konflik	13%	0	Konflik	90	Konflik	113%
6	1	6	01.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	10	Dokumen	10	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	50%	2	Dokumen	13	Dokumen	130%
6	1	6	01.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10	Dokumen	10	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	50%	2	Dokumen	13	Dokumen	130%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dinilai dari beberapa aspek utama yang mencerminkan efektivitas, efisien dan dampaknya terhadap masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Efektivitas pengelolaan program dan kegiatan dengan melakukan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, seperti pengelolaan konflik sosial, pembinaan kebhinekaan dan lainnya serta mampu dalam melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan persatuan bangsa dan politik.

Pelayanan Publik yang responsivitas terhadap masyarakat yang mampu merespon kebutuhan masyarakat terkait dengan persatuan, keamanan, penanganan konflik dan pembinaan masyarakat yang inklusif. Tingkat keterbukaan informasi mengenai kegiatan, kebijakan dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada publik dan stakeholder terkait, serta pemanfaatan inovasi dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkontribusi dalam memelihara stabilitas sosial dan persatuan bangsa. Serta dampak dan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memfasilitasi dan me astikan keberlangsungan pemilu yanga adil, bersih dan berintegrasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi Kewenangan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar telah menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 – 2026, kemudian, untuk mengetahui atau mengukur apakah tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar telah tercapai atau belum dapat tercapai, maka digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah untuk memperoleh informasi kinerja sekaitan penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis, yang dapat digunakan untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Adapun hasil analisa pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar adalah sebagaimana tertuang dalam **Tabel T-C-30**.

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MAKASSAR

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024 TW 1	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Aparatur Sipil Negara Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	-	100% 10 Orang	100% 13 Orang	100% 15 Orang	100% 15 Orang	100% 10 Orang	53,85% 7 Orang	100% 15 Orang	100% 15 Orang	
2	Persentase Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat	-	-	20,39% 1260 Orang	20,55% 1270 Orang	21,04% 1300 Orang	22,65% 1400 Orang	18,19% 1124 Orang	0,00% 0 Orang	21,04% 1300 Orang	22,65% 1400 Orang	
3	Persentase Pendidikan Politik Masyarakat	-	-	21,05% 2172 Orang	26,32% 2715 Orang	17,54% 1810 Orang	17,54% 1810 Orang	21,05% 2172 Orang	3,64% 375 Orang	17,54% 1810 Orang	17,54% 1810 Orang	
4	Persentase Pembinaan Organisasi Politik	-	-	100% 16 Orpol	100% 16 Orpol	100% 16 Orpol	100% 16 Orpol	100% 16 Orpol	0% 0 Orpol	100% 16 Orpol	100% 16 Orpol	
5	Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat	-	-	40% 142 Ormas	60% 213 Ormas	80% 284 Ormas	100% 356 Ormas	14,93% 53 Ormas	3,10% 11 Ormas	80% 284 Ormas	100% 356 Ormas	
6	Persentase Peningkatan Pemahaman Toleransi dan Moderasi Beragama	-	-	20,39% 1260 Orang	20,55% 1270 Orang	21,04% 1300 Orang	22,65% 1400 Orang	9,06% 560 Orang	0,00% 0 Orang	21,04% 1300 Orang	22,65% 1400 Orang	
7	Persentase Kelompok Masyarakat dan ASN yang Berpartisipasi dan Mendapat Pemahaman terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika	-	-	14,71% 375 Orang	17,65% 450 Orang	20,59% 525 Orang	2353,00% 600 Orang	13,73% 350 Orang	0,00% 0 Orang	20,59% 525 Orang	2353,00% 600 Orang	
8	Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan Konflik Sosial	-	-	20,39% 1260 Orang	20,55% 1270 Orang	21,04% 1300 Orang	22,65% 1400 Orang	5,66% 350 Orang	0,00% 0 Orang	21,04% 1300 Orang	22,65% 1400 Orang	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar adalah salah satu organisasi perangkat daerah Kota Makassar yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Adapun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. **Penguatan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila** yaitu perlunya peningkatan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila, khususnya di kalangan pelajar dan masyarakat umum.
2. **Partisipasi dan Pendidikan Politik** yaitu perlunya peningkatan partisipasi politik dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur politik, khususnya di kalangan pemilih muda.
3. **Keamanan dan Ketertiban** yaitu masih adanya penyalahgunaan narkoba dan potensi konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.
4. **Administrasi dan Pengawasan** yaitu pentingnya optimalisasi dalam administrasi dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan, kegiatan keramaian, serta orang asing di Kota Makassar.
5. **Kerukunan dan Ketahanan Sosial** yaitu potensi konflik antar umat beragama dan aliran kepercayaan yang dapat mengganggu kerukunan sosial di Kota Makassar.
6. **Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)** yaitu kebutuhan akan pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai bidang, termasuk kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan.
7. **Pengelolaan Keuangan dan Bantuan** yaitu akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan bantuan yang bersumber dari APBD, termasuk bantuan kepada partai politik dan instansi vertikal terkait lainnya.
8. **Keamanan dan Pencegahan** yaitu meningkatkan pengawasan terhadap orang asing dan mengelola kegiatan unjuk rasa agar tidak mengganggu ketertiban umum.

Isu-isu strategis yang telah diuraikan di atas berpotensi memberikan dampak signifikan, yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis yang tepat sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian visi Pemerintah Kota Makassar, yaitu **"Percepatan**

Mewujudkan Makassar kota Dunia Yang Sombere' & Smart City dengan Imunitas Kuat Untuk Semua". Langkah-langkah strategis tersebut meliputi :

1. **Penguatan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila** yaitu :
   a. Pendidikan dan Sosialisasi yaitu Mengadakan program pendidikan dan sosialisasi tentang Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) secara rutin di sekolah-sekolah dan komunitas/kelompok masyarakat.
   b. Dialog dan Diskusi yaitu Menyelenggarakan dialog kebangsaan secara periodik, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
   c. Pembentukan Tim Kerja yaitu Memperkuat peran Tim Forum Pembauran Kebangsaan dan Tim Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan terkait.

2. **Partisipasi dan Pendidikan Politik** yaitu :
   a. Pendidikan dan Pelatihan yaitu mengadakan pelatihan dan pendidikan politik yang menyeluruh untuk berbagai segmen masyarakat, termasuk perempuan, pemilih muda, dan tokoh masyarakat.
   b. Dialog dan Forum Diskusi yaitu menggelar dialog dan forum diskusi tentang pentingnya partisipasi politik dan mekanisme pengawasan pemilu.
   c. Peningkatan Kapasitas yaitu meningkatkan kapasitas perempuan dalam lembaga politik untuk memastikan kesetaraan gender.
   d. Satgas dan Dukungan Teknis yaitu membentuk Satgas untuk peningkatan partisipasi pemilih dan pengawasan partisipatif, serta mendukung Tim DESK Pemilihan Umum dan Pilkada.

3. **Keamanan dan Ketertiban** yaitu :
   a. Deteksi dan Pencegahan yaitu meningkatkan kegiatan deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, melalui pemeriksaan dan pendataan pengguna narkoba.
   b. Penyuluhan dan Edukasi yaitu mengadakan penyuluhan bahaya narkoba secara rutin di sekolah-sekolah dan komunitas/kelompok masyarakat.
   c. Pengelolaan Konflik yaitu membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan meningkatkan kewaspadaan dini melalui koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga terkait, seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).
   d. Pengendalian Aksi yaitu mengontrol kegiatan aksi unjuk rasa dengan pendekatan yang humanis dan dialogis untuk menjaga ketertiban umum.

b. Pengendalian Unjuk Rasa yaitu menerapkan pendekatan yang lebih dialogis dan preventif dalam menangani aksi unjuk rasa, dengan melakukan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.

Delapan langkah strategis yang diuraikan di atas, diharapkan dapat menjadi prioritas utama dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2025. Dengan penetapan prioritas ini, diharapkan langkah-langkah tersebut akan mendapatkan alokasi anggaran yang memadai, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan mendukung pencapaian visi Pemerintah Kota Makassar.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, menetapkan prioritas pembangunan daerah yang menyelaraskan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makasar Tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026 dan hal ini terdapat pada Misi I **"Revolusi SDM dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi"** dengan program strategis **"Perkuatan Kelmanan Umat"**. Adapun program dan kegiatan yang berkaitan yaitu :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
      1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
      2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
      3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
      4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
      5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

6) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

Adapun pagu anggaran program dan kegiatan di atas, disesuaikan dengan plafon pagu indikatif yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2025.

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar tahun 2025 dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan anggaran tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD. Hal ini disebabkan karena rancangan awal RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, pada program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang kemudian mengalami penyesuaian pemuktahiran dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga program, kegiatan, indikator, target, serta satuan target juga mengalami pemutakhiran. begitu juga dengan kebutuhan pagu anggaran terjadi kenaikan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Pemerintah Kota Makassar. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dapat disajikan pada pada **Tabel T-C-31** berikut :

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAKASSAR

No					Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	**0**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Makassar**	**Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**100% 8 Dokumen**	**8.292.597.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Makassar**	**Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**100% 8 Dokumen**	**6.694.413.000**	
						Makassar	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**			**Makassar**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**		
						Makassar	**Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas**	**100% 15 Orang**			**Makassar**	**Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas**	**100% 15 Orang**		
0	**0**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Renja, Renstra, Dokumen RKA, Dokumen DPA dan LAKIP Perangkat Daerah**	**8 Dokumen**	**349.832.048**	**Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Renja, Renstra, Dokumen RKA, Dokumen DPA dan LAKIP Perangkat Daerah**	**8 Dokumen**	**92.094.000**	
0	0	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	2 Dokumen	316.816.340	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	2 Dokumen	58.686.000	
0	0	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	14.225.348	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 Dokumen	4.545.000	
0	0	1	2.01	3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	8.494.101	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	3.420.000	
0	0	1	2.01	4	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 Dokumen	8.477.068	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 Dokumen	4.945.000	

No					Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	1	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	1 519.191	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	4 440 000	
0	0	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.500 000	
0	0	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10 568.000	
0	**0**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**4.630.650.415**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**5.237.960.710**	
0	0	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang / Bulan	4 170 371.207	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang / Bulan	4 790 597 910	
0	0	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	437.423 490	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	268 250 000	
0	0	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	22.855.718	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	181.082 500	
0	0	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	-	
0	0	1	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	-	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	-	
0	0	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	-	

No					Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	0 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	0 Laporan	-	
0	0	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Makassar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Makassar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	-	
0	**0**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**190 379.149**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**190.000.000**	
0	0	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	76 Paket	54.110 149	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	
0	0	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	136.269 000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	190.000.000	
0	**0**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**424.776.024**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**380 842.690**	
0	0	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	4.253 296	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	4 594 970	
0	0	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0 Paket	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	45.279.720	
0	0	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	79.782.093	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.678 000	
0	0	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.410 000	
0	0	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	39.245.472	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	54 000 000	

No					Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	301.495.163	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	221.880.000	
0	**0**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4 Dokumen**	**1.993.829.817**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0 Dokumen**	-	
0	0	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	0 Unit	-	
0	0	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	
0	0	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	1.993.829.817	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	
0	0	1	2.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	-	
0	**0**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 Dokumen**	**359.744.482**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 Dokumen**	**529.605.600**	
0	0	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	339.084.966	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	-	
0	0	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	16.436.313	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000	
0	0	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	0 Laporan	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	0 Laporan	-	
0	0	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	4.223.203	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	1 Laporan	517.605.600	
0	**0**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5 Dokumen**	**343.385.005**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5 Dokumen**	**273.918.000**	

No					Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.191.910	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46.380.000	
0	0	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	267.180.602	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	201.350.000	
0	0	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Di pelihara	0 Unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Di pelihara	50 Unit	26.180.000	
0	0	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	-	
0	0	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	31.012.553	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	
8	**1**	**2**			**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Makassar**	**Persentase Kelompok Masyarakat yang yang Mendapat Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**80% 1300 Orang**	**1.410.120.000**	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Makassar**	**Persentase Kelompok Masyarakat yang yang Mendapat Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**80% 1300 Orang**	**2.493.592.840**	
8	**1**	**2**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Makassar**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**2 Dokumen**	**1.410.120.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Makassar**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**2 Dokumen**	**2.493.592.840**	
8	1	2	1.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Makassar	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0 Dokumen	-	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Makassar	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0 Dokumen	-	
8	1	2	1.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan yang di Susun	2 Dokumen	1.410.120.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan yang di Susun	2 Dokumen	268.086.440	

No					Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1	2	1.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Orang	-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Orang	-	
6	1	2	1.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Orang	-	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	81 Orang	52.977.400	
6	1	2	1.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Laporan	-	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Laporan	-	
6	1	2	1.01	6	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0 Dokumen	-	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0 Keluarga	-	
6	1	2	1.01	7	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	0 Dokumen	-	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Makassar	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	2.060.909.000	
6	1	2	1.01	8	Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka	0 Orang	-	Pembentukan Paskibraka	Makassar	Jumlah Paskibraka	70 Orang	111.620.000	

No					Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1	2	1.01	9	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila		Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	-	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Makassar	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	-	
8	1	2	1.01	10	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	-	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Makassar	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	-	
8	1	2	1.01	11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Orang	-	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Makassar	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Orang	-	
8	1	3			**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Makassar**	**Persentase Partai Politik yang mendapat Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**100% 1810 Orang**	**3.080.522.000**	**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Makassar**	**Persentase Partai Politik yang mendapat Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**100% 1810 Orang**	**3.785.489.000**	
8	1	3	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta**	**Makassar**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**2 Dokumen**	**3.080.522.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Makassar**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**2 Dokumen**	**3.785.489.000**	
8	1	3	1.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	1.772.512.016	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen		

No					Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1	3	1.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perw kilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Makassar	Jumlah Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Yang Disusun	0 Dokumen	-	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perw kilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Makassar	Jumlah Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Yang Disusun	0 Dokumen	-	
8	1	3	1.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0 Orang	-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0 Orang	-	
8	1	3	1.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perw kilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	1.308.009.982	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perw kilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah, serta pemantauan situasi politik di Daerah	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	3.785.469.600	Terdapat anggaran Bantuan Hibah kepada Partai Politik sebagai Berikut : 1. Partai Golongan Karya sebesar Rp.486.045.000,- 2. Partai Amanat Nasional sebesar Rp.305.750.000,- 3. PDIP sebesar Rp.284.200.000,- 4. Partai Demokrat sebesar Rp.252.075.000,- 5. Partai Gerindra sebesar Rp.378.790.000,- 6. Partai Hanura sebesar Rp.152.610.000,- 7. PKS sebesar Rp.398.355.000,- 8. PKB sebesar Rp.334.670.000,- 9. Partai Nasdem sebesar Rp.473.780.000,-

No					Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
															10 Partai Perindo sebesar Rp.105.135.000,- 11. PPP sebesar Rp.278.975.000,- Total Jumlah Bantuan Hibah kepada Partai Politik sebesar Rp.3.420.385.000,-
8	1	3	1.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0 Laporan	-	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0 Laporan	-	
8	1	3	2.01	6	Pelaksanaan tugas Paskibraka		Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	0 Laporan	-	Pelaksanaan tugas Paskibraka		Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	0 Laporan	-	
8	**1**	**4**			**Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Makassar**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar Dan Mendapat Pembinaan**	**100% 284 Ormas**	**7.614.879.000**	**Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Makassar**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar Dan Mendapat Pembinaan**	**100% 284 Ormas**	**1.297.294.000**	
8	**1**	**4**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Penuntapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Makassar**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**2 Dokumen**	**7.614.879.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Makassar**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**2 Dokumen**	**1.297.294.000**	
8	1	4	1.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	500.767.658	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	1.297.294.000	Terdapat anggaran bantuan hibah sepeda 2 Purna Paskibraka Indonesia (PPI) sebesar Rp.750.000.000,- 3 Resimen Mahasiswa (MENWA) sebesar Rp.350.000.000,- Total anggaran hibah sebesar Rp.1.100.000.000,-

No					Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1	4	1.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Makassar	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	7.114.111.342	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Makassar	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	-	
8	1	4	1.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Orang	-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Orang	-	
8	1	4	1.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Orang	-	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Orang	-	
8	1	4	1.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Laporan	-	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Laporan	-	
8	**1**	**5**			**Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**	**Makassar**	**Persentase Kelompok Masyarakat Yang Berpartisipasi dan Mendapat Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**	**100% 1300 Orang**	**465.208.000**	**Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**	**Makassar**	**Persentase Kelompok Masyarakat Yang Berpartisipasi dan Mendapat Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**	**100% 1300 Orang**	**1.289.321.240**	
8	**1**	**5**	**1.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Penentapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**	**Makassar**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Penentapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**2 Dokumen**	**465.208.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Penentapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**	**Makassar**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Penentapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**2 Dokumen**	**1.289.321.240**	

No					Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1	5	1.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	0 Dokumen	-	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	0 Dokumen	-	
8	1	5	1.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Makassar	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	41.987.323	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Makassar	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	-	
8	1	5	1.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Orang	-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Orang	-	
8	1	5	1.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	423.220.677	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	1.289.321.240	Terdapat anggaran bantuan hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar sebesar Rp.1 000.000 000,-
8	1	5	1.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	0 Laporan		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Laporan		

No					Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
8	1	6			**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Makassar**	**Persentase Kelompok Masyarakat yang Mendapat Pemahaman Terhadap Pencegahan Konflik Sosial**	**100% 1300 Orang**	**731.940.000**	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Makassar**	**Persentase Kelompok Masyarakat yang Mendapat Pemahaman Terhadap Pencegahan Konflik Sosial**	**100% 1300 Orang**	**21.142.869.320**	
II	1	6	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Makassar**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**2 Dokumen**	**731 940.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Makassar**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**2 Dokumen**	**21.142.869.320**	
8	1	6	1.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Program Kerja Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	260 901.316	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Program Kerja Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	19 864 403.240	Terdapat anggaran bantuan hibah kepada 4 Polrestabes Makassar sebesar Rp.10.000.000.000,- 5 Polres Pelabuhan Makassar sebesar Rp.5 400 000.000,- 6 Kodim 1408/Makassar sebesar Rp.4,100.000.000,- Atau dengan total anggaran sebesar Rp 19 500 000 000,-
8	1	6	1.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Makassar	Jumlah Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	471.038.684	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Makassar	Jumlah Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	335.503 400	



No					Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1	6	1.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Orang	-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Orang	-	
8	1	6	1.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Orang	-	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Orang	-	
8	1	6	1.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Laporan	-	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Laporan	-	
8	1	6	1.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.142.982.680	
								JUMLAH	**21.595.266.000**					**36.703.000.000**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel T-C.32 berikut :

TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KOTA MAKASSAR

NO / KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				
08.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				
08.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Makassar**	**Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**100% (8 Dokumen)**	
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	**100%**	
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	**100% (15 Orang)**	
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah Dokumen Renja, Renstra, Dokumen RKA, Dokumen DPA dan LAKIP Perangkat Daerah**	**8 Dokumen**	
8 01.01.2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	
8.01 01.2 01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
8 01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	
8 01.01.2 01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	
8.01.01.2 01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	
8.01.01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**II Dokumen**	
8 01.01 2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	
8.01 01 2 02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
8 01.01 2 02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makasser	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	



NO / KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	
8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang	
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**0 Dokumen**	
8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	
8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 Dokumen**	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5 Dokumen**	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	



NO / KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	
08.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		**Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapat Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	100%	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Kota Makassar**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**2 Dokumen**	
8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0 Dokumen	
8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	- Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait wawasan kebangsaan di Kelurahan Pisang Utara 1 Kegiatan dengan anggaran Rp.12.700.000 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber dari lokal di Kelurahan Mangkura 1 Kegiatan dengan anggaran Rp.12.700.000
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Orang	
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	81 Orang	
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Laporan	
8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kota Makassar	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0 Keluarga	
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka	Kota Makassar	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Kota Makassar	Jumlah Paskibraka	70 Orang	
8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Makassar	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	
8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Makassar	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	

NO / KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Makassar	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	0 Orang	
08.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		**Persentase Partai Politik yang mendapat Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	**100%**	
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Kota Makassar**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**2 Dokumen**	
8.01 03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0 Orang	
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0 Laporan	
8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Kota Makassar	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	0 Kegiatan	
08.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar dan mendapat pembinaan**	**100%**	
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Kota Makassar**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**2 Dokumen**	

NO / KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	
8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Orang	
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Orang	
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Laporan	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**		**Persentase Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dan mendapat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**100%**	
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Kota Makassar**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**2 Dokumen**	
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	
8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Orang	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	- Melakukan FGD untuk meningkatkan kerukunan Beragama Masyarakat di Kelurahan Tamalabba 3 kegiatan dengan anggaran Rp 76.200.000 - Melakukan Penyuluhan pencegahan bahaya narkoba bagi masyarakat di Kelurahan Untia 2 kegiatan dengan anggaran Rp.25 400.000 - Melakukan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Narkoba bagi masyarakat khususnya remaja di

NO / KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
					Kelurahan Pisang Selatan 1 kegiatan dengan anggaran Rp.12.700.000
					- Penyuluhan dan Pencegahan Bahaya Narkoba/Narkotika/Pengisap Lem dan Obat-Obatan berbahaya lainnya bagi masyarakat umu, generasi muda,ank usia muda 1 kegiatan dengan anggaran Rp.12.700.000
					- Melakukan Penyuluhan dan Pencegahan Bahaya Narkoba untuk Masyarakat Kelurahan Mattoanging terutama untuk remaja 2 kegiatan dengan anggaran Rp.25.700.000
					- Melakukan Penyuluhan dan Pencegahan Narkoba/Narkotika/Pengisap Lem dan Obat-Obatan lainnya di kelurahan Tamalanrea Jaya 1 kegiatan dengan anggaran Rp.12.700.000
					- Melakukan Penyuluhan dan Pencegahan Bahaya Narkoba/Pengisap Lem bagi Masyarakat di Kelurahan Bontoala 1 kegiatan dengan anggaran Rp.12.700.000
					- Peningkatan Kerukunan Beragama bagi Masyarakat Kelurahan Totaka 3 kegiatan dengan anggaran Rp.38.100.000
					- Melakukan Penyuluhan pencegahan terhadap bahaya narkoba/narkotika/pengisap lem dan obat-obatan berbahaya lainnya 1 kegiatan dengan anggaran Rp.12.500.000
					- Melakukan Pembinaan kepada remaja tentang pemahaman psikososial dan kesehatan bagi remaja di Kelurahan Pattingaloang 3 kegiatan dengan anggaran Rp.38.100.004
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Laporan	
08.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**		**Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapat Pemahaman terhadap Pencegahan Konflik Sosial**	**100%**	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Kota Makassar**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**2 Dokumen**	
8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	

NO / KODE	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Orang	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Orang	
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Laporan	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan untuk memastikan bahwa pemilihan tersebut dilaksanakan secara demokratis, tertib, aman, dan terkendali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan ini. Pedoman tersebut mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi, menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta memastikan koordinasi yang baik dengan instansi terkait seperti TNI dan Polri. Selain itu, peraturan ini mengamanatkan pembentukan Desk Pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan Pilkada, serta mengelola pendanaan yang bersumber dari APBD. Peraturan ini juga diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mengatur ketentuan yang lebih lanjut mengenai tanggung jawab, dukungan, pengendalian, dan pendanaan pelaksanaan Pilkada.

Dalam konteks Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) memainkan peran yang sangat penting. Badan Kesbangpol bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk TNI, Polri, dan instansi lainnya, untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada. Mereka juga terlibat dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak pilih dan

proses pemilihan, yang penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan memastikan pemilihan yang demokratis. Selain itu, Badan Kesbangpol mengawasi pelaksanaan Pilkada di daerahnya, mengevaluasi proses tersebut, dan memberikan masukan untuk perbaikan jika diperlukan. Mereka membantu dalam pembentukan dan pengelolaan Desk Pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang berfungsi untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan Pilkada serta menangani permasalahan yang mungkin timbul. Badan Kesbangpol juga berperan dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi konflik sosial dan politik, berusaha untuk menyelesaikannya secara damai dan efektif. Secara keseluruhan, Badan Kesbangpol berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat, memastikan pelaksanaan Pilkada yang tertib, aman, dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Visi Kota Makassar 2025 adalah "Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya, dan Jasa yang Berorientasi Internasional, Berwawasan Lingkungan, dan Paling Bersahabat." Visi ini bertujuan untuk menjadikan Makassar sebagai pusat terkemuka dalam berbagai sektor dengan pendekatan yang berfokus pada keberlanjutan dan keterhubungan internasional. Untuk mewujudkan visi ini, perhatian harus difokuskan pada prioritas kebijakan yang dirumuskan dalam RPJPD untuk periode 2005-2025, guna memastikan konsistensi dan kesinambungan dalam pembangunan jangka panjang serta jangka menengah.

Selaras dengan visi tersebut, Visi Pemerintah Kota Makassar adalah "Percepatan Mewujudkan Makassar sebagai Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas Kuat untuk Semua." Visi ini menegaskan komitmen pemerintah kota untuk mempercepat transformasi Makassar menjadi kota internasional dengan karakteristik ramah, modern, dan berdaya tahan. Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah konkret perlu diambil, termasuk melaksanakan misi, mengatasi permasalahan, dan menangani isu strategis. Salah satu tujuan utama dalam mendukung misi ini adalah "Revolusi SDM dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia yang bersih dari indikasi korupsi." Selain itu, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal RKPD, Program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar mempunyai 6 (enam) rumusan program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dengan total pagu sebesar **Rp.36.703.000.000**,-. Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yaitu :

A. Program Pendukung

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2) Pendidikan dan Pelatiahan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Utama yaitu :

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

a. **Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
6) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
7) Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
8) Pembentukan Paskibraka
9) Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
10) Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
11) Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
6) Pelaksanaan tugas Paskibraka

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
6) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Selanjutnya program dan kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaannya sebagai berikut :

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA MAKASSAR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MAKASSAR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**36.703.000.000,00**				**23.582.417.000,00**
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				**36.703.000.000,00**				**23.582.417.000,00**
.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**36.703.000.000,00**				**23.582.417.000,00**
.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**100% (8 Dokumen)**	**6.694.413.000,00**			**100% (8 Dokumen)**	**9.055.665.000,00**
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		**100 %**				**100 %**	
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas		**100% (15 Orang)**				**100% (15 Orang)**	
.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Jumlah Dokumen Renja, Renstra, Dokumen RKA, Dokumen DPA dan LAKIP Perangkat Daerah***	**Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**8 Dokumen**	**92.094.000,00**			**8 Dokumen**	**367.323.650,00**
01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	2 Dokumen	58.686.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	332.657.157,00



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	1 Dokumen	4.545.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	14.936.615,00
3.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	3.420.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	8.918.806,00
3.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	1 Dokumen	4.945.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	8.900.921,00
3.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.440.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	1.910.151,00
3.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	1 Laporan	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	0,00
3.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	1 Laporan	10.558.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	0,00
3.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**8 Dokumen**	**5.237.960.710,00**			**8 Dokumen**	**4.862.182.936,00**
3.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Orang/bulan	4.790.597.910,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Orang/bulan	4.378.889.767,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	266.280.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	459.294.665,00
3.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	1 Dokumen	181.082.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	23.998.504,00
3.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**2 Dokumen**	**180.000.000,00**			**2 Dokumen**	**199.898.106,00**
3.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Paket	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		76 Paket	56.815.656,00
3.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	29 Orang	180.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		29 Orang	143.082.450,00
3.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**6 Dikumen**	**380.842.690,00**			**6 Dikumen**	**446.014.825,00**
3.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	4.594.970,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	4.465.961,00
3.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	1 Paket	45.279.720,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	0,00
3.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	38.678.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	83.771.197,00
3.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	1 Paket	16.410.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 01 01.2 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	54 000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	41.207.746,00
3 01 01 2 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	221 880 000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	316 569.921,00
3.01.01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**0 Dokumen**	**0,00**			**4 Dokumen**	**2.441.959.457,00**
3 01.01.2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	0 Unit	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	0,00
3.01 01 2 07.0002	Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	0 Unit	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Unit	0,00
3.01 01 2 07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Unit	2.441.959.457,00
3.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**4 Dokumen**	**529.606.600,00**			**4 Dokumen**	**377.731.706,00**
3.01 01 2 08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Laporan	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	356.039 214,00
3.01 01 2 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	12 000 000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	17.258 128,00



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	0 Laporan	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	0,00
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	1 Laporan	517.605.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	4.434.364,00
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa**	**5 Dokumen**	**273.910.000,00**			**5 Dokumen**	**360.564.320,00**
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	Kota Makasser, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	1 Unit	46.380.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	47.451.506,00
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibeyarkan Pajak dan Perizinannya*	Kota Makasser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	201.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	280.539.633,00
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kota Makasser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Unit	26.180.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Unit	0,00
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Makasser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	32.563.181,00
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapat Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***		**100 %**	**2.493.592.840,00**			**100 %**	**1.539.876.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	***Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	**Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa**	**2 Dokumen**	**2.493.592.840,00**			**2 Dokumen**	**1.539.876.000,00**
8 01 02 2 01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	0 Dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	0,00
8 01.02 2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun*	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	2 Dokumen	268.086.440,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	1 539 876.000,00
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	0 Orang	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Orang	0,00
8 01.02 2 01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	81 Orang	52 977 400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		81 Orang	0,00



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	0 Laporan	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	0,00
8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	0 Keluarga	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Keluarga	0,00
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	*Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka*	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.060.909.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	0,00
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	*Jumlah Paskibraka*	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	70 Orang	111.620.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70 Orang	0,00
8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	0 Dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	0,00
8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	0 Dokumen	0,00	-		0 Dokumen	0,00
8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	0 Orang	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Orang	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Persentase Partai Politik yang mendapat Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik***		**100 %**	**3.785.489.600,00**			**100 %**	**3.363.986.000,00**
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	***Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik***	**Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa**	**2 Dokumen**	**3.785.489.600,00**			**2 Dokumen**	**3.363.986.000,00**
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	0 Dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	2.768.525.319,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 01.03 2 01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	0 Dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	0,00
3 01.03 2 01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	0 Orang	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Orang	0,00
3.01 03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	3.785 489.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terdapat anggaran Bantuan Hibah kepada Partai Politik sebagai Berikut Partai Golongan Karya sebesar Rp.486 045.000,- Partai Amanat Nasional sebesar Rp.305.750.000,- PDIP sebesar Rp.284 200.000,- Partai Demokrat sebesar Rp.252 075 000,- Partai Gerindra sebesar Rp.378.790.000,-	50 Orang	595 459 681,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Partai Hanura sebesar Rp 152 610.000,- PKS sebesar Rp.398.355 000,- PKB sebesar Rp.334 670 000,- Partai Nasdem sebesar Rp 473 780.000,- Partai Perindo sebesar Rp 105.135 000,- PPP sebesar Rp.278 975 000,- Total Jumlah Bantuan Hibah kepada Partai Politik sebesar Rp 3 420 385 000,-		
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	0 Laporan	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	0,00
8 01 03 2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	0 Kegiatan	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Kegiatan	0,00
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar dan mendapat pembinaan***		**100 %**	**1.297.294.000,00**			**100 %**	**8.315.584.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	***Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***	**Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa**	**2 Dokumen**	**1.297.294.000,00**			**2 Dokumen**	**8.315.684.000,00**
3.01 04 2 01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun*	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1 297 294 000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terdapat anggaran bantuan hibah kepada : Puma Paskibraka Indonesia (PPI) sebesar Rp.750.000.000,- Resimen Mahasiswa (MENWA) sebesar Rp.350.000.000,- Total anggaran hibah sebesar Rp.1 100 000 000,-	2 Dokumen	845.767.091,00
3 01 04 2 01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	0 Dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	7.469.816.909,00
3.01 04 2 01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Orang	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Orang	
3.01.04.2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	0 Orang	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Orang	0,00



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	0 Laporan	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	0,00
.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***Persentase Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dan mendapat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***		**100 %**	**1.289.321.240,00**			**100 %**	**508.016.000,00**
.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	***Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***	**Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa**	**2 Dokumen**	**1.289.321.240,00**			**2 Dokumen**	**508.016.000,00**
.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	0 Dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Dokumen	0,00
.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	0 Dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	44.086.690,00
.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Orang	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Orang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	1.289.321.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terdapat anggaran bantuan hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar sebesar Rp.1.000.000.000,-	100 Orang	463.929.310,00
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	0 Laporan	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	0,00
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapat Pemahaman terhadap Pencegahan Konflik Sosial***		**100 %**	**21.142.889.320,00**			**100 %**	**799.291.000,00**
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	***Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***	**Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa**	**2 Dokumen**	**21.142.889.320,00**			**2 Dokumen**	**799.291.000,00**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun*	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	19.664.403.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Terdapat anggaran bantuan hibah kepada . Polrestabes Makassar sebesar Rp 10.000 000.000,- Polres Pelabuhan Makassar sebesar Rp.5.400.000.000,- Kodim 1408/Makassar sebesar Rp.4 100.000.000,- Atau dengan total anggaran sebesar Rp.19.500.000.000,-	2 Dokumen	304 700 382,00
3.01 06 2 01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun*	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	2 Dokumen	335.503 400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	494.590.618,00
3.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Orang	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Orang	0,00



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	0 Orang	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Orang	0,00
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	0 Laporan	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0 Laporan	0,00
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota*	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	2 Dokumen	1.142.982.680,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	0,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2025 yang dibahas pada Bab III, dengan merujuk kepada hasil evaluasi kinerja Tahun 2023, tujuan dan sasaran, Program Prioritas Daerah dalam RPJPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah berisikan Program dan Kegiatan, dimana dalam setiap program kerja operasional selanjutnya dijabarkan ke dalam sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar menetapkan Rencana Kerja dan Pendanaan indikatif Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 58.686.000,-
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.545.000,-
3) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.420.000,-
4) Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.945.000,-
5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.440.000,-
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.500.000,-
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 10.558.000,-

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.790.597.910,-
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu indikatif sebesar Rp. 266.280.000,-
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 181.082.800,-

c. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0,-
2) Pendidikan dan Pelatiahan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan pagu indikatif sebesar Rp. 180.000.000,-

d. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp.4.594.970,-
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp.45.279.720,-
3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp.38.678.000,-
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 16.410.000,-
5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 54.000.000 ,-
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 221.880.000,-

e. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 0,-
2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0,-
3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0,-

f. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0,-
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu indikatif sebesar Rp. 12.000.000,-
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0,-
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp.517.605.600,-

g. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 46.380.000,-
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu indikatif sebesar Rp.201.350.000,-
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu indikatif sebesar Rp. 26.180.000,-
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0,-

2. **Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**

a. **Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan pagu indikatif sebesar Rp.0,-
2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 268.086.440,-
3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan pagu indikatif sebesar Rp.0,-
4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan pagu indikatif sebesar Rp.52.977.400,-
5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan pagu indikatif sebesar Rp.0,-
6) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara dengan pagu indikatif sebesar Rp.0,-
7) Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka dengan pagu indikatif sebesar Rp. 2.060.909.000,-

8) Pembentukan Paskibraka dengan pagu indikatif sebesar Rp. 111.620.000,-
9) Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0,-
10) Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila dengan pagu indikatif sebesar Rp.0-
11) Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila dengan pagu indikatif sebesar Rp.0-

3. **Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**
   a. **Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**
      1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp.0,-
      2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp.0,-
      3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp.0,-
      4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.785.489.600,-
      5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp.0,-

6) Pelaksanaan tugas Paskibraka dengan pagu indikatif dengan pagu indikatif sebesar Rp.0-

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1) Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.297.294.000,-
2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp.0,-
3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0,-
4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp.0,-
5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp.0,-

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp.0,-
2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp.0,-
3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat

Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp.0,-

4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.289.321.240,-
5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp.0,-

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 19.664.403.240,-
2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 335.503.400,-
3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp.0,-
4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp.0,-
5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp.0,-

6) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.142.982.680,-

Adapun rincian program dan Kegiatan dapat di sajikan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 4-1
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KOTA MAKASSAR
TAHUN 2025

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**36.703.000.000,00**							**23.582.417.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**			**36.703.000.000,00**							**23.582.417.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**36.703.000.000,00**							**23.582.417.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas***	100 %	**6.694.413.000,00**						-	**9.055.665.000,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Renja, Renstra, Dokumen RKA, Dokumen DPA dan LAKIP Perangkat Daerah*	6 Dokumen	92.094.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	367.323.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	58.686.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		332.657.157,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.545.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		14.936.615,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.420.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		8.918.806,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.945.000,00	Kota Makassar Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		8.900.921,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.440.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		1.910.151,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5.500.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.558.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	8 Dokumen	5.237.960.710,00			-	-	Perangkat Daerah	-	4.862.182.936,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	4.790.597.910,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		4.378.889.767,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	266.280.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		459.294.665,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	181.082.800,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		23.998.504,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	2 Dokumen	180.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah	-	199.898.106,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		56.815.656,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang	180.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		143.082.450,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	6 Dikumen	380.842.690,00			-	-	Perangkat Daerah	-	446.014.825,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.594.970,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		4.465.961,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.279.720,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.678.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		83.771.197,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.410.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	54.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		41.207.746,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	221.860.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		316.569.921,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah*	0 Dokumen	0,00			-	-	Perangkat Daerah	-	2.441.959.457,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		2.441.959.457,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Dokumen	529.605.600,00			-	-	Perangkat Daerah	-	377.731.706,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		356.039.214,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		17.258.128,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	517.605.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		4.434.364,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	201 350 000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		280.539 633,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	26.160.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah		32 583.181,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapat Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	**100 %**	**2.493.592 840,00**						**100 %**	**1.539.876.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*	2 Dokumen	2.493 592 840,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan	05 Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Kelompok Masyarakat	-	1.539 876.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Penyandan Disabilitas					
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0 Dokumen	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Kelompok Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	266 066 440,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan	05 Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Kelompok Masyarakat		1 539.876.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Penyandan Disabilitas					
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Orang	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an PD 1 | Peni ngkatan pe mbangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Kelompok Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	81 Orang	52.977.400,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an PD 1 | Peni ngkatan pe mbangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Kelompok Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas					
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Laporan	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an PD 1 | Peni ngkatan pe mbangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Kelompok Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara											
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0 Keluarga	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an PD 1 | Peni ngkatan pe mbangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	Kelompok Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	dan berdaya saing				
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka											
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	2.060.909.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi	05 Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an PD 1 | Peni ngkatan pe mbangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	Kelompok Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
								Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	dan berdaya saing				
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan Paskibraka											
			Jumlah Paskibraka	70 Orang	111.620.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi	05.Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an PD 1 | Peni ngkatan pe mbangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	Kelompok Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	dan berdaya saing				
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Pumapaskibraka Duta Pancasila											
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Pumapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	06.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Kelompok Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Pumapaskibraka Duta Pancasila											
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Pumapaskibraka Duta Pancasila	0 Dokumen	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	Kelompok Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	dan berdaya saing				
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Pumapaskibraka Duta Pancasila											
			Jumlah Pumapaskibraka Duta Pancasila	0 Orang	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi	05 Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	Kelompok Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
								Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	dan berdaya saing				
3.	8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Persentase Partai Politik yang mendapat Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik***	**100 %**	**3.785.489.600,00**						-	**3.363.985.000,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum*	2 Dokumen	3.785.489.600,00			-	-	Pengurus Partai Politik dan Kelompok Masyarakat	-	3.363.985.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pengurus Partai Politik dan Kelompok Masyarakat		2.758.525.319,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pengurus Partai Politik dan Kelompok Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	0 Orang	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pengurus Partai Politik dan Kelompok Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemantauan Situasi Politik di Daerah										
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	3.785.489.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pengurus Partai Politik dan Kelompok Masyarakat		595.459.681,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0 Laporan	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pengurus Partai Politik dan Kelompok Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka											
			Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	0 Kegiatan	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pengurus Partai Politik dan Kelompok Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar dan mendapat pembinaan***	**100 %**	**1.297.294.000,00**						-	**8.315.584.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	2 Dokumen	1 297 294.000,00			-	-	Pengurus Ormas dan Kelompok Masyarakat	-	8 315 584 000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	1 297 294.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pengurus Ormas dan Kelompok Masyarakat		845 767.091,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pengurus Ormas dan Kelompok Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Orang	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pengurus Ormas dan Kelompok Masyarakat		7.469.816.909,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											
			Jumlah [illegible]	1 Dokumen	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pengurus Ormas dan Kelompok Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah										
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Laporan	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pengurus Ormas dan Kelompok Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***Persentase Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dan mendapat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,***	**100 %**	**1.289.321.240,00**						-	**508.016.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*	2 Dokumen	1.289.321.240,00			-	-	Kelompok Masyarakat	-	508.016.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelompok Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	0 Dokumen	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelompok Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun										
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Orang	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelompok Masyarakat		44.086.690,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat K[illegible] di Daerah	100 Orang	1.289.321.240,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelompok Masyarakat		463.929.310,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah											
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Laporan	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelompok masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN**	***Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapat Pemahaman***	**100 %**	**21.142.889.320,00**						-	**799.291.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	***terhadap Pencegahan Konflik Sosial***										
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*	2 Dokumen	21.142.889.320,00			-	-	Kelompok Masyarakat	-	799.291.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	19.664.403.240,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelompok Masyarakat		304.700.382,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	335.503.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelompok Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Orang	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelompok Masyarakat		494 590 618,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Orang	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelompok Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Laporan	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelompok Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota											
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.142.982.680,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelompok Masyarakat		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH				**36.703.000.000,00**							**23.562.417.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2025 disusun mengacu pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025. Kegiatan, indikator, target kinerja, dan pagu anggaran disusun dalam matriks yang bersifat indikatif, menjadi acuan dalam penyusunan dokumen penganggaran, seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Diharapkan, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025, guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Makassar, 5 Agustus 2024
Kepala Badan,

H. ANDI BUKTI DJUFRIE, S.P., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690330 199903 1 006

PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

RENJA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025



makassar i❤MC

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
8. Rencana Panjang Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.

Pasal 3

(1) Sistematika RKPD Tahun 2025 terdiri atas:
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
BAB VII PENUTUP.

(2) Uraian sistematika RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025 dan penyusunan RAPBD Tahun 2025.

Pasal 4

(1) Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan, dapat dilakukan Perubahan RKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau;
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

(3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 8 Juli 2024
WALI KOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 8 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

FIRMAN HAMID PAGARRA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 26

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025. Berdasarkan pemahaman dan dengan memperhatikan Visi Walikota dan Wakil Wali Kota, maka Visi Pembangunan Daerah Kota Makassar untuk periode RPJMD 2021–2026 adalah **"Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere' dan *Smart City* dengan Imunitas Kuat Untuk Semua",** sehingga dalam rangka percepatan pelaksanaan visi tersebut, Balitbangda akan berupaya menghasilkan inovasi dan rekomendasi yang bernilai *scientific* dan *impact recognition* yang kreatif, inovatif dan akuntabel.

Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan menjawab tantangan serta permasalahan yang berkaitan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar. Kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2025 serta seluruh pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Renja tersebut.

Semoga Dokumen Rencana Kerja ini dapat menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan Balitbangda yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan secara akuntabel ke depannya. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih belum sempurna, karena itu kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Dokumen Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2025 ini sangat diharapkan dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan yang berkelanjutan.

Makassar, 18 Juli 2024
KEPALA BADAN

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR BALITBANGDA

NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST.,M.AP
NIP. 197304252005021001

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Balitbangda Tahun 2023 dan Capaian Renstra Balitbangda 8
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2023 8
2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2024 (Triwulan I) 21
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 41
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Balitbangda Kota Makassar 49
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD 50
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 70

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 71
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 71
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar 72
3.3 Program dan Kegiatan 77

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 90

BAB V PENUTUP 118
5.1 Kesimpulan 118
5.2 Rencana Tindak Lanjut 119

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Hal

2.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2023 17
2.2 Evaluasi Hasil Rencana Kerja SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Triwulan I Tahun 2024 29
2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Balitbangda Kota Makassar dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (T-C.29) 35
2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Kota Makassar (T-C.30) 45
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2025 (T-C.31) 52
2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Makassar (T-C.32) 70
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar 73
3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Balitbangda Kota Makassar 77
3.3 Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Balitbangda Kota Makassar Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 (T-C.33) 78
4.1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2025 Unit Kerja: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 92

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pada dasarnya merupakan patokan untuk mempermudah tercapainya tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan adalah suatu proses yang menguraikan tujuan dari organisasi, serta menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menjadi dasar dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia. Pemerintah Kota Makassar mengemban tugas dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kota Makassar melalui proses perencanaan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, transparan dan didukung oleh ketersediaan sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaannya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) oleh perangkat daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode jangka pendek satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan. Dokumen tersebut disusun dengan berpedoman kepada rencana strategis pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh Perangkat Daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, dilakukan melalui 6 (enam) tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan Forum PD
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD

6. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8), Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional berimplikasi pada dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang bertugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi di lingkup Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan BRIN.

Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 diarahkan guna mendukung penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah sesuai peran Badan Riset dan Inovasi Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435).
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5, tambahan lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5);
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 104 Tahun 2021);
18. Peraturan Walikota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2025. (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar adalah :

1. Untuk merumuskan rencana kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan renstra perangkat daerah
2. Untuk mewujudkan komitmen dan konsistensi pada perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan secara konsekuen

berdasarkan prinsip-prinsip prioritas pembangunan daerah pada Balitbangda Kota Makassar.

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah :

1. Untuk memberikan arah bagi dimensi kebijakan dan program strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pengelolaan pembangunan, secara umum dan khususnya kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang terakomodir pada Balitbangda Kota Makassar.

2. Sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan serta mengevaluasi hasil kinerja pada Balitangda Kota Makassar setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Awal Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2025 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Balitbangda, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara dokumen Renja Balitbangda dengan dokumen RKPD 2025, Renstra Balitbangda serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, kewenangan Balitbangda, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Balitbangda.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

Balitbangda.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Balitbangda, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Balitbangda tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Balibangda berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Balitbangda tahun-tahun sebelumnya yang mengacu pada hasil laporan hasil kinerja tahunan Balitbangda atau realisasi APBD Balitbangda.

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini berisikan kajian terhadap pencapaian kinerja pelayanan Balitbangda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK. Dijelaskan mengenai 7 peran utama kelitbangan, kinerja Balitbangda dalam tugasnya membantu Wali Kota Makassar, dan indikator peningkatan kualitas serta capaian indikatornya.

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian ini dijelaskan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Balitbangda, permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Balitbangda, beberapa poin mengenai isu-isu strategis yang terdapat pada Balitbangda. Diantaranya adalah permasalahan yang dihadapi, peluang/*opportunity* di tahun 2025, dan ancaman yang harus diantisipasi di tahun 2025.

2. 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada bagian ini berisi hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kota Makassar tahun 2025 yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator dan target kinerja program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan di Balitbangda.

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini berisi mengenai penelaahan usulan dari masyarakat terkait program dan kegiatan yang didapatkan melalui Musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini berisi tentang Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Balitbangda.

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada bagian ini berisi tentang keterkaitan antara tujuan dan sasaran Renja Balitbangda Kota Makassar yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra Balitangda.

3. 3. Program dan Kegiatan

Bagian ini berisi tentang rincian rumusan rencana program dan kegiatan, indikator, target capaian kinerja, kebutuhan dana yang ada pada Balitbangda untuk tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memberikan gambaran umum tentang kondisi rumusan Rencana Kerja dan Program Balitbangda Tahun 2025 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan beberapa kaidah untuk memenuhi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Renja Balitbangda Tahun 2025 dan rencana tindak lanjut Balitbangda sebagai pusat penelitian dan pengembangan daerah.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, serta realisasi Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan atau realisasi keuangan Perangkat Daerah, ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan dari Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar, faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Reviu yang dimaksud adalah evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar tahun 2023, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar tahun 2021-2026.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2023

Secara Keseluruhan, baik tingkat capaian kinerja atau realisasi anggaran Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023 memiliki predikat kinerja **sangat tinggi**. Tingkat capaian kinerja Balitbangda tercatat pada angka 99,37%. Adapun kondisi keuangan adalah sebesar Rp.15.423.589.227,- dengan realisasi sebesar Rp,11.808.919.917,- atau sebesar 89,53%. Alokasi belanja untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2023 sebesar Rp.7.599.881.167,- atau sebesar (Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh

Tujuh Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.439.347.160,50 (Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah Lima Puluh Sen) atau sebesar 84,73%.

Adapun alokasi belanja untuk Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp.7.823 708.060,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Enam Puluh Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.369.572.756,50,- (Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah Lima Puluh Sen). Predikat kinerja keuangan untuk program ini juga sangat tinggi yaitu sebesar 94,20%. Pencapaian-pencapaian tersebut, didukung oleh pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang terjabarkan secara spesifik sebagai berikut :

A. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pencapaian tingkat kinerja dan realisasi anggaran Program Penelitian dan Pengembangan Daerah didukung oleh pelaksanaan kegiatan berikut:

1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan. yang terbagi menjadi 5 (lima) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.876.008.715,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.680.221.417,75 atau sebesar 89,56%. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
   1. 1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.395.716.634,50 atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 92,18% dengan realisasi kinerja 100%.
   1. 2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.159.904.785,50 atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 84,58% dengan realisasi kinerja 100%.
   1. 3. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.438.140.262,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 92,21% dengan realisasi kinerja 100%.

1. 4. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.89.042.650,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 80,76% dengan realisasi kinerja 100%.

1. 5. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.597.417.085,75,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 88,87% dengan realisasi kinerja 100%.

2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang terbagi menjadi 3 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.637.475.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.554.456.003,- atau sebesar 96,85%. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

2.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial dengan realisasi anggaran sebesar Rp.579.010.085,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 97,70% dengan realisasi kinerja 100%;

2.2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.315.768.960,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 95,43% dengan realisasi kinerja 100%;

2.3 Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan realisasi anggaran sebesar Rp.178.147.700,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 97,15% dengan realisasi kinerja 100%;

2.4 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja dengan realisasi anggaran sebesar Rp.317.347.759,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 95,56% dengan realisasi kinerja 100%;

2.5 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar Rp.**1**.162.181.499,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 96,97% dengan realisasi kinerja 100%.

3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, yang terbagi menjadi 4 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.758.477.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.726.399.330,50

atau sebesar 98,18%. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:

3.1. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.510.938.135,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 97,47% dengan realisasi kinerja 100%;

3.2. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dengan realisasi anggaran sebesar Rp.509.281.410,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 97,37% dengan realisasi kinerja 100%;

3.3. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp.480.388.985,50,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 99,43% dengan realisasi kinerja 100%;

3.4. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.225.790.800,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 98,98% dengan realisasi kinerja 100%.

4) Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang terbagi menjadi 5 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.551.746.545,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.408.496.005,25 atau sebesar 90,77%. dengan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

4.1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp.374.905.058,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 92,59% dengan realisasi kinerja 100%;

4.2. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi dengan realisasi anggaran sebesar Rp.347.762.742,25,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 91,03% dengan realisasi kinerja 100%;

4.3. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.143.671.684,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 79,20% dengan realisasi kinerja 100%;

4.4. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.228.550.710,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 93,94% dengan realisasi kinerja 100%;

4.4. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dengan realisasi anggaran sebesar Rp.313.605.811,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 92,20% dengan realisasi kinerja 100%.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terbagi menjadi 7 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.248.474.050,- dan realisasi kinerja sebesar Rp. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:

1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.279.250,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 64,58% dengan realisasi kinerja 100%;

1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.966.750,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 99,61% dengan realisasi kinerja 100%;

1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.957.550,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 99,97% dengan realisasi kinerja 100%;

1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.719.700,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 99,67% dengan realisasi kinerja 100%;

1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.067.100,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 99,64% dengan realisasi kinerja 100%;

1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan realisasi anggaran

sebesar Rp.129.522.056,50,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 99,76% dengan realisasi kinerja 99,76%;

1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.11.589.350,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 16,49% dengan realisasi kinerja 100%.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terbagi menjadi 5 sub kegiatan dengan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.4.635.606.367,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.744.081.238,- atau sebesar 80,77%. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:

2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.328.515.538,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 78,99% dengan realisasi kinerja 75%;

2 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan realisasi anggaran sebesar Rp 242.825.500,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 98,93% dengan realisasi kinerja 100%;

2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.151.582.900,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 97,63% dengan realisasi kinerja 100%;

2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.999.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 99,52% dengan realisasi kinerja 100%;

2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.158.300.000,-. atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 99,95% dengan realisasi kinerja 100%.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.1.001.380.000,-

dan realisasi keuangan sebesar Rp.916.368.099,- atau sebesar 91,51%. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:

3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.32.880.000,-. atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 100% dengan realisasi kinerja 100%;

3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan realisasi anggaran sebesar Rp.883.488.099,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 91.22% dengan realisasi kinerja 100%.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terbagi menjadi 5 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.915.226.300,- dan realisasi kinerja sebesar Rp.870.064.571,- atau sebesar 95,07%. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut :

4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi anggaran sebesar Rp.714.000-. atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 34,42% dengan realisasi kinerja 100%;

4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi anggaran sebesar Rp.109.532.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 96,20% dengan realisasi kinerja 100%;

4.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.361.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 87,14% dengan realisasi kinerja 100%;

4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.286.325.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 90,21% dengan realisasi kinerja 100%;

4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.463.132.571,- atau

dengan persentase serapan anggaran sebesar 98,54% dengan realisasi kinerja 100%.

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terbagi menjadi 3 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.314.725 000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.313.600.000,- atau sebesar 99,64%. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:

   5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.124.500.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 100% dengan realisasi kinerja 100%;

   5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp.189.100.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 99,41% dengan realisasi kinerja 100%;

   5.3. Pengadaan Aset tak Berwujud dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,-.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terbagi menjadi 2 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.66.600.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.53.961.449,- atau sebesar 81,02%. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:

   6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi anggaran sebesar Rp.35.961.449,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 73,99% dengan realisasi kinerja 100%;

   6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi anggaran sebesar Rp.18.000.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 100% dengan realisasi kinerja 100%.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terbagi menjadi 5 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.417.869.450,- dan realisasi anggaran

sebesar Rp.303.631.047,- atau sebesar 72,66%. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:

7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.39.302.150,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 96,93% dengan realisasi kinerja 100%;

7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.118.833.897,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 70,08% dengan realisasi kinerja 100%;

7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp.25.495.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 67,54% dengan realisasi kinerja 72,73%;

7.4. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,-

7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp.120.000.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 100% dengan realisasi kinerja 100%,-.

Lebih lanjut, pada tabel 2.1 (E.81) Tahun 2023 disajikan secara lengkap Evaluasi Renja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2023 yang mencakup nomenklatur program dan kegiatan, indikator kinerja, target kinerja program (*outcome*) maupun kinerja kegiatan (*output*), realisasi kinerja dan anggaran sampai akhir tahun.

Tabel 2.1 (E.81)

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2023

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA SKPD
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

No	Kode	Sasaran/Tujuan/Program Pemerintahan Daerah yang Prioritas / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Satuan Ukuran	Target RENSTRA pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
												I		II		III		IV											
					K	Rp. (ribuan)	K	Rp. (ribuan)	K	Rp. (ribuan)	Rp. (000) RPA	K	Rp. (ribu)	K	Rp. (ribu)	K	Rp. (ribu)	K	Rp. (ribu)	K	Rp. (000)			K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5.a	5		6		7			8		9		10		11											
1	Misi: Pemerintahan Lincah Terbaik/Baik																												
1.1	Perencanaan dan Pengembangan																												
II	1.01.01	Perencanaan Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan disusun	Dokumen	40	4.895.450.000,00	10	684.949.150,00	10	4.895.450.000,00	348.499.999,00	3	37.348.300,00	3	67.888.300,00	4	43.196.404,00	3	142.741.000,00	10	197.826.704,00	100	96,04	100	491.000.150,00	40,00	96,79	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.01	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	83.000.000,00	2	28.348.750,00	2	160.116.400,00	28.542.950,00	0	0,00	1	6.878.338,00	0	0,00	1	6.000.000,00	2	19.279.250,00	200	96,56	6	41.000.000,00	30,00	78,14	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.02	Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra)	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.03	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.04	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.05	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LCK)	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.07	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.08	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.09	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.10	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.11	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.12	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.13	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.14	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.15	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.16	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.17	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.18	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.19	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.20	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.21	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.22	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.23	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.24	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.25	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.26	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.27	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.28	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.29	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.30	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.31	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.32	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.33	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.34	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.35	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.36	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.37	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.38	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.39	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	
a	a	1.01.01.40	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Dokumen	1	83.000.000,00	1	83.000.000,00	1	140.000.000,00	0	0	0,00	0	0,00	1	0.000.000,00	0	0,00	1	0.000.000,00	100	100,00	1	83.000.000,00	100,00	100,00	Realisasi capaian	

5	5	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	53	830.374.410,00	31	304.434.000,00	34	2.130.864.830,00	314.725.000,00	0	0,00	0	0,00	0	124.500.000,00	8	188.300.000,00	14	313.000.000,00	100	99,44	86	600.364.000,00	100,00	125,27	Balitbangda	
5	5	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	8	0,00	0	0,00	6	1.408.796.006,00	124.500.000,00	0	0,00	0	0,00	6	124.500.000,00	0	0,00	6	124.500.000,00	100	100	8	124.500.000,00	0,00	0,00	Balitbangda	
5	5	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30	308.374.410,00	21	304.026.000,00	18	1.068.066.866,00	190.225.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	188.300.000,00	18	189.300.000,00	100	99,41	59	404.038.000,00	196,00	121,58	Balitbangda	
5	5	1	2.07	09	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	4	0,00	1	85.474.000,00	0	180.000.000,00		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	99.474.000,00	0,00	0,00	Balitbangda	
5	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Bulan	50	79.190.540,00	12	12.382.500,00	12	310.998.500,00	64.600.000,00	5	8.306.166,00	3	11.962.114,00	3	14.445.761,00	5	17.271.507,00	12	51.984.649,00	100	81,02	34	64.826.000,00	40,00	80,06	Balitbangda	
5	5	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	15	50.580.540,00	3	10.800.000,00	0	10.800.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	10.800.000,00	20,00	21,35	Balitbangda	
5	5	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0,00	0	0,00	12	122.918.400,00	46.600.000,00	3	3.756.166,00	3	8.455.558,00	3	9.480.380,00	3	12.781.257,00	12	35.961.445,00	100	73,55	12	35.961.445,00	0,00	0,00	Balitbangda	
5	5	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	40	21.812.000,00	8	1.382.500,00	2	7.180.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	1.382.500,00	20,00	6,33	Balitbangda	
5	5	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0,00	0	0,00	12	170.000.000,00	18.000.000,00	3	4.500.000,00	3	4.500.000,00	3	4.500.000,00	3	4.500.000,00	12	18.000.000,00	100	100	12	18.000.000,00	0,00	0,00	Balitbangda	
5	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Unit	15	1.466.657.798,00	10	90.387.740,00	9	616.441.500,00	467.809.450,00	2	16.357.900,00	11	161.871.200,00	0	88.384.197,00	1	84.484.960,00	8	300.686.047,00	88	72,14	14	904.918.787,00	140,00	36,96	Balitbangda	
5	5	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	338.217.378,00	1	33.108.750,00	1	40.630.000,00	40.546.450,00	0	3.863.790,00	0	7.511.750,00	0	16.340.800,00	1	9.785.900,00	1	37.502.150,00	100	98,93	2	72.490.900,00	40,00	20,82	Balitbangda	
5	5	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	204.752.500,00	9	35.287.900,00	17	194.381.500,00	168.575.000,00	5	13.400.000,00	5	24.865.500,00	4	38.909.397,00	3	43.370.000,00	17	120.834.897,00	100	70,40	26	154.122.797,00	650,00	75,27	Balitbangda	
5	5	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	0,00	0	0,00	55	37.750.000,00	37.750.000,00	0	0,00	10	8.906.000,00	0	0,00	30	15.500.000,00	40	24.406.000,00	72,73	67,54	40	25.445.000,00	0,00	0,00	Balitbangda	
5	5	1	2.09	09	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	5	248.506.580,00	0	0,00	1	50.000.000,00	50.000.[illegible]	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Balitbangda	
5	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	685.151.357,00	2	21.910.000,00	1	180.000.000,00	170.000.000,00	0	0,00	1	130.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	170.000.000,00	100	100	3	161.910.000,00	20,00	21,33	Balitbangda	
																							Rata-rata capaian kinerja (%)		98,73	84,73			100,39	72,57		
																							Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sedang		
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	100	9.252.667.705,00	100	4.292.987.844,00	66	5.678.065.784,00	7.082.780.880,00	0	73.115.300,00	50,00	1.363.867.310,00	20,00	1.686.448.097,00	10,00	4.206.793.130,58	90	7.368.672.758,00	100	84,30	100	11.661.330.500,00	100	115,12	Balitbangda	
						Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	100		100		100			0		25,00		50,00		20,00		100		100		200		200		Balitbangda	
						Persentase OPD yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	90		90		100			0		0,00		10,00		90,00		100		100		100		233		Balitbangda	
						Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan	%	50		50		75,5			0		25,00		20,00		25,47		75,47		100		100		100		Balitbangda	
5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang diselenggarakan	Rekomendasi	26	3.676.816.500,00	5	1.236.138.116,00	10	1.460.000.796,00	1.676.006.715,00	0	16.326.880,00	0	236.711.860,00	5	456.683.276,00	5	866.377.170,75	10	1.596.122.407,75	100	89,38	15	2.834.338.606,75	55,73	100,07	Balitbangda	
5	5	2	2.01	01	Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Otonomi Daerah	Laporan	5	837.228.144,00	1	129.591.354,00	2	240.308.100,00	429.232.900,00	0	5.111.400,00	0	83.367.900,00	1	76.500.000,00	1	227.836.554,50	2	395.716.634,50	100	92,18	3	525.307.988,50	60,00	74,05	Balitbangda	
5	5	2	2.01	02	Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	0	0,00	0	0,00	1	341.274.800,00	180.047.800,00	0	5.711.400,00	0	24.153.400,00	0	37.884.950,00	1	89.009.035,50	1	156.904.785,50	100	86,58	1	156.904.785,50	0,00	0,00	Balitbangda	

5	5	2	2.01	03	Analisis Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Analisis Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	4	0,00	0	0,00	3	319.289.000,00	475.156.900,00	0	0,00	0	80.073.659,00	1	141.947.581,00	2	236.199.103,00	3	436.140.262,00	100	92,21	3	436.140.262,00	0,00	0,00	Kelembagaan		
5	5	2	2.01	13	Pengelolaan Data Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Data Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	9	725 667.251,00	2	802.159.250,00	2	75.336.500,00	1,39.254.900,00	0	0,00	0	20.658.350,00	1	19.460.008,00	1	48.724.900,00	2	49.042.160,00	100	80,76	0	151 195.900,00	0,00	26,35	Kelembagaan		
5	5	2	2.01	15	Penyusunan Rekomendasi atau Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atau Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi	10	1.113 928.297,00	2	900.387 936,00	2	523.860.500,00	672.258.115,00	0	0,00	0	67.860.880,00	1	174.907 936,00	1	358.548 699,75	2	597.817.083,75	100	88,87	4	1 494 305.019,75	40,00	134,64	Kelembagaan		
5	5	2	2.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dihasilkan**	**Dokumen**	**15**	**2.525.486.589,00**	**6**	**1.515.014.413,00**	**5**	**1.374.306.000,00**	**2.687.473.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**351.180.800,00**	**0**	**344.667.500,00**	**6**	**1.258 686.903,00**	**6**	**2.164.456.003,00**	**100**	**96,85**	**13**	**4.068.470.416,00**	**80,00**	**161,10**	**Kelembagaan**		
5	5	2	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	5	734 041.945,00	3	496.268.250,00	3	327.580 900,00	592 659.500,00	0	0,00	0	137.470.100,00	0	134.960.000,00	3	306.579.985,00	3	579.010.085,00	600	97,70	6	1.169 298.935,00	120,00	163,73	Kelembagaan		
5	5	2	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	5	974.827.260,00	1	249 737.905,00	2	115 870.500,00	330.879.500,00	0	0,00	0	54.515.000,00	0	50.000.000,00	2	213.173 960,00	2	315.758 960,00	100	95,43	3	568.506.460,00	60,00	58,03	Kelembagaan		
5	5	2	2.02	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	0	0,00	0	0,00	1	110.614.500,00	188.382.500,00	0	0,00	0	57.396.000,00	0	50.340.000,00	1	70 421 700,00	1	178.147 700,00	100	97,15	1	178.147 700,00	0,00	0,00	Kelembagaan		
5	5	2	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	0	0,00	0	0,00	2	109.736.500,00	331.007.500,00	0	0,00	0	56.000.500,00	0	50.340.000,00	2	210.977.258,00	2	317.317.758,00	100	95,56	2	317.317.758,00	0,00	0,00	Kelembagaan		
5	5	2	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	5	892.807.354,00	2	674.987 663,00	2	810.507.000,00	1.198 482.000,00	0	0,00	0	45.700.000,00	0	56.997 500,00	2	1.058.538.999,00	2	1.162.181.499,00	100	96,97	4	1.837 168.162,00	80,00	220,60	Kelembagaan		
5	5	2	2.05		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dihasilkan**	**Dokumen**	**10**	**892.807.354,00**	**1**	**244.984.673,00**	**6**	**770.680.600,00**	**1.758.477.800,00**	**0**	**24.389.200,00**	**0**	**512.086.000,00**	**0**	**508.885.700,00**	**0**	**681.987.230,50**	**6**	**1.726.389.330,50**	**500**	**96,18**	**7**	**1.971.389.103,50**	**70,00**	**286,77**	**Kelembagaan**		
5	5	2	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	0	0,00	0	0,00	2	256.044.980,00	524.303.900,00	0	0,00	0	156.194.601,00	0	149.390.600,00	2	205.253 135,00	2	510 838.135,00	100	97,47	2	510.838.135,00	0,00	0,00	Kelembagaan		
5	5	2	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	0	0,00	0	0,00	2	263.993.900,00	539.014.900,00	0	15.776.400,00	0	144.358.300,00	0	142.723.360,00	2	708.824 510,00	2	909.281.410,00	100	97,37	2	926.281.410,00	0,00	0,00	Kelembagaan		
5	5	2	2.04	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	5	892 807.354,00	1	244.984 473,00	2	148.824 100,00	488.152.800,00	0	9.113.400,00	0	142.513.400,00	0	148.257.000,00	2	182.505.185,50	2	486.348.985,50	100	99,43	5	725.373.458,50	80,00	87,10	Kelembagaan		
5	5	2	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen	0	0,00	0	0,00	1	109.736.600,00	228.122.500,00	0	0,00	0	68.970.000,00	0	69.715.800,00	1	47 105 800,00	1	225 790.800,00	100	98,58	1	225 790.800,00	0,00	0,00	Kelembagaan		

4	5	2	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	Laporan	55	3.260.388.880,00	9	1.206.856.140,00	11	2.123.018.408,00	1.951.746.545,00	9	85.701.700,00	2	274.035.860,00	3	356.822.518,00	4	761.896.126,25	11	1.488.496.005,25	100	96,77	19	2.797.352.145,25	34,55	83,84	Baik/Memuaskan	
5	5	2	2.04	01	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	0	0,00	0	0,00	1	560.616.000,00	404.896.608,00	0	14.801.600,00	0	62.100.000,00	0	89.796.300,00	1	208.177.258,00	1	374.905.058,00	100	92,58	1	374.905.058,00	0,00	0,00	Baik/Memuaskan	
5	5	2	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Kerangka Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Kerangka Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	10	1.222.615.807,00	2	273.911.096,00	2	272.443.400,00	382.028.200,00	0	30.870.100,00	0	74.870.100,00	1	75.233.300,00	1	176.099.342,25	2	347.752.742,25	100	91,08	4	621.673.838,25	40,00	51,30	Baik/Memuaskan	
5	5	2	2.04	03	Diseminasi Jasa Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berdasar Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jasa Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berdasar Inovatif	Laporan	29	514.996.913,00	3	248.409.904,00	4	341.178.000,00	181.409.000,00	0	0,00	0	0,00	1	71.527.284,00	3	72.144.400,00	4	143.671.684,00	100	78,20	5	391.081.586,00	25,00	42,76	Baik/Memuaskan	
5	5	2	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	15	835.446.233,00	5	531.344.950,00	3	386.123.000,00	243.292.060,00	0	0,00	2	137.265.560,00	1	91.285.150,00	0	0,00	9	228.550.710,00	100	86,94	8	759.895.660,00	53,33	90,96	Baik/Memuaskan	
5	5	2	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	5	294.130.147,00	4	246.156.130,00	1	562.650.000,00	340.126.685,00	0	0,00	0	0,00	0	28.990.685,00	1	284.615.126,00	1	313.606.811,00	100	90,30	7	558.796.031,00	140,00	189,70	Baik/Memuaskan	
																						Rata-rata capaian (dalam %)		100,00	94,20				20,00	33,63		
																						Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													19.305.568.450,00	15.473.589.227,00		1.382.129.627,00		2.915.060.330,00		3.329.706.730,00		6.433.073.230,00		13.059.919.917,00		85,53						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																									98,37	89,46					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																									Sangat Tinggi	Tinggi					

Makassar, 31 Desember 2023
KEPALA BADAN,

HAMDI BUKTI GODFRIE, SP.M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP . 19690330 199903 1 006

2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2024 (Triwulan I)

Rencana Kerja Balitbangda pada tahun 2024 mencakup 2 program, 10 kegiatan, dan 38 sub kegiatan. Program tersebut terdiri atas 1 program utama dan 1 program penunjang. Jumlah anggaran Balitbangda pada tahun ini adalah sebesar **Rp.9.089.001.800,-**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa realisasi capaian anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 untuk program utama, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar **Rp.150.730.968**,- atau sebesar 8,39% dan tingkat capaian kinerja sebesar 25,75%. Realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar **Rp.929.179.348,-** atau sebesar 12,74% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 24,33%.

Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran Balitbangda Kota Makassar pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar **10,57% (realisasi keuangan)** dengan predikat kinerja sangat rendah, dan **25,04% (realisasi kinerja)** juga dengan predikat sangat rendah. Berikut ini diuraikan secara terperinci program dan kegiatan yang termuat dalam Renja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2024.

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN :

A. **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**, terdiri atas 4 kegiatan sebagai berikut:

1. **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**, yang terbagi menjadi 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.489.446.350,-. dan realisasi anggaran sebesar Rp.19.500.000,- Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:

   2. 1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.500.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 2,62% dengan realisasi kinerja 0%.
   2. 2. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.000.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 5,21% dengan realisasi kinerja 0%.

2. 3. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.000.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 4,45% dengan realisasi kinerja 0%.

Faktor pendukung :

- Komunikasi dan koordinasi yang baik antara tim riset dengan pihak Balitbangda dalam menyesuaikan perubahan *action plan* dan pentahapan kegiatan riset.
- Kemajuan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi Balitbangda dan tim peneliti dalam berkomunikasi dan berbagi informasi terkait pelaksanaan penelitian

Faktor penghambat :

- Adanya perubahan *action plan* pelaksanaan sebagian tahapan sehingga dibutuhkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang akan mulai dilakukan di pada triwulan berikutnya

Tindak lanjut :

- Penguatan komitmen dan konsistensi pada action plan yang telah disusun untuk senantiasa mengutamakan target capaian kinerja sesuai dengan road map penelitian yang telah disepakati.
- Penguatan komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif dan berkelanjutan baik yang dilakukan secara tatap muka ataupun virtual meet antar Balitbangda dan Tim Peneliti serta stakeholder terkait untuk pemenuhan kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan.
- Kolaborasi dan sharing knowledge antar Balitbangda dengan Tim Riset untuk akselerasi pencapaian luaran riset sesuai target yang telah ditetapkan dan penyebarluasan luaran riset untuk pemanfaatan hasil riset yang lebih bermakna dan berkualitas.

2. **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**, yang terbagi menjadi 3 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.443.245.200,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.31.400.000. Adapun Realisasi anggaran maupun kinerja untuk sub-sub kegiatan sebagai berikut:

2. 1. Penelitian dan Pengembangan Aspek-Aspek Sosial dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.400.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 7,23% dan realisasi kinerja 0%.
2. 2. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.800.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 6,47% dan realisasi kinerja 0%.
2. 3. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.200.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 7,70% dan realisasi kinerja 0%.

3. **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**, yang terbagi menjadi 2 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.324.870.900,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.50.245.334,-. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:
   3. 1. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.17.579.900,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 12,54% dan realisasi kinerja 0%.
   3. 2. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum dengan realisasi anggaran sebesar Rp.32.665.434,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 17,69% dan dengan realisasi kinerja 0%.

Faktor Pendukung :

- Adanya komitmen antara Badan Penelitian dan Lembaga Penelitian di setiap Universitas dalam melaksanakan Penelitian sesuai dengan Visi misi Walikota
- Komunikasi dan koordinasi yang baik antara tim peneliti dengan pihak Balitbangda
- Sumber daya yang cukup
- Kemajuan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi Balitbangda dan tim peneliti dalam berkomunikasi dan berbagi informasi terkait pelaksanaan penelitian.

Faktor Penghambat :

- Adanya berkas pihak ketiga yang tidak lengkap sehingga keterlambatan dalam pencairan keuangan sesuai dengan tahapannya

Tindak lanjut :

- Meningkatkan koordinasi dengan pihak ketiga dalam kelengkapan pemberkasan..
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

4. **Pengembangan Inovasi dan Teknologi,** yang terbagi menjadi 4 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.538.273.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.49.585.634,-. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:

4. 1. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi dengan realisasi anggaran sebesar Rp.49.585.634,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 17,08% dengan realisasi kinerja 0%;

4. 2. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%;

4. 3. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%;

4. 4. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%.

Faktor Pendorong :

- Adanya komitmen dan konsistensi yang kuat dari pimpinan puncak (kepala daerah) dan pimpinan internal Balitbangda terhadap inovasi daerah
- Fleksibilitas anggaran yang proporsional
- Pengakuan eksternal pemda terhadap kebijakan dan capaian inovasi Pemerintah Kota Makassar
- Dukungan lingkungan sekolah yang kompetitif terhadap kebijakan inovasi

Faktor Penghambat :

- Terjadinya perubahan komposisi staf (kuantitas) akibat pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK dan mutasi menyebabkan alokasi pembagian sasaran inkubasi inovasi dan kegiatan terkait lainnya mengalami pengurangan dan perlambatan
- Masih minimnya penekanan internal di setiap SKPD mengenai urgensi sasaran target perencanaan daerah dalam urusan inovasi

Tindak lanjut :

- Melakukan pembagian sasaran inkubasi secara proporsional dengan memperhatikan SOP Inkubator Inovasi, anggaran dan agenda terkait lainnya (Pemerintah Pusat dan Pemkot) guna mencapai target triwulan berikutnya
- Menyusun konsep kebijakan teknis untuk meningkatkan dukungan SKPD terhadap kebijakan inovasi daerah
- Mengintensifkan sosialisasi, publikasi dan dokumentasi dalam menyebarluaskan kebijakan inovasi
- Menyiapkan lebih awal rancangan kegiatan beserta administrasinya untuk melaksanakan agenda kegiatan berikutnya
- Perlu dukungan kuat dari Tim Anggaran untuk mensupportkan di SKPD dan Bagian Setda serta di UPT sebagai bentuk apresiasi anggaran pengelola inovasi di instansi/unit kerja masing masing.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA:

1) **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,** yang terbagi menjadi 7 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.195.793.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.0,-. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:

1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%.

1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%.

1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%.

1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 100%.

1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%.

1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%;

1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%;

2) **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, yang terbagi menjadi 5 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.441.207.750,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.756.865.715,-. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:

   2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi anggaran sebesar Rp.679.165.715,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 13,57% dengan realisasi kinerja 58,14%;

   2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan realisasi anggaran sebesar Rp.46.200.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 20,87% dengan realisasi kinerja 25%;

   2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.31.500.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 17,47% dengan realisasi kinerja 25%;

   2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%.

   2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%.

3) **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.323.187.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.54.726.450,-. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:

   3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%.

   3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan realisasi anggaran sebesar Rp.54.726.450,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 18,61% dengan realisasi kinerja 20,69%;

4) **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, yang terbagi menjadi 5 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.532.066.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.77.117.209,-. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:

4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja sebesar 0%.

4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 0% dengan realisasi kinerja 0%;

4.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%;

4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%.

4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.77.117.209,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 23,23% dan realisasi kinerja 28,57%.

5) **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, yang terbagi menjadi 4 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.385.760.400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.24.189.974,-. Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:

5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.689.974,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 12,03% dan realisasi kinerja 25%;

5.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%

5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi anggaran sebesar Rp.19.500.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 5,76% dan realisasi kinerja 25%.

6) **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, yang terbagi menjadi 4 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.415.150.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.16.280.000,- Adapun realisasi anggaran dan kinerja sub-sub kegiatan sebagai berikut:

6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.780.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 8,52% dan realisasi kinerja 100%;

6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.000.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 4,23% dan realisasi kinerja 26,67%;

6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- dan realisasi kinerja 0%;

6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.500.000,- atau dengan persentase serapan anggaran sebesar 4,23% dan realisasi kinerja 2,67%,-.

Faktor pendorong :

Terciptanya kerja sama yang kuat antara pimpinan dan staf dalam menjembatani setiap pelaksanaan kegiatan.

Faktor Penghambat :

1. Masih dilakukannya penyesuaian pelaksanaan kegiatan kaitannya dengan proses pemeliharaan barang milik daerah yang saat ini dituntut lebih tertib administratif.
2. Terbatasnya SPD untuk melaksanakan setiap kegiatan.

Tindak lanjut :

Meningkatkan koordinasi dengan bidang dan Instansi yang terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Lebih lanjut, pada tabel 2.2 (E.81) Triwulan I (satu) Tahun 2024 disajikan secara lengkap Evaluasi Renja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2024 yang mencakup nomenklatur program dan kegiatan, indikator kinerja, target kinerja program *(outcome)* maupun kinerja kegiatan *(output),* realisasi kinerja.

Tabel 2.2 (E.81)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA SKPD
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2024		Realisasi capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp. (000) RENDA	Rp. (000) DPA	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp		
1	2	3	4	4a	5		6		7			8		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16	17
5	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan																							
5.5	Penelitian dan Pengembangan																							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terkoordinasi laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat Daerah	Persen	100	37 150 353 747	100	6 133 347 381	100	7.301.149.330	7 398 165 359	25	929 179 348	25	929 179 348	25,00	12,74	125	7.074.934.909	125,00	38,99	Balitbangda	
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Persen	90		99,16		90			20,83		22,89			110,37		122,63		Balitbangda	
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	80		87		80			22,50		31,50		139			121,67		Balitbangda	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	1.359.533.000	10	237 840 756,50	10	195.793.800	195 799 800	1	0	1	0	10	0	11	237.840.756,50	110	17,50	Balitbangda	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	57 483 800	2	13 279 250	2	114.556.200	114.556.200	0	0	0	0	0	0	2	13.279.250	13,33	25,30	Balitbangda	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	5	57 537 800	1	5 966 750	1	10 473 600	10 473 600	0	0	0	0	0	0	1	5.966.750	20	11,36	Balitbangda	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	52.374.600	1	6.957.550	1	10.488.000	10.488.000	0	0	0	0	0	0	1	6.957.550	20	18,28	Balitbangda	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	51 886 800	1	7 719 700	1	10.500.000	10 500.000	1	0	1	0	100	0	2	7 719 700	40	14,94	Balitbangda	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	52 465 800	1	7 067 100	1	10.500.000	10 500.000	0	0	0	0	0	0	1	7 067 100	20	13,47	Balitbangda	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	1.060.213.400	4	129.522.056,50	1	23 918 000	23.918.000	0	0	0	0	0	0	4	129 522.056,50	80	12,22	Balitbangda	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	51 771.800	4	67 178 180	2	15 458 000	15 458 000	0	0	0	0	0	0	4	67 178 350	40	129,66	Balitbangda	

					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	80	30.293.464.963	33	5.744.081.238	32	5.441.207.798	5.441.207.798	3	758.865.735	3	758.865.715	25	13,93	35	4.500.946.963	25	14,86	Balitbangda	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	195	27.956.040.558	33	3.328.515.530	43	5.004.129.650	5.004.129.650	25	679.165.715	25	679.165.715	58,14	13,57	58	4.007.663.283	29,74	14,54	Balitbangda	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0,00	1	242.823.500	12	221.400.000	221.400.000	3	46.200.000	3	46.200.000	25	20,87	4	289.085.500	0	0	Balitbangda	
					Pelaksanaan Pencocokan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pencocokan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	48	2.540.612.000	12	151.547.900	12	180.334.500	180.334.500	3	31.500.000	3	31.500.000	25	17,47	15	183.082.900	25	7,21	Balitbangda	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	88.400.800	1	8.999.000	1	19.257.600	19.257.600	0	0	0	0	0	0,00	1	8.999.000	20	5,15	Balitbangda	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	15	99.401.200	18	12.158.300	18	16.066.000	18.066.000	4	0	4	0	22,22	0,00	22	12.158.300	147	12,36	Balitbangda	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	60	1.468.215.800	12	935.968.099	12	329.187.600	329.187.600	5	54.726.450	3	54.726.450	25	16,89	15	971.094.549	25	68,56	Balitbangda	
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	235	348.203.000	48	32.280.000	45	29.187.600	29.187.600	0	0	0	0	0	0	45	52.980.000	20,43	13,15	Balitbangda	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	128	1.308.012.000	105	669.489.099	29	294.000.000	294.000.000	5	54.726.450	4	54.726.450	20,59	18,61	111	938.214.549	88,75	71,70	Balitbangda	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Tertib dan Akuntabel	Jenis Pengelolaan	25	2.286.955.533	8	870.064.573	5	502.066.008	502.066.008	1	77.117.309	1	77.117.309	20	15,48	6	947.181.782	24	32,70	Balitbangda	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	10.212.733	1	714.000	1	1.968.000	1.968.000	0	0	0	0	0	0,00	1	714.000	1,13	6,99	Balitbangda	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	983.032.000	2	109.537.000	2	54.106.000	54.106.000	0	0	0	0	0	0,00	2	109.532.000	20	11,14	Balitbangda	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	191.631.300	2	10.563.000	2	9.192.000	9.192.000	0	0	0	0	0	0,00	2	10.361.000	20	7,87	Balitbangda	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Dokumen	25	161.481.630	2	388.128.000	8	134.800.000	134.800.000	1	0	1	0	20	0,00	3	286.935.000	12	202,38	Balitbangda	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	163	1.490.018.000	65	463.132.571	35	332.000.000	332.000.000	10	77.117.309	10	77.117.309	28,57	23,23	75	540.249.780	46,01	78,14	Balitbangda	

						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	60	23.452.000	12	53.961.449	12	385.760.400	385.760.400	3	24.189.974	3	24.189.974	25	6,27	15	78.151.423	25,00	330,42	Balitbangda	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	0	12	35 961.449	12	39.000.000	39.000.000	3	4.689.974	3	4.689.974	25	12,03	15	40.651.423	0,00	0	Balitbangda	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	40	23.452.000	0	0	1	8.025.200	8.025.200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	Balitbangda	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	12	18.000.000	12	338.735.200	338.735.200	3	19.500.000	3	19.500.000	25	5,76	15	37.500.000	0,00	0	Balitbangda	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Paket**	**40**	**1.105.153.236**	**4**	**303.631.047**	**11**	**415.150.000**	**415.150.000**	**4**	**16.280.000**	**4**	**16.280.000**	**36,36**	**3,92**	**8**	**319.911.047**	**20,00**	**28,95**	**Balitbangda**	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	235.237.579	1	39 302.150	1	44.380.000	44.380.000	1	3.780.000	1	3.760.000	100	8,52	2	43.082.150	40,00	18,33	Balitbangda	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	204.762.900	17	318.933.897	15	188.970.000	188 970 000	4	8.000.000	4	8.000.000	26,67	4,23	21	126.933.897	105,00	61,94	Balitbangda	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	40	25.495 000	20	13 800.000	13.800 000	0	0	0	0	0	0,00	40	25 495.000	0,00	0,00	Balitbangda	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	665.153.357,00	1	120.000.000	1	168 000.000	168.000 000	1	4 500.000	1	4.500.000	100	2,68	2	124.500.000	13,33	18,72	Balitbangda	
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		24,33	12,74			123,06	10,99		
																		Predikat kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		

					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	100	3.405.586.002	80,00	4.653.116.847	85	3.795.836.250	3.795.836.250	42,5	150.730.968	42,5	150.730.968	50,00	8,99	122,50	4.803.847.815	122,50	51,07	Balitbangda	
						Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Kota Makassar	Persen	90		75,47		85,29			25		25		28,00		100,47		111,63		Balitbangda	
						Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	100		100		100			25		25		25,00		133		125,00		Balitbangda	
						Presentase SKPD Yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	90		100		100			0		0		0,00		100		111,11		Balitbangda	
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaran Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rekomendasi	25	1.676.814.082,00	10	2.082.178.370,25	4	469.446.150	469.446.150	0	19.500.000	0	19.500.000	0	3,98	18	1.101.678.370,25	40	65,70	Balitbangda	
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	5	837.223.144	2	395.716.634,50	1	171.776.400	171.776.400	0	4.500.000	0	4.500.000	0	2,62	2	400.216.634,50	40	47,80	Balitbangda	
					Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	10	725.663.251	2	89.042.650	2	115.263.800	115.263.800	0	6.000.000	0	6.000.000	0	5,21	2	95.042.650	20	13,10	Balitbangda	
					Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	10	113.928.297	2	597.417.085,75	1	202.406.150	202.406.150	0	9.000.000	0	9.000.000	0	4,45	2	606.417.085,75	20	532,28	Balitbangda	
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen	15	1.321.856.568	6	2.056.960.544	3	443.248.200	443.248.200	0	31.400.000	0	31.400.000	0	7,084	6	2.068.382.544	40	82,82	Balitbangda	
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	5	714 161 365	3	579 010 085	1	143 916 800	143 916 800	0	10.400 000	0	10.400.000	0	7,23	3	589.410.085	60	82,53	Balitbangda	
					Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	5	974 687 260	2	345 768 960	2	166 915 900	166 915 900	0	10.800 000	0	10.800.000	0	6,47	2	326.568.960	40	33,50	Balitbangda	
					Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	5	832.807.354	2	1.162.181.489	1	132.412.500	132.412.500	0	10.200.000	0	10.200.000	0	7,70	2	1.172.381.489	40	140,77	Balitbangda	

					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksanannya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	10	1.946.735.651	6	480.398.985,50	2	324.870.900	324.870.900	0	50.245.334	0	50.245.334	0	15,47	6	530.634.319,50	60	27,26	Balitbangda	
					Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	5	1.113.928.297	0	0,00	1	140.189.600	140.189.600	0	17.579.900	0	17.579.900	0	12,54	0	17.579.900	0	1,58	Balitbangda	
					Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	5	892.807.354	2	480.398.985,50	1	184.681.300	184.681.300	0	32.665.434	0	32.665.434	0	17,69	2	513.054.419,50	40	61,61	Balitbangda	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksanannya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Laporan	50	3.260.389.090	11	1.033.390.947,25	6	538.273.800	538.273.800	0	49.585.634	0	49.585.634	0	9,21	11	1.083.176.581,25	22	33,22	Balitbangda	
					Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	10	1.211.815.807	2	347.762.742,25	1	290.370.900	290.370.900	0	49.585.634	0	49.585.634	0	17,08	2	397.348.376,25	20	32,79	Balitbangda	

					Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	20	916.996.913	4	143.671.684,00	2	96.016.300	96.016.300	0	0	0	0	0	0	4	143.671.684	20	15,67	Balitbangda
					Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	15	835.446.223	3	228.550.710,00	2	105.842.600	105.842.600	0	0	0	0	0	0	3	228.550.710	20	27,36	Balitbangda
					Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	5	296.130.147	1	313.605.811,00	1	46.044.000	46.044.000	0	0	0	0	0	0	1	313.605.811	20	105,90	Balitbangda
																			Rata-rata capaian kinerja (%)			25,75	8,39			117,56	51,07	
																			Predikat kinerja			Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												9.089.001.800	9.089.001.800		1.079.910.316		1.079.910.316						11,88						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																						25,04	10,57						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																						Sangat Rendah	Sangat Rendah						

Makassar, 31 Maret 2024
KEPALA BADAN

NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST.,M.AP
NIP. 197304252005021001

Untuk rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Balitbangda Kota Makassar dan pencapaian renstra perangkat daerah sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.3 (T-C.29) berikut:

Tabel 2.3 (T-C.29.)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Balitbangda Kota Makassar dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (%)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	100,00	100	300,00	75,00
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90	90	90	89,58	99,53	90	268,58	67,40
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	90	86	90	87	96,67	90	263,00	65,75
5	1	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	48	20	10	10	100	10	61,22	15,31
5	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	2	2	2	100	3	46,67	11,67
5	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5	1	1	1	100	1	60,00	15,00
5	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1	1	1	100	1	60,00	15,00
5	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	5	1	1	1	100	1	60,00	15,00
5	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	1	1	1	100	1	60,00	15,00

5	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	1	4	4	100	1	120,00	30,00
5	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	2	4	4	100	2	80,00	20,00
5	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah kegiatan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan**	**60**	**12**	**12**	**12**	**100**	**12**	**60,00**	**15,00**
5	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	195	33	44	33	75	43	55,90	13,97
5	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	1	1	100	12	13,00	3,25
5	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	12	12	12	100	12	60,00	15,00
5	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	1	1	100	1	60,00	15,00

5	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15	3	18	18	100	18	260.00	65,00
5	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pengadaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang dilaksanakan**	**60**	**12**	**12**	**12**	**100**	**12**	**60,00**	**15,00**
5	1	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	235	47	43	43	100	43	58,72	14,68
5	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	128	25	105	105	100	29	124,22	31,05
5	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang dikelola secara tertib dan akuntabel**	**25**	**5**	**5**	**5**	**100**	**5**	**60,00**	**15,00**
5	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	90	18	1	1	100	1	22,22	5,56
5	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	2	2	2	100	2	60,00	15,00
5	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	2	2	2	100	1	50,00	12,50
5	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25	5	2	2	100	5	48,00	12,00
5	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163	57	65	65	100	35	96,32	24,08
5	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**60**	**12**	**12**	**12**	**100**	**12**	**60,00**	**15,00**
5	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15	3	0	0	0	0	30,00	5,00
5	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	12	12	100	12	24,00	6,00

5	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	8	2	0	0	2	25,00	6,25
5	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	12	12	100	12	24,00	6,00
5	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara**	**10**	**10**	**5**	**4**	**100**	**11**	**250,00**	**62,50**
5	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	1	1	1	100	1	60,00	15,00
5	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	9	17	17	100	15	1025,00	256,25
5	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	55	40	72,73	20	60,00	15,00
5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	2	1	1	100	1	26,67	6,67
5	**2**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan**	**100**	**100**	**80**	**80**	**100**	**85**	**265**	**66,25**
					Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**75,00**
					Persentase SKPD yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	**90**	**90**	**100**	**100**	**100**	**100**	**290**	**72,50**
					Presentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan	**90**	**90**	**75,47**	**75,47**	**100**	**88**	**255**	**63,69**
5	**2**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang diselenggarakan**	**29**	**5**	**10**	**10**	**100**	**4**	**65,52**	**16,38**
5	2	2.01	01	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Otonomi Daerah	5	1	2	2	100	1	80,00	20,00

5	2	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	0	2	2	2	100	2	6,00	1,50
5	2	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	10	2	2	2	100	1	50,00	12,50
5	**2**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dihasilkan**	**15**	**6**	**6**	**6**	**100**	**3**	**200,00**	**25,00**
5	2	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	5	3	3	3	100	1	140,00	35,00
5	2	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	5	1	2	2	100	1	80,00	20,00
5	2	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	5	2	2	2	100	1	100,00	25,00
5	**2**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dihasilkan**	**10**	**1**	**6**	**6**	**100**	**2**	**90,00**	**22,50**
5	2	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	0	0	0	0	0	1	1,00	0,25
5	2	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	5	1	2	2	100	1	80,00	20,00
5	**2**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan**	**55**	**8**	**11**	**11**	**100**	**6**	**45,45**	**11,36**

5	2	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	10	2	2	2	100	1	50,00	12,50
5	2	2.04	03	Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	20	1	4	4	100	2	35,00	8,75
5	2	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	15	5	3	3	100	2	66,67	16,67
5	2	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	5	6	1	1	100	1	160,00	40,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah merupakan landasan pelaksanaan tugas sebagai Institusi Penelitian dan Pengembangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar sendiri memiliki 7 (tujuh) peran utama kelitbangan, sebagai berikut:

1. Penelitian;
2. Pengembangan;
3. Pengkajian;
4. Perekayasaan;
5. Penerapan;
6. Pengoperasian;
7. Evaluasi Kebijakan.

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan penelitian, dalam pelaksanaannya harus dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah. Penelitian tersebut dapat dilakukan melalui penelitian-penelitian seperti dimaksud di atas. Selain itu, penelitian terapan juga dilakukan dengan tujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Penelitian ini tidak berfokus pada pengembangan sebuah ide, teori, atau gagasan, tetapi lebih berfokus kepada penerapan penelitian dalam kehidupan sehari-hari.

Peran kedua adalah pengembangan yaitu kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peran ketiga adalah pengkajian yaitu penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengkajian sebagai suatu bentuk penelitian terapan yang dilakukan guna menganalisis dan mengevaluasi kegiatan pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan. Kegiatan pengkajian dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi

bagi perbaikan kebijakan lebih lanjut. Kegiatan pengkajian sebagaimana dimaksud, dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

Pengkajian strategis yaitu pengkajian yang dilakukan guna menganalisis dan mengevaluasi suatu fenomena yang ruang lingkupnya berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan pemerintahan daerah. Pengkajian ini dapat dilakukan melalui Pengkajian aktual yaitu pengkajian yang dilakukan guna menganalisis dan mengevaluasi suatu fenomena yang ruang lingkupnya berhubungan dengan berbagai kejadian terkini dan berpotensi mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah.

Pengkajian lainnya adalah pengkajian kompetitif yang dilakukan guna menganalisis dan mengevaluasi suatu fenomena yang ruang lingkupnya berhubungan dengan berbagai kebijakan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah dan dapat dilakukan secara perorangan atau secara berkelompok. Kegiatan ini dapat diikuti/ketuai oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Peran Balitbangda yang keempat adalah Perekayasaan yaitu kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau inovasi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika, dalam suatu kerja kelompok fungsional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

Selanjutnya yang kelima adalah Penerapan. Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan penerapan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Penerapan draft I pedoman umum/teknis program dalam bentuk *Pilot Project*, dan
b. Uji publik terhadap draft peraturan.

Peran keenam adalah Pengoperasian yaitu kegiatan uji pelaksanaan, uji rekomendasi, evaluasi, diseminasi untuk efektifitas dan efisiensi suatu alternatif kebijakan dan/atau program yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengoperasian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Menganalisis dan memanfaatkan hasil *pilot project* penerapan draft I pedoman umum/teknis, maka dihasilkan draft II pedoman umum/khusus

yang telah teruji dan selanjutnya disampaikan kepada pejabat pengambil kebijakan sebagai pertimbangan pengoperasian oleh komponen teknis, dan

b. Menganalisis dan memanfaatkan hasil uji publik terhadap draft I peraturan perundang-undangan maka dihasilkan draft II peraturan perundang-undangan yang siap untuk disampaikan kepada pejabat pengambil kebijakan sebagai pertimbangan kebijakan lebih lanjut.

Peran Balitbangda yang terakhir adalah Evaluasi Kebijakan yaitu suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Kegiatan evaluasi kebijakan, dilaksanakan dalam 10 (sepuluh) tahapan sub kegiatan dan 3 (tiga) keluaran dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan.

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RKPD Kota Makassar, maupun terhadap IKU sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Balitbangda Kota Makassar, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

Penilaian masyarakat dan *stakeholder* terhadap kriteria kepuasan dan profesionalisme serta akuntabilitas yang ditunjukkan dalam pelayanan yang diberikan oleh Balitbangda Kota Makassar ditunjukkan oleh tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan riset yang dilakukan dan diimplementasikan. Kegiatan kelitbangan yang diselenggarakan oleh Balitbangda Kota Makassar mencakup kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan melalui seminar, *workshop, coaching clinic*, fasilitasi, diseminasi dan publikasi dalam rangka kebijakan publik yang berkualitas dan daya saing daerah yang kompetitif dan inovatif sehingga bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Penilaian masyarakat dan *stakeholder* tersebut dapat ditunjukkan pada tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Kota Makassar berikut ini:

Pencapaian kinerja pelayanan Balitbangda Kota Makassar diukur melalui Indikator kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang terdiri dari

1) Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan;
2) Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan;
3) Persentase SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah; dan
4) Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan.

Untuk Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:

1) Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah;
2) Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas;
3) Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik.

Pencapaian kinerja pelayanan Balitbangda Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 (T-C.30.)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Kota Makassar

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024 (Tw.1)	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	**Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah.**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**	**Pencapaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Kota Makassar Tahun 2023 pada indikator program ini telah 100% memenuhi target Renstra Balitbangda Kota Makassar Tahun 2023. Artinya, kinerja pelayanan Balitbangda Kota Makassar terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan riset telah dilakukan dan diimplementasikan dengan baik dan berkelanjutan. Sedangkan untuk pencapaian kinerja pelayanan tahun 2024, masih 25% dari target Renstra Tahun 2024 karena mempertimbangkan capaian target tahunan dengan rata-rata tingkat capaian 25% per triwulan.**
			Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10%	100%	100%	Pencapaian kinerja pelayanan tahun 2024 pada indikator kegiatan ini, masih 10% dari target Renstra Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian terhadap waktu penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tiap tahunnya.
			Terselenggaranya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	25%	100%	100%	Pencapaian kinerja pelayanan tahun 2024 pada indikator kegiatan ini masih 25% dari target Renstra Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena kegiatannya bersifat rutin.

2.	**Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas.**			**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**100%**	**22,99%**	**100%**	**100%**	**Pencapaian kinerja pelayanan tahun 2024 pada indikator program ini masih 25% dari target Renstra Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena kegiatannya bersifat rutin dan disesuaikan dengan penyediaan dana (SPD).**
			Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	25%	100%	100%	Pencapaian kinerja pelayanan tahun 2024 pada indikator kegiatan ini masih 25% dari target Renstra Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena kegiatannya bersifat rutin.
			Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah secara secara tertib dan akuntabel.	5 Jenis pengelolaan	5 Jenis pengelolaan	5 Jenis pengelolaan	5 Jenis pengelolaan	100%	20%	100%	100%	Pencapaian kinerja pelayanan tahun 2024 pada indikator kegiatan ini masih 20% dari target Renstra Tahun 2024 Hal ini disebabkan karena kegiatannya bersifat rutin dan disesuaikan dengan penyediaan dana (SPD).
			Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	25%	100%	100%	Pencapaian kinerja pelayanan tahun 2024 pada indikator kegiatan ini masih 25% dari target Renstra Tahun 2024 Hal ini disebabkan karena kegiatannya bersifat rutin.
3.	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik.**			**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**95,56%**	**25%**	**100%**	**100%**	**Pencapaian kinerja pelayanan tahun 2024 pada indikator program ini masih 25% dari target Renstra Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena kegiatannya bersifat rutin.**
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	11 Paket	11 Paket	11 Paket	11 Paket	80%	36,36%	100%	100%	Pencapaian kinerja pelayanan tahun 2024 pada indikator kegiatan ini masih 36,36% dari target Renstra Tahun 2024 Hal ini disebabkan karena kegiatannya bersifat rutin.
4.	**Persentase implementasi rencana kelitbangan.**			**50%**	**50%**	**50%**	**100%**	**100%**	**50%**	**100%**	**100%**	**Pencapaian kinerja pelayanan pada indikator program ini telah 50% dari target Renstra Tahun 2024. Karena sudah terlaksana 2 dari 4 tahapan penelitian, yaitu ICP dan Seminar Proposal. Sedangkan yang belum terlaksana Seminar Kemajuan dan Seminar**



											Hasil.
			Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%	0%	100%	100%	Pencapaian kinerja pelayanan pada indikator kegiatan ini masih 0%, karena belum ada rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan 2 tahapan rekomendasi
			Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan.	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	0%	100%	100%	Pencapaian kinerja pelayanan pada indikator kegiatan ini masih 0%, karena belum ada rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan 2 tahapan rekomendasi.
5.	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**	**Pencapaian kinerja pelayanan pada indikator program ini 25%, karena sudah terlaksana 1 dari 4 rekomendasi.**
			Terlaksananya penelitian dan Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan.	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	100%	0%	100%	100%	Pencapaian kinerja pelayanan pada indikator kegiatan ini masih 0%, karena belum ada rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan 2 tahapan rekomendasi.
6.	**Persentase SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.**			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**Pencapaian kinerja pelayanan pada indikator program ini masih 0%, karena memperhitungkan kondisi rata-rata jumlah SKPD yang dapat diupgrade tingkat kematangan inovasinya per triwulan berdasarkan capaian tahun sebelumnya (20-25 SKPD).**
			Jumlah dokumen hasil pengembangan inovasi dan teknologi yang dilaksanakan	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	0%	100%	100%	Pencapaian kinerja pelayanan pada indikator kegiatan ini masih 0%, karena belum ada dokumen yang dihasilkan dari pengembangan inovasi dan teknologi yang dilaksanakan.

7.	**Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan.**			**75,47%**	**89,29%**	**94,83%**	**100%**	**100%**	**26%**	**100%**	**100%**	**Pencapaian kinerja pelayanan pada indikator program ini berada pada nilai 26%, karena dengan mempertimbangkan capaian target tahunan dengan rata-rata tingkat capaian 29% per triwulan.**
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi.	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	0%	100%	100%	Pencapaian kinerja pelayanan pada indikator kegiatan ini masih 0%, karena belum ada dokumen yang dihasilkan dari pelaksanaan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi

Secara umum, rata-rata pencapaian kinerja pelayanan Balitbangda Kota Makassar Tahun 2023 pada 4 (empat) indikator program telah 100% memenuhi target Renstra Balitbangda Kota Makassar Tahun 2023. Artinya, kinerja pelayanan Balitbangda Kota Makassar terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan riset telah dilakukan dan diimplementasikan dengan baik dan berkelanjutan. Sedangkan untuk pencapaian kinerja pelayanan tahun 2024, rata-rata masih 25% dari target Renstra Tahun 2024 karena mempertimbangkan capaian target tahunan dengan rata-rata tingkat capaian 25% per triwulan

2.3. Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Balitbangda Kota Makassar

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangannya, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar menghadapi berbagai permasalahan dan masih perlu untuk diatasi serta diantisipasi.

A. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Balitbangda Kota Makassar hingga saat ini, yaitu:

1. Masih rendahnya presentasi pemanfaatan hasil kelitbangan.
2. Belum tersedianya SDM fungsional peneliti maupun perekayasa sehingga pelaksana penelitian pengembangan dan kajian masih bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya.
3. Masih minimnya data pendukung terkait inovasi daerah.
4. Inovator yang telah pensiun, berganti atau mutasi menyebabkan inovasi tidak berlanjut atau berlanjut membutuhkan waktu yang lama untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan.
5. Masih kurangnya dukungan dari masing-masing instansi kepada inovator dalam berinovasi.
6. Masih banyak SKPD yang melakukan kegiatan riset/kajian/indeks.
7. Masih rendahnya anggaran koordinasi Balitbangda/BRIDA sebagai SKPD koordinatif.
8. Tidak masuknya Balitbangda dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
9. Lemahnya perencanaan kegiatan SKPD untuk menindaklanjuti hasil riset yang telah dilakukan atau dihasilkan Balitbangda
10. Sinkronisasi dan Integrasi riset dan inovasi yang terpusat di BRIDA, bertentangan dengan filosofi dan substansi materi muatan hukum dalam perpres 78 Tahun 2019, juncto perda 8 Tahun 2023.

B. Peluang *(Opportunity)*

Isu-isu strategis berupa peluang *(Opportunity)* untuk tahun 2025 yang perlu dicermati adalah:

1. Amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional semakin mendorong pelaksanaan kebijakan berbasis riset dan sains di daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Kepemimpinan kepala Daerah yang visioner/inovatif, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipatif di Kota Makassar;
5. Pemerintah Kota Makassar bersiap menuju Kota Metaverse yang merupakan langkah maju Kota Makassar yang ingin dicapai dalam kerangka menjadikan Makassar Kota Dunia, dengan "Membungkus" nilai kearifan lokal melalui informasi teknologi yang mumpuni sehingga Kota Makassar dapat dikenal luas dan mampu berkompetisi dalam berbagai aspek dengan kota maju lainnya;
6. Perbaikan Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Makassar mulai tertata dengan baik;
7. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam melakukan riset dan inovasi untuk pembangunan;
8. Pemerintah Kota Makassar membuka peluang terhadap partisipatif peran serta lembaga penelitian Perguruan Tinggi dan Balai Penelitian di Kota Makassar dalam proses pelaksanaan riset dan inovasi;
9. Pemanfaatan sistem informasi manajemen yang cukup memadai sehingga dapat dihasilkan data akurat dan akuntabel sebagai bahan dalam proses pelaksanaan riset dan inovasi, khususnya telah tersedia database inovasi dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) Inovasi Daerah;

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

Penyempurnaan Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD yang dilakukan setelah mendapat masukan dari usulan dari berbagai pihak. Penyempurnaan Renja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2025 dilakukan dengan

menyajikan penggabungan daftar kegiatan prioritas dan telaahan terhadap rancangan RKPD. Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Balitbangda dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Balitbangda, serta pagu indikatif yang disediakan berdasarkan rancangan RKPD.

Review terhadap rancangan RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator dan target kinerja program dan kegiatan (*output* dan *outcome*), serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan untuk Balitbangda. Secara keseluruhan, usulan program dan kegiatan Balitbangda Kota Makassar Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 (T-C.31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	-4	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Makassar	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%	921.822.281,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Makassar SKPD	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%	5.575.861.900,00	
		Kota Makassar SKPD	PRESENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	90%	6.666.244.119,00		Kota Makassar SKPD	PRESENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	90%	105.000.000,00	
		Kota Makassar SKPD	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	90%	451.229.600,00		Kota Makassar SKPD	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	90%	854.976.100,00	
5.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	294.840.000,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Dokumen	127.155.000,00	
5.05 01.2 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	11.340 000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	73 495.000,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.01.2 01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11 340 000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7 538 000,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar
5.05.01.2 01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.340 000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.538.000,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar
5.05.01 2 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	11.340.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	7.538.000,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar
5.05 01 2 01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11.340.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.538.000,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar
5.05 01.2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	226 800 00,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	7 538 000,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2 Laporan	11.340.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	16 000 000,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar
5.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Makassar SKPD**	**Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**6,371.404.119,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Makassar SKPD**	**Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**12 Bulan**	**5.448.576.900,00**	
5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar SKPD	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	39 Orang	5 759 044.119,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar SKPD	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 Orang	5 064 132 100,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar
5 05 01.2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	225.960 000,00	[illegible]ntuk [illegible]endukung [illegible]rogram Prioritas [illegible]ali Kota [illegible]akassar
.05.01.2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	567.000.000,0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	140.262 000,00	[illegible]ntuk [illegible]endukung [illegible]rogram Prioritas [illegible]ali Kota Makassar
5.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	22.680.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	7 152.000,00	[illegible]ntuk [illegible]endukung [illegible]rogram Prioritas Wali Kota Makassar

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD	3 Laporan	22.680.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD	3 Laporan	11.150.800,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar
5.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Makassar SKPD**	**Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**12 Bulan**	**283.500.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Makassar SKPD**	**Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**12 Bulan**	**105.000.000,00**	
5.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	47 Stel	56.700.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar SKPD	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0	0	
5.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar SKPD	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	27 Orang	226.800.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar SKPD	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 Orang	105.000.000,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Makassar SKPD**	**Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah secara tertib dan akuntabel.**	**5 Jenis Pengelolaan**	**622.446.281,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Makassar SKPD**	**Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah secara tertib dan akuntabel**	**3 Jenis Pengelolaan**	**452.251.500,00**	
5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar SKPD	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	18 Komponen	2.148.281,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar SKPD	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	0	0	
5.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar SKPD	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Komponen	226.800.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar SKPD	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	42.451.500,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar
5.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar SKPD	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis	22.680.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar SKPD	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	0	0	
5.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	5 Media	30.618.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7 Dokumen	109.800.000,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar
5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	33 Kali	340.200.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	300.000.000,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Makassar SKPD**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerinahan Daera**	**7 Unit**	**119.070.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Makassar SKPD**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	0	0	
5.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	
5.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar SKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	83.349.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar SKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	
5.05.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar SKPD	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	0	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar SKPD	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	0	
5.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar SKPD	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya lainnya yang disediakan	3 Unit	35.721.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar SKPD	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya lainnya yang disediakan	0	0	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar SKPD**	**Terlaksananya penyediaan asa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**12 Bulan**	**15.876.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar SKPD**	**Terlaksananya penyediaan asa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**12 Bulan**	**170.714.600,00**	
5.05 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Orang	10.206.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	
5.05.01 2 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39 000.000,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar
5.05.01.2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Jenis	5.670.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.768.600,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar
5.05.01 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	129 946.000,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar
5.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar SKPD**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara**	**11 Paket**	**332.159.600,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar SKPD**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara**	**10 Paket**	**232.010.000,00**	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46.478.124,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.380.000,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar
5.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	39.690.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	159.930.000,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar.
5.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar SKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar SKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.700.000,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar
5.05.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar SKPD	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 Paket	85.050.000,00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar SKPD	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0	0	
5.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar SKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	2 Orang	21.024.360,00	Pemeliharaan/ Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar SKPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ili tasi	0	0	
5.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar SKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	3 Jenis	139.917.116,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar SKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	21.000.000,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar

5.05.02	PROGRAM PENELITIANDAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kota Makassar SKPD	PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA KELITBANGAN	90%	938.441.947,00	PROGRAM PENELITIANDAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kota Makassar SKPD	PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA KELITBANGAN	90%	1.056.171.600,00	
		Kota Makassar SKPD	PERSENTASE PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN	100%	559.869.763,00		Kota Makassar SKPD	PERSENTASE PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN	100%	499.999.800,00	
		Kota Makassar SKPD	PERSENTASE SKPD YANG DIFASILITASI DALAM PENERAPAN INOVASI DAERAH	100%	434.146.471,00		Kota Makassar SKPD	PERSENTASE SKPD YANG DIFASILITASI DALAM PENERAPAN INOVASI DAERAH	100%	399.006.000,00	
		Kota Makassar SKPD	PERSENTASE KEBIJAKAN INOVASI YANG DITERAPKAN	94,83%	255.910.819,00		Kota Makassar SKPD	PERSENTASE KEBIJAKAN INOVASI YANG DITERAPKAN	94,83%	431.184.600,00	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Makassar SKPD	Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	6 Rekomendasi	559.869.763,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Makassar SKPD	Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	3 Rekomendasi	499.999.800,00	
5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Rekomendasi	174.423.375,00	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	166.684.200,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	0	0	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum.	0	0	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.02.2.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	0	0	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	0	0	
5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	0	0	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	0	0	
5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	0	0	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	0	0	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5 05 02 2 01 06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	0	0	Fasilitasi, Pelaksanaandan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	0	0	
5 05 02 2 01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 Laporan	151.983.068,00	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 Laporan	170.479.900,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar
5 05 02 2 01 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rancana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau EvaluasiTerhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	2 rekomendasi	233.463.300,00	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	2 rekomendasi	162 835.700,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	0	0	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	0	0	
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Kota Makassar SKPD**	**Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan**	**3 Dokuman**	**530.655.272,00**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Kota Makassar SKPD**	**Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan**	**3 Dokumen**	**623.397.500,00**	
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	1 Dokumen	151.651.510,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspekaspek sosial	1 Dokumen	208.447.000,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar
5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dihasilkan	0	0	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dihasilkan	0	0	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	204.280.368,00	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	207.238.000,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar
5.05.02 2.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	0	0	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen HasilPenelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	0	0	
5 05.02 2 02.05	Penelitian dan Pengembangan Parawisata	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Pengembangan Parawisata	0	0	Penelitian dan Pengembangan Parawisata	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen hasilpenelitian dan pengembangan Pengembangan Parawisata	0	0	
5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Pengembangan Kesehatan	0	0	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen hasilpenelitian dan pengembangan Pengembangan Kesehatan	0	0	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.02 2 02.10	Penelitian dan Pengambangan Bidang Partisipasi Masyarakat	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang partisipasi masyarakat	1 Dokumen	174.423.375,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Partisipasi Masyarakat	Kota Makassar SKPD	Jumlahdokumenhasil penelitian dan pengembangan bidang partisiPesi masyarakat	1 Dokumen	207.712.500,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar
5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Kota Makassar SKPD	**Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan**	**2 Dokumen**	**407.886.675,00**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Kota Makassar SKPD	**Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan**	**2 Dokumen**	**431.774.100,00**	
5 05.02.2 0 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kota Makassar SKPD	Jumlahdokumenhasil penelitian dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	233.463.300,00	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	1 Dokumen	208 138 000,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar.

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5 05 02.2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kota Makassar SKPD	Jumlahdokumenhasil penelitian dan pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	0	0	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	0	0	
5 05 02.2 03 06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral	0	0	
5 05.02.2 03 08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan kehutanan yang dihasilkan	0	0	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan kehutanan yang dihasilkan	0	0	
5.05 02.2 03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pekerjaan umum	1 Dokumen	174.423 375,00	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pekerjaan umum	1 Dokumen	223 636.100,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perhubungan yang dihasilkan.	0	0	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perhubungan yang dihasilkan.	0	0	
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0	0	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman.	0	0	
5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Komunikasi dan Informatika	0	0	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika.	0	0	
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Kota Makassar SKPD**	**Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi**	**11 Dokumen**	**690.057.290,00**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Kota Makassar SKPD**	**Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi**	**5 Dokumen**	**830.190.600,00**	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Makassar SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0	0	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Makassar SKPD	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi.	1 Dokumen	224 000 000,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar
5 05 02 2 04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi danPenerapan Teknologi	2 Laporan	255.910 819,00	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan hasil pelaksanaan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	1 Laporan	207.184 600,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar
5 05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	4 Laporan	192.169.323,00	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Makassar SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	1 Laporan	87.033.000,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil- hasil kelitbangan	3 Laporan	175.097.475,00	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	1 Laporan	162.259.000,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	66.859.673,00	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Makassar SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	149.714.000,00	Untuk Mendukung Program Prioritas Wali Kota Makassar
TOTAL					10.227.665.000,00	TOTAL				8.921.200.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2025 yang telah didiskusikan dalam Forum Perangkat Daerah Kota Makassar dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Makassar, mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai tingkat kota yang ditujukan kepada Balitbangda Kota Makassar belum ada. Atau dengan kata lain, sampai saat ini, usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat dan pemangku kepentingan berasal dari hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat lewat Musrenbang yang ditujukan kepada Balitbangda Kota Makassar belum ada.

Tabel 2.6 (T-C.32.)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Makassar

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat pada Balitbangda Kota Makassar berdasarkan hasil Musrenbang Tahun 2025, tidak terdapat usulan masyarakat untuk Balitbangda Kota Makassar.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada landasan pelaksanaan tugas sebagai institusi penelitian dan pengembangan, Balitbangda Kota Makassar antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinasi baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang penelitian maupun tugas-tugas lainnya. Diantaranya adalah koordinasi perumusan kebijakan di bidang penelitian pembangunan daerah dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti mengadakan koordinasi, melaksanakan FGD, melakukan penelitian yang bekerjasama dengan berbagai lembaga penelitian, baik universitas maupun instansi vertikal yang melaksanakan kegiatan kelitbangan guna menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan maupun naskah akademik. Selain itu, Balitbangda Kota Makassar juga melakukan analisis/telaahan kebijakan pembangunan sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya serta berperan dalam mengusulkan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar yang diharapkan dapat termanfaatkan bagi Pemerintah Daerah.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 yang kemudian diubah menjadi Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain mengatur tentang tugas dan struktur BRIN, Perpres tersebut juga mengamanatkan pembentukan Badan Riset dan Inovasi di tingkat daerah yang disebut dengan BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah). BRIDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah. BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan oleh BRIN sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 78 Tahun 2021. Pembentukan BRIDA tersebut dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Kebijakan tersebut tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Balitbangda Kota Makassar yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta riset kebijakan sebagai landasan pembangunan daerah di berbagai bidang kehidupan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar

Tujuan Balitbangda Kota Makassar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar 2021-2026 adalah "*Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi organisasi perangkat daerah*"

Sedangkan Tujuan Balitbangda Kota Makassar yang dituangkan dalam Renja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2025 dibuat berdasarkan dokumen perencanaan yang ada dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Balitbangda yang saat ini akan bertransformasi menjadi BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) Kota Makassar adalah Meningkatkan Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi dan Teknologi Organisasi Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya, tujuan tersebut perlu ditunjang dengan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan. Oleh karena itu, Balitbangda Kota Makassar kemudian menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Terlaksananya penelitian dan pengembangan kebijakan daerah.
2. Terlaksananya penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
3. Terwujudnya pengembangan inovasi dan teknologi.

Selain tiga sasaran tersebut, sasaran yang dapat mendukung penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota juga perlu diperhatikan. Sasaran-sasaran tersebut dapat diukur dengan menggunakan suatu indikator. Dari rumusan tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis, telah ditetapkan sasaran seperti diuraikan di atas. Maka dari itu, untuk menjelaskan keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang akan diwujudkan oleh Balitbangda Kota Makassar selama 5 (lima) tahun yang diuraikan ke dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN IKU SASARAN	KETERANGAN IKU PROGRAM
	Tujuan RPJMD 2021-2026 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif.							
	Sasaran RPJMD 2021-2026 : Terwujudnya pelayanan publik yang *sombere'* dan *smart.*	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).**	**Penelitian dan Pengembangan Daerah.**	- Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. - Persentase implementasi rencana kelitbangan. - Persentase SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. - Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di Kota Makassar.	**Balitbangda Kota Makassar.**	**Balitbangda Kota Makassar.**	**Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).**	
	Tujuan : Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi organisasi perangkat daerah.							
1	Sasaran : Terlaksananya penelitian dan pengembangan kebijakan daerah.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan kebijakan daerah yang dapat diimplementasikan	**Penelitian dan Pengembangan Daerah**	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah.	Laporan hasil penelitian dan pengembangan kebijakan daerah.	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan daerah yang terimplementasikan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan daerah yang terimplementasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan daerah yang dihasilkan dikali

2	Sasaran Terlaksanany a penelitian dan pengembang an pembanguna n daerah.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang diimplementasik an.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Bidang Penelitian dan Pengembanga n Pembangunan Daerah.	Laporan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang terimplementasikan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan daerah yang telah dilakukan	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang terimplementasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang dihasilkan dikali 100%.
3	Sasaran : Terwujudnya pengembang an inovasi dan teknologi organisasi perangkat daerah.	Persentase hasil pengembangan dan implementasi inovasi daerah dan teknologi yang diimplementasik an.	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di Kota Makassar.	Bidang Inovasi dan Teknologi.	Laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi.	Jumlah rekomendasi hasil inovasi dan pengembangan teknologi yang terimplementasikan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rekomendasi hasil inovasi dan pengembangan teknologi yang telah dilakukan.	Jumlah rekomendasi hasil pengembangan inovasi dan teknologi yang terimplementasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rekomendasi hasil pengembangan inovasi dan teknologi yang dihasilkan dikali 100%.

4	Meningkatnya kinerja dukungan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian dan umum	Presentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah. Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik.	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah.	Sekretariat Balitbangda	Data kepegawaian, kartu inventaris barang dan laporan pertanggungjawaban keuangan	Jumlah data pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian dan umum Balitbangda Kota Makassar yang telah dilaporkan, dibandingkan dengan jumlah seluruh data pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian dan umum Balitbangda Kota Makassar. Jumlah data sarana dan prasarana yang masih dalam kondisi baik pada Balitbangda Kota Makassaryang telah dilaporkan, dibandingkan dengan jumlah seluruh data sarana dan prasarana pada Blitbangda Kota Makassar	Jumlah data pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian dan umum Balitbangda Kota Makassar yang telah dilaporkan, dibandingkan dengan jumlah seluruh data pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian dan umum Balitbangda Kota Makassar. Jumlah data sarana dan prasarana yang masih dalam kondisi baik pada Balitbangda Kota Makassaryang telah dilaporkan, dibandingkan dengan jumlah seluruh data sarana dan prasarana pada Blitbangda Kota Makassar

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada Rencana Kerja (Renja) Balitbangda Kota Makassar Tahun 2025 mengacu pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 serta Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026.

Berdasarkan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Identifikasi dan melakukan pemetaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwali).
2. Identifikasi dan melakukan pemetaan permasalahan dalam pembangunan daerah kedalam bentuk *Idea Concept Paper* (ICP).
3. Memaksimalkan laboratorium inovasi sebagai media pengembangan kreativitas para inovator OPD.
4. Pembinaan ASN dan tenaga pendukung pengelola administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian dan umum.
5. Pengelolaan sarana dan prasarana kantor.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dari rumusan strategi yang diuraikan diatas, maka ditetapkan Arah kebijakan Balitbangda Kota Makassar Tahun 2021-2026 atau dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian dan pengembangan terkait permasalahan di bidang kebijakan daerah.
2. Melakukan penelitian dan pengembangan terkait permasalahan di bidang pembangunan daerah.
3. Melakukan *coaching* berkesinambungan kepada inovator OPD guna mendorong terciptanya inovasi yang berkelanjutan.
4. Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas aparatur.
5. Melakukan Pelaporan dan evaluasi kegiatan tepat waktu.
6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Balitbangda Kota Makassar

Visi : Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang *Sombere* Dan *Smart City* Dengan Imunitas Kuat Untuk Semua".

Misi :

1. **Revolusi SDM dan percepatan reformasi birokrasi menuju kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia, bersih dari indikasi korupsi.**
2. **Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.**
3. **Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang sombere' dan *smart city* untuk semua.**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi organisasi perangkat daerah.	Terlaksananya penelitian dan pengembangan kebijakan daerah.	Identifikasi dan melakukan pemetaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwali).	Melakukan penelitian dan pengembangan terkait permasalahan di bidang kebijakan daerah.
	Terlaksananya penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.	Identifikasi dan melakukan pemetaan permasalahan dalam pembangunan daerah kedalam bentuk *Idea Concept Paper* (ICP).	Melakukan penelitian dan pengembangan terkait permasalahan di bidang pembangunan daerah.
	Terwujudnya pengembangan inovasi dan teknologi organisasi perangkat daerah.	Memaksimalkan laboratorium inovasi sebagai media pengembangan kreativitas para innovator OPD	Melakukan *coaching* berkesinambungan kepada innovator OPD guna mendorong terciptanya inovasi yang berkelanjutan
	Meningkatnya kinerja dukungan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian dan umum.	Pembinaan ASN dan tenaga pendukung pengelola administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian dan umum	Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas aparatur Melakukan Pelaporan dan evaluasi kegiatan tepat waktu.
		Pendataan sarana dan prasarana kantor secara berkala.	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Pendukung.

3.3 Program dan Kegiatan

Secara terperinci, uraian garis besar rumusan rencana program dan kegiatan yang ada pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 (T-C.33.)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Balitbangda Kota Makassar Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Unit Kerja: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (n)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (n+1)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5 5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5 5.05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, SKPD	100%		PendapatanAsli Daerah (PAD)		100%	
		Presentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Kota Makassar, SKPD	90%	6.535.838.000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)		90%	8.779 055.000
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kota Makassar, SKPD	90%		PendapatanAsli Daerah (PAD)		90%	
5 5.05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, SKPD	9 Dokumen	127.186.000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)		10 Dokumen	321.375.600,00
5 5.05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Makassar, SKPD	2 Dokumen	73.495.000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)		3 Dokumen	12 360 600,00
5 5.05 01 2.01 02	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar, SKPD	1 Dokumen	7 538 000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)		1 dokumen	12 360.600,00

5	5.05	01	2.01	03	Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar, SKPD	1 Dokumen	7.538 000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	1 dokumen	12 360 600,00
5	5.05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Makassar, SKPD	1 Dokumen	7.538.000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	1 Dokumen	12 360 600,00
5	5.05	01	2.01	05	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar, SKPD	1 Dokumen	7.538 000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	1 Dokumen	12.360 600,00
5	5 05	01	2 01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar, SKPD	1 Laporan	7.538.000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	1 Laporan	247 212.000,00
5	5.05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Makassar, SKPD	4 Laporan	16 000.000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	2 Laporan	12 360.600,00
5	**5.05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya kegiatan administrasikeuangan Perangkat Daerah**	**Kota Makassar, SKPD**	**12 Bulan**	**5.448.676.900,00**	**PendapatanAsli Daerah (PAD)**	**12 Bulan**	6.961.052 850,00
5	5.05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar, SKPD	39 Orang/bulan	5.064.132 100,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	39 Orang/bulan	6 293.580.450,00
5	5.05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar, SKPD	1 Dokumen	225 960 000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Dokumen	0,00

5	5.05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar, SKPD	12 Dokumen	140.282.000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	12 Bulan	618.030.000,00
5	5.05	01	2.02	05	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhirtahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar, SKPD	1 Laporan	7.152.000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	1 Laporan	24.721.200,00
5	5.05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD	Kota Makassar, SKPD	3 Laporan	11.150.800,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	3 Laporan	24.721.200,00
5	**5.05**	**01**	**2.05**		**Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Makassar, SKPD**	**12 Bulan**	**106.000.000,00**	**PendapatanAsli Daerah (PAD)**	**12 Bulan**	**309.015.000,00**
5	5.05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	47 stel	81.803.000,00
5	5.05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Makassar, SKPD	8 Orang	105.000.000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	29 Orang	247.212.000,00
5	**5.05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Tertib dan Akuntabel**	**Kota Makassar, SKPD**	**3 Jenis Pengelolaan**	**462.251.500,00**	**PendapatanAsli Daerah (PAD)**	**5 Jenis Pengelolaan**	**678.466.446,00**
5	5.05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	18 Komponen	2.341.626,00

5	5.05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan LogistikKantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Makassar, SKPD	2 Paket	42.451.500,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	2 Komponen	247.212.000,00
5	5.05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	2 Jenis	24.721.200,00
5	5.05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Kota Makassar, SKPD	7 Dokumen	109.800.000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	5 Media	33.373.620,00
5	5.05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar, SKPD	32 Laporan	300.000.000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	33 Kali	370.818.000,00
5	**5.05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Makassar, SKPD**	**0**	**0**	**PendapatanAsli Daerah (PAD)**	**7 Unit**	**129.786.300,00**
5	5.05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Unit	0
5	5.05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	4 Unit	90.850.410,00
5	5.05	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Unit	0
5	5.05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	3 Unit	38.935.890,00
5	**5.05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kota Makassar, SKPD**	**12 Bulan**	**170.714.600,00**	PendapatanAsli Daerah (PAD)	12 bulan	**17.304.840,00**

5	5.05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat/Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	3 Orang	11 124.540,00
5	5.05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Makassar, SKPD	12 Laporan	39.000.000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Laporan	0,00
5	5.05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar, SKPD	3 Laporan	1.768 600,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	8 Jenis	6.180.300,00
5	5.05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Makassar, SKPD	12 Laporan	129.946.000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Laporan	0,00
5	**5.05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, SKPD	**10 Paket**	**232.010.000,00**	PendapatanAsli Daerah (PAD)	**11 Paket**	**362.053.964,00**
5	5.05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Makassar, SKPD	1 Unit	44 380 000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	1 Unit	50 661.155,00
5	5.05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penzinannya	Kota Makassar, SKPD	15 Unit	159 930.000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	4 Unit	43 262.100,00
5	5.05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Makassar, SKPD	10 Unit	6 700.000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Unit	0,00

5	5.05	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yangdipelihara	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	1 Paket	92.704.500,00
5	5.05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	2 Orang	22 916 552,00
5	5.05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Makassar, SKPD	1 Unit	21.000.000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	3 Jenis	152 509.656,00
5	5.05	02			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA KELITBANGAN**	**Kota Makassar, SKPD**	**90%**		PendapatanAsli Daerah (PAD)	**90%**	
						PERSENTASE PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN	**Kota Makassar, SKPD**	**100%**		PendapatanAsli Daerah (PAD)	**100%**	
						PERSENTASE SKPD YANGDIFASILITASI DALAM PENERAPAN INOVASI DAERAH	**Kota Makassar, SKPD**	**100%**	**2.388.362.000,00**	PendapatanAsli Daerah (PAD)	**100%**	**2.389.738.001,00**
						PERSENTASE KEBIJAKAN **INOVASI YANG DITERAPKAN**	**Kota Makassar, SKPD**	**94.93 %**		PendapatanAsli Daerah (PAD)	**94.93%**	
5	5.05	02	2.01		**Penelitian dan** Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Kota Makassar, SKPD	**3 Rekomendasi**	499 999.800,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	**6 Rekomendasi**	614.673.832,00

5	5.05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kota Makassar, SKPD	1 Laporan	166.684.200,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	1 Rekomendasi	194.537.269,00
5	5.05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Laporan	0
5	5.05	02	2.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)SKPD	0 Laporan	0
5	5.05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)SKPD	0 Laporan	0
5	5.05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)SKPD	0 Laporan	0

5	5.05	02	2.01	06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)SKPD	0 Laporan	0
5	5.05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Kota Makassar, SKPD	1 Laporan	170.479.900,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)SKPD	2 Laporan	165.661.566,00
5	5.02	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Kota Makassar, SKPD	1 Rekomendasi	162.835.700,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	2 Rekomendasi	254.474.997,00
5	**5.06**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Makassar, SKPD	**3 Dokumen**	**623.397.500,00**	PendapatanAsli Daerah (PAD)	3 Dokumen	578.305.247,00
5	5.05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Kota Makassar, SKPD	1 Dokumen	206.447.000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	1 Dokumen	165.518.146,00
5	5.05	02	2.02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Makassar, SKPD	0 Dokumen	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Dokumen	0

5	5.05	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kota Makassar, SKPD	1 Dokumen	207 236.000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	1 Dokumen	222.665 622,00
5	5.05	2.02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahrega	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Dokumen	0
5	5.05	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Dokumen	0
5	5.05	2.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Dokumen	0
5	5.05	2.02	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Dokumen	0
5	5.05	2.02	08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Dokumen	0
5	5.05	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Dokumen	0
5	5.05	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kota Makassar, SKPD	1 Dokumen	207.712 500,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	1 Dokumen	190 121.479,00
5	**5.05**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Terleksanenya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Makassar, SKPD	**2 Dokumen**	**431.774.100,00**	PendapatanAsli Daerah (PAD)	**2 Dokumen**	444 596 476,00
5	5.05	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kota Makassar, SKPD	1 Dokumen	208 136 000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	1 Dokumen	254 474 997,00

5	5.05	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Makassar, SKPD	0 Dokumen	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Dokumen	0
5	5.05	2.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Kota Makassar, SKPD	0 Dokumen	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Dokumen	0
5	5.05	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kota Makassar, SKPD	0 Dokumen	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Dokumen	0
5	5.05	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kota Makassar, SKPD	0 Dokumen	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Dokumen	0
5	5.05	2.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Mineral	Kota Makassar, SKPD	0 Dokumen	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Dokumen	0
5	5.05	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Makassar, SKPD	0 Dokumen	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Dokumen	0
5	5.05	2.03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Kota Makassar, SKPD	0 Dokumen	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Dokumen	0
5	5.05	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Makassar, SKPD	1 Dokumen	223 636 100,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	1 Dokumen	190 121 479,00
5	5.05	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD	0 Dokumen	0

5	5.05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Dokumen	0
5	5.05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Dokumen	0
5	5.05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Kota Makassar, SKPD	0	0	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Dokumen	0
5	**5.05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Makassar, SKPD	**5 Dokumen**	**830.190.600,00**	PendapatanAsli Daerah (PAD)	**11 Dokumen**	**752.182.446,00**
5	5.05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Makassar, SKPD	1 Dokumen	224 000 000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	0 Dokumen	0,00
5	5.05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kota Makassar, SKPD	1 Laporan	207.184.600,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	2 Dokumen	278 942.793,00
5	5.05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovati	Kota Makassar, SKPD	1 Laporan	87.033.000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	4 Dokumen	209.486.362,00

6	5.05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Makassar, SKPD	1 Laporan	182 259 000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	3 Laporan	190.856.248,00
6	5.05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Makassar, SKPD	1 Laporan	148 714.000,00	PendapatanAsli Daerah (PAD)	1 Laporan	72 877 043,00
					TOTAL				**8.921.200.000,00**			**11.168.793.000,00**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Penyusunan program dan kegiatan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar didasarkan pada RPJMD Kota Makassar, RKPD Kota Makassar dan Renstra Balitbangda Kota Makassar. Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2025 mencakup 2 Program, 10 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
   g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
   e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.
3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**
   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
   b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah.**
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
   b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
   d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
   e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1. **Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.**
   a. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
   b. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan.
   c. Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan.
2. **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.**
   a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial.
   b. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.
   c. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
3. **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.**
   a. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
   b. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.
4. **Pengembangan Inovasi dan Teknologi.**
   a. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi.
   b. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif.
   c. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.
   d. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

Secara keseluruhan, program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dirincikan ke dalam tabel Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2025 berikut:

TABEL 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						9 821.200 000,00							11 168.793 000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						9 821.200 000,00							11.168.793.000,00	
	5.06	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						9 821.200 000,00							11 168 793 000,00	
1	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik* *Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas* *Persentase Keterseduaan Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah*	-			90 % 90 % 100 %	6.536.638 000,00						-	8.776.088.000	
	5.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			9 Dokumen	127 185 000,00			-	05 Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	10 Dokumen	321 375 800,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	73 495 000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05 Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	0 Dokumen	12 380 800,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	7 538 000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05 Pemberdayaan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PO 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	1 dokumen	12.380.600,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	7.538.000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05 Pemberdayaan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PO 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	1 dokumen	12.380.600,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7 538 000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05 Pemberdayaan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PO 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	Dokumen	12.380.600,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7 538 000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06 Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an PD 1 | Peni ngkatan pe mbangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	1 Dokumen	12 360 600,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	7 538 000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05 Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an PD 1 | Peni ngkatan pe mbangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	1 Laporan	247 212 000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	16.000.000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05 Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an PD 1 | Peni ngkatan pe mbangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	Laporan	12.360.500,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	5 468 878 900,00			-	05 Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	12 Bulan	9 961 052 850,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	5 054 132 100,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05 Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	39 Orang/bulan	5 213 580 450,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	225 960 000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05 Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	1 Dokumen	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5 05 01 2 02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	140 252 000 00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05 Pemberdayaan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PO 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balibangda Kota Makassar	12 Bulan	4 168 030 000 00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5 05 01 2 02 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7 182 000 00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05 Pemberdayaan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PO 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balibangda Kota Makassar	1 Laporan	24 727 200,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5 05 01 2 02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	11 150 600,00	Kota Makassar Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06.Pemberdayaan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Bailbangda Kota Makassar	3 Laporan	24 721 200,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	105.000.000,00			-	06.Pemberdayaan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Bailbangda Kota Makassar	12 Bulan	309.516.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Pakaian Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Pakaian	0,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06.Pemberdayaan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Bailbangda Kota Makassar	47 stel	61 903 000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berpeluang Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	105.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05 Pemburan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	29 Orang	247.212.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksanannya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Secara Tertib dan Akuntabel*	-			3 Jenis Pengelolaan	452.251.500,00			-	05 Pemburan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	5 Jenis Pengelolaan	878.488.448,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05 Pemburan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	13 Komponen	2.341.825,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Legalitas Kantor yang Disediakan				2 Paket	42.481.500,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06 Pemberdayaan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	2 Komponen	247.212.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.06.0005	Penyelesaian Barang Cerakan dan Penggendaan														
			Jumlah Paket Barang Cerakan dan Penggendaan yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06 Pemberdayaan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	2 Jenis	24.721.200,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.06.0006	Penyelesaian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	109.900.000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	06 Pemberdayaan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	Media	33.373.620,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32 Laporan	300.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05 Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	33 Kali	370.818.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			0 Unit	0,00			-	05 Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	7 Unit	129.788.300,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan				9 Unit	0,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05.Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	0 Unit	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.07.0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Penelitian dan Measi Lainnya yang Dieadikan				6 Unit	0,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05 Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an PD 1 | Peni ngkatan pe mbangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Bekbangda Kota Makassar	4 Unit	90 850.410 00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Diadakan				6 Unit	0,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05 Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an PD 1 | Peni ngkatan pe mbangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Bekbangda Kota Makassar	0 Unit	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dieadikan				0 Unit	0,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05 Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an PD 1 | Peni ngkatan pe mbangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Bekbangda Kota Makassar	5 Unit	38 835 450 00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksanannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	170.714.800,00			-	05 Pemberdayaan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	12 bulan	17.304.849,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05 Pemberdayaan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	9 Orang	11.124.540,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	39.000.000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05 Pemberdayaan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	0 Laporan	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	1 755 600,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05 Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	3 Jasa	5 180 300,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	129 946 000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05 Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	0 Laporan	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			10 Paket	232.010.000,00			-	05 Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	11 Paket	382.083.884,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	44 380 000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	D5 Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an PD 1 | Peni ngkatan pe mbangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	1 Unit	60 551 165 00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	158 630 000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	D5 Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an PD 1 | Peni ngkatan pe mbangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	1 Unit	43.282 100,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	6 700 000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	D5 Pemban gunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjut an PD 1 | Peni ngkatan pe mbangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balitbangda Kota Makassar	1 Unit	0 00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05 Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balibangda Kota Makassar	1 Paket	82 704 500,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05 Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balibangda Kota Makassar	2 Orang	22 916 662,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	21.000.000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05 Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan PD 1 | Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Balibangda Kota Makassar	3 Jenis	152 909 656,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	*Persentase SKPD Yang Diteliti/ai Dalam Penerapan Inovasi Daerah* *Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan* *Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Kota Makassar* *Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan*	-			100 % 90 % 94,83 % 100 %	2.388 382.000,00			-		-	-	2.388 738.001,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyusunan Peraturan	*Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyusunan Peraturan yang Dihasilkan*	-			3 Rekomendasi	489 999 900,00			-	04 Peningkatan Kerjasama Internasional masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3	Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perguruan Tinggi, Pihak Swasta, Media, dan Masyarakat	3 Rekomendasi	514 573 832,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				1 Laporan	188 684 200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kerjasama Internasional masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3	Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perguruan Tinggi Pihak Swasta Media dan Masyarakat	1 Rekomendasi	194 537 269,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Perekam														
			Jumlah Data Kelitbangan dan Perpustakaan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	170 479 900,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kerjasama Internasional masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3	Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perguruan Tinggi Pihak Swasta Media dan Masyarakat	1 Laporan	165 661 566,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rancana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan														
			Jumlah Rekomendasi atas Rancana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	162 835 700,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kualitas Masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Perangkat Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perguruan Tinggi, Pihak Swasta, Media dan Masyarakat	2 Rekomendasi	254 474 997,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*	-			3 Dokumen	923 397 500,00			-	04 Peningkatan Kualitas Masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder	3 Dokumen	578.305 247,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	208 447 000,00	Kota Makassar Semua Kecamatan, Semua KelDesa Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kualitas Masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perguruan Tinggi Masyarakat dan Stakeholder	1 Dokumen	185 518 148,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				0 Dokumen	0,00	Kota Makassar Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder	0 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	207.239.500,00	Kota Makassar Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder	1 Dokumen	232.665.622,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0004	Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Olahraga				0 Dokumen	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder	0 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				0 Dokumen	0,00	Kota Makassar Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kerjasama Kemitraan masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi Masyarakat dan Stakeholder	0 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				0 Dokumen	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kerjasama kemitraan masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi Masyarakat dan Stakeholder	0 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				0 Dokumen	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kerjasama kemitraan masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi Masyarakat dan Stakeholder	0 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				0 Dokumen	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kualitas interaksi masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder	0 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja				0 Dokumen	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kualitas interaksi masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder	0 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	257 712 500,00	Kota Makassar Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kualitas interaksi masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder	1 Dokumen	190 121 479,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-			2 Dokumen	431.774.100,00			-	04 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder	1 Dokumen	444.596.475,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	206.136.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder	1 Dokumen	254.474.997,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				0 Dokumen	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder	0 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				0 Dokumen	0,00	Kota Makassar Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perumda, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder	0 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				0 Dokumen	0,00	Kota Makassar Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perumda, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder	0 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				0 Dokumen	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perumda, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder	0 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				0 Dokumen	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder	0 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				0 Dokumen	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder	0 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan				0 Dokumen	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder	0 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Umum				1 Dokumen	223.638.100,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kualitas Hidup Manusia masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder	1 Dokumen	190.121.479,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				0 Dokumen	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kualitas Hidup Manusia masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder	0 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				0 Dokumen	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04.Peningkatan Kualitas Hidup Manusia masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder	0 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perakaan Ruang dan Pertanahan				0 Dokumen	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	D4 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder	0 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				0 Dokumen	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	D4 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder	0 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	-			5 Dokumen	830 180.600,00			-	D4 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder	11 Dokumen	762.182.446,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	224 000 000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi Masyarakat dan Stakeholder	2 Dokumen	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	207 184 600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD Perusda Perguruan Tinggi Masyarakat dan Stakeholder	2 Dokumen	278 842 793 00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berskala Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berskala Inovatif				1 Laporan	47 033 000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 | Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi Masyarakat dan Stakeholder	4 Dokumen	208 485 352 00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	152.259.000,00	Kota Makassar Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 (Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder	5 Laporan	180.856.248,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	149.714.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata PD 3 (Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	SKPD, Perusda, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan Stakeholder	1 Laporan	72.577.043,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	JUMLAH							9.821.200.000,00							11.168.763.000,00	

BAB V

PENUTUP

Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), maka Balitbangda Kota Makassar yang saat ini dalam proses transformasi menuju BRIDA pada tahun 2023 mengarahkan Rencana Kerja tahun 2025 yang dapat mendukung penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah sebagai peran dari BRIDA. BRIDA sebagai perangkat daerah mandiri menjadi sentral dalam seluruh kegiatan kelitbangan dan inovasi di Kota Makassar kedepannya yang dalam pelaksanaannya membutuhkan program, kegiatan, dan alokasi dana yang mendukung pelaksanaan kelitbangan dan inovasi tersebut. Alokasi anggaran pada Rancangan Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2025 adalah sebesar Rp10.227.665.000,-. Apabila ketersediaan anggaran Pemerintah Kota Makassar tidak mencukupi ataupun melebihi dalam pengalokasian anggaran program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rancangan Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2025 tersebut, maka akan dilakukan pengkajian ulang terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam mendukung program prioritas Wali Kota Makassar. Sehingga ditetapkan pagu pada Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2025 adalah sebesar Rp8.921.200.000,-.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2025, antara lain :

a. Penyusunan Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2025 masih belum sempurna, terkait dengan dasar penyusunan Renja yang berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

b. Dalam penyusunan Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang dikarenakan harus melakukan upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan setiap program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Makassar Tahun 2025 dan pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan triwulan I tahun 2024.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. d. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192).

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Fungsi Balitbangda Kota Makassar sebagai pusat penelitian dan pengembangan daerah akan melakukan kajian untuk menghasilkan inovasi yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan Kota Makassar, membutuhkan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur fungsional untuk melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar serta kegiatan lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur fungsional.
b. Memberdayakan aparatur fungsional yang dimiliki Balitbangda Kota Makassar untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan lembaga penelitian pemerintah agar pelaksanaan penelitian dan pengembangan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan serta menghasilkan suatu rekomendasi dan inovasi untuk pembangunan Kota Makassar.
c. Dalam rangka sinergitas penelitian harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah agar proses pembangunan yang dilaksanakan mencapai target yang diharapkan.
d. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila mengacu jadwal yang ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja Balitbangda Kota Makassar Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi kita semua.

Makassar, 18 Juli 2024
KEPALA BADAN

NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST.,M.AP
NIP. 197304252005021001

LAMPIRAN

LEMBAR VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

HARI/ TANGGAL : SELASA / 16 JULI 2024
NAMA PERANGKAT DAERAH : BALITBANGDA KOTA MAKASSAR
KABID /VERIFIKATOR : FARIDAH, SE,MM
PEJABAT DARI PERANGKAT DAERAH : KABAN, AMRI MAULA (KABID) & KASUBAG. DKK
CONTACT PERSON : +62 812-9510-3241

NO.	URAIAN	MASUKAN / REKOMENDASI
BAB I	PENDAHULUAN	- Sampul untuk Renja-PD tahun 2025 diseragamkan, silakan menyesuaikan. - Tanggal yang dimasukan di hal. Kata pengantar dan penutup disarankan sebelum tanggal penetapan Renja-PD secara kolektif atau tanggal setelah proses penyempurnaan rankhir Renja-PD. - Untuk Nama Tabel diseragamkan sesuai cara penyajian renja-PD dalam Permendagri 86 tahun 2017 (dalam bentuk tabel TC.) - Daftar isi dan tabel menyesuaikan halaman SK. Penetapan Renja-PD secara kolektif masih proses tandatangan pimpinan, silakan melampirkan nanti setelah halaman sampul.
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA~ PD TAHUN LALU (*Target/Realisasi) (*Catatan Penting)	-Perhatikan tanda warna merah dalam file PDF rankhir Renja, silakan perbaiki. -Tabel T-C.30 kolom realisasi yang diberi warna merah satuan indikatornya dokumen dan bulan tetapi yg dimasukan dalam bentuk persentase, silakan menyesuaikan atau penjelasannya langsung. -Untuk Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Balitbangda Kota Makassar, apakah permasalahan point 1, 2, 4, 6, 8 dan 9 dijadikan permasalahan SKPD? Dan berdasarkan hasil evaluasi Renja Tahun 2024 -TC.31 : Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 disesuaikan dengan kondisi penginputan akhir di sipd dan dilengkapi dengan pengisian kolom catatan penting, sesuai tahapan penyempurnaan rancangan akhir Renja-PD. -Hal. 69 catatan penting adanya alasan penambahan pagu, ketika tabel T-C 31 telah disesuaikan dengan kondisi inputan akhir, berarti penjelasan narasi tersebut dihapus sampai ke hal. 70 point 3.
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	- Tabel T-C. 33, isi inputan penyajiannya belum sesuai kondisi akhir penginputan di sipd tahun 2025 sedangkan untuk perkiraan maju telah sesuai dengan kondisi pagu indikatif renstra Balitbangda tahun 2026. - Menyesuaikan tujuan dan sasaran renstra-PD
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	- Silakan menyesuaikan nama tabel 4.1: Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2025. - Pada kolom perkiraan maju tahun 2026 belum sesuai dengan pagu indikatif Renstra Balitbangda.

BABV PENUTUP	- Bab. V, disarankan hanya berisi : catatan penting terkait pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran jika tidak sesuai dengan kebutuhan (masukan total anggaran berserta alasan adanya penurunan dari ranwal ke rankhir) Kaidah pelaksanaan singkat - Rencana tindaklanjut singkat
Jumlah Usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Dokumen Rancangan Akhir RENJA Tahun 2025 (disertai matriks).	Tidak ada usulan musrenbang yang ditujukan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pokok- Pokok Pikiran DPRD Kota Makassar yang Terakomodir dalam Dokumen RENJA	Tidak ada usulan Pokok Pikiran DPRD Kota Makassar yang ditujukan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Usulan Hibah (ada/tidak)	Tidak ada mengakomodir Hibah
Usulan ke Musrenbang Provinsi (ada/tidak)	Tidak ada
Matriks program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 dari SIPD.	Tabel sesuai dari SIPD silakan mengecek kembali kolom yang belum terisi
Keseuaian Rancangan Akhir Renja-PD Tahun 2025 dengan Renstra Tahun 2021-2026 (Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, dan Target).	Disarankan untuk mengecek kembali kesesuaikan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, dan Target antara hasil inputan di sipd perencanaan dengan dokumen Renstra Inspektorat tahun 2021-2026.
Rancangan Akhir Renja-PD Tahun 2025 selaras dengan Rancangan RKPD (selaras/tidak selaras)	Disarankan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah selaras dengan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2025

Mengetahui,

Penanggungjawab,
Kepala Bidang

(Fajar Hidayat, S.STP, MM)

Verifikator,

(Faridah, SE,MM)

“

MAKASSAR
KOTA YANG BAIK
UNTUK SEMUA

PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

RENJA

BADAN PERENCANAAN PEMBAGUNAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025



makassar

i MC

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
8. Rencana Panjang Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) RKPD Tahun 2025 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Sistematika RKPD Tahun 2025 terdiri atas:
   a. BAB I PENDAHULUAN;
   b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
   c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
   d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
   e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
   f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
   g. BAB VII PENUTUP.

(2) Sistematika RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025 dan penyusunan RAPBD Tahun 2025.

Pasal 4

(1) Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan, dapat dilakukan Perubahan RKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau;
   b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

(3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 08 Juli 2024
WALI KOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 08 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

FIRMAN HAMID PAGARRA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 26

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jalan Jenderal Achmad Yani Makassar No. 2 90111 Telp (0411) 316940 Fax (0411) 333952

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA MAKASSAR
Nomor : 050.13/ 1734 /KEP/ VII /2024

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)TAHUN 2025
BAPPEDA KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BAPPEDA KOTA MAKASSAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Administrasi, rancangan Kegiatan Pokok serta Program Pendukung Kegiatan SKPD, maka dipandang perlu penetapan RENJA-SKPD Tahun 2025 dalam lingkup BAPPEDA Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA Kota Makassar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);

14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota makassar Tahun 2021 nomor 5).
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 tahun 2023);
18. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 (Berita daerah Kota Makassar Tahun 2024 nomor 26).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN 2025 BAPPEDA KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024;**

KESATU : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;

KETIGA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 10 Juli 2024

KEPALA BADAN,

A.ZULKIFLY,S.STP.M.Si
Pangkat : Pembina Utama / IV.b
Nip: 19800630 199810 1 002

Tembusan disampaikan kepada:
1. Pertinggal.

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, khususnya pasal 126-129, yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Renja Perangkat Daerah yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Menindak lanjuti peraturan tersebut maka Bappeda Kota Makassar menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai perwujudan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah Kota Makassar.

Rencana Kerja ini menyajikan evaluasi pelaksanaan Tahun sebelumnya (2023) yang menjabarkan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, tujuan dan sasaran Bappeda Kota Makassar serta Rencana Kerja serta pendanaan Bappeda Kota Makassar pada tahun 2025 yang akan datang. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Rencana Kerja ini Semoga Allah SWT selalu meridhoi-Nya.

Penyusunan rancangan akhir Renja ini merupakan proses penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk mempertajam program kegiatan dan pagu indikatif berdasarkan program, kegiatan, pagu indikatif yang telah di tetapkan dalam RKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan,lokasi kegiatan,kelompok sasaran serta berpedoman pada hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan tahun berjalan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Demikian, semoga dokumen Rencana Kerja Bappeda Kota Makassar Tahun 2025 ini dapat menghasilkan perencanaan yang implementatif, akuntabel dan berorientasi kinerja untuk mendukung terwujudnya visi Kota Makassar ***"Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere' dan Smart City dengan Imunitas Kuat Untuk Semua".***

Makassar, 10 Juli 2024

KEPALA BAPPEDA KOTA MAKASSAR

A. ZULKIFLY, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I/ IV.b
NIP. 19800630 199810 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA MAKASSAR TAHUN LALU. 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Makassar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9
2.1.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Dan Pencapaian Renstra Bappeda Tahun Lalu 12
2.1.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Dan Pencapaian Renstra Bappeda Tahun Berjalan 26
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 45
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 47
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 49
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 66
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 67
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 67
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 68
3.3 Program dan Kegiatan 69
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 124
BAB V PENUTUP 139

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Keuangan Tahun 2023	10
Tabel 2.2	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Dan Pencapaian Renstra Bappeda Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18
Tabel T-C.29	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30
Tabel T-C.30	Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Makassar	46
Tabel T-C.31	Review terhadap rancangan awal RKPD Kota Makassar Tahun 2025	50
Tabel T-C.32	Kajian Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat Tahun 2025	66
Tabel 3.1	Tujuan dan sasaran rencana kerja Bappeda Tahun 2025	69
Tabel T-C.33	Rumusan rencana program dan kegiatan Bappeda Kota Makassar Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Bappeda Kota Makassar	75
Tabel 4.1	Rumusan rencana program dan kegiatan Bappeda Kota Makassar Tahun 2025	125

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Bappeda merupakan dokumen perencanaan Bappeda Kota Makassar untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun.

Pada dokumen resmi perangkat daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu dan digunakan sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan selanjutnya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar

Dokumen Renja Bappeda Kota Makassar pada dasarnya merupakan suatu proses strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Bappeda Kota Makassar. Kualitas dokumen Renja Bappeda Kota Makassar sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Bappeda Kota Makassar sangat ditentukan oleh kemampuan Bappeda Kota Makassar dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Bappeda Kota Makassar terdiri dari tiga tahapan utama yaitu : tahap persiapan penyusunan Renja Bappeda, tahap penyusunan rancangan Renja Bappeda, dan tahap penetapan Renja Bappeda. Tahapan persiapan meliputi pembentukan Tim Penyusun

Renja Perangkat Daerah, Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, Penyusunan agenda kerja, serta Penyiapan data dan informasi. Penyusunan Renja Bappeda Kota Makassar merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Bappeda Kota Makassar.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Bappeda Kota Makassar mengacu pada rancangan RKPD, oleh karena itu Renja Bappeda Kota Makassar disusun secara paralel dengan penyusunan RKPD, dengan melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kota Makassar tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap Pencapaian Renstra Bappeda Kota Makassar. Penetapan Renja Bappeda Kota Makassar dilakukan dengan keputusan Pemerintah Daerah untuk menjadi pedoman Bappeda Kota Makassar dalam menyusun RKA Bappeda Kota Makassar.

Renja Bappeda Kota Makassar Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun keempat dari Renstra BAPPEDA Kota Makassar Tahun 2021-2026, yang memuat program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran serta Prioritas Pembangunan daerah Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026.
2. Program dan Kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);

16. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);

17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015, Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota makassar Tahun 2021 nomor 5).
21. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 (Berita daerah Kota Makassar Tahun 2024 nomor 26).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Bappeda Kota Makassar 2025 Sebagai rencana pembangunan tahunan Bappeda Kota Makassar periodesasi ke-4 dari Renstra tahun 2021-2026, guna penyusunan program, kegiatan/sub kegiatan, anggaran serta target kinerja sebagai hasil evaluasi Renja Bappeda.

Adapun tujuan penyusunan Renja Bappeda Kota Makassar Tahun 2025 ini adalah:

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Kota Makassar dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Makassar Tahun 2025;
2. Sebagai Parameter penilaian keberhasilan maupun ketidak berhasilan Bappeda Kota Makassar Tahun 2025 melalui Indikator dan Target Kinerja yang telah di tetapkan;
3. Sebagai Parameter penilaian kinerja Bappeda Kota Makassar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan;
4. Menjadi instrumen bagi masyarakat dan *stakeholder* serta Legislatif dalam pengawasan terhadap kinerja Bappeda Kota Makassar dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.
5. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Makassar 2025 merupakan pedoman dan arah kerja Bappeda Kota Makassar, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja Bappeda Kota Makassar , proses penyusunan Renja Bappeda Kota Makassar, keterkaitan antara Renja Bappeda Kota Makassar dengan dokumen RKPD, Renstra Bappeda , dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Bappeda Kota Makassar.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda Kota Makassar, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KOTA MAKASSAR TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Makassar Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappeda

Menjelaskan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Bappeda Kota Makassar Tahun 2023 dan perkiraan capaian sampai dengan triwulan I Tahun 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda Kota Makassar berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM,

maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Bappeda Kota Makassar dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung langsung dengan pelayanan yang langsung ditujukan kepada Bappeda Kota Makassar maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi, penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Makassar.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat

Memuat rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Makassar yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappeda Kota Makassar.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar terkait rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Bappeda untuk periode Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2023 dan Capaian Renstra Bappeda

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 memuat analisis terhadap pelaksanaan Renja dan perkiraan capaian kinerja tahun 2024 untuk mengidentifikasi pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Bappeda Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2023 mendapat alokasi anggaran dari APBD Kota Makassar sebesar Rp. 36.585.518.505,- dan Anggaran sebesar itu dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp. 35.260.813.305,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.324.705.200,- untuk melaksanakan 3 (Tiga) Program 13 Kegiatan dan 70 sub kegiatan.

Adapun realisasi target capaian keuangan yang dicapai BAPPEDA Kota Makassar tahun 2023 dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2023

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN	(%)
BELANJA DAERAH	**36.585.518.505,00**	**28.768.478.955,00**	**7.817.039.550,00**	**78,63**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.039.540.305,00	19.518.529.152,00	5.521.011.153,00	77,95
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164.163.700,00	99.217.324,00	64.946.376,00	60,44
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.840.290.655,00	10.488.887.771	3.351.402.884,00	75,79
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	740.850.000,00	713.970.714,00	26.879.286,00	96,37
Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.087.567.500,00	5.445.645.264,00	641.922.236,00	89,46
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.349.595.200,00	953.150.000,00	396.445.200,00	70,62
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.920.546.000,00	1.262.793.396,00	657.752.604,00	65,75
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	936.527.250,00	554.864.683,00	381.662.567,00	59,25
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.390.097.700,00	2.738.148.221,00	651.949.479,00	80,77
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.554.624.200,00	2.092.116.866,00	462.507.334,00	81,90
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	430.864.000,00	291.652.241,00	139.211.759,00	67,69

Perencanaan Pembangunan Daerah				
Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	404.609.500,00	354.379.114,00	50.230.386,00	87,59
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	8.155.880.500,00	6.511.801.582,00	1.644.078.918,00	79,84
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2.747.469.200,00	2.129.015.714,00	618.453.486,00	77,49
Koordinasi Pelaksanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3.089.045.00,00	2.768.238.859,00	320.806.141,00	89,61
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2.319.366.300,00	1.614.547.009,00	704.819.291,00	69,61
Jumlah	36.585.518.505,00	28.768.478.955,00	7.817.039.550,00	78,63

2.1.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Dan Pencapaian Renstra Bappeda Tahun Lalu

Berdasarkan pengukuran pencapaian indikator pada seluruh program yang telah dilaksanakan Bappeda Kota Makassar pada Triwulan IV Tahun 2023, Dapat disimpulkan bahwa dengan 3 Program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 70 kinerja dan anggaran Rp. 36.585.518.505.- diperoleh capaian kinerja dan anggaran untuk seluruh program Tahun 2022 yaitu :

- ❖ Realisasi seluruh program = Rp. 28.768.478.955,00
- ❖ Capaian Kinerja = 92 %
- ❖ Capaian Anggaran = 78.63 %

Berdasarkan data dari Tabel 2.1 yang berkenaan dengan Rekapitulasi Realisasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2023 Kota Makassar, pencapaian kinerja sasaran BAPPEDA Kota Makassar untuk ketiga program adalah:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

   Program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 25.039.540.305,- dan realisasi sebesar Rp. 19..518.529,152- (77,95%). Indikator programnya adalah persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah dan persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas.Rata-rata capaian kinerja 93% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.Pencapaian target kinerja program didukung oleh 7 kegiatan yaitu :

   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

   Faktor Pendukung:

   - Adanya kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang telah direncanakan setiap bulan/ Triwulan. Sehingga pada akhir periode akan terserap anggaran secara optimal sesuai dengan jumlah anggaran tahunan yang telah tersedia.

- Ketersediaan anggaran yang memadai dan adanya program rutin yang terlaksana setiap bulannya.
- Ketersediaan SDM yang berkualitas di SKPD yang menduduki jabatan sesuai dengan keahliannya.
- Adanya kerjasama yang baik antar pejabat teknis dan pihak ketiga yang berjalan maksimal serta motivasi dan dukungan dari pimpinan dan segenap staf Bappeda Kota Makassar.

Faktor Penghambat:

- Anggaran kas yang tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Terdapat beberapa sub kegiatan dengan capaian kinerja sub kegiatan yang masih rendah hal ini disebabkan adanya belanja ATK yang tidak terealisasi.
- Administrasi yang tidak tertib dapat membuat pelaksanaan kegiatan terhambat, terutama yang berhubungan dengan dokumen Kontrak sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan ikut mundur dan mempengaruhi penyerapan anggaran sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut:

- Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang pada lingkup Bappeda Kota Makassar.
- Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan di evaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut terus meningkat pada periode mendatang sesuai dengan target yang telah ditetapkanMelakukan koordinasi dengan SKPD terkait perihal anggaran kas yang tidak sesuai.
- Melakukan koordinasi dan komunikasi internal Bappeda secara lebih intensif
- Percepatan proses pengadaan barang dan jasa dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan / kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

2. **Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.3.390.097.700,- dan realisasi sebesar Rp. 2.738.148.221,- (80,77%). Indikator programnya adalah tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Perda, tersedianya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Perkada dan penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD. Rata-rata capaian kinerja 100 % dengan predikat kinerja Sangat

Tinggi. Pencapaian target kinerja Program didukung oleh 3 kegiatan yaitu:

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Faktor Pendukung:

- Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan aliran kas yang sudah ada.
- Ketersediaan anggaran yang memadai dan adanya program rutin yang terlaksana setiap bulannya.

Tindak Lanjut:

- Tetap menjaga konsistensi dan mempertahankan kinerja serta koordinasi yang baik dengan bidang – bidang pada lingkup Bappeda Kota Makassar melalui rapat koordinasi perencanaan bappeda.

3. **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.8.155.880.500,- dan realisasi sebesar Rp. 6.511.801.582,- (79,84%). Indikator programnya adalah penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam Renja PERANGKAT DAERAH. Rata-rata capaian kinerja 100 % dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.Pencapaian target kinerja program didukung oleh 3 kegiatan yaitu:

1. **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

   Faktor Pendukung:

- Adanya koordinasi yang baik dari pihak Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan optimal.
- SDM yang memiliki kapasitas ilmu yang memadai.
- Dilaksanakan sesuai jadwal Pelaksanaan Kegiatan.

Faktor Penghambat :

- Realisasi anggaran Sub Kegiatan Sinergitas dan Harmonisasi Bidang Pemerintahan terkait kegiatan Pemberian Penghargaan tidak sesuai target.

- Adanya anggaran perjalanan pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia yang tidak terealisasi dengan baik.
- Adanya penyusunan Dokumen yang mengalami rasionalisasi / pengurangan jumlah kegiatan.

Tindak Lanjut:

- Perlunya sinkronisasi dengan timeline pelaksanaan kegiatan bidang dengan timeline kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
- Perlunya Koordinasi yang lebih intens terkait perencanaan kegiatan internal bidang dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan.
- Diperlukan penyusunan lebih awal dan menyepakati KAK/TOR dalam merumuskan dan pelaksanaan kegiatan agar terencana dan terlaksana dengan baik.

2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Faktor Pendukung:

- Pelaksanaan Tupoksi sebagai Koordinator Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian pada Mitra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan SDA yang berjalan sesuai timeline perencanaan dan terupdate mengikuti perubahan perubahan.
- Pelaksanaan kegiatan Updating terhadap Capaian Indikator Ekonomi Makro yang berkontribusi terhadap penyusunan Dokumen Perancanaan Daerah.
- Tim Pendukung Kegiatan yang solid dan sarana prasarana yang memadai

Faktor Penghambat:

- Perangkat Daerah Mitra bidang Ekonomi SDA yang belum maksimal dalam berkontribusi secara kualitas dan kuantitas terhadap Pelaksanaan Perencanaan aspek penyusunan dokumen perencanaan dan ketepatan pengumpulan dokumen perencanaan serta pendukungnya.

Tindak Lanjut:

- Diperlukan pembinaan dan koordinasi secara aktif dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan.

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Faktor Pendukung:

- Koordinasi yang optimal dengan SKPD mitra bidang
- Adanya dukungan dari Tim Ahli
- Sarana dan prasarana yang memadai

Faktor Penghambat

- Perangkat Daerah Mitra bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang belum maksimal dalam berkontribusi secara kualitas dan kuantitas terhadap Pelaksanaan Perencanaan aspek penyusunan dokumen perencanaan dan ketepatan pengumpulan dokumen perencanaan serta pendukungnya.

Tindak Lanjut

- Diperlukan pembinaan dan koordinasi secara aktif dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan.

Adapun langkah – langkah kedepan yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan kualitas dokumen perencanaan dan penyelenggaraan melalui validasi data dan informasi termasuk perbaikan indikator kinerja dan target dengan metodologi atau bimbingan teknis dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan.
2. Menyediakan sistem perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian yang berbasis elektronik yang dikelola secara internal oleh Bappeda.
4. Setiap pengelola kegiatan harus mengacu pada KAK dan anggaran kas yang telah disusun, sekaligus mensosialisasikan kepada seluruh tim pelaksana kegiatan.
5. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan target yang belum tercapai di Tahun sebelumnya.
6. Sinergitas dengan TAPD dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang diwadahi TAPD.

7. Melakukan konsultasi dan koordinasi yang lebih intensif terhadap lembaga Legislatif sehingga terjalin komunikasi yang baik dalam pelaksanaan pembahasan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hasil informasi tersebut diatas, berikut ini disajikan evaluasi Renja pada Tahun 2023, pada **Tabel 2.2** berikut:

TABEL 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Dan Pencapaian Renstra Bappeda Tahun 2023

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2023 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab
						I		II		III		IV										
			K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
3	4	4.a	7			8		9		10		11		12 = 9+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan																						
Perencanaan																						
					36.585.518.505,00		2.510.303.311		8.615.715.431		1.222.333.666		10.420.116.547		28.768.478.955		78,63					Bappeda
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat	%	90			0		0		73		17		90		90		90%		90%		Bappeda
	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat	%	100	Rp 23.930.961.624	25.039.540.305	0	1.963.736.368	0	5.497.028.275	64	5.210.000.964	36	6.847.763.545	100	19.518.529.152	100	77,95	100%	42.536.660.156	100%	37%	Bappeda
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam	%	90			0		0		67		23		90		90		90%		90%		Bappeda
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	%	100	Rp 417.681.800	164.163.700	14	4.376.700	0	8.520.000	43	32.645.000	43	53.075.624	100	99.217.324	100	60,44	100	237.316.700	100,00	7%	Bappeda
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	Rp 260.247.300	43.288.700	0	4.376.700	0	4.320.000	2	11.435.000	1	10.223.624	3	34.615.324	100	79,96	6	61.037.814	50%	3%	Bappeda
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	Rp 35.988.500	16.443.500	0	0	0	0	0	930.000	1	6.904.000	1	7.834.000	100	47,64	2	23.479.650	40%	1%	Bappeda
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	Rp 16.296.500	14.223.500	0	0	0	0	1	930.000	0	6.834.000	1	7.764.000	100	54,59	2	23.829.650	40%	1%	Bappeda
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	Rp 24.289.500	28.335.500	1	0	0	0	0	7.730.000	0	5.902.000	1	13.632.000	100	48,32	2	35.367.650	40%	23%	Bappeda
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	Rp 17.689.500	16.144.500	0	0	0	0	0	868.000	1	7.304.000	1	8.172.000	100	50,62	2	22.187.000	40%	17%	Bappeda
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	1	Rp 7.766.000	7.766.000	0	0	0	0	0	892.000	1	1.140.000	1	2.032.000	100	26,34	1	**2.032.000**	20%	4%	Bappeda
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	Rp 45.404.500	37.962.000	1	0	0	3.600.000	1	9.600.000	1	11.768.000	3	25.048.000	100	65,98	5	60.702.792	33%	13%	Bappeda

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2023 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp.(000) RENJA	Rp.(000) DPA	I		II		III		IV										
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
3	4	4.a	7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 8 + 12		15 = 14/5*100		16
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan**	**Ls**	**100**	**Rp 13.644.858.874**	**13.840.290.655**	**0**	**1.412.403.245**	**0**	**3.031.629.851**	**50**	**2.340.271.516**	**50**	**3.044.583.157**	**100**	**10.408.887.771**	**100**	**75,79**	100	**13.833.330.788**	100,00	31%	Bappeda
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	68	Rp 12.564.884.474	12.727.008.055	0	1.187.153.545	0	2.844.365.851	0	2.692.787.518	68	2.775.705.401	68	9.500.622.315	100	74,65	123	17.885.703.290	162%	23%	Bappeda
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Dokumen	15	Rp 309.600.000	345.570.000	0	81.000.000	0	83.040.000	0	84.960.000	15	84.360.000	15	333.360.000	100	96,47	33	630.480.000	220%	34%	Bappeda
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Dokumen	12	Rp 238.637.500	238.637.500	0	43.500.000	0	43.500.000	0	46.500.000	12	45.214.000	12	190.714.000	100	79,92	24	391.829.000	200%	27%	Bappeda
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2	Rp 5.455.500	5.455.500	0	0	0	0	1	0	1	2.034.000	2	2.034.000	100	38,38	4	4.063.000	200%	5%	Bappeda
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Rp 6.944.000	5.907.500	0	0	0	0	0	0	1	2.474.000	1	2.474.000	100	41,88	2	0	40%	0%	Bappeda
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	Rp 246.826.500	247.278.500	0	40.000.000	1	60.000.000	0	60.000.000	1	82.474.000	2	242.474.000	100	98,06	4	484.445.000	40%	9,31	Bappeda
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	Rp 267.721.400	265.624.100	0	54.763.700	6	54.120.000	0	55.310.000	6	50.547.756	12	214.721.456	100	80,84	24	430.891.456	40%	6,93	Bappeda
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Laporan	2	Rp 4.809.500	4.809.500	0	0	1	0	0	714.000	1	1.714.000	2	2.428.000	100	50,48	4	4.043.000	40%	12%	Bappeda

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2023 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab
							I		II		III		IV										
			K	Rp. (000) RENJA		Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	
3	4	4.a	7				8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 8 + 12		15 = 14/5*100		16
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya layanan Admininstrasi Kepegawaian**	**%**	**100**	**Rp**	**866.500.000**	**740.850.000**	**0**	**193.114.737**	**0**	**133.237.553**	**50**	**210.730.567**	**40**	**170.767.737**	**90**	**733.970.114**	**90**	**96,31**	**90**	**1.155.463.103**	**90,00**	**24%**	Bappeda
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	106	Rp	146.500.000	72.350.000	0	0	0	0	0	0	91	62.095.000	91	62.095.000	86	84,66	201	153.815.970	190	41%	Bappeda
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	60	Rp	720.000.000	667.500.000	0,0	193.114.737	0,0	133.237.553	0,0	210.730.567	60	108.672.737	60	651.675.114	100	97,66	90	995.647.133	270	22%	Bappeda
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya layanan Administrasi Umum**	**%**	**90**	**Rp**	**4.564.083.700**	**6.087.567.500**	**10**	**125.614.501**	**10**	**346.354.430**	**20**	**1.531.882.673**	**40**	**2.841.733.660**	**80**	**5.445.645.264**	**89**	**83,46**	**90**	**9.037.667.303**	**100,00**	**53%**	Bappeda
Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp	8.413.000	98.162.400	0	0	0	0	0	0	1	3.500.000	1	3.500.000	100	22,15	2	Rp18.275.000,00	160	16%	Bappeda
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket	1	Rp	209.231.700	270.337.700	0	0	0	0	0	18.996.000	1	145.542.000	1	164.458.000	100	60,83	2	309.596.000	400	33%	Bappeda
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	Rp	32.850.400	66.023.800	0	0	0	0	0	0	2	61.523.200	2	61.523.200	100	93,19	3	132.453.204	500	14%	Bappeda
Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	Rp	336.961.000	296.961.000	0	0	0	0	2	127.363.000	2	161.221.000	4	288.584.000	100	97,30	6	628.242.000	300	35%	Bappeda
Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	Rp	389.387.600	390.102.600	0	0	0	18.081.000	0	0	1	291.617.000	1	309.698.000	100	79,39	2	582.258.000	400	42%	Bappeda
Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	Rp	1.468.400.000	2.788.800.000	3	53.500.000	3	625.300.000	3	763.800.000	3	1.221.300.000	12	2.663.900.000	100	95,74	27	4.367.400.000	225%	288%	Bappeda
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1	Rp	186.000.000	150.000.000	0	0	0	11.880.000	0	16.300.000	1	74.600.000	1	105.380.000	100	70,25	586	155.409.000	100%	8%	Bappeda
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	laporan	1	Rp	1.498.000.000	1.650.000.000	0	72.114.501	0	246.093.430	0	340.041.673	1	595.474.460	1	1.453.724.064	100	88,10	418	2.067.568.105	100%	32%	Bappeda
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	3600	Rp	162.840.000	169.680.000	0	0	0	0	0	0	3600	163.680.000	3600	163.680.000	100	100,00	3600	0	20%	0%	Bappeda
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	Rp	272.000.000	269.500.000	0	0	0	45.000.000	0	56.250.000	1	117.250.000	1	218.500.000	100	75,47	2	614.000.000	200%	60%	Bappeda
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**%**	**90**	**Rp**	**1.678.121.300**	**1.343.535.200**	**0**	**0**	**0**	**329.806.000**	**40**	**0**	**40**	**23.350.000**	**80**	**953.156.000**	**89**	**70,62**	**170**	**8.163.805.343**	**1,89**	**166%**	Bappeda
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	Rp	1.161.508.200	973.143.200	0	0	0	733.300.000	2	0	1	6.100.000	3	739.400.000	100	75,96	13	5.804.355.510	87%	129%	Bappeda
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	Rp	537.213.100	376.452.000	0	0	0	196.500.000	0	0	1	17.250.000	1	213.750.000	100	56,76	3	532.105.435	60%	199%	Bappeda
Pengedaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	**Tersedianya layanan Jasa Penunjang Urusan**	**%**	**90**	**Rp**	**1.784.461.200**	**1.520.546.000**	**0**	**183.168.873**	**0**	**329.574.336**	**0**	**337.334.056**	**80**	**412.656.131**	**80**	**1.262.793.336**	**98**	**65,75**	**90**	**1.805.454.823**	**1,00**	**21%**	Bappeda
Pengedaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	25	Rp	179.161.200	178.426.800	0	15.306.800	0	22.960.000	0	24.600.000	9	24.311.146	9	82.377.946	36	51,77	15	216.112.094	12%	9%	Bappeda
Pengedaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	Rp	402.900.000	552.900.000	0	17.522.273	0	73.674.396	0	73.592.564	1	60.058.065	1	226.847.629	100	42,84	2	432.743.812	200%	25%	Bappeda
Pengedaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengedaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	Rp	1.202.400.000	1.189.219.200	0	145.735.800	0	226.939.420	0	233.201.436	44	327.686.820	44	933.567.630	92	78,50	92	1.504.467.630	175%	44%	Bappeda



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang divalusasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2023 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab
						I		II		III		IV										
			K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
3	4	4.a	7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	%	50	Rp 1.034.654.750	936.527.250	0	44.458.252	0	51.852.101	50	157.037.150	20	301.537.176	70	554.864.683	70	59,25	90	347.125.582	1,00	4%	Bappeda
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	Rp 62.274.750	62.274.750	1	8.742.500	0	8.732.700	0	3.963.200	1	11.913.604	1	33.219.004	100	53,33	2	52.491.804	2001	5%	Bappeda
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	Unit	55	Rp 731.610.000	692.242.500	9	39.178.752	0	47.355.405	39	66.358.950	47	204.320.012	41	357.214.119	75	54,31	70	497.200.460	1275	7%	Bappeda
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	Rp 140.770.000	132.010.000	0	0	0	0	2	44.635.000	1	37.743.000	3	82.378.000	150	77,75	5	266.415.000	2675	27%	Bappeda
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	Rp 100.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	1	46.837.500	1	46.837.500	100	93,68	0	0	0%	0%	Bappeda
														Rata-rata capaian kinerja (%)		93	77,95	0	41.586.764.250	0,67	44%	Bappeda
														Predikat kinerja		Sangat Tinggi	Tinggi	0	0	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Bappeda
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam**	%	100			0		0		42		58		100		100		101				Bappeda
	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah	-	ADA	Rp 4.839.874.300	3.350.897.700	0	164.232.250	ADA	1.352.744.601	Ada	959.341.716	Ada	861.825.516	ADA	2.738.148.221	100	80,77	0	0	2,00	0%	Bappeda
	Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah	-	ADA			Ada		Ada		ADA		ADA		ADA		100		0				Bappeda
Pengusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Tersusunnya Perencanaan dan Pendanaan**	%	100	Rp 3.083.732.800	2.554.624.200	61	155.532.250	17	1.243.843.156	17	274.666.250	0	618.515.201	100	2.092.116.866	100	81,50	100	3.743.117.702	100	21%	Bappeda
Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan	Dokumen	51	Rp 97.917.000	83.767.000	11	0	0	9.720.000	0	18.052.500	0	13.191.529	51	42.160.445	100	50,33	102	77.358.343	10201	5%	Bappeda
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	1	Rp 81.351.000	72.251.000	0	0	0	0	0	30.952.720	1	24.088.809	1	55.041.529	100	75,14	2	72.011.829	6,00%	3%	Bappeda
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi	Berita Acara	1	Rp 164.442.000	114.922.000	1	57.788.000	0	20.600.000	0	0	0	5.453.500	1	83.915.500	100	73,30	2	197.624.500	40%	18%	Bappeda
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	Rp 219.474.000	219.474.000	1	1.560.000	0	105.660.000	0	2.175.000	0	2.340.000	1	151.340.000	100	67,36	2	371.836.000	40%	22%	Bappeda
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	Rp 1.079.430.000	950.081.000	1	5.220.000	0	707.804.265	0	6.000.000	0	86.324.014	1	805.351.279	100	70,30	2	1.443.930.279	40%	28%	Bappeda
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Diterapkan(RPJPD/RPJMD/RKP	Dokumen	2	Rp 1.381.218.800	1.305.129.200	0	90.352.250	1	231.128.031	1	276.266.615	0	307.693.343	2	646.803.789	100	76,50	4	1.576.344.847	50%	25%	Bappeda





Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2023 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab
						I		II		III		IV										
			K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
3	4	4.a		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Tersusunnya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**%**	**100**	**Rp 764.332.500**	**430.864.000**	**0**	**8.720.000**	**50**	**61.534.401**	**0**	**15.880.000**	**50**	**295.509.840**	**100**	**231.652.241**	**100**	**67,63**	**100**	**976.220.553**	**100**	**24%**	Bappeda
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan	Masukan	2	Rp 479.552.500	174.684.000	0	8.720.000	1	25.934.401	0	8.820.000	1	38.555.340	2	82.029.741	100	46,96	4	436.081.341	40%	21%	Bappeda
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	51	Rp 284.780.000	256.180.000	0	0	0	35.600.000	0	7.060.000	51	166.954.500	51	209.622.500	100	81,83	102	408.139.212	200%	22%	Bappeda
Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	**Terlaksananya Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan**	**%**	**100**	**Rp 981.009.000**	**404.603.500**	**25**	**0**	**25**	**48.167.124**	**25**	**60.807.455**	**25**	**237.404.535**	**100**	**354.379.114**	**100**	**87,53**	**100**	**1.630.188.534**	**100**	**26%**	Bappeda
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2	Rp 123.000.000	51.000.000	0	0	0	3.480.000	0	11.250.000	2	11.250.000	2	25.980.000	100	50,34	4	1.024.601.068	40%	20%	Bappeda
Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	Rp 852.009.000	353.609.500	1	0	1	44.687.124	1	57.557.455	1	226.154.535	4	328.399.114	100	92,87	7	606.187.526	35%	41%	Bappeda
														Rata-rata capaian		**100**	**89,77**	0	**6.350.126.843**	**300**	**152**	Bappeda
														Predikat kinerja		**Sangat**	**Tinggi**	0	**0**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**	Bappeda

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2023 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV									
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
3	4	4.a	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam**	%	100%	46.530.559.901	100%	5.873.050.267	100	Rp 12.626.067.900	8.155.986.500	0	382.340.693	20	1.765.946.475	25	1.652.998.988	55	2.780.523.426	100	6.511.801.582	100	79,84	100	12.304.851.043	100,00	27%	Bappeda
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam	%	100%		100%		100			0		20		45		35		100		100		100		100,00		Bappeda
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan**	%	100%	17.888.789.628	75	1.718.056.092	100	Rp 3.259.687.800	2.747.469.200	0	144.130.395	12	274.488.858	38	530.661.817	50	1.179.734.644	100	2.129.015.714	100	77,43	175	3.847.871.986	175,00	22%	Bappeda
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Dokumen	9 Dokumen	2.425.206.411	2	191.097.484	2	Rp 224.813.400	206.563.600	0	50.693.500	1	52.420.000	0	98.887.890	1	91.467.890	2	293.398.480	100	89,52	4	474.495.964	40%	20%	Bappeda
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Perangkat Daerah	7 SKPD	434.893.410	4	195.932.000	7	Rp 167.768.500	87.847.500	0	0	0	10.755.000	0	41.499.500	7	27.529.000	7	79.783.500	100	90,82	11	195.715.500	157%	45%	Bappeda
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Laporan	5 Dokumen	1.221.138.411	4	95.055.260	5	Rp 107.977.500	86.039.000	0	0	0	3.480.000	5	7.350.000	0	66.192.500	5	77.020.500	100	93,47	9	172.075.760	36%	14%	Bappeda
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi RenstraRenja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	9 Dokumen	3.805.806.411	2	240.882.681	2	Rp 523.894.500	464.717.500	0	0	1	52.375.000	0	52.243.970	1	152.815.404	2	257.434.374	100	64,00	4	630.316.975	40%	17%	Bappeda
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Dokumen	9 Dokumen	2.966.886.411	2	261.304.504	2	Rp 567.645.900	500.824.100	0	42.185.200	1	94.883.858	1	116.725.000	0	157.138.773	2	410.932.837	100	82,05	4	672.237.351	40%	23%	Bappeda
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan RenstraRenja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	7 SKPD	320.028.749	10	114.116.000	7	Rp 121.373.000	113.873.000	0	0	0	10.755.000	0	64.965.000	7	32.550.000	7	108.270.000	100	95,08	17	222.386.000	243%	69%	Bappeda
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan RenstraRenja Bidang	Perangkat Daerah	5 Dokumen	1.696.526.411	4	160.401.030	5	Rp 200.999.500	114.500.000	0	0	0	2.500.000	5	7.769.000	0	95.594.000	5	106.263.000	100	92,81	9	266.744.030	36%	16%	Bappeda
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi RenstraRenja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	9 Dokumen	4.217.993.411	2	438.387.203	2	Rp 1245.925.500	1.063.048.500	0	51.261.695	2	46.520.000	0	141.294.257	0	526.517.071	2	765.593.023	100	72,05	4	1.204.300.226	40%	29%	Bappeda

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2023 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab
			K	Rp. (000) RENJA		Rp. (000) DPA	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
3	4	4.a	7				8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA**	**%**	**100**	**Rp**	**4.140.385.100**	**3.089.045.000**	**0**	**137.848.738**	**0**	**1.271.023.440**	**15**	**615.301.361**	**21**	**743.375.320**	**96**	**2.768.238.859**	**96**	**83,61**	**196**	**4.576.453.721**	**102**	**25%**	Bappeda
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	Rp	635.032.700	415.855.700	0	57.543.104	1	92.915.736	1	145.920.247	0	109.362.000	2	335.741.179	100	95,16	4	624.032.036	40%	31%	Bappeda
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalm Penyusunan RenstraRenja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	3	Rp	131.018.500	104.041.500	0	0	0	24.300.000	0	60.985.000	3	13.512.000	3	98.797.000	100	94,96	6	223.300.182	267%	72%	Bappeda
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan RenstraRenja Bidang	Perangkat Daerah	5	Rp	194.600.500	187.512.000	0	0	0	33.169.621	0	44.393.521	5	92.085.412	5	169.648.554	100	90,47	10	367.821.326	40%	37%	Bappeda
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi RenstraRenja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	2	Rp	2.111.499.000	1.537.322.000	0	22.092.527	1	1.024.102.305	0	181.928.161	1	166.309.780	2	1.394.352.771	100	90,70	4	1.692.340.722	40%	55%	Bappeda
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	Rp	259.351.900	235.732.100	0	53.254.100	1	38.473.660	0	75.720.265	1	39.692.748	2	207.641.373	100	88,08	4	392.111.875	40%	20%	Bappeda
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan RenstraRenja Bidang SDA	Perangkat Daerah	4	Rp	129.861.700	103.250.800	0	0	0	24.320.000	0	41.322.000	4	13.263.924	4	78.905.924	100	77,00	6	180.538.008	150%	59%	Bappeda
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan RenstraRenja Bidang SDA	Perangkat Daerah	5	Rp	135.594.200	124.694.800	0	4.538.377	0	10.000.000	0	45.169.797	5	43.588.906	5	103.307.070	100	83,65	10	223.897.904	40%	22%	Bappeda
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi RenstraRenja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	2	Rp	543.424.600	389.636.100	0	0	0	33.146.058	0	19.932.350	2	260.164.550	2	313.244.958	100	82,30	4	671.751.606	40%	12%	Bappeda

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2023 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2023		Unit SKPD Penanggung Jawab
						I		II		III		IV										
			K	Rp.(000) RENJA	Rp.(000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	
3	4	4.a		7			8		9		10		11		12 = 9+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	16
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan	**Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang**	**%**	**100**	**Rp 5.225.935.000**	**2.319.366.300**	**0**	**100.361.560**	**25**	**220.428.177**	**50**	**506.947.880**	**25**	**786.809.462**	**100**	**1.614.547.003**	**100**	**63,61**	**200**	**3.961.326.322**	**200**	**23%**	Bappeda
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	Rp 258.011.000	236.374.600	0	34.330.100	1	50.339.709	0	63.523.640	1	63.086.612	2	214.479.512	100	90,74	4	422.734.842	40%	23%	Bappeda
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	6	Rp 129.500.000	122.922.000	0	0	0	16.030.000	6	52.260.000	0	19.225.500	6	87.515.500	100	71,50	11	184.524.350	100%	28%	Bappeda
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra/renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	5	Rp 306.928.700	150.020.000	0	0	0	10.000.000	5	10.000.000	0	65.487.595	5	85.487.595	100	56,30	10	201.215.161	40%	13%	Bappeda
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	laporan	2	Rp 2.097.898.000	771.569.000	0	20.385.820	1	67.386.436	0	111.435.784	1	238.851.000	2	438.157.039	100	56,79	4	1.051.404.398	40%	52%	Bappeda
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	2	Rp 265.425.000	233.170.400	0	35.881.790	1	31.324.621	0	81.815.221	0	50.475.532	2	199.537.154	100	85,60	4	407.332.866	40%	16%	Bappeda
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	perangkat Daerah	17	Rp 111.891.500	113.714.500	0	0	0	17.891.500	10	26.462.500		41.030.500	17	85.478.500	100	83,96	34	190.733.150	30%	24%	Bappeda
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/renja Bidang kewilayah yang dilaksanakan	perangkat Daerah	5	Rp 174.780.800	176.328.800	0	0	0	23.373.861	5	10.200.000		87.561.603	5	124.715.464	100	70,73	10	244.217.319	40%	19%	Bappeda
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	2	Rp 1.681.469.000	515.328.000	0	9.065.860	0	2.925.000	0	136.144.465		220.920.860	2	369.056.185	100	11,61	4	1.253.100.655	40%	45%	Bappeda
															Rata-rata capaian	83	79,84	0	10.384.851.849	477	27%	Bappeda
															Predikat kinerja	Tinggi	Tinggi	0	0	Sangat	Sangat	Bappeda
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				Rp 36.616.969.524	36.585.518.505		Rp 2.510.309.311,00		8.615.719.431		7.222.333.666		10.420.196.547		28.768.478.955		78,62					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																92	79,52					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Tinggi	Tinggi					

Berdasarkan evaluasi Rencana kerja di tahun 2023, pada tahun berikutnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) akan melakukan perbaikan dalam perencanaan anggaran, mengoptimalkan target-target kegiatan yang belum tercapai, serta proses perbaikan administrasi pencairan anggaran secara optimal dan berkesinambungan.

2.1.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Dan Pencapaian Renstra Bappeda Tahun Berjalan

Pada tahun 2024 untuk hasil capaian Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I BAPPEDA Kota Makassar diuraikan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

   Indikator kinerja program yang diimplementasikan dengan target kinerja 100% dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp.24.425.851.700,- (Dua Puluh Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah). Pencapaian target kinerja Program didukung oleh 7 kegiatan yaitu :

   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Faktor Pendukung:

   - Adanya kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang telah direncanakan setiap bulan/ Triwulan. Sehingga pada akhir periode akan terserap anggaran secara optimal sesuai dengan jumlah anggaran tahunan yang telah tersedia.
   - Adanya Dukungan Sarana dan Prasarana yang memadai.

   Faktor Penghambat :

   - Masih dalam proses tahapan administrasi persuratan dan penyusunan SK,KAK, dan administrasi lainnya.
   - Untuk menentukan penyedia/pihak ketiga membutuhkan waktu verifikasi yang lebih lama.
   - Keterbatasan SPD pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pemakaian anggaran masih sebatas pemenuhan gaji dan tunjangan ASN
- Pelaksanaan program,kegiatan dan sub kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Tindak Lanjut

- Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang pada lingkup Bappeda Kota Makassar
- Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan target yang belum tercapai di Triwulan I
- Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait perihal keterbatasan SPD yang belu tersedia
- Setiap pengelola kegiatan harus mengacu pada KAK dan anggaran kas yang telah disusun, sekaligus mensosialisasikan kepada seluruh tim pelaksana kegiatan
- Untuk mendukung kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan,pengelola kegiatan sebaiknya dapat menyampaikan berkas laporan administrasi penatausahaan keuangan secara disiplin(Lengkap, akurat dan tepat waktu).

2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Indikator kinerja program yang diimplementasikan dengan target kinerja 100% dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp. 4.830.466.400- (Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) Pencapaian target kinerja Program didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Faktor Pendukung:

- Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan aliran kas yang sudah ada
- Ketersediaan anggaran yang memadai dan adanya program rutin yang terlaksana setiap bulannya

Faktor Penghambat :

- Adanya keterlambatan pencairan anggaran dikarenakan administasi (SK) yang masih berproses di Bagian Hukum untuk dilakukan verifikasi.

Tindak Lanjut

- Mengoptimalkan koordinasi ke Bagian Hukum untuk segera dilakukan percepatan penyelesaian berkas administrasi pendukung kegiatan.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator kinerja program yang diimplementasikan dengan target kinerja 100% dan didukung alokasi anggaran sebesar Rp. 9.749.925.400,- (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah). Pencapaian target kinerja Program didukung oleh 3 kegiatan yaitu :

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Faktor Pendukung:

- Adanya Dukungan Sarana dan Prasarana yang memadai
- Adanya kerjasama dan Koordinasi dengan tim Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum

Faktor Penghambat :

- Adanya keterlambatan pencairan anggaran pelaksanaan dikarenakan administrasi (SK) pelaksanaan kegiatan yang masih berproses di Bagian Hukum untuk dilakukan verifikasi.

Tindak Lanjut :

- Mengoptimalkan koordinasi ke Bagian Hukum untuk segera dilakukan percepatan penyelesaian berkas administrasi pendukung kegiatan.

2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Faktor Pendukung:

- Keberadaan SDM dalam tim yang solid dan kompak serta dukungan sarana prasarana yang memadai.
- Telah mengikuti Timeline yang ditetapkan dan dilaksanakan lebih awal serta di update jika ada perubahan.
- Pelaksanaan Tupoksi sebagai Koordinator Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian pada Mitra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan SDA.
- Melaksanakan Updating terhadap Capaian Indikator Ekonomi Makro dimana hal tersebut berkontribusi langsung dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah.

Faktor Penghambat :

- Adanya keterlambatan pencairan anggaran pelaksanaan dikarenakan administrasi (SK) pelaksanaan kegiatan yang masih berproses di Bagian Hukum untuk dilakukan verifikasi.

Tindak Lanjut :

- Mengoptimalkan koordinasi ke Bagian Hukum untuk segera dilakukan percepatan penyelesaian berkas administrasi pendukung kegiatan.
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Faktor Pendukung:

- Koordinasi yang optimal dengan SKPD mitra bidang
- Adanya dukungan dari Tim Ahli
- Sarana dan Prasarana yang memadai

Faktor Penghambat :

- Timeline Waktu yang disediakan sangat terbatas dengan jumlah perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang berjumlah 22 Perangkat Daerah.
- Keterlambatan administrasi kegiatan akibat keterlambatan administrasi (SK) pelaksanaan kegiatan yang masih berproses pada bagian hukum untuk dilakukan verifikasi.
- Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Tindak Lanjut :

- Mengoptimalkan waktu pelaksanaan sesuai dengan timeline penyusunan dokumen perencanaan yang telah disusun.
- Mengoptimalkan koordinasi ke Bagian Hukum untuk segera dilakukan percepatan penyelesaian berkas administrasi pendukung kegiatan.
- Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang terlaksana pada triwulan berikutnya.

Dari Ketiga program tersebut terdiri atas beberapa kegiatan dan sub kegiatan, selengkapnya realisasi kinerja Outcome dan output pada BAPPEDA Kota Makassar dapat dilihat pada Tabel **T.C-29** berikut ini:



TABELT-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) dan Pencapaian Renstra

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6*100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)*100
5	**1**	**1**		**Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	90	**90,00**	**270,00**	**6750**
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	100	**100,00**	**300,00**	**7500**
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	90	**90,00**	**270,00**	**6750**







				Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100,00**	**100,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300,00**	7500
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	3	3	3	100	3	9,00	225
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	1	1	1	100	1	3,00	75
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	1	1	1	100	1	3,00	75
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	1	1	1	100	1	3,00	75
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	1	1	1	100	1	3,00	75
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	0	1	1	100	1	2,00	50
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	2	3	3	100	2	7,00	175



				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100,00**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**300,00**	7500
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76	55	68	68	100,00	68	191,00	4775
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15	18	15	15	100,00	12	45,00	1125
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	12	12	12	100,00	12	36,00	900
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10	2	2	2	100,00	1	5,00	125
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	1	1	100,00	1	3,00	75
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10	2	2	2	100,00	2	6,00	150
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	12	12	12	100,00	12	36,00	900

				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	2	2	2	100,00	2	6,00	150
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya layanan Admininstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100,00**	**90**	**100**	**90**	**90,00**	**90**	**270,00**	6750
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1075	110	106	91	86,00	100	301,00	7525
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	365	38	60	60	100,00	70	168,00	4200
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya layanan Admininstrasi Umum Perangkat Daerah**	**90,00**	**90**	**90**	**80**	**90,00**	**90**	**260,00**	6500
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100,00	1	3,00	75
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100,00	3	5,00	125
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	3	2	2	100,00	6	11,00	275
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	2	4	4	100,00	2	8,00	200
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	1	1	1	100,00	2	4,00	100
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	12	15	12	12	100,00	12	39,00	975



				Perundang-undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan							
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	565	1	1	100,00	2	568,00	14200
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	417	1	1	100,00	2	420,00	10500
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18	0	3600	3600	100,00	4	3604,00	90100
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	1	100,00	4	6,00	150
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90,00**	**90**	**90**	**80**	**90**	**90**	**260,00**	6500
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	10	3	3	100,00	45	58,00	1450
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	2	1	1	100,00	21	24,00	600
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90,00**	**90**	**90**	**88**	**89**	90	238,00	6700
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	123	6	25	9	36,00	12	27,00	675





				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	1	1	100,00	4	6,00	150
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	233	48	48	44	92,00	8	100,00	2500
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90,00**	**90**	**90**	**70**	**78,00**	**90**	**250,00**	6250
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	1	100,00	1	3,00	75
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55	29	55	41	75,00	65	135,00	3375
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	5	3	3	100.00	271	279,00	6975
				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5	0	1	1	100,00	5	6,00	150
5	**1**	**2**		**Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD**	**100**	**100**	**100**	**100**	99,67	100	300.00	7483
					Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah	**ADA**	**ADA**	**ADA**	**ADA**	**ADA**	ADA	**ADA**	**ADA**

				Pembangunan Daerah	**Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada**						
					Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	**ADA**	**ADA**	**ADA**	**ADA**	**ADA**	ADA	**ADA**	**ADA**
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Tersusunnya Perencanaan dan Pendanaan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300,00**	7500
				Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	10	1	51	51	100,00	1	53,00	1325
				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	25	1	1	1	100,00	1	3,00	75
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	1	1	1	100,00	1	3,00	75
				Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5	1	1	1	100,00	1	3,00	75
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5	1	1	1	100,00	1	3,00	75
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang	13	2	2	2		4	8,00	200



				Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)					100,00			
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Tersusunnya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	100	300,00	7500
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	10	2	2	2	100,00	2	6,00	150
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	51	51	51	51	100,00	51	153,00	3825
				Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Terlaksananya Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**300,00**	7500
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	10	2	2	2	100,00	1	5,00	125





				Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	20	3	4	4	100,00	4	11,00	275
5	**1**	**3**		**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	**100**	**100**	**100**	**100**	100,00	100	300,00	7500
					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	**100**	**100**	**100**	**100**	100,00	100	300,00	7500
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100**	**75**	**100**	**100**	**100**	**100**	**275,00**	6875
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	10	2	2	2	100,00	2	6,00	150
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat daerah	7	4	7	7	100,00	6	17,00	450

				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	25	4	5	5	100,00	6	15,00	400
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	10	2	2	2	100,00	2	6,00	150
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	10	2	2	2	100,00	2	6,00	150
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	7	10	7	7	100,00	7	21,00	475

				Pembangunan Manusia								
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Resntra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	25	4	5	5	100,00	7	16,00	275
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	10	2	2	2	100,00	2	6,00	150
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**100**	**100**	**100**	**96**	**100**	**100**	**300.00**	7400
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	10	2	2	2	100,00	2	6,00	150

				Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)							
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalm Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	3	5	3	3	100,00	7	15,00	375
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	25	5	5	5	100,00	7	17,00	425
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	10	2	2	2	100,00	2	6,00	150
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	10	2	2	2	100,00	2	6,00	150

				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	2	4	4	100,00	2	8,00	200
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	25	5	5	5	100,00	2	12,00	300
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	10	2	2	2	100,00	2	6,00	150
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300.00**	7500
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	10	2	2	2	100,00	2	6,00	150

				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	11	5	6	6	100,00	6	17,00	425
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra/renja Bidang Infrastruktur	25	5	5	5	100,00	6	16,00	400
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	10	2	2	2	100,00	2	6,00	150
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10	2	2	2	100,00	2	6,00	150
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	11	17	17	17	100,00	17	51,00	1275

				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan								
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/renja Bidang kewilayah yang dilaksanakan	25	5	5	5	100,00	17	27,00	675
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	10	2	2	2	100,00	2	6,00	150

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Makassar

Analisis kinerja pelayanan Bappeda Kota Makassar berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda Kota Makassar dengan kinerja dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Bappeda Kota Makassar sesuai dengan tugas dan fungsi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, berkedudukan di bawah Wali Kota. Untuk melaksanakan tugas pokok fungsi sesuai dengan urusan dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menetapkan Indikator Kinerja sasaran sebagai tolok ukur yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok fungsi. Indikator sasaran ini dirumuskan berdasarkan:

1) Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2021 – 2026;
2) Analisis terhadap Indikator Kinerja dalam NSPK;
3) Analisis terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017;
4) Mengacu pada Indikator Kinerja Sasaran (dampak/impact) Permendagri Nomor 86 tahun 2017;
5) Isu strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi;
6) Evaluasi pelaksanaan Renstra/Renja tahun sebelumnya.

Secara lengkap pencapaian kinerja BAPPEDA Kota Makassar. Berikut adalah indikator kinerja sesuai urusan berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NO	Indikator Kinerja Utama	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2.	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3.	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4.	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5.	Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	
6.	Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA

RKPD Kota Makassar Tahun 2025 merupakan tahun keempat untuk pelaksanaan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026. Dalam pencapaian keberhasilan pembangunan dan menghadapi tantangan pelaksanaan pembangunan Kota Makassar Tahun 2025, maka diperlukan keselarasan, sinkronisasi dan harmonisasi Pembangunan antara program Pemerintah Pusat dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan" dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memuat tema "Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing". Berdasarkan kedua tema tersebut diatas, maka tema RKPD tahun 2025 Pemerintah Kota Makassar dalam menyusun RKPD Kota Makassar Tahun 2025 mengusung tema :"Percepatan Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Berdasarkan tema RKP, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RKPD Kota Makassar tahun 2025 terdapat beberapa isu yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan Program dan Kegiatan Bappeda tahun 2025 yaitu fokus pembangunan seperti Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing; Penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang *Sombere'* dan *Smart*; Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; Penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dan peningkatan peluang kerja dan peluang bisnis baru; Percepatan pembangunan infrastruktur kota dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan memperhatikan ketiga tema Rencana Kerja tersebut dapat disimpulkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Pambangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 sebagai acuan dalam penyusunan visi, misi dan program prioritas calon Kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada Tahun 2024;
2. Pengarusutamaan pendekatan tematik holistik integratif dan spasial (THIS) dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah
3. Peningkatan kompetensi dan aparatur perencana Pembangunan baik yang ada di Bappeda maupun yang ada di SKPD.

4. Ketersediaan data dan informasi yang *update* dan akurat berbasis jaringan (*web based*).
5. Mengoptimalkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah yang membutuhkan Keterlibatan multisektor.
7. Sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis elektronik (*e-planning dan e-monev*) secara komprehensif.
8. Peningkatan pelayanan publik dibidang Perencanaan dalam rangka good governance;
9. Kualitas Monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh proses perencanaan dan hasil pelaksanaan perencanaan. Hasil pengendalian dan evaluasi hasil perencanaanya digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan tahun berikutnya;
10. Memaksimalkan dan mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa dibelanjakan untuk produk buatan dalam negeri (TKDN).

Dalam penyelenggaraan organisasi, salah satu tantangan yang dihadapi BAPPEDA yaitu belum adanya aplikasi yang dikelola secara internal dalam mendukung pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 ditetapkan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024 dan capaian kinerja dalam RPJMD Kota Makassar 2021-2026. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD. Berdasarkan review terhadap rancangan awal RKPD Kota Makassar dengan hasil analisis kebutuhan program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dirumuskan program kegiatan sebagaiman dalam tabel T-C.31 berikut;

Tabel T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

BAPPEDA Kota Makassar

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN				39.635.174.000					39.967.500.000	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Makassar	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	23.426.297.033	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Makassar	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	24.627.795.658	Adanya), penambahan beban gaji, TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), Adanya kenaikan pada SSH, SBU
		Makassar	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Bappeda Kota Makassar	100%			Makassar	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Bappeda Kota Makassar	100%		
		Makassar	Persentase ASN Bappede Kota Makassaryang mendapat peningkatan kapasitas	90%			Makassar	Persentase ASN Bappeda Kota Makassaryang mendapat peningkatan kapasitas	90%		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	216.534.100	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Makassar	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	170.416.200	Penyesuaian dan rasionalisasi Anggaran Sesuai dukungan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
						Perangkat Daerah					pelaksanaan kegiatan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah dokumen perencanaan Bappeda Kota Makassar	4 Dokumen	85.075.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah dokumen perencanaan Bappeda Kota Makassar	3 Dokumen	94.247.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	29.715.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.478.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	19.756.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.979.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	19.962.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	11.098.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	18.982.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.065.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	8.492.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	5.844.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	36.550.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	14.707.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Makassar	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	**100%**	12.314.236.373	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Makassar	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	**100%**	14.210.754.896	Adanya), penambahan beban gaji, TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai).
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 ASN	11.408.626.013	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang	13.376.757.296	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	348.480.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	314.400.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	249.102.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	239.908.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	4.080.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	3.797.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	5.050.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.611.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			Akhir Tahun SKPD								
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	5.394.500	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	5.184.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	288.009.360	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	281.520.600	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Makassar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Laporan	5.294.500	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Makassar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4.597.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Makassar	**Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**90%**	1.079.382.000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Makassar	**Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**90%**	990.000.000	Penyesuaian dan rasionalisasi Anggaran Sosial dukungan pelaksanaan kegiatan
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	111 Paket	128.682.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	952.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	990.000.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Makassar	Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	5.493.686.560	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Makassar	Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	4.701.780.360	Penyesuaian dan rasionalisasi Anggaran Sesuai dukungan pelaksanaan kegiatan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.150.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.173.980	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	148.037.750	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	121.856.280	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Makassar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	215.185.640	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Makassar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	170.822.400	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	180.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	93.139.700	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	267.513.150	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	177.708.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.600.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.702.280.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	207.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	136.000.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 TLaporan	1.989.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.368.160.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3600 Dokumen	589.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	442.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1Dokumen	485.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4Dokumen	483.520.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	**Tersedianya layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	80%	875.942.000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Makassar	**Tersedianya layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	80%	1.204.639.000	Pemenuhan kebutuhan dan Peremajaan sarana dan prasarana (meubeler dan peringkat computer) guna pencapaian target-target kinerja secara efisiensi dan produktiv
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Unit Kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	-	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Unit Kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	-	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	842.400.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	1.028.533.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	34.542.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	178.106.000	Pemenuhan kebutuhan dan Peremajaan sarana dan prasarana (meubeler dan peringkat computer) guna pencapaian target-target kinerja secara efisiensi dan produktiv

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	**Tersedianya layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90%**	2.124.000.000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Makassar	**Tersedianya layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90%**	2.054.395.200	Penyesuaian dan rasionalisasi Anggaran Sesuai dukungan pelaksanaan kegiatan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 Laporan	138.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	131.735.200	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	570.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	512.160.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	1.416.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	1.410.500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	**Tersedianya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90%**	1.319.316.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Makassar	**Tersedianya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90%**	1.295.830.000	Penyesuaian dan rasionalisasi Anggaran Sesuai dukungan pelaksanaan kegiatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	84.336.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	85.360.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	843.360.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	790.800.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	141.620.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	289 Unit	158.850.000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	290.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	300.000.000	
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Makassar	Ketersediaan dokumen rencana pembangunan jangka menegah daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan perda	Ada	5.976.982.190	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Makassar	Penyaberan Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100%	4.939.838.744	
		Makassar	Ketersediaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada			Makassar	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada		
		Makassar	Penyaberan konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%			Makassar	Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	Ada		
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Makassar	**Tersusunnya Perencanaan dan Pendanaan**	100%	3.767.092.423	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Makassar	**Tersusunnya Perencanaan dan Pendanaan**	100%	3.672.431.744	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	51 Dokumen	340.160.747	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	0	0	Pelaksanaan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah digabungkan melalui sub kegatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
											Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Makassar	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	5 Dokumen	457.200.920	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Makassar	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	0	0	Pelaksanaan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya digabungkan melalui sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Makassar	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	246.470.013	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Makassar	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	229.693.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Makassar	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	366.428.013	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Makassar	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	233.514.024	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1.045.561.002	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	964.472.400	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD /RKPD)	2 Dokumen	1.311.271.728	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD /RKPD)	3 Dokumen	2.244.752.320	Adanya Penyesuaian Penambahan Narasumber/Tim Ahli Penyusunan Ranperda Terhadap Dokumen RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Makassar	**Tersusunnya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	100%	865.443.026	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Makassar	**Tersusunnya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	100%	484.731.000	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	997.698.013	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Makassar	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	131.663.000	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Makassar	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	51 Orang	468.745.013	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Makassar	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	51 Orang	353.068.000	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Makassar	**Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	100%	1.343.446.741	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Makassar	**Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	100%	782.676.000	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	1.054.252.726	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	199.697.000	Penyesuaian dan rsionalisasi Anggaran Sesuai dukungan pelaksanaan kegiatan
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	269.194.013	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	582.779.000	
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN DAERAH	Makassar	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RENSTRA SKPD	100%	**10.231.894.777**	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN DAERAH	Makassar	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RENSTRA PERANGKAT DAERAH	100%	10.359.665.800	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
		Makassar	Penyabaran konsistensi program RKPD kedalam RENJA SKPD	100%			Makassar	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam RENJA PERANGKAT DAERAH			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Makassar	**Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	100%	5.761.305.690	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Makassar	**Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	100%	2.973.289.200	Penyesuaian dan rasionalisasi Anggaran Sesuai dukungan pelaksanaan kegaiatn
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	515.240.011	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	477.134.500	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Pemerintahan	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7 Perangkat Daerah	124.753.745	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Pemerintahan	Makassar	Jumlah Bappeda Kota Makassaryang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat daerah	8 Laporan	115.773.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Pemerintahan	Makassar	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan	304.428.411	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Pemerintahan	Makassar	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Pemerintahan	9 Laporan	211.142.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Makassar	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	2 Laporan	811.360.011	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	507.255.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			Pemerintahan								
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	515.578.011	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir	2 Dokumen	472.724.800	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Pembangunan Manusia	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	101.786.079	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Pembangunan Manusia	Makassar	Jumlah Bappeda Kota Makassaryang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	107.176.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Pembangunan Manusia	Makassar	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	399.584.011	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Pembangunan Manusia	Makassar	Jumlah Bappeda Kota Makassaryang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	213.707.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Makassar	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	886.579.411	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	768.387.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Makassar	**Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA**	100%	3.552.700.087	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan**	Makassar	**Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA**	100%	4.501.054.200	Penyesuaian dan rasionalisasi Anggaran Sesuai dukungan

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			(Sumber Daya Alam)			SDA (Sumber Daya Alam)		(Sumber Daya Alam)			pelaksanaan kegiatan
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	559.554.611	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Makassar	Jumlah Bappeda Kota Makassaryang mendapatkan Asistensi dalm Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	2 Dokumen	784.111.000	Penyesuaian Anggaran Sesuai Kebutuhan dan Adanya penyesuaian anggaran belanja pada SSH dan SBU
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Perekonomian	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	99.619.844	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Perekonomian	Makassar	Jumlah Bappeda Kota Makassar yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	7 Laporan	85.094.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Perekonomian	Makassar	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	259.073.511	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Perekonomian	Makasssar	Jumlah Bappeda Kota Makassaryang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	7 Laporan	205.384.000	
	Koordinasi Peleksansan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Makassar	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	874.248.411	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	2.539.808.000	Penyesuaian Anggaran Sesuai Kebutuhan dan Adanya penyesuaian anggaran belanja pada SSH dan SBU
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	428.708.611	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang	2 Dokumen	391.741.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang SDA	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	99.146.177	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang SDA	Makassar	Jumlah Bappeda Kota Makassaryang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2 Laporan	84.033.200	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang SDA	Makassar	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	259.232.611	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang SDA	Makassar	Jumlah Bappeda Kota Makassaryang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2 Laporan	154.616.400	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	1.173.016.411	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	276.266.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Makassar	**Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100%**	2.917.889.000	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Makassar	**Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100%**	2.925.512.200	Penyesuaian dan rasionalisasi Anggaran Sesuai dukungan pelaksanaan kegiatan
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	317.395.500	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	328.652.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Infrastruktur	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	11 Laporan	169.675.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Infrastruktur	Makassar	Jumlah Bappeda Kota Makassaryang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Laporan	105.255.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Infrastruktur	Makassar	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	104.068.500	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Infrastruktur	Makassar	Jumlah Bappeda Kota Makassaryang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Laporan	161.043.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	794.464.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	706.277.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	238.354.500	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	328.762.600	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	171.532.500	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Kewilayahan	Makassar	Jumlah Bappeda Kota Makassaryang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	17 Laporan	106.454.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan	Makassar	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Dokumen	176.246.500	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Beppeda Kota MakassarBidang Kewilayahan	Makassar	Jumlah Beppeda Kota Makassaryang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	7 Laporan	274.875.000	Penyesuaian Anggaran Sesuai Kebutuhan dan Adanya penyesuaian anggaran belanja pada SSH dan SBU
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	843.132.500	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	893.293.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sampai saat ini, usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat dan pemangku kepentingan berasal dari hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai tingkat kota yang ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar melalui sistem https://sipd-ri.kemendagri.go.id/ untuk Tahun 2025 tidak ada usulan.

TC.32
KAJIAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT
TAHUN 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-	-	-	-	-	Tidak ada program/kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan masyarakat dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar .

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada Tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengangkat tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 (Tiga) Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan nasional sebagai berikut :

1. SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan Produktivitas.
3. Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan, Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas; Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk ramah lingkungan.

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Bappeda Kota Makassar sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Makassar agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu "Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah;
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata;
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Prioritas pembangunan daerah Kota Makassar Tahun 2025 menggambarkan fokus penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD. Secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional. Perumusan prioritas dan sasaran prioritas pembangunan daerah Kota Makassar mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan tema pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, maka tema pembangunan daerah Kota Makassar Tahun 2025 yaitu **"Percepatan Pembangunan Yang Inklusif dan Berkelanjutan"** yang kemudian dijabarkan melalui prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang *Sombere'* dan *Smart*;
3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. Penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dan peningkatan peluang kerja dan peluang bisnis baru;
5. Percepatan pembangunan infrastruktur kota dan pengelolaan lingkungan hidup.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Kota Makassar

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA Kota Makassar. Perumusan tujuan menjabarkan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi BAPPEDA Kota Makassar. Lebih dari itu, perumusan tujuan juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehingga tujuan dan sasaran Bappeda Kota Makassar seperti yang terdapat dalam Tabel 3.1.

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
TUJUAN : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%
SASARAN : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Makro	100%
	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100%
	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	100%
SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daera	Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah	100%
	Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Bappeda Kota Makassar yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari Renstra Bappeda Makassar Tahun 2021 – 2026, dimana merupakan serangkaian langkah penjabaran dari kebijakan dan strategi yang akan dilakukan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Bappeda.

Rencana program dan kegiatan Bappeda ini juga merupakan bagian dari program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam rangka untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Makassar yaitu **"Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang *'Sombere' dan Smart City'* dengan Imunitas Kota yang Kuat Untuk Semua"**.

Bappeda sebagai penyelenggara Urusan Pemerintahan fungsi penunjang perencanaan, mengemban amanah untuk mendukung pencapaian Misi ke-1 (satu), yaitu **"Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Percepatan Reformasi Birokrasi menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia, Bersih dari Indikasi Korupsi"**. Disamping itu, Bappeda juga berkewajiban mengawal program pembangunan daerah secara umum dalam rangka pencapaian keseluruhan Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Walikota. Berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur baru sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2022, mengalami perubahan/pemutakhiran, terakhir dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, tanggal 23 Juni 2023 maka dapat dipetakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

a. **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri atas 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PERANGKAT DAERAH;
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- PERANGKAT DAERAH;
- Koordinasi dan Penyusunan DPA- PERANGKAT DAERAH;
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- PERANGKAT DAERAH;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. **Administrasi Keuangan, terdiri atas 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu :**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PERANGKAT DAERAH;
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi PERANGKAT DAERAH;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PERANGKAT DAERAH;
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PERANGKAT DAERAH;
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

c. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :**

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

d. **Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri atas 10 (sepuluh) sub kegiatan, yaitu :**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PERANGKAT DAERAH;
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada PERANGKAT DAERAH;
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PERANGKAT DAERAH.

e. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri atas 2 (Dua) sub kegiatan, yaitu :**

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

f. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud.

2. **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

a. **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, terdiri atas 6 (enam) sub kegiatan, yaitu :**

- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah;
- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya;

- Pelaksanaan Konsultasi Publik;
- Koordinasi Pelaksanaan Forum PERANGKAT DAERAH/Lintas PERANGKAT DAERAH;
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota;
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

b. **Analis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan pembangunan daerah, terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :**

- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan perangkat daerah.

c. **Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan pembangunan daerah, terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :**

- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota;
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

3. **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

a. **Koordinasi Perencanaan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu :**

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Pemerintahan;
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Pemerintahan;
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Pembangunan Manusia;
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Pembangunan Manusia;
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri atas 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian;
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Perekonomian;
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Perekonomian;
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota Makassar Bidang SDA;
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang SDA;
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri atas 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Infrastruktur;
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota Makassar Bidang

Infrastruktur;

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur;
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota MakassarBidang Kewilayahan;
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota Makassar Bidang Kewilayahan;
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

Untuk lokasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut adalah dalam lingkup internal Bappeda dan mencakup fasilitasi dengan kelompok sasaran seluruh Bappeda Kota Makassar di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, instansi vertikal terkait dan masyarakat di Kota Makassar.

Berikut ini pada Tabel 3.2 diuraikan indikator dan target kinerja rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappeda Kota Makassar pada Tahun 2025 serta prakiraan maju Tahun 2026 sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, tanggal 23 Juni 2023 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kota Makassar Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Bappeda Kota Makassar

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								39.967.500.000					43.282.318.000
5	01				PERENCANAAN								39.967.500.000					43.282.318.000
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								24.627.795.656					25.171.540.963
5	01	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								170.416.200					811.043.562
5	01	01	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mencapat peningkatan kapasitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	3 Dokumen	100 %	94.247.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	500.000.000

	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	90 %	1 Dokumen	100 %	20.478.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	78.000.000
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	

	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	1 Dokumen	100 %	11.979.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	30.250.000
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	

5	01	01	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	1 Dokumen	100 %	11.098.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	35.420.330
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	1 Dokumen	100 %	12.065.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	33.463.232



	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	1 Laporan	100 %	5.844.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	13.310.000
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	





	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	90 %	3 Laporan	100 %	14.707.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	123.800.000
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								14.210.754.896					13.623.000.000

5	01	01	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	68 Orang/bulan	100 %	13.376.757.296	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	13.000.000.000
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	12 Dokumen	100 %	314.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	400.000.000

	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	90 %	12 Dokumen	100 %	239.908.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	350.000.000
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	

5	01	01	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	1 Dokumen	100 %	3.797.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentsse ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	15.000.000
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitss	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	1 Laporan	100 %	4.811.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	15.000.000

	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	2 Dokumen	100 %	5.184.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	15.000.000
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	

5	01	01	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	12 Laporan	100 %	261.520.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	18.000.000
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	2 Dokumen	100 %	4.597.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	10.000.000

	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								990.000.000					1.016.497.401
5	01	01	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	90 %	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	71.070.000
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	



	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	80 Orang	90 %	990.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	945.427.401
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								4.701.760.350					4.305.000.000





5	01	01	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	1 Paket	90 %	7 173 980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	25 030 000
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	3 Paket	90 %	121 956 280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	250 300 000

	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	3 Paket	90 %	170.822.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	250.000.000
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	

5	01	01	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	90 %	7 Paket	90 %	93.139.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	400.000.000
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	90 %	2 Paket	90 %	177.708.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	350.000.000
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	

	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	12 Dokumen	90 %	1.702.280.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	350.000.000
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	2 Laporan	90 %	135.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	400.000.000



	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	4 Laporan	90 %	1.368.150.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	2.000.000.000
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	







5	01	01	2	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	4 Dokumen	90 %	442.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	30.000.000
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aperatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aperatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	4 Dokumen	90 %	483.520.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	260.000.000







	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								1.204.639.000					1.250.000.000
5	01	01	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru		0		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	0
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	





5	01	01	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	60 Unit	90 %	1.028.533.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	1.200.000.000
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	12 Unit	90 %	175.106.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	50.000.000
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	



	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								2.054.395.200					1.791.000.000
5	01	01	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	12 Lapor an	90 %	131.735.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	550.000.000
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	





5	01	01	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	2 Laporan	90 %	512.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	425.000.000
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	8 Laporan	90 %	1.410.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	816.000.000



	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam koncisi bak				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								1 295 830 000					2 175 000 000
5	01	01	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	1 Unit	90 %	46 380 000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	175 000 000
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	





	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	65 Unit	90 %	790.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Peringkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	1.500.000.000
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	

5	01	01	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	269 Unit	90 %	158.850.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	250.000.000
	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	01	2	II	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Tersedianya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	90 %	6 Unit	90 %	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	250.000.000

	01					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				100 %						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	
	01					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				90 %						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	
5	01	02			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**								4.939.838.744					7.102.227.000
5	01	02	2		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**								3.672.431.744					4.468.116.147
5	01	02	2	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Tersusunnya Perencanaan dan Pendanaan	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	0		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	398.963.290



	01					Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada				ADA						Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	ADA	
	01					Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda				ADA						Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	ADA	
5	01	02	2	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Tersusunnya Perencanaan dan Pendanaan	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	0		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	561.140.951
	01					Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada				ADA						Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	ADA	







	01					Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda				ADA						Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	ADA	
5	01	2	2	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Tersusunnya Perencanaan dan Pendanaan	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	100 %	1 Berita Acara	100 %	229.693.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	350.409.951
	01					Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada				ADA						Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	ADA	
	01					Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda				ADA						Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	ADA	



5	01	02	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan dan Pendanaan	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	1 Berita Acara	100 %	233.514.024	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	470.387.951
	01					Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada				ADA						Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	ADA	
	01					Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda				ADA						Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	ADA	
5	01	02	2	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Tersusunnya Perencanaan dan Pendanaan	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	1 Berita Acara	100 %	986.472.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	1.195.561.000



	01					Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada				ADA						Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	ADA	
	01					Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda				ADA						Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	ADA	
5	01	2	2	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Tersusunnya Perencanaan dan Pendanaan	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	3 Dokumen	100 %	2.244.752.320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	1.489.678.004
	01					Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada				ADA						Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	ADA	







	01					Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda				ADA						Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	ADA	
5	01	02	2		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								484.731.000					1.074.322.902
5	01	02	2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Tersusunnya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	2 Dokumen	100 %	131.663.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	501.837.951







	01					Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada				ADA						Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	ADA	
	01					Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda				ADA						Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	ADA	
5	01	02	2	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Tersusunnya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	51 Orang	100 %	353 066 000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	572 684 951
	01					Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada				ADA						Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	ADA	





	01					Tersedianya Dokumen Rencana Pembanguna n Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda				ADA							Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	ADA	
5	01	02	2		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								782.676.000						1.561.787.951
5	01	02	2	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Penjaberan Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembanguna n	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	1 Laporan	100 %	199.897.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjaberan Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	1.168.854.000
	01					Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada				ADA							Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	ADA	
	01					Tersedianya Dokumen Rencana Pembanguna n Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda				ADA							Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	ADA	

5	01	02	2	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Penyabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	4 Laporan	100 %	582.779.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penyabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100 %	393.133.951
	01					Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada				ADA						Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Diterapkan Dengan Perkada	ADA	
	01					Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda				ADA						Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	ADA	

5	01	03			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**								10.399.865.600					11.038.550.037
5	01	03	2		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**								2.973.298.200					4.026.630.070
5	01	03	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	2 Dokumen	100 %	477.134.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100 %	616.741.600
	01					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD				100 %						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100 %	
5	01	03	2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat daerah	Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	6 Laporan	100 %	115.773.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100 %	87.911.155

	01					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD				100 %						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100 %	
5	01	03	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	6 Laporan	100 %	211.142.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100 %	304.928.000
	01					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD				100 %						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100 %	

5	01	03	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	100 %	2 Laporan	100 %	807.255.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100 %	861.861.500
	01					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD				100 %						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100 %	
5	01	03	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100 %	2 Dokumen	100 %	472.724.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100 %	717.077.600
	01					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD				100 %						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100 %	



5	01	03	2	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	7 Laporan	100 %	107.176.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100 %	84.943.502
	01					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD				100 %						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100 %	
5	01	03	2	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	7 Laporan	100 %	213.707.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100 %	400.085.600





	01					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD				100 %						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100 %	
5	01	03	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	2 Laporan	100 %	768.387.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100 %	973.381.000
	01					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD				100 %						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100 %	
5	01	03	2		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**								4.501.054.200					3.696.601.502
5	01	03	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		100 %	2 Dokumen	100 %	784.111.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100 %	660.156.200



	01					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD				100 %						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100 %	
5	01	03	2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalm Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	100 %	7 Laporan	100 %	85.094.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100 %	62.777.266
	01					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD				100 %						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100 %	

5	01	03	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Penyaberan Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	100 %	7 Laporan	100 %	205.384.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100 %	258.575.100
	01					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD				100 %						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100 %	
5	01	03	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	100 %	2 Laporan	100 %	2.539.606.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100 %	669.527.037
	01					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD				100 %						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100 %	

5	01	03	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	2 Dokumen	100 %	391.741.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100 %	529.210.200
	01					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD				100 %						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100 %	
5	01	03	2	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	2 Laporan	100 %	64.053.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100 %	62.303.599
	01					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD				100 %						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100 %	

5	01	03	2	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	Jumlah Perangkat Daersh yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Penjaberan Konsistensi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	2 Laporan	100 %	154.618.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100 %	256.734.100
	01					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD				100 %						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100 %	
5	01	03	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	2 Laporan	100 %	276.266.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100 %	1.173.518.000
	01					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD				100 %						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100 %	



5	01	03	2		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**								2.926.512.200				3.285.116.465
5	01	03	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	2 Dokumen	100 %	328.652.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100 %	496.704.600
	01					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD				100 %						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100 %	
5	01	03	2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	6 Laporan	100 %	105.255.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100 %	134.725.166







	01					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD				100 %						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100 %	
5	01	03	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan Renstra/renja Bidang Infrastruktur	Penyaberan Konsistensi Perancanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	5 Laporan	100 %	181.943.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100 %	367.723.000
	01					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD				100 %						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100 %	





5	01	3	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Persentase Konsistensi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	2 Laporan	100 %	708.277.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100 %	502.797.500
	01					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD				100 %						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100 %	
5	01	03	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	2 Dokumen	100 %	326.762.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100 %	640.781.500

	01					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD				100 %						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100 %	
5	01	03	2	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	17 Laporan	100 %	106.454.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100 %	158.028.499
	01					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD				100 %						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100 %	
5	01	03	2	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/renja Bidang kewilayahDokumen Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat	Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	17 Laporan	100 %	274.875.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100 %	324.702.000



							Daerah Bidang Kewilayahan yang diaksanakan										
	01					Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD				100 %						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100 %	
5	01	03	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Penjabaran Konsistensi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	100 %	2 Laporan	100 %	893.293.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100 %	857.656.000
						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD				100 %						Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100 %	
TOTAL													**39.967.500.000**					**43.282.318**





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RPJMD Kota Makassar 2021 - 2026, Renstra Bappeda 2021 – 2026, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2025 merupakan faktor-faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana kerja dan kerangka pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan pelayanan Bappeda Kota Makassar Tahun 2025.

Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan, melaksanakan urusan perencanaan. Jumlah program yang akan dilaksanakan Bappeda pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya adalah sebanyak 3 (tiga) Program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Sedangkan jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan, dan total 70 (tujuh puluh) sub kegiatan, dengan dana bersumber dari APBD Kota Makassar dengan total pagu indikatif direncanakan sebesar Rp.39.967.500.000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Untuk lebih jelasnya, program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kota Makassar Tahun 2025

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**39.967.660.000,00**							**43.282.318.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**39.955.521.000,00**							**43.252.068.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**39.955.521.000,00**							**43.252.068.000,00**	
1	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah*** ***Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik*** ***Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas***				**100 %** **80 %** **90 %**	**24.815.816.656,00**							**25.141.290.963,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	358.437.200,00					Perangkat Daerah		280.193.962,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	94.247.200,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	20.476.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	11.098.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		31.426.330,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	12.065.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		33.883.732,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5.884.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		13.310.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.01.0001	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	11.207.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		123.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Administasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	14.210.254.496,00					Perangkat Daerah		13.823.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	13.376.757.296,00	Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		13.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	314.400.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penggajian/Verifikasi keuangan SKPD				12 Dokumen	239.908.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	3.797.800,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				11 Laporan	4.671.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	5.164.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	261.520.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desi Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						RELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.02.0018	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				7 Dokumen	4.697.500.00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		10.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				90 %	980.000.000.00					Perangkat Daerah		1.016.457.401.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan				3 Paket	0.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		71.070.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				80 Orang	980.000.000.00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		849.427.401.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				90 %	4.701.760.360.00					Perangkat Daerah		4.300.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.172.880.00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		25.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Pengadaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	121.556.280.00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		250.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	170.622.400.00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		250.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	81.139.100.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		400.000.000.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	177.708.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.102.280.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	135.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	1.368.160.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		2.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Pemutakhiran Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Pemutakhiran Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	442.906.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	483.520.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengawasan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				80 %	1.204.639.000,00					Perangkat Daerah		1.250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				60 Unit	1.078.533.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		1.200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dioptimalkan				10 Unit	1.90.108.000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terselenggaranya layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				90 %	2.654.495.250,00					Perangkat Daerah		1.391.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	131.725.250,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dioptimalkan				2 Laporan	512.160.000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		825.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dioptimalkan				8 Laporan	1.410.500.000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		816.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terselenggara layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				80 %	1.295.830.000,00					Perangkat Daerah		2.175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	95.360.000,00	Kota Makassar Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				65 Unit	760.600.000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		1.600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				289 Unit	154.850.000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				5 Unit	300.000.000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan dengan Perkada Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang Telah Ditetapkan dengan Perda Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD***	**ADA ADA ADA**			**Ada Ada Ada Ada 500 Person**	**4.939.838.744,00**						**ADA ADA ADA**	**7.102.227.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran	*Tersusunnya Perencanaan dan Penganggaran*	100 %			100 %	2.972.431.744,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	01 Peningkatan Tata Kelola yang Berinteraksi pemerintahan yang akuntabel dan inovatif PD 2 : Peningkatan kinerja pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang Sombere dan Smart	Perangkat Daerah	100 %	4.466.116.147,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Pemasalahan, Isu Isu Strategis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan /Isu RPJMD) Misi/ Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	0,00	Kota Makassar Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyalahgunaan	01 Peningkatan Tata Kelola yang Berinteraksi pemerintahan yang akuntabel dan inovatif PD 2 : Peningkatan kinerja pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang Sombere dan Smart	Perangkat Daerah		396.963.296,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				0 Dokumen	0.00	Kota Makassar Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengerakkan Reformasi Publik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01 Peningkatan Tata Kelola yang menggunakan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif PO 2 Penguatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang Sumberdaya dan Smart	Perangkat Daerah		307.140.551.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pemkanaan komunikasi Publik														
			Jumlah Benda Acara Komunikasi Publik				1 Benda Acara	229.893.000.00	Kota Makassar Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengerakkan Reformasi Publik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01 Peningkatan Tata Kelola yang menggunakan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif PO 2 Penguatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang Sumberdaya dan Smart	Perangkat Daerah		350.478.951.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Benda Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Benda Acara	233.514.014.00	Kota Makassar Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengerakkan Reformasi Publik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01 Peningkatan Tata Kelola yang menggunakan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif PO 2 Penguatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang Sumberdaya dan Smart	Perangkat Daerah		370.361.951.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pemkanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														

NO.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET (525	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	864.472.400,00	Kota Makassar Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menyelesaikan Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01 Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif PD 2 Pengawasan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang Sombere dan Smart	Perangkat Daerah		1.195.561.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan (RKP,PD,RPJMD,RKPD)				1 Dokumen	2.243.752.320,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Menyelesaikan Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01 Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif PD 2 Pengawasan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang Sombere dan Smart	Perangkat Daerah		1.489.673.004,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %			100 %	864.737.080,00			Menyelesaikan Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	01 Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif PD 2 Pengawasan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang Sombere dan Smart	Perangkat Daerah	100 %	1.074.322.902,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	131.463.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengerakkan Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memprioritaskan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pornografi	01.Peningkatan Tata Kelola yang menjaga asas pemerintahan yang akuntabel dan inovatif PD 2 ; Penguatan kinerja pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang Sumberdaya dan Smart	Perangkat Daerah		501.637.951,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	1.01.02.2.02.0002	Pemantauan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dilatih dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				51 Orang	353.068.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengerakkan Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memprioritaskan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pornografi	01.Peningkatan Tata Kelola yang menjaga asas pemerintahan yang akuntabel dan inovatif PD 2 ; Penguatan kinerja pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang Sumberdaya dan Smart	Perangkat Daerah		572.664.951,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	1.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %			100 %	782.616.000,00			Mengerakkan Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memprioritaskan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pornografi	01.Peningkatan Tata Kelola yang menjaga asas pemerintahan yang akuntabel dan inovatif PD 2 ; Penguatan kinerja pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang Sumberdaya dan Smart	Perangkat Daerah	100 %	1.561.187.951,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	1.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Pemrosesan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan				1 Laporan	150.697.000,00	Kota Makassar Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Meningkatkan Pelayanan dan Pemberantasan Korupsi, Terorisme, Judi dan Penyalahgunaan	01 Peningkatan Tata Kelola yang Menggambarkan pemerintahan yang akuntabel dan inklusif (PO 2) ; Penguatan kinerja pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik yang bersih dan Smart	Perangkat Daerah		1.168.654.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	582.179.000,00	Kota Makassar Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Meningkatkan Pelayanan dan Pemberantasan Korupsi, Terorisme, Judi dan Penyalahgunaan	01 Peningkatan Tata Kelola yang Menggambarkan pemerintahan yang akuntabel dan inklusif (PO 2) ; Penguatan kinerja pemerintah dan penyelenggara pelayanan publik yang bersih dan Smart	Perangkat Daerah		392.133.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Pengadaan Konsultansi Program RPJMD Kedalam Bentuk SKPD*** ***Pengadaan Konsultansi Program RKPD Kedalam Renja SKPD***	**100 %** **100 %**			**100 Persen** **100 Persen**	**10.299.866.600,00**						**100 %** **100 %**	**11.008.350.037,00**	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Pengadaan Konsultansi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	100 %			100 %	2.973.299.200,00					Perangkat Daerah	100 %	4.026.630.010,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	471.134.900,00	Kota Makassar Lapng Pasalang, Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		618.141.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				6 Laporan	115.273.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		87.911.168,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				6 Laporan	211.142.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		304.926.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Revisi/Renja dengan RKPD/RP/MD pada Bidang Pemerintahan				2 Laporan	501.215.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		861.861.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RP/PD, RP/MD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RP/PD, RP/MD dan RKPD)				2 Dokumen	472.129.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		117.077.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				7 Laporan	107.170.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		94.843.502,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				7 Laporan	213.707.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		400.085.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Revisi/Renja dengan RKPD/RP/MD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	768.997.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		913.081.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Prosentase Konsistensi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*	100 %			100 %	4.501.204.390,00					Perangkat Daerah	100 %	3.896.801.502,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RP/PD, RP/MD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	594.111.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		660.156.220,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				7 Laporan	61.094.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		62.777.286,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				7 Laporan	245.384.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		258.575.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Kerja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				2 Laporan	2.539.808.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		886.527.012,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	281.141.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		329.218.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				2 Laporan	64.033.240,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		82.853.599,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				2 Laporan	154.816.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		256.736.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana/Kerja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				2 Laporan	276.268.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		1.113.618.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Penyelarasan Konsistensi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %			100 %	3.825.512.200,00					Perangkat Daerah	100 %	3.286.116.465,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	228.632.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		498.704.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				6 Laporan	105.295.000,00	Kota Makassar Semua Kecamatan Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		138.725.168,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				6 Laporan	181.843.000,00	Kota Makassar Semua Kecamatan Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		361.723.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Sinkronisasi dengan RKPD/RPJMD yang Bidang Infrastruktur				2 Laporan	704.277.000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		502.791.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	326.162.600,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		640.781.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				17 Laporan	506.458.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		159.029.499,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				17 Laporan	274.875.000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		324.702.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan	861.293.000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah		657.656.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**11.979.000,00**							**30.250.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**11.979.000,00**							**30.250.000,00**	
1	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah*** ***Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik*** ***Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas***				**100 %** **90 %** **90 %**	**11.979.000,00**							**30.250.000,00**	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	11.979.000,00							30.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD				1 Dokumen	11.979.000,00	Kota Makassar Semua Kecamatan Semua Kel/Desa Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		JUMLAH						**39.967.500.000,00**							**43.282.318.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2025. Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja BAPPEDA Kota Makassar Tahun 2025 harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabilitas.

a. Catatan Penting

Ada beberapa catatan penting terdapat perbedaan kerangka pendanaan di Renstra dan Renja Bappeda Tahun 2025 yaitu:

1. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Indikatornya pada Renja Bappeda pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Makassar;
2. Penyusunan Renja Bappeda Kota Makassar Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Bappeda Kota Makassar Tahun 2021-2026 dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; sehingga dalam penyusunan Renja Tahun 2025 dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
3. Penyusunan Renja Bappeda Kota Makassar ini juga berpedoman pada RKPD Kota Makassar Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah pelaksanaan

Penyusunan pelaksanaan serta penetapan program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) tahun 2025 bertujuan untuk

meningkatkan perencanaan pembangunan yang menerapkan prinsip-prinsip efiesiensi, efektivitas, transparansi akuntabilitas dan partisipasi Pemerintah Kota Makassar mengacu kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renja Bappeda ini akan menjadi pedoman dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksnaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Makassar Tahun Anggaranb 2025;
2. Seluruh aparatur dilingkungan Bappeda Kota Makassar berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Bappeda Kota Makassar Tahun 2025 secara efektif dan efisien.
3. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan akan terjadinya perubahan berdasarkan hasil reviuw yang dilaksanakan oleh Inspektorat kota Makassar begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan akan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Makassar serta hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Renja BAPPEDA Kota Makassar dilaksanakan dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja BAPPEDA Kota Makassar mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan perencanaan tahun yang akan datang dimana fungsi BAPPEDA Kota Makassar sebagai perencana membutuhkan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

a. Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
b. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja Bappeda kota Makassar menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen renja ini dapat dilakukan perubahan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan dan aturan yang berlaku. Perubahan perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Bappeda Kota Makassar Tahun 2025;
c. Koordinasi yang intensif dengan SKPD dan stakeholder agar proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mencapai target yang diharapkan yang mana merupakan tanggungjawab penuh seluruh pegawai Bappeda Kota Makassar;

d. Dalam menetapkan dokumen Renja Bappeda disusun sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan melalui Peraturan Walikota Makassar.

Dengan disusunnya Renja Bappeda Kota Makassar Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini ini juga diharapkan menjadi panduan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai ukuran keberhasilan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Makassar Tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja BAPPEDA Kota Makassar Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi kita semua.

Makassar, 10 Juli 2024

KEPALA BAPPEDA
KOTA MAKASSAR

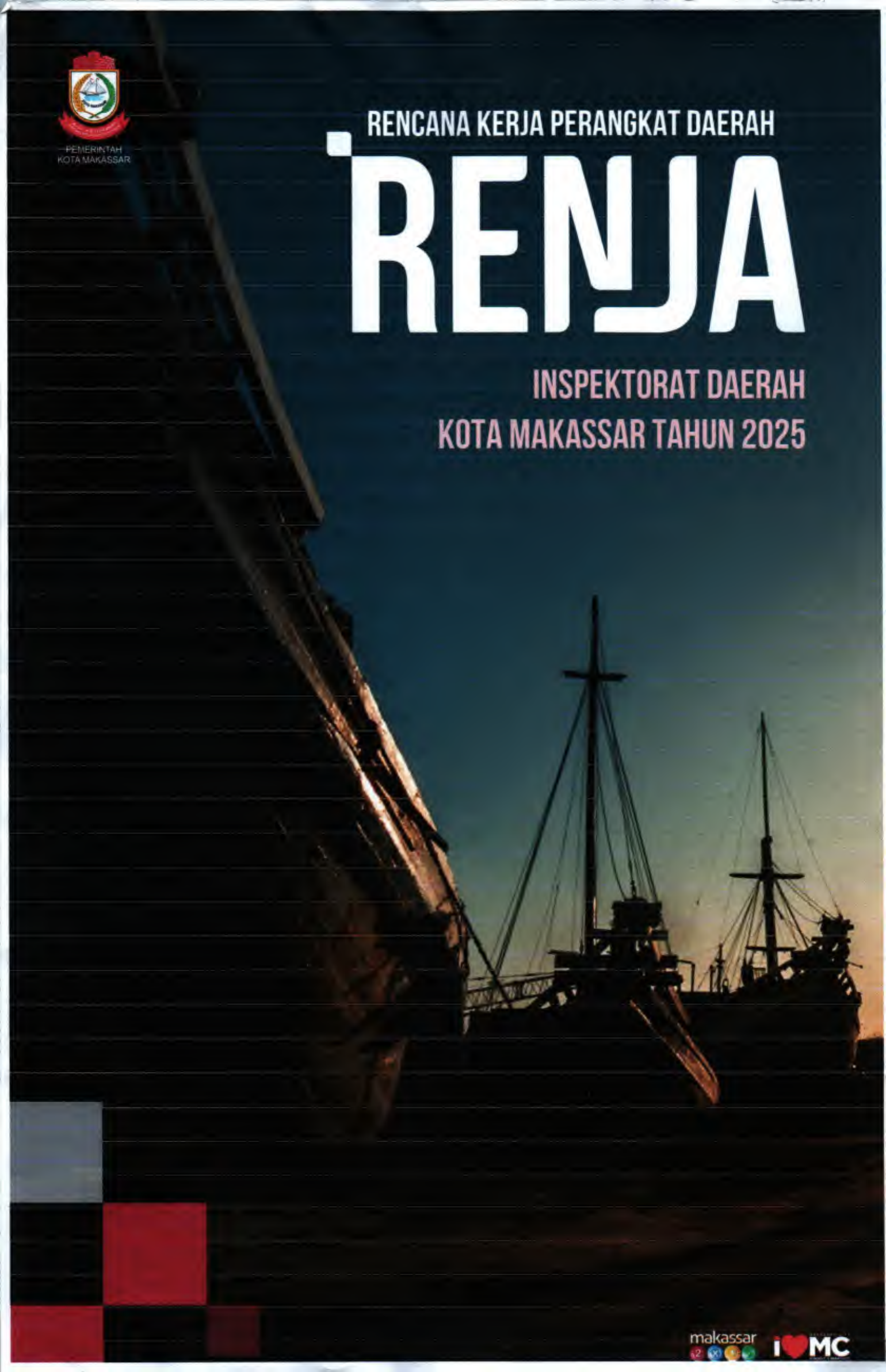
A.ZULKIFLY, S.STP,.M.Si
Pembina TK.I / IV.b
NIP. 19800630 199810 1 002

PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

RENJA

INSPEKTORAT DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2025



makassar

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 2252 / 188.4.45 / Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan NomoR 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terkahir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
22. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.
KESATU	:	Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana di maksud Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 08 Agustus 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan.:
1. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 merupakan rencana pengendalian dan evaluasi program pengawasan tahunan yang disusun untuk mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar. Selain dari pada itu Inspektorat Daerah Kota Makassar juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pengawasan penyelenggaran pemerintah di Kota Makassar, disamping itu peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Kami menyadari dokumen ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri dari 1) Pendahuluan; 2) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu; 3) Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; 4) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan; 5) Penutup.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dan semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Makassar, 8 Agustus 2024

INSPEKTUR,

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
INSPEKTORAT

A. ASMA ZULISTIA EKAYANTI, S.E, M.M., CGCAE
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19840203 200604 2 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR LAMPIRAN iv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II 7
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 7
2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 28
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD 30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 45
BAB III 46
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 46
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional 46
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 48
3.3 Program dan Kegiatan 49
BAB IV 58
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 58
BAB V 71
PENUTUP 71

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Target dan Realisasi Indikator Program Tahun 2023	7
Tabel 2.2	Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	9
Tabel 2.3	Realisasi Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan	10
Tabel 2.4	Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2023	12
Tabel 2.5	Realisasi Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Tahun 2021, 2022 dan 2023	15
Tabel 2.7	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kota Makassar s/d Triwulan I Tahun 2024	18
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Makassar	27
Tabel 2.9	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	32
Tabel 2.10	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	45
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kota Makassar ...	52
Tabel 4.1	Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2025	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
Lampiran 1	Evaluasi Renja Tahun 2023	74

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat maupun daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan juga dimaksudkan untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Makassar tahun 2021-2026 dan mengacu pada Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 serta Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan mangakomodir visi dan misi kepala daerah terpilih.

Penyusunan Renja perangkat daerah ini memperhatikan hasil kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis, mempertimbangkan sinergi antar sektor pembangunan, koordinasi antar perangkat daerah serta instansi terkait lainnya.

Dokumen Renja Perangkat Daerah berisikan daftar program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif serta sumber pendanaannya yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mencapai sasaran

pembangunan. Untuk mendapatkan konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran tahunan, Renja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Makassar tahun 2025 perlu mengikuti kerangka pedoman penyusunan anggaran tahunan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2024, Nomor 700.1/3013/SJ, Nomor HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 Tanggal 8 Juli 2024 tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah merupakan langkah yang penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan tersebut merupakan dukungan pemerintah pusat bagi APIP daerah seiring dengan meningkatnya kompleksitas tugas dan aktivitas pemerintah daerah agar mampu melaksanakan tugasnya secara objektif, independent, efektif, dan efisien dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah serta mencegah terjadinya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Peningkatan pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat, menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independent, efektif, efisien, transparan dan terukur, menindaklanjuti temuan pengawasan, meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparat pengawasan intern pemerintah, sistem pengendalian intern), mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja dan profesionalitas tenaga pemeriksa dan meningkatkan sistem informasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) serta perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik, dan standar audit melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum. Untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal, para aparatur pengawasan baik internal maupun eksternal, para aparatur pengawasan lebih meningkat kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.

Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Peran dan fungsi utama Inspektorat Daerah Kota Makassar sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan (*assurance*) dan pembinaan (*consulting*) penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai mitra strategis (*strategi partner*) dan/atau penasehat terpercaya (*trusted advisor*) dalam memberikan hasil pengawasan yang diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas, efisiensi dan kehematan, efektivitas manajemen risiko, dan sistem perigatan dini, serta perbaikan tata Kelola.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Makassar mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);

20. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 81 Tahun 2016);
21. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55);
22. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kota Makassar di tahun 2025 melalui rencana kerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Makassar tahun 2025 ini adalah menyiapkan dokumen rencana kerja tahun yang operasional:

a. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Makassar dengan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Makassar, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Daerah Kota Makassar.
b. Sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah Kota Makassar untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah Kota Makassar yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025.
c. Sebagai acuan untuk pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kota Makassar tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Makassar adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja-PD yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja-PD dan sistematika penyusunan.

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab II menjelaskan tentang evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra PD yang memuat evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun 2023 dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun 2024 (Triwulan I), Analisis kinerja pelayanan PD, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, Reviu terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab III menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan yang berisikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dan uraian garis besar program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV mengemukakan rencana program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana kerja perangkat daerah tahun 2025 dan capaian kinerja yang direncanakan serta pagu indikatifnya.

Bab V Penutup

Bab V merupakan penutup yang berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta pagu indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kota Makassar Tahun 2023.

Untuk memantapkan perencanaan pengawasan tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan pencapaian hasil triwulan I tahun 2024. Pada tahun 2023 Inspektorat Daerah Kota Makassar telah melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program, sebanyak 12 (dua belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan yang dibiayai oleh APBD tahun anggaran 2023 sebesar **Rp21.421.272.622,00** atau 87,61% dari alokasi anggaran dalam APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp24.451.758.413,00.**

Secara umum Inspektorat Daerah Kota Makassar telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Rata-rata capaian kinerja dari 2 (dua) program utama dan 1 (satu) program penunjang menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 98% dengan kategori Sangat Tinggi. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja sebagian besar dinyatakan BERHASIL dengan 6 (enam) indikator kinerja, sedangkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase tindak lanjut temuan ≤ 100% sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Indikator Program Tahun 2023

URAIAN			INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE		RATA-RATA
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA			REALISASI	CAPAIAN	
Program Pengawasan Internal	1.	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	100%	

URAIAN			INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE		RATA-RATA
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA			REALISASI	CAPAIAN	
	2.	Persentase Tindak Lanjut Temuan	69,60	60,77%	87,31%	
	3.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100	100%	100%	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	100%	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.	Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90%	90%	100%	
	2.	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90%	90%	100%	
	3.	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	
Rata-Rata Pencapaian Target						**98%**

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Tahun 2023

Capaian kinerja sasaran tersebut di atas didukung oleh:

1. Penguatan kelembagaan Inspektorat Daerah Kota Makassar dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
2. Optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya aparatur yang telah bersertifikasi dan berpengalaman, serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Auditor, Pejabat Pengawas Pemerintahan dan Auditor Kepegawaian maupun sumber daya anggaran;
3. Terbangunnya komunikasi dan koordinasi yang baik dan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Pembina APIP, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

4. Seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar telah berpartisipasi aktif dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.09.03/LHE-743/PW21/6/2023 Tanggal 9 November 2023 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat Kota Makassar menunjukkan bahwa tingkat Kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Kota Makassar Tahun 2023 berada pada Level 3 dengan skor 3,00 untuk seluruh elemen kapabilitas APIP. Berdasarkan kondisi tersebut persentase realisasi kinerja pada indikator Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) telah memenuhi target kinerja yaitu Level 3 Hal tersebut dapat dideskripsikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

No	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan *(Enabler)*			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan *(Delivery)* dan Kualitas Pengawasan *(Result)*			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		**3**	**3,000**

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat Daerah Kota Makassar oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2023 berada pada Level 3 (skala 1 – 5) dengan karakteristik *delivered*, yakni APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP dan mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan.

Capaian kinerja tersebut di atas dipengaruhi oleh:

a. Faktor Pendukung/Pendorong
   1) Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Makassar telah mencapai Level 3 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
   2) Pelaksanaan kegiatan Kapabilitas APIP secara berkala;
   3) Dukungan dari pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Pembina APIP dalam pendampingan penilaian Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Makassar.

b. Faktor Penghambat/Permasalahan

1) Sumber Daya Manusia (SDM) masih memerlukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan sertifikasi jabatan, pelatihan sertifikasi profesional penunjang pengawasan maupun teknis substansi;
2) Belum optimalnya implementasi dari Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3) Koordinasi dan sinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal Kementerian, Lembaga, Inspektorat Provinsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih perlu dioptimalkan mulai dari perencanaan, pengkomunikasian, serta tindak lanjut hasil pengawasan.

c. Rencana Tindak Lanjut

1) Peningkatan kompetensi SDM pengawasan dengan alokasi anggaran yang memadai, melalui pelatihan sertifikasi jabatan, pelatihan sertifikasi profesional penunjang pengawasan, maupun pelatihan teknis substantif;
2) Penerapan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah berupa Pendampingan Penyusunan Register Risiko SKPD dan Evaluasi Register Risiko SKPD;
3) Menyusun Program Kerja Perencanaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko mengacu pada Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) Tahun Anggaran 2025;
4) Melakukan telaah sejawat antar Irban secara berkala;
5) Melakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP secara berkelanjutan;
6) Mengoptimalkan koordinasi dan sinergi dengan BPK RI, KPK, Inspektorat/Inspektorat Jenderal Kementerian/ Lembaga, Inspektorat Daerah Provinsi dan BPKP dalam setiap tahapan pengawasan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengkomunikasian sampai menindaklanjuti hasil pengawasan.

2. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Persentase tindak lanjut temuan pada Inspektorat Daerah Kota Makassar dengan target kinerja 69,60%, dan persentase realisasi sebesar 60,77%, sedangkan persentase capaian kinerja sebesar 87,31%. Adapun untuk rincian capaian persentase tindak lanjut temuan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Realisasi Kinerja Persentase Tindak Lanjut Temuan

Jenis Temuan	Jumlah		
	Temuan	Tindak Lanjut	(%)
APIP	6.424	3.728	58,03
BPK	1.597	1.146	71,76
Total	**8.021**	**4.874**	**60,77**
Persentase Capaian Kinerja			**87,31**

Sumber : Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester II Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2023.

Indikator dari Persentase tindak lanjut temuan terdiri dari temuan administrasi APIP dan BPK. Dari 8.021 temuan administrasi yang ada, telah ditindaklanjuti sebanyak 4.874 temuan, sehingga untuk realisasi kinerja persentase hasil tindak lanjut temuan administrasi sebesar 60,77%. Adapun untuk persentase capaian kinerja hasil tindak lanjut temuan Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2023 sebesar 87,31%.

Capaian kinerja tersebut di atas dipengaruhi oleh:

a. Faktor Pendukung/Pendorong
   1) Terbangunnya komunikasi dan koordinasi yang baik dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawal penyelesaian tindak lanjut temuan APIP;
   2) Adanya Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah yang menegaskan pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah belum menyelesaikan kerugian negara/daerahberdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP;
   3) Adanya Surat Edaran Wali Kota Makassar yang menekankan agar ASN yang akan pensiun dan mutasi ke Pemda/Kementerian diwajibkan mengurus bebas temuan Pemeriksaan APIP dan BPK-RI;
   4) Adanya aplikasi Sipakatau (Sistem Informasi Pemuktahiran Data Tindak Lanjut).

b. Faktor Penghambat/Permasalahan
   1) Komitmen SKPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum optimal;
   2) Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur pengawasan dibandingkan dengan obyek pengawasan;
   3) Masih terdapat temuan hasil pemeriksaan dimana penanggungjawab temuan telah pension atau meninggal dunia.

c. Rencana Tindak Lanjut
   1) Meningkatkan pelaksanaan pendampingan dan pelayanan konsultasi bidang pengawasan kepada SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar;
   2) Meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia di Inspektorat Daerah Kota Makassar untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan;
   3) Pemantauan secara berkala dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi bersama Inspektorat Daerah Kota Makassar dan SKPD;
   4) Melakukan pemantauan tindak lanjut dan pemuktahiran dan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Makassar secara berkala.

3. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat sebanyak 37 laporan pengaduan dari target 37 laporan pengaduan. Laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Wali Kota Makassar dan diteruskan ke Inspektorat Daerah Kota Makassar untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan atau klarifikasi. Pengaduan masyarakat tersebut antara lain berupa perhitungan kerugian keuangan daerah, penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme, dan pelanggaran disiplin pegawai pemerintah Kota Makassar. Adapun untuk realisasi kinerja indikator persentase penyelesaian pengaduan masyarakat sebesar 100%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja.

Capaian kinerja tersebut di atas dipengaruhi oleh:

a. Faktor Pendukung/Pendorong
   1) Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk menyelesaikan kasus pengaduan yang diterima di Inspektorat Daerah Kota Makassar;
   2) Adanya dukungan dan Kerjasama yang baik dengan kepolisian dan kejaksaan dalam menangani pengaduan masyarakat.
b. Faktor Penghambat/Permasalahan
   1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengaduan.
c. Rencana Tindak Lanjut
   1) Mengoptimalkan aplikasi pengaduan masyarakat.

4. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, maka telah dilakukan penilaian cepat Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Makassar. Laporan hasil penilaian cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Makassar Nomor PE.09.03/LHP-770/PW21/3/2023 Tanggal 20 November 2023 menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah mencapai skor 3,263 atau pada Level 3 dengan target yang ditentukan yaitu Level 3. Hal ini menunjukkan bahwa telah memenuhi target kinerja dengan capaian realisasi kinerja sebesar 100%. Adapun untuk komponen penilaian dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2023

Komponen, Unsur, dan Sub Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN				
Kualitas Sasaran Strategis	0,500%	2,000		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	0,500%	1,500		

Komponen, Unsur, dan Sub Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		**3,500**		
BOBOT PENETAPAN TUJUAN			**1,400**	
STRUKTUR DAN PROSES				
Lingkungan Pengendalian				
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	0,038%	0,114		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	0,038%	0,150		
Kepemimpinan yang kondusif (1.3)	0,038%	0,103		
Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan (1.4)	0,038%	0,150		
Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat (1.5)	0,038%	0,150		
Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan (1.6)	0,038%	0,091		
Perwujudan peran APIP yang efektif (1.7)	0,038%	0,122		
Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait (1.8)	0,038%	0,098		
Penilaian Risiko				
Identifikasi risiko (2.1)	0,100	0,242		
Analisis risiko (2.2)	0,100	0,179		
Kegiatan Pengendalian				
Reviuatas kinerja instansi pemerintah (3.1)	0,023	0,074		
Pembinaan sumber daya manusia (3.2)	0,023	0,091		
Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi (3.3)	0,023	0,068		
Pengendalian fisik atas aset (3.4)	0,023	0,091		
Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja (3.5)	0,023	0,074		
Pemisahan fungsi (3.6)	0,023	0,091		
Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting (3.7)	0,023	0,091		
Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian (3.8)	0,023	0,091		
Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatanya (3.9)	0,023	0,091		
Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatanya (3.10)	0,023	0,091		
Dokumentasi yang bai katas SPI serta transaksi dan kejadian penting (3.11)	0,023	0,068		
Informasi dan Komunikasi				
Informasi yang relevan (4.1)	0,050	0,120		
Komunikasi yang efektif (4.2)	0,050	0,200		
Pemantauan				
Pemantauan berkelanjutan (5.1)	0,075	0,200		
Evaluasi terpisah (5.2)	0,075	0,169		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES		**3,009**		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			**0,903**	
PENCAPAIAN TUJUAN				

Komponen, Unsur, dan Sub Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi				
Capaian *Outcome*	0,200	0,800		
Capaian *Output*	0,100	0,300		
Keandalan Pelaporan Keuangan				
Opini Laporan Keuangan	0,250	0,750		
Pengamanan atas Aset Negara				
Catatan Pengamanan Aset	0,250	0,750		
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan				
Temuan Ketaatan - BPK	0,200	0,600		
IEPK				
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	**1,000**	**3,200**		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			**0,960**	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI				**3,263**
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI				**3**

Sumber: Laporan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023 pada Pemerintah Kota Makassar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Capaian kinerja Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tahun 2023 adalah 100% dengan capaian kinerja tersebut di atas dipengaruhi oleh:

a. Faktor Pendukung/Pendorong
   1) Penguatan Inspektorat Daerah dalam pengawasan pemerintah daerah berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2024, Nomor 700.1/3013/SJ Nomor HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah;
   2) Dukungan dari pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Pembina APIP dalam penyediaan pedoman terkait pengukuran tingkat maturitas;
   3) Hasil Laporan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi Tahun 2023 memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (terdefinisi) dengan skor 3,263.

b. Faktor Penghambat/Permasalahan
   1) Beberapa pengendalian belum diimplementasikan sesuai dengan kebijakan;
   2) Belum terdapat program terkait Pendidikan antikorupsi.

c. Rencana Tindak Lanjut
   1) Melakukan reviu atas kebijakan manajemen risiko dengan memasukkan risiko kemitraan baik tingkat pemda maupun SKPD;

2) Memperbaiki materi dan skor tingkat maturitas dalam laporan *re-assessment* sesuai hasil QA;
3) Melakukan pembinaan perbaikan/menindaklanjuti *Area of Improvement* (AoI) dan mengimplementasikan SPIP kepada SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kota Makassar;
4) Melakukan evaluasi terhadap tindak pengendalian yang efektif/tidak efektif menurunkan risiko.

5. Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas

Pada tahun 2023 terdapat peningkatan kapasitas ASN berupa Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pelatihan Dikantor Sendiri (PKS). Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas mempunyai target pada tahun 2023 sebesar 90% dan realisasi kinerja mencapai sebesar 90%, oleh karena itu untuk capaian kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas dapat dijabarkan dalam tabel berikut. Adapun realisasi ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Realisasi Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Tahun 2021, 2022 dan 2023.

NO	NAMA DIKLAT/ BIMTEK / WORKSHOP	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.	Diklat Fungsional Penjenjangan Auditor Madya		1 Orang	1 Orang
2.	Diklat Orientasi Tugas PPUD Ahli Pertama (dari Inpassing)		-	3 Orang
3.	Diklat Substansi Manajemen Pengawasan		-	1 Orang
4.	Diklat Substansi Pemeriksaan Belanja Daerah		-	4 Orang
5.	Diklat *Certification Government Chief Audit Excetutive* (CGCAE)		-	1 Orang
6.	Diklat Substansi Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)		-	25 Orang
7.	Diklat Audit Teknologi Informasi		-	22 Orang
8.	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama		10 Orang	-
9.	Diklat Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa		20 Orang	-
10.	Diklat Pemeriksaan Belanja Daerah		20 Orang	-
11.	Diklat Pemeriksaan Barang dan Jasa		2 Orang	-
12.	Diklat Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik		1 Orang	-
13.	Diklat Penilaian Kapabilitas APIP	-	1 Orang	-
14.	Diklat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2 Orang	2 Orang	-
15.	Diklat Audit Internal Berbasis Risiko	1 Orang	-	-
16.	Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja Bagi Organisasi Perangkat Daerah	-	-	14 Orang
17.	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD	-	-	2 Orang
18.	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Pengelolaan Keuangan yang	-	-	2 Orang

NO	NAMA DIKLAT/ BIMTEK / WORKSHOP	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
	Transparan dan Akuntabel untuk Mencegah Penyimpangan.			
19.	Pelatihan Kantor Sendiri New Maturitas SPIP	50 Orang	-	-
20.	Pelatihan Kantor Sendiri Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin Covid 19 di Kota Makassar	50 Orang	-	-
21.	Pelatihan Kantor Sendiri Pedoman Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Tahap III dan Tahap IV Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah	50 Orang	-	-
22.	Pelatihan Kantor Sendiri Reviu RKA	50 Orang	-	-
23.	Pelatihan Kantor Sendiri Pengisian Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2021	50 Orang	-	-
24.	Pelatihan Kantor Sendiri Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Pemerintah Kota Makassar TA. 2022	50 Orang	-	-
25.	Pelatihan Kantor Sendiri Reviu LKPD Berbasis Akrual Inspektorat Daerah	-	57 Orang	-
26.	Pelatihan Kantor Sendiri Reviu Harga Perkiraan Sendiri	-	57 Orang	-
27.	Pelatihan Kantor Sendiri Reviu Hasil PMPRB	-	50 Orang	58 Orang
28.	Pelatihan Kantor Sendiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	-	39 Orang	58 Orang
29.	Pelatihan Kantor Sendiri Reviu RKA Perubahan	-	62 Orang	-
30.	Pelatihan Kantor Sendiri Penyusunan Risk Register Fraud, Risk Kemitraan, dan Risk Register SKPD	-	47 Orang	-

Sumber : Realisasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2021, 2022, dan 2023.

6. Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik

Persentase sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah dalam kondisi baik dengan target kinerja 90% dan persentase realisasi sebesar 90% sedangkan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Tahun 2023 Inspektorat Daerah melaksanakan 5 (lima) kegiatan dalam program ini, dengan realisasi pencapaian untuk kegiatan ini adalah sebesar 100%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa telah memenuhi target kinerja 2023 dan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kondisi yang sama capaian kinerjanya.

7. Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah dengan target kinerja 100% dan persentase realisasi sebesar 100% sedangkan presentase capaian kinerja sebesar 100%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa telah memenuhi target kinerja tahun 2023.

Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 secara detail dapat dilihat pada Lampiran I.

2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

Realisasi kemajuan belanja Inspektorat Daerah Kota Makassar sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebesar Rp3.377.755.040,00 atau (11,26%) dari total anggaran tahun 2024 Rp30.000.000.000,00. Sedangkan realisasi capaian target kinerja sebanyak 3 (tiga) program sampai dengan triwulan I tahun 2024 capain kinerja sebesar 19,62%.

Secara umum penyebab masih rendahnya capaian target kinerja 3 (tiga) program adalah hampir semua kegiatan belum waktunya dilaksanakan, menentukan penyedia membutuhkan waktu verifikasi yang lebih lama, koordinasi dengan penyedia terkadang membutuhkan waktu yang lama sehingga menyebabkan penyelesaian dokumen pengadaan barang/jasa terlambat, terlambatnya tender pengadaan makan minum, alat tulis kantor, kertas, bahan komputer, dan beberapa kegiatan telah dilaksanakan dan anggaran kegiatan dalam proses pencairan.

Secara detail evaluasi hasil rencana kerja perangkat daerah Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 pada tabel 2.7 (T-C 29) sebagai berikut:

Tabel 2.7 (T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kota Makassar s/d Triwulan I Tahun 2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Perangkat Daerah) Tahun (2021 - 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) /2021		Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2023				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) / 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan)		
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / s.d. Maret 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2024
2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9	10= (5+7+9)		11=(10/4)
INSPEKTORAT DAERAH															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	Dokumen	5	Dokumen	9	Dokumen	9	Dokumen	100%	5	Dokumen	2	Dokumen	60%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	Dokumen	20%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	Dokumen	20%

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	40%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	0	Dokumen	20%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	428	Orang/ Bulan	79	Orang/ Bulan	86	Orang/ Bulan	86	Orang	100%	87	Orang/ Bulan	87	Orang/ Bulan	39,77%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Bulan		-	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	3	Dokumen	25%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Dokumen		-	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	0	Laporan	20%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	Dokumen		-	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	3	Laporan	25%

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10	Dokumen		-	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	1	Dokumen	30%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60	Bulan		-	12	Dokumen	12	Bulan	100%	12	Dokumen	3	Dokumen	25%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10	Dokumen		-	2	Laporan	2	Dokumen	100%	2	Laporan	1	Laporan	30%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	621	Pasang		-	110	Paket	110	Paket	100%	108	Paket	3	Paket	17,36%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	Orang		-	78	Orang	78	Orang	100%	66	Orang	26	Orang	52,63%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30	Kegiatan		-	58	Orang	58	Orang	100%	61	Orang	0	Orang	396,67 %

Administrasi Umum Perangkat Daerah															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	Jenis		-	8	Paket	8	Paket	100%	16	Paket	0	Paket	10,13%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	75	Jenis		-	45	Paket	45	Paket	100%	3	Paket	0	Paket	300%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	Jenis		-	9	Paket	9	Paket	100%	7	Paket	0	Paket	25,71%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30	Terbitan	2	Terbitan	36	Dokumen	36	Dokumen	100%	12	Dokumen	6	Dokumen	168%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	90	Kali		-	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	3	Laporan	19,78%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185	Kali	8	Kali	45	Laporan	45	Laporan	100%	39	Laporan	31	Laporan	51,63%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik pada SKPD	5	Aplikasi		-	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	3	Dokumen	360%

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	215	Unit	0	-	0	Unit	0	Unit	0%	4	Unit	0	Unit	0%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	86	Unit	0	-	28	Unit	28	Unit	100%	14	Unit	0	Unit	15,56%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	110	Orang	2	Orang	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	3	Laporan	40%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	Bulan	2	Bulan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	3	Laporan	29,09%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharan dan Dibayarkan Pajaknya	5	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	1	Unit	40%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharan dan Dibayarkan Pajaknya	165	Unit	33	Unit	32	Unit	32	Unit	100%	30	Unit	8	Unit	29,09 %

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperlihara	750	Unit	150	Unit	122	Unit	122	Unit	100%	101	Unit	0	Unit	22,27 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	60	Bulan	12	Bulan	3	Unit	3	Unit	100%	3	Unit	1	Unit	6,67%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN															
Penyelenggaraan Pengawasan Internal															
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	40	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100%	4	Laporan	4	Laporan	20%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	440	Laporan	135	Laporan	69	Laporan	91	Laporan	132%	69	Laporan	15	Laporan	30,19 %
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1040	Laporan	208	Laporan	213	Laporan	213	Laporan	100%	208	Laporan	2	Laporan	20,87 %
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	25	Laporan	31	Laporan	10	Laporan	19	Laporan	190%	5	Laporan	3	Laporan	71,11 %
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	40	Laporan	7	-	2	Kesepakatan	2	Kesepakatan	100%	2	Kesepakatan	0	Kesepakatan	13,33 %

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	60	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100%	12	Dokumen	0	Dokumen	2,67%
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu															
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100%	6	Laporan	0	Laporan	18,33 %
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	260	Laporan	69	Laporan	32	Laporan	37	Laporan	116%	32	Laporan	2	Laporan	21,15 %
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI															
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan															
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	280	Dokumen	28	Dokumen	5	Rekomendasi	5	Rekomendasi	100%	55	Rekomendasi	0	Rekomendasi	2,14%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	5	Dokumen	1	Dokumen	3	Rekomendasi	3	Rekomendasi	100%	1	Rekomendasi	0	Rekomendasi	80%
Pendampingan dan Asistensi															
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan	70	Laporan	34	Laporan	40	Perangkat Daerah	46	Perangkat Daerah	115%	36	Perangkat Daerah	9	Perangkat Daerah	37,22 %

	Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	260	Laporan	37	Laporan	36	Perangkat Daerah	36	Perangkat Daerah	100%	37	Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah	27,69 %
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	105	Laporan	21	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100%	18	Kegiatan	0	Kegiatan	14,44 %
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	15	Laporan	1	Laporan	0	Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah	0%	3	Perangkat Daerah	51	Perangkat Daerah	340%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kota Makassar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di tingkat Pemerintah Kota Makassar maupun dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Inspektorat Daerah adalah Pelayanan Bidang Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah peningkatan Kapasitas dan Intensitas Pengawasan Internal yang meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Upaya Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1) Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
2) Persentase Tindak Lanjut Temuan;
3) Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
4) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Sasaran strategis Inspektorat Daerah dirincikan kedalam beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan kualitas pelayanan suatu perangkat daerah. Ketujuh IKU yang diampu oleh Inspektorat Daerah setiap tahunnya diperoleh dari hasil evaluasi BPKP dan BPK. Akan tetapi, Inspektorat Daerah tetap melakukan upaya untuk mencapai target IKU yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah disusun.

Keberhasilan pencapaian IKU dapat dilihat dari persentase realisasi capaian target kinerja pelayanan yang telah ditetapkan dalam Renstra terhadap masing-masing IKU. Pada tabel 2.8, dapat dilihat perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja masing-masing IKU. Secara keseluruhan, pencapaian IKU dapat dikategorikan berhasil karena persentase ketercapaian di atas 90%, bahkan beberapa telah mencapai 100%. Kurang maksimalnya pencapaian disebabkan karena beberapa hal, salah satunya adalah penyelesaian tindak lanjut temuan.

Untuk proyeksi ke depannya, yaitu pada tahun 2025 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD periode 2021-2026, diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan di dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Makassar yang setiap tahunnya selalu ditargetkan untuk mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terus dilakukan agar Inspektorat Daerah Kota Makassar selalu berupaya memberikan pelayanan yang semakin baik

setiap tahunnya. Secara lengkap pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah Kota Makassar terdapat dalam Tabel 2.8 (T-C 30) sebagai berikut:

Tabel 2.8 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Makassar

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Hasil Tindak Lanjut temuan			69,60%	72,60%	75,60%	61,94%	60,77%	75,60%	78,60%	
2	Persentase Penyelesaian Pengaduan			100%	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	
3	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	
4	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	
5	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			90 %	90 %	90 %	100%	100%	100 %	100 %	
6	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik			90 %	90 %	90 %	100%	100%	100 %	100 %	
7	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perubahan sistem manajemen kepemerintahan daerah dan perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah memberikan perubahan paradigma tugas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Makassar selaku APIP. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara menekankan arti pentingnya Sistem Pengawasan Intern dalam rangka penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah berdasarkan prinsip *good governance*.

Sejalan dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pentingnya Sistem Pengawasan Intern atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai tujuan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Inspektorat Daerah Kota Makassar memiliki berbagai peluang yang dapat menunjang pengembangan pelayanan. Peluang-peluang dimaksud antara lain bertambahnya kewenangan yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terkait pengawasan, tersedianya dana dari APBD, lingkungan kerja yang kondusif serta sarana dan prasarana kantor yang memadai yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan adanya koordinasi dengan Inspektorat Daerah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Isu strategi pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, fokus dan sasaran pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah meliputi:

a) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026 dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2025 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi;
b) Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026 dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2025 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi;
c) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yaitu:
    1. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau

2. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah.

d) Pengawasan yang bersifat mandatori oleh Inspektorat Daerah, meliputi kegiatan pengawasan yaitu;

1. Kinerja rutin pengawasan
    1) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah, meliputi:
        (a) Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2026 dan Perubahan Tahun 2025;
        (b) Reviu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Tahun 2025;
        (c) Reviu Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan Tahun Anggaran 2025;
        (d) Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun Anggaran 2026 dan Perubahan Tahun Anggaran 2025.
    2) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
    3) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Makassar Tahun 2024;
    4) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Makassar Tahun 2024;
    5) Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
    6) Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
    7) Reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa;
    8) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Pengawasan Prioritas Nasional
    1) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
    2) Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
    3) Tindak lanjut perjanjian kerja sama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
3. Pengawalan Reformasi Birokrasi yang meliputi:
    1) Evaluasi Reformasi Birokrasi;
    2) Penanganan laporan pengaduan *(whistle blower system)*; dan
    3) Penanganan pengaduan masyarakat.
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas
    1) Pengendalian gratifikasi;

2) Pelaksanaan survei penilaian integritas;
3) Asistensi pembangunan reformasi birokrasi;
4) Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi;
5) Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6) Penilaian Internal Zona Integritas;
7) Penanganan benturan kepentingan.

5. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah:
   a. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
   b. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
   c. Penerapan Manajemen Risiko;
   d. Pendidikan Profesional berkelanjutan.
6. Pemberian jasa konsultasi dan jasa narasumber terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Makassar.

Gambaran isu-isu strategis di atas membawa dampak yang signifikan, sehingga pencapaian visi dan misi Wali Kota Makassar yakni mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan berkualitas menjadi tidak maksimal. Berdasarkan isu-isu strategis di atas diperlukan langkah-langkah strategis yang penting dilakukan guna mendukung pencapaian visi Kota Makassar, **"Percepatan Mewujudkan Makassar kota Dunia Yang *Sombere'* & *Smart City* dengan Imunitas Kuat Untuk Semua"**. Langkah-langkah strategis tersebut antara lain, yaitu:

1. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan.
2. Mengoptimalkan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Mengoptimalkan Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
4. Mengoptimalkan manajemen tindak lanjut hasil pengawasan.
5. Mengoptimalkan sistem deteksi dini *(early warning)* dalam mencegah tindak pidana korupsi baik untuk deteksi fraud, maupun penyimpangan lainnya.
6. Mengoptimalkan fungsi asistensi dan pendampingan.
7. Mengoptimalkan pemberian layanan sebagai *quality assurance* dan *consulting* terhadap SKPD.

Ketujuh langkah strategis di atas diharapkan dapat menjadi prioritas dalam penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2025, untuk selanjutnya mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Adanya perubahan/reviu terhadap program dan rancangan awal RKPD dari hasil analisis kebutuhan untuk Renja Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1) Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024;

2) Penyesuaian Pedoman penilaian pencegahan korupsi pemerintah daerah melalui *Monitoring Center For Prevention (MCP).*
3) Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2024, Nomor 700.1/3013/SJ, Nomor HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 Tanggal 8 Juli 2024 tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, maka:

1) Kegiatan pengawasan dapat mencakup kegiatan audit, reviu, pembinaan, pemantauan, evaluasi, serta kegiatan pengawasan lainnya seperti asistensi, konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
2) Pengawasan internal ditekankan pada sifat *prefentif* (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan, namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (*early warning system)*.

Rancangan awal Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Makassar tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kota Makassar tahun 2021-2026 serta membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra dan target kinerja yang dicapai oleh Inspektorat Daerah dengan arahan Kepala Daerah terkait dengan program prioritas kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan. Setelah melalui tahapan pembahasan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 bersama TAPD, tahapan Forum Perangkat Daerah, maka ditetapkan untuk Inspektorat Daerah sebanyak 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan. Hasil analisis terhadap rancangan awal kegiatan tersebut hingga menjadi renja yang siap untuk difinalisasikan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Makassar yang tersaji pada tabel 2.9 (T-C 31) sebagai berikut:

Tabel 2.9 (T-C 31)

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(2)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)	(5)	(6)	(12)
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
INSPEKTORAT DAERAH				27,720,807,000	INSPEKTORAT DAERAH				30,000,000,000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90%	24,279,350,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90%	28,191,789,700	
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	90%				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	90%		
		Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%				Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%		
Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Termanfaatkannya Dokumen Pelaksanaan Tahun Berjalan dan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun yang akan Datang	100%	355,262,000	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Termanfaatkannya Dokumen Pelaksanaan Tahun Berjalan dan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun yang akan Datang	100%	193,846,872	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	287,634,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	176,569,200	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	22,023,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7,136,500	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	22,072,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,136,500	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	11,806,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,823,336	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	11,726,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,181,336	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kota Makassar**	**Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun Berjalan**	**100%**	**19,216,094,727**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun Berjalan**	**100%**	**21,607,726,308**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/Bulan	18,309,563,227	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/Bulan	21,207,379,036	Penambahan pagu untuk Penyesuaian PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas PPNomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	226,920,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	241,680,000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,852,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,755,112	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	157,711,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	155,912,160	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kota Makassar**	**Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah SKPD**	**90%**	**101,186,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah SKPD**	**90%**	**61,974,000**	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1,616,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.187,000	

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	96,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	60,000,000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3,570,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	787,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kota Makassar**	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Inspektorat dan PNS Lingkup Pemerintah Kota Makassar**	**90%**	**884,620,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Inspektorat dan PNS Lingkup Pemerintah Kota Makassar**	**90%**	**3,127,187,000**	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	133 Paket	109,300,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57 Orang	722,500,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	87 Orang	3,094,000,000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	58 Orang	52,820,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	61 Orang	33,187,000	

Perundang-Undangan		Peraturan Perundang-Undangan			Perundang-Undangan		Peraturan Perundang-Undangan			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kota Makassar**	**Termanfaatkannya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**90%**	**1,382,075,100**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Termanfaatkannya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**90%**	**1,613,086,400**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	29,566,600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	11,186,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	168,892,500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	234,130,800	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	59,392,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	45,792,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	5 Dokumen	65,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,160,000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Makassar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	22 Laporan	56,784,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Makassar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	23,793,600	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	660,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43 Laporan	951,424,000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik pada SKPD	1 Dokumen	342,040,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik pada SKPD	12 Dokumen	341,600,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kota Makassar**	**Termanfaatkannya Barang Milik Daerah**	**90%**	**916,662,500**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Makassar**	**Termanfaatkannya Barang Milik Daerah**	**90%**	**435,138,000**	
Pengadaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	296,000,000	Pengadaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	42,900,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	64 Unit	620,662,500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	392,238,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Makassar**	**Termanfaatkannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Berjalan**	**90%**	**517,323,600**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar**	**Termanfaatkannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**90%**	**432,591,000**	

							Daerah Tahun Berjalan			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan	250,081,200	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	203,943,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	267,242,400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	228,648,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Makassar**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD**	**90%**	**906,126,073**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD**	**90%**	**720,240,120**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41,724,800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44,380,000	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	33 Unit	488,530,400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit	287,073,400	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperlihara	150 Unit	96,610,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperlihara	125 Unit	95,560,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	279,260,873	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	293,226,720	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	**Kota Makassar**	**Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)**	**Level 3**	**1,807,209,000**	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Kota Makassar**	**Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)**	**Level 3**	**1,237,023,900**	
		Persentase tindak lanjut temuan	**75,60%**				**Persentase tindak lanjut temuan**	**75,60%**		

		Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	**100%**				**Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat**	**100%**		
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Kota Makassar**	**Tercapainya Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)**	**Level 3**	**1,432,719,000**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Kota Makassar**	**Tercapainya Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)**	**Level 3**	**1,155,237,900**	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	26,294,000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	10,830,600	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	88 Laporan	244,185,000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	88 Laporan	254,457,600	
Reviu Laporan Kinerja	Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	208 Laporan	119,945,000	Reviu Laporan Kinerja	Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	208 Laporan	209,255,900	
Reviu Laporan Keuangan	Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	9 Laporan	68,186,000	Reviu Laporan Keuangan	Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	9 Laporan	21,072,800	
Kerjasama Pengawasan Internal	Kota Makassar	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	12 Kesepakatan	645,456,000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kota Makassar	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	12 Kesepakatan	295,055,600	

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	328,653,000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	364,565,400	
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Kota Makassar**	**Peningkatan Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat**	**100%**	**374,490,000**	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Kota Makassar**	**Peningkatan Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat**	**100%**	**81,786,000**	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	277,703,000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6 Laporan	6,857,600	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	52 Laporan	96,787,000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	32 Laporan	74,928,400	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	**Kota Makassar**	**Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**	**Level 3**	**1,634,248,000**	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Kota Makassar**	**Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**	**Level 3**	**571,186,400**	



Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Kota Makassar**	**Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**	**Level 3**	**636,651,000**	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Kota Makassar**	**Tercapainya Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**	**Level 3**	**185,640,400**	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	56 Rekomendasi	445,390,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	53 Rekomendasi	124,682,400	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	191,261,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	60,958,000	
Pendampingan dan Asistensi	**Kota Makassar**	**Tercapainya Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**	**Level 3**	**997,597,000**	**Pendampingan dan Asistensi**	**Kota Makassar**	**Tercapainya Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**	**Level 3**	**385,546,000**	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah	45,550,000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 Perangkat Daerah	19,539,000	

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Makassar	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	52 Perangkat Daerah	109,567,000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Makassar	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	37 Perangkat Daerah	163,305,400	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Makassar	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	18 Kegiatan	675,308,000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Makassar	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	13 Kegiatan	181,898,600	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Makassar	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3 Perangkat Daerah	167,172,000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Makassar	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3 Perangkat Daerah	20,803,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Daerah Kota Makassar tidak langsung berhubungan dengan usulan program atau kegiatan dari masyarakat, namun ketugasannya selaku Instansi Pengawas yang juga terkait dengan pelayanan masyarakat yaitu : melakukan pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi, serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau investigatif dengan fokus dugaan KKN, penyalahgunaan wewenang, hambatan pelayanan publik, pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

Melakukan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yaitu : bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang perumahan dan Kawasan pemukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang lingkungan hidup, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang penanaman modal, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang persandian, bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang perpustakaan dan kearsipan, bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang perindustrian, serta bidang pemerintahan umum.

Mereviu dokumen perencanaan dan anggaran daerah dimana dalam kegiatan reviu tersebut diantaranya memperbandingkan kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah dengan hasil musrenbang yang merupakan usulan dari masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Makassar tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Daerah Kota Makassar belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para *stakeholders*. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.10 (T-C 32) berikut:

Tabel 2.10 (T-C 32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Voulme	Catatan
1	2	3	4	5	6
					Tidak ada program/ kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan masyarakat dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Makassar khususnya pada tugas-tugas di bidang pengawasan/pemeriksaan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 380 ayat (1) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota. Ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati/Wali Kota dibantu oleh Inspektorat kabupaten/kota.

Pengawasan yang terkait keuangan daerah meliputi kegiatan audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, asistensi dan pendampingan dalam pengelolaan APBD kabupaten/kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang dilakukan Inspektorat Daerah kabupaten/kota dapat bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dan/dan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Berdasarkan Pasal 385 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di instansi daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau Aparat Penegak Hukum. Ayat (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1).

Ayat (3) Aparat Penegak Hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Ayat (4) Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, kelembagaan daerah kabupaten/kota, kepegawaian pada perangkat daerah kabupaten/kota, keuangan daerah kabupaten/kota, pembangunan daerah kabupaten/kota, pelayanan publik di daerah kabupaten/kota, kerja sama daerah kabupaten/kota, kebijakan daerah kabupaten/kota, Bupati/Wali Kota dan DPRD kabupaten/kota, dan bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah kabupaten/kota. Ruang lingkup pemeriksaan untuk Inspektorat Daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Kebijakan pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan pengawasan. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengawasan meliputi 5 (lima) jenis kegiatan yaitu:
   a. Kegiatan peningkatan kapabilitas APIP yaitu: bimbingan teknis pemeriksaan investigative, bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*), bimbingan teknis penerapan sistem manajemen risiko.
   b. Kegiatan asistensi/pendampingan yaitu: penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah.
   c. Kegiatan reviu meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu Laporan Kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa.
   d. Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, dana Kelurahan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP, penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan laporan gratifikasi, penanganan *Whistle Blower System*, penanganan benturan kepentingan, penilaian internal zona integritas, verifikasi LHKPN/LHKASN, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, penyelenggaraan pemerintah daerah, perencanaan dan penganggaran responsif gender, pelayanan publik.
   e. Kegiatan pemeriksaan meliputi pemeriksaan/audit kinerja dan pemeriksaan/audit dengan tujuan tertentu.

Untuk menjamin terciptanya keberhasilan pembangunan dan guna mengatasi tantangan pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar Tahun 2025 menuju kota tangguh, maka di perlukan keselarasan, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan antara program Pemerintah Pusat dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memuat tema "Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing". Berdasarkan kedua tema tersebut diatas, maka tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2025 "Percepatan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Untuk itu, fokus dan sasaran pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah Kota Makassar di tahun mendatang adalah dengan mengawal 5 (lima) arahan strategis Presiden dalam pembagunan nasional yaitu 1) Pembagunan Sumber Daya Manusia, 2) Pembangunan Infrastruktur, 3) Penyederhanaan Regulasi, 4) Penyederhanaan Birokrasi, dan 5) Transformasi Ekonomi. Upaya percepatan pencapaian target prioritas pembangunan nasional dimana

target-target telah diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja dalam bentuk program, indikator maupun target yang terukur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah dengan ruang lingkup:

1). Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan sasaran prioritas daerah ang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti:
   (a) Pengendalian inflasi daerah;
   (b) Kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
   (c) Tingkat pengangguran terbuka;
   (d) Investasi dan pelayanan publik; dan/atau
   (e) Penanganan *stunting*.

   Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
   1. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan noma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Makassar telah sesuai ketentuan perundang-undangan;
   2. Pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Makassar yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Makassar;
2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran penapatan dan belanja daerah meliputi:
   (a) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;
   (b) Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
   (c) Reviu laporan keuangan;
   (d) Kegiatan pengawasan lainnya.
3) Penguatan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan integritas;
4) Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026.

Tujuan Rencana Kerja Inspektorat Daerah yang disesuaikan dengan tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah dibuat Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 yaitu **mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif**.

Sedangkan Sasaran Rencana Kerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kota Makassar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025 yaitu SPM Urusan Wajib Pelayanan Publik, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kota Makassar Tahun 2005-2025, Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, *Sustainable Development Goals* Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah adalah :

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dalam lingkup pemerintah Kota Makassar;
2. Meningkatnya kualitas pembinaan sumber daya aparatur pengawas internal pemerintah;
3. Meningkatnya kinerja dukungan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian dan umum.

Ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran dibuktikan dengan tercapainya target indikator kinerja, sesuai dengan penjelasan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau saseran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output)*, hasil (*outcome)*, dampak *(impact)*. Capaian indikator-indikator kinerja juga bermanfaat sebagai bahan evaluasi program/kegiatan/sub kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program, dan kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan RKPD, program/kegiatan/sub kegiatan Inspektorat Daerah Kota Makassar mempunyai 3 (tiga) rumusan program, 12 (dua belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Daerah Kota Makassar yaitu :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
      1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;

2) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
3) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD;
4) Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD;
5) Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
2) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
3) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD;
4) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1) Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD;
2) Pengamanan barang milik daerah SKPD;
3) Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
2) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
3) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
2) Penyediaan bahan logistik kantor;
3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
5) Fasilitasi kunjungan tamu;
6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
7) Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan mebel;
2) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan jasa surat menyurat;
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
4) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. **Program Penyelenggaraan Pengawasan**, dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. **Penyelenggaraan Pengawasan Internal**
      1) Pengawasan kinerja pemerintah daerah;
      2) Pengawasan keuangan pemerintah daerah;
      3) Reviu laporan kinerja;
      4) Reviu laporan keuangan;
      5) Kerjasama pengawasan internal;
      6) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
   b. **Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**
      1) Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah;
      2) Pengawasan dengan tujuan tertentu.
3. **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi** dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**
      1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
      2) Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan.
   b. **Pendampingan dan Asistensi**
      1) Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah;
      2) Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi;
      3) Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
      4) Pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas.

Selanjutnya program dan kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaannya sebagaimana terdapat pada tabel 3.1 (T-C 33) sebagai berikut:

Tabel 3.1 (T-C 33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kota Makassar

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (2026)	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6	1					Inspektorat Daerah				30,000,000,000				30,271,617,000
6	6	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kota Makassar	90%	28,191,789,700		-	90%	27,119,790,000
							Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		90%				90%	
							Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah		100%				100%	
6	6	1	1	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Termanfaatkannya Dokumen Pelaksanaan Tahun Berjalan dan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun yang akan Datang	Kota Makassar	100%	193,846,872		-	100%	330,932,000
6	6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	9 Dokumen	176,569,200	Pendapatan Asli Daerah		5 Dokumen	274,834,000
6	6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	1 Dokumen	7,136,500	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	18,196,500
6	6	01	01	2.01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	1 Dokumen	7,136,500	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	16,769,500

6	6	01	01	2.01	04	Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Makassar	1 Dokumen	1,823,336	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	10,606,000
6	6	01	01	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-KPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Makassar	1 Dokumen	1,181,336	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	10,526,000
6	**6**	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun Berjalan**	**Kota Makassar**	**100%**	**21,607,726,308**	**Pajak Daerah**	-	**100%**	**22,977,483,727**
6	6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	87 Orang/Bulan	21,207,379,036	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		87 Orang/Bulan	22,586,146,727
6	6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	12 Dokumen	241,680,000	Pendapatan Asli Daerah		12 Dokumen	226,920,000
6	6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar	1 Laporan	2,755,112	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	3,852,000
6	6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar	12 Laporan	155,912,160	Pendapatan Asli Daerah		12 Laporan	160,565,000
6	**6**	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun Berjalan**	**Kota Makassar**	**90%**	**61,974,000**	**Pajak Daerah**	-	**90%**	**99,986,000**
6	6	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	2 Dokumen	1,187,000	Pendapatan Asli Daerah		2 Dokumen	1,616,000
6	6	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	12 Dokumen	60,000,000	Pendapatan Asli Daerah		12 Dokumen	96,000,000

6	6	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	2 Laporan	787,000	Pendapatan Asli Daerah		2 Laporan	2,370,000
6	**6**	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Inspektorat Daerah dan PNS Lingkup Pemerintah Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**90%**	**3,127,187,000**	**Pajak Daerah**	**-**	**90%**	**728,870,000**
6	6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	0 Paket	0,00	Pendapatan Asli Daerah		133 Paket	108,550,000
6	6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Makassar	87 Orang	3,094,000,000	Pendapatan Asli Daerah		57 Orang	567,500,000
6	6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	61 Orang	33,187,000	Pendapatan Asli Daerah		58 Orang	52,820,000
6	**6**	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Termanfaatkannya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**90%**	**1,613,086,400**	**Pajak Daerah**	**-**	**90%**	**1,136,966,100**
6	6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	8 Paket	11,186,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		16 Paket	27,177,600
6	6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	14 Paket	234,130,800	Pendapatan Asli Daerah		3 Paket	160,972,500
6	6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Makassar	8 Paket	45,792,000	Pendapatan Asli Daerah		7 Paket	59,392,000
6	6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Makassar	12 Dokumen	5,160,000	Pendapatan Asli Daerah		5 Dokumen	65,400,000
6	6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Makassar	12 Laporan	23,793,600	Pendapatan Asli Daerah		22 Laporan	63,984,000
6	6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	43 Laporan	951,424,000	Pendapatan Asli Daerah		36 Laporan	468,000,000

6	6	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik pada SKPD	Kota Makassar	12 Dokumen	341,600,000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	292,040,000
6	**6**	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Termanfaatkannya Barang Milik Daerah**	**Kota Makassar**	**90%**	**435,138,000**	Pendapatan Asli Daerah	-	**90%**	**436,962,500**
6	6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kota Makassar	6 Unit	42,900,000	Pendapatan Asli Daerah		35 Unit	143,000,000
6	6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Makassar	11 Unit	392,238,000	Pendapatan Asli Daerah		64 Unit	293,962,500
6	**6**	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Termanfaatkannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Berjalan**	**Kota Makassar**	**90%**	**432,591,000**	Pendapatan Asli Daerah	-	**90%**	**507,463,600**
6	6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	12 Laporan	203,943,000	Pendapatan Asli Daerah		12 Laporan	240,221,200
6	6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Makassar	12 Laporan	228,648,000	Pendapatan Asli Daerah		12 Laporan	267,242,400
6	**6**	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD**	**Kota Makassar**	**90%**	**720,240,120**	Pendapatan Asli Daerah	-	**90%**	**901,126,073**
6	6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharan dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Makassar	1 Unit	44,380,000	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit	41,724,800
6	6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Makassar	30 Unit	287,073,400	Pendapatan Asli Daerah		33 Unit	488,530,400
6	6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperlihara	Kota Makassar	125 Unit	95,560,000	Pendapatan Asli Daerah		150 Unit	91,610,000

6	6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Makassar	3 Unit	293,226,720	Pendapatan Asli Daerah		12 Unit	279,260,873
6	**6**	**1**	**2**			**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)**	**Kota Makassar**	**Level 3**	**1,237,023,900**	Pendapatan Asli Daerah	-	**Level 3**	**1,621,002,000**
							Persentase tindak lanjut temuan		**75,60%**				**78,60%**	
							Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat		**100%**				**100%**	
6	**6**	**1**	**2**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Tercapainya Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)**	**Kota Makassar**	**Level 3**	**1,155,237,900**	Pendapatan Asli Daerah	-	**Level 3**	**1,274,521,000**
						Program Penyelenggaraan Pengawasan	**Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan**	**Kota Makassar**	**75,60%**			-	**Level 3**	
6	6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Makassar	4 Laporan	10,830,600	Pendapatan Asli Daerah		8 Laporan	23,026,000
6	6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	88 Laporan	254,457,600	Pendapatan Asli Daerah		88 Laporan	222,862,000
6	6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kota Makassar	208 Laporan	209,255,900	Pendapatan Asli Daerah		208 Laporan	93,055,000
6	6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kota Makassar	9 Laporan	21,072,800	Pendapatan Asli Daerah		9 Laporan	43,161,000
6	6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kota Makassar	12 Kesepakatan	295,055,600	Pendapatan Asli Daerah		12 Kesepakatan	620,734,000
6	6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Makassar	6 Dokumen	364,565,400	Pendapatan Asli Daerah		12 Dokumen	271,683,000
6	**6**	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Peningkatan Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat**	**Kota Makassar**	**100%**	**81,786,000**	**Pajak Daerah**	-	**100%**	**346,481,000**

6	6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Kota Makassar	6 Laporan	6,857,600	Pendapatan Asli Daerah		12 Laporan	262,849,000
6	6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Makassar	32 Laporan	74,928,400	Pendapatan Asli Daerah		52 Laporan	83,632,000
6	**6**	**1**	**3**			**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**	**Kota Makassar**	**Level 3**	**571,186,400**	**Pajak Daerah**	**-**	**Level 3**	**1,530,825,000**
6	**6**	**1**	**3**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Tercapainya Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**	**Kota Makassar**	**Level 3**	**185,640,400**	**Pajak Daerah**	**-**	**Level 3**	**573,556,000**
6	6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kota Makassar	53 Rekomendasi	124,682,400	Pendapatan Asli Daerah		56 Rekomendasi	399,949,000
6	6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kota Makassar	1 Rekomendasi	60,958,000	Pendapatan Asli Daerah		1 Rekomendasi	173,607,000
6	**6**	**1**	**3**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Tercapainya Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**	**Kota Makassar**	**Level 3**	**385,546,000**	**Pajak Daerah**	**-**	**Level 3**	**957,269,000**
6	6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	40 Perangkat Daerah	19,539,000	Pendapatan Asli Daerah		45 Perangkat Daerah	34,350,000
6	7	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Makassar	37 Perangkat Daerah	163,305,400	Pendapatan Asli Daerah		52 Perangkat Daerah	90,046,000
6	8	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Makassar	13 Kegiatan	181,898,600	Pendapatan Asli Daerah		18 Kegiatan	675,308,000
6	9	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Makassar	3 Perangkat Daerah	20,803,000	Pendapatan Asli Daerah		3 Perangkat Daerah	157,565,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Tahun 2025 yang dibahas pada Bab III, dengan merujuk kepada hasil evaluasi kinerja tahun 2023, tujuan dan sasaran, Program Prioritas Daerah dalam RPJPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan, dimana dalam setiap program kerja operasional selanjutnya dijabarkan ke dalam sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian Inspektorat Daerah Kota Makassar menetapkan rancangan awal Rencana Kerja dan Pendanaan indikatif tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp176.569.200,00.
2) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp7.136.500,00.
3) Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp7.136.500,00.
4) Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp1.823.336,00.
5) Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp1.181.336,00.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan pagu indikatif sebesar Rp21.207.379.036,00.
2) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan pagu indikatif sebesar Rp241.680.000,00.
3) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp2.755.112,00.
4) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp155.912.160,00.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1) Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp1.187.000,00.

2) Pengamanan barang milik daerah SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp60.000.000,00.
3) Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp787.000,00.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan pagu indikatif sebesar Rp0,00.
2) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan pagu indikatif sebesar Rp3.094.000.000,00.
3) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan pagu indikatif sebesar Rp33.187.000,00.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp11.186.000,00.
2) Penyediaan bahan logistik kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp234.130.800,00.
3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan pagu indikatif sebesar Rp45.792.000,00.
4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan pagu indikatrf sebesar Rp5.160.000,00.
5) Fasilitasi kunjungan tamu dengan pagu indikatif sebesar Rp23.793.600,00.
6) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp951.424.000,00.
7) Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis electronik pada SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp341.600.000,00.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan mebel dengan pagu indikatif sebesar Rp42.900.000,00.
2) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan pagu indikatif sebesar Rp392.238.000,00.

g.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan jasa surat menyurat dengan pagu indikatif sebesar Rp203.943.000,00.
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan pagu indikatif sebesar Rp228.648.000,00.

h.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan pagu indikatif sebesar Rp44.380.000,00.
2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan pagu indikatif sebesar Rp287.073.400,00.
3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan pagu indikatif sebesar Rp95.560.000,00.
4) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya dengan pagu indikatif sebesar Rp293.226.720,00.

2. **Program Penyelenggaraan Pengawasan**, dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. **Penyelenggaraan Pengawasan Internal**
      1) Pengawasan kinerja pemerintah daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp10.830.600,00.
      2) Pengawasan keuangan pemerintah daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp254.457.600,00.
      3) Reviu laporan kinerja dengan pagu indikatif sebesar Rp209.255.900,00.
      4) Reviu laporan keuangan dengan pagu indikatif sebesar Rp21.072.800,00.
      5) Kerjasama pengawasan internal dengan pagu indikatif sebesar Rp295.055.600,00.
      6) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dengan pagu indikatif sebesar Rp364.565.400,00.
   b. **Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**
      1) Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp6.857.600,00.
      2) Pengawasan dengan tujuan tertentu dengan pagu indikatif sebesar Rp74.928.400,00.
3. **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi** dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**
      1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan pagu indikatif sebesar Rp124.682.400,00.
      2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dengan pagu indikatif sebesar Rp60.958.000,00.
   b. **Pendampingan dan Asistensi**
      1) Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp19.539.000,00.
      2) Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi dengan pagu indikatif sebesar Rp163.305.400,00.
      3) Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan pagu indikatif sebesar Rp181.898.600,00.
      4) Pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas dengan pagu indikatif sebesar Rp20.803.000,00.

Rumusan secara detail Rencana kerja perangkat daerah Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2025

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inspektorat Daerah			30.000.000.000,00							30.271.617.000,00	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			30.000.000.000,00							30.271.617.000,00	
INSPEKTORAT DAERAH			30.000.000.000,00							30.271.617.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 % 90% 90%	28.191.789.700,00						-	27.119.790.000,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Termanfaatkannya Dokumen Pelaksanaan Tahun Berjalan dan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun yang akan Datang	100%	193.846.872,00			-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar dan SKPD Terkait		330.932.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	176.569.200,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar dan SKPD Terkait		274.834.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											

	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.136.500,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar dan SKPD Terkait		18.196.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.136.500,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar dan SKPD Terkait		16.769.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.823.336,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar dan SKPD Terkait		10.606.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.181.336,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar dan SKPD Terkait		10.526.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah tahun berjalan	100 %	21.607.726.308,00			-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar dan SKPD Terkait	-	22.977.483.727,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang/bulan	21.207.379.036,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar dan SKPD Terkait		22.586.146.727,00	INSPEKTORAT DAERAH
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											

	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	241.680.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar dan SKPD Terkait		226.920.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.755.112,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar dan SKPD Terkait		3.852.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	155.912.160,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar dan SKPD Terkait		160.565.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah tahun berjalan	90 %	61.974.000,00			-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar	-	99.986.000,00	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD											
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.187.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar		1.616.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	60.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar		96.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											

	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	787.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar		2.370.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Inspektorat Daerah dan PNS Lingkup Pemerintah Kota Makassar	90 %	3.127.187.000,00			-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar	-	728.870.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar		108.550.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	87 Orang	3.094.000.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar		567.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	61 Orang	33.187.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar		52.820.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Termanfaatkannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	1.613.086.400,00			-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar	-	1.136.966.100,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	11.186.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar		27.177.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	234.130.800,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar		160.972.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	45.792.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar		59.392.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.160.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar		65.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Fasilitasi Kunjungan Tamu											
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	23.793.600,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar		63.984.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43 Laporan	951.424.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar		468.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	341.600.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar		292.040.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Termanfaatkannya Barang Milik Daerah	90 %	435.138.000,00			-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar	-	436.962.500,00	

Pengadaan Mebel											
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	42.900.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar		143.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	392.238.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar		293.962.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Termanfaatkannya jasa penunjang urusan pemerintah daerah tahun berjalan	90 %	432.591.000,00			-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar	-	507.463.600,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	203.943.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar		240.221.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	228.648.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar		267.242.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	90 %	720.240.120,00			-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar	-	901.126.073,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.380.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar		41.724.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	287.073.400,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar		488.530.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	95.560.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar		91.610.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	293.226.720,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pegawai Inspektorat Daerah Kota Makassar		279.260.873,00	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Persentase Tindak Lanjut Temuan Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Level 3 75,60 % 100%	1.237.023.900,00							1.621.002.000,00	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tercapainya Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Level 3	1.155.237.900,00			-	-	SKPD, Masyarakat, ASN, Stakeholder.	-	1.274.521.000,00	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah											

	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	10.830.600,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SKPD, Masyarakat, ASN, Stakeholder.		23.026.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah											
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	88 Laporan	254.457.600,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SKPD, Masyarakat, ASN, Stakeholder.		222.862.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Reviu Laporan Kinerja											
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	208 Laporan	209.255.900,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SKPD, Masyarakat, ASN, Stakeholder.		93.055.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Reviu Laporan Keuangan											
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	9 Laporan	21.072.800,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SKPD, Masyarakat, ASN, Stakeholder.		43.161.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Kerja Sama Pengawasan Internal											
	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	12 Kesepakatan	295.055.600,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SKPD, Masyarakat, ASN, Stakeholder.		620.734.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP											
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	364.565.400,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SKPD, Masyarakat, ASN, Stakeholder.		271.683.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertantu	Peningkatan Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat	100 %	81.786.000,00			-	-	SKPD, Masyarakat, ASN, dan Stakeholder.	-	346.481.000,00	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah											

	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6 Laporan	6.857.600,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SKPD, Masyarakat, ASN, dan Stakeholder.		262.849.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu											
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	32 Laporan	74.928.400,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SKPD, Masyarakat, ASN, dan Stakeholder.		83.632.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Level 3	571.186.400,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.530.825.000,00	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tercapainya Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Level 3	185.640.400,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar	-	573.556.000,00	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan											
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	53 Rekomendasi	124.682.400,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar		399.949.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan											
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	60.958.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar		173.607.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Pendampingan dan Asistensi	Tercapainya Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Level 3	385.546.000,00			-	-	SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar	-	957.269.000,00	

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah											
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 Perangkat Daerah	19.539.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar		34.350.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi											
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	37 Perangkat Daerah	163.305.400,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar		90.046.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi											
	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	13 Kegiatan	181.898.600,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar		675.308.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas											
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3 perangkat daerah	20.803.000,00	Kota Makassar, Rappocini, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	SKPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar		157.565.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
JUMLAH			**30.000.000.000,00**							**30.271.617.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah kota makassar masih akan mengalami kehidupan yang dinamis. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Inspekorat Daerah Kota Makassar untuk daerah meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Makassar tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Inspektorat Daerah Kota Makassar itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Inspektorat Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000.000,00 mengalami penambahan dari pagu rancangan awal Rencana Kerja berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Makassar sebesar Rp27.720.807.000,00. Penambahan pagu tersebut untuk menindaklanjuti surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2024, Nomor 700.1/3013/SJ, Nomor HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 Tanggal 8 Juli 2024 tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Makassar sebagai dokumen rencana operasional pengawasan tahun 2025, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2025 yang mengacu pada isu-isu strategis, program prioritas daerah tahun 2025 dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Rencana strategis Inspektorat Daerah Kota Makassar tahun 2021-2026 menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2025, selain itu sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai sasaran dan target kinerja. Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan pengawasan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju dalam 1 (satu) tahun.
2. Secara Normatif, menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Secara Operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pengawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Makassar; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pengawasan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas dan efektifnya pengawasan dapat tercapai dengan memperhatikan beberapa hal pokok pada pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun yang akan datang yakni:

1. Penguatan kelembagaan Inspektorat Daerah Kota Makassar sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2024, Nomor 700.1/3013/SJ Nomor HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah;
2. Peningkatan kompetensi SDM pengawasan dengan alokasi anggaran yang memadai, terutama sertifikasi jabatan, sertifikasi profesional penunjang pengawasan, maupun teknis substansi;
3. Penerapan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah berupa pendampingan penyusunan *register* risiko SKPD dan evaluasi *register* risiko SKPD;
4. Mengoptimalkan koordinasi dan sinergi dengan BPK RI, KPK, Inspektorat/Inspektorat Jenderal Kementerian/ Lembaga, Inspektorat Daerah Provinsi dan BPKP dalam setiap tahapan pengawasan, mulai dari tahap merencanakan, melaksanakan, mengkomunikasikan sampai menindaklanjuti hasil pengawasan;
5. Meningkatkan pelaksanaan pendampingan dan pelayanan konsultasi bidang pengawasan kepada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Makassar;
6. Menerapkan pengawasan berbasis risiko dan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar;
7. Melakukan pembinaan dan mengikuti fasilitasi untuk seluruh SKPD dan melakukan perbaikan/menindaklanjuti *area of improvement* (*AoI*) dan mengimplementasikan SPIP oleh seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar;

8. Meningkatkan skor tingkat maturitas dalam laporan penilaian mandiri sesuai hasil evaluasi BPKP;
9. Melakukan reviu atas kebijakan manajemen risiko dengan memasukkan risiko *fraud*, risiko kemitraan baik tingkat pemda maupun SKPD.

Semoga Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Makassar ini menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik *(Good Governance)* dan mendukung pencapaian visi Pemerintah Kota Makassar.

Makassar, 8 Agustus 2024
INSPEKTUR,

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
INSPEKTORAT

A. ASMA ZULISTIA EKAYANTI, S.E., M.M., CGCAE
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP. 19840203 200604 2 011

Lampiran 1. Evaluasi Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Makassar Tahun 2023

Visimi/Misi/Misi Utusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan (Output) / Sub kegiatan	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD yang 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA SKPD TAHUN 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
										I		II		III		IV														
			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)			K	Rp.		
1	4	4.a	5		6		7			9		9		10		.1				12 = 8+9+10+11		13 = 11/7*100		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100		16	17
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp 321,821,281,000		Rp 13,886,622,248		25,826,748,700	24,451,758,414		2,455,350,493		6,593,287,600		4,799,689,726		7,382,144,842				31,431,272,501		87.61%								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	%	100		100		100			25		25		25		25			100		100%		100%			100.00%		Inspektorat	
	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	%	95	Rp 155,163,053,000	95	Rp 17,802,445,632	90	Rp 22,280,344,700	Rp 22,488,395,153	10	Rp 2,999,126,439	30	Rp 6,671,071,080	30	Rp 4,482,539,004	20	Rp 6,589,367,948	90	Rp 20,142,524,451	105%	99.57%	100%	Rp 38,034,584,923	111.11%	82.74%	Inspektorat	
	Persentase ASN/Perangkat daerah yang mendapat pendingkatan kapasitas	%	90		90		90			15		15		40		20			89		105%		100%			111.11%		Inspektorat	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen pelaporan tahun berjalan dan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tahun yang akan datang	Dokumen	100	Rp 1,651,800,000	100	Rp 116,400,604	100	Rp 189,944,800	Rp 169,415,200	38.46	Rp 32,328,000	15.38	Rp 27,258,000	23.08	Rp 11,041,200	23.08	Rp 66,877,044	100.00	Rp 137,504,244	100.00%	81.14%		Rp 252,904,748		15.27%	Inspektorat	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	25	Rp 1,381,348,000	4	Rp 109,994,104	9	Rp 137,429,800	Rp 116,936,200	4	Rp 32,328,000	1	Rp 27,258,000	2	Rp11,041,200.00	2	Rp63,729,944	9	Rp 134,357,144	100.00%	97.27%	13	Rp 190,351,448	52.00%	13.78%	Inspektorat	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	84,781,500	1	3,706,700	1	13,968,500	13,968,500	0	Rp. -	1	0	0	Rp0.00	0	Rp8,803,000	1	Rp 8,803,000	100.00%	63.02%	2	Rp 12,512,700	40.00%	14.76%	Inspektorat	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	82,936,500	1	6,189,800	1	13,742,500	13,742,500	0	Rp. -	0	0	1	Rp0.00	0	Rp0	1	Rp -	100.00%	0.00%	2	Rp 6,189,800	40.00%	7.44%	Inspektorat	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	51,568,000	1	Rp -	1	Rp -	Rp -	1	Rp -	0	0	0	Rp0.00	0	Rp0.00	1	Rp -	100.00%	0.00%	2	Rp -	40.00%	0.00%	Inspektorat	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	51,198,000	1	2,566,700	1	4,808,000	4,808,000	0	Rp. -	0	0	0	Rp0.00	1	Rp2,344,100	1	Rp 2,344,100	100.00%	48.75%	2	Rp 4,910,800	40.00%	9.59%	Inspektorat	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah tahun berjalan**	**Dokumen**	**100**	**Rp 85,547,811,900**	**100**	**Rp 14,986,859,161**	**100**	**Rp 19,106,507,500**	**Rp 19,101,105,903**	**5.41**	**Rp 1,034,329,393**	**5.41**	**Rp 6,016,455,968**	**5.41**	**Rp 4,101,101,507**	**83.78**	**Rp 5,168,615,129**	**100.00**	**Rp 17,302,664,575**	**100.00%**	**90.42%**		**Rp 32,358,727,330**		**93.87%**	**Inspektorat**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	420	83,600,713,900	86	14,852,192,666	86	19,484,358,930	Rp 18,788,180,403	0	Rp 1,845,134,930	0	Rp 5,948,990,948	0	Rp4,017,959,007.00	86	Rp5,126,178,130	86	Rp 16,979,236,875	100.00%	90.41%	172	Rp 31,830,417,341	40.19%	33.79%	Inspektorat	
Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	60	1,134,600,000	12	204,220,000	12	349,840,000	349,840,000	3	Rp. 50,350,000	3	Rp 49,950,000	3	Rp49,940,000.00	3	Rp65,950,000	12	Rp 216,990,000	100.00%	99.88%	24	Rp 443,210,000	40.00%	39.06%	Inspektorat	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	10,200,000	1	Rp -	1	1,803,000	1,803,000	0	Rp. 1,295,000	0.00	Rp 112,500	0	Rp0.00	1	Rp0	1	Rp - 387,500	100.00%	95.96%	2	Rp 1,807,500	40.00%	7.10%	Inspektorat	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	60	792,198,300	12	139,652,495	12	168,011,200	167,163,200	3	Rp. 51,790,000	3	Rp 3,912,500	3	Rp39,262,500.00	3	Rp47,095,000	12	Rp 144,160,000	100.00%	86.15%	24	Rp 283,752,495	40.00%	35.81%	Inspektorat	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah tahun berjalan**	**Dokumen**	**108**	**Rp 101,130,500**	**100**	**Rp 80,332,940**	**100**	**Rp 98,166,000**	**Rp 98,106,000**	**32.25**	**Rp -**	**21.25**	**Rp -**	**10.75**	**Rp -**	**10.75**	**Rp 60,000,000**	**100.00**	**Rp 60,000,000**	**100.00%**	**60.80%**		**Rp 140,332,940**		**38.02%**	**Inspektorat**	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	Rp 8,000,000	2	Rp 392,940	2	Rp 1,408,000	Rp 1,408,000	1	Rp -	1	0	0	Rp0.00	0	0	2	Rp -	100.00%	0.00%	4	Rp 392,940	40.00%	4.80%	Inspektorat	
Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	60	Rp 480,000,000	12	Rp 80,000,000	12	Rp 96,000,000	Rp 96,000,000	3	Rp -	3	0	3	Rp0.00	3	Rp60,000,000.0	12	Rp 60,000,000	100.00%	62.50%	24	Rp 140,000,000	40.00%	29.17%	Inspektorat	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	12	Rp 13,050,000	2	Rp -	2	Rp 1,176,000	Rp 1,176,000	1	Rp -	1	0	0	Rp0.00	0	0	2	Rp -	100.00%	0.00%	4	Rp -	40.00%	0.00%	Inspektorat	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Inspektorat Daerah dan PNS lingkup Pemerintah Kota Makassar**	**Persen**	**108**	**Rp 2,707,356,000**	**108**	**Rp 181,457,170**	**100**	**Rp 914,650,000**	**Rp 910,680,600**	**1.02**	**Rp 36,585,475**	**1.22**	**Rp 47,216,300**	**46.34**	**Rp 22,220,000**	**50.61**	**Rp 642,664,945**	**100.00**	**Rp 748,386,721**	**100.00%**	**82.14%**		**Rp 1,129,843,891**		**38.01%**	**Inspektorat**	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	625	Rp 534,750,000	79	Rp -	150	Rp 79,050,000	Rp 79,050,000	0	Rp -		0	113	Rp0.00	0	Rp75,850,000	150	Rp 75,850,000	100.00%	95.93%	154	Rp 75,850,000	30.40%	14.19%	Inspektorat	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	25	Rp 2,998,500,000	79	Rp 174,884,678	78	Rp 818,150,000	Rp 818,150,000	4	Rp 36,585,475	5	Rp 47,216,300	4	Rp22,220,000.00	67	Rp658,635,946	78	Rp 662,157,721	100.00%	80.93%	154	Rp 1,297,051,399	616.00%	84.58%	Inspektorat	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	83	Rp 264,100,500	6	Rp 16,563,492	58	Rp 13,830,000	Rp 13,690,000	0	Rp -	0	0	0	Rp0.00	58	Rp10,179,000	58	Rp 10,179,000	100.00%	74.89%	64	Rp 26,742,492	213.33%	10.13%	Inspektorat	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya dokumen administrasi umum perangkat daerah**	**Jenis**	**107**	**Rp**	**1.295.179.500**	**100**	**Rp**	**816.594.616**	**100**	**Rp**	**1.094.067.200**	**Rp**	**967.897.000**	**27.54**	**Rp**	**204.467.581**	**88.52**	**Rp**	**216.184.289**	**14.97**	**Rp**	**164.693.402**	**19.16**	**Rp**	**197.482.849**	**100.00**	**Rp**	**966.116.911**	**100.00%**	**89.30%**		**Rp**	**1.662.712.327**		**35.42%**	**Inspektorat**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	11	Rp	139.277.000	11	Rp	8.085.800	8	Rp	12.113.200	Rp	12.113.200	0	Rp	-	0		0	0	Rp0.00	8	Rp9.824.540	8	Rp	9.824.500	100.00%	81.12%	24	Rp	15.914.300	150.00%	11.10%	Inspektorat	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	75	Rp	767.422.400	5	Rp	111.293.800	45	Rp	123.671.200	Rp	114.972.200	0	Rp	-	45	Rp	0.874.000	0	Rp68.121.100.00	0	Rp28.693.000	45	Rp	76.688.100	100.00%	66.70%	48	Rp	107.972.000	64.00%	24.48%	Inspektorat	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	20	Rp	296.960.000	7	Rp	43.096.800	9	Rp	19.356.000	Rp	19.356.000	0	Rp	-	0		0	0	Rp0.00	9	Rp11.860.000	9	Rp	11.860.000	100.00%	61.27%	16	Rp	55.216.000	80.00%	18.61%	Inspektorat	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	30	Rp	327.000.000	6	Rp	52.932.200	16	Rp	3.680.000	Rp	3.680.000	3	Rp	514.000	9	Rp	614.000	9	Rp891.000.00	9	Rp 1.305.000	36	Rp	8.084.000	100.00%	84.28%	41	Rp	36.216.000	136.67%	11.08%	Inspektorat	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	90	Rp	238.320.000	12	Rp	7.302.800	12	Rp	23.985.600	Rp	16.285.600	1	Rp	-	2	Rp	134.000	6	Rp0.00	3	Rp10.200.000	12	Rp	10.574.000	100.00%	66.33%	24	Rp	17.876.000	26.67%	7.50%	Inspektorat	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	185	Rp	2.312.000.000	37	Rp	440.653.334	45	Rp	594.000.000	Rp	594.000.000	33	Rp	223.851.581	5	Rp	195.322.289	7	Rp219.071.302.00	0	Rp79.889.119	45	Rp	588.176.711	100.00%	99.02%	82	Rp	1.038.810.027	44.32%	44.90%	Inspektorat	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	Rp	1.233.200.000	2	Rp	174.957.200	12	Rp	257.600.000	Rp	187.600.000	3	Rp	-	3		0	3	Rp0.00	5	Rp148.911.000	12	Rp	146.913.500	100.00%	77.78%	14	Rp	530.868.000	280.00%	26.51%	Inspektorat	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya barang milik daerah**	**Jenis**	**103**	**Rp**	**2.320.692.500**	**100**	**Rp**	**430.446.242**	**100**	**Rp**	**311.699.600**	**Rp**	**311.699.900**	**0.00**	**Rp**	**-**	**86.29**	**Rp**	**247.300.300**	**7.14**	**Rp**	**38.500.000**	**3.57**	**Rp**	**-**	**100.00**	**Rp**	**305.900.300**	**100.00%**	**98.32%**		**Rp**	**756.343.242**		**32.78%**	**Inspektorat**	
Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel yang disediakan	Unit	215	Rp	801.700.000	20	Rp	159.246.942	0	Rp	-	Rp	-	0	Rp	-	0		0	0	**Rp0.00**	0		0	Rp	-	0.00%	0.00%	00	Rp	159.246.942	19.14%	19.86%	Inspektorat	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	81	Rp	1.518.992.500	40	Rp	271.198.300	28	Rp	311.599.900	Rp	311.599.900	0	Rp	-	25	Rp	247.300.300	2	**Rp68.900.000.00**	1		28	Rp	305.900.300	100.00%	98.32%	68	Rp	576.998.300	79.17%	37.99%	Inspektorat	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah tahun berjalan**	**Bulan**	**132**	**Rp**	**2.537.800.000**	**100**	**Rp**	**402.900.000**	**100**	**Rp**	**442.230.000**	**Rp**	**442.950.000**	**25.00**	**Rp**	**140.200.351**	**25.00**	**Rp**	**92.574.941**	**22.00**	**Rp63.978.745.00**	**25.00**		**Rp130.422.941.00**	**100.00**	**Rp**	**422.176.990**	**100.00%**	**95.61%**		**Rp**	**815.505.099**		**32.13%**	**Inspektorat**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	110	Rp	1.201.648.500	9	Rp	214.998.800	12	Rp	220.961.800	Rp	220.961.800	1	Rp	40.000.000	1	Rp	Rp10.500.000.00	1	Rp49.018.268	12	Rp	217.074.268	100.00%	97.17%	21	Rp	491.479.134	19.00%	39.91%	Inspektorat	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	60	Rp	1.336.212.000	12	Rp	188.531.143	12	Rp	218.568.000	Rp	218.568.800	8	Rp	45.644.361	3	Rp	51.974.041	3	Rp=3.478.745.00	3	Rp43.404.675	12	Rp	205.501.822	100.00%	94.02%	24	Rp	334.032.965	40.00%	26.49%	Inspektorat	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya barang milik daerah**	**Jenis**	**160**	**Rp**	**4.516.168.092**	**100**	**Rp**	**638.127.100**	**100**	**Rp**	**407.300.650**	**Rp**	**407.300.650**	**1.06**	**Rp**	**24.805.898**	**61.82**	**Rp**	**5.732.500**	**29.42**	**Rp81.410.190.00**	**1.70**		**Rp133.297.250.00**	**100.00**	**Rp**	**259.344.050**	**100.00%**	**63.65%**		**Rp**	**917.373.340**		**20.31%**	**Inspektorat**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	5	Rp	308.624.900	1	Rp	26.098.550	1	Rp	40.552.650	Rp	40.552.650	0	Rp	4.458.900	0	Rp	1.571.000	0	Rp11.758.650.00	0	Rp8.019.900	1	Rp	25.808.850	100.00%	63.64%	2	Rp	52.907.400	40.00%	24.88%	Inspektorat	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	165	Rp	2.442.652.900	33	Rp	314.871.370	32	Rp	204.134.000	Rp	204.134.000	8	Rp	20.346.750	8	Rp	5.651.500	8	Rp55.730.500.00	8	Rp52.317.350	32	Rp	132.146.100	100.00%	64.78%	93	Rp	447.117.670	39.39%	18.30%	Inspektorat	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	750	Rp	463.050.900	123	Rp	48.560.000	122	Rp	81.616.000	Rp	81.600.900	0	Rp	-	96	Rp	6.510.000	20	Rp29.930.000.00	0	Rp4.010.000	122	Rp	34.440.000	100.00%	42.20%	245	Rp	93.000.000	32.67%	17.92%	Inspektorat	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	60	Rp	1.401.849.342	12	Rp	268.697.370	8	Rp	81.200.000	Rp	81.000.000	0	Rp	-			0	3	Rp0.00	0	Rp44.750.000	8	Rp	66.750.000	100.00%	82.41%	15	Rp	195.347.370	25.00%	23.92%	Inspektorat	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)					**109.39**	**82.68**					**44.62**	**35.71**		
																					Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					**Sedang**	**Rendah**		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)**	**level**	**3**	**Rp**	**8.230.594.000**	**3**	**Rp**	**948.955.400**	**3**	**Rp**	**1.313.971.000**	**Rp**	**1.296.220.200**	**0**	**Rp**	**54.872.000**	**3**	**Rp**	**71.339.100**	**0**	**Rp330.807.500.00**	**0**	**Rp**	**473.161.954**	**3**	**Rp**	**832.340.454**	**100.00%**	**64.21%**	**3**	**Rp**	**1.702.295.954**	**75.00%**		**Inspektorat**	
	Persentase tindak lanjut temuan	%	79.00			61.96			68.6					0			0			0		60.77			60.77			97.31%		60.77			79.33333333			
	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100			100			100					25			25			25		100			100			100.00%		100.00%			100.00%			
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)**	**Level**	**3**	**Rp**	**6.479.100.000**	**3**	**Rp**	**793.103.784**	**3**	**Rp**	**1.188.750.000**	**Rp**	**1.170.997.200**	**0**	**Rp**	**50.344.500**	**0**	**Rp**	**70.200.500**	**0**	**Rp170.983.000.00**	**3**	**Rp469.960.954.00**	**3**	**Rp**	**769.438.954**	**100.00%**	**95.71%**		**Rp**	**1.562.940.738**			**Inspektorat**	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	Laporan	40	Rp	118.398.000	8	Rp	8.156.912	4	Rp	13.111.900	Rp	13.111.900	0	Rp	-	2		0	2	Rp10.440.000.00	0	Rp700.000	4	Rp	11.140.000	100.00%	84.82%	12	Rp	18.296.912	30.00%	15.35%	Inspektorat	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Laporan	440	Rp	1.116.633.300	75	Rp	198.897.716	69	Rp	391.981.000	Rp	391.681.000	19	Rp	5.014.000	31	Rp	1.876.500	25	Rp93.179.000.00	16	Rp71.478.000	91	Rp	170.140.500	100.00%	43.56%	156	Rp	368.488.216	37.73%	32.53%	Inspektorat	
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Laporan	1,000	Rp	492.116.000	210	Rp	55.754.895	213	Rp	80.516.500	Rp	80.516.500	2	Rp	-	1	Rp	1.134.000	154	Rp46.670.500.00	16	Rp4.380.000	213	Rp	51.984.500	100.00%	85.90%	423	Rp	107.889.395	40.67%	21.88%	Inspektorat	
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil laporan keuangan	Laporan	25	Rp	240.800.000	20	Rp	24.854.750	18	Rp	20.266.500	Rp	20.266.500	5	Rp	3.849.500	4	Rp	1.550.000	6	Rp12.276.000.00	4	Rp700.000	19	Rp	17.375.500	100.00%	85.74%	47	Rp	42.296.318	188.00%	17.54%	Inspektorat	
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang ditandatangani	Laporan	40	Rp	1.046.192.300	24	Rp	212.089.310	2	Rp	370.330.500	Rp	370.330.500	1	Rp	50.000.000	1	Rp	34.200.000	0	Rp881.000.00	0	Rp192.452.695	2	Rp	257.523.686	100.00%	64.14%	28	Rp	469.602.996	85.00%	35.09%	Inspektorat	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Laporan	60	Rp	1.417.162.900	12	Rp	283.789.592	6	Rp	330.020.000	Rp	315.267.200	1	Rp	31.500.000	3	Rp	31.500.000	2	Rp17.670.500.00	1	Rp200.206.295	6	Rp	280.982.766	100.00%	89.09%	18	Rp	564.672.360	30.00%	39.28%	Inspektorat	
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat**	**%**	**100.00**	**Rp**	**1.760.434.800**	**100**	**Rp**	**156.411.866**	**100**	**Rp**	**125.221.000**	**Rp**	**125.223.000**	**25.00**	**Rp**	**4.567.500**	**25.00**	**Rp**	**3.299.000**	**25.00**	**Rp51.894.000.00**	**15.00**		**Rp3.293.000.00**	**100.00**	**Rp**	**62.903.500**	**0.00%**	**50.25%**		**Rp**	**219.315.366**			**Inspektorat**	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	Laporan	30	Rp	1.329.099.900	6	Rp	96.990.200	6	Rp	93.764.000	Rp	93.768.000	0	Rp	-	1		0	7	Rp140.500.00	2	Rp1.033.000	10	Rp	1.166.500	166.67%	2.54%	19	Rp	97.756.700	180.00%	6.80%	Inspektorat	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	laporan	240	Rp	431.315.100	48	Rp	59.421.666	32	Rp	31.455.000	Rp	31.455.000	6	Rp	4.567.500	4	Rp	3.299.000	1	Rp1.540.500.00	24	Rp1.193.000	37	Rp	45.533.000	133.33%	86.12%	80	Rp	101.988.666	80.77%	80.33%	Inspektorat	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)					**125.52**	**63.74**					**72.77**	**32.47**		
																					Predikat kinerja					**Sangat Tinggi**	**Tinggi**								

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**	**Level**	**3**	**Rp**	**7,417,548,000**	**3**	**Rp**	**843,926,427**	**3**	**Rp**	**1,232,475,000**	**Rp**	**667,141,000**	**0**	**Rp**	**1,122,000**	**0**	**Rp**	**38,057,020**	**0**	**Rp66,353,716.00**	**3**	**Rp339,674,941.00**	**3**	**Rp**	**446,807,677**	**100.00%**	**66.97%**	**300.00%**	**Rp**	**1,290,754,104**			**Inspektorat**	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**	**Level**	**3**	**Rp**	**2,198,873,000**	**3**	**Rp**	**260,976,740**	**3**	**Rp**	**305,900,000**	**Rp**	**333,090,000**	**0**	**Rp**	**-**	**0**	**Rp**	**31,865,020**	**0**	**Rp40,309,940.00**	**3**	**Rp165,468,168.00**	**3**	**Rp**	**237,643,120**	**100.00%**	**71.35%**		**Rp**	**438,609,840**			**Inspektorat**	
Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis dibidang pengawasan yang disusun	Dokumen	280	Rp	1,875,186,000	56	Rp	155,112,055	5	Rp	226,209,000	Rp	199,289,100	0	Rp	-	3	Rp	Rp31,865,020.00	1	Rp92,791,440.00	1	Rp62,130,150	5	Rp	176,186,620	100.00%	63.97%	61	Rp	285,986,675	21.79%	15.03%	Inspektorat	
Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan yang disusun	Dokumen	1	Rp	715,686,000	1	Rp	45,864,685	1	Rp	158,801,000	Rp	133,801,000	0	Rp	-	3	Rp	Rp0.00	0	Rp8,018,500.00	0	Rp103,338,000	3	Rp	111,156,500	100.00%	83.23%	4	Rp	157,021,185	80.00%	21.57%	Inspektorat	
Pendampingan dan Asistensi	**Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**	**Level**	**3**	**Rp**	**4,826,673,000**	**3**	**Rp**	**642,949,687**	**3**	**Rp**	**847,329,000**	**Rp**	**334,052,000**	**0**	**Rp**	**1,122,000**	**0**	**Rp**	**6,792,000**	**0**	**Rp46,043,776.00**	**3**	**Rp155,206,781.00**	**3**	**Rp**	**209,164,357**	**100.00%**	**62.65%**		**Rp**	**852,114,244**			**Inspektorat**	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah para sigat daerah yang diakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Laporan	70	Rp	182,950,000	76	Rp	18,102,347	40	Rp	37,705,000	Rp	37,705,000	6	Rp	1,122,000	13	Rp	Rp1,122,000	15	Rp4,372,500.00	9	Rp7,558,000	46	Rp	14,184,500	115.00%	37.58%	122	Rp	32,286,847	174.29%	17.65%	Inspektorat	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah para sigat daerah yang diakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Laporan	260	Rp	469,753,000	73	Rp	33,816,220	36	Rp	134,306,000	Rp	136,308,000	0	Rp	-	0	Rp	Rp0.00	34	Rp0.00	1	Rp91,334,882	36	Rp	91,334,882	100.00%	67.01%	108	Rp	125,151,102	41.92%	26.64%	Inspektorat	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Laporan	105	Rp	3,376,540,000	18	Rp	591,031,120	8	Rp	591,662,000	Rp	159,962,000	0	Rp	-	5	Rp	Rp5,670,000	3	Rp41,671,275.00	0	Rp56,303,899	8	Rp	103,645,175	100.00%	64.79%	39	Rp	694,676,295	34.76%	29.57%	Inspektorat	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah para sigat daerah yang diakukan pendampingan asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Laporan	15	Rp	797,452,000	0	Rp	-	0	Rp	53,576,000	Rp	-	0	Rp	-		Rp	Rp0.00	0	Rp0.00	0	Rp0	0	Rp	-	0.00%	0.00%	0	Rp	-	0.00%	0.00%	Inspektorat	
																								Rata-rata capaian kinerja (%)				**81.83**	**53.66**			**57.13**	**16.97**		
																								Predikat kinerja				**T inggi**	**Sedang**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							**Rp**	**10,839,730,798**	**Rp**	**14,481,748,413**		**Rp**	**2,469,300,400**		**Rp**	**4,799,207,500**		**Rp**	**4,799,489,720**		**Rp**	**7,300,144,045**		**Rp**	**21,421,272,622**					**87.60%**						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												**91.19**	**87.60**						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												**Sangat T inggi**	**Tinggi**						

PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



RENCANA KERJA

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dipandang perlu untuk diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, dengan menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana di maksud Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan.:
1. Wakil Wali Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
7.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
9.	Dinas Sosial Kota Makassar
10.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
12.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
13.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Makassar
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
22.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
23.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
24.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
25.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
26.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
27.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
28.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
29.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar

31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
32.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
34.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
35.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
36.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
37.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
38.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
39.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
40.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
43.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
44.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
45.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
46.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
47.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
58.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
49.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
50.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar
51.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

WALIKOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini kami awali dengan ungkapan Syukur kehadirat Allah SWT dengan harapan agar kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar dapat tercapai dengan baik sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2025 merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Makassar. Rencana kerja perangkat daerah merupakan turunan dari dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, dan RPJMD Kota Makassartahun 2021-2026.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.

Makassar, 12 Agustus 2025
KEPALA BADAN,

KAMELIA THAMRIN TANTU, SE, M.Si
Pangkat: Pembina Tk.I
Nip : 197207211998032005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Landasan Hukum 5

1.3. Maksud dan Tujuan 8

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II EV ALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 11

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan OPD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 11

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 27

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 28

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025 30

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 41

BAB IV PENUTUP i

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra E.81 15

Tabel 2.2 IKU 2025 28

Tabel 2.3 T-C.30 29

Tabel 2.4 T-C.31 32

Tabel 3.1 Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan Renja Perubahan BKPSDMD Kota Makassar 43

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan Perubahan OPD merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama periode 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Makassar sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kota Makassar dan terjabar ke dalam Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perubahan Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja danpendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Keterkaitan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar dengan RKPD adalah Rencana Kerja BKPSDMD Kota Makassar harus mendukung dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Makassar Tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar.

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Renja Perubahan BKPSDMD Kota Makassar mengacu pada kerangka yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh Karena itu penyusunan Renja Perubahan BKPSDMD Kota Makassar dapat dikerjakan secara berkelanjutan dengan penyusunan RKPD Kota Makassar, dengan melakukan kajian terlebih dahulu terhadap Kondisi BKPSDMD Kota

Makassarsar, Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan tahun sebelumnya dan Evaluasi Renja Perubahan terhadap pencapaian Renstra BKPSDMD Kota Makassar.Komponen yang paling penting dalam penyusunan Renja Perubahan ialah adanya indicator kinerja yang memilikii target disetiap triwulan baik itu target kualitatif ataupun targent kuantitatif. Pencapaian indicator kinerja yang nantinya akan menjadi keseluruhan pencapaian dari BKPSDMD Kota Makassar. Renja Perubahan PD memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, tahapan penyusunan Renja Perubahan PDadalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja Perubahan PD
2. Penyusnan Rancangan Awal Renja Perubahan PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja Perubahan PD tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan Renja Perubahan PD berdasarkan surat edaran Kepala Dearah tentang penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD.
4. Pembahasan rancangan Renja Perubahan PD dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.

Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2024 disusun dengan sistematika seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-DaerahTingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 20219 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.53406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangka Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
19. Peraturan Walikota Makassar Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
20. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 26);
21. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Perubahan BKPSDMD Kota Makassar Tahun 2025 ini adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kota Makassar ditahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

1.3.2. Tujuan antara lain :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perubahan dan Anggaran BKPSDMD Kota Makassar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra BKPSDMDKota Makassar;
2. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di Tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan laporan kinerja;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang, bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah, ketertaitan antara Renja Perubahan Perangkat Daerah

dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perubahan Kota serta tindak lanjutnya dengan proses RAPBD.

1.2. Landasan Hukum, bagian ini memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan panganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan, bagian ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan, bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, bagian ini menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun *n-2*) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun *n-1*).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, bagian ini berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, bagian ini

menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Pemerintah Kota Makassar yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari temuan hasil pemantauan dilapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kota.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDMD Kota Makassar

3.1 Program dan Kegiatan, bagian ini berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rakapitulasi program dan kegiatan.

3.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program Dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan OPD Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 memuat analisis terhadap pelaksanaan Renja Perubahan dan perkiraan capaian kinerja tahun 2025 untuk mengidentifikasi pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. BKPSDMD Kota Makassar pada Tahun 2025 mengelola belanja daerah berdasarkan DPA Pokok 2025 sebesar **Rp. 30.704.884.842,-.** Dan mengalami efisiensi anggaran yang termuat dalam DPA Parsial I BKPSDMD Kota Makassar dengan sisa anggaran **28.050.644.842,-** Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan, dan 42 (empat puluh dua) Sub Kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (tiga) indikator antara lain :

- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik.
- Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja PerangkatDaerah.
- Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas.

Dengan target kinerja 100% dan didukung dengan alokasi dana sebesar Rp. 16.211.304.902,-. Adapun rata-rata capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 29,47% dengan capaian anggaran sebesar Rp. 3.030.076.538,-. atau 18,7 %.

Faktor pendorong/pendukung pencapaian kinerja yaitu :

1. Pelaksanaan rapat internal di lingkup BKPSDMD Kota Makassar
2. Tersedianya sarana dan prasarana dengan baik.
3. Monev berkala yang dilakukan oleh pimpinan

Faktor penghambat pencapaian kinerja yaitu :

1. Adanya rasionalisasi di beberapa sub kegiatan sehingga realisasi kinerja tidak maksimal

Tindak Lanjut :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan target yang belum tercapai pada tahun berikutnya.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 7 Kegiatan, diantaranya :

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** yang mempunyai indikator kinerja yaitu jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun. Dengan target kinerja 100% dan didukung anggaran sebesar Rp. 104.468.400,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 26,31% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,-. atau 0%. Adapun faktor pendorong adalah ketersediaan anggaran yang memadai dan adanya program rutin yang terlaksana setiap bulannya. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini memiliki 7 sub kegiatan, sebagai berikut:
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 3 dokumen didukung anggaran sebesar Rp. 29.048.200,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 33,33% atau sebanyak 1 dokumen dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,-. atau 0%.
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target 1 dokumen didukung anggaran sebesar Rp. 10.230.600,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 100% atau sebanyak 1 dokumen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan target 1 dokumen didukung anggaran sebesar Rp. 9.362.600,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 0% atau sebanyak 0 dokumen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan dengan target 1 dokumen didukung anggaran sebesar Rp. 8.777.000,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 100% atau sebanyak 1 dokumen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan target 1 dokumen didukung anggaran sebesar Rp. 9.250.000,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 0% atau sebanyak 0 dokumen dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0,-. atau 0%.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 5 laporan didukung anggaran sebesar Rp. 27.540.000,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 20% atau sebanyak 1 laporan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 7 laporan didukung anggaran sebesar Rp. 10.260.000,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 14,28% atau sebanyak 1 laporan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.

2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** yang mempunyai Indikator kinerja yaitu jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun, dengan target kinerja 100% didukung anggaran sebesar Rp. 13.673.644.162,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 28,20% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.704.064.303,-. atau sebesar 19,78%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan yang berarti, karena kegiatan ini berisi pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta pembayaran pengelolah keuangan. Rencana tindak lanjut dengan mempercepat serta meneliti dokumen-dokumen pengajuan pencairan. Kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan:

   1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan target 14 bulan didukung anggaran sebesar Rp. 13.233.739.162,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 35,71% atau sebanyak 5 bulan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.603.304.303,-. atau 19,67%.
   2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN dengan target 18 dokumen didukung dengan anggaran sebesar Rp. 286.440.000,-. Adapun capaian target sampai dengan Triwulan I sebesar 22,22% atau 4 dokumen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 69.260.000,-. atau 24,17%.
   3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target 7 dokumen didukung anggaran sebesar Rp.

153.465.000,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 28,57% atau 2 dokumen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.500.000,-. atau 20,52%.

3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** mempunyai indikator yaitu Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan, dengan target kinerja 100% didukung anggaran sebesar Rp. 224.290.000,-. Adapun capaian kinerja sampai Triwulan I sebesar 67,71% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.710.000,-. atau sebesar 9,23%. Adapun faktor pendorong adalah ketersediaan anggaran yang memadai dan adanya program rutin yang terlaksana setiap bulannya, dan faktor penghambat adalah tahapan telah dalam proses pelaksanaan dalam tahapan pemilihan rekanan, rencana tindak lanjut yaitu mempercepat perikatan kontrak rekanan, serta menyiapkan pendukung dokumen pencairan.
   1. Pemulangan Pegawai yang Pensiun dengan Target 400 orang didukung anggaran sebesar Rp. 32.420.000,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 56,75% atau 227 orang dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.
   2. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas dengan target 15 laporan didukung anggaran sebesar Rp. 191.870.000,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 26,67% atau 4 laporan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.710.000,-. atau 10,79%.

4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah** mempunyai Indikator kinerja kegiatan jumlah jasa administrasi umum yang tersedia dengan target kinerja 100% atau 6 jenis dengan didukung anggaran sebesar Rp. 423.547.700,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 15,85% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 720.000,-. atau 0,16%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak memiliki hambatan berarti, dikarenakan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki sub kegiatan yang termasuk kegiatan rutinitas BKPSDMD sehingga target kinerja dan realisasi anggaran dapat tercapai. Kegiatan ini memiliki 6 (enam) sub kegiatan:

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 12 paket didukung anggaran sebesar Rp. 45.453.400,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 25% atau 3 paket dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan target 12 paket, didukung anggaran sebesar Rp. 62.791.500,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 25% atau 3 Paket dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan target 18 dokumen didukung anggaran sebesar Rp. 17.280.000,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 22,22% atau 4 dokumen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 720.000,-. atau 4,16%.
4. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target 12 laporan didukung anggaran sebesar Rp. 20.022.800,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 25% atau 3 Laporan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.
5. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 28 laporan didukung anggaran sebesar Rp. 278.000.000,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 0% atau 0 laporan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.

5. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** mempunyai Indikator kinerja yaitu Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan dengan target kinerja 100% didukung anggaran sebesar Rp. 1.447.144.640,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 25% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 304.582.235,-. atau sebesar 21,04%. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 12 laporan didkung anggaran sebesar Rp. 1.198.952.000,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 25% atau 3 laporan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 267.000.000,-. atau 22,27%.
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target 12 laporan didukung anggaran sebesar Rp.

248.192.640,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 25% atau 3 laporan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 37.582.235,-. atau 15,14%.

6. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** mempunyai indikator kinerja yaitu jumlah barang milik daerah yang dipelihara, dengan target kinerja 100% dengan didukung anggaran sebesar Rp. 338.210.000,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 25% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%. Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) sub kegiatan:
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target 6 unit didukung anggaran sebesar Rp. 44.380.000,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 100% atau 6 unit dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.
   2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target 15 unit didukung anggaran sebesar Rp. 269.250.000,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 100% atau 15 unit dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0 %.
   3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target 12 unit didukung anggaran sebesar Rp. 24.580.000,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 100% atau 12 unit dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.

2. Program Kepegawaian Daerah

Indikator kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ditentukan oleh 3 (tiga) indikator kinerja antara lain :

- Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), dengan target 64,69%. Adapun realisasi kinerja pada Tahun 2025 sebesar 79,43%.
- Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), dengan target 8,24 %. Adapun realisasi kinerja pada Tahun 2025 sebesar 73,29%.
- Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS Tidak

Termasul Guru Dan Tenaga Kesehatan), target 8,24 %. Adapun realisasi kinerja pada Tahun 2025 sebesar 26,06%.

Didukung anggaran sebesar Rp. 3.180.526.760,-. adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 39.000.000,-. atau sebesar 1,22%.

Faktor pendorong/pendukung pencapaian kinerja yaitu :

1. Pelaksanaan rapat internal di lingkup BKPSDMD Kota Makassar
2. Tersedianya sarana dan prasarana dengan baik.
3. Monev berkala yang dilakukan oleh pimpinan

Faktor penghambat pencapaian kinerja yaitu :

1. Adanya rasionalisasi di beberapa sub kegiatan sehingga realisasi kinerja tidak maksimal.
2. Dinamisasi peraturan kepegawaian

Tindak Lanjut :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan target yang belum tercapai pada tahun berikutnya.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi Kementerian dan Lembaga terkait peraturan kepegawaian.

Program Kepegawaian Daerah ini memiliki 4 (empat) kegiatan, yaitu:

1. **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** yang mempunyai Indikator kinerja yaitu Jumlah pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yang dikelola, target kinerja 100% didukung anggaran sebesar Rp. 1.711.757.600,-. Adapun realisasi kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 0% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%. Kegiatan ini memiliki 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:
   1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN dengan target 778 dokumen didukung anggaran sebesar Rp. 407.147.000,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 0% atau 0 dokumen realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.
   2. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN dengan target 500 lembaga didukung anggaran sebesar Rp. 180.958.600,-. Adapun capaian

kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 0% atau 0 lembaga dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.

3. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan target 6 dokumen didukung anggaran sebesar Rp. 992.000.000,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 0% atau 0 dokumen dengan realisasi keuangan sebesar 0,-. atau 0%.
4. Pengelolaan Data Kepegawaian dengan target 100 dokumen didukung anggaran sebesar Rp. 72.770.000,-. Adapun capaian kinerja sebesar 0% atau 0 dokumen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0 %
5. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian dengan target 90 laporan didukung anggaran sebesar Rp. 58.882.000,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 0% atau 0 laporan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0 %.

2. **Mutasi dan Promosi ASN** yang mempunyai Indikator kinerja yaitu jumlah mutasi dan promosi ASN, target kinerja 100% dengan didukung anggaran sebesar Rp. 245.459.400,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 15,34% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
   1. Pengelolaan Mutasi ASN dengan target 1250 dokumen didukung anggaran sebesar Rp. 134.976.400,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 5,36% atau 67 dokumen dengan realisasi keuangan sebesar 0,-. atau 0%.
   2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan target 3500 dokumen didukung anggaran sebesar Rp. 110.483.000,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 18,91% atau 622 dokumen dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,-. atau 0 %.

3. **Pengembangan Kompetensi ASN** yang mempunyai indikator kinerja yaitu jumlah pengembangan kompetensi ASN yang dikelola, dengan target kinerja 100% didukung anggaran sebesar Rp. 489.227.000,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 20%

dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.000,-. atau sebesar 4,08%. Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN dengan target 1 dokumen didukung anggaran sebesar Rp. 64.227.000,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 0% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.
2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan target 3 orang didukung anggaran sebesar Rp. 380.000.000,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 33,33% atau 1 orang dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.000,-. atau 5,26%.
3. Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional dengan target didukung anggaran sebesar Rp. 45.000.000,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 0% atau 0 orang dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0 %.

4. **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** yang mempunyai indikator yaitu indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan Kepegawaian, target kinerja 100% didukung anggaran sebesar Rp. 734.082.760,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 2,29% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.000.000,-. atau sebesar 5,02%. Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
   1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan 12 dokumen didukung anggaran sebesar Rp. 378.309.800,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 25% atau 3 dokumen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau 0%.
   2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai dengan target 500 ASN didukung anggaran sebesar Rp. 198.972.000,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 0% atau 0 ASN dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.
   3. Pembinaan Disiplin ASN dengan target 11.019 orang didukung anggaran sebesar Rp. 156.800.960,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 33,33% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.000.000,-. Atau 12,11%.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

ditentukan oleh 3 (tiga) indikator kinerja antara lain :

1. Rata – rata lama pegawai mendapat pendidikan dan pelatihan dengan target 20 JP. Adapun realisasi kinerja pada Tahun 2025 sebesar 100%.
2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dengan target 3,55%. Adapun realisasi kinerja pada Tahun 2025 sebesar 9,05%.
3. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, dengan target 97%. Adapun realisasi kinerja pada Tahun 2025 sebesar 128%.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mempunyai 1 Kegiatan Sebagai berikut:

1. **Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional** target kinerja 100% dengan didukung anggaran sebesar Rp. 8.658.813.180,-. Adapun realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 2.219.700.000,-. atau sebesar 25,63%.

Faktor pendorong/pendukung pencapaian kinerja yaitu :

1. Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam peningkatan kapasitas SDM.
2. Koordinasi hubungan kerja yang sinergis antar Bidang.
3. Pengelolaan administrasi yang berbasis Teknologi Informasi.
4. Sumber Daya Manusia yang memadai.
5. Persentase capaian kinerja mengalami kenaikan drastis disebabkan karena perbandingan antara target yang ditetapkan pada renstra, belum mengantisipasi adanya penyetaraan sesuai arahan KEMENPANRB dan sehingga menyebabkan realisasi yang berlipat ganda.

Kegiatan ini mempunyai 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan derah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, dan prajabatan dengan target kinerja 5 laporan didukung anggaran sebesar Rp. 3.818.547.780,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 40% atau 2 laporan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau sebesar 0 %.

2. Pembinaan, pengordinasian, fasilitasi, pementauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksaan sertifikasi pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi pengelolaan sumber belajar, dan kerja sama, serta pengembangan kompetensi pimpinan derah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan dengan target 4 dokumen didukung anggaran sebesar Rp. 4.840.265.400,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 25% atau 1 dokumen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.219.700.000,-. atau 45,85%.

Tabel E.81

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II		III		IV											
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2					3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				28.050.644.842,0	28.050.644.842,0		5.288.776.538,0		6.589.799.547,0		0,0		0,0		11.878.576.085,0		42,35		11.878.576.085,0		10,62		
	5	03				KEPEGAWAIAN				19.391.831.662,0	19.391.831.662,0		3.069.076.538,0		4.136.738.547,0		0,0		0,0		7.205.816.085,0		37,16		7.205.816.085,0		9,21		
	5	03				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah				19.391.831.662,0	19.391.831.662,0		3.069.076.538,0		4.136.738.547,0		0,0		0,0		7.205.816.085,0		37,16		7.205.816.085,0		9,21		
	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90,0	16.211.304.902,0	16.211.304.902,0	25,0	3.098.076.538,0	25,0	3.817.148.547,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	6.847.226.085,0	55,56	42,24	50,0	6.847.226.085,0	55,56	11,23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
							Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90,0			36,0		34,60		0,0		0,0		70,60		78,44		70,60		78,44				
							Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0			27,0		21,20		0,0		0,0		48,20		48,20		48,20		48,20				
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dinilai	dokumen	19,0	104.468.400,0	104.468.400,0	5,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	47,37		9,0	0,0	47,37			
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanain Perangkat Daerah	Dokumen	3,0	29.048.200,0	29.048.200,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	66,67		2,0	0,0	0,0			
	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,0	10.230.600,0	10.230.600,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	100,0		1,0	0,0	0,0			
	5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,0	9.362.600,0	9.362.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,0	8.777.000,0	8.777.000,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	100,0		1,0	0,0	0,0			
	5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,0	9.250.000,0	9.250.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,0	27.540.000,0	27.540.000,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	40,0		2,0	0,0	0,0			
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7,0	10.260.000,0	10.260.000,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	28,57		2,0	0,0	0,0			

	5	03	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang disediakan**	**Jenis**	**2,0**	**1.447.144.640,0**	**1.447.144.640,0**	**0,50**	**304.582.235,0**	**0,50**	**353.333.748,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**657.915.983,0**	**50,0**	**45,46**	**1,0**	**657.915.983,0**	**50,0**	**12,23**		
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,0	1.198.952.000,0	1.198.952.000,0	3,0	267.000.000,0	3,0	317.385.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	584.385.600,0	50,0	48,74	6,0	584.385.600,0	0,0	12,72		
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,0	248.192.640,0	248.192.640,0	3,0	37.582.235,0	3,0	95.948.348,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	73.530.383,0	50,0	29,63	6,0	73.530.383,0	0,0	9,36		
	5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**Jenis**	**4,0**	**338.210.000,0**	**338.210.000,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**72.579.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**72.579.200,0**	**50,0**	**21,46**	**2,0**	**72.579.200,0**	**50,0**	**3,82**		
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6,0	44.380.000,0	44.380.000,0	0,0	0,0	6,0	9.769.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	9.769.200,0	100,0	22,01	6,0	9.769.200,0	0,0	6,92		
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15,0	269.250.000,0	269.250.000,0	0,0	0,0	15,0	62.810.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	62.810.000,0	100,0	23,33	15,0	62.810.000,0	0,0	7,79		
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12,0	24.580.000,0	24.580.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
	5	**03**	**01**			**RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)**																**60,73**	**46,99**			**60,73**	**12,45**		
	5	**03**	**01**			**PREDIKAT KINERJA**																**RENDAH**	**SANGAT RENDAH**			**RENDAH**	**SANGAT RENDAH**		
	5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi Dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)**	**%**	**64,48**	**3.180.526.760,0**	**3.180.526.760,0**	**79,85**	**36.000.000,0**	**0,0**	**319.590.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**79,85**	**358.590.000,0**	**123,84**	**11,27**	**79,85**	**358.590.000,0**	**126,36**	**2,08**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	
							Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	**%**	**8,56**			**18,17**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**18,17**		**212,27**		**18,17**		**200,11**			
							Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	**%**	**8,56**			**61,05**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**61,05**		**713,20**		**61,05**		**672,36**			
	5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang dikelola**	**Jenis**	**5,0**	**1.711.757.600,0**	**1.711.757.600,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**297.990.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**297.990.000,0**	**60,0**	**17,41**	**3,0**	**297.990.000,0**	**60,0**	**3,33**		
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	2,0	407.147.000,0	407.147.000,0	0,0	0,0	2,0	111.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	111.500.000,0	100,0	27,39	2,0	111.500.000,0	0,0	4,76		
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	2,0	180.958.600,0	180.958.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	6,0	992.000.000,0	992.000.000,0	0,0	0,0	2,0	186.490.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	186.490.000,0	33,33	18,80	2,0	186.490.000,0	0,0	4,57		
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	3,0	72.770.000,0	72.770.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
	5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	3,0	58.882.000,0	58.882.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		

	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	dokumen	14,0	13.673.644.162,0	13.673.644.162,0	1,0	2.704.604.555,0	1,0	3.369.777.304,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.074.042.687,0	42,85	43,92	6,0	6.074.042.687,0	42,85	14,85		
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	14,0	13.239.750.162,0	13.239.750.162,0	4,0	2.603.304.359,0	4,0	3.200.147.704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.803.452.007,0	57,14	46,85	8,0	5.803.452.007,0	0,0	34,16		
	5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	18,0	286.445.000,0	286.445.000,0	4,0	60.265.000,0	4,0	69.190.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129.390.000,0	44,44	48,31	8,0	129.390.000,0	0,0	12,23		
	5	03	01	2.02	0009	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	7,0	153.485.000,0	153.485.000,0	2,0	31.300.000,0	2,0	31.305.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63.000.000,0	57,14	41,05	4,0	63.000.000,0	0,0	10,25		
	5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan**	**Jenis**	**3,0**	**224.260.000,0**	**224.260.000,0**	**1,0**	**20.710.000,0**	**2,0**	**7.531.500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**28.241.500,0**	**100,0**	**12,59**	**3,0**	**28.241.500,0**	**100,0**	**1,38**		
	5	03	01	2.05	0002	Pengelolaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	118,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
	5	03	01	2.05	0005	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	400,0	32.420.000,0	32.420.000,0	277,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	369,0	0,0	92,25		369,0	0,0	0,0		
	5	03	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	15,0	101.870.000,0	101.870.000,0	4,0	20.730.000,0	3,0	7.511.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	28.241.500,0	46,67	14,72	7,0	28.241.500,0	0,0	1,68		
	5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jasa Administrasi Umum yang Tersedia**	**Jenis**	**8,0**	**423.547.705,0**	**423.547.705,0**	**1,0**	**720.000,0**	**2,0**	**82.927.305,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**83.647.305,0**	**50,0**	**19,75**	**5,0**	**83.647.305,0**	**99,0**	**2,78**		
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	300,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,0	45.458.400,0	45.458.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0		6,0	0,0	0,0		
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,0	62.791.500,0	62.791.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0		6,0	0,0	0,0		
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	18,0	17.280.000,0	17.280.000,0	4,0	720.000,0	3,0	1.845.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	4.065.000,0	38,89	23,52	7,0	4.065.000,0	0,0	1,29		
	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12,0	20.022.800,0	20.022.800,0	1,0	0,0	3,0	9.329.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	9.329.000,0	50,0	46,59	4,0	9.329.000,0	0,0	10,95		
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	28,0	278.000.000,0	278.000.000,0	0,0	0,0	15,0	70.253.395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	70.253.395,0	53,57	25,27	15,0	70.253.395,0	0,0	3,20		
	5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang disalurkan**	**unit**	**8,0**	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**			
	5	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
	5	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			

	5	03	02	2.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah Mutasi dan Promosi ASN**	**ASN**	**4.750,0**	**265.459.400,0**	**265.459.400,0**	**725,0**	**0,0**	**780,0**	**1.600.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.509,0**	**1.600.000,0**	**31,77**	**0,65**	**1.509,0**	**1.600.000,0**	**31,77**	**0,11**		
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	1.250,0	134.976.400,0	134.976.400,0	67,0	0,0	40,0	1.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,0	1.600.000,0	8,56	1,33	107,0	1.600.000,0	0,0	0,19		
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	3.500,0	110.483.000,0	110.483.000,0	662,0	0,0	740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.402,0	0,0	40,06		1.402,0	0,0	0,0				
	5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN yang dikelola**	**Jenis**	**3,0**	**489.227.000,0**	**489.227.000,0**	**1,0**	**20.000.000,0**	**1,0**	**20.000.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**40.000.000,0**	**66,67**	**8,18**	**2,0**	**40.000.000,0**	**100,0**	**1,17**		
	5	03	02	2.03	0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	1,0	64.227.000,0	64.227.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0				
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	3,0	380.000.000,0	380.000.000,0	1,0	20.000.000,0	1,0	20.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	40.000.000,0	66,67	10,53	2,0	40.000.000,0	0,0	1,74		
	5	03	02	2.03	0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	1,0	45.000.000,0	45.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0				
	5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang dikelola**	**Jenis**	**3,0**	**734.082.760,0**	**734.082.760,0**	**1,0**	**19.000.000,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**19.000.000,0**	**66,67**	**2,59**	**2,0**	**19.000.000,0**	**0,0**	**0,55**		
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	12,0	378.309.800,0	378.309.800,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	50,0		6,0	0,0	0,0				
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	500,0	198.972.000,0	198.972.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0				
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	12,0	156.800.960,0	156.800.960,0	4,0	19.000.000,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	19.000.000,0	58,33	12,12	7,0	19.000.000,0	0,0	3,34		
	5	03	02			**RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)**																**349,77**	**12,21**			**332,27**	**2,09**		
	5	03	02			**PREDIKAT KINERJA**																**SANGAT TINGGI**	**SANGAT RENDAH**			**SANGAT TINGGI**	**SANGAT RENDAH**		

RENJA PERUBAHAN PERUBAHAN

	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				8.658.813.180,0	8.658.813.180,0		2.219.700.000,0		2.453.060.000,0		0,0		0,0		4.672.760.000,0		53,97		4.672.760.000,0		13,89			
	5	04				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah				8.658.813.180,0	8.658.813.180,0		2.219.700.000,0		2.453.060.000,0		0,0		0,0		4.672.760.000,0		53,97		4.672.760.000,0		13,89			
	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan	Jam Pelajaran	20,0	8.658.813.180,0	8.658.813.180,0	20,0	2.219.700.000,0	0,0	2.453.060.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	4.672.760.000,0	100,0	53,97	68,0	4.672.760.000,0	100,0	13,89	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
							Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	%	4,24			11,0		0,0		0,0		0,0		11,0		259,43		11,0		220,0				
							Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	%	100,0			82,0		0,0		0,0		0,0		82,0		82,0		82,0		82,0				
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dikelola	Jenis	2,0	8.658.813.180,0	8.658.813.180,0	1,0	2.219.700.000,0	1,0	2.453.060.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	4.672.760.000,0	100,0	53,97	2,0	4.672.760.000,0	100,0	13,89		
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	5,0	3.818.547.780,0	3.818.547.780,0	2,0	0,0	2,0	2.009.060.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	2.009.060.000,0	80,0	52,46	4,0	2.009.060.000,0	0,0	9,37		
	5	04	02	2.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	4,0	4.840.265.400,0	4.840.265.400,0	1,0	2.219.700.000,0	1,0	690.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2.668.700.000,0	50,0	55,16	2,0	2.669.700.000,0	0,0	21,75		
	5	04	02			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																147,14	80,91			134,0	15,67			
	5	04	02			PREDIKAT KINERJA																SANGAT TINGGI	RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			
						RATA-RATA CAPAIAN KINERJA OPD (%)																93,95	42,35							
						PREDIKAT KINERJA OPD																SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI							

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama. Adapun analisis pencapian kinerja pelayanan BKPSDMD Kota Makassar adalah sesuai dengan tabel berikut :

Table 2.2
Pencapaian IKU Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan keterampilan profesional berdasarkan tugas dan fungsinya. (Program Kepegawaian Daerah)	Persentase jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional untuk peningkatan pengetahuan	%	21,17%		
2.	Terwujudnya pengembangan ASN sesuai kompetensi. (Program Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi seusai dengan jabatan	%	89,47 %		

Table T-C. 30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-		64,92	64,69	64,48	64,21	79,43		92	93
2.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-		7,64	8,24	8,56	9,08	26,06		27	28
3.	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan tenaga kesehatan)	-		7,64	8,24	8,56	9,08	73,29		76	77
4.	Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	-		20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	48 JP		20 JP	20 JP
5.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	-		2,86	3,55	4,24	5,00	11,20		14,5	14,6
6.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	-		94	97	100	100	128,28		97	97

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, telaah visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra Kementerian / Lembaga

dan Provinsi, maka dapat ditentukan beberapa isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar yaitu :

2.1. Implementasi sistem merit dalam manajemen ASN diharapkan akan menjawab seluruh permasalahan seputar aspek pengelolaan kepegawaian.

2.2. Belum maksimalnya penginputan data pribadi ASN pada aplikasi myASN sehingga mempengaruhi penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

2.3. *Formasi jabatan assessor sudah terdapat dalam Analis Jabatan* BKPSDMD Kota Makassar namun belum ada pegawai yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan assessor kepegawaian.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelengggarakan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2025 adalah masalah eksternal karena sebagian besar outcomes akhir produk kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar ada pada pihak ketiga, diantaranya yaitu Badan Kepegawaian Negara (pusat dan regional), Kementerian PAN dan RB, dan Sekretaris Negara. Permasalahan dan hambatan lain adalah masalah internal yang berupa nilai individu, kultur individu, responsibilitas individu terhadap masalah, hubungan antar pribadi dengan unit pemangku kepentingan dan/atau antar pemangku kepentingan.

Tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Makassar Tahun 2025 mengangkat tema **"Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan".**

Sekaitan dengan Visi tersebut, ditetapkan 7 (Tujuh) misi sebagai rujukan pencapaian Visi dimaksud, yang nantinya dikolaborasi oleh OPD. Tujuh misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau;
2. Meningkatkan kualitas layanan dasar bidang Pendidikan dan dan Kesehatan secara merata
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan dan ramah lingkungan
4. Mengembangkan pusat inovasi kepemudaan dan pengembangan olahraga, seni budaya serta pariwisata;
5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang Bersih dan Terpercaya;
6. Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, dan

penyandang disabilitas;

7. Menegakkan ketertiban umum dan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana.

Dalam mewujudkan Visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, BKPSDMD mendukung pada misi ke-5 Kota Makassar yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Terpercaya, terkhusus pada Tujuan 5.1 yaitu "Meningkatkan Kualitas Birokrasi yang Berintegritas dan Adaptif" dengan Indikator "Indeks Reformasi Birokrasi" untuk mendukung pencapaian misi 5 (lima) tersebut BKPSDMD Kota Makassar merumuskan tujuan yaitu "Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah yang Profesional, Transparan dan Akuntabel" dengan indicator Indeks Sistem Merit, dimana salah satu komponen pengungkit keberhasilan Indeks Reformasi Birokrasi salah satunya ialah Indeks Sistem Merit, maka untuk memaksimalkan pencapaian tujuan BKPSDMD tersebut maka dirumuskan beberapa langkah untuk mencapai Misi tersebut, yaitu sebagai berikut:

1) Mewujudkan manajemen kepegawaian dan sumber daya aparatur Pemerintah Daerahyang bersih dan profesional;
2) Penyajian data kepegawaian yang apresiatif;
3) Peningkatan koordinasi aktif dibidang kepegawaian dengan SKPD sebagai mitrastrategis;
4) Mendukung kreatifitas dan kepastian karier aparatur;
5) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara komprehensif;
6) Mengimplementasikan setiap kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan;
7) Mendorong terwujudnya Aparatur Professional dan berwawasan global;
8) Mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas SKPD dalam pengembangan aparatur;
9) Mendorong peningkatan kinerja dan profesionalisme penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana kerja. Bagian ini berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap rumusan program dan kegiatan yang sesuai dengan rancangan awal SKPD, termasuk dalam hal penganggaran. Tahapan rancangan awal SKPD disajikan dalam tabel T-C 31.

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
No.	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Pagu Indikatif	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Pagu Indikatif	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH					**30.704.884.842**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**				**30.678.090.000**	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					**30.704.884.842**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**30.678.090.000**	
KEPEGAWAIAN					**19.824.071.662**	**KEPEGAWAIAN**				**19.864.205.380**	
A.	**16.478.304.902**	**Makassar**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik** **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah** **Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas**		**16.478.304.902**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Makassar**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik** **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah** **Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas**	**100**	**17.053.119.420**	
I.	**Perencanaan, Penganggaran danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun**	**19**	**104.468.400**	**Perencanaan, Penganggaran danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah dokumen perencanaan perangkatdaerah yang disusun**	**19**	**82.208.400**	**Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3	29.048.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah dokumen perencanaan perangkatdaerah yang disusun	3	21.788.200	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1	10.230.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKASKPD yang disusun	1	8.230.600	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah dokumen RKA perubahan SKPD yang disusun	1	9.362.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah dokumen RKA perubahan SKPD yang disusun	1	7.362.600	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1	8.777.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1	6.777.000	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	1	9.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	1	7.250.000	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	5	27.540.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	5	24.540.000	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	7	10.260.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yangdisusun	7	6.260.000	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
II.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerahyang Disusun**	**14**	**13.673.644.162**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang**	**14**	13.673.657.880	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	13.233.739.162	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	13.233.752.880	

2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN	Makassar	Tersedianya Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18	286.440.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN	Makassar	Tersedianya Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18	286.440.000	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7	153.465.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7	153.465.000	
III.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan**	**3**	**226.290.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang**	**3**	406.790.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Makassar	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Makassar	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	0	0	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
2	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Makassar	Jumlah administrasi pensiun yang diselesaikan	400	34.420.000	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Makassar	Jumlah administrasi pensiun yang diselesaikan	400	25.420.000	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
3	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Makassar	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	7	191.870.000	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Makassar	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	15	381.370.000	Penambahan anggarkan, dikarenakan pagu yang dianggarkan setelah efisiensi tidak mencukupi hingga akhir tahun
IV.	**Administrasi Umum PerangkatDaerah**	**Makassar**	**Jumlah jasa adminitrasi umumyang tersedia**	**6**	**688.547.700**	**Administrasi Umum PerangkatDaerah**	**Makassar**	**Jumlah jasa adminitrasi umumyang tersedia**	**6**	723.945.700	
1	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Tersedianya komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	Sudah diambil alih oleh bagian umum

2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Peralatan danPerlengkapan Kantor yang disediakan	12	45.453.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Peralatan danPerlengkapan Kantor yang disediakan	12	45.453.400	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Makassar	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	62.791.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Makassar	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	62.791.500	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Makassar	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18	17.280.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Makassar	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18	17.280.000	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	12	20.022.800	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	12	27.420.800	Penambahan anggarkan, dikarenakan pagu yang dianggarkan setelah efisiensi tidak mencukupi hingga akhir tahun
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1	543.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1	571.000.000	
V.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah**	**Makassar**	**Jumlah Barang MilikDaerah yang diadakan**	**8**	**0**	**Pengadaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah**	**Makassar**	**Jumlah Barang MilikDaerah yang diadakan**	**8**	246.780.002	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Persentase saranadan prasarana aparatur dalam kondisi baik	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	0	0	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Tersedianya Peralatan dan MesinLainnya	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	11	246.780.002	Dibutuhkan sesuai dengan RKBMD 2025
3	Pengadaan gedung kantor atau bangunanlainnya	Makassar	Terlaksanany pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	0	0	Pengadaan gedung kantor atau bangunanlainnya	Makassar	Terlaksanany pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	0	0	

VI.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang disediakan**	**2**	**1.447.144.640**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang disediakan**	**2**	1.439.144.640	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Jasa SuratMenyurat yang disediakan	12	1.198.052.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	12	1.190.952.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	248.192.640	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	248.192.640	
VII.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**4**	**338.210.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**4**	480.592.798	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas Jabatan	1	44.380.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	1	40.880.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	56	269.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	56	244.130.000	

3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48	24.580.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48	24.580.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	171.002.798	
B.	**PROGRAM KEPEGAWAIN DAERAH**	**Makassar**	**Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi Dan menengah/dasar (%)(PNS tidak termasukguru dan tenaga kesehatan)** **Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk gurudan tenaga kesehatan)** **Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk gurudan tenaga kesehatan)**		**3.345.766.760**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Makassar**	**Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi Dan menengah/dasar (%)(PNS tidak termasukguru dan tenaga kesehatan)** **Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk gurudan tenaga kesehatan)** **Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk gurudan tenaga kesehatan)**		2.811.085.960	**Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran**
VII.	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Makassar**	**Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang dikelola**	**5**	**1.754.597.600**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Makassar**	**Jumlah Pengadaan, Pemberhentian danInformasi Kepegawaian ASN yang dikelola**	**5**	1.573.157.600	
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Makassar	Jumlah pengadaanASN	4	407.147.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Makassar	Jumlah pengadaan ASN	4	368.647.000	

2	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Makassar	Jumlah Lembaga Profesi ASN yangdifasilitasi	2	180.958.600	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Makassar	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	2	170.458.600	
3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Makassar	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikelola	1	992.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Makassar	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikelola	1	950.000.000	
4	Pengelolaan Data Kepegawaian	Makassar	Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian	1	115.610.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Makassar	Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian	1	72.770.000	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
5	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Makassar	Jumlah RekonsiliasiData Verifikasi Kepegawaian	1	58.882.000	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Makassar	Jumlah Rekonsiliasi Data Verifikasi Kepegawaian	1	11.282.000	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
IX	**Mutasi dan Promosi ASN**	Makassar	**Jumlah mutasi dan promosi ASN**	**5225**	**331.859.400**	**Mutasi dan Promosi ASN**	Makassar	**Jumlah mutasi dan promosi ASN**	**5225**	253.368.600	**Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran**
1	Pengelolaan MutasiASN	Makassar	Jumlah mutasi dan promosi ASN	5	206.376.400	Pengelolaan MutasiASN	Makassar	Jumlah mutasi dan promosi ASN	5	118.214.800	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
2	Pengelolaan Kenaikan PangkatASN	Makassar	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6	125.483.000	Pengelolaan Kenaikan PangkatASN	Makassar	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6	135.153.800	
X	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Makassar**	**Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN yang dikelola**	**2**	**498.227.000**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Makassar**	**Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN yang dikelola**	**3**	533.977.000	

1	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Makassar	Jumlah Adiministrasi Diklat dan Sertifikasi ASN yang dikelola	1	64.227.000	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Makassar	Jumlah Adiministrasi Diklat dan Sertifikasi ASN yang dikelola	1	58.977.000	
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Makassar	Jumlah Pendidikan Lanjutan ASN yang dikelola	8	380.000.000	Pengelolaan Pendidikan LanjutanASN	Makassar	Jumlah Pendidikan Lanjutan ASN yang dikelola	8	430.000.000	
3	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Makassar	Jumlah administrasi diklat dan sertifikasi ASN yang dikelola	1	45.000.000	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Makassar	Jumlah administrasi diklat dan sertifikasi ASN yang dikelola	1	45.000.000	
XI	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Makassar**	**Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang dikelola**	**3**	**770.082.760**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Makassar**	**Jumlah Penilaian danEvaluasi Kinerja Aparatur yang dikelola**	**3**	450.582.760	**Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran**
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Makassar	Jumlah pegawai yangdi evaluasi kinerjanyadan administrasi tambahan penghasilan pegawai (TPP)	5	414.309.800	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Makassar	Jumlah pegawai yang di evaluasi kinerjanya dan administrasi tambahan penghasilan pegawai (TPP)	5	61.809.800	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan BagiPegawai	Makassar	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan penghargaan	300	198.972.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan BagiPegawai	Makassar	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan penghargaan	300	191.972.000	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
3	Pembinaan DisiplinASN	Makassar	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang dikelola administrasi kedisiplinannya	10	156.800.960	Pembinaan DisiplinASN	Makassar	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang dikelola administrasi kedisiplinannya	10	196.800.960	
C.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Makassar**	**Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan**		**10.880.813.180**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Makassar**	**Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan**		10.813.884.620	

			Persentase ASNyang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal **Persentase pejabatASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural**					**Persentase ASNyang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal** **Persentase pejabatASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural**			
XII	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Makassar**	**Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dikelola**	**1**	**10.880.813.180**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Makassar**	**Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dikelola**	**1**	10.813.884.620	**Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran**
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan,	Makassar	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	5	5.720.547.780	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan,	Makassar	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	5	3.813.369.220	Penambahan anggarkan, dikarenakan pagu yang dianggarkan setelah efisiensi tidak mencukupi hingga akhir tahun
2	Pembinaan, Pengoordinasian , Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi,, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Bagi Pimipinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	Makassar	Persentase Pejabat yang telah mengikutiPendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai jenjang jabatannya.	4	5.160.265.400	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi,, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama serta Pengembangan Kompetensi Bagi Pimipinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, dan Kepemimpinan dan Prajabatan	Makassar	Persentase Pejabat yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai jenjang jabatannya.	4	7.000.515.400	Menyesuaikan dengan kebutuhan jumlah pendidikan dan pelatihan.

	Fungsional, dan Kepemimpinan dan Prajabatan										

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang telah ditentapkan, dengan mengacu kepada RPJMD Kota Makassar 2021-2026 maka dalam mewujudkan Visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, BKPSDMD mendukung pada misi ke-5 Kota Makassar yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Terpercaya, terkhusus pada Tujuan 5.1 **yaitu "Meningkatkan Kualitas Birokrasi yang Berintegritas dan Adaptif"** dengan Indikator "Indeks Reformasi Birokrasi" untuk mendukung pencapaian misi 5 (lima) tersebut BKPSDMD Kota Makassar merumuskan tujuan yaitu **"Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah yang Profesional, Transparan dan Akuntabel"** dengan indikator Indeks Sistem Merit, dimana salah satu komponen pengungkit keberhasilan Indeks Reformasi Birokrasi salah satunya ialah Indeks Sistem Merit, maka untuk memaksimalkan pencapaian tujuan BKPSDMD tersebut maka dirumuskan 3 (Tiga) program yaitu: Program Kepegawaian Daerah (4 Kegiatan, 13 sub kegiatan), Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (1 Kegiatan dan 2 sub kegiatan), dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7 Kegiatan, 27 sub kegiatan) dan akan dijabarkan pada table TC-33.

3.2 Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan uraian penjelasan factor-faktor penyusun program dan kegiatan diatas, maka kami rincikan dalam bentuk table TC-33 dibawah ini:

Tabel TC-33

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perubahan BKPSDMD Kota Makassar

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2025

UD	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	INDIKATIF 2025	APBD 2025	INDIKATIF PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH							83.765.304.396,00	58.764.664.042,92	65.579.280.304,00	7.071.299.908,00							36.826.515.416,00	
	0	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							83.765.304.396,00	58.764.664.042,92	65.579.280.304,00	7.071.299.908,00							36.826.515.416,00	
	0.02	KEPEGAWAIAN							19.852.213.446,00	19.824.071.304,00	19.994.955.904,00	2.972.990.944,00							37.282.814.756,00	
1	0.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ASN Perangkat Daerah yang memenuhi persyaratan kepangkatan				100 90 % %	100 90 persen persen	13.940.823.960,00	14.672.594.907,92	11.600.645.472,00	8.791.527.952,00							19.815.278.810,00	
	0.02.01.01.01	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan anggaran (Kerja Perangkat Daerah yang Disusun				11 Dokumen	11 Dokumen	10.630.400,00	334.400.402,00	37.720.472,00	11.470.000,00					Seluruh kecamatan	ASN Pemerintah Kota Makassar	115.708.570,00	NAMA KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	14.746.207,00	20.018.240,00	41.198.200,00	1.980.000,00	Kota Makassar (Kota Perkantoran)	(BPKAD, SEKRETARIAT DAERAH)	Seluruh kecamatan				28.000.000,00	BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusun Dokumen Laporan Kinerja																		
			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Laporan Hasil Monitoring Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12.230.207,00	12.297.620,00	9.241.207,00	2.300.000,00	Kota Makassar (Kota Perkantoran)	(BPKAD, SEKRETARIAT DAERAH)	Seluruh kecamatan				12.987.000,00	BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	0.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RK) dan Laporan Hasil Monitoring Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.362.400,00	3.767.900,00	4.067.400,00	7.400.000,00	Kota Makassar (Kota Perkantoran)	(BPKAD, SEKRETARIAT DAERAH)	Seluruh kecamatan				13.201.756,00	NAMA KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir																		
			Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (Laporan Keuangan Akhir) yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	8.111.600,00	8.111.600,00	8.111.600,00	2.300.000,00	Kota Makassar (Kota Perkantoran)	(BPKAD, SEKRETARIAT DAERAH)	Seluruh kecamatan				10.000.000,00	BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKIP) dan Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Program Perangkat Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	2.300.000,00	Kota Makassar (Kota Perkantoran)	(BPKAD, SEKRETARIAT DAERAH)	Seluruh kecamatan				5.540.000,00	BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	1.02.01.2.01.0006	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	2.300.000,00	Kota Makassar (Kota Perkantoran)	(BPKAD, SEKRETARIAT DAERAH)	Seluruh kecamatan				14.300.000,00	BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	0.02.01.2.02.0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	15.516.414.812,00	14.657.649.194,00	14.613.602.578,00	2.057.236.196,00					Seluruh kecamatan	ASN Pemerintah Kota Makassar	31.670.913.000,00	BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	1.02.01.2.02.0001	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan				75 Orang/Bln	75 Orang/Bln	9.556.447.942,00	13.017.816.153,00	11.181.782.972,00	1.141.156.732,00	Kota Makassar (Kota Perkantoran)	(BPKAD, SEKRETARIAT DAERAH)	Seluruh kecamatan				14.322.939.732,00	NAMA KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	1.02.01.2.02.0002	Pelayanan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-11)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Hasil Pengolahan Tempat/Lahan Pemakaman Tingkat Kota				16 Lokasi/Unit	16 Lokasi/Unit					Kota Makassar (yang Perlakuan Baru)							
	5.03.01.2.01.0003	Pengelolaan Pemakaman Umum																		
		Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT)																		
			Jumlah Layanan Pemakaman dan Pengurusan/Biaya Kuburan (UPT)				7 (tujuh) unit	7 (tujuh) unit					Kota Makassar (yang Perlakuan Baru)							
	5.03.01.2.04	Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil	Jumlah Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil yang Diterbitkan				3 Jenis	3 Jenis									UPT Pemakaman Kota Makassar			
	5.03.01.2.05.0002	Penyediaan Fasilitas Sholat bersedia Untuk Kepentingan Umum																		
			Jumlah Alat Fasilitas Tempat Sholat Untuk Kepentingan				1.15 Paket	1.15 Paket					Kota Makassar (yang Perlakuan Baru)							
	5.03.01.2.10.0002	Pelayanan Kependudukan yang Profesional																		
			Jumlah Pelayanan Tersedia yang Diselenggarakan				1.10 Unit/Lokasi	1.10 Unit/Lokasi					Kota Makassar (yang Perlakuan Baru)							
	5.03.01.2.11.0001	Penerbitan Dokumen yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kota				2 Laporan	2 Laporan					Kota Makassar (yang Perlakuan Baru)							
	5.03.01.2.16	Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum yang Tersedia				4 Jenis	4 Jenis									UPT Pemakaman Kota Makassar			
	5.03.01.2.20.0001	Pengelolaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Unit/Lokasi	1 Unit/Lokasi					Kota Makassar (yang Perlakuan Baru)							
	5.03.01.2.30.0001	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket					Kota Makassar (yang Perlakuan Baru)							
	5.03.01.2.30.0002	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket					Kota Makassar (yang Perlakuan Baru)							
	5.03.01.2.30.0003	Penyediaan Bahan/Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan/Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				18 Dokumen	18 Dokumen					Kota Makassar (yang Perlakuan Baru)							
	5.03.01.2.36.0005	Fasilitasi Kerjasama Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berlanjut/Berkurang (19-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Capaian Program Rangkaian Fasi				171 Layanan	12 Layanan	29.007.900.00	29.007.900.00	19.107.900.00	-9.100.000.00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempunyai referensi politik hukum dan tindakan serta mempunyai pengaruh dan pertimbangan kerjasa terkait dan dimplementasi	-			29.307.900.00	DINAS KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	28 Laporan	848.000.000.00	343.000.000.00	695.500.500.00	-287.500.500.00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempunyai referensi politik hukum dan tindakan serta mempunyai pengaruh dan pertimbangan kerjasa terkait dan dimplementasi	-			625.000.000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.07.07.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan				10 Unit	10 Unit	0.00	0.00	227.700.362.00	227.700.362.00					ASN Pemerintah Kota Makassar		188.775.900.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.05.07.2.07.0000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-			3.45.500.000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.05.07.2.10.0000	Pengadaan Perabotan dan Alat Kantor																		
			Jumlah Unit Perabotan dan Alat Kantor yang Diadakan				34 Unit	34 Unit	0.00	0.00	227.700.362.00	227.700.362.00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					238.275.900.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.05.07.2.06	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang disediakan				2 Jasa	2 Jasa	1.939.944.440.00	1.947.184.680.00	1.944.184.680.00	-10.440.480.00			Mempunyai referensi politik hukum dan tindakan serta mempunyai pengaruh dan pertimbangan kerjasa terkait dan penyediaanya	-	ASN Pemerintah Kota Makassar		1.780.215.540.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Jasa Alat Berat																		
			Jumlah Layanan Pengadaan Jasa Alat Berat				83 Layanan	83 Layanan	1.111.111.100.00	1.196.111.100.00	1.111.197.301.00	-10.400.301.00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempunyai referensi politik hukum dan tindakan serta mempunyai pengaruh dan pertimbangan kerjasa terkait dan penyediaanya	-			1.198.197.300.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Layanan	12 Layanan	249.192.840.00	369.192.840.00	284.192.940.00	0.00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempunyai referensi politik hukum dan tindakan serta mempunyai pengaruh dan pertimbangan kerjasa terkait dan penyediaanya	-			421.994.580.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.05.01.2.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara				4 Unit	4 Unit	159.971.000.00	339.210.000.00	501.960.305.00	342.610.000.00			Mempunyai referensi politik hukum dan tindakan serta mempunyai pengaruh dan pertimbangan kerjasa terkait dan penyediaanya	-	ASN Pemerintah Kota Makassar		701.943.880.50	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	61.500.000.00	61.300.000.00	13.680.300.00	0.500.000.00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempunyai referensi politik hukum dan tindakan serta mempunyai pengaruh dan pertimbangan kerjasa terkait dan penyediaanya				73.000.900.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0000	Penyediaan Jasa Perkantoran, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Tersedia dan Terpelihara Pajak dan Perizinannya				61 Unit	61 Unit	76.888.440.00	765.730.000.00	764.133.400.00	687.734.440.00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempunyai referensi politik hukum dan tindakan serta mempunyai pengaruh dan pertimbangan kerjasa terkait dan penyediaanya	-			151.067.000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0000	Pemeliharaan Kendaraan Non Dinas Lainnya																		
			Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	32.610.000.00	24.580.000.00	21.580.300.00	1.000.001.00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempunyai referensi politik hukum dan tindakan serta mempunyai pengaruh dan pertimbangan kerjasa terkait dan penyediaanya				112.913.000.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.10.0000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kerja dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3.600.000.00	0.00	114.000.300.00	102.913.300.00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempunyai referensi politik hukum dan tindakan serta mempunyai pengaruh dan pertimbangan kerjasa terkait dan penyediaanya				268.541.880.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD Tahun 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (13-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi Dan Menengah/Dasar (%) (PSS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) Rasio Pegawai Fungsional (PSS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)**				**54.48 0.56 %**	**54.48 0.56 persen persen**	**3.844.291.758,00**	**3.349.748.740,00**	**2.811.381.850,00**	**-1.445.142.028,00**							**7.280.534.768,00**	
	5.03.02.2.01	Pengelolaan Ketatausahaan dan Urusan Rumahtangga ASN	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN yang diterima				1 Jenis	1 Jenis	1.991.170.438,00	1.704.391.040,00	1.173.157.600,00	-818.012.838,00			Mempermudah administrasi publik, hukum dan bersifat satu kesatuan yang mempermudah pelayanan dan pertanggungjawaban. Kinerja: terukur, sub. dan pelayan efisien	-	Aset Tersedianya Alat Makassar		1.591.167.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Standar Kebutuhan Jenis dan Jenjang Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	157.607.100,00	157.157.100,00	308.947.200,00	-113.090.100,00	Kota Makassar (Kota Pantaloro Baru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempermudah administrasi publik, hukum dan bersifat satu kesatuan yang mempermudah pelayanan dan pertanggungjawaban. Kinerja: terukur, sub. dan pelayan efisien	-			324.082.960,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0006	Fasilitasi Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				2 Lembaga	2 Lembaga	80.394.640,00	161.948.940,00	113.444.400,00	19.500.000,00	Kota Makassar (Kota Pantaloro Baru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempermudah administrasi publik, hukum dan bersifat satu kesatuan yang mempermudah pelayanan dan pertanggungjawaban. Kinerja: terukur, sub. dan pelayan efisien	-			467.133.980,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0010	Pemasiban Tanda Kehormatan Kesetiaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Berkas Usulan Kesetiaan				6 Dokumen	6 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	800.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Makassar (Kota Pantaloro Baru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempermudah administrasi publik, hukum dan bersifat satu kesatuan yang mempermudah pelayanan dan pertanggungjawaban. Kinerja: terukur, sub. dan pelayan efisien	-			1.160.000.960,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	75.238.000,00	115.000.000,00	72.870.000,00	-150.368.000,00	Kota Makassar (Kota Pantaloro Baru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempermudah administrasi publik, hukum dan bersifat satu kesatuan yang mempermudah pelayanan dan pertanggungjawaban. Kinerja: terukur, sub. dan pelayan efisien	-			630.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0012	Fasilitasi Gaji, Ekonomi dan Jumlah Honorer Kategorian																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data Informasi dan Jaringan Informasi Kepegawaian				11 Aplikasi	11 Aplikasi	10.362.100,00	10.362.100,00	11.097.000,00	40.000.000,00	Kota Makassar (Kota Pantaloro Baru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempermudah administrasi publik, hukum dan bersifat satu kesatuan yang mempermudah pelayanan dan pertanggungjawaban. Kinerja: terukur, sub. dan pelayan efisien	-			100.157.960,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Mutasi dan Promosi ASN				5.025 ASN	5.025 ASN	80.918.400,00	81.898.400,00	323.984.000,00	148.674.000,00			Mempermudah administrasi publik, hukum dan bersifat satu kesatuan yang mempermudah pelayanan dan pertanggungjawaban. Kinerja: terukur, sub. dan pelayan efisien		Aset Tersedianya Alat Makassar		625.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi, Analisis Pengaruh Tinggi Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas dan Mutasi ASN antar Daerah				350 Dokumen	350 Dokumen	221.196.838,00	209.378.438,00	118.490.850,00	101.940.600,00	Kota Makassar (Kota Pantaloro Baru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempermudah administrasi publik, hukum dan bersifat satu kesatuan yang mempermudah pelayanan dan pertanggungjawaban. Kinerja: terukur, sub. dan pelayan efisien				429.157.040,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.12.0022	Pendaftaran Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengadaan Kenaikan Pangkat ASN				1.250 Dokumen	1.250 Dokumen	141.842.100,00	121.140.000,00	140.107.900,00	-5.309.700,00	Kota Makassar (Kota Pantaloro Baru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempermudah administrasi publik, hukum dan bersifat satu kesatuan yang mempermudah pelayanan dan pertanggungjawaban. Kinerja: terukur, sub. dan pelayan efisien	-			396.510.040,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.12.0023	Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pengabdian	Jumlah Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat yang Dilaksa				1 Jenis	1 Jenis	554.211.000,00	489.231.000,00	418.571.000,00	-132.240.000,00			Mempermudah administrasi publik, hukum dan bersifat satu kesatuan yang mempermudah pelayanan dan pertanggungjawaban. Kinerja: terukur, sub. dan pelayan efisien		Aset Tersedianya Alat Makassar		1.467.414.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.13.0023	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Laporan	1 Laporan	139.911.000,00	108.121.000,00	108.911.000,00	-50.750.000,00	Kota Makassar (Kota Pantaloro Baru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempermudah administrasi publik, hukum dan bersifat satu kesatuan yang mempermudah pelayanan dan pertanggungjawaban. Kinerja: terukur, sub. dan pelayan efisien				324.817.110,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.13.0024	Pengelolaan Pemberhentian Pegawai ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Tersedia/Terkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				4 Orang	4 Orang	489.500.000,00	380.000.500,00	410.000.000,00	90.000.000,00	Kota Makassar Ujung Tanjung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama di bidang sub. dan pelayanan	-				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.5009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama di bidang sub. dan pelayanan	-				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.14	Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang dibina				3 Jenis	3 Jenis	525.372.750,00	750.000.750,00	450.750.750,00	372.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama di bidang sub. dan pelayanan	-	Aparatur Kota Makassar			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.5002	Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pelatihan dan Evaluasi Kinerja Peserta				10 Dokumen	10 Dokumen	119.000.800,00	113.000.800,00	91.000.800,00	107.000.000,00	Kota Makassar Ujung Tanjung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama di bidang sub. dan pelayanan	-				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.5004	Pengelolaan Administrasi Pengembangan Saga Kejaksa																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				900 Orang	900 Orang	167.452.000,00	196.972.500,00	181.972.500,00	44.710.000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Narkoba, terutama sub. dan pelayanan	-				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.5007	Pemilihan Dalam ASN																		
			Jumlah ASN yang Mengajukan Pensiun				10 Orang	10 Orang	158.820.000,00	158.000.000,00	150.000.000,00	40.000.000,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama di bidang sub. dan pelayanan	-				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**5.132.883.860,00**	**10.883.813.180,00**	**10.814.884.820,00**	**4.703.289.080,00**							**5.564.701.710,00**	
1	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Kab/Kota Lima Pegawai Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pelatihan Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal**				100 20 4,34 % Jam Pelajaran %	100 20 4,34 % Jam Pelajaran %	**5.110.866.360,00**	**10.883.813.180,00**	**10.813.884.820,00**	**2.484.119.180,00**							**5.564.701.710,00**	
	5.04.02.2.01	Koordinasi, Konsolidasi, Pengendalian dan Pengelolaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Jumlah Bahan Koordinasi, Pengendalian Konsolidasi dan Pengelolaan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang dibina				1 Jenis	1 Jenis	6.154.960.460,00	10.883.813.180,00	10.813.884.820,00	4.703.289.080,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama di bidang sub. dan pelayanan	-	Aparatur Kota Makassar			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.12.5007	Penyelenggaraan Pendidikan Kepolisian Pamong Praja, Urusan Pemerintahan Umum, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengendalian Konsolidasi dan Pengelolaan Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				5 Laporan	5 Laporan	4.173.627.960,00	5.720.542.780,00	3.813.388.320,00	940.320.360,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama di bidang sub. dan pelayanan	-				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.12.5009	Pembinaan, Pengelolaan, Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan, Rekam Ulang, Penertiban, Penyelesaian Validasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				4 Dokumen	4 Dokumen	1.196.999.220,00	1.196.999.470,00	1.196.971.400,00	1.143.971.400,00	Kota Makassar Ujung Pandang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama di bidang sub. dan pelayanan	-				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		JUMLAH							**23.353.852.060,00**	**30.734.884.542,00**	**30.870.090.093,00**	**7.374.290.080,00**							**30.939.911.410,00**	

BAB IV
PENUTUP

a) Catatan Penting

Dokumen Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2025 ini merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, yang selanjutnya dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PD). Olehnya itu, dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Perubahan ini, perlu dibangun sinergitas dan koordinasi yang baik dan berkala kepada seluruh stakeholder untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Tahun 2025, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian sasaran program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2025. Rencana kerja BKPSDM Kota Makassar disusun berdasarkan target dan sasaran pembangunan yang diprioritaskan untuk Pembangunan Daerah Kota Makassar serta berkelanjutan di Lingkungan BKPSDMD Kota Makassar secara lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergi.

b) Kaidah Pelakasanaan

1. Bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, Renja Perubahan ini, merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Perubahan) Tahun 2025;
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan, masing-masing bidang/unit kerja lingkup BKPSDMD Kota Makassar wajib menjadikan dokumen Renja Perubahan Perubahan ini sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di unit kerja masing-masing, sehingga dapat dihasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen ini;
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan, BKPSDMD Kota Makassar melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan, maupun kesesuaian antara target dan realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2025.

c) Rencana Tindak lanjut

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan-P) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar ini merupakan bagian dari perencanaan tahunan yang disusun sebelum melaksanakan program dan kegiatan. Penyusunan Renja Perubahan ini tentunya tidak lepas dari hasil evaluasi capaian kinerja yang telah dihasilkan di tahun-tahun sebelumnya, penjabaran dari Rencana Strategis BKPSDMD 2025-2030, serta berpedoman pada tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Makassar yang tercantum dalam RKPD Tahun 2025, dan juga dengan tetap memperhatikan peluang, potensi, dan tantangan yang dihadapi saat ini. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah bukan hanya merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tetapi juga merupakan tanggung jawab sebuah organisasi kepada masyarakat dalam mengemban amanah. Besar harapan kami, penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan-P) Tahun 2025 ini dapat memberi sumbangsih bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran BKSPSDM Kota Makassar, serta menjadi cerminan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk itu mohon dukungan, kritik dan saran dari berbagai pihak untuk menuju kesempurnaan dokumen perencanaan.

Makassar, 12 Agustus 2025
KEPALA BADAN,

KAMELIA THAMRIN TANTU, SE, M.Si
Pangkat: Pembina Tk.I
Nip : 197207211998032005



PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga *Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renja Perubahan ini merupakan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya, dengan mempertimbangkan perkembangan dinamika kebijakan, perubahan lingkungan strategis, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar yang lebih responsif, adaptif, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Renja Perubahan ini disusun dengan mengedepankan prinsip partisipatif dan akuntabel, melalui koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Harapan kami, dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, serta mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Makassar.

MAKASSAR, 12 AGUSTUS 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR

MUH. HATIM, S.STP., M.Tr.A.P
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 198610172006021001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

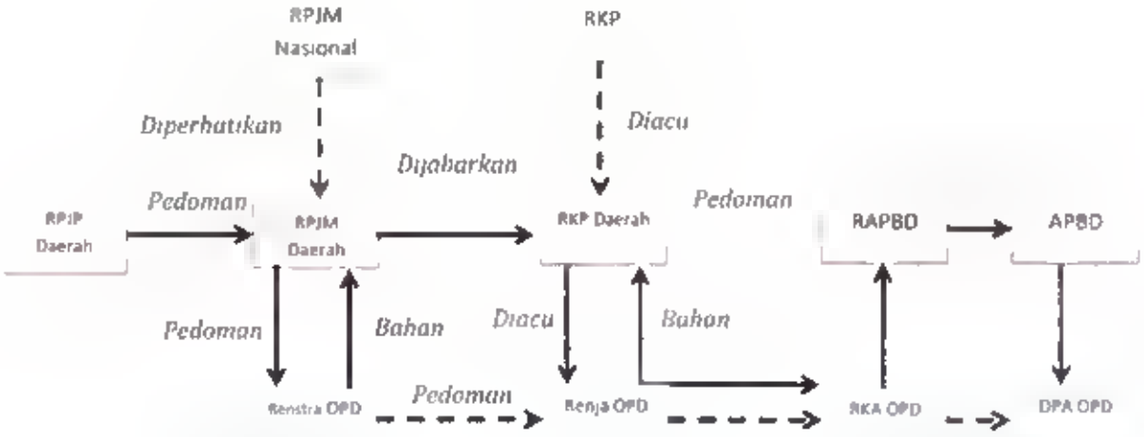
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.Tata cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) Dinas yang menjadi dasar/ acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar setiap tahun/kinerja tahunan.

Dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2024. Adapun nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyusun Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Gambar 1.1
Keterkaitan dokumen Renja dengan dokumen perencanaan lainnya



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700
5. PERUBAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIUBAH DENGAN UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan Nomor 104 tahun 2019

11. Permendagri 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam adm kependudukan Administrasi Kependudukan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangka Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
18. Peraturan Daerah Kota Makasssar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kota Makasssar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017);
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menjamin Sinergritas, Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengawasan serta Efisiensi sumber daya.
2. Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah :
   a. Sebagai Pedoman Dokumen Perencanaan Yang Akan Dilaksanakan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sesuai Tupoksinya
   b. Sebagai sarana Pengendalian Program Kegiatan sub kegiatan 2025
   c. Untuk menjamin keselarasan, Penganggaran dan hasil yang optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini disusun dengan sistematikapenulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat ;

1.1 Latar Belakang,
1.2 Landasan Hukum,
1.3 Maksud dan Tujuan serta,
1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada Bab ini memuat kajian (review) ;

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD,

2.2 Analisis kinerja pelayanan PD,

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD,

2.4 Review terhadap rancangann awal RKPD dan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 program dan kegiatan perangkat daerah

3.2 uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD dan nama serta tanda tangan kepala PD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

TABEL EVALUASI RENJA TRIWULAN I TAHUN 2025

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA
KOTA MAKASSAR
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD TAHUN BERJALAN SAAT DILAKUKAN EVALUASI (RENJA)			REALISASI KINERJA DAN REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I								EVALUASI CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN RENJA SKPD		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KEUANGAN		PERMASALAHAN KINERJA & KEUANGAN (UNTUK SETIAP INDIKATOR)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI KEUANGAN		PERMASALAHAN KINERJA & KEUANGAN (UNTUK SETIAP INDIKATOR)
				K	Rp. (RENJA)	Rp. (RPJMD)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				20,081,533,848.0	20,081,533,848.0		3,518,838,758.0		0.0		0.0		0.0		3,518,838,758.0		17.01		3,518,838,758.0		4.01		
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM & ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH				20,081,533,848.0	20,081,533,848.0		3,518,838,758.0		0.0		0.0		0.0		3,518,838,758.0		17.01		3,518,838,758.0		4.01		
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				20,081,533,848.0	20,081,533,848.0		3,518,838,758.0		0.0		0.0		0.0		3,518,838,758.0		17.01		3,518,838,758.0		4.01		
0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase survey dan pemetaan kompetensi Aparatur Sipil Negara	%	97.0	19,574,133,989.0	19,574,133,848.0	23.0	3,591,113,758.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	3,591,113,758.0	24.44	14.33	23.0	3,591,113,758.0	24.44	4.01	Dalam Koordinasi dan Pemantauan Sipil	
		Persentase Internalisasi Nilai-Nilai Dasar ASN	%	100.0			29.5		0.0		0.0		0.0		29.5		29.5		29.5		29.5			
		Persentase ASN Penegak Disiplin yang menerapkan disiplin/aturan kepegawaian	%	80.0			22.5		0.0		0.0		0.0		22.5		24.44		22.5		24.44			
0 1 . 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen capaian kinerja pemerintah yang penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	30.0	71,410,240.0	71,410,240.0	3.0	24,700,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	24,700,000.0	8.3	34.59	3.0	24,700,000.0	8.0	8.63		
0 1 . 0 2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4.0	38,624,800.0	38,624,800.0	8.0	24,700,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	24,700,000.0	200.0	64.12	8.0	24,700,000.0	0.0	23.82		
0 1 . 0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1.0	4,978,800.0	4,978,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0 1 . 0 4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1.0	4,354,000.0	4,373,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0 1 . 0 5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	8.0	9,118,240.0	9,558,540.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0 1 . 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	6.0	9,500,000.0	9,889,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0 1 . 0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Laporan	21.0	12,773,800.0	12,773,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0 2 .	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah	%	100.0	11,978,974,848.0	11,978,974,848.0	25.0	2,644,692,158.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	2,644,692,158.0	25.0	17.34	25.0	2,644,692,158.0	25.0	5.52		
0 2 . 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	63.0	11,342,553,808.0	11,342,553,808.0	21.0	1,950,092,160.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	1,950,092,160.0	33.3	17.19	21.0	1,950,092,160.0	7.53	5.57		
0 2 . 0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12.0	291,302,160.0	291,302,160.0	3.0	53,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	53,000,000.0	25.0	21.64	3.0	53,000,000.0	0.0	6.11		
0 2 . 0 3	Penatausahaan Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Gaji Keuangan SKPD	Dokumen	12.0	147,717,600.0	147,717,600.0	3.0	31,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	31,500,000.0	25.0	21.32	3.0	31,500,000.0	0.0	5.61		
0 2 . 0 4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2.0	8,150,000.0	8,150,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0 2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PERSENTASE capaian layanan administrasi kepegawaian daerah	%	100.0	83,453,900.0	83,467,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0 2 . 0 1	Pengadaan, Pelatihan Dasar, dan Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah Paket Pelatihan Dasar beserta Monitoring	Paket	0.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
0 2 . 0 2	Pendidikan dan Pengadaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengadaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
0 2 . 0 3	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Diklat Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Diklat Pegawai	Dokumen	12.0	13,040,000.0	13,040,000.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0		
0 2 . 0 4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8.0	84,500,900.0	84,500,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0 2 . 0 5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70.0	23,100,900.0	23,100,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian layanan administrasi umum perangkat daerah	%	100.0	852,453,900.0	852,453,900.0	23.0	72,648,744.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	72,648,744.0	23.0	8.52	23.0	72,648,744.0	23.0	1.52		
0 2 . 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	30.0	16,291,940.0	16,291,940.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
0 2 . 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30.0	44,292,820.0	44,292,820.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

	0 1	2	0 0	Penyediaan Perumahan Rumah Tinggal	Jumlah Paket Penataan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	46.0	22,700,000.0	22,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0		
	0 1	2	0 0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10.0	43,252,700.0	43,052,700.0	3.0	3,750,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3,750,000.0	30.0	8.69	9.0	3,750,000.0	0.0	2.87	
	0 1	2	0 0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6.0	43,097,500.0	43,097,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0		
	0 1	2	0 0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Diperlukan	Dokumen	3.0	15,000,000.0	15,000,000.0	1.0	2,300,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2,300,000.0	33.33	21.07	9.0	2,300,000.0	0.0	4.33	
	0 1	2	0 0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0.0			2.0		0.0		0.0		0.0			0.0		0.0		0.0			
	0 1	3	0 0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12.0	301,644,000.0	301,644,000.0	3.0	47,732,744.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	47,732,744.0	25.0	15.84	3.0	47,732,744.0	0.0	2.30	
	0 1	2	0 0	Pemeliharaan Alat Dekorasi pada SKPD	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Alat Dekorasi pada SKPD	Dokumen	6.0 pkt	218,638,000.0	218,638,000.0	550.0	17,505,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	550.0	17,505,044.0	25.0	8.09	550.0	17,505,000.0	0.0	2.19	
	0 2	2	0 0 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12.0	275,000,000.0	275,000,000.0	3.0	6,250,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6,250,000.0	50.0	2.27	3.0	6,250,000.0	0.0	0.83	
	0 1	3		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	36.0	1,005,345,000.0	1,005,345,000.0	34.0	670,061,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	670,061,000.0	100.0	66.66	22.0	661,061,000.0	0.0	6.22	
	0 1	2	0 0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0.0			3.0		0.0		0.0		0.0			3.0		0.0		0.0			
	0 1	2	0 0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0.0			0.0		0.0		0.0		0.0			0.0		0.0		0.0			
	0 1	2	0 0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0.0			0.0		0.0		0.0		0.0			0.0		0.0		0.0			
	0 1	2	0 0	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Unit Perlengkapan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	42.0	1,066,542,700.0	1,065,942,000.0	18.0	650,061,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	650,061,500.0	23.81	61.00	10.0	663,061,500.0	0.0	4.70	
	0 1	2	0 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Rapat-rapat Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Rapat-rapat Lainnya yang Disediakan	Unit	3.0			0.0		0.0		0.0		0.0			3.0		0.0		3.0			
	0 1	2	0 0	Penyediaan Jasa Perancang Umum Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan biaya ke penyedia jasa perancang umum pemerintah daerah yang	laporan	12.0	1,443,193,200.0	1,443,193,200.0	3.0	250,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	250,000,000.0	25.0	17.33	3.0	250,000,000.0	0.0	5.0	
	0 1	2	0 0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6.0	33,150,000.0	33,150,000.0	0.0	6,132,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6,132,000.0	16.67	14.30	0.0	6,132,000.0	0.0	0.83	
	0 1	2	0 0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1.0	528,000,000.0	170,000,000.0	8.0	111,232,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	111,232,000.0	50.0	21.07	8.0	111,232,000.0	0.0	5.79	
	0 2	2	0 0	Penyediaan Jasa Pengelolaan Lahan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pengelolaan Lahan Kantor yang Disediakan	Laporan	12.0	903,713,200.0	903,713,200.0	9.0	133,256,500.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	133,256,500.0	25.0	14.75	3.0	133,256,500.0	0.0	6.74	
	0 2	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	unit	270.0	531,192,100.0	531,192,100.0	13.0	32,435,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	36,498,915.0	3.70	6.84	10.0	36,498,000.0	3.0	1.91	
	0 1	2	0 0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibiayai Pajaknya	Unit	1.0	43,531,700.0	43,531,700.0	1.0	3,600,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3,600,000.0	50.0	8.26	1.0	3,600,000.0	0.0	2.17	
	0 1	2	0 0	Penyediaan Jasa Penyelenggara, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3.0	270,082,500.0	270,082,500.0	9.0	34,859,350.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	34,859,350.0	33.33	12.91	9.0	34,859,350.0	0.0	4.21	
	0 1	2	0 0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	200.0	237,500,000.0	237,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			
	0 1	2	0 0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0.0			2.0		0.0		0.0		0.0			0.0		0.0		0.0			
	0 1	2	0 0	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0.0			3.0		0.0		0.0		0.0			0.0		3.0		0.0			
	0			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															24.83	17.43			24.83	11.43		
	0			INDIKATOR KINERJA															SANGA T	SANGA T			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	0 2			PROGRAM PEMBINAPAAN PENDIDIK	Persentase Anak Usia 5-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	%	60.0	3,444,812,900.0	3,444,812,900.0	25.0	222,800,160.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	225,500,000.0	25.0	6.54	22.0	223,631,000.0	20.0	1.63	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	100.0			25.0		0.0		0.0		0.0		25.0	25.0		25.0		25.0			
	0 1	2		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	persentase capaian kinerja pelayanan pendaftaran penduduk	%	100.0	1,171,478,160.0	1,171,478,160.0	22.0	219,600,291.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	220,000,000.0	25.0	17.41	22.0	223,000,000.0	0.0	3.74	
	0 2	2	0 0 1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	4.0	15,000,640.0	15,000,640.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			
	0 2	2	0 0	Pencatatan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	2.0	231,000,000.0	231,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			

	0 1	2 . 0	0 0	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendidikan Penduduk	Laporan	8.0	79,901,320.0	79,901,320.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	0 2	2 . 0	0 0	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelayanan Pendidikan Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelayanan Pendidikan Kependudukan	Laporan	12.0	1,044,634,400.0	1,044,634,400.0	8.0	233,630,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	210,600,000.0	12.0	12.94	3.0	229,600,000.0	5.0	5.91		
	0 3	3 .		Penataan Pendaftaran Penduduk	persentase capaian pelayanan pendaftaran penduduk	%	100.0	2,373,134,100.0	2,373,134,100.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0				
	0 2	2 . 0 3	0 0 2	Pengadaan Dokumen Kependudukan (Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan (Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	1.0	2,373,134,100.0	2,373,134,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	25.0	22.94			25.00	5.97		
	0 3			PRODUKT KINERJA																			SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI		
	0 1			PROGRAM PENDATATAN SIPIL	Cakupan Pemanfaatan Akta Kelahiran	%	100.0	854,678,000.0	854,678,000.0	25.0	163,750,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	163,750,000.0	25.0	16.84	25.0	163,750,000.0	25.0	5.97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	
					Rasio Pelayanan Bonded Waste	%	70.8			10.0		0.0		0.0		0.0		12.0		14.26		10.0		10.0				
	0 1	2 .		Pelayanan Pencatatan Sipil	pemenuhan capaian pelayanan pencatatan sipil	%	100.0	753,507,972.0	753,507,800.0	25.0	163,750,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	163,750,000.0	25.0	16.84	25.0	163,750,000.0	5.0	5.97		
	0 3	2 . 0 1	0 0 1	Penerbitan, Penyimpanan dan Pemutakhiran Dokumen Atas Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan, Penyimpanan dan Pemutakhiran Dokumen Atas Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	2.0	534,215,400.0	534,215,400.0	1.0	163,750,000.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	163,750,000.0	25.0	22.00	1.0	163,750,000.0	0.83	5.97		
	0 1	2 .	3 3	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pencatatan Sipil yang Diverifikasi	Laporan	4.0	100,792,572.0	1,28,792,572.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0 3	2 .		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	persentase capaian pelayanan pencatatan sipil	%	100.0	98,567,572.0	98,567,572.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0				
	0 3	2 . 0 2	0 0 1	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	1.0	4,253,500.0	4,253,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0 3	2 . 0 4	0 0 4	Pelayanan Sosialisasi Pentingnya Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan peristiwa Penting Tertib Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Sosialisasi Akta Pencatatan Pristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Tertib Pencatatan Sipil	Laporan	2.0	98,303,220.0	98,303,200.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0 3	3 .		2.03 Penataan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan			0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
	0 3	2 .	0 0	Terlaksana Tertib Tertuil Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Tertib Tertuil Pencatatan Sipil	Laporan	0.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
	0			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	12.94	13.43			17.50	11.38		
	0 3			PRODUKT KINERJA																	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	0 6			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	%	70.0	247,826,952.0	294,833,400.0	10.0	23,910,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	23,910,000.0	14.29	8.33	10.0	23,910,000.0	12.0	5.65	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	0 6	2 . 0 1		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemutakhiran dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah dokumen Data Kependudukan, dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dokumen	8.0	153,888,800.0	153,138,800.0	1.0	23,910,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	23,910,000.0	25.0	17.00	1.0	23,910,000.0	0.0	1.94		
	0 4	2 . 0	0 0	Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Dikelola dan Dianalisis	Dokumen	12.0	116,550,000.0	116,550,000.0	3.0	23,910,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	23,910,000.0	0.0	0.00	0.0	23,910,000.0	0.0	2.94		
	0 4	2 .	0 0	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	6.0	19,138,800.0	19,138,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0 4	2 . 0		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan	Laporan	16.0	133,654,800.0	133,654,800.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	21.00	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0				
	0 4	2 . 0	0 0 1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Pemanfaatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Pemanfaatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1.0	33,484,800.0	33,484,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0 1	3 . 0	0 0	Fasilitasi Tertib Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1.0	98,370,000.0	98,370,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	1 1	3 . 1		2.04 Pemeliharaan dan Pengamanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			

Penjelasan dari tabel evaluasi renja triwulan 1 2025 sebagai berikut:
Pagu anggaran tahun 2025 sebessar Rp 20.683.923.868 realisasi sampai dengan maret 2025 sebesar Rp 3518808758 ataus sebesar 17,01% dan realisasi fisik sebesar 19,68%.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

   Dengan total anggaran Rp 16.024.137.968 realisasi sampai triwulan 1 sebesar Rp 3.097.112.758 atau 19,33%

   Indicator program :

   - Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah

     Kegiatan yang mendukung indicator ini adalah :

     a. Pertencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja PD dengan indicator jumlah dokumen capaian kinerja perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 20 dokumen dengan target trw 1 4 dokumen dengan pagu anggaran Rp. 71.410.240 realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 24.700.000 atau sebesar 34,59%.

        Dengan sub kegiatan :

        1. Penyusunan dokumen perencanaan PD dengan indicator jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target 7 dokumen dengan pagu Rp. 38.524.000 realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 24.700.000 atau sebesar 64,12%
        2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD dengan indicator jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD dengan target 1 dokumen dengan pagu Rp 4.079.000 realisasi sampai triwulan 1 sebesar Rp, 00
        3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan indicator jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumenperubahan RKA SKPD dengan target 1 dokumen dengan pagu Rp. 4.395.000 dengan realisasi sampai triwulan 1 sebesar Rp 0,00

4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indicator jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD dengan target 1 dengan pagu Rp. 5.659.240 dengan realisasi sampai triwulan 1 sebesar Rp 0,00
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan indicator jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD dengan target 1 dokumen dengan pagu Rp. 5.980.000 dengan realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 0,00
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indicator jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 12 dokumen dengan pagu anggaran Rp 12.773.000 realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp. 000

b. Administrasi keuangan perangkat daerah dengan indicator persentase capaian administrasi keuangan PD dengan target 100% dengan pagu anggaran Rp 11.789.574.968 dan realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 2.044.622.165 atau sebesar 17,34%

   Dengan sub kegiatan :

   1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indicator jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target 68/12 bulan dengan pagu angggran Rp 11.342.368.808 realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 1.950.092.165 atau sebesar 17,19%
   2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan indicator Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan target 12 dokumen dengan pagu Rp 291.309.160 , realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 63.030.000 atau sebesar 21,64%
   3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indicator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target 12 dokumen dengan pagu anggaran Rp 147.717.000 dengan realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 31.500.000 atau sebesar 21,32%

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indicator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target 2 laporan, realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 000

- Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

  Kegiatan yang mendukung indicator ini adalah :

  a. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indicator jumlah pengadaaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 42 unit, realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 1.065.345.000 dengan realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 660.061.500 atau sebesar 61,96%

     Dengan subkegiatan :

     1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indicator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan target 42 unit realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 660.061.500 atau sebesar 61,96%

  b. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indicator jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 389 unit dengan pagu Rp. 551.292.000 realisasi sampai triwulan 1 sebesar Rp 38.498.989 atau 6,98%

     Dengan subkegiatan :

     1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indicator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target 1 unit dengan pagu sebesar Rp 43.630.000 realisasi sampai dengan triwulan 3 sebesar Rp 3.603.600 atau 8,23%
     2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indicator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya debgan target 77 unit dengan pagu Rp

270.062.000 realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 34.895.389 atau 12,92%

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indicator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target 311 unit dengan pagu Rp 237.600.000 dan realisasi sampai dengan triwulan 1 Rp 000

- Persentase ASN PD yang mendapatkan peningkatan kapasitas aparatur

  Kegiatan yang mendukung indicator ini adalah :

  a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indicator PERSENTASE capaian layanan administrasi kepegawaian daerah dengan target 100% dengan pagu anggaran Rp 98.447.000 realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 000
  b. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indicator persentase capaian layanan administrasi umum perangkat daerah dengan target 100% dengan pagu anggaran Rp 982.465.560 realisasi sampai triwulan 1 sebesar Rp 78.629.744 atau sebesar 8%
  c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indicator jumlah laporan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 36 laporan dengan pagu anggaran Rp 1.465.603.200 , realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 250.600.360 atau 17,10%

Factor penghambat :

- Jadwal pencaiaran di triwulan 1 tidak mengikuti penjadwalan anggaran kas sehingga Tingkat realisasi juga masih rendah
- lambatnya proses administrasi menyebabkan serapan anggaran rendah di awal tahun
- SDM yang terbatas atau belum memiliki kapasitas optimal dapat memperlambat proses pengadaan

Factor pendukung

- Ketersediaan dokumen pelaksanaan anggaran seperti DPA dan dokumen perencanaan mempermudah penyusunan dan pelaksanaan anggran

- Pemanfaatan aplikasi atau sistem informasi mempercepat proses pengadaan dan penyusunan anggaran
- Ketersediaan Anggaran

Tindak lanjut

- Percepatan Realisasi Anggaran
- Peningkatan Kapasitas SDM

2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Dengan total pagu anggaran sebesar Rp 3.444.802.260 realisasi sampai dengan rtriwulan 1 sebesar Rp. 239.600.000 atau sebesar 6,96%

Indicator program :

- Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
- Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan indicator itu :

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan indicator persentase capaian kinerja pelayanan pendaftaran penduduk dengan target 100% dengan pagu sebesar Rp 1.371.408.160 dengan realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 23.9600.000 atau 17,47%

   Dengan subkegiatan :

   1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan dengan indicator Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan dengan target 2 dokumen dengan pagu Rp. 15.038.640 realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 000
   2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk dengan indicator Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk dengan target 12 dokumen dengan pagu anggaran Rp. 231.983.800 realisasi sampai dengann triwulan 1 sebesar Rp 000
   3. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan

Pendaftaran Penduduk dengan target 12 laporan dengan pagu anggaran Rp 79.901.320 dengan realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 000

4. Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan dengan indicator Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan dengan target 12 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.044.484.400 realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 239600000 atau sebesar 22,94%

b. Penataan Pendaftaran Penduduk

Dengan sub kegiatan :

1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan dengan indicator Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia dengan target 1 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.073.394.100 dengan realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 000

Factor penghambat :

- Beberapa warga belum memahami pentingnya dokumen kependudukan dan enggan mengurusnya
- Jadwal pencaiaran di triwulan 1 tidak mengikuti penjadwalan anggaran kas sehingga Tingkat realisasi juga masih rendah
- Masih Terbatasnya Jangkauan jaringan
- Kadang terjadi kendala teknis atau koneksi internet

Factor pendukung

- Kebijakan Nasional yang Mendukung Layanan Adminduk
- Adanya Infrastruktur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK Terpusat)
- Dukungan Pemerintah Daerah dan Anggaran APBD
- Inovasi Layanan

Tindak lanjut

- Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Publik baik melalui media social maupun secara langsung

- Perluasan dan Penguatan Layanan Mobile
- Peningkatan Kapasitas SDM

3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Dengan total pagu sebesar Rp 854.575.000 realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 143.760.000 atau sebesar 16,82%

Indicator program :

- rasio pasangan berakte nikah target 50%
- cakupan penerbitan akte kelahiran target 100%

kegiatan yang mendukung pencapaian indicator itu :

a. Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indicator persentase capaian pelayanan pencatatan sipil dengan target 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp 755007920 realisasi sampai triwulan 1 sebesar Rp 143.760.000 atau sebesar 19,04%

   Dengan subkegiatan :

   1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting dengan indicator Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting dengan target 12 dokumen dengan pagu anggaran Rp 624.215.400 realisasi sampai triwulan 1 sebesar Rp 143.760.000 atau sebesar 23,03%
   2. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indicator Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan dengan target 4 layanan dengan pagu anggaran sebesar Rp 130.792.520 realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 000

b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan indicator jumlah lapaoarn capaian pelekasanaan penyelenggaraan pencatatan sipil dengan target 4 laporan dengan pagu anggaran Rp. 99.567.080 realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 000

   Dengan subkegiatan :

   1. Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi

Penduduk yang beragama Islam dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dengan target 2 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp 4263800 dengan realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 000

2. Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil dengan target 12 laporan dengan pagu anggaran sebesar Rp 95.303.280 realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 000

Factor penghambat :

- Banyak warga belum mencatatkan peristiwa penting, seperti kematian atau perkawinan, karena dianggap tidak mendesak
- Jadwal pencaiaran di triwulan 1 tidak mengikuti penjadwalan anggaran kas sehingga Tingkat realisasi juga masih rendah
- Kurangnya SDM Operato
- Kadang terjadi kendala teknis atau koneksi internet

Factor pendukung

- Regulasi yang Kuat dan Mendukung
- Memudahkan pencatatan sipil dilakukan secara online
- Dukcapil gencar melakukan layanan terutama untuk pencatatan akta kelahiran dan kematian.
- **Sinergi dengan Instansi Terkait** Seperti rumah sakit, Dinas Kesehatan, Kemenag, dan Pengadilan Agama untuk mempermudah pencatatan peristiwa sipil

Tindak lanjut

- Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Publik baik melalui media social maupun secara langsung
- Penguatan Integrasi Data dengan Fasilitas Kesehatan, KUA, Untuk mempercepat pencatatan akta lahir, perkawinan, perceraian, dan kematian

- Peningkatan Kapasitas SDM
- Layanan Keliling untuk Pencatatan Sipil

4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

   Dengan total pagu sebesar Rp 267.835.600 realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 23.960.000 atau 8,95%. Indikator dari program ini adalah jumlah OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan target 6 OPD

   Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini adalah :

   a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dengan indicator jumlah dokumen Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dengan target 6 dokumen dengan pagu anggaran sebesar Rp 133.980.800 realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 23.960.000 atau sebesar 17,88%

      Subkegiatan yang medndukung pelaksanaan kegiatan ini adalah :

      1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dengan indicator Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan dengan target 12 dokumen dengan pagu anggaran Rp 116.850.000 realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 23.960.000 atau sebesar 20,50%
      2. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan indicator Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan target 6 dokumen PKS dengan pagu anggaran Rp 17.130.800 realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 000

   b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indicator jumlah dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan target 2 dokumen dengan pagu anggaran Rp 133.854.800 realisasi sampai triwulan 1 sebesar Rp 000

Sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan target 2 laporan dengan pagu anggaran Rp 35.484.800 realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 000
2. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan indicator Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan target 6 laporan dengan pagu anggaran Rp 98.370.000 realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 000

Factor penghambat :

- Jadwal pencaiaran di triwulan 1 tidak mengikuti penjadwalan anggaran kas sehingga Tingkat realisasi juga masih rendah
- Kurangnya SDM IT SIAK
- Sebagian masyarakat belum menyadari pentingnya pembaruan data kependudukan secara berkala. Banyak yang hanya mengurus dokumen saat diperlukan, bukan secara proaktif.
- Integrasi data dengan skpd pemanfaat data masih kurang

Factor pendukung

- Regulasi yang Kuat dan Mendukung
- Inovasi layanan dukcapil
- Dukcapil intensif melakukan sosialisasi melalui media sosial, dan layanan daring, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Tindak lanjut

- Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Publik baik melalui media social maupun secara langsung
- Penguatan Integrasi Data dengan SKPD pemanfaat data
- Peningkatan Kapasitas SDM

5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Dengan pagu anggaran sebesar Rp 92.573.040 , realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 14.376.000 atau sebesar 15,53% .

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini adalah :

a. Penyusunan Profil Kependudukan dengan indicator jumlah buku profil kependudukan yang di susun dengan target 56 Buku profil dengan pagu anggaran Rp. 92.573.040 , realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar Rp 14.376.000 atau sebesar 15,53%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayananberdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standar Prosedur dan Kriteria) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal), maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Capaian Kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar di analisis berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standar Prosedur dan Kriteria) , disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing –masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berikut ini disajikan tabel TC 30 analisis pencapaian kinerja pelayanan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil berikut tabel pencapaian kinerja pelayanan 2016-2022 sebagai berikut ;

Tabel T.C 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Makassar

Indikator	Program	IKK	Tahun 2021	Target Renstra					Realisasi Capaian						Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2024	
Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		13%	45%	60%	75%	80%	100%	28,97	42,78	51,55	52%					
CAKUPAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		93,14 %	100%	100%	100%	100%	100%	94,81	94,14	98	98					
CAKUPAN PENERBITAN AKTE KELAHIRAN	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		98%	100%	100%	100%	100%	100%	98,90	100	100	100					
RASIO PASANGAN BERAKTE NIKAH (NON MUSLIM)	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		30	35	45	55	60	65	41,07	48,08	52	50					
PERSENTASE OPD YANG TELAH MEMANFAATKAN DATA KEPENDUDUKAN MELALUI PKS	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		1,96	20	30	50	70	100	5,08	5,08	5,08	6					
PERSENTASE KEBUTUHAN DATA PROFIL KEPENDUDUKAN YANG DISUSUN	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					

verifikasi

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di bidang penyelenggaraan adminduk (UU Nomor 24Th 2013, harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus-menerus, isu-isu strategis yang dilaksanakan di renja perubahan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan program strategis dari program yang sebelumnya guna penyempurnaan pelaksanaan program tersebut , isu-isu antara lain melalui:

a. Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi ke dalam satu sistem,yaitu SIAK;
b. Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan / pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online;
c. Mekanisme /pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi pengarsipan digital;
d. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah,murah,cepat,transparan dan dekat dengan masyarakat;
e. Pelayanan secara online agar memudahkan masyarakat dalam hal pengaksesan pendaftaran dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
f. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil;
g. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,wajib disiapkan:Standar Operasional Prosedur (SOP)
h. Adanya migrasi penduduk yang tidak merata di seluruh kecamatan dan tidak terdata dengan akurat

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD perubahan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat tiga hal yaitu:

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah dan
3. Rencana kerja,pendanaan dan prakiraan maju,

Selanjutnya ketiga hal tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah berdasarkan RKPD kota makassar yang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD sekota makassar yang melaksanakan program dan kegiatan.

Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan setiap tahun dalam dokumen Rencana StrategisDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tahun 2021 – 2026 , kemudian dilakukan proses analisis kebutuhan program dan kegiatan.

Proses analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui urgensi program dan kegiatan terhadap program pembangunan daerah. Hasil dari analisiskebutuhan pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah terdapat program yang kegiatan yang berubah dari RKPD tahun sebelumnya karena sudah mengacu pada Permendagri No 50 tahun 2020, program yang kegiatannya tetap sub kegiatannya ditambah dan program yang kegiatannya tetap subkegiatannya diganti dengan sub kegiatan baru yangrelevan dan kontekstual. Selain itu pula pagu anggaran yang diberikan disesuaikan besarannya pada setiap program dan kegiatan.Besaran anggaran untuk setiap program dan kegiatan prioritas didasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025, maka terjadi perubahan atau pergeseran pagu anggaran baik antar program, kegiatan maupun sub kegiatan sebagai berikut

Untuk membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disajikan tabel berikut ;

TABEL TC 31
REVIUW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR
TAHUN 2025

NO	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**kota makassar**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**90.**	**16,024,137,968.0**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**kota makassar**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**90.**	**Rp.18.852.670.835**	
			Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	**100.**				**Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**100.**		
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	**90.**				**Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas**	**90.**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**kota makassar**	**jumlah dokumen capaian kinerja perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**20.**	**71,410,240.0**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**kota makassar**	**jumlah dokumen capaian kinerja perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**20.**	Rp. 49.910.240	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.	38,524,000.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.	Rp. 33.024.000	efesiensi anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**kota makassar**	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.	4,079,000.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**kota makassar**	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.	Rp. 2.579.000	efeaiensi anggaran

verifikasi

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.	4,395,000.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.	Rp. 2.895.000	efesiensi anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**kota makassar**	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.	5,659,240.0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**kota makassar**	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.	Rp. 4.159.240	efesiensi anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.	5,980,000.0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.	Rp. 4.480.000	efesiensi anggaran
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**kota makassar**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.	12,773,000.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**kota makassar**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.	Rp. 2.773.000	efesiensi anggaran
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**kota makassar**	**persentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100.**	**11,789,574,968.0**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**kota makassar**	**persentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100.**	**Rp. 11.790.262.839**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**kota makassar**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82.	11,342,368,808.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**kota makassar**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82.	Rp. 11.343.056.679	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.	291,309,160.0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.	Rp. 291.309.160	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.	147,717,000.0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.	Rp. 147.717.000	

verifikasi

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**kota makassar**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.	8,180,000.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**kota makassar**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.	Rp. 8.180.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**kota makassar**	**PERSENTASE capaian layanan administrasi kepegawaian daerah**	**100.**	**98,447,000.0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**kota makassar**	**PERSENTASE capaian layanan administrasi kepegawaian daerah**	**100.**	Rp. 117.647.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	**kota makassar**	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	**kota makassar**	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0.		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0.		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0.		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12.	10,047,000.0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12.	Rp. 10.047.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**kota makassar**	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6.	64,500,000.0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**kota makassar**	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6.	Rp. 102.800.000	bimtek untuk operator layanan
	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	**kota makassar**	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70.	23,900,000.0	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	**kota makassar**	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70.	Rp. 4.800.000	efesiensi anggaran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**kota makassar**	**persentase capaian layanan administrasi umum perangkat daerah**	**100.**	**982,465,560.0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**kota makassar**	**persentase capaian layanan administrasi umum perangkat daerah**	**100.**	**Rp.** 1.086.359.560	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**kota makassar**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30.	16,251,940.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**kota makassar**	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30.	Rp. 16.251.940	

verifikasi

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**kota makassar**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30.	44,282,920.0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**kota makassar**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30.	Rp. 84.142.920	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**kota makassar**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15.	22,099,000.0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**kota makassar**	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10.	Rp. 22.099.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**kota makassar**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10.	43,892,700.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**kota makassar**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10.	Rp. 43.892.700	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**kota makassar**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.	46,997,000.0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**kota makassar**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.	Rp. 46.997.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.	15,660,000.0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.	Rp. 20.880.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	**kota makassar**	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0.		Fasilitasi Kunjungan Tamu	**kota makassar**	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0.	Rp. 0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**kota makassar**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.	301,644,000.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**kota makassar**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.	Rp. 250.458.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,200.	216,638,000.0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,200.	Rp. 126.638.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.	275,000,000.0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.	Rp. 475.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**kota makassar**	**jumlah pengadaaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah**	**36.**	**1,065,345,000.0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**kota makassar**	**jumlah pengadaaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah**	**36.**	Rp. 3.399.280.296	

verifikasi

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**kota makassar**	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0.		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**kota makassar**	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0.		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**kota makassar**	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**kota makassar**	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0.	Rp. 498.810.000	
	Pengadaan Mebel	**kota makassar**	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0.		Pengadaan Mebel	**kota makassar**	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0.	Rp. 194.992.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**kota makassar**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42.	1,065,345,000.0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**kota makassar**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42.	Rp. 2.705.478.296	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**kota makassar**	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**kota makassar**	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0.		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**kota makassar**	**jumlah laporan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**12.**	**1,465,603,200.0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**kota makassar**	**jumlah laporan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**12.**	Rp. 1.401.920.900	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**kota makassar**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.	33,390,000.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**kota makassar**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.	Rp. 33.390.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**kota makassar**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.	528,900,000.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**kota makassar**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.	Rp. 563.040.700	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**kota makassar**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**12.**	903,313,200.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**kota makassar**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.	Rp. 805.490.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**kota makassar**	**jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah**	**270.**	**551,292,000.0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**kota makassar**	**jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah**	**270.**	**551,292,000.0**	

verifikasi

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**kota makassar**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.	43,630,000.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**kota makassar**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.	43,630,000.0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**kota makassar**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38.	270,062,000.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**kota makassar**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38.	270,062,000.0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**kota makassar**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200.	237,600,000.0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**kota makassar**	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200.	Rp. 286.000.000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	**kota makassar**	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0.		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	**kota makassar**	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0.		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**kota makassar**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**kota makassar**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0.	Rp. 380.000.000	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**kota makassar**	**Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)**	**80.**	**3,444,802,260.0**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**kota makassar**	**Persentase Anak Usia 1- 17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)**	**80.**	**Rp. 3.711.859.125**	
		kota makassar	**Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**	**100.**			**kota makassar**	**Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**	**100.**		
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**kota makassar**	**persentase capaian kinerja pelayanan pendaftaran penduduk**	**100.**	**1,371,408,160.0**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**kota makassar**	**persentase capaian kinerja pelayanan pendaftaran penduduk**	**100.**	Rp. 1.035.059.160	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	48.	15,038,640.0	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	48.	Rp. 8.038.640	

verifikasi

	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2.	231,983,800.0	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2.	Rp. 144.749.800	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**kota makassar**	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.	79,901,320.0	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**kota makassar**	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.	Rp. 94.901.320	
	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	**kota makassar**	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12.	1,044,484,400.0	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	**kota makassar**	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12.	Rp. 787.369.400	
	Penataan Pendaftaran Penduduk	**kota makassar**	**persentase capaian penataan pendaftaran penduduk**	**100.**	**2,073,394,100.0**	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**kota makassar**	**persentase capaian penataan pendaftaran penduduk**	**100.**	Rp. 2.676.799.965	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1.	2,073,394,100.0	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1.	Rp. 2.676.799.965	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**kota makassar**	**Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran**	**100.**	**854,575,000.0**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**kota makassar**	**Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran**	**100.**	**Rp. 620.789.800**	
		kota makassar	**Rasio Pasangan Berakte Nikah**	**70.**			**kota makassar**	**Rasio Pasangan Berakte Nikah**	**70.**		
	Pelayanan Pencatatan Sipil	**kota makassar**	**persentase capaian pelayanan pencatatan sipil**	**100.**	**755,007,920.0**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**kota makassar**	**persentase capaian pelayanan pencatatan sipil**	**100.**	Rp. 611.972.720	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2.	624,215,400.0	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2.	Rp. 546.730.200	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	**kota makassar**	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4.	130,792,520.0	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	**kota makassar**	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4.	Rp. 65.242.520	

verifikasi

	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**kota makassar**	**persentase capaian pelekasanaan penyelenggaraan pencatatan sipil**	**100.**	**99,567,080.0**	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**kota makassar**	**persentase capaian pelekasanaan penyelenggaraan pencatatan sipil**	**100.**	Rp. 8.817.080	
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	**kota makassar**	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1.	4,263,800.0	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	**kota makassar**	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1.	Rp. 3.513.800	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	**kota makassar**	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	2.	95,303,280.0	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	**kota makassar**	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	2.	Rp. 5.303.280	
	2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**kota makassar**		**0.**	**0.0**	**2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**kota makassar**		**0.**		
	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	**kota makassar**	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0.		Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	**kota makassar**	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0.		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**kota makassar**	**Persentase OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama**	**70.**	**267,835,600.0**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**kota makassar**	**Persentase OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama**	**70.**	Rp. 208.636.400	

verifikasi

	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**kota makassar**	**jumlah dokumen Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**5.**	**133,980,800.0**	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**kota makassar**	**jumlah dokumen Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**5.**	Rp. 112.881.600	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12.	116,850,000.0	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12.	Rp. 97.000.800	
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	6.	17,130,800.0	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	6.	Rp. 15.880.800	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**kota makassar**	**jumlah laporan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan**	**14.**	**133,854,800.0**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**kota makassar**	**jumlah laporan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan**	**14.**	Rp. 95.754.800	
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban-Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**kota makassar**	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.	35,484,800.0	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban-Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**kota makassar**	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.	Rp. 34.884.800	
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**kota makassar**	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.	98,370,000.0	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**kota makassar**	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.	Rp. 60.870.000	
	2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**kota makassar**		**0.**	**0.0**	**2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**kota makassar**		**0.**		

verifikasi

	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama KabupatenKota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah Talak Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	0.		Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama KabupatenKota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah Talak Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	0.		
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**kota makassar**	**Persentase Profil Kependudukan yang dikelola**	**100.**	**92,573,040.0**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**kota makassar**	**Persentase Profil Kependudukan yang dikelola**	**100.**	Rp. 122.723.840	
	Penyusunan Profil Kependudukan	**kota makassar**	**jumlah buku Profil Kependudukan yang dikelola**	**60.**	**92,573,040.0**	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**kota makassar**	**jumlah buku Profil Kependudukan yang dikelola**	**60.**	Rp. 122.723.840	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	90.	92,573,040.0	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	**kota makassar**	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	90.	Rp. 122.723.840	
	TOTAL				**20,683,923,868.0**					Rp.23.516.680.000	

verifikasi

BAB III.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan dalam dokumen renja perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Tahun 2025 berdasarkan hasil input di aplikasi SIMAKDA untuk RKPD perubahan 2025 adalah sebagai berikut; ,

*B*eberapa kegiatan dan subkegiatan mengalami perubahan atau pergeseran karena rasionalisasi anggaran tanpa merubah target dan indikator program, berikut sub kegiatan yang mengalami perubahan :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan pagu anggaran 0
   3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   4. Fasilitasi Kunjungan Tamu

V. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Pengadaan kendaraan operasional
3. Pengadaan meubel

VI. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

VII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

I. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
3. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4. penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan

II. Kegiatan penataan pendaftaran penduduk

1. pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

I. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipi

1. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

II. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

1. koordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama kabupaten/kota dan pengedilan agama mengenai pelaporan pencatatan talak dan cerai bagi penduduk beragama islam
2. Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. Kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan

1. Pengolahan dan penyajian data kependudukan
2. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan

II. Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

1. Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

1. Penyusunan profil kependudukan

   Subkegiatan penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

Berikut hasil inputan RKPD perubahan melalui aplikasi SIPD ;

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RSAKA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Selisih/Kenaikan/Penurunan (13-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							97,170,300,000.00	29,623,927,848.00	23,514,687,000.00	-5,334,359,000.00							29,913,106,000.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							97,170,300,000.00	29,623,927,848.00	23,514,687,000.00	-5,334,359,000.00							29,913,106,000.00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							97,170,300,000.00	29,623,927,848.00	23,514,687,000.00	-5,334,359,000.00							29,913,106,000.00	
1	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terfasilitasi ASN PD yang mendapatkan peningkatan kapasitas pemantapan secara dan prasarana dalam kondisi baik				100 80 % %	100 20 % %	13,240,819,043.00	18,824,137,943.00	18,534,973,843.00	2,519,155,900.00							14,760,100,000.00	
	2.12.01.2.01	Penyelenggaraan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase laporan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja				100 %	100 %	79,350,243.00	71,410,743.00	49,910,240.00	-29,440,000.00					ASN Eselon/ masyara		250,500,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	4 Dokumen	90,184,000.00	38,124,300.00	33,024,000.00	-57,160,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, terrorisme, hoti, dan penyalahgunaan.				84,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen PRA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,369,000.00	4,378,800.00	3,575,000.00	-3,532,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, terrorisme, hoti, dan penyalahgunaan.				3,500,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,873,000.00	4,205,300.00	3,935,000.00	-4,940,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, terrorisme, hoti, dan penyalahgunaan.				3,500,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,139,243.00	9,556,243.00	4,159,243.00	-1,980,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, terrorisme, hoti, dan penyalahgunaan.				2,729,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.3.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																		

verifikasi

			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,450,000.00	6,450,000.00	4,491,000.00	-1,959,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi, netralitas, jujur, dan penyelesaian.	-	-	-	-	1,900,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	7,173,000.00	62,773,000.00	2,773,000.00	-4,400,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi, netralitas, jujur, dan penyelesaian.	-	-	-	-	165,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	pencapaian target administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	8,113,037,500.00	11,783,574,950.00	11,789,529,695.00	2,676,954,309.00			Meningkatnya reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi, netralitas, jujur, dan penyelesaian.	-	-	ASN di Kota Makassar	-	8,847,500,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	8,491,031,340.00	11,342,300,950.00	11,342,331,729.00	2,671,752,389.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi, netralitas, jujur, dan penyelesaian.					8,567,530,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	205,405,150.00	291,305,150.00	291,359,150.00	4,950,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi, netralitas, jujur, dan penyelesaian.					232,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Pemberkasan dan																			
			Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Hasil Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	107,717,000.00	107,717,000.00	107,717,000.00	0.00	Kota Makassar, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi, netralitas, jujur, dan penyelesaian.					112,001,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8,160,000.00	8,160,000.00	8,160,000.00	0.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Kecamatan, Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatnya pencegahan dan pemberantasan korupsi, netralitas, jujur, dan penyelesaian.					8,500,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	pencapaian target Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah				100 %	100 %	101,623,000.00	58,647,000.00	58,647,000.00	-42,976,000.00			-	-	-	ASN di Kecamatan Makassar	-	314,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
	2.12.01.2.05.0002	Penyediaan Paket Pin Dan Input Akta Kelahiran																			
			Jumlah Paket Pin Dan Input Akta Kelahiran				157 Paket	157 Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	318,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Personel																			

verifikasi

			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	13,772,000.00	10,047,000.00	10,047,000.00	-726,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						8,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0009	Pembinaan dan Pelatihan Pegawai	Pembinaan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Terbimbing dan Tugas dan Fungsi yang Terajukan Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	67,500,000.00	54,900,000.00	42,000,000.00	-25,500,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	79,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	23,250,000.00	23,900,000.00	4,800,000.00	-12,450,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						36,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	715,853,510.00	932,406,140.00	523,355,550.00	177,368,060.00			Mempertimbangkan rekomendasi poin 3, dalam dan birokrasi, serta mempertimbangkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.			ASN dikenakan sanksi		1,453,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	26,465,140.00	16,251,540.00	16,251,540.00	-10,213,540.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertimbangkan rekomendasi poin 3, dalam dan birokrasi, serta mempertimbangkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.						17,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Pengadaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	60,083,130.00	44,252,910.00	84,143,130.00	84,060,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertimbangkan rekomendasi poin 3, dalam dan birokrasi, serta mempertimbangkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	-					284,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Perlengkapan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	23,059,000.00	23,099,000.00	22,059,000.00	0.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertimbangkan rekomendasi poin 3, dalam dan birokrasi, serta mempertimbangkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	-					24,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Pengadaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	43,652,700.00	43,652,700.00	43,652,700.00	0.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertimbangkan rekomendasi poin 3, dalam dan birokrasi, serta mempertimbangkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.						35,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	48,097,900.00	48,997,000.00	68,837,900.00	0.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertimbangkan rekomendasi poin 3, dalam dan birokrasi, serta mempertimbangkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.						48,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Pengadaan Bahan Bacaan dan Penyediaan Jaringan/Langganan																			

verifikasi

			Jumlah Dokumen Bahan Standar dan Pedoman Pelayanan - Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	18,660,000.00	15,060,000.00	80,580,000.00	5,220,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertimbangkan politik, hukum dan birokrasi, serta mempertimbangkan dan pertimbangan konsep, rantaian, jadi, dan penyebaran.				33,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.17.01.2.06.0005	Fasilitasi Kunjungan Kerja																				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Kerja				5 Laporan	5 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertimbangkan politik, hukum dan birokrasi, serta mempertimbangkan dan pertimbangan konsep, rantaian, jadi, dan penyebaran.				5,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	27,288,000.00	338,544,000.00	250,450,000.00	31,200,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertimbangkan politik, hukum dan birokrasi, serta mempertimbangkan dan pertimbangan konsep, rantaian, jadi, dan penyebaran.				600,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Aset Tetap pada SKPD																				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset Tetap pada SKPD				3000 Dokumen	1020 Dokumen	216,638,000.00	216,638,000.00	126,638,000.00	-90,000,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertimbangkan politik, hukum dan birokrasi, serta mempertimbangkan dan pertimbangan konsep, rantaian, jadi, dan penyebaran.				280,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0015	Dokumen Pelaksanaan Sistem Pengendalian Berbasis Elektronik pada OKPD																				
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	75,000,000.00	275,000,000.00	275,000,000.00	200,000,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertimbangkan politik, hukum dan birokrasi, serta mempertimbangkan dan pertimbangan konsep, rantaian, jadi, dan penyebaran.				350,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pengadaan capaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	974,843,630.00	1,005,245,000.00	3,780,253,358.00	3,224,433,728.00			-			ASN di kota makassar		2,696,001,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0002	Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0.00	0.00	496,870,000.00	496,870,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				250,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0003	Pengadaan Mebel																				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0.00	0.00	194,993,000.00	194,993,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				250,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Perabotan dan Unsur Kelengkapannya																				
			Jumlah Unit Perabotan dan Unsur Kelengkapannya yang Disediakan				50 Unit	10 Unit	174,843,630.00	1,066,245,000.00	2,705,478,225.00	2,550,687,695.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1,400,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pengadaan capaian layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pengadaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	8,369,235,005.00	8,455,900,200.00	9,451,543,200.00	61,717,500.00			-			ASN di kota makassar		8,340,000,001.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				

verifikasi

			Jumlah Laporan Pengaduan Jasa Sosial Masyarat				1 Laporan	1 Laporan	370,000,000.00	00,000,000.00	33,500,000.00	-336,500,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						360,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0000	Penyediaan Jasa Kebudayaan, Sumber Daya Alam dan Lingk																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kemasyarakat, Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	497,428,000.00	629,530,000.00	563,040,703.00	69,612,708.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						600,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	537,408,000.00	933,348,200.00	636,113,200.00	297,918,200.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						360,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemberdayaan Sosial Pak Daerah Pemerintah Daerah	Cakupan Pemberdayaan Orang Miskin Daerah Pemerintah Daerah				100 %	100 %	696,309,290.00	551,352,000.30	940,190,000.00	214,240,000.00									625,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0003	Pengelolaan Jaring Pengaman Sosial Perempuan, Fakir																				
			Jumlah Kelurahan Percontohan Basis atau Kecamatan Basis Jaringan yang Dikelola dan Disyaratkan Pelatihan				9 Unit	9 Unit	40,500,000.00	43,500,000.00	40,150,000.00	-350,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						45,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pasca Rehabilitasi, Bina Pemberdayaan, Pelaksana Perlindungan Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Lainnya																				
			Jumlah Kendaraan Roda Operasional dan Lainnya yang Dipelihara dan Disyaratkan Pajak dan Perizinannya				38 Unit	38 Unit	427,102,000.00	270,092,000.00	301,150,000.00	-135,940,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						253,021,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.00.0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				200 Unit	200 Unit	166,300,000.00	331,800,000.00	219,300,000.00	52,500,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						141,072,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.00.0009	Pemeliharaan Jalan Tak Berwujud																				
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	62,175,200.00	0.00	0.00	-62,175,200.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						18,900,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.00.0001	Pemeliharaan Rutin Alat Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Dimanfaatkan				1 Unit	1 Unit	0.00	0.00	350,000,000.00	350,000,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						120,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2.12.01	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Pemilikan Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Kota (usia 6-17 Tahun Keluarga Miskin (Gakin) Ke-1 Yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)				10% (21 % %	100 43 % %	3,438,816,250.00	2,604,802,240.00	3,861,915,475.00	914,680,440.00									4,480,010,000.00	
	2.12.01.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	penerbitan cepatan kinerja pelayanan pendaftaran penduduk Terciptanya data penduduk dan dokumen kependudukan (akta satu tahun"				95 %	100 %	1,525,569,160.00	1,871,408,160.00	1,293,174,180.00	-243,412,000.00			Memperkuat reformasi polOk, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan,			penduduk, kependudukan			1,600,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyediaan Pendukung Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	24,458,240.00	16,000,640.00	8,000,640.00	-16,457,600.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Kepponi, Kepponi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi polOk, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan,						64,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Penyediaan Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Pelayanan Akta Pendaftaran Penduduk																				

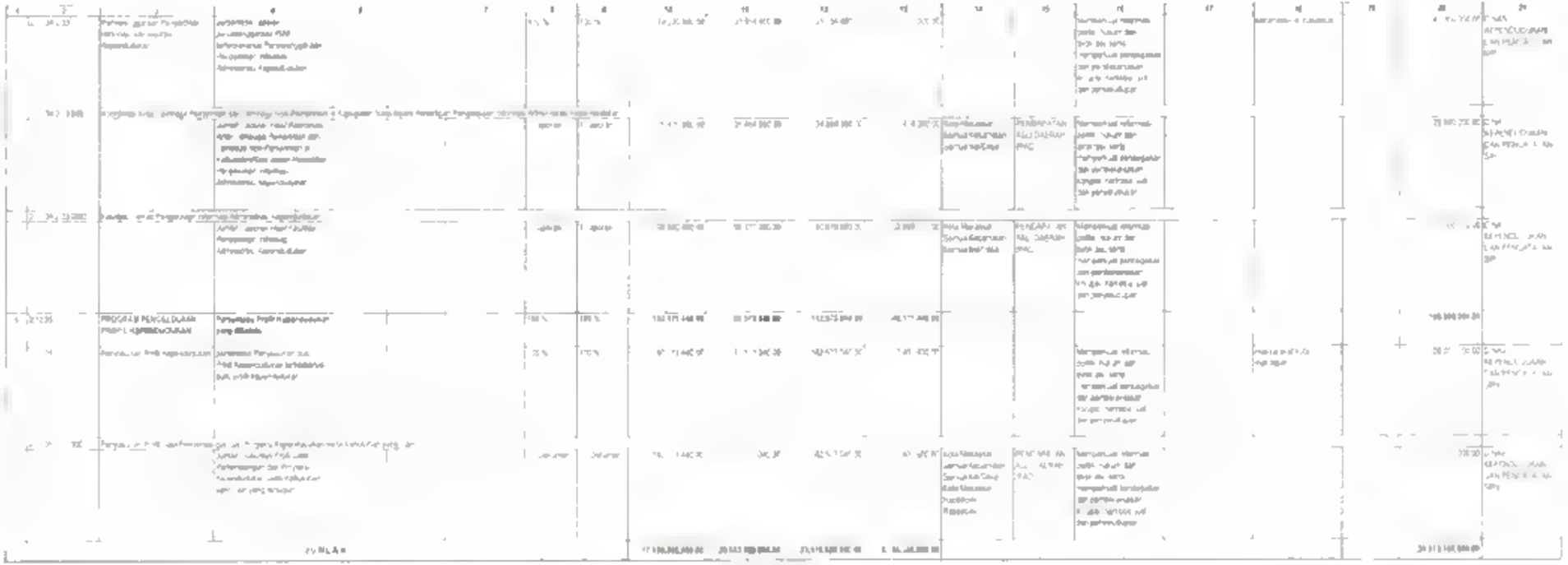
verifikasi

			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penerbitan dan Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Perdata				2 Dokumen	2 Dokumen	350,288,800.00	213,583,800.00	169,760,900.00	-136,127,900.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rapoolsi, Rapoolsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya efektifitas politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatnya pemerintahan dan pembangunan bangsa, negara, jati, dan penyelesaian.	-			370,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	2 Laporan	121,954,320.02	78,971,220.00	94,991,520.06	-35,201,100.00	Kota Makassar, Rapoolsi, Rapoolsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya efektifitas politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatnya pemerintahan dan pembangunan bangsa, negara, jati, dan penyelesaian.	-			160,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Akta Hasil Pencatatan Pelaporan Kependudukan																	
			Jumlah Laporan Pengolahan Dokumen Akta Hasil Pelayanan Pencatatan Kependudukan				0 Laporan	0 Laporan	643,055,800.00	1,364,394,400.00	1,183,484,400.00	53,437,200.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya efektifitas politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatnya pemerintahan dan pembangunan bangsa, negara, jati, dan penyelesaian.	-			1,200,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.07	Penataan Pendaftaran Penduduk	pemenuhan capaian pelayanan pendaftaran penduduk berdasarkan jaminan pelayanan pendaftaran penduduk				95 %	100 % 95 %	1,666,700,360.00	2,379,394,100.00	2,376,441,310.00	619,773,550.00			Meningkatnya efektifitas politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatnya pemerintahan dan pembangunan bangsa, negara, jati, dan penyelesaian.	-	masyarakat kota makassar		2,670,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pengelolaan Dokumen Kependudukan selain Elemen KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sistem Manual dengan Komputasi																	
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Elemen KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sistem Manual dengan Komputasi yang Terkait				1 Dokumen	1 Dokumen	1,666,700,360.00	2,971,394,100.00	2,976,441,310.00	619,773,550.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya efektifitas politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatnya pemerintahan dan pembangunan bangsa, negara, jati, dan penyelesaian.	-			2,660,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	3.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kecamatan Bontoala Bikkah				100 % 53 % %	100 % 53 % %	642,917,400.00	654,375,100.51	733,834,003.00	373,052,600.00							1,911,000,000.00	
	3.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	pemenuhan capaian layanan pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan target pelayanan dokumen pelayanan pencatatan sipil				100 %	100 %	769,350,320.00	766,057,920.00	731,007,830.00	-38,232,400.00			Meningkatnya efektifitas politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatnya pemerintahan dan pembangunan bangsa, negara, jati, dan penyelesaian.	-	masyarakat kota makassar		1,180,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Penerbitan Penerbitan dan Penerbitan Dokumen Akta Pelaporan Pencatatan Perdata																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan, Penerbitan dan Penerbitan Dokumen Akta Pelaporan Pencatatan Perdata				2 Dokumen	2 Dokumen	677,207,800.00	634,215,400.00	655,554,180.00	63,817,600.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Rapoolsi, Rapoolsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya efektifitas politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatnya pemerintahan dan pembangunan bangsa, negara, jati, dan penyelesaian.	-			350,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Penerbitan dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil																	

verifikasi

			Jumlah Laporan Pemadatan Sipil yang Ditingkatkan				3 Laporan	3 Laporan	183,142,000.00	159,792,000.00	53,292,000.00	-129,900,000.00	Seluh Kelurahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempercepat administrasi publik, hukum dan birokrasi, serta mempromosikan pengelolaan dan pemberdayaan kompak, narkoba, judi, dan penyelidikan.				620,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Pelayanan Administrasi Kependudukan Sipil	Persentase cakupan pelayanan administrasi kependudukan sipil				100 %	100 %	171,657,000.00	99,967,000.00	8,817,000.00	-162,793,000.00			Mempercepat administrasi publik, hukum dan birokrasi, serta mempromosikan pengelolaan dan pemberdayaan kompak, narkoba, judi, dan penyelidikan.				139,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Administrasi yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Pendudul yang Beragama Islam																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Administrasi yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Pendudul yang Beragama Islam				1 Laporan	1 Laporan	4,253,000.00	4,253,000.00	3,500,000.00	-753,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempercepat administrasi publik, hukum dan birokrasi, serta mempromosikan pengelolaan dan pemberdayaan kompak, narkoba, judi, dan penyelidikan.				8,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0004	Pelayanan Lanjut Aktif Pendaftaran Penduduk Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tingkat Pemerintah Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Penduduk Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tingkat Pemerintah Kota				2 Laporan	2 Laporan	107,303,250.00	98,303,250.00	8,303,250.00	-162,000,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempercepat administrasi publik, hukum dan birokrasi, serta mempromosikan pengelolaan dan pemberdayaan kompak, narkoba, judi, dan penyelidikan.				128,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	2.12.04	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pemanfaatan OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama				70 %	70 %	532,978,000.00	387,853,000.00	228,853,000.00	-916,630.00							303,000,000.00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pemanfaatan OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				70 %	100 % 70 %	203,644,000.00	133,830,000.00	132,730,000.00	-71,914,000.00			Mempercepat administrasi publik, hukum dan birokrasi, serta mempromosikan pengelolaan dan pemberdayaan kompak, narkoba, judi, dan penyelidikan.		OPD PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN		275,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Dikelola dan Disajikan				2 Dokumen	1 Dokumen	105,514,000.00	118,650,000.00	118,650,000.00	-61,864,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempercepat administrasi publik, hukum dan birokrasi, serta mempromosikan pengelolaan dan pemberdayaan kompak, narkoba, judi, dan penyelidikan.				280,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	17,130,000.00	17,130,000.00	15,000,000.00	-1,214,000.00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempercepat administrasi publik, hukum dan birokrasi, serta mempromosikan pengelolaan dan pemberdayaan kompak, narkoba, judi, dan penyelidikan.				23,000,000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

verifikasi



BAB IV
PENUTUP

Kaidah- kaidah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen penting yang harus dilaksanakan oleh OPD guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengingat hal tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini memuat rencana program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota Makassar.
2. Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada pendekatan baru dalam sistem penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rekomendasi

Rencana anggaran program dan kegiatan dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat terrealisasi sesuai dengan kebutuhan mengingat jumlahnya masih mengacu pada jumlah pagu indikatif. Namun demikian jumlah tersebut belum sesuai dengan kebutuhan riil untuk tahun 2025, sehingga diharapkan adanya penambahan anggaran yang memadai dari APBD Kota Makassar khususnya terkait peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas. Harapan kami, semoga dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat dalam memberikan konstribusi pada peningkatan pelayanan kepada Masyarakat dan mendukung misi Walikota terpilih.

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini disusun untuk dapat dijadikan acuan bagi segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan untuk diketahui oleh para stakeholder yang berkepentingan.

MAKASSAR, 12 AGUSTUS 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR

MUH. HATIM, S.STP., M.Tr.A.P
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 198610172006021001



#MenujuMakassarMULIA

makassarkota.go.id

PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

RANCANGAN

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Dinas Kearsipan



RENCANA KERJA

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dipandang perlu untuk diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, dengan menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana di maksud Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan.:
1. Wakil Wali Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
7.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
9.	Dinas Sosial Kota Makassar
10.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
12.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
13.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Makassar
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
22.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
23.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
24.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
25.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
26.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
27.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
28.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
29.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar

31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
32.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
34.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
35.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
36.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
37.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
38.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
39.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
40.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
43.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
44.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
45.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
46.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
47.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
58.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
49.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
50.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar
51.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

WALIKOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun 2025 ini merupakan Acuan Perencanaan Kegiatan Dinas Kearsipan Kota Makassar selama 1 (Satu) Tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (RENSTRA) 2022-2026. Adapun penyusunan Perubahan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD).

Penyusunan Perubahan Renja PD merupakan faktor mendasar dalam pencapaian sasaran, program dan kegiatan serta lokasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat banyak kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja Dinas Kearsipan Kota Makassar untuk masa mendatang.

Makassar, 12 Agustus 2025

KEPALA DINAS,

FAHYUDDIN,A.P.M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197504251994121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB.I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan atau Dasar Hukum 2
1.3. Maksud Dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB.II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Triwulan II Tahun Berjalan 7
2.2. Analisis Pelayanan SKPD 48
2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 61
2.4. Reviu Rancangan Awal RKPD..... 61
BAB.III.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 93
BAB.IV.PENUTUP 129

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Analisis Capaian Kinerja Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun 2024 dan Realisasi Capaian Sampai Dengan Triwulan ke II Tahun 2025 7

Tabel 2.1.1 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9

Tabel 2.1.2 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Arsip 18

Tabel 2.1.3 Capaian Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 21

Tabel 2.2. Analisis capaian kinerja Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun 2024 49

Tabel 3.1. Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 103

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2025. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun 2025 memuat program/kegiatan tahun 2025, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Mengacu pada dokumen Rencana Kerja Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun 2025 pada arah kebijakan ekonomi daerah yang fokus terhadap pembangunan sarana dan prasarana publik serta peningkatan sosial ekonomi lokal masyarakat, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun 2025 mengalami beberapa penyesuaian dan perubahan rencana maupun target. Demikian pula halnya dengan arah kebijakan keuangan daerah berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan satu tahun 2025 diperlukan perbaikan dengan asumsi-asumsi logis dan terukur.

Berdasarkan evaluasi tersebut diatas, maka pada tahun 2025 perlu disusun perubahan terhadap RKPD sebagai akibat dari:

1. Penyesuaian Belanja Daerah;
2. Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan triwulan satu tahun 2025;

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan Kota Makasar Tahun 2025 dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2025, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam Rencana Kerja Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun Anggaran 2025. Sebagai keberlanjutan pelaksanaan program/kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ada asumsi keadaan yang harus dilakukan pergeseran anggaran karena ada program/kegiatan untuk mendukung program prioritas pemerintah Kota Makassar dengan menggunakan anggaran program/kegiatan yang belum terealisasi sampai dengan triwulan satu.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun 2025.

Tujuan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun 2025 dibuat karena:

1. Penyesuaian Belanja Daerah;
2. Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan triwulan satu tahun 2025;

1.2. Landasan atau Dasar Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4) Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten – kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8); Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6);
26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 14) menyesuaikan Perwali RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun 2025 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kota Makassar di tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan Perubahan RENJA Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun 2025 adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahun 2025 yang operasional:

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kearsipan Kota Makassar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Kearsipan Kota Makassar dan RPJMD Kota Makassar di tahun 2025.
b. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 . Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan.

I.2 . Dasar Hukum

Menjelaskan tentang dasar hukum penyusunan dokumen Perubahan perencanaan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang dasar hukum penyusunan dokumen Perubahan perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan Perubahan Perencanaan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja sampai Triwulan Ke II Tahun Berjalan.

Menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 sampai dengan Triwulan ke II.

2.2. Analisis Pelayanan SKPD.

Menjelaskan tentang analisis kinerja pelayanan perangkat daerah.

2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD.

Menjelaskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dann fungsi perangkat daerah.

2.4. Review Rancangan Awal RKPD.

Menjelaskan tentang hasil reviuw terhadap rancangan akhir RKPD yang meliputi kegiatan identifikasi program prioritas dan kegiatan perangkat daerah

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEARSIPAN KOTA MAKASSAR

Menjelaskan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun 2025 yang disusun berdasarkan P-RKPD Tahun 2025 dan Capaian Kinerja yang direncanakan dalam RPJMD serta Pagu Indikatifnya.

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun 2025, sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN (2025)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Triwulan II Tahun Berjalan

Capaian target Resntra tahun 2025 dan Rentra tahun 2025 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1.
Analisis Capaian Kinerja Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun 2024 dan Realisasi Capaian Sampai Dengan Triwulan ke II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025 (s/dTriwulan II)		
		Target	Realisasi Capaian	Capaian (%)	Target	Realisasi Capaian	Capaian (%)
1	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100	100%	58.,33	58,33
2	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%	100	90%	41,67	46,30
3	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	100	90%	45,45	50,50
4	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	70.59%	70.59%	100	80.39%	78,43%	97,56
5	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	79.2%	79.2%	100	84.3%	80.2%	95.14
6	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	10 Orang	10 Orang	100	10 Orang	0 Orang	0
7	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan	10 Box Arsip	10 Box Arsip	100%	10 Box Arsip	2 Box Arsip	20

	Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat						
8	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	100%	100%	100	100%	50%	50%

Evaluasi pelaksanaan penyusunan Perubahan Renja tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan target dan raealisasi kinerja Program dan kegiatan Dinas Kearsipan Kota Makassar.

Anggaran Dinas Kearsipan Kota Makassar pada tahun 2025 sebesar **Rp. 10.396.755.038,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah)**, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar **Rp. 2.905.794.464.00 -., (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)** atau **27.95%** dan capaian kinerja **33,67%.**.

Realisi keuangan dan capaian kinerja sampai triwulan II dijabarkan pada penjelasan berikut :

1. **Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada tabel brikut:

Tabel 2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi S/D Triwulan II (%)	Capaian (%)
1.	Persentase Sarana Dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	90	45,45	50,50
2.	Persentase Ketersedian Laporan Keuangan dan laporan Kinerja Perangkat Daerah	100	58,33	58,33
3.	Persentase ASN Perangdat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90	41,67	46,30

- Alokasi Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar **Rp.9.987,347,378.00 ,-**, realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II sebesar **Rp. 2.778.197.624 ,-**, atau **28.98%** dan capaian kinerja **36.77%.**

Rincian realisasi keuangan dan capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran Rp. 116.385.860,00 ,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp.51.727.230.00 ,- atau 44,44%, target kinerja 12 Dokumen, capaian kinerja 41.67% (5 dokumen). Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran Rp.78.532.560,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp.43.702.230,-, atau 55,65%, capaian kinerja 33.33%.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah, target kinerja 1 dokumen, capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan II, 66.67% (2 dokumen).

1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Alokasi anggaran sebesar Rp.8.299.300,00,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar RP.0,- , atau 0%, capaian kinerja 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yaitu jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, target kinerja 1 dokumen, capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan II,0% (0 dokumen).

1.3. Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;

Alokasi anggaran Rp.6.465.000,00,- realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar RP. 0,- , atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yaitu jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD , target kinerja 1 dokumen , capaian kinerja sampai dengan triwulan II, 100% (1 dokumen).

1.4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;

Alokasi anggaran sebesar Rp.5.910.000.00,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah Rp. 0,-, atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD adalah jumlah dokumen dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD, target kinerja 1 dokumen capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan I, 0% (0 dokumen).

1.5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Alokasi anggaran sebesar Rp.5.275.000,-. realisasi keungan sampai dengan triwulan II adalah Rp. 2.820.000,-, atau 47.72%.

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yaitu Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD

yang disusun, target kinerja 1 dokumen, capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan II, 100% (1 dokumen).

1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Alokasi anggaran sebesar Rp.6.389.000,- , realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah Rp. 2.775.000,-, atau 43.37 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yaitu jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, target kinerja 3 Dokumen , capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan II, 66.67% (2 dokumen).

1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Alokasi anggaran sebesar Rp.5.515.000,- realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah Rp.2.775.000,-, atau 44.06%.

Indikator kinerja sub kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yaitu Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun, target kinerja 2 dokumen , capaian kinerja sampai dengan triwulan II, 50% (1 Dokumen).

2. Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran sebesar **Rp.7.132.088.728,-** realisasi keungan sampai dengan triwulan II sebesar **Rp.2.537.989.338,- atau 15.88%.**

Indikator kinerja Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun. target kinerja **12 Dokumen**, capaian kinerjai sampai dengan dengan triwulan II, **50%** (6 Dokumen).

Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi anggaran sebesar Rp.6.848.302.318,- realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp.2.421.361.338,-, atau 35.36%.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yaitu Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, target kinerja 39 orang/bulan, capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan II,74% (29 orang/bulan).

2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

Alokasi anggaran sebesar Rp.209.760.000,- realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp.85.400.000-, atau 40,71%.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yaitu jumlah dokumen hasil penyedian administrasi pelaksanaan tugas ASN , target kinerja 12 dokumen, capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan II, 41.67% (5 dokumen).

2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;

Alokasi anggaran sebesar Rp.72.000.000,- realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp.30.000.000-,atau 42.86%.

Indikator kinerja sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yaitu jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan yang disediakan, target kinerja 12 dokumen , capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan II, 41.86% (6 dokumen).

2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.

Alokasi Anggaran Sebesar Rp.2.026.000,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp.1.228.000-, atau 60.61%.

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yaitu jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun, target kinerja 12 Laporan, capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan II, 58.33% (7 Laporan).

3. Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran sebesar **Rp.318.000.000,-**. realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 45.444.760,- atau 14,29%,.

Indikator kinerja kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun,target 21 laporan, capaian kinerja sampai triwulan II, 58.33% (7 Laporan).

Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

3.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Alokasi anggaran sebesar Rp. 108.000.000,- , realisasi keuangan sampai dengan dengan triwulan II sebesar Rp.45.444.760,-, atau 14.29%.

Indikator kinerja sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yaitu jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang dilaksanakan, target kinerja 21 orang, capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan II, 33.33% (7 orang).

4. Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar **Rp.228.069.200,-.** realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp.33.502.710,- atau 14.69%.

Indikator kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah jumlah administrasi umum perngkat daerah yang disediakan, target kinerja 7 jenis, capaian kinerja sampai triwulan II, 18,18% (4 Jenis).

Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

4.1. Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran sebesar Rp.4.995.000,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,-, atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, target kinerja 1 paket, capaian kinerja sampai triwulan II, 0% (0 paket).

4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran sebesar Rp.28.740.000,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 13.636.750,-, atau 47.45%.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, target kinerja 1 paket, capaian kinerja sampai triwulan II 50% (1 paket).

4.3. Penyedian Peralatan Rumah Tangga

Anggaran sebesar Rp.5.193.400,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,-, atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyedian Peralatan Rumah Tangga jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan, target kinerja 1 paket, capaian kinerja sampai triwulan II 0% (0 paket).

4.4. Penyedian Bahan Logistik Kantor

Anggaran sebesar Rp.13.884.800,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,-, atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyedian Bahan Logistik Kantor jumlah bahan logisti kantor yang disediakan, target kinerja 1 paket, capaian kinerja sampai triwulan II 0% (0 paket).

4.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Alokasi anggaran sebesar Rp.9.456.000,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 3.225.000, atau 31.11%..

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yaitu jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, target kinerja 1 paket , capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan II, 40% (1 paket).

4.6. Fasilitas Kunjungan Tamu;

Alokasi anggaran sebesar Rp.2.800.000,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0, atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu yaitu jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu, target kinerja 1 laporan, capaian kinerja sampai triwulan II, 0% (0 laporan).

4.7. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD;

Alokasi anggaran sebesar Rp.163.000.000,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 16.640.960,-, atau 10,21%.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, target kinerja 22 laporan , capaian kinerja sampai triwulan II, 12,50% (2 laporan).

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran sebesar **Rp.1.294.546.000,-.** realisasi keungan sampai dengan triwulan II sebesar **Rp. 0,-** atau **0%.**

Indikator kinerja kegiatan Penadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan, target 107 unit, capaian kinerja sampai triwulan II, 0% (0 unit).

Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 253.390.000,-.** realisasi keungan sampai dengan dengan triwulan **II sebesar Rp.103.139.461,-, atau 40,70%.**

Indikator kinerja kegiatan Pemeliharaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendapatkan pemeliharaan, target **88** , capaian kinerja sampai triwulan II, **45.45% (40 Unit).**

Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

Alokasi anggaran sebesar Rp. 43.730.000,- , realisasi sampai dengan keuangan sampai triwulan II sebesar Rp.15.164.300,-, atau 34,68%.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yaitu jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan yang dibayarkan pajaknya, target kinerja 1 unit , capaian kinerja sampai dengan triwulan II, 35%.

7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

Alokasi anggaran sebesar Rp. 159.880.000,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah Rp. 63.075.161,- atau 39.45%.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yaitu jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya , target kinerja 24 unit , capaian kinerja sampai dengan triwulan II, 40% (7 unit).

7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

Alokasi anggaran sebesar Rp.31.780.000,- , realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 18.900.000,- atau 59.47%.

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu jumlah peralatan dan mesin lainnya yang yang dipelihara, target kinerja 39 unit, capaian kinerja sampai dengan triwulan II, 61,54% (24 unit).

7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

Alokasi anggaran sebesar Rp. 18.000.000,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp.6.000.000,-, atau 33.33%.

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yaitu jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, target kinerja 1 unit , capaian kinerja sampai triwulan II, 41,67%.

Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja terdapat pada:

- Proses pengadaan belanja barang dan dan jasa sebagian kegiatan sementara berproses.

Tindak Lanjut :

- Mempercepat proses belanja barang dan jasa kegiatan sesuai dengan regulasi.

2. Program Pengelolaan Arsip

Indikator Kinerja Program Pengelolan Arsip dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.2. Capaian Indikator Kinerja Program Pengelolaan Arsip

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi S/D Triwulan II Tahun 2025	Capaian (%)
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti	2350 Arsip	570 arsip	24,26

	yang sah dan pertanggungjawaban nasional			
2.	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	5 SKPD	4 SKPD	80
3.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	230 Orang	0 Orang	0

Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 411.636.340,-** realisasi keuangan sampai dengan triwulan **II sebesar Rp.65.211.420,- , atau 15.84%.**

Untuk rincian realisasi keungan dan capaian kinerja kegiatan sampai dengan dengan triwulan II adalah sebagai berikut :

1. **Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** dengan Alokasi Anggaran Sebesar **Rp.64.468.400,-.** realisasi keungan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 7.243.500,-, atau 27.94%.

   Indikator kinerja kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota adalah jumlah arsip dinamis kota makassar yang dikelolah, target kinerja **2100 Arsip**, capaian kinerja sampai dengan triwulan **II, 52.38% (1100 arsip).**

   Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

   1.1. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 33.651.400**,-** realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 5.188.500,-, atau 15.42%.

   Indikator kinerja sub kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis adalah jumlah naskah dinas arsip yang diciptakan dan digunakan, target kinerja 100 berkas (1000 arsip), capaian kinerja sampai triwulan II,50% (50 berkas atau 500 arsip).

   1.2. Pemeliharaan Dan Penyusutan Arsip Dinamis;Alokasi anggaran sebesar Rp.16.415.000,-. realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 5.188.500,-, atau 15.42%.

   Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis adalah Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan, target kinerja 100 berkas (1000 arsip), capaian kinerja samapai triwulan II, 50% (50 berkas atau 500 arsip).

1.3. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 14.420.000,- , realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,-, atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota adalah jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/ kota, target kinerja 5 laporan, capaian kinerja sampai triwulan II , 50% (5 laporan).

2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran sebesar **Rp.129.958.440,-** realisasi keunagan sampai dengan triwulan II sebesar **Rp. 0,-**, atau **0%.**

Indikator kinerja kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota adalah jumlah arsip statis kota makassar yang dikelolah, **250 arsip**, capaian kinerja sampai triwulan II, 28% (70 arsip).

Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

2.1. Pengumpulan Dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI

Alokasi anggaran sebesar Rp.2.820.000,- , realisasi keungan sampai dengan triwulan II sebesar Rp.0,-, atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI yaitu jumlah salinan otentik naskah asli arsip terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan kepada ANRI, target kinerja 2 arsip, capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan II, 0% (0 arsip).

2.2. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, Dan Akses Arsip Statis

Alokasi anggaran sebesar Rp.129.958.440,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp.0,-, atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, Dan Akses Arsip Statis yaitu jumlah arsip statis yang mendapat akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis, target kinerja 250 arsip , capaian kinerja sampai dengan triwulan II, 28% (70 arsip).

3. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat kabupaten/Kota

Alokasi anggaran sebesar **Rp. 217.191.500,-**, realisasi keuangan sampai dengan triwulan **II sebesar Rp.57.967.920,-, atau 26.69%.**

Indikator kinerja kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota adalah jumlah simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat Kota Makassar yang dikelolah, target kinerja **20 Pengguna**, capaian kinerja sampai triwulan **II,40% (8 pengguna).**

Adapun rincian Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

3.1. Penyedian Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran sebesar Rp.142.750.400,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 57.967.920,-, atau 40,61%.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyedian Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah yaitu jumlah layanan penyedian informasi akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN, target kinerja 20 pengguna, capaian kinerja sampai dengan triwulan II,40% (8 pengguna).

3.2. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran sebesar Rp.74.441.100,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,-, atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota adalah jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan, target kinerja 2 laporan, capaian kinerja sampai dengan triwulan II, 0%.

Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja terdapat pada:

- Proses pengadaan belanja barang dan dan jasa sebagian kegiatan sementara berproses.

Tindak Lanjut :

- Mempercepat proses belanja barang dan jasa kegiatan sesuai dengan regulasi.

3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Indikator Kinerja Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip adalah tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, target kinerja pada tahun 2024 adalah **10 Box arsip**, capaian kinerja sampai dengan triwulan II **10%** (**1 Box Arsip)**.

Tabel 2.1.3. Realisasi Capaian Kinerja Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
	TARGET	REALISASI s/d TRIWULAN II	CAPAIAN %
Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	10 box arsip	2 box arsip	20

Alokasi Anggaran sebesar **Rp.394.156.920,-,** realisasi keuangan sampai dengan triwulan **II sebesar Rp. 60.923.420,- atau 15.46%.**

Adapun rincian realisasi kegiatan untuk program perlindungan dan penyelamatan arsip adalah sebagai berikut:

1. **Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**.
   Alokasi Anggaran sebesar **Rp.26.669.000,-.** realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar **Rp. 0,-** , atau **0%** .
   Indikator kinerja kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun adalah jumlah arsip dilingkungan pemerintah kota makassar yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun yang dimusnahkan, target

kinerja **1000 arsip**, capain kinerja sampai dengan triwulan II, 9.80% (100 Arsip)

Rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1.1. Penilaian dan penetapan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun.

Alokasi anggaran sebesar Rp.13.780.000,- , realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,- , atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun adalah jumlah pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang mendapatkan penilaian dan pemusnahan, target kinerja 500 arsip, capaian kinerja sampai dengan triwulan II, 10% (50 arsip).

1.2. Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun.

Alokasi anggaran sebesar Rp.12.889.000,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 0,-. atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yaitu Jumlah pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang dilaksanakan, target kinerja 500 arsip, capaian kinerja sampai triwulan II, 10% (50 arsip).

2. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota

Alokasi Anggaran sebesar **Rp.12.370.000,-.** realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 4.455.500,- , atau 36.02% ..

Indikator kinerja kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota adalah Jumlah Arsip yang Berskala Kota Makassar yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana, target kinerja **100 arsip**, capain kinerja sampai dengan triwulan II, 100% (100 arsip)

Rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut:

2.1. Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana

Alokasi anggaran sebesar Rp.6.225.000,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 2.217.500,-. atau 35.62%.

Indikator kinerja sub kegiatan Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana yaitu jumlah arsip yang dilakukan evaluasi ,identifikasi, akibat bencana, target kinerja 100 arsip, capaian kinerja sampai triwulan II, 100% (100 arsip).

2.2. Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana

Alokasi anggaran sebesar Rp.6.145.000,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp.2.238.000,-. atau 36.42%.

Indikator kinerja sub kegiatan Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana yaitu jumlah arsip yang dilakukan pemulihan dan penyimpanan akibat bencana, target kinerja 100 arsip, capaian kinerja sampai triwulan II, 100% (100 arsip).

3. **Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**.

Alokasi anggaran sebesar **Rp.106.400.000,-** , realisasi keuangan sampai dengan dengan triwulan II sebesar **Rp.0,-,** atau **0%** .

Indikaor kinerja Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota adalah jumlah arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota yang di autentikasi, target kinerja 300 arsip, capaian kinerja sampai dengan triwulan II, **0% (0 arsip)**.

Rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut:

4.1. Penilaian Dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip.

Alokasi anggaran sebesar Rp.82.006.000,-, realisasi keuangan sampai dengan dengan triwulan II sebesar Rp. 0,-, atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Penilaian Dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip adalah jumlah autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang yang mendapatkan penilaian dan penetapan, target kinerja 150 arsip, capaian kinerja sampai dengan triwulan II, 0% (0 arsip).

4.2. Penilaian Dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip.

Alokasi anggaran sebesar Rp.24.394.000,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp.0,-, atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Mediasesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yaitu jumlah hasil alih media yang dinilai ditetapkan sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip, target kinerja 150 arsip, capaian kinerja sampai dengan triwulan II, 0% (0 arsip).

5. **Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**

Alokasi anggaran sebesar **Rp. 248.717.920,-** , realisasi keuangan sampai dengan triwulan **II sebesar Rp.56.467.920-,, atau 22,70% .**

Indikator kinerja Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang adalah jumlah arsip statis kabupaten/kota makasar yang dinyatakan hilang yang dilakukan pencarian, target kinerja **330 arsip**, sampai dengan triwulan **II, 24,24% (80 arsip) .**

Rincian sub kegiatan adalah sebagai berikut:

5.1. Penilaian Dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Yang Dinyatakan Hilang.

Alokasi anggaran sebesar Rp.87.900.960,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 0,-, atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Penilaian Dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Yang Dinyatakan Hilang adalah jumlah autentisitas arsip statis yang dinyatakan Hilang yang mendapatkan penilaian dan penetapan, target kinerja 150 arsip, capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan II, 0% (0 arsip).

5.2. Evaluasi dan penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan hilang

Alokasi anggaran sebesar Rp.143.120.400,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp.56.467.920,-, atau 39.45%.

Indikator kinerja sub kegiatan Penilaian Dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Yang Dinyatakan Hilang adalah jumlah autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang yang mendapatkan penilaian dan penetapan, target kinerja 150 arsip, capaian kinerja sampai dengan triwulan II, 40 (80 arsip).

5.3. Penetapan dan pengumuman daftar pencarian arsip (DPA).

Alokasi anggaran sebesar Rp.17.696.560,-, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp.0,-, atau 0%.

Indikator kinerja sub kegiatan Penetapan dan pengumuman daftar pencarian arsip (DPA) adalah jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang ditetapkan dan diumumkan, target kinerja 30 arsip realisasi sampai dengan triwulan II, 0% (0 arsip).

Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja terdapat pada:

- Proses pengadaan belanja barang dan dan jasa sebagian kegiatan sementara berproses.

Tindak Lanjut :

- Mempercepat proses belanja barang dan jasa kegiatan sesuai dengan regulasi

4. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Alokasi angaran sebesar **Rp.3.614.400,-** realisasi sampai triwulan II sebesar **Rp 1.462.000,-, atau 40.45%,-.**

Indikator Program Perizinan Penggunaan arsip adalah prosentase perijinan pengunaan arsip yang diterbitkan, target kinerja 100%, capaian kinerja sampai dengan dengan triwulan II, 50%.

Adapun rincian kegiatan Program Penggunaan Arsip adalah sebagai berikut:

4.1. Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota,

Alokasi anggaran sebesar **Rp. 3.614.400,-** realisasi keuangan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 1.462.000,-, atau 40.45%,-.

Indikator sub kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota adalah jumlah pengguna arsip yang bersifat tertutup di kota makassar yang mendapat pelayanan izin, target 100%,capaian kinerja sampai dengan triwulan II, 50%.

Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja terdapat pada:

- Proses pengadaan belanja barang dan dan jasa sebagian kegiatan sementara berproses.

Tindak Lanjut :

- Mempercepat proses belanja barang dan jasa kegiatan sesuai dengan regulasi.

Dari penjabaran diatas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel TC.29. Rekapitulasi Pelaksanaan Evaluasi Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kearsipan Kota Makassar s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan /Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come/Kegiatan (Out Come) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Kegiatan Sampai Dengan Tahun Berjalan s/d (Maret 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6x100%)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4x100%)
				Wajib									
				Kearsipan									
2.24	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2.24	01	2.01		Perencanaan , Penganggaran, dn Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	51 Dokumen	5 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100 %	11 Dokumen	27 Dokumen	53 %
2.24	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	6 Dokumen	50 %

2.24	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	60 %
2.24	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan SKPD yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	60 %
2.24	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	60 %
2.24	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	60 %
2.24	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	9 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	100 %	3 Laporan	7 Laporan	78 %
2.24	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan	6 Laporan	60 %
2.24	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat**	**36 Dokumen**	**8 Dokumen**	**8 Dokumen**	**8 Dokumen**	**100 %**	**8 Dokumen**	**24 Dokumen**	**67 %**

					Daerah yang Disusun								
2.24	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	190 Orang	36 orang	37 orang	36 orang	97 %	28 orang	100 orang	52,63 %
2.24	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan	75 orang	15 orang	15 orang	15 orang	100 %	15 orang	45 orang	60 %
2.24	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan yang disediakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	60 %
2.24	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang disusun	4 laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	75%
2.24	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	4 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	75%
2.24	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola	4 laporan	0 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	2 Laporan	50%

2.24	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD yang disusun	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	12 bulan	36 laporan	60 %
2.24	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	4 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	50
2.24	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi BMD pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**25 Jenis**	**0 Jenis**	**4 Jenis**	**4 jenis**	**100%**	**4 Jenis**	**8 Jenis**	**32%**
2.24	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	4 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	50%
2.24	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang disediakan	36 bulan	0 bulan	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	0 bulan	0
2.24	01	2.03	03	Koordinasi dan penilaian barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Koordinasi dan penilaian barang Milik Daerah SKPD yang dilaksanakan	36 bulan	0 bulan	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	0 bulan	0
2.24	01	2.03	04	Pembinaan Pengawasan dan	Jumlah Pembinaan Pengawasan dan	36 bulan	0 bulan	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	0 bulan	0

				pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan								
2.24	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsilidasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD yang dilaksanakan	4 Dokumen	0 laporan	1 laporan	1 laporann	100%	1 laporan	2 laporan	50%
2.24	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	48 Bulan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0
2.24	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan	4 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	50%
2.24	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Prangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Kepegawaian Prangkat Daerah yang tersedia**	**24 Jenis**	**2 Jenis**	**4 Jenis**	**2 jenis**	**50 %**	**2 Jenis**	**5 Jenis**	**21 %**
2.24	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	7 Jenis	0 Jenis	1 Jenis	0 jenis	0	0 Jenis	0 Jenis	0
2.24	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut	329 Stel	50 Stel	53 Stel	46 Stel	87 %	50 jenis	146 Stel	44 %

					kelengkapannya yang diadakan								
2.24	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang di data dan dikelola	4 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	50%
2.24	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksnaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksnaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 bulan	0 bulan	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	0 bulan	0
2.24	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlahlaporan Monitoring, Evaluasi dan penilaiankinerjapegawai	0 bulan	0 bulan	0 bulan	0 bulan	0	0 bulan	0 bulan	0
2.24	01	2.05	06	Pemulangan pegawai yang pension	JumlahPemulanganpegawai yang pensiun	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0	0 orang	0 orang	0
2.24	01	2.05	07	Pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	JumlahPemulanganpegawai yang meninggaldalmmelaksanakantugas	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0	0 orang	0 orang	0
2.24	01	2.05	08	Pemindahan tugas ASN	Jumlah ASN yang pindahtugas	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0	0 orang	0 orang	0
2.24	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	92 orang	0 orang	17 orang	4 orang	24%	17 orang	21 orang	23%

				Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
2.24	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	300 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0	0 orang	0 orang	0
2.24	01	2.05	11	Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturanperundang-undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturanperundang-undangan	15 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0	0 orang	0 orang	0
2.24	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**60 Bulan**	**4 Bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100 %**	**12 Bulan**	**28 bulan**	**47 %**
2.24	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	29 komponen	4 komponen	4 komponen	0 komponen	0 %	7 komponen	11 komponen	38 %
2.24	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 Jenis	0 Jenis	4 Jenis	3 Jenis	75 %	4 jenis	7 jenis	35 %
2.24	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	51 Jenis	0 Jenis	9 Jenis	0 jenis	0%	9 jenis	9 jenis	18 %

2.24	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	19 Jenis	0 Jenis	3 Jenis	2 jenis	67%	3 jenis	5 jenis	26 %
2.24	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	30 jenis	1 Jenis	6 jenis	3 jenis	50 %	6 jenis	9 Jenis	30 %
2.24	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	8 media cetak	0 media cetak	2 media cetak	1 media cetak	50%	1 media cetak	3 media cetak	38%
2.24	01	2.06	07	Penyedian bahan / material	Jumlah bahan / material yang disediakan	10 jenis	0 Jenis	0 Jenis	0 jenis	0	0 Jenis	0 Jenis	0
2.24	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang mendapatkan fasilitas	670 orang	120 orang	125 orang	0	0	125 orang	245 orang	36 %
2.24	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	83 kali	6 kali	15 kali	12 kali	80 %	17 kali	35 kali	42 %
2.24	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis SKPD ditata	4 jenis	0 jenis	0 Arsip	0 Arsip	0	0	0	0

2.24	01	2.06	11	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	JumlahSistemPemerintahanBerbasisElektronik pada SKPD yang dilaksanakan	2 Tahun	0	0	0	0	0	0	0
2.24	**01**	**2.076**		**Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan**	**96 Unit**	**9 unit**	**13 unit**	**13 unit**	**100 %**	**19 unit**	**41 unit**	**43 %**
2.24	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	0	0	0	0	0	0	0	0
2.24	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang diadakan	3 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0
2.24	01	2.07	03	Pengadaan alat besar	Jumlah Pengadaan alat besar yang diadakan	0	0	0	0	0	0	0	0

2.24	01	2.07	04	Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor yang diadakan	0	0	0	0	0	0	0	0
2.24	01	2.07	05	Pengadaan meubel	Jumlah Pengadaan meubel yang diadakan	14 unit	0	0	0	0	6 unit	6 Unit	43
2.24	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaanperalatan dan mesin lainnya yang diadakan	66 unit	1 unit	14 unit	13 unit	93%	14 unit	28 unit	42 %
2.24	01	2.07	07	Pengadaan asset tetap lainnya	Jumlah pengadaanasset tetaplainnya yang diadakan	4 unit	0	0	0	0	0	0	0
2.24	01	2.07	08	Pengadaan asset tak terwujud	Jumlah Pengadaan asset takterwujud yang diadakan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	0 Aplikasi	0 Aplikasi	0 %	0	1 Aplikasi	100 %
2.24	01	2.07	09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0	0	0	0	0	0	0	0
2.24	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	3 Unit	0	0	0	0	1 unit	1 unit	33 %
2.24	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana pendukung	5 Unit	0	0	0	0	1 unit	1 unit	20 %

				pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan								
2.24	**01**	**2.08**		**Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan**	**14 jenis**	**2 jenis**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**100 %**	**3 jenis**	**8 jenis**	**57 %**
2.24	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat dan ekspedisi yang disediakan	96 Surat	0	24	24	100%	24 surat	48 surat	50 %
2.24	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	13 Jenis	1 jenis	2 jenis	2 jenis	100 %	2 Jenis	5 jenis	39 %
2.24	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0	0	0 jenis	0%
2.24	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	6 orang	0	2 Orang	1 Orang	50%	2 orang	3 Orang	50%
2.24	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**28 jenis**	**4 jenis**	**5 jenis**	**5 jenis**	**100 %**	**6 jenis**	**15 jenis**	**54 %**

				Pemerintahan Daerah	**Pemerintahan Daerah yang dipelihara**								
2.24	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan yang disediakan	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 unit	100 %	1 Unit	3 Unit	60 %
2.24	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	21 Unit Mobil dan 68 unit motor	16 Unit	4 Unit Unit Mobil dan 13 unit motor	17 unit	100 %	4 Unit Unit Mobil dan 18 unit motor	55 Unit	62%
2.24	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar yang disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0
2.24	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat angkutandarattakber motor	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan Perizinan angkutandarattakbermotor yang disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0

2.24	01	2.09	05	Pemeliharaan meubel	Jumlah meubel yang mendapat pemeliharaan	5 set	0	0	0	0	0	0	0
2.24	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	142 unit	24 Unit	26 unit	17 unit	65%	24 unit	45 unit	32%
2.24	01	2.09	07	Pemeliharaan asset tetap lainnya Lainnya	Jumlah asset tetap lainnya Lainnya yang mendapat pemeliharaan	0 unit	0 unit	0 unit	0	0	0 unit	0 unit	0
2.24	01	2.09	08	Pemeliharaan asset tak berwujud	Jumlah asettakberwujud yang mendapat pemeliharaan	2 Aplikasi	1 unit	0 unit	0	0	0 unit	1 unit	50%
2.24	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi	2276 M²/Tahun	0 Unit	500 M²/Tahun	0	0	0 M²/Tahun	155 M²/Tahun	7 %
2.24	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3 unit	60 %

2.24	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0
2.24	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Tanah yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi	0	0	0	0	0	0	0	0
2.24	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Tingkat Ketersedian Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggung Jawaban Nasional**	**6070 Arsip (94%)**	**5070 Arsip / 250 Arsip (74.1%)**	**5320 Arsip/250 Arsip (79,2%)**	**5320 Arsip/250 Arsip (79,2%)**	**100 %**	**5320 Arsip/250 Arsip (86%)**	**5320 Arsip/750 arsip**	**86 %**
					Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelolah Arsip Secara Baku	**100% (51 SKPD)**	**60.78 (31 SKPD)**	**70.59% (5 SKPD)**	**70.59% (5 SKPD)**	**100 %**	**(71%) 5 SKPD**	**(80%) 41 SKPD**	**80 %**
					Peningkatan SDM Penelolah Kearsipan	**71 orang**	**31 orang**	**10 Orang**	**10 Orang**	**100%**	**10 Orang**	**51 Orang**	**72%**
2.24	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab,/Kota**	**Jumlah Arsip Dinamis Kota Makassar Yang Dikelolah**	**50 arsip,5 Kegiatan, 25 SKPD**	**10 arsip,1 Kegiatan, 6 SKPD**	**10 Arsip, 1 Kegiatan, 5 SKPD**	**10 Arsip, 1 Kegiatan, 5 SKPD**	**100 %**	**10 Arsip, 1 Kegiatan, 5 SKPD**	**30 Asip, 3 Kegiatan,15 SKPD**	**60 %**

2.24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis yang diciptakan dan digunakan	50 Dokumen	10 Dokumen	10 Arsip	10 Arsip	100 %	10 Dokumen	30 Dokumen	60 %
2.24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis yang mendapat pemeliharaan dan penyusutan	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	1 Kegiatan	3 Kegiatan	60 %
2.24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang diawasi	25 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	100 %	5 SKPD	15 SKPD	40 %
2.24	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab,/Kota**	**Jumlah Arsip Statis Kota Makassar Yang Dikelolah**	**10 berkas 750 arsip**	**2 berkas 150 arsip**	**2 berkas 150 arsip**	**2 berkas 150 arsip**	**100 %**	**2 berkas 150 arsip**	**6 berkas 450 arsip**	**60 %**
2.24	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan Kepada ANRI	10 berkas	2 berkas	2 berkas	2 berkas	100 %	2 berkas	6 berkas	60 %
2.24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang mendapat Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses	750 arsip	150 arsip	150 arsip	150 arsip	100 %	150 arsip	450 arsip	60 %
2.24	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional**	**Jumlah simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kota**	**10 Dokumen, dan 10 SKPD**	**0**	**2 Dokumen 2 SKPD**	**2 Dokumen 2 SKPD**	**100 %**	**2 Dokumen 2 SKPD**	**4 Dokmen 4 SKPD**	**40 %**

				Tingkat Kabupaten/kota	**Makassar yang dikelolah**								
2.24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Kearsipan Tingkat Kota Makassar Melalui JIKN yang mendapat Penyediaan Informasi dan Akses	10 Layanan	0	2 Layanan	2 Layanan	100 %	2 Layanan	4 Layanan	40 %
2.24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kota Makassar yang mendapat peningkatan/pemberdayaan kapasitas	10 SKPD	0	2 SKPD	2 SKPD	100 %	2 SKPD	4 SKPD	40 %
2.24	**03**	**2.03**		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setaiap Aspek Kehidupan Bebangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat**	**1191 Box (1 Box Arsip Statis Per SKPD)**	**1141 Box (1 Box Arsip Statis Per SKPD)**	**1151 Box (1 Box Arsip Statis Per SKPD)**	**1151 Box Arsip**	**100 %**	**1161 Box Arsip**	**1161 Box Arsip**	**98 %**

2.24	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh)Tahun**	**Jumlah Arsip Dilingkungan Pemerintah Makassar Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun dimusnahkan**	**510 Arsip**	**0**	**102 Arsip**	**102 Arsip**	**100 %**	**102 Arsip**	**204 Arsip**	**40 %**
2.24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang mendapat penilaian dan pemusnahan	255 Arsip	0	51 Arsip	51 Arsip	100 %	51 Arsip	102 Arsip	40 %
2.24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang dilaksanakan	255 Arsip	0	51 Arsip	51 Arsip	100 %	51 Arsip	102 Arsip	40 %
2.24	**03**	**2.02**		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Berskala Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip Yang Berskala Kota Makassar yang DilindungiAkibat Bencana**	**50 Arsip**	**0**	**10 Arsip**	**10 Arsip**	**100 %**	**10 Arsip**	**20 Arsip**	**40**
2.24	03	2.02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dievaluasi dan diidentifikasi Akibat Bencana	25 Arsip	0	5 Arsip	10 Arsip	200 %	10 Arsip	20 Arsip	80 %

2.24	03	2.02	01	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang mendapat pemulihan dan penyimpanan Akibat Bencana	25 Arsip	0	5 Arsip	10 Arsip	100 %	10 Arsip	20	80 %
2.24	**03**	**2.03**		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten Kota Yang Digabung Dan/AtauDibubarkan Dan Pemekaran Daerah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan**	**Jumlah Arsip Perangkat Daerah Kabupaten Kota Yang Digabung Dan/AtauDibubarkan Dan Pemekaran Daerah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan**	**50 Arsip**	10 Arsip	10 Arsip	0	0	**0**	**0**	**20 %**
2.24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang didata, disusun daftar dan dinilai serta diserahkan atau dimusnahkan Bagi Penggabungan Perangkat Kota Makassar	15 Arsip	3 Arsip	3 Arsip	0	0	0	3 Arsip	20 %
2.24	03	2.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang didata, disusun daftar dan dinilai serta diserahkan atau dimusnahkan Bagi Pembubaran Perangkat Kota Makassar	15 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	0	0	0 Arsip	0 Arsip	20 %

2.24	03	2.03	03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan yang mendapat pendampingan	10 Arsip	0	0 Arsip	0	0	0 Arsip	0 Arsip	0 %
2.24	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Kelurahan yang mendapat pendampingan	10 Arsip	0	0 Arsip	0	0	0 Arsip	0 Arsip	0 %
2.24	**03**	**2.04**		**Autentikasi Arsip statis dan arsip hasi lalih media kabupaten/kota**	**Jumlah Arsip Statis Dan Arsip Hasil Alih Media Kota Makassar Yang Diautentikasi**	**70 Arsip**	**5 Arsip**	**14 Arsip**	**14 Arsip**	**100 %**	**14 Arsip**	**33 Arsip**	**47 %**
2.24	03	2.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Autentisitas Arsip Statis yang dinilai dan ditetapkan sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10 Arsip	2 Arsip	2 Arsip	2 Arsip	100 %	2 Arsip	6 Arsip	60 %
2.24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan	Jumlah Hasil Alih Media yang dinilai dan ditetapkan sesuai Persyaratan	60 Arsip	0 Arsip	12 Arsip	12 Arsip	100 %	12 Arsip	24 Arsip	40 %

				Penjaminan Keabsahan Arsip	Penjaminan Keabsahan Arsip								
2.24	**03**	**2.05**		**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota Yang DinytakanHilang**	**Jumlah Arsip Statis Kota Makassar Yang Dinytakan Hilang Yang Dilakukan Pencarian**	**25 Arsip**	**5 Arsip**	**5 Arsip**	**5 Arsip**	**100 %**	**5 Arsip**	**15 Arsip**	**60 %**
2.24	03	2.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang yang mendapat penilaian dan penetapan	10 Arsip	2 Arsip	2 Arsip	2 Arsip	100 %	2 Arsip	6 Arsip	60 %
2.24	03	2.05	02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Hasil Alih Media Arsip Statis yang dinyatakan Hilang yang mendapat evaluasi dan penetapan	10 Arsip	2 Arsip	2 Arsip	2 Arsip	100 %	2 Arsip	6 Arsip	640 %
2.24	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang ditetapkan dan diumumkan	5 Arsip	1 Arsip	1 Arsip	1 Arsip	100 %	1 Arsip	3 Arsip	60 %
2.24	**04**			**PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Persentase Perijinan Penggunaan Arsip Yang Diterbitkan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100 %**

Tabel 2.2. Analisis capaian kinerja Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN	CAPAIAN (%)
1	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100
2	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%	100
3	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	100
4	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	80,39%	80.39%	100
5	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	84,3%	84,3%	100
6	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	51 Orang	51 Orang	100
7	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	1171 arsip	1171 arsip	100
8	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	100%	100%	100

Tabel TC.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan
Kota Makassar

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra / Renja SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Cat.Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	12			14	17
1	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun**		**Ketersedian Laporan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat daerah**	**9 Dokumen**	**9 Dokumen**	**11 Dokumen**	**11 Dokumen**	**11 Dokumen**	**11 Dokumen**	**11 Dokumen**	**11 Dokumen**	
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah dokumen RKA perubahan SKPD yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	

	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun			2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
2	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun**		Prosentase Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangakat Daerah	**8 Dokumen**	**8 Dokumen**	**8 Dokumen**	**8 Dokumen**	**8 Dokumen**	**8 Dokumen**	**8 Dokumen**	**8 Dokumen**	
	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan			36 Orang	37 Orang	39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	35 Orang	37 Orang	39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	
	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan			15 Orang	15 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	14 Orang	15 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan yang disediakan			12 Bulan	12 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang disusun			0 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun			0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola			0 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD yang disusun			12 Bulan	12 Bulan	12 laporan	12 laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	
	Jumlah pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
3	**Jumlah Administrasi BMD pada Perangkat Daerah yang disediakan**			**0 Jenis**	**0 Jenis**	**4 Jenis**	**7 Jenis**	**0 Jenis**	**0 Jenis**	**4 Jenis**	**7 jenis**	
	Jumlah penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

	Jumlah pengamanan barang milik daerah SKPD yang disediakan			0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	
	Jumlah Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan			0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	
	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan			0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	
	Jumlah rekonsilidasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD yang dilaksanakan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	
	Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
4	**Jumlah administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia**			**2 Jenis**	**4 Jenis**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	**2 Jenis**	**4 Jenis**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	
	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai			0 Jenis	1 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	0 Jenis	1 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	
	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan			46 Stel	53 Stel	53 Paket	53 Paket	50 Paket	53 Paket	53 Paket	53Paket	
	Jumlah pegawai yang di data dan dikelola			0 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Jumlah koordinasi sistem informasi kepegawai			0 Bulan	0 Bulan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Bulan	0 Bulan	0 Dokumen	0 Dokumen	

	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai			0 Bulan	0 Bulan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Bulan	0 Bulan	0 Dokumen	0 Dokumen	
	Jumlah pemulangan pegawai yang pensiun			0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	
	Jumlah pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas			0 orang	0 orang	0 Laporan	0 Laporan	0 orang	0 orang	0 Laporan	0 Laporan	
	Jumlah ASN yang pindahTugas			0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	
	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			0 orang	18 Orang	18 Orang	20 orang	0 orang	8 orang	18 Orang	20 orang	
	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan			0 Orang	0 Orang	0 Orang	100 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	100 Orang	
	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			0 Orang	0 Orang	0 Orang	5 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	5 Orang	
5	**Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan**			**2 Jenis**	**4 Jenis**	**4 Jenis**	**4 Jenis**	**1 Jenis**	**4 Jenis**	**4 Jenis**	**4 Jenis**	
	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			4 Komponen	4 Komponen	7 Paket	7 Paket	0 Komponen	0 Komponen	4 Komponen	7 Paket	
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			4 Jenis	4 Jenis	4 Paket	4 Paket	0 Jenis	2 Jenis	4 Jenis	4 Paket	
	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan			9 Jenis	9 Jenis	12 Paket	12 Paket	0 Jenis	0 Jenis	9 Jenis	12 Paket	
	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan			3 Jenis	3 Jenis	5 Paket	5 Paket	0 Jenis	0 Jenis	3 Jenis	5 Paket	
	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			6 Jenis	6 Jenis	0 Paket	0 Paket	0 Jenis	4 Jenis	6 Jenis	0 Paket	

	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			2 Media Cetak	2 Media Cetak	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Media 0 Cetak	0 Media Cetak	2 Media Cetak	2 Dokumentasi	
	Jumlah bahan/material yang disediakan			0 Jenis	0 Jenis	2 Paket	2 Paket	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	2 Paket	
	Jumlah tamu yang mendapatkan fasilitas			120 Orang	125 Orang	150 Laporan	150 Laporan	36 Orang	0 Orang	125 Orang	150 Laporan	
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan			6 Kali	11 Kali	15 Kali	20 Laporan	1 Kali	8 Kali	15 Kali	20 Laporan	
	Jumlah arsip dinamis SKPD ditata			0 Jenis	0 Jenis	1 Jenis	1 Dokumen	0 Jenis	0 Jenis	1 Jenis	1 Dokumen	
	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan			0 Tahun	0 Tahun	0 Tahun	1 Dokumen	0 Tahun	0 Tahun	0 Tahun	1 Dokumen	
6	**Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**			**9 Unit**	**24 Unit**	**19 Unit**	**19 Unit**	**2 Unit**	**24 Unit**	**19 Unit**	**19 Unit**	
	Jumlah kendaraan dinas jabatan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan			0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	
	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan			0 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	2 Unit	
	Jumlah alat berat yang diadakan			0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	
	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang diadakan			0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	
	Jumlah mebel yang diadakan			0 Unit	0 Unit	3 Unit	3 Unit	Unit	Unit	0 Unit	3 Unit	
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan			8 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	0 Unit	1 Unit	14 Unit	14 Unit	
	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan			0 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	2 Unit	
	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan			1 Aplikasi	0 Aplikasi	0	0	0 Aplikasi	1 Aplikasi	0 Aplikasi	0 Unit	

	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan			0 0 Unit	0 0 unit	0 1 Unit	0 1 Unit	0 0 Unit	0 0 Unit	0 0 unit	0 1 Unit	
	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan			0 paket	0 Unit	1 Unit	1 Unit	0 paket	0 Unit	1 Unit	1 Unit	
7	**Jumlah Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**			**1 Jenis**	**2 Jenis**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	
	Jumlah jasa surat menyurat dan ekspedisi yang disediakan			0 Surat	24 Surat	24 Laporan	24 Laporan	0 Surat	24 Surat	24 Laporan	24 Laporan	
	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			1 Jenis	2 Jenis	4 Laporan	4 Laporan	1 Jenis	2 Jenis	4 Laporan	4 Laporan	
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			0 Jenis	0 Jenis	0 Laporan	0 Laporan	0 Jenis	0 Jenis	0 Laporan	0 Laporan	
	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			0 Orang	0 Orang	3 Laporan	3 Laporan	2 Orang	0 Orang	3 Laporan	3 Laporan	
8	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendapatkan pemeliharaan**		**Persentase Sarpras Dalam kondisi Baik**	**5 Jenis**	**5 Jenis**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	**5 Jenis**	**5 Jenis**	**6 Jenis**	**6 Jenis**	
	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan yang disediakan			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan			4 Unit Mobil dan 13 Unit Motor	4 Unit Mobil dan 13 Unit Motor	5 Unit Mobil dan 13 Unit Motor	5 Unit Mobil dan 13 Unit Motor	4 Unit Mobil dan	4 Unit Mobil dan	5 Unit Mobil dan 13 Unit Motor	5 Unit Mobil dan 13 Unit Motor	

	kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan							13 Unit Motor	13 Unit Motor			
	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar yang disediakan			0	0	0	0	0	0	0	0 Unit	
	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor yang mendapatkan pemeliharaan			0	0	0	0	0	0	0	0 Unit	
	Jumlah mebel yang mendapat pemeliharaan			0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan			21 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	12 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	
	Jumlah aset tetap lainnya yang mendapatkan pemeliharaan			0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	
	Jumlah aset tak berwujud yang mendapatkan pemeliharaan			0 Unit	0 unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 unit	0 Unit	0 Unit	
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi			500 m2 /Tahun	500 m2 /Tahun	0 Unit	0 Unit	0	500 m2 /Tahun	0 Unit	0 Unit	
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	

	Jumlah sarana dan prasaranan pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi			0	0	0	0	0	0	0	0 Unit	
	Jumlah tanah yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi			0	0	0	0	0	0	0	0 Ha	
9	**Jumlah arsip Kota Makassar yang dikelola**		**Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelolah Asip Secara Baku**	**10 Arsip**	**10 Arsip**	**10 Arsip**	**10 Arsip**	**10 Arsip**	**10 Arsip**	**10 Arsip**	**10 Arsip**	
				1 Kegiatan	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	
				5 SKPD	**5 SKPD**	**5 SKPD**	**5 SKPD**	**5 SKPD**	**5 SKPD**	**5 SKPD**	**5 SKPD**	
	Jumlah Arsip Dinamis yang diciptakan dan digunakan			10 Arsip	10 Arsip	10 Arsip	10 Arsip	10 Arsip	10 Arsip	10 Arsip	10 Arsip	
	Jumlah Arsip Dinamis yang mendapat pemeliharaan dan penyusutan			100 Arsip	100 Arsip	100 Arsip	100 Arsip	100 Arsip	100 Arsip	100 Arsip	100 Arsip	
	Jumlah SKPD yang diawasi			5 SKPD	5 SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	
10	**Jumlah Arsip Statis Kota Makasar yang dikelola**		**Persentase kenaikan jumlah arsip yang diakusisi**	150 Arsip	150 Arsip	150 Arsip	150 Arsip	150 Arsip	150 Arsip	150 Arsip	150 Arsip	
	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan Kepada ANRI			2 Arsip	2 Arsip	2 Arsip	2 Arsip	2 Arsip	2 Arsip	2 Arsip	2 Arsip	
	Jumlah Arsip Statis yang mendapat Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses			150 Arsip	150 Arsip	150 Arsip	150 Arsip	150 Arsip	150 Arsip	150 Arsip	150 Arsip	
11												

	Jumlah Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kota Makassar yang dikelola			**2 Pengguna dan 2 SKPD**	**2 Pengguna dan 2 SKPD**	**2 Pengguna dan 2 SKPD**	**2 Pengguna dan 2 SKPD**	**2 Pengguna dan 2 SKPD**	**2 Pengguna dan 2 SKPD**	**2 Pengguna dan 2 SKPD**	**2 Pengguna dan 2 SKPD**	
	Jumlah Layanan Kearsipan Tingkat Kota Makassar Melalui JIKN yang mendapat Penyediaan Informasi dan Akses			2 Pengguna	2 Pengguna	2 Pengguna	2 Pengguna	2 Pengguna	2 Pengguna	2 Pengguna	2 Pengguna	
	Jumlah Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kota Makassar yang mendapat peningkatan/pemberdayaan kapasitas			2 SKPD	2 SKPD	2 SKPD	2 Laporan	0 SKPD	2 SKPD	2 SKPD	2 SKPD	
12	**Jumlah Arsip Dilingkungan Pemerintah Kota Makassar yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun yang dimusnahkan**			**102 Arsip**	**102 Arsip**	**102 Arsip**	**102 Arsip**	**102 Arsip**	**102 Arsip**	**102 Arsip**	**102 Arsip**	
	Jumlah Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang mendapat penilaian dan pemusnahan			51 Arsip	51 Arsip	51 Arsip	51 Arsip	51 Arsip	51 Arsip	51 Arsip	51 Arsip	
	Jumlah Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang dilaksanakan			51 Arsip	51 Arsip	51 Arsip	51 Arsip	51 Arsip	51 Arsip	51 Arsip	51 Arsip	
13	**Jumlah Arsip yang Berskala Kota Makassar yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana**			**10 Arsip**	**10 Arsip**	**10 Arsip**	**10 Arsip**	**10 Arsip**	**0 Arsip**	**10 Arsip**	**10 Arsip**	
	Jumlah Arsip yang dievaluasi dan diidentifikasi Akibat Bencana			10 Arsip	10 Arsip	10 Arsip	10 Arsip	10 Arsip	0 Arsip	10 Arsip	10 Arsip	

	Jumlah Arsip yang mendapat pemulihan dan penyimpanan Akibat Bencana			10 Arsip	10 Arsip	10 Arsip	10 Arsip	10 Arsip	0 Arsip	10 Arsip	10 Arsip	
14	**Jumlah Arsip Perangkat Daerah Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang diselamatkan**			**2 Arsip**	**0 Arsip**	**0 Arsip**	**0 Arsip**	**2 Arsip**	**0 Arsip**	**0 Arsip**	**0 Arsip**	
	Jumlah Arsip yang didata, disusun daftar dan dinilai serta diserahkan atau dimusnahkan Bagi Penggabungan Perangkat Kota Makassar			2 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	2 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	
	Jumlah Arsip yang didata, disusun daftar dan dinilai serta diserahkan atau dimusnahkan Bagi Pembubaran Perangkat Kota Makassar			2 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	2 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	
	Jumlah Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan yang mendapat pendampingan			0 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	
	Jumlah Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Kelurahan yang mendapat pendampingan			0 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	0 Arsip	
15	**Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kota Makassar yang diautentifikasi**			**14 Arsip**	**14 Arsip**	**14 Arsip**	**14 Arsip**	**14 Arsip**	**14 Arsip**	**14 Arsip**	**14 Arsip**	
	Jumlah Autentisitas Arsip Statis yang dinilai dan ditetapkan sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			2 Arsip	2 Arsip	2 Arsip	2 Arsip	2 Arsip	2 Arsip	2 Arsip	2 Arsip	

	Jumlah Hasil Alih Media yang dinilai dan ditetapkan sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			12 Arsip	12 Arsip	12 Arsip	12 Arsip	12 Arsip	12 Arsip	12 Arsip	12 Arsip	
16	**Jumlah Arsip Statis Kota Kota Makassar yang Dinyatakan Hilang yang dilakukan pencarian**			**5 Arsip**	**5 Arsip**	**5 Arsip**	**5 Arsip**	**5 Arsip**	**5 Arsip**	**5 Arsip**	**5 Arsip**	
	Jumlah Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang yang mendapat penilaian dan penetapan			5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	
	Jumlah Hasil Alih Media Arsip Statis yang dinyatakan Hilang yang mendapat evaluasi dan penetapan			5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	
	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang ditetapkan dan diumumkan			5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	
18	**Jumlah Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kota Makassar yang mendapat pelayanan izin**		**Persentase Perizinan Penggunaan Arsip Yang Diterbitkan**	**1 SOP**	**0 SOP**	**0 SOP**	**0 SOP**	**0 SOP**	**1 SOP**	**0 SOP**	**0 SOP**	
				12 Dokumen	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	
	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang disusun dan ditetapkan			1 SOP	0 SOP	0 SOP	0 SOP	0 SOP	1 SOP	0 SOP	0 SOP	
	Jumlah Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang mendapat penetapan daftar dan penetapan izin			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 okumen	

2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Masalah Internal yang dihadapi Dinas Kearsipan Kota Makassar antara lain :

1. Dukungan SDM Dinas Kearsipan Kota Makassar baik dari segi kuantitas dan kualitas .
2. Pengadaan Gedung Arsip yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang representative sesuai dengan Perka ANRI No.31 Tahun 15, yang dilengkapiu dengan depot arsip, ruang diorama, ruang preservasi arsip, ruang restorasi dan ruang layanan kearsipan.

Adapun masalah Eksternal yang dihadapi Dinas Kearsipan Kota Makassar antara lain:

1. Belum terintegrasinya Pengelolaan arsip secara digital (Digitalisasi arsip)
2. Belum adanya Perda Kearsipan .
3. Masih perlunya peningktan SDM Kearsipan baik dari segi kulitas dan kuantitas.

Menyikapi permasalahan – permasalahan yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal, disamping tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kearsipan Kota Makassar serta isu–isu penting terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka hal–hal yang perlu mendapat perhatian untuk mengatasi kondisi tersebut diatas antara lain :

1. Peningkatan kompotensi SDM Dinas Kearsipan melalui kegiatan diklat dan .
2. Penambahan SDM fungsional arsiparis di organisasi perangkat daerah.
3. Pembangunan Gedung Arsip yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang representative sesuai dengan Perka ANRI No.31 Tahun 15, yang dilengkapi dengan depot arsip, ruang diorama, ruang preservasi arsip, ruang restorasi dan ruang layanan kearsipan.
4. PembuatanPerda Kearsipan di Kota Makassar.

2.4. Reviu Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Makassar PRKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasionaldan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kota Makassar berakhir sampai Tahun 2026. Olehnya itu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Kota Makassar tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. PRKPD Kota

Makassar selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD.

RKPDP memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kewajiban daerah untuk menyusun PRKPD sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan/perundangan. Proses yang dilakukanya itu membandingkan antara rancangan awal PRKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kearsipan Kota Makassar.

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Kearsipan Kota Makassar terhadap Analisis gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Makassar, Aspek Geografis serta Demografi, Indikator Kinerja, Evaluasi Program dan Kegiata RKPD sampai tahun berjalan 2025 dan Realisasi RPJMD terhadap evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan 2024, Pembangunan daerah tahun lalu dan realisasi target indikator kinerja, permasalahan, peluang, isu strategis, maka skala prioritas kebutuhan proyeksi tahun 2025 dan 2026 terhadap program dan kegiatan Dinas Kearsipan Kota Makassar, maka untuk tahun 2025 program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen Klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dengan ini Dinas Kearsipan Kota Makassar melaksanakan 4 program (16 kegiatan), terdiri dari 1 (satu) program penunjang/pendukung (7 kegiatan dan 26 sub kegiatan) dan 3 (tiga) program utama (8 kegiatan dan 17 sub kegiatan).

Adapun Alasan atau tujuan RKPDP terhadap Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan Kota Makassar, sebagai berikut:

- Pedoman bagi Dinas Kearsipan Kota Makassar dalam Penyusunan Perubahan RKA setelah Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2025;
- Kerangka acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2025;
- Pedoman bagi SKPD untuk menyusun Perubahan Renja-SKPD;
- Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan ataupun evaluasi program dan kegiatan.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal PRKPD. Telaahan

teradap rancangan awal PRKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD Kota Makassar, berdasarkan rancangan awal PRKPD.

Hasil review terhadap rancangan awal PRKPD yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran untuk Dinas Kearsipan pada Perubahan tahun 2025 mengacu pada dokumen PRKPD yang disusun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Berikut Tabel. 2.4 Review terhadap rancangan awal Dinas Kearsipan Kota Makassar adalah sebagai berikut:

Tabel TC .31. Review Terhadap Rancangan Awal PRKPD Tahun 2025

SKPD: DINAS KEARSIPAN

Rancangan Awal PRKPD						Hasil Analisis Kebutuhan Sesuai Hasil Rasionalisasi					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100% 100% 90%	8.559.038.160	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perngkat Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat kapasitas	100% 90%	8.559.038.160,00	

2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Makassar**	**Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun**	**13 Dokumen**	**116.385.860**	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Kec. Makassar**	**Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun**	**13 Dokumen**	**105.381.180,00**	
2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Makassar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3 Dokumen	77.077.560	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Makassar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3 Dokumen	77.077.560	
2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Makassar	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	6.249.620	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Makassar	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	6.249.620	
2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Makassar	Jumlah dokumen RKA perubahan SKPD yang disusun	1 Dokumen	4.965.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Makassar	Jumlah dokumen RKA perubahan SKPD yang disusun	1 Dokumen	4.965.000	

2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Makassar	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	4.410.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Makassar	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	4.410.000	
2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Makassar	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	1 Dokumen	3.775.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Makassar	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	1 Dokumen	3.775.000	
2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	2 Laporan	4.889.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	2 Laporan	4.889.000	
2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Makassar	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2 Laporan	4.015.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Makassar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2 Laporan	4.015.000	
2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Makassar**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun**	**8 Dokumen**	**7.132.088.318**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Makassar**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun**	**8 Dokumen**	**7.130.288.318**	

2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Makassar	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	39 Orang/bulan	6.848.303.280	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Makassar	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	39 Orang/bulan	6.848.302.318	
2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Makassar	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	207.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Makassar	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan	12 dokumen	207.960.000	
2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Makassar	Jumlah dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	72.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan yang disediakan	12 dokumen	72.000.000	
2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Laporan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	0 Dokumen	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Makassar	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang disusun	0 Dokumen	0	
2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	0 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Makassar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	0 Laporan	0	

2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec. Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kec. Makassar	Jumlah penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola	0 Dokumen	0	
2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kec. Makassar	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD	12 Laporan	2.026.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kec. Makassar	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD yang disusun	12 Laporan	2.026.000	
2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Makassar	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	0 dokumen	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Makassar	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	0 dokumen	0	
2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kec. Makassar**	**Jumlah Administrasi BMD pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**0 Jenis**	**0**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kec. Makassar**	**Jumlah Administrasi BMD pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**0 Jenis**	**0**	

2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Makassar	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	0 Dokumen	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Makassar	Jumlah penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	0 Dokumen	0	
2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Makassar	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	0 dokumen	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Makassar	Jumlah pengamanan barang milik daerah SKPD yang disediakan	0 Dokumen	0	
2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan	0 laporan	0	
2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	0	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Makassar	Jumlah laporan hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	0 laporan	0	

2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan rekonsilidasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah laporan rekonsilidasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	0 Laporan	0	
2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Makassar	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Makassar	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	0 laporan	0	
2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Makassar	Jumlah dokumen Hasil Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	0 Dokumen	0	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Makassar	Jumlah dokumen Hasil Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	0 dokumen	0	
2.04	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Makassar dan Luar Daerah**	**Jumlah administrasi kepegaian Perangkat Daerah yang tersedia**	**1 Jenis**	**363.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Makassar dan Luar Daerah**	**Jumlah administrasi kepegaian Perangkat Daerah yang tersedia**	**1 Jenis**	**111.000.000**	Dirasionalisasi
2.04.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. Makassar	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	0 Unit	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. Makassar	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	0 Unit	0	

2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Makassar	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0 paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Makassar	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	0 paket	0	
2.04.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	0 Dokumen	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Makassar	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	0 Dokumen	0	
2.04.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Makassar	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi kepegawaian	Dokumen	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Makassar	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi kepegawaian	0 dokumen	0	
2.04.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Makassar	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	0 Dokumen	0	
2.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	Orang	0	Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	0 Orang	0	
2.04.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang	Laporan	0	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam	0 Laporan	0	

	dalam Melaksanakan Tugas		meninggal dalam melaksanakan tugas			Melaksanakan Tugas		melaksanakan tugas			
2.04.08	Pemindahan Tugas ASN		Jumlah ASN yang pindahTugaskan	Orang	0	Pemindahan Tugas ASN		Jumlah ASN yang pindahTugas	0 Orang	0	
2.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	42 Orang	111.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 Orang	111.000.000	
2.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0 Orang	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0 Orang	0	
2.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0 Orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0 Orang	0	

2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan**	**12 Bulan**	**460.069.200**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan**	**12 Bulan**	**232.267.300**	
2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Paket	4.995.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Paket	4.995.000	
2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	32.281.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	32.281.100	
2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Makassar	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	7.631.400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Makassar	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	7.631.400	
2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	7.847.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	7.847.800	
2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan	Kota Makassar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	14.112.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	14.112.000	

	dan Penggandaan										
2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0 Dokumen	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0 Dokumen	0	
2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kota Makassar	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 Paket	0	Penyediaan Bahan/Material	Kota Makassar	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	0 Paket	0	
2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Makassar	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	7 Laporan	2.400.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Makassar	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	7 Laporan	2.400.000	
2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	41 Laporan	163.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	16 Laporan	163.000.000	
2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis SKPD	0 Dokumen	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis SKPD	0 Dokumen	0	
2.06.11	Dukungan Pelaksanaan	Kota Makassar	Jumlah dokumen dukungan sistem pemerintahan	1 Dokumen	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem	Kota Makassar	Jumlah dokumen dukungan sistem pemerintahan	0 Dokumen	0	

	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		berbasis elektronik pada SKPD			Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		berbasis elektronik pada SKPD			
2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**107 Unit**	**552.364.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**29 Unit**	**552.364.000**	**Dialihkan ke Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip untuk Kegiatan Pameran Kearsipan sebesar Rp. 742.182.000,00**
2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	0 Unit	0	

2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 Unit	0	
2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Kota Makassar	Jumlah unit alat berat yang disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Alat Besar	Kota Makassar	Jumlah unit alat berat yang disediakan	0 Unit	0	
2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Makassar	Jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Makassar	Jumlah unit alat angkutan darat tak bermotor yang disediakan	0 Unit	0	
2.07.05	Pengadaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah pakret mebel yang disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah pakret mebel yang disediakan	0 Unit	0	
2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	107 Unit	552.364.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	29 Unit	552.364.000	Dialihkan ke Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip untuk Kegiatan Pameran Kearsipan sebesar Rp.

											742.182.00 00,00
2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Makassar	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Makassar	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	0 Unit	0	
2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	0 Unit	0	
2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 Unit	0	
2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 Unit	0	
2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Kota Makassar	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 Unit	0	

	atau Bangunan Lainnya										
2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**4 Jenis**	**244.868.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**4 Jenis**	**199.496.400**	
2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah laporan penyedian jasa surat menyurat	0 Laporan	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah laporan penyedian jasa surat menyurat	0 Laporan	0	
2.08.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	28.496.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	28.496.400	
2.08.04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah laporan penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0 Laporan	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah laporan penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0 Laporan	0	
2.08.05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor	7 Laporan	171.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 Laporan	171.000.000	

2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendapatkan pemeliharaan**	**5 Jenis**	**253.390.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendapatkan pemeliharaan**	**5 Jenis**	**228.240.000**	
2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara atau dibayarkan pajaknya	1 Unit	40.880.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara atau dibayarkan pajaknya	1 Unit	40.880.000	
2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Kota Makassar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara atau dibayarkan pajaknya	24 Unit	143.070.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kota Makassar	Jumlah kendaraan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara atau dibayarkan pajaknya	24 Unit	143.070.000	

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Operasional atau Lapangan					
2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Makassar	Jumlah kendaraan alat besar yang yang dipelihara atau dibayarkan perizinannya	0 Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Makassar	Jumlah kendaraan alat besar yang yang dipelihara atau dibayarkan perizinnannya	0 Unit	0	
2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Makassar	Jumlah kendaraan alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	0 unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Makassar	Jumlah kendaraan alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	0 unit	0	
2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah mebel yang dipelihara	0 Unit	0	Pemeliharaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah mebel yang dipelihara	0 Unit	0	
2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	39 Unit	26.290.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 Unit	26.290.000	

2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Makassar	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	0 Unit	0	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Makassar	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	0 unit	0	
2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	0 Unit	0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah aset tak berwujud yang pelihara	0 unit	0	
2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 Unit	0	
2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	18.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	18.000.000	
2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Kota Makassar	Jumlah sarana dan prasaranan pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang	0 unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah sarana dan prasaranan pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang	0 Unit	0	

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		dipelihara/direhabilitasi					dipelihara/direhabilitasi			
2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kota Makassar	Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi	0 Ha	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kota Makassar	Luas tanah yang dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi	0 Ha	0	
02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Kota Makassar**	**Persentase Ketersediaan Arsip**	**6,71% (5820 Arsip)**	**384.964.496**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Kota Makassar**	**Persentase Ketersediaan Arsip**	**6,71% (5820 Arsip)**	**384.964.496**	
2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Jumlah arsip Kota Makassar yang dikelola**	**2100 Arsip**	**64.486.400**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Jumlah Arsip Kota Makassar yang dikelola**	**2100 Arsip**	**18.172.400**	
2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kota Makassar	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	100 Berkas	8.359.400	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kota Makassar	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	100 Berkas	8.359.400	
2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kota Makassar	Jumlah naskah dinas yang dilakukan	100 Berkas	5.419.000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kota Makassar	Jumlah naskah dinas yang dilakukan	100 Berkas	5.419.000	

			pemeliharaan dan penyusutan					pemeliharaan dan penyusutan			
2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota	Kota Makassar	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenagan Kabupaten/ Kota	5 Laporan	4.394.000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota	Kota Makassar	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenagan Kabupaten/ Kota	5 Laporan	4.394.000	
2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Jumlah Arsip Statis Kota Makasar yang dikelola**	**250 Arsip**	**129.958.440**	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Jumlah Arsip Statis Kota Makasar yang dikelola**	250 Arsip	**161.270.696**	
2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Kota Makassar	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan Kepada ANRI	2 Arsip	5.267.200	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Kota Makassar	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan Kepada ANRI	2 Arsip	5.267.200	
2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kota Makassar	Jumlah arsip statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses arsip statis	250 Arsip	156.003.496	Jumlah Arsip Statis yang mendapat Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses	Kota Makassar	Jumlah arsip statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses arsip statis	250 Arsip	156.003.496	

2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Jumlah Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kota Makassar yang dikelola**	2 Pengguna	**217.191.500**	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Jumlah Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kota Makassar yang dikelola**	20 Pengguna	**205.521.400**	
2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Kota Makassar	Jumlah Layanan Informasi , Akses dan layanan Kearsipan Tingkat Kota Makassar Melalui JIKN	2 pengguna	143.595.400	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Kota Makassar	Jumlah Layanan Informasi , Akses dan layanan Kearsipan Tingkat Kota Makassar Melalui JIKN	20 pengguna	143.595.400	
2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabuoaten/Kota	2 Laporan	61.926.000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabuoaten/Kota	2 Laporan	61.926.000	
03	**PROGRAM PERLINDUN**	**Kota Makassar**	**Persentase Cakupan**	**9,50%(1181 Arsip)**	**976.670.800**	**PROGRAM PERLINDUNGAN**	**Kota Makassar**	**Persentase Cakupan**	**9,50%(1181 Arsip)**	**976.670.800**	

	GAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**			**DAN PENYELAMATAN ARSIP**		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**			
2.01.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Rentensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**Kota Makassar**	**Jumlah Arsip Dilingkungan Pemerintah Kota Makassar yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun yang dimusnahkan**	**1000 Arsip**	**26.669.000**	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Rentensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**Kota Makassar**	**Jumlah Arsip Dilingkungan Pemerintah Kota Makassar yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun yang dimusnahkan**	**1000 Dokumen**	**14.213.000**	
2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di	Kota Makassar	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan, dan pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	1000 Arsip	6.761.000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Makassar	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan, dan pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	1000 Arsip	6.761.000	

	Bawah 10 (sepuluh) Tahun										
2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kota Makassar	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang dimusnahkan	100 Berkas	7.452.000	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kota Makassar	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang dimusnahkan	100 Berkas	7.452.000	
2.02	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Jumlah Arsip yang Berskala Kota Makassar yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana**	**20 Dokumen**	**12.370.000**	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Jumlah Arsip yang Berskala Kota Makassar yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana**	**20 Dokumen**	**16.017.000**	
2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kota Makassar	Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi dan diidentifikasi Akibat Bencana	100 Arsip	8.190.000	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kota Makassar	Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi dan diidentifikasi Akibat Bencana	100 Arsip	8.190.000	

2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kota Makassar	Jumlah Arsip yang dilakukan pemulihan dan penyimpanan Akibat Bencana	100 Arsip	7.827.000	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kota Makassar	Jumlah Arsip yang mendapat pemulihan dan penyimpanan Akibat Bencana	100 Arsip	7.827.000	
2.03	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Kota Makassar**	**Jumlah arsip Perangkat Daerah Kota yang Digabungkan dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang diselamatkan**	**0 Arsip**	**0**	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Kota Makassar**	**Jumlah arsip Perangkat Daerah Kota yang Digabungkan dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang diselamatkan**	**10 Arsip**	**0**	
2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan	Kota Makassar	Jumlah daftar Arsip yang dilakukan pendataan, penyusuan, dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Daftar	0	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah daftar Arsip yang dilakukan pendataan, penyusuan, dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan	0 Daftar	0	

	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota							perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Arsip yang dilakukan pendataan , penyusunandaftar dan penilaiani serta penyerahan atau pemusnahan Bagi Penggabungan Perangkat daerah Kabupaten/Kota	0 Arsip	0	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Arsip yang dilakukan pendataan , penyusunandaftar dan penilaiani serta penyerahan atau pemusnahan Bagi Penggabungan Perangkat daerah Kabupaten/Kota	0 Arsip	0	
2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Kota Makassar	Jumlah daftar Arsip yang dilakukan pendampinagan penyelamtana arsip bagi pemekaran daerah kecamatan	0 Arsip	0	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Kota Makassar	Jumlah daftar Arsip yang dilakukan pendampinagan penyelamtana arsip bagi pemekaran daerah kecamatan	0 Arsip	0	
2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Kota Makassar	Jumlah daftar arsip yang dilakuakan pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/ Kelurahan	0 Arsip	0	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Kota Makassar	Jumlah daftar arsip yang dilakuakan pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi	0 Arsip	0	

								Pemekaran Desa/ Kelurahan			
2.04	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kota Makassar yang diautentifikasi**	**300 Arsip**	**106.400.000**	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kota Makassar yang diautentifikasi**	**300 Arsip**	**835.107.200**	
2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Makassar	Jumlah daftar Autentisitas Arsip sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang dinilai dan ditetapkan sesuai	150 Arsip	829.771.200	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Makassar	Jumlah daftar Autentisitas Arsip sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang dinilai dan ditetapkan sesuai	150 Arsip	829.771.200	Pameran Kerasipan, bertambah sebesar Rp. 688.319.200,00
2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan	Kota Makassar	Jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	150 Arsip	5.336.000	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Makassar	Jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	150 Arsip	5.336.000	

	Keabsahan Arsip										
2.05	**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	**Kota Makassar**	**Jumlah Arsip Statis Kota Kota Makassar yang Dinyatakan Hilang yang dilakukan pencarian**	**330 Arsip**	**248.717.920**	**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	**Kota Makassar**	**Jumlah Arsip Statis Kota Kota Makassar yang Dinyatakan Hilang yang dilakukan pencarian**	**330 Arsip**	**111.333.600**	
2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kota Makassar	Jumlah daftar Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang yang dinilai dan ditetapkan	150 Arsip	40.412.000	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kota Makassar	Jumlah Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang yang mendapat penilaian dan penetapan	150 Arsip	40.412.000	
2.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Kota Makassar	Jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan Hasil Alih Media Arsip yang dinyatakan Hilang	150 Arsip	65.549.600	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Kota Makassar	Jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan Hasil Alih Media Arsip yang dinyatakan Hilang	150 Arsip	65.549.600	
2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar	Kota Makassar	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang lakukan	30 Arsip	5.372.000	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Kota Makassar	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang lakukan	30 Arsip	5.372.000	

	Pencarian Arsip (DPA)		penetapan dan pengumuman					penetapan dan pengumuman			
04	**PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Kota Makassar**	**Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup**	100%	**103.172.544**	**PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Kota Makassar**	**Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup**	100%	**103.172.544**	Pembuatan dokumen a SOP Dan SKM, pengaloiha n dari kegiatan pengadaan barang milik daerah
2.01	**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Jumlah Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kota Makassar yang mendapat pelayanan izin**	**12 Dokumen**	**3.614.400**	**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Jumlah Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kota Makassar yang mendapat pelayanan izin**	**12 Dokumen**	**103.172.544**	
2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Makassar	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang disusun dan ditetapkan	0 SOP	0	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Makassar	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang disusun dan ditetapkan	0 SOP	0	

2.01.02	Penyedian Daftar dan Penetapan Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Makassar	Jumlah daftar arsip hasil penyedian daftar dan penetapan izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	12 Arsip	103.172.544	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Makassar	Jumlah daftar arsip hasil penyedian daftar dan penetapan izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	12 Arsip	103.172.544	Pembuatan SOP dan SKM

BAB III
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS KEARSIPAN KOTA MAKASSAR

Rencana kerja perubahan merupakan acuan setiap Perangkat Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai visi misi Walikota Makassar. Dengan rencana kerja perubahan yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah.

Penyusunan RENJA Perubahan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPDP) Tahun 2025. Penyusunan RENJA Perubahan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPDP, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBDP.

Anggaran Dinas Kearsipan Kota Makassar sebesar **Rp.10.396.755.038,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah**) pada tahun 2025 dan setelah perubahan berkurang sebesar **Rp. Rp.372.910.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)** sehingga menjadi **Rp.10.023.845.038 (Sepuluh Milyar Dua Puluh Tiga Juta Delapan Rtaus Empat Puluh Lima Rinbu Tiga Puluh Delapan Rupiah)**.

Untuk lebih jelasnya program dan kegiatan serta pendanaan yang dilaksanakan di Renja Perubahan Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun 2024 dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang semula telah dianggarkan pada DPA Pokok sebesar **Rp.9.987,347,378.00,-**, berkurang sebesar **Rp. 1.028.310.180,-** sehingga menjadi **Rp.8.559.037.198**,-.

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

Indikator kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun, target kinerja 3 dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp.78.532.560,-, berkurang sebesar Rp.1.455.000.,- sehingga menjadi Rp.77.077.560,-.

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yaitu Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun, target kinerja 1 dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.299.300,00,- kurang sebesar Rp.2.049.680.,- sehingga menjadi Rp.6.249.620

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yaitu Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun, target kinerja 1 dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.465.000,00,-, berkurang sebesar Rp.1.500.000.,- sehingga menjadi Rp. 4.965.000,-.

1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang disusun, target kinerja 1 dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.910.000.00,-, berkurang sebesar Rp.1.500.000.,- sehingga menjadi Rp. 4.410.000,-.

1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yaitu Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun, target kinerja 1 dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.275.000,-. berkurang sebesar Rp.1.500.000.,- sehingga menjadi Rp. 3.775.000,-.

1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yaitu Jumlah dokumen penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun, target kinerja 2 dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.389.000,- , berkurang sebesar Rp.1.500.000.,- sehingga menjadi Rp. 4.889.000,-.

1.1.7. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja sub kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yaitu Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun, target kinerja 3 dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.515.000,- berkurang sebesar Rp.1.500.000.,- sehingga menjadi Rp.4.015.000,-.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :

1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yaitu Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan, target kinerja 37 orang dengan alokasi anggaran pada DPA Pokok sebesar Rp.6.848.302.318,.

1.1.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yaitu Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan,

target kinerja 12 dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp.209.760.000,-

1.1.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
Indikator kinerja sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yaitu Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang disediakan, target kinerja 12 dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.000.000,-

1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD;
Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yaitu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun, target kinerja 12 bulan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.026.000,-,

1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :

1.2.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
Indikator kinerja sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yaitu Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang dilaksanakan, target kinerja 21 orang dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.318.000.000,-**. berkurang sebesar Rp.207. 000.000,- sehingga menjadi Rp.111.000.000,-

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:

1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan, target kinerja 7 Paket dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.995.000,-, tidak mengalami perubahan.

1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, target kinerja 1 paket, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.740.000,-,, bertambah sebesar Rp.3.541.100,- sehingga menjadi Rp.32.281.100,-

1.3.3. Penyedian Peralatan Rumah Tangga
Indikator kinerja sub kegiatan Penyedian Peralatan Rumah Tangga jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan, target kinerja 1 paket dengan alokasi

anggaran sebesar Rp.5.193.400,-,bertambah sebesar Rp.2.438.000,sehingga menjadi Rp. 7.631.400,-.

1.3.4. Penyedian Bahan Logistik Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan Penyedian Bahan Logistik Kantor jumlah bahan logisti kantor yang disediakan, target kinerja 1 paket dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.884.800,-, berkurang sebesar Rp.6.037.000,-, sehingga menjadi Rp.7.847.800,-.

1.3.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yaitu jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, target kinerja 1 paket dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.456.000,-, bertambah sebesar Rp.4.656.000,-, sehingga menjadi Rp.14.112.000,-.

1.3.6. Fasilitas Kunjungan Tamu;

Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu yaitu jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu, target kinerja 1 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.800.000,-, berkurang sebesar Rp.400.000,-, sehinnga menjadi Rp.2.400.000,-.

1.3.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, target kinerja 22 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.163.000.000,-, tidak mengalami perubahan.

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :

1.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

Indikator kinerja sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan, target kinerja 14 unit dengan alokasi anggaran pada DPA Pokok sebesar Rp.1.294.546.000, berkurang sebesar Rp.742.182.000,-,sehingga menjadi Rp. 552.364.000,-.

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :

1.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yaitu Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan, target kinerja 12 bulan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.868.000,-, berkurang sebesar Rp.22.371.600,-, sehingga menjadi Rp.28.496.400,-.

1.5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu Jumlah Laporan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan, target kinerja 4 Jenis dengan alokasi anggaran sebesar Rp.194.000.000,-, berkurang sebesar Rp.23.000.000,-, sehingga menjadi Rp. 171.000.000,-

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :

1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yaitu Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan, target kinerja 1 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.730.000,- ,berkurang sebesar Rp.2.850.000,-, sehingga menjadi Rp.40.880.000,-.

1.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yaitu Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan, target kinerja 23 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 159.880.000,-, berkurang sebesar Rp.16.810.000,-, sehingga menjadi Rp.143.070.000,-.

1.6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan, target kinerja 17 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.780.000,- berkurang sebesar Rp.5.490.000, sehingga menjadi Rp.26.290.000,-.

1.6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yaitu Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/rehabilitasi, target kinerja 1 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- tidak mengalami perubahan.

2. Program Pengelolaan Arsip

Program Pengelolaan Arsip dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah serta untuk menyediakan bahan bahan pertanggungjawaban bagi pemerintah sesuai kaidah-kaidah kearsipan dan Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan program pengelolaan arsip adalah memelihara arsip dengan baik, menyimpan arsip dengan sistem yang tepat sehingga mudah di temukan kembali secara tepat dan cepat, menyiapkan tempat penyimpanan yang memadai serta menjamin keselamatan arsip yang baik isinya maupun bentuknya, sehinga dapat terjaga keautentikan, keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip yang dikelola.

Program Pengelolaan Arsip yang semula telah dianggarkan pada DPA Pokok sebesar Rp. 411.636.340,- berkurang sebesar Rp.26.671.844,- sehingga menjadi Rp. 384.964.496,-.Kegiatan yang mendukung program pengelolaan arsip adalah sebagai berikut :

2.1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :

2.1.1. Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis;

Indikator kinerja sub kegiatan Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis yaitu jumlah arsip dinamis yang diciptakan dan digunakan, target kinerja 100 berkas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.651.400,- , berkurang sebesar Rp. 25.292.000,- sehingga menjadi Rp.33.651.400.

2.1.2. Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis;

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis yaitu Jumlah arsip dinamis yang mendapatkan pemeliharaan dan penyusutan, target kinerja 1 Berkas 2000 arsip dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.415.000,- berkurang sebesar Rp.10.996.000,- sehingga menjadi Rp. 5.419.000,-.

2.1.3. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja sub kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu Jumlah SKPD yang diawasi, target kinerja 5 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.420.000,-, berkurang sebesar Rp. 10.026.000,- sehingga menjadi Rp.4.394.000,-.

2.2. Pengelolaan Asip Statis Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :

2.2.1. Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI;

Indikator kinerja sub kegiatan Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI yaitu Jumlah salinan Otentik Naskah asli arsip terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan kepada

ANRI, target kinerja 2 arsip dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.820.000,- bertambah sebesar Rp.2.447.200,- sehingga menjadi Rp.5.267.200,-

2.2.2. Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis;

Indikator kinerja sub kegiatan Akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis yaitu Jumlah Arsip Statis yang mendapat Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis, target kinerja 150 arsip dengan alokasi anggaran sebesar Rp.127.138.440,- bertambah sebesar Rp.28.865.056,- sehingga menjadi Rp.156.003.496,-.

2.3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :

2.3.1. Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota;

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota yaitu Jumlah Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kota Makassar yang mendapat peningkatan/pemberdayaan kapasitas, target kinerja 2 laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.74.441.100,- berkurang sebesar Rp.12.515.100,- sehingga menjadi Rp.61.926.000,-.

2.3.2. Penyediaan Informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN

Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN yaitu Jumlah Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kota Makassar yang mendapat peningkatan/pemberdayaan kapasitas, target kinerja 20 Pengguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 142.750.400,- berkurang sebesar Rp.845.000,- sehingga menjadi Rp.143.595.400,-.

3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program Perlindungan dan penyelamatan arsip bertujuan untuk melindungi dan penyelamatan arsip baik fisik maupun informasi, yang berasal dari SKPD, BUMD, Swasta, Ormas/Orsospol, dan Perorangan, sehingga arsip dapat didayagunakan untuk kepentingan generasi mendatang serta meningkatkan mutu layanan dan arus informasi kearsipan dari dan untuk masyarakat. Perlindungan dan penyelamatan arsip dilakukan untuk mengatur dan menata arsip secara sistematis, aspek nilai kegunaan, bentuk dan sifat arsip, pemeliharaan dan perawatan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip untuk menunjang pelaksanaan tugas organisasi.

Perlindungan arsip adalah suatu kegiatan untuk melindungi, mengamankan dan menyelamatkan serta memulihkan arsip dari kerusakan, hilang atau musnah baik secara fisik maupun informasi yang terkandung di dalam dokumen/arsip khususnya

arsip yang karena sifatnya harus dirahasiakan maka harus diatur melalui prosedur yang tepat. Perlindungan dokumen/arsip dapat dilakukan dengan cara : penggandaan (duplication), pemencaran (dispersal), menggunakan peralatan penyimpanan khusus (vaulting) yang aman.

Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip yang semula telah dianggarkan pada DPA Pokok sebesar Rp. 394.156.920,- berkurang sebesar Rp.582.513.880,-. , sehingga menjadi Rp.976.670.800,-

Kegiatan yang mendukung Program perlindungan dan Penyelamatan Arsip adalah sebagai berikut :

3.1. Pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kebupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, dengan sub kegiatan yaitu:

3.1.1. Penilaian dan penetapan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun;

Indikator kinerja sub kegiatan Penilaian dan penetapan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yaitu Jumlah Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang mendapatkan penilaian dan pemusnahan, target kinerja 500 arsip dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.889.000,- berkurang sebesar Rp.6.128.000,- sehingga menjadi Rp.6.761.000,-.

3.1.2. Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun.

Indikator kinerja sub kegiatan Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yaitu Jumlah Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang dilaksanakan, target kinerja 500 berkas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.780.000,- berkurang sebesar Rp.6.328.000,- sehingga menjadi Rp.7.452.000,-.

3.2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :

3.2.1 Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana;

Indikator kinerja sub kegiatan Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana yaitu Jumlah Arsip yang Eievakuasi dan Diidentifikasi Akibat Bencana, target kinerja 100 arsip dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.225.000,- bertambah sebesar Rp.1.965.0200,-, sehingga menjadi Rp.8.190.000,-.

3.2.1. Pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana.

Indikator kinerja sub kegiatan Pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana yaitu Jumlah Arsip yang Mendapat Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana, target kinerja 100 arsip dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.145.000,- berkurang sebesar Rp.1.682.000,-, sehingga menjadi Rp.7.827.000,-,

3.3. Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :

3.3.1. Penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip;

Indikator kinerja sub kegiatan Penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yaitu Jumlah

Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang yang mendapatkan penilaian dan penetapan, target kinerja 150 Arsip dengan alokasi anggaran sebesar Rp.82.006.000,- bertambah sebesar Rp.747.765.200,- sehingga menjadi 829.771.200,-

3.3.2. Penilaian dan penetapa hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip.

Indikator kinerja sub kegiatan Penilaian dan penetapan hasil alih mediasesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yaitu Jumlah Hasil Alih Media yang dinilai ditetapkan sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip, target kinerja 150 Arsip dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.394.000,- berkurang sebesar Rp. 19.058.000,- sehingga menjadi Rp. 5.336.000,-

3.4. Pencarian arsip statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang, dengan sub kegiatan yaitu :

3.4.1. Penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang;

Indikator kinerja sub kegiatan Penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang yaitu Jumlah Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang yang mendapatkan penilaian dan penetapan, target kinerja 150 Arsip dengan alokasi anggaran sebesar Rp.87.900.960,- berkurang sebesar Rp.47.488.960,- sehingga menjadi Rp.40.412.000,-.

3.4.2. Evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan hilang

Indikator kinerja sub kegiatan evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan hilang yaitu Jumlah evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan Hilang, target kinerja 150 Arsip dengan alokasi anggaran sebesar Rp.143.120.400,- berkurang sebesar Rp.77.570.800,-, sehingga menjadi Rp.65.549.600.

3.4.3. Penetapan dan pengumuman daftar pencarian arsip (DPA).

Indikator kinerja sub kegiatan Penetapan dan pengumuman daftar pencarian arsip (DPA) yaitu Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang

ditetapkan dan diumumkan, target kinerja 30 Arsip dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.696.560,- berkurang sebesar Rp.12.324.560,- sehingga menjadi Rp.5.372.000,-

4. Program Perijinan Penggunaan Arsip

Program perijinan penggunaan arsip bertujuan untuk menjamin kemudahan akses arsip bagi pengguna arsip untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip.

Program perijinan penggunaan arsip yang semula telah dianggarkan pada DPA Pokok sebesar **Rp.3.614.400,-** bertambah sebesar **Rp.99.558.144,-** sehingga menjadi **Rp.103.172.544,-**. Kegiatan yang mendukung Program perijinan penggunaan arsip adalah sebagai berikut :

4.1. Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :

4.1.1. Penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup.

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yaitu Jumlah Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang mendapat penetapan daftar dan penetapan izin, target kinerja 12 arsip dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.614.400,- bertambah sebesar Rp.99.558.144,- sehingga menjadi Rp.103.172.544,-.

Dari penjabaran diatas dapat dilihat pada Tabel TC.33. Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi	Rencana Tahun 2025								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	24					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											10.693.755.038,00	10.023.846.000,00	PAD				10.965.817.000,00
2	24	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan				100 %	100 %					9.884.347.378,00	8.559.038.160,00	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	100%	9.584.463.000,00

							laporan kinerja perangkat daerah															
							Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat kapasitas				90 %	90 %								Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat kapasitas	90%	
2	24	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusu	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar/Makassar/Maccini			10 Dokumen	10 Dokumen	100 %	100 %	116.385.860	105.381.180	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun		295.720.000,00

2	24	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar/Makassar/Maccini			2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	78.532.560	77.077.560	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Honor MC pada kegiatan Forum SKPD dihilangkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	73.680.000,00
2	24	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar/Makassar/Maccini			1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	8.299.300	6.249.620	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Makan minum rapat ditiadakan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	21.840.000,00
2	24	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar/Makassar/Maccini			1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	6.465.000	4.965.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Makan minum rapat ditiadakan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	19.010.000,00

2	24	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar/Makassar/Maccini			1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	5.910.000	4.410.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Makan minum rapat ditiadakan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	14.719.000,00
2	24	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar/Makassar/Maccini			1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	5.275.000	3.775.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Makan minum rapat ditiadakan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	13.540.000,00
2	24	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar/Makassar/Maccini			2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	6.389.000	4.889.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Makan minum rapat ditiadakan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	2 Laporan	130.093.000,0

								Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
2	24	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar/Makassar/Maccini			2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	5.515.000	4.015.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Makan minum rapat ditiadakan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	22.838.000,00
2	**24**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**Kota Makassar/Makassar/Maccini**			**8 Dokumen**	**8 Dokumen**	**100 %**	**100 %**	**7.132.088.318**	7.130.289.280,00	**[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun**		**6.901.234.450,00**

2	24	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Kota Makassar/Makassar/Maccini			39 orang/bulan	39 orang/bulan	100 %	100 %	6.848.302.318,00	6.848.303.280,00	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/Bulan	6.518.888.450,00
2	24	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Kota Makassar/Makassar/Maccini			12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	209.760.000	207.960.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	216.840.000
2	24	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Kota Makassar/Makassar/Maccini			12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	72.000.000	72.000.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	132.892.000,00D

2	24	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Kota Makassar/Makassar/Maccini			12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	2.026.000	2.026.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12.766.000,00
2	24	01	2	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia					**6 Janis**	**6 Jenis**	**90%**	**90 %**	**363.000.000,00**	**111.000.000,00**			Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia		**333.919.000,00**

2	24	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar/Makassar/Maccini			8 Orang	8 Orang	90%	90 %	363.000.000,00	111.000.000	[DANA KHUSUS) - PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Jumlah pegawai untuk ikut diklat dikurangi dari 14 orang menjadi 9 orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan	20 Orang	193.000.000,00
2	**24**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan**	**Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang disediakan**	**Kota Makassar/Makassar/Maccini**			**0 Bulan**	**12 Bulan**	**90%**	**90 %**	**480.069.200,00**	**232.267.300,00**	**[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**		**Jumlah administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan**	**12 Bulan**	**532.793.625,00**
2	24	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang disediakan	Kota Makassar/Makassar/Maccini			6 Paket	6 Paket	90%	90 %	4.995.000	4.995.000	[DANA KHUSUS) - PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Dihilangkan karena danya rasionalisasi anggaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket	10.161.250,00

2	24	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang disediakan	Kota Makassar/Makassar/Maccini			3 Paket	3 Paket	90%	90 %	28.740.000	32.281.100	[DANA KHUSUS) - PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	55.234.475,00
2	24	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang disediakan	Kota Makassar/Makassar/Maccini			2 Paket	2 Paket	90%	90 %	5.193.400	7.631.400	[DANA KHUSUS) - PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Dihilangkan karena danya rasionalisasi anggaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	10.582.000,00
2	24	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang disediakan	Kota Makassar/Makassar/Maccini			8 Paket	1 Paket	90%	90 %	13.884.800	7.847.800			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	59.268.400,00
2	24	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang disediakan	Kota Makassar/Makassar/Maccini			6 Paket	4 Paket	90%	90 %	9.456.000	14.112.000	[DANA KHUSUS) - PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Dikurangi karena danya rasionalisasi anggaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	34.762.000,00

2	24	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang disediakan	Kota Makassar/Makassar/Maccini			7 Laporan	7 Laporan	90%	90 %	2.800.000	2.400.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dikurangi 1 laporan	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	31 Laporan	12.500.000,00
2	24	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang disediakan	Kota Makassar/Makassar/Maccini			4 Laporan	16 Laporan	90%	90 %	415.000.000	163.000.000	[DANA KHUSUS) - PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	195.000.000
2	**24**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan**	**Terpenuhinya Barang Milik Daerah yang disediakan**	**Kota Makassar/Makassar/Maccini**			**28 Unit**	**28 Unit**	**100 %**	**100 %**	**1.294.546.000**	**552.364.000,00**			**Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan**		**744.280.875,00**
2	24	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya Barang Milik Daerah yang disediakan	Kota Makassar/Makassar/Maccini			6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	1.294.546.000	552.364.000,00	[DANA KHUSUS) - PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Dirasionalkan dari 14 unit menjadi 5 unit untuk kebutuhan depo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 unit	280.821.875,00

2	**24**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**Tersedianya Jasa Penunjang Kantor**	**Kota Makassar/Makassar/Maccini**			**4 Jenis**	**4 Jenis**	**90%**	**90 %**	**244.868.000**	**199.496.400,00**			**Jumlah laporan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**		**101.040.000,00**
2	24	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	Kota Makassar/Makassar/Maccini			4 Laporan	4 Laporan	90%	90 %	50.868.000	28.496.400	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dirasionalkan Rp. 12.000.000,-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan	87.240.000,00D
2	24	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Penunjang Kantor	Kota Makassar/Makassar/Maccini			5 Laporan	7 Laporan	90%	90 %	194.000.000	171.000.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja honor tim pelaksana kegiatan Tim Pentaheliks dan Geoportal sebesar Rp. 9.000.000,-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	12.000.000,00

2	**24**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendapatkan pemeliharaan**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah**	**Kota Makassar/Makassar/Maccini**			**5 Jenis**	**5 Jenis**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**253.390.000**	**228.240.000,00**			**Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendapatkan pemeliharaan**		**638.431.550,00**
2	24	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Makassar/Makassar/Maccini			2 Unit	3 Unit	12 Bulan	12 Bulan	43.730.000	40.880.000	[DANA KHUSUS) - PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	44.247.300,00
2	24	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Makassar/Makassar/Maccini			31 Unit	28 Unit	12 Bulan	12 Bulan	159.880.000	143.070.000	[DANA KHUSUS) - PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 Uit	275.554.250,00

2	24	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Makassar/Makassar/Maccini			39 Unit	39 Unit	12 bulan	12 bulant	31.780.000	26.290.000	[DANA KHUSUS) - PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Dirasionalkan dari 26 Unit menjadi 12 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 unit	29.190.000,0
2	24	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kota Makassar/Makassar/Maccini			1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	18.000.000,00	18.000.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	24.000.000
2	**24**	**02**				**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti**				**61 orang 89,4%**	**61 orang 89,4%**					**411.636.340**	**384.964.496**			**Persentase Ketersediaan Arsip**	**25,76 %(20 830 Arsip)**	**520.635.000,00**

							Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional **Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku**				**90,20% (46SKPD)**	**90,20% (46SKPD)**											
2	24	02	2	01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah Arsip Kota Makassar yang dikelola	Terpeliharanya Dokumen Asip Dinamis Kota Makassar	Kota Makassar/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan			100 Arsip	100 Arsip	100 %	100 %	64.486.400	18.172.400,00			Jumlah Arsip Kota Makassar yang dikelola		111.966.600,00

2	24	02	2	01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Terpeliharanya Dokumen Asip Dinamis Kota Makassar	Kota Makassar/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan			10 Berkas	100 Berkas	100 %	100 %	33.651.400,00	8.359.400,00	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	100 Berkas	46.764.000,00
2	24	02	2	01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Terpeliharanya Dokumen Asip Dinamis Kota Makassar	Kota Makassar/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan			1 Berkas	1 Berkas	100 %	100 %	16.415.000	5.419.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dirasionalkan sebesar Rp.21.573.200 psds belsnjs makan minum rapat dan honor kegiatan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1 Berkas	24.955.600,00
	24	02	2	01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten /Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Dokumen Asip Dinamis Kota Makassar	Kota Makassar/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan			5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	14.420.000	4.394.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Makan minum aktifitas lapangan 4 kali dialihkan ke penelusuran sejarah sungai jeneberang dan sungai Tallo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten /Kota	5 Laporan	40.247.000,00

909	24	02	2	02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah Arsip Statis Kota Makasar yang dikelola	Terpeliharanya Arsip Statis Kota Makassar	Kota Makassar/Semua Kecamatan/ Semua Kelurahan			150 arsip	150 arsip	100 %	100 %	129.958.440	161.270.696	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Arsip Statis Kota Makasar yang dikelola		328.012.400,00
2	24	02	2	02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI		Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Terpeliharanya Arsip Statis Kota Makassar	Kota Makassar/Semua Kecamatan/ Semua Kelurahan			2 Arsip	2 Arsip	100 %	100 %	2.820.000	5.267.200	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dirasionalkan sebesar Rp. 12.207.600 pada belanja Perjalanan Dinas 1 kali untuk ESelon IV dan makan minum aktifitas lapangan	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	2 Arsip	21.080.000,00
2	24	02	2	02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Terpeliharanya Arsip Statis Kota Makassar	Kota Makassar/Semua Kecamatan/ Semua Kelurahan			150 Arsip	150 Arsip	100 %	100 %	127.138.440	156.003.496	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Makan minum aktifitas lapangan 4 kali dialihkan ke penelusuran sejarah sungai jenebera ng dan	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	150 Arsip	306.932.400,00

																			sungai Tallo sebesar Rp. 6.000.000,- dan belanja makanmi num rapat dan honor kegiatan dirasionalkan Rp. 68.207.800			
2	24	02	2	03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**		Jumlah Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat kota Makassar yang dikelola	Terpeliharanya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kota Makassar	Kota Makassar/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan			2 Pengguna	2 Pengguna			217.191.500	205.521.400			Jumlah Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat kota Makassar yang dikelola	20 pengguna	80.656.000,00
2	24	02	2	03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Melalui JIKN		Jumlah Layanan penyedian informasi, akses,dan layanan kearsipan Tingkat daerah kabupaten/kota Melalui JIKN	Terpeliharanya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat	Kota Makassar/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan			2 Pengguna	2 Pengguna			142.750.400	143.595.400	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Layanan penyedian informasi, akses,dan layanan kearsipan Tingkat daerah kabupaten /kota Melalui JIKN	2 pengguna	13.638.000,00

									Kota Makassar														
2	24	02	2	03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kota Makassar	Kota Makassar/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan			2 Laporan	2 Laporan			74.441.100	61.926.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten /Kota	2 Laporan	67.018.000,00
2	**24**	**03**				**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berba**				**1181 Box Arsip Statis**	**1181 Box Arsip Statis**					**394.156.920**	**976.670.800**			**Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**27,60 % (3431 arsip)**	**642.328.000,00**

							ngsa Dan Berne gara Untuk Kepen tingan Negar a, Pemer intaha n, Pelay anan Publik Dan Kesej ahtera an Rakya t															
2	24	03	2	01		Pemusnah an Arsip Dilingkung an Pemerinta h Daerah Kabupaten /Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Jumlah Arsip Dilingkun gan Pemerinta h Kota Makassar yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun yang dimusnah kan	Terlind unginy a dan Tersel amatka nnya Arsip Daerah	Kota Mak assa r/Se mua Kec ama tan/ Sem u a Kelu raha n			102 Arsi p	102 Arsi p	102 Arsi p	102 Arsi p	26.669.000	14.213.000			Jumlah Arsip Dilingkung an Pemerinta h Kota Makassar yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun yang dimusnahk an	102 arsip	97.512.000,00

2	24	03	2	01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan			51 arsip	500 arsip	51 arsip	500 arsip	12.889.000	6.761.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	500 Arsip	89.492.000,00
2	24	03	2	01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun		Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan			51 Berkas	500 Berkas	100 berkas	100 berkas	13.780.000	7.452.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	500 Berkas	8.020.000,00
2	24	03	2	02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten /Kota		Jumlah Arsip yang berskala Kota Makassar yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan			10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	12.370.000,00	16.017.000			Jumlah Arsip yang berskala Kota Makassar yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana	10 Dokumen	37.704.000,00

2	24	03	2	02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana		Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan			5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	6.225.000	8.190.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dirasionalkan menjadi Rp. 0	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	5 Arsip	19.152.000,00
2	24	03	2	02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana		Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan			5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	6.145.000	7.827.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dirasionalkan menjadi Rp. 0	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	5 Arsip	18.552.000,00
2	24	03	2	04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten /Kota		Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kota Makassar yang diautentikasi	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan			14 Arsip	14 Arsip	14 Arsip	14 Arsip	106.400.000	835.107.200			Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kota Makassar yang diautentikasi	14 Arsip	293.728.000,00

2	24	03	2	04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan			2 Arsip	150 Arsip	2 Arsip	150 Arsip	82.006.000	829.771.200	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pergeseran anggaran dari belanja modal ke anggaran untuk Pameran Kearsipan	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	150 Arsip	114.551.000,00

2	24	03	2	04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan			12 Arsip	150 Arsip	12 Arsip	150 Arsip	24.394.000	5.336.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	150Arsip	179.177.000,00

2	24	03	2	05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten /Kota yang Dinyatakan Hilang		Jumlah Arsip Statis Kota Makassar yang dilakukan pencarian	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar/Semua Kecamatan/ Semua Kelurahan			5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	5 Arsip	248.717.920	111.333.600			Jumlah Arsip Statis Kota Makassar yang dilakukan pencarian	5 Arsip	166.716.000,00
2	24	03	2	05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang		Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar/Semua Kecamatan/ Semua Kelurahan			2 Arsip	150 Arsip	2 Arsip	150 Arsip	87.900.960	40.412.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Makan minum aktifitas lapangan dan honor kegiatan dirasionalkan	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	150 Arsip	147.884.000,00
2	24	03	2	05	02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang		Jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan hilang	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar/Semua Kecamatan/ Semua Kelurahan			2 Arsip	150 Arsip	2 Arsip	150 Arsip	143.120.400	65.549.600	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Makan minum aktifitas lapangan dan honor kegiatan dirasionalkan	Jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan hilang	150 Arsip	9.774.000,0

2	24	03	2	05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)		Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Terlindunginya dan Terselamatkannya Arsip Daerah	Kota Makassar/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan			1 Arsip	30 Arsip	1 Arsip	30 Arsip	17.696.560	5.372.000	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Makan minum aktifitas lapangan dirasionalkan sebesar Rp. 1926.000 ,-	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	30 Arsip	9.058.000,00
2	**24**	**04**				**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan**				**100%**	**100 %**					**3.614.400**	**103.172.544**			**Peresntase Akes Masyarakat terhadap Pengguna an Arsip yang Bersifat Tertutup**	**100%**	168.391.000,00
2	24	04	2	01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten /Kota		Jumlah Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kota Makassar yang mendapat pelayanan izin	Terlayaninya izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di Kota Makassar	Kota Makassar/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan			12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	3.614.400	103.172.544	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kota Makassar yang mendapat pelayanan izin	12 Arsip	168.391.000,00

2	24	04	2	01		Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Terlayaninya izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di Kota Makassar	Kota Makassar/Semua Kecamatan/Semua Kelurahan			12 Arsip	12 Arsip	100 %	100 %	3.614.400	103.172.544	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	12 Arsip	168.391.000,00

BAB IV
PENUTUP

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun 2025 yang didalamnya mencakup tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan Kota Makassar Tahun 2025-2029, ini dimaksudkan sebagai acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang kearsipan pada tahun 2025, dimana kegiatan yang menjadi prioritas utama Dinas Kearsipan yaitu:

1. Pengadaan depo arsip untuk tempat penyimpanan dan perlindungan arsip yang memiliki spesifikasi beragam sesuai dengan kebetuhan perlindungan bagi arsip didalammnya
2. Perda tentang kearsipan yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya tertib pengelolaan arsip dan menjamin ketersedian arsip yang autentik dan terpercaya dalam rang perlindungan kepentingan daerah dan masyrakat dan menjamin keselamatan asset dan budaya melalu kegiataan pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip
3. Peningkatan SDM arsiparis ditinjau dari kuliatas dan kuantitasnya.

Tindak lanjut dari permasalahan maupun faktor penghambat terhadap kegiatan prioritas sehingga realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tidak sesuai dengan target yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat proses administrasi kegiatan
2. Koordinasi yang intens ke pejabat pengadaan untuk percepatan proses pengadaan barang dan jasa.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan Kota Makassar diharapkan agar seluruh staf dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Makassar, 12 Agustus 2025

KEPALA DINAS,

FAHYUDDIN,A.P.M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197504251994121001

PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Dinas Ketahanan Pangan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dipandang perlu untuk diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, dengan menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana di maksud Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan.:
1. Wakil Wali Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
7.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
9.	Dinas Sosial Kota Makassar
10.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
12.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
13.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Makassar
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
22.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
23.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
24.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
25.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
26.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
27.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
28.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
29.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar

31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
32.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
34.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
35.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
36.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
37.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
38.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
39.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
40.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
43.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
44.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
45.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
46.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
47.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
58.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
49.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
50.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar
51.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

WALIKOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Lt. 5 Telepon (0411) 3616-639
M A K A S S A R

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR
NOMOR : 891/1618/ DKP/VII/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa untuk lebih tercapainya pembangunan yang terarah dan terencana serta tersedianya dokumen rencana kerja pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar maka dipandang perlu penetapan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menerapkan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar;.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Peternakan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas

Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
22. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional 2022-2024;
23. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301;;
24. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau dan Gula Konsumsi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1302;;
25. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336;
26. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung dan Kedelai di Tingkat Konsumen, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1339;
27. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1340;
28. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140;

29. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 339;
30. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 665;
31. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 993;
32. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Pesyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287;
33. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional nomor 7 tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327;
34. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Dan Iklan Pangan Segar, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 500;
35. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Batas Maksimal Cemaran Dalam Pangan Segar Di Peredaran, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 501;
36. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Penganekaragaman Pangan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 880;
37. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Batas Maksimal Residu Pestisida Dalam Pangan Segar Asal Tumbuhan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 981;

38. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 93;
39. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Badan Pangan Nasional, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 94;
40. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
41. Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 91 Tahun 2023);
42. Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Pengentasan Kemiskinan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 111).
43. Peraturan Walikota Makassar Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Atas APBD

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025;**

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar tentang Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2025;

KEDUA : Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KETIGA : Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar menjadi Pedoman Dinas Ketahanan Pangan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 12 Agustus 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Makassar,

Nirman Niswan Mungkasa, ST,M.Ap
Pangkat : Pembina Tk. I/IV.b
NIP : 197304252005021001

Tembusan Kepada, Yth. :
1. Masing-Masing yang Bersangkutan;
2. Pertinggal.

KATA PENGANTAR

Dengan segenap keikhlasan, kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan hidayah-Nya, sehingga Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2025 dapat disusun sesuai dengan rencana.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2025 merupakan dokumen yang berisi program dan kegiatan, lokasi kegiatan, serta indikator kinerja perubahan untuk mencapai sasaran di tahun berjalan. Dokumen ini menjadi acuan pelaksanaan kerja tahun 2025 yang mengalami perubahan akibat kebijakan pimpinan. Seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini. Langkah ini diperlukan untuk mendorong pencapaian target-target pembangunan ketahanan pangan dalam waktu yang telah ditetapkan.

Namun demikian, kami menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran terhadap Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini, sehingga dapat meningkatkan kualitas rencana kerja yang diinginkan dalam sisa waktu di tahun berjalan ini. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Makassar, 12 Agustus 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Makassar,

Nirman Niswan Mungkasa, ST, M.Ap
Pangkat : Pembina Tk. I/IV.b
NIP : 197304252005021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR LAMPIRAN iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAKSANAAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025 TRIWULAN II 10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 Triwulan II 10
2.2 Analisis Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar 23
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar 28
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD 31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 57

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN 61
3.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 61
3.2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan 72
BAB IV PENUTUP 103
LAMPIRAN
4.1 Catatan Penting 103
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 103

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar (T-C 30)	25
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar (T-C 31)	33
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar (T-C 32)	57
Tabel 3.1	Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs (Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026)	64
Tabel 3.2	Matriks Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan 2025 (T-C 33)	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.Form T-C.19 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2025 Kota Makassar.....
Lampiran 2.Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA).....
Lampiran 3 Ringkasan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.....
Lampiran 4.Lembar Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar merupakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu satu tahun. Dokumen Renja Perubahan ini juga bertujuan untuk mencapai harmonisasi dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan sumber daya manusia pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dalam kebijakan pembangunan jangka menengah nasional, kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan serta pembangunan jangka menengah daerah kota Makassar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343, bahwa perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Pada pelaksanaan renja di tahun berjalan, terdapat penyesuaian, sehingga disusunlah Renja perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar yang merupakan dokumen perubahan atas kebijakan dalam melaksanakan kegiatan, baik berupa (a). Perubahan Kebijakan Pemerintah, berupa kebijakan baru dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan keamanan dan ketersediaan pangan memerlukan adaptasi dalam rencana kerja, (b). Kualitas dan Keamanan Pangan dimana Isu-isu terkait kualitas dan keamanan pangan yang memerlukan perhatian dan tindakan segera, (c). Penilaian terhadap keberhasilan dan kelemahan program-program yang telah dijalankan sebelumnya maupun (e). Perubahan atas Pagu Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Visi Kota Makassar dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 adalah: "Makassar Kota Dunia, Maju dan Berkelanjutan Yang Sombere' dan Smart Untuk Semua". Terhadap Visi Kota Makassar, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang menjadi arah RPJPD untuk periode 2025-2045 yang hendak diwujudkan adalah masyarakat Kota Makassar yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang sehingga tercapai

struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas tinggi. Pada tahapan ini, identitas sebagai kota maritim, niaga, pendidikan dan jasa yang berorientasi global, berwawasan lingkungan dan bersahabat diharapkan memanifestasikan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, adil dan makmur tersebut. Berdasarkan pemahaman dan dengan memperhatikan Visi Walikota dan Wakil Walikota untuk periode RPJMD 2021-2026

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2025 disusun melalui proses pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja 2025, orientasi mengenai perubahan Renja, penyiapan data dan informasi perencanaan, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 dan Rencana Akhir Perubahan RKPD 2025, serta penetapan Rancangan Perubahan Renja menjadi Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 juga tidak terlepas dari Prioritas pembangunan nasional tahun 2025 berfokus pada 17 (tujuh belas) Program Prioritas RPJMN 2025-2029, termasuk swasembada pangan, energi, dan air, reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta peningkatan kualitas SDM dan kesehatan. Sasaran utama pembangunan adalah penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, ada fokus pada penguatan pertahanan negara, kesetaraan gender, perlindungan lingkungan, dan pembangunan hunian terjangkau.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja, ditetapkan menjadi Program Prioritas, atau Program Pembangunan Daerah. Program yang tidak menjadi penunjang tujuan dan sasaran akan menjadi Program Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 memuat perubahan pagu anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan, pergeseran anggaran terhadap kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan seiring kondisi saat ini. Peranan dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung ekonomi Kota Makassar pada era globalisasi sekarang ini perlu ditunjang oleh kebijakan dalam program yang lebih terarah dan lebih tajam dalam penyediaan pangan baik. Kebijakan-kebijakan yang diambil harus bersifat antisipatif dan responsif sesuai dengan perkembangan serta dinamika zaman. Demikian pula dengan program yang akan dilaksanakan harus pragmatis, terukur, memberikan dampak serta berkesinambungan untuk dapat menjawab permasalahan ketahanan Pangan Kota Makassar.

1.2. Landasan Hukum

Dasar penyusunan RENJA Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Peternakan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
22. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional 2022-2024;
23. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301;;
24. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau dan Gula Konsumsi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1302;;

25. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336;
26. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung dan Kedelai di Tingkat Konsumen, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1339;
27. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1340;
28. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, ;
29. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 339;
30. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 665;
31. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 993;
32. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Pesyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287;
33. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional nomor 7 tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327;
34. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Dan Iklan Pangan Segar, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 500;
35. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Batas Maksimal Cemaran Dalam Pangan Segar Di Peredaran, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 501;
36. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Penganekaragaman Pangan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 880;
37. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Batas Maksimal Residu Pestisida Dalam Pangan Segar Asal Tumbuhan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 981;

38. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 93;
39. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Badan Pangan Nasional, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 94;
40. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
41. Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 109 Tahun 2016);
42. Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Pengentasan Kemiskinan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 111).
43. Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Lembar Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 14).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Perubahan yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Ketahanan Pangan Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kerja Walikota Makassar yang memuat arah kebijakan untuk peningkatan ekonomi dan kegiatan pembangunan sektor ketahanan pangan di Kota Makassar;
2. Menyediakan dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 di Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar sesuai tugas dan fungsinya;
3. Sebagai pedoman perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sementara tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sinergitas dan penyelarasan program dan kegiatan RKPD dengan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2025 ;
2. Menjadi sarana pengendalian program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD ke Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar;

3. Sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUPA) dan PPAS perubahan yang akuntabel dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini memuat maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Berisikan antara lain :

1.1. Latar Belakang, yang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-P OPD, proses penyusunan Renja-P OPD, keterkaitan antara Renja-P OPD dengan dokumen RKPD Perubahan, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan

1.2. Landasan Hukum, yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Ketahanan Pangan;

1.3. Maksud dan Tujuan, yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan; dan (4) Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-P Dinas Ketahanan Pangan, serta susunan garis besar isi dokumen;

1.4. Sistematika Penulisan, memuat tata cara penulisan Renja-P Dinas Ketahanan Pangan.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Pada bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD yang mengungkapkan dan menggambarkan, serta memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n1) dan perkiraan capaian tahun berjalan memuat progress dan permasalahan semester I serta proyeksi pencapaian target kinerja semester II baik fisik maupun keuangan. Berisikan antara lain :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan TW II Tahun 2023

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4. Review terhadap Rencana Akhir RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan
Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Bab IV Penutup
Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan TW II Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahun 2025 Dinas Ketahanan pangan Kota Makassar sampai Triwulan II, dimana telah melaksanakan 5 (Lima) program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 36 (Tiga Puluh Enam) Sub Kegiatan, yang terdiri atas 1 (Satu) program Penunjang/Pendukung, 6 (enam) kegiatan, 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dan 4 (empat) program utama,7 (tujuh) kegiatan, 14 (empat belas) sub kegiatan.

Pengertian Evaluasi Kinerja adalah analisis hasil capaian kinerja untuk mencari hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kegiatan/program dan hasilnya, disamping mengidentifikasi dan memilih permasalahan serta menjelaskan hasil pengukuran kinerja (kegagalan dan keberhasilan). Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program kegiatan di masa akan datang.

Sejalan dengan berjalannnya waktu, pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2025 telah melewati Triwulan II. Sebagian program dan kegiatan yang tertuang dalam buku Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2025 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi.

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan pangan Kota Makassar sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	KETERANGAN
												I		II		III		IV									
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1						3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 5+10-11-12		12 = 11/6 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				31.455.752.807,0	23.320.825.297,0		1.715.114.854,0		2.137.665.408,0		0,0		0,0		3.852.780.262,0		16,52		3.852.780.262,0		8,14		
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				31.455.752.807,0	23.320.825.297,0		1.715.114.854,0		2.137.665.408,0		0,0		0,0		3.852.780.262,0		16,52		3.852.780.262,0		8,14		
	2	09				Dinas Ketahanan Pangan				31.455.752.807,0	23.320.825.297,0		1.715.114.854,0		2.137.665.408,0		0,0		0,0		3.852.780.262,0		16,52		3.852.780.262,0		8,14		
	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90,0	17.586.494.179,0	11.130.516.669,0	22,33	1.606.726.054,0	7,76	2.022.092.608,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,09	3.628.818.662,0	33,41	37,66	30,09	3.628.818.662,0	33,41	14,50	Dinas Ketahanan Pangan	
							Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat	%	100,0			21,50		10,12		0,0		0,0		31,62		31,62		31,62		31,62			
							Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90,0			15,0		20,62		0,0		0,0		35,62		39,58		35,62		39,58			
	2	09	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume	16,0	89.391.800,0	196.883.500,0	4,0	21.330.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	21.330.000,0	25,0	10,83	4,0	21.330.000,0	6,45	8,42		
	2	09	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume	4,0	26.739.600,0	133.512.000,0	1,0	21.330.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	21.330.000,0	25,0	15,98	1,0	21.330.000,0	0,0	16,53		
	2	09	01	2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokume	2,0	10.460.000,0	8.864.000,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	50,0		1,0	0,0	0,0			
	2	09	01	2	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokume	2,0	12.100.000,0	8.684.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	2	09	01	2	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokume	2,0	11.098.000,0	8.954.000,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	50,0		1,0	0,0	0,0			
	2	09	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokume	2,0	10.466.400,0	8.089.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
											I		II		III		IV										
								K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2				3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 5+7+9+11	12	12 = 11/6 * 100%		13 = 7+9+11		14 = 13/6 * 100%		15	16
	2	0 9	0 1	2 . 0 1	0 0 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4,0	8.416.800,0	17.765.000,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	25,0		1,0	0,0	0,0			
	2	0 9	0 1	3 . 0 1	0 0 0 3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2,0	10.216.000,0	10.216.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	2	**0 9**	**0 1**	**2 . 0 2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100,0**	**32.747.023.243,0**	**8.171.243.557,0**	**23,0**	**1.402.813.804,0**	**0,0**	**1.833.911.718,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**23,0**	**3.236.725.522,0**	**23,0**	**39,61**	**23,0**	**3.236.725.522,0**	**0,0**	**17,83**		
							Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Dokume**	**6,0**			**1,0**		**2,0**		**0,0**		**0,0**		**3,0**		**50,0**		**3,0**		**0,0**			
	2	0 9	0 1	2 . 0 2	0 0 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bln	41,0	11.939.543.243,0	7.719.593.557,0	41,0	1.296.943.804,0	0,0	1.712.581.718,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	3.009.525.522,0	100,0	38,99	41,0	3.009.525.522,0	0,0	17,83		
	2	0 9	0 1	2 . 0 2	0 0 0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	32,0	690.120.000,0	269.280.000,0	3,0	60.870.000,0	3,0	82.330.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	143.200.000,0	50,0	53,18	6,0	143.200.000,0	0,0	14,94		
	2	0 9	0 1	2 . 0 2	0 0 0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	12,0	109.215.000,0	182.470.000,0	3,0	45.000.000,0	3,0	39.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	84.000.000,0	50,0	46,06	6,0	84.000.000,0	0,0	28,20		
	2	0 9	0 1	2 . 0 2	0 0 0 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	6,0	5.364.000,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
	2	0 9	0 1	2 . 0 2	0 0 0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2,0	1.981.000,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
	2	**0 9**	**0 1**	**2 . 0 5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100,0**	**792.000.000,0**	**532.500.000,0**	**15,0**	**7.500.000,0**	**0,0**	**41.368.740,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**48.868.740,0**	**15,0**	**9,18**	**15,0**	**48.868.740,0**	**0,0**	**3,73**		
	2	0 9	0 1	2 . 0 5	0 0 0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	96,0	792.000.000,0	532.500.000,0	2,0	7.500.000,0	4,0	41.368.740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	48.868.740,0	6,25	9,18	6,0	48.868.740,0	0,0	3,73		
	2	**0 9**	**0 1**	**2 . 0 8**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Tersedianya Administrasi umum perangkat daerah**	**%**	**100,0**	**2.196.377.136,0**	**1.388.035.612,0**	**20,0**	**12.064.050,0**	**0,0**	**31.125.350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**43.189.400,0**	**20,0**	**3,11**	**20,0**	**43.189.400,0**	**0,0**	**1,44**		
	2	0 9	0 1	2 . 0 8	0 0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8,0	216.520.136,0	434.824.600,0	0,0	0,0	1,0	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1.500.000,0	12,50	0,80	1,0	1.500.000,0	0,0	0,96		

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG	KETERANGAN
											I		II		III		IV									
								K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2				3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 5+10-13+14		12 = 11/6 * 100%		13 = 7+13		14 = 11/6 * 100%		15	16
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2,0	92.540.800,0	227.399.600,0	1,0	2.900.000,0	0,0	12.937.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	15.837.500,0	50,0	6,96	1,0	15.837.500,0	0,0	6,96		
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,0	26.616.000,0	7.822.212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24,0	1.368.160.000,0	725.429.000,0	1,0	8.924.050,0	2,0	13.627.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	22.551.900,0	12,50	3,10	3,0	22.551.900,0	0,0	3,10		
	2	09	01	2.06	0911	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3,0	492.540.000,0	492.540.000,0	0,0	240.000,0	0,0	1.260.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0	0,0	0,26	0,0	1.500.000,0	0,0	0,17		
	2	**09**	**01**	**2.06**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100,0**	**1.502.632.000,0**	**599.784.000,0**	**25,0**	**103.359.600,0**	**0,0**	**96.111.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**199.470.600,0**	**25,0**	**33,26**	**25,0**	**199.470.600,0**	**25,0**	**10,54**		
	2	09	01	2.06	0007	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,0	231.172.000,0	55.800.000,0	3,0	11.068.000,0	0,0	11.319.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	22.387.400,0	25,0	68,14	3,0	22.387.400,0	0,0	7,74		
	2	09	01	2.06	0008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	14,0	1.271.460.000,0	541.884.000,0	3,0	93.791.600,0	1,0	84.791.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	177.083.200,0	28,57	32,55	4,0	177.083.200,0	0,0	11,05		
	2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100,0**	**259.070.000,0**	**242.070.000,0**	**22,0**	**59.658.600,0**	**0,0**	**19.575.800,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,0**	**79.234.400,0**	**22,0**	**32,73**	**22,0**	**79.234.400,0**	**0,0**	**18,72**		
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,0	44.480.000,0	41.630.000,0	1,0	15.628.600,0	0,0	4.507.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	20.135.900,0	100,0	46,15	1,0	20.135.900,0	0,0	26,39		
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9,0	171.240.000,0	145.270.000,0	4,0	44.081.000,0	4,0	15.068.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	59.098.300,0	88,89	40,54	8,0	59.098.300,0	0,0	24,0		

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1		PENANGGUNG JAWAB DAERAH PENANGGUNG	KETERANGAN
												I		II		III		IV									
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2					3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 9+10+11+12		12 = 11/6 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6 *100%		15	16
	2	0 5	0 1	2 0 0 9	0 0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	68,0	43.450.000,0	52.670.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	0 9	0 1			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																34,88	37,50			34,88	16,57		
	2	0 9	0 1			PREDIKAT KINERJA																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	0 9	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	93,0	305.247.940,0	61.247.940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		Dinas Ketahanan Pangan	
	2	0 9	0 2	2 . 0 1		Penyediaan infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	Kecamatan	0,0	305.247.940,0	61.247.940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
							Jumlah Dokumen Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen	1,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
	2	0 9	0 2	2 . 0 1	0 0 3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	2,0	305.247.940,0	61.247.940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	2	0 9	0 2			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																0,0	0,0			0,0	0,0		
	2	0 9	0 2			PREDIKAT KINERJA																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	0 9	0 3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita	Energi	## ##	10.878.565.488,0	10.093.215.488,0	0,0	58.710.600,0	## ##	70.394.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	## ##	129.105.200,0	114,11	1,28	## ##	129.105.200,0	114,11	0,70	Dinas Ketahanan Pangan	
							Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita	Protein	128,0			0,0		83,55		0,0		0,0		83,55		65,27		## ##		64,77			
							Jumlah Lorong Garden dan Lorong Wisata	Lorong	500,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
							Skor Pola Pangan Harapan		88,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG	KETERANGAN
											I		II		III		IV										
								K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2				3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 9+10+11+12		12 = 11/6 * 100%		13 = 7+11		14 = 13/6 *100%		15	16
	2	0 9	0 3	2 . 0 1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	3,0	608.771.408,0	506.121.408,0	0,0	27.097.200,0	0,0	38.781.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65.878.400,0	0,0	13,02	0,0	65.878.400,0	0,0	6,19		
	2	0 9	0 1	2 . 0 1	0 0 0 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Lapor an	12,0	169.256.340,0	169.256.340,0	2,0	27.097.200,0	3,0	26.167.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	53.264.400,0	41,67	31,47	5,0	53.264.400,0	0,0	17,63		
	2	0 9	0 1	2 . 0 1	0 0 1 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Laporan	28,0	197.665.048,0	175.915.048,0	8,0	0,0	7,0	11.664.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	11.664.000,0	53,57	6,66	15,0	11.664.000,0	0,0	3,27		
	2	0 9	0 3	2 . 0 1	0 0 1 6	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	3,0	241.850.020,0	163.850.020,0	0,0	0,0	0,0	950.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950.000,0	0,0	8,58	0,0	950.000,0	0,0	0,23		
	2	0 9	0 3	2 . 0 2		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan pemerintah	Ton	0,0	84.993.000,0	84.993.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
							Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0					
	2	0 9	0 1	2 . 0 2	0 0 0 3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	5,0	84.993.000,0	84.993.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	2	0 9	0 3	2 . 0 4		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Lokasi Analisa Ratio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Kota	0,0	10.184.801.080,0	9.502.101.080,0	0,0	31.613.400,0	0,0	31.613.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63.226.800,0	0,0	0,67	0,0	63.226.800,0	0,0	0,37		
							jumlah Dokumen Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi	Dokumen	3,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0					
	2	0 9	0 1	2 . 0 4	0 0 0 1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1,0	165.009.000,0	75.009.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II		III		IV											
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2					3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 5+10+11+12		12 = 11/6 * 100%		13 = 7+11		14 = 13/6 * 100%		15	16
	2	0 9	0 3	2 . 0 4	0 0 0 7	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	170,0	9.572.864.080,0	9.163.664.080,0	7,0	31.613.400,0	8,0	31.613.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	63.226.800,0	8,82	0,69	15,0	63.226.800,0	0,0	0,40		
	2	0 9	0 3	2 . 0 4	0 0 0 8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	4,0	447.428.000,0	263.428.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	2	**0 9**	**0 3**			**RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)**																**44,85**	**1,58**			**44,72**	**0,85**		
	2	**0 9**	**0 3**			**PREDIKAT KINERJA**																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	2	**0 9**	**0 4**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan**	%	11,76	1.346.429.800,0	856.829.800,0	0,0	27.097.200,0	0,0	27.097.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54.194.400,0	0,0	6,32	0,0	54.194.400,0	0,0	3,19	Dinas Ketahanan Pangan	
	2	**0 9**	**0 4**	**2 . 01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Tersedianya Data dan Informasi tentang daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan**	**Laporan**	**12,0**	**106.177.000,0**	**106.177.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**			
	2	0 9	0 4	2 . 01	0 0 0 1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Diterbitkan	Dokumen	1,0	106.177.000,0	106.177.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	2	**0 9**	**0 4**	**2 . 02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Laporan Penanganan Daerah Rawan Pangan** **Dokumen Penanganan Kerawanan pangan kewenangan Kabupaten/Kota**	**Laporan** **Dokumen**	**0,0** **2,0**	**1.240.252.800,0**	**750.652.800,0**	**0,0** **0,0**	**27.097.200,0**	**0,0** **0,0**	**27.097.200,0**	**0,0** **0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**	**54.194.400,0**	**0,0** **0,0**	**7,22**	**0,0** **0,0**	**54.194.400,0**	**0,0** **0,0**	**3,72**		
	2	0 9	0 4	2 . 02	0 0 0 2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,0	795.113.800,0	309.513.800,0	0,0	27.097.200,0	0,0	27.097.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54.194.400,0	0,0	17,51	0,0	54.194.400,0	0,0	6,82		

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN (RPJMD)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN EVALUASI RENJA)		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISAN ANGGARAN (RPJMD) s/d TAHUN n+1		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
								K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	2	09	04	2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi Kabupaten/Kota	Laporan	8,0	505 139 000,0	441 139 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0				
	2	09	B			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														0,0	7,58				0,0	7,81				
	2	09	B			PREDIKAT KINERJA														TANGGAL RENDAH	SANGAT BAIK				SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
	2	09	01			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Dan Pemeriksaan Keamanan Pangan	%	100,0	1 339 015 400,0	1 179 015 400,0	12,0	22 501 000,0	29,66	18 661 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,66	40 662 000,0	41,66	2,45	41,66	40 662 000,0	41,66	2,29	Dinas Ketahanan Pangan	
	2	09	01	3	01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggara Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu/Lintas Otonom Pelaksanaan Pengawasan Keamanan pangan Segar	Laporan	0,0	1 339 015 400,0	1 179 015 400,0	0,0	22 501 000,0	0,0	18 661 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 662 000,0	0,0	2,45	0,0	40 662 000,0	0,0	2,29		
								Dokumen	3,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0				
	2	09	01	3	01	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0,0	267 954 000,0	147 954 320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0				
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0				0,0				
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0				0,0				
	2	09	01	3	01	Penyelenggaraan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	19,0	968 550 600,0	929 550 600,0	0,0	22 501 000,0	0,0	18 661 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 662 000,0	0,0	4,37	0,0	40 662 000,0	0,0	3,25		
	2	09	01	3	01	Pengawasan terhadap pengelola keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pengawasan kelembagaan pengelola keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	3,0	106 506 800,0	106 506 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0				

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN KINERJA SKPD TAHUN BERKENAAN YANG DI EVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KINERJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025)		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1		KETERANGAN
					K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	7 0 8 5	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															41.60	0.42			41,88	2.42				
	7 0 8 5	PREDIKAT KINERJA															TANGGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				
		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA OPD (%)															21.00	16.52								
		PREDIKAT KINERJA OPD															SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH								

Nama Program	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja	Tindak Lanjut Triwulan Berikutnya	Tindak Lanjut RKPD
PROGRAM PENGEMBANGAN KERAWANAN PANGAN				
PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAHAN DAERAH				
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	" Adanya pemanfaatan Anggaran Perubahan Adanya perubahan aplikasi sistem e-catalog dari v5 ke v6 untuk pembuatan LS"	" Adanya dukungan dari bagian pemerintah daerah yang ada di OPD dan pemerintah lainnya dan lain"	" Sudah dimasukkan dalam pemanfaatan RKA Perubahan TA 2025 Sudah dimodifikasi sesuai pemprov sumsel	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	"" Adanya pemanfaatan Anggaran Perubahan Adanya perubahan aplikasi sistem e-catalog dari v5 ke v6 untuk pembuatan LS "" Menyesuaikan dengan aplikasi Adanya Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi terkait Kegiatan Budidaya Tanaman Hortikultura yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan sekarang berada di Dinas Pertanahan dan Pangan Kota Makassar Kegiatan ini belum dilaksanakan karena menunggu SPO dan Menyesuaikan dengan apa kita yang membutuhkan informasi perkembangan pemerintah setempatnya	"" Adanya dukungan dari bagian pemerintah Adanya dukungan dari LKP dan pemerintah-barang dan jasa"" Sub kegiatan ini meningkatkan kegiatan pengumpulan data komoditi harga-harga pangan strategis Komoditi Harga Mingguan Masyarakat sudah aktif dalam Data SIMPANAS yang rutin diinput oleh Data Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Sub kegiatan ini mendukung Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang fokus untuk Pengembangan Komunitas dan sebaiknya Pangan Masyarakat Sub kegiatan ini mendukung kegiatan lainnya dan pengadaan rutinnya pangan	" Sudah dimasukkan dengan pemanfaatan RKA Perubahan TA 2025 Sudah dimodifikasi sesuai dengan pemprov sumsel " Kegiatan ini sangat diperlukan pada Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Bagian Pokok dan Fungsi Bidang Ketahanan dan Pengawasan untuk Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Mereka informasi terkait kegiatan Pangan tingkat Lokal maupun nasional dan berkoordinasi dengan Pos Ronda Perkotaan Kegiatan Lomba Cipta Menu	
PROGRAM PENGEMBANGAN KERAWANAN PANGAN	Adanya pemanfaatan Anggaran Perubahan Adanya perubahan aplikasi sistem e-catalog dari v5 ke v6 untuk pembuatan LS	Adanya kerjasama Pemko Medan dengan mitra regional PDKT Adanya Berkoordinasi dengan PD Pasar dan Perum Bulog Sulawesi Adanya Koordinasi dengan OPD dan pihak kecamatan terkait data pasar	Kegiatan Pengurusan Pokja untuk bulan berikut kegiatan Dokumentasi Pangan dan Dokumentasi Pengelolaan Kegiatan SDM menunggu hasil pemprosesan anggaran perubahan" " Kegiatan Pengawasan dan Pengujian Sampel untuk bulan berikut kegiatan Dokumentasi Hasil Pengawasan dan BPOM menunggu hasil pemprosesan anggaran perubahan" " Kegiatan Pendataan pelaku usaha bulan berikut kegiatan Dokumentasi Pelaporan Pengawasan Keamanan menunggu hasil pemprosesan anggaran perubahan"	

Sumber Data : Form E. Monev, Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi yang ditampilan pada tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan rata-rata Capaian Realisasi Serapan Anggaran dari seluruh program pada Dinas Ketahanan Pangan sampai dengan 30 Juni 2025 Triwulan II mencapai 16.52% sedangkan secara fisik relisasi sebesar 23,42% dengan predikat Sangat Rendah. Pada Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 disimpulkan dari 5 (Lima) program, dana yang dianggarkan berjumlah Rp.25,222,054,297,- pada APBD Pokok, anggaran yang terealisasi hingga 30 Juni 2025 berjumlah Rp. 3,852,780,262,- dan anggaran yang tersisa berjumlah Rp. 19,468,045,035,-.

A. Program Penunjang/Pendukung

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Total Alokasi Anggaran Pokok pada Program Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp **11,752,795,669**, pada Pergeseran Anggaran sebesar **Rp.11,130,516,669** dengan Total Realisasi pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar **Rp.3,628,818,662** dengan capaian anggaran 32.60%, Capaian Kinerja 37.42% dan menghasilkan Capaian Indikator kinerja output sebagai berikut :

Indikator	Capaian
Presentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	35,62 %
Presentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah	31,62 %
Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	30,09 %

Adapun Faktor Penghambat pada Program Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Pencairan Kegiatan yang bersifat rutin belum *on date* mengikuti keluarnya SPD dari BPKAD;
2. Proses penggantian Kepala Dinas selama 3 kali pada tahun 2025 sehingga mempengaruhi pengurusan administrasi dan kebijakan;
3. Adanya perubahan aplikasi sistem e-catalog dari V5 ke V6 untuk proses pengadaan hingga pencairan;
4. Adanya proses perubahan rincian belanja dalam penyesuaian Anggaran Perubahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan.

Adapun Faktor Pendorong pada Program Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang sifatnya rutin dikerjakan setiap bulannya.
2. Dukungan sumber daya dan stakeholder terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
3. Dukungan pihak internal dan eksternal dalam pelaksanaan kegiatan.

Tindak Lanjut pada Program Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Percepatan pemanfaatan anggaran yang *on schedule*
2. Peningkatan SDM pada sub bagian perencanaan
3. Diperlukan komitmen bersama dengan evaluasi berkala terhadap penyerapan anggaran
4. Dalam penyerapan anggaran sebaiknya menyesuaikan dengan alur kas

B. Program Utama

1). Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Total Alokasi Anggaran Pokok pada Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan sebesar Rp.225,247,940 pada Pergeseran Anggaran sebesar Rp.61,247,940 dengan Total Realisasi pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp 0 ,- dengan capaian anggaran 0%, Capaian Kinerja 1.37% dan menghasilkan Capaian Indikator kinerja output sebesar 0.00%

Adapun Faktor Penghambat pada Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan sebagai berikut :

1. Adanya proses dalam penyesuaian Anggaran Perubahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan
2. Sehubungan dengan adanya perubahan aplikasi sistem e-catalog dari versi 5 (V5) ke versi 6 (V6), proses pembuatan LS kini mengikuti ketentuan dan alur yang telah disesuaikan dalam sistem terbaru.

Adapun Faktor Pendorong pada Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dari bagian perencanaan
2. Adanya dukungan dari ULP dan penyedia barang dan jasa

Tindak Lanjut pada Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan sebagai berikut :

1. Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut, telah dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2025

   Perubahan dan penyesuaian yang telah dilakukan juga telah ditindaklanjuti dengan penyelesaian proses kontrak.

2). Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Total Alokasi Anggaran Pokok pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp **10,670,565,488**, pada Pergeseran Anggaran sebesar Rp.**10,093,215,488** dengan Total Realisasi pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. **129,105,200,** dengan capaian anggaran 1.28%, Capaian Kinerja 10,32% dan menghasilkan Capaian Indikator kinerja output sebagai berikut:

Indikator	Capaian
Jumlah Lorong Garden dan Lorong Wisata	0
Jumlah Skill Training Gratis	0
Ketersediaan Energi	3.081
Ketersediaan Protein	83.55
Skor PPH	0

Adapun Faktor Penghambat pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebagai berikut :

1. Adanya proses dalam penyesuaian Anggaran Perubahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan
2. Sehubungan dengan adanya perubahan aplikasi sistem e-catalog dari versi 5 (V5) ke versi 6 (V6), proses pembuatan LS kini mengikuti ketentuan dan alur yang telah disesuaikan dalam sistem terbaru.
3. Keterlambatannya data dari beberapa surveyor
4. Adanya penyesuaian pada alur kas
5. Adanya Peralihan Tugas Pokok dan Fungsi terkait Kegiatan Budidaya Tanaman Hortikultura yang sebelumnya diampu oleh Dinas Ketahanan Pangan sekarang beralih ke Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
6. Kegiatan ini belum terlaksana karena menunggu SPD dan Menyesuaikan dengan alur kas serta menunggu informasi pelaksanaan pameran selanjutnya :

Adapun Faktor Pendorong pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dari bagian perencanaan
2. Adanya dukungan data ketersediaan stok dan harga di pasar modern dan tradisional
3. Adanya dukungan dari ULP dan penyedia barang dan jasa
4. Koordinasi baik dengan distributor penyedia pangan
5. Dukungan data dari beberapa SKPD terkait
6. Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun merupakan kegiatan pengambilan data konsumsi harian masyarakat, faktor pendorong nya data Konsumsi harian Masyarakat sudah didukung Data SUSENAS yang nanti disediakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan
7. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang fokus untuk Penganekaragaman Konsumsi dan ketahanan Pangan Masyarakat
8. meliputi festival pangan lokal dan penyebaran informasi produk pangan.

Tindak Lanjut pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebagai berikut :

1. Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut, telah dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2025

2. Melakukan pemantauan stok harga pangan di pasar modern dan tradisional
3. Sudah ditindaklanjuti dengan koordinasi yang lebih intensif dengan Tim
4. Perubahan dan penyesuaian yang telah dilakukan juga telah ditindaklanjuti dengan penyelesaian proses kontrak
5. Adanya Kegiatan yang rencana dilaksanakan pada Triwulan III
6. Saat ini sedang dilakukan Penyusunan RKA untuk Kegiatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Konsumsi dan Penganegaraman Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
7. Mencari Informasi terkait kegiatan Pameran tingkat Lokal maupun Nasional dan berkoordinasi dengan PKK terkait Pelaksanaan Kegiatan Lomba Cipta Menu yang rencana kegiatan akan dilaksanakan di Bulan 8 bersamaan Hari Ulang Tahun PKK

3). Program Penanganan Kerawanan Pangan

Total Alokasi Anggaran Pokok pada Program Penanganan Kerawanan Pangan sebesar Rp. **1,282,429,800** pada Pergeseran Anggaran sebesar Rp.**856,829,800** dengan Total Realisasi pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. **54,194,400,** dengan capaian anggaran 6.32%, Capaian Kinerja 9.27% dan menghasilkan Capaian Indikator kinerja output sebesar 0.00%

Adapun Faktor Penghambat pada Program Penanganan Kerawanan Pangan sebagai berikut :

1. Adanya perubahan juknis dari Badan Pangan Nasional dan keterlambatan pengumpulan data dari SKPD penyedia data
2. Adanya proses dalam penyesuaian Anggaran Perubahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan
3. Sehubungan dengan adanya perubahan aplikasi sistem e-catalog dari versi 5 (V5) ke versi 6 (V6), proses pembuatan LS kini mengikuti ketentuan dan alur yang telah disesuaikan dalam sistem terbaru.

Adapun Faktor Pendorong pada Program Penanganan Kerawanan Pangan sebagai berikut :

1. Komunikasi dengan penyedia data dan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional terkait perubahan sistem analisa FSVA
2. Adanya dukungan dari bagian perencanaan
3. Adanya dukungan dari ULP dan penyedia barang dan jasa

Tindak Lanjut pada Program Penanganan Kerawanan Pangan sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan BAPANAS dan pengambilan data indikator setiap bulan untuk mempercepat proses Analisa
2. Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut, telah dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2025
3. Perubahan dan penyesuaian yang telah dilakukan juga telah ditindaklanjuti dengan penyelesaian proses kontrak

4). Program Pengawasan Keamanan Pangan

Total Alokasi Anggaran Pokok pada Program Pengawasan Keamanan Pangan.sebesar Rp. **1,291,015,400** pada Pergeseran Anggaran sebesar Rp.1,179,015,400 dengan Total Realisasi pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 40,662,000 dengan capaian anggaran 3.45%, Capaian Kinerja 14,84 % dan menghasilkan Capaian Indikator kinerja output sebesar 41.60%

Adapun Faktor Penghambat pada Program Pengawasan Keamanan Pangan sebagai berikut :

1. Adanya proses dalam penyesuaian Anggaran Perubahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan
2. Sehubungan dengan adanya perubahan aplikasi sistem e-catalog dari versi 5 (V5) ke versi 6 (V6), proses pembuatan LS kini mengikuti ketentuan dan alur yang telah disesuaikan dalam sistem terbaru.

Adapun Faktor Pendorong pada Program Pengawasan Keamanan Pangan sebagai berikut:

1. Terbentuknya kerjasama dengan bidang keamanan pangan tingkat propinsi untuk pembinaan kepada Pelaku usaha baik komoditi beras maupun rempah dan adanya kerjasama dengan penyuluh pertanian di tingkat KWT/KT.
2. Adanya kerjasama Pelaku Usaha penerima nomor registrasi PDUK
3. Adanya kerjasama dengan PD Pasar dan Retail di Kota Makassar
4. Adanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengawasan keamanan pangan PSAT berupa rapid test dan Mobil Lab Ammoli
5. Adanya Koordinasi dengan OKKPD dan pihak Kecamatan terkait data pasar

Tindak Lanjut pada Program Pengawasan Keamanan Pangan sebagai berikut :

1. Kegiatan Registrasi PDUK sesuai bulan berjalan
2. Kegiatan Pengambilan dan Pengujian Sampel sesuai bulan berjalan
3. Kegiatan Diseminasi Hasil Pengawasan dan GERMAS menunggu hasil penyesuaian anggaran perubahan
4. Kegiatan Pendataan pelaku usaha sesuai bulan berjalan
5. Kegiatan Diseminasi Peraturan Penguatan Kelembagaan menunggu hasil penyesuaian anggaran perubahan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar diarahkan fokus pada kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemantapan Ketahanan Pangan Daerah .

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja Untuk menganalisis dan mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dengan bidang urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan

Pangan Kota Makassar, meliputi aspek penilaian pada tataran pengambilan kebijakan, pelaksana kebijakan dan tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan Analisis Kebutuhan Pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang melekat didalamnya. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada **Tabel TC. 30** berikut :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2025 (T-C 30)

No	Sasaran / Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	S1. Meningkatnya akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah												
1	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	-		90	90	90	90	100	93,6	30.08	90	n/a	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana – namun akan dilakukan penyesuaian pada Renstra berikutnya
2	Presentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	-		100	100	100	100	100	98,97	31.61	100	n/a	Penyusunan dokumen perencanaan berbasis evidence - namun akan dilakukan penyesuaian pada Renstra berikutnya
3	Presentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasistas	-		90	90	90	90	99,33	98,8	35.62	90	n/a	Peningkatan Kualitas SDM - namun akan dilakukan penyesuaian pada Renstra

No	Sasaran / Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
													berikutnya
	S.2. Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat dengan menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman												
5	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	90 %		91%	92%	93%	94%	130,97	136,97	0	91%	n/a	Koefisiensi Angka Ketersediaan Pangan Utama
6	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita	2.400 kkal/kapita/hr dan 63 kkal/kapita/hari		Energi : 2.600 Protein:126	Energi : 2.700 Protein:127	Energi: 2.700 Protein:129	Energi: 2.700 Protein:129	Energi : 2441 Protein : 66,92	Energi : 2812 Protein 88,13	Energi 3081 Protein 83,55	Energi : 2.600 Protein: 126		Hasil analisis NBM yang menggambarkan Ketersediaan energi dan protein untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Kota Makassar
	Jumlah Lorong Garden dan Lorong Wisata	-		500 Lorong Garden dan Lorong Wisata	500 Lorong Garden dan Lorong Wisata	500 Lorong Garden dan Lorong Wisata	500 Lorong Garden dan Lorong Wisata	619 lorong	283 lorong	0	-	-	Terdapat kendala pencapaian jumlah Lorong yang representative untuk menerima bantuan

No	Sasaran / Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7	Jumlah Skill Training Gratis	-		200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	100 orang	-	0	-	-	Jumlah Keseluruhan Skill Training untuk skala Kota Makassar telah terpenuhi
9	Skor PPH	100		82	85	88	90	85,2	89,73	0	88	88	Analisis skor mengalami kenaikan dengan adanya intervensi dari stakeholder untuk konsumsi masyarakat
10	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	12%		17,64 %	11,76 %	11,76 %	5,88 %	17,64 %	11,76 %	0	11,76 %	11,76%	Analisis menurun dengan harapan penduduk rawan pangan semakin berkurang
11	Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	80-100%		92%	94%	96%	98%	100%	100%	41.60	96%	96%	Perlunya sosialisasi untuk meningkatkan Jumlah kelompok usaha yang teregistrasi PSAT

Sumber Data : Renstra, Tahun 2021-2026

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar di masa mendatang.

Suatu kondisi yang menjadi issu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumber daya aparatur baik kualitas maupun kuantitas, masih kurangnya pelatihan-pelatihan dan rendahnya disiplin khususnya PNS teknis sehingga kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar belum maksimal sesuai dengan program kerja yang direncanakan;
2. Penanganan daerah rawan pangan khususnya pemberdayaan masyarakat miskin dan stunting belum maksimal, adanya temuan pelanggaran standar keamanan pangan, belum tersedianya sarana prasarana keamanan pangan dan masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan pangan karena terbatasnya pengetahuan dan daya beli terhadap produk pangan yang aman;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penganekaragaman pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman, dimana masih tingginya konsumsi beras perkapita, serta masih kurangnya konsumsi buah dan sayur karena perilaku Masyarakat Kota Makassar yang cenderung sulit merubah pola makan ketergantungan akan beras ke Pangan Alternatif;
4. Pengerahuan akan diversifikasi konsumsi pangan (penganekaragaman konsumsi pangan) yang masih rendah, karena kurangnya sosialisasi, promosi dan advokasi dalam penganekaragaman konsumsi panganmelalui media yang bisa digunakan.;
5. Masih belum terjaminnya keamanan pangan yang beredar di pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern di Kota Makassar.
6. Masih belum stabilnya harga pangan yang beredar di pasar tradisional maupun pasar modern.
7. Terbatasnya SDM Petugas Pengambil Contoh (PPC) untuk memeriksa keamanan pangan;
8. Belum tersedianya petugas PPNS untuk pengawasan keamanan pangan;

Permasalahan di atas, jika tidak diantisipasi saat ini akan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dimana program prioritasnya yaitu : Penerapan Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan di Masyarakat agar terwujud Indeks Ketahanan Pangan yang diharapakan di Kota Makassar. Untuk

mengantisipasi tantangan dan peluang di masa depan dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar telah menyiapkan 4 (empat) program utama, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** diharapkan dapat mengantisipasi kekurangan SDM dengan peningkatan sumber daya yang ada, agar kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar menjadi maksimal.
2. **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, merupakan program untuk :
   a. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok dan lainnya di Kota Makassar;
   b. Menyediakan cadangan pangan pemerintah untuk memenuhi ketersediaan pangan di Kota Makassar;
   c. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar pentingnya penganekaragaman pangan sehingga mampu menjadi keluarga yang mandiri pangan;
   d. Meningkatkan kesadaran kelompok wanita tani agar menerapkan sistem informasi dalam berbagai aspek dalam kelompoknya.
3. **Program Penanganan Kerawanan Pangan**, merupakan program untuk mengantisipasi daerah rawan pangan yang ditangani agar lebih efektif dan efisien yang didukung oleh adanya Peta FSVA untuk mengklusterisasi daerah sangat rawan pangan, rawan pangan, agak rawan pangan.
4. **Program Pengawasan Keamanan Pangan**, merupakan program untuk membantu Dinas Ketahanan Pangan dalam mengawasi keamanan pangan yang beredar, baik di pasar tradisional maupun pasar modern berupa pangan segar asal tumbuhan (PSAT), sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar memperhatikan keamanan pangan yang akan dikonsumsi.

Dinas Ketahanan Pangan mengusung 4 (empat) Program, 1 (satu) Program Penunjang dan 3 (tiga) Program Utama yang di periode Renstra Awal mengusung 4 (empat) Program Utama. Adanya perubahan jumlah program tersebut dengan pertimbangan pemutakhiran Sub Kegiatan yang tersaji pada SIPD, dimana Kegiatan pada Program ini adalah 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Badan Pangan Nasional, Program ini diarahkan pada peningkatan infrastruktur ataupun lumbung pangan yang ada di Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan Kota Makassar merupakan Kota Jasa dengan penjelasan sebagai berikut :

Kota Makassar mungkin tidak membangun lumbung pangan secara signifikan karena bukan merupakan sentra produksi padi utama, melainkan lebih fokus pada sektor lain seperti perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Perubahan fungsi lahan dan tekanan penduduk juga berkontribusi terhadap berkurangnya lahan sawah di Kota Makassar. Berikut adalah beberapa alasan lebih detail :

- **Bukan Sentra Produksi Padi:**

  Kota Makassar bukan merupakan wilayah dengan produksi padi yang besar. Lahan pertanian di Makassar lebih banyak dimanfaatkan untuk tanaman lain seperti pisang, ubi, dan hasil perkebunan lainnya, namun dengan kondisi saat ini juga semakin berkurang.

- **Alih Fungsi Lahan**

  Lahan pertanian di Kota Makassar mengalami alih fungsi menjadi permukiman dan bangunan lainnya akibat pertumbuhan kota yang pesat.

- **Pola Konsumsi**

  Kota Makassar memiliki konsumsi pangan yang lebih beragam, tidak hanya beras, sehingga kebutuhan pangan di kota ini dapat terpenuhi dari berbagai sumber, termasuk impor dari daerah lain. Kebiasaan masyarakat dalam Konsumsi Pangan yang masih belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman, kecenderungan memenuhi Konsumsi Energi dari Sumber Pangan Beras, dan belum bisa beralih ke sumber pangan alterlatif berbasis Sumber Daya Lokal yang harganya Relatif lebih mahal dari pada mengkonsumsi Beras.

- **Ketersediaan Sumber Pangan**

  Kota Makassar memiliki akses yang mudah terhadap berbagai sumber pangan, baik dari dalam maupun luar daerah. Ketersediaan pangan yang cukup memungkinkan kota ini untuk mengandalkan suplai dari luar. UU 23/2014 mengamanatkan pada Pemerintah dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengankebutuhan Daerah. Dalam rangka mewujudkan stabilitas pangan, tantangan ke depan adalah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin,serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan konsumen. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing produk pangan akan lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk lokal tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yangdiminta, maka akan diisi oleh produk sejenis yang berasal dari impor

- **Review Periode Sebelumnya**

  Keberadaan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan pada periode sebelumnya tidak terlalu berdampak signifikan pada Peningkatan Kemandirian Pangan di Masyarakat.

  Dengan alasan tersebut di atas, maka Dinas Ketahanan Pangan mendukung Program Strategis Pemerintah melalui 3 (tiga) Program Utama dan 1 (satu) Program Penunjang.

2.4. Review terhadap Rencana Akhir Perubahan RKPD

Sejalan dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Makassar periode 2025-2029, maka Dinas Ketahanan Pangan melakukan penyesuaian program, kegiatan dan Sub kegiatan sesuai dengan visi misi walikota ke dalam dokumen perencanaan perubahan.

Pada saat yang bersamaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar juga mempersiapkan Rencana Akhir Renstra tahun 2025-2029 yang mengacu kepada Rencana Akhir RPJMD Pemerintah Kota Makassar tahun 2025-2029, yang dijabarkan di dalam rencana kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan tahunan sebagai acuan untuk melaksanakan pembangunan di tingkat Dinas Ketahanan Pangan jika dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) telah mendapat persetujuan oleh DPRD Kota Makassar.

Pada tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar telah melaksanakan tupoksi sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025. Sejalan dengan masa transisi dari RPJMD tahun 2021-2026 ke tahun 2025-2029 tersebut, untuk melakukan review terhadap Rencana Akhir RKPD tahunan yang berpedoman pada RPJMD Kota Makassar dan Rencana Akhir Renja-Dinas Ketahanan Pangan sesuai rancangan Renstra-Dinas Ketahanan Pangan. Secara umum Rencana Akhir RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025, dimana ada pengurangan Program dan kegiatan dan terdapat penambahan kegiatan pada Renja 2025 Perubahan.

Setelah dilakukan reviu dan analisa maka rancangan akhir Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 sesuai dengan kebutuhan menjadi 4 (Empat) program dan 15 (Lima Belas) kegiatan dan 54 (Lima Puluh Empat) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.15.729,883,000,00 (Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Beberapa hal yang menyebabkan adanya penyesuaian Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan, diantaranya karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya penyesuaian Anggaran Gaji ASN sesuai dengan hasil rekonsiliasi Gaji dengan BPKAD karena kenaikan Gaji Pegawai dan Mutasi Pegawai masuk ke Dinas Ketahanan Pangan, Pengangkatan PPPK dan Penerimaan PJLP Administrasi;
2. Beberapa rasionalisasi anggaran terhadap Kode Rekening Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan
3. Untuk menunjang Sarana Pendukung Program penunjang Urusan Kabupaten/Kota yaitu Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia,
4. Penambahan Sub Kegiatan dan anggaran dalam rangka Rencana Aksi Intervensi ASTACITA dan Makanan Bergizi Gratis (MBG)

5. Anggaran Untuk Menunjang Tugas Fungsi dinas Ketahanan Pangan dalam rangka stabilisasi harga Pangan untuk Pengendalian Inflasi.

Untuk memperjelas review Rencana Akhir RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan terhadap program, kegiatan, volume dan anggaran yang sama dapat dilihat pada tabel review Terhadap Rencana Akhir RKPD tahun 2025 berikut :

TABEL 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025 (T-C.31)

NO	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				15.729.883.000,00					15.729.883.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Makassar	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	90 % 100 %	**10.086.456.724,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Kota Makassar	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	0	**10.086.456.724,00**	Penyesuaian Indikator
									85%		Perubahan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kota Makassar**	**Jumlah Dokumen Perencanaan PD**	**12 Dokumen**	**209.483.500,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah Dokumen Perencanaan PD**	**12 Dokumen**	**209.483.500,00**	

NO	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2 Dokumen	90.532.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	2 Dokumen	90.532.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA-PD	1 Dokumen	5.364.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA- PD	1 Dokumen	5 364.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1 Dokumen	5.184.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- PD	1 Dokumen	5.184 000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-PD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA PD	1 Dokumen	5.453.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-PD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA PD	1 Dokumen	5.453.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-PD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA PD	1 Dokumen	5.389.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-PD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Peruabahan DPA PD	1 Dokumen	5.389.500,00	

NO	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Kota Makassar	Tersedianya Dokumen	1 Laporan	7.765.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Kota Makassar	Tersedianya Dokumen	1 Laporan	7.765.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.816.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	5.816.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kota Makassar**	**Persentase Pelaksanaan Keuangan PD**	**100 %**	**8.171.243.557 ,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Persentase Pelaksanaan Keuangan PD**	**100 %**	**8.171.243.557,0 0**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ bulan	7.719.594.012 ,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerma Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ bulan	7.719.594.012,0 0	
	Penyediaan Administrasi	Kota	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	310.320.000,0	Penyediaan Administrasi	Kota	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokumen	310.320.000,00	

NO	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)
	Pelaksanaan Tugas ASN	Makassar	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0	Pelaksanaan Tugas ASN	Makassar	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	182.370.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	12Dokumen	182.370.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Kota Makassar	Tersedianya Laporan Akhir Tahun PD	1 Laporan	0	

NO	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)
	Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Makssar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dsn Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	Pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dsn Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	1 Laporan	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul ana n/Semesteran	1 Laporan	0	

NO	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)
								SKPD			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kota Makassar**	**Persentase penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**945.000.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Persentase penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**945.000.000,00**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	67 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Pendisiplinan ASN	67 Paket	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan	96 Orang	186.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Kota Makassar	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan	96 Orang	186.000.000,00	

NO	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)
	Tugas dan Fungsi		Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Tugas dan Fungsi		Formal			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kota Makassar**	**Persentase Tersedianya Administrasi Umum PD**	**100 %**	**1.585.214.612 ,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Persentase Tersedianya Administrasi Umum PD**	**100 %**	**1.585.214.612,0 0**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.684.600,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.684.600,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	0	
	Penyediaan	Kota	Jumlah Paket	1 Paket	227.399.800,0	Penyediaan Bahan	Kota	Jumlah Paket	1 Paket	227.399.800,00	

NO	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)
	Bahan Logistik kantor	Makassar	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0	Logistik kantor	Makassar	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.822.212,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.822.212,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	225.096.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	225.096.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	12 Bulan	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	12 Bulan	0	

NO	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	404.590 000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	404.590.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kota Makassar**	**Persentase Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Makassar**	**Persentase Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**0**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang	33 Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya	33 Unit	0	

NO	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)
			disediakan					yang disediakan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Makassar**	**Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**599.784.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar**	**Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**599.784.000,00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	1 Laporan	55.800.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	55.800.000,00	

NO	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)
			Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	368.546.600,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	368.546.600,00	

NO	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Makassar**	**Persentase pemeliharaan BMD urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**242.070.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar**	**Persentase pemeliharaan BMD urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**242.070.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.880.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.880.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	12 Unit	115.890.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	12 Unit	115.890.000,00	

NO	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah peralatan / mesin lainnya yang Dipelihara	18 Unit	45.960.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah peralatan / mesin lainnya yang Dipelihara	18 Unit	45.960.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Kota Makassar	Ketersediaan Pangan Utama	92%	**0**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Kota Makassar	Ketersediaan Pangan Utama	92%	**0**	**Dihapuskan** sesuai kewenangan dan kebutuhan kabupaten/kota
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung	Kota Makassar	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang	15 Kecamatan	**225.247.940,00**	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung**	Kota Makassar	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang	15 Kecamatan	**225.247.940,00**	

	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)
	Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		pentingnya kemandirian pangan			**Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		pentingnya kemandirian pangan			
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	1 Unit	0	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	1 Dokumen	0	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Kota Makassar**	**Jumlah Training Skill Gratis** **Skor PPH** **Ketersediaan Protein**	**200 Orang** **85 Poin** **127 gr/kap/tahun** **500 Lorong**	**4.735.914.076,00**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Kota Makassar**	**Jumlah Training Skill Gratis** **Skor PPH** **Ketersediaan Protein** **Jumlah**	**200 Orang** **85 Poin** **127 gr/kap/tahun**	**4.735.914.076,00**	Dilakukan perubahan indikator menyesuaikan renstra 2025-2029

NO	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)
			Jumlah Lorong Garden dan Lorong Wisata					Lorong Garden dan Lorong Wisata	500 Lorong		
								Tingkat Ketersediaan Energi berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKG)	2.400 kkal/kapita/hari		
								Tingkat Konsumsi Energi Berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKG)	2.100 kkal/kapita/hari		
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan	Kota Makassar	Jumlah Laporan Ketersediaan Energi dan Protein serta	1 Dokumen	568.771.408,00	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan	Kota Makassar	Jumlah Laporan Ketersediaan Energi dan	1 Dokumen	568.771.408,00	

NO	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)
	Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Stok, Pasokan dan Harga Pangan			**Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**		Protein serta Stok, Pasokan dan Harga Pangan			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	1.381.761.840,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	1.381.761.840,00	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Makassar	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan		23.356.048,00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Makassar	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan		23.356.048,00	

NO	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)
			Keluarga					Pangan Keluarga			
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota		66.275.488,00	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota		66.275.488,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kota Makassar	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis		75.960.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Kota Makassar	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok		75.960.000,00	

NO	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)
								Strategis			
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Makassar	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	125.449.020,00	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kota Makassar	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	325.600.000	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Kota Makassar**	**Jumlah Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan pemerintah**	**25 Ton**	**84.993.000,00**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Jumlah Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan pemerintah**	**25 Ton**	**84.993.000,00**	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	22 Ton	0	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah cadangan pangan beras	22 Ton	0	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	**Kota Makassar**	**Jumlah Lokasi Analisa Ratio Jumlah Penduduk Terhadap**	**1 Kota Makassar**	**10.016.801.080,00**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun**	**Kota Makassar**	**Jumlah Lokasi Analisa Ratio Jumlah Penduduk**	**1 Kota Makassar**	**10.016.801.080,00**	

NO	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)
	Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		**Jumlah Kebutuhan Pangan**			**sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**		**Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan**			
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kota Makassar	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	15 Kecamatan	92.059.000,00	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kota Makassar	Jumlah Lokasi analisa ratio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	15 Kecamatan	92.059.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Makassar	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	15 Laporan	2.506.205.680,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Makassar	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	15 Laporan	2.506.205.680,00	

NO	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)
								Lokal			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Makassar	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	15 Laporan	464.847.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Makassar	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	15 Laporan	464.847.000,00	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Kota Makassar**	**Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan**	**11.76 %**	**528.700.000,00**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Kota Makassar**	**Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan**	**11.76 %**	**528.700.000,00**	Dilakukan perubahan indikator menyesuaikan renstra 2025-2029
								Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)			
	Penyusunan Peta	Kota	Tersedianya Data dan	**1 Laporan**	**106.177.000,0**	**Penyusunan Peta Kerentanan dan**	Kota	Tersedianya data informasi	**1 Laporan**		

NO	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)
	Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Makassar	Informasi tentang daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan		**0**	**Ketahanan Pangan Kecamatan**	Makassar	tentang daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan		**106.177.000,00**	
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Makassar	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	154 609.000,00	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Makassar	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	154.609.000,00	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Tersedianya Laporan Penganan Daerah Rawan Pangan	1 Laporan	**1.176.252.800,00**	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kota Makassar	Tersedianya Laporan Penganan Daerah Rawan Pangan	1 Laporan	**1.176.252.800,00**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	Kota Makassar	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan	1 Laporan	136.189.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Kota Makassar	Terjalinnya kerjasama lintas sektor untuk penanganan	1 Laporan	136.189.000,00	

NO	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)
	Kabupaten/Kota		pangan dan gizi kabupaten/kota			Kabupaten/Kota		kerawanan pangan			
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	225.744.000,00	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	225.744.000,00	
	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kot	1 Dokumen	12.158.000,00	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/K	1 Dokumen	12.158.000,00	

NO	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)
			a					ota			
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Kota Makassar**	**Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan**	94 %	**378.812.200,00**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Kota Makassar**	**Tersedianya Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman dan bermutu**	**94 %**	**378.812.200,00**	Dilakukan perubahan indikator menyesuaikan renstra 2025-2029
								Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar (%)			
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Tersedianya Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	1 Laporan	**1.291.015.400,00**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Makassar	Tersedianya Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar	1 Laporan	**1.291.015.400,00**	
	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan	Kota Makassar	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas	6 Dokuman	27 570.400,00	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah	Kota Makassar	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan	6 Dokuman	27.570.400,00	

NO	RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(1)	(12)
	mutu pangan segar asal tumbuhan		keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			Kabupaten/Kota		pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	13.528.000,00	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah sertifikat uji mutu yang dikeluarkan	2 Dokumen	13.528.000,00	
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	240 Sampel	337.713.800,00	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	240 Sampel	337.713.800,00	

Sumber : Dinas ketahanan Pangan, 2025

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dasar usulan Program dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan program prioritas dan non prioritas dan dilakukan penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat yang mendukung pemantapan ketahanan pangan dalam Renstra 2021-2026 sehingga mampu memberikan lapangan kerja bagi masyarakat dan mampu menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat di tingkat rumah tangga.

Berdasarkan usulan yang masuk, maka diselenggarakanlah Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan di Ruang Sipakalebbi dengan menghadirkan stakeholder terkait, LPM, pihak kecamatan pengusul serta Anggota DPRD Kota Makassar, selanjutnya dilaksanakan Forum Perangkat Daerah tingkat Kota Makassar dalam rangka penyamaan persepsi dan penentuan alokasi anggaran dan penempatan usulan yang dianggap tidak tepat sasaran, Adapun usulan yang masuk pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar (T.C.32)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
USULAN MUSRENBANG					
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jl.Bandang No. 10, Kota Makassar	500 lorong garden dan Lorong wisata	Dibutuhkan pelatihan pengembangan tanaman hidroponik bagi Masyarakat di Kelurahan Bontoala (Volume 1 Angkatan, Perkiraan Anggaran Rp. 8.200.000)	Pelatihan pengembangan tanaman hias / tanaman hidroponik (SUHARDI, S.Sos (KELURAHAN BONTOALA)
2	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jl. Andalas Lr.126 F dan Jl. Sembilan Lr.2, Kota Makassar Makassar , Tamalanr	500 lorong garden dan Lorong wisata	Dibutuhkan bantuan bibit tanaman pangan di lorong di Kelurahan Bontoala (Volume 100 Sachet, Perkiraan	Bantuan Bibit tanaman Pangan di Lorong SUHARDI, S.Sos (KELURAHAN BONTOALA

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
USULAN MUSRENBANG					
		ea, Tamalanrea Jaya		Anggaran Rp. 4.528.500)	)
3	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	TAMBASA 2 RT 001 RW 006 (LORONG WISATA PERMATA), Kota Makassar	500 lorong garden dan Lorong wisata	Bantuan Pengembangan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (HIBAH)	Bantuan Pengembangan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (HIBAH) TRY SASBIANTO, SE (KELURAHAN TAMALANREA JAYA)
4	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kampung Parang Rt 003 Rw 006 (Lorong Wisata Kampar), Kota Makassar	500 lorong garden dan Lorong wisata	Bantuan Pengembangan Kelompok Tani Dan Kelompok Wanita Tani Dengan Volume 1 Angkatan, Pada Anggaran Rp. 4.500.000	Bantuan Pengembangan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (HIBAH) TRY SASBIANTO, SE (KELURAHAN TAMALANREA JAYA)
5.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Perdos Unhas Rw 004 (Lorong Wisata Ikhtiar) , Kota Makassar	500 lorong garden dan Lorong wisata	Bantuan Pengembangan Kelompok Tani Dan Kelompok Wanita Tani Dengan Volume 1 Angkatan, Pada	Bantuan Pengembangan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (HIBAH) TRY

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
USULAN MUSRENBANG					
				Anggaran Rp. 4.500.000	SASBIANTO, SE (KELURAHAN TAMALANREA JAYA)
6.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN VIII LR. 2 RT 001 RW 003 (LORONG WISATA HIMRETA) , Kota Makassar	500 lorong garden dan Lorong wisata	Bantuan Pengembangan Kelompok Tani Dan Kelompok Wanita Tani Dengan Volume 1 Angkatan, Pada Anggaran Rp. 4.500.000	Bantuan Pengembangan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani (HIBAH) TRY SASBIANTO, SE (KELURAHAN TAMALANREA JAYA)
7.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN VIII LR. 2 RT 001 RW 003 (LORONG WISATA HIMRETA) , Kota Makassar	500 lorong garden dan Lorong wisata	Butuhnya para pelaku tani di lorong bantuan bibit tanaman dengan perkiraan estimasi anggaran : (45.000*26paket) = 1.170.000	Bantuan Bibit tanaman Pangan di Lorong AMRULLAH YUNUS (KELURAHAN TAMPARANG KEKE)
USULAN POKIR					
	NIHIL				

Sumber Data : Usulan Musrenbang dan Pokir 2025

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa pada Dinas Ketahanan Pangan secara keseluruhan mempunyai 7 (tujuh) Musrenbang dan tidak

ada usulan Pokir. Dari hasil Forum Perangkat Daerah Lingkup Kota Makassar dihasilkan pemetaan usulan kepada masing-masing pemangku kepentingan, usulan ini akan segera dilaksanakan dan telah dilakukan verivikasi lapangan (verval) dan terdapat 1 lokasi yang tidak bersedia menerima bantuan, sehingga dilakukan rasionalisasi pada anggaran yang disediakan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan diutamakan dari produksi dalam negeri. Upaya ini mengisyaratkan agar dalammemantapkan ketahanan pangan harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan secara terintegrasi. Yang telah dijabarkan dalam PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

3.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana kerja dan pendanaan Perubahan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif perubahan yang dirancang untuk menyesuaikan dengan visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada tahun 2025 dalam upaya pemenuhan Dinas Ketahanan Pangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Perencanaan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya pada peningkatan produktivitas yang tinggi, namun peningkatan produksi pangan tersebut sudah dapat memenuhi gizi masyarakatnya. Karena itu perencanaan ketahanan pangan harus bersifat holistik, realistik, *continue*, dan *actual*. Konsekuensi pembuatan perencanaan pangan bukan hanya hasil saja yang harus diperlihatkan, tetapi juga mengenai cara merumuskan pilar ketersediaan dan kerentanan pangan, pilar distribusi pangan, pilar pola konsumsi dan keamanan pangan dapat berproses dan berjalan secara sinergitas.

Analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Sasaran strategis yang termuat dalam Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota telah sinergi dengan Renstra Dinas Ketahanan PanganProvinsi Sulawesi Selatan.

Visi Badan Pangan Nasional adalah "Terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional berbasis kedaulatan dan kemandirian pangan yang tangguh dan berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong", sedangkan Misinya sebagai berikut :

1. Menguatkan ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan.
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan pangan dan gizi yang berkualitas untuk hidup sehat, aktif dan produktif.
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi 2020-2025 dirancang untuk mencapai sasaran terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi masyarakat secara nasional, wilayah, sampai dengan perseorangan. Kebijakan

strategis ini merupakan arahan untuk setiap Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan sistem pangan. Desain kebijakan ini juga dirancang untuk mencapai indikator kinerja pembangunan pangan dan gizi,

1. Prinsip Dasar Kebijakan Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Pangan No 18 tahun 2012, penyelenggaraan pangan dilakukan dengan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan dan keadilan. Sejalan dengan hal tersebut kebijakan strategis ketahanan pangan strategis dijalankan atas dasar prinsip keadilan, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, kedaulatan dan stabilitas nasional, kemandirian, peran aktif para pihak, keamanan pangan, dan berkelanjutan untuk menghasilkan masyarakat yang sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

2. Aspek Kebijakan Strategis

Kebijakan strategis yang disusun mencakup aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan dengan memperhatikan keamanan pangan pada setiap aspek ketahanan pangan dan gizi.

Dalam upaya mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan melalui tujuh Prioritas Nasional (PN), dimana Badan Pangan Nasional berkontribusi mendukung PN 1, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Strategi pencapaian sasaran PN ini salah satunya dilakukan melalui Program Prioritas (PP3) Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan, dengan fokus penguatan tata kelola sistem pangan dengan penguatan sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas konsumsi pangan

Sebagai lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional terus berupaya untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Selain terus melaksanakan tugas dan fungsi yang Rencana Aksi Badan Pangan Nasional Tahun 2023 5 diamanatkan, Badan Pangan Nasional juga menerima pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa dari 3 (tiga) kementerian, yaitu Kementerian Perdagangan terkait penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan serta penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan, Sesuai dengan peta jalan Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, pada tahun 2023 Badan Pangan Nasional fokus untuk memperkuat kelembagaan, teknologi informasi dan komunikasi pangan, hub pangan wilayah, Cadangan Pangan Pemerintah, pengendalian food loss and waste, edukasi dan percepatan perubahan pola konsumsi pangan B2SA, dan pengentasan wilayah rentan rawan pangan.

Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tertuang pada target Pencapaian SDGs. Hal tersebut digambarkan pada tabel perumusan di bawah ini :

Tabel 3.1 RENCANA AKSI DAERAH (RAD) SDGs (DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2021-2026)

Tujuan . 1 Tanpa Kemiskinan, mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua tempat

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TAHUN DASAR	TARGET PENCAPAIAN						Capaian Target	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1 * Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	43 klp	43 klp	500	500	500	500	500	133	494

Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tahun Dasar 2020	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 2021-2026 (Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
INDIKATOR : 1.a.1 * Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.											
PROGRAM : 2.09.03 (Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan)											

Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Per Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Indikator Kegiatan : Jumlah lokasi pembinaan lorong wisata	Lorong	43 klp	43 klp	500	500	500	500	500	59.427.971.000	APBD Kota Makassar	Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan : 2 Tanpa Kelaparan, mencapai Ketahanan Pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian yang berkelanjutan

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TAHUN DASAR	TARGET PENCAPAIAN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi , terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	29,41%	60 %	23,52 %	17,64 %	11,76 %	11,76 %	5,88 %
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang telah disepakati secara	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah	43 klp	43 klp	43 klp	500	500	500	500

internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	lima tahun/balita							
	2.2.2. (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai ; dan tingkat konsumsi ikan	79	84	80	82	85	88	90
2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.	2.c.1 Indikator anomali harga pangan	Energi:105%(2.523 dari 2.400) Protein:199,65%(125 ,78 dari 63)	Energi:2.400 Protein:63	Energi:2.600 Protein:126	Energi:2.600 Protein:126	Energi:2.700 Protein:127	Energi:2.700 Protein:128	Energi:2.700 Protein:129

Program/Kegiatan/ Indikator		Satuan	Tahun Dasar 2020	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 2021-2026 (Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2025	2026			
INDIKATOR : 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan											
PROGRAM : 2.09.04 (Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota)											
Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan kabupaten / Kota, Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Dan penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Indikator Kegiatan : Persentase penanganan kerawanan pangan	Persen	29,41	60	23,52	17,64	11,76	11,76	5,88	252.648.438	APBD Kota Makassar	Dinas Ketahanan Pangan

Program/Kegiatan/ Indikator	Satuan	Tahun Dasar 2020	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 2021-2026 (Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
INDIKATOR : 2.2.1 * Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita											
PROGRAM : 2.09.03 (Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan)											

Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Per Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Indikator Kegiatan : Jumlah lokasi pembinaan lorong wisata	Lorong	43 klp	43 klp	500	500	500	500	500	59.427.971.000	APBD Kota Makassar	Dinas Ketahanan Pangan

INDIKATOR : 2.2.2. (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai ; dan tingkat konsumsi ikan

PROGRAM : 2.09.03 (Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan)

Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Per Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per kapita Per tahun	Indikator Kegiatan : Jumlah lokasi Analisa Ratio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Skor	78,8	80	80	82,0	85	88	90	533.687.569	APBD Kota Makassar	Dinas Ketahanan Pangan

INDIKATOR 2.c.1 Indikator anomali harga pangan

PROGRAM : 2.09.03 (Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan)

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Indikator Kegiatan : Tersedianya informasi ketersediaan pangan dalam Neraca Bahan Makanan	kkal/kapita/hari gr/kapita/hari	Energi:105%(2.523 dari 2.400)Protein:199,65%(125,78 dari 63)	Energi:2.600 Protein:126	Energi:2.600 Protein:126	Energi:2.700 Protein:127	Energi:2.700 Protein:128	Energi:2.700 Protein:129	Energi:2.700 Protein:129	1.751.490.200	APBD Kota Makassar	Dinas Ketahanan Pangan

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Sub Kegiatan : Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Indikator Kegiatan : Tersedianya informasi Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen (38 Komoditi)	1	1	1	1	1	1	1	693.505.402	APBD Kota Makassar	Dinas Ketahanan Pangan

3.2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Di tahun 2025 yang tertuang dalam perubahan rencana kerja, terdapat Evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahun 2025 Dinas Ketahanan pangan Kota Makassar sampai Triwulan II, dimana telah melaksanakan 5 (Lima) program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 36 (Tiga Puluh Enam) Sub Kegiatan, yang terdiri atas 1 (Satu) program penunjang/pendukung, 6 (enam) kegiatan, 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dan 4 (empat) program utama, 7 (Tujuh) kegiatan, 14 (empat belas) sub kegiatan dan akan melakukan penyesuaian menjadi 4 program diantaranya 1 program penunjang dan 3 program pendukung.

Rencana Program prioritan beserta kegiatannya disajikan berdasarkan identifikasi dan telaahan terhadap sinergitas antara sasaran pembangunan yang tertuang dalam Sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah dengan Renja Dinas Ketahanan Pangan sesuai Permendagri No 90 Tahun 2019, dan Kepmendagri No 050 Tahun 2021 serta Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dapat diwujudkan. Adapun Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Meliputi :

1. Pengentasan Kemiskinan pada daerah rawan dan rentan rawan pangan;
2. Peningkatan Kualitas konsumsi pangan Daerah dengan pemberdayaan Masyarakat.
3. Peningkatan Aksebilitas Ketersediaan Pangan Perkotaan
4. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
5. Pencapaian Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Menyusun Rencana Kerja Perubahan yang tertuang dalam Ringkasan serta Matriks Rencana Kerja Perubahan yang mencakup Kode Rekening, Urusan bidang, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target, capain serta prakiraan maju yang dilaksanakan oleh DKP, dengan rincian terlampir pada **Tabel TC.33** Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2025 Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel 3.1. Matriks Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan 2025 (TC.33)

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dinas Ketahanan Pangan				20.065.600.000,00	25.222.054.297,00	15.729.883.000,00				22.917.656.223,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				20.065.600.000,00	25.222.054.297,00	15.729.883.000,00				22.917.656.223,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				20.065.600.000,00	25.222.054.297,00	15.729.883.000,00				22.917.656.223,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100 90 90 % % %	100 90 % %	8.576.451.760,00	11.752.795.669,00	10.086.456.724,00				7.435.094.100,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang selesai tepat waktu	12 Dokumen	100 %	194.232.500,00	209.483.500,00	209.483.500,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Meningkatnya akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.		320.621.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	4 Dokumen	125.432.000,00	146.112.000,00	90.532.000,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			159.520.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	8.638.000,00	8.864.000,00	5.364.000,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			9.984.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas Nasional		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	8.684.000,00	8.684.000,00	5.184.000,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			9.161.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	8.953.000,00	8.953.000,00	5.453.000,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			9.595.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	8.889.500,00	8.889.500,00	5.389.500,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			9.005.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	17.765.000,00	17.765.000,00	7.765.000,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan			22.141.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4 Laporan	15.871.000,00	10.216.000,00	5.816.000,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			101.215.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	100 Persen	100 %	6.792.641.260,00	8.171.243.557,00	8.171.243.557,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.		6.093.944.700,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	74 Orang/bulan	6.370.151.260,00	7.719.593.557,00	7.719.594 012,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			5.764.049.000,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	240.120.000,00	269.280.000,00	310.320.000,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			134.640 000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1 Dokumen	182.370.000,00	182.370.000,00	182.370.000,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			168.000.000,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			18.329.000,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			8.926.700,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100 Persen	100 %	72.000.000,00	945.000.000,00	945.000.000,00	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.		290.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	15 Orang	72.000.000,00	945.000.000,00	186.000.000,00	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			290.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pesentase penyediaan layanan umum kantor	100 Persen	100 %	885.497.600,00	1.585.214.612,00	1.585.214.612,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.		313.467.400,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	133.573.800,00	434.844.600,00	70.684.600,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			10.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor										

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	213.539.800,00	227.399.800,00	227.399.800,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			21.600.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.330.000,00	7.822.212,00	7.822.212,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			5.867.400,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	25 Laporan	280.514.000,00	422.608.000,00	225.096.000,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			173.000.000,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	243.540.000,00	492.540.000,00	404.590.000,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			103.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya BMD Penunjang Urusan PD	100 Persen	100 Persen	0,00	0,00	0,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.		10.980.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			10.980.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah	100 Persen	100 %	446.332.400,00	599.784.000,00	599.784.000,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Meningkatnya akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.		72.215.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	55.800.000,00	55.800.000,00	55.800.000,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			59.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	390.532.400,00	543.984.000,00	368.546.600,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			13.215.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 Persen	80 %	185.748.000,00	242.070.000,00	242.070.000,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya akuntabilitas, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah.		333.866.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	43.630.000,00	43.630.000,00	40.880.000,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			89.284.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	10 Unit	89.448.000,00	145.770.000,00	115.890.000,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			187.392.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	57 Unit	52.670.000,00	52.670.000,00	45.960.000,00	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.			57.190.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Persentase Ketersediaan Pangan Utama	93 %	100 93 % %	8.000.000,00	225.247.940,00	0,00				205.570.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15 Kecamatan	1 Dokumen	8.000.000,00	225.247.940,00	225.247.940,00	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Masyarakat ; Kelompok Masyarakat		205.570.000,00
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya										

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	2 Unit	8.000.000,00	225.247.940,00	0,00	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			205.570.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Konsumsi Energi Berdasarkan Angka Kecukupan Energi Tingkat Ketersediaan Energi Berdasarkan Angka Kecukupan Energi	500 88 "Energi: 2.700 Protein: 128" Lorong	2100 2400 Kkal / Kapita kkal/kapita	10.923.363.640,00	10.670.565.488,00	4.735.914.076,00				14.160.281.423,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang terlaksana	1 Dokumen	91 %	376.762.840,00	568.771.408,00	568.771.408,00	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat dengan menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman.		1.050.187.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya										
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	12 Laporan	2 Laporan	129.156.800,00	169.256.340,00	1.381.761.840,00	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.			234.587.000,00
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga										

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	150 Keluarga	0,00	0,00	23.356.048,00	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.			30.000.000,00
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota										
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-	3 laporan	0,00	0,00	66 275.488,00	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.			80.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis										

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas Nasional		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	15 Laporan	1 Laporan	145.000.000,00	197.665.048,00	75.960.000,00	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.			352.800.000,00
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)										
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	102.606.040,00	201.850.020,00	125.449.020,00	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.			352.800.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	110 868 600,00	84.993.000,00	84.993.000,00	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat dengan menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman		90.000.000,00
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota										
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Ton	5 Ton	110 868.600,00	84 993.000,00	0,00	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.			90.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas			
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1 Kota Makassar	90 %	10.435.732.200,00	10.016.801.080,00	10.016.801.080,00	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat dengan menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman		13.020.094.423,00
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun										
	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	12.300.000,00	123.009.000,00	92.059.000,00	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.			103.504.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal										

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas Nasional		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	20 Laporan	2 Laporan	10.283.317.200,00	9.530.364.080,00	2.506.205.680,00	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.			12.763.622.569,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun										
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	4 Laporan	3 Laporan	140.115.000,00	363.428.000,00	464.847.000,00	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.			152.967.854,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	11,76 %	1,31 %	247.718.200,00	1.282.429.800,00	528.700.000,00				429.532.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kota	1 Laporan	100 %	110.011.200,00	106.177.000,00	106.177.000,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat dengan menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman.		252.482.000,00
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan										
	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	110.011.200,00	106.177.000,00	154.609.000,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			252.482.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan KabupatenKota yang terlaksana	1 Laporan	100 %	137.707.000,00	1.176.252.800,00	1.176.252.800,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat dengan menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman		177.050.000,00
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	79.258.000,00	735.113.800,00	225.744.000,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			73.637.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota										

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2 Laporan	3 Laporan	58.449.000,00	441.139.000,00	136.189.000,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			88.413.000,00
Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota										
	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	0,00	0,00	12.158.000,00	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			15.000.000,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar	96 %	80 %	310.066.400,00	1.291.015.400,00	378.812.200,00				687.178.700,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang terlaksana	1 Laporan	80 %	310.066.400,00	1.291.015.400,00	1.291.015.400,00	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat dengan menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman.		687.178.700,00
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota										
	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	26.839.000,00	230.958.000,00	13.528.000,00	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			341.605.000,00
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota										

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	2 Dokumen	2 Dokumen	266.131.600,00	953.550.600,00	337.713.800,00	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			193.772.500,00
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan										
	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	2 Dokumen	17.095.800,00	106.506.800,00	27.570.400,00	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru			151.801.200,00
			JUMLAH	20.065.600.000,00	25.222.054.297,00	15.729.883.000,00				22.917.656.223,00

BAB IV
PENUTUP

4.1. Catatan Penting

Dirumuskan beberapa catatan penting untuk mencapai Keberhasilan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam program kerja ini sangat bergantung kepada komitmen pimpinan dan seluruh staf Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar yang tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholder.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang akan tertuang dalam Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025, setiap unit terkait (Sekretariat dan Bidang) wajib menerapkan prinsip - prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik kerangka regulasi maupun pelayanan publik, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan baik antar program, antara kegiatan dalam satu program, maupun kegiatan antar unit kerja dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing - masing unit kerja.

Pada akhir tahun 2025, setiap unit kerja dalam Dinas Ketahanan Pangan wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA, RKA PD, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD di Kota dan peraturan-peraturan lainnya.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 disimpulkan dari 5 (Lima) program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 36 (Tiga Puluh Enam) Sub Kegiatan, yang terdiri atas 1 (Satu) program Penunjang/Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 6 (enam) kegiatan, 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dan 4 (empat) program utama,7 (tujuh) kegiatan, 14 (empat belas) sub kegiatan dan akan dilakukan perubahan menjadi

Program kerja yang terjabar di dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar merupakan tahapan operasionalisasi pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Makassar yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dan terjadi perubahan dikarenakan penyesuaian dengan kegiatan berjalan.

Dalam mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan dalam Musrenbang. Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 merupakan acuan bagi setiap unit kerja dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan, masyarakat dan stakeholder lainnya

sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di Dinas Ketahanan Pangan. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan Renja Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Setiap unit kerja dalam lingkup Dinas, masyarakat dan stakeholder lainnya berkewajiban melaksanakan program - program yang tertuang dalam Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.
2. Renja Tahun 2025 menjadi acuan dan pedoman bagi setiap unit kerja dalam lingkup Dinas untuk menyusun kebijakan publik, baik yang berupa regulasi maupun pelayanan publik, dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran PD (RKA-PD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD (DPA-PD) Tahun 2025, dengan ketentuan :
   a. Uraian penggunaan pagu indikatif Tahun 2025 merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas agenda kerja pembangunan daerah.
   b. Uraian rencana penggunaan pagu indikatif Tahun 2025 merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas PD sesuai tupoksinya.
3. Pelaksanaan rencana tindak lanjut yang tertuang dalam Renja Tahun 2025 ini wajib mengikuti prinsip - prinsip pengarusutamaan yaitu : pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengarusutamaan gender.
4. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang undangan. Berkaitan dengan pendanaan, masyarakat luas dan stakeholder lainnya dapat berperan serta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program - program pembangunan.

Dinas Ketahanan Pangan berkomitmen untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan mewajibkan kepada seluruh penanggung jawab kegiatan untuk melaksanakan pemantauan, melakukan Tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Dinas dan Kepala Dinas akan menyampaikan kepada Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini diharapkan sesuai dengan rencana awal sehingga dapat direalisasikan dengan pencapaian kinerja yang memuaskan.

Makassar, 12 Agustus 2025
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Makassar,

Ir. Nasir Siswan Mungkasa, ST, M.Ap
Pangkat : Pembina TK I /IV.b
NIP : 197304252005021001

LAMPIRAN

Lampiran 1 . Form T-C.19 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2025 Kota Makassar

TABEL T-C.19 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM RKPD TAHUN 2025 KOTA MAKASSAR

NO	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran			
1	2			3	4	5		6		7		8		9=8/7 X 100%		10 = 6+8		11= 10/5 x 100%		11	12	
	2			URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR																		
	2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																		
	2	09	01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90	9,507,287,000	87,6	6 388.627 .218	90	7.597.450.003	99,33	6.560.906 167	110,36	69.36	186,93	12.949.533.385	211	136,20	Dinas Ketahanan Pangan			
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100		91,9		100		100		100		191,9		191,90				

TABEL T-C.19 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM RKPD TAHUN 2025 KOTA MAKASSAR

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 X 100%		10 = 6+8		11= 10/5 x 100%		11	12
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90		89		90		100		111,11		189		210			
	2 09 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	94	247,938,000	0	0	91	4.500.000	130,67	4.500.000	143,59	100	130,67	4.500.000	139,01	1,81		
	2 09 03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi Perkapita	2700	5,847,167,000	2716	14.835.769.036	2600	16.030.040.200	2782	15.217.255.019	107	94,93	5498	30.053.024.055	203,62	513,97		
			Ketersediaan Protein Perkapita	126		73,71		126		80,69		64,03		154,40		122,53			

TABEL T-C.19 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM RKPD TAHUN 2025 KOTA MAKASSAR

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		TINGKAT REALISASI KINERJA ANGGARAN DAN RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 X 100%		10 = 6+8		11= 10/5 x 100%		11	12
			Jumlah Lorong Gerden dan Lorong Wisata	500		491		500		619		123,8		1110		222			
			Skor Pola Pangan Harapan	90		83.9		82		89,60		109,26		173,50		192,77			
	2 09 04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	588	217,341,000	23.52	449,027,820	17,64	334,150,800	17,64	312,887,534	100	93.64	41,16	761,915,354	700	350,56		
	2 09 05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	100	328,383,000	100	596,028,700	100	1,413,066,150	100	1,376,178,481	100	97,39	200	1,972,207,181	200	600,58		

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Lt. 5 Telepon (0411) 3616-639
M A K A S S A R

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR
NOMOR : 891 /1370/ DKP/VI/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa untuk lebih tercapainya pembangunan yang terarah dan terencana serta tersedianya dokumen rencana kerja pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar maka dipandang perlu penetapan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menerapkan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar;.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Peternakan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas

Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
22. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional 2022-2024;
23. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301;;
24. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau dan Gula Konsumsi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1302;;
25. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336;
26. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung dan Kedelai di Tingkat Konsumen, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1339;
27. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1340;
28. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Label Pangan Segar, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140;
29. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 339;

30. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 665;
31. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 993;
32. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Pesyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287;
33. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional nomor 7 tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327;
34 Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Dan Iklan Pangan Segar, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 500;
35. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Batas Maksimal Cemaran Dalam Pangan Segar Di Peredaran, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 501;
36 Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal Dalam Rangka Penganekaragaman Pangan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 880;
37. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Batas Maksimal Residu Pestisida Dalam Pangan Segar Asal Tumbuhan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 981;
38. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 93;

39. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Badan Pangan Nasional, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 94;

40. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);

41. Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 91 Tahun 2023);

42. Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Pengentasan Kemiskinan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 111).

43. Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan . **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR TENTANG TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025;**

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menginventarisir dan menyiapkan data sebai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
2. Mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan
3. Melaksanakan koordinasi Intern Tim Penyusunan Guna Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan

4. Merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
5. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan
7. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan *ini* mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 18 Juni 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Makassar,

Ir. Andi Niswan Mungkasa, ST,M.Ap
Pangkat : Pembina Tk I/IV.b
NIP : 197304252005021001

Tembusan Kepada, Yth. ;
1. Masing-Masing yang Bersangkutan;
2 Pertinggal.

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025

A. Ketua : Kepala Dinas
B. Koordinator Tim : Sekretaris
C. Wakil Koordinator Tim : Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
D. Kelompok Kerja :

1. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
   a. Fungsional Ahli Muda
   b. Fungsional Ahli Pertama
   c. Pelaksana

2. Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
   a. Fungsional Ahli Muda
   b. Fungsional Ahli Pertama
   c. Pelaksana

3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
   a. Fungsional Ahli Muda
   b. Fungsional Ahli Pertama
   c. Pelaksana

4. Kepala Bidang Kemanan Pagan
   a. Fungsional Ahli Madya
   b. Fungsional Ahli Pertama
   c. Pelaksana

5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   a. Pelaksana

6. Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan
   a. Pelaksana

7. Staf Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Ringkasan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan
Kota Makassar

No	Program / Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Penjelasan Analisa
1	*2*	*3*	*4*
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 Sub Kegiatan (-) Rasionalisasi Anggaran Kode Rekening Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		- 3 Sub Kegiatan (+) Terdapat penambahan ASN Mutasi Masuk dengan kondisi per 30 Juni 2025 : - PNS : 32 Orang - CPNS : 2 Orang - PPPK : 33 Orang - Kenaikan Pangkat Gol. IV sebanyak 2 Orang dari Existing 10 Orang - Kenaikan Pangkat Gol. III sebanyak 6 orang di Bulan April, Exsisting 19 orang, Total 25 orang - Terdapat Kekurangan Gaji PPPK sebanyak 6 orang selama 2 bulan - Penambahan Tenaga PPPK dengan memperhitungkan Tunjangan Keluarga dan Lainnya - Peralihan Tenaga Fungsional sebanyak 5 orang - Tambahan Penghasilan : - Grade 14 kadis . 1 org - grade 12 sekdis : 1 org - grade 12 F. Madya . 1 org - grade 11 Kabid : 4 org - grade 10 F. Muda : 3 org - grade 9 kasubag : 3 org - grade 8 F. Pertama : 5 org + 2 org = 7 org - grade 7 Pelaksana 10 org - Grade 6 Pelaksana 1 org - P3K gol 9 / grade 8 : 12 org
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Sub Kegiatan (-) Rasionalisasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		5 Sub Kegiatan (-) Pengurangan Tenaga Kontrak
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2 Sub Kegiatan (-) Rasionalisasi Belanja Modal
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Sub Kegiatan (-) Rasionalisasi Pemeliharaan AC
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN		

No	Program / Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Penjelasan Analisa
1	*2*	*3*	*4*
	PANGAN		
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		- 1 Sub Kegiatan - Dihapuskan karena tidak lagi sesuai dengan kondisi kewenangan kota
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		- Dari 3 jadi 5 Sub Kegiatan - Terdapat 3 Sub Kegiatan yang termasuk Tagging Program Astacita - Terdapat 1 Sub Kegiatan Pendukung Program Prioritas" Urban Farming" dan Penanganan Infasi - MBG (Menjaga Pasokan)
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Dihapuskan karena kondisi telah mencukupi dan diarahkan ke pengelolaan
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		- 3 Sub Kegiatan - Terdapat Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyusunan RAD - Mandatory pelaksanaan *B2SA Go To School* - Peralihan Belanja dari Kegitatan Budidaya Pertanian menjadi Kegiatan Diversifikasi Pangan Lokal kerja sama PKK - Kegiatan Intervensi Kemiskinan dan Stunting - MBG (Menu Controlling)
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		1 Sub Kegiatan
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Dari 2 jadi 3 Sub Kegiatan - Terdapat Rasionalisasi Kegiatan Meeting - MBG (Penanganan Food Loss dan Food Waste)
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		3 Sub Kegiatan - Mandatory keberlanjutan PAS - AMAN di pasar Maricayya - Diperlukan Edukasi dan Sosialisasi Pengawasan Keamanan Pangan - Diperlukan penambahan bahan uji rapid - MBG (Pengawasan Keamanan Pangan di SPPG Se- Kota Makassar)

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2025.

PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Dinas Perdagangan dan Perindustrian



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dipandang perlu untuk diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, dengan menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana di maksud Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan.:
1. Wakil Wali Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
7.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
9.	Dinas Sosial Kota Makassar
10.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
12.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
13.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Makassar
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
22.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
23.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
24.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
25.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
26.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
27.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
28.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
29.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar

31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
32.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
34.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
35.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
36.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
37.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
38.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
39.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
40.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Paanakkukang Kota Makassar
43.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
44.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
45.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
46.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
47.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
58.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
49.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
50.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar
51.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025. Dokumen ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam mengemban amanah pembangunan daerah, memastikan setiap langkah yang diambil selaras dengan Visi Kepala Daerah "Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan". Rencana Kerja Perubahan ini bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen vital yang memandu seluruh gerak langkah organisasi untuk satu tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini didasari oleh refleksi mendalam atas kinerja dan capaian Rencana Kerja sebelumnya. Kami senantiasa melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas program dan kegiatan yang telah berjalan, mengidentifikasi kekuatan yang perlu dipertahankan, serta mengenali titik-titik kelemahan yang memerlukan perbaikan. Evaluasi ini menjadi fondasi utama dalam merumuskan strategi baru dan penyesuaian yang diperlukan, memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang diusulkan benar-benar responsif terhadap dinamika dan kebutuhan riil di lapangan.

Kami memahami betul bahwa Kota Makassar dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, khususnya di sektor perdagangan dan perindustrian. Permasalahan mendasar seperti rendahnya tingkat produktivitas dan inovasi pada Industri Kecil Menengah (IKM), di mana kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Makassar mengalami penurunan dari 16,76% pada tahun 2020 menjadi 14,27% pada tahun 2023, menjadi perhatian utama. Selain itu, keterbatasan akses IKM terhadap teknologi modern, yang baru sekitar 30% IKM mengadopsinya, menuntut solusi konkret dan terencana.

Di sisi perdagangan, kami menyadari bahwa kualitas sarana distribusi perdagangan masih memerlukan perbaikan signifikan. Dari total 50 pasar rakyat yang ada, hanya 10 pasar yang memenuhi standar SNI, yang tentu saja berdampak pada kenyamanan konsumen dan daya tarik pasar tradisional. Tantangan lainnya adalah masih minimnya adopsi sistem digital dalam transaksi pasar, dengan hanya 15% pasar yang telah menggunakan sistem pembayaran non-tunai, menghambat efisiensi dan transparansi. Lebih lanjut, isu vital terkait stabilitas harga dan daya beli masyarakat juga menjadi fokus perhatian kami. Inflasi di Kota Makassar yang mencapai 2,11% pada tahun 2023, dengan fluktuasi harga barang pokok yang tidak terkontrol, menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di samping itu, pengawasan kemetrologian juga menjadi perhatian serius, di mana hanya 50% alat ukur di pasar yang telah terkalibrasi dan memenuhi standar, berpotensi merugikan konsumen.

Dalam konteks pengembangan ekonomi daerah, volume ekspor produk lokal yang masih rendah, hanya mencapai $34.700.607 pada tahun 2020 dengan target pertumbuhan tahunan yang tidak tercapai, menunjukkan bahwa produk lokal belum sepenuhnya mampu bersaing di pasar internasional. Minimnya partisipasi pelaku usaha dalam pameran internasional, hanya 10%, juga menjadi hambatan dalam pemanfaatan potensi pasar global secara optimal.

Melalui Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar bertekad untuk lebih mengefektifkan kinerja dalam mengatasi seluruh permasalahan tersebut. Kami telah mengintegrasikan berbagai masukan berharga, termasuk usulan program dari hasil Musrenbang dan pokok-pokok pikiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seperti pelaksanaan operasi pasar reguler di berbagai kelurahan, yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen kami untuk memastikan bahwa perencanaan kami berbasis pada aspirasi dan kebutuhan riil di lapangan.

Rencana Kerja Perubahan ini dirancang dengan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif, dengan penyesuaian pada program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan dinamika kebutuhan dan efisiensi anggaran. Kami telah memiliki catatan penting mengenai potensi tantangan dalam pelaksanaan, termasuk ketersediaan anggaran, dan telah merumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan yang kuat serta rencana tindak lanjut yang konkret. Ini merupakan upaya kami untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam setiap langkah yang diambil, meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa pencapaian Visi "Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan" membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pihak, baik pelaku usaha, akademisi, komunitas, maupun masyarakat umum, untuk bersama-sama mendukung implementasi Rencana Kerja Perubahan ini demi terwujudnya Kota Makassar yang lebih baik, sejahtera, dan berdaya saing.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam setiap ikhtiar membangun Kota Makassar yang kita cintai.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 12 Agustus 2025
Kepala Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar

Evy Apriati, SE., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680417 199203 2007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian 50

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar. 54

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kota Makassar 61

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 95

BAB IV PENUTUP 123

4.1. Catatan Penting 123

4.2. Kaidah Kaidah Pelaksanaan 124

4.3. Rencana Tindak Lanjut 126

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 (TABEL E-81) Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar 31

Tabel. 2.2 (Format TC.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar s/d Tahun 2025 52

Tabel 2.3 (T-C.31). Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025 Kota Makassar 62

Tabel. 3.1. Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 98

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025 merupakan langkah strategis yang tidak terpisahkan dari dinamika pembangunan daerah, serta didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan kebutuhan adaptasi terhadap perubahan prioritas. Perubahan ini krusial untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas senantiasa relevan, efektif, dan efisien dalam mendukung visi pembangunan Kota Makassar.

Secara fundamental, proses penyusunan rencana kerja perubahan ini berpegang teguh pada sejumlah regulasi yang mengikat. Pedoman utamanya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, sebagai acuan yang lebih spesifik di tingkat daerah, rencana kerja perubahan ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan yang mengatur pedoman perencanaan pembangunan daerah. Di lingkup lokal, proses ini disesuaikan pula dengan Peraturan Walikota Makassar yang secara detail mengatur mekanisme dan prosedur perencanaan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Kepatuhan terhadap seluruh kerangka regulasi ini menegaskan legalitas, akuntabilitas, dan objektivitas setiap tahapan perubahan RENJA yang disusun.

Sebagai dasar pemikiran dan perencanaan yang komprehensif, rencana kerja perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025 secara hierarkis mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026. RPJMD ini menjadi dokumen induk yang menetapkan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar untuk periode lima tahunan, mencakup target-target makro yang harus dicapai oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Secara lebih spesifik, rencana kerja perubahan ini juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2021-2026. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Makassar. Keselarasan antara RENJA, RPJMD, dan Renstra menjadi kunci vital untuk memastikan konsistensi arah pembangunan, efisiensi alokasi sumber daya, dan sinergi antar-program.

Visi dan Misi Walikota Makassar, yaitu "Makassar Unggul, Inklusif, dan Berkelanjutan", merupakan payung besar yang menaungi seluruh upaya pembangunan daerah, termasuk sektor perdagangan dan perindustrian. Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki peran krusial dalam mewujudkan visi tersebut, terutama dalam aspek keunggulan melalui peningkatan daya saing produk dan industri lokal, inklusifitas dengan pemerataan akses pasar dan kesempatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta keberlanjutan melalui pengembangan industri yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan. Melalui sektor perdagangan dan perindustrian yang maju, diharapkan tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Rencana kerja perubahan ini dirancang untuk lebih menginternalisasikan dan menterjemahkan visi dan misi tersebut ke dalam program-program kerja yang konkret, terukur, dan berdampak nyata.

Penyebab dilaksanakannya rencana kerja perubahan tahun 2025 ini didasari oleh beberapa faktor krusial yang muncul seiring berjalannya waktu. Pertama, meskipun perencanaan pembangunan Tahun 2025 telah disusun pada Tahun Anggaran 2024 dan telah menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan pertama Tahun 2025 menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian mendesak. Adanya penyesuaian program strategis dan program prioritas kepala daerah terpilih mengharuskan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar untuk bersikap adaptif dan responsif. Penyesuaian ini bisa mencakup fokus baru pada pengembangan ekspor komoditas unggulan, peningkatan kapasitas industri kreatif, atau upaya percepatan hilirisasi produk. Kedua, hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kota Makassar Tahun 2025 triwulan kedua mengindikasikan adanya program atau kegiatan yang memerlukan penyesuaian target, anggaran, atau bahkan perubahan strategi pelaksanaannya agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran. Ketiga, disisi lain, keberlanjutan program dan kegiatan dalam membangun Kota Makassar juga menunjukkan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian lebih untuk segera ditindaklanjuti. Permasalahan ini dapat berupa tantangan dalam stabilisasi harga kebutuhan pokok, peningkatan kualitas produk industri lokal agar berdaya saing global, pengembangan infrastruktur pendukung perdagangan dan industri, atau adaptasi terhadap perubahan regulasi tingkat nasional yang berdampak pada sektor ini. Oleh karena itu, rencana kerja perubahan ini dipandang perlu untuk mengoptimalkan kinerja dinas dan memastikan bahwa setiap upaya pembangunan memberikan dampak yang maksimal dan berkelanjutan.

Kondisi Kota Makassar saat ini, khususnya yang menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian, menunjukkan berbagai potensi sekaligus tantangan yang kompleks. Sebagai pusat perekonomian di kawasan Timur Indonesia, Kota Makassar memiliki geliat perdagangan yang dinamis dan potensi industri yang terus

berkembang. Namun, sektor ini masih dihadapkan pada isu-isu krusial seperti fluktuasi harga komoditas strategis, daya saing produk industri lokal di pasar global, keterbatasan akses pasar bagi produk UMKM dan industri kecil, kebutuhan inovasi produk dan proses produksi, serta tantangan digitalisasi dalam rantai pasok dan pemasaran. Selain itu, persaingan yang semakin ketat, perubahan preferensi konsumen, dan dampak disrupsi teknologi juga menuntut adaptasi cepat dari pelaku usaha. Dinas Perdagangan dan Perindustrian perlu merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan ini, misalnya melalui program stabilisasi harga, fasilitasi pameran dagang dan promosi produk, pendampingan standarisasi produk industri, pelatihan peningkatan kapasitas SDM industri, serta pengembangan ekosistem e-commerce yang kondusif.

Setelah rencana kerja perubahan tahun 2025 ini disetujui dan disahkan, tindak lanjut yang harus dilakukan ke depannya adalah memastikan implementasi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Pertama, sosialisasi intensif terhadap seluruh jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta pemangku kepentingan terkait (asosiasi pengusaha, pelaku UMKM, masyarakat), mengenai substansi rencana kerja perubahan ini menjadi krusial. Ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang seragam dan membangun komitmen bersama dalam pelaksanaannya. Kedua, penyesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, seperti Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), harus segera dilakukan agar sepenuhnya sejalan dengan rencana kerja. Ketiga, pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam rencana kerja perubahan harus dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dengan mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan capaian indikator kinerja yang terukur. Keempat, monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengukur progres pencapaian target, mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul, serta merumuskan langkah korektif yang diperlukan secara tepat waktu. Hasil monev ini akan menjadi dasar kuat untuk laporan pertanggungjawaban, bahan pengambilan keputusan, serta masukan berharga bagi proses perencanaan di periode selanjutnya. Dengan demikian, rencana kerja perubahan ini tidak hanya menjadi dokumen statis, melainkan panduan dinamis yang secara berkelanjutan mengarahkan setiap upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mendukung terwujudnya Kota Makassar yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Peyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pengentasan Kemiskinan Daerah Kota Makassar Tahun 2021- 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 111);
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan.
21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita daerah Kota Makassar Tahun 2025 nomor 15)
22. Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1799/188.4.45/Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Makassar Nomor 2252/188.4.45/Tahun 2025 Tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025, memiliki maksud dan tujuan yang sangat strategis dan krusial. Ini dirancang untuk memastikan tercapainya indikator kinerja tahunan secara optimal di sektor perdagangan dan perindustrian. Rencana kerja perubahan ini adalah sebuah kerangka strategis yang memuat program dan kegiatan yang telah disesuaikan, baik dalam konteks regulasi maupun anggaran, guna memaksimalkan pencapaian sasaran pembangunan yang telah direncanakan untuk tahun berjalan.

Perubahan pada RENJA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar ini bukanlah sekadar revisi rutin, melainkan sebuah respons proaktif terhadap dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang. Secara spesifik, penyusunan rencana kerja perubahan ini bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan Program Strategis dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih.
   Dengan adanya visi dan misi baru Walikota Makassar terpilih, atau perubahan fokus kebijakan yang muncul seiring berjalannya waktu hingga triwulan pertama tahun 2025, sangat penting bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar untuk segera menyelaraskan program-programnya. Ini memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan oleh Dinas, termasuk inisiatif baru dalam peningkatan daya saing produk lokal, pengembangan ekspor, atau penguatan ekosistem industri kreatif, benar-benar mendukung arah pembangunan Kota Makassar yang diinginkan.
2. Penyelarasan Program dan Kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) di Masing-masing Bidang Dinas.
   Evaluasi triwulan pertama seringkali mengungkap adanya potensi ketidaksesuaian atau tumpang tindih dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, rencana kerja perubahan ini menjadi momen penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang diusung oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, mulai dari bidang pengelolaan pasar, perlindungan konsumen, pengembangan industri kecil dan menengah, hingga promosi perdagangan, benar-benar relevan dan optimal dalam mendukung pelaksanaan Tupoksi masing-masing bidang. Penyelarasan ini menjamin efisiensi dan efektivitas kerja internal Dinas.
3. Menyesuaikan Indikator dan Target Kinerja Program dan Kegiatan sesuai dengan Tupoksi di Masing-masing Bidang Dinas.
   Untuk mencapai pembangunan yang terukur, indikator dan target kinerja adalah hal mutlak. Rencana kerja perubahan ini memungkinkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar untuk melakukan kalibrasi ulang terhadap indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian ini bisa didasari oleh realisasi capaian triwulan pertama yang menunjukkan perlunya penyesuaian target agar lebih realistis atau lebih ambisius, atau perubahan metodologi pengukuran agar lebih akurat dalam

merefleksikan hasil kerja Dinas, khususnya dalam mendukung sektor perdagangan dan perindustrian Kota Makassar.

4. Penyesuaian Pendanaan Program dan Kegiatan Prioritas. Alokasi anggaran adalah tulang punggung pelaksanaan program.
   Rencana kerja perubahan ini memungkinkan adanya realokasi atau penyesuaian pendanaan untuk program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama. Hal ini bisa terjadi karena adanya efisiensi di satu sektor, kebutuhan mendesak di sektor lain, atau penambahan anggaran untuk mendukung program strategis baru yang muncul. Dengan penyesuaian ini, dipastikan bahwa sumber daya finansial Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran untuk mendukung capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, maksud dan tujuan utama dari rencana kerja perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025 adalah untuk menciptakan dokumen perencanaan yang lebih adaptif, responsif, dan akuntabel. Ini krusial untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dijalankan oleh Dinas dapat secara efektif dan efisien mencapai indikator-indikator kinerja tahunan yang telah ditetapkan, serta pada akhirnya berkontribusi nyata terhadap terwujudnya visi Makassar Unggul, Inklusif, dan Berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan urutan sebagai berikut:

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. PENDAHULUAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan triwulan 1 tahun 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU dan terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Berisikan uraian mengenai:

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

1) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
3) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
4) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai alasan terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, Program dan Kegiatan

yang tidak mengalami Perubahan serta program dan kegiatan yang mengalami perubahan

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi menjadi fondasi krusial dalam proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas, untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana program dan kegiatan yang telah direncanakan di awal tahun mampu direalisasikan. Peninjauan ini tidak hanya berfokus pada progres fisik dan penyerapan anggaran, namun juga menyoroti efektivitas program dalam mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta keselarasan dengan sasaran strategis jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas. Data kuantitatif dan informasi kualitatif yang dikumpulkan dari pelaksanaan di lapangan akan menjadi dasar analisis utama dalam bab ini.

Bagian ini juga akan memuat hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar yang relevan dengan periode yang sedang berjalan. Meskipun Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah, capaian triwulan pertama RENJA adalah cerminan awal dari progres menuju sasaran strategis tersebut. Evaluasi ini akan mengkorelasikan kinerja operasional jangka pendek dengan tujuan jangka panjang Dinas, seperti peningkatan daya saing produk industri, stabilisasi harga kebutuhan pokok, atau perluasan akses pasar bagi pelaku usaha di Kota Makassar. Di sini, data kualitatif dari feedback pelaku usaha, laporan monitoring, dan observasi lapangan akan melengkapi angka-angka kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang holistik terhadap capaian dan tantangan strategis.

Dari hasil kajian ini, akan teridentifikasi berbagai keberhasilan, tantangan, serta faktor-faktor penghambat dan pendorong yang memengaruhi kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar. Keberhasilan akan didukung dengan data-data yang menunjukkan peningkatan atau pencapaian target, menjadi motivasi dan model untuk terus dikembangkan. Sementara itu, tantangan dan hambatan akan dianalisis secara mendalam, disertai dengan data pendukung yang mengilustrasikan akar permasalahannya, seperti penundaan pengadaan, kurangnya partisipasi, atau perubahan kondisi pasar. Pemahaman mendalam terhadap kondisi riil di lapangan, baik dari sisi angka maupun narasi, ini sangat esensial untuk merumuskan strategi penyesuaian yang tepat dalam rencana kerja perubahan.

Keseluruhan temuan dan analisis dalam Bab II ini, yang disajikan melalui kombinasi data kuantitatif dan narasi kualitatif, akan menjadi landasan kuat bagi perumusan rekomendasi dan penyesuaian program serta kegiatan yang akan diuraikan pada Bab III Perubahan RENJA. Dengan demikian, dokumen perubahan ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap masalah, namun juga proaktif dalam mengoptimalkan potensi dan memastikan bahwa alokasi sumber daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar benar-benar efektif dan efisien dalam mencapai visi "Makassar Unggul, Inklusif, dan Berkelanjutan".

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

1. Garis besar mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut:

   Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar menatap Tahun Anggaran 2025 dengan optimisme dan strategi yang terarah untuk mengakselerasi pembangunan di sektor perdagangan dan perindustrian. Guna mencapai visi "Makassar Unggul, Inklusif, dan Berkelanjutan", seluruh rencana kegiatan telah dipetakan secara cermat dan sistematis. Pembangunan di bidang perdagangan dan perindustrian tahun 2025 direncanakan melalui 10 program utama. Dari jumlah tersebut, 9 program di antaranya merupakan Program Urusan Wajib yang fundamental, terdiri dari 3 Program Prioritas yang akan menjadi motor penggerak utama, serta 6 Program Utama yang menopang keberlanjutan sektor. Selain itu, terdapat 1 Program Penunjang yang dirancang untuk memastikan efisiensi operasional internal. Keseluruhan program ini kemudian dijabarkan ke dalam 21 kegiatan konkret, dengan 8 Kegiatan Penunjang dan 13 Kegiatan Urusan Wajib yang siap diimplementasikan. Struktur program yang terintegrasi ini merefleksikan komitmen Dinas dalam mewujudkan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan ekonomi Kota Makassar.

   Jangkauan program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar dirancang untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha. Lokasi implementasi program dan kegiatan ini tersebar secara merata di semua Kecamatan di Kota Makassar, memastikan pemerataan pembangunan dan aksesibilitas layanan. Secara lebih spesifik, kelompok sasaran utama yang akan menerima manfaat langsung dari program-program ini meliputi para unit usaha yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan, pengembangan Pasar Tradisional yang berstandar SNI sebagai wujud peningkatan kualitas infrastruktur perdagangan, penyediaan dan kalibrasi alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan (UTTP) Metrologi Legal guna menjamin keadilan dan kepastian transaksi, serta fasilitasi Pameran Dagang untuk memperluas jangkauan pasar. Tak kalah penting, program-program ini juga secara khusus menyasar para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang tersebar di seluruh Kota Makassar, mendorong inovasi dan peningkatan daya saing mereka. Pendekatan yang komprehensif ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem perdagangan dan perindustrian yang lebih kuat dan berdaya saing.

   Untuk mendukung ambisi pembangunan ini, total kebutuhan dana atau Pagu Indikatif yang dialokasikan untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 21.516.264.139; (Dua Puluh Satu Milyard Lima Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah). Alokasi ini mencerminkan investasi strategis pemerintah daerah untuk memajukan sektor

perdagangan dan perindustrian. Dari usulan yang dihasilkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Makassar, sebanyak 2 usulan kegiatan krusial berhasil diakomodir oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, menunjukkan responsivitas Dinas terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang muncul dari akar rumput. Ini adalah bukti nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan prioritas pembangunan yang relevan.

Meskipun demikian, evaluasi terhadap realisasi kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan tantangan awal yang memerlukan adaptasi cepat. Realisasi kemajuan belanja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar sampai dengan Triwulan II tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 10.134,139.282,- (Sepuluh Milyard Seratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) atau sekitar 42.38 persen dari total pagu. Realisasi capaian target kinerja dari 10 program sampai dengan triwulan II tahun 2025 menunjukkan bahwa 9 program memiliki capaian kinerja di bawah 50 persen. Secara umum, rendahnya capaian kinerja ini disebabkan oleh adanya faktor eksternal yang signifikan, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang "Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025". Instruksi ini menuntut penyesuaian yang cepat dan strategis dalam pola belanja, yang secara inheren memerlukan waktu untuk diimplementasikan sepenuhnya.

Meskipun dihadapkan pada tantangan efisiensi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan sisa waktu dan sumber daya yang ada. Kondisi ini justru memicu inovasi dan kreativitas dalam menjalankan program, memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan memberikan dampak maksimal. Perubahan RENJA ini menjadi momentum strategis untuk meninjau kembali prioritas, merancang ulang strategi pelaksanaan yang lebih efisien, dan memastikan bahwa target kinerja dapat tercapai dengan penyesuaian yang cermat. Dengan perencanaan yang adaptif dan eksekusi yang tangkas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian optimis dapat mengatasi hambatan ini dan terus berkontribusi pada kemajuan ekonomi Kota Makassar, mendorong sektor perdagangan dan perindustrian yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

2. Progres Capaian Kinerja Kegiatan Sampai Pada Triwulan II Tahun 2025
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
		Target	Realisasi s/d Triwulan II	Capaian %
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	81.76%	90%	46%	51.11%
Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	87.03%	100%	52%	52%
Persentase ASN Perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	51.86%	90%	35%	38.88%

1) Analisa Capaian:
   Adapun Analisa capaian program diatas sampai dengan Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:
   a) Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik", target yang ditetapkan adalah 90%. Meskipun realisasi tahun 2024 mencapai 81.76%, capaian hingga Triwulan II tahun 2025 telah mencapai 51.11% dari target tahunan (dengan realisasi s/d Triwulan II sebesar 46.11%). Angka ini mengindikasikan bahwa seperdua dari target tahunan yang berhasil dicapai dalam enam bulan pertama.
   b) Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah", target yang ditetapkan pada 100%. Realisasi tahun 2024 sudah sangat baik, yaitu 87.03%., Capaian Triwulan II tahun 2025 berada pada angka 52% dari target (dengan realisasi s/d Triwulan II sebesar 52%).
   c) Dari target 90 persen ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas, terealisasi sebesar 35 persen atau dengan capaian sebesar 38.88 persen;

   Secara agregat, capaian di atas 25% untuk ketiga indikator pada Triwulan II menunjukkan adanya tantangan serius dalam akselerasi pelaksanaan Program Penunjang. Idealnya,

pada akhir triwulan kedua, capaian telah mencapai sekitar 50.46 % agar program berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target tahunan. Kondisi saat ini mengisyaratkan perlunya evaluasi mendalam dan penyesuaian strategi yang lebih untuk meningkatkan realisasi pada triwulan berikutnya.

2) Faktor Pendorong
   a) Adanya target yang jelas setiap indikator yang memiliki target tahunan yang terukur (90-100%), memberikan arah yang jelas untuk upaya peningkatan.
   b) Realisasi Tahun Sebelumnya yang Cukup Baik dengan rincian realisasi tahun 2024 untuk sarana prasarana (81.76%) dan laporan keuangan (87.03%) menunjukkan bahwa Dinas memiliki kapasitas untuk mencapai angka tinggi, yang bisa menjadi modal untuk tahun 2025.
   c) Adanya dukungan kuat dari kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Makassar dan tersedianya anggaran memadai.
   d) Terkai ketersediaan anggaran bahwa, anggaran untuk program penunjang telah dialokasikan, meskipun mungkin menghadapi instruksi efisiensi, dana dasar tetap ada.
3) Faktor Penghambat
   a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja adalah faktor eksternal dominan yang kemungkinan besar menyebabkan penundaan atau pengetatan pengeluaran di awal tahun anggaran, berdampak langsung pada pengadaan sarana prasarana, pelaksanaan pelatihan, dan mungkin sumber daya untuk penyelesaian laporan.
   b) Proses pengadaan barang/jasa untuk sarana prasarana dan pelaksanaan pelatihan seringkali memerlukan waktu panjang untuk perencanaan, tender, dan pencairan dana di awal tahun anggaran.
   c) Untuk indikator peningkatan kapasitas ASN, identifikasi kebutuhan pelatihan yang relevan, pencarian penyedia, dan jadwal pelaksanaan pelatihan seringkali baru dimulai atau difokuskan pada pertengahan tahun.
   d) Penyusunan laporan keuangan dan kinerja memiliki siklus tertentu yang mungkin baru mulai aktif setelah data-data triwulan II terkumpul penuh dan terverifikasi.
4) Tindak Lanjut

   Melihat rendahnya capaian di Triwulan II, langkah-langkah tindak lanjut yang proaktif dan terkoordinasi sangat krusial untuk memastikan Program Penunjang dapat mengejar ketertinggalan dan mencapai target tahunan. Adapun secara terfokus tindak lanjutnya adalah:
   a) Merevisi rencana aksi untuk setiap indikator program penunjang, dengan mempertimbangkan dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025

b) Review mendalam terhadap alokasi anggaran Program Penunjang, mencari area di mana efisiensi dapat diterapkan tanpa mengorbankan kualitas
c) Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam Dinas untuk mempercepat proses administrasi dan pelaporan, khususnya untuk indikator ketersediaan laporan
d) Memastikan seluruh data keuangan dan kinerja dicatat dan direkonsiliasi secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang akhir periode pelaporan

b. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
		Target	Realisasi s/d Triwulan II	Capaian %
Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan	65,42% 1.737 (Unit Usaha)	75% 1.991 (Unit Usaha)	41.32 % 823 (Unit Usaha)	55.09 %

1) Analisa Capaian
Tabel 2.2 menunjukkan capaian kinerja Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar untuk indikator "Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan". Untuk tahun 2025, Dinas menargetkan 75% atau sebanyak 1.991 unit usaha memperoleh izin sesuai ketentuan. Pada Triwulan II tahun 2025, realisasi menunjukkan41.32% atau 823 unit usaha. Dengan capaian persentase sebesar 55.09% dari target tahunan, dapat disimpulkan bahwa program ini berada pada jalur yang cukup baik atau sesuai ekspektasi untuk triwulan kedua.
Capaian triwulan pertama ini menjadi fondasi penting untuk mencapai target yang lebih besar di akhir tahun. Namun, tetap perlu dicermati apakah ada potensi percepatan yang bisa dilakukan di triwulan berikutnya untuk mengantisipasi dinamika dan kebutuhan pelaku usaha.

2) Faktor Pendorong
a) Adanya kesadaran dan komitmen Dinas untuk mempermudah proses perizinan dan pendaftaran bagi pelaku usaha.
b) Sudah ada sistem (misalnya OSS atau sistem internal Dinas) yang memfasilitasi proses perizinan, sehingga pelayanan dapat berjalan secara reguler.

c) Peningkatan kesadaran dari pelaku usaha akan pentingnya legalitas usaha dan perizinan yang sesuai ketentuan.
d) Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang semakin mempermudah perizinan usaha.

3) Faktor Penghambat
a) Anggaran untuk kegiatan pada program perizinan dan pendaftaran untuk kegiatan monitoring tersedia pada Triwulan ke 3 serta adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efesiensi anggaran untuk kegiatan pengawasan dan pendataan perizinan.
b) Meskipun ada upaya penyederhanaan, beberapa jenis perizinan mungkin masih memiliki persyaratan dokumen yang kompleks, sehingga memperlambat proses pengajuan.
c) Beberapa pelaku usaha mungkin belum sepenuhnya memahami prosedur atau pentingnya perizinan, sehingga memperlambat inisiatif mereka dalam mengurus izin.
d) Fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi atau minat investasi dapat memengaruhi jumlah permohonan izin yang masuk.

4) Tindak Lanjut
a) Merevisi rencana aksi untuk setiap indikator program penunjang, dengan mempertimbangkan dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025
b) Review mendalam terhadap alokasi anggaran Program Penunjang, mencari area di mana efisiensi dapat diterapkan tanpa mengorbankan kualitas
c) Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam Dinas untuk mempercepat proses administrasi dan pelaporan, khususnya untuk indikator ketersediaan laporan
d) Memastikan seluruh data keuangan dan kinerja dicatat dan direkonsiliasi secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang akhir periode pelaporan.

c. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
		Target	Realisasi s/d Triwulan II	Capaian %
Jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (SNI)	0 unit	1 Unit	0	0%
Persentase Penggelolaan Sarana Distribusi	(66.67 %) 100 Orang	100 Orang	0	0%

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
		Target	Realisasi s/d Triwulan II	Capaian %
Perdagangan Masyarakat yang mendapat pembinaan				

1) Analisa Capaian

Tabel 2.3 menyajikan capaian kinerja Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar untuk dua indikator kunci. Hasil pada Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan 0% capaian untuk kedua indikator tersebut, yang mengindikasikan bahwa program ini belum menunjukkan progres sama sekali di awal tahun anggaran.

Pada indikator "Jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (SNI)", target tahun 2025 adalah 1 unit pasar SNI. Realisasi tahun 2024 menunjukkan 0 unit. Hingga Triwulan II tahun 2025, realisasi masih 0 unit dengan capaian 0%. Ini berarti belum ada langkah konkret yang terekam dalam tiga bulan pertama untuk mencapai target pasar SNI. Mengingat proses sertifikasi atau pembangunan/revitalisasi pasar SNI biasanya memakan waktu yang signifikan, capaian nol persen di triwulan pertama ini menunjukkan bahwa tahapan awal mungkin belum dimulai atau belum terekam dalam sistem pelaporan.

Demikian pula, untuk indikator "Persentase Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat yang mendapat pembinaan", target tahun 2025 adalah 100 orang. Realisasi tahun 2024 menunjukkan pembinaan terhadap 100 orang atau 66.67% dari target, namun pada Triwulan II tahun 2025, realisasi masih 0 orang dengan capaian 0%. Ini mengindikasikan bahwa kegiatan pembinaan untuk pengelola sarana distribusi belum dimulai sama sekali pada periode ini. Angka nol persen pada kedua indikator ini menggarisbawahi perlunya perhatian serius dan percepatan luar biasa di triwulan-triwulan berikutnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

2) Faktor Pendorong
   a) Target spesifik (1 unit pasar SNI, 100 orang pembinaan) memberikan arah yang tegas bagi pelaksanaan program.
   b) Realisasi pembinaan 100 orang pada tahun 2024 menunjukkan adanya pengalaman dan kapasitas Dinas dalam melaksanakan kegiatan serupa.
3) Faktor Penghambat

untuk Pembangunan/Revitalisasi Pasar Tradisional tidak dianggarkan untuk Tahun Anggaran 2025. Untuk Kegiatan Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan anggaran tersedia di Triwulan ke III.

4) Tindak Lanjut
   a) Merevisi rencana aksi untuk setiap indikator program penunjang, dengan mempertimbangkan dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025
   b) Review mendalam terhadap alokasi anggaran Program Penunjang, mencari area di mana efisiensi dapat diterapkan tanpa mengorbankan kualitas
   c) Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam Dinas untuk mempercepat proses administrasi dan pelaporan, khususnya untuk indikator ketersediaan laporan
   d) Memastikan seluruh data keuangan dan kinerja dicatat dan direkonsiliasi secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang akhir periode pelaporan

d. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
		Target	Realisasi s/d Triwulan II	Capaian %
Persentase Barang kebutuhan pokok Dengan Harga Stabil	37.50% (9 Jenis bahan kebutuhan pokok yang terpantau harganya dari target 24 jenis bahan pokok)	33.33%	22.49 %	67.47%
Persentase Barang Penting Dengan Harga Stabil	44.45% (4 Jenis bahan kebutuhan pokok yang distabilkan harganya dari target 9 jenis bahan pokok)	33.33%	23%	69%

1) Analisa Capaian
   Capaian kinerja Program Stabilisasi Harga Barang dan Barang Penting Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar untuk dua indikator utama. Kedua indikator ini memiliki

target tahunan 66.66% dan menunjukkan realisasi s/d Triwulan II sebesar 45.49%, dengan capaian persentase dari target tahunan sebesar 68.24%.

Untuk indikator "Persentase Barang kebutuhan pokok Dengan Harga Stabil", target tahun 2025 ditetapkan sebesar 33.33%. Realisasi tahun 2024 menunjukkan 37.50% (dengan 9 jenis bahan kebutuhan pokok terpantau dari target 24 jenis). Hingga Triwulan II tahun 2025, realisasi sebesar 22.49%, yang berarti capaian 67.47% dari target tahunan 2025. Angka ini secara persentase sudah mencapai sepedua dari target tahunan dalam enam bulan pertama. Ini menunjukkan bahwa program pemantauan harga berjalan sesuai dengan target triwulan yang proporsional.

Demikian pula, untuk indikator "Persentase Barang Penting Dengan Harga Stabil", target tahun 2025 juga ditetapkan sebesar 33.33%. Realisasi tahun 2024 menunjukkan 44.45% (dengan 4 jenis bahan kebutuhan pokok yang distabilkan dari target 9 jenis). Hingga Triwulan II tahun 2025, realisasi juga sebesar 23.69%, dengan capaian 69% dari target tahunan 2025. Capaian yang identik ini mengindikasikan bahwa upaya stabilisasi harga barang penting juga telah dimulai dan menunjukkan progres yang konsisten dengan perencanaan awal triwulan.

Secara keseluruhan, capaian 68.23% pada Triwulan II untuk kedua indikator ini dapat dinilai cukup baik dan sesuai dengan proyeksi proporsional triwulanan. Capaian lebih dari itu menunjukkan bahwa program stabilisasi harga telah dilaksanakan dengan efektif sejak awal tahun. Ini adalah hasil yang positif, terutama mengingat pentingnya stabilisasi harga bagi daya beli masyarakat dan menjaga inflasi.

2) Faktor Pendorong
   a) Stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting adalah isu krusial yang selalu menjadi perhatian utama pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.
   b) Adanya koordinasi yang efektif dengan instansi terkait (misalnya BPS, Bulog, petani/produsen) dalam mendapatkan data harga dan intervensi pasar jika diperlukan.
   c) Pengalaman dan data realisasi tahun 2024 (37.50% dan 44.45%) menjadi landasan dan patokan yang kuat untuk melanjutkan program.
3) Faktor Penghambat
   a) Perubahan iklim ekstrem, gagal panen, atau bencana alam dapat secara drastis memengaruhi pasokan dan harga komoditas.
   b) Kendala dalam distribusi barang dari produsen ke konsumen (misalnya masalah transportasi, infrastruktur,

atau praktik penimbunan) dapat menyebabkan lonjakan harga.

c) Jika terjadi gejolak harga yang besar, anggaran yang tersedia untuk operasi pasar atau subsidi mungkin tidak mencukupi untuk menstabilkan harga secara signifikan.

4) Tindak Lanjut

a) Merevisi rencana aksi untuk setiap indikator program penunjang, dengan mempertimbangkan dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025

b) Review mendalam terhadap alokasi anggaran Program Penunjang, mencari area di mana efisiensi dapat diterapkan tanpa mengorbankan kualitas

c) Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam Dinas untuk mempercepat proses administrasi dan pelaporan, khususnya untuk indikator ketersediaan laporan

d) Memastikan seluruh data keuangan dan kinerja dicatat dan direkonsiliasi secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang akhir periode pelaporan

e. Program Pengembangan Ekspor

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
		Target	Realisasi s/d Triwulan II	Capaian %
Peningkatan Hasil ekspor	347.006.079USD	724.027.781 USD	221.838.884 USD	30%

1) Analisa Capaian

Program Pengembangan Ekspor terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 4 (Empat) sub kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.000.091.840 (satu miliar sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dengan realisasi angggaran sebesar Rp. 108.212.580,- (Seratus Delapan Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan atau 10.82 Persen.

Capaian kinerja untuk Program Pengembangan Ekspor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, dengan indikator kunci "Peningkatan Hasil Ekspor". Target yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah 347.006.079 USD, sama dengan realisasi pada tahun 2024. Namun, data menunjukkan bahwa realisasi hingga Triwulan II tahun 2025 adalah, dengan capaian persentase sebesar 30%,dan atau sebesar 221.838.884 USD data ini berdasarkan transaksi di Pelabuhan Makassar,-

2) Faktor Pendorong

a) Adanya target spesifik dalam USD (724.027 USD) memberikan tujuan yang konkret untuk dicapai.

b) Realisasi ekspor sebesar 347.006.079 USD pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Kota Makassar memiliki basis produk dan pelaku usaha yang berpotensi untuk diekspor.
c) Adanya permintaan pasar internasional terhadap produk-produk unggulan Kota Makassar.
d) Makassar memiliki berbagai produk unggulan, terutama di sektor perikanan, pertanian, dan kerajinan, yang memiliki potensi pasar ekspor.
e) Anggaran untuk kegiatan pada program pengembangan ekspor tersedia pada Triwulan ke 2 serta diterbitkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efiseinsi anggaran sehingga terjadi rasionalisasi anggaran pada kegiatan pameran

3) Faktor Penghambat
a) Proses ekspor melibatkan banyak tahapan, mulai dari produksi, standarisasi, pengurusan dokumen, logistik, hingga pembayaran. Hasilnya mungkin baru terlihat pada triwulan berikutnya atau pertengahan tahun.
b) Pengetatan anggaran di awal tahun menunda pelaksanaan program-program promosi, fasilitasi pameran dagang internasional, atau misi dagang yang krusial untuk mendorong ekspor.
c) Pelaku usaha, terutama IKM, masih kurang dalam hal kapasitas produksi, manajemen ekspor, atau akses ke informasi pasar internasional.
d) Tingginya biaya logistik atau ketersediaan jalur pengiriman yang efisien menjadi hambatan serius bagi eksportir.

4) Tindak Lanjut
a) Merevisi rencana aksi untuk setiap indikator program penunjang, dengan mempertimbangkan dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025
b) Review mendalam terhadap alokasi anggaran Program Penunjang, mencari area di mana efisiensi dapat diterapkan tanpa mengorbankan kualitas
c) Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam Dinas untuk mempercepat proses administrasi dan pelaporan, khususnya untuk indikator ketersediaan laporan
d) Memastikan seluruh data keuangan dan kinerja dicatat dan direkonsiliasi secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang akhir periode pelaporan

f. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
		Target	Realisasi s/d Triwulan II	Capaian %
Persentase Alat-Alat Ukur,	100%	80%	12.02%	15%

Takaran, Timbangan Dan Perlengkapanya (UTTP) Bertanda Tera kebudayaan Sah Yang Berlaku	1.466 UTTP	1.600 UTTP	(211 UTTP)	

1) Analisa Capaian
   Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan anggaran dilaksanakan dari anggaran APBD sebesar Rp. 528.829.652 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.107.225,- dan atau 11.93%
2) Faktor Pendorong
   Adanya dukungan kuat dari kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian kota Makassar untuk melaksanakan percepatan kegiatan dan tersedianya anggaran yang memadai
3) Faktor Penghambat
   Anggaran untuk kegiatan pada program standarisasi dan perlindungan konsumen tersedia pada Triwulan ke 2 serta diterbitkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efiseinsi anggaran sehingga terjadi rasionalisasi anggaran pada kegiatan pengawasan dan penyuluhan mertologi legal.
4) Tindak Lanjut
   a) Merevisi rencana aksi untuk setiap indikator program penunjang, dengan mempertimbangkan dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025
   b) Review mendalam terhadap alokasi anggaran Program Penunjang, mencari area di mana efisiensi dapat diterapkan tanpa mengorbankan kualitas
   c) Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam Dinas untuk mempercepat proses administrasi dan pelaporan, khususnya untuk indikator ketersediaan laporan
   d) Memastikan seluruh data keuangan dan kinerja dicatat dan direkonsiliasi secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang akhir periode pelaporan

g. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
		Target	Realisasi s/d Triwulan II	Capaian %

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	500 Orang	500 Orang	0	0%

1) Analisa Capaian

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran APBD sebesar Rp. 651.494.456 (enam ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

Capaian kinerja untuk Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, dengan indikator kunci "Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal". Target yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah 500 orang, sama dengan realisasi pada tahun 2024. Namun, data menunjukkan bahwa realisasi hingga Triwulan II tahun 2025 adalah 0, dengan capaian persentase sebesar 0%.

Capaian nol persen pada Triwulan II ini mengindikasikan bahwa belum ada kegiatan pembinaan kelompok pedagang atau usaha informal yang terekam atau dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar pada tiga bulan pertama tahun anggaran 2025. Angka nol ini sangat mengkhawatirkan, terutama mengingat target 500 orang yang sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa program yang vital untuk pemberdayaan ekonomi informal ini belum berjalan sama sekali di awal tahun. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dan rencana percepatan yang agresif di triwulan berikutnya untuk dapat mengejar target yang telah ditetapkan.

2) Faktor Pendorong
   a) Anggaran untuk kegiatan pada program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri untuk kegiatan monitoring tersedia pada Triwulan ke 2 serta adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
   b) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar kemungkinan sudah memiliki data atau jaringan kelompok pedagang/usaha informal dari kegiatan tahun sebelumnya, yang bisa mempermudah identifikasi sasaran.erkait efisiensi anggaran
3) Faktor Penghambat
   a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, menjadi faktor eksternal dominan yang menunda pelaksanaan program-program yang melibatkan pengeluaran untuk kegiatan outreach, pelatihan, atau fasilitasi. Penyesuaian anggaran dan birokrasi akibat

instruksi ini dapat menunda dimulainya kegiatan pembinaan.

b) Kegiatan pembinaan seringkali memerlukan persiapan yang matang seperti identifikasi kelompok sasaran, penyusunan materi, penentuan jadwal, penyiapan logistik, dan koordinasi dengan narasumber. Proses ini mungkin masih berlangsung di Triwulan I.

c) Proses pencairan dana atau persetujuan kegiatan di awal tahun anggaran seringkali memakan waktu.

4) Tindak Lanjut

a) Merevisi rencana aksi untuk setiap indikator program penunjang, dengan mempertimbangkan dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025

b) Review mendalam terhadap alokasi anggaran Program Penunjang, mencari area di mana efisiensi dapat diterapkan tanpa mengorbankan kualitas

c) Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam Dinas untuk mempercepat proses administrasi dan pelaporan, khususnya untuk indikator ketersediaan laporan

d) Memastikan seluruh data keuangan dan kinerja dicatat dan direkonsiliasi secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang akhir periode pelaporan

h. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
		Target	Realisasi s/d Triwulan II	Capaian %
Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah di Kota Makassar	360 IKM	360	180	25 %
Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri	-	69%	34%	24.64%
Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Perindustrian	150 IKM	250 IKM	-	-

1) Analisa Capaian

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran APBD sebesar Rp. 5.720.057.040; (lima miliar tujuh ratus dua puluh juta lima puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp3.463.515.772; (Tiga Milyard Empat Ratus Enam PuluhTiga Juta Lima Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)

Capaian kinerja Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar untuk tiga indikator kunci pada Triwulan II Tahun 2025. Secara umum, capaian program ini menunjukkan progres yang cukup konsisten dengan ekspektasi triwulan pertama, yaitu sekitar 25% dari target tahunan, meskipun ada sedikit variasi.

Untuk indikator "Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah (IKM) di Kota Makassar", target tahun 2025 ditetapkan sebesar 360 IKM, sama dengan realisasi tahun 2024. Hingga Triwulan II tahun 2025, realisasi telah mencapai 180 IKM, yang berarti capaian 50% dari target tahunan. Angka ini sangat positif dan menunjukkan bahwa upaya penumbuhan IKM baru atau pendataan IKM yang ada telah berjalan sesuai jalur yang diharapkan di awal tahun.

Selanjutnya, indikator "Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri" memiliki target 69% untuk tahun 2025, sama dengan realisasi tahun 2024. Realisasi s/d Triwulan II tahun 2025 adalah 34%, yang berarti capaian 24.64% dari target tahunan. Capaian ini menunjukkan progres yang sejalan dengan proporsi waktu, mengindikasikan bahwa langkah-langkah menuju sasaran pembangunan industri sedang berjalan sesuai rencana.

Terakhir, pada indikator "Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Perindustrian", target tahun 2025 adalah 250 IKM, sama dengan realisasi tahun 2024. Realisasi s/d Triwulan II tahun 0 2025 .

2) Faktor Pendorong

a) Pengembangan IKM dan sektor industri merupakan salah satu pilar ekonomi Kota Makassar, sehingga program ini mendapat perhatian dan dukungan serius dari pemerintah daerah.

b) Dinas sudah memiliki basis data IKM yang kuat dan jaringan yang mempermudah identifikasi serta komunikasi dengan target peserta pelatihan atau calon IKM baru.

c) Realisasi tahun 2024 yang mencapai target (atau mendekati) untuk ketiga indikator menunjukkan kapasitas dan pengalaman Dinas dalam melaksanakan program ini.

d) Adanya kolaborasi yang efektif dengan lembaga pendidikan, asosiasi industri, atau pihak swasta dalam pelaksanaan pelatihan atau pendataan IKM.

3) Faktor Penghambat
   a) Anggaran untuk kegiatan pada program perencanaan dan pembangunan industri tersedia pada Triwulan ke 2 serta diterbitkannya Inpres Nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran sehingga terjadi rasionalisasi anggaran untuk kegiatan pengawasan, pendataan dan pelatihan serta tersedianya anggaran Hibah dekranasda yang belum terealisasi.
   b) Pertumbuhan IKM sangat bergantung pada kondisi ekonomi makro dan minat masyarakat untuk berwirausaha, yang bisa berfluktuasi.
   c) Peningkatan jumlah IKM perlu diimbangi dengan akses ke pasar yang lebih luas dan sumber pembiayaan yang memadai agar IKM tersebut dapat bertahan dan berkembang.

4) Tindak Lanjut
   a) Merevisi rencana aksi untuk setiap indikator program penunjang, dengan mempertimbangkan dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025
   b) Review mendalam terhadap alokasi anggaran Program Penunjang, mencari area di mana efisiensi dapat diterapkan tanpa mengorbankan kualitas
   c) Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam Dinas untuk mempercepat proses administrasi dan pelaporan, khususnya untuk indikator ketersediaan laporan
   d) Memastikan seluruh data keuangan dan kinerja dicatat dan direkonsiliasi secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang akhir periode pelaporan

i. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
		Target	Realisasi s/d Triwulan II	Capaian %
Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Dan Industri Menengah Yang	75.80%	95%	42.34%	44.56%

Dikeluarkan Oleh Intansi Yang Terkait				

1) Analisa Capaian

Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran APBD sebesar Rp. 164.403.840 (seratus enam puluh empat juta empat ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sampai denga triwulan II sebesar Rp. 69.301.575. (Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan atau 42.15%.

Capaian kinerja Program Pengendalian Izin Usaha Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar untuk indikator "Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Intansi Yang Terkait". Target yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah 95%,Hingga Triwulan II tahun 2025, realisasi telah mencapai 42.34%, yang berarti capaian 44.56% dari target tahunan.

pada Triwulan II ini menunjukkan bahwa Program Pengendalian Izin Usaha Industri berjalan dengan progres yang sangat konsisten dan sesuai dengan proporsi waktu. Ini mengindikasikan bahwa kegiatan pemantauan dan pengawasan izin usaha industri telah dimulai secara aktif sejak awal tahun anggaran dan berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target 95% di akhir tahun. Konsistensi ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, serta menjaga iklim usaha yang tertib dan berdaya saing di Kota Makassar. Capaian ini merefleksikan efektivitas tim pengawasan dan mekanisme pelaporan yang telah ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar.

2) Faktor Pendorong

a) Dinas perdagangan dan perindustrian kota Makassar, memiliki komitmen kuat untuk memastikan bahwa setiap usaha industri beroperasi sesuai dengan perizinan yang berlaku, demi menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

b) Dinas perdagangan dan perindustrian kota Makassar, memiliki tim pengawas yang terlatih dan aktif dalam melakukan pemantauan di lapangan, serta memahami prosedur pengawasan.

c) Capaian 95% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa dinas perdagangan dan perindustrian kota Makassar memiliki kapasitas dan mekanisme yang terbukti efektif dalam melakukan pemantauan dan pengawasan.

3) Faktor Penghambat
   a) Anggaran untuk kegiatan pada program pengendalian izin usaha industri tersedia pada Triwulan ke 2 serta diterbitkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran sehingga terjadi rasionalisasi anggaran pada kegiatan pengawasan, pendataan dan kegiatan pameran.
   b) Meskipun ada tim pengawas, keterbatasan jumlah personel atau anggaran operasional membatasi frekuensi dan cakupan pemantauan.
   c) Wilayah Kota Makassar yang luas dan banyaknya jumlah industri (termasuk IKM) menjadi tantangan dalam memastikan pemantauan yang menyeluruh.
   d) Akses ke lokasi industri yang sulit, penolakan dari pelaku usaha, atau kondisi lapangan yang tidak terduga memperlambat proses pemantauan.

4) Tindak Lanjut
   e) Merevisi rencana aksi untuk setiap indikator program penunjang, dengan mempertimbangkan dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025
   f) Review mendalam terhadap alokasi anggaran Program Penunjang, mencari area di mana efisiensi dapat diterapkan tanpa mengorbankan kualitas
   g) Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam Dinas untuk mempercepat proses administrasi dan pelaporan, khususnya untuk indikator ketersediaan laporan
   h) Memastikan seluruh data keuangan dan kinerja dicatat dan direkonsiliasi secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang akhir periode pelaporan

j. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
		Target	Realisasi s/d Triwulan II	Capaian %
Persentase Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini	100%	100%	0%	0%

1) Analisa Capaian
   Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang dilaksanakan dari anggaran APBD sebesar Rp. 98.823.080; (sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh rupiah)

Capaian kinerja untuk Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, dengan indikator kunci "Persentase Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini". Target yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah 100%, sama dengan realisasi pada tahun 2024. Namun, data menunjukkan bahwa realisasi hingga Triwulan II tahun 2025 adalah 0%, dengan capaian persentase sebesar 0%.

Capaian nol persen pada Triwulan II ini mengindikasikan bahwa belum ada progres yang terekam atau dilaporkan dalam upaya ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar pada tiga bulan pertama tahun anggaran 2025. Angka nol ini sangat kontras dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai 100% dan target tahun 2025 yang juga ambisius di angka 100%. Kondisi ini menunjukkan adanya stagnasi atau penundaan yang signifikan dalam pelaksanaan program vital ini, yang seharusnya menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan berbasis data dan pelayanan kepada publik serta pelaku industri. Hal ini memerlukan perhatian serius dan intervensi segera untuk mengejar ketertinggalan dan memastikan ketersediaan data yang akurat.

2) Faktor Pendorong
   a) Capaian 100% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Dinas memiliki sistem, prosedur, dan kapasitas yang memadai untuk mengelola informasi industri secara optimal. Pengalaman ini adalah modal yang sangat berharga.
   b) Dinas perdagangan dan perindustrian kota Makassar telah memiliki infrastruktur dasar (server, database, perangkat lunak) yang mendukung pengelolaan sistem informasi.
3) Faktor Penghambat
   a) Ketiadaan SDM yang cukup atau terlatih khusus untuk update data, pengelolaan database, atau verifikasi informasi.
   b) Aktivitas pengumpulan dan pembaruan data seringkali memerlukan perencanaan dan alokasi sumber daya di awal tahun, yang mungkin tertunda karena berbagai alasan administratif.
   c) Adanya perubahan pada Sistem Informasi Industri Nasional di tingkat pusat atau regulasi terkait yang memerlukan penyesuaian sistem di daerah, sehingga proses update tertunda.
4) Tindak Lanjut
   a) Merevisi rencana aksi untuk setiap indikator program penunjang, dengan mempertimbangkan dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025

b) Review mendalam terhadap alokasi anggaran Program Penunjang, mencari area di mana efisiensi dapat diterapkan tanpa mengorbankan kualitas
c) Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam Dinas untuk mempercepat proses administrasi dan pelaporan, khususnya untuk indikator ketersediaan laporan
d) Memastikan seluruh data keuangan dan kinerja dicatat dan direkonsiliasi secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang akhir periode pelaporan

Untuk lebih jelasnya Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana disajikan format Formulir Tabel E.81 Permendagri 86 Tahun 2017 di bawah ini

Tabel 2.1 (TABEL E-81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar

Periode Pelaksanaan: S.D Triwulan II Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
								I		II		III		IV													
					K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2				3	4	5	6			7		8		9	10		11 = 9+10+11+12		12 = 13/B * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100 %		15	16
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				32,515,763,207.0	23,782,329,310.0		2,956,625,161.0		7,130,548,346.0		0.0		0.0		10,087,173,507.0		42.41		10,087,173,507.0		0.36		
	3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				26,216,179,247.0	17,799,045,350.0		2,912,778,655.0		3,630,661,505.0		0.0		0.0		6,543,440,160.0		36.76		6,543,440,160.0		0.23		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000		Dinas Perdagangan				26,216,179,247.0	17,799,045,350.0		2,912,778,655.0		3,630,661,505.0		0.0		0.0		6,543,440,160.0		36.76		6,543,440,160.0		0.23		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90.0	22,481,928,179.022	14,481,510,282.0	22.0	2,709,546,252.0	24.0	3,015,779,623.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	5,725,325,875.0	51.11	39.54	46.0	5,725,325,875.0	51.11	0.20	Dinas Perdagangan	
						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	%	100.0			25.0		27.0		0.0		0.0		52.0		52.0		52.0		52.0			
						Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90.0			15.0		20.0		0.0		0.0		35.0		38.89		35.0		38.89			

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II		III		IV											
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100 %		15	16
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Dokumen	7.0	93,882,800.0	195,322,340.0	2.0	42,444,840.0	2.0	51,728,640.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	94,173,480.0	57.14	48.21	4.0	94,173,480.0	57.14	12.79		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3.0	26,734,600.0	153,225,940.0	1.0	42,444,840.0	1.0	51,338,640.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	93,783,480.0	66.67	61.21	2.0	93,783,480.0	18.18	20.64		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1.0	10,460,000.0	8,324,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1.0	12,100,000.0	8,552,000.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	100.0		1.0	0.0	20.0			
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1.0	11,098,000.0	5,748,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1.0	10,466,400.0	5,887,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II		III		IV											
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100 %		15	16
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8.0	8,318,800.0	7,855,800.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	50.0		4.0	0.0	9.76			
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8.0	14,707,000.0	5,729,000.0	0.0	0.0	4.0	390,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	390,000.0	50.0	6.81	4.0	390,000.0	10.0	0.84		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan yang baik	Dokumen	460.0	13,004,193,443.0	12,321,423,734.0	115.0	2,411,233,720.0	115.0	2,627,133,844.0	0.0	0.0	0.0	0.0	230.0	5,038,367,564.0	50.0	40.89	230.0	5,038,367,564.0	47.62	0.18		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	15.0	11,939,543,243.0	11,678,438,534.0	79.0	2,255,065,460.0	79.0	2,468,542,954.0	0.0	0.0	0.0	0.0	158.0	4,723,608,414.0	1,053.33	40.43	158.0	4,723,628,414.0	213.51	0.17		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	48.0	690,126,000.0	332,360,000.0	12.0	82,140,000.0	12.0	83,310,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	165,450,000.0	50.0	49.75	24.0	165,450,000.0	10.0	14.52		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	97.0	109,215,600.0	186,346,000.0	24.0	45,000,000.0	24.0	45,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.0	90,000,000.0	49.48	48.30	48.0	90,000,000.0	9.90	6.43		

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II		III		IV											
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+12		14 = 16/6*100 %		15	16
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	2.02	0057	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	36.0	265,315,200.0	124,079,200.0	9.0	29,008,260.0	9.0	30,280,890.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	59,289,150.0	50.0	47.78	18.0	59,289,150.0	10.0	7.11		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen administrasi pengelolaan barang milik daerah yang baik	Dokumen	8.0	20,741,000.0	2,669,000.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	25.0		2.0	0.0	25.0			
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2.0	20,741,000.0	2,669,000.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	50.0		1.0	0.0	10.0			
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Penyediaan administrasi kepegawaian	%	90.0	1,707,331,000.0	45,510,000.0	0.0	0.0	25.0	23,276,280.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	23,276,280.0	27.78	51.15	25.0	23,276,280.0	27.78	0.97		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1.0	915,331,000.0	3,510,000.0	0.0	0.0	0.0	503,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	503,000.0	0.0	14.33	0.0	503,000.0	0.0	0.05		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8.0	792,000,000.0	40,000,000.0	0.0	0.0	2.0	22,773,280.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	22,773,280.0	25.0	54.22	2.0	22,773,280.0	5.0	1.73		

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II		III		IV											
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100 %		15	16
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan administrasi umum	%	90.0	1,652,640,936.0	450,393,135.0	22.0	41,578,837.0	0.0	53,449,851.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	95,028,688.0	24.44	21.10	22.0	95,028,688.0	24.44	3.83		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.0	6,760,000.0	6,760,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	2.06	0002	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1.0	216,320,336.0	216,520,336.0	0.0	0.0	1.0	10,414,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10,414,000.0	100.0	4.81	1.0	10,414,000.0	20.0	2.80		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1.0	17,304,600.0	11,054,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1.0	26,616,000.0	26,616,000.0	0.0	750,000.0	1.0	8,450,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	9,200,000.0	100.0	34.57	1.0	9,200,000.0	20.0	9.04		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1.0	17,280,600.0	31,200,000.0	0.0	0.0	0.0	2,640,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,640,000.0	0.0	8.46	0.0	2,640,000.0	0.0	2.08		
	3	30	3.30.3.31.0.00.	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30.0	1,368,160,600.0	158,232,000.0	8.0	40,828,637.0	5.0	31,945,851.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	72,774,688.0	43.33	45.99	13.0	72,774,686.0	8.67	3.75		

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN BELANJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2024)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KINERJA SKPD TAHUN DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN SKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERAN DAERAH PERSONIL JAWAB	KETERANGAN
												I		II		III		IV											
									K	Rp. (KEGIATAN)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.		
1	1						2	3	4			7		8		9		10		11 = 9+10+13+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 9+12		14 = 15/6*100 %		15	16
			01.00.00																										
	3	30	3.30 3.31 0.00 01.00 00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana penunjang yang tersedia	%	90.0	3,201,848,000.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
	3	30	3.30 3.31 0.00 01.00 00	01	2.07	0.05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Unit	24.0	3,201,848,000.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
	3	30	3.30 3.31. 0.00 01.00 00	01	2.07		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100.0	1,530,632,000.0	691,654,072.0	25.0	153,026,089.0	25.0	162,839,416.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	315,865,489.0	50.0	45.13	50.0	315,665,489.0	50.0	8.25		
	3	30	3.30 3.31 0.00 01.00 00	01	2.07	0.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12.0	10,000,000.0	64,472,600.0	3.0	14,504,130.0	3.0	14,781,845.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	29,285,975.0	50.0	45.42	6.0	29,285,975.0	10.0	8.15		
	3	30	3.30 3.31 0.00 01.00 00	01	2.07	0.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.0	231,172,000.0	217,564,872.0	3.0	67,592,534.0	3.0	67,934,264.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	129,526,910.0	50.0	89.53	6.0	129,526,910.0	10.0	12.23		
	3	30	3.30. 3.31 0.00 01.00 00	01	2.07	0.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.0	1,271,460,000.0	417,616,800.0	3.0	76,929,405.0	3.0	79,923,290.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	156,852,695.0	50.0	37.56	6.0	156,852,695.0	10.0	6.65		

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN KERJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN SKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERMASALAHAN DAERAH YEKA KOORDINASI JAWA B	KETERANGAN
												I		II		III		IV											
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (RPJMD)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2					3	4	5	6			7		8		9		10		12 = 9+10+11+12		13 = 12/8 * 100%		14 = 7+13		15 = 14/6*100 %		16	17
	3	30	3.30 3.31 0.00 01.00 00	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana penunjang urusan pemerintah daera	Bulan	12 0	1,280,659,000.0	768,535,000 0	3.0	61,362,78 8.0	25.0	97,551,56 2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28. 0	158,914,375.0	233. 33	20 72	29 0	158,91 4,375.0	233 33	4 1 2		
	3	30	3.30 3.31 0.00 01.00 00	01	2.0 9	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1.0	44,349,000.0	44,349,000.0	0.0	5,306,000. 0	1.0	11,367,30 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	16,673,300.0	100. 0	37 61	1.0	16,673, 300.0	100. 0	37.6 2		
	3	30	3.30 3.31 0.00 01.00 00	01	3.0 9	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1.0	171,340,000.0	460,684,000 0	0.0	53,956 78 6.0	3.0	75,799,28 9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	131,256,078.0	300 0	28 49	3.0	131,25 6,078.0	100. 0	61 3		
	3	30	3.30 3.31 0.00 01.00 00	01	2.0 9	0 0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3.0	43,450,000.0	22,180,000.0	0.0	0.0	3.0	10,865,00 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	10,865,000.0	60.0	48 99	3.0	10,865 ,000.0	11.1 1	4 2 0		
	3	30	3.30 3.31 0.00 01.00 00	01	2.0 9	0 0 0 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4.0	180,000,000.0	53,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			
	3	30	3.30 3.31 0.00 01.00 00	01	2.0 9	0 0 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3.0	921,389,000.0	188,294,000 0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			
	3	30	3.30 3.31 0.00 01.00 00	01			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																47 3 3	46 10			47 3 3	0 2 4		

PERUBAHAN

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II		III		IV											
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100 %		15	16
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01			PREDIKAT KINERJA																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PersentasePelakuUsaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan	%	75.0	304,677,680.0	295,661,080.0	19.0	54,994,530.0	19.0	58,914,930.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	113,909,460.0	50.67	41.32	38.0	113,909,460.0	40.0	6.43	Dinas Perdagangan	
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Izin	340.0	19,617,200.0	12,417,200.0	85.0	900,000.0	85.0	2,090,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	170.0	2,990,000.0	50.0	24.08	170.0	2,990,000.0	50.0	1.73		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemilehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Pemilehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	4.0	19,617,200.0	12,417,200.0	1.0	900,000.0	0.0	2,090,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2,990,000.0	25.0	24.08	1.0	2,990,000.0	5.0	1.73		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah tnda daftar gudang yang terbit	Unit	440.0	138,438,880.0	131,238,880.0	110.0	29,908,260.0	110.0	31,980,890.0	0.0	0.0	0.0	0.0	220.0	61,889,150.0	50.0	47.16	220.0	61,889,150.0	50.0	7.32		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	4.0	138,438,880.0	131,238,880.0	1.0	29,908,260.0	0.0	31,980,890.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	61,889,150.0	25.0	47.16	1.0	61,889,150.0	5.0	7.32		

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERAHOKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II		III		IV											
										K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100 %		15	16
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	02	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri yang terbit	Unit	4800	23,461,000.0	16,281,000.0	115.0	900,000.0	115.0	2,190,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	230.0	3,090,000.0	50.0	18.98	230.0	3,090,000.0	50.0	2.72		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	02	2.03	001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	4.0	23,461,000.0	16,281,000.0	1.0	900,000.0	0.0	2,190,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3,090,000.0	25.0	18.98	1.0	3,090,000.0	5.0	2.72		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat yang terbit	Unit	1100	123,140,000.0	115,724,000.0	28.0	23,286,270.0	28.0	22,654,040.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.0	45,940,310.0	50.91	39.70	56.0	45,940,310.0	50.91	7.20		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	02	2.05	001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	4.0	123,140,000.0	115,724,000.0	1.0	23,286,270.0	0.0	22,654,040.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	45,940,310.0	25.0	39.70	1.0	45,940,310.0	5.0	7.20		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	02			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																50.67	47.34			40.0	6.71		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	02			PREDIKAT KINERJA																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN SKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II		III		IV											
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5	6		7		8		9		10		11 = 9+10+11+12		12 = 13/5 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/5*100 %		15	16		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (SNI)	Pasar	1.0	52,557,200.0	23,257,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		Dinas Perdagangan	
								Persentase Penggelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat yang mendapat pembinaan	%	100.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0					
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	Pasar	1.0	3,127,200.0	3,127,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	2.0	3,127,200.0	3,127,200.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	50.0		1.0	0.0	50.0			
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang di bina	Orang	100.0	49,430,000.0	20,130,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen (hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1.0	49,430,000.0	20,130,000.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	100.0		1.0	0.0	0.0			
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	03			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)															0.0	0.0			0.0	0.0				

SO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II		III		IV											
										K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+12		14 = 16/6*100 %		15	16
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	03			PREDIKAT KINERJA																SANGAT KURANG	SANGAT KURANG			SANGAT KURANG	SANGAT KURANG		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Barang Kebutuhan Pokok Dengan Harga Stabil	%	33.33	838,200,840.0	968,223,660.0	0.0	14,504,130.0	18.0	425,976,645.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	440,480,775.0	54.01	45.49	18.0	440,480,775.0	54.01	11.09	Dinas Perdagangan	
								Persentase Barang Penting Dengan Harga Stabil	%	33.33			0.0		18.0		0.0		0.0		18.0		54.01		18.0		54.01			
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah jenis bahan kebutuhan pokok yang terkendali	Jenis	4.0	838,200,840.0	968,223,660.0	2.0	14,504,130.0	2.0	425,976,645.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	440,480,775.0	100.0	45.49	4.0	440,480,775.0	100.0	11.09		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	4.0			0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	2.0	838,200,840.0	838,200,840.0	1.0	0.0	0.0	393,515,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	393,515,000.0	50.0	46.95	1.0	393,515,000.0	10.0	11.25		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	04			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA Pa																54.01	46.28			54.01	11.28		

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II		III		IV											
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100 %		15	16
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	04			PREDIKAT KINERJA																SEN DAH	SANGAT RENDAH			REN DAH	SAN GAT REN DAH		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan Hasil ekspor	US$	724,027,781.0	1,108,491,840.0	1,000,091,840.0	0.0	108,212,580.0	0.0	139,370,020.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	247,582,600.0	0.0	24.76	0.0	247,582,600.0	0.0	9.16	Dinas Perdagangan	
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jenis komoditas unggulan yang diekspor	Jenis	10.0	1,108,491,840.0	1,000,091,840.0	4.0	108,212,580.0	4.0	139,370,020.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	247,582,600.0	80.0	24.76	8.0	247,582,600.0	80.0	9.16		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	5.0	232,364,600.0	203,164,000.0	2.0	69,534,900.0	0.0	93,071,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	164,606,200.0	40.0	81.02	2.0	164,606,200.0	8.0	16.12		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	10.0	541,161,600.0	541,161,000.0	0.0	0.0	0.0	2,916,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,916,500.0	0.0	0.54	0.0	2,916,500.0	0.0	0.35		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	10.0	105,033,600.0	39,833,000.0	0.0	0.0	0.0	3,268,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,268,500.0	0.0	6.19	0.0	3,268,500.0	0.0	0.73		

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2026) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II		III		IV											
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100 %		15	16
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	15.0	229,933,840.0	202,933,840.0	5.0	38,677,880.0	0.0	38,113,720.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	76,791,600.0	33.33	37.84	5.0	76,791,400.0	6.67	19.14		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	05			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																0.0	29.20			0.0	9.24		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	05			PREDIKAT KINERJA																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Terakreditasi Sah Yang Berlaku	%	80.0	638,829,652.0	528,829,652.0	18.0	40,025,293.0	20.0	23,081,932.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	63,107,225.0	47.50	11.93	38.0	63,107,225.0	38.0	2.30	Dinas Perdagangan	
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0200	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang di tera	UTTP	1,600.0	638,829,652.0	528,829,652.0	400.0	40,025,293.0	400.0	23,081,932.0	0.0	0.0	0.0	0.0	800.0	63,107,225.0	50.0	11.93	800.0	63,107,225.0	40.0	2.30		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	400.0	482,848,452.0	384,848,452.0	100.0	24,921,163.0	0.0	11,136,487.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	36,057,650.0	25.0	9.37	100.0	36,057,650.0	5.0	1.63		

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH dan PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2024)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2024) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERMOKATDAERAH PEMODUNG JAWA B	KETERANGAN
													I		II		III		IV											
										K	Rp (KEUA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1						2	3	4	5			7		8		9		10		11 = 8+10+11+12		12 = 12/5 * 100%		13 = 7+12		14 = 14/6*100 %		15	16
	3	30	3.30 3.31 0.00 01.00 00	06	2.01	0.0 0.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	100.0	155,881,200.0	143,951,200.0	20.0	16,104,130.0	0.0	12,945,440.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	27,049,875.0	20.0	18.79	20.0	27,049,875.0	4.0	8.02		
	3	30	3.30 3.31 0.00 01.00 00	08			RATA RATA CAPAIAN KINERJA (%)																47.50	12.33			38.0	2.35		
	3	30	3.30 3.31 0.00 01.00 00	08			PREDIKAT KINERJA																BASIC AT BPN DAM	SANGAT REKDAH			SANGAT REN DAH	SAN GAT REN DAH		
	3	30	3.30 3.31 0.00 01.00 00	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Data Kelompok Pedagang/Usaha Informal	Kelompok	500.0	791,494,456.0	651,494,456.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		Dinas Perdagangan	
	3	30	3.30 3.31 0.00 01.00 00	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Pemanfaatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi, pemasaran produk dalam negeri yang dilaksanakan	Kegiatan	1.0	791,494,456.0	651,494,456.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			
	3	30	3.30 3.31 0.00 01.00 00	07	2.01	0.0 0.0 5	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mengerjakan mailimai Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	150	130,823,856.0	114,823,856.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			

PERUBAHAN

44

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN KINERJA RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TAHUNAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KINERJA RKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERMASALAHAN DAERAH KOMISI JAWA II	KETERANGAN
													I		II		III		IV										
										K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.		
1	2						3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 10/6*100 %		15	16
	J	30	3.30 3.31 0.00 01.00 00	07	2.01	0 0 0 5	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa ekspedisi	UMKM	500.0	660,670,600.0	536,870,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0				
	3	30	3.30 3.31 0.00 01.00 00	07			RATA RATA CAPAIAN KINERJA (%)																0.0	0.0			0.0	0.0		
	3	30	3.30 3.31 0.00 01.00 00	07			PREDIKAT KINERJA																SANGAT KURANG	SANGAT RENDAH			SANGAT KURANG	SANGAT RENDAH		
	3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				4,299,563,960.0	3,963,283,960.0		43,646,500.0		3,499,646,841.0		0.0		0.0		3,543,733,347.0		59.23		3,543,733,347.0		20.77		
	3	31	3.30 3.31 0.00 01.00 00				Dinas Perindustrian				4,299,563,960.0	3,963,283,960.0		43,646,500.0		3,499,646,841.0		0.0		0.0		3,543,733,347.0		59.23		3,543,733,347.0		20.77		
	3	31	3.30 3.31 0.00 01.00 00	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kota Makassar		385.0	3,431,387,040.0	3,730,057,040.0	90.0	10,003,536.0	90.0	3,463,512,236.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	3,472,515,772.0	50.0	60.71	540.0	3,472,515,772.0	50.0	34.05	Dinas Perindustrian	
								Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri	%	10.0			17.0		17.0		0.0		0.0		34.0		49.24		34.0		4.21			
								Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Untuk Sektor Perindustrian		250.0			62.0		82.0		0.0		0.0		124.0		49.60		274.0		9.92			

PERUBAHAN

69 / 45

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II		III		IV											
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100 %		15	16
	3	31	3.30.3.31.0.00.01.0000	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah pengrajin yang dibina	Orang	350.0	5,951,557,040.0	5,720,057,040.0	87.0	10,003,536.0	100.0	3,462,512,236.0	0.0	0.0	0.0	0.0	187.0	3,472,515,772.0	53.43	60.71	187.0	3,472,515,772.0	10.69	24.05		
	3	31	3.30.3.31.0.00.01.0002	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	4.0	177,151,800.0	106,151,800.0	0.0	0.0	2.0	941,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	941,000.0	50.0	0.89	2.0	941,000.0	10.0	0.04		
	3	31	3.30.3.31.0.00.01.0003	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	4.0	210,516,800.0	168,516,800.0	0.0	0.0	2.0	988,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	988,000.0	50.0	0.59	2.0	988,000.0	10.0	0.10		
	3	31	3.30.3.31.0.00.01.0004	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	4.0	342,306,520.0	326,306,520.0	1.0	10,003,536.0	2.0	10,003,236.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	20,006,772.0	75.0	6.13	3.0	20,006,772.0	15.0	0.75		
	3	31	3.30.3.31.0.00.01.0005	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	4.0	5,221,581,920.0	5,119,081,920.0	0.0	0.0	2.0	3,450,580,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3,450,580,000.0	50.0	87.41	2.0	3,450,580,000.0	10.0	41.72		
	3	31	3.30.3.31.0.00.01.0000	02			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																49.63	52.14			21.38	24.19		
	3	31	3.30.3.31.0.00	02			PREDIKAT KINERJA																SANGAT RENDAH	RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II		III		IV											
										K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 16/6*100 %		15	16
			01.00.00																											
	3	31	3.30.3.31.0.00.01.00.00	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	95.0	182,203,840.0	164,403,840.0	23.0	33,842,970.0	23.0	35,458,605.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	69,301,575.0	48.42	42.15	46.0	69,301,575.0	46.0	4.28	Dinas Perdagangan	
	3	31	3.30.3.31.0.00.01.00.00	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah usaha ikm yang di pantau	IKM	360.0	182,203,840.0	164,403,840.0	90.0	33,842,970.0	90.0	35,458,605.0	0.0	0.0	0.0	0.0	180.0	69,301,575.0	50.0	42.15	180.0	69,301,575.0	12.50	4.28		
	3	31	3.30.3.31.0.00.01.00.00	03	2.01	003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	4.0	171,627,720.0	156,627,720.0	1.0	33,842,970.0	0.0	34,558,605.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	68,401,575.0	25.0	43.67	1.0	68,401,575.0	5.0	5.09		
	3	31	3.30.3.31.0.00.01.00.00	03	2.01	004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	4.0	10,576,120.0	7,776,120.0	1.0	0.0	0.0	900,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	900,000.0	25.0	11.57	1.0	900,000.0	5.0	0.33		

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II		III		IV											
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100 %		15	16
	3	31	3.30.3.31.0.00.01.0000	03			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																48.42	47.60			48.0	4.73		
	3	31	3.30.3.31.0.00.01.0000	03			PREDIKAT KINERJA																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	31	3.30.3.31.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini	%	100.0	165,823,680.0	98,823,080.0	25.0	0.0	25.0	1,916,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	1,916,000.0	50.0	1.94	50.0	1,916,000.0	50.0	0.19	Dinas Perdagangan	
	3	31	3.30.3.31.0.00.01.0000	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data informasi industri	%	100.0	165,823,680.0	98,823,080.0	0.0	0.0	25.0	1,916,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	1,916,000.0	25.0	1.94	25.0	1,916,000.0	25.0	0.19		
	3	31	3.30.3.31.0.00.01.0000	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	4.0	159,299,480.0	92,299,480.0	1.0	0.0	0.0	1,182,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1,182,500.0	25.0	1.28	1.0	1,182,500.0	5.0	0.18		

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II		III		IV											
										K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+12		14 = 15/6*100 %		15	16
	3	31	3.30. 3.31. 0.00. 01.00 00	04	2.0 1	0 0 0 5	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SiNas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SiNas	Dokumen	4.0	6,523,600.0	6,523,600.0	1.0	0.0	0.0	733,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	733,500.0	25.0	11.24	1.0	733,500.0	5.0	0.28		
	3	31	3.30. 3.31. 0.00. 01.00 00	04			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																50.0	2.15			50.0	0.21		
	3	31	3.30. 3.31 0.00. 01.00 00	04			PREDIKAT KINERJA																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA OPD (%)																49.72	42.38						
							PREDIKAT KINERJA OPD																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH						

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Kinerja pelayanan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar disesuaikan dengan Standar Operational Prosedur (SOP) yang merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan Pemerintahan, yaitu bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa harus dilakukan. Untuk menyikapi hal ini maka terdapat 2 (dua) pelayanan yang ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, yaitu:

1. Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat (bersifat administratif) kepada seluruh unit-unit atau pegawai yang berada dalam lingkungan internal organisasi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan unit-unit lini organisasi (Bidang Teknis dan UPT) bersifat sangat rinci dan teknis yang langsung ditujukan kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah lainnya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Secara lebih jelas, berikut adalah detail pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar:

a. Pelayanan Bidang Usaha Perdagangan, diantaranya adalah dibawah ini:
   1) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pendaftaran perusahaan, pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, sarana dan prasarana perdagangan;
   2) Menyusun bahan perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan pengawasan di bidang perdagangan;
   3) Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin-izin usaha perdagangan;
   4) Menyiapkan bahan rencana dan program pembinaan terhadap pendaftaran perusahaan;
   5) Menyiapkan bahan bimbingan dan penyelenggaraan wajib Daftar Perusahaan (WDP).
b. Pelayanan Bidang Standarisasi dan perlindungan konsumen, diantaranya adalah dibawah ini:
   1) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, kemetrologian legal dan perlindungan konsumen.
   2) Pelaksanaan kebijakan di bidang stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, kemetrologian legal dan perlindungan konsumen;
   3) Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, kemetrologian legal dan perlindungan konsumen;
   4) Melaksanakan pemantauan, evaluasidan pelaporan kegiatan di bidang stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, kemetrologian legal dan perlindungan konsumen;

c. Pelayanan Bidang Pendataan, Pengendalian Usaha dan Pengembangan Ekspor dan Impor, diantaranya adalah dibawah ini:
   1) Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitas ekspor impor, bina pelaku ekspor dan pengembangan ekspor;
   2) Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi ekspor impor, bina pelaku ekspor dan pengembangan ekspor;
   3) Melaksanakan identifikasi produk unggulan kualitas ekspor baik promosi dan kerjasama;
d. Pelayanan Bidang Perindustrian, diantaranya adalah dibawah ini:
   1) Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pengawasan usaha dibidang industri;
   2) Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin usaha industri serta bimbingan produksi;
   3) Melakukan pembinaan dan pengembangan sarana dan usaha industri serta bimbingan produksi;
   4) Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan dan pengawasan mutu hasil produksi, penerapan standar industri, diversifikasi dan inovasi produk;
   5) Melaksanakan promosi dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan teknologi industri;
   6) Melaksanakan kemitraan, industry kecil, menengah dan besar dengan sector ekonomi lainnya;
   7) Melaksanakan bimbingan teknis pemantauan penanggulangan pencemaran;
   8) Menyusun bahan peningkatan kapasitas IPTEK dan sistemproduksi;
   9) Menyusun bahan program penataan struktur industri;

Pelayanan Peningkatan teknologi produksi dan pemasaran meliputi peningkatan teknologi produksi dan pemasaran bidang industry tekstil, industry meubel, industry makanan dan minuman, industry kerajinan, industry rumahtangga tersebar di wilayah kota Makassar.

Terkait masalah kinerja pelayanan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar senantiasa menunjukkan presentasi yang menggembirakan. Ini tentunya karena pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar sangat mengerti dan memahami akan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepadanya. Disamping itu, partisipasi masyarakat juga sangat menentukan kesuksesan Organisasi kedepan.

Sampai dengan Triwulan II Pada Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar melakukan evaluasi kinerja pelayanan bidang perdagangan dan perindustrian sebagaimana tercantum pada tabel 2.4 (Tabel TC.30) dibawah ini:

Tabel. 2.2 (Format TC.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar s/d Tahun 2025

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n1)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Unformal			500	500	500	500	500	0	0	500	
2.	Kontribusi Sektor Perdagang an terhadap PDRB (%)			20.07	20.31	20.56	20.80	20.09 %	18,56%	25.15%	20.80	
3.	Ekspor Bersih Perdagang an (U$)			1.198.523	1.386.945	1.578.694	1.849.249	888.23	1.133.27 U$	34.700.607.977	1.849.249	
4.	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kota Makassar			360	360	360	360	360 IKM	360 IKM	360 IKM	360	
5.	Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Perindustri an			250	250	250	250	250 IKM	150 IKM	150 IKM	250	
6.	Cakupan Bina Kelompok			30.28	32.22	34.61	36.10	38.82 %	31.05%	12.34%	36.10	
7.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)			16.76	16.14	15.52	14.89	22.76 %	14.97%	23.27%	14.89	
8.	Jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (SNI)											

				-	1	1	1	-	2 Unit	0	1	
9.	Persentase Pengelolaa n Sarana Distribusi Perdagang an Masyaraka t yang Dapat Pembinaan			-	83,33%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	

Deskripsi Tabel:

Berdasarkan Tabel 2.2 (Format TC.30) mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, terlihat bahwa kinerja beberapa indikator memiliki target dan capaian yang bervariasi hingga tahun 2025. Salah satu indikatornya adalah Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal yang target dan capaiannya sama, yaitu 500. Sementara itu, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ditargetkan meningkat dari 20,07% pada 2022 menjadi 20,80% pada 2025. Capaiannya sendiri bervariasi, yakni 20,09% pada 2022, 18,56% pada 2023, dan 25,15% pada 2024, dengan proyeksi 20,80% di tahun 2025.

Selanjutnya, Ekspor Bersih Perdagangan (U$) memiliki target yang terus meningkat, dari 1.198.523 U$ pada 2022 menjadi 1.849.249 U$ pada 2025. Capaiannya juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, di mana pada tahun 2024 mencapai 34.700.607,97 U$, jauh melampaui target yang ditetapkan. Di sisi lain, indikator Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah (IKM) memiliki target yang konsisten yaitu 360 IKM setiap tahunnya dari 2022 hingga 2025. Capaiannya sempat melebihi target pada tahun 2022 dan 2023 dengan masing-masing 390 IKM dan 460 IKM, sebelum kembali mencapai target 360 IKM di tahun 2024.

Tabel ini juga mencatat kinerja sektor perindustrian lainnya, seperti Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis yang ditargetkan sebanyak 250 peserta per tahun. Capaiannya menunjukkan angka yang fluktuatif, dengan 500 IKM pada 2022, 400 IKM pada 2023, dan 150 IKM pada 2024. Adapun untuk cakupan bina kelompok pengrajin, targetnya meningkat dari 30,28% pada tahun 2022 menjadi 36,10% pada tahun 2025, namun capaiannya menunjukkan penurunan yang signifikan dari 38,82% pada tahun 2022 menjadi 12,34% pada tahun 2024. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB juga memiliki target yang menurun dari 16,76% pada tahun 2022 menjadi 14,89% pada tahun 2025, dengan capaian yang melebihi target pada tahun 2022 dan 2024.

Terkait dengan sarana dan prasarana, target untuk Jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu pasar setiap tahun dari 2023 hingga 2025. Capaiannya menunjukkan 2 unit pada tahun 2023, tetapi tidak ada capaian pada tahun 2024. Sementara itu, persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat yang dapat pembinaan memiliki target 100% pada tahun 2024 dan 2025, dengan capaian sebesar 100 orang pada tahun yang sama.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar.

1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar.

   Bidang Perindustrian

   Permasalahan Pelayanan:

a. Rendahnya Tingkat Produktivitas dan Inovasi pada Industri Kecil Menengah (IKM):
   Menurut data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Makassar mengalami penurunan dari 16,76% pada tahun 2020 menjadi 14,27% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa IKM belum mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, yang berdampak pada daya saing produk lokal.
b. Keterbatasan Akses terhadap Teknologi Modern:
   Hanya sekitar 30% dari IKM yang telah mengadopsi teknologi modern dalam proses produksi. Sebagian besar IKM masih menggunakan metode tradisional yang mengakibatkan rendahnya efisiensi dan kualitas produk.

Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan
Permasalahan Pelayanan:

a. Dari total 50 pasar rakyat yang ada, hanya 10 pasar yang memenuhi standar SNI. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan konsumen dan berkurangnya daya tarik pasar tradisional.
b. Banyak pasar yang belum menerapkan sistem digital dalam transaksi, sehingga menghambat efisiensi dan transparansi. Data menunjukkan bahwa hanya 15% pasar yang telah menggunakan sistem pembayaran non-tunai.

Bidang Pengembangan Usaha Ekspor
Permasalahan Pelayanan:

a. Volume ekspor produk lokal hanya mencapai $34.700.607 pada tahun 2020, dengan target pertumbuhan tahunan yang tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa produk lokal belum mampu bersaing di pasar internasional.
b. Hanya 10% dari pelaku usaha yang mengikuti pameran internasional, sehingga potensi pasar global tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting, dan Pengawasan Kemetrologian
Permasalahan Pelayanan:

a. Data menunjukkan bahwa inflasi di Kota Makassar mencapai 2,11% pada tahun 2023, dengan fluktuasi harga barang pokok yang tidak terkontrol. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
b. Hanya 50% dari alat ukur yang ada di pasar yang telah terkalibrasi dan memenuhi standar, sehingga berpotensi merugikan konsumen.

2. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals)
   a. Dampak permasalahan pelayanan terhadap visi misi walikota makassar (Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan) yaitu:

1) Penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB (dari 16,76% menjadi 14,27%) secara langsung menghambat keunggulan ekonomi kota. IKM yang tidak produktif dan inovatif, serta minimnya adopsi teknologi modern, membuat produk lokal sulit bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional. Ini mengurangi potensi Makassar untuk menjadi pusat industri dan perdagangan yang unggul.
2) Pasar tradisional yang tidak memenuhi SNI dan minimnya sistem pembayaran non-tunai menunjukkan ketertinggalan dalam infrastruktur perdagangan. Hal ini menghambat daya saing pasar tradisional dan mengurangi daya tarik bagi konsumen, sehingga Makassar kesulitan mencapai keunggulan dalam sektor perdagangan modern dan efisien.
3) IKM yang tidak berkembang secara optimal dapat menyebabkan stagnasi ekonomi di tingkat akar rumput. Keterbatasan akses teknologi bagi IKM menghambat peningkatan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah, yang merupakan bagian penting dari masyarakat, sehingga mengurangi aspek inklusivitas dalam pembangunan ekonomi.
4) Inflasi yang tidak terkontrol dan fluktuasi harga barang pokok secara langsung membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi dan mengurangi akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, sehingga menghambat pencapaian Makassar yang inklusif.
5) Ketidakstabilan harga barang pokok dapat memicu keresahan sosial dan mengurangi rasa aman masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ekonomi yang tidak stabil berpotensi menimbulkan ketidakamanan sosial.
6) Jika IKM tidak berinovasi dan tidak mengadopsi teknologi modern, mereka mungkin akan terus bergantung pada metode yang kurang efisien atau tidak ramah lingkungan, atau bahkan tergerus oleh persaingan. Ini menghambat pembangunan industri yang berkelanjutan.

b. Dampak terhadap Capaian Program Nasional/Internasional (SPM dan SDGs)
1) SPM terkait pelayanan publik, termasuk ketersediaan dan kualitas fasilitas umum. Pasar rakyat yang tidak memenuhi SNI menunjukkan kegagalan dalam memenuhi standar pelayanan minimal bagi masyarakat terkait fasilitas perdagangan yang layak, bersih, dan aman.
2) Alat ukur yang tidak terkalibrasi berarti pelayanan pengawasan kemetrologian tidak memenuhi standar minimal untuk menjamin keadilan dan akurasi dalam transaksi, sehingga merugikan masyarakat.

3) Rendahnya Produktivitas dan Inovasi IKM, serta Keterbatasan Akses Teknologi Modern, menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta penciptaan lapangan kerja yang layak. Penurunan kontribusi industri terhadap PDRB menunjukkan stagnasi ekonomi.
4) kurangnya diversifikasi ekonomi dan partisipasi dalam perdagangan global, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang kuat.
5) Berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi, yang dapat memperlebar ketimpangan.
6) Minimnya partisipasi dalam pameran internasional, menunjukkan kurangnya kemitraan dan kolaborasi untuk mencapai tujuan pembangunan, khususnya dalam mempromosikan perdagangan dan investasi.

3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar.

Bidang Perindustrian

Tantangan pelayanan:

a. Banyak pelaku IKM yang tidak mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai teknologi dan manajemen usaha. Data menunjukkan bahwa hanya 25% dari pelaku IKM yang mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas.
b. Banyak IKM yang mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan. Hasil survei menunjukkan bahwa 60% pelaku IKM menganggap akses ke lembaga keuangan sebagai hambatan utama dalam pengembangan usaha mereka.

Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan

Tantangan pelayanan:

a. Anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan sarana perdagangan masih terbatas, sehingga revitalisasi pasar tidak dapat dilakukan secara menyeluruh.
b. Hanya 20% dari pasar yang memiliki kerjasama dengan pihak swasta untuk pengembangan infrastruktur dan layanan, sehingga inovasi dalam pelayanan menjadi terhambat.

Bidang Pengembangan Usaha Ekspor

Tantangan pelayanan:

a. Dinas belum maksimal dalam memberikan dukungan pemasaran dan promosi produk lokal, yang berdampak pada rendahnya kesadaran pelaku usaha tentang peluang ekspor.
b. Banyak pelaku usaha yang tidak memahami persyaratan dan regulasi ekspor, sehingga produk mereka tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh negara tujuan.

Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting, dan Pengawasan Kemetrologian

Tantangan pelayanan:

a. Jumlah petugas pengawas yang terbatas menyebabkan pengawasan terhadap barang pokok dan alat ukur tidak dapat dilakukan secara optimal.
b. Kurangnya kerjasama dengan instansi lain dalam pengendalian harga dan pengawasan kemetrologian menghambat efektivitas program yang ada.

4. Rekomendasi dan catatan strategis berupa tindak lanjut berdasarkan data analisis SWOT Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar.\
   a. Dimensi Kekuatan (Strength)
      1) Dinas Perdagangan dan Peridustrian Kota Makassar memiliki visi-misi yang terintegrasi dengan visi besar kota Makassar, sehingga seluruh program pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian diarahkan untuk mewujudkan Makassar Unggul secara ekonomi, Inklusif dalam pemberdayaan pelaku usaha dari berbagai kalangan, Aman melalui pengelolaan pasar dan distribusi yang tertib serta berstandar nasional, serta Berkelanjutan lewat pengembangan industri ramah lingkungan.
      2) Adanya struktur organisasi yang jelas memudahkan koordinasi internal serta pelaksanaan tugas secara efektif.
      3) Tersedianya tenaga ASN profesional di bidang perdagangan dan perindustrian mendukung pelaksanaan program secara optimal.
      4) Penetapan target kuantitatif seperti peningkatan ekspor bersih, cakupan bina kelompok usaha informal, serta jumlah peserta pelatihan skill training menunjukkan fokus pada hasil nyata.
      5) Fokus pembinaan kelompok pedagang/usaha informal serta pengrajin memperkuat basis ekonomi lokal inklusif.
      6) Target 100% pembinaan sarana distribusi perdagangan masyarakat mencerminkan perhatian pada efisiensi rantai pasok yang berkelanjutan.
      7) Integrasi antara sektor perdagangan dengan industri kecil menengah mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara holistik.
      8) Upaya standarisasi pasar rakyat meningkatkan kualitas layanan sekaligus daya saing produk lokal di pasar regional maupun nasional.
   b. Kelemahan (Weakness)
      1) Meskipun ada upaya pelatihan, masih terdapat keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengadopsi teknologi digital untuk mendukung perdagangan modern dan industri kreatif.
      2) Sarana distribusi perdagangan masyarakat belum sepenuhnya optimal, sehingga mempengaruhi efisiensi rantai pasok dan akses pasar.

3) Sistem pengumpulan data kinerja sektor perdagangan dan perindustrian masih belum terintegrasi secara real-time, menyebabkan keterlambatan informasi strategis.
4) Alokasi anggaran yang terbatas membatasi cakupan pembinaan serta pelatihan bagi UMKM sehingga potensi pengembangan usaha menjadi kurang maksimal.
5) Sinergi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar dengan instansi terkait seperti dinas lain, asosiasi pedagang, serta pelaku industri kadang mengalami hambatan komunikasi atau tumpang tindih program.
6) Beberapa target seperti jumlah peserta pelatihan atau pertambahan IKM tidak menunjukkan peningkatan signifikan selama periode Renstra 2020-2024, menandakan potensi kurang agresifnya strategi pengembangan kapasitas.

c. Peluang (Opportunity)
1) Kondisi ekonomi Indonesia yang terus tumbuh membuka peluang bagi sektor perdagangan dan perindustrian di Makassar untuk berkembang, terutama dengan dukungan kebijakan pemerintah pusat.
2) Program smart city di Makassar memberikan kesempatan bagi Dinas Perdagangan dan Perindutsrian untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam pengelolaan perdagangan dan industri, meningkatkan efisiensi serta pelayanan publik.
3) Target peningkatan ekspor bersih menunjukkan adanya peluang memperluas jaringan pasar internasional melalui promosi produk lokal serta fasilitasi ekspor.
4) Adanya program pembinaan kelompok usaha informal dan IKM membuka ruang besar untuk pemberdayaan pelaku usaha kecil menengah sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
5) Kesadaran masyarakat terhadap produk lokal semakin tinggi, memberikan peluang pengembangan pasar domestik bagi produk industri kreatif dan kerajinan khas Makassar.
6) Kerjasama dengan institusi pendidikan dapat meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan industri masa depan.

d. Ancaman (Threat)
1) Meningkatnya persaingan baik dari daerah lain maupun produk impor dapat mengancam daya saing pelaku usaha lokal, khususnya industri kecil dan menengah.
2) Kebijakan perdagangan atau regulasi baru yang tidak terduga dapat mempengaruhi kelancaran distribusi barang serta ekspor-impor.
3) Fluktuasi ekonomi global, seperti krisis finansial atau gangguan rantai pasok internasional, berpotensi menghambat pertumbuhan sektor perdagangan dan industri di tingkat lokal.

4) Infrastruktur distribusi yang belum optimal dapat menjadi hambatan dalam efisiensi logistik dan pengembangan pasar.
5) Risiko bencana alam seperti banjir, kebakaran, atau gempa bumi dapat mengganggu aktivitas produksi serta distribusi barang secara signifikan.

Dengan berdasar pada data data diatas, berikut adalah strategi pengembangan yang dapat dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar:

a. SO Strategy: Maksimalkan Kekuatan untuk Menangkap Peluang
   1) Optimalisasi visi dan misi yang selaras dengan visi kota dalam mengembangkan program perdagangan dan perindustrian berbasis teknologi digital.
   2) Penguatan SDM melalui pelatihan teknologi agar mampu memanfaatkan pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.
   3) Pemanfaatan jaringan kemitraan strategis dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk inovasi produk lokal.
b. WO Strategy: Atasi Kelemahan dengan Peluang
   1) Peningkatan kapasitas SDM secara intensif, khususnya dalam penguasaan teknologi digital melalui pelatihan berkelanjutan.
   2) Pengembangan infrastruktur digital sebagai pendukung distribusi perdagangan online guna menjawab kebutuhan pasar modern.
   3) Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain untuk mendapatkan dukungan regulasi serta pendanaan program peningkatan daya saing industri kecil menengah.
c. ST Strategy: Gunakan Kekuatan Hadapi Ancaman
   1) Perkuat branding produk lokal berkualitas tinggi sesuai standar nasional agar mampu bersaing di pasar domestik maupun ekspor.
   2) Implementasikan kebijakan pembinaan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) secara inklusif sehingga dapat bertahan menghadapi persaingan ketat.
   3) Manfaatkan data dan sistem informasi perdagangan berbasis smart city sebagai alat monitoring risiko perubahan regulasi atau kondisi pasar.
d. WT Strategy: Minimalkan Kelemahan Hindari Ancaman
   1) Restrukturisasi organisasi internal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, fokus pada peningkatan efisiensi kerja serta adaptasi cepat terhadap perubahan regulasi.
   2) Pengembangan sistem evaluasi kinerja program secara berkala, guna mendeteksi hambatan lebih awal sebelum berdampak besar pada pencapaian target.

Sebagai kesimpulan pada analisis SWOT ini, berikut adalah poin rekomendasi:

a. Tingkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif di bidang teknologi digital, manajemen usaha, dan

pemasaran modern agar mampu mendukung transformasi digital sektor perdagangan dan industri.

b. Fasilitasi pengembangan IKM dengan program pendampingan teknis, akses permodalan, serta penguatan jaringan pemasaran baik lokal maupun ekspor untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk lokal.
c. Tingkatkan jumlah pasar rakyat yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai upaya memperbaiki kualitas infrastruktur perdagangan sekaligus memberikan kenyamanan bagi pedagang dan konsumen.
d. Bangun kolaborasi erat dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, serta komunitas usaha untuk inovasi produk, pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan teknologi tepat guna dalam proses produksi dan distribusi.
e. Pastikan seluruh sarana distribusi perdagangan masyarakat mendapatkan pembinaan secara menyeluruh guna meningkatkan efisiensi rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar.
f. Fokus pada peningkatan ekspor barang/jasa dengan dukungan kebijakan promosi yang agresif serta fasilitasi kemudahan akses pasar internasional bagi pelaku usaha daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kota Makassar

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, mutlak diawali dengan review tajam terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025. Evaluasi ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang diusulkan benar-benar selaras dengan kebutuhan faktual di lapangan, mengidentifikasi celah antara target capaian dan realitas permasalahan yang dihadapi, serta mengoptimalkan alokasi sumber daya yang terbatas. Tanpa analisis mendalam ini, potensi inefisiensi anggaran, program yang tidak tepat sasaran, dan hambatan dalam pencapaian visi daerah akan sulit dihindari.

Oleh karena itu, setiap program yang termuat dalam rancangan awal perlu dianalisis secara kritis, mulai dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah hingga Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan memperhatikan indikator kinerja, target capaian, dan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Review ini tidak hanya berorientasi pada kesesuaian administratif, tetapi juga pada relevansi strategis program terhadap Tupoksi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, serta dampaknya terhadap peningkatan produktivitas IKM, stabilitas harga, daya saing ekspor, dan perlindungan konsumen di Kota Makassar.

TABEL 2.3 (T-C.31). REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KOTA MAKASSAR

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kota Makassar				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Kota Makassar				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Kota Makassar				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Kota Makassar				
	Dinas Perdagangan	Kota Makassar				Dinas Perdagangan	Kota Makassar				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Makassar	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90.0 %	14,441,376,483	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Makassar	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90.0 %	14,441,376,483	
		Kota Makassar	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100.0 %			Kota Makassar	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100.0 %		

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
		Kota Makassar	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90.0	%			Kota Makassar	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90.0	%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	19.0	Dokumen	195,322,340	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	19.0	Dokumen	173,822,340	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.0	Dokumen	145,685,940	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.0	Dokumen	145,685,940	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.0	Dokumen	5,384,600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.0	Dokumen	5,384,600	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.0	Dokumen	5,612,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.0	Dokumen	5,612,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.0	Dokumen	2,808,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.0	Dokumen	2,808,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.0	Dokumen	2,947,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.0	Dokumen	2,947,000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.0 Laporan	5,655,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.0 Laporan	5,655,800	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.0 Laporan	5,729,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.0 Laporan	5,729,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan yang baik	460.0 Dokumen	12,321,423,734	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan yang baik	460.0 Dokumen	12,321,424,184	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76.0 Org/bulan	11,678,438,984	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76.0 Orang/bulan	11,678,438,984	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.0	Dokumen	332,560,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.0	Dokumen	332,560,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	432.0	Dokumen	186,346,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	432.0	Dokumen	186,346,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.0	Laporan	124,079,200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.0	Laporan	124,079,200	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Makassar	Tersedianya Dokumen administrasi pengelolaan barang	2.0	Dokumen	2,669,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Kota Makassar	Tersedianya Dokumen administrasi pengelolaan	2.0	Dokumen	2,669,000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
			milik daerah yang baik				Perangkat Daerah		barang milik daerah yang baik				
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8.0	Dokumen	2,669,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8.0	Dokumen	2,669,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar	Presentase Penyediaan administrasi kepegawaian	90.0	%	45,510,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar	Presentase Penyediaan administrasi kepegawaian	90.0	%	45,510,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.0	Dokumen	3,510,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.0	Dokumen	3,510,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10.0	Orang	42,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10.0	Orang	42,000,000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Persentase Pelayanan administrasi umum	90.0	%	474,393,136	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Persentase Pelayanan administrasi umum	90.0	%	450,393,136	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.0	Paket	6,760,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.0	Paket	6,760,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.0	Paket	216,520,336	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.0	Paket	216,520,336	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang Disediakan	1.0	Paket	11,064,800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang Disediakan	1.0	Paket	11,064,800	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.0	Paket	26,616,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.0	Paket	26,616,000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.0	Dokumen	31,200,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.0	Dokumen	31,200,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.0	Laporan	158,232,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.0	Laporan	158,232,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Persentase sarana penunjang yang tersedia	90.0	%	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Persentase sarana penunjang yang tersedia	90.0	%	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.0	Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.0	Unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100.0	%	699,654,072	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kota Makassar	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100.0	%	722,251,823	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
							Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.0	Laporan	64,472,600	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.0	Laporan	64,472,600	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.0	Laporan	240,162,623	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.0	Laporan	240,162,623	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.0	Laporan	417,616,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.0	Laporan	417,616,600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Terpeliharanya sarana penunjang urusan pemerintah daera	12.0	Bulan	766,538,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Terpeliharanya sarana penunjang urusan pemerintah daera	12.0	Bulan	725,306,000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.0 Unit	40,880,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.0 Unit	40,880,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30.0 Unit	423,108,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30.0 Unit	423,108,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40.0 Unit	22,180,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40.0 Unit	22,180,000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2.0 Unit	53,000,000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2.0 Unit	53,000,000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.0	Unit	186,138,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.0	Unit	186,138,000	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kota Makassar	Persentase PelakuUsaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan	75.0	%	275,477,080	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kota Makassar	Persentase PelakuUsaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan	75.0	%	275,477,080	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kota Makassar	Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	16.0	Dokumen	19,617,200	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kota Makassar	Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	16.0	Dokumen	12,417,200	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4.0	Dokumen	12,417,200	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4.0	Dokumen	12,417,200	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Izin Pengelolaan Pasar Rakya, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	16.0	Dokumen	138,438,880	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Izin Pengelolaan Pasar Rakya, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	16.0	Dokumen	131,238,880	
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	4.0	Dokumen	131,238,880	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	4.0	Dokumen	131,238,880	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Izin Pengelolaan Pasar Rakya, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	16.0	Dokumen	23,481,000	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Izin Pengelolaan Pasar Rakya, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	16.0	Dokumen	16,281,000	
	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	4.0	Dokumen	16,281,000	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	4.0	Dokumen	16,281,000	
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Izin Pengelolaan Pasar Rakya, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	16.0	Dokumen	123,140,000	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Izin Pengelolaan Pasar Rakya, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	16.0	Dokumen	115,540,000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
							Langsung Minum di Tempat						
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Kota Makassar	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4.0	Dokumen	115,540,000	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Kota Makassar	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4.0	Dokumen	115,540,000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						
		Kota Makassar	Presentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100.0	%	22,562,000		Kota Makassar	Presentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100.0	%	22,562,000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Makassar	Jumlah Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	1.0	Unit	3,127,200	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Makassar	Jumlah Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	1.0	Unit	2,432,000	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Makassar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1.0	Unit	2,432,000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Makassar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1.0	Unit	2,432,000	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Makassar	jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang di bina	100.0	Orang	49,430,000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Makassar	jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang di bina	100.0	Orang	20,130,000	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4.0	Dokumen	20,130,000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4.0	Dokumen	20,130,000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kota Makassar	Presentase Harga Komoditas, Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Stabil	90.0	%	946,223,640	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kota Makassar	Presentase Harga Komoditas, Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Stabil	90.0	%	946,223,640	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Laporan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kota Makassar	8.0	Laporan	995,223,640	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Laporan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kota Makassar	8.0	Laporan	946,223,640	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Makassar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4.0	Laporan	130,022,800	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Makassar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4.0	Laporan	130,022,800	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4.0	Laporan	816,200,840	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4.0	Laporan	816,200,840	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kota Makassar	Presentase Komoiditas Ekspor Yang Di Kembangkan	75.0	%	999,791,840	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kota Makassar	Presentase Komoiditas Ekspor Yang Di Kembangkan	75.0	%	999,791,840	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pameran Dagang dan Misi Dagang dalam Rangka Promosi Produk Ekspor Unggulan Daerah yang di Ikuti	3.0	Pameran	1,092,491,840	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pameran Dagang dan Misi Dagang dalam Rangka Promosi Produk Ekspor Unggulan Daerah yang di Ikuti	3.0	Pameran	999,791,840	
	Pameran Dagang Nasional	Kota Makassar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5.0	Pelaku Us	203,164,000	Pameran Dagang Nasional	Kota Makassar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5.0	Pelaku	203,164,000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
					aha						Usaha		
	Pameran Dagang Lokal	Kota Makassar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	10.0	Pelaku Usaha	542,361,000	Pameran Dagang Lokal	Kota Makassar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	10.0	Pelaku Usaha	542,361,000	
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kota Makassar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10.0	Pelaku Usaha	51,333,000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kota Makassar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10.0	Pelaku Usaha	51,333,000	
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kota Makassar	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	15.0	Produk	202,933,840	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kota Makassar	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	15.0	Produk	202,933,840	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kota Makassar	Presentase Capaian Standardisasi Tera dan Tera Ulang	80.0	%	549,530,461	PROGRAM STANDARDISASI DAN	Kota Makassar	Presentase Capaian Standardisasi Tera dan Tera Ulang	80.0	%	143,981,200	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						PERLINDUNGAN KONSUMEN					
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Makassar	Presentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera/Tera Ulang Dalam Tahun Berjalan	80.0 %	606,829,652	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Makassar	Presentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera/Tera Ulang Dalam Tahun Berjalan	80.0 %	143,981,200	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Makassar	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	0.0		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Makassar	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	0.0	405,549,261	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Makassar	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100.0 Orang	143,981,200	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Makassar	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100.0 Orang	143,981,200	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kota Makassar	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	500.0 Kelompok	651,494,456	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kota Makassar	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	500.0 Kelompok	651,494,456	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kota Makassar	Jumlah promosi, pemasaran produk dalam negeri yang dilaksanakan	1.0	Pameran	775,494,456	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kota Makassar	Jumlah promosi, pemasaran produk dalam negeri yang dilaksanakan	1.0	Pameran	651,494,456	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	15.0	UMKM	114,823,856	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	15.0	UMKM	114,823,856	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	500.0	UMKM	536,670,600	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	500.0	UMKM	536,670,600	
	URUSAN PEMERINTAHAN	Kota Makassar					URUSAN PEMERINTAHAN	Kota Makassar					

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	BIDANG PERINDUSTRIAN						BIDANG PERINDUSTRIAN						
	Dinas Perdagangan	Kota Makassar					Dinas Perdagangan	Kota Makassar					
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kota Makassar	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kota Makassar	60.0	Orang	4,108,382,120	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kota Makassar	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kota Makassar	60.0	Orang	4,035,357,440	
		Kota Makassar	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri	0.0	%			Kota Makassar	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri	0.0	%		
		Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Perindustrian	250.0	Orang			Kota Makassar	Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Perindustrian	250.0	Orang		
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah IKM Lorong Wisata yang di Bina	350.0	Orang	5,919,557,040	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah IKM Lorong Wisata yang di Bina	350.0	Orang	3,789,130,520	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	4.0	Dokumen	106,151,800	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	4.0	Dokumen	106,151,800	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4.0	Dokumen	162,516,800	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4.0	Dokumen	162,516,800	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0.0	Dokumen		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0.0	Dokumen	319,251,600	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4.0	Dokumen	3,520,461,920	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4.0	Dokumen	3,520,461,920	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Kota Makassar	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil danIndustri (IUI) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	95.0	%	164,403,840	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Kota Makassar	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil danIndustri (IUI) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	95.0	%	164,403,840	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah usaha ikm yang di pantau	360.0	IKM	18,203,840	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan	Kota Makassar	Jumlah usaha ikm yang di pantau	360.0	IKM	164,403,840	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
							Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	4.0	Dokumen	156,627,720	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	4.0	Dokumen	156,627,720	
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar	Kota Makassar	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan	4.0	Doku	7,776,120	Fasilitasi verifikasi pemenuhan	Kota Makassar	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan	4.0	Doku	7,776,120	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	men		persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi	men		

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
									kewenangan pemerintah pusat				
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kota Makassar	Persentase Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini	100.0	%	81,823,080	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kota Makassar	Persentase Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini	100.0	%	81,823,080	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Tersedianya data informasi industri	100.0	%	157,823,080	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Tersedianya data informasi industri	100.0	%	81,823,080	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem	4.0	Dokumen	75,299,480	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem	4.0	Dokumen	75,299,480	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Informasi Industri Nasional (SIINas)			Informasi Industri Nasional (SIINas)		Informasi Industri Nasional (SIINas)			
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	4.0 Dokumen	6,523,600	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	4.0 Dokumen	6,523,600	

Deskripsi Tabel:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Program ini secara fundamental mendukung operasional dan efektivitas internal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, sesuai dengan fungsi penunjang administrasi pemerintahan daerah. Indikator kinerja yang ditetapkan meliputi peningkatan kapasitas ASN perangkat daerah sebesar 90%, ketersediaan laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah sebesar 100%, serta kondisi sarana dan prasarana aparatur yang baik sebesar 90%. Selain itu, program ini menargetkan tersusunnya 7 dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas.
   Alokasi pagu indikatif untuk program ini adalah Rp 14.505.510.282 untuk peningkatan kapasitas ASN dan Rp 195.322.340 untuk penyusunan dokumen perencanaan. Target yang ambisius ini menunjukkan komitmen Dinas untuk memastikan sumber daya manusia yang kompeten dan sistem administrasi yang akuntabel, yang menjadi dasar penting bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas secara keseluruhan.
2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
   Program ini sangat relevan dengan Tupoksi Dinas dalam mengatur, mengawasi, dan memfasilitasi legalitas berbagai jenis usaha di Kota Makassar, sehingga menciptakan iklim usaha yang tertib dan terdata. Target yang ditetapkan mencakup persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan sebesar 75%, penerbitan 340 izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan, serta penerbitan 440 tanda daftar gudang. Selain itu, ditargetkan pula penerbitan 460 Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dan 110 Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C.
   Dengan pagu indikatif sebesar Rp 304.677.080, program ini menunjukkan fokus Dinas pada aspek regulasi dan legalitas usaha. Pencapaian target-target ini akan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan usaha, transparansi, dan kemudahan berusaha, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang terstruktur
3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
   Program ini berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur perdagangan, khususnya pasar rakyat, yang merupakan bagian integral dari Tupoksi Dinas untuk mendukung ekosistem perdagangan yang layak dan berdaya saing. Indikator kinerja utamanya adalah peningkatan jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (SNI), dengan target 1 Pasar. Selain itu, program ini menargetkan 100% pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat yang mendapat pembinaan, meskipun terdapat anomali pada target "Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina" yang tercantum 0.

Alokasi pagu indikatif sebesar Rp 52.557.200 untuk peningkatan standar SNI pasar dan Rp 49.430.000 untuk pembinaan pengelola menunjukkan komitmen pada perbaikan fasilitas fisik dan kapasitas SDM pengelola. Namun, target 1 Pasar SNI masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan total 50 pasar rakyat yang ada di Kota Makassar, mengindikasikan bahwa perbaikan infrastruktur pasar akan membutuhkan upaya berkelanjutan dalam jangka panjang.

4. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

   Program ini merupakan salah satu fungsi krusial Dinas dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mengendalikan inflasi dan fluktuasi harga barang pokok yang berdampak langsung pada daya beli. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan harga stabil, keduanya ditargetkan mencapai 52%. Selain itu, program ini berfokus pada pengendalian 4 jenis bahan kebutuhan pokok yang terkendali di tingkat pasar Kabupaten/Kota.

   Dengan pagu indikatif sebesar Rp 995.223.640, program ini menunjukkan prioritas Dinas dalam menjaga daya beli masyarakat. Target stabilisasi 52% mencerminkan bahwa meskipun ada upaya, tantangan dalam mengendalikan harga masih besar, mengingat inflasi Kota Makassar mencapai 2,11% pada tahun 2023.

5. Program Pengembangan Ekspor

   Program ini sejalan dengan Tupoksi Dinas untuk mempromosikan dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global, yang esensial untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Target utama program ini adalah peningkatan hasil ekspor hingga $724.027.781, dan menargetkan ekspor 10 jenis komoditas unggulan melalui penyelenggaraan promosi dagang seperti pameran dan misi dagang.

   Pagu indikatif yang dialokasikan untuk program ini adalah Rp 1.092.491.840. Target peningkatan hasil ekspor yang sangat signifikan ini menunjukkan ambisi besar Dinas untuk memperluas jangkauan pasar produk lokal, mengingat volume ekspor Kota Makassar pada tahun 2020 hanya mencapai $34.700.607.

6. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen

   Program ini menegaskan peran Dinas dalam memastikan keadilan dan perlindungan konsumen melalui pengawasan standar alat ukur, takaran, dan timbangan. Indikator kinerjanya adalah persentase alat ukur, takaran, timbangan, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera kebudayaan sah yang berlaku, ditargetkan mencapai 80%. Untuk mencapai target ini, program akan melaksanakan tera, tera ulang, dan pengawasan terhadap 1600 UTTP.

   Dengan pagu indikatif sebesar Rp 155.981.200, program ini berupaya mengatasi masalah alat ukur yang belum terkalibrasi, di mana saat ini hanya 50% yang memenuhi standar. Peningkatan persentase UTTP yang terkalibrasi akan secara langsung meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengurangi potensi kerugian akibat praktik curang.

7. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini merupakan bagian dari Tupoksi Dinas untuk memperkuat pasar domestik dan mendorong preferensi terhadap produk lokal, sehingga mendukung keberlanjutan usaha di dalam negeri. Indikator kinerja program ini mencakup cakupan bina 500 kelompok pedagang/usaha informal dan pelaksanaan 1 pameran promosi dan pemasaran produk dalam negeri.

Alokasi pagu indikatif sebesar Rp 775.494.456 menunjukkan komitmen untuk membina dan memperluas jangkauan pasar bagi produk lokal dan usaha kecil. Pembinaan kelompok usaha informal adalah langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka di pasar domestik.

8. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program ini krusial dalam mengatasi rendahnya produktivitas dan inovasi Industri Kecil Menengah (IKM), sejalan dengan Tupoksi Dinas dalam pengembangan sektor industri. Program ini menargetkan 350 orang peserta pelatihan skill training gratis di sektor perindustrian, serta pembinaan 350 pengrajin di 75 lorong. Namun, indikator penting seperti "Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri" dan "Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan menengah di Kota Makassar" tidak memiliki target kuantitatif.

Dengan pagu indikatif sebesar Rp 5.917.277.440, program ini menunjukkan investasi signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia dan IKM. Meskipun demikian, ketiadaan target kuantitatif pada beberapa indikator utama dapat menyulitkan evaluasi dampak program terhadap pertumbuhan industri secara keseluruhan.

9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini mendukung Tupoksi Dinas dalam pengawasan dan pengaturan izin usaha industri, memastikan kepatuhan dan tata kelola yang baik di sektor industri. Indikator kinerjanya adalah persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait, ditargetkan mencapai 95%. Untuk mencapai ini, program akan memantau 360 IKM.

Pagu indikatif yang dialokasikan adalah Rp 182.203.840. Tingginya target persentase pemantauan (95%) menunjukkan komitmen Dinas untuk menjaga kepatuhan dan mengidentifikasi potensi pelanggaran, sehingga menciptakan lingkungan industri yang teratur dan bertanggung jawab.

10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini sangat penting dalam Tupoksi Dinas untuk menyediakan data dan informasi industri yang akurat dan terkini, yang merupakan dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif. Indikator kinerja utamanya adalah persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini, ditargetkan 100%, serta tersedianya data informasi industri sebesar 100%.

Dengan pagu indikatif sebesar Rp 157.823.080, program ini menunjukkan investasi dalam digitalisasi dan pengelolaan data industri. Ketersediaan informasi yang komprehensif akan

memungkinkan analisis yang lebih baik terhadap kondisi dan tren industri, mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan meningkatkan transparansi bagi pelaku usaha dan publik.

Selaian melakukan review terhadap rancangan awal rencana kinerja perangkat daerah kota Makassar, pada penyusunan rencana kerja perubahan ini, juga menganalisis tentang beberapa usulan yang berasal dari pihak eksternal, untuk diintegrasikan kedalam dokumen rencana perubahan tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar. Adapun usulan program kegiatan yaitu:

1. Usulan Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Makassar (Musrembang)
   Berikut tabel dibawah ini adalah usulan program dan kegiatan yang berasal dari kegiatan Musrembang Tahun 2025.

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program: Stabilisasi Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
	Kegiatan: Pengendalian Harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				
1.	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dala 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kelurahan Mangkura, Kecamatan Mamajang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	150 Paket	Pengusul: Muhammad Syakhrul Saad, ST.

Deskripsi Tabel:
Pengusulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan melalui Musrenbang merupakan masukan krusial untuk menyempurnakan dokumen Rencana Kerja Perubahan (RKP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025. Salah satu usulan yang menonjol adalah "Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota" di Kelurahan Mangkura, Kecamatan Mamajang. Kegiatan ini merupakan sub kegiatan dari program "Stabilisasi Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting" dan kegiatan "Pengendalian Harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota".
Usulan ini sangat relevan dengan salah satu permasalahan utama yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yaitu inflasi di Kota Makassar yang mencapai 2,11% pada tahun 2023 dengan fluktuasi harga barang pokok yang tidak terkontrol, serta berdampak

pada kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan target 150 paket laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus, usulan ini dapat menjadi instrumen efektif untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta secara langsung mengatasi permasalahan inflasi yang merugikan masyarakat.

Integrasi usulan ini ke dalam dokumen RKP 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar akan memperkuat upaya Dinas dalam mewujudkan misi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang pokok. Hal ini tidak hanya menunjukkan responsivitas Dinas terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang, tetapi juga mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam melindungi daya beli masyarakat dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan aman.

2. Usulan Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Makassar (Pokok Pikiran)

Berikut tabel dibawah ini adalah usulan program dan kegiatan yang berasal dari kegiatan Musrembang Tahun 2025.

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program: Stabilisasi Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				
	Kegiatan: Pengendalian Harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				
1.	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	50 Paket Rp. 7.500.000	Pengusul: Anton Paul Goni

Deskripsi Tabel:

Usulan program dan kegiatan yang berasal dari pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menjadi masukan penting dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025. Salah satu usulan spesifik yang diajukan adalah "Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota" di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate. Kegiatan ini merupakan bagian dari program "Stabilisasi Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting" dan kegiatan "Pengendalian Harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota".

Usulan yang diajukan oleh Anton Paul Goni ini mengindikasikan pentingnya intervensi langsung pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di tingkat masyarakat, khususnya di wilayah tertentu seperti Kelurahan Jongaya. Dengan indikator kinerja "Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota" dan target 50 Paket dengan anggaran Rp 7.500.000, kegiatan ini diharapkan mampu meredam fluktuasi harga barang pokok yang kerap menjadi keluhan masyarakat. Ini sejalan dengan upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mengendalikan inflasi dan memastikan ketersediaan barang pokok dengan harga yang terjangkau.
Integrasi usulan pokok pikiran ini ke dalam Rencana Kerja Perubahan 2025 akan memperkuat dimensi representasi dan responsivitas kebijakan pemerintah terhadap kebutuhan konstituen. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang konkret di tingkat masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar untuk tahun 2025 merupakan dokumen strategis yang secara komprehensif merespons berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas. Perencanaan ini disusun dengan mempertimbangkan visi Kepala Daerah "Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan", serta mendukung agenda-agenda penting seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sustainable Development Goals (SDGs). Pendekatan ini memastikan bahwa rencana kerja tidak hanya berfokus pada capaian internal, tetapi juga mampu mengintegrasikan aspirasi pemangku kepentingan yang muncul dari Musrenbang dan pokok-pokok pikiran anggota DPRD, sehingga menciptakan program yang relevan dan didukung luas.

Secara internal, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar memprioritaskan penguatan kapasitas organisasi melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini berupaya meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara dan memastikan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola administrasi ini menjadi pondasi esensial bagi efektivitas seluruh program pelayanan publik yang akan dijalankan oleh Dinas.

Dalam bidang perdagangan, rencana kerja Dinas diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang tertib dan infrastruktur pasar yang berkualitas. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan akan memfasilitasi legalitas berbagai jenis usaha, sehingga meningkatkan kepatuhan dan keteraturan bisnis di Kota Makassar. Sementara itu, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan secara spesifik menargetkan perbaikan kualitas pasar rakyat, yang selama ini menghadapi tantangan dalam memenuhi standar. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan konsumen dan daya saing pasar tradisional.

Aspek krusial lainnya adalah stabilisasi harga dan perlindungan konsumen. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar berupaya keras untuk mengendalikan inflasi dan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok yang seringkali membebani masyarakat. Integrasi usulan operasi pasar dari Musrenbang dan pokok pikiran DPRD menunjukkan komitmen responsif Dinas terhadap kebutuhan masyarakat akan harga yang stabil dan terjangkau. Selain itu, Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen akan memastikan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi dengan memastikan akurasi alat ukur, sehingga melindungi konsumen dari potensi kerugian.

Di sektor perindustrian dan pengembangan ekspor, rencana kerja fokus pada peningkatan daya saing dan inovasi produk lokal. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi Industri Kecil Menengah (IKM) melalui berbagai pelatihan dan pembinaan, mengatasi tantangan penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Sejalan dengan itu, Program Pengembangan Ekspor

berambisi besar untuk memperluas jangkauan pasar produk lokal di kancah internasional, mendorong peningkatan volume ekspor dan diversifikasi komoditas unggulan. Seluruh inisiatif ini didukung oleh Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, yang menjamin ketersediaan data industri yang akurat dan terkini, sebagai basis esensial untuk pengambilan keputusan strategis yang lebih baik.

Rekapitulasi Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan inti dari perencanaan strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, yang mengkonsolidasikan seluruh inisiatif dan prioritas yang akan dijalankan. Tabel ini menjadi panduan operasional yang merangkum secara sistematis alokasi sumber daya dan fokus kegiatan Dinas untuk satu tahun ke depan, memastikan bahwa setiap upaya terukur, terarah, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah serta permasalahan yang telah teridentifikasi, baik dari analisis internal maupun masukan pemangku kepentingan. Berikut adalah tabel rekapitulasinya:

Tabel. 3.1. Rekapitulasi Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Jumlah Pada DPA Pokok	Tidak Mengalami Perubahan	Mengalami Perubahan	Mengalami Penambahan Pagu	Mengalami Pengurangan Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program	10	3	7	2	5
2.	Kegiatan	21	7	14	5	9
3.	Sub Kegiatan	53	30	23	9	14

Deskripsi Tabel:

Berdasarkan Tabel 3.1. Rekapitulasi Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025:

1. Program: Dari total 10 Program pada DPA Pokok, 3 Program tidak mengalami perubahan, sementara 7 Program mengalami perubahan. Perubahan ini melibatkan 2 Program yang mengalami penambahan pagu dan 5 Program yang mengalami pengurangan anggaran. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian signifikan pada level strategis, dengan lebih banyak program yang mengalami pengurangan anggaran dibandingkan penambahan, mengindikasikan adanya prioritisasi ulang atau efisiensi anggaran.
2. Kegiatan: Pada level kegiatan, terdapat total 21 Kegiatan pada DPA Pokok. Dari jumlah tersebut, 7 Kegiatan tidak mengalami perubahan, sedangkan 14 Kegiatan mengalami penyesuaian. Perubahan ini melibatkan 5 Kegiatan yang mendapatkan penambahan pagu dan 9 Kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran. Proporsi kegiatan yang mengalami perubahan lebih besar dibandingkan program, menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi Dinas dalam merespons dinamika kebutuhan operasional.
3. Sub Kegiatan: Untuk sub kegiatan, tercatat total 53 Sub Kegiatan pada DPA Pokok. Sejumlah 30 Sub Kegiatan tidak mengalami perubahan, yang berarti lebih dari separuhnya tetap stabil. Namun, 23 Sub

Kegiatan mengalami perubahan, dengan rincian 9 Sub Kegiatan mengalami penambahan pagu dan 14 Sub Kegiatan mengalami pengurangan anggaran. Jumlah sub kegiatan yang mengalami perubahan menunjukkan penyesuaian rinci pada implementasi di lapangan, dengan kecenderungan pengetatan anggaran pada sebagian besar sub kegiatan yang diubah.

Rekapitulasi Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, mencerminkan adaptasi strategis terhadap kebutuhan yang berkembang dan efisiensi anggaran. Setiap penyesuaian yang terjadi, baik pada level program, kegiatan, maupun sub kegiatan, merupakan hasil dari proses evaluasi mendalam yang bertujuan untuk memastikan alokasi sumber daya yang optimal demi pencapaian target kinerja. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian perubahan pada setiap tingkatan, dapat melihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.1. Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Makassar Tahun Anggaran 2025

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025																	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan																	
Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																	
Kode					**Uraian**	**Sumber Dana**	**Lokasi**	**Jumlah**									
								Tahun - 1	**Tahun N**								**Tahun + 1**
									Sebelum					**Sesudah**			
									Belanja Operasi	**Belanja Modal**	**Belanja Tidak Terduga**	**Belanja Transfer**	**Jumlah (Rp)**	**Belanja Operasi**	**Belanja Modal**	**Belanja Tidak Terduga**	**Belanja Transfer**	**Jumlah (Rp)**	
Dinas Perdagangan																			
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				Rp. 23.623.703.938	Rp. 175.509.200			Rp. 23.799.213.138	Rp. 22.103.203.539	Rp. 175.509.200			Rp. 22.278.712.739	Rp. 21.566.523.031,00
3	3 0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				Rp. 17.706.426.498	Rp. 175.509.200			Rp. 17.881.935.698	Rp. 17.545.626.099	Rp. 175.509.200			Rp. 17.721.135.299	Rp. 19.526.523.031,00
3	3 0	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				Rp. 14.330.001.082	Rp. 175.509.200			Rp. 14.505.510.282	Rp. 14.258.416.583	Rp. 175.509.200			Rp. 14.433.925.783	Rp. 15.544.790.100,00

3	3 0	0 1	2, 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 195.322. 340				Rp. 195.322. 340	Rp. 178.055. 140				Rp. 178.055. 140	Rp. 180.560.0 00,00
3	3 0	0 1	2, 0 1	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	- Kota Maka ssar, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa		Rp. 153.225. 940				Rp. 153.225. 940	Rp. 149.918. 740				Rp. 149.918. 740	Rp. 110.145.0 00,00
3	3 0	0 1	2, 0 1	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-		Rp. 8.324.60 0				Rp. 8.324.60 0	Rp. 5.384.60 0				Rp. 5.384.60 0	Rp. 12.800.00 0,00
3	3 0	0 1	2, 0 1	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	- Kota Maka ssar, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa		Rp. 8.552.00 0				Rp. 8.552.00 0	Rp. 5.612.00 0				Rp. 5.612.00 0	Rp. 12.348.00 0,00

3	3 0	0 1	2, 0 1	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp. 5.748.000				Rp. 5.748.000	Rp. 2.808.000				Rp. 2.808.000	Rp. 10.250.000,00
3	3 0	0 1	2, 0 1	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp. 5.887.000				Rp. 5.887.000	Rp. 2.947.000				Rp. 2.947.000	Rp. 11.630.000,00
3	3 0	0 1	2, 0 1	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.855.800				Rp. 7.855.800	Rp. 5.655.800				Rp. 5.655.800	Rp. 12.572.000,00
3	3 0	0 1	2, 0 1	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp. 5.729.000				Rp. 5.729.000	Rp. 5.729.000				Rp. 5.729.000	Rp. 10.815.000,00
3	3 0	0 1	2, 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 12.321.423.734				Rp. 12.321.423.734	Rp. 11.817.681.284				Rp. 11.817.681.284	Rp. 13.087.767.000,00

3	3 0	0 1	2, 0 2	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	- Kota Maka ssar, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa		Rp. 11.678.4 38.534				Rp. 11.678.4 38.534	Rp. 11.182.4 39.284				Rp. 11.182.4 39.284	Rp. 12.500.00 0.000,00
3	3 0	0 1	2, 0 2	00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	- Kota Maka ssar, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa		Rp. 332.560. 000				Rp. 332.560. 000	Rp. 327.760. 000				Rp. 327.760. 000	
3	3 0	0 1	2, 0 2	00 03	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	- Kota Maka ssar, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa		Rp. 186.346. 000				Rp. 186.346. 000	Rp. 188.170. 000				Rp. 188.170. 000	Rp. 420.800.0 00,00

3	3 0	0 1	2, 0 2	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	- Kota Maka ssar, Rapp ocini, Banta - Banta eng		Rp. 124.079. 200				Rp. 124.079. 200	Rp. 119.312. 000				Rp. 119.312. 000	Rp. 166.967.0 00,00
3	3 0	0 1	2, 0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp. 2.669.00 0				Rp. 2.669.00 0	Rp. 2.669.00 0				Rp. 2.669.00 0	Rp. 2.706.200 ,00
3	3 0	0 1	2, 0 3	00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	- Kota Maka ssar, Rapp ocini, Banta - Banta eng		Rp. 2.669.00 0				Rp. 2.669.00 0	Rp. 2.669.00 0				Rp. 2.669.00 0	Rp. 2.706.200 ,00
3	3 0	0 1	2, 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 45.510.0 00				Rp. 45.510.0 00	Rp. 520.104. 000				Rp. 520.104. 000	Rp. 284.584.9 00,00
3	3 0	0 1	2, 0 5	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	- Kota Maka ssar, Semu a Keca matan, Semu a												Rp. 90.000.00 0,00

							Kel/Desa											
3	30	01	2,05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng		Rp. 3.510.000				Rp. 3.510.000	Rp. 3.510.000				Rp. 3.510.000	Rp. 60.880.000,00
3	30	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng		Rp. 42.000.000				Rp. 42.000.000	Rp. 516.594.000				Rp. 516.594.000	Rp. 133.704.900,00
3	30	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 298.883.936	Rp. 175.509.200			Rp. 474.393.136	Rp. 335.150.936	Rp. 175.509.200			Rp. 510.660.136	Rp. 549.672.000,00
3	30	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng		Rp. 6.760.000				Rp. 6.760.000	Rp. 6.760.000				Rp. 6.760.000	Rp. 325.000.000,00
3	30	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan	- PENDAPATAN	- Kota Makassar,		Rp. 41.011.136	Rp. 175.509.200			Rp. 216.520.336	Rp. 41.011.136	Rp. 175.509.200			Rp. 216.520.336	Rp. 41.100.000,00

					Perlengkapan Kantor	ASLI DAERAH (PAD)	Rappocini, Banta-Bantaeng												
3	30	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng		Rp. 11.064.800				Rp. 11.064.800	Rp. 11.064.800				Rp. 11.064.800	Rp. 6.400.000,00
3	30	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng		Rp. 26.616.000				Rp. 26.616.000	Rp. 39.207.000				Rp. 39.207.000	Rp. 40.000.000,00
3	30	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Makassar, Rappocini, Banta-Bantaeng		Rp. 31.200.000				Rp. 31.200.000	Rp. 31.200.000				Rp. 31.200.000	Rp. 29.172.000,00
3	30	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	- PENDAPATAN ASLI DAERA	- Kota Makassar, Rappocini,		Rp. 182.232.000				Rp. 182.232.000	Rp. 205.908.000				Rp. 205.908.000	Rp. 108.000.000,00

					Konsultasi SKPD	H (PAD)	Banta - Banta eng												
3	3 0	0 1	2, 0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														Rp. 140.000.000,00
3	3 0	0 1	2, 0 7	00 05	Pengadaan Mebel	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-												Rp. 18.000.000,00
3	3 0	0 1	2, 0 7	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-												Rp. 122.000.000,00
3	3 0	0 1	2, 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 699.654.072				Rp. 699.654.072	Rp. 679.450.223				Rp. 679.450.223	Rp. 585.000.000,00
3	3 0	0 1	2, 0 8	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp. 64.472.600				Rp. 64.472.600	Rp. 43.472.600				Rp. 43.472.600	Rp. 120.000.000,00

3	3 0	0 1	2, 0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-		Rp. 217.564. 872				Rp. 217.564. 872	Rp. 240.162. 623				Rp. 240.162. 623	Rp. 325.000.0 00,00
3	3 0	0 1	2, 0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-		Rp. 417.616. 600				Rp. 417.616. 600	Rp. 395.815. 000				Rp. 395.815. 000	Rp. 140.000.0 00,00
3	3 0	0 I	2, 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 766.538. 000				Rp. 766.538. 000	Rp. 725.306. 000				Rp. 725.306. 000	Rp. 714.500.0 00,00
3	3 0	0 1	2, 0 9	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-		Rp. 44.380.0 00				Rp. 44.380.0 00	Rp. 40.880.0 00				Rp. 40.880.0 00	Rp. 42.000.00 0,00
3	3 0	0 1	2, 0 9	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan	- PENDA PATAN ASLI DAERA	-		Rp. 460.684. 000				Rp. 460.684. 000	Rp. 423.108. 000				Rp. 423.108. 000	Rp. 330.000.0 00,00

					, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	H (PAD)													
3	3 0	0 1	2, 0 9	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-		Rp. 22.180.0 00				Rp. 22.180.0 00	Rp. 22.180.0 00				Rp. 22.180.0 00	Rp. 47.500.00 0,00
3	3 0	0 1	2, 0 9	00 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-		Rp. 53.000.0 00				Rp. 53.000.0 00	Rp. 53.000.0 00				Rp. 53.000.0 00	Rp. 75.000.00 0,00
3	3 0	0 1	2, 0 9	00 09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-		Rp. 186.294. 000				Rp. 186.294. 000	Rp. 186.138. 000				Rp. 186.138. 000	Rp. 220.000.0 00,00
3	3 0	0 2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARA N PERUSAHAA N				Rp. 304.677. 080				Rp. 304.677. 080	Rp. 230.477. 080				Rp. 230.477. 080	Rp. 510.800.9 71,00

3	30	02	2,01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				Rp. 19.617.200				Rp. 19.617.200	Rp. 12.417.200				Rp. 12.417.200	Rp. 75.000.000,00
3	30	02	2,01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.617.200				Rp. 19.617.200	Rp. 12.417.200				Rp. 12.417.200	Rp. 75.000.000,00
3	30	02	2,02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang				Rp. 138.438.880				Rp. 138.438.880	Rp. 104.238.880				Rp. 104.238.880	Rp. 225.000.971,00
3	30	02	2,02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Makassar, Semua Kecamatan,		Rp. 138.438.880				Rp. 138.438.880	Rp. 104.238.880				Rp. 104.238.880	Rp. 225.000.971,00

							Semua Kel/Desa											
3	30	02	2,03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri				Rp. 23.481.000				Rp. 23.481.000	Rp. 16.281.000				Rp. 16.281.000	Rp. 67.500.000,00
3	30	02	2,03	0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 23.481.000				Rp. 23.481.000	Rp. 16.281.000				Rp. 16.281.000	Rp. 67.500.000,00
3	30	02	2,05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				Rp. 123.140.000				Rp. 123.140.000	Rp. 97.540.000				Rp. 97.540.000	Rp. 143.300.000,00

3	3 0	0 2	2, 0 5	00 01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 123.140.000				Rp. 123.140.000	Rp. 97.540.000				Rp. 97.540.000	Rp. 143.300.000,00
3	3 0	0 3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				Rp. 52.557.200				Rp. 52.557.200	Rp. 48.802.000				Rp. 48.802.000	Rp. 128.000.000,00
3	3 0	0 3	2, 0 1		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				Rp. 3.127.200				Rp. 3.127.200	Rp. 2.432.000				Rp. 2.432.000	Rp. 50.000.000,00
3	3 0	0 3	2, 0 1	00 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.127.200				Rp. 3.127.200	Rp. 2.432.000				Rp. 2.432.000	Rp. 50.000.000,00

3	3 0	0 3	2, 0 2		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				Rp. 49.430.000				Rp. 49.430.000	Rp. 46.370.000				Rp. 46.370.000	Rp. 78.000.000,00
3	3 0	0 3	2, 0 2	00 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 49.430.000				Rp. 49.430.000	Rp. 46.370.000				Rp. 46.370.000	Rp. 78.000.000,00
3	3 0	0 4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				Rp. 995.223.640				Rp. 995.223.640	Rp. 950.456.440				Rp. 950.456.440	Rp. 1.000.000.000,00
3	3 0	0 4	2, 0 2		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar				Rp. 995.223.640				Rp. 995.223.640	Rp. 950.456.440				Rp. 950.456.440	Rp. 1.000.000.000,00

					Kabupaten/Kota													
3	30	04	2,02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 157.022.800				Rp. 157.022.800	Rp. 134.255.600			Rp. 134.255.600	Rp. 150.000.000,00
3	30	04	2,02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 838.200.840				Rp. 838.200.840	Rp. 816.200.840			Rp. 816.200.840	Rp. 850.000.000,00
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				Rp. 1.092.491.840				Rp. 1.092.491.840	Rp. 1.273.778.340			Rp. 1.273.778.340	Rp. 1.567.931.960,00
3	30	05	2,01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran				Rp. 1.092.491.840				Rp. 1.092.491.840	Rp. 1.273.778.340			Rp. 1.273.778.340	Rp. 1.567.931.960,00

					Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
3	30	05	2,01	0002	Pameran Dagang Nasional	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 216.364.000				Rp. 216.364.000	Rp. 531.150.500				Rp. 531.150.500	Rp. 392.931.960,00
3	30	05	2,01	0003	Pameran Dagang Lokal	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 541.161.000				Rp. 541.161.000	Rp. 542.361.000				Rp. 542.361.000	Rp. 175.000.000,00

3	30	05	2,01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 105.033.000				Rp. 105.033.000	Rp. 51.333.000				Rp. 51.333.000	Rp. 550.000.000,00
3	30	05	2,01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 229.933.840				Rp. 229.933.840	Rp. 148.933.840				Rp. 148.933.840	Rp. 450.000.000,00
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				Rp. 155.981.200				Rp. 155.981.200	Rp. 116.981.200				Rp. 116.981.200	Rp. 125.000.000,00
3	30	06	2,01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				Rp. 155.981.200				Rp. 155.981.200	Rp. 116.981.200				Rp. 116.981.200	Rp. 125.000.000,00

3	30	06	2,01	0002	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 155.981.200				Rp. 155.981.200	Rp. 116.981.200				Rp. 116.981.200	Rp. 125.000.000,00
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				Rp. 775.494.456				Rp. 775.494.456	Rp. 666.714.456				Rp. 666.714.456	Rp. 650.000.000,00
3	30	07	2,01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				Rp. 775.494.456				Rp. 775.494.456	Rp. 666.714.456				Rp. 666.714.456	Rp. 650.000.000,00
3	30	07	2,01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp. 114.823.856				Rp. 114.823.856	Rp. 122.823.856				Rp. 122.823.856	Rp. 150.000.000,00

3	30	07	2,01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp. 660.670.600				Rp. 660.670.600	Rp. 543.890.600				Rp. 543.890.600	Rp. 500.000.000,00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				Rp. 5.917.277.440				Rp. 5.917.277.440	Rp. 4.557.577.440				Rp. 4.557.577.440	Rp. 2.040.000.000,00
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				Rp. 5.577.250.520				Rp. 5.577.250.520	Rp. 4.244.130.520				Rp. 4.244.130.520	Rp. 1.190.000.000,00
3	31	02	2,01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				Rp. 5.577.250.520				Rp. 5.577.250.520	Rp. 4.244.130.520				Rp. 4.244.130.520	Rp. 1.190.000.000,00
3	31	02	2,01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 161.151.800				Rp. 161.151.800	Rp. 154.751.800				Rp. 154.751.800	Rp. 425.000.000,00

3	31	02	2,01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp. 194.516.800				Rp. 194.516.800	Rp. 484.016.800				Rp. 484.016.800	Rp. 340.000.000,00
3	31	02	2,01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp. 5.221.581.920				Rp. 5.221.581.920	Rp. 3.605.361.920				Rp. 3.605.361.920	Rp. 425.000.000,00
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				Rp. 182.203.840				Rp. 182.203.840	Rp. 142.403.840				Rp. 142.403.840	Rp. 700.000.000,00
3	31	03	2,01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan				Rp. 182.203.840				Rp. 182.203.840	Rp. 142.403.840				Rp. 142.403.840	Rp. 700.000.000,00

					Kabupaten/Kota													
3	31	03	2,01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 171.627.720				Rp. 171.627.720	Rp. 132.627.720				Rp. 132.627.720	Rp. 350.000.000,00
3	31	03	2,01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.576.120				Rp. 10.576.120	Rp. 9.776.120				Rp. 9.776.120	Rp. 350.000.000,00

					(SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)													
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				Rp. 157.823.080				Rp. 157.823.080	Rp. 171.043.080				Rp. 171.043.080	Rp. 150.000.000,00
3	31	04	2,01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				Rp. 157.823.080				Rp. 157.823.080	Rp. 171.043.080				Rp. 171.043.080	Rp. 150.000.000,00
3	31	04	2,01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp. 151.299.480				Rp. 151.299.480	Rp. 164.519.480				Rp. 164.519.480	Rp. 75.000.000,00

					Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)													
3	31	04	2,01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp. 6.523.600				Rp. 6.523.600	Rp. 6.523.600			Rp. 6.523.600	Rp. 75.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				Rp. 442.568.452	Rp. 8.280.000			Rp. 450.848.452	Rp. 307.367.661	Rp. 8.280.000			Rp. 315.647.661	Rp. 530.000.000,00
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				Rp. 442.568.452	Rp. 8.280.000			Rp. 450.848.452	Rp. 307.367.661	Rp. 8.280.000			Rp. 315.647.661	Rp. 530.000.000,00
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				Rp. 442.568.452	Rp. 8.280.000			Rp. 450.848.452	Rp. 307.367.661	Rp. 8.280.000			Rp. 315.647.661	Rp. 530.000.000,00

3	30	06	2,01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				Rp. 442.568.452	Rp. 8.280.000			Rp. 450.848.452	Rp. 307.367.661	Rp. 8.280.000			Rp. 315.647.661	Rp. 530.000.000,00
3	30	06	2,01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp. 442.568.452	Rp. 8.280.000			Rp. 450.848.452	Rp. 307.367.661	Rp. 8.280.000			Rp. 315.647.661	Rp. 530.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				Rp. 310.057.520	Rp. 32.249.000			Rp. 342.306.520	Rp. 202.851.600	Rp. 0			Rp. 202.851.600	Rp. 550.000.000,00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				Rp. 310.057.520	Rp. 32.249.000			Rp. 342.306.520	Rp. 202.851.600	Rp. 0			Rp. 202.851.600	Rp. 550.000.000,00
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				Rp. 310.057.520	Rp. 32.249.000			Rp. 342.306.520	Rp. 202.851.600	Rp. 0			Rp. 202.851.600	Rp. 550.000.000,00
3	31	02	2,01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				Rp. 310.057.520	Rp. 32.249.000			Rp. 342.306.520	Rp. 202.851.600	Rp. 0			Rp. 202.851.600	Rp. 550.000.000,00
3	31	02	2,01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembanguna	- PENDAPATAN ASLI DAERA	- Kota Makassar, Semua		Rp. 310.057.520	Rp. 32.249.000			Rp. 342.306.520	Rp. 202.851.600	Rp. 0			Rp. 202.851.600	Rp. 550.000.000,00

					n Sarana dan Prasarana Industri	H (PAD)	Kecamatan, Semua Kel/Desa											
							Jumlah		**Rp. 24.376. 329.910**	**Rp. 216.0 38.20 0**			**Rp. 24.592. 368.110**	**Rp. 22.613. 422.800**	**Rp. 183.7 89.20 0**			**Rp. 22.797. 212.000**	**Rp. 22.646.5 23.031,0 0**

BAB IV
PENUTUP

4.1. Catatan Penting

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar telah memastikan bahwa setiap program dirancang secara strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan mendasar yang teridentifikasi. Hal ini mencakup upaya fundamental untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi Industri Kecil Menengah (IKM) yang masih rendah, memperluas akses terhadap teknologi modern, serta meningkatkan kualitas pasar rakyat yang belum memenuhi standar nasional. Selain itu, Dinas juga menyadari perlunya intervensi terencana dan pendanaan yang memadai untuk menanggulangi fluktuasi harga barang pokok yang berdampak pada inflasi, volume ekspor produk lokal yang masih rendah, serta masalah kalibrasi alat ukur di pasar. Setiap program, mulai dari peningkatan kapasitas internal hingga intervensi langsung di masyarakat seperti operasi pasar, telah dirancang secara cermat untuk menjawab tantangan-tantangan kompleks ini.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah mencatat bahwa dari sisi pelaksanaan, tantangan tidak hanya terbatas pada aspek finansial. Kompleksitas koordinasi antarlembaga, potensi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta hambatan birokrasi yang kadang muncul, semuanya telah menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan. Dinas memahami bahwa implementasi di lapangan kerap kali dihadapkan pada realitas yang dinamis, sehingga menuntut fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi. Oleh karena itu, mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat telah diantisipasi sebagai esensial untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan ini secara dini dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Meskipun demikian, isu ketersediaan anggaran telah diakui sebagai perhatian sentral yang senantiasa memerlukan manajemen yang cermat. Dinas menyadari bahwa apabila alokasi dana tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan, konsekuensinya dapat meluas dan berpotensi mengancam capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Program-program vital yang memerlukan investasi besar, seperti peningkatan sarana distribusi perdagangan, pembangunan industri, atau promosi ekspor, telah diidentifikasi sebagai area yang sangat rentan terdampak, yang dapat menghambat daya saing daerah, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan bahkan memperburuk kondisi sosial jika stabilitas harga tidak dapat terjaga secara optimal.

Analisis rekapitulasi program/kegiatan/subkegiatan pada perubahan rencana kerja Tahun 2025 telah secara gamblang menunjukkan adanya dinamika anggaran yang signifikan. Dari total 10 Program pada DPA Pokok, 7 di antaranya mengalami perubahan, dengan 5 Program menghadapi pengurangan anggaran. Demikian pula, dari 21 Kegiatan, 14 mengalami perubahan, di mana 9 Kegiatan mengalami pemotongan pagu. Pada level sub kegiatan, 23 dari 53 sub kegiatan berubah, dengan

14 di antaranya mengalami pengurangan anggaran. Tren ini mengindikasikan bahwa Dinas telah secara proaktif melakukan penyesuaian prioritas dan efisiensi, namun juga menjadi catatan bahwa beberapa inisiatif mungkin harus beroperasi dengan sumber daya yang lebih terbatas dari yang ideal.

Dinas telah mempertimbangkan bahwa ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dapat memiliki dampak kualitatif yang mendalam pada setiap program. Sebagai contoh, Dinas telah mengantisipasi bahwa pemotongan anggaran untuk Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dapat menghambat pelatihan skill training gratis bagi IKM, sehingga berpotensi memperlambat peningkatan produktivitas dan inovasi. Pada Program Pengembangan Ekspor, kekurangan dana bisa membatasi partisipasi dalam pameran internasional, menghambat pencapaian target ekspor yang ambisius. Demikian pula, telah menjadi catatan bahwa Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting mungkin tidak dapat melaksanakan operasi pasar secara optimal, berpotensi memperparah fluktuasi harga dan membebani masyarakat, terutama yang rentan.

Untuk menghadapi skenario ketersediaan anggaran yang tidak sesuai, Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah menyusun strategi mitigasi yang jelas. Ini meliputi kemampuan untuk melakukan prioritisasi ulang kegiatan yang paling strategis dan berdampak langsung pada masyarakat dan perekonomian. Efisiensi dalam penggunaan anggaran yang ada, pencarian sumber pendanaan alternatif jika memungkinkan, serta optimalisasi kolaborasi dengan pihak swasta atau lembaga lain, telah menjadi kunci dalam pendekatan ini. Dinas menyadari bahwa pilihan-pilihan sulit mungkin harus diambil, seperti menunda beberapa inisiatif atau mengurangi skala pelaksanaannya, namun tetap dengan mempertimbangkan dampak minimal terhadap capaian prioritas utama.

Oleh karena itu, catatan ini telah melekat dalam perencanaan Dinas sebagai pengingat akan pentingnya perencanaan yang adaptif dan proaktif. Mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan tidak hanya berfungsi untuk mengukur capaian, tetapi juga untuk secara cepat mengidentifikasi deviasi anggaran dan dampaknya. Kemampuan untuk merevisi dan menyesuaikan strategi di tengah jalan adalah esensial untuk menjaga momentum pembangunan, memastikan bahwa Dinas tetap mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, bahkan di bawah kondisi anggaran yang menantang.

4.2. Kaidah Kaidah Pelaksanaan

Keberhasilan implementasi Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025 sangat bergantung pada adherence terhadap kaidah-kaidah pelaksanaan yang kuat dan terdefinisi. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai pedoman operasional yang memastikan bahwa setiap langkah, mulai dari perencanaan mikro hingga eksekusi di lapangan, dilakukan secara terarah, efisien, dan akuntabel. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip

ini, Dinas dapat meminimalkan risiko, mengoptimalkan sumber daya, dan menjaga relevansi program di tengah dinamika perubahan yang mungkin terjadi.

1. Prinsip Prioritisasi dan Fokus.
   Mengingat beragamnya program dan potensi keterbatasan anggaran seperti yang terindikasi pada rekapitulasi perubahan pagu, Dinas wajib menerapkan prinsip prioritisasi yang ketat. Ini berarti mengidentifikasi dan memfokuskan sumber daya pada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang memiliki dampak paling strategis dan mendesak, khususnya yang berkaitan langsung dengan stabilisasi harga barang pokok, peningkatan produktivitas IKM, dan perlindungan konsumen. Prioritisasi harus didasarkan pada data, analisis kebutuhan riil masyarakat, serta keselarasan dengan visi daerah.
2. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.
   Pelaksanaan harus senantiasa mengedepankan efisiensi dalam penggunaan anggaran, memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memberikan nilai tambah dan dampak maksimal. Ini meliputi optimalisasi proses pengadaan, pengelolaan proyek yang cermat, serta pemanfaatan teknologi untuk mengurangi biaya operasional. Pada saat yang sama, efektivitas harus diukur dari sejauh mana program mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, seperti persentase barang kebutuhan pokok dengan harga stabil atau jumlah IKM yang terlatih, bukan sekadar terlaksananya kegiatan.
3. Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor.
   Mengatasi permasalahan kompleks seperti inflasi, daya saing IKM, atau infrastruktur pasar membutuhkan kerja sama yang erat. Kaidah pelaksanaan menekankan pentingnya koordinasi internal antarbidang di Dinas, serta kolaborasi eksternal dengan OPD terkait lainnya, pemerintah pusat, pelaku usaha, asosiasi, dan komunitas. Sinergi ini akan memperkuat implementasi program dan mengatasi hambatan birokrasi, mengingat tantangan pelaksanaan tidak hanya berkutat pada aspek finansial semata.
4. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi.
   Setiap tahapan pelaksanaan harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas yang tinggi. Ini berarti adanya kejelasan tanggung jawab untuk setiap program dan kegiatan, serta pelaporan yang transparan mengenai penggunaan anggaran dan capaian kinerja. Keterbukaan informasi kepada publik dan pemangku kepentingan akan membangun kepercayaan dan memungkinkan pengawasan yang lebih efektif, khususnya dalam pengelolaan dana yang mungkin mengalami penambahan atau pengurangan.
5. Prinsip Monitoring, Evaluasi, dan Adaptasi Berkelanjutan.
   Pelaksanaan bukan merupakan proses linear, melainkan siklus yang memerlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Kaidah ini mengamanatkan pembentukan mekanisme monitoring yang kuat untuk mengidentifikasi deviasi, hambatan, atau perubahan kondisi di lapangan secara dini. Hasil evaluasi harus menjadi dasar untuk

melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap rencana kerja, memastikan bahwa program tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya, bahkan jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan awal.

6. Prinsip Responsivitas terhadap Kebutuhan Masyarakat.
   Pelaksanaan program harus mampu merespons secara cepat dan tepat terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang. Contohnya, seperti usulan operasi pasar dari Musrenbang dan pokok pikiran anggota DPRD, menunjukkan pentingnya keterlibatan partisipatif dalam menentukan prioritas. Kaidah ini mendorong Dinas untuk senantiasa terbuka terhadap umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa program benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung.
7. Prinsip Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi.
   Dinas harus secara aktif mendorong inovasi dalam pelaksanaan program, terutama dalam pemanfaatan teknologi modern. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga untuk mengatasi keterbatasan akses terhadap teknologi yang dihadapi oleh IKM dan pasar tradisional. Inovasi dapat membuka peluang baru dalam pemasaran produk lokal, manajemen data industri, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adopsi dan implementasi kaidah-kaidah pelaksanaan ini secara konsisten menjadi kunci untuk memastikan bahwa Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025 tidak hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar terwujud menjadi aksi nyata. Dengan demikian, meskipun menghadapi tantangan operasional dan dinamika anggaran, Dinas tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, berkontribusi signifikan terhadap pencapaian visi daerah "Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan".

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Implementasi Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025 akan ditindaklanjuti secara tegas, terarah, dan komprehensif, sebagai wujud nyata komitmen Dinas dalam merealisasikan setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Bagian ini merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk memastikan keberhasilan, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan di lapangan, sekaligus mengantisipasi serta merespons dinamika yang mungkin terjadi.

Pertama dan yang paling fundamental, sistem monitoring dan evaluasi akan diperkuat secara masif dan berkelanjutan. Dinas akan secara sistematis memantau progres capaian indikator kinerja mulai dari peningkatan produktivitas IKM, kualitas pasar, stabilitas harga, hingga volume ekspor melawan target yang telah ditetapkan. Pemanfaatan data akurat dari Sistem Informasi Industri Nasional akan dioptimalkan untuk menyajikan gambaran real-time, memungkinkan

deteksi dini terhadap setiap deviasi atau hambatan pelaksanaan agar segera ditindaklanjuti.

Selanjutnya, rapat review kinerja akan diselenggarakan secara periodik dan wajib. Forum ini akan menghadirkan seluruh pihak terkait, baik internal Dinas maupun eksternal, untuk secara kritis mengevaluasi hasil monitoring, menganalisis capaian, dan merumuskan rekomendasi perbaikan yang tajam. Pertemuan ini juga akan menjadi platform esensial untuk meninjau ulang asumsi anggaran dan strategi, memastikan bahwa rencana kerja tetap adaptif dan relevan di tengah perubahan kondisi yang tak terduga.

Aspek krusial berikutnya adalah penguatan koordinasi dan komunikasi yang intensif. Dinas akan secara proaktif membangun dan memelihara sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk OPD terkait, pemerintah pusat, pelaku usaha, asosiasi, dan masyarakat. Komunikasi yang efektif akan meminimalkan gap informasi, mempercepat proses birokrasi, mengoptimalkan pelaksanaan program lintas sektor seperti operasi pasar bersama, serta memastikan dukungan penuh untuk mencapai tujuan bersama.

Dinas juga akan secara konsisten melanjutkan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan mobilisasi sumber daya finansial. Program pelatihan lanjutan bagi ASN akan terus diimplementasikan untuk menjamin kompetensi yang relevan dengan kebutuhan program. Dalam menghadapi potensi kendala anggaran, Dinas akan secara agresif mengeksplorasi sumber-sumber pendanaan alternatif, menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta, dan mengoptimalkan peluang bantuan dari pemerintah yang lebih tinggi, guna menjamin keberlangsungan program-program prioritas.

Aspek akuntabilitas dan transparansi akan menjadi pilar utama dalam setiap tahapan implementasi. Dinas berkomitmen penuh untuk menyampaikan laporan kinerja secara berkala, rinci, dan transparan kepada publik serta seluruh pemangku kepentingan. Laporan ini tidak hanya akan memuat capaian kuantitatif dan kualitatif, tetapi juga penjelasan mengenai penggunaan anggaran dan hasil evaluasi, sehingga membangun kepercayaan publik dan memastikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara keseluruhan, seluruh rencana tindak lanjut ini menegaskan pendekatan manajemen adaptif yang akan diterapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar. Keseluruhan langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 tidak hanya menjadi dokumen formal, melainkan panduan hidup yang dinamis, tanggap terhadap tantangan, dan berorientasi pada hasil. Dengan komitmen yang kuat dan pelaksanaan yang disiplin, Dinas optimis dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, berkontribusi signifikan terhadap pencapaian visi "Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.



#MenujuMakassarMULIA

makassarkota.go.id

PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Dinas Pemuda dan Olahraga



RENCANA KERJA

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dipandang perlu untuk diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, dengan menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana di maksud Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan.:
1. Wakil Wali Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
7.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
9.	Dinas Sosial Kota Makassar
10.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
12.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
13.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Makassar
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
22.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
23.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
24.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
25.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
26.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
27.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
28.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
29.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar

31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
32.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
34.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
35.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
36.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
37.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
38.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
39.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
40.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
43.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
44.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
45.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
46.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
47.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
58.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
49.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
50.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar
51.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

WALIKOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	10
2.1Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD	10
2.2Analisis kinerja pelayanan PD	34
2.3Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD	37
2.4Review terhadap rancangann awal RKPD perubahan	38
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	57
3.3 Program dan kegiatan	58
BAB V PENUTUP	83

BAB I
PENDAHULUAN

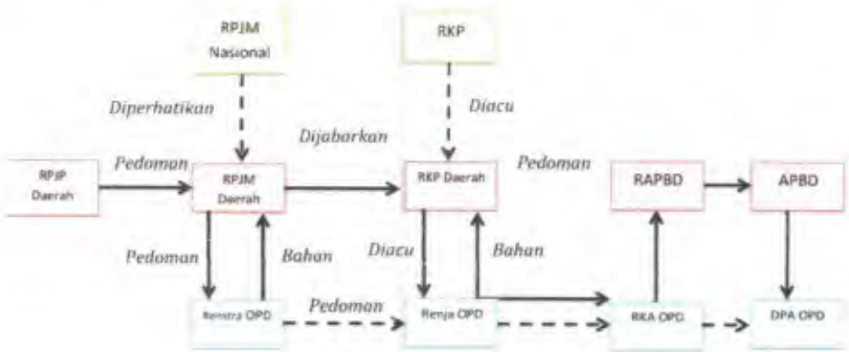
1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.Tata cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) Dinas yang menjadi dasar/ acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar setiap tahun/kinerja tahunan.

Dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, Dinas Pemuda dan Olahraga menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2025. Adapun nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menyusun Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

Gambar 1.1 Keterkaitan dokumen Renja dengan dokumen perencanaan lainnya



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5871)
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 tahun 2006 tentang Rencanna Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah kota makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017)
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 147 Tahun 2007).
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 3);
16. Peraturan Walikota Makassar Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat DaerahTahun 2021-2026 (Berita Daerah

Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55):

20. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perubahan RKPD Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Menjamin Sinergritas, Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengawasan serta Efisiensi sumber daya.
2. Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah:
   a. Sebagai Pedoman Dokumen Perencanaan Yang Akan Dilaksanakan Oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 sesuai Tupoksinya.
   b. Sebagai sarana Pengendalian Program Kegiatan sub kegiatan 2025.
   c. Untuk menjamin keselarasan, Penganggaran dan hasil yang optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat ;

1.1 Latar Belakang,
1.2 Landasan Hukum,
1.3 Maksud dan Tujuan serta,
1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada Bab ini memuat kajian (review) ;

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD,
2.2 Analisis kinerja pelayanan PD,
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD,
2.4 Review terhadap rancangann awal RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama serta tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Sebagaimana Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program/ kegiatan/ sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

Berdasarkan evaluasi kinerja, laporan pelaksanaan APBD sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025, maka perbandingan antara target kinerja fisik dan keuangan dengan realisasi fisik dan keuangan, adalah sebagai berikut:

Berikut ini Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 4 program (1 program penunjang, 3 program wajib), 15 kegiatan dan 42 sub kegiatan.

❖ Program Pendukung (Urusan Pilihan)

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

❖ Program Strategis (Urusan Wajib)

- PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
- PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
- PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dengan indikator program :

1. Persentase Ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah target 2025 100% dan target sebesar 41,67%.
   Pagu yang mendukung indikator ini sebesar Rp 11.111.694.219 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 3.759.480.853 atau sebesar 33,38%, Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja program ini adalah :
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Persentase capaian kinerja perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 142.495.000 dan realisasi Rp. 28.170.000 atau sebesar 19,77%

Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pagu anggaran Rp 69.796.000 dan realisasi Rp. 28.170.000 atau 40,36%
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan pagu anggaran 11.271.500 realisasi Rp 0 atau sebesar 0%, dengan target 1 dokumen RKA SKPD dan realisasi 1 dokumen.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan pagu anggaran Rp 10,847,500 dan realisasi Rp 0 atau sebesar 0%, dengan target 1 dokumen RKA SKPD dan realisasi 1 dokumen.
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan pagu anggaran Rp 10.298.000 realisasi Rp.0 atau sebesar 0%.
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan pagu Rp. 9.702.000 realisasi Rp 0 atau sebesar 0%.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu Rp 30.580.000 realisasi 0 atau sebesar 0%.

b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan indikator persentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah dengan pagu Rp 8.095.907.189 realisasi Rp 2.949.774.410 atau sebesar 36,44%.

Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran Rp. 7.287.227.189 realisasi Rp 2.574.354.410 atau sebesar 35,33%.
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu anggaran Rp. 484.680.000 realisasi Rp 249.420.000 atau sebesar 51,46%
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD den6gan indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu anggaran Rp 324.000.000 realisasi Rp

126.000.000 atau sebesar 38,89%

c. Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada perangkat Daerah dengan indikator persentase capaian administrasi barang milik daerah dengan pagu Rp 8.435.000 realisasi 0 atau sebesar 0%

Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah :

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu anggaran Rp. 241.000 realisasi Rp. 0 atau sebesar 0%.
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD dengan pagu anggaran Rp. 5.794.000 realisasi Rp. 0atau sebesar 0%.
- Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD dengan pagu anggaran Rp. 2.400.000 realisasi Rp. 0 atau sebesar 0%.

2. Persentase ASN Peragkat Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja program ini:
   a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator persentase capaian Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah anggaran sebesar Rp. 61.000.000 dengan realiasasi Rp. 12.000.000 atau 19,67%
      Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah :
      - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan indikator Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan pagu Rp. 61.000.000 realisasi Rp. 12.000.000 atau 19,67%
   b. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator persentase capaian Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 782.693.680 dengan realisasi Rp. 34.066.710 atau 4,35%
      Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah :
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan pagu anggaran Rp 574.686.080 realisasi Rp.0 atau 0%
      - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan dengan pagu anggaran Rp 6.908.600 realisasi Rp 6.774.300 atau 98,06%.
      - Penyediaan Bahan Logistik kantor dengan pagu anggaran Rp. 11.005.000 realisasi Rp. 9.900.000 atau 89,96%.
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan

yang disediakan dengan pagu Rp 29.174.000 realisasi Rp 0 atau 0%.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan dengan pagu anggaran Rp .7.920.000 realisasi Rp 1.900.000 atau 23,99 %
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran Rp. 153.000.000 realisasi Rp 15.492.410 atau 10,13%

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.631.807.800 dengan realisasi Rp. 623.028.700 atau sebesar 38,18%.
Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah :
   - Penyediaan Jasa Surat menyurat dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan dengan pagu Rp 19.135.000. realisasi Rp. 7.500.000 atau 38,18%.
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan pagu Rp 41,400,000. realisasi Rp. 391.500 atau 0,95%.
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan pagu Rp.1.571.272.800 realisasi Rp 615.137.200 atau 39,15%.

3. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dengan target 90% Jumlah pagu sebesar Rp 389.355.550 Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja program ini adalah:
   a. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.389.355.550 dengan realisasi sebesar Rp 112.441.033 atau sebesar 28,88%
   Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah :
      - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan pagu anggran Rp Rp45.380.000 realisasi Rp. 14.446.900 atau sebesar 31,84%.
      - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan pagu anggaran Rp 316.575.550 realisasi Rp. 87.494.133 atau 27,64%

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan pagu anggaran Rp. 27.400.000 realisasi Rp 10.500.000 atau sebesar 38,32%

Faktor pendorong :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang telah direncanalan setiap bulan/ triwulan, untuk memastikan serapan anggaran secara optimal sesuai dengan jumlah anggaran yang telah tersedia
2. Ketersediaan SDM yang berkualitas, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing bidang dapat berjalan dengan lancar dan tertib

Faktor penghambat :

1. Administrasi yang tidak tertib dapat membuat pelaksanaan kegiatan terhambat, terutama yang berhubungan dengan berkas pencairan anggaran
2. Adanya regulasi terkait pencaiaran anggaran dan proses administrasinya.

Tindak Lanjut :

1. penataan administrasi pelaksanaan kegiatan supaya menjadi lebih tertib dan mengikuti penjadwalan sesuai anggaran kas
2. Meningkatkan proses komunikasi dengan BPKAD sehingga dapat meminimalisir adanya misskomunikasi dalam pekerjaan.

B. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan sebagai bagian dari Pembangunan Nasional. Pagu anggaran yang mendukung program ini sebesar Rp.10.107.287.000 dan realisasi sebesar Rp. 751.730.000 atau 7,44%. Program ini terdiiri dari 2 Indikator:

1. **Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri**

Pada Triwulan II tahun 2025, terdapat 230 pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri. Angka ini baru memenuhi 1,60 % dari target yang ingin dicapai yaitu 90 % dari 16.000 pemuda. Tahun ini Dispora Kota Makassar melakukan pendataan Indeks Pembangunan Pemuda sebagai baseline RPJPD Kota Makassar. Salah satu Indikator dari program ini adalah mengukur seberapa besar minat pemuda mengikuti kegiatan ekonomi mandiri. Uraian kegiatan yang mendukung indicator ini dilaksanakan dalam Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Dan sub kegiatan yang terdiri dari:

a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelengggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor.
b. Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan.

Berikut serapan anggaran dari Kegiatan :

a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, pagu sebesar Rp. 9.779.763.000 dan realisasi sebesar Rp. 662.580.000 atau 6,78%.

   Adapun serapan anggaran sub kegiatan adalah :

   - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota, Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan Implementasi rencana aksi daerah/RAD tingkat kabupaten/kota pagu anggaran Rp. 158.400.000 realisasi Rp. 33.000.000 atau sebesar 20,83%
   - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota dengan pagu anggaran Rp. 933.084.000 realisasi Rp. 311.330.000 atau sebesar 33,37%
   - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota dengan pagu anggaran Rp. 4.740.169.000 realisasi Rp. 156.000.000 atau sebesar 3,29%
   - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota pagu anggaran Rp. 3.267.427.000 realisasi Rp. 162.250.000 atau 4,97%
   - Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda pelopor tingkat Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 680.683.000 realisasi Rp. 0 atau 0%

2. **Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan**

   Pada tahun 2025 target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebanyak 86.07% organisasi pemuda. Jumlah realisasi data organisasi tersebut pada Triwulan II belum dapat dihitung. Uraian kegiatan yang mendukung indikator ini dilaksanakan dalam Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Rp. 327.524.000 dan realiasi sebesar Rp. 89.150.000 atau sebesar 27,22%

Adapun serapan anggaran sub kegiatan adalah :

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 276.342.000 realisasi Rp. 62.850.000 atau 22,74%
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/kota dengan pagu anggaran Rp. 51.182.000 realisasi 26.300.000 atau sebesar 51,39%

Faktor Pendukung :

1. Adanya Bonus Demografi yang puncaknya akan terjadi ditahun 2030.
2. Amanah tujuan SDGs poin kedelapan yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dan poin kesembilan yaitu Peningkatan infrakstruktur guna menjamin akses teknologi terhadap generasi muda.

Faktor Penghambat :

1. Adanya perubahan regulasi dalam pelaksanaan program kerja.
2. Adanya efisiensi anggaran dan belum tersedianya data wirausaha muda

Tindak Lanjut :

1. Melakukan penyesuaian terhadap segala regulasi yang ada.
2. Melakukan verfikasi Kembali terhadap organisasi yang aktif dan tidak aktif

C. PROGRAM PEMGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Pagu Anggaran program ini sebesar Rp. 97.105.445.895 dengan realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 4.273.182.895 atau sebesar 4,40 %. Adapun dilakukan rasionalisasi anggaran pada beberapa kegiatan Pembangunan Prasarana Olahraga (belanja modal) yang tidak dapat terlaksana pada tahun ini. Program ini terdiri dari 4 kegiatan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 77.059.167.859 dengan realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 661.355.195 atau 0,86%. Adapun serapan anggaran sub kegiatan adalah:
   - Koordinasi, Sinkronisasi penyediaan presarana Olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan Prasarana olahraga di tingkat Kabupaten Kota dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 77.059.167.859 dengan realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 661.355.195 atau 0,86%.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 6.724.975.000 realisasi Rp. 2.338.423.700 atau sebesar 34,77%.
   Adapun serapan anggaran sub kegiatan adalah:

- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 5.792.207.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.338.423.700 atau sebesar 40,37%.
- Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga dengan pagu anggaran Rp. 932.768.000 realisasi Rp. 0 atau sebesar 0%.

c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 2.175.800.000 dengan realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 56.250.000 atau 2,59%. Adapun serapan anggaran sub kegiatan adalah:
   - Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 2.175.800.000 dengan realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 56.250.000 atau sebesar 2,59%.

d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 11.145.503.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.217.154.000 atau sebesar 10,92%.
   Adapun serapan anggaran sub kegiatan adalah:
   - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga rekreasi dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 2.997.861.380 dengan realisasi sebesar Rp. 512.750.000 atau sebesar 17,10%.
   - Pegembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 5.253.522.620 dengan realisasi sebesar Rp. 237.539.000 atau sebesar 4,52%.
   - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.255.728.000 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%.
   - Pemassalan olahraga dan Penyelenggaraan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional dengan pagu anggaran Rp. 1.638.391.000 realisasi Rp. 466.865.000 atau sebesar 28,50%.

Faktor Pendukung :

1. Adanya dukungan dari stakeholder terkait yang mendukung pelaksanaan kegiatan

Faktor Penghambat :

1. Untuk Pengerjaan fisik Karebosi : Review Desain perencanaan sementara berproses dan menunggu hasil audit BPKP.
2. Penyesuaian Visi Misi Walikota baru dan penyesuaian program kegiatan.

Tindak Lanjut :

1. Melakukan koordinasi terkait sarana olahraga terhadap pengelolah sarana
2. Melakukan koordinasi dengan pengurus cabang olahraga

3. Melakukaan koordinasi kepada pihak terkait, langka langka apa saja yang perlu dilakukan untuk percepatan administrasi dan keuangan

D. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Uraian kegiatan yang mendukung program ini dilaksanakan dalam Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan Pagu Rp 1.000.000.000 dan realiasi sebesar Rp.0 atau 0%.
Cakupan pembinaan Pramuka belum dapat dihitung dikarenakan kegiatan belum terlaksana.

Faktor pendukung :

1. Komunikasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga yang terbangun dengan baik dan penuh keterbukaan memberikan masukan yang baik bagi Kwarcab dalam mengelola kegiatannya.
2. Semangat yang besar dan kekompakan yang kuat dari segenap Kwartir Ranting dalam menjalankan program program yang ada.

Faktor penghambat :

1. Masih adanya pihak pihak yg belum mengerti peran dari gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan yg menanamkan rasa nasionalisme dari usia sedini mungkin sehingga senantiasa menganggap pemuka sebagai kegiatan yg biasa.
2. Sebagian pengambil kebijakan di level bawah masih terpengaruh dengan kebijakan diluar otoritas yg ada.

Tindak lanjut :

1. Lebih menggiatkan lagi kegiatan yg langsung bersentuhan dengan penanaman rasa nasionalisme bagi anggota Pramuka.
2. Memberikan kesempatan lebih besar kepada para pembina Pramuka dalam meningkatkan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan dan kursus kursus kepramukaan.
3. Membuka ruang komunikasi yg lebih besar bagi setiap individu yg ingin tau bagaimana gerakan Pramuka itu sendiri.

TABEL TC .29 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
PENCAPAIAN RENJA TAHUN 2025 TRIWULAN II DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)	
								I		II									
					K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				120.627.842.078,0	101.849.308.078,0		1.890.555.579,0		3.748.875.469,0		5.639.431.048,0		5,54		5.639.431.048,0		2,17
	2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				120.627.842.078,0	101.849.308.078,0		1.890.555.579,0		3.748.875.469,0		5.639.431.048,0		5,54		5.639.431.048,0		2,17
	2 19	Dinas Pemuda dan Olahraga				120.627.842.078,0	101.849.308.078,0		1.890.555.579,0		3.748.875.469,0		5.639.431.048,0		5,54		5.639.431.048,0		2,17
	2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90,0	11.346.444.219,0	11.111.694.219,0	20,0	1.694.865.579,0	20,0	2.064.615.274,0	40,0	3.759.480.853,0	44,44	33,83	40,0	3.759.480.853,0	44,44	16,22
			Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0			25,0		25,0		50,0		50,0		50,0		50,0	
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90,0			20,0		20,0		40,0		44,44		40,0		44,44	
	2 19 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen penganggaran dan laporan kinerja	dokumen	8,0	147.495.000,0	142.495.000,0	2,0	28.170.000,0	0,0	0,0	2,0	28.170.000,0	25,0	19,77	2,0	28.170.000,0	25,0	8,69

						Perangkat Daerah																
	2	1 9	0 1	2. 01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum en	3,0	74.796.00 0,0	69.796.00 0,0	2,0	28.170.0 00,0	0,0	0,0	2,0	28.170.0 00,0	66,6 7	40,3 6	2,0	28.170.0 00,0	0,0	17,1 1
	2	1 9	0 1	2. 01	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokum en	1,0	11.271.50 0,0	11.271.50 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	1 9	0 1	2. 01	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokum en	1,0	10.847.50 0,0	10.847.50 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	1 9	0 1	2. 01	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokum en	1,0	10.298.00 0,0	10.298.00 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	1 9	0 1	2. 01	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokum en	1,0	9.702.000, 0	9.702.000, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	1 9	0 1	2. 01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapora n	12,0	30.580.00 0,0	30.580.00 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	1 9	0 1	2. 01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapora n	12,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	**1 9**	**0 1**	**2. 02**		**Administrasi Keuangan Perangkat**	**Persentase keuangan perangkat daerah**	**persen**	**100, 0**	**8.095.907. 189,0**	**8.095.907. 189,0**	**25, 0**	**1.324.16 7.669,0**	**25,0**	**1.625.60 6.741,0**	**50,0**	**2.949.77 4.410,0**	**50,0**	**36,4 4**	**50,0**	**2.949.77 4.410,0**	**50,0**	**21,1 5**

						Daerah															
	2	1 9	0 1	2. 02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	12,0	7.287.227. 189,0	7.287.227. 189,0	3,0	1.145.45 7.669,0	3,0	1.428.89 6.741,0	6,0	2.574.35 4.410,0	50,0	35,3 3	6,0	2.574.35 4.410,0	0,0	20,9 3
	2	1 9	0 1	2. 02	00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokum en	12,0	484.680.0 00,0	484.680.0 00,0	3,0	124.710. 000,0	3,0	124.710. 000,0	6,0	249.420. 000,0	50,0	51,4 6	6,0	249.420. 000,0	0,0	22,6 1
	2	1 9	0 1	2. 02	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokum en	12,0	324.000.0 00,0	324.000.0 00,0	3,0	54.000.0 00,0	3,0	72.000.0 00,0	6,0	126.000. 000,0	50,0	38,8 9	6,0	126.000 000,0	0,0	23,3 3
	2	1 9	0 1	2. 02	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapora n	1,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
	2	**1 9**	**0 1**	**2. 03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum barang milik daerah SKPD**	**persen**	**100, 0**	**10.185.00 0,0**	**8.435.000, 0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	2	1 9	0 1	2. 03	00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokum en	0,0	241.000,0	241.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	1 9	0 1	2. 03	00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapora n	1,0	5.794.000, 0	5.794.000, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	1 9	0 1	2. 03	00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapora n	2,0	4.150.000, 0	2.400.000, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	**1 9**	**0 1**	**2. 05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase capaian administrasi kepegawaian**	**persen**	**100, 0**	**101.000.0 00,0**	**61.000.00 0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**12.000.0 00,0**	**25,0**	**12.000.0 00,0**	**25,0**	**19,6 7**	**25,0**	**12.000.0 00,0**	**25,0**	**2,44**
	2	1 9	0 1	2. 05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	80,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

	2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20,0	101.000.000,0	61.000.000,0	0,0	0,0	2,0	12.000.000,0	2,0	12.000.000,0	10,0	19,67	2,0	12.000.000,0	0,0	3,42
	2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor lainnya**	**persen**	**100,0**	**970.693.680,0**	**782.693.680,0**	**10,0**	**22.266.710,0**	**10,0**	**11.800.000,0**	**20,0**	**34.066.710,0**	**20,0**	**4,35**	**20,0**	**34.066.710,0**	**0,0**	**1,38**
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,0	574.686.080,0	574.686.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,0	6.908.600,0	6.908.600,0	1,0	6.774.300,0	0,0	0,0	1,0	6.774.300,0	100,0	98,06	1,0	6.774.300,0	0,0	38,27
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0,0	11.005.000,0	11.005.000,0	0,0	0,0	0,0	9.900.000,0	0,0	9.900.000,0	0,0	89,96	0,0	9.900.000,0	0,0	89,96
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,0	29.174.000,0	29.174.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	19	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,0	7.920.000,0	7.920.000,0	0,0	0,0	4,0	1.900.000,0	4,0	1.900.000,0	33,33	23,99	4,0	1.900.000,0	0,0	10,35
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30,0	341.000.000,0	153.000.000,0	3,0	15.492.410,0	0,0	0,0	3,0	15.492.410,0	10,0	10,13	3,0	15.492.410,0	0,0	1,05
	2	**19**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase tersedianya barang milik kantor**		**100,0**	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		
	2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	37,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

	2	**1 9**	**0 1**	**2. 08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tersedianya jasa penunjang pemerintah daerah**		**100, 0**	**1.631.807. 800,0**	**1.631.807. 800,0**	**25, 0**	**286.984. 000,0**	**25,0**	**336.044. 700,0**	**50,0**	**623.028. 700,0**	**50,0**	**38,1 8**	**50,0**	**623.028. 700,0**	**0,0**	**18,3 4**
	2	1 9	0 1	2. 08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0,0	19.135.000,0	19.135.000,0	3,0	2.500.000,0	3,0	5.000.000,0	6,0	7.500.000,0	0,0	39,20	6,0	7.500.000,0	0,0	39,20
	2	1 9	0 1	2. 08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,0	41.400.000,0	41.400.000,0	3,0	0,0	3,0	391.500,0	6,0	391.500,0	50,0	0,95	6,0	391.500,0	0,0	0,50
	2	1 9	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,0	1.571.272. 800,0	1.571.272. 800,0	3,0	284.484. 000,0	3,0	330.653. 200,0	6,0	615.137. 200,0	50,0	39,15	6,0	615.137. 200,0	0,0	18,63
	2	**1 9**	**0 1**	**2. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100, 0**	**389.355.5 50,0**	**389.355.5 50,0**	**11, 25**	**33.277.2 00,0**	**15,0**	**79.163.8 33,0**	**26,2 5**	**112.441. 033,0**	**26,2 5**	**28,8 8**	**26,2 5**	**112.441. 033,0**	**0,0**	**11,0 4**
	2	1 9	0 1	2. 09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,0	45.380.000,0	45.380.000,0	1,0	6.745.200,0	1,0	7.701.700,0	2,0	14.446.900,0	200,0	31,84	2,0	14.446.900,0	0,0	15,92
	2	1 9	0 1	2. 09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8,0	316.575.550,0	316.575.550,0	2,0	26.532.000,0	3,0	60.962.133,0	5,0	87.494.133,0	62,50	27,64	5,0	87.494.133,0	0,0	10,02
	2	1 9	0 1	2. 09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30,0	27.400.000,0	27.400.000,0	0,0	0,0	7,0	10.500.000,0	7,0	10.500.000,0	23,33	38,32	7,0	10.500.000,0	0,0	19,16
	2	**1 9**	**0 1**			**RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)**												**46,30**	**33,83**			**46,30**	**16,22**
	2	**1 9**	**0 1**			**PREDIKAT KINERJA**												**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**			**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**

	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	90,0	11.031.252.000,0	10.107.287.000,0	1,43	51.690.000,0	2,25	700.040.000,0	3,68	751.730.000,0	4,09	7,44	3,68	751.730.000,0	3,68	3,09
							Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	86,07			29,70		29,70		59,40		69,01		59,40		59,40		
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda yang terlaksana		3.600,0	10.563.728.000,0	9.779.763.000,0	320,0	43.540.000,0	0,0	619.040.000,0	320,0	662.580.000,0	8,89	6,78	320,0	662.580.000,0	8,89	3,14
	2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	1.500,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	900,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

	2	19	02	2.01	0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang	600,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Orang	600,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupatenkota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi DaerahRAD Tingkat kabupatenkota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Dokumen	0,0	158.400.000,0	158.400.000,0	0,0	13.200.000,0	0,0	19.800.000,0	0,0	33.000.000,0	0,0	20,83	0,0	33.000.000,0	0,0	20,83
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan	Orang	0,0	1.212.709.000,0	933.084.000,0	230,0	6.340.000,0	400,0	304.990.000,0	630,0	311.330.000,0	0,0	33,37	630,0	311.330.000,0	0,0	25,67

						Wirausaha pemula Tingkat Kabupatenkota	Pemuda															
	2	1 9	0 2	2. 01	00 13	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupatenkota	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kegiatan	0,0	4.843.609.000,0	4.740.169.000,0	0,0	0,0	0,0	156.000.000,0	0,0	156.000.000,0	0,0	3,29	0,0	156.000.000,0	0,0	3,22
	2	1 9	0 2	2. 01	00 14	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupatenkota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Orang	0,0	3.604.427.000,0	3.267.427.000,0	90,0	24.000.000,0	1.090,0	138.250.000,0	1.180,0	162.250.000,0	0,0	4,97	1.180,0	162.250.000,0	0,0	4,50
	2	1 9	0 2	2. 01	00 15	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupatenkota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang	0,0	744.583.000,0	680.683.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	**1 9**	**0 2**	**2. 02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah rincian kegiatan yang dilaksanakan**	**kegiatan**	**8,0**	**467.524.000,0**	**327.524.000,0**	**1,0**	**8.150.000,0**	**0,0**	**81.000.000,0**	**1,0**	**89.150.000,0**	**12,50**	**27,22**	**1,0**	**89.150.000,0**	**12,50**	**2,77**
	2	1 9	0 2	2. 02	00 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Kegiatan	6,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	1 9	0 2	2. 02	00 03	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupatenkota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	0,0	388.842.000,0	276.342.000,0	0,0	8.150.000,0	0,0	54.700.000,0	0,0	62.850.000,0	0,0	22,74	0,0	62.850.000,0	0,0	16,16

	2	19	02	2.02	0004	Koordinasi Sinkronisasi dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat KabupatenKota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Orang	0,0	78.682.000,0	51.182.000,0	0,0	0,0	0,0	26.300.000,0	0,0	26.300.000,0	0,0	51,39	0,0	26.300.000,0	0,0	33,43
	2	19	02			**RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)**												36,55	7,44			31,54	3,09
	2	19	02			**PREDIKAT KINERJA**												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH
	2	19	03			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	57,80	97.250.145.859,0	97.105.445.859,0	0,0	461.250.000,0	0,0	3.811.932.895,0	0,0	4.273.182.895,0	0,0	4,40	0,0	4.273.182.895,0	0,0	2,05
							Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	67,16			0,0		50,75		50,75		75,57		50,75		60,78	
							Peningkatan Prestasi Olahraga	Atlet Berprestasi	406,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
							Peningkatan Prestasi Olahraga	Cabor	37,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	19	03	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pembangunan prasarana olahraga		5,0	77.067.617.859,0	77.059.167.859,0	1,0	144.000.000,0	0,0	517.355.195,0	1,0	661.355.195,0	20,0	0,86	1,0	661.355.195,0	0,0	0,43
							Jumlah pengiriman atlet		2,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	19	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Kegiatan	1,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

	2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	5,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan pengadaan pemanfaatan pemeliharaan dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupatenkota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit	0,0	77.067.617.859,0	77.059.167.859,0	0,0	144.000.000,0	0,0	517.355.195,0	0,0	661.355.195,0	0,0	0,86	0,0	661.355.195,0	0,0	0,86
	2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kejuaraan yang terlaksana**	**Kegiatan**	**16,0**	**6.743.725.000,0**	**6.724.975.000,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2.338.423.700,0**	**2,0**	**2.338.423.700,0**	**12,50**	**34,77**	**2,0**	**2.338.423.700,0**	**0,0**	**14,12**
	2	19	03	2.02	0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	12,0	5.792.207.000,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	2,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Kegiatan	2,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupatenkota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Orang	0,0	951.518.000,0	932.768.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	

	2	**1 9**	**0 3**	**2. 04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Jumlah pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga**	**Lembaga / organisasi**	**3,0**	**2.207.800.000,0**	**2.175.800.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**56.250.000,0**	**0,0**	**56.250.000,0**	**0,0**	**2,59**	**0,0**	**56.250.000,0**	**0,0**	**0,46**
	2	1 9	0 3	2. 04	00 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	2,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	1 9	0 3	2. 04	00 03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Lembaga	3,0	2.207.800.000,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	**1 9**	**0 3**	**2. 05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga**	**Kegiatan**	**5,0**	**11.231.003.000,0**	**11.145.503.000,0**	**1,0**	**317.250.000,0**	**0,0**	**899.904.000,0**	**1,0**	**1.217.154.000,0**	**20,0**	**10,92**	**1,0**	**1.217.154.000,0**	**0,0**	**4,51**
	2	1 9	0 3	2. 05	00 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kegiatan	2,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	1 9	0 3	2. 05	00 02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kegiatan	2,0	2.997.861.380,0		1,0		0,0		1,0		50,0		1,0		0,0	
	2	1 9	0 3	2. 05	00 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit	7,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	1 9	0 3	2. 05	00 04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kegiatan	6,0	5.312.022.520,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
	2	1 9	0 3	2. 05	00 05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Kegiatan	1,0	1.273.728.000,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah nasional dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	0,0	1.647.391.000,0	1.638.391.000,0	0,0	0,0	0,0	466.865.000,0	0,0	466.865.000,0	0,0	28,50	0,0	466.865.000,0	0,0	28,34
	2	**19**	**03**			**RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)**												**18,89**	**4,40**			**15,19**	**2,05**
	2	**19**	**03**			**PREDIKAT KINERJA**												**SANGAT REN DAH**	**SANGAT REN DAH**			**SANGAT REN DAH**	**SANGAT REN DAH**
	2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Cakupan Pembinaan Pramuka** **Jumlah Prestasi Pramuka**	**%** **Orang**	**90,26** **90,0**	**1.000.000.000,0**	**1.000.000.000,0**	**0,0** **0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**		**0,0** **0,0**	**0,0**	**0,0** **0,0**	
	2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan**	**organisasi**	**1,0**	**1.000.000.000,0**	**1.000.000.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi	1,0	1.000.000.000,0	1.000.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
	2	**19**	**04**			**RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)**												**0,0**	**0,0**			**0,0**	**0,0**
	2	**19**	**04**			**PREDIKAT KINERJA**												**SANGAT REN DAH**	**SANGAT REN DAH**			**SANGAT REN DAH**	**SANGAT REN DAH**
						RATA-RATA CAPAIAN KINERJA OPD (%)												**20,31**	**7,36**				
						PREDIKAT KINERJA OPD												**SANGAT REN DAH**	**SANGAT REN DAH**				

	Berprestasi														
7	Jumlah Prestasi Olahraga			19 cabor	25 cabor	31 cabor	37 cabor	43	28	47	12	37 cabor			
8	Cakupan Pembinaan Pramuka			62,13% (530 binaan pramuka/853 gugus depan)	71,51%	80,89%	90,26%	99,64%			48,7% (415/853)	0%			
9	Jumlah Anggota Pramuka Berprestasi			60 orang (Pramuka Garuda)	70 orang	80	90	100			16	0			
10	Jumlah Prestasi Pramuka			1 prestasi (kwartir tergiat)	1 prestasi (kwartir tergiat)	1 prestasi (kwartir tergiat)	1 prestasi (kwartir tergiat)	1 prestasi (kwartir tergiat)		1 prestasi (kwartir tergiat)		1 prestasi (kwartir tergiat)			

1.2 Isu – Isu Penting PenyelenggaraanTugas dan Fungsi SKPD

Beberapa isu-isu strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu sebagai berikut :

Kepemudaan :

1. Maraknya tawuran pemuda/remaja dan pelaku begal usia muda
2. Kurangnya lapangan kerja dan keterampilan para pemuda usia 16 – 30 tahun
3. Kurangnya keterlibatan pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Adapun peran pemuda terbagi dalam 2 aspek yaitu sebagai berikut :

1. Peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
   - Arus materialisme dan hedonisme mengakibatkan redupnya nasionalisme para pemuda sehingga menurunkan rasa persaudaraan dan semakin tajamnya individualisme
   - Pada kondisi ini para pemuda harus mampu menyesuaikan peluang partisipasi politik yang makin terbuka di era reformasi sehingga dapat meminimalisir anarkisme dan sebagainya.
   - Pemuda harus siap menjadi pelaku ekonomi mandiri dengan meningkatkan etos kerja pemuda

2. Pengembangan pemuda dalam perspektif ekonomi
   - Dengan adanya kenaikan jumlah penduduk dan daya saing yang tinggi para pemuda dengan usia kerja harus menyeimbangkan dengan berpartisipasi langsung dalam roda ekonomi melalui berbagai sektor terutama Wirausaha Muda

Keolahragaan :

1. Rendahnya peran kelembagaan / organisasi olahraga serta belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar organsasi dalam mewujudkan prestasi olahraga
2. Rendahnya prestasi dan pemasyarakatan olahraga. Hal ini dikarenakan pembinaan dan pembibitan atlet berprestasi belum berjalan dengan baik dan berkelanjutan dan upaya untuk mensosialisasikan gerakan memasyarakatkan olahraga.
3. Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam pembinaan dan pembibitan atlet.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Makassar, Dinas Pemuda Olahraga Kota Makassar mengemban tugas pokok untuk menyusun rencana, membina, mengembangkan dan mengawasi kegiatan peningkatan kualitas sumber daya serta pemberdayaan kelembagaan pemuda dan keolahragaan. Hal yang menjadi tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga tersebut telah dilaksanakan dengan baikdari partisipasi dari elemen yang ada.

1.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD perubahan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen

1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan indikator yang mengacu pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga. Keberhasilan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja dapat dilihat pada Tabel 2 (Tabel. T-C.30 sesuai Permendagri 86 Tahun 2017) berikut ini:

perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat tiga hal yaitu:

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah dan
3. Rencana kerja,pendanaan dan prakiraan maju,

Selanjutnya ketiga hal tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah berdasarkan RKPD kota makassar yang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se Kota Makassar yang melaksanakan program dan kegiatan.

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah dokumen penganggaran dan laporan kinerja	12 dok	224,367,200.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah dokumen penganggaran dan laporan kinerja	12 dok	176,507,200.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		95,694,100.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		89,834,100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun		9,784,300.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun		6,984,300.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun		11,094,600.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun		8,294,600.00	

TABEL TC. 31

REVIUW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
DINAS Pemuda dan Olahraga											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Kota Makassar**	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	**13.341.421.280**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Makassar**	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90 %	**10.831.291.156**	
			Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %		
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %		

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD		38,493,800.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD		12,293,800.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		jumlah koordinasi danpenyusunan dokumen perubahan DPA SKPD		16,131,300.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		jumlah koordinasi danpenyusunan dokumen perubahan DPA SKPD		12,531,300.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		17,181,600.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		17,181,600.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% keg administrasi keuangan		6,519,385,380.00	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		% keg administrasi keuangan		5,854,254,956.00	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan		5,803,569,880.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan		5,015,319,456.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		jumlah pengelolaan adm pelaksana tugas ASN		495,240,000.00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		jumlah pengelolaan adm pelaksana tugas ASN		618,360,000.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		jumlah penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd yang dilaksanakan		216,000,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		jumlah penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd yang dilaksanakan		216,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Penyusunan laporan keuangan semesteran, laporan keuangan akhir tahun dan perhitungan penyusutan asset SKPD		4,575,500.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Penyusunan laporan keuangan semesteran, laporan keuangan akhir tahun dan perhitungan penyusutan asset SKPD		4,575,500.00	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		% kegiatan adm kepegawaian perangkat daerah yg terlaksana		240,714,000.00	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		% kegiatan adm kepegawaian perangkat daerah yg terlaksana		0.00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		53,214,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		10,520,500.00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		187,500,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		4,832,500.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		% keg administrasi umum yang dilaksanakan		240,714,000.00	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		% keg administrasi umum yang dilaksanakan		5,688,000.00	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		jumlah penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		53,214,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		jumlah penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		391,214,000.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		187,500,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		141,214,000.00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		jumlah penyedeaan peralatan rumah tangga		524,469,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		jumlah penyedeaan peralatan rumah tangga		250,000,000.00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah pengadaan cetak dan penggandaan		17,380,800.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		jumlah pengadaan cetak dan penggandaan		17,380,800.00	

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah bahan bacaan		115,994,600.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		jumlah bahan bacaan		115,994,600.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah		10,793,200.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah		10,793,200.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		59,155,000.00	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		% pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		59,155,000.00	
	Pengadaan Mebel		jumlah pengadaan meja dan kursi kerja /rapat		10,440,000.00	Pengadaan Mebel		jumlah pengadaan meja dan kursi kerja /rapat		10,440,000.00	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya		310,705,400.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya		310,705,400.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		1,799,043,800.00	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		% penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		1,799,043,800.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air,listrik dan internet ktr		36,424,200.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah jenis jasa komunikasi,sumber daya air,listrik dan internet ktr		36,424,200.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor		1,762,619,600.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor		1,762,619,600.00	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% pemeliharaan BMD yang dilaksanakan		566,391,200.00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		% pemeliharaan BMD yang dilaksanakan		566,391,200.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah penyedia jasa perizinan dan sertifikasi kendaraan dinas jabatan		52,900,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah penyedia jasa perizinan dan sertifikasi kendaraan dinas jabatan		52,900,000.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor		486,091,200.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor		486,091,200.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin ktr		27,400,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin ktr		27,400,000.00	

	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				**5,440,981,800.00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**				**11,233,889,100.00**	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda yang terlaksana		3,838,881,800.00	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**		Jumlah kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda yang terlaksana		8,686,761,900.00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		795,692,000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor		Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		1,621,772,600.00	

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		1,035,011,600.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		0.00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/ Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		149,740,700.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/ Kota		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		1,049,170,600.00	
	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan		Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda		467,250,300.00	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan		Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan		3,761,971,200.00	

	Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan			, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan			
	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota		0.00	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota		0.00	
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan		1,391,187,200.00	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan		2,253,847,500.00	

			dan Kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan					Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan			
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**jumlah kegiatan yang dilaksanakan**		1,865,653,100.00	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**		**jumlah kegiatan yang dilaksanakan**		1,865,653,100.00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha		Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha		0.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha		Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha		0.00	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		Jumlah Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		1,865,653,100.00	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota		Jumlah Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		1,865,653,100.00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING		**Cakupan pembinaan olahraga**		508,818,181,500.00	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA**		**Cakupan pembinaan olahraga**		108,431,979,500.00	

	KEOLAHRAGAAN					**SAING KEOLAHRAGAAN**					
			Cakupan pembinaan atlet muda					**Cakupan pembinaan atlet muda**			
			Jumlah Atlet Berprestasi					**Jumlah Atlet Berprestasi**			
			Jumlah prestasi olahraga					**Jumlah prestasi olahraga**			
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pembangunan prasarana olahraga, Jumlah pengiriman atlet		468,007,246,600.00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pembangunan prasarana olahraga, Jumlah pengiriman atlet		468,007,246,600.00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar		0.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar		0.00	

						Pendidikan Dasar					
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		188,264,000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		188,264,000.00	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kejuaraan yang terlaksana		467,818,982,600.00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah kejuaraan yang terlaksana		75,101,054,800.00	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota		7,729,519,000.00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		7,729,519,000.00	

	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		6,460,960,800.00	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		6,460,960,800.00	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		1,198,147,200.00	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		1,198,147,200.00	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan		70,411,000.00	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan		70,411,000.00	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		**Jumlah pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga**		3,162,150,000.00	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**		**Jumlah pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga**		3,162,150,000.00	

	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		897,200,000.00	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		897,200,000.00	
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota		2,200,000,000.00	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota		2,200,000,000.00	
	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi		Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan		64,950,000.00	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi		Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan		64,950,000.00	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		**Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi olahra**		11,977,015,900.00	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**		**Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi olahra**		11,977,015,900.00	

	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		Jumlah Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		3,568,825,000.00	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		Jumlah Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		3,568,825,000.00	
	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		Jumlah Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		4,132,383,700.00	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		Jumlah Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		4,132,383,700.00	
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		2,640,363,200.00	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		2,640,363,200.00	
	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		Jumlah Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		1,459,544,000.00	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		Jumlah Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		1,459,544,000.00	

	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		Jumlah Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat		175,900,000.00	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		Jumlah Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat		175,900,000.00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				**3,000,000,000.00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**				**3,000,000,000.00**	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan		Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan		3,000,000,000.00	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan		Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan		3,000,000,000.00	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan dalam Dokumen Renja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar Tahun 2025 berdasarkan hasil input di aplikasi SIPD RI dan adalah sebagai berikut; ***terlampir sipd 2025,***

Beberapa kegiatan dan subkegiatan mengalami perubahan atau pergeseran karena rasionalisasi anggaran tanpa merubah target dan indikator program, berikut tabel sub kegiatan yang mengalami perubahan :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	8	9	10	12	13	14	17	18	19
						Dinas Pemuda dan Olahraga				233.564.400.000,00	67.407.562.000,00					45.704.509.000,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				233.564.400.000,00	67.407.562.000,00					45.704.509.000,00
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				233.564.400.000,00	67.407.562.000,00					45.704.509.000,00
1	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 90 % %	90 100 % %	9.637.469.900,00	11.265.584.307,00					11.133.220.000,00
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran dan laporan kinerja	8 dok	8 dok	164.793.000,00	147.495.000,00			Terkelolanya dengan baik dokumen perangkat daerah		815.600.000,00
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	81.396.000,00	48.776.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			550.000.000,00

	2	19	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	19.954.500,00	8.271.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19.300.000,00
	2	19	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.057.500,00	7.847.500,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19.500.000,00
	2	19	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.353.000,00	7.298.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19.500.000,00
	2	19	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.252.000,00	6.702.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19.500.000,00
	2	19	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	33.780.000,00	8.580.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			136.800.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 1	000 9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
							Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1 Data	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.000.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 1	001 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50.000.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	6.743.227.270,00	8.095.907.189,00			Terkelolanya dengan baik dokumen perangkat daerah		6.423.730.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	6.051.667.270,00	7.325.479.530,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.500.000.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 2	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										

							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	367.560.000,00	485.700.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			665.880.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 2	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	324.000.000,00	234.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			180.000.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 2	000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 2	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8.350.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 2	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19.500.000,00
	2	19	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20.000.000,00
	2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi umum barang milik daerah SKPD	100 %	100 %	13.221.000,00	10.185.000,00			ASN, Dokumen, sarana dan prasarana		58.500.000,00
	2	19	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	241.000,00	241.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19.500.000,00
	2	19	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.585.000,00	2.294.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19.500.000,00
	2	19	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.395.000,00	2.400.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19.500.000,00
	2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi kepegawaian	100 %	100 %	125.000.000,00	101.000.000,00			Persentase ASN perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas, Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		452.500.000,00
	2	19	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			72.500.000,00
	2	19	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										

							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang	125.000.000,00	61.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			380.000.000,00
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan dan kelengkapan kantor lainnya	100 %	100 %	720.438.080,00	970.693.680,00			Persentase ASN perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas, Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		1.137.890.000,00
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000,00
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	148.010.080,00	597.920.080,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			450.000.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 6	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.007.000,00	15.601.600,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25.000.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	29.167.500,00	15.625.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	44.333.500,00	29.174.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			42.250.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 6	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.920.000,00	7.920.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.640.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 6	000 7	Penyediaan Bahan/Material										

							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15.000.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 6	000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15.000.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	479.000.000,00	469.000.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500.000.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00	0,00			-		1.350.000.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 7	000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	0,00	0,00	-	-			200.000.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 7	000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250.000.000,00
	2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300.000.000,00
	2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300.000.000,00
	2	19	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200.000.000,00
	2	19	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100.000.000,00

	2	1 9	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.496.791.000,0 0	1.631.807.800, 00			Persentase ASN perangkat Daerah yang mendapat peningkata n kapasitas, Persentase ketersedua an laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		728.000.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 8	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	34.135.000,00	19.135.000,00	Kota Makassar , Ujung Pandang, Bulogadi ng	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			25.000.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	44.256.000,00	41.400.000,00	Kota Makassar , Ujung Pandang, Bulogadi ng	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			3.000.000,00

	2	1 9	0 1	2.0 8	000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	Kota Makassar , Ujung Pandang, Bulogadi ng	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			200.000.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.418.400.000,0 0	1.575.713.547, 00	Kota Makassar , Ujung Pandang, Bulogadi ng	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			500.000.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	373.999.550,00	389.355.550,00			Persentase ASN perangkat Daerah yang mendapat peningkata n kapasitas, Persentase ketersedua an laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		167.000.000,00

	2	1 9	0 1	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	45.380.000,00	41.880.000,00	Kota Makassar , Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60.000.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	301.219.550,00	235.375.550,00	Kota Makassar , Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15.000.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 9	000 5	Pemeliharaan Mebel										
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kota Makassar , Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	27.400.000,00	18.250.000,00	Kota Makassar , Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 9	000 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kota Makassar , Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.000.000,00

	2	1 9	0 1	2.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kota Makassar , Ujung Pandang, Bulogadi ng	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			25.000.000,00
	2	1 9	0 1	2.0 9	001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kota Makassar , Ujung Pandang, Bulogadi ng	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			5.000.000,00
2	2	1 9	0 2			PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	86.07 90 % %	86.07 90 % %	4.481.430.000,0 0	9.149.463.000, 00					8.959.670.000, 00
	2	1 9	0 2	2.0 1		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kot a, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	Jumlah kegiatan Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda yang terlaksana	9 keg	9 keg	4.127.836.000,0 0	10.563.728.000 ,00			Pemuda, OKP		7.159.670.000, 00

						Kabupaten/Kota										
	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota											
							Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	158.400.000,00	158.400.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			109.670.000,00
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota										
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	500 Orang	500 Orang	1.471.064.000,00	955.441.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.500.000.000,00
	2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda										
							Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.300.000.000,00

												Bulogading				
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota										
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.509.861.000,00	3.179.356.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.600.000.000,00
	2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota										
							Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	150 Orang	150 Orang	745.768.000,00	3.300.508.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.500.000.000,00
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota										
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	150 Orang	150 Orang	242.743.000,00	173.323.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.000.000.000,00
	2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota										
							Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000,00

												Pandang, Bulogading				
	2	1 9	0 2	2.0 2		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	353.594.000,00	467.524.000,00			Pemuda, OKP		1.800.000.000,00
	2	1 9	0 2	2.0 2	000 3	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota										
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	269.563.000,00	1.331.253.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			600.000.000,00
	2	1 9	0 2	2.0 2	000 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota										
							Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	150 Orang	150 Orang	84.031.000,00	51.182.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.200.000.000,00

3	2	1 9	0 3			PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	Cakupan Pembinaan Olahraga Cakupan Pembinaan Atlet Muda Peningkatan Prestasi Olahraga	406 atlet berprestasi 37 cabang olahraga 57.8 67.16 Atlet Cabang Olahraga % %	57.8 67.16 406 atlet berprestasi 37 cabang olahraga % % Atlet Cabang Olahraga	218.445.500.10 0,00	44.934.883.000 ,00					24.411.619.000 ,00
	2	1 9	0 3	2.0 1		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah	5 cabang olahraga	5 cabang olahraga	205.123.611.60 0,00	77.067.617.859 ,00			Cakupan pembinaan atlet muda dan cakupan pembinaan olahraga		3.400.000.000, 00
	2	1 9	0 3	2.0 1	000 4	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota										
							Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kota Makassar , Ujung Pandang, Bulogadi ng	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			100.000.000,00
	2	1 9	0 3	2.0 1	000 5	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota										
							Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	10 Unit	10 Unit	205.123.611.60 0,00	4.296.310.000, 00	Kota Makassar , Ujung Pandang, Bulogadi ng	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			3.000.000.000, 00
	2	1 9	0 3	2.0 1	000 6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar										

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300.000.000,00
	2	1 9	0 3	2.0 2		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan yang terlaksana	11 kegiatan	11 kegiatan	6.510.437.000,00	6.743.725.000,00			Cakupan pembinaan atlet muda dan cakupan pembinaan olahraga		11.000.000.000,00
	2	1 9	0 3	2.0 2	000 4	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota										
							Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	5 Kegiatan	6.174.357.000,00	6.330.581.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000.000,00
	2	1 9	0 3	2.0 2	000 5	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota										
							Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	7 Kegiatan	7 Kegiatan	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500.000.000,00
	2	1 9	0 3	2.0 2	000 6	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga										
							Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	50 Orang	50 Orang	336.080.000,00	932.768.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500.000.000,00

	2	1 9	0 3	2.0 3		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	0,00	0,00			Atlet, cabang olahraga		961.000.000,00
	2	1 9	0 3	2.0 3	000 6	Seleksi Atlet Daerah											
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	Kota Makassar , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar , Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.000.000,00
	2	1 9	0 3	2.0 3	000 7	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga											
							Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	Kota Makassar , Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500.000.000,00
	2	1 9	0 3	2.0 3	000 8	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)											
							Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	3 Pelatda	3 Pelatda	0,00	0,00	Kota Makassar , Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00
	2	1 9	0 3	2.0 3	000 9	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota											

							Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350.000.000,00
	2	19	03	2.03	0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota										
							Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100.000.000,00
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	50 organisasi	50 organisasi	4.348.800.000,00	2.207.800.000,00			Atlet, cabang olahraga		5.000.000.000,00
	2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota										
							Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait										
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	4.348.800.000,00	22.175.800.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.000.000.000,00

	2	1 9	0 3	2.0 5		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	5 kegiatan	5 kegiatan	2.462.651.500,0 0	11.231.003.000 ,00			Atlet, cabang olahraga		4.050.619.000, 00
	2	1 9	0 3	2.0 5	000 6	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi										
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	1 Laporan	895.926.500,00	3.066.861.380, 00	Kota Makassar , Ujung Pandang, Bulogadi ng	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			361.619.000,00
	2	1 9	0 3	2.0 5	000 7	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan										
							Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Laporan	1 Laporan	363.276.000,00	5.003.522.620, 00	Kota Makassar , Ujung Pandang, Bulogadi ng	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			1.689.000.000, 00
	2	1 9	0 3	2.0 5	000 8	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat										
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	396.878.000,00	1.590.649.000, 00	Kota Makassar , Ujung Pandang, Bulogadi ng	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			350.000.000,00
	2	1 9	0 3	2.0 5	000 9	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan										
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	Kota Makassar , Ujung Pandang, Bulogadi ng	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			1.000.000.000, 00
	2	1 9	0 3	2.0 5	001 0	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional										

							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	1 Lembaga	806.571.000,00	1.538.391.000,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			650.000.000,00
4	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pembinaan Pramuka Jumlah Prestasi Pramuka	90,26 (770 binaan pramuka/853 gugus depan) 90 (Pramuka Garuda) 1 prestasi (kwartir tergiat) % Orang	90,26 (770 binaan pramuka/853 gugus depan) 90 (Pramuka Garuda) 1 prestasi (kwartir tergiat) % Orang	1.000.000.000,00	2.057.631.693,00					1.200.000.000,00
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	2 keg	2 keg	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			cakupan pembinaan pramuka		1.200.000.000,00
	2	19	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik										
							Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah										
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100.000.000,00
	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah										

							Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100.000.000,00
	2	1 9	0 4	2.0 1	000 4	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
	2	1 9	0 4	2.0 1	000 5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah										
							Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
	2	1 9	0 4	2.0 1	000 6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah										
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
	2	1 9	0 4	2.0 1	000 7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah										
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
	2	1 9	0 4	2.0 1	000 8	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan										

							Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	1 Organisasi	1.000.000.000,00	2.057.631.693,00	Kota Makassar, Ujung Pandang, Bulogading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.000.000.000,00
							JUMLAH			233.564.400.000,00	67.407.562.000,00					45.704.509.000,00

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen penting yang harus dilaksanakan oleh OPD guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mengingat hal tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1 Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini memuat rencana program dan kegiatan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota Makassar
2 Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada pendekatan baru dalam sistem penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana anggaran program dan kegiatan dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat terrealisasi sesuai dengan kebutuhan mengingat jumlahnya masih mengacu pada jumlah pagu indikatif. Namun demikian jumlah tersebut belum sesuai dengan kebutuhan riil untuk tahun 2025, sehingga diharapkan adanya penambahan anggaran yang memadai dari APBD Kota Makassar khususnya terkait peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas. Harapan kami, semoga dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat dalam memberikan konstribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini disusun untuk dapat dijadikan acuan bagi segenap aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga dan untuk diketahui oleh para stakeholder yang berkepentingan.

Makassar, 12 Agustus 2025

Plt. KEPALA DINAS,

FADLI WELLANG, A.P, M.AP
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19750807 199412 1 001

PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188 4 45/TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 2252/188 4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188 4 45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dipandang perlu untuk diubah,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188 4 45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025,

Mengingat
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, dengan menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

KEDUA Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana di maksud Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah

KETIGA Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan.:
1 Wakil Wali Kota Makassar,
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar,
3. Inspektur Daerah kota Makassar,
4 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar,
5 Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6 Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4 45/TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188 4 45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

No	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
6	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
7.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
9	Dinas Sosial Kota Makassar
10	Dinas ketenagakerjaan Kota Makassar
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
12.	Dinas ketahanan Pangan Kota Makassar
13.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
14	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Makassar
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
22	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
23	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
24.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
25.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
26.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
27.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
28	Sekretariat Daerah Kota Makassar

31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
32	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
34	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
35.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
36.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
37.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
38.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
39	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
40	Kecamatan Manggala Kota Makassar
41	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
43.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
44	Kecamatan Tallo Kota Makassar
45.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
46.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
47.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
58	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
49.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
50.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar
51.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

WALIKOTA MAKASSAR,

MUSNAFRI ARIFUDDIN

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kesempatan kepada Kami untuk dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2025 Penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah suatu keharusan bagi setiap Perangkat Daerah dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Daerah Kota Makassar yang dituangkan dalam bentuk Rencana Program dan Kegiatan Perubahan yang akan dilakukan oleh OPD pada satu tahun kedepan.Dalam penyelesaian Rencana Kerja Perubahan ini telah disesuaikan dengan alur dan mekanisme yang telah ditetapkan sebagai panduan penulisan dan telah disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Makassar. Semoga rencana kerja perubahan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami ditahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Makassar, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Makassar, 27 Juli 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Makassar

drg. ITA ISDIANA ANWAR, M.Kes
Pangkat : Pembina, TK I
NIP. 196808292006042006

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul..... .. i
Kata Pengantar.....ii
Daftar Isi.....iii

BAB I PENDAHULUAN..... 4
1.1 Latar Belakang..... 4
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 9
1.4 Sistematika Penulisan 10
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 .
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 13
2.2 Analisis Pelayanan SKPD..... 27
2.3 Isu-Isu Penting..... 35
2.4 Review Rancangan Awal..... 38
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 72
3.1 Perubahan pagu anggaran..... 72
3.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah 77
BAB IV PENUTUP..... 106

BAB
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2025 merupakan dokumen rencana pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar periode Tahun 2025 yang penyusunannya masih berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika yang sudah ditentukan ,baik tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

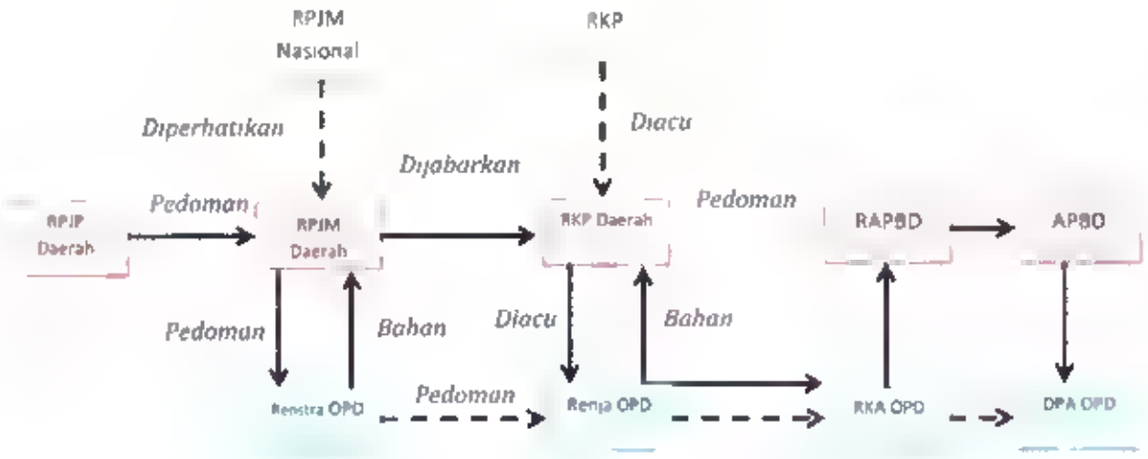
1. Perkembangan kebutuhan organisasi.
2. Pergeseran kegiatan, penambahan dan pengurangan PAGU anggaran kegiatan.
3. Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Disamping itu, dokumen perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2025 ini disusun untuk menjadi pedoman

penyusunan Perubahan Rencana Kerja & Anggaran (P-RKA) OPD yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Makassar.

Keterkairan Renja dengan Dokumen Lainnya dilihat dari bagan berikut ini :

Gambar 1.1
Keterkaitan dokumen Renja dengan dokumen perencanaan lainnya



Sumber data : Lampiran permendagri 86 Tahun 2017

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukukm yang dijadikakn acuan dalam penyususnan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;(Lembaran Negaran Tahun 2004 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
9. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dengan pemserintah deaerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelengaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604).
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
20. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021).
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199).
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206).
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887).
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56)
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446)
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).
27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2022).
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4 dan Tambahan dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 271)
31. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
32. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangka Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016).
33. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2019)
34. Peraturan Daerah Kota Makasssar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5).
35. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6) Ditetapkan Tanggal 28 Desember 2023.
36. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) ((Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 2);
37. Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 67)
38. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26).

39. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 30 Tahun 2025)

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kota Makassar 2025-2030 melalui perencanaan kinerja tahunan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2025 adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahun yang oprasional :

1) Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar untuk memastikan pencapaian target tahunan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dan RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2030
2) Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan laporan kinerja,

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar agar substansi pada bab-

dan Perlindungan Anak Kota Makassar agar substansi pada bab-bab berikut dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat sebagai berikut :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan dokumen RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan daerah lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat

daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenan

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2025.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan triwulan II tahun 2025 mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target

perundang-undangan yang terkaitan dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berisikan uraian mengenai :

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian Program nasional/ Internasional,
4) Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025. Berisikan uraian mengenai :

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2025 (TRIWULAN II)

2.1. Evaluasi pelaksanaan renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggran 2025 (Triwulan II).

Secara garis besar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025, Mendapatkan alokasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 18.721.283.227 227 adapun target kinerja di Tahun 2025 adalah 100% dengan target kinerja di triwulan pertama sebesar 25% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.535.639.419 dan capaian kinerja di triwulan kedua 33,30% dan capaian realisasi keuangan sebesar 33,14% masing–masing program

Berdasarkan evaluasi kinerja laporan pelaksanaan APBD sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2025 maka perbandingan antara target kinerja fisik dan keuangan dengan realisasi fisik dan keuangan yang mana pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 7 program (1 program penunjang, 6 program wajib), 21 kegiatan dan 48 sub kegiatan. Adapun rincian realisasi anggaran dan realisasi kinerja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota.

Dalam mendukung pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota beserta kegiatannya maka dengan ini akan dijelaskan beberapa hasil evaluasi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota. Target kinerja pada triwulan pertama adalah 25 % yang mana pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 11.430.685.035 dengan realisasi keuangan sebesar 1.495.321.698 dengan capaian realisasi fisik sebesar 13,65% dan capaian realisasi keuangan sebesar 13,08%.

Dalam program penunjang urusan pemerintah daerah yang mempunyai 3 indikator kinerja yaitu :

1. Persentase ASN perangkat Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas dengan target 90% dengan pagu anggaran sebesar Rp 250.500.000 dengan realisasi keuangan Rp 214.476.000 capaian kinerja 45% dan realisasi capaian keuangan 40%
2. Persentase Ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah dengan target 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp 9.528.648.035 dengan capaian keuangan sebesar 2.829.162.383 dengan capaian keuangan sebesar 32,44% dan capaian kinerja sebesar 60,87%
3. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dengan target 90% dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.651.537.000 untuk realisasi keuangan ditriwulan pertama sebesar 57.243.000 dengan capaian kinerja sebesar 3,47% dan caaian keuangan sebesar 3,47%.

Dalam program penunjang urusan pemerintah daerah di Tahun 2025 ini dalam pencapaian kinerja dan realisasi keuangan untuk triwulan pertama belum dapat mencapai target dikarenakan adanya kendala-kendala dalam urusan administrasi, dan kendala dalam hal pengadaan barang dan jasa yang mengikuti alur dan menyesuaikan sesuai dengan aturan yang ada.

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indicator Persentase anggaran responsive gender pada belanja langsung APBD target tahun 2025 sebesar 80 % , untuk alokasi anggaran pokok sebesar Rp 756.255.000,- dan realisasi realisasi pada triwulan pertama sebesar Rp 242.200.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 45,79% dan capaian kinerja sebesar 50,09%. Program ini diampuh 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan Adapun rinciannya sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
- Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan KabKota

Faktor Pendukung :

- Dalam kegiatan Program Pengarusustamaan gender dan pemberdayaan perempuan kegiatannya berada di alur kas pada triwulan pertama dan metode dalam pengadaan barang dan jasa masih menggunakan metade yang lama sehingga kegiatan yang mendukung program pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan bisa berjalan sesuai alur kas yang telah ditentukan.
- Komitmen pimpinan dalam pelasanaan kegiatan.

Rencana Tindak Lanjut :

- Melakukan evaluasi tindak lanjut untuk pencapaian hasil yang maksimal
- Revisi program kegiatan yang terkait program prioritas Walikota Makassar

3. Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan dengan indicator Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPPO per 100.000 Penduduk perempuan dengan target 79,56% untuk pencapaian target indikator kinerja Program Perlindungan Perempuan di Tahun 2025 dengan pagu anggaran Rp 2.125.987.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 640.780.500 dengan capaian kinerja sebesar 32,34% dan capaian realisasi keuangan sebesar 30,14%.

Program Perlindungan Perempuan diampuh 2 Kegiatan, dan 3 Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut :

a. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota:
   - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
   - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Dalam Program Perlindungan Perempuan yang mana di triwulan pertama ini indicator kinerjanya belum mencapai target dikarenakan untuk alur kas di program Perlindungan Perempuan untuk triwulan pertama hanya untuk pembayaran honor operasional dari Shalter warga yang dibayarkan pada bulan maret untuk kegiatan lain alur kas berada di triwulan kedua.

Faktor Penghambat :

1. Masih minimnya kegiatan Program Bidang Perlindungan Perempuan dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan rutin yang didahulukan di triwulan pertama
2. Masih minimnya sarana dan prasarana pengadministrasian dalam mendukung percepatan realisasi program dan kegiatan .

Faktor Pendukung :

1. Telah tersusunya perencanaan Bidang Perlindungan Perempuan sesuai dengan alur kas yang ditentukan
2. Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
3. Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Tindak Lanjut :

1. Percepatan program dan kegiatan yang menyesuaikan alur kasnya
2. Evaluasi dan monitoring pada setiap pelaksanaan kegiatan
3. Peningkatan kapasitas SDM dalam proses Perencanaan dan Penatausaha keuangan.

4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan indikatro Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mendapatkkan pemberdayaan Pencapaian Target Indikator Kinerja Program Peningkatan Kualitas Keluarga di Tahun 2025 dengan anggaran **Rp 602.535.000** dan realisasi di triwulan pertama sebesar **Rp 176.772.500** dengan pencapaian kinerja sebesar 38,15 % dan capaian realisasi keuangan sebesar 36,15% dalam program peningkatan kualitas keluarga yang mana kinerja dari program ini adalah tentang layanan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang mana layanan ini dapat meningkatkan kualitas keluarga dan memberikan motivasi atau dukungan apabila ada persoalan-persoalan dalam keluarga.

Dalam mendukung Program Peningkatan Kualitas Keluarga diampuh 3 Program dan 5 sub kegiatan antara lain sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   - Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
   - Pelaksanaan Kegiatan, Informaso dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota
b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Peningkatan kapasitas sumber daya pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualiats keluarga tingkat daerah kabupaten/kota

- Penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga Tingkat daerah kabupaten/kota

b. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Faktor Penghambat :

1) Kegiatan Program Peningkatan kualitas keluarga berada di triwulan ke dua
2) Adanya perubahan system aplikasi di e katalog dari versi 5 ke versi 6

Tindak Lanjut :

1) Mempercepat proses pekerjaan yang dalam system aplikasi e katalog versi 6
2) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa

5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program Pengelolaan Sistim Data Gender dan Anak dengan didukung satu kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data ditingkat Daerah Kab/Kota dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.
2) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota.

Pencapaian Target Indikator Kinerja Program Pengelolaan Sistem Data Gender dengan target kinerja di triwulan pertama Tahun 2025 yang mana pagu anggarannya sebesar Rp 77.850.000 untuk realisasi kinerja dan keuangan pada Program Pengelolaan system data gender dan anak pada triwulan pertama ini belum terrealisasi dikarenakan kegiatannya akan dilaksanakan pada triwulan ke tiga.

6. Program Pemenuhan Hak Anak

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) terdiri 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1) Advokasi Kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada Lembaga pemerintah , non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/kota
2) Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota
3) Koordinasi dan singkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab/kota Kegiatan Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota.
4) Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia layanan, peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kab/Kota.
5) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup.

Pencapaian Target Indikator Kinerja Program Pemenuhan Hak Anak di triwulan pertama dengan pagu anggaran sebesar Rp 933. 259.000 dan realisasi keuangan dan fisik untuk Program Pemenuhan Hak Anak di triwulan kedua sebesar Rp 186.165.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 29,49% realisasi fisik sebesar 32,64%

Faktor Penghambat :

1) Kegiatan Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak berada di triwulan ke dua
2) Adanya perubahan system aplikasi di e katalog dari versi 5 ke versi 6

Tindak Lanjut :

1) Mempercepat proses pekerjaan yang dalam system aplikasi e katalog versi 6
2) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa

7. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan antara lain :

1) Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan program/kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak
2) Koordinasi Pelaksanaan Layanan (Anak Memerlukan Perlindungan Khusus) AMPK
3) Peningkatan kapasitas SDM Lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
4) Penyediaan bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota

Pencapaian Target Indikator Kinerja Program Perlindungan Khusus Anak di Tahun 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.407.722.192 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 908.195.840 dengan capaian kinerja 49,06% dan capaian keuangan 39,99 % Adapun untuk kinerja program perlindungan khusus anak terkait dengan layanan pencegahan dan penanganan korban kekerasan pada anak.

Faktor Penghambat :

1) Kegiatan Program Perlindungan Khusus anak berada di triwulan ke dua
2) Adanya perubahan system aplikasi di e katalog dari versi 5 ke versi 6

Tindak Lanjut :

1) Mempercepat proses pekerjaan yang dalam system aplikasi e katalog versi 6
2) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa

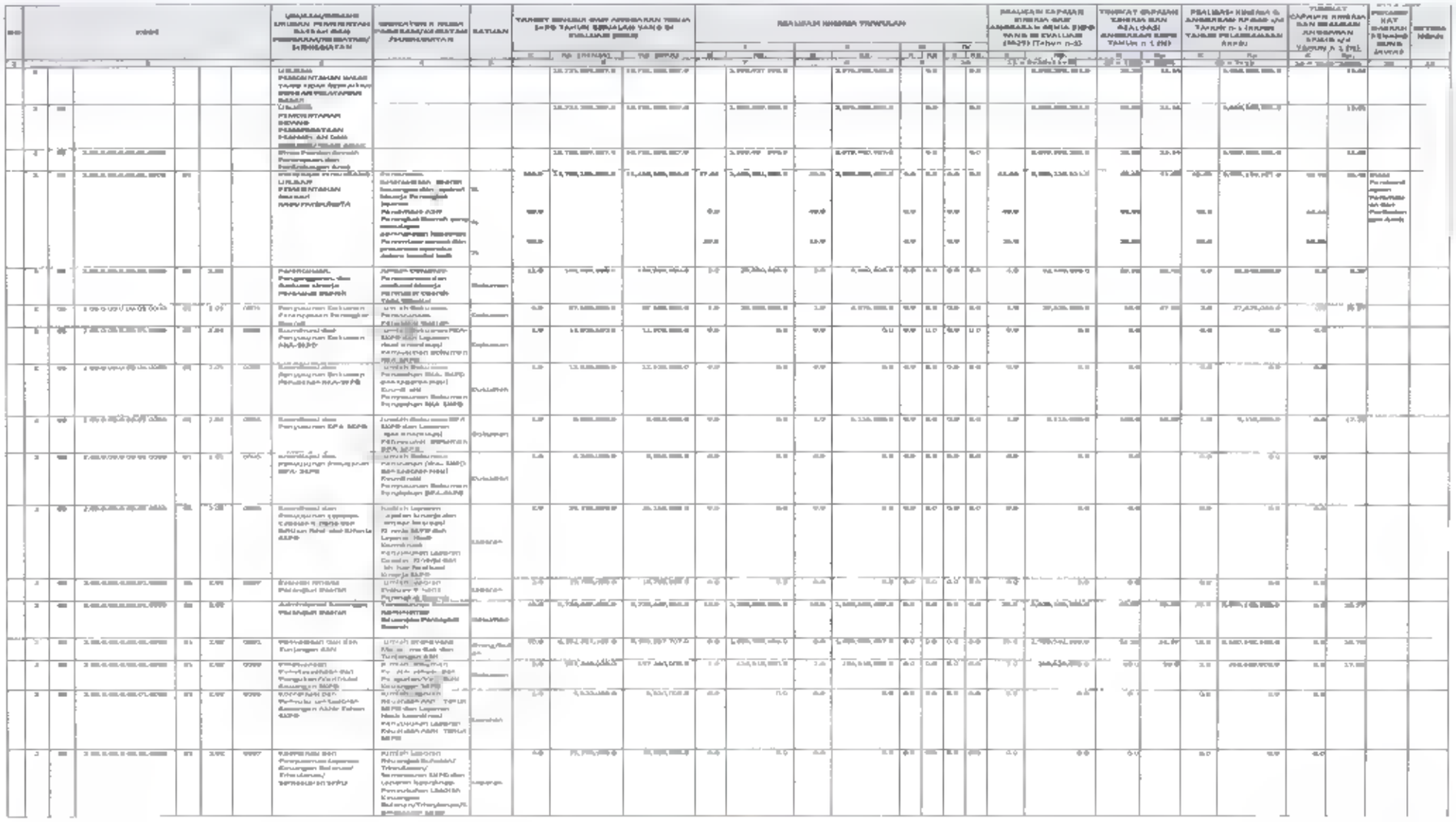
Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2025 sebagaimana di sajikan dalam Tabel E 81 Permandegri 86 Tahun 2017 dibawah ini :

KOTA MAKASSAR

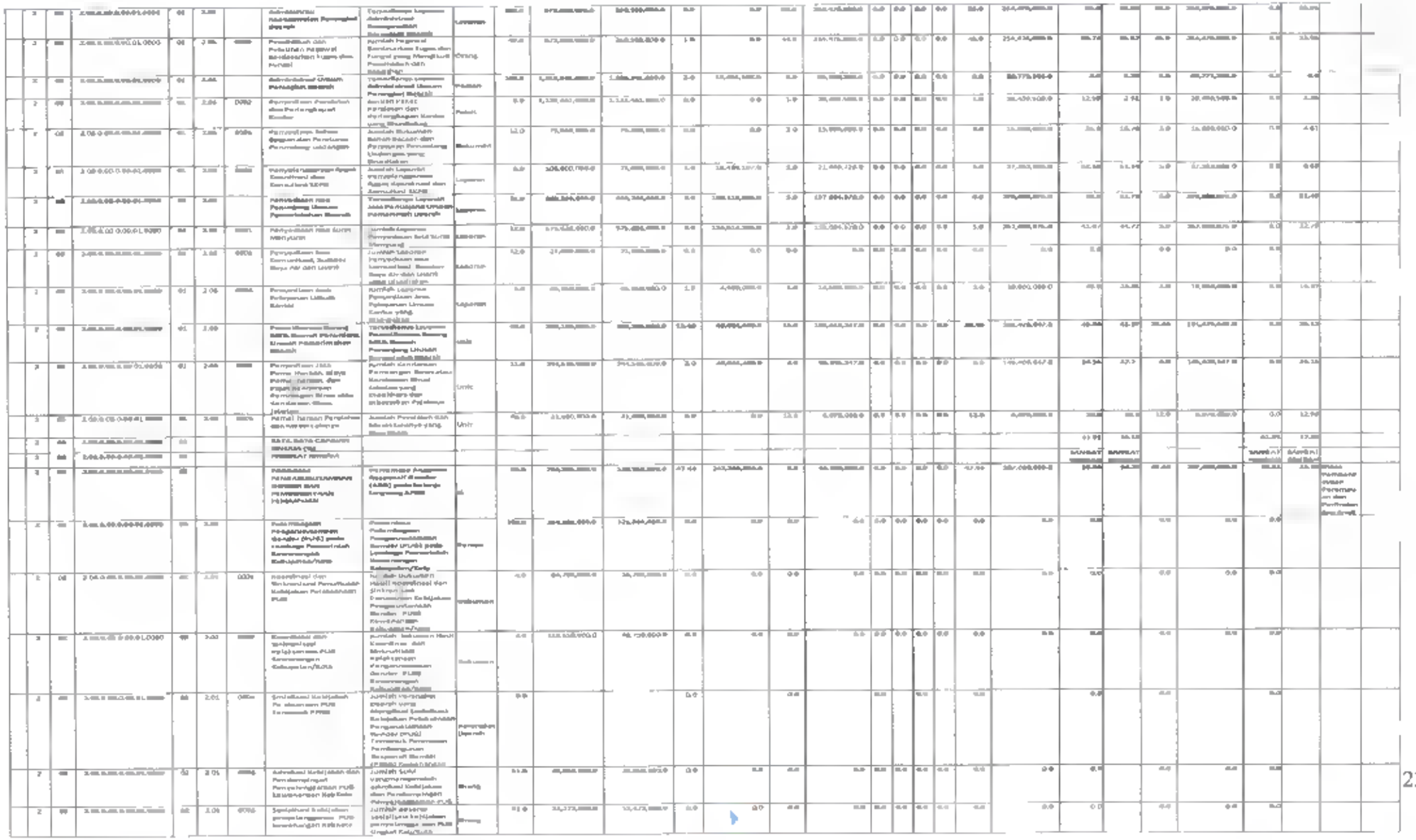
EVALUASI HASIL KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA MAKASSAR

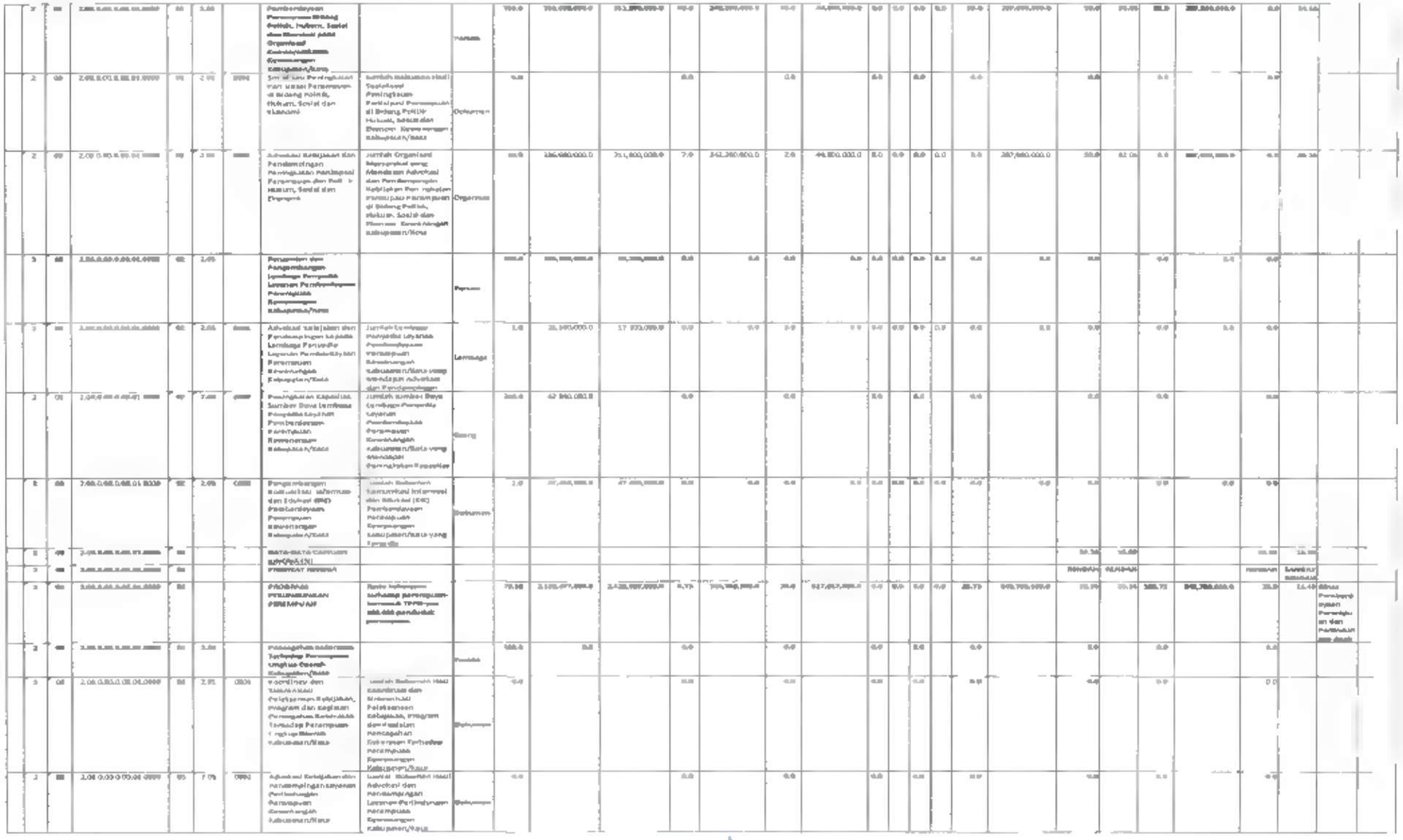
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2025



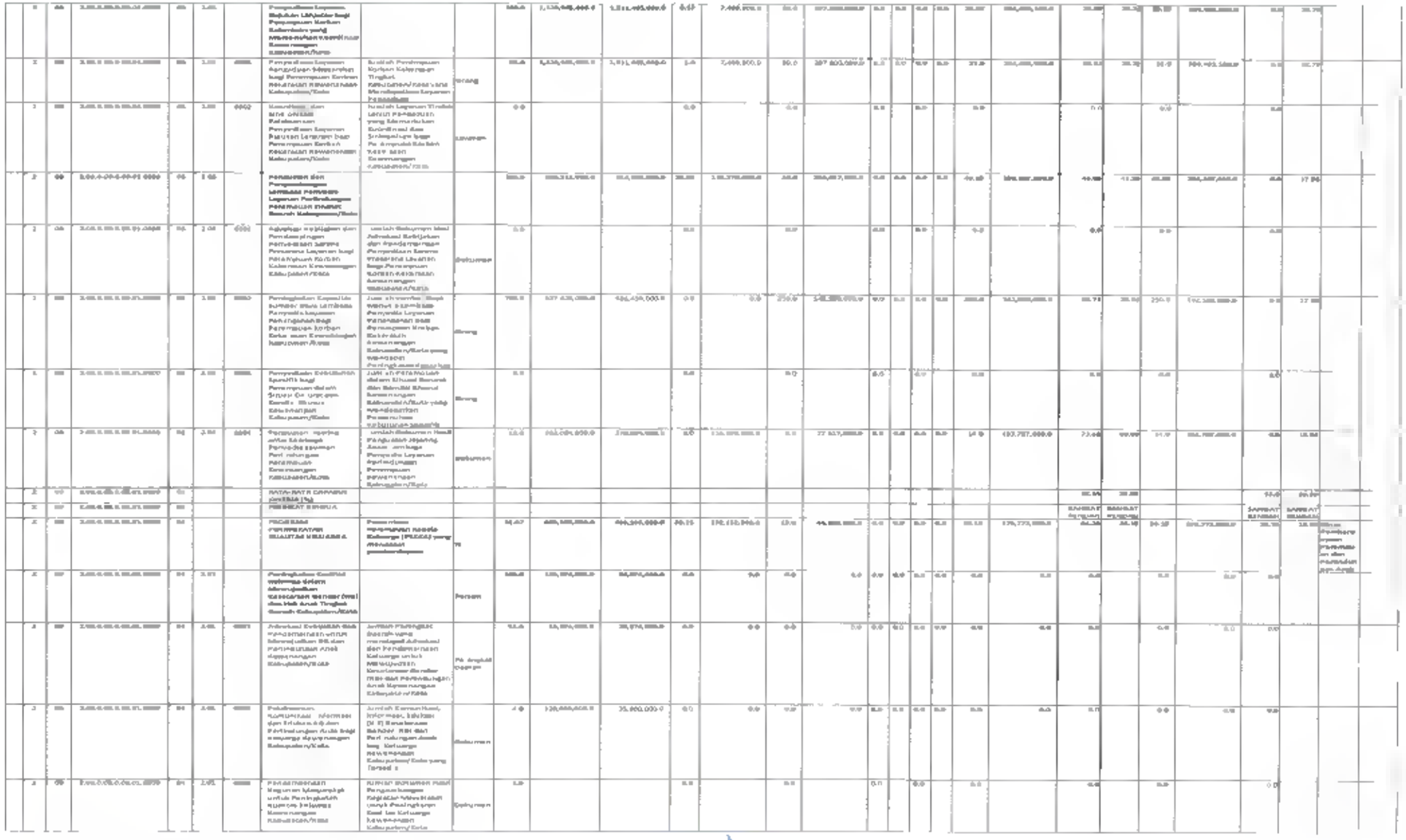
KOTA MAKASSAR



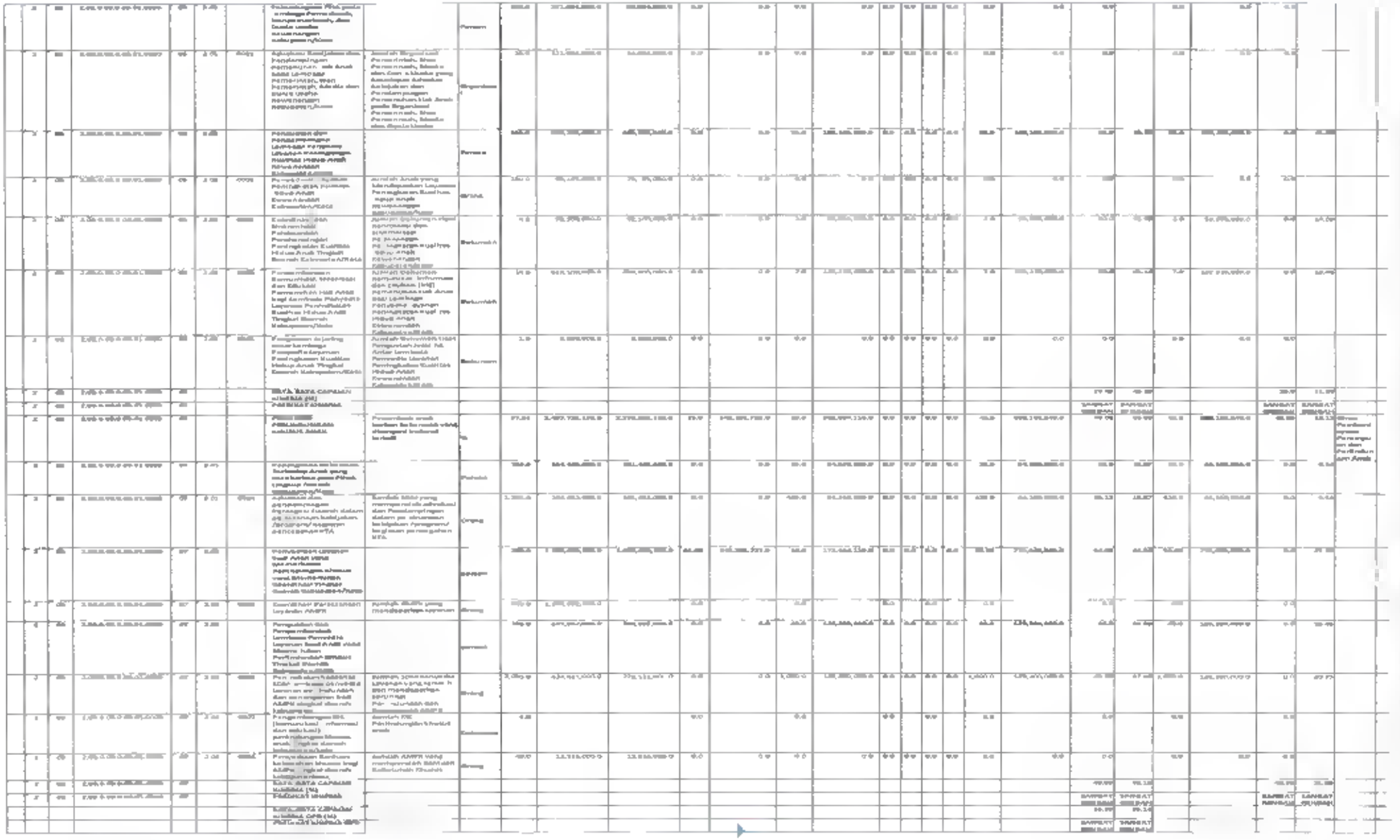
KOTA MAKASSAR



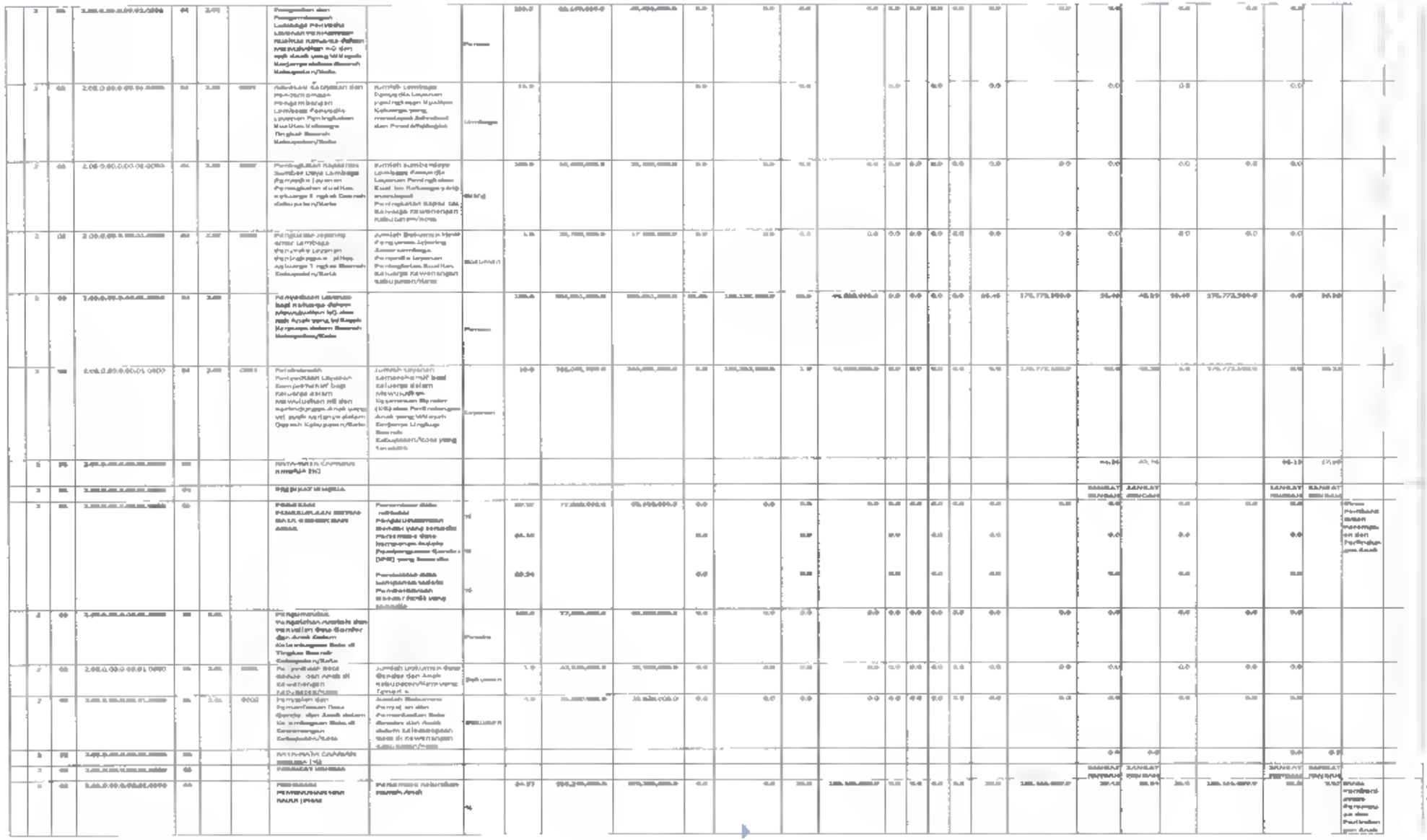
KOTA MAKASSAR



KOTA MAKASSAR



KOTA MAKASSAR



2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar berdasarkan capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing adalah :

1. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator presentase data komponen indeks pembangunan gender yang tersedia, dan presentase data komponen indeks pemberdayaan gender yang tersedia.
2. Meningkatkan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dengan indikator presentase perempuan kepala keluarga yang mendapat pemberdayaan.
3. Meningkatkan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dengan indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk termasuk TPPO per 100.000 Penduduk Perempuan.
4. Meningkatkan ketersediaan data dan Informasi gender dan anak dengan indikator presentase ketersediaan data gender dan anak
5. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak dengan Indikator presentase Kelurahan Ramah Anak.

KOTA MAKASSAR

Tabel TC -30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ke-					Realisasi Capaian Kinerja ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun					Proyeksi
					2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	2025
1	Presentase data komponen indeks pembangunan gender (IPG) yang terpenuhi		94,55%		94,51%	94,53%	94,55%	95%		94,44%	94,52%	94,65%			99,92%	99,98%	100,10%		95%
2	Presentase data komponen indeks pemberdayaan gender (IDG) yang terpenuhi		83,94%		79,02%	83,02%	83,94%	83,96%		6,59%	78,15%	78,13%			96,92%	94,12%	93,06%		83,96%
3	Presentase partisipasi		64,09%		62,85%	63,48%	63,79%	64,09%		65,77%	68,76%	67,58%	68,84%		104,65%	108,32%	107,79%	107,41	95%

KOTA MAKASSAR

	perempuan dilembaga pemerintah																%	
4	Presentase Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR		36 %		24%	28%	31%	33%		24%	26%	26%	16%		100 %	92,86 %	84%	48 %	25%
	Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Yang Mendapatkan Pemberdayaan					23,33%	46,67%	64,16%			23,33%	45,64%	63,15%		100%	100%	98%	98%	100 %
	Prevelensi Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO=- Per 100.000 Penduduk Perempuan					82,84 %	81,18 %	79,56 %			82,84 %	81,18 %	79,5 6%			96,4 &%	100%	100 %	77,9 7
5	Rasio KDRT		1,09%	1,39%	1,39 %	1,39 %	1,29 %	1.19 %		0,35 %	0,07 %	0,012 %	0,00 9%		8,86 %	5,03 %	5,42 %%	7,5 6%	1,09
6	Cakupan perempuan dan anak korban		100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100 %		100 %	100%	100%	100 %	100 %

KOTA MAKASSAR

	kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (%)																	
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)		100%		100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	10 0%	100 %

KOTA MAKASSAR

8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPTD		18,54%		27,03 %	17,81 %	17,94 %	18,19 %		27,03 %	17,81 %	17,94 %	18,19 %		100%	100%	100%	100%	100%
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan		100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%

KOTA MAKASSAR

	anak																		
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum		49,90%		76,59 %	86,96 %	91,87 %	96,71 %		86,46 %	89,36 %	80,13 %	76,15 %		100%	100%	100%	100%	100%
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan		100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan		100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase Kelurahan Ramah Anak		100%			39,87%	54,90 %	69,93 %		39,87 %	54,90 %	69,93 %				100%	100%	100%	100%

KOTA MAKASSAR

	(prioritas)																		
14	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Semua OPD dan Lembaga Pemenuhan Hak anak danPerlindungan Perempuan dan Anak		100%			83,37 %	85,57 %	87,57 %		83,37 %	85,57 %	87,57 %				100%	100%	100%	100%

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar ada beberapa indikator yang mengalami peningkatam ditiap tahunnya dan ada juga beberapa indikator tidak mencapai target yaitu proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD kota Makassar dan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum yang capaiannya mengalami penurunan.

Ada beberapa faktor sehingga terjadi penurunan pada capaian indikator proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD yaitu:

1. Masih terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk berkarir dibidang politik
2. Budaya partiarkis sehingga perempuan sering dianggap sebagai pelengkap di dunia politik
3. Sistem politik yang tidak ramah perempuan dapat membuat sulit perempuan untuk berpartisipasi dalam politik
4. Kurangnya dukungan partai politik bagi perempuan untuk maju dalam politik.

Adapun beberapa faktor penyebab sehingga capaian menurun pada indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum yaitu:

1. Banyak korban tidak menegetahui adanya layanan bantuan hukum yang tersedia, atau tidak tahu bagaimana cara mengaksenya
2. Korban sering merasa malu, takut dipersalahkan, atau mendapat tekanan dari keluarga/Masyarakat untuk tidak melapor atau mencari bantuan hukum
3. Banyaknya kasus kekerasan yang tidak terlaporkan, sehingga tidak masuk kedalam cakupan layanan bantuan hukum
4. Masih terbatasnya SDM pendamping hukum, dan konselor hukum dalam penanangan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1. Belum optimalnya penerapan Isu Gender pada Perencanaan dan Penganggaran di setiap SKPD.

   Dalam mengimplementasikan pelaksanaan Pengarusutamaan gender atau PUG pada perencanaan dan penganggaran Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbagai upaya dalam setiap program dan kegiatan namun belum optimal dikarenakan adanya hambatan struktural yang berasal dari kemampuan dan keahlian aparatur pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran yang responsive gender. Dan juga adanya hambatan institusional yang berasal dari kurangnya pemahaman terhadap konsep gender yang masih disalahartikan, sehingga tujuan utama dalam program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
2. Keterbatasan Akses Ekonomi dan pendidikan perempuan berakibat pada kemiskinan yang menyebabkan terjadinya kekerasan.

   Kita ketahui bahwa akses ekonomi dan pendidikan sangatlah berpengaruh terhadap masyarakat. Kemiskinan yang tidak selalu netral gender perempuan lebih menderita akan dampaknya. Ketimpangan yang mengakar karena pengaruh pendidikan dan ekonomi ini berpengaruh besar terhadap perempuan, oleh karenanya perempuan akan selalu mengalami yang namanya kekerasan, sehingga perlunya program dan kegiatan dalam menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan memberikan peningkatan kapasitas terhadap perempuan agar tidak mengalami kesenjangan gender dan terhindar dari kemiskinan dan kekerasan.
3. Masih Tingginya Kekerasan Terhadap Anak.

   Kekerasan terhadap anak di Kota Makassar tiap tahunnya makin meningkat ini disebabkan karena banyak faktor, adanya faktor

yang menyebabkan tingkat kekerasan terhadap anak adalah faktor ekonomi yang mana faktor ekonomi ini yang sering terjadi kekerasan terhadap anak. Faktor disfungsi keluarga adalah peran orangtua tidak berjalan sebagaimana mestinya, Faktor lingkungan yang tidak sehat. Untuk menekan kasus kekerasan terhadap anak maka diperlukan dukungan dari pemerintah yaitu adanya dukungan kebijakan dan pendidikan yang layak bagi anak , serta memberikan lingkungan yang ramah untuk anak.

Isu-isu strategis apabila tidak diantisipasi akan berdampak pada pencapain tujuan dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, maka dengan ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyiapkan Program utama yaitu:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, program ini diharapkan dapat menerapkan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan mengoptimalkan ketimpangan gender pada program dan kegiatan di setiap SKPD.
b. Program Perlindungan Perempuan program ini diharapkan dapat membantu perempuan dalam mencegah kemiskinan dan menjadikan perempuan berkualitas sehingga tidak menyebabkan lagi terjadinya kekerasan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan sekitarnya.
c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, program ini berperan mengatasi ketimpangan gender dan juga membantu menekan kasus kekerasan perempuan dan anak dan juga dapat mengoptimalkan peningkatan kualitas perempuan sehingga mencegah dari kemiskinan dan kesenjangan sosial
d. Program Sistem Data Gender dan Anak., didalam program ini dapat mempetakan data untuk pengambilan keputusan dalam mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak..

e. Program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak diharapkan dapat mengoptimalkan sekolah-sekolah dan kelurahan ramah anak dan juga mencegah makin tingginya kasus kekerasan terhadap anak .

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah adalah;

a. Adanya ketimpangan gender dalam berbagai aspek , dilihat dari IPG dan IDG, terutama dalam aspek ekonomi dan partisipasi perempuan di bidang politik
b. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan fisik, seksual maupun psikis
c. Kemajuan tekhnologi yang tidak di imbangi dengan literasi digital bagi perempuan dan anak, berdampak pada tingginya angka kekerasan berbasis gender
d. Belum tersususnya basis data terkait partisipasi Lembaga dan dunia usaha, mediam dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Peluang yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar adalah :

a. Komitmen dan kebijakan pengarustaman gender sudah mulai diwujudkan dalam berbagai bidang politik, ekonomi, dan dalam kesetaraan akses kesejahteraan dalam dunia kerja
b. Kebijakan walikota makassar terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan anak semakin konkkrit dengan kejelasan isu anak dalam misi pemerintah daerah
c. Partisipasi para pihak semakin jelas dalam isu pemberdayaan perempuan dan perlinsungan anak ditandai, dengan banyaknya Lembaga layanan perlindungan kesejahteraan anak.
d. Kelembagaan partisipasi anak sudah terbentuk sampai tingkat kelurahan

e. Dukungan anggaran dari APBD maupun APBN berupa Dak Non Fisik

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembagunan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

a. Rancangan kerangka ekonomi daerah
b. Program prioritas pembangunan daerah
c. Rencana kerja , pendanaan dan prakiraan maju

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar berdasarkan RKPD Kota Makassar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se- Kota Makassar.

Dalam proses penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Telahaan terhadap rancangan awal RKPD. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang telah tercapai oleh SKPD, dengan arahan Kepada Daerah terkait prioritas program/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025. Adapun Rancangan Awal Usulan Perubahan RKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 sebesar Rp 18.346.867.000.

Hasil Review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2025 yang meliputi kegiatan identifikasi Prioritas program dan kegiatan, indicator kinerja program dan kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan setelah proses perbandingan antara Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan dimana

antara rumusan dalam Rancangan Renja SKPD pada rancangan akhir Perubahan RKPD tahun 2025 sebesar 18.903.554.000 sebagai mana disajikan pada tabel dengan format formulir TC-31 sebagai berikut:

TABEL TC 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

NO	RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target 2025	pagu indikatif	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	Target 2025	pagu indikatif	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kota makassar			**18.346.867.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	Kota makassar			**18.346.867.000**	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	kota makassar	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**11.290.005.035**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	kota makassar	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	**100%**	**11.290.005.035**	

		kota makassar	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	**90%**			kota makassar	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	**90%**		
		kota makassar	persentase ASN PD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	**90%**			kota makassar	persentase ASN PD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	**90%**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kota makassar	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**12 Dok**	**100.873.580**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	kota makassar	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**12 Dok**	**100.873.580**	Megalami rasionalisasi (pengurangan anggaran) pada saat efesiensi
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kota makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	51 520 000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kota makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	51.520 000	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kota makassar	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	8 400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	kota makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	8.400 000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	kota makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	9.020 000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	kota makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	9 020.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	kota makassar	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	5 115 000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	kota makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 dokumen	5 115.000	

			Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	kota makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	4 860 000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	kota makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	4 860 000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	2 Laporan	12 158 080	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan	12.158 080	

			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kota makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**4 laporan**	9 800 000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kota makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**4 laporan**	9 800.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kota makassar	persentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	**8.162.327.707**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	kota makassar	persentase capaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	**8.162.327.707**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kota makasaar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 org/bulan	8.162 327 707	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	kota makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang ASN	8.162.327 707	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan	kota makasaar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	5 dokumen	537.240.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan	kota makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan	5 Dokumen	537 240 000	

	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kota makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5.520.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	kota makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	5 520 000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu	1 Laporan	1.359.948	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	1 359 948	

			lanan/Semesteran SKPD					Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kota makassar	PERSENTASE capaian layanan administrasi kepegawaian daerah	100%	**246.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	kota makassar	PERSENTASE capaian layanan administrasi kepegawaian daerah	100%	**246.000.000**	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	kota makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	47 Orang	246 000 000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	kota makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	47 Orang	246 000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kota makassar			**1.276.661.400**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	kota makassar			**1.276.661.400**	Megalami

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kota makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 132 461 000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kota makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 132 461.000	rasionalisasi anggaran
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	kota makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	79 880.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	kota makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	70 880 000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kota makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 laporan	73 000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kota makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 laporan	73 000 000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kota makassar	persentase capaian layanan penyediaan jasa penunjang urusan	100 %	**607.568.400**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	kota makassar	persentase capaian layanan penyediaan jasa penunjang urusan	100%	**607.568.400**	Megalami rasionalisasi

			pemerintahan daerah					pemerintahan daerah			anggaran
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kota makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	535 928 400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kota makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	535 928 400	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kota makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	21 690 000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	kota makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	21 690.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kota makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	49 850.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kota makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	49 950 000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kota makassar	Tersedianya layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 persen	**352.454.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	kota makassar	Tersedianya layanan Pemeliharaan Barang Milik	100 persen	**352.454.000**	Megalami rasionalisasi

			Pemerintahan Daerah					Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			anggaran
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kota makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	330 774 000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kota makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	330.774 000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kota makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	21..680 000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kota makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	21..680 000	
II	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	kota makassar	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung**	**70 %**	**1.003.333.000**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN**	kota makassar	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)**	**70%**	**1.003.333.000**	Megalamu rasionalisasi

			APBD			**PEREMPUAN**		**pada belanja langsung APBD**			anggaran
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	kota makassar	Presentase Pelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) Pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten kota	100 %	68.143 000	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	kota makassar	Presentase Pelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) Pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten kota	100 %	68.143.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	kota makassar	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumen	16 193.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	kota makassar	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumen	16.193 000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	kota makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	37.150 000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	kota makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	37 150.000	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG Kewenangana Kab/Kota	Kota Makassat			14 800.000					14.800 000	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	**kota makassar**	**Terlaksananya koordinasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada**	**100%**	**850.200.000**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan**	**kota makassar**	**Terlaksananya koordinasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada**	**100%**	**850.200.000**	

	Kewenangan Kabupaten/Kota		**Organisasi Kemasyarakatan**			**Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Organisasi Kemasyarakatan**		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	kota makassar	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Organisasi	850 200 000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	kota makassar	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Organisasi	850.200 000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	kota makassar	Terselenggaranya koordinasi penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedian	100%	**85.490.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan**	kota makassar	Terselenggaranya koordinasi penguatan dan Pengembangan Lembaga	100%	**85.490.000**	

	Kewenangan Kabupaten/Kota		Layanan Pemberdayaan Perempuan			**Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		Penyedian Layanan Pemberdayaan Perempuan			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 lembaga	17 300 000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 lembaga	17 300 000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	1500 Orang	47.450 0000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Kota Makassar	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	1500 Orang	47 450 0000	

			Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			Kewenangan Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	20.740 000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	20 740 000	
III	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Kota Makassar**	**Prevalensi kekerasan terhadap perempuan-termasuk TPPO per**	**81,18 %**	**2.692.164.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Kota Makassar**	**Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO-**	**81,18 %**	**2.692.164.000**	Megalami rasionalisasi

			100.000 penduduk perempuan					**per 100.000 penduduk perempuan**			anggaran
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	kota makassar	Presentase Capaian Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga	100%	**1.395.252.000**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	kota makassar	Presentase Capaian Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga	100%	**1.395.252.000**	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	kota makassar	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	90 Laporan	1.287.065 000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	kota makassar	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	90 Laporan	1.287 065.000	

	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/kota	kota makassar	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Yang Memerlukan Koordinasi dan Singkronisasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota			Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/kota	kota makassar	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Yang Memerlukan Koordinasi dan Singkronisasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	1 Layanan	108 187 000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kota makassar	Presentase Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota	100%	**1.296.912.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	kota makassar	Presentase Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota	100%	**1.296.912.000**	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga	Kota Makassar	Jumlah sumber Daya	655 Orang	529 128 000	Peningkatan Kapasitas Sumber	Kota Makassar	Jumlah sumber Daya	655 Orang	529 128 000	

	Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	16 Dokumen	768.584 000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	16 Dokumen	768.584.000	

			Kabupaten/Kota					Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
IV	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	kota makassar	**Presentase perempuan kepala keluarga (PEKKA) yang mendapatkan pemberdayaan**	**64,16 %**	**603.440.600**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	kota makassar	**Presentase perempuan kepala keluarga (PEKKA) yang mendapatkan pemberdayaan**	**64,16 %**	**603.440.600**	Megalam rasionalisasi anggaran
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kota makassar	Presentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	**38.574.000**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	kota makassar	Presentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	**38.574.000**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan	kota makassar	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi	51 Perangkat Daerah	20.974 000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan	kota makassar	Jumlah Perangkat Daerah yang	51 Perangkat	20 974.000	

	Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Daerah		
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	kota makassar	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 dokumen	17 600 000	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	kota makassar	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 dokumen	17 600 000	

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	kota makassar	Presentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	**214.600.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	kota makassar	Presentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	**214.600.000**	
	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kab/kota	kota makassar	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	31 Lembaga	197 300 000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	kota makassar	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat	31 Lembaga	197.300 000	

						Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Advokasi dan Pendampingan			
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	17.300 000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	17.300.000	
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	kota makassar	Presentase Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Kota	100 %	**350.266.600**	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	kota makassar	Presentase Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam	100 %	**350.266.600**	

			Makassar yang dilaksanakan					Kota Makassar yang dilaksanakan			
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	kota makassar	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	350.266 600	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	kota makassar	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	350.266 600	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM	**kota makassar**	**Persentase data indikator Pengarus Utamaan Gender yang tersedia**	**87,57 %**	**43.050.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM**	**kota makassar**	**Persentase data indikator Pengarus Utamaan Gender yang tersedia**	**87,57 %**	**43.050.000**	

V	**DATA GENDER DAN ANAK**	**kota makassar**	**Persentase data komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang tersedia**	**83,02 %**		**DATA GENDER DAN ANAK**	**kota makassar**	**Persentase data komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang tersedia**	**83,02 %**		
		kota makassar	**Persentase data komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang tersedia**	**94.53 %**			**kota makassar**	**Persentase data komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang tersedia**	**94.53 %**		
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kota makassar	Presentase capaian Data Gender dan anak Dalam Kelembagaan Data Di tingkat Kota Makassar Yang dikumpulkan,	100%	**43.050.000**	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	kota makassar	Presentase capaian Data Gender dan anak Dalam Kelembagaan Data Di tingkat Kota Makassar Yang dikumpulkan,	100%	**43.050.000**	

			Diolah, Dianalisis dan Disajikan					Diolah, Dianalisis dan Disajikan			
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	kota makassar	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	24 930.000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	kota makassar	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	24.930 000	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	kota makassar	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	18 120.000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	kota makassar	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	18 120.000	
VI	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Kota Makassar**	**Persentase Kelurahan Ramah Anak**	**69,93 %**	**563.059.000**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Kota Makassar**	**Persentase Kelurahan Ramah Anak**	**69,93 %**	**563.059.000**	Megalamu rasionalisasi

											anggaran
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha KewenanganKabupaten/ Kota	Kota Makassar	Presentase Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kota Makassar yang dilaksanakan	100 %	**73.104.000**	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha KewenanganKabupaten/Kota	Kota Makassar	Presentase Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kota Makassar yang dilaksanakan	100 %	**73.104.000**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga emerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada	15 Organisasi	73 104 000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga emerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	15 Organisasi	73 104 000	

			Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha					Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Presentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kota Makassar yang mendapat penguatan dan pengembangan	100 persen	**489.955.000**	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Presentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kota Makassar yang mendapat penguatan dan pengembangan	100 persen	**489.955.000**	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas	Kota Makassar	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan	950 Orang	118.755.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kota Makassar	Jumlah Anak yang	950 Orang	118.755.000	

	Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Kewenangan Kabupaten/Kota		Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	84 100 000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	84 100 000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak	25 Dokumen	279 700 000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	25 Dokumen	279 700 000	

	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	7.400.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	7.400.000	

VII	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Kota Makassar**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait**	**98.05 %**	**2.151.315.192**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Kota Makassar**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait**	**98.05 %**	**2.151.315.192**	Megalami rasionalisasi anggaran
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		**Presentase capaian anak yang memerlukan perlindungan khusus yang ditangani instansi terkait**	**100 %**	**411.813.000**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Presentase capaian anak yang memerlukan perlindungan khusus yang ditangani instansi terkait**	**100 %**	**411.833.000**	
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Makassar	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	90 Orang	411.813 000	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Makassar	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/	90 Orang	411 833 000	

								kegiatan pencegahan KTA			
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Makassar**	**Presentase Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	1 520 345 192	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Presentase Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**1.520.345.192**	
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Makassar	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	2 Orang	1 520 345.192	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Makassar	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	2 Orang	1 520 345 192	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	**Kota Makassar**			**219.137.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan**	**Kota Makassar**			**219.137.000**	

	Daerah Kabupaten/Kota					**Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					
	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kab/kota	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	1 Lembaga	206 621.000	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	1 Lembaga	206 621 000	
	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Makassar	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	4 Dokumen	12 516.000	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Makassar	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	4 Dokumen	12.516 000	
	JUMLAH				**18.346.867.000**	**JUMLAH**				**18.346.867.000**	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan perubahan RKPD Tahun 2025. Proses penyusunan RKPD Tahun 2025 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja pemerintah sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kota Makassar. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan renja Tahun 2025 sampai dengan triwulan pertama (I) serta mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencapaian target sasaran Renstra Dinas fdPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2030.

Sesuai hasil evaluasi perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 lebih memuat berbagai perubahan dan pergeseran anggran tanpa adanya penambahan kegiatan yang ada, namun adanya pengurangan anggran di perubahan renja tahun 2025 dikarenakan adanya program dan kegiatan yang realisasinya sesuai dengan kebutuhan dan adanya pergeseran anggaran dilakukan untuk prioritas kegiatan.

3.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 serta mempertimbangkan Isu-Isu strategis dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaann program dan kegiatan pada tahun 2025. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025.

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Kedudukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kota Makassar tahun 2025 merupakan tahun pertama dari proses pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029 dalam rangka

mencapai Visi pemerintah Kota Makassar Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025-2029 yakni " Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan", dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Maakassar dalam melaksanakan pelayanan berkontribusi melalui :

Misi 6 : yaitu meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan Perempuan, anak, dan Penyandang disabilitas , serta pembamgunan kepemudaan dan olahraga. Masuk pada tujuan 6.1 adalah Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender dengan indicator kinerja Indeks Ketimpangan gender dan indeks kualitas perlindungan anak pada sasaran 6.1.1). Menurunnya Ketimpangan Gender dan Sasaran 6.1.2) yakni meningkatnya kualitas perlindungan anak.

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai peran dan tanggung jawab untuk pencapaian target indeks ketimpangan gender dan indeks perlindungan anak. Yakni dengan memperhatikan tingkat pemberdayaan perempuan dan upaya peningkatan kualitas perlindungan anak.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan yang terampil dan produktif maka dapat meningkatkan peluang-peluang bagi perempuan dari segi pemberdayaannya dan dari segi perlindungan anak.

1. Prioritas pertama yang merupakan program yang secara langsung berkontribus pada pencapaian program strategis walikota Makassar antara lain
    - Program Pengarusutamaan gender dam pemberdayaan perempuan merupakan implementasi dalam pencapaian misi 6 meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak serta penyadang disabilitas. Program ini bertujuan untuk menurunkan ketimpangan gender , serta meningkatkan dari pembangunan dan pemberdayaan gender dalam pembangunan.
    - Program Peningkatan Kualitas Perempuan merupakan implementasi pencapaian misi 6 meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak serta penyadang disabilitas , program, ini bertujuan untuk peningkatan kualitas perempuan dalam segi pemberdayaan perempuan
    - Program Penyajian data gender dan anak merupakan implemantasi pencapaian misi 6 yakni meningkatkan akses pelayanan dan

perlindungan perempuan dan anak serta penyandang disabilitas dalam mewujudkan menurunkan ketimpangan gender

- Program Perlindungan Perempuan merupakan implementasi pencapaian misi 6 yakni meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan dan anak serta penyandang disabilitas dalam mewujudkan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan agar perempuan tidak mengalami diskriminasi.
- Program pemenuhan hak anak merupakan implementasi pencapaian misi 6 yakni meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan dan anak serta penyandang disabilitas dan dalam mewujudkan program prioritas adalah Perlindungan anak dalam hal pemenuhan hak anak.
- Program perlindungan Khusus Anak merupakan pencapaian misi 6 yakn meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan dan anak serta penyandang disabilitas dalam mewujudkan program prioritas ini agar anak mendapatkan akses dari segi perlindungannya.

b. Pencapaian SDGs

Dalam pencapaian SDGs Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen global yang tertuang dalam dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development dan di selaraskan dengan RPJMN melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB/SDGs merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat.

Khusus urusan yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di tujuan ke-5 dan Tujuan 16 yaitu Gender Equality – Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, yang terdiri atas :

TARGET TPB	INDIKATOR TPB	TARGET PENCAPAIAN		
		2024	2025	2026
5.1. mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimanapun	5.1.1. Jumlah Kebijakan yang responsive gender mendukung	85%	95%	100%

	pemberdayaan perempuan			
5.2.Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	5.2.1.a Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	100%	100%	100%
	5.2.2 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	100%	100%	100%
	5.2.2.a Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	100%	100%	100%
5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan Masyarakat	5.5.1Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	31%	31%	31%
16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk	16.2.3.a.Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami	100%	100%	100%

kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun			
16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.b Prevalensi kekerasan terhadap anak lakilaki dan anak perempuan.	100%	100%	100%

c. Pengentasan Kemiskinan

Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan, terutama melalui pendekatan berbasis gender dan perlindungan kelompok rentan . kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencapaian program dan kegiatan pengentasan kemiskinan tidak selalu bersifat langsung , tetapi lebih pada aspek pemberdayaan , dan perlindungan serta pencegahan siklus kemiskinan.

- Dari segi pemberdayaan perempuan yaitu pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi perempuan khususnya ibu rumah tangga dan perempuan kepala keluarga, dan perempuan miskin, pendampingan usaha mikro yang dikelola oleh perempuan, akses permodalan melalui kemitraan dengan Lembaga keuangan atau koperasi perempuan.
- Dari segi perlindungan anak yakni pencegahan eksploitasi seperti pekerja anak melalui edukasi dan advokasi, pemenuhan hak anak atas Pendidikan dan Kesehatan kolabarasi dengan dinas terkait
- Layanan perlindungan perempuan dan anak melalui UPTD PPPA untuk layanan psikososial dan bantuan hukum.

d. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Makassar untuk pendayagunaan potensi ekonomi daerah bertujuan untuk :

- Meningkatkan peran produktif perempuan
- Mengoptimalkan potensi local untuk penguatan ekonomi keluarga
- Mendorong kemandirian dan ketahanan ekonomi perempuan dan anak.

3.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Secara garis besar total program di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar adalah 7 program , terdiri dari 1 program penunjang dan 6 program utama, yang terdiri dari 21 kegiatan dan 47 sub kegiatan.

Pada Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar hanya mengalami pergeserran anggaran . yang mana anggaran Pokok Rp 18.721.283.227,- dan pada perubahan anggaran sebesar Rp 18.346.867.000,-

Adapun Rincian Pada Pergeseran Anggaran adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

Program : Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Anggaran pokok program Penunjang urusan pemerintah daerah Rp. 11.783.185.035 dan anggaran perubahan sebesar Rp 11.290.005.035 dengan kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran Pokok sebesar Rp. 144.933.580 dengan anggaran perubahan sebesar Rp 100.873.580 adanya pengurangan anggaran sebesar Rp 44.060.000 hanya bergeser pada beberapa sub kegiatan antara lain :

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Pokok Rp 57.680.000 dan anggaran perubahan sebesar Rp 51.520.000 pengurangan anggaran sebesar 6.160.000

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD yang anggaran pokoknya sebesar Rp. 11.900.500 mengalami perubahan anggatan sebesar Rp 8.400.000 Mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 3.500.000

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang anggaran Pokoknya Rp.12.520.000,- dan anggaran perubahan sebesar Rp.9.020.000,- mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 3.500.000

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD pada sub kegiatan ini anggaran pokok sebesar Rp.8.615.000,- dan anggaran perubahan sebesar Rp.5.115.000,- mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 3.500.000,-.

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD pada sub kegiatan ini anggaran pokok sebesar Rp.8.360.000,- dan anggaran perubahan sebesar Rp.4.880.000,- mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 3.500.000,-.

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang anggaran pokoknya Rp. 26.158.080,- sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan anggaran sebesar Rp 12.158.080 mengalami perubahan anggaran sebesar Rp 14.000.000

Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Yang anggaran pokok sebesar Rp. 19.700.000,- dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 9.800.000,- dan mengalami rasionalisasi anggaran sebesar Rp. 9.900.000,-

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Anggaran pokok sebesar Rp 8.720.447.655,- mengalami perubahan anggran Rp. 8.706.447.635,- mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 14.000.000,-

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran Pokok sebesar Rp. 8.162.327.707,-tidak mengalami perubahan

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD yang mana anggaran pokoknya Rp. 537.240.000,- anggaran perubahan sebesar Rp. 537.240.000,- tidak menglami perubahan anggaran,-

Sub Kegiatan : Koordnasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD anggaran pokok Rp. 5.520.000,- dan pada anggaran perubahann tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan anggaran

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dengan Anggran Pokok Rp.15.359.948,- setelah perubahan Rp.1.359.948,- mengalami pengurangan anggaran

Sub Kegiatan : Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran pokok Rp.573.000.000,- setelah perubahan Rp.246.000.000,- mengalami pengurangan anggaran.

Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya yang anggaran Pokok Rp.573.000.000,- dan setelah perubahan anggaran Rp.246.000.000,-mengalami pengurangan anggaran.

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah pada anggaran pokok sebesar Rp. 1.315.341.000,- dan mengalami perubahan Rp. 1.276.661.400,- mengalami pengurangan anggaran,-.

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pada sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada anggaran pokok sebesar Rp.1.132.461.000,- dan pada perubahan anggaran sebesar Rp. 1.132.461.000,- tidak mengalami perubahan anggaran

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang anggaran Pokok Rp. 79.880.000,- dan Perubahan Anggaran Rp. 70.880.000,- mengalami pengurangan anggaran

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD dengan Anggaran Pokok Rp.103.000.000, perubahan anggaran sebesar Rp 73.000.000 dalam sub kegiatan tersebut mengalami pengurangan anggaran.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran pokok sebesar Rp. 663.266.800,- mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 607.568.400,- mengalami pengurangan anggaran,-.

Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang anggaran pokoknya Rp. 575.626.800 ,- dan anggaran perubahan Rp. 535.928.400,- mengalami pengurangan anggaran

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang anggaran pokok sebesar Rp. 21.690.000,- dan Anggaran Setelah Perubahan Rp.21.690.000,- mengalami pengurangan anggaran

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang anggaran pokok sebesar Rp. 65.950.000,- yang anggaran perubahan sebesar Rp. 49.950.000,- dimana anggarannya mengalami pengurangan anggaran

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran pokok sebesar Rp. 344.516.000,- anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 330.774.000,-., mengalami pengurangan anggaran

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang anggaran pokok Rp. 344.516.000,- anggaran perubahan Rp. 330.774.000,- dan pada sub kegiatan mengalami pengurangan anggaran

Sub Kegiatan : Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran pokok sebesar Rp. 21.680.000 anggaran ini tidak mengalami perubahan.

2. **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota dengan anggaran pokok Rp. 284.265.000,- dan anggaran perubahan Rp.68.143.000,- mengalami pengurangan anggaran yang rinciannya sebagai berikut :

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 84.793.000 dan setelah perubahan Rp. 16.193.000 mengalami pengurangan anggaran

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota anggaran pokok : Rp. 119.550.000,- setelah perubahan anggaran Rp. 37.150.000 mengalami pengurangan anggaran.

Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi dengan anggaran pokok Rp. 336.600.000,- dan anggaran perubahan menjadi Rp. 850.200.000, mengalami penambahan anggaran sebagai berikut :

Sub Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan Peningkatan Pertisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan Anggaran Rp. 336.600.000,- dengan anggaran perubahan sebesar Rp 850.200.000 mengalami penambahan anggaran

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran pokok sebesar Rp.135.390.000,- dan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 85.490.000, mengalami pengurangan anggaran

Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pembedayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggran pokok sebesar Rp. 25.100.000 anggaran perubahan sebesar Rp 17.300.000 mengalami pengurangan anggaran

Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran pokok sebesar Rp. 47.450.000,- anggaran perubahan sebesar Rp 47.450.000 tidak mengalami perubahan anggaran

Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas sumberdaya Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota dengan anggaran pokok

sebesar Rp 62.840.000 dengan anggaran perubahan sebesar Rp 20.740.000 mengalami pengurangan anggaran

Program Perlindungan Perempuan

Program : Perlindungan Perempuan dengan anggaran pokok sebesar Rp. 2.160.477.000, anggaran pokok sebesar Rp 2.692.164.000 mengalami penambahan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan : Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota dengan anggaran Rp. 1.320.965.000,- dan anggaran perubahan Rp. 1.395.252.000,- mengalami penambahan anggaran

Sub Kegaiatan : Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pokok Rp. 1.320.965.000 anggaran perubahan sebesar Rp 1.287.065.000 mengalami pengurangan anggaran

Sub Kegiatan : Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Dengan Anggaran Pokok Sebesar Rp 0 ,- Dan Anggaran perubahan sebesar Rp 108.187.000

Kegiatan : Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota dengan anggaran pokok sebesar Rp. 839.512.000 dengan anggaran perubahan sebesar Rp 1.296.912.000 ,- mengalami penambahan anggaran

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota dengan anggraran pokok Rp.537.428.000,- anggaran ini mengalami perubahan Rp. 529.128.000,-, mengalami pengurangan anggaran

Sub Kegiatan : Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota dengan anggaran pokok Rp. 302.084.000,- anggaran ini mengalami perubahan menjadi Rp.767.784.000,- anggaran ini mengalami penambahan anggaran

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dengan anggaran pokok sebesar Rp.153.374.000,- anggaran ini mengalami perubahan menjadi Rp.38.574.000,- anggaran ini mengalami pengurangan anggaran

Sub Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota dengan anggaran pokok Rp.

33.374.000,- anggaran perubahan sebesar Rp 20.974.000 mengalami pengurangan anggaran

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Komunikasi,Informasi,dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran pokok sebesar Rp.120.000.000 dengan anggaran perubahan sebesar Rp 17.600.000,- anggaran ini mengalami pengurangan anggaran

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Kabupaten/Kota dengan anggaran pokok Rp. 83.100.000,- anggaran ini mengalami perubahan menjadi Rp. 214.600.000 mengalami penambahan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran Pokok sebesar Rp.59.400.000,- dengan anggaran perubahan sebesar Rp 197.300.000, mengalami penambahan anggaran

Sub Kegiatan : Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran pokok sebesar Rp.23.700.000 dengan anggaran perubahan Rp 17.300.000 anggaran ini mengalami pengurangan anggaran

Kegiatan : Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dengan anggaran pokok Rp.366.061.000 dengan anggaran perubahan Rp 350.266.600,- anggaran ini menggalami pengurangan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG Dan Perlindungan Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran pokok sebesar Rp.366.061.000,- anggaran perubahan sebesar Rp 350.266.600 mengalami pengurangan anggaran

3. **Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak**

Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kab/Kota dengan anggaran pokok sebesar Rp.77.850.000 anggaran perubahan sebesar Rp 43.050.000 mengalami perubahan anggaran

Sub Kegiatan : Penyediaan Data Gender Dan Anak Dikewenangan Kab/Kota dengan anggaran pokok Rp 67.074.400,- anggaran ini tidak mengalami perubahan.

Sub Kegiatan : Penyajian Data Pemanfaatan Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran pokok Rp.35.020.000 anggaran perubahan sebesar Rp 18.120.000,- sub kegiatan ini mengalami pengurangan anggaran.

4. **Program Pemenuhan Hak Anak**

Kegiatan : Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran pokok Rp.121.004.000,- anggaran ini mengalami perubahan menjadi Rp.73.104.000,- anggaran ini mengalami pengurangan anggaran

Sub Kegiatan : Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota dengan anggaran pokok Rp. 121.004.000,- anggaran ini mengalami perubahan menjadi Rp.73.104.000,- mengalami pengurangan anggaran

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran pokok Rp. 812.255.000,- anggaran ini mengalami perubahan menjadi Rp.489.955.000,- mengalami pennguranganan anggaran

Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewengan Kabupaten/Kota dengan anggaran pokok Rp.93.155.000,- anggaran perubahan sebesar Rp 118.755.000 dengan mengalami penambahan anggaran

Sub Kegiatan : Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran pokok Rp.92.100.000,- anggaran ini mengalami perubahan menjadi Rp.84.100.000,- mengalami pengurangan anggaran

Sub Kegiatan : Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Dearah Kabupaten/Kota dengan anggaran pokok sebesar Rp.618.100.000,- anggaran mengalami perubahan menjadi Rp. 279.700.000,- mengalami pengurangan anggaran

Sub Kegiatan : Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan

anggaran pokok sebesar Rp.8.900.000 anggaran perubahan sebesar Rp 7.400.000,- mengalami pengurangan anggaran.

5. **Program Perlindungan Khusus Anak**

Program : Perlindungan Khusus Anak dengan anggaran pokok Rp.2.407.722.192,- anggran ini mengalami perubahan menjadi Rp.2.151.315.192,- mengalami penngurangan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran pokok Rp.394.483.000,- anggaran ini mengalami perubahan menjadi Rp.411.813.000,- mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.17.330.000,-

Sub Kegiatan : Advokasi Dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijkan/Program/Kegiatan Pencengahan KTA dengan anggaran pokok Rp.394.483.000,- anggaran ini mengalami perubahan menjadi Rp.411.813.000,- mengalami penambahan anggaran sebesar Rp.17.330.000,-

Kegiatan : Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran pokok Rp. 1.365.902.192,- anggaran ini mengalami perubahan menjadi Rp.1.628.552.192 dengan penggurangan sebesar Rp.262.650.000,-

Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK dengan dengan anggaran pokok Rp. 1.365.902.192,- anggaran ini mengalami perubahan menjadi Rp.1.628.552.192 dengan penggurangan sebesar Rp.262.650.000,-

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran pokok Rp.647.337.000,- anggaran ini mengalami perubahan menjadi Rp.219.137.000,- dengan pengurangan anggaran sebesar Rp.428.200.000

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota dengan anggaran pokok Rp.634.821.000 dengan perubahan anggaran sebesar Rp 206.621.000 dengan pengurangan anggaran sebesar Rp 428.200.000

Sub Kegiatan : Penyediaan Bantuan Kebutuhan Khusus Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/kota dengan anggaran pokok Rp.12.516.000 tidak mengalami perubahan

Berikut Tabel Usulan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2025;

TABEL TC – 31 PENDANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)		Tahun Rencana 2025							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi		Target Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-9	(12)
												15 721.283.227	15.345.867 000	(374.416.227.)	
2	2.03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan kinerja Perangkat Daerah, Persentase sarana dana prasarana aparatur dalam kondisi baik.	Persentase ketersediaan laporan kinerja Perangkat Daerah. Persentase sarana dana prasarana aparatur dalam kondisi baik.	Kota Makassar	Kota Makassar	100 % 90 %	100 % 90 %	11 783.185 035,-	11 290.005 208	(493.179.827)	
2	2.06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	144.933.580	100.873.580	(44.060.000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2 06	01	2 01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kota Makassar	Kota Makassar			57.680 000	51 520 000	(6.160.000)	Dinas Pemberdayaan

					Daerah	Daerah	Perangkat Daerah			4 Dokumen	4 Dokumen				Perempuan dan Perlindungan anak
2	2 08	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 dokumen	1 dokumen	11.900 500	8 400 000	(3.500.000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	2 08	01	2 0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 dokumen	1 dokumen	12 520 000	9.020 000	(3.500.000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2 08	01	2 0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 dokumen	1 dokumen	8 615.000	5 115 000	(3.500.000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2 0 8	01	2 0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 dokumen	1 dokumen	8 360 000	4 860 000	(3.500.000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2 08	01	2 0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Laporan	2 Laporan	26 158 080	12 158 080	(14.000.000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2	2 08	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Lapooran	2 Laporan	19 700 000	9 800 000	(9.900.000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**2.0 8**	**01**	**2.0 2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**100%**	**100%**	**8.720.447.655**	**8.706.447. 655**	**(14.000.000)**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	2 08	01	2 0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Kota Makassar	31 Orang/bulan	31 Orang/ Bulan	8 162 327 707	8 162 327 7 07	-	Dinas Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an Anak
2	2 08	01	2 0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	537 240 000	537 240 00 0	-	Dinas Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak

	2 0 8	01	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Laporan	1 Laporan	5 520 000	5 520 000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2 08	01	2 02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Laporan	1 Laporan	15 359 948	1 359 948	**(14.000.000)**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**2.08**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Kegitan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Kegitan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**100%**	**100%**	**573.000.000**	**246.000.000**	**(327.000.000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	2 0 8	01	2 0 5	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Makassar	Kota Makassar	15 Orang	15 Orang	573 000 000	246 000.000	(327 000 000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**2.08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	100 Persen	100 Persen	**1.315.341.000**	**1.276.661.400**	**(38.679.600)**	Dinas Pemberdayaan Perempuan

															dan Perlindungan Anak
2	2 08	01	2 06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	10 Paket	10 Paket	1 132 461.000	1 132 781 400	(320.400)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2 08	01	2 06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	18 Dokumen	18 Dokumen	79 880 000	70 880 000	(9.000.000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2 08	01	2 06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	34 Orang	34 Orang	103 000 000	73 000 000	(30.000.000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**2.08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	**100 Persen**	**100 Persen**	**663.266.800**	**607.568.400**	**(55.698.400)**	Dinas Pemberdayaan Perempuan

															dan Perlindungan Anak
2	2 08	01	2 08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Laporan	1 Laporan	575 626 800	535 928 400	**(39.698.400)**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2 08	01	2 08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Laporan	1 Laporan	21.690 000	21 690 000	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2 08	01	2 08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Laporan	1 Laporan	65 950 000	49 950 000	**(16.000.000)**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**2.08**	**01**	**2.09**		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	**100%**	**100%**	**366.198.000**	**352.464.000**	**(13.742.000)**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

														Perlindungan Anak
2	2 08	01	2 09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan di bayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan di bayarkan pajaknya	Kota Makassar	Kota Makassar	8 Unit	8 Unit	344 516 000	330.774 000	**(16.090.400)**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2 08	01	2 09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kota Makassar	Kota Makassar	27 Unit	27 Unit	21 680 000	21 680.000	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2 08	**02**			**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Pada belanja APBD**	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Pada belanja APBD**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**80,00%**	**80,00%**	**756.258 000**	**1 003.833.000**	**(247.575 000)**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2 08	**02**	**2 01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah kewenangan kota makassar yang dilaksanakan	Jumlah pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah kewenangan kota makassar yang dilaksanakan	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**100 Person**	**100 Person**	**284.265.000**	**68.143.000**	**(216.122.000)**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2	2 08	02	2 01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Kota Makassar	5 Dokumen	5 Dokumen	84.793.000	16.193 000	**(68.600.000)**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2 08	02	2.01	02	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Kota Makassar	4 Dokumen	4 dokumen	119 550 000	37 150 000	**(82.400.000)**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/kota	Jumlah SDM Yang Memperoleh advokasi kebijakan dan pendampingan Penyelenggaraan PUG	Jumlah SDM Yang Memperoleh advokasi kebijakan dan pendampingan Penyelenggaraan PUG	Kota Makassar	Kota Makassar	51 orang	51 orang	49 650 000	14 800 000	**(34.850.000)**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijaan Penyelenggaraan PUG Tingkat Kab/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijaan Penyelenggaraan PUG Tingkat Kab/Kota	Kota Makassar	Kota Makassar	51 Perangkat daerah	0	33 272 000	0	**(33.272.000)**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2	**2 08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**			**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**1 Paket**	**1 Paket**	**336.600 000**	**850.200.000**	**513.600.000**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2 08	02	2 0 2	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Kota Makassar	6 Organisasi	6 Organisasi	336 600 000	850 200 000	513 600 000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**2 08**	**02**	**2.0 3**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota**	**Tercapainya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota**	**Tercapainya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**100%**	**100%**	**135.390.000**	**85.490.000**	**(49.000 000)**	
2	2.08	02	2 0 3	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota Yang Mendapat Advokasi dan pendampingan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota Yang Mendapat Advokasi dan pendampingan	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Lembaga	1 Lembaga	25 100 000	17 300 000	**(7.800.000)**	

					Kewenangan Kab/Kota											
					Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	47 450 000	47.450 000	-	
2	2 08	02	2 0 3	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kota Makassar	Kota Makassar	100 Orang	100 Orang	52 840.000	20 740 000	**(42.100.000)**	
2	**2 08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO-Per 100.000 Penduduk Perempuan**	**Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO-Per 100.000 Penduduk Perempuan**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**85,04%**	**85,04%**	**2.160.477.000**	**2.692.164.000**	**(531.687.000)**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**2.08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**			**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	100%	100%	1.320.965.000	1.395.252.000	(74.287.000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2	2 08	03	2 02	01	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban kekerasan Tingkat Kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	Jumlah Perempuan Korban kekerasan Tingkat Kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	Kota Makassar	Kota Makassar	400 Orang	400 Orang	1 320 965 000	1.287 065 000	(33 900 000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Koordinasi dan sangkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota							0	108 187.000	108 187.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**2.08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	100%	**100%**	**839.512.000**	**1.296.912.000**	**457.400.000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2	2 06	03	2 03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan /kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan /kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Kota Makassar	Kota Makassar	100 orang	100 orang	537 428 000	529 128 000	(8.300.000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2	208	03	2 03	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Kota Makassar	40 Dokumen	40 Dokumen	302 084.000	767 784 000	**465.700.000**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**208**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mendapatkan Pemberdayaan**	**Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mendapatkan Pemberdayaan**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**64,16%**	**64,16%**	**602 535.000**	**603.440.600**	**(179.094.400)**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**208**	**04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Hak anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**100%**	**100%**	**163.374.000**	**38 574 000**	**(144 800 000)**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	208	04	201	01	Addvokasi Kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan	Kota Makassar	Kota Makassar	153 Perangkat Daerah	153 Perangkat Daerah	33.374 000	20 974 000	**(12.400.000)**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

						Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota									
2	2 0 8	04	2.0 1	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	120 000 000	17 600 000	(102 400.000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2 0 8	**04**	**2.0 2**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**			Kota Makassar	Kota Makasser	**100%**	**100%**	**83.100.000**	**214.600.000**	**131.500.000**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2.0 8	04	2 0 2	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat daerah kab/kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Kota Makassar	100 orang	100 orang	59 400 000	197 300 000	137 900.000	**DP3A**

2	2 0 8	04	2 0 2	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Kota Makassar	3 Dokumen	3 Dokumen	23.700 000	17 300 000	(6.400.000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**2.0 8**	**04**	**2.0 3**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota**	**meningkatnya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**meningkatnya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**100 Persen**	**100 Persen**	**366.061.000**	**350.266 600**	**(15.794.400)**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
					Pelaksanaan Penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Yang Wilayah kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	2 Layanan	2 Layanan	366 061 000	350 266 600	(15 794 400)	
2	2 08	**05**			**Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**	**Persentase data komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang tersedia Persentase data Indikator Pengarus Utamaan Gender yang**	**Persentase data komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang tersedia Persentase data indikator Pengarus Utamaan Gender yang Tersedia Persentase**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**83.9 % 89.57% 94,55%**	**83.9 % 89 57% 94,55%**	**77.850 000**	**43.030.000**	**(34 800.000)**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

						Tersedia Persentase data komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang tersedia	**data komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang tersedia**									
2	2 08	05	2.0 1		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota**	MeningkatnyaPengumpula n, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	MeningkatnyaPengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**100%**	**100%**	**77.850.000**	**43.030.000**	(34 800 000)	Dinas Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak
2	2 08	05	2 0 1	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Yang Tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Yang Tersedia	Kota Makassar	Kota Makassar	1 dokumen	1 dokumen	42 830 000	24 930 000	(17 900 000)	Dinas Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak
2	2 08	05	2 0 1	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Kewenangan Kab/Kota	Kota Makassar	Kota Makassar	6 Dokumen	6 Dokumen	35 020 000	18 120 000	(16.900 000)	Dinas Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak
2	**2 08**	**06**			**PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Kelurahan Ramah Anak**	**Persentase Kelurahan Ramah Anak**	Kota Makassar	Kota Makassar	**39,87%**	**39,87%**	**933.259.000**	**563.059.000**	**(370.200.000)**	Dinas Pemberdaya

																an Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2 08	**06**	2 02		**Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota**			**Kota Makassar**	**Kota Makassar**			**121.004.000**	**73.104.000**	**(49.700.000)**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2 08	**06**	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	15 Organisasi	15 Organisasi	121 004 000	73 104 000	(49 700 000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2 08	06	2 02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Kota Makassar	100%	100%	**812.255.000**	**489 955.000**	**(322.300.000)**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

						Kabupaten/Kota										n Anak
2	2 08	06	2 02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Kota Makassar	48 Orang	48 Orang	93 155 000	118 758 000	(25.000.000)	Dinas Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak
2	2 08	06	2 02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Dokumen	2Dokumen	92.100 000	84 100 000	(8.000.000)	Dinas Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak
2	2 08	06	2 02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Kota Makassar	15 Dokumen	15 Dokumen	618.100 000	279 700 000	(338.400.000)	Dinas Pemberdaya an Perempuan dan Perlindunga n Anak
2	2 08	06	2 02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Kota Makassar	Kota Makassar	1 dokumen	1 Dokumen	8 900 000	7.400 000	(1.500 000)	

						Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Anak Kewenangan Kab/Kota										
2	**2.06**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait**	**Persentase anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait**	Kota Makassar	Kota Makassar	**97,84%**	**97,84%**	**2 407 722.192**	**2 289 502.192**	**(143.220.000)**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2.06	**07**	**2.02**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup DaerahKab/Kota**	**Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Makassar	Kota Makassar	**100%**	**100%**	**394.483.000**	**411.813.000**	**(17.330.000)**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2 0 8	07	2.0 2	04	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Makassar	Kota Makassar	300 Orang	300 Orang	394 483 000	411 813 000	(17 330 000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**2.06**	**07**	**2.02**	**03**	**Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**100%**	**100%**	**1.365.902.192**	**1.520.345.192**	**164.443.000**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung**

															an Anak
2	2 08	07	2 02	06	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK Yang Mendapatkan Layanan	Jumlah AMPK Yang Mendapatkan Layanan	Kota Makassar	Kota Makassar	15 Laysnan	15 Layanan	1 365 902 192	1 520 345 192	154 443 000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**2.08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**647.337.000**	**219.137.000**	**(428.200.000)**	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2 08	07	2 03	07	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah/Kabupaten kota	Jumlah SDM Penyediaan Layanan Yang Terlatih dan Mendapatkan sertifikat Perlindungan Dan Penanganan AMPK	Jumlah SDM Penyediaan Layanan Yang Terlatih dan Mendapatkan sertifikat Perlindungan Dan Penanganan AMPK	Kota Makassar	Kota Makassar	80 orang	80 orang	634 821 000	206 621 000	(428 200 000)	
2	08	07	2 03	08	Penyediaan Bantuan Kebutuhan Khusus bagi AMPK tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK Yang Memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	Jumlah AMPK Yang Memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	Kota Makassar	Kota Makassar	30 orang	30 orang	12 516 000	12.516.000	0	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis oprasional tahunan yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kota Makassar Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2025 memuat kebijakan tentang program, kegiatan yang dilengkapi sasaran kenerja yang menggunakan pagi indikatif untuk tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan Kedua (I) Tahun 2025 ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Adanya Rasionalisasi Anggaran untuk program prioritas Kota Makassar
2. Para PPTK harus selalu melakukan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan sehingga tidak ada kegiatan yang terlambat atau bahkan tidak terlaksana dengan alasan apapun, karena hal ini akan mempengaruhi kinerja Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
3. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2025 harus menjadi dasar pelaksanaan penganggaran tahun berikutnya.

Rencana Tindak Lanjut

Transpasransi sangat berkaitan dengan system informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publi berdasarkan hal tersebut diatas maka Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkash-langkah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar melakukan upaya optimal dalam pencapaian kinerja di tahun 2025
2. Advokasi secara penuh dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak untuk mencapai indicator kelurahan ramah anak.

3. Melakukan upaya peningkatan layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Bersama jejaring dan mitra dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

drg. ITA ISDIANA ANWAR, M.Kes
Pangkat : Pembina, TK I
NIP.. 196808292006042006

PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Dinas Ketenagakerjaan



REN ERJA

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dipandang perlu untuk diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, dengan menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana di maksud Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan.:
1. Wakil Wali Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
7.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
9.	Dinas Sosial Kota Makassar
10.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
12.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
13.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Makassar
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
22.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
23.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
24.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
25.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
26.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
27.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
28.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
29.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar

31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
32.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
34.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
35.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
36.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
37.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
38.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
39.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
40.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
43.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
44.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
45.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
46.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
47.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
58.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
49.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
50.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar
51.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

WALIKOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah. Rencana Kerja ini subtansinya menjabarkan potret permasalahan ketenagakerjaan serta program tahun 2025 yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara terencana dan bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan yang ada.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilanjutkan dengan Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menterjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam progran dan kegiatan OPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk periode Tahun 2025 yang memuat rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 beserta indikator-indikator kinerja program/kegiatan rincian target kinerja berupa masukan (input), keluaran (outputs) dan hasil (outcome) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengindentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran. Sehingga dengan dokumen rencana kinerja juga merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana strategis yang telah ditetapkan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem penganggarannya.

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat mendukung kebijakan umum Pemerintah Kota Makassar yang pada akhirnya dapat memberikan konstribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam kaitannya dengan penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan di Kota Makassar.

Makassar, 12 Agustus 2025
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR

NJELMA PALAMBA, SH. M.AP
Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc
NIP : 19651210 199112 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**

BAB I. PENDAHULUAN **01**
1.1 Latar Belakang 01
1.2 Landasan Hukum 02
1.3 Maksud Dan Tujuan 04
1.4 Sistimatika Penulisan 04

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 ..... **07**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 07
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar 14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD 18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025 23

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **30**
3.1 Perubahan Rencana Kerja 30
3.2 Perubahan Pendanaan Perangkat Daerah 32
3.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Dan Pendanaan Program Prioritas Tahun 2025 40

BAB IV. PENUTUP **41**
4.1 Catatan Ketersediaan Anggaran 41
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 41
4.3 Rencana Tindak Lanjut 43

LAMPIRAN **44**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rincian Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2025	10
Tabel 2.2	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Periode Pelaksanaan : Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025	11
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025	16
Tabel 2.4	Kondisi Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2019 s.d Tahun 2023	20
Tabel 2.5	Analisa SWOT dalam Penentuan Isu-Isu Strategi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar	21
Tabel 2.6	Review Terhadap Rancangan Awal Peubahan RKPD Tahun 2025 Kota Makassar	25
Tabel 3.1	Rekapitulasi Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025	33
Tabel 3.2	Perubahan Belanja Program Tahun Anggaran 2025	33
Tabel 3.3	Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen rencana kinerja juga merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem penganggarannya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menterjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD. Selain itu Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat digunakan dalam menjaga konsistensi program/kegiatan dan sinkronisasi pencapaian tujuan serta sasaran yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis, dan juga merupakan landasan penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah Pasal 343 ayat (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi: (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan Rencana Kerja ini subtansinya menjabarkan potret permasalahan ketenagakerjaan serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara terencana dan bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan yang ada.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 dilakukan berlandaskan pada Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dokumen perencanaan tahunan yang lebih spesifik sebagai penjabaran dari Rencana Strategis yang

memuat rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan beserta indikator-indikator kinerja program/kegiatan rincian target kinerja berupa masukan (input), keluaran (outputs) dan hasil (outcome) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengindentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Data dan Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 120);
15. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6)

22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 1);
23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Pengentasan Kemiskinan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 111);
24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 15);
25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 86 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan;
26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 adalah untuk :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025 ke dalam program dan kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar; dan
4. Pelaksanaan program/kegiatan pada Tahun 2025 nantinya dapat terlaksana secara lebih terarah berdasarkan indikator capaian yang akan/telah disusun sebelumnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan arah arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2025.

1.4 Sistimatika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan urutan sebagai berikut :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan triwulan II tahun 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah..

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas ketenagakerjaan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU dan terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan. Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Dacrah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025. Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Perubahan RKPD.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai alasan terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, Program dan Kegiatan yang tidak mengalami perubahan serta program dan kegiatan yang mengalami perubahan

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 direncanakan dalam 5 program yang dijabarkan dalam 18 kegiatan dan 47 sub kegiatan;
2. Lokasi program dan kegiatan tersebar pada semua Kecamatan se Kota Makassar, yang secara lebih spesifik kelompok sasaran yang dituju adalah para pencari kerja, tenaga kerja/buruh, organisasi pekerja/buruh, perusahaan, lembaga pelatihan kerja, dan masyarakat umum lainnya yang membutuhkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan serta perangkat daerah; serta
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2025 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 adalah sebesar Rp.25.185.364.383,- (dua puluh lima milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);
4. Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Makassar Nomor 903/71/D.Edar/BPKAD/ III/2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; serta
5. Sehubungan dengan hal tersebut pada angka 4 (empat) Dinas Ketenagakerjaan telah melakukan efisiensi dan penyesuaian anggaran menjadi sebesar Rp.24.231.705.183,- (dua puluh empat milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebesar Rp.8.132.539.005,- (delapan milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima rupiah) atau 33,56 persen.

Secara umum, penyebab capaian kinerja dan serapan anggaran belum sesuai yang direncanalan adalah sebagai berikut:

1. Sub kegiatan telah dilaksanakan dan masih dalam proses pencairan (antara lain 3 Bulan Iuran JKK/JKM Pekerja Rentan, 3 angkatan pelatihan dan 1 angkatan sertifikasi);

2. Sub kegiatan masih dalam proses pemilihan penyedia (antara lain 3 angkatan pelatihan dan 3 angkatan pelatihan perluasan kesempatan kerja)

Adapun rincian capaian kinerja 5 program adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
		Target	Realisasi s.d TW II	% Capaian
Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90,16	90,00	38,61	42,90
Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100,00	100,00	50,00	50,00
Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	93,44	90,00	5,15	5,72

Adapun analisa capaian program di atas sebagai berikut:

a. Dari target 90 persen Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik dengan terealisasi sebesar 38,61 persen atau dengan capaian sebesar 54,01 persen. Dimana dari 72 unit sarana dan prasarana aparatur lingkup yang mendapatkan pemeliharaan sebanyak 35 sarana dan prasarana dalam kondisi baik;
b. Dari target 100 persen Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar 50,00 persen atau dengan capaian sebesar 50,00 persen. Dimana dari 12 laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebanyak 6 laporan; dan
c. Dari target 90 persen ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas, terealisasi sebesar 5,15 persen atau dengan capaian sebesar 5,72 persen. Dimana dari rencana 73 ASN Lingkup Dinas Ketenagakerjaan yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 5 ASN telah mendapatkan peningkatan kapasitas

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.12.697.546.323,- (dua belas milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.261.400.729,- (lima milyar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) atau sebesar 41,44 persen.

Dari 26 (dua puluh enam) subkegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II masih terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada stakeholder, sudah tentu suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh stakeholder yang membutuhkannya. Oleh karena itulah, Dinas Ketenagakerjaan dalam

pencapaian sasaran tersebut melakukan berbagai strategi ataupun cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu dapat tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada stakeholder yang menerimanya meliputi :

a. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai terkait masalah attitude atau perilaku;
b. Menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik salah satunya dengan Menyusun SOP dan Peta Proses Bisnis;
c. Meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik melalui pengadaan/perbaikakan sarana dan prasarana, penyediaan fasilitas untuk difabel, dan ruang laktasi; serta
d. Penyediaan sarana pengaduan.

Adapun perbaikan secara internal dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap minggu melalui rapat koordinasi untuk membahas program kerja, permasalahan dan solusi pemecahan. Selain itu keterlibatan pimpinan tertinggi secara langsung dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Melakukan evaluasi kinerja pegawai setiap triwulannya.

Faktor Penghambat:

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja diuraikan sebagai berikut :

a. Ketersediaan sumber daya manusia yang kurang dalam rangka pemenuhan kebutuhan unit kerja.

Faktor Pendukung:

Adapun faktor pendorong dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja diuraikan sebagai berikut :

a. Ketersediaan anggaran;
b. Komitmen pimpinan dan ASN Lingkup Dinas Ketenagakerjaan dalam pemberian pelayanan.

Tindak Lanjut:

Tindak Lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

a. Peningkatan kapasitas aparatur untuk menunjang penyelenggaraan tata kelola penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan.

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
		Target	Realisasi s.d TW II	% Capaian
Persentase Kebutuhan Perencanaan Tenaga Kerja Yang Disusun	100,00%	96,77%	0,00	0,00

Adapun analisa capaian program di atas sebagai berikut :

a. Dari target 96,77 persen Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja terealisasi sebesar 0,00 persen. Masih nihilnya capaian disebabkan kegiatan pada program tersebut berada triwulan III tahun berjalan.

Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD

sebesar Rp.95.571.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi anggaran masih nihil.

Faktor Penghambat :

Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja diuraikan sebagai berikut:

a. Masih minimnya kesadaran perusahaan dalam menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro.

Faktor Pendukung :

Adapun beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja diuraikan sebagai berikut :

a. Telah tersusunnya Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Makassar Tahun 2022-2026;
b. Terbentuknya Forum HRD.

Tindak Lanjut :

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain:

a. Lebih melibatkan Forum HRD yang sudah di bentuk dalam penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro;
b. Sosialiasai Kebijakan yang tertuang Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Makassar tahun 2022-2026.

3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
		Target	Realisasi s,d TW II	% Capaian
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,40%	1,03%	0,00	0,00
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	23,52%	22,50%	0,00	0,00
Jumlah Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan	862,00 Orang	1.230 Orang	239	19,43

Dimana target capaian kinerja program sebagai berikut:

a. Dari target 1,03 persen Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi terealisasi sebesar 0,00 persen, dimana perhitungan capaian baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun;
b. Dari target 22,50 persen Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja terealisasi sebesar 0,00 persen, dimana perhitungan capaian baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun; dan
c. Dari target 1.230 Orang Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan terealisasi sebesar 239 orang atau dengan capaian sebesar 19,43 persen.

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 2.513.787.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.487.282.765,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) atau sebesar 19,38 persen.

Secara garis besar pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja masih kecilnya capaian kinerja dan serapan anggaran disebabkan antara lain:

a. Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi yang direncanakan sampai dengan Triwulan II melaksanakan pelatihan sebanyak 6 angkatan (96 orang), dimana terealisasi baru 3 angkatan dan sisanya baru dalam proses pemilihan penyedia. Telatnya proses pemilihan penyedia karena terjadinya pemilihan ulang penyedia;
b. Sub kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dimana direncanakan sampai dengan triwulan II telah melaksanakan sertifikasi sebanyak 3 angkatan, terealisasi pelaksanaan kegiatan sebanyak 3 angkatan akan tetapi 1 angkatan masih dalam proses pencairan anggaran.

Faktor Penghambat:

Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja diuraikan sebagai berikut:

a. Belum adanya PNS Pejabat Fungsional Pelatihan Kerja;
b. Tidak adanya instruktur dan sarana Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang dimiliki oleh Kota Makassar.

Faktor Pendukung:

Adapun beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja diuraikan sebagai berikut :

a. Adapun faktor pendorong dari keberhasilan indikator tersebut antara lain adanya Program Strategis Wali Kota "10.000 Skill Training Gratis" dengan memberikan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan pengembangan produktivitas. Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan serta dunia usaha. Akan semakin dipertajam dengan mengirim tenaga magang keluar negeri dan pelatihan bahasa asing. Peserta magang akan melalui proses tes kelayakan di Jakarta, baik tes kompetensi, produktifitas, keterampilan, kesehatan dan penguasaan bahasa asing. Pelatihan dan Sertifikasi ini di harapkan menjadi salah satu upaya mendorong daya saing tenaga kerja lokal sebelum masuk ke dunia kerja.
b. Melakukan pemantauan akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK) serta kurikulum pelatihan senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar lebih mengikuti perkembangan IPTEK dan kebutuhan pasar kerja.

Tindak Lanjut :

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

a. Melakukan evaluasi pelatihan, dilakukan setelah pelatihan selesai dilaksanakan untuk evaluasi penyelenggaraan pelatihan dan pelaksanaan pelatihan;
b. Melakukan pemantauan akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK) serta kurikulum pelatihan;
c. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif;

d. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dan antara pemerintah pusat-daerah untuk peningkatkan kualitas tenaga kerja melalui Pengembangan standar kompetensi dilaksanakan oleh pihak pengguna; dan
e. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dan Pengembangan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh LSP.

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
		Target	Realisasi s.d TW. II	% Capaian
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	63,01%	65,00%	32,94	50,68
Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	7795 Peluang Kerja	9.555 Peluang Kerja	3.449 Peluang Kerja	35,39

Dimana target capaian kinerja program sebagai berikut:

a. Dari target 65 persen Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar terealisasi sebesar 32,94 persen atau dengan capaian sebesar 50,68 persen. Dimana dari 3.191 orang pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 1.051 orang; dan
b. Dari target 9.555 peluang kerja dan bisnis baru terealisasi sebesar 3.449 peluang kerja atau dengan capaian sebesar 35,39 persen.

Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 9 (sembilan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.1.062.173.360,- (satu milyar enam puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 171.407.162,- (sepuluh tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh ribu seratus enam puluh dua rupiah) atau sebesar 16,14 persen.

Secara garis besar pada Program Penempatan Tenaga Kerja masih kecilnya capaian kinerja dan serapan anggaran disebabkan antara lain :

a. Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja direncanakan sampai dengan Triwulan II melaksanakan 3 angkatan pelatihan akan tetapi belum dilaksanakan karena sampai Triwulan II masih dalam proses pemilihan penyedia;
b. Beberapa sub kegiatan masih dalam proses pencairan.

Faktor Penghambat:

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian kinerja program ini antara lain :

a. Dalam penempatan tenaga kerja belum dilaksanakan secara optimal karena masih kurangnya PNS penjabat fungsional pengantar kerja;
b. Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal dan Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal; dan

c. Masih kurangnya kesadaran dari pemberi kerja/perusahaan untuk melaporkan tenaga kerja baru. Demikian pula halnya Pencari kerja masih kurangnya kesadaran dalam melaporkan apabila telah diterima bekerja.

Faktor Pendorong:

Adapun faktor pendorong dari keberhasilan indikator tersebut, Dinas Ketenagakerjaan telah beberapa kali menggelar kegiatan kegiatan yang bertujuan meningkatkan serapan penempatan seperti job fair yang telah banyak bekerja sama dengan instansi atau perusahaan di Kota Makassar, pengembangan jejaring informasi pasar kerja, pembentukan bursa Kerja khusus (BKK) yang merupakan sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta dan Universitas, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra Dinas Ketenagakerjaan. BKK merupakan wadah dalam mempertemukan alumni dengan pencari kerja, sebagai wadah dalam memberikan pelatihan tamatan sesuai dengan permintaan pasar kerja.

Beberapa upaya lain yang dilakukan melalui dorongan-dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja melalui bimbingan teknis memperbaiki kejiwaan, mental dan moralitas para pengangguran untuk melakukan hal yang berguna dan berdampak positif. Selain itu Dinas Ketenagakerjaan juga melakukan pembinaan kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). Selain itu melalui peningkatkan pelatihan yang berkaitan dengan pengenalan terhadap teknologi tepat guna, pengembangan kewirausahaan, serta berbagai keterampilan pendukung lainnya sehingga tenaga kerja mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri mapun orang lain.

Pencapaian kinerja peningkatan kesempatan kerja juga ditunjang oleh terbentuknya Forum Human Resources Development (HRD) dari sejumlah perusahaan swasta yang berada di Kota Makassar.

Tindak Lanjut:

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja ditahun berikutnya, akan membentuk regulasi tentang Wajib Lapor Lowongan Kerja sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980 yang menyatakan "Setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya". Selain itu akan lebih mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja, serta penambahan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.

5. Program Hubungan Industrial

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
		Target	Realisasi s.d TW. II	% Capaian
Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	39,45	51,01	0,00	0,00

Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	2,82	3,27	0,00	0,00
Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	63,41	84,00	63,42	75,50

Dimana capaian kinerja program sebagai berikut:

a. Dari target 51,01 persen Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak terealisasi sebesar 0,00 persen. Perhitungan dilakukan pada akhir tahun;
b. Dari target 3,27 persen Angka sengketa perselisihan hubungan industrial pertahun terealisasi sebesar 0,00 persen. Perhitungan dilakukan pada akhir tahun. Perlu diketahui indikator ini bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya.; dan
c. Dari target 84 Persen Kasus Hubungan Industrial Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) terealisasi sebesar 63,42 persen atau dengan capaian sebesar 75,50 persen. Dimana dari 17 kasus yang dilaporkan sebanyak 6 kasus diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB).

Program Hubungan Industrial terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.8.005.874.700,- (delapan milyar lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.240.291.189,- (dua milyar dua ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu serratus delapan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 27,98 persen.

Secara garis besar pada Program Hubungan Industrial masih kecilnya capaian kinerja dan serapan anggaran disebabkan antara lain :

a. Sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja untuk iuran JKK dan JKM Pekerja rentan baru terealisasi sebanyak 3 bulan (Januari s.d Maret). Untuk bulan April s.d Juni sudah tahap proses administrasi keuangan.

Hubungan industrial yang harmonis mendorong terciptanya ketenangan berusaha dan bekerja, peningkatan produksi dan produktivitas kerja serta keterampilan tenaga kerja.Hubungan industrial yang baik akan mempermudah setiap pihak mencapai tujuannya. Peningkatan hubungan industrial juga berdampak pada perkembangan perusahaan yang akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Yang tentunya ini akan membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran.Hubungan industrial yang kondusif akan mendorong terciptanya stabilitas di sektor kerja dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pada keadaan tertentu kepentingan di antara keduanya dapat berbeda, hal ini berpotensi menimbulkan konflik yang berujung pada perselisihan hubungan industrial. Oleh karena itu, sarana sarana hubungan industrial sangat diperlukan agar tercipta iklim kerja yang harmonis.

Dinas Ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan industrial melakukan pembinaan antara lain Serikat Pekerja/Serikat Buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartite dan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan.

Selain itu melakukan pendaftaran dan pemantaun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dalam menjamin kesejahteraan pekerja melakukan pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) melalui Dewan Pengupahan.

Hubungan antara pekerja dan pengusaha yang secara tertulis dituangkan dalam perjanjian kerja tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya salah satu atau kedua belah pihak melalaikan kewajibannya dan atau tidak memenuhi haknya. Dengan tidak dipenuhinya hak atau kewajiban tersebut, dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha. Semua perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit yakni hanya antara kedua belah pihak. Apabila perundingan bipartit gagal maka salah satu atau kedua belah pihak yang sedang berselisih mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan ditawarkan kepada pihak yang berselisih untuk meyelesaikan alternatif penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Apabila para pihak tersebut memutuskan untuk memilih alternatif mediasi maka penyelesaian perselisihan tersebut dilimpahkan kepada mediator Dinas Ketenagakerjaan dan untuk segera dilaksanakan mediasi. Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Peran Dinas Ketenagakerjaan sebagai mediator dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Dinas Ketenagakerjaan sebagai mediator dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kota Makassar.

Faktor Penghambat :

Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja diuraikan sebagai berikut :

a. Tingginya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran menyebabkan angka sengketa hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja masih tinggi;
b. Selain itu, dalam penyelesaian kasus hubungan industrial terjadi peningkatan dengan anjuran (tidak terjadi kesepakatan antara perusahaan dan pekerja yang bersengketa) sehingga kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) mengalami penurunan; dan
c. Masih terbatasnya PNS penjabat fungsional mediator.
d. Untuk pembayaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan masih dalam tahap verifikasi pendataan.

Faktor Pendukung :

Adapun beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja diuraikan sebagai berikut :

a. Terbentuknya LKS Tripartit yang setiap bulan melakukan rapat kerja terkait isu-isu Ketenagakerjaan;

b. Terbentuknya Dewan Pengupahan.

Tindak Lanjut :

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

a. Mengoptimalkan komunikasi antara semua pihak yang berkepentingan dan meningkatkan fungsi kaidah-kaidah hukum ketenagakerjaan sebagai rambu-rambunya;
b. Penambahan Pejabat Fungsional Mediator.

Sedangkan target dan realisasi anggaran per program yang telah dicapai di Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rincian Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2025

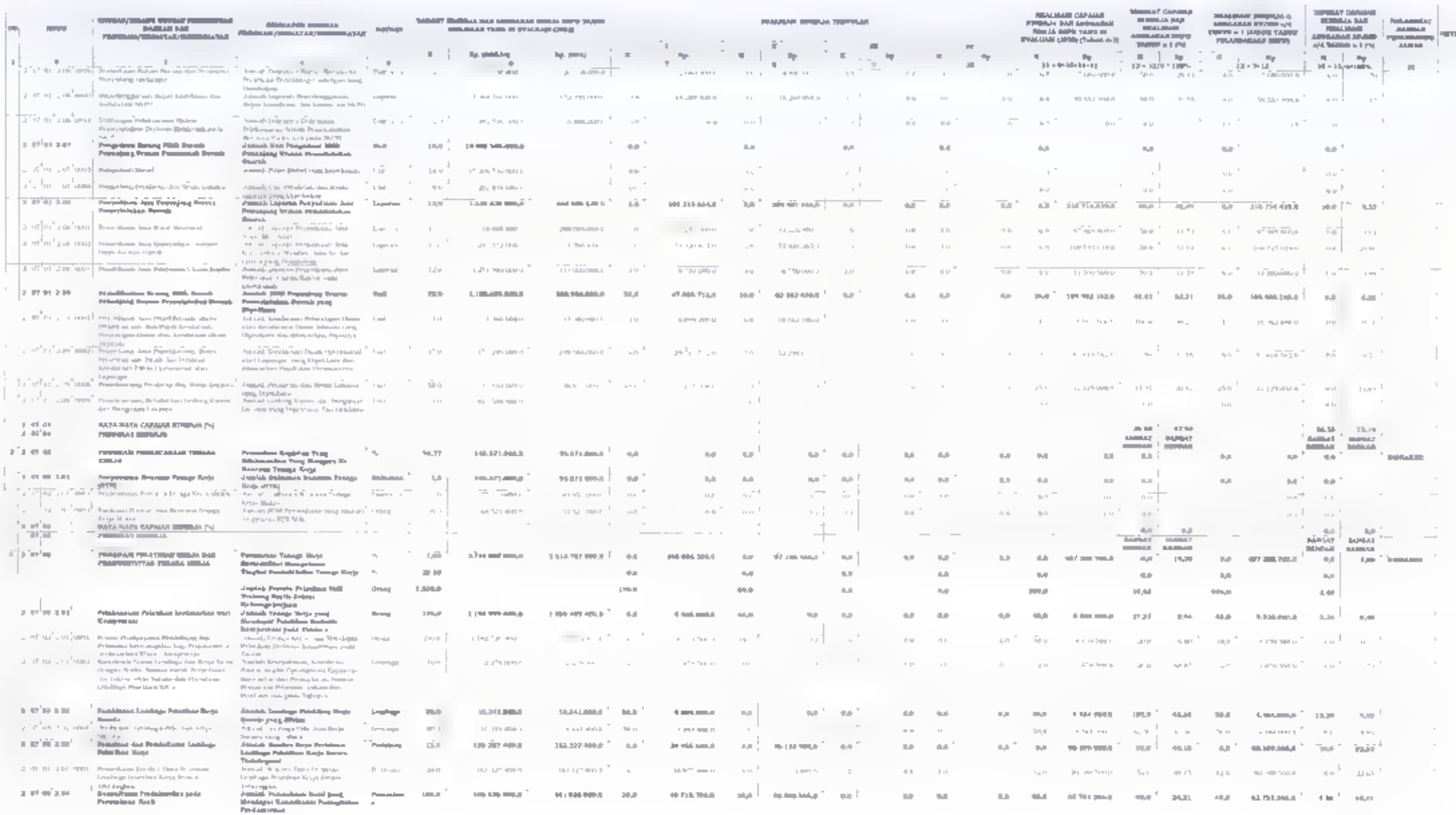
NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.697.546.323	3 5.261.400.729	41,44%
2	Perencanaan Tenaga Kerja	95.571.000	0	0,00%
3	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.513.787.000	487.282.765	19,38%
4	Penempatan Tenaga Kerja	1.062.173.360	171.407.162	16,14%
5	Hubungan Industrial	8.005.874.700	2.240.291.189	27,98%
	TOTAL	**24.231.705.183**	**8.132.539.005,0**	**33,56%**

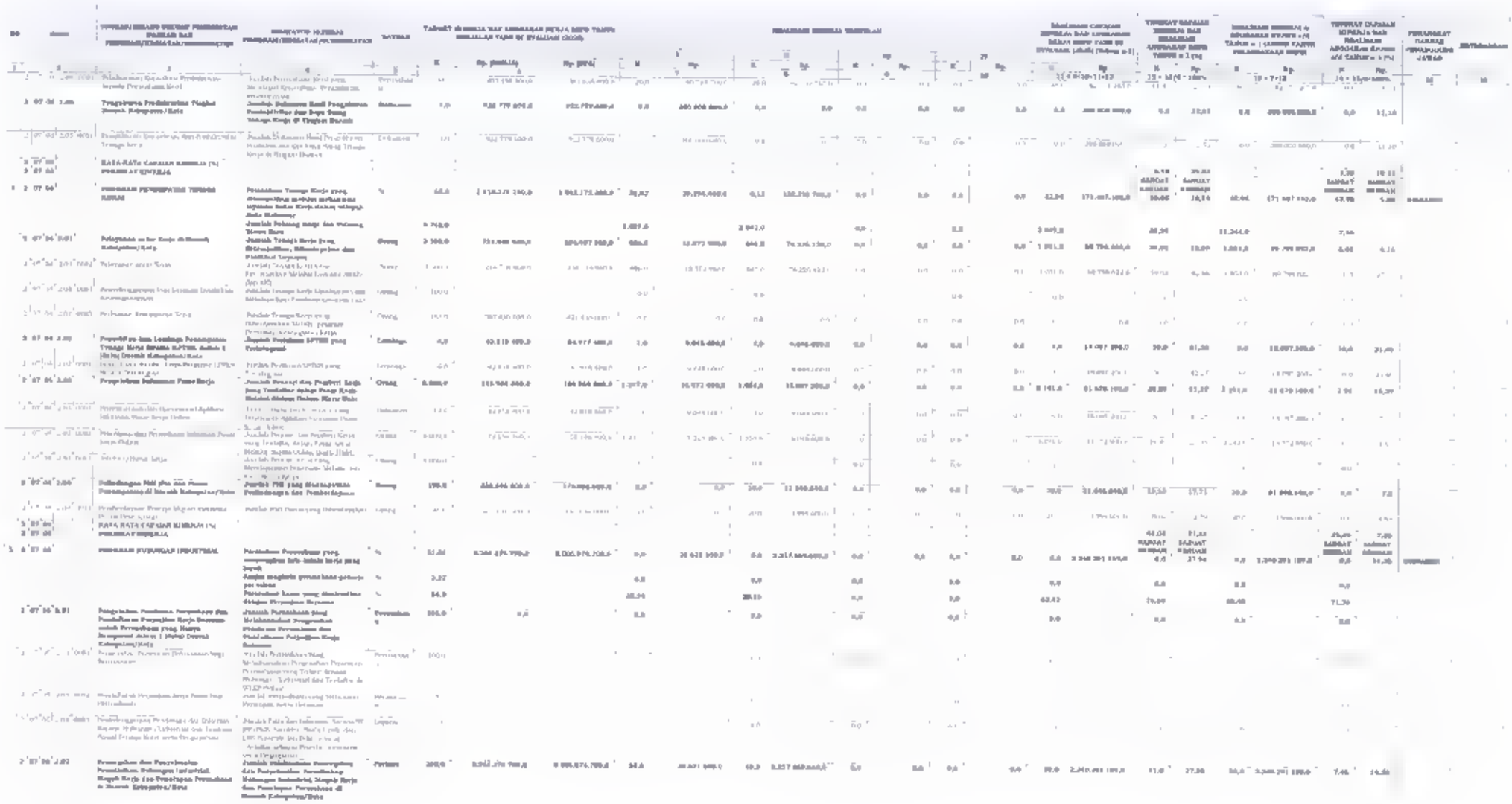
Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas Ketenagakerjaan, 2025

Untuk lebih lengkapnya Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut sesuai format Formulir Tabel E.81 Permendagri 86 Tahun 2017 di bawah ini:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
Periode Pelaksanaan : S.D Triwulan II Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA OPD TAHUN DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA OPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
								I		II		III		IV											
					K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6			7		8		9		10		11 = 9+10+11+12		12 = 11/8 * 100%		13 = 7+12		14 = 13/6*100%		15	16
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				49.758.892.239,0	24.251.705.183,0		2.837.529.525,0		5.295.009.480,0		0,0		0,0		8.132.539.005,0		16,34		8.132.539.005,0		16,34			
	2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				49.758.892.239,0	24.251.705.183,0		2.837.529.525,0		5.295.009.480,0		0,0		0,0		8.132.539.005,0		16,34		8.132.539.005,0		16,34			
	2 07	Dinas Ketenagakerjaan				49.758.892.239,0	24.251.705.183,0		2.837.529.525,0		5.295.009.480,0		0,0		0,0		8.132.539.005,0		16,34		8.132.539.005,0		16,34			
1	2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase survey dan penerima aspirasi dalam bentuk hoft	%	90,0	47.540.681.879,0	12.697.546.326,0	34,16	2.353.617.525,0	14,16	2.875.763.404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,61	5.261.400.729,0	54,01	41,44	68,61	5.261.400.729,0	54,01	10,72	DISNAKER	
			Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0			25,0		25,0		0,0		0,0		50,0		50,0		50,0		50,0			
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90,0			0,5		5,13		0,0		0,0		5,13		5,72		5,13		5,72			
	2 07 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12,0	30.882.800,0	83.865.000,0	1,0	27.303.000,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	27.303.000,0	16,66	32,54	2,0	27.303.000,0	3,33	16,54		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen	2,0	26.751.800,0	16.180.000,0	0,0	27.303.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.303.000,0	0,0	99,74	0,0	27.303.000,0	0,0	99,83		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,0	11.941.000,0	5.628.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,0	11.941.000,0	5.628.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,0	11.941.000,0	5.628.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,0	11.941.000,0	5.628.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun	Laporan	4,0	8.100.000,0	7.200.000,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	50,0	0,0	2,0	0,0	50,0	0,0		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2,0	14.707.000,0	7.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2 07 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	12,0	13.006.190.442,0	10.755.289.200,0	3,0	2.121.947.559,0	3,0	2.304.022.590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	4.665.970.149,0	50,0	43,53	6,0	4.665.970.149,0	50,0	21,79		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	84,0	11.409.340.242,0	10.013.658.400,0	84,0	2.102.101.559,0	84,0	2.447.142.590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	9.464.211.149,0	100,0	82,95	84,0	9.464.211.149,0	100,0	23,20		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelayanan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,0	990.120.200,0	276.944.000,0	3,0	19.846.000,0	3,0	67.760.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	87.606.000,0	50,0	47,58	6,0	87.606.000,0	50,0	13,79		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	Dokumen	12,0	526.217.000,0	142.544.000,0	3,0	47.600.000,0	3,0	43.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	90.600.000,0	50,0	34,51	6,0	90.600.000,0	50,0	15,92		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD dan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Terminologi Neraca dan Laporan Keuangan SKPD	Laporan	12,0	961.125.000,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
	2 07 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Dokumen	12,0	152.914.000,0	42.668.600,0	3,0	6.000.000,0	3,0	9.064.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	12.064.800,0	50,0	28,28	6,0	12.064.800,0	50,0	3,90		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Unit/Item	12,0	12.905.900,0	12.668.600,0	3,0	6.000.000,0	3,0	6.064.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	12.064.800,0	50,0	47,55	6,0	12.064.800,0	50,0	17,12		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,0	139.242.900,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
	2 07 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	12,0	929.395.900,0	426.944.000,0	3,0	45.242.000,0	3,0	67.742.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	112.984.000,0	50,0	35,74	6,0	112.984.000,0	50,0	8,78		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Perangkat Daerah yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12,0	752.000.000,0	230.000.000,0	0,0	0,0	0,0	22.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.500.000,0	0,0	2,99	0,0	22.500.000,0	0,0	4,11		
	2 07 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Jasa Administrasi Umum yang Tersedia	Jenis	7,0	2.220.417.138,0	387.368.600,0	3,0	21.263.400,0	1,0	81.189.090,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	102.452.790,0	57,14	26,45	4,0	102.452.790,0	11,43	3,61		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,0	6.200.000,0	9.936.000,0	0,0	0,0	1,0	4.825.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4.825.170,0	100,0	48,56	1,0	4.825.170,0	7,1	24,06		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7,0	211.520.138,0	144.111.000,0	2,0	11.263.400,0	2,0	17.364.120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	17.364.120,0	66,7	19,01	2,0	17.364.120,0	28,6	3,99		
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Paket Bahan Material Kantor yang Disediakan	Paket	2,0	16.310.800,0	16.131.600,0	1,0	1.077.000,0	0,0	8.775.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	12.810.000,0	50,0	69,81	1,0	12.810.000,0	0,0	7,94		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penggunaan	Jumlah Paket Bahan Material Kantor yang Disediakan	Paket	2,0	26.610.000,0	25.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		





NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN I		REALISASI KINERJA TRIWULAN II		REALISASI KINERJA TRIWULAN III		REALISASI KINERJA TRIWULAN IV		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
					K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6			7		8		9		10		11 = 9+10+11+12		12 = 12/6 * 100%		13 = 7+13		14 = 13/6*100%		15	16
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	200,0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	2 07 05	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																25,17	49,47			23,75	21,27		
	2 07 05	PREDIKAT KINERJA																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA OPD (%)																29,05	33,68						
		PREDIKAT KINERJA OPD																SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH						

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan

Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 terdiri dari 5 indikator sebagai berikut :

1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja;
2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi;
3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan);
5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota.

Untuk bidang urusan tenaga kerja termasuk urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sampai dengan Triwulan II Pada Tahun 2025 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar melakukan evaluasi kinerja pelayanan bidang ketenagakerjaan sebagaimana tercantum pada tabel sesuai format T-C.30 berikut:

Tabel 2.3 (Format T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Ketenagakerjaa Kota Makassar S.D Tahun 2025

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK Tahun 2026	Target Renstra Perangkat Daerah					Capaian Kinerja				Proyeksi
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		√	67,35	93,55	93,55	96,77	96,77	67,35	93,33	93,33	100	96,77
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi		√	0,41	0,58	0,70	1,03		0,41	0,53	0,65	1,40	
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja		√	20,05	21,00	21,50	22,00	22,50	20,05	20,69	20,69	24,06	22,05
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan		√	28,62	29,84	33,69	38,50		28,62	30,75	31,53	39,45	
5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota		√	50,00	55,00	60,00	65,00	65,50	53,46	58,32	59,04	62,70	65,50

Adapun rincian capaian kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

   Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dengan jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota.

   Realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 100 persen dari target 96,77 persen kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja. Dimana dari 30 jumlah kegiatan keseluruhan berdasarkan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) yang dilaksanakan sebanyak 30 kegiatan.

2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

   Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan.

   Dari target 1,03 persen Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi terealisasi sebesar 1,40 persen atau dengan capaian sebesar 135,92 persen, dimana sebanyak 8.782 orang tenaga kerja bersertifikat kompetensi dari 629.183 orang tenaga kerja keseluruhan

3. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja

   Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja adalah perbandingan antara Produk Domestik Regional Bruto (harga konstan) (Miliar Rupiah) terhadap jumlah penduduk yang bekerja.

   Dari target 22,00 persen Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja terealisasi sebesar 24,06 persen atau dengan capaian sebesar 109,36 persen, dimana PDRB dengan harga konstan sebesar Rp.140.197,90 (dalam milyar rupiah) dari 582.708 jiwa tenaga kerja persen.

4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

   Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) merupakan perbandingan antara jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) terhadap jumlah perusahaan yang beroperasi di Kota Makassar.

   Dari target 38,50 persen Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak terealisasi sebesar 39,45 persen atau dengan capaian sebesar 102,47 persen. Dimana dari 2.299 perusahaan yang memiliki tenaga kerja melebihi 10 orang yang berada di Kota Makassar sebanyak 907 perusahaan telah menerapkan tata kelola kerja yang layak (Memiliki PP/PKB. Peserta BPJS dan LKS Tripartit)

5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota

   Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota merupakan

perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang ditempatkan terhadap jumlah mencari kerja melalui mekanisme layanan antar kerja.

Dari target 65 persen Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar terealisasi sebesar 63,01 persen atau dengan capaian sebesar 96,94 persen. Dimana dari 3.758 orang pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 2.368 orang.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan

Bidang ketenagakerjaan tidak berdiri sendiri atau bebas nilai dari berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kontrol atau kewenangan Dinas Ketenagakerjaan. Bidang ketenagakerjaan merupakan muara dari berbagai bidang. Setiap kebijakan di berbagai bidang ini akan berpengaruh terhadap bidang ketenagakerjaan. Bila tidak dapat dikatakan semua, maka bidang-bidang yang dipandang mempunyai pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap bidang ketenagakerjaan adalah: (a) Politik dan hukum, (b) Ekonomi, (c) Kependudukan, (d) Globalisasi, (e) Persepsi terhadap pasar kerja, (f) Budaya perusahaan, (g) Budaya pekerja, (i) Budaya pemerintah dan (h) Otonomi daerah.

Berdasarkan permasalahan pengangguran, maka dapat digambarkan perumusan isu strategis ketenagakerjaan :

1. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia
2. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan
3. Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Pembangunan pada sektor ini tidak bisa dilaksanakan secara sektoral mengingat banyak variabel yang terlibat, sehingga diperlukan perencanaan yang terarah, berkesinambungan dan bersifat lintas sektoral. Perencanaan pembangunan pada sektor ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi perlu melibatkan seluruh stakeholders, baik pengusaha, tenaga kerja, maupun masyarakat. Harapannya hubungan yang sinergis antara pemerintah, pengusaha, tenaga kerja (buruh) dan masyarakat dapat mendorong iklim ketenagakerjaan yang baik sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Sebagai pusat aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan, kota Makassar menjadi destinasi utama bagi siapapun yang ingin memperbaiki kondisi ekonominya. Bukan hanya masyarakat Sulawesi Selatan, tapi sebagian dari mereka berasal dari provinsi lain yang sedang mengupayakan sebuah penghidupan lebih yang baik di kota Makassar. Wajar jika pasar tenaga kerja

di kota Makassar setiap tahunnya dipenuhi para pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulwesi Selatan, tahun 2024 sebanyak 1.123.229 jiwa penduduk berumur 15 tahun ke atas bermukim di Kota Makassar, jumlah itu setara dengan 16,00 persen dari total populasi Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk sebanyak ini, sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengimbangi pertumbuhan tenaga kerja.

Kota Makassar sebagai salah daerah yang jumlah angkatan kerjanya terbesar di Sulawesi Selatan diposisikan akan mengalami bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk produktif (berusia 15-64 tahun) mendominasi populasi. Bonus demografi menjadi dasar meningkatkan produktivitas dan memicu pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan SDM. Saat tingkat fertilitas turun, pertumbuhan pendapatan per kapita untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk usia anak-anak dapat dialihkan untuk peningkatan mutu manusia sebagai modal pembangunan. Di saat yang sama, jumlah anak yang sedikit akan memberi peluang bagi kaum perempuan untuk masuk pasar kerja. Bonus demografi akan menjadi windows of opportunity bila disokong oleh SDM yang berkualitas. Jika jumlah penduduk produktif yang lebih besar dapat dioptimalkan untuk mengakumulasi pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan secara ekonomi, maka hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kemajuan di masa depan. Namun bonus demografi menjadi windows of disaster jika sebagian besar penduduk usia produktif berpendidikan rendah atau bahkan tak lulus pendidikan SMP atau SMA, lalu penduduk usia produktif yang banyak jumlahnya itu tidak bisa dimanfaatkan akibat kurangnya lapangan kerja, sehingga menimbulkan efek sosial yang buruk dan hilangnya momentum untuk mengumpulkan kesejahteraan. Momentumini jika tidak dimanfaatkan oleh Kota Makassar akan menjadi ancaman apabila bonus demografi hanya diukur dari struktur demografi (kuantitas) semata. Untuk itu, pengembangan SDM menjadi salah satu pilar untuk meningkatkan nilai tambah. Terlebih bila dikaitkan dengan potensi Kota Makassar sebagai salah satu pusat ekonomi utama untuk wilayah Indonesia Timur. Penanaman investasi baru maupun pemindahan investasi ke Kota Makassar akan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi atau keterampilan baru. Dunia usaha umumnya akan melaksanakan re-engineering dan re-structuring di segala bidang untuk menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan. Akibatnya akan terjadi perubahan terhadap posisi permintaan (supply) dan penawaran (demand) tenaga kerja, struktur persyaratan jabatan maupun kompetensi kerja. Mengacu pada potensi Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama di Indonesia Timur, maka sektor-sektor industri yang diperkirakan akan banyak berkembang dan membutuhkan tenaga kerja diantaranya adalah sektor migas (olahan mineral), industri olahan (manufaktur), jasa dan perdagangan, hotel/restoran, dan industri olahan hasil-hasil pertanian. Tenaga kerja yang dibutuhkan setidaknya untuk mengisi peluang tenaga semi skill dan full skill, baik untuk tingkat profesional/manajerial maupun teknisi/operator.

Beralih pada kondisi ketenagakerjaan di Kota Makassar berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilaksanakan oleh

Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 kota Makassar memiliki 696.851 jiwa angkatan kerja, bertambah sebanyak 45.019 jiwa (6,91 persen) dibandingkan tahun 2023. Banyaknya angkatan kerja di Kota Makassar dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, kenaikan angkatan kerja membuat pasar tenaga kerja kota Makassar relatif lebih dinamis, yang berarti pengusaha dapat mencari pekerja dengan upah lebih kompetitif. Namun, kondisi ini bisa berdampak buruk terhadap bertambahnya jumlah dan tingkat pengangguran terbuka jika sektor- sektor ekonomi produktif tidak mampu menampung para pencari kerja. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan menunjukan bahwa dari total angkatan kerja di kota Makassar tahun 2024, sebanyak 629.183 jiwa sudah mendapatkan pekerjaan bertambah sebanyak 46.475 jiwa (7,98 persen) dibandingkan tahun 2023, sementara yang belum mendapat pekerjaan mencapai 67.668 jiwa, berkurang sebanyak minus 1.456 jiwa (minus 2,11 persen). Angka tersebut mengindikasikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) kota Makassar menurun dari 10,60 persen di tahun 2023, menjadi 9,71 persen di tahun 2024. Angka tersebut menjadikan kota Makassar sebagai daerah dengan jumlah pengangguran dan TPT paling tinggi di Sulawesi Selatan.

Adapun perkembangan kondisi ketenagakerjaan Kota Makassar selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Kondisi Ketenagakerjaan Kota Makassar
Tahun 2020-2024

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia Kerja	Jiwa	1.199.282	1.215.200	1.230.996	1.110.014	1.123.229
Angkatan Kerja	Jiwa	696.158	725.529	729.635	651.832	696.851
- Bekerja	Jiwa	585.325	629.933	643.368	582.708	629.183
- Penganggur	Jiwa	110.833	95.596	86.267	69.124	67.668
Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	503.124	489.671	501.361	458.182	426.378
- Sekolah	Jiwa	156.172	130.671	151.801	127.955	116.287
- Mengurus Rumah Tangga	Jiwa	280.399	267.390	280.306	268.600	251.367
- Lainnya	Jiwa	66.553	91.610	69.254	61.627	58.725
TPT	Persen	15,92%	13,18%	11,82%	10,60%	9,71
TPAK	Persen	58,05%	59,70%	59,27%	58,72%	62,04

Dalam struktur perekonomian kota Makassar, ada tiga lapangan usaha dominan yaitu sector perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor industri pengolahan, serta sector konstruksi. Tahun 2024, ketiga sektor ini masing-masing berkontribusi 19,96 persen, 18,14 persen, dan 15,04 persen terhadap pembentukan nilai tambah ekonomi. Artinya, boleh dikatakan bahwa ketiga sektor ini menjadi penggerak aktivitas produksi barang dan jasa di kota Makassar.

Selain itu, BPS kota Makassar mencatat pertumbuhan nilai tambah industri pengolahan mengalami penurunan sebesar minus hanya 0,04

persen di tahun 2024, padahal beberapa tahun sebelumnya sempat tumbuh 7-8 persen pertahun. Meskipun terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa terjadi pergeseran struktur ekonomi dari industri ke jasa, tapi menurunnya pertumbuhan dan kontribusi industri pengolahan dan kemudian naiknya peran dan pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dapat menjadi gejala yang mesti diwaspadai pemerintah daerah. Empat tahun lalu, perdagangan besar hanya menyumbang 18,96% terhadap struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pertumbuhan sebesar 7,58 persen. Tapi tahun 2023, sektor ini berkontribusi 19,82 persen dan pertumbuhannya mencapai 11,79 persen. Pemerintah daerah perlu waspada, karena elastisitas penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan besar lebih kecil dari 1 (satu) persen. Artinya ketika nilai tambahnya naik 1 (satu) persen, penyerapan tenaga kerjanya hanya tumbuh di bawah 1 (satu) persen.

Pergeseran struktur ekonomi membuat perumusan kebijakan mengatasi pengangguran menjadi sulit. Membesarnya peran sektor perdagangan besar di satu sisi baik dampaknya bagi perekonomian daerah lantaran menghasilkan nilai tambah lebih besar dari sektor lain, termasuk industri. Artinya, jika pemerintah daerah pro terhadap pertumbuhan ekonomi, maka mendorong sektor perdagangan besar merupakan salah satu strategi yang dibutuhkan, meskipun dengan catatan angka penyerapan tenaga kerjanya rendah. Namun, jika sebaliknya, pemerintah daerah concern terhadap penurunan pengangguran, maka harusnya lebih fokus pada kebijakan pengembangan sektor industri pengolahan.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Kota Makassar melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Dalam menentukan isu-isu strategis ini dengan menggunakan Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunites and Threats) dilakukan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dengan melihat lingkungan bisnis secara internal dan eksternal pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Berikut hasil dari analisis.

Tabel 2.5 Analisa SWOT dalam Penentuan Isu-Isu Strategis
Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

Strength	Weaknesses
• Peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang mendukung; • Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan 10.000 skill training gratis dan kemudahan akses 100.000 peluang kerja/bisnis baru selama 5 (lima) tahun; • Tersedia sistem Informasi Pasar Kerja; dan •Terbentuknya Forum HRD, Bursa Kerja Khusus (BKK), UP3, Dewan Tripartit, Dewan Pengupahan, LPK Binaan	• Kurangnya Pejabat Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dibandingkan dengan layanan yang diberikan (jumlah perusahaan di Kota Makassar, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk angkatan kerja); • Belum tersedianya database Ketenagakerjaan yang realtime; • Keterbatasan anggaran; dan • Masih kurangnya sinkronisasi antar OPD dalam melaksanakan kegiatan lintas sektoral.
Opportunites	**Threats**
• Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar yang tinggi; • Kota Makassar sebagai Kota Pendidikan dan Kota Jasa; • Jumlah Angkatan Kerja usia Produktif yang tinggi; dan • Kerjasama sama dengan ADB dalam Program Jobstrat, BLKI Kementerian Ketenagakerjaan RI, dengan asosiasi pengusaha dalam pemagangan, Kerjasama dengan Pemerintah Jepang dalam Pemagangan Luar Negeri (Jepang).	• Bonus demografi apabila tidak dapat dimanfaatkan akibat kurangnya lapangan kerja atau tidak dapat diserap oleh lapangan kerja akibat kurangnya SDM Tenaga Kerja; • Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar tidak diiringi oleh elastisitas penyerapan kesempatan kerja;; • Masih kurangnya kesadaran perusahaan untuk wajib lapor Ketenagakerjaan; • Investasi di Kota Makassar masih merupakan padat modal bukan padat karya; • Urbanisasi yang tidak diikuti oleh SDM yang siap bersaing; dan • Masih tingginya Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja

Dari hasil analisis SWOT tersebut juga kemudian dirumuskan untuk dapat digunakan sebagai strategi perencanaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, sebagai berikut.

1. Strength and Opportunities (SO)

Memanfaatkan Informasi lowongan kerja secara akurat dan terpercaya, sehingga dapat memberikan daya tarik para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Dengan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan 10.000 skill training gratis dan kemudahan akses 100.000 peluang kerja/bisnis baru selama 5 (lima) tahun, kerjasama sama dengan stakeholder dan keterlibatan dunia pendidikan serta dunia usaha dalam menciptakan

tenaga kerja trampil yang dapat berdaya saing dalam penyerapan kesempatan kerja di Kota Makassar.

2. Strength and Threats (ST)

   Memberikan pemahaman dan meningkatkan pemantauan pada perusahaan yang ada di Kota Makassar dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang terampil untuk dapat memberikan kesadaran wajib lapor. Meningkatkan informasi lowongan kerja yang akan memberikan minat atau kepercayaan kepada pencari kerja. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sehingga dapat terserap dalam lapangan kerja yang tersedia.

3. Weaknesses and Opportunities (WO)

   Menambah jumlah Sumber Daya Manusia yang terampil pada setiap bidang dan membuat aplikasi database Ketenagakerjaan yang realtime (SARRING) untuk memperlancar proses bisnis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan memudahkan pencari kerja dan penyedia kerja dapat berinteraksi secara langsung secara online.

4. Weaknesses and Threats (WT)

   Menambah jumlah pejabat fungsional Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan Ketenagakerjaan. Menyusun regulasi untuk lebih memperketat dalam pengawasan wajib lapor Ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja lokal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2025

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar berdasarkan RKPD Kota Makassar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kota Makassar.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2025. Adapun rancangan awal usulan Perubahan RKPD tahun 2025 sebesar Rp.24.903.554.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Hasil review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2025 yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan, setelah proses perbandingan antara rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan

analisis kebutuhan dimana antara rumusan kegiatan dalam rancangan awal Perubahan RKPD kesemuanya terdapat dalam rancangan RENJA SKPD. Pada rancangan akhir usulan Perubahan RKPD tahun 2025 sebesar Rp.24.903.554.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), sebagaimana disajikan pada tabel dengan format formulir T-C.31 berikut:

Tabel 2.6 (T-C.31) Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Makassar

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN

Lembar.....dari.....

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
02	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**										
02	**07**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja** **Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**	**100 Persen** **90 Persen**	**12.772.899.040**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja** **Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**	**100 Persen** **90 Persen**	**12.772.899.040**	
02	**07**	**01**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**15 Dokumen**	**54.385.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**15 Dokumen**	**54.385.000**	
02	07	01	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	41.400.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	41.400.000	
02	07	01	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.825.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.825.000	
02	07	01	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.620.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.620.000	
02	07	01	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.805.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.805.000	
02	07	01	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.805.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.805.000	
02	07	01	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.130.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.130.000	
02	07	01	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.800.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.800.000	
02	**07**	**01**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Dokumen**	**10.765.288.890**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12 Dokumen**	**10.765.288.890**	
02	07	01	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/Bulan	10.305.808.890	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/Bulan	10.305.808.890	
02	07	01	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	276.948.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	276.948.000	
02	07	01	02	0003	Pelaksanaan Prestasiuahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Prestasiuahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	182.532.000	Pelaksanaan Prestasiuahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Prestasiuahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	182.532.000	
02	**07**	**01**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah**	**12 Dokumen**	**42.668.600**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah**	**12 Dokumen**	**42.668.600**	
02	07	01	03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	42.668.600	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	42.668.600	
02	**07**	**01**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** **Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %** **12 Dokumen**	**368.103.800**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** **Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %** **12 Dokumen**	**368.103.800**	
02	07	01	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	0	
02	07	01	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	137.103.800	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	137.103.800	
02	07	01	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	73 Orang	231.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	73 Orang	231.000.000	
02	07	01	05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0	
02	**07**	**01**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah Jenis Jasa Administrasi Umum yang Tersedia**	**7 Jenis**	**384.868.680**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah Jenis Jasa Administrasi Umum yang Tersedia**	**7 Jenis**	**384.868.680**	

KODE					RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1					2	3	4	8	9	7	8	9	10	11	12
02	07	01	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9 936.000	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9 936.000	
02	07	01	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	5 Paket	60 411.080	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	60 411 080	
02	07	01	06	0004	Penyediaan bahan Logistik kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	3 Paket	76 431 600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	76 431 600	
02	07	01	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25 200.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25 200 000	
02	07	01	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	12 Dokumen	26 100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Ba. aan dan Peraturan Perundang Undangan yang	12 Dokumen	26 100 000	
02	07	01	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	172 350.000	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	172 350 000	
02	07	01	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	14 400.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	14 400 000	
02	**07**	**01**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**86 Unit**	**89.308.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**86 Unit**	**89 308 000**	
02	07	01	07	0005	Pengadaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit 1 Unit	59 208.000	Pengadaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit 1 Unit	59 208 000	
02	07	01	07	0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit	0	
02	07	01	07	0009	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	0	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	0	
02	**07**	**01**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar**	**Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** **Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %** **12 Laporan**	**870.311.070**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar**	**Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** **Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %** **12 Laporan**	**870 311 070**	
02	07	01	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	200 009.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	200 009 000	
02	07	01	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	248 802.070	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	248 802 070	
02	07	01	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	121 500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	121 500 000	
02	**07**	**01**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**118 Unit**	**928.063.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**118 Unit**	**928 063 000**	
02	07	01	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Untuk Tahanan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	40 830.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Untuk Tahanan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40 830 000	
02	07	01	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	248 830.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	248 830 000	
02	07	01	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	42 940.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	42 940 000	
02	07	01	09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	0	
02	07	01	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	195 415.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	195 415 000	
02	**07**	**02**			**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Kota Makassar**	**Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja**	**96,67 Persen**	**95.071.000**	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Kota Makassar**	**Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja**	**96.67 Persen**	**95.071.000**	
02	**07**	**02**	**01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Kota Makassar**	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja**	**2 Dokumen**	**95.071.000**	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Kota Makassar**	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja**	**2 Dokumen**	**95.071.000**	
02	07	02	01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro	1 Dokumen	42 550.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro	1 Dokumen	42 550 000	
02	07	02	01	0003	Pendataan Perusahaan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Makassar	Jumlah BUMI Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	50 Perusahaan	52 521.000	Pendataan Perusahaan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Makassar	Jumlah BUMI Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	50 Perusahaan	52 521 000	
02	**07**	**03**			**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Kota Makassar**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi** **Jumlah Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Bahar Ketenagakerjaan**	**1,03 Persen** **1.230 Persen**	**2.748.079.400**	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Kota Makassar**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi** **Jumlah Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Bahar Ketenagakerjaan**	**1,03 Persen** **1.230 Persen**	**2 748.079 400**	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Persentase tenaga kerja di sektor prioritas Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	30,49 Persen 22,80 Persen				Persentase tenaga kerja di sektor prioritas Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	30,49 Persen 22,80 Persen		
02	07	04	01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Kota Makassar**	**Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun**	**176 Orang 240 Orang**	**1.362.999.600**	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Kota Makassar**	**Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun**	**176 Orang 240 Orang**	**1.362.999.600**	
02	07	03	01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	176 Orang	1.350.720.400	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	176 Orang	1.350.720.400	
02	07	03	01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi kapasitas instruktur dan Pengelolaan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2024	30 Lembaga	2.279.000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Pengelolaan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2024	30 Lembaga	2.279.000	
02	**07**	**04**	**02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Kota Makassar**	**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina**	**50 Lembaga**	**10.341.800**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Kota Makassar**	**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina**	**50 Lembaga**	**10.341.800**	
02	07	03	02	0003	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	50 Lembaga	10.341.800	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	50 Lembaga	10.341.800	
02	**07**	**03**	**03**		**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Kota Makassar**	**Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi**	**12 Perizinan**	**138.217.000**	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Kota Makassar**	**Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi**	**12 Perizinan**	**138.217.000**	
02	07	03	03	0003	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	12 Perizinan	138.217.000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	12 Perizinan	138.217.000	
02	**07**	**03**	**04**		**Kemitraan Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Kota Makassar**	**Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Kemitraan Peningkatan Produktivitas**	**100 Perusahaan 600 Perusahaan**	**323.741.600**	**Kemitraan Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Kota Makassar**	**Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Kemitraan Peningkatan Produktivitas**	**100 Perusahaan 600 Perusahaan**	**323.741.600**	
02	07	03	04	0002	Pelaksanaan Kemitraan Produktivitas antara Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Kemitraan Peningkatan Produktivitas	100 Perusahaan	323.741.600	Pelaksanaan kemitraan Produktivitas antara Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Kemitraan Peningkatan Produktivitas	100 Perusahaan	323.741.600	
02	**07**	**03**	**05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah**	**1 Dokumen**	**922.779.600**	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah**	**1 Dokumen**	**922.779.600**	
02	07	03	05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	922.779.600	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	922.779.600	
02	**07**	**04**			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Kota Makassar**	**Pencari Kerja yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar Jumlah Pelatihan Kerja Dan Pelatihan Bisnis Baru**	**68,00 Persen 9 745 Pelatihan Kerja**	**1.083.481.650**	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Kota Makassar**	**Pencari Kerja yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar Jumlah Pelatihan Kerja Dan Pelatihan Bisnis Baru**	**68,00 Persen 9 745 Pelatihan Kerja**	**1.083.481.650**	
02	07	04	01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitasi Layanan	4 340 Orang	687.718.960	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitasi Layanan	4 340 Orang	687.718.960	
02	07	04	01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	0 Orang	0	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar kerja	Kota Makassar	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	0 Orang	0	
02	07	04	01	0002	Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Dicemberikan Melalui Layanan AKAD dan AKL	4.000 Orang	401.368.960	Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberikan Melalui Layanan AKAD dan AKL	4.000 Orang	401.368.960	
02	07	04	01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari kerja	Kota Makassar	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	67.478.600	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	67.478.600	
02	07	04	01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Memanfaatkan Fasilitas Layanan ULD	100 Orang	39.455.300	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	100 Orang	39.455.300	
02	07	04	01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan	140 Orang	379.413.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan	140 Orang	379.413.000	
02	**07**	**04**	**02**		**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi**	**5 Lembaga 6 Lembaga**	**84.897.400**	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi**	**6 Lembaga 6 Lembaga**	**84.897.400**	
02	07	04	02	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	6 Lembaga	42.818.400	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	6 Lembaga	42.818.400	
02	07	04	02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Makassar	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	4 Lembaga	42.079.000	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Makassar	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	4 Lembaga	42.079.000	

KODE					RANCANGAN AWAL KEPO				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	07	04	03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Kota Makassar**	**Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)**	**8 000 Orang**	**118 984 800**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Kota Makassar**	**Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)**	**8 000 Orang**	**118 984 800**	
02	07	04	03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	47 818 400	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	47 818 400	
02	07	04	03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	8 000 Orang	73 146 400	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar kerja Melalui Sistem Online (karir Hub)	8 000 Orang	73 146 400	
02	07	04	03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	1 000 Orang	0	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	1 000 Orang	0	
02	**07**	**04**	**04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah PMI yang Mendapatkan Pelindungan dan Pemberdayaan**	**190 Orang**	**164.903.600**	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah**	**Kota Makassar**	**Jumlah PMI yang Mendapatkan Pelindungan dan Pemberdayaan**	**190 Orang**	**164.903.600**	
02	07	04	04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Makassar	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	150 Orang	33.100.600	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Makassar	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	150 Orang	33.100.600	
02	07	04	04	0003	Pendayagunaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Makassar	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	40 Orang	129 794.000	Pendayagunaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Makassar	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	40 Orang	129 794.000	
02	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	**Kota Makassar**	**Angka Mogokis Perusahaan Pekerja Pertahun** **Persentase Perusahaan Yang Memenuhi Tata Kelola Kerja Yang Layak** **Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)**	**3.27 Persen** **81.01 Persen** **84.00 Persen**	**5.234 022.900**	**Program Hubungan Industrial**	**Kota Makassar**	**Angka Mogokis Perusahaan Pekerja Pertahun** **Persentase Perusahaan Yang Memenuhi Tata Kelola Kerja Yang Layak** **Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)**	**3,27 Persen** **81,01 Persen** **84,00 Persen**	**5 234 022.900**	
02	07	05	01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang kerja Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Jumlah Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama** **Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama**	**105 Perusahaan** **12 Dokumen**	**40.328.400**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang kerja Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Jumlah Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama** **Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama**	**105 Perusahaan** **12 Dokumen**	**40.328.400**	
02	07	05	01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terbuat dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WEBS Online	100 Perusahaan	0	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terbuat dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WEBS Online	100 Perusahaan	0	
02	07	05	01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Melakukan Perjanjian Kerja Bersama	5 Perusahaan	0	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Melakukan Perjanjian Kerja Bersama	5 Perusahaan	0	
02	07	05	01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Makassar	Jumlah Data dan Informasi Secara IT (HP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	40.325 400	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Secara Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Makassar	Jumlah Data dan Informasi Secara IT (HP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	40.325 400	
02	**07**	**05**	**02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Persentase Perkara Perselisihan yang diselesaikan**	**100 Persen**	**8 193.697 500**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Makassar**	**Persentase Perkara Perselisihan yang diselesaikan**	**100 Persen**	**8.193 697 500**	
02	07	05	02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Kota Makassar	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	60 Perkara	467 320 400	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	60 Perkara	467 320 400	
02	07	05	02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	200 Perkara	159 671.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	200 Perkara	159 671.000	
02	07	05	02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Reaktivasi Kepengurusan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat	Kota Makassar	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0	Penyelenggaraan Verifikasi dan Reaktivasi Kepengurusan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat	Kota Makassar	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0	

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	07	05	02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2 Lembaga	226.578.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2 Lembaga	226.578.000	
02	07	05	02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Makassar	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	34.722 Orang	7.340.128.100	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Makassar	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	34.722 Orang	7.340.128.100	
TOTAL PAGU INDIKATIF									24.903.554.000					24.903.554.000	

BAB III
Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berpedoman pada Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2025.

3.1 Perubahan Rencana Kerja

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 serta mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2025. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025.

Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kota Makassar tahun 2025 merupakan tahun pertama dari proses pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai visi pemerintah Kota Makassar Tahun 2025-2029 **"Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan"**, dimana Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pelayanan berkontribusi melalui:

Misi 1 : yaitu Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan penciptaan lapangan kerja. Masuk pada tujuan 1.1) Mewujudkan Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi pada sasaran 1.1.2) Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Pendapatan Masyarakat dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Dinas Ketenagakerjaan mempunyai peran dan tanggung jawab untuk pencapaian target TPT melalui upaya antara lain:

- Penyerapan angkatan kerja melalui peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja serta peningkatan kesempatan/penenpatan tenaga kerja;
- Iklim usaha dan peningkatan investasi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja melalui hubungan industrial yang kondusif.

Misi 6 : yaitu Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas, serta pembangunan kepemudaan dan olahraga. Masuk pada tujuan 6.2) Meningkatkan Perlindungan Sosial Yang Adaptif dan Tepat Sasaran dengan indikator kinerja Tingkat Kemiskinan pada sasaran 6.2.2) Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas dengan indikator kinerja Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal.

Dinas Ketenagakerjaan mempunyai peran dan tanggung jawab untuk pencapaian target Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal melalui upaya peningkatan aksebilitas tenaga kerja disabilitas melalui pemberian fasilitas pelatihan bagi

tenaga kerja disabilitas, Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan fasilitasi akses pasar kerja formal.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja; meningkatkan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja; meningkatkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial, Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar menyusun rencana operasional teknis yang diimplementasikan dalam 5 (lima) program dimana terbagi dalam skala prioritas sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama (1), merupakan program yang secara langsung berkontrubusi pada pencapaian program strategis Walikota Makassar antara lain :
   a) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
      Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja merupakan implementasi dalam pencapaian Misi 1 "**Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan penciptaan lapangan kerja**" dan mewujudkan Program Prioritas "**Membangun Makassar Creative Hub Sebagai Wadah Kreatifitas. Pengembangan Skill Dan Co-Working Space Di Setiap Kecamatan (Unggulan)**".
      Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, keterampilan, keahlian dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja dan peningkatan produktifitas tenaga kerja. Sehingga dengan peningkatan kualitas tenaga kerja diharapkan dapat mendorong tenaga kerja yang memiliki karakter, mampu dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja;
   b) Program Penempatan Tenaga Kerja
      Program Penempatan Tenaga Kerja merupakan implementasi dalam pencapaian Misi 1 "**Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan penciptaan lapangan kerja**" dan Misi 6 "**Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas, serta pembangunan kepemudaan dan olahraga**" serta mewujudkan Program Prioritas "**Pembinaan Keterampilan Bagi Perempuan Dan Difabel**".
      Program ini bertujuan untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja baik sektor formal maupun sektor informal secara remunerative, produktif, layak dan sejahtera baik dalam maupun di luar negeri
   c) Program Hubungan Industrial
      Program Hubungan Industrial merupakan implementasi dalam pencapaian Misi 1 "**Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan penciptaan lapangan kerja**" dan mewujudkan Program Prioritas "**Perlindungan Dan Bantuan Hukum Bagi Tenaga Kerja**" dan "**Berbagi Jaminan Sosial**"
      Program ini bertujuan untuk perbaikan syarat kerja dan sistim pengupahan, pemberdayaan lembaga hubungan industrial serta fasilitasi penyelesaian persclisihan dan pembinaan hubungan industrial demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja/pengusaha

2. Prioritas Kedua (2), merupakan program yang secara tidak langsung mendukung program strategis Walikota dan merupakan perwujudan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain:
   a) Program Perencanaan Tenaga Kerja
      Program Perencanaan Tenaga Kerja merupakan implementasi dalam mendukung pencapaian Misi 1 "**Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan penciptaan lapangan kerja**".
      Program ini merupakan proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
3. Penunjang, merupakan program penunjang urusan pemerintahan daerah antara lain:
   a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
      Program ini bertujuan sebagai penunjang urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan demi terciptanya administrasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan.

3.2 Perubahan Pendanaan Perangkat Daerah

Sesuai hasil evaluasi, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 lebih memuat berbagai perubahan pergeseran anggaran tanpa penambahan kegiatan yang ada. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan akibat adanya perubahan volume kegiatan maupun optimalisasi pemanfaatan dana silpa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Selain itu pergeseran anggaran juga dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi pengelolaan anggaran sehingga seluruh target dan sasaran dapat tercapai.

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara ringkas dari total 51 subkegiatan, terdapat 15 subkegiatan (29,41%) tidak mengalami perubahan, sebanyak 9 subkegiatan (17,65%) mengalami penambahan anggaran dan 27 subkegiatan (52,94%). Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2025 pagu indikatif sebesar Rp.25.185.364.383,00 (dua puluh lima milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), sedangkan pada Perubahan Rencana Kerja pagu indikatif menjadi sebesar Rp.24.903.553.315,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima belas ribu rupiah) berkurang sebesar 1,12 persen.

Adapun rincian Perubahan Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rekapitulasi Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	APBD 2025	Tidak Mengalami Perubahan	Mengalami Penambahan Pagu	Mengalami Pengurangan Anggaran
1	Program	5	0	2	3
2	Kegiatan	19	4	6	9
3	Sub Kegiatan	51	15	9	27

Tabel 3.2 Perubahan Belanja Program Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	APBD Pokok Tahun 2025	Perubahan RENJA Tahun 2025	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.914.186.323	12.772.899.040	(141.287.283)	(1,09)
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	137.571.000	95.071.000	(42.500.000)	(30,89)
3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.674.887.000	2.748.079.400	73.192.400	2,74
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.278.345.360	1.053.481.660	(224.863.700)	(17,59)
5	Program Hubungan Industrial	8.180.374.700	8.234.022.900	53.648.200	0,66
6	**Total**	**25.185.364.383**	**24.903.554.000**	**(281.811.068)**	**(1,12)**

Adapun Rincian Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel sesuai Format I.I berikut:

Tabel 3.3 (Format T-I.I) Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kota Makassar

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)		TAHUN RENCANA 2025							PERANGKAT DAERAH
				LOKASI		TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PERUBAHAN (+/-)	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)			(7)
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**25.185.364.383**	**24.903.554.000**	**(281.810.383)**	**DISNAKER**
2.07.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik** **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik** **Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah** **Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**90 Persen** **100 Persen** **90 Persen**	**90 Persen** **100 Persen** **90 Persen**	**12.914.186.323**	**12.772.899.040**	**(141.287.283)**	**Disnaker**
2.07.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**13 Dokumen**	**15 Dokumen**	**96.465.000**	**54.385.000**	**(42.080.000)**	
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	3 Dokumen	3 Dokumen	60.780.000	41.400.000	(19.380.000)	
2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	5.825.000	2.825.000	(3.000.000)	
2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	5.620.000	2.620.000	(3.000.000)	

2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	4.805.000	1.805.000	(3.000.000)	
2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	5.105.000	1.805.000	(3.300.000)	
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	4 Laporan	4 Laporan	7.130.000	1.130.000	(6.000.000)	
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Laporan	4 Laporan	5.825.000	2.825.000	(3.000.000)	
2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**10.765.288.205**	**10.765.288.890**	**685**	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Kota Makassar	61 Orang/Bulan	72 Orang/Bulan	10.305.808.205	10.305.808.890	685	
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	276.948.000	276.948.000	0	
2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	182.532.000	182.532.000	0	
2.07.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**42.668.600**	**42.668.600**	**0**	

2.07.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	42.668.600	42 668 600	0	
2.07.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**498.944.000**	**368.103.800**	**(130.840.200)**	
2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Makassar	Kota Makassar	0	0	0	0	0	
2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	200.444.000	137,103,800	(63.340.200)	
2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Makassar	Kota Makassar	20 Orang	73 orang	298.500.000	231 000 000	(67.500.000)	
2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	Kota Makassar	0	0	0	0	0	
2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Administrasi Umum yang Tersedia**	**Jumlah Jenis Jasa Administrasi Umum yang Tersedia**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**7 Jenis**	**7 Jenis**	531.308.680	384 868 680	(146.440.000)	
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Paket	1 Paket	9.936.000	9.936.000	0	
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	5 Paket	5 Paket	60.411.080	60.411.080	0	
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	3 Paket	3 Paket	76.431 600	76.431.600	0	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Paket	2 Paket	25.200.000	25.200.000	0	
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	26.100.000	26.100.000	0	

		Perundang-Undangan yang Disediakan	Perundang-Undangan yang Disediakan								
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Laporan	12 Laporan	316.430.000	172.390.000	(144.040.000)	
2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	16.800.000	14.400.000	(2.400.000)	
2.07.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	0	25 Unit	0	**59.208.000**	**59.208.000**	
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	0	25 Unit	0	59.208.000	59.208.000	
2.07.01.2,07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	0	0	0	0	0	
2.07.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	0	0	0	0	0	
2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**24 Laporan**	**24 Laporan**	**648.605.838**	**570.311.070**	**(78.294.768)**	
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Laporan	12 Laporan	200.009.000	200.009.000	0	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Laporan	12 Laporan	331.596.838	248.802.070	(82.794.768)	
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	Kota Makassar			117.000.000	121.500.000	4.500.000	
2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**49 Unit**	**118 Unit**	**330.906.000**	**528.065.000**	**197.159.000**	

		Pemerintahan Daerah	**Pemerintahan Daerah**								
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Unit	1 Unit	44.380.000	40.880.000	(3.500.000)	
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Makassar	Kota Makassar	16 Unit	16 Unit	249.586.000	248.830.000	(756.000)	
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Makassar	Kota Makassar	30 Unit	54 Unit	36.940.000	42.940.000	6.000.000	
2.07.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Makassar	Kota Makassar	0 Unit	0 Unit	0	0	0	
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Makassar	Kota Makassar	0 Unit	1 Unit	0	195.415.000	195.415.000	
2.07.02	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja**	**Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**			137.571.000	95.071.000	(42.500.000)	
2.07.02.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja**	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**100 Persen**	**100 Persen**	**137.571.000**	**95.071.000**	**(42.500.000)**	
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	69.050.000	42.550.000	(26.500.000)	
2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Kota Makassar	Kota Makassar	40 Perusahaan	50 Perusahaan	68.521.000	52.521.000	(16.000.000)	
2.07.03	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi** **Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi** **Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**1,03 Persen** **22,50 Persen**	**1,03 Persen** **22,50 Persen**	**2.674.887.000**	**2.748.079.400**	**73.192.400**	

		Jumlah Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan	**Jumlah Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan**			**1230 Orang**	**1230 Orang**				
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan**	**Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**240 Orang**	**176 Orang**	**1.162.999.400**	**1.352.999.400**	**190.000.000**	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kota Makassar	Kota Makassar	240 Orang	176 Orang	1.160.720.400	1.350.720.400	190.000.000	
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	JumlahKesepakatan /Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Jumlah Kesepakatan /Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Kota Makassar	Kota Makassar	20 Lembaga	20 Lembaga	2.279.000	2.279.000	0	
2.07.03.2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina**	**Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**20 Lembaga**	**20 Lembaga**	**10.341.800**	**10.341.800**	**0**	
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kota Makassar	Kota Makassar	20 Lembaga	20 Lembaga	10.341.800	10.341.800	0	
2.07.03.2.03	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi**	**Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**12 Perizinan**	**12 Perizinan**	**183.327.400**	**138.217.000**	**(45.110.400)**	
2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Perizinan	12 Perizinan	183.327.400	138.217.000	(45.110.400)	
2.07.03.2.04	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas**	**Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**250 Perusahaan**	**100 Perusahaan**	**395.438.800**	**323.741.600**	**(71.697.200)**	
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Kota Makassar	Kota Makassar	250 Perusahaan	100 Perusahaan	395.438.800	323.741.600	(71.697.200)	
2.07.03.2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan**	**Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**922.779.600**	**922.779.600**	**0**	

		Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	**Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah**								
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kota Makassar	Kota Makassar	1 Dokumen	1 Dokumen	922.779.600	922.779.600	0	
2.07.04	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar** **Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru**	**Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar** **Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**65,00 Persen** **9745 Peluang Kerja**	**65,00 Persen** **9745 Peluang Kerja**	**1.278.345.360**	**1.053.481.660**	**(224.863.700)**	
2.07.04.2.01	**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitasi Layanan**	**Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitasi Layanan**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**4283 Orang**	**4340 Orang**	**830.427.560**	**687.715.860**	**(142.711.700)**	
2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Kota Makassar	Kota Makassar	0 Orang	0 Orang	0	0	0	
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kota Makassar	Kota Makassar	4000 Orang	4000 Orang	214.518.960	201.368.960	(13.150.000)	
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Makassar	Kota Makassar	0 Orang	100 Orang	134.478.600	67.478.600	(67.000.000)	
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Kota Makassar	Kota Makassar	100 Orang	100 Orang	0	39.455.300	39.455.300	
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan	Kota Makassar	Kota Makassar	183 Orang	140 Orang	481.430.000	379.413.000	(102.017.000)	

		Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja								
2.07.04.2.02	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi**	**Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**10 Lembaga**	**10 Lembaga**	**92.477.400**	**84.897.400**	**(7.580.000)**	
2.07.04.2.02.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Kota Makassar	Kota Makassar	6 Lembaga	6 Lembaga	42.818.400	42.818.400	0	
2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Kota Makassar	Kota Makassar	4 Lembaga	4 Lembaga	49.659.000	42.079.000	(7.580.000)	
2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)**	**Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**8000 orang**	**8000 orang**	**115.964.800**	**115.964.800**	**0**	
2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Kota Makassar	12 Dokumen	12 Dokumen	42.818.400	42.818.400	0	
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kota Makassar	Kota Makassar	8000 Orang	8000 Orang	73.146.400	73.146.400	0	
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Kota Makassar	Kota Makassar	0 Orang	0 Orang	0	0	0	
2.07.04.2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan**	**Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**140 Orang**	**190 Orang**	**239.475.600**	**164.903.600**	**(74.572.000)**	
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Kota Makassar	Kota Makassar	100 Orang	150 Orang	36.609.600	35.109.600	(1.500.000)	
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Kota Makassar	Kota Makassar	40 Orang	40 Orang	202.866.000	129.794.000	(73.072.000)	

2.07.05	Program Hubungan Industrial	Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kota Makassar	Kota Makassar	3,27 Persen 51,01 Persen 84,00 Persen	,27 Persen 51,01 Persen 84,00 Persen	**8.180.374.700**	**8.234.022.900**	**53.648.200**	
2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama**	**Jumlah Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**105 Perusahaan**	**105 Perusahaan**	**0**	**40.325.400**	**40.325.400**	
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kota Makassar	Kota Makassar	0 Perusahaan	0 Perusahaan				
2.07.05.2.01.0001	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kota Makassar	Kota Makassar	0 Perusahaan	0 Perusahaan				
2.07.05.2.01.0001	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kota Makassar	Kota Makassar	0 Laporan	6 Laporan				
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perselisihan yang Dicegah**	**Jumlah Perselisihan yang Dicegah**	**Kota Makassar**	**Kota Makassar**	**100 Persen**	**100 Persen**	**8.180.374.700**	**8.193.697.500**	**13.322.800**	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kota Makassar	Kota Makassar	60 Perkara	60 Perkara	377.420.400	467.320.400	89.900.000	

	Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
2.07.05.2.02.0001	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Kota Makassar	Kota Makassar	200 Perkara	200 Perkara	221.048.200	159.671.000	(61.377.200)	
2.07.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kota Makassar	Kota Makassar	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0	0	0	
2.07.05.2.02.0001	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kota Makassar	Kota Makassar	2 Lembaga	2 Lembaga	232.578.000	226.578.000	(6.000.000)	
2.07.05.2.02.0001	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Makassar	34Kota Makassar	34.722 Orang	81.466 Orang	7.349.328.100	7.340.128.100	(9.200.000)	

3.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Dan Pendanaan Program Prioritas Tahun 2025

Untuk mencapai sasaran pembangunan Tahun 2025, perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang diperlukan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yang menjadi perhatian dengan terpilihnya kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah periodisasi ini merupakan transisi pemerintahan untuk melanjutkan pembangunan dengan memperhatikan Visi dan Misi terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, berdasarkan Pemendagri Nomor 12 Tahun 2024 bahwa Penambahan dan /atau pengurangan kegiatan dan/ atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhatikan. visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam perubahan perubahan RKPD Tahun 2025, ditindaklanjuti dan/atau penambahan dengan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah. Adapun Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pendanaan Program Prioritas Tahun 2025 dalam pelayanan Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Program, Kegiatan, Target Dan Pendanaan Program Prioritas Tahun 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU PENDANAAN	KETERANGAN
1	Perlindungan Dan Bantuan Hukum Bagi Tenaga Kerja	Hubungan Industrial	Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Bulan	50.000.000	Penyediaan Bantuan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Berselisih
2	Pembinaan Keterampilan Bagi Perempuan Dan Difabel	Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	100 Orang	39.455.300	Fasilitasi Unit Layanan Disabilitas
3	Membangun Makassar Creative Hub Sebagai Wadah Kreatifitas. Pengembangan Skill Dan Co-Working Space Di Setiap Kecamatan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi			
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja			1. Makassar Skill Competition 2. Sertifikasi Kompetensi/Profesi
4	Makassar Berbagi Jaminan Sosial	Program Hubungan Industrial	Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	34.722 Orang/Bulan	7.340.128.100	Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja (Jkk) Dan Jaminan Sosial Kematian (Jkm) Bagi Pekerja Rentan

BAB IV
PENUTUP

4.1. Catatan Ketersediaan Anggaran

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Kota Makassar Tahun 2025. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja untuk tahun anggaran yang sedang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan Kota Makassar dan pagu indikatif yang ditetapkan pada Perubahan RKPD Kota Makassar tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk tahun anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di bidang ketenagakerjaan yang mandiri, berdaya Saing, harmonis dan sejahtera. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tahun 2025, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan dari Pemerintah Kota Makassar, Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, serta Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan janji dalam memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan publik.
3. Seluruh bidang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan ketenagakerjaan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja tahun 2025 wajib mengupayakan agar setiap target kinerja sesuai indikator dapat tercapai.
4. Melakukan upaya perbaikan yang berkesinambungan dengan melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja.

Makassar, 12 Agustus 2025
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR

NIELMA PALAMBA, SH. M.AP
Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc
NIP : 19651210 199112 2 006

PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

LAMPIRAN 1

Formulir E.70 Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025



Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Kota Makassar

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengedalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal Perubahan RKPD Kabupaten/Kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Peranglat Daerah kabuaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			

13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.		√	Masih berupa rancangan akhir	Akan menyisipkan aturan yang mensyakhan Perubahan Renja PD

Makassar, 28 Juli 2025

Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar

NIELMA PALAMBA, SH. M.AP
Pangkat : Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. : 19651210 199112 2 006

PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

LAMPIRAN 2

Lembar Verifikasi Perubahan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025



LEMBAR VERIFIKASI PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR RENJA-PD TAHUN 2025
DINAS KETENAGAKERJAAN

Sistematika Perubahan Renja-PD (Sub Bab)		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan		
				Kesesuaian		Tindak Lanjut / Keterangan
				Ada	Tidak	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
A. Sistematika Dokumen : (Permendagri 86 Tahun 2017)						
BAB I PENDAHULUAN						
1.1	Latar Belakang	1	Mengemukakan pengertian ringkas tentang P-Renja PD, proses penyusunan P-Renja PD, keterkaitan antara P-Renja PD dengan dokumen P - RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.	√		Sudah sesuai dengan kaidah penulisan
1.2	Landasan Hukum	2	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.	√		1. Perlu mengupdate peraturan terbaru 2. Memasukkan Perwali Perubahan
1.3	Maksud dan tujuan	3	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja-PD Tahun 2025.	√		Sudah sesuai dengan kaidah penulisan
1.4	Sistematika Penulisan	4	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Perubahan Renja-PD Tahun 2025.	√		Sudah sesuai dengan kaidah penulisan
BAB II EVALUASI RENJA – PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN						
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra-PD.	5 - -	Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berkenaan (tahun N), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD *dan/atau* realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan. Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel E-81 yang disesuaikan dengan PD masing-masing, dengan format tabel dalam E-monev.		√	1. Perlu memasukkan Evaluasi sampai dengan triwulan II (form E.81) beserta narasi dari tabel
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	6 -	Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah 13 tahun 2019 dan Permendagri 18 tahun 2020. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika PD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan PD, yang disesuaikan menurut PD masing-masing, dengan format Tabel T-C.30.		√	1. Perlu melakukan penyesuaian dan melengkapi tabel TC-30 serta narasi (format tabel pada lampiran Permendagri 86 tahun 2017)

2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	7	Memuat uraian mengenai: 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD ; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional (seperti NSPK, SPM dan SDGs/*Suistanable Development Goals*); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.	√		Sudah sesuai
2.4	Review terhadap Rancangan RKPD	8	Bagian ini berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancanganl RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan 4.Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31:	√		Sudah sesuai
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH						
3.1	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	9	Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, b. Pencapaian SDGs, c. Pengentasan kemiskinan, d. Pencapaian NSPK dan SPM, e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, f. Pengembangan daerah terisolir, g. dsb.	√		• Perlu menambahkan narasi mengapa dilakukan *perubahan baik* itu penambahan atau pengurangan anggaran untuk pencapaian program tertentu • Perlu menambahkan program yang mendukung program prioritas
3.2	Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan	10	Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: a. Jumlah program dan jumlah kegiatan. b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. d. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. **Tabel Penyajian :** Tabel rencana program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33 sesuai inputan SIPD.			Perlu melakukan penyesuaian tabel TC- 33 dan data inputan, yang telah disesuaikan dengan dokumen P-RKPD 2025 dan SIPD
-	Mengakomodir Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025 (beri tanda label/tagging)			√		

-	Mengakomodir Hasil Usulan Musrenbang Tahun 2025 (beri tanda label/tagging)			√		
-	Mengakomodir Hibah Barang/Uang (beri tanda label/tagging)			√		
-	Mengakomodir Program Prioritas Pembangunan Daerah (sesuai visi misi) (beri tanda label/tagging)			√		
BAB IV PENUTUP						
			Berisikan uraian penutup, berupa: a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD dan nama dan tanda tangan kepala PD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan	√		Sudah sesuai dengan kaidah penulisan
B.	**Kesesuaian dengan SIPD** - Nomenklatur Urusan - Nomenklatur Bidang Urusan - Nomenklatur Program - Nomenklatur Kegiatan/ Subkegiatan - Telah berpedoman pada Perwali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perwali No. 26 Tahun 2024 tentang RKPD Kota Makassar Tahun 2025			√		Perlu mengecek dan cermati kembali *kesesuaian* nomenklatur pada SIPD
C.	**Format Penulisan** - Jenis Font (Bookman Old Style) - Ukuran Font (12 pt untuk paragraf) - Spasi (1,15) dan mengikuti sampul seragam untuk Dokumen P-Renja PD			√		Sudah sesuai dengan kaidah penulisan
D.	**Tambahan Inovasi PD**			-	-	-

Keterangan :
***) beri tanda √ untuk kolom yang sesuai.**
****) sesuaikan dengan nama Perangkat Daerah.**
Silakan tambahkan masukan/saran dalam bentuk Narasi.

Perwakilan Tim Perubahan Renja-PD,
Kasubag Perencanaan dan Pelaporan

(Neny Nuryani, ST)

Tim Verifikasi BAPPEDA
1. Verifikator Pertama,

(Hijriani, ST, M.Adm. KP)

2. Verifikator Kedua,

(Muh. Agung Alfian Busri, S.IP)

Mengetahui,
Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian & SDA BAPPEDA,

Dr. A. Ato Rakhmawan, S.IP., S.AP., M.AP.
NIP.19910628 201206 1 001
Pangkat: Penata Tk.I/III.d

PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

LAMPIRAN 3

Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
INSPEKTORAT

Jalan Teduh Bersinar No. 07 Komp. Griya Fajar Mas, Makassar Kode Pos. 90224
Telepon (0411) 881550, Fax (0411) 8215755
E-mail: inspektorat_makassar@yahoo.com

Kepada
Yth. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar

di Makassar

SURAT PENGANTAR
Nomor : 255/Insp/700/VIII/2025

NO	JENIS SURAT/LAPORAN YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 174/Insp/780.04/VIII/2025 Tanggal 11 Agustus 2025	1 (satu) Laporan	Disampaikan dengan hormat untuk bahan sebagaimana mestinya.

Makassar, 14 Agustus 2025

a.n. INSPEKTUR,
Sekretaris,

ARFAN SERY JUSUF, S.Ag., M.Si
Pangkat . Pembina Tk. I
NIP 19710522 200604 1 013

Diterima oleh
Nama/NIP

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
INSPEKTORAT
Jalan Teduh Bersinar No. 07 Komp. Griya Fajar Mas, Makassar Kode Pos : 90224
Telepon. (0411) 881550, Fax. (0411) 8215755
E-mail: inspektorat_makassar@yahoo.com

LAPORAN HASIL REVIU

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

NOMOR : 174/INSP/780.04/VIII/2025
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2025
LAMPIRAN : 2 (DUA) BERKAS

Daftar Isi **Halaman**

I. Ringkasan Eksekutif ..... (2)
II. Dasar Hukum ..... (3)
III. Tujuan Reviu ..... (4)
IV. Ruang Lingkup Reviu ..... (4)
V. Metodologi Reviu ..... (4)
VI. Gambaran Umum ..... (5)
VII. Uraian Hasil Reviu ..... (7)
VIII. Apresiasi ..... (11)

Lampiran:

1. Formulir Simpulan atas Status Rekomendasi.
2. Catatan Hasil Reviu.

LAPORAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Perangkat Daerah menyusun rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) setelah Perangkat Daerah menerima Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja PD. Rancangan Perubahan Renja PD disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja PD berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja PD diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Perubahan Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.
2. Sesuai instruksi pimpinan, Inspektorat Daerah Kota Makassar telah melaksanakan Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025. Adapun reviu dilaksanakan setelah pelaksanaan verifikasi rancangan akhir yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar setelah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025.

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025, telah didukung dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
   a. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kota Makassar Tahun 2025.
   b. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s.d. 2026.
   c. Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

www.inspektorat.makassarkota.go.id
Email : inspektorat_makassar@yahoo.com

2. Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 telah disajikan dengan sistematika sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
3. Pencantuman program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator dan target kinerja dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja PD belum sepenuhnya bersesuaian dengan Perubahan RKPD.
4. Pencantuman program dan kegiatan pada Bab III Rancangan Akhir Perubahan Renja PD telah didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada Bab II.
5. Kinerja kegiatan/sub kegiatan telah mendukung kinerja program Perubahan Renja PD dan Renstra PD.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar telah direkomendasikan agar melakukan penyesuaian indikator kinerja dan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan antara Rancangan Akhir Perubahan Renja PD dengan Perubahan RKPD.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar melalui Surat Nomor 500.15/2630/Disnaker/VIII/2025 Tanggal 11 Agustus 2025 memberikan tanggapan bahwa akan melakukan perbaikan sebagaimana uraian catatan hasil. Adapun sampai dengan diterbitkannya Laporan Hasil Reviu, belum terdapat penyampaian tindak lanjut sesuai catatan hasil reviu.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1329/IJ Tanggal 3 Juni 2022 hal Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023.

www.inspektorat.makassarkota.go.id
Email : inspektorat_makassar@yahoo.com

III. TUJUAN REVIU

Tujuan dari dilaksanakannya Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 adalah untuk memastikan bahwa dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2025 telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2025, meliputi:

1. Pengujian atas kesesuaian Rancangan Akhir Perubahan Renja PD dengan Perubahan RKPD.
2. Pengujian atas penyusunan substansi antar Bab Rancangan Akhir Perubahan Renja PD.

Ruang lingkup reviu mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

V. METODOLOGI REVIU

1. Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1329/IJ Tanggal 3 Juni 2022 hal Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023.
2. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 serta melaksanakan wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait dengan proses penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2025.
3. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Makassar Nomor 152/ST-Reviu/Insp/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025, dengan susunan tim sebagai berikut:

Penanggung Jawab	: Dr. A. Asma Zulistia Ekayanti, S.E., M.M., CGCAE.
Wakil Penanggungjawab	: Arnawanty, S.E., Ak., M.M.
Pengendali Teknis	: Rismawati Tahir, S.E.
Ketua Tim	: Syahriyanti, S.Sos
Anggota Tim	: 1. Andi Wahidin, S.E., M.Si.
	2. Andi Muhammad Akmal Malla, S.E.

www.inspektorat.makassarkota.go.id
Email : inspektorat_makassar@yahoo.com

3. Andi Azis Abubakar,S.Kom,M.M.
4. A. Tenriwali, S.E.
5. Rahayu Amaliah, S.Psi.
6. Muh. Dahri, S.E.
7. Yunita Irianingsih, S.E.
8. Dede Fitriani Choirunisa, S.H.
9. Gusmar Adi Nugroho, S.E.
10. Yudha Mangunsardi, S.T.
11. Muhammad Ruhyadi Natsir, A.Md.

Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan selama 8 (delapan) hari kerja mulai tanggal 24 Juli s.d. 4 Agustus 2025.

VI. GAMBARAN UMUM

1. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang Perubahan RKPD.
2. Langkah kerja Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2025 terdiri dari:
   a. Pengujian atas kesesuaian Rancangan Akhir Perubahan Renja PD dengan Perubahan RKPD, meliputi:
      1) Mendapatkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja PD.
      2) Meyakinkan perangkat daerah telah menyusun Perubahan Renja PD dan pencantuman program/kegiatan/sub kegiatan beserta Indikator dan target kinerja dalam Perubahan Renja PD telah sesuai dengan Perubahan RKPD.
   b. Pengujian atas penyusunan substansi antar Bab pada Rancangan Akhir Perubahan Renja PD, meliputi:
      1) Meyakinkan program dan kegiatan pada Bab III Perubahan Renja PD didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Bab II.

www.inspektorat.makassarkota.go.id
Email : inspektorat_makassar@yahoo.com

2) Meyakinkan kinerja kegiatan/sub kegiatan mendukung kinerja program Perubahan Renja PD dan Renstra PD.

3. Dalam melaksanakan Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja PD dibutuhkan beberapa dokumen pendukung antara lain:
   a. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
   b. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s.d. 2026.
   c. Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025.
4. Program dan Kegiatan berdasarkan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas 8 kegiatan, yaitu:
      1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
      2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
      3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
      4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
      5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
      6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
      7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
      8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   b. Program Perencanaan Tenaga terdiri atas 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).
   c. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja terdiri atas 5 kegiatan, yaitu:
      1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.
      2) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
      3) Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
      4) Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil.
      5) Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
   d. Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas 4 kegiatan, yaitu:
      1) Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota.
      2) Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
      3) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.

www.inspektorat.makassarkota.go.id
Email : inspektorat_makassar@yahoo.com

4) Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.

e. Program Hubungan Industrial terdiri atas 2 kegiatan, yaitu:

1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota.

2) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

VII. URAIAN HASIL REVIU

Hasil Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025, mengungkapkan kondisi reviu sebagai berikut:

1. Pengujian atas kesesuaian Rancangan Akhir Perubahan Renja PD dengan Perubahan RKPD

a. Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025, telah didukung dengan kelengkapan dokumen antara lain sebagai berikut:

1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s.d. 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

3) Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Hasil reviu terhadap kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja PD menunjukkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 telah didukung dengan kelengkapan dokumen yang memadai.

www.inspektorat.makassarkota.go.id
Email : inspektorat_makassar@yahoo.com

b. Pengujian atas Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD

1) Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah tanggal 25 Juli 2025 telah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
   a) Pendahuluan.
   b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025.
   c) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
   d) Penutup.
2) Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa pencantuman program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator dan target kinerja dalam Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025 pada Bab III Rancangan Akhir Perubahan Renja PD belum sepenuhnya bersesuaian dengan Bab V Perubahan RKPD, sebagai berikut:

No	Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD	Indikator Kinerja Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD	Target Kinerja Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD	Catatan Hasil Reviu
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Terdapat ketidaksesuaian Indikator kinerja kegiatan pada Perubahan Renja PD dengan Perubahan RPKD yaitu "Ketersediaan Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah" pada Perubahan Renja PD dan "Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah" pada Perubahan RKPD
2	Tidak tercantum	-	-	Sub Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja tidak tercantum pada dokumen Perubahan Renja PD yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan indikator kinerja yaitu "Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD", target kinerja yaitu "12 Laporan"
3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118 Unit	Terdapat ketidaksesuaian Indikator kinerja kegiatan pada Perubahan Renja PD dengan Perubahan RPKD yaitu "Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" pada Perubahan Renja PD dan "Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" pada Perubahan RKPD
4	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	50 Perusahaan	Terdapat ketidaksesuaian satuan target kinerja kegiatan pada dokumen Perubahan Renja PD tercantum 50 Perusahaan, pada dokumen Perubahan RKPD tercantum 50 orang
5	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitasi Layanan	4340 Orang	Terdapat perbedaan target kinerja kegiatan pada Perubahan Renja PD dengan Perubahan RPKD yaitu "4340 Orang" pada Perubahan Renja PD dan "4383 Orang" pada Perubahan RKPD
6	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	12 Dokumen	Terdapat ketidaksesuaian satuan target kinerja kegiatan pada Perubahan Renja PD dengan Perubahan RPKD yaitu "12 Dokumen" pada Perubahan Renja PD dan "12 Bulan" pada Perubahan RKPD

www.inspektorat.makassarkota.go.id
Email : inspektorat_makassar@yahoo.com

Atas Catatan Hasil Reviu tersebut, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar agar melakukan penyesuaian indikator kinerja dan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan antara Rancangan Akhir Perubahan Renja PD dengan Perubahan RKPD.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar melalui Surat Nomor 500.15/2630/Disnaker/VIII/2025 Tanggal 11 Agustus 2025 memberikan tanggapan bahwa akan melakukan perbaikan sebagaimana uraian catatan hasil. Adapun sampai dengan diterbitkannya Laporan Hasil Reviu, belum terdapat penyampaian tindak lanjut sesuai catatan hasil reviu.

2. Pengujian atas Penyusunan Substansi antar Bab pada Rancangan Akhir Perubahan Renja PD

a. Pengujian Kesesuaian Program dan Kegiatan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD dengan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa program dan kegiatan pada Bab III Rancangan Akhir Perubahan Renja PD telah didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada Bab II dengan uraian sebagai berikut:

No	Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan pada BAB III Rancangan Akhir Perubahan Renja PD	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada BAB II Rancangan Akhir Perubahan Renja PD
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Berdasarkan permasalahan pengangguran maka dapat digambarkan perumusan isu-isu penting ketenagakerjaan diantaranya adalah: 1. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia. 2. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan. 3. Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial.. Keberhasilan pembagunan ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.
a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
c	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
d	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
e	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
f	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
g	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
h	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	
A	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
3	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	
a	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
b	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
c	Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	
d	Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	

www.inspektorat.makassarkota.go.id
Email : inspektorat_makassar@yahoo.com

e	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
4	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	
a	Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
b	Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	
c	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
d	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah	
5.	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	
a	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	
b	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	

b. Pengujian Kesesuaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Kinerja Program Perubahan Renja PD dan Renstra PD

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kinerja kegiatan/sub kegiatan telah mendukung kinerja program Perubahan Renja PD dan Renstra PD yaitu pencantuman indikator kinerja program dan target kinerja program dalam Tabel Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Bab III Rancangan Akhir Perubahan Renja PD telah bersesuaian dengan Renstra PD, sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan Perubahan Renja PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Perubahan Renja PD	Target Kinerja Program/ Kegiatan Perubahan Renja PD
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 2. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	90% 100%
II	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	96,67%
III	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 2. Jumlah Peserta Pelatihan *Skill Traning* Gratis Sektor Ketenagakerjaan 3. Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya 4. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1,03 % 1.230 Orang 20,49 % 22,50 %
IV	Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar 2. Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	65% 9.745 peluang kerja
V	Program Hubungan Industrial	1. Angka sengketa perusahaan-pekerja per tahun 2. Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	3,27 % 51,01 %

www.inspektorat.makassarkota.go.id
Email : inspektorat_makassar@yahoo.com

No	Program/Kegiatan Perubahan Renja PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Perubahan Renja PD	Target Kinerja Program/ Kegiatan Perubahan Renja PD
		3 Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	84 %

VIII. APRESIASI

Inspektorat Daerah Kota Makassar menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2025

Mengetahui,
INSPEKTUR

Dr. A. ASMA ZULISTIA EKAYANTI, S.E., M.M., CGCAE.
Pangkat . Pembina Tk I
NIP : 19840203 200604 2 011

WAKIL PENANGGUNG JAWAB

ARNAWIANTY, S.E., Ak., M.M.
Pangkat . Pembina Tk.I
NIP : 19760911 200112 2 004

PENGENDALI TEKNIS

RISMAWATI TAHIR, S.E.
Pangkat Penata Tk I
NIP . 19821204 200804 2 002

KETUA TIM

SYAHRIYANTI, S.Sos.
Pangkat Penata Tk.I
NIP 19790510 200502 2 005

Tembusan
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

www. inspektorat-makassarkota.go.id
E-mail : inspektorat_makassar@yahoo.com

FORMULIR SIMPULAN ATAS STATUS REKOMENDASI

DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

No	Langkah Kerja	Catatan Hasil Reviu				Tindak Lanjut SKPD	Simpulan atas Tindak Lanjut	
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan	Rekomendasi		Sesuai	Tidak Sesuai
1	**Pengujian atas Kesesuaian Rancangan Akhir Perubahan Renja PD dengan Perubahan RKPD**							
a	Mendapatkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja PD	√		Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025, telah didukung dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut: a. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kota Makassar Tahun 2025. b. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 s.d. 2026. c. Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.				
b	Meyakinkan perangkat daerah telah menyusun Perubahan Renja PD dan pencantuman program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator dan target kinerja dalam Perubahan Renja PD telah sesuai dengan Perubahan RKPD	√		Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 telah disajikan dengan sistematika sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017				
			√	Pencantuman program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator dan target kinerja dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja PD belum sepenuhnya bersesuaian dengan Perubahan RKPD.	Melakukan penyesuaian indikator kinerja dan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan antara Rancangan Akhir Perubahan Renja PD dengan Perubahan RKPD.	-		√

No	Langkah Kerja	Catatan Hasil Reviu				Tindak Lanjut SKPD	Simpulan atas Tindak Lanjut	
		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan	Rekomendasi		Sesuai	Tidak Sesuai
2	**Pengujian atas Penyusunan Substansi antar Bab pada Rancangan Akhir Perubahan Renja PD**							
a	Meyakinkan Program dan Kegiatan pada Bab III Perubahan Renja PD didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Bab II	√		Pencantuman program dan kegiatan pada Bab III Rancangan Akhir Perubahan Renja PD telah didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada Bab II.				
b	Meyakinkan kinerja kegiatan/sub kegiatan mendukung kinerja program Perubahan Renja PD dan Renstra PD	√		Kinerja kegiatan/sub kegiatan telah mendukung kinerja program Perubahan Renja PD dan Renstra PD.				

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
INSPEKTORAT

LAPORAN

HASIL PEMERIKSAAN

REVIU : Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025

KOTA MAKASSAR

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : 174/Insp/780.08/VIII/2025

TANGGAL : 11 Agustus 2025

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KETENAGAKERJAAN
Jl. Andi Pangeran Pettarani No. 72 Telp/Fax (0411) 8539 01 Makassar 90222
Email: Website: Disnaker.makassar.go.id

Makassar, 11 Agustus 2025

Nomor : 500.15/2630/Disnaker/VIII/2025
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan atas Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025

Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 oleh Inspektorat Kota Makassar dengan ini disampaikan bahwa kami akan melakukan perbaikan sebagaimana uraian catatan hasil reviu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
Kota Makassar

NIELMA PALAMBA, SH. M.AP
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV c
Nip : 19651210 199112 2 006

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
INSPEKTORAT
Jalan Jend. A. Kara nan No. 02 A, Mp. ... nya Lajo Mas, Makassar, Kode P... 90224
Telepon (0411) 881550, Fax (0411) 8215755
E-mail: inspektorat_makassar@yahoo.com

CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN RENJA-PD) DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

Inspektorat Daerah Kota Makassar

Disusun oleh/Tanggal: Gusmar Adi Nugroho, S.E, 4 Agustus 2025

Ditelit oleh/Tanggal: Syahriyanti, S.Sos, 4 Agustus 2025

Disetujui oleh/Tanggal: Rismawati Tahir, S.E, 4 Agustus 2025

Sehubungan dengan penugasan Inspektur Kota Makassar berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Makassar Nomor 152/ST-Reviu/Insp/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025 untuk melaksanakan Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2025 dengan ini disampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut

I GAMBARAN UMUM

a. Ruang Lingkup Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2025 terdiri dari

b. Pengujian atas kesesuaian Rancangan Akhir Perubahan Renja PD dengan Perubahan RKPD meliputi

1) Mendapatkan Kelengkapan Dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja PD

2) Yakinkan perangkat daerah telah menyusun Perubahan Renja PD dan Yakinkan Pencantuman Program/Kegiatan/Sub Kegiatan beserta Indikator dan Target Kinerja dalam Perubahan Renja PD telah sesuai dengan Perubahan RKPD

Pengujian atas penyusunan substansi antar Bab pada Rancangan Akhir Perubahan Renja PD meliputi

1) Yakinkan Program dan Kegiatan pada Bab III Perubahan Renja PD didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Bab II.

2) Yakinkan kinerja kegiatan/sub kegiatan mendukung kinerja program Perubahan Renja PD dan Renstra PD

2. Program dan Kegiatan berdasarkan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 8 (delapan) kegiatan, yaitu

1) Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Program Perencanaan Tenaga terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

c. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja terdiri atas 5 (lima) kegiatan yaitu

1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
3) Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
4) Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
5) Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

d. Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas 4 (empat) kegiatan yaitu

1) Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten Kota
2) Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
4) Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

e. Program Hubungan Industrial terdiri atas 2 (dua) kegiatan yaitu

1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

2) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

II. URAIAN HASIL REVIU

Hasil Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 mengungkapkan kondisi reviu sebagai berikut

1 **Pengujian atas kesesuaian Rancangan Akhir Perubahan Renja PD dengan Perubahan RKPD**

a **Pengujian atas Kelengkapan Dokumen Pendukung**

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 telah didukung dengan kelengkapan dokumen antara lain sebagai berikut

1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 2026
3) Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Hasil reviu terhadap kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja PD menunjukkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 telah didukung dengan kelengkapan dokumen yang memadai

b. **Pengujian atas Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD**

1) Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah tanggal 25 Juli 2025 telah disajikan dengan sistematika sebagai berikut
   a) Pendahuluan
   b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025

c) Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, dan

d) Penutup

Kondisi tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 361 ayat (3)

2) Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa terdapat pencantuman program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator dan target kinerja dalam Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025 pada Bab III Rancangan Akhir Perubahan Renja PD yang belum bersesuaian dengan Bab V Perubahan RKPD, sebagai berikut

No	Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD	Indikator Kinerja Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD	Target Kinerja Program Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD	Catatan Hasil Reviu
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Terdapat ketidaksesuaian indikator kinerja kegiatan pada Perubahan Renja PD dengan Perubahan RPKD yaitu Ketersediaan Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Perubahan Renja PD dan Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tidak tercantum		Sub Kegiatan Indikator dan Target Kinerja tidak tercantum pada dokumen Perubahan Renja PD yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD target kinerja yaitu 12 Laporan
3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118 Unit	Terdapat ketidaksesuaian indicator kinerja kegiatan pada Perubahan Renja PD dengan Perubahan RPKD yaitu Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perubahan Renja PD dan Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perubahan RKPD
4	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang Mampu menyusun RTK Mikro	50 Perusahaan	Terdapat ketidaksesuaian satuan target kinerja kegiatan pada dokumen Perubahan Renja PD tercantum 50 Perusahaan, pada dokumen Perubahan RKPD tercantum 50 orang
5	Kegiatan Pelayanan Ketenagakerjaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan Diberdayakan dan Fasilitasi Layanan	4340 Orang	Terdapat perbedaan target kinerja kegiatan pada Perubahan Renja PD dengan Perubahan RPKD yaitu 4340 Orang pada Perubahan Renja PD dan 4367 Orang pada Perubahan RKPD
6	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	12 Dokumen	Terdapat ketidaksesuaian satuan target kinerja kegiatan pada Perubahan Renja PD dengan Perubahan RPKD yaitu 12 Dokumen pada Perubahan Renja PD dan 12 Bulan pada Perubahan RKPD

Email : inspektorat.makassar@yahoo.com

2. **Pengujian atas Penyusunan Substansi antar Bab pada Rancangan Akhir Perubahan Renja PD**

   a **Pengujian Kesesuaian Program dan Kegiatan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD dengan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

   Hasil pengujian menunjukkan bahwa program dan kegiatan pada Bab III Rancangan Akhir Perubahan Renja PD diyakini telah didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada Bab I dengan uraian sebagai berikut

No	Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan pada BAB III Rancangan Akhir Perubahan Renja PD	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada BAB II Rancangan Akhir Perubahan Renja PD
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Berdasarkan permasalahan pengangg... Desa dapat digambarkan per... isu penting keterlaksanaan ... adalah 1. Terbatasnya ... sekompeten ... tersedia 2. Masih rendahnya kualitas ... Desa dari segi pendidikan ... keterampilan Tingginya angka kasus ... Hubungan Industrial Kebermasalah ... ketenagakerjaan ... akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian ... karena tenaga kerja ... faktor produksi yang ... dalam ... diberdayakan ...
a	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
-	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
-	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
-	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
-	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
-	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
-	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	
-	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
3	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	
-	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
-	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
-	Kegiatan Pengesahan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	
-	Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan/Kec	
-	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
4	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	
-	Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
-	Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PTKS) dalam 1 satu Daerah Kabupaten/Kota	
-	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
-	Kegiatan Perlindungan PMI (TKI) dan Pos Pelayanan Penempatan Terpadu	
5	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	
-	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 satu Daerah Kabupaten/Kota	
-	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	

b. **Pengujian Kesesuaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Kinerja Program Perubahan Renja PD dan Renstra PD**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kinerja kegiatan/sub kegiatan telah diyakini dapat mendukung kinerja program Perubahan Renja PD dan Renstra PD yaitu pencantuman indikator kinerja program dan target kinerja program dalam Tabel Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Bab III Rancangan Akhir Perubahan Renja PD telah bersesuaian dengan Renstra PD sebagai berikut

No	Program/Kegiatan Perubahan Renja PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Perubahan Renja PD	Target Kinerja Program/ Kegiatan Perubahan Renja PD
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur** **Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah**	**90 %** **100%**
1	Penyusunan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[illegible]
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	[illegible]
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi BMD	[illegible]
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi	
4	Administrasi [illegible] Perangkat Daerah	[illegible] Jenis Jasa Administrasi Umum yang Tersedia	[illegible]
5	[illegible] Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[illegible] Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[illegible]
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[illegible]
II	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja**	**96 67%**
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Pada	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	[illegible]
III	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi** **Jumlah Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan** **Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya** **Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja**	**1 03** **1 230 Orang** **20 49** **22 50**
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan [illegible] Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi	[illegible]

INSPEKTORAT

No	Program/Kegiatan Perubahan Renja PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Perubahan Renja PD	Target Kinerja Program/Kegiatan Perubahan Renja PD
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	[illegible]
	Pendataan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Sumber Daya Pendidik Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Terintegrasi	[illegible]
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	[illegible]
	Penyelenggaraan Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	[illegible]
IV	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar**	65%
		Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	9.745 peluang kerja
	Pelayanan Antarkerja Dalam Kabupaten Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Oleh Sarana Pelayanan	[illegible]
	Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKS) dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Perusahaan LPTK yang Terdaftar	[illegible]
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online Kabupaten	[illegible]
	Pendataan PMI Purna Penempatan Antar Kabupaten Kota	Jumlah PMI yang Mendapatkan Pendampingan dan Pemberdayaan	[illegible]
V	**Program Hubungan Industrial**	**Angka sengketa perusahaan pekerja per tahun**	3.27
		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	51.01 %
		Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	84 %
	Pelaksanaan Perbaikan Syarat-syarat Kerja dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan yang Beroperasi dalam Satu Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Pelayanan Penyelesaian Perbaikan Syarat-syarat Kerja Bersama	[illegible]
		Perusahaan dan Pekerja yang Mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama	[illegible]
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Kabupaten Kota	Persentase Perkara Perselisihan yang diselesaikan	[illegible]

III. REKOMENDASI

Sehubungan dengan Uraian hasil reviu pada poin II di atas, maka direkomendasikan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar agar melakukan koreksi/perbaikan sebagaimana Uraian Catatan Hasil Reviu.

Makassar, 8 Agustus 2025

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR,

MELMA PARAMBA, S.H., M.A.P.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651210 199112 2 006

WAKIL PENANGGUNG JAWAB REVIU

ARNAWANTY, S.E., Ak., M.M.
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19760911 2001122 004

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
INSPEKTORAT

Jalan Teduh Bersinar No. 07 Komp. Griya Fajar Mas, Makassar Kode Pos : 90224
Telepon (0411) 881550, Fax (0411) 8215755
E-mail: inspektorat_makassar@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor: 152/ST-Reviu/Insp/VII/2025

Dasar : 1. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 Tanggal 18 Juli 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

2. Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 01/188.4.45/Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025.

Inspektur Kota Makassar memberikan tugas kepada :

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. A. Asma Zulistia Ekayanti, S.E., M.M., CGCAE	Penanggung Jawab
2.	Arnawanty, S.E., Ak., M.M.	Wakil Penanggung Jawab
3.	Rismawati Tahir, S.E.	Pengendali Teknis
4.	Syahriyanti, S.Sos.	Ketua Tim
5.	Andi Wahidin, S.E., M.Si.	Anggota Tim
6.	Andi Muhammad Akmal Malla, S.E.	Anggota Tim
7.	Andi Azis Abubakar, S.Kom., M.M.	Anggota Tim
8.	A. Tenriwali, S.E.	Anggota Tim
9.	Rahayu Amaliah, S.Psi.	Anggota Tim
10.	Muh. Dahri, S.E.	Anggota Tim
11.	Yunita Irianingsih, S.E.	Anggota Tim
12.	Dede Fitriani Choirunisa, S.H.	Anggota Tim
13.	Gusmar Adi Nugroho, S.E.	Anggota Tim
14.	Yudha Mangunsardi, S.T.	Anggota Tim
15.	Muhammad Ruhyadi Natsir, A.Md.	Anggota Tim

untuk melaksanakan Reviu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Kota Makassar Tahun 2025, selama 8 (delapan) hari kerja terhitung mulai tanggal 24 Juli s.d. 4 Agustus 2025, pada :

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar;
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
3. Dinas Pendidikan Kota Makassar;
4. Dinas Pengendalian Pendduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar;
5. Dinas Pariwisata Kota Makassar;
6. Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar;
7. Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar;
9. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar;
10. Dinas Kearsipan Kota Makassar;
11. Kecamatan Rappocini Kota Makassar;
12. Kecamatan Mamajang Kota Makassar;
13. Kecamatan Mariso Kota Makassar.

Laporan hasil penugasan ini diserahkan kepada Sekretariat paling lambat tanggal 4 Agutus 2025.
Demikian Surat Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Makassar, 24 Juli 2025
INSPEKTUR,

Dr. A. ASMA ZULISTIA EKAYANTI, S.E., M.M., CGCAE
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19840203 200604 2 011

Tembusan:
Wali Kota Makassar

Keputusan Inspektur Nomor 3638/Insp/700/2018 tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Kota Makassar: Aturan Perilaku Nomor 7 Huruf b "Auditor, PJUPD, Auditwan dan PNS tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya"

PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Dinas Perikanan dan Pertanian



RENCANA KERJA

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dipandang perlu untuk diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, dengan menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana di maksud Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan.:
1. Wakil Wali Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
7.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
9.	Dinas Sosial Kota Makassar
10.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
12.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
13.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Makassar
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
22.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
23.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
24.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
25.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
26.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
27.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
28.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
29.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar

31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
32.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
34.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
35.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
36.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
37.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
38.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
39.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
40.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
43.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
44.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
45.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
46.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
47.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
58.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
49.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
50.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar
51.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

WALIKOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik.

Penyusunan Renja Perubahan ini merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021–2026, serta memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, baik di tingkat kota maupun nasional. Dokumen ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan, termasuk adanya perubahan kebijakan, prioritas pembangunan, serta kebutuhan riil di lapangan yang memerlukan penyelarasan target dan alokasi sumber daya.

Melalui Renja Perubahan ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar pada tahun 2025 dapat lebih terarah, efektif, dan mampu memberikan hasil yang optimal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam bidang perikanan, pertanian, dan Peternakan.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen ini, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Semoga dokumen Renja Perubahan ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi dasar bagi peningkatan kinerja perangkat daerah ke depan.

Makassar, 12 Agustus 2025

KEPALA DINAS
PERIKANAN DAN PERTANIAN
KOTA MAKASSAR,

AULIA ARSYAD, S.STP., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
NIP : 197805011996122001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan..... 4
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan..... 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 40
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... 43
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 44
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masayarkat... 71

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 77
3.1 Rumusan perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 77
3.2 Rekapitulasi program dan kegiatan 78

BAB IV PENUTUP 103
4.1 Catatan Penting..... 103
4.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan 104
4.1 Rencana Tindak Lanjut..... 104

DAFTAR TABEL

TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
2.1	Evaluasi Renja Kerja SKPD Triwulan II Tahun 2025	9
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD	41
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal	46
2.5	Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2025	72
2.6	Usulan Pokok Pokok Pikiran Tahun 2025	75
3.2	Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja PD	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Kota Makassar Tahun 2025 triwulan Kedua. Sedangkan untuk sistematika dan tata cara penyusunan RENJA Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Meteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan Tahun 2025 telah disusun pada Tahun Anggaran 2024 dan dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Namun, seiring dengan dinamika yang berkembang hingga Triwulan II Tahun 2025, diperlukan penyesuaian terhadap dokumen Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II menjadi dasar penting dalam melakukan penyesuaian RENJA Tahun 2025. Evaluasi tersebut mengindikasikan adanya kebutuhan untuk menyelaraskan target yang telah ditetapkan dengan kondisi aktual di lapangan, sehingga dipandang perlu untuk melakukan Perubahan RENJA Tahun 2025.

Disisi lain keberlanjutan program dan kegiatan dalam membangun Kota Makassar terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian lebih untuk segera ditindak lanjuti, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dirasakan sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Makassar secara efektif dan efisien.

Dalam rangka mengembangkan potensi perikanan, pertanian dan peternakan yang lebih maju dan berkualitas, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan

Pembangunan Daerah dalam Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Pertanian dan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut P-RKPD.

1.2 Landasan Hukum.

Penyusunan perencanaan dan penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang nomor 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani;
3. Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang - undang nomor 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2021 Nomor 5).
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kota Makassar Tahun 2023 No 8);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2024-2043;
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Makassar Tahun 20025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6);

17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pertanian;
18. Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2025.
19. Surat Edaran Wali Kota Makassar nomor 050.13 / 103 / S.Edar / Bappeda / III /2025 tentang persiapan penyusunan perubahan RKPD Kota Makassar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Pembuatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, berisi Perubahan Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, baik itu dalam bentuk kerangka regulasi maupun dalam bentuk kerangka anggaran. Perubahan RENJA ini bertujuan untuk memaksimalkan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun berkenaan.

Selain dari pada itu Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Pertanian bertujuan :

a. Penyesuaian Rencana program strategis dan rencana program prioritas kepala daerah terpilih
b. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi di masing-masing bidang Perangkat Daerah.
c. Menyesuaikan indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi di masing-masing bidang Perangkat Daerah.
d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, keterkaitan antara Perubahan Renja Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dengan dokumen P-RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan II Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Tahun 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah 13 tahun 2019 dan Permendagri 18 tahun 2020.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Memuat Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah , Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Memuat perbandingan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancanganl RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda serta menampilkan Tabel T-C.31;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat kajian terhadap berbagai usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat, baik melalui musyawarah perencanaan pembangunan (*Musrenbang*) di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun hasil dari kanal partisipatif lainnya.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Kota Makassar

Berisikan Tabel yang memuat Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

3.2 Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Memuat secara garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi Jumlah program dan jumlah kegiatan,

Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu), Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya, serta Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; Kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

4.2 Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Memuat Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, termasuk hasil penelaahan usulan masyarakat, berpedoman pada sejumlah kaidah dasar untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Menggambarkan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan perangkat daerah setelah dilakukan penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat dan Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Reviu evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 merupakan bagian yang cukup penting dalam penyusunan Perubahan Renja tahun 2025. Hal ini disebabkan pelaksanaan Renja 2025 merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kinerja SKPD di tahun sebelumnya sekaligus mengevaluasi kendala yang mungkin dihadapi pada saat pelaksanaan program.

Sesuai dengan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, maka untuk mengukur kinerja Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 telah dirumuskan sasaran strategis yang harus direalisasikan yang dapat dilihat pada indikator-indikator kinerja setiap tahunnya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025, guna mencapai ketiga sasaran tersebut dituangkan ke dalam 11 program dan 27 Kegiatan yang terdiri dari 59 sub kegiatan

Adapun capaian program/kegiatan/sub kegiatan triwulan II tahun berkenaan dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.1 (Tabel E.81)
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA SKPD
DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA MAKASSAR
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I (JANUARI s/d JUNI) TAHUN 2025

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II											
									K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp		
1	2					3	4	5	6			7		9		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				42 662 113 787 ,0	42.136. 213 787 ,0		5.640 3 44.656 0		8.270 4 02.019 0		14 910. 746 678 ,0		35,3 9		14.910 746 678 ,0		17, 26		
	3	2 8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				8 969.0 19 160, 0	8 648.4 19 160, 0		365 86 8 560,0		490.09 5.060,0		855 963 560,0		10,1 1		855 963 .560,0		4,2 6		
	3	2 8	3.26 3.27 0.00.01.00 00			Dinas Perikanan dan Pertanian				8 969 0 19 160, 0	8 648 4 19 160, 0		365 86 8 560,0		490.09 5.060,0		855 963 .560,0		10,1 1		855 963 .560,0		4,2 6		
	3	2 8	3 26 3.27 0.00.01.00 00	0 3		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Cakupan Dinas Kelompok Nelayan	%	18, 50	3 340.1 75 850, 0	3 326.1 75 850, 0	0,0	283 46 9 150,0	0,0	317.49 1.850,0	0,0	871 160 600 0	0,0	17,1 7	0,0	871 160 600,0	0,0	8,1 7	Dinas Perikanan dan Pertanian	
							Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	20 713 ,0			3.2 48, 50		4.2 45, 70		7.4 94, 20		36,1 8		28 0 88 1 0		38, 47			
	3	2 5	3.26 3.27 0.00.01.00 00	0 3	2. 0 1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	20 713 ,0	389.462 .200 0	375.462 .200,0	3.2 48, 50	51 290. 200,0	4.2 45, 70	122.83 5.800 0	7.4 94, 20	174 226 .000,0	36,1 8	44,4 8	7 49 4.20	174.226 .000 0	0 0	26, 78		
	3	2 5	3 25.3.27 0 00.01 0000	0 3	2 0 1	0 0 0 1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	12,0	284 129 200,0	284 129 200,0	0,0	51.390 200,0	3,0	62 235. 800 0	3,0	113 626 000,0	25,0	39,9 9	3,0	113 626 000 0	0,0	20,8 1		

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II											
										K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.		
1	2						3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/5 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	3	25	3.25.3.27.0.00.01.0000	03	201	0002	Penyelesaian Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	202,0	105 333 000,0	91.333.000,0	0,0	0,0	202,0	80.600.000,0	202,0	60 600.000,0	100	56,35	202,0	60.600.000,0	0,0	57,53		
	3	25	3.25.3.27.0.00.01.0000	03	202		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pemberdayaan Pemberdayaan Nelayan Kecil**	**Kelompok**	**153,0**	**80.219.000,0**	**80.219.000,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	3	25	3.25.3.27.0.00.01.0000	03	202	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	160,0	80.219.000,0	80.219.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	3	25	3.25.3.27.0.00.01.0000	03	203		**Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pantera dan Rajawali**	**Layanan**	**2,0**	**2.870.495.680,0**	**2.870.495.680,0**	0,0	202.279.900,0	0,0	194.655.700,0	0,0	396.934.600,0	0,0	13,83	0,0	396.934.600,0	0,0	6,84		
	3	25	3.25.3.27.0.00.01.0000	03	203	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	2,0	2.870.495.680,0	2.870.495.680,0	0,0	202.279.900,0	0,0	194.655.700,0	0,0	396.934.600,0	0,0	13,83	0,0	396.934.600,0	0,0	6,84		

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2024)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II											
									K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp		
1	2					3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/6 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	3	25	3.25.3.27.0.00.01.0000	02		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												12,09	17,18			17,74	6,17		
	3	25	3.25.3.27.0.00.01.0000	03		PREDIKAT KINERJA												BANGAT RENDAH	BANGAT RENDAH			BANGAT RENDAH	BANGAT RENDAH		
	3	25	3.25.3.27.0.00.01.0000	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1 859	1 480.4 31 800,0	1.249.8 31 800,0	319,44	112 19 9 400,0	343,90	187 71 3 780,0	463 88	269 913 100,0	42 85	21,25	2.16 2,16	269 913 100,0	41,94	7,37	Dinas Perikanan dan Perkan	
	3	25	3.25.3.27.0.00.01.0000	04	2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Rekomendasi	1,0	1.282.000,0	1.282.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	3	25	3.25.3.27.0.00.01.0000	04	201	0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif dan Intensif serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Rekomendasi	1,0	1.282.000,0	1.282.000,0	0,0	0,0	0 0	0,0	0,0	0,0	0 0		0,0	0,0	0,0			

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN SKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERATURAN DAERAH PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
													I		II											
										K	Rp. (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 12/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 13/6*100%		15	16
	3	2 5	3.25.3.27 0.00.01.0000	0 4	2 0 2		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembudidayaan Ikan Kecil Yang Dikembangkan	Kelompok	80,0	374.564.800,0	153.964.800,0	0,0	0,0	0,0	1.530.350,0	0,0	1.530.350,0	0,0	0,93	0,0	1.530.350,0	0,0	0,16		
	3	2 5	3.25.3.27 0.00.01.0000	0 4	2 0 2	0 0 0 1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	80,0	44.786.000,0	26.386.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	3	2 5	3.25.3.27 0.00.01.0000	0 4	2 0 2	0 0 0 2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	80,0	130.408.000,0	103.808.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	3	2 5	3.25.3.27 0.00.01.0000	0 4	2 0 2	0 0 0 4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	80,0	199.370.500,0	33.770.500,0	0,0	0,0	0,0	1.530.350,0	0,0	1.530.350,0	0,0	4,53	0,0	1.530.350,0	0,0	0,30		
	3	2 5	3.25.3.27 0.00.01.0000	0 4	2 0 4		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Ton	215,0	1.104.618.300,0	1.104.618.300,0	319,60	112.199.400,0	343,90	154.123.350,0	663,50	266.322.750,0	42,86	24,30	663,50	266.322.750,0	0,0	9,92		

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II											
									K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp		
1	2					3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 10/8 * 100%		13 = 7+12		14 = 10/6*100%		15	16
	3	25	3.25.3.27.0.00.01.0000	04	204	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12,0	247.870.000,0	247.870.000,0	3,0	48.042.000,0	3,0	45.184.500,0	6,0	93.216.500,0	50,0	37,61	6,0	93.216.500,0	0,0	17,75		
	3	25	3.25.3.27.0.00.01.0000	04	204	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1,0	291.830.600,0	291.830.600,0	0,0	54.617.400,0	0,0	79.627.600,0	0,0	134.145.000,0	0.0	45,97	0,0	134.145.000,0	0.0	17,57		
	3	25	3.25.3.27.0.00.01.0000	04	204	0003	Penyaminan Keterseidiaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Paket	14,0	406.887.300,0	406.887.300,0	0,0	0,0	0,0	4.901.250,0	0,0	4.901.250,0	0,0	1,20	0,0	4.901.250,0	0,0	0,46		
	3	25	3.25.3.27.0.00.01.0000	04	204	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tertuji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	1,0	5.825.000,0	5.825.000,0	0,0	0,0	0.0	4.488.000,0	0,0	4.488.000,0	0,0	77,05	0,0	4.488.000,0	0,0	3.21		
	3	25	3.25.3.27.0.00.01.0000	04	204	0005	Perencanaan Pengembangan Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Dokumen	1,0	126.202.500,0	25.999.500,0	0,0	0,0	0,0	1.661.000,0	0,0	1.661.000,0	0,0	6,39	0,0	1.661.000,0	0.0	0,95		

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2026)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II													
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5	6			7		8		9+10+11+12		12 = 13/5 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	3	25	3 25.3 27.0 00.01 0000	04	204	0007	Perencanaan, dan Pengelolaan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengelolaan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Paket	7,0	25.999.500,0	126.202.500,0	0,0	9 600 000,0	0 0	20.371 000,0	0,0	29 971 000,0	0,0	23 75	0,0	29 971 000,0	0,0	17,05		
	3	25	3.25.3.27 0.00.01.00 00	04			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											42,58	22,35			41,94	7,35		
	3	25	3.25 3 27. 0.00 01 00 00	04			PREDIKAT KINERJA											SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	25	3 25.3 27. 0.00.01 00 00	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Jumlah Kelompok unit usaha yang diawasi	%	100 ,0	63 290 500 0	63.290 500,0	27, 0	0,0	25, 0	14.869 350 0	52, 0	14 889. 668,0	52,0	23,53	52,0	14.889 350 0	52, 0	23, 53	Dinas Perikanan dan Pertanian	
	3	25	3.25 3.27. 0.00.01 00 00	05	201		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Unit Usaha Pembudidaya Ikan yang diawasi	Kelompok	51, 0	63 290. 500,0	63 290. 500 0	14 0	0,0	13, 0	14 889. 350,0	27, 0	14.889 350 0	52,94	23,53	27,0	14.889 350.0	0,0	23, 53		

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II											
									K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp		
1	2					3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/6 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	3	25	3.25 3 27 0. 00.01.0000	05	201	0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	51,0	63 290.5 00,0	63 290.5 00,0	14,0	0,0	13,0	14 589 850,0	27,0	14 589 8 50,0	52,9 4	23,5 3	27,0	14.589 8 50,0	0,0	23,5 3		
	3	25	3.25 3.27 0.00.01.00 00	05			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												52,0	23,5 3			52, 0	23, 53		
	3	25	3.25.3.27 0.00 01.00 00	05			PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	25	3.25 3.27 0.00 01.00 00	05			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	27 90	1.088 1 21.000, 0	1.006 1 21 000, 0	7,6 3	0 0	7,9 0	0 0	15, 53	0,0	55,6 6		49,8 3	0,0	64, 78		Dinas Perikanan dan Pertanian	
	3	25	3.25 3.27 0.00.01 00 00	05	203		Penyediaan dan Pengolahan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pengolah Hasil Perikanan	Kelompok	51, 0	1.085.1 21.000, 0	1 006.1 21.000, 0	12 0	0,0	13, 0	0,0	25, 0	0,0	49,0 2		26.0	0,0	0,0			
	3	25	3.25 3 27 0. 00.01.0000	05	203	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	28,0	1 085 12 1 000,0	1 006 12 1 000,0	8,0	0,0	8,0	0,0	16,0	0,0	55,6 6		16,0	0,0	0,0			

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERAMCAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II											
										K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp		
1	2						3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/5 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	3	27	3.26.3.27 0.00.01.00 00	01			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												88,66	0,0			84,78	0,0		
	3	27	3.26.3.27 0.00.01.00 00	01			PREDIKAT KINERJA												KURANG	SANGAT KURANG			SANGAT KURANG			
	3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTAMAN				36.713.894.607,0	36.478.794.607,0		6.274.476.156,0		7.780.306.969,0		14.054.783.126,0		38,64		14.054.783.126,0		19,33		
	3	27	3.26.3.27 0.00.01.00 00				Dinas Perikanan dan Pertanian				36.713.894.607,0	36.478.794.607,0		6.274.476.156,0		7.780.306.969,0		14.054.783.126,0		38,64		14.054.783.126,0		19,33		
	3	27	3.26.3.27 0.00.01.00 00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90,0	30.562.988.419,0	30.922.988.419,0	20,0	5.991.593.785,0	25,0	7.294.725.469,0	45,0	13.286.319.426,0	88,0	43,53	45,0	13.286.319.426,0	50,0	23,65	Dinas Perikanan dan Pertanian	
								Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	%	100,0			25,0					88,0				50,0			
								Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90,0			20,0		25,0		45,0		88,0		45,0		50,0		
	3	27	3.26.3.27 0.00.01.00 00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100,0	166.480.738,0	166.480.738,0	20,0	42.888.200,0	25,0	10.922.600,0	50,0	53.510.900,0	80,0	32,14	50,0	53.510.900,0	0,0	16,63		

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II												
										K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.		
1	2						3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/6 * 100%		13 = 9+13		14 = 18/6*100%		15	16
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3,0	88.615.000,0	88.615.000,0	1,0	31.554.800,0	1,0	3.713.000,0	2,0	35.267.800,0	66.67	40.07	2,0	35.267.800,0	0,0	23,35		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	01	201	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,0	5.963.200,0	5.963.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0				
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	01	201	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,0	7.771.500,0	7.771.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0				
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	01	201	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,0	4.303.500,0	4.303.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0				
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	01	201	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,0	4.523.500,0	4.523.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0				

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II											
									K	Rp (FISIK)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp		
1	2						3	4	5	6			7		8		9 = 7+8+11+12		12 = 13/5 * 100%		13 = 7+13		14 = 13/5*100%		15	16
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1,0	3.112.000,0	3.112.000,0	1,0	1.417.000,0	0,0	0,0	1,0	1.417.000,0	100,0	45,53	1,0	1.417.000,0	0,0	22,63		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4,0	49.792.080,0	49.792.080,0	1,0	9.616.400,0	1,0	7.209.600,0	2,0	16.826.000,0	50,0	33,79	2,0	16.826.000,0	0,0	14,53		
	3	**27**	**3.25.3.27.0.00.01.0000**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Penyelenggaraan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Paket**	**100,0**	**27.838.787.867,0**	**27.838.787.867,0**	**38,0**	**3.863.192.348,0**	**36,0**	**4.680.455.486,0**	**74,0**	**12.183.647.834,0**	**50,0**	**43,77**	**50,0**	**12.183.647.834,0**	**0,0**	**26,41**		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	184,0	27.251.267.887,0	27.251.267.887,0	184,0	5.357.062.346,0	0,0	6.534.325.486,0	184,0	11.891.387.834,0	100,0	43,64	184,0	11.891.387.834,0	0,0	24,40		

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II													
									K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+12		14 = 13/6*100%		15	16
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,0	458.520.000,0	458.520.000,0	0,0	114.630.000,0	0.0	114.630.000,0	0,0	229.260.000.0	0,0	50,0	0,0	229.260.000,0	0,0	24,83		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	12,0	126.000.000,0	126.000.000,0	3,0	31.500.000,0	3,0	31.500.000,0	6,0	63.000.000,0	50,0	50,0	6,0	63.000.000,0	0,0	25,0		
	3	**27**	**3.25.3.27.0.00.01.0000**	**01**	**202**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**Persen**	**90,0**	**319.800.000,0**	**319.800.000,0**	**26,0**	**213.000.000,0**	**30,0**	**44.013.060,0**	**56,0**	**257.013.060,0**	**61.11**	**80,44**	**56,0**	**257.013.060,0**	**0,0**	**26,36**		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	01	205	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	100,0	15.000.000,0	15.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	149,0	304.500.000,0	304.500.000,0	141,0	213.000.000,0	6,0	44.013.060,0	147,0	257.013.060,0	98,66	84,40	147,0	257.013.060,0	0,0	33,27		

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA RKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA RKPD TAHUN YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II											
									K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2						3	4	5			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 13/6*100%		15	16
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	Persen	100,0	534 846 880,0	344 846 880,0	25,0	49.341.133 0	30,0	285 05 8.470 0	55,0	384.594 653,0	36,0	36,0	55,0	304.594 .653 0	0,0	17 23		
	3	27	3 25 3 27 0. 00.01.0000	01	206	0001	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,0	3 561 00 0 0	3 561 00 0 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0 0	0,0	0,0			
	3	27	3 25 3 27 0. 00.01.0000	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perajatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,0	191 987 180,0	191 987 180,0	1,0	7 684 5 00,0	3,0	140.309 550,0	4,0	147 994 050,0	66,6 7	77,0 9	4,0	147 994 050,0	0,0	50,2 2		
	3	27	3 25 3 27 0 00.01.0000	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2,0	23 798.4 00,0	23 798.4 00,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	3	27	3 25 3 27 0 00.01 0000	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,0	141 700 000,0	141 700 000,0	0,0	0,0	0 0	55 550 000,0	0,0	55.550.0 00,0	0,0	39,2 0	0,0	55.550 0 00,0	0,0	39,2 2		

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II											
									K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp		
1	2						3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 12/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12,0	17.400.000,0	17.400.000,0	3,0	200.000,0	3,0	1.005.000,0	4.0	1.205.000,0	50,0	6.93	4,0	1.205.000,0	0,0	3.02		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,0	265.000.000,0	225.000.000,0	3,0	29.656.683.0	3,0	31.940.920.0	6,0	81.597.603,0	50,0	36,27	6,0	81.597.603,0	0,0	12,77		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	01	206	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12,0	241.400.000,0	241.400.000,0	3,0	12.000.000,0	3,0	6.250.000,0	6,0	18.250.000,0	50,0	7,56	6,0	18.250.000,0	0,0	3,78		
	3	**27**	**3.25.3.27.0.00.01.0000**	**01**	**207**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persen**	**0,0**	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**			
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Unit	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0				

NO	KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2024)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II											
										K	Rp. (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.		
1	2						3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 12/9 * 100%		13 = 7+12		14 = 13/6*100%		15	16
	0	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	0 1	2.0.5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemantauan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Paket	100,0	887.975.172,0	887.975.172,0	25,0	116.122.376,0	25,0	113.091.061,0	50,0	226.213.481,0	50,0	38,81	50,0	226.213.481,0	0,0	18,44		
	0	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	0 1	2.0.5	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,0	198.492.000,0	198.492.000,0	3,0	48.082.000,0	3,0	42.893.300,0	6,0	90.975.300,0	50,0	45,83	6,0	90.975.300,0	0,0	19,06		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	0 1	2.0.5	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,0	311.483.172,0	311.483.172,0	3,0	55.040.370,0	3,0	55.947.581,0	6,0	110.987.951,0	50,0	35,63	6,0	110.987.951,0	0,0	15,41		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	0 1	2.0.5	0 0 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,0	78.000.000,0	78.000.000,0	3,0	12.000.000,0	3,0	14.250.000,0	6,0	26.250.000,0	50,0	33,65	6,0	26.250.000,0	0,0	8,69		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	0 1	2.0.9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun	1,0	767.496.000,0	767.496.000,0	0,0	68.149.658,0	0,0	191.187.972,0	0,0	259.337.627,0	0,0	33,79	0,0	259.337.627,0	0,0	19,93		

KD	KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II											
										K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp		
1	2						3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/6 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,0	43.430.000,0	43.430.000,0	1,0	5.213.600,0	0,0	4.567.300,0	1,0	9.720.900,0	100,0	22,38	1,0	9.720.900,0	0,0	11,19		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14,0	708.026.000,0	708.026.000,0	4,0	62.936.055,0	6,0	186.680.672,0	10,0	249.616.727,0	71,43	35,26	10,0	249.616.727,0	0,0	17,13		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24,0	16.040.000,0	16.040.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	01	209	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II											
									K	Rp. (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2					3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+12		14 = 18/8*100%		15	16
	3	27	3.28.3.27.0.00.01.0000	01			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											80,0	44.43			80,0	26,28		
	3	27	3.28.3.27.0.00.01.0000	01			PREDIKAT KINERJA											SANGAT REND AH	SANGAT REND AH			SANGAT REND AH	SANGAT REND AH		
	3	27	3.28.3.27.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Miliyar	213,36	3.733.848.324,0	3.811.848.324,0	0,0	37.289.400,0	48,66	267.177.300,0	48,66	344.466.700,0	21,40	9,81	160.90	344.466.700.0	21,22	3.74	Dinas Pertanian dan Pertanian	
								Produktivitas Pertanian Per Hektar Pertanian	Ton/Hektar	7,10			0,0		6,80		6,80	98,77		13,30		94,44				
								Cakupan Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Benih/Bibit Ternak	Sampel	480,0			112,0		148,0		260,0	87,73		649,0		62,0				
								Cakupan Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Benih/Bibit Ternak	Mitra	380,0			93,0		78,0		166,0	47,43		788,0		41.80				
	3	27	3.28.3.27.0.00.01.0000	02	2.01		Pengawasan Pengadaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Petani dan Peternak	Kelompok	226,0	3.295.750.980,0	3.076.750.980,0	0,0	72.964.800,0	52,0	147.220.100,0	52,0	220.084.900,0	22,81	7.15	52,0	220.084.900,0	0,0	2,71		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	02	201	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	4,0	57.417.000,0	57.417.000,0	0.0	0,0	2.0	0,0	2,0	0.0	50,0		2,0	0,0	0,0				

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA BKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2023)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA BKPD YANG DI EVALUASI (2023) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II											
								K	Rp (FISIK)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp		
1	2					3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/9 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/9*100%		15	16
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	02	201	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	12,0	3.241.333.980,0	3.019.333.980,0	3,0	72.864.800,0	6,0	147.220.100,0	9.0	220.084.900.0	75,0	7.29	9,0	220.084.900,0	0,0	2.78		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	02	202		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penerima Manfaat pada Kelompok Peternak**	**Kelompok**	**9,0**	**418.701.144,0**	**418.701.144,0**	**0,0**	**14.424.600,0**	**0,0**	**107.983.200,0**	**0,0**	**122.407.800,0**	**0,0**	**29,45**	**0,0**	**122.407.800,0**	**0,0**	**10,54**		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	02	202	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1,0	418.701.144,0	418.701.144,0	0,0	14.424.600,0	0,0	107.983.200.0	0,0	122.407.800,0	0.0	29,45	0,0	122.407.800,0	0.0	10,56		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	02	203		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengawasan Sampel Pakan**	**Sampel**	**484,0**	**3.501.200,0**	**3.501.200,0**	**112,0**	**0,0**	**148,0**	**922.000,0**	**260,0**	**922.000,0**	**57,78**	**26.32**	**260.0**	**922.000,0**	**0,0**	**7,69**		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	02	203	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	4,0	3.501.200,0	3.501.200,0	1,0	0,0	1.0	922.000,0	2.0	922.000,0	50,0	26,33	2,0	922.000,0	0,0	7,69		

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN SKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II											
									K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp		
1	2						3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 11/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/6*100%		15	16
	3	27	3.28.3.27.0.00.01.0000	02	205		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Benih/Bibit Ternak yang Bersertifikat	Ekor	350,0	15.895.000,0	15.895.000,0	90,0	0,0	73,0	1.052.000,0	166,0	1.052.000,0	47.43	6,62	166,0	1.052.000,0	0,0	3,24		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	02	205	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan/Pakan	Laporan	4,0	15.895.000,0	15.895.000,0	1,0	0,0	1,0	1.052.000,0	2,0	1.052.000,0	50,0	6,62	2,0	1.052.000,0	0,0	3,24		
	3	27	3.28.3.27.0.00.01.0000	02			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												55,56	9,81			62,29	3,74		
	3	27	3.28.3.27.0.00.01.0000	02			PREDIKAT KINERJA												RENDAH	BANGAT RENDAH			RENDAH	BANGAT RENDAH		
	3	27	3.28.3.27.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Prasarana Pertanian yang disediakan	Prasarana	1,0	82.772.500,0	39.772.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		Dinas Perikanan dan Pertanian	
	3	27	3.28.3.27.0.00.01.0000	03	201		Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersedianya Dokumen LP2B	Dokumen	1,0	82.772.500,0	39.772.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2024) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II											
										K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp		
1	2						3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+12		14 = 15/6*100%		15	16
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	03	2 01	0 0 1 5	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen	1,0	82.772.800,0	35.772.800,0	0,0	0,0	0 0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0					
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	03			**RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)**												0,0	0,0			0,0	0,0		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	03			**PREDIKAT KINERJA**												BANGAT RENDAH	BANGAT RENDAH			BANGAT RENDAH	BANGAT RENDAH		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	04			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular**	%	100,0	1.960.233.360,0	1.738.333.360,0	95,60	194.162.000,0	87,60	188.177.000,0	144,20	382.279.000,0	144,20	21,99	144,20	382.279.000,0	144,20	4,29	Dinas Perikanan dan Pertanian	
								Cakupan Produksi Peternakan Dan Hasil Turunannya Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal (Asuh)	%	18,25			3,81		3,81		7,62	49,97		7,62		50,30			
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	04	3 01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembebasan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Hewan/Ternak Yang Sehat**	Ekor	1.200.000,0	176.043.024,0	71.043.024,0	218,0	26.496.800,0	595,0	7.636.000,0	513,0	34.132.800,0	67,75	48,04	513,0	34.132.800,0	0,0	4,75		

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN SKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II											
										K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp		
1	2						3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+12		14 = 13/6*100%		15	16
	s	2 7	3 25.3 27 0. 00 0 1.0000	0 4	2 0 1	0 0 0 8	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	12,0	176.643 .024,0	71.043 0 24,0	3,0	26 496 500,0	3 0	7 636.0 00,0	6,0	34 132.5 00,0	50,0	48,0 4	6,0	34 132.5 00,0	0,0	6,75		
	3	2 7	3.25 3.27 0.00 01.00 00	0 4	2. 0 3		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Ekor**	**13 480 ,0**	**393 473 .850,0**	**393.473 850,0**	**1.1 47 0**	**2.924.0 00.0**	**11 28) ,0**	**48 182. 000,0**	**12. 426 ,0**	**48.078 000.0**	**92,7 8**	**12,2 2**	**12.4 26,0**	**48.078 000 0**	**0 0**	**1.6 2**		
	3	2 7	3 25.3.27 0 00.0 1.0000	0 4	2 0 2	0 0 0 4	Pengawasan atau Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan /atau pengeluaran HPM	laporan	4,0	25.756.5 00,0	25 756.5 00,0	0,0	0,0	2 0	6 197 0 00,0	2,0	6 197.00 0,0	50,0	24,0 6	2,0	6 197 00 0,0	0,0	10,8 4		
	3	2 7	3 25.3.27 0 00.0 1.0000	0 4	2 0 2	0 0 0 5	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemasukan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemasukan HPM	Laporan	12,0	367 717 000,0	367 717 000 0	3,0	2 926 0 00,0	3,0	38 955 000,0	6,0	41 881 0 00,0	50,0	11,3 9	6,0	41 881 0 00,0	0,0	1 44		

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II											
									K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp		
1	2						3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+12		14 = 13/8*100%		15	16
	3	27	3.25.3.27 0.00.01.0000	04	203		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Produk Peternakan dan Hasil Turunannya yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Dokumen	1.400,0	902 638 312,0	558 639 312,0	261,0	143 15 6 700,0	399,0	83 390 400,0	660,0	227.697 100,0	44 43	26,84	660,0	227 697 100,0	0,0	13,84		
	3	27	3.25.3 27 0. 00.01 0000	04	203	0001	Penyelisan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	8,0	81 593 5 12,0	81 593 5 12,0	2,0	167 000 ,0	2,0	5 000 5 00,0	4 0	5 167 50 0,0	50,0	6 33	4 0	5 167 50 0,0	0,0	3 49		
	3	27	3 25.3 27 0 00.01 0000	04	203	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	16,0	821 044 800,0	774 044 800,0	4,0	143.029 700 0	4 0	78.869 900,0	8,0	221 919 600 0	50,0	28,67	4 0	221 919 600,0	0,0	14,87		
	3	27	3.25.3.27 0.00.01.00 00	04	204		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terwujudnya Produk Peternakan dan Hasil Turunannya Yang Aman, Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	Ton	5.100 0	488 178 .324 0	418.178 .324,0	1.522, 0	21 482. 800,0	1.524, 0	51 498 600 0	3.046, 0	72 981. 400,0	59,93	17,48	3.046,0	72.981 400,0	0,0	7,30		
	3	27	3.25 3 27 0. 00 01.0000	04	204	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	6,0	335 867 500,0	285.867 500,0	1,0	19 232 808,0	1 0	47.346 600,0	2,0	66.579 4 00,0	33,33	23,29	2,0	66.579 4 00,0	0,0	9,06		

NO	KODE					URAIAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN REALISASI YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II											
									K	Rp (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5	6			7		8		11 = 9+10		12 = 13/9 * 100%		13 = 7+13		14 = 15/9*100%		15	16
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	01	204	004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	12,0	132.311.024,0	132.311.024,0	3,0	2.260.000,0	3,0	4.152.000,0	6,0	6.402.000,0	50,0	4,84	6,0	6.402.000,0	0,0	2,42		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	04			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											97,0	28,9			97,28	6,24		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	04			PREDIKAT KINERJA											SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Benzena Pertanian yang dikendalikan	%	50	196.344.500,0	196.344.500,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	20,0		1,0	0,0	20,0		Dinas Pertanian dan Pertanian	
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Bencana Pertanian Akibat Dampak Perubahan Iklim	Hektar	100,0	196.344.500,0	196.344.500,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0		20,0	0,0	0,0			

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN n-1 (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II											
									K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+12		14 = 13/6*100%		15	16
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	01	201	0001	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	100,0	196.344.500,0	196.344.500,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0		20,0	0,0	0,0			
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	02			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											20,0	0,0			20,0	0,0			
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	03			PREDIKAT KINERJA											SANGAT KURANG	SANGAT KURANG			SANGAT KURANG	SANGAT KURANG			
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	05			PROGRAM PERLINDUNGAN USAHA PERTANIAN	Persentase Pertanian Usaha Pertanian Yang Dibina dan Diawasi	%	100,0	4.999.244,0	4.999.244,0	19,23	0,0	38,46	2.094.000,0	57,69	2.094.000,0	57,69	41,89	57,69	2.094.000,0	57,69	22,31	Dinas Perkebunan dan Pertanian	
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	05	201		Pemeliharaan Jalan Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Usaha Pertanian/Peternakan Yang Telah Dibina dan Diawasi	Unit Usaha	39,0	2.952.744,0	2.952.744,0	50	0,0	50	1.302.000,0	18,0	1.302.000,0	36,64	44,09	18,0	1.302.000,0	0,0	24,12		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	05	201	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	1,0	2.952.744,0	2.952.744,0	0,0	0,0	0,0	1.302.000,0	0,0	1.302.000,0	0,0	44,09	0,0	1.302.000,0	0,0	24,12		

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2024)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2024) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
												I		II											
									K	Rp. (REKA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp		
1	2					3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/9 * 100%		13 = 7+12		14 = 15/6*100%		15	16
	3	27	3.28.3.27.0.00.01.0000	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail Sub Distributor) Obat Hewan	Tercapainya Unit Usaha Obat Hewan Yang Diawasi	Unit Usaha	39	2.046.500,0	2.046.500,0	10,0	0,0	10	792.000,0	20,0	792.000,0	51,28	38,70	20,0	792.000,0	0,0	19,85		
	3	27	3.28.3.27.0.00.01.0000	06	2003	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Laporan	4,0	2.046.500,0	2.046.500,0	1,0	0,0	1.0	792.000,0	2,0	792.000,0	50,0	38.70	2,0	792.000,0	0,0	19,85		
	3	27	3.28.3.27.0.00.01.0000	06			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												87,64	41,69			87,64	22,31		
	3	27	3.28.3.27.0.00.01.0000	06			PREDIKAT KINERJA												RENDAH	SANGAT RENDAH			RENDAH	SANGAT RENDAH		
	3	27	3.28.3.27.0.00.01.0000	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Desa Kelompok Petani	%	100,0	172.797.960,0	461.407.960,0	28,0	1.491.000,0	28,0	38.133.000,0	80,0	39.624.000,0	280	8,59	80,0	39.624.000,0	80,0	5.35	Dinas Pertanian dan Perikanan	
	3	27	3.28.3.27.0.00.01.0000	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluhan Pertanian Yang dilaksanakan	Dokumen	12,0	172.797.960,0	461.407.960,0	3,0	1.491.000,0	0,0	38.133.000,0	3,0	39.624.000,0	25,0	8,59	3,0	39.624.000,0	0,0	5,35		

NO	KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2024)			REALISASI KINERJA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Triwulan ke-3)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1 (%)		PERAKOKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
													I		II											
									K	Rp (REKA)	Rp (BPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp		
1	2						3	4	5	6			7		8		11 = 9+10+11+12		12 = 13/8 * 100%		13 = 7+13		14 = 13/4*100%		15	16
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	07	201	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	2,0	137.969.360,0	451.469.360,0	0,0	1.491.000,0	0,0	38.133.000,0	0,0	39.624.000,0	0,0	6,78	0,0	39.624.000,0	0,0	6,38		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	07	201	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	2,0	34.738.600,0	9.938.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	07			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)												80,0	6,59			80,0	6,38		
	3	27	3.25.3.27.0.00.01.0000	07			PREDIKAT KINERJA												SANGAT REDAH	SANGAT REDAH			SANGAT REDAH	SANGAT REDAH		
							RATA RATA CAPAIAN KINERJA OPD (%)												38,46	36,39						
							PREDIKAT KINERJA OPD												SANGAT REDAH	SANGAT REDAH						

Berdasarkan tabel evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2025 diatas, dapat kita lihat pencapaian target Renja Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar yang didasarkan pada realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun 2025 dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan triwulan II tahun 2025 (Tahun Berjalan) yaitu :

a. Program Perikanan Tangkap

Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan , dengan total anggaran sebesar Rp. 3.326.175.880 Capaian kinerja sampai Triwulan II yaitu Jumlah Total produksi perikanan tangkap dari target 20713 ton tercapai sebanyak 7.494,2 ton atau sebesar 36,18%, cakupan bina kelompok nelayan dari target 153 kelompok pada triwulan kedua belum ada yang terealisasi terhadap kelompok karena kegiatan pembinaan kelompok belum dilaksanakan. Sedangkan untuk realisasi anggaran pada program ini sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 571.160.600 atau 17,18 % dari jumlah total anggaran. Rata–rata capaian kinerja sampai Triwulan II tahun 2025 yakni sebesar 18,09%.

Adapun faktor pendukung dari program ini yakni adanya Upaya Menyelesaikan kegiatan dan tersedianaya dana/anggaran serta terjalin kerjasama serta komunikasi antara stakeholder terjalin dengan baik. Faktor penghambat yakni Realisasi kinerja pada triwulan II sangat rendah karena kegiatan masih dalam proses pengadaan barang/jasa dan anggaran kas belum tersedia. ULP meninjau kembali proses pengkajian lelang rehabilitasi UPT Rajawali akibat perubahan durasi perencanaan dari enam bulan menjadi lima bulan, serta belum dianggarkannya biaya pendampingan dalam APBD, yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Tindak lanjutnya adalah berkoordinasi dengan stakeholder terkait penyelesaian kendala tersebut dan melakukan rasionalisasi anggaran dalam rangka memaksimalkan capaian kinerja.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini didukung oleh 3 (Tiga) Kegiatan dan 10 (Sepuluh) sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.269.831.800,-. Capaian kinerja sampai Triwulan II Jumlah Produksi Perikanan Budidaya sebesar atau 663,58 Ton atau 42,56% dari target 1559 Ton, dengan realisasi aggaran Rp. 269.913.100 atau 22,88 % dan jumlah total anggaran. Adapun rata-rata capaian kinerja yaitu sebesar 42,56% dengan kategori sangat rendah.

Adapun **faktor pendukung** dari program ini yakni SDM yang mendukung, sarana, prasarana serta keuangan yang memadai, serta komunikasi dengan penyuluh dan stakeholder lainnya terjalin dengan baik, adapun **faktor**

penghambatnya yaitu Adanya hambatan dari proses pengadaan barang/jasa (Penyesuaian dengan E-Katalog versi 6 - Inaproc) sedangkan untuk Belanja Barang diserahkan kepada masyarakat, terdapat Banyak calon penerima manfaat sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi lapangan (Kesesuaian lahan, kesanggupan calon penerima dan administrasi kelompok. Sedangkan **Tindak lanjutnya** adalah Melakukan koordinasi dalam percepatan pengadaan barang/jasa serta melakukan pendampingan maksimal dalam pembenahan administrasi kelompok, dan diharapkan bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat (sarana dan prasarana pembudidayaan ikan) segera direalisasikan secepatnya untuk meningkatkan nilai produksi perikanan budidaya.

c. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 63,290,500 dengan realisasi anggaran Triwulan II sebesar Rp. 14.889.850 dengan persentase sebesar 23,53%. Target kinerja Persentase Jumlah Kelompok unit usaha yang diawasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 52% dengan kategori rendah.

Adapun Faktor Pendukung dari Kegiatan ini Kinerja tim yang terjalin baik dan keterbukaan Kelompok Budidaya Perikanan dalam menerima dan memberikan data dan informasi, sedangkan Faktor Penghambatnya adalah Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan khususnya pembudidaya ikan. Tindak lanjutnya adalah Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait berkenaan dengan peningkatan sarana dan prasarana pengawasan.

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 1.006.121.000 Realisasi anggaran pada Triwulan II TA 2025 belum ada. Capaian kinerja sampai Triwulan II Tahun 2025 jumlah produksi pengolahan hasil perikanan dari target 27,9 ton telah terealisasi 15,53 ton atau sebesar sebesar 55,66%, Rata –rata Capaian kinerja sampai Triwulan II tahun 2025 yakni sebesar 55,66% dengan kategori rendah.

Adapun Faktor Pendukung dari Kegiatan ini adalah Adanya Upaya Menyelesaikan kegiatan dan tersedianaya dana/anggaran serta terjalin kerjasama serta komunikasi antara stakeholder terjalin dengan baik. Sedangkan faktor Penghambatnya adalah Realisasi kinerja pada triwulan II

masih sangat rendah Realisasi kinerja pada triwulan II masih sangat rendah karena kegiatan masih dalam proses pengadaan barang/jasa dan anggaran kas belum tersedia. Tindak lanjutnya adalah Berkoordinasi dengan stakeholder terkait penyelesaian kendala tersebut dan melakukan rasionalisasi anggaran dalam rangka memaksimalkan capaian kinerja.

e. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini didukung oleh 4 (empat).kegiatan dan 5 (lima) sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 3.511.848.324 Capaian kinerja sampai triwulan II Tahun 2025 yakni untuk Indikator kinerja produktivitas pertanian per hektar per tahun dengan target sebesar 7,1 ton/hektar, data sementara sebesar 6,8 Ton/Hektar. Pada indikator Cakupan Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Benih/Bibit Ternak telah terealisasi 260 sampel / 166 ekor atau sebesar 57,78% / 47,43% dari target 450 sampel / 350 ekor dengan realisasi anggaran Rp 344.466.700 atau sebesar 9,81 % dari jumlah total anggaran. Rata –rata Capaian kinerja sampai triwulan II tahun 2025 yakni sebesar 55,60% dengan kategori Rendah.

Adapun Faktor pendukung dari program ini yakni Adanya koordinasi lintas tim yang solid, komitmen dalam percepatan proses verifikasi dan validasi data dengan sistem yang lebih terstruktur, serta dukungan teknologi dan keterlibatan aktif dalam menindaklanjuti data calon penerima manfaat secara tepat sasaran. Sedangkan faktor Penghambatnya adalah Adanya penyesuaian dengan E-Catalog versi-6 Inaproc untuk proses pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan waktu tambahan, sedangkan untuk belanja barang diserahkan kepada masyarakat masih berlangsung proses verifikasi dan validasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Tindaklanjut yang dilakukan yaitu Percepatan finalisasi dokumen pengadaan melalui optimalisasi penggunaan E-Catalog versi-6 Inaproc, serta peningkatan koordinasi dengan masyarakat penerima manfaat untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi data. Selain itu, pendampingan teknis akan ditingkatkan guna memastikan kesesuaian kriteria sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tepat waktu.

f. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini didukung oleh 1 (satu).kegiatan dan 1 (satu) sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 35.772.800,- dan Realisasi anggaran pada Triwulan II TA 2025 belum ada. Capaian kinerja sampai Triwulan II masih 0%. Pada program ini telah dilakukan sosialisasi terkait rencana penetapan lahan yang termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan

menghadirkan penyuluh dan kelompok tani dan mengkomunikasikan hal-hal terkait tindak lanjuta Perda LP2B.

Adapun faktor pendukungnya Terbangunnya sinergi antar OPD yang mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan LP2B., sedangkan yang dapat menjadi faktor penghambat adalah Adanya tambahan waktu untuk koordinasi antar OPD terkait kegiatan LP2B, mengingat periode awal 2025 terjadi sejumlah transisi di Pemerintahan Kota. Tindaklanjutnya Berkoordinasi antar OPD terkait, untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan LP2B, serta memastikan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing OPD agar pelaksanaan program berjalan efektif dan terarah.

g. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 1.738.333.360. Capaian kinerja sampai Triwulan II untuk indikator kinerja Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular dari target 100% (0 kasus) terealisasi sebesar 144,2%, cakupan Produksi Peternakan dan Hasil Turunannya yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dari target 6.100 ton telah terrealisasi sebesar 3.046 ton atau sebesar 49,93%, realisasi anggaran sebesar Rp 382.279.000 atau 25,86% dari jumlah total anggaran. Rata –rata Capaian kinerja sampai Triwulan II tahun 2025 yakni sebesar 97,08% dengan kategori Sangat Tinggi.

Adapun faktor pendukung dari program ini yakni yakni (1) Jumlah obat hewan dan alat tersedia dalam jumlah memadai (2) Pengetahuan peternak dalam mengatasi kasus penyakit hewan sudah cukup baik (3) KIE yang cukup masif (4) adanya program Makan Bergizi Gratis menuntut para pelaku usaha untuk memiliki NKV dan Sertifikasi halal produk peternakan (5) bertambahnya daya saing produk peternakan membuat pelaku usaha menambah nilai jual produk. Adapun faktor pengambat (1) Munculnya kembali wabah penyakit PMK di Sulawesi Selatan (2) Pengawasan lalu lintas ternak yang lemah (3) Tidak ada / tidak lengkapnya dokumen Kesehatan Hewan untuk ternak masuk ke Kota Makassar (4) Kondisi perubahan cuaca yang cukup ekstrim (5) Coverage vaksinasi yang masih rendah (6) Pemeliharaan ternak yang masih semi intensif (7) Banyak peternak yang enggan divaksin ternaknya (8) Dana penanggulangan wabah PMK yang disediakan melalui APBN sangat kecil, sementara melalui APBD tidak ada sama sekali (9) sarana pendukung berupa mobil operasional tidak dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pengawasan produk peternakan di

pasar tradisional dan pasar modern (10) Sistem pengawasan perlunya didukung pihak Eksternal. Tindak lanjut (1) Memperketat pengawasan lalu lintas ternak (2) Menyediakan anggaran yang memadai di APBD untuk investigasi dan penanggulangan penyakit hewan (3) Meningkatkan coverage vaksinasi.

h. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 196.344.500,-. Capaian kinerja sampai Triwulan II untuk Indikator kinerja Persentase bencana pertanian yang dikendalikan dari target 5% yakni 100 hektar dari jumlah lahan pertanian adalah 1%, realisasi anggaran sebesar Rp 0,- dari jumlah total anggaran. Kegiatan ini disinkronisasi keadaan umum lapangan di lahan yang saat ini baru mulai awal musim tanam. Adapun rata-rata capaian kinerja yaitu sebesar 20% dengan kategori sangat rendah.

Adapun faktor Pendukung adalah Adanya Upaya Menyelesaikan kegiatan dan tersedianya dana/anggaran serta terjalin kerjasama serta komunikasi antara stakeholder terjalin dengan baik, sedangkan faktor penghambatnya Adanya perubahan rencana umum pengadaan (RUP) dalam Proses pengadaan barang/jasa. Tindaklanjutnya Berkoordinasi dengan stakeholder terkait penyelesaian kendala tersebut dan melakukan rasionalisasi anggaran dalam rangka memaksimalkan capaian kinerja.

i. Perizinan Usaha Pertanian Perikanan

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 4.999.244. Capaian kinerja sampai Triwulan II untuk Indikator kinerja Persentase Penzinan Usaha Pertanian yang dibina dan diawasi dari target 100% telah terealisasi sebesar 57,69% dengan realisasi anggaran Rp. 2.094.000 atau 41,89% dari jumlah total anggaran. Rata –rata Capaian kinerja sampai Triwulan II tahun 2025 yakni sebesar 57,69 % dengan kategori Rendah.

Adapun faktor Pendukung adalah (1) Sumber daya sudah memadai; (2) Adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mensyaratkan pelaku usaha harus memiliki legalitas usaha. Sedangkan faktor penghambatnya penghambatnya (1) Masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya pertimbangan teknis yang harus dimiliki pelaku usaha; (2) Masih kurangnya akses pelaku usaha ke media perizinan Aplikasi OSS. Tindaklanjutnya (1) Melakuakan Informasi. Komunikasi, Edukasi (IKE) yang masif kepada pelaku usaha.

j. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini didukung oleh 1 (satu).kegiatan dan 2 (Dua) sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 172.707.960. Capaian kinerja sampai Triwulan II untuk Indikator kinerja Cakupan Bina Kelompok Petani sebesar 50% dari target 100%, realisasi anggaran sebesar Rp. 39.624.000 atau sebesar 8,59% dari jumlah total anggaran, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 50% dengan kategori sangat rendah.

Adapun faktor pendukung SDM dalam hal ini penyuluh pertanian yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan yang bertugas sebagai penghubung antara SKPD dengan kelompok sedangkan faktor penghambatnya masih terbatasnya sarana dan prasarana penyuluh dalam hal melakukan kegiatan karena keterbatasan anggaran. Tindak lanjut yaitu melakukan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan dengan peningkatan sarana dan prasarana penyuluh agar dapat lebih maksimal sehingga dapat menerapkan segala kemampuan yang dimiliki ke masyarakat atau kelompok.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, dapat disimpulkan dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp.42,136,213,787 telah terealisasi sebesar Rp. 14,910,746,675,- atau 35,39% dengan kategori sangat rendah dan adapun rata-rata realisasi kinerja sebesar 38,48% dengan kategori sangat rendah.

K. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Total anggaran yang mendukung program ini adalah sebesar Rp.30.522.088.419 Capaian kinerja sampai Triwulan II untuk Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 45,00 %, persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah 50,00% dan persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas 45,00% dengan realisasi anggaran Rp. 13.286.319.425 atau 46.43% dari jumlah total anggaran. Rata –rata Capaian kinerja sampai Triwulan II tahun 2025 yakni sebesar 50% dengan kategori sangat rendah.

Adapun faktor Pendorong adalah Adanya Upaya Menyelesaikan kegiatan dan tersedianaya dana/anggaran serta terjalin kerjasama serta komunikasi antara stakeholder terjalin dengan baik. Faktor penghambat adalah Adanya perubahan rencana umum pengadaan (RUP) dalam Proses pengadaan barang/jasa, Adanya hambatan dari proses pengadaan barang/jasa (Penyesuaian dengan E-Katalog versi 6 - Inaproc). Tindak lanjut yang dilakukan yaitu Adanya perubahan rencana umum pengadaan (RUP) dalam

Proses pengadaan barang/jasa, Adanya hambatan dari proses pengadaan barang/jasa (Penyesuaian dengan E-Katalog versi 6 - Inaproc).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

a. Berbagai permasalahan yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang hendak dicapai;
c. Sasaran-sasaran dan prioritas yang akan diwujudkan;
d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Tahun 2025 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun berjalan (triwulan II) sebagai *entry point* dalam penyusunan perubahan renja tahun 2025;
b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya sesuai dengan kebutuhan;
c. Memperhatikan Program Prioritas dan strategis berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, Rencana Program Prioritas dan strategis berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029, Rancangan Akhir Renstra 2025-2029 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Tahun 2025
d. Memperhatikan Tupoksi tiap Bidang sehubungan dengan sturktur organisasi OPD.

Jika berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun IKK sesuai dengan peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kinerja pelayanan, dimana Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar tidak memiliki Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan hanya dapat menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKK), dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.2 (T-C. 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Tahun Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	20.727 Ton	19.518,94 Ton	19.909,32 Ton	20.307 Ton	20.772,5 Ton	20.603.9 Ton	20.713Ton	21.127Ton	
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.386,34 Ton	1.490,90 Ton	1.513,2 Ton	1,536 Ton	1.528,39 Ton	1.519.58Ton	1.559Ton	1.582,39Ton	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Tahun Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Luas Panen Hortikultura	6,7 Ton	6,8 Ton	6,9 Ton	7,0 Ton	6,5 Ton	6,5 Ton	7,1 Ton	7,2 Ton	
4.	Meningatnya Produksi dan Hasil Turunan Peternakan yang aman, sehat utuh dan halal		Jumlah Produk dan Hasil Turunan Peternakan yang Aman, Sehat,Utuh dan Halal	4.600 Ton	5.800 Ton	5.900 Ton	6 000 Ton	5.902 Ton	6.022,2 Ton	6.100 Ton	6.200 Ton	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Arah dan kebijakan pembangunan bidang perikanan, pertanian dan peternakan Kota merupakan bagian integral dari pembangunan daerah secara keseluruhan yang pada hakekatnya merupakan proses bersifat integratif baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dan terarah. Sektor perikanan, pertanian dan peternakan merupakan sektor yang strategis dalam mendukung perekonomian, karena memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan sumber protein, perolehan devisa, penyediaan bahan baku bagi industri serta penyediaan kesempatan kerja. Pengelolaan sektor perikanan, pertanian dan peternakan secara serius dapat diharapkan meningkatkan konstribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional secara umum dan khususnya pembangunan di Kota Makassar yang nantinya bertujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, petani dan peternak.

Namun demikian, masih adanya tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dalam hal pembangunan daerah yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan nasional, adapun beberapa tantangan yang dihadapi adalah :

1. Tingginya Alih Fungsi Lahan;
2. Masih Tingginya Ketimpangan Pendapatan Petani dan Nelayan;
3. Menurunnya Produktivitas Perikanan Tangkap;
4. Menurunnya Produktivitas Budidaya Perikanan Tambak;
5. Tingginya ketidakstabilan Harga Komoditas Pangan;
6. Status kewenangan dan Lokasi yang belum jelas diantaranya Status Lahan Balai Benih Ikan (BBI) Parangtambung, Status Kewenangan Pengelolaan TPI Paotere, Status Kewenangan Pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH);
7. Kasus penyakit hewan menular yang tidak kunjung selesai;

Sedangkan peluang yang dihadapi :

a. Dukungan pemerintah melalui regulasi dan anggaran terhadap berbagai program di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pertanian dan peternakan;
b. Potensi sumberdaya yang cukup besar Dimana Peluang usaha dibidang perikanan, pertanian dan peternakan semakin terbuka;

c. Dukungan pihak pemerintah terhadap perbaikan lingkungan semakin terarah;
d. Kelembagaan nelayan, pembudidaya semakin berkualitas dan berkembang;
e. Peningkatan kapasitas melalui inovasi teknologi dan sinkronisasi kebijakan.

Adanya beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar tentu saja akan memberikan dampak terhadap capaian program secara nasional. Hasil identifikasi Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar tentang tantangan dan peluang dapat mempengaruhi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan dan berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan.

Ada beberapa formulasi dari isu-isu penting yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dalam melaksanakan tupoksinya berupa beberapa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam rangka perumusan program dan kegiatan prioritas pada perubahan Renja Tahun 2025. Beberapa isu-isu penting tersebut adalah :

1. Pembinaan, Pengelolaan perikanan berkelanjutan dan berbasis kawasan;
2. Perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan;
3. Menggalakkan penerapan konsep urban farming pada 3 Demplot percontohan dan 17 kelompok Wanita tani yang berpotensi dijadikan Lokasi urban farming.
4. Peningkatan Kapasitas, Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Ekonomi Petani dan Nelayan;
5. Modernisasi perikanan dan pertanian berbasis teknologi dan inovasi;
6. Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kerja pegawai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Peran Dinas Perikanan dan Pertania Kota Makassar untuk mendukung ekonomi Kota Makassar dalam era globalisasi saat ini perlu ditunjang dengan kebijakan dalam program yang lebih terarah. Pembangunan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat dunia dan lebih tajam dalam mengelola sumber-sumber pendapatan baik yang berasal perikanan, pertanian dan

peternakan yang memiliki ruang lingkup yang besar, maka kegiatan pembangunan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia perlu ditingkatkan.

Rumusan pokok-pokok kebijakan Dinas Perikanan dan Pertanian kota Makassar yang dijadikan sebagai isu-isu penting sebagai acuan dalam menetapkan program pembangunan sesuai dengan kebijakan pemerintah kota berupa :

1. Aspek Fisik dan Lingkungan
   - Lingkungan Hidup
   - Pekerjaan umum
   - Penataan ruang
   - Perumahan
   - Perhubungan
   - Komunikasi dan Informasi
   - Pertanahan
2. Aspek Sosial Budaya
   - Kesehatan
   - Pendidikan
   - Sosial
   - Perlindungan anak dan perempuan
3. Aspek Ekonomi Keuangan
4. Aspek Pemerintah

Di antara keempat aspek tersebut maka Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar lebih berorientasi pada kebijakan aspek Fisik dan Lingkungan sehingga kebijakan yang diambil harus bersifat antisipatif dan responsif sesuai dengan perkembangan dan dinamika zaman. Demikian pula halnya dengan program yang akan dilaksanakan harus pragmatif dan responsive dengan perkembangan dan dinamika zaman bersifat antisipati di sektor perikanan, pertanian dan peternakan, terukur dan memberikan dampak baik serta berkesinambungan untuk menjawab tantangan pembangunan di Kota Makassar untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah. dimana di dalamnya dijabarkan perbandingan antara reviu rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan.

Tabel 2.4 (T-C. 31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Makassar

Rancangan Awal RKPD												HASIL ANALISA KEBUTUHAN												
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)		Catatan Penting			
1					2	3	4	5		6		7	8	9	10		11		12				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					33.363.781.119		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					33.634.154.119						
3	25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90	Persen	30.862.088.419		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90	Persen	31.210.979.419					
							Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100	Persen					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100	Persen						
3	25	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	166.480.780		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Persentase Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	138 480.780					
3	25	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	88.015.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	73 515 000					

Rancangan Awal RKPD											HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	25	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	6 963 200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	6 963 200	
3	25	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Dokumen	7 771 500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Dokumen	5 771 500	
3	25	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	Dokumen	4 303 500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	Dokumen	2 303.500	
3	25	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	Dokumen	4 523.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	Dokumen	2 523.500	

Rancangan Awal RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	25	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	3 112 000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1 612 000	
3	25	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	49 792 080	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	45.792 080	
3	**25**	**1**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**27 835.787.887**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**Tahun**	**27.835.787.887**	
3	25	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	184	Orang/Bulan	27 251 267 887	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	184	Orang/Bulan	27 251 267 887	
3	25	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	458.520.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	458 520 000	
3	25	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	126 000 000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	126 000 000	

Rancangan Awal RKPD									HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	**25**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**90**	**Persen**	**319.800.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**90**	**Persen**	**482.044.800**	
3	25	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	Paket	15 000 000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelangkapannya	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	261	Paket	177 544 800	
3	25	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	149	Orang	304 500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	149	Orang	304 500.000	
3	**25**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran**	**100**	**Persen**	**884.846.580**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran**	**100**	**Persen**	**802.246.580**	
3	25	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediaka	1	Paket	3.561 000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediaka	1	Paket	3.561 000	
3	25	1	2.05	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	191 987.180	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	191.987 180	

Rancangan Awal RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	25	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	23 796 400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	23.798.400	
3	25	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	141 700.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	141 700 000	
3	25	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	17 400 000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	17 400.000	
3	25	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	265.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	225 000 000	
3	25	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen	241 400.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen	196 800 000	
3	**25**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**0**	**Persen**	-	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**Persen**	**595.113.200**	

Rancangan Awal RKPD											HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	25	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36	Unit	595 113.200	
3	**25**	**1**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**587.975.172**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**587 975.172**	
3	25	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	198 492 000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	198 492 000	
3	25	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	311 483 172	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	311 483 172	
3	25	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	78 000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	78.000 000	
3	**25**	**1**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**90**	**Persen**	**767.498.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**90**	**Persen**	**769 331.000**	

Rancangan Awal RKPD									HASIL ANALISA KEBUTUHAN						Catatan Penting
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	25	1	20.29	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	43 430 000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	39 930 000	
3	25	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	Unit	708 028 000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	Unit	713 361 000	
3	25	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	Unit	16.040.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	Unit	16.040.000	
3	25	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit		
3	25	1	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit		

Rancangan Awal RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	26	3			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Cakupan Bina Kelompok Nelayan**	**18,9**	**Persen (%)**	**469 680.200**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Cakupan Bina Kelompok Nelayan**	**18,9**	**Persen (%)**	**413.680.200**	
							Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	**20,713**	**Ton**				**Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap**	**20,713**	**Ton**		
3	**25**	**3**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap**	**20,713**	**Ton**	**389.462.200**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap**	**20,713**	**Ton**	**333.462.200**	
3	25	3	201	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	12	Dokumen	284 129 200	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	12	Dokumen	252 129 200	
3	25	3	201	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia	202	Unit	105.333.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Tersedia	202	Unit	81 333.000	

Rancangan Awal RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	25	3	2,02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Nelayan Kecil	153	Kelompok	80.218.000	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Nelayan Kecil	153	Kelompok	80.218.000	
3	25	3	2,02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	160	Orang	80 218 000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	160	Orang	80 218 000	
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	1559	Ton	1.188.601.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	1559	Ton	1 010.063.000	
3	25	4	2,01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	1	Rekomendasi	1.252.000	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	1	Rekomendasi	1.252 000	

Rancangan Awal RKPD									HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	25	4	2,01	2	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	1	Rekomendasi	1 252 000	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	1	Rekomendasi	1 252 000	
3	**25**	**4**	**202**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Pembudidayaan Ikan Kecil Yang Dilaksanakan**	**80**	**Kelompok**	**374 564 500**	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Pembudidayaan Ikan Kecil Yang Dilaksanakan**	**80**	**Kelompok**	**163.964.500**	
3	25	4	202	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	80	Kelompok	44 786 000	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	80	Kelompok	26 386 000	

Rancangan Awal RKPD									HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	25	4	202	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	80	Kelompok	130 409.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	80	Kelompok	103 808.000	
3	25	4	202	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	80	Kelompok	199 370.500	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	80	Kelompok	33.770.500	
3	**25**	**4**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya**	**1559**	**Ton**	**812.784.500**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya**	**1589**	**Ton**	**844.366.500**	
3	25	4	204	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12	Dokumen	247 870.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12	Dokumen	207 870.000	
3	25	4	204	3	Penyediaan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14	Unit	406.887.500	Penyediaan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14	Unit	478 969.500	

Rancangan Awal RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	25	4	204	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1	Dokumen	5 825 000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1	Dokumen	5 825 000	
3	25	4	204	6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	1	Ha	25.999 500	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	1	Ha	25 999 500	
3	25	4	204	7	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	7	Orang	126 202 500	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	7	Orang	126 202 500	
3	**25**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Persentase Jumlah Kelompok unit usaha yang diawasi**	**100**	**Persen**	**83.290 500**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Persentase Jumlah Kelompok unit usaha yang diawasi**	**100**	**Persen**	**23.290.500**	

Rancangan Awal RKPD									HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	25	5	2,01		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan Dalam Kabupaten/Kota**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Jumlah Kelompok Unit Usaha Pembudidaya Ikan yang diawasi**	51	**Kelompok**	**63.290.500**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan Dalam Kabupaten/Kota**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Jumlah Kelompok Unit Usaha Pembudidaya Ikan yang diawasi**	51	**Kelompok**	**23.290.600**	
3	25	5	2,01	1	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupatenkota	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	51	Kelompok	63.290.500	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupatenkota	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	51	Kelompok	23 290 500	
3	25	6			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Produksi Pengolahan Hasil Perikanan**	**27,9**	**Ton**	**1.085.121.000**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Produksi Pengolahan Hasil Perikanan**	**27,9**	**Ton**	**976.121.000**	
3	25	6	2.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pengolah Hasil Perikanan**	51	**Kelompok**	**1.085.121.000**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pengolah Hasil Perikanan**	51	**Kelompok**	**976.121.000**	

Rancangan Awal RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	25	6	203	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	28	Ton	1 065 121 000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	28	Ton	976 121 000	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**					**4.997.366.588**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**					**6.721.749.996**	
3	27	2			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	**Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB**	213,36	Milyar	3.270.813.724	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	**Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB**	213,36	Milyar	8.014 497.132	
							Produktivitas Pertanian Per Hektar Pertahun	7,1	Ton Perhektar				**Produktivitas Pertanian Per Hektar Pertahun**	7,1	Ton Perhektar		
							Cakupan Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Benih/Bibit Ternak	450	Sampel (42%)				**Cakupan Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Benih/Bibit Ternak**	460	Sampel (42%)		
							Cakupan Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Benih/Bibit Ternak	360	Ekor (1.1%)				**Cakupan Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Benih/Bibit Ternak**	350	Ekor (1.1%)		

Rancangan Awal RKPD											HASIL ANALISA KEBUTUHAN							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	27	2	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Terlaksananya Pembinaan Kelompok Petani dan Peternak**	**225**	**Kelompok**	**2.835.716.330**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Terlaksananya Pembinaan Kelompok Petani dan Peternak**	**225**	**Kelompok**	**4.461 584.740**	
3	27	2	2,01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4	Laporan	57 417.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4	Laporan	13.417.000	
3	27	2	2,01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12	Laporan	2.778 299.380	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12	Laporan	4 448.167.740	
3	27	2	2,02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Terlaksananya Penerima Manfaat pada Kelompok Peternak**	**9**	**Kelompok**	**415.701.144**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Terlaksananya Penerima Manfaat pada Kelompok Peternak**	**9**	**Kelompok**	**545 516 192**	
3	27	2	2,02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	Dokumen	415.701 144	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	Dokumen	545 516 192	

Rancangan Awal RKPD									HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	27	2	2,03		**Peningkatan mutu dan perederan benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Terlaksananya Pengawasan dampel Pakan**	**450**	**Sampel**	**3.501.200**	**Peningkatan mutu dan perederan benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Terlaksananya Pengawasan Sampel Pakan**	**450**	**Sampel**	**3.501.200**	
3	27	02	203	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4	Laporan	3 501 200	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4	Laporan	3 501 200	
3	27	2	2,05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Perederan Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Tersedianya Benih/Bibit Ternak yang Berkualitas**	**350**	**Ekor**	**15.895.000**	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Perederan Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Tersedianya Benih/Bibit Ternak yang Berkualitas**	**350**	**Ekor**	**3.895.000**	
3	27	2	2,05	6	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	4	Laporan	15 895 000	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	4	Laporan	3 895 000	

Rancangan Awal RKPD									HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	27	3			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Cakupan Prasarana Pertanian yang disediakan**	**1**	**Prasarana UPT. Rumah Potong Hewan (RPH)**	**82.772.800**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Cakupan Prasarana Pertanian yang disediakan**	**1**	**Prasarana UPT. Rumah Potong Hewan (RPH)**	**31.772.800**	
3	27	3	2,01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Tersedianya Dokumen LP2B**	**1**	**Dokumen**	82 772 800	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Tersedianya Dokumen LP2B**	**1**	**Dokumen**	31 772 800	
3	27	3	2,01	15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan PertanianPangan Berkelanjutan/ KP2B dan LahanCadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1	Dokumen	82 772 800	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1	Dokumen	31 772 800	
3	27	4			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular**	**100**	**(0 Kasus)**	**1.269 728 360**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular**	**100**	**(0 Kasus)**	**1.040 728.360**	
							Cakupan Produksi Peternakan Dan Hasil Turunannya Yang Aman Sehat, Utuh Dan Halal (Asuh)	**15, 25**	**Persen(%)**				**Cakupan Produksi Peternakan Dan Hasil Turunannya Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal (Asuh)**	**15, 25**	**Persen(%)**		

Rancangan Awal RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	**27**	**4**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Pengendalian dan Pemberantasan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Tercapainya Hewan/Ternak Yang Sehat**	**1200**	**Ekor**	**176.043.024**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Pengendalian dan Pemberantasan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Tercapainya Hewan/Ternak Yang Sehat**	**1200**	**Ekor**	**56.043.024**	
3	27	4	201	1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12	Laporan	176.043.024	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12	Laporan	56 043.024	
3	**27**	**4**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**13,400**	**Ekor**	**393.473.500**	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**13,4**	**Ekor**	**366 473.500**	
3	27	4	202	4	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	4	Laporan	25 756 500	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	4	Laporan	13.756.500	

Rancangan Awal RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	27	4	202	6	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	12	Laporan	367.717.000	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	12	Laporan	352.717.000	
3	**27**	**4**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Tercapainya Produk Peternakan dan Hasil Turunannya yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)**	**1400**	**Sampel**	**212.033.312**	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Tercapainya Produk Peternakan dan Hasil Turunannya yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)**	**1400**	**Sampel**	**212.033.312**	
3	27	4	203	1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	8	Laporan	81.593.512	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	8	Laporan	81.593.512	
3	27	4	203	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	16	Laporan	130.439.800	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	16	Laporan	130.439.800	
3	**27**	**4**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Tersedianya Produk Peternakan dan Hasil Turunannya Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)**	**6100**	**Ton**	**488.178.524**	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Tersedianya Produk Peternakan dan Hasil Turunannya Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)**	**6100**	**Ton**	**406.178.524**	

Rancangan Awal RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	27	4	2 04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	6	Laporan	355 967 500	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	6	Laporan	285 867 500	
3	27	4	2.04	4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	12	Dokumen	132 311 024	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	12	Dokumen	120 311. 024	
3	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Persentase Bencana Pertanian yang dikendalikan**	**5**	**%**	**196.344. 500**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Persentase Bencana Pertanian yang dikendalikan**	**5**	**%**	**168 344 500**	
3	**27**	**5**	**2,01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Terlaksananya Pengendalian Bencana Pertanian Akibat Dampak Perubahan Iklim**	**100**	**HA**	**196.344 500**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Terlaksananya Pengendalian Bencana Pertanian Akibat Dampak Perubahan Iklim**	**100**	**HA**	**168.344. 500**	
3	27	5	2,01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100	HA	196.344 500	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100	HA	168 344 500	
3	**27**	**6**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Persentase Perizinan Usaha Pertanian Yang Dibina dan Diawasi**	**100**	**Persen**	**4.999 244**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Persentase Perizinan Usaha Pertanian Yang Dibina dan Diawasi**	**100**	**Persen**	**4 999.244**	

Rancangan Awal RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	27	6	2,01		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Terlaksananya Pengawasan Usaha Pertanian/Peternakan Yang Telah Dibina dan Diawasi**	**39**	**Unit Usaha**	**2.952.744**	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Terlaksananya Pengawasan Usaha Pertanian/Peternakan Yang Telah Dibina dan Diawasi**	**39**	**Unit Usaha**	**2.952.744**	
3	27	6	2,01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1	Dokumen	2 952 744	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1	Dokumen	2.952.744	
3	27	6	2.03		**Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Tercapainya Unit Usaha Obat Hewan Yang Diawasi**	**39**	**Unit Usaha**	**2.046 500**	**Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Tercapainya Unit Usaha Obat Hewan Yang Diawasi**	**39**	**Unit Usaha**	**2.046.500**	
3	27	6	2 0 3	2	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	4	Laporan	2 046 500	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	4	Laporan	2 046 500	
3	25	4			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (UPT BBI PARANGTAMBUNG)**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya**	**1559**	**Ton**	**291.830.800**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (UPT BBI PARANGTAMBUNG)**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya**	**1559**	**Ton**	**291.830.800**	
3	25	4	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Budidaya**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya**	**1559**	**Ton**	**291 830.800**	**Pengelolaan Pembudidayaan Budidaya**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya**	**1559**	**Ton**	**291.830.800**	

Rancangan Awal RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	25	4	204	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Unit	291 830 800	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Unit	291 830 800	
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (UPT PEMBIBITAN TANAMAN)**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB**	**213,36**	**Milyar**	**463.034.600**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (UPT PEMBIBITAN TANAMAN)**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB**	**213,36**	**Milyar**	**463.034.600**	
							Produktivitas Pertanian Per Hektar Pertahun	**7,1**	**Ton Perhektar**				**Produktivitas Pertanian Per Hektar Pertahun**	**7,1**	**Ton Perhektar**		
							Cakupan Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Benih/Bibit Ternak	**450**	**Sampel (42%)**				**Cakupan Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Benih/Bibit Ternak**	**450**	**Sampel (42%)**		
							Cakupan Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Benih/Bibit Ternak	**350**	**Ekor (1.1%)**				**Cakupan Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Benih/Bibit Ternak**	**350**	**Ekor (1.1%)**		
3	**27**	**2**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina**	**228**	**Kelompok**	**463.034.600**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina**	**228**	**Kelompok**	**463.034.600**	
3	27	2	202	1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12	Laporan	463 034 500	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12	Laporan	463 034 600	

Rancangan Awal RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (UPT PUSKESWAN)	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	100	(0 Kasus)	690.605.000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (UPT PUSKESWAN)	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	100	(0 Kasus)	643.605.000	
							Cakupan Produksi Peternakan Dan Hasil Turunannya Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal (Asuh)	15,25	Persen(%)				Cakupan Produksi Peternakan Dan Hasil Turunannya Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal (Asuh)	15,25	Persen(%)		
3	27	4	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah sampel yang diperiksa	2200	Ekor	690.605.000	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah sampel yang diperiksa	2200	Ekor	643.605.000	
3	27	4	203	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Laporan	690 605 000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Laporan	643 605. 000	
3	25	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP (UPT TPI PAOTERE)	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	18,9	Persen (%)	572 609. 480	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP (UPT TPI PAOTERE)	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	18,9	Persen (%)	572.609 480	
							Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	20,713	Ton				Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	20,713	Ton		

Rancangan Awal RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	25	3	2.03		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere**	**12**	**Bulan**	**572.609.480**	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere**	**12**	**Bulan**	**572.609.480**	
3	25	3	203	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	Layanan	572 609 480	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	Layanan	572 609 480	
3	**25**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP (UPT TPI RAJAWALI)**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Cakupan Bina Kelompok Nelayan**	**18,9**	**Persen (%)**	**2.297.886.200**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP (UPT TPI RAJAWALI)**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Cakupan Bina Kelompok Nelayan**	**18,9**	**Persen (%)**	**2.297.886.200**	
							Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	**20,713**	**Ton**				**Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap**	**20,713**	**Ton**		
3	25	3	2.03		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali**	**12**	**Bulan**	**2.297.886.200**	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rajawali**	**12**	**Bulan**	**2.297.886.200**	
3	25	3	203	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	Layanan	2.297 886 200	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	Layanan	2 297 886 200	

Rancangan Awal RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Cakupan Bina Kelompok Petani	100	Persen (%)	172.707.960	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Cakupan Bina Kelompok Petani	100	Persen (%)	461.407.960	
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Bina Kelompok Petani	100	Persen (%)	172.707.960	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Bina Kelompok Petani	100	Persen (%)	461.407.960	
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Unit	137 969 360	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Unit	451 469 360	
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Unit	34 738 600	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kelurahan/Kecamatan Kota Makassar	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Unit	9 939 600	
TOTAL										42.682.113.787						44.624.870.195	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan tupoksi Dinas Perikanan dan Pertanian kota Makassar tidak terlepas dari peran masyarakat dan unsur-unsur terkait lainnya dalam memperkaya program dan kegiatan yang akan dilakukan. Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD lain yang langsung ditujukan kepada Dinas Perikanan dan Pertanian maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD lain se-Kota Makassar dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota. Pada proses pelaksanaan musrenbang para pemangku kepentingan termasuk dinas terkait ikut terlibat langsung dalam proses musrenbang yang dilakukan di wilayah kerja masing-masing. Selanjutnya. hasil usulan musrenbang diinput ke dalam SIPD Kota Makassar kemudian hasil Musrenbang dipilah dan dipilih sesuai dengan keputusan hasil musrenbang kemudian dilakukan pemilahan berdasarkan dengan jenis kegiatan. Kegiatan tersebut disesuaikan dengan tupoksi dinas terkait. Untuk lebih jelasnya, semua usulan masyarakat hasil musrenbang yang ditujukan kepada Dinas Perikanan dan Pertanian disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2.5 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan (MUSREMBANG) Tahun 2025
Kota Makassar

SKPD : Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar

No	Program / Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator Kinerja	Sasaran / Volume	Catatan	
					Usulan	Rekomendasi Mitra Bappeda
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap/ Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota/ Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota	Jl. Barukang II No.33 Makassar, Kota Makassar	Terwujudnya lorong wisata dalam rangka mendukung peningkatan lorong garden dan pembentukan 5000 lorong wisata	4 Kegiatan	BAHRUL TOMPO (KELURAHAN PATTINGALLOANG)	diakomodir
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap/ Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jl. Barukang II No.33 Makassar, Kota Makassar	Jumlah Nelayan yang mengikuti skill training	2 Kegiatan	BAHRUL TOMPO (KELURAHAN PATTINGALLOANG)	diakomodir

No	Program / Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator Kinerja	Sasaran / Volume	Catatan	
					Usulan	Rekomendasi Mitra Bappeda
	/Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil					
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap/ Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota/ Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota	Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang	Terwujudnya lorong wisata dalam rangka mendukung peningkatan lorong garden dan pembentukan 5000 lorong wisata	2 Kegiatan	Zainuddin,SE (KELURAHAN PISANG UTARA)	diakomodir
4.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap/ Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota/Peningkatan	JL.Buakana komp.pertamina blok c5, Kota Makassar	Terwujudnya lorong wisata dalam rangka mendukung peningkatan lorong garden dan pembentukan 5000 lorong wisata	2 Kegiatan	ST. RAHMIATY ALWI, SH (KELURAHAN BUAKANA)	diakomodir

No	Program / Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator Kinerja	Sasaran / Volume	Catatan	
					Usulan	Rekomendasi Mitra Bappeda
	Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota					
5.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya /Pengelolaan Pembudidayaan Ikan /Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pulau Barrang Lompo RT 04 RW 02, Kota Makassar , Kota Makassar, Kepulauan Sangkarrang, Barrang Lompo, Kota Makassar	Jumlah sarana pembudidayaan ikan salam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1 Kegiatan	Kurniati, SP (KELURAHAN BARRANG LOMPO)	dinkomodr

Usulan Pokok-pokok pikiran Tahun 2025 Kota Makassar

SKPD : Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar

No	Program / Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator Kinerja	Sasaran / Volume	Catatan	
					Usulan	Rekomendasi Mitra Bappeda
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian/ Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jl. Abd. Kadir Komp. Hartaco Indah Blok I Pondok Anantkupa RT 5 RW 7 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate, Kota Makassar	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Kegiatan	Ir. HJ. NURUL HIDAYAT	diakomodir
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap/ Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota/ Pengembanagan Kapasitas Nelayan Kecil	Pulau Kodingareng (Kediaman Pak Rijal) RT.003 RW.004 Kel. Kodingareng Kec. Sangkarrang, Kota Makassar	Jumlah Nelayan yang mengikuti skill training	1 Kegiatan	H. RAY SURYADI ARSYAD, SIP	diakomodir

No	Program / Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator Kinerja	Sasaran / Volume	Catatan	
					Usulan	Rekomendasi Mitra Bappeda
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap/ Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota/ Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Pulau Kodingareng (Kediaman Pak Parawansa) RT.002 RW.003 Kel. Kodingareng Kec. Sangkarrang, Kota Makassar	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	5 Kelompok	H. RAY SURYADI ARSYAD, SIP	diakomodir

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Adapun rumusan yang mendasari perubahan Rencana Kerja antara lain:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap capaian program dan kegiatan;
2. Penyesuaian Rencana program prioritas dan program strategis kepala daerah terpilih;
3. Kebutuhan untuk memperbaiki dan menyempurnakan uraian rincian belanja agar lebih efisien dan tepat sasaran;
4. Terbitnya Surat Edaran Walikota Makassar Nomor 903/71/S.Edar/BPKAD/III/2025 tentang efisiensi anggaran;
5. Penyesuaian dengan penambahan anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pertanian Tahun 2025 yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas konsumsi pangan serta efektifitas operasional penyuluh.

Dari kendala yang dihadapi tersebut di atas mengakibatkaan perlu adanya formulasi kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran berupa:

1. Melakukan penyesuaian terhadap target capaian program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan II;
2. Melakukan penyesuaian anggaran terhadap Rencana program strategis dan program prioritas Pemerintah Daerah Kota Makassar agar selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih;
3. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyempurnaan uraian rincian belanja;
4. Melakukan koordinasi dengan Bidang Anggaran BPKAD Kota Makassar untuk penyesuaian kebijakan efisiensi anggaran;
5. Melakukan koordinasi dengan Bidang Anggaran BPKAD Kota Makassar terkait penyesuaian anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Pertanian Tahun 2025.

3.2 Rekapitulasi program dan kegiatan

Dalam rangka penyesuaian terhadap dinamika pembangunan daerah, evaluasi capaian Triwulan II, serta adanya kebijakan strategis Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar telah melakukan revisi terhadap rencana program dan kegiatan melalui penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025.

Revisi program dan kegiatan dilakukan untuk memastikan bahwa arah pembangunan sektor pertanian, perikanan, dan Peternakan tetap adaptif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat. Selain itu, rekapitulasi ini juga memperhitungkan hasil penajaman prioritas pembangunan daerah, pergeseran anggaran, serta penyesuaian terhadap kapasitas riil pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Adapun rincian program dan kegiatan perubahan Rencana Kerja (RENJA) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.2 (T-C.33)
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3																						
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah			Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar	100	100					30.562.088.419	31 210.98 0.224	APBD		100	Persen	32 671.433.483
						Persentase aset dan penunjang operasional dalam kondisi baik				90	90									90	Persen	
						Persentase ASN perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas				100	100									100	Persen	
2	28	001	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar					100	100	166 480 780	138.480.780	APBD		100	Persen	437 486 170

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Contoh Pentingnya	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Teknik Ukur	Target	
3	25	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			3	3			88 015 000	73.515.000	APBD		3	Dokumen	134 090 094
3	25	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			1	1			8 963 200	6.963 200	APBD		1	Dokumen	14 431 454
3	25	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			1	1			7 771 500	5.771 500	APBD		1	Dokumen	14.003 624
3	25	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			1	1			4 903 500	2 303.500	APBD		1	Dokumen	8 837 193
3	25	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			1	1			4 523.500	2.523 500	APBD		1	Dokumen	8 436 349

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	25	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kelurahan/ kecamatan Kota Makassar			1	1			3.112.000	1.612.000	APBD		1	Laporan	12.766.510
3	25	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			4	4			49.792.080	45.792.080	APBD		4	Laporan	244.857.946
2	**25**	**00 1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar**					**210**	**210**	**27.835.787.837**	**27.835.787.692**	**APBD**		**1**	**Tahun**	**28.410.941.041**
3	25	1	2.02	1	Penyaluran Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			184	184			27.251.267.837	27.251.268.692	APBD		184	Orang/Bulan	27.881.080.458
3	25	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			1	1			458.520.000	458.520.000	APBD		1	Dokumen	446.381.454

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Telek Ukur	Target	
3	25	1	203	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			12	12			126 000 000	126 000 000	APBD		12	Dokumen	83 479 129
3	**25**	**001**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Jumlah Administrasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar**					**12**	**12**	**319 600.000**	**482.044.800**	**APBD**		**1**	**Tahun**	**395 982.600**
3	25	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			275	361			15.000 000	177 544.800	APBD		250	Paket	162 500 000
3	25	1	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			16	158			304 500.000	304.500 000	APBD		16	Orang	233 482 500
3	**25**	**1**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Jumlah Pengelolaan Administrasi Umum Perlengkapan**	**Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar**					**12**	**12**	**884.846.850**	**902.246.850**	**APBD**		**1**	**Tahun**	**924.223.284**
3	25	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			6	6			3 561.000	3.561 000	APBD		6	Paket	5.822 862

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rincian Tahun 2026								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Teknik Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3	25	1	20 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			6	6			191 987 180	191 987 180	APBD		12	Paket	139 145 291
3	25	1	20 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			2	2			23 798 400	23 798 400	APBD		12	Paket	31 131.000
3	25	1	20 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			1	1			141 700 000	141 700 000	APBD		12	Paket	127.549 850
3	25	1	20 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			12	12			17 400.000	17.400 000	APBD		12	Dokumen	14 494 301
3	25	1	20 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			12	12			265 000 000	225 000 000	APBD		12	Laporan	415 080 000
3	25	1	20 6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			12	12			241 400 000	198.800 000	APBD		12	Dokumen	191 000 000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	25	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar					100	100	-00	895 113.200	APBD		100	Persen	850.757.688
3	25	1	207	6	Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Perabotan dan Mesin Lainnya yang Diadakan		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			16	36			-00	595 113 200	APBD		16	Unit	850 757 688
3	25	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar					12	12	587.975.172	587 975.172	APBD		12	Bulan	822.223 440
3	25	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			12	12			198 492 000	198 492 000	APBD		12	Laporan	230 828 123
3	25	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			12	12			311 483 172	311 483 172	APBD		12	Laporan	465 468 829

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3	25	1	2.09	4	Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dimutakhirkan		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			12	12			78.000.000	78.000.000	APBD		12	Laporan	126.926.489
3	26	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar**					**12**	**12**	**767.495.880**	**769.231.000**	**APBD**		**12**	**Bulan**	**329.980.240**
3	26	1	20, 29	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			1	1			43.430.000	39.930.000	APBD		1	Unit	27.568.625
3	26	1	20 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			34	14			706.026.000	713.461.000	APBD		34	Unit	451.735.559
3	25	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			24	24			16.040.000	16.040.000	APBD		16	Unit	17.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran dan Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran dan Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	25	1	2.09	9	Penatalaksanaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Daerah akibatnya		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			1	1			-00	-00	APBD		1	Unit	125 000 000
3	25	1	2.09	10	Penatalaksanaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Daerah akibatnya		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			1	1			-00	-00	APBD		1	Unit	8 076.160
3	**26**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Cakupan Rina Kelompok Nelayan**			**Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar**	**183**	**183**					**469.680.280**	**413.680.200**	**APBD**		**20,4**	**Persen (%)**	**420.234.000**
						Produksi Perikanan Tangkap				**20,713**	**20,713**									**2112 7**	**Ton**	
3	**26**	**3**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**			**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar**					**20,713**	**20,713**	**389 462.280**	**333.462.000**	**APBD**		**2112 7**	**Ton**	**298.234.000**
3	25	3	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			5	12			284 129 200	252 129 200	APBD		1	Dokumen	195 234 000
3	25	3	2.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			3	202			105.333 000	81.333.000	APBD		1	Unit	100 000 000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
3	25	3	2,01	4	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Yang Terjaman dan Tersedia		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			3	3			-00	-00			Unit	
3	26	3	2,02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Nelayan yang mengikuti skill training	Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar					25	25	80.218.000	80.218.000	APBD		25	Orang	120.000.000
3	25	3	2,02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			185	160			80 218.000	80 218 000	APBD		25	Orang	125 000 000
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya			Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar	1559	1559					1.188.601.000	1 010.083.000	APBD		1582,39	Ton	689 438.500
3	26	4	2,01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar					1	1	1.262.000	1.262.000	APBD		1	Dokumen	6.960.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kelompok Sasaran/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
3	25	4	2.01	2	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana Semi Intensif dan Intensif serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana Semi Intensif dan Intensif serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			1	1			1.252.000	1.252.000	APBD		1	Rekomendasi	6.950.000
3	25	4	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			Pembudidayaan Ikan Kecil Yang Dikembangkan	Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar					80	80	374.864.800	163.964.800	APBD		90	Kelompok	133 142.000
3	25	4	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			80	80			44 786 000	26 386.000	APBD		90	Kelompok	61.878.000
3	25	4	2.02	2	Pelaksanaan Pelatihan Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan kecil yang Mengikuti Pembentukan dan		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			80	80			130 408 000	103 808 000	APBD		90	Kelompok	21 122 000

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rincian Tahun 2026									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran dan Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Pengembangan Kelembagaan														
3	25	4	20 3	4	Pemberian Pendampingan Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			80	80			199 370 500	33 770 500	APBD		90	Kelompok	30 132 000
3	**25**	**4**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**			**Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya**	**Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar**					**1659**	**1659**	**812.784.000**	**844 986.500**	**APBD**		**1652,39**	**Ton**	**849.846.500**
3	25	4	20 4	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kelurahan/ Kecamatan kota Makassar			5	5			247 870 000	207.870 000	APBD		1	Dokumen	117 789 000
3	25	4	20 4	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terus Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			1	1			5 825 000	5 825 000	APBD		4	Dokumen	58 185.000
3	25	4	20 4	9	Penyediaan ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kelurahan/ Kecamatan Kota			3	21			406 867 500	476 969 500	APBD		9	Unit	317 992 500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026									Capaian Penting	Perubahan Meja Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					(Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Makassar													
3	25	4	2.04	11	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			8	6			126 202 500	126 202.500	APBD		40	Orang	23 380 000
3	25	4	2.04	12	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Usaha Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			1	1			25 999 500	25 999 500	APBD		40	Ha	32 000.000
3	**25**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Persentase Jumlah Kelompok unit usaha yang diawasi**			**Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar**	**100**	**100**					**63.290.000**	**23.290.000**	**APBD**		**100**	**Persen (%)**	**99 719.200**
3	25	5	2,01		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan Dalam Kabupaten/Kota**			**Jumlah Kelompok Unit Usaha Pembudidaya Ikan yang diawasi**	**Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar**					**51**	**51**	**63.290.500**	**23.290.500**	**APBD**		**53**	**Kelompok**	**99.719.200**
3	25	5	2,01	4	Pengawasan usaha pembudidayaan dan sanksi kewenangan kabupaten/kota		Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			53	51			63 290 500	23 290 500	APBD		53	Pelaku Usaha	99 719 200

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Kelompok Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	26	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan			Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar	27,9	27,9					1 085 121 000	976 121.000	APBD		28 35	Ton	62.657.500
2	26	6	2.03		Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hasil Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			Jumlah Kelompok Pengolahan yang dibina	Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar					51	51	1.085.121 000	976 121.000	APBD		51	Kelompok	62.657.500
3	25	6	203	1	Penyediaan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 [Satu] Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			27 9	27,9			1 085.121 000	976 121 000	APBD		28 35	Ton	62 657 500
2	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB			Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar	213,36	213,36					8.270.813.724	8.014.497.132	APBD		215,2	Milyar	1.849 169 000
						Produktivitas Pertanian Per Hektar Pertahun				7,1	7,1									7,2	Ton Perhektar	
						Cakupan Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Benih/Bibit Ternak				480	480									500	Sampel (42%)	
										380	380									400	Ekor (1 1%)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Kelurahan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
3	27	2	2,01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina	Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar					228	228	2.836.716.380	4.441.584.740	APBD		228	Kelompok	1.144.367.870
3	27	2	2,01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			4	4			57.417.000	13.417.000	APBD		16	Laporan	44.267.875
3	27	2	2,01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			10	10			2.779.299.380	4.448.167.740	APBD		12	Laporan	1.100.000.000
3	27	2	2,02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Kelompok Ternak Yang Dibina	Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar					8	8	418.701.144	545.516.192	APBD		8	Kelompok	280.139.875
3	27	2	2,02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			1	1			415.701.144	545.516.192	APBD		1	Dokumen	280.139.875

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
3	27	2	2,03		Peningkatan mutu dan pengedaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota			Jumlah Sampel dan Pakan Yang Diawasi	Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar					480	480	3.501.200	3.501.200	APBD		600	Sampel	20.575.750
3	27	2	2,03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			4	4			3.501.200	3.501.200	APBD		4	Laporan	20.575.750
3	27	2	2,03		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Bibit Ternak Yang Diawasi	Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar					380	380	15.896.000	3.899.000	APBD		400	Ekor	24.175.500
3	27	2	2,05	6	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan/Pakan		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			4	4			15.895.000	3.895.000	APBD		4	Laporan	24.175.500
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Prasarana Pertanian yang disediakan			Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar	1	1					52.772.800	31.772.800	APBD		1	Prasarana UPT Rumah Potong Hewan (RPH)	80.120.800
3	27	3	2,01		Pengembangan Prasarana Pertanian			Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	Kelurahan/ Kecamatan Kota					1	1	52.772.800	31.772.800	APBD		1	Unit	80.120.800

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
									Makassar													
3	27	3	2,01	15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/Kota		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			1	1			82 772 800	31 772 800	APBD		1	Dokumen	80 120 000
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAHAT VETERINER	Persentase Peningkatan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular			Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar	100	100					1.269 728. 360	1.040 726 360	APBD		100	(0 Kasus)	1.197.123 745
						Cakupan Produksi Peternakan Dan Hasil Turunannya Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal (Asuh)				10,25	10,25									10,15	Persen(%)	
						Cakupan Produk Peternakan dan Hasil Turunannya Yang				6100	6100											

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Kelaurun Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Teknis Ukur	Target	
						Aman, Sehat, Utuh Dan Halal (Aswh)																
3	27	4	20 1		Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembebasan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Hewan/Ternak yang Tertangani Kesehatannya	Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar					1260	1260	176.043.024	66.043.024	APBD		1260	Ekor	63.009.000
3	27	4	2.01	8	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami pemutusan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			12	12			176 043 024	56 043.024	APBD		12	Laporan	63 009.000
3	27	4	3.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Hewan/ternak yang diperiksa	Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar					1240 0	1240 0	393.473.880	346.473.000	APBD		1260 0	Ekor	378.970.395
3	27	4	3.02	4	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)		Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			8	4			25 756 500	13 756 500	APBD		6	Laporan	27.624 000

Kode					Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3	27	4	20 2	6	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM		Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			12	12			367 717 000	352 717 000	APBD		12	Laporan	348 346.398
3	**27**	**4**	**2.02**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**Jumlah sampel yang diperiksa**	**Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar**					**1400**	**1400**	**212.023.212**	**212.023.212**	**APBD**		**1680**	**Sampel**	**530.394.698**
3	27	4	203	1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			8	8			81.593.512	81 593 512	APBD		12	Laporan	72 044.875
3	27	4	203	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			4	4			130 439 80 0	130 439 80 0	APBD		12	Laporan	456 349 723
3	**27**	**4**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**			**Jumlah Produk Peternakan dan Turunannya yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)**	**Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar**					**6180**	**6180**	**488.178.824**	**406.178.824**	**APBD**		**6200**	**Ton**	**227 749 760**
3	27	4	204	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		Kelurahan/ Kecamatan Kota			6	6			365 867 500	285 867 500	APBD		12	Laporan	107 766 450

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kelompok Data/
										Program		Kegiatan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
									Makassar													
3	27	4	20 4	4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			12	12			132.311.024	120.311.024	APBD		1	Dokumen	119.983.300
3	27	5			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Bencana Pertanian yang dikendalikan**			**Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar**	8	8					**196.344.500**	**168.344.500**	**APBD**		8	%	**119.983.300**
3	27	5	2,01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**			**Jumlah Benih/Bibit Untuk Antisipasi Dampak Perubahan Iklim/Banjir**	**Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar**					100	100	**196.344.500**	**168.344.500**	**APBD**		100	**HA**	**10.000.000**
3	27	5	2,01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			100	100			196.344.500	168.344.500	APBD		100	HA	10.000.000
3	27	6			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase Perizinan Usaha Pertanian Yang Diisu Dan Diawasi**			**Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar**	100	100					**4.999.244**	**4.999.244**	**APBD**		100	**Persen (%)**	**10.126.000**

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
3	27	6	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Unit Usaha Obat Hewan Yang Dibina	Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar					39	39	2.952.744	2.952.744	APBD		60	Unit Usaha	6.842.000
3	27	6	2.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			1	1			2.952.744	2.952.744	APBD		1	Dokumen	6.842.000
3	27	4	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan			Jumlah Unit Usaha Obat Hewan yang diawasi	Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar					39	39	2.046.500	2.046.500	APBD		41	Unit Usaha	3.284.000
3	27	6	2.03	2	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan		Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			4	4			2.046.500	2.046.500	APBD		4	Laporan	3.284.000
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (UPT BBI PARANG TAMBUNG)	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya			Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar	1659	1659					291.830.800	291.830.800	APBD		1552,39	Ton	38.325.000
3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Budidaya			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar					1659	100	291.830.800	291.830.800	APBD		1552,39	Ton	38.325.000
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kelurahan/ Kecamatan Kota			1	1			291.830.800	291.830.800	APBD		1	Unit	38.325.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026									Prakiraan Maju Rancana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
									Makassar													
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (UPT PEMBIBITAN TANAMAN)	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB			Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar	213,26	213,30					463 034.600	463.034.600	APBD		216,2	Miyar	212.683.600
						Produktivitas Pertanian Per Hektar Pertahun				7,1	7,1									7,2	Ton Perhektar	
						Cakupan Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Benih/Bibit Ternak				450	450											
										350	350											
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina	Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar					226	226	463.034.600	463 034.600	APBD		226	Kelompok	212.683.600
3	27	2	201	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			12	12			463.034 600	463 034.600	APBD		12	Laporan	212 683 600
2	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus			Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar	100	100					640 606 000	643.606.000	APBD		0	(0 Kasus)	213 106.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					(UPT PUSKESWAN)	Penyakit Hewan Menular																
						Cakupan Produksi Peternakan Dan Hasil Turunannya Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal (Asuh)				18,25	18,28									18,18	Persen(%)	
						Cakupan Produk Peternakan dan Hasil Turunannya Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal (Asuh)				6100	6180											
2	27	4	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah sampel yang diperiksa	Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar					1400	1400	690 608.000	642.606.000	APBD		1400	Sampel	212.106.000
3	27	4	2.03	2	Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			12	12			690 605.000	643.605 000	APBD		12	Laporan	213 106 000
2	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN	Cakupan Binaan Kelompok Nelayan			Kelurahan/ Kecamatan	153	153					572.609.430	572.609.430	APBD		20,4	Persen (%)	681.800.230

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Kelurahan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Kelurahan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Teknis Ukur	Target	
					TANGKAP (UPT TPI PAOTERE)	Produksi Perikanan Tangkap			Kota Makassar	20,713	20,713									21127	Ton	
3	25	4	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar					12	12	872.609.480	872.609.480	APBD		12	Bulan	681.800.280
3	25	3	2.03	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			1	1			572.609.480	572.609.480	APBD		1	Layanan	551.800.280
3	26	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP (UPT TPI RAJAWALI)	Cakupan Bina Kelompok Nelayan			Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar	153	153					2.297.886.200	2.297.886.200	APBD		30,4	Persen (%)	277.677.000
						Produksi Perikanan Tangkap				20,713	20,713									21127	Ton	
3	26	3	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar					12	12	2.297.886.200	2.297.886.200	APBD		12	Bulan	277.677.000
3	25	3	2.03	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			1	1			2.297.886.200	2.297.886.200	APBD		1	Layanan	277.677.000
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Kelompok Tani Yang Mendapatkan			Kelurahan/ Kecamatan Kota	100	100					172.707.960	461.407.960	APBD		100	Persen (%)	172.708.260

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rincian Tahun 2026									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Kelurahan Sub Kegiatan		Final Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Teknis Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Pendampingan Penyuluh			Makassar													
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			Jumlah Penyuluhan Pertanian Yang Dilaksanakan	Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar					12	12	172.707.960	461.407.960	APBD		100	Persen	172.788.260
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			2	2			137.969.360	451.469.360	APBD		2	Unit	137.969.360
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Kelurahan/ Kecamatan Kota Makassar			2	2			34.738.600	9.938.600	APBD		2	Unit	34.738.700

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 2025 Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan pengelolaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Penyusunan Perubahan Rencana kerja ini disusun dengan tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar dan kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang telah dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD).

Program-program dan kegiatan-kegiatan indikatif yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 akan dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar. Oleh karena itu komitmen pimpinan dan segenap staf Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar harus didukung oleh segenap aparatur daerah dan legislatif serta dukungan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan di dalam mengimplementasikan perubahan rencana kerja ini.

4.1 Catatan Penting

Dalam Anggaran Perubahan Tahun 2025, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar melakukan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program-program prioritas yang bersifat strategis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kelembagaan.

Salah satu program yang mengalami penambahan alokasi anggaran adalah pengembangan Urban Farming, yang dipandang sebagai upaya strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan lokal, pemberdayaan masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan di wilayah perkotaan. Urban Farming dinilai mampu memberikan dampak langsung terhadap ketersediaan pangan keluarga, pengendalian inflasi daerah, dan keterlibatan aktif warga dalam memanfaatkan lahan sempit secara produktif. Selain itu, program ini selaras dengan misi Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan, hijau, dan mandiri pangan.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas kerja aparatur, dialokasikan pula anggaran belanja modal untuk pengadaan peralatan dan mesin kantor. Hal ini didasarkan pada kondisi aktual, di mana sebagian besar peralatan kantor yang digunakan saat ini telah mengalami kerusakan, penurunan fungsi, atau tidak lagi

layak pakai. Situasi tersebut berdampak pada turunnya produktivitas, keterlambatan proses administrasi, serta menurunnya efisiensi kerja pegawai secara keseluruhan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana kerja ini disesuaikan dengan pendanaan sehingga ada skala prioritas dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan rencana kerja ini harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku sehingga arah dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini dapat lebih terarah dan teratur. Kesinambungan kegiatan sangat dibutuhkan agar dapat tersajikan data yang terukur.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang dilakukan yakni menyelesaikan segala kendala yang berkenaan dengan pencapaian Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dengan memperhatikan sasaran program prioritas berdasarkan tugas dan fungsi serta berkoordinasi dengan stakeholder terkait dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, dan Renstra 2021-2026 Dinas Perikanan dan Pertanian.

Program-program dan kegiatan-kegiatan indikatif yang tercantum dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 berdasarkan urusan perikanan dan pertanian akan dibiayai dengan sumber dana Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Rencana kerja ini disesuaikan dengan pendanaan sehingga ada skala prioritas dalam pelaksanaannya.

Kegiatan yang ditindaklanjuti ini pula jelas harus berpedoman pada pemenuhan kebutuhan didasarkan adanya usulan dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan Kota Makassar khususnya urusan Perikanan dan Pertanian.

Makassar, 12 Agustus 2025

KEPALA DINAS
PERIKANAN DAN PERTANIAN
KOTA MAKASSAR,

AULIA ARSYAD, S.STP., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
NIP : 197805011996122001



PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

RENCANA KERJA

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dipandang perlu untuk diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dipindai dengan CamScanner

17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, dengan menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana di maksud Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan.:
1. Wakil Wali Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
7.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
9.	Dinas Sosial Kota Makassar
10.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
12.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
13.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Makassar
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
22.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
23.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
24.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
25.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
26.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
27.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
28.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
29.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar

Dipindai dengan CamScanner

31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
32.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
34.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
35.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
36.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
37.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
38.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
39.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
40.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Paanakkukang Kota Makassar
43.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
44.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
45.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
46.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
47.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
58.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
49.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
50.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar
51.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar merupakan dokumen acuan perencanaan kegiatan SKPD sampai dengan akhir tahun anggaran yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025 berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan Nasional yang diaplikasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah. Perubahan Renja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Anggaran Tahun 2025.

Atas kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar Kota Makassar, diucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Makassar, Juni 2025
KEPALA DINAS,

Drs. A. IRWAN BANGSAWAN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690322 199303 1 005

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar merupakan dokumen acuan perencanaan kegiatan SKPD sampai dengan akhir tahun anggaran yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025 berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan Nasional yang diaplikasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah. Perubahan Renja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Anggaran Tahun 2025.

Atas kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar Kota Makassar, diucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Makassar, 4 Agustus 2025
KEPALA DINAS,

Drs. A. IRWAN BANGSAWAN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690322 199303 1 005

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 5

1.1 Latar Belakang 5

1.2 Landasan Hukum 8

1.3 Maksud dan Tujuan 11

1.4 Sistematika Penulisan 12

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 13

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 13

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 38

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 45

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 46

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan 61

3.2 Usulan Program dan Kegiatan 71

3.3 Rumusan Rencana Program 72

BAB IV PENUTUP 88

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA T-C.29	28
TABEL 2.2	IKU 2023	38
TABEL 2.3	T-C.30	39
TABEL 2.4	T-C.31	46
TABEL 2.5	T-C.32	71
TABEL 3.1	T-C.33	72
TABEL 4.1	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (P- RENJA) tahun 2025. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) tahun 2025 dimaksudkan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD. Pada Perubahan RENJA Tahun 2025 ini digambarkan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyiapan dan pelaksanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar ditujukan untuk memberikan pelayanan prima secara sistematis dibidang pengendalian penduduk dan keluaga berencana baik dari segi kuantitas maupun dari segi peningkatan kualitas pelayanan serta pemerataan pelaksanaan program keluarga berencana. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus memenuhi standar yang telah ditetapkan baik pelayanan yang bersifat subsidi maupun mandiri sesuai dengan kemampuan masyarakat dan mudah dijangkau.

Pengembangan jaringan organisasi pelayanan KB ditujukan untuk mempercepat proses perubahan pandangan, sikap dan perilaku masyarakat yang positif terhadap program KB, yang selanjutnya harus diikuti dengan perancangan kegiatan operasional serta penyiapan sarana pelayanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Pengembangan jaringan pelayanan KB dimaksud, baik yang dikelola oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan program keluarga berencana ditujukan untuk memperkuat dan mengembangkan manajemen/jejaring pelayanan serta kelembagaan program KB disemua tingkatan wilayah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan Renja dapat dilakukan apablia berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,

Dipindai dengan CamScanner

meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan perencanaan Renja Pokok.
2. Keadaan yang menyebabkan perlunya pengurangan dan atau penambahan anggaran.

Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar merupakan dokumen perencanaan untuk bulan Mei sampai dengan Desember yang disusun berdasarkan RKPD Kota Makassar yang berpedoman pada dokumen RENTSRA Periode 2025-2029.

Selanjutnya P-Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar Tahun 2025 mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan dokumen rencana strategis periode 2025-2029.

Perubahan Anggaran terjadi karena adanya fluktuasi kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan I dan adanya Bantuan Dana Operasional Keluarga Berencana dari Dana Alokasi Khusus serta penerapan efisiensi belanja daerah yang tertuang dalam Surat Edaran Walikota Makassar Nomor : 903/71/S.Edar/BPKAD/III/2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Hubungan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

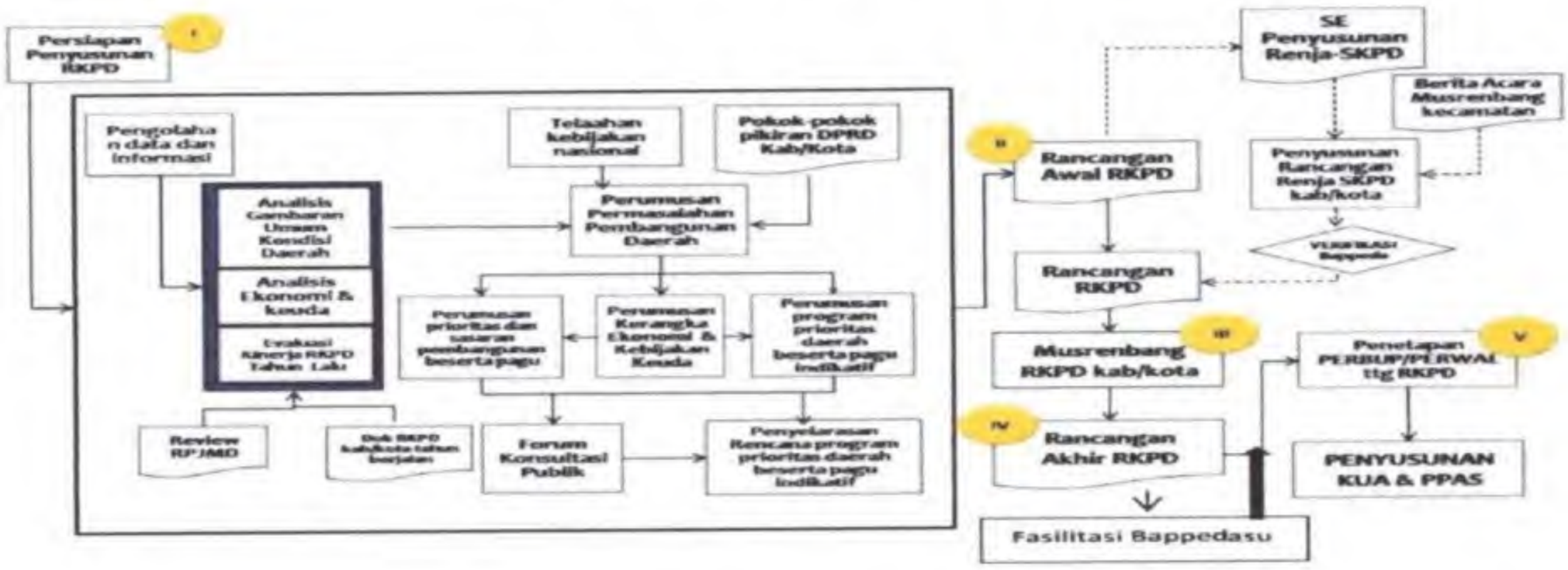
a. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar Tahun 2025 dan Rencana Kerja Kota Makassar (RKP) Tahun 2025 merupakan sinergitas menyangkut sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan. Keterkaitannya menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Makassar melalui program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Pemerintah Kota Makassar dan kebijakan Pemerintah dalam mendukung Pembangunan Nasional.
b. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan dokumen RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran secara operasional dan terukur, dan merupakan pelaksanaan Tahun Pertama RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029.
c. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar Tahun 2025 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah satu kesatuan yang memuat kebijakan program dan kegiatan

Dipindai dengan CamScanner

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar.

Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana RKPD Kota Makassar Tahun 2025 dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 merupakan sinergitas terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan. Keterkaitan perubahan menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemerintah Kota Makassar serta Provinsi Sulawesi Selatan dan Kebijakan Pemerintah dalammendukung Pembangunan Nasional.

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah



Dipindai dengan CamScanner

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
12. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Dan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RencanaKerja Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalan Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanunan Dan Keuangan Daerah.
15. Permendagri nomor 77 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri(Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangka Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);

Dipindai dengan CamScanner

20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran DaerahKota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Walikota Makassar Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 123 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2019 Tentang pendewasaan Usia Perkawinan;
24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Pengentasan Kemiskinan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 111);
25. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Kereja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
26. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perubahan.

Dipindai dengan CamScanner

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar Tahun 2025 dimaksudkan agar para aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki pedoman yang jelas tentang tahapan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Makassar pada Tahun Anggaran 2025. Karena itu, pada Rencana Kerja 2025 ini terangkum rencana program dan kegiatan, rencana anggaran, dan indikator pencapaian program dan kegiatan. Perubahan Rencana kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Anggaran Perubahan tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 ;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomiandan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

Dipindai dengan CamScanner

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Perubahan Renja SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar Tahun 2025 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang, bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, ketertaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Kota serta tindak lanjutnya dengan proses RAPBD.

1.2. Landasan Hukum, bagian ini memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan panganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan, bagian ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan, bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN (2025)

Bab ini memuat kajian (review) Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Hasil Triwulan I dan II.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, bagian ini memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, bagian ini memuat rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan, bagian ini berisikan penjelasan mengenai uraian garis besar mengenai rakapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Pengendalian Penduduk & KB untuk periode Tahun 2025-2026.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan uraian kesimpulan, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN I DAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 memuat analisis terhadap pelaksanaan Renja dan perkiraan capaian kinerja tahun 2025 untuk mengidentifikasi pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar pada Tahun 2025 mengelola belanja daerah sebesar **Rp. 27.022.735.931,-.** setelah perubahan mengalami penambahan sejumlah Rp **36.529.479.000,-** Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 4 (empat) Program, 15 (lima belas) Kegiatan, dan 63 (enam puluh tiga) Sub Kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 (Tiga) indikator antara lain :

- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik.
- Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah.
- Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas.

Dengan target kinerja 100% dan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.119.823.131-. Setelah perubahan anggaran mengalami pengurangan anggaran menjadi Rp 16.424.957.700,- Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 32,21% dengan capaian anggaran sebesar Rp. 5.349.7772.497,-. atau 32,11 %.

Faktor pendorong/pendukung pencapaian kinerja yaitu :

1. Pelaksanaan rapat internal tindak lanjut capaian program/kegiatan
2. Dukungan Manajemen
3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang berfungsi dengan baik.
4. Monev berkala yang dilakukan Lingkup Dinas Pengendalian Penduduk & KB.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 7 Kegiatan, diantaranya :

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** yang mempunyai indikator kinerja yaitu jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun. Dengan target kinerja 100% dan didukung anggaran

Dipindai dengan CamScanner

sebesar Rp. 155.520.680,-. Setelah perubahan anggaran mengalami pengurangan anggaran menjadi Rp 131.260.680,- Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 8,10% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.530.000,-. atau 8,06%. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ini memiliki sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 2 dokumen didukung anggaran sebesar Rp. 66.789.640,- Setelah perubahan anggaran mengalami pengurangan anggaran menjadi Rp 46.929.640,-. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 18,87% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 12.530.000,-. atau 18,76%.
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target 1 dokumen didukung anggaran sebesar Rp. 18.491.000,- sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan anggaran. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 0% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan target 1 dokumen didukung anggaran sebesar Rp. 18.491.000,- sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan anggaran. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 0% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.
d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan dengan target 1 dokumen didukung anggaran sebesar Rp. 12.461.520,- sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan anggaran. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 0% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.
e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan target 1 dokumen didukung anggaran sebesar Rp. 12.461.250,-. sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan anggaran. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 0% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 2 laporan didukung anggaran sebesar Rp. 10.826.000,- Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 0% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 2 laporan didukung anggaran sebesar Rp. 16.000.000,- Setelah perubahan anggaran mengalami pengurangan menjadi Rp 11.600.000,- Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 0% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.

Dipindai dengan CamScanner

2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** yang mempunyai Indikator kinerja yaitu jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun, dengan target kinerja 100% didukung anggaran sebesar Rp. 12.179.924.983,-. Setelah perubahan anggaran mengalami penambahan menjadi Rp 12.233.085.552. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 34,12% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.138.253.089,-. atau sebesar 34,12%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan yang berarti, karena kegiatan ini berisi pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta pembayaran pengelolah keuangan. Rencana tindak lanjut dengan mempercepat serta meneliti dokumen-dokumen pengajuan pencairan. Kegiatan ini memiliki 5 sub kegiatan:

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan target 12 bulan didukung anggaran sebesar Rp. 11.583..668.983,-. Setelah perubahan anggaran mengalami penambahan menjadi Rp 11.583.669.552. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 33,63% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.878.423.089,-. atau 33,48%.
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN dengan target 12 dokumen didukung dengan anggaran sebesar Rp. 259.560.000,-. Setelah perubahan anggaran mengalami penambahan menjadi Rp 312.720.000. Adapun capaian target sampai dengan Triwulan II sebesar 47,47% atau 5 dokumen dengan realisasi keuangan sebesar Rp 123.830.000,-. atau 47,71%.
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target 12 dokumen didukung anggaran sebesar Rp. 298.936.200,-. sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan anggaran. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 45,49% atau 5 dokumen dengan realisasi keuangan sebesar Rp 136.000.000,-. atau 47,71%.
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target 1 Laporan di dukung anggaran Rp 20.471.000,- sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan anggaran. Adapun capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 0% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0% atau 0%.
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan target 12 Laporan didukung anggaran Rp 17.288.800,- adapun capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 0% dengan realisasi keuangan 0%.

Dipindai dengan CamScanner

3. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** mempunyai indikator Persentase Pelaksanaan Admnistrasi Barang Milik Daerah dengan target kinerja 1 Dokumen didukung anggarana sebesar Rp 13.287.920. kegiatan ini tidak mengalami perubahan anggaran adapun capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 0% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0,- atau sebesar 0%. Kegiatan ini didukung dengan satu sub kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan target 1 Dokumen didukung anggaran sebesar Rp 13.287.920,- adapun capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 0% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0,- atau sebesar 0%.
4. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** mempunyai indikator yaitu Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan, dengan target kinerja 100% didukung anggaran sebesar Rp. 1.101.963.400,-. Setelah perubahan anggran berkurang menjadi Rp 776.463.400,- Adapun capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 65,68% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 459.135.000,-. atau sebesar 65,68%. Kegiatan ini didukung 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
    1. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dengan Target 12 Dokumen didukung anggaran sebesar Rp. 29.463.400,-. Sub kegiatan ini tidak mengalami perubahan. Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 0% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.
    2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan target 12 orang didukung anggaran sebesar Rp. 1.072.500.000,-. Setelah perubahan anggaran berkurang menjadi Rp 747.000.000,- Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 68,58% atau 7 orang dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 459.135.000,-. atau 68,78%.
3. **Administrasi Umum Perangkat Daerah** mempunyai Indikator kinerja kegiatan jumlah jasa administrasi umum yang tersedia dengan target kinerja 100% atau 6 jenis dengan didukung anggaran sebesar Rp. 1.379.445.728,-. Setelah perubahan anggaran berkurang menjadi Rp 1.183.021.428,- Adapun capaian kinerja sampai dengan triwulanII sebesar 25% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 514.952.724,-. atau 32,38%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak memiliki hambatan berarti, dikarenakan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki sub kegiatan

Dipindai dengan CamScanner

yang termasuk kegiatan berkelanjutan dan rutin di Dinas Pengendalian Penduduk & KB sehingga target kinerja dan realisasi anggaran dapat tercapai. Kegiatan ini memiliki 5 (lima) sub kegiatan:

1. Penyediaan dan Peralatan Perlengkapan Kantor, dengan Target 49 paket didukung anggaran sebesar Rp. 774.131.928,-. Sub.kegiatan ini tidak mengalami perubahan Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 0% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target 2 paket didukung anggaran sebesar Rp. 47.376.000,-. Setelah perubahan anggaran mengalami penambahan Rp 63.696.000,- Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 0% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan target 8 paket, didukung anggaran sebesar Rp. 53.337.500,-. Sub.Kegiatan ini tidak mengalami perubahan Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 0% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 116 laporan didukung anggaran sebesar Rp. 338.000.000,- Setelah perubahan anggaran mengalami pengurangan Rp 282.000.000,- Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 11% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.035.652,-. atau 11,01%.
5. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan target 1 Dokumen didukung anggaran sebesar Rp. 166.600.000,-. Setelah perubahan anggaran mengalami pengurangan menjadi Rp 9.856.000 Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 0,58% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.000.000,-. atau 0,60%.

4. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** mempunyai Indikator kinerja yaitu Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan dengan target kinerja 100% didukung anggaran sebesar Rp. 1.637.202.720,-. Setelah perubahan anggaran mengalami pengurangan menjadi Rp 1.417.158.720,- Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 33,19% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 542.403.381,-. atau sebesar 33,13%. Kegiatan ini memiliki 3 (dua) sub kegiatan yaitu:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 12 laporan didukung anggaran sebesar Rp. 670.476.000,-. Sub.kegiatan ini tidak mengalami perubahan Adapun

Dipindai dengan CamScanner

capaian kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 40,53% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 272.400.200,-. atau 40,63%.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target 12 laporan didukung anggaran sebesar Rp. 134.526.720,-. Setelah perubahan anggaran mengalami pengurangan menjadi Rp 140.982.720,- Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 36,24% atau 4 laporan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.303.181,-. atau 35,91%.
3. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target 12 Laporan didukung anggaran sebesar Rp 832.200.000,- Setelah perubahan anggaran mengalami pengurangan menjadi Rp 605.700.000,- adapun capaian kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 26,77% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 221.700.000,- atau 26,64%.

5. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** mempunyai indikator kinerja yaitu jumlah barang milik daerah yang dipelihara, dengan target kinerja 100% dengan didukung anggaran sebesar Rp. 652.478.000,-. Setelah perubahan anggaran bertambah menjadi Rp 670.680.000,- Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 25,37% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 165.415.375,-. atau 25,35%. Kegiatan ini memiliki 5 (lima) sub kegiatan:
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target 1 unit didukung anggaran sebesarRp. 44.630.000,-. Setelah perubahan mengalami pengurangan Rp 41.130.000,- Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 30,66% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.588.170,-. atau 30,45%.
   2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan target 181 unit didukung anggaran sebesar Rp. 381.448.000,-. Setelah perubahan anggaran mengalami penambahan sejumlah Rp 409.150.000,- Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar 23,29% atau dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 88.827.205,-. atau 23,29%.
   3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target 81 unit didkung anggaran sebesar Rp. 47.400.000,-. Setelah perubahan anggaran mengalami pengurangan sejumah Rp 41.400.000,- Adapun capaian kinerja sampai dengan Triwulan II sebesar0% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,-. atau 0%.

Dipindai dengan CamScanner

4. Pemeliharaab Asset Tak Berwujud dengan target 3 Unit didukung anggran sebesar Rp 53.000.000 tidak mengalami perubahan adapun capaian kinerja sebesar 0% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- atau 0%
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gudung Kantor atau bangunan Lainnya dengan target 2 unit didukung anggaran sebesar Rp. 126.000.000,-. Adapun capaian kinerja sebesar 50% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 63.000.000,-. atau 50%.

2. Program Pengendalian Penduduk

Capaian target kinerja Program Pengendalian Penduduk di dukung oleh dua Indikator yaitu Persentase SKPD yang Menyusun dan memanfaatkan rancagan induk pengendalian penduduk dengan target 45,09%, sampai di Triwulan II belum terealisasi atau 0%. Dikarenakan target pendataan keluarga tahun 2024 sementara berjalan dan perhitungannya berakhir pada akhir tahun berjalan, Indicator lainnya adalah Rata-rata jumlah anak perkeluarga dengan target indikator kinerja tahun 2024 sebesar 2 Anak, untuk realisasi di triwulan II telah tercapai 1,33%, program ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp. 1.009.182.200,- setelah perubahan anggaran berkurang menjadi Rp 859.683.200,-

Pencapaian target kinerja program didukung oleh Kegiatan yaitu :

-Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan alokasi Rp 339.845.000,- setelah perubahan anggaran menjadi Rp 859.683.200,- dengan target 1 Dokumen yang terdiri dari sub kegiatan:

1) Penyusunan dan Pemanfataan Grand Design Pembagunan kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota didukung alokasi anggaran Rp 26.795.000,- dengan Target 1 Dokumen. Adapun capaian kinerja sampai saat ini 0 dokumen dengan nilai realisasi Rp 0,- atau 0 Dokumen.
2) Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal didukung alokasi anggaran Rp 282.245.000,- setelah perubahan menjadi Rp 116.445.000 dengan target 50 Satuan Pendidikan. Adapun capaian kinerja sampai saat ini 0 satuan pendidikan dengan nilai realisasi Rp 0,- atau 0 satuan pendidikan.
3) Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan didukung alokasi anggaran Rp

Dipindai dengan CamScanner

30.805.000,- dengan Target 50 Organisasi. Adapun capaian kinerja sampai saat ini 0 Organisasi dengan nilai realisasi Rp 0,- atau 0 Organisasi.

- Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota mempunyai indikator Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota Makassar dengan Target 3 Dokumen didukung dengan alokasi anggaran Rp 669.337.200,- setelah perubahan anggaran menjadi Rp 685.638.200,- kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut:
  1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga sub.kegiatan ini merupakan anggaran yang teralokasi dari bantuan DAK/BOKB dengan nilai Rp 59.981.000,-
  2) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga didukung dengan anggaran Rp 529.124.400,- setelah perubahan menjadi Rp 100.584.400,- dengan target 1 Dokumen.
  3) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga sub.kegiatan ini merupakan anggaran yang teralokasi dari bantuan DAK/BOKB dengan nilai Rp 152.300.000,-
  4) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB didukung dengan alokasi anggaran Rp 118.730.800,- setelah perubahan bertambah menjadi Rp 351.290.800,- bertambah dari dana DAK sebesar Rp 232.560.000,- dengan target 12 Dokumen
  5) Perumusan Parameter Pengendalian Penduduk dan KB didukung dengan anggaran Rp 10.499.000,- setelah realokasi menjadi Rp 0 dengan target 2 Dokumen.
  6) Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) didukung anggaran sebesar Rp 10.983.000,- setelah dengan target 1 Dokumen

realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebesar Rp.41.653.900,- atau 4,29%. Capaian Outcome Program Pengendalian Penduduk dipengaruhi oleh 2 Faktor yaitu :

Faktor Pendorong :

a. Terlaksananya koordinasi dengan SKPD dengan lintas sektor terkait pelaksanaan sinkronisasi kebijakan kependudukan dan penyusunan Grand Design.
b. Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Keluarga Indonesia dari BKKBN Pusat yang menunjang keakuratan data keluarga berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
c. Terukurnya data pelayanan KB, Pengendalian lapangan antara lain : Data Poktan, Kampung KB, Rumah Dataku, dan PPKS melalui aplikasi New SIGA.
d. Terlaksananya inovasi Masiga dalam rangka mempercepat analisa data informasi Bangga Kencana.

Dipindai dengan CamScanner

Faktor Penghambat :

Permasalahan yang dahadapi adalah :

a. Masih adanya beberapa kader KB yang belum mengetahui penginputan data ke aplikasi Siga.
b. Pelaksanaan monitoring GDPK , Sekolah siaga kependudukan, Parameter kependudukan, sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga, kajian dampak kependudukan , updateing pendataan keluarga dan profil kependudukan tidak terlaksana karena disebabkan dengan adanya rasionalisasi anggaran.
c. Adanya penyesuaian anggaran BOKB terhadap belanja perjalanan dinas dalam daerah wilayah kota dan penyesuaian biaya internet di balai penyuluh kb.
d. Anggaran dana DAK/BOKB proses salurnya berada di akhir Triwulan II yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan.

Tindak lanjut :

a. Melakukan koordinasi intensif dengan BKKBN Pusat melalui Perwakilan BKKBN Provinsi terkait penyesuaian dalam pelaksanaan SIGA
b. Melakukan analisa permasalahan yang dihadapi oleh semua Kecamatan melalui UPT terkait peralihan ke Aplikasi SIGA
c. Melakukan perbaikan dan penyesuaian data K/0, R/I, R/II, Tribina dan Poktan
d. Menyiapkan dokumen dan melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam pelaksanaan kerjasama sinkronisasi kebijakan penduduk dan penyusunan Grand Design pembangunan kependudukan serta parameter kependudukan.
e. Menyesuaikan anggaran BOKB antara Juknis Keputusan Persiden dan SBU di Aaplikasi SIPD.

3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) ditentukan oleh 2 (Dua) indikator kinerja antara lain :

1. Rasio Akseptor KB dengan Target 68,35% untuk di Triwulan II capaian 62,5%
2. Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi dengan target 48,51% untuk di Triwulan II capaian 61,15%

Program ini didukung anggaran sebesar Rp.7.873.213.400,- setelah anggaran perubahan mendapat tambahan dari dana DAK/BOKB sehingga anggaran bertambah menjadi Rp 12.674.926.900. Pencapaian target kinerja program didukung oleh Kegiatan yaitu :

- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan target 55 Mitra Kerja didukung dengan alokasi anggaran Rp 281.134.200,- setelah perubahan bertambah menjadi Rp 1.077.564.200,- realisasi

Dipindai dengan CamScanner

sampai di Triwulan II Rp 1.309.356.600,- adapun capaian kinerja sebesar 10,58% atau 5 Mitra Kerja yang terdiri dari sub kegiatan:

1) Pengendalian Program KKBPK mendapatkan dengan target 3 Laporan mendapatkan alokasi anggaran Rp 11.069.000,-
2) Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana dengan target 9 Unit mendapatkan alokasi anggaran Rp 98.151.000,-
3) Pengelolaan Operasional dan sarana di balai penyulhan bangga kencana dengan target 12 Laporan mendapatkan alokasi anggaran Rp 161.864.200,- setelah perubahan angaran bertambah menjadi Rp 570.934.200,- yang bersumber dari bantuan DAK/BOKB.
4) Pelaksanaan Mekanisme Oprasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minlok) dengan target 16 Laporan diduknng alokasi angaran Rp 297.000.000,- bersumber dari dana DAK/BOKB.
5) Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kep[ada stakeholders dan Mitra Kerja dengan target 52 Organisasi mendapatkan alokasi anggaran Rp 10.050.000,- setelah perubahan mendapatkan tambahan anggaran menjadi Rp 100.410.000,- yang bersumber dari dana DAK/BOKB.

- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan target 153 PKB/PLKB mendapat alokasi anggaran Rp 5.676.897.200,- setelah perubahan anggaran bertambah menjadi Rp 5.995.617.200,- untuk triwulan II target kinerja telah tercapai 65,75% dengan realisasi anggaran Rp 1.261.554.100,- atau 20.82%. Kegiatan ini didukung oleh beberapa sub.kegiatan antaranya sebagai berikut :

1) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan target 1153 Orang mendapatkan alokasi anggaran Rp 5.204.156.000,- setelah perubahan bertambah menjadiRp 5.522.876.000,-
2) Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) (PKB/PLKB) dengan target 4 Laporan mendapatkan alokasi anggran Rp 472.741.200,-

- Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota dengan target 114 Faskes didukung alokasi anggaran Rp 385.999.000,- setelah perubahan anggaran bertambah Rp 3.860.462.500,- sampai Triwulan II capaian 27,93% atau 23 Faskes dengan nilai realisasi keuangan Rp 47.802.500,- atau 1,32% yang terdiri dari sub kegiatan:

Dipindai dengan CamScanner

1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan target 7 Laporan didukung anggaran Rp 25.418.000,-
2) Peningkatan Kesertaan Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan target 3320 Orang didukung anggaran Rp 124.274.000,- setelah perubahan anggaran bertambah dari dana DAK/BOKB menjadi Rp 1.871.185.000,-
3) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB dngan target 1 Unit didukung anggaran Rp 1.520.512.500,- yang bersumber dari dana DAK/BOKB.
4) Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB dengan target 25 Orang mendapatkan alokasi anggran Rp 27.756.000,-
5) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jarigan dan Jejaringnya dengan target 450 Orang mendapatkan alokasi anggaran Rp 14.623.000,- setelah perubahan anggran bertambah menjadi Rp 267.863.000,-
6) Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak dengan target 12 Laporan mendapatkan alokasi anggaran Rp 124.411.000,- setelah perubahan anggaran berkurang menjadi Rp 104.811.000,-
7) Peningkatan Kesertaan KB Pria dengan target 200 Orang mendapatkan alokasi anggaran Rp 30.627.000,- setelah perubahan anggaran berkurang menjadi Rp 12.027.000,-
8) Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB dengan target 220 orang mendapatkan alokasi anggaran Rp 16.015.000,-
9) Promosi dan Konseling KB pasca persalinan dengan target 300 Orang mendapatkan alokasi anggaran Rp 22.875.000 setelah perubahan menajadi Rp 14.875.000,-

- Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan target 52 Organisasi mendapatkan alokasi anggaran Rp 1.529.183.000,- setelah perubahan anggaran bertambah menjadi Rp 1.741.283.000,- capaian untuk Triwulan II 0% dengan nilai realisasi Rp 0,- atau 0% yang terdiri dari sub kegiatan:
  1) Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan target 52 Organisasi mendapatkan alokasi anggaran Rp 1.500.000.000,-
  2) Pembinaan Terpadu Kampung KB dengan target 3 Laporan mendapatkan alokasi anggran Rp 29.183.000,- setelah perubahan anggran bertambah menjadi Rp 18.683.000,-

Dipindai dengan CamScanner

3) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB dengan target 15 Kampung didukung alokasi anggaran Rp 222.600.000,- anggaran bertambah bersumber dari dana DAK/BOKB .

Capaian Outcome Program Pelayanan Keluarga Berencana dipengaruhi oleh 2 Faktor yaitu :

Faktor Pendorong :

a. Adanya kerjasama yang baik dengan pengelolaan program KB di tingkat Lini Lapangan
b. Tersedianya Alokon dari BKKBN Pusat
c. Adanya sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya progran pelayanan keluarga berencana
d. Tersedianya Kader KB sampai Tingkat RW yang mempunyai peran penting dalam melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangga Kencana.
e. Terlaksananya Staf Meeting setiap minggu di UPT KB yang membaha capaian dan evaluasi program bangga kencana.

Faktor Penghambat :

1. Pergantian kader KB sehingga Kader KB yang belum efektif melaksanakan tugas program bangga kencana.
2. Jumlah tenaga PKB/PLKB jika dibandingkan dengan jumlah keluarhan ridak berimbang sehingga PKB/PLKB bertugas di dua kelurahan.
3. Ada beberapa kegiatan bahan sosialisasi KIE terkendala karena rasionalisasi anggaran
4. Anggaran dana DAK/BOKB proses salurnya berada di akhir Triwulan II yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan.

Tindak Lanjut :

Dalam mengatasi Faktor-faktor tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kedepan akan melaksanakan:

1. Memaksimalkan tenaga PKB/PLKN untuk mendampingi kader KB
2. Memberdayakan Laskar Pelangi yang telah mengikuti Latihan dasar teknis penyuluhan yang diselenggarakan oleh BKKBN sebaga tenaga penyuluh Non ASN

4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) ditentukan oleh 4 (Empat) indikator kinerja antara lain :

1. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang Ber-KB dengan Target 77,14% capaian untuk ditriwulan II 45,45%

Dipindai dengan CamScanner

2. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang Berk-KB dengan Target 73,40% capaian untuk ditriwulan II 24,24
3. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Yang Ber-Kb dengan target 64,07% capaian untuk ditriwulan II 21,28%
4. Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri dengan target 38,41% capaian untuk ditriwulan II 21,28%

Program ini didukung anggaran sebesar Rp.1.020.517.200,- setelah perubahan anggaran bertambah menjadi Rp 6.569.911.200,- Pencapaian target kinerja program didukung oleh Kegiatan antara lain sebagai berikut :

- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai target 100% dengan alokasi anggaran Rp 1.020.517.200,- setelah perubahan anggaran bertambah menjadi Rp 1.382.311.200,- capaian sampai triwulan II 4.38% dengan realisasi anggaran Rp 55.293.000,- atau 4,42%, yang terdiri dari sub kegiatan:
  1) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) dengan target 25 Laporan didukung alokasi anggaran Rp 815.910.000,- setelah perubahan anggaran berkurang menjadi Rp 237.110.000,-
  2) Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) setelah perubahan mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari dana DAK/BOKB Rp 76.800.000,-.
  3) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan target 2 Laporan mendapat alokasi anggaran Rp 40.500.000,- setelah perubahan anggaran berkurang menjadi Rp 290.500.000,-
  4) Penyediaan Biaya Operasional Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan target 13 Orang mendapatkan alokasi anggaran Rp 137.569.200,- setelah perubahan anggaran bertambah menjadi Rp 751.363.200,- yang bersumber dari dana DAK/BOKB.
  5) Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan target 110 Kelompok mendapatkan alokasi anggaran Rp 26.538.000,-

Dipindai dengan CamScanner

- Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan target 15 Ormas mendapat alokasi anggaran dari dana DAK/BOKB berjumlah Rp 5.187.600.000,- capaian target sampai triwulan II 0% atau dengan realisasi keuangan Rp 0 atau 0% yang terdiri dari subkegiatan:
  1) pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) dengan target 1 Dokumen mendapatkan alokasi anggaran Rp 2.358.000.000,- bersumber dari dana DAK/BOKB.
  2) pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) dengan target 15 Laporan mendapatkan alokasi anggaran Rp 2.829.600.000,- bersumber dari dana DAK/BOKB.

Capaian Outcome Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dipengaruhi oleh 2 Faktor yaitu :

Faktor Pendorong :

1. Tersedianya Alat Edukasi berupa buku KIT siap Nikah yang diperuntukkan untuk kelompok BKR
2. Terlaksananya koordinasi dan dukungan antara penyulu dengan pemerintah Tingkat kelurahan dan jajaranya
3. Terbentuknya sekolah lansia di kecamatan
4. Adanya peran aktif mitra kerja
5. Terbentuknya PIK-R pada jalur Pendidikan dan Masyarakat
6. Adanya dukungan Pembina yang berada disekolah tentang pentingnya kelompok PIK-R

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya partisipasi masyarakat tentang adanya kelompok BKB di wilayahnya
2. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang dampak baiknya kegiatan BKB
3. Adanya realokasi anggaran yang mempengaruhi jalannya kegiatan pembinaan
4. Kurangnya alat edukasi
5. Belum ada pembinaan langsung PPKS di Balai

Tindak Lanjut :

Dalam mengatasi Faktor-faktor tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kedepankan

1. Melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman tentang apa manfaat dari kegiatan BKB
2. Memberikan jadwal pertemuan Kader BKB dan menambah alat Edukasi

Dipindai dengan CamScanner

3. Memaksimalkan kegiatan prioritas hasil dari tindak lanjut rasionalisasi anggaran
4. Perlu adanya pembinaan dan pelartihan terhadap kader PPKS di 12 Kecamatan
5. Memeberdayakan Non ASn yang telah mengikuti pendididkan Latihan Dasar Teknik penyuluhan untuk melakukan pendampingaan langsung di lapangan.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel T-C 29

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025

Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Makassar

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	14				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	90%	90%	100%	90%	47%	52%
						Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	95%	95%	100%	45%	45%
						Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	100%	90%	83,4%	92.6%	90%	27%	30%
2	**14**	**01**	201		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen
2	14	01	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Dipindai dengan CamScanner

2	14	01	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2	14	01	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2	14	01	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2	14	01	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2	14	01	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
2	14	01	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
2	**14**	**01**	202		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
2	14	01	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Org/Bulan	12 Org/Bulan	12 Org/Bulan	12 Org/Bulan	12 Org/Bulan	12 Org/Bulan	12 Org/Bulan	12 Org/Bulan
2	14	01	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
2	14	01	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
2	14	01	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2	14	01	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jml Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD & Laporan Koord. Penyusunan Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

Dipindai dengan CamScanner

						Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
2	**14**	**01**	203		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2	14	01	203	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2	**14**	**01**	205		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis
2	14	01	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	107 Paket	107 Paket	107 Paket	107 Paket	107 Paket	107 Paket	107 Paket	107 Paket
2	14	01	205	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
2	14	01	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang
2	**14**	**01**	206		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jasa adminitrasi umum yang tersedia	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis
2	14	01	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket
2	14	01	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket
2	14	01	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket
2	14	01	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	192 Dokumen	192 Dokumen	192 Dokumen	192 Dokumen	192 Dokumen	192 Dokumen	192 Dokumen	192 Dokumen
2	14	01	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan
2	14	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2	**14**	**01**	207		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis

Dipindai dengan CamScanner

2	14	01	207	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
2	14	01	207	5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
2	14	01	207	6	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit
2	14	01	207	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
2	**14**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
2	14	01	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
2	14	01	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
2	14	01	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
2	**14**	**01**	209		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis
2	14	01	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
2	14	01	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	161 Unit	161 Unit	161 Unit	161 Unit	161 Unit	161 Unit	161 Unit	161 Unit
2	14	01	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	43 Unit	43 Unit	43 Unit	43 Unit	43 Unit	43 Unit	43 Unit
2	14	01	209	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
2	14	01	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit

Dipindai dengan CamScanner

2	14	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
2	**14**	**02**			**Program Pengendalian Penduduk**	**Persentase SKPD yang Menyusun dan memanfaatkan rancagan induk pengendalian penduduk**	**45,09**	**45,09**	**45,09**	**45,09**	**45,09**	**45,09**	**45,09**	**45,09**
						Rata-rata Jumlah anak perkeluarga	**2 Anak**	**2 Anak**	**2 Anak**	**2 Anak**	**2 Anak**	**2 Anak**	**2 Anak**	**2 Anak**
2	**14**	**02**	201		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2	14	02	201	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2	14	02	201	9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan
2	14	02	201	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	50 Organisasi	50 Organisasi	50 Organisasi	50 Organisasi	50 Organisasi	50 Organisasi	50 Organisasi	50 Organisasi
2	14	02	201	17	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
	214	**02**	202		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakup	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
2	14	02	202	5	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Dipindai dengan CamScanner

2	14	02	202	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2	14	02	202	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
2	14	02	202	17	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2	14	02	202	20	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2	**14**	**03**			**Perogram Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	Rasio Akseptor KB	**68,35**	**68,35**	**68,35**	**68,35**	**68,35**	**68,35**	**68,35**	**68,35**
						Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	**49,48**	**49,48**	**49,48**	**49,48**	**49,48**	**49,48**	**49,48**	**49,48**
2	**14**	**03**	201		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Jumlah Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	**55 Mitra Kerja**	**55 Mitra Kerja**	**55 Mitra Kerja**	**55 Mitra Kerja**	**55 MitraKerja**	**55 MitraKerja**	**55 MitraKerja**	**55 MitraKerja**
2	14	03	201	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
2	14	03	201	9	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit
2	14	03	201	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
2	14	03	201	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan

Dipindai dengan CamScanner

2	14	03	201	12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2	14	03	201	13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
2	14	03	201	14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	52 Organisasi	52 Organisasi	52 Organisasi	52 Organisasi	52 Organisasi	52 Organisasi	52 Organisasi	52 Organisasi
2	**14**	**03**	**202**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang didayagunakan**	**153 PKB/PLKB**	**153 PKB/PLKB**	**153 PKB/PLKB**	**153 PKB/PLKB**	**153 PKB/PLKB**	**153 PKB/PLKB**	**153 PKB/PLKB**	**153 PKB/PLKB**
2	14	03	202	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1151 Orang	1151 Orang	1151 Orang	1151 Orang	1151 Orang	1151 Orang	1151 Orang	1151 Orang
2	14	03	202	5	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi	2 Organisasi
2	14	03	202	6	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	4 Laporan 4	4 Laporan 4	4 Laporan 4	4 Laporan 4	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
2	**14**	**03**	**203**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota Makassar yang**	**114 Faskes**	**114 Faskes**	**114 Faskes**	**114 Faskes**	**114 Faskes**	**114 Faskes**	**114 Faskes**	**114 Faskes**

Dipindai dengan CamScanner

						dikendalikan dan didistribusikan							
2	14	03	203	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan
2	14	03	203	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1500 Orang	1500 Orang	1500 Orang	1500 Orang	1500 Orang	1500 Orang	1500 Orang
2	14	03	203	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	31 Unit	31 Unit	31 Unit	31 Unit	31 Unit	31 Unit	31 Unit
2	14	03	203	7	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	375 Orang	375 Orang	375 Orang	375 Orang	375 Orang	375 Orang	375 Orang
2	14	03	203	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	450 Laporan	450 Laporan	450 Laporan	450 Laporan	450 Laporan	450 Laporan	450 Laporan
2	14	03	203	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
2	14	03	203	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
2	14	03	203	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang
2	14	03	203	15	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	220 Orang	220 Orang	220 Orang	220 Orang	220 Orang	220 Orang	220 Orang	220 Orang
2	14	03	203	16	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang
2	**14**	**03**	**204**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan**	**Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat**	**10 Ormas**	**10 Ormas**	**10 Ormas**	**10 Ormas**	**10 Ormas**	**10 Ormas**	**10 Ormas**	**10 Ormas**

Dipindai dengan CamScanner

					Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Kota Makassar Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang dilaksanakan**								
2	14	03	204	1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	52 Organisasi	52 Organisasi	52 Organisasi	52 Organisasi	52 Organisasi	52 Organisasi	52 Organisasi	52 Organisasi
2	14	03	204	4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
2	14	03	204	6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	15 Kampung	15 Kampung	15 Kampung	15 Kampung	15 Kampung	15 Kampung	15 Kampung	15 Kampung
2	**14**	**03**			**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang Ber-KB	**77,14**	**77,14**	**77,14**	**77,14**	**77,14**	**77,14**	**77,14**	**77,14**
						Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang Ber-KB	**73,40**	**73,40**	**73,40**	**73,40**	**73,40**	**73,40**	**73,40**	**73,40**
						Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber-KB	**64,07**	**64,07**	**64,07**	**64,07**	**64,07**	**64,07**	**64,07**	**64,07**
						Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	**38,41**	**38,41**	**38,41**	**38,41**	**38,41**	**38,41**	**38,41**	**38,41**
2	**14**	**04**	201		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Cakupan Pembagunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	14	04	201	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan

Dipindai dengan CamScanner

2	14	04	201	20	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang
2	14	04	201	21	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
2	14	04	201	24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	852 Orang	852 Orang	852 Orang	852 Orang	852 Orang	852 Orang	852 Orang	852 Orang
2	14	04	201	26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	110 Kelompok	110 Kelompok	110 Kelompok	110 Kelompok	110 Kelompok	110 Kelompok	110 Kelompok	110 Kelompok
2	14	04	202		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kota Makassar dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan	15 Ormas	15 Ormas	15 Ormas	15 Ormas	15 Ormas	15 Ormas	15 Ormas	15 Ormas
2	14	04	202	3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50 Organisasi	50 Organisasi	50 Organisasi	50 Organisasi	50 Organisasi	50 Organisasi	50 Organisasi	50 Organisasi
2	14	04	202	4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanandan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagiMitra Kerja	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

Dipindai dengan CamScanner

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama. Adapun analisis pencapian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Makassar adalah sesuai dengan tabel berikut :

Table 2.2

Pencapaian IKU Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1 .	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,21%	0,26	21,49
		Total Fertility Rate (TFR)	%	2,09%	2,02	96,65
2.	Menurunya Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Cakupan pasangan Usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	8,30	9,06	109,16
3.	Meningkatnya kesertaan pasangan usia subur (PUS) dalam ber KB dan Kesehatan Reproduksi	Angka pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 Tahun	%	68,30	68,46	100
4.	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100

Dipindai dengan CamScanner

Table T-C. 30.
Pencapaian Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kota Makassar

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	-	□	1,22	1,21	1,21	1,20	0,26	0,26	0,26	1,21
2.	Total Fertelity Rate	-	□	2,10	2,09	2,08	2,07	2,13	2,02	2,02	2,08
3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	-	□	54,90	56,86	58,82	60,78	52,94	64,70	66,67	58,82
4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan memanfaatkan Rancagan Induk Pengendalian Penduduk	-		41,17	43,13	45,09	47,05	58,82	66,67	0	45,09
5.	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	-		1	1	1	1	1	1	1	1
6.	Jumlah Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk	-		21	22	23	24	32	34	34	23

Dipindai dengan CamScanner

	perencanaan program pembangunan										
7	Jumlah Kerjasama penyelenggaraan Pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan Pendidikan kependudukan			9	13	16	18	8	8	8	16
8	Rata-rata jumlah anak perkeluarga			2	2	2	2	1,24	1,32	1,33	2
9	Ratio Akseptor KB			68,25	68,30	68,35	38,40	56,71	68,46	62,05	68,35
10	Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi Perempuan menikah usia 15-49			68,25	68,30	68,35	38,40	57,81	68,46	62,05	68,35
11	Angka kelahiran remaja (Perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)			31,52	29,53	27,50	25,59	29,04	23,80	23,80	27,50
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya			0,55	0,54	0,53	0,52	15,73	14,60	16,62	0,53

Dipindai dengan CamScanner

13	Cakupan PUS yang i8ngin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)			8,70	8,30	7,90	7,50	25,85	9,06	7,61	7,90
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			32,88	33,44	33,98	34,54	28,93	27,75	31,23	33,98
15	Persentase Tingkat keberlangsungan pemakaian kontasepsi			47,56	48,51	49,48	50,47	79,98	46,06	61,15	49,48
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB			76,22	76,82	77,14	77,74	84,80	44,16	45,45	77,14
17	Cakupan anggota Bina Keleuarga Remaja (BKR) ber-KB			72,15	72,80	73,40	74,00	17,01	23,55	24,24	73,40
18	Cakupan anggota Bina Keleuarga Lansia (BKL) ber-KB			62,87	63,47	64,074	64,67	6,99	11,100	9,59	64,074
19	Cakupan Reamaj dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa			813,33	833,33	853,33	873,33	853,33	866,66	0	853,33
20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan			100	100	100	100	100	100	100	100

Dipindai dengan CamScanner

	Pembangunan daerah di bidang pengedalian penduduk										
21	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri			38,37	38,39	38,41	38,43	25,69	22,76	21,28	38,41
22	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan			100	100	100	100	100	104,57	100	100
23	Cakupan Ketersedian dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan Masyarakat			39,25	39,43	39,64	39,80	35,19	50,23	0	39,64
24	Persentase Faskes dan jejarignya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan			97,34	97,36	97,38	97,40	81,45	76,43	0	97,38
25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Kelurahan			100	100	100	100	100	100	100	100

Dipindai dengan CamScanner

26	Cakpan Klompok kegiatan yang melakukan pembinaan 8 fungsi keluarga			100	100	100	100	100	100	0	100
27	Cakupan Keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak			100	100	100	100	89,45	46,04	0	100
28	Rata-rata usia kawin pertama Wanita			21 Tahun	21 Tahun	21 Tahun	21 Tahun	20,76 Tahun	21 Tahun	21 Tahun	21 Tahun
29	Persentase pembiayaan program kepndudukan,keluarga berencana dan Pembangunan keluarga melalui APBD			0,69	0,71	0,73	0,73	0,75	0,73	0	0,73

Dipindai dengan CamScanner

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar melaksanakan reviuw dalam rengak mencapai Visi danMisi melalui pelaksanaan Program/Kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatan terhadap pencapaian tujuan perlu dipahami ada kendala yang tidak bisa dikesampingkan, kendala-kendala permasalahan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Masalah Internal :
   a. Koordinasi antar Lembaga belum terjalin dengan baik;
   b. Kurangnya alat edukasi
   c. Jumlah Penyulu tidak sebanding dengan sasaran kelompok pembinaan
   d. Pergantian kader KB sehingga kader kb yang baru belum efektif dalam melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi program Bangga Kencana.
2. Masalah Eksternal :
   a. Masih banyak Masyarakat yang kurang memahami tentang dampak baiknya kegiatan Penyuluhan terhadap Isu-isu Kependudukan & Keluarga Berencana
   b. Kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang keberadaan PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)
   c. Kurangnya partisipasi Masyarakat terhadap kelompok binaan

Dipindai dengan CamScanner

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
No.	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Pagu Indikatif	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Pagu Indikatif	
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					27.022.735.931	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				36.529.479.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					27.022.735.931	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				36.529.479.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					27.022.735.931	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				36.529.479.000	
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Makassar**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100**	**17.119.823.131**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Makassar**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100**	**16.424.957.700**	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
			Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah					**Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah**			
			Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas					**Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas**			
I.	**Perencanaan, Penganggaran danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun**	**10**	**155.520.680**	**Perencanaan, Penganggaran danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah dokumen perencanaan perangkatdaerah yang disusun**	**10**	**131.260.680**	**Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionallsasi anggaran**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	66.789.640	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah dokumen perencanaan perangkatdaerah yang disusun	2	46.929.640	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran

Dipindai dengan CamScanner

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1	18.491.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKASKPD yang disusun	1	18.491.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah dokumen RKA perubahan SKPD yang disusun	1	18.491.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah dokumen RKA perubahan SKPD yang disusun	1	18.491.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1	12.461.520	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1	12.461.250	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	1	12.461.250	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	1	12.461.250	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	2	10.826.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	2	10.826.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2	16.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yangdisusun	2	11.600.000	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
II.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerahyang Disusun**	**12**	**12.179.924.983**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang**	**12**	**12.233.085.552**	**Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran**

Dipindai dengan CamScanner

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	11.583.668.983	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	11.583.669.552	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN	Makassar	Tersedianya Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	259.560.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN	Makassar	Tersedianya Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	312.720.000	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	298.936.200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	298.936.200	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	20.471.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	20.471.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12	17.288.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12	17.288.800	
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun.	1	13.287.920	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun.	1	13.287.920	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	13.287.920	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	13.287.920	
IV.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan**	**3**	**1.101.963.400**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang**	**3**	**776.463.400**	**Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran**

Dipindai dengan CamScanner

1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Makassar	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	107	74.446.400	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Makassar	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	107	0,00	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Makassar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	29.463.400	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Makassar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	29.463.400	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	1.072.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	747.000.000	Arahan Langsung dari Tim TAPD Melakukan Rasionalisasi anggaran
IV.	**Administrasi Umum PerangkatDaerah**	**Makassar**	**Jumlah jasa adminitrasi umumyang tersedia**	**6**	**1.379.445.428**	**Administrasi Umum PerangkatDaerah**	**Makassar**	**Jumlah jasa adminitrasi umumyang tersedia**	**6**	**1.183.021.428**	Arahan Langsung dari Tim TAPD Melakukan Rasionalisasi anggaran
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	774.131.928	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	774.131.928	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	47.376.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makassar	Jumlah Peralatan danPerlengkapan Kantor yang disediakan	2	63.696.000	Arahan Langsung dari Tim TAPD Melakukan Rasionalisasi anggaran
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Makassar	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	7	53.337.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Makassar	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	7	53.337.500	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Makassar	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	192	18.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Makassar	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	18	0	Arahan Langsung dari Tim TAPD Melakukan Rasionalisasi anggaran
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56	338.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	282.000.000	Arahan Langsung dari Tim TAPD Melakukan Rasionalisasi anggaran

Dipindai dengan CamScanner

6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	166.600.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	9.856.000	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
V.	**Pengadaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah**	**Makassar**	**Jumlah Barang MilikDaerah yang diadakan**	**3**	**512.500.000**	**Pengadaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah**	**Makassar**	**Jumlah Barang MilikDaerah yang diadakan**	**3**	**0**	**Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran**
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Persentase saranadan prasarana aparatur dalam kondisi baik	-	0,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	-	0,00	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
2	Pengadaan Mebel	Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	32.000.000	Pengadaan Mebel	Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	0,00	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26	480.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26	0	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
VI.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang disediakan**	**12**	**1.637.202.720**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang disediakan**	**12**	**1.417.158.720**	**Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Jasa SuratMenyurat yang disediakan	12	670.476.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	49	670.476.000	

Dipindai dengan CamScanner

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	134.526.720	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	140.982.720	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	832.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	605.700.000	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
VII.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**6**	**652.478.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Makassar**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**6**	**670.680.000**	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas Jabatan	1	44.630.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	1	41.130.000	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	161	381.448.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	161	409.150.000	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43	47.400.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43	41.400.000	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar	Tersedianya Pemeliharaan Peralatandan Aset Tak Berwujud	3	53.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassa	Tersedianya Pemeliharaan Peralatandan Aset Tak Berwujud	3	53.000.000	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	31.350.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	0	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran

Dipindai dengan CamScanner

5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	126.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	126.000.000	
B.	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Makassar**	**Persentase SKPD yang Menyusun dan memanfaatkan rancagan induk pengendalian penduduk**	**45,09**	**1.009.182.200**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Makassar**	**Persentase SKPD yang Menyusun dan memanfaatkan rancagan induk pengendalian penduduk**	**45,09**	**859.683.200**	**Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran**
			Rata-rata Jumlah anak perkeluarga	**2**				**Rata-rata Jumlah anak perkeluarga**	**2**		
VIIII.	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Kota Makassar Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang dipadukan dan disinkronisasi**	**1**	**339.845.000**	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Makassar**	**Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Kota Makassar Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang dipadukan dan disinkronisasi**	**1**	**174.045.000**	**Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran**
1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	26.795.000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	26.795.000	
2	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Makassar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	50	282.245.000	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Makassar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	50	116.445.000	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
3	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Makassar	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	50	30.805.000	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Makassar	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	50	30.805.000	

Dipindai dengan CamScanner

4	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Makassar	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1	11.034.600	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Makassar	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1	0	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
IX	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Makassar	**Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota Makassar**	**3**	**669.337.200**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Makassar	**Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota Makassar**	**3**	**685.638.200**	**Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran**
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Makassar	Terlaksanannya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	8	0	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Makassar	Terlaksanannya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	8	59.981.000	Dana BOKB/DAK
2	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Makassar	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yangTersediany	1	529.124.400	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Makassar	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yangTersediany	1	116.445.000	Arahan langsung dari Tim TAPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran
3	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Makassar	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0	0	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Makassar	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	127	152.300.000	Dana BOKB/DAK
4	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangandan Pelayanan KB	Makassar	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangandan Pelayanan K	12	118.730.800	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Makassar	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangandan Pelayanan K	12	351.290.800	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
5	Perumusan Parameter pengendalian pendudukdan KB	Makassar	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalianpenduduk dan KB yang dirumuskan	2	10.499.000	Perumusan Parameter pengendalian penduduk danKB	Makassar	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalianpenduduk dan KB yang dirumuskan	2	10.499.000	
6	Penyusunan profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Makassar	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1	10.983.000	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Makassar	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1	10.983.000	

Dipindai dengan CamScanner

C.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Makassar	Rasio Akseptor KB	68,35	7.873.213.400	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Makassar	Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	68,35	12.674.926.900	Tambahan Dari Dana BOKB/DAK
			Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	49,48				Persentase ASNyang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	49,48		
XII	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Makassar	Jumlah Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	55	281.134.200	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Makassar	Jumlah Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	55	1.077.564.200	Tambahan Dari Dana BOKB/DAK
1	Pengendalian Program KKBPK	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	3	11.069.000	Pengendalian Program KKBPK	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	3	11.069.000	
2	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Makassar	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	9	98.151.000	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Makassar	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	9	98.151.000	
3	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	161.864.200	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	570.934.200	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
4	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Makassar	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	16	0	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),dan Mini Lokakarya (Minilok)	Makassar	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	16	297.000.000	Tambahan Dari Dana BOKB/DAK

Dipindai dengan CamScanner

5	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Makassar	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	0	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Makassar	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2	0	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
6	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Makassar	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3	185.540.300	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Makassar	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3	0	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
7	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Makassar	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	52	10.050.000	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Makassar	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	52	100.410.000	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Makassar	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang didayagunakan	153	5.676.897.200	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Makassar	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang didayagunakan	153	5.995.617.200	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Makassar	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1151	5.204.156.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Makassar	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1151	5.522.876.000	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran

Dipindai dengan CamScanner

	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Makassar	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2	421.430.500	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Makassar	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2	0	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	4	472.741.200	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	4	472.741.200	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota Makassar yang dikendalikan dan didistribusikan	114	385.999.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota Makassar yang dikendalikan dan didistribusikan	114	3.860.462.500	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Makassar	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	7	25.418.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Makassar	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	7	25.418.000	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1500	124.274.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1500	1.871.185.000	Sumber Dari Dana BOKB/DAK
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Makassar	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	-		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Makassar	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	31	1.520.512.500	Sumber Dari Dana BOKB/DAK

Dipindai dengan CamScanner

	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta K	375	27.756.000	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta K	375	27.756.000	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	450	14.623.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	450	267.863.000	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Makassar	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	100	371.351.200	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Makassar	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	100	0	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Makassar	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12	124.411.000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Makassar	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12	104.811.000	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Makassar	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	200	30.627.000	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Makassar	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	200	12.027.000	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Makassar	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	220	16.015.000	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Makassar	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	220	16.015.000	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Makassar	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	300	22.875.000	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Makassar	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	300	14.875.000	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan	Makassar	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kota Makassar Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	10	1.529.183.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Makassar	Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kota Makassar Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	10	1.741.283.000	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran Arahan Langsung

Dipindai dengan CamScanner

	Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Kesertaan Ber-KB yang dilaksanakan					Kesertaan Ber-KB yang dilaksanakan			Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Makassar	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	52	1.500.000.000	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Makassar	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	52	1.500.000.000	
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	3	29.183.000	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	3	18.683.000	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Makassar	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	15	0	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Makassar	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	15	226.600.000	Sumber Dari DAK/BOKB
D	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Makassar**	**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Yang Ber-KB**	**77,14**	**1.020.517.200**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Makassar**	**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Yang Ber-KB**	**77,14**	**6.569.911.200**	
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Yang Ber-KB	**73,40**				**Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Yang Ber-KB**	**73,40**		
			Cakupan Anggota Keluarga Bina Lansia (BKL) yang Ber-KB	**64,07**				**Cakupan Anggota Keluarga Bina Lansia (BKL) yang Ber-KB**	**64,07**		
			Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri	**38,41**				**Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri**	**38,41**		
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Makassar**	Cakupan Pembagunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan	100	1.020.517.200	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Makassar**	Cakupan Pembagunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan	100	1.382.311.200	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran

Dipindai dengan CamScanner

	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	**Makassar**	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2	815.910.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	**Makassar**	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2	237.110.000	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	**Makassar**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	200	53.996.400	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	**Makassar**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	200	0	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	**Makassar**	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	200	0	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	**Makassar**	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	200	76.800.000	Bersumber Dari dana DAK/BOKB
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	**Makassar**	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2	40.500.000	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	**Makassar**	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2	290.500.000	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	**Makassar**	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	852	137.569.200	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	**Makassar**	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	852	751.363.200	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	**Makassar**	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	110	26.538.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	**Makassar**	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	110	26.538.000	

Dipindai dengan CamScanner

	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Makassar**	Jumlah Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kota Makassar dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan	**110**	63.664.500	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Makassar**	Jumlah Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kota Makassar dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan	110	348.920.000	Arahan Langsung Dari TIM TAPD unutk Rasionalisasi anggaran
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	**Makassar**	Terlaksanannya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	200	0	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	**Makassar**	Terlaksanannya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	200	2.358.000.000	Bersumber Dari dana DAK/BOKB
	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	**Makassar**	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	200	0	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	**Makassar**	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	200	2.829.600.000	Bersumber Dari dana DAK/BOKB

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Menurut UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya sesuai PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar memuat rancangan kerangka pembangunan daerah dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagai keberlanjutan program dan kegiatan dalam membangun Kota Makassar terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian lebih terkait kurangnya tenaga di skpd yang memahami teknis pembuatan paket pengadaan dan kurangnya tenaga pokja dan pejabat pengadaan yang tersedia yang harus merangkap beberapa skpd sehingga pendampingan pokja ke skpd kurang maksimal sesuai dengan waktu yang tersedia, selain itu adanya pergantian pimpinan skpd, bendahara, dan beberapa pejabat struktural yang menyebabkan keterlambatan administrasi.

Pada Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar terdapat 4 Program (15 Kegiatan 63 Sub Kegiatan) tahun 2025 dengan jumlah Anggaran Pokok 2025 sebesar Rp. 27.022.735.931,- , setelah ada penambahan anggaran Parsial 1-3 dana DAK/BOKB sebesar Rp. 9.506.743.069,- sehingga Anggaran Pokok bertambah menjadi Rp. 36.529.479.000,- , rincian realisasi pelaksanaan APBD hingga triwulan II (30 Juni 2025) yang terdiri dari Anggaran Pokok dan Anggaran Parsial 1 (satu)

Dipindai dengan CamScanner

sampai dengan Parsial 3 (tiga) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar 2025 sebesar Rp.76.756.075.997,- atau 18,65%.

Program dan kegiatan tahun 2025 di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran pokok sebesar Rp.17.119.823.131,- dengan target Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah 100%, Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan) dengan Anggaran Setelah Perubahan Menjadi Rp. 16.424.957.700,- Pengurangan sebanyak (Rp.694.865.431)dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.155.520.680,- setelah perubahan menjadi Rp. 131.260.680,- mengalami pengurangan Sebanyak (Rp. 24.260.000,-) dengan target 10 Dokumen dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 66.789.640,- setelah Perubahan Menjadi Rp. 46.929.640,- dengan target 2 Dokumen

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 18.491.000,- dengan target 1 Dokumen

1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.18.491.000 dengan target 1 Dokumen

1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.12.461.520 target 1 Dokumen

1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran Sebesar Rp.12.461.520 dengan target 1 Dokumen

1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 10.826.000,- dengan target 2 Dokumen

1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Sebesar Rp.16.000.000,- Setelah Perubahan Menjadi Rp.11.600.000,- target 2 Dokumen

Dipindai dengan CamScanner

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.12.179.924.983,- Setelah Perubahan Menjadi Rp. 12.233.085.552,- Penambahan sebanyak Rp.53.160.569,- dengan target 12 bulan sebagai berikut :

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp.11.583.668.983,- Setelah Perubahan Menjadi Rp. 11.583.669.552,- dengan target 12 bulan.

1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp.259.560.000,- Setelah Perubahan Menjadi Rp.312.720.000,- dengan target 12 bulan.

1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp.298.936.200,- Setelah Perubahan MenjadiRp 298.936.200,- dengan target 12 bulan.

1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp.20.417.000,- dengan target 1 laporan.

1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp.17.288.000,- dengan target 12 bulan.

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.17.860.700,- dengan target 1 Dokumen.

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.101.963.400,- Setelah Perubahan Menjadi Rp.776.463.400,- Pengurangan sebanyak (Rp.325.500.000)dengan target 3 jenis dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan dengan anggaran sebesar Rp.74.446.400,- Setelah Perubahan Menjadi Rp. 0,- dengan target 110 stel.

1.4.2 Pendataan dan Pengolahan Adminisrasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp.29.463.400,- dengan target 12 bulan.

1.4.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp.1.072.500.000,- Setelah Perubahan Menjadi Rp.747.000.000,- dengan target 29 orang.

Dipindai dengan CamScanner

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.379.445.428,- Setelah Perubahan Menjadi Rp.1.183.021.428,- Pengurangan Sebanyak (Rp. 196.424.000) dengan target 6 jenis dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

1.5.1 Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.774.131.928,-.

1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 47.376.000,- setelah perubahan menjadi Rp 63.696.000 dengan target 2 Paket.

1.5.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp.53.337.500 dengan target 14 Eksemplar.

1.5.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran Sebesar Rp.9.000.000,- Setelah Perubahan Menjadi Rp. 0,- dengan target 12 bulan.

1.5.5 Penyelengaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Dengan Anggaran Sebesar Rp.338.000.000,- Setelah Perubahan Menjadi Rp.282.000.000,- dengan target 70 laporan.

1.5.6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp.166.600.000,- Setelah Perubahan Menjadi Rp. 9.856.000,-.

1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 0,-, dikarenakan adanya penyesuaian belanja pada kegiatan ini dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1.6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp. 0.

1.6.2 Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp. 0.

1.6.3 Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya sebesar Rp. 0.

1.6.4 Pengadaan Aset Tak Berwujud sebesar Rp. 0.

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.637.202.720,- Setelah Perubahan Menjadi Rp.1.417.158.720,- Pengurangan Sebanyak (RP220.044.000) dengan target 12 Bulan, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

1.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Anggaran Sebesar Rp.670.476.000,- dengan target 12 bulan.

Dipindai dengan CamScanner

1.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp.140.982.720 dengan target 12 bulan.

1.7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp.832.200.000,- Setelah Perubahan Menjadi Rp 605.700.000,- dengan target 12 bulan

1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp.652.478.000,- Setelah Perubahan Menjadi Rp.670.680.000,- Mengalami Penambahan Sebanyak Rp.18.202.000,- dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp.41.130.000,- dengan target 1 unit karena penarikan LS.

1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp381.448.000,- Setelah Perubahan Menjadi Rp.409.150.000,- target 158 unit.

1.8.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.41.400.000,- dengan target 43 jenis.

1.8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp.156.000.000,- Setelah Perubahan Menjadi Rp. 0,-.

1.8.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya sebesar Rp. 126.000.000,- dengan target 12 Bulan.

2. Program pengendalian penduduk, dengan anggaran pokok sebesar Rp. 1.009.182.200,- dengan target LPP 1,22 %, TFR 2,10, mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 859.683.200,- Pengurangan Sebanyak (Rp.149.499.000) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

2.1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan anggaran sebesar Rp.174.045.000,- dengan target 1 Dokumen dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

2.1.1. Penyusunan dan Pemanfataan Grand Design Pembagunan kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.26.795.000,- Setelah Perubahan Menjadi Rp.26.795.000,- dengan target 1.

Dipindai dengan CamScanner

2.1.2. Advokasi ,Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal dengan anggaran sebesar Rp.282.245.000,- Setelah Perubahan Menjadi Rp.116.445.000,- dengan target 1000rang.

2.1.3. Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan dengan anggaran sebesar Rp.30.805.000,- dengantarget 150 orang.

2.1.4. Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga dengan anggaran sebesar Rp.6.829.000,- Setelah Perubahan Menjadi Rp.0.

2.2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran pokok sebesar Rp. 1.287.416.720,- dengan target 3 dokumen setelah perubahan menjadi Rp. 591.971.000,- dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

2.2.1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga mendapat alokasi anggaran dari dana BOKB/Dak Rp 59.981.000,- dengan target 1 Laporan.

2.2.2. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga dengan anggaran sebesar Rp.529.124.400,- Setelah Perubahan Menjadi Rp. 100.584.400,- dengan target 15 kecamatan.

2.2.3. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga mendapat penambahan anggaran bersumber dari dana DAK/BOKB Rp 152.300.000,- dengan target 1 Laporan.

2.2.4. Pengelolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB dengan Anggaran Sebesar Rp. 118.730.800,- Setelah Perubahan Menjadi Rp. 351.290.800,- dengan target 12

2.2.5. Perumusan Parameter Pengendalian Penduduk dan KB dengan anggaran sebesar Rp.10.449.000,- Setelah Perubahan Menjadi Rp.10.499.000,- dengan target 1 dokumen yaitu kegiatan advokasi dan sosialisasipembentukan rumah data kependudukan di Kampung KB.

2.2.6. Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dengan anggaran sebesar Rp. 10.983.000,- Setelah Perubahan Menjadi Rp.10.983.000,-

Dipindai dengan CamScanner

dengan target 1 dokumen sub kegiatan tersebut tidak mengalami perubahan.

3. Program Pembinaan Keluarga Berencana dengan anggaran pokok sebesar Rp. 7.873.213.400,- dengan target indikator Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 47,56% , Angka Pemakaian Kontrasepsi/Cpr Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 dengan target 68,25%, mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 12.674.926.900 Penambahan Sebanyak (Rp. 4.801.713.500) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

3.1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Sebesar Rp. 281.134.200,- Setelah Perubahan Menjadi Rp. 1.077.564.200,- dengan target 52 Mitra Kerja sehingga terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 796.430.000,- dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

3.1.1. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 0 ,-

3.1.2. Pengendalian program KKBPK dengan anggaran sebesar Rp. 11.069.000,- dengan target 3 Kegiatan.

3.1.3. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dengan anggaran sebesar Rp. 161.864.200,- setelah perubahan menjadi Rp570.934.200,- dengan target 12 balai.

3.1.4. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minlok) dengan anggaran sebesar Rp. 0,- dengan target 15 kecamatan setelah perubahan menjadi Rp. 297.000.000,-.

3.1.5. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 10.050.000,- dengan target 52 mitra kerja mengalami perubahan menjadi Rp. 100.410.000,-.

3.2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan anggaran sebesar Rp. 5.676.897.200,- mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 5.995.617.200 dengan Penambahan Sebanyak Rp.318.720.000,- rincian sub kegiatan sebagai berikut:

3.2.1. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan anggaran sebesar Rp. 5.522.876.000,- dengan target 1151 Orang.

Dipindai dengan CamScanner

3.2.2. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB dengan anggaran sebesar Rp. 0,- dengan target 12 bulan.

3.2.3. Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan,Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK Untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dengan anggaran sebesar Rp.472.741.200 dengan target 153 PKB/PLKB setelah perubahan menjadi.

3.3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 385.999.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 3.860.462.500 dengan target 104 Faskes dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

3.3.1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan anggaran sebesar Rp.25.418.000,- dengan target 108 Faskes.

3.3.2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan anggaran sebesar Rp. 124.274.000,- dengan target 1.500 Orang, setelah perubahan menjadi Rp. 1.871.185.000,-.

3.3.3. Penyediaaan Sarana Penunjang Pelayanan KB dengan anggaran sebesar Rp 0,- setelah perubahan menjadi Rp 1.520.521.500,- dari dana DAK/BOKB.

3.3.4. Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB dengan anggaran sebesar Rp. 27.756.000,-

3.3.5. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan Jejaringnya dengan anggaran sebesar Rp. 14.623.000,- setelah perubahan menjadi Rp 267.863.000,-.

3.3.6. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak dengan anggaran sebesar Rp. 124.411.000,- setelah perubahan menjadi Rp.104.811.000 dengan target 12 bulan.

3.3.7. Peningkatan Kesertaan KB Pria dengan anggaran sebesar Rp.30.627.000,- setelah perubahan menjadi Rp.12.027.000 dengan target 100 orang.

Dipindai dengan CamScanner

3.3.8. Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB dengan anggaran sebesar Rp. 16.015.000,- dengan target 100 orang.

3.3.9. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dengan anggaran sebesar Rp. 22.875.000,- setelah perubahan menjadi Rp.14.875.000,- dengantarget 450 orang.

3.4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan anggaran Rp. 1.529.183.000,- dengan target 6 Ormas setelah perubahan menjadi Rp. 1.714.283.000,- Penambahan Sebanyak Rp 212.100.000 dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

3.4.1. Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,- dengan target 50 MitraKerja dan 5 Ormas.

3.4.2. Pembinaan Terpadu Kampung KB dengan anggaran sebesar Rp. 29.183.000 dengan target 15 Kampung setelah perubahan menjadi Rp. 18.683.000,-.

3.4.3. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan anggaran sebesar Rp0,- dengan target 15 Kampung, setelah perubahan menjadi Rp. 22.600.000,-.

4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan anggaran pokok sebesar Rp. 1.020.517.200,- dengan target Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Yang Ber-KB 76.22%, Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber-KB 72,15%, Setelah Perubahan Rp. 6.569.911.200,- Penambahan Sebanyak Rp.5.549.394.000 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

4.1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga setelah mengalami perubahan anggaran Rp. 1.020.517.200,- dengan target 100% setelah Perubahan menjadi Rp.6.569.911.200 penambahan sebanyak Rp.361.794.000,- dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

4.1.1. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

Dipindai dengan CamScanner

dengan anggaran sebesar Rp. 815.910.000,- setelah mengalami perubahan anggaran Rp. 237.110.000,-dengan target 200.

4.1.2. Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) dengan anggran sebesar Rp 37.271.500,- setelah mengalami perubahan anggaran Rp. 0,-.

4.1.3. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan anggaran sebesar Rp. 40.500.000,- dengan target 700 peserta, setelah mengalami perubahan anggaran Rp. 290.500.000,-.

4.1.4. Penyediaan Biaya Operasional Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan anggaran sebesar Rp. 137.569.200,- dengan target 12 bulan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp 751.363.200,-.

4.1.5. Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan anggaran sebesar Rp. 26.538.000,- setelah mengalami perubahan anggaran Rp.26.538.000,-.

4.2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 0,- setelah mengalami perubahan anggaran menjadi Rp.5.187.600.000,- Penambahan sebanyak Rp. 5.187.600.000,- dengan target 7 Ormas dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

4.2.1 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) mendapatkan alokasi anggaran dari DAK/BOKB Rp 2.358.000.000,-

4.2.2 Pendampingan Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) mendapatkan alokasi anggaran dari DAK/BOKB Rp 2.829.600.000,-

Dipindai dengan CamScanner

TABEL T-C.32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KOTA MAKASSAR

NAMA SKPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan
1.	Bahrul Tompo N.S.Sos	Pembinaan Kader Keluarga Berencana (KB) (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Di Butuhkan Pemberdayaan Masyarakat Pembinaan kader Keluarga berencana di Kelurahan Pattingalloang untuk 2 angkatan dengan perkiraan Anggaran Rp. 18.400.000	Jl. Barukang II No. 33 Makassar, Kota Makassar	Ujung Tanah	Patingalloang
2.	Hj. Sitti Hafsah, SE. MM	Pembinaan Kader Keluarga Berencana (KB) (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Pembinaan Kader Keluarga Berencana (KB) karena masih banyaknya warga yang kurang akan pemahaman program pemerintah di sekitar Mannuruki, perlu pelatihan 10 angkatan X 9.200.000 = 92.000.000	Kantor Kelurahan Mannuruki Kota Makassar	Tamalate	Mannuruki
3	Muhammad Saiful Saad. SH	Pembinaan Kader Keluarga Berencana (KB) (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Pembinaan Kader Keluarga Berencana (KB) dengan jumlah Peserta 20 orang untuk 1 Anggaran dan Perkiraan Kebutuhan Anggaran Rp. 9.200.000	Kelurahan Tamalabba Kota Makassar	Ujung Tanah	Tamalabba

Dipindai dengan CamScanner

Tabel T-C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perkiraan Maju tahun 2026
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar

Kode						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			RENCANA TAHUN 2025							CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026			
							CAPAIAN PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	LOKASI OUTPUT KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		KELUARAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
											PROGRAM	KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN							
(1)						(2)		(3)		(4)			(5)		(6)	(7)	(8)			(9)	(10)
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									Rp 36.529.479.000						Rp 35.132.987.797
2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									Rp 36.529.479.000						Rp 35.132.987.797
2	14	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik						90%		Rp 16.829.479.000					90%	Rp 16.185.587.009
							Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah						100%							100%	
							Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas						90%							90%	
2	14	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun			10	Dokumen		Rp 131.260.680						Rp 205.905.400
2	14	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		Kota Makassar		10	Dokumen		Rp 46.929.640	APBD		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	Rp 55.403.000
2	14	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil		Kota Makassar		1	Dokumen		Rp 18.491.000	APBD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 25.300.000

Dipindai dengan CamScanner

						SKPD		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
2	14	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kota Makassar		1	Dokumen		Rp 18.491.000	APBD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 17.538.000
2	14	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Kota Makassar		1	Dokumen		Rp 12.461.520	APBD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	Rp 17.341.900
2	14	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Kota Makassar		1	Dokumen		Rp 12.461.520	APBD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	Rp 15.725.300
2	14	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Makassar		2	Laporan		Rp 10.826.000	APBD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	Rp 10.751.500
2	14	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Makassar		2	Laporan		Rp 11.600.000	APBD		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	Rp 63.845.700
2	**14**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Jumlah Pelaksanaan Administrasi keuangan yang tersedia**						**Rp 12.233.085.552**						**Rp 10.942.795.609**
2	14	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Makassar		12	Orang/bulan		Rp 11.583.669.552	APBD		Jumlah Orang yang Menerima	12	Orang/bulan	Rp 10.321.697.000

Dipindai dengan CamScanner

																		Gaji dan Tunjangan ASN				
2	14	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Makassar		12	Dokumen		Rp 312.720.000	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	Rp 317.240.000
2	14	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kota Makassar		12	Dokumen		Rp 298.936.200	APBD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	Rp 278.163.809
2	14	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Makassar		1	Laporan		Rp 20.471.000	APBD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	Rp 11.344.200
2	14	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Kota Makassar		12	Laporan		Rp 17.288.800	APBD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	Rp 14.350.600
2	**14**	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**			**Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun**						**Rp 13.287.920**						**Rp 38.000.000**
2	14	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Makassar		1	Dokumen		Rp 13.287.920	APBD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	Rp 38.000.000
2	**14**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia**						**Rp 776.463.400**						**Rp 621.236.000**
2	14	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kota Makassar		0	Paket		Rp 0	APBD		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	107	Paket	Rp 85.446.000

Dipindai dengan CamScanner

2	14	01	2	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kota Makassar		12	Dokumen		Rp 29.463.400	APBD		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	Rp 35.790.000
2	14	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kota Makassar		110	Orang		Rp 747.000.000	APBD		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	Rp 500.000.000
2	**14**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Jumlah Administrasi umum yang tersedia**			6	jenis		**Rp 1.183.021.428**						**Rp 1.043.650.000**
2	14	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kota Makassar		55	Paket		Rp 774.131.928	APBD		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	Rp 350.000.000
2	14	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kota Makassar		2	Paket		Rp 63.696.000	APBD		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	Rp 75.250.000
2	14	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kota Makassar		8	Paket		Rp 53.337.500	APBD		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	Rp 35.000.000
2	14	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kota Makassar		0	Dokumen		Rp 0	APBD		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	192	Dokumen	Rp 9.000.000
2	14	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Makassar		60	Laporan		Rp 282.000.000	APBD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56	Laporan	Rp 500.000.000
2	14	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kota Makassar		12	Dokumen		Rp 9.856.000	APBD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	Rp 74.400.000

Dipindai dengan CamScanner

2	**14**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**						**Rp 0**					**Rp 418.000.000**
2	14	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional Atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang Disediakan		Kota Makassar		0	Unit		Rp 0	APBD		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	Rp 35.000.000
2	14	01	2	07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Kota Makassar		0	Unit		Rp 0	APBD		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit	Rp 33.000.000
2	14	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kota Makassar		0	Unit		Rp 0	APBD		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26	Unit	Rp 150.000.000
2	14	01	2	07	08	Pengadaan Aset tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		Kota Makassar		0	Unit		0			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	Unit	Rp 200.000.000
2	**14**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**						**Rp 1.417.158.720**					**Rp 1.916.000.000**
2	14	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kota Makassar		12	Laporan		Rp 670.476.000	APBD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	Rp 700.000.000
2	14	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kota Makassar		12	Laporan		Rp 140.982.720	APBD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Rp 116.000.000
2	14	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kota Makassar		12	Laporan		Rp 605.700.000	APBD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Rp 1.100.000.000
2	**14**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia**			6	Jenis		**Rp 670.680.000**					**Rp 1.000.000.000**

Dipindai dengan CamScanner

2	14	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara		Kota Makassar		1	Unit		Rp 41.130.000	APBD		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	Rp 45.000.000
2	14	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kota Makassar		201	Unit		Rp 409.150.000	APBD		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	161	Unit	Rp 450.000.000
2	14	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kota Makassar		43	Unit		Rp 41.400.000	APBD		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43	Unit	Rp 95.000.000
2	14	01	2	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		Kota Makassar		3	Unit		Rp 53.000.000	APBD		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Unit	Rp 150.000.000
2	14	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kota Makassar		0	Unit		Rp 0	APBD		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	Rp 160.000.000
2	14	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kota Makassar		12	Unit		Rp 126.000.000	APBD		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Rp 100.000.000
2	**14**	**02**				**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase SKPD yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk**						**%**		**Rp 859.683.200**					**%**	**Rp 891.770.450**
							Rata-rata jumlah anak perkeluarga						**Anak**							**Anak**	

Dipindai dengan CamScanner

2	**14**	**02**	**2**	**01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**			**Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Kota Makassar Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang dipadukan dan disinkronisasi**			1	Dokumen		**Rp 174.045.000**						**Rp 245.631.000**
2	14	02	2	01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Kota Makassar		1	Dokumen		Rp 26.795.000	APBD		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	Rp 48.712.000
2	14	02	2	01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal		Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal		Kota Makassar		1	Dokumen Satuan Pendidikan		Rp 116.445.000	APBD		Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	50	Satuan Pendidikan	Rp 39.919.000
2	14	02	2	01	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		Kota Makassar		52	Organisasi		Rp 30.805.000	APBD		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	50	Organisasi	Rp 150.000.000

Dipindai dengan CamScanner

2	14	02	2	01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga		Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga		Kota Makassar		0	Kegiatan		Rp 0	APBD		Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1	Kegiatan	Rp 7.000.000
2	**14**	**02**	**2**	**02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**			**Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota Makassar**						**Rp 591.971.000**						**Rp 168.677.300**
2	**14**	**02**	**2**	**02**	01	Perumusan Parameter Kependudukan		Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan		Kota Makassar		1	Dokumen		Rp 10.499.000	APBD		Jumlah Laporan Parameter Kependudukan dan KB yang Dirumuskan	2	Dokumen	Rp 13.000.000
2	**14**	**02**	**2**	**02**	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		Kota Makassar		1	Dokumen		Rp 10.983.000	APBD		Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	Dokumen	Rp 13.500.000
2	**14**	**02**	**2**	**02**	05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan		Jumlah Kajian Dampak Kependudukan		Kota Makassar		0	Dokumen		Rp 0	APBD		Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1	Dokumen	Rp 150.000.000
2	**14**	**02**	**2**	**02**	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya		Kota Makassar		15	Dokumen		Rp 100.584.400	APBD		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1	Dokumen	Rp 150.000.000
2	**14**	**02**	**2**	**02**	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Kota Makassar		12	Dokumen		Rp 351.290.800	APBD		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	Dokumen	Rp 92.000.000
2	**14**	**03**				**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Rasio Akseptor KB**						**%**		**Rp 12.674.926.900**					**%**	**Rp 10.908.240.520**
							Persentase tingkat keberlansungan pemakaian kontrasepsi						**%**							**%**	

Dipindai dengan CamScanner

2	**14**	**03**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**			**Jumlah Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan**			55	Mitra Kerja		**Rp 1.077.564.200**						**Rp 1.151.027.620**
2	14	03	2	01	01	Pengendalian Program KKBPK		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		Kota Makassar		2	Laporan		Rp 11.069.000	APBD		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	52	Organisasi	Rp 48.000.000
2	14	03	2	01	02	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana		Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		Kota Makassar		10	Unit		Rp 98.151.000	APBD		Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	3	Dokumen	Rp 185.000.000
2	14	03	2	01	03	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		Kota Makassar		12	Laporan		Rp 570.934.200	APBD		Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	9	Unit	Rp 628.027.620

Dipindai dengan CamScanner

2	14	03	2	01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Kota Makassar		10	Laporan		Rp 297.000.000	APBD		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	16	Laporan	Rp 23.000.000
2	14	03	2	01	07	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		Kota Makassar		0	Dokumen		Rp 0	APBD		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	Laporan	Rp 50.000.000
2	14	03	2	01	08	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan		Kota Makassar		0	Dokumen		Rp 0	APBD		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	3	Laporan	Rp 200.000.000
2	14	03	2	01	08	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Kota Makassar		54	Organisasi		100.410.000	APBD					Rp 17.000.000
2	**14**	**03**	**2**	**02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**			**Jumlah Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**			153	PKB/PLKB		**Rp 5.995.617.200**						**Rp 6.301.563.600**

Dipindai dengan CamScanner

									yang didayagunakan												
2	14	03	2	02	01	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Kota Makassar		1155	Orang		Rp 5.522.876.000	APBD					Rp 6.145.563.600
2	14	03	2	02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Kota Makassar		2	Organisasi		Rp 0	APBD		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2	Organisasi	Rp 100.000.000
2	14	03	2	02	03	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		Kota Makassar		153	Laporan		Rp 472.741.200	APBD		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	4	Laporan	Rp 56.000.000
2	**14**	**03**	**2**	**03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota**			**Jumlah Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota Makassar yang dikendalikan dan**			114	Faskes		**Rp 3.860.462.500**						**Rp 1.491.649.300**

Dipindai dengan CamScanner

									didistribusikan											
2	14	03	2	03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Kota Makassar		112	Laporan		Rp 25.418.000	APBD		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	7	Laporan	Rp 30.000.000
2	14	03	2	03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB		Kota Makassar		250	Orang		Rp 16.015.000	APBD		Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	220	Orang	Rp 45.000.000
2	14	03	2	03	02	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		Kota Makassar		0	Unit		Rp 1.520.512.500					Rp 50.000.000
2	14	03	2	03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Kota Makassar		3320	Orang		Rp 1.871.185.000	APBD		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1500	Orang	Rp 497.000.000
2	14	03	2	03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB		Kota Makassar		25	Orang		Rp 27.756.000	APBD		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	375	Orang	Rp 30.000.000
2	14	03	2	03	09	Pembinaan Pelayaanan Keluarga dan Kesehatan Reproduksi		Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di		Kota Makassar		300	Orang		Rp 14.875.000	APBD		Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi,	450	Orang	Rp 25.000.000

Dipindai dengan CamScanner

								Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan										serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan			
2	14	03	2	03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		Kota Makassar		0	Orang		Rp 0	APBD		Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	100	Orang	Rp 230.000.000
2	14	03	2	03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		Kota Makassar		0	Laporan		Rp 104.811.000	APBD		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12	Laporan	Rp 165.000.000
2	14	03	2	03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan		Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran		Kota Makassar		300	Orang		Rp 14.875.000	APBD		Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	300	Orang	Rp 25.000.000
2	14	03	2	03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria		Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria		Kota Makassar		100	Orang		Rp 12.027.000	APBD		Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	200	Orang	Rp 125.000.000
2	**14**	**03**	**2**	**04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**			**Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kota Makassar Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang dllaksanakan**						**Rp 1.741.283.000**						**Rp 1.964.000.000**
2	14	03	2	04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Kota Makassar		52	Organisasi		Rp 35.000.000	APBD		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya	52	Organisasi	Rp 416.261.186

Dipindai dengan CamScanner

																		dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
2	14	03	2	04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB		Kota Makassar		0	Kamp ung		Rp 222.600.000	APBD		Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangun an Keluarga, Kependuduk an, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	15	Kampung	Rp 103.000.000
2	14	03	2	04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB		Kota Makassar		15	Lapor an		Rp 18.683.000	APBD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	3	Laporan	Rp 211.000.000
2	**14**	**04**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**CAKUPAN ANGGOTA BINA KELUARGA BALITA (BKB) YANG BER-KB**						**%**		**Rp 6.569.911.200**				77,74	**%**	**Rp 7.147.390.000**
							CAKUPAN ANGGOTA BINA KELUARGA REMAJA (BKR) YANG BER-KB						**%**					74,00	**%**	
							CAKUPAN ANGGOTA BINA KELUARGA LANSIA (BKL) YANG BER-KB						**%**					64,67	**%**	
							Cakupan pasangan usia subur (PUS) Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluraga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-						**%**					38,43	**%**	

Dipindai dengan CamScanner

							KB mandiri														
2	**14**	**04**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**			**Cakupan Pembagunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan**						**Rp 1.382.311.200**						**Rp 1.001.030.000**
2	14	04	2	01	03	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga))		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kota Makassar		25	Laporan		Rp 237.110.000	APBD		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	2	Laporan	Rp 148.000.000
2	14	04	2	01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kota Makassar		13	Orang		Rp 751.363.200	APBD		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	852	Orang	Rp 277.000.000
2	14	04	2	01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi		Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kota Makassar		34	Kelompok		Rp 26.538.000	APBD		Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha	110	Kelompok	Rp 77.000.000

Dipindai dengan CamScanner

						Keluarga/UPPKS]												Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA) Yang Mendapat Biaya Oprasional Kegiatan			
2	14	04	2	01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		Kota Makassar		0	Laporan		Rp 0	APBD		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2	Laporan	Rp 220.000.000
2	14	04	2	01	11	Advokasi dan Promosi IPK		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)		Kota Makassar		100	Orang		Rp 0	APBD		Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	200	Orang	Rp 40.000.000
2	**14**	**04**	**2**	**02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**			**Jumlah Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kota Makassar dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan**						**Rp 5.187.600.000**						**Rp 6.146.360.000**

Dipindai dengan CamScanner

2	14	04	2	02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kota Makassar		0	Organisasi		Rp 0		APBD		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50	Organisasi	Rp 220.00.000
2	14	04	2	02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		Kota Makassar		0	Laporan		Rp 0		APBD		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1	Laporan	Rp 220.000.000
						TOTAL								**Rp 36.529.479.000**							**Rp 35.132.987.979**

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PENUTUP

4.1. Catatan Penting

Dokumen Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2025 ini merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kota Makassar, yang selanjutnya dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PD). Olehnya itu, dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan ini, perlu dibanguna sinergitas dan koordinasi yang baik dan berkala kepada seluruh stakeholder untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Tahun 2025, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian sasaran program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2025. Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Makassar disusun berdasarkan target dan sasaran pembangunan yang diprioritaskan untuk Pembangunan Daerah Kota Makassar serta berkelanjutan di Lingkungan DPPKB Kota Makassar secara lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergi.

4.2. Kaidah Pelakasanaan

1. Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Makassar, Renja ini, merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Peubahan) Tahun2025;
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan, masing-masing bidang/unit kerja lingkup DPPKB Kota Makassar wajib menjadikan dokumen Renja Perubahan ini sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan di unit kerja masing-masing, sehingga dapat dihasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen ini;
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan, DPPKB Kota Makassar melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan, maupun kesesuaian antara target dan realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2025.

4.3. Rencana Tindak lanjut

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) DPPKB Kota Makassar ini merupakan bagian dari perencanaan tahunan yang disusun sebelum melaksanakan program dan kegiatan. Penyusunan Renja Perubahan ini tentunya tidak lepas dari hasil evaluasi capaian kinerja yang telah dihasilkan di tahun-tahun sebelumnya, penjabaran dari Rencana Strategis DPPKB 2021-2026, serta berpedoman pada tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Makassar yang tercantum dalam RKPD Tahun 2025, dan juga dengan tetap memperhatikan peluang, potensi, dan tantangan yang dihadapi saat ini. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah bukan hanya merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tetapi juga merupakan tanggung jawab sebuah organisasi kepada masyarakat dalam mengemban amanah. Besar harapan kami, penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2025 ini dapat memberi sumbangsih bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran DPPKB Kota Makassar, serta menjadi cerminan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk itu mohon dukungan, kritik dan saran dari berbagai pihak untuk menuju kesempurnaan dokumen perencanaan.

Makassar, 4 Agustus 2025
Kepala Dinas

Drs. A. IRWAN BANGSAWAN, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda / IV.c
Nip : 19690322 199303 1 005

Dipindai dengan CamScanner

#MenujuMakassarMULIA

makassarkota.go.id

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Badan Pendapatan Daerah



RENCANA KERJA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 24
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 25
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD Perubahan 2025 29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 38

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 39

BAB IV PENUTUP 46

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Perubahan ini berpedoman pada pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2025.

Di samping itu, Perubahan Renja juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi pergeseran pagu kegiatan serta rasionalisasi yang berupa penambahan ataupun pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta memperhatikan Rancangan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029. Hal ini disebabkan adanya masa transisi/peralihan dari RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 saat pelaksanaan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 ini, di mana pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar mendukung Misi 1 yaitu Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan penciptaan lapangan kerja.

Target Pendapatan Daerah yang berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kondisi yang belum ideal sehingga asumsi-asumsi pendapatan yang termuat dalam RKPD Tahun 2025 diperkirakan tidak mencapai kondisi optimal. Rata-rata capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar hingga Triwulan II Tahun 2025 untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar 17,91%, sedangkan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada 83,85%. Adapun untuk realisasi Pajak Daerah hingga Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp700.913.486.955,10 atau 32,98%. Sementara untuk realisasi Retribusi Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah yaitu Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp2.941.906.286,00 atau 13,78%.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
3. Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 1);
17. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah;
18. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar;
19. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 98 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah;
20. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah ddan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah;
21. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 76 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 77);
22. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 14).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Selarasnya Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan RPJMD, Renstra, dan Perubahan RKPD.
2. Terwujudnya penilaian kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang terukur dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2025, yaitu:

1. Sebagai bentuk penyajian dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar pada tahun 2025 berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025 dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026;
2. Sebagai bentuk perumusan dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA-P) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2025;
3. Sebagai bentuk pengelolaan upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikut dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

1.1 Latar Belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta capaian kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025;

1.2 Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat

Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memuat kajian reviu terhadap Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berjalan (Tahun 2025), Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Reviu terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah;

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah;

2.4 Reviu terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025;

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bab ini berisi penyesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk perubahan Tahun Anggaran 2025.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil, efisiensi, dan efektivitas dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dan strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan kinerja di sisa periode Renja. Selain itu, evaluasi juga akan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis data dalam mengalokasikan sumber daya yang ada agar dapat lebih tepat sasaran dan efisien. Dengan begitu, diharapkan target dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renja Badan Pendapatan Daerah dapat tercapai dengan lebih baik, serta memberikan dampak positif bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pada tahun 2025, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar melaksanakan 2 program yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang dan 1 (satu) program utama. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 kegiatan dan terbagi dalam 30 sub kegiatan. Sementara untuk Program utama Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yakni Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 1 kegiatan dan terbagi dalam 11 sub kegiatan.

Rata-rata capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar hingga Triwulan II Tahun 2025 masih sebesar 50,88% dimana capaian kinerja untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar 17,91% sedangkan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada 83,85%. Sementara itu, realisasi capaian anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar hingga Triwulan II Tahun 2025 masih relatif sangat rendah yaitu sebesar Rp29.493.332.752,02 atau 22,08%.

Adapun untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2025 terdiri atas 8 (delapan) jenis Pajak Daerah dan 1 (satu) jenis Retribusi Daerah yakni Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan. Realisasi Pajak Daerah hingga Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp700.913.486.955,10 atau 32,98% sedangkan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp2.941.906.286,00 atau 13,78%.

PROGRAM PENUNJANG/PENDUKUNG

Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan terdiri atas 30 sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp113.773.340,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp43.335.500,00 atau 38,09%. Capaian kinerja hingga Triwulan II sebesar 42,86%. Adapun sub kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD;

c. Koordinasi dan Penyususnan Dokumen Perubahan RKA - SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD;
e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD;
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu anggaran pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp78.841.450.506,00 dengan target kinerja persentase ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan sebesar 100%. Capaian target kinerja kegiatan ini sebesar 26,98% dengan realisasi keuangan sebesar Rp22.193.192.220,02 atau 28,15%. Adapun sub kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Penyediaan Administrasi PelaksanaanTugas ASN;
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan;
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp1.336.000.000,00 dengan target kinerja persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas sebesar 90%. Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 1,22% dengan realisasi keuangan sebesar Rp74.425.660,00 atau 5,57%. Adapun sub kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah:

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp3.517.475.040,00 dengan target kinerja persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik sebesar 100%. Capaian kinerja dari kegiatan ini sebesar 16,25% dan realisasi keuangan sebesar Rp714.216.384,00 atau 20,30%. Adapun sub kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorPenyediaan Bahan Logistik Kantor;
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
g. Fasilitas Kunjungan Tamu;
h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp1.359.495.400,00 dengan target kinerja persentase barang dan peralatan mesin lainnya dalam kondisi baik sebesar 100%. Capaian kinerja dari kegiatan ini masih pada posisi 30,54% dengan realisasi keuangan sebesar Rp416.440.000,00 atau sebesar 30,63%. Adapun sub kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah:

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp3.732.034.740,00 dengan target kinerja persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik sebesar 100%. Capaian kinerja dari kegiatan ini sebesar 46,67% dengan realisasi keuangan sebesar Rp869.986.311,00 atau 23,31%. Adapun sub kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp8.154.912.400,00 dengan target kinerja persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik sebesar 100%. Capaian kinerja dari kegiatan ini sebesar 15,20% dan realisasi keuangan sebesar Rp278.555.091,00 atau 3,42%. Adapun sub kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Faktor pendukung program penunjang ini adalah:

a. Ketersediaan anggaran yang memadai dan kegiatan rutin yang terlaksana setiap bulannya;
b. Adanya dukungan sarana prasarana sesuai yang memadai/sesuai kebutuhan;
c. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaan program.

Sementara itu, faktor penghambat program ini adalah:

a. Terdapat beberapa jenis item belanja yang masih dalam proses migrasi dari katalog elektronik versi 5 ke versi 6 untuk memperbaharui sistem pengadaan barang dan jasa;
b. Belum ada penyedia jasa yang memenuhi syarat untuk melakukan perbaikan kendaraan

operasional (motor);

c. Beberapa item belanja yang memiliki pagu besar dilaksanakan pada triwulan ketiga;
d. Beberapa item belanja telah mengalami efisiensi dan rasionalisasi dalam rangka penganggaran perubahan.

Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada antara lain:

a. Memantau secara berkala terhadap perkembangan migrasi item dan melakukan koordinasi intensif dengan BPBJ (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa*)* untuk mempercepat proses migrasi dan memastikan semua item yang dibutuhkan tersedia di Katalog versi 6, serta memonitoring secara berkala terhadap perkembangan migrasi item agar tidak tertunda lebih lama;
b. Melakukan percepatan terkait berkas pendukung untuk percepatan belanja;
c. Memperbaiki atau menyediakan fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan.

PROGRAM UTAMA

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini merupakan program yang mendukung pencapaian Misi Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan terdiri atas 11 (sebelas) sub kegiatan, antara lain sebagai berikut:

a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
g. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
h. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
i. Penagihan Pajak Daerah;
j. Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah;
k. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 untuk indikator Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 38,98% dari target 53,04%. Capaian kinerja untuk indikator Deviasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD sebesar 94,20% dari target 100%.

Dari total anggaran untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah ini sebesar Rp36.523.589.756,00, sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 telah terealisasi anggaran sebesar

Rp4.903.181.586,00 atau 13,42%. Sementara rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 87,56% dengan kategori Tinggi.

Faktor pendukung program ini adalah:

a. Ekstensifikasi dan intensifikasi dalam menggali potensi dan meningkatkan penerimaan Pajak Daerah;
b. Adanya regulasi baru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar hukum Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. Sosialiasi dan edukasi kepada masyarakat secara intensif dan berkesinambungan;
d. Pemanfaatan digitalisasi dalam percepatan proses pelayanan dan penerimaan Pajak Daerah.

Faktor penghambat program ini adalah:

a. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak sehingga pelaporan pajak usahanya belum tepat waktu dan tepat jumlah;
b. Belum akuratnya data potensi Pajak Daerah yang digunakan sebagai dasar penentuan target penerimaan;
c. Belum terintegrasinya data dan informasi internal dan antar Perangkat Daerah.

Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada antara lain:

a. Memaksimalkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah;
b. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pajak Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
c. Melakukan perbaikan peningkatan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak;
d. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait regulasi-regulasi terbaru serta himbauan pembayaran Pajak Daerah melalui media sosial, baliho, banner, serta pertemuan dengan pengelola pajak dan masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan;
e. Terus membangun sinergitas dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah dan BUMN agar dapat menggali potensi untuk optimalisasi pajak;
f. Melakukan Pendataan Wajib Pajak dan Pemutakhiran *Database* Wajib Pajak secara optimal;
g. Melakukan percepatan dalam proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan.

Adapun, hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel E.81 berikut:

Tabel 2.1
E.81 EVALUASI RENCANA KERJA SKPD HINGGA TRIWULAN II TAHUN 2025
NAMA PERANGKAT DAERAH: BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
								K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1					2	3	4	5			6		7		8 = 6+7		9 = 8/5*100		10	11
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5	5.02				KEUANGAN			100	136,083,000,000	133.578.731.182		9.680.094.128,51		19.813.238.623,51		29.493.332.752,02		22,08		KEUANGAN
5	5.02	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	Persen	90	99,578,975,325	97.055.141.426	0,23	8.061.153.590,17	0,91	16.535.099.657,51	1,14	24.590.151.166,02	1,27	25,34	BAPENDA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
						PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persen	100			12,15		14,5		27,00		27,00			BAPENDA	
						PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM KONDISI BAIK	Persen	90			6,18		14,48		23,90		25,45			BAPENDA	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
								K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1					2	3	4	5			6		7		8 = 6+7		9 = 8/5*100		**10**	11
5	**5.02**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**151,341,840**	**113,773,340**	**23,81**	**0**	**19,05**	**43.335.500**	**42,86**	**43.335.500**	**42,86**	**38,09**	BAPENDA	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
5	5.02	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2	103,363,900	47,792,955	1	0	0	20.280.500	1	20.280.500	33,33	42,,43	BAPENDA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5	5.02	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	Dokumen	1	8,811,500	11,578,795	0	0	1	0	1	0	100,00	0,00	BAPENDA	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5	5.02	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD yang disusun	Dokumen	1	8,815,000	11,053,400	0	0	0	4.986.000	0	4.986.000	0,00	45,11	BAPENDA	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5	5.02	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Dokumen	1	8,594,000	7,035,000	1	0	0	6.048.000	1	6.048.000	100,00	85,97	BAPENDA	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5	5.02	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	Dokumen	1	9,230,400	6,970,000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	BAPENDA	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
								K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1					2	3	4	5			6		7		8 = 6+7		9 = 8/5*100		10	11
5	5.02	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Laporan	2	9,233,040	18,404,535	1	0	1	12.021.000	2	12.021.000	66,67	65,32	BAPENDA	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5	5.02	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Laporan	4	3,294,000	10,938,655	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	BAPENDA	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	**5.02**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan**	**Persen**	**100**	**83,353,192,355**	**78,841,450,506**	**12,13**	**6.992.823.104,51**	**14,84**	**15.200.369.115,51**	**26,98**	**22.193.192.220,02**	**26,98**	**28,15**	BAPENDA	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
5	5.02	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Orang / bulan	183	82,131,888,555	77,613,802,706	228	6.758.643.104,51	228	14.967.689.115,51	228	21.726.332.220,02	100,00	27,99	BAPENDA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5	5.02	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	737,040,000	736,440,000	0	175.680.000	0	175.680.000	0	351.360.000	0,00	47,71	BAPENDA	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
								K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1					2	3	4	5			6		7		8 = 6+7		9 = 8/5*100		**10**	11
5	75.02	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	1	386,667,000	397,372,000	0	58.500.000	0	57.000.000	0	115.500.000	0,00	29,07	BAPENDA	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5	5.02	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	17	97,596,800	93,835,800	4	0	4	0	8	0	47,06	0,00	BAPENDA	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD
5	**5.02**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas**	**Persen**	**90**	**1,941,250,000**	**1,336,000,000**	**0,21**	**6.000.000**	**1,01**	**68.425.660.00**	**1,22**	**74.425.660**	**1,22**	**5,57**	**BAPENDA**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
5	5.02	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Paket	1	164,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	BAPENDA	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5	5.02	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	443	1.777.000.000	1,336,000,000	2	6.000.000	8	68.425.660,00	10	74.425.660	2,08	5,57	BAPENDA	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5	**5.02**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik**	**Persen**	**100**	**5,492,533,040**	**3,517,475,040**	**5,62**	**578.667.637**	**10,63**	**135.548.747**	**16,25**	**714.216.384**	**16,25**	**20,30**	**BAPENDA**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
								K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1					2	3	4	5			6		7		8 = 6+7		9 = 8/5*100		**10**	11
5	.02	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	2	133,032,800	96,342,800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	BAPENDA	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5	5.02	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	552,644,440	447,745,040	0	0	1	0	1	0	20,00	0,00	BAPENDA	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5	5.02	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	154,161,800	149,450,200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	BAPENDA	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5	5.02	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	465,212,000	222,510,000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	BAPENDA	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5	5.02	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1,215,267,000	1,194,987,000	0	281.425.000	0	0	0	281.425.000	0,00	23,55	BAPENDA	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5	5.02	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dokumen	8	160,440,000	160,440,000	8	0	8	30.060.000	8	30.060.000	100,00	18,74	BAPENDA	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5	5.2	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	500	92,000,000	59,000,000	2	0	42	0	44	0	44,00	0,00	BAPENDA	Fasilitas Kunjungan Tamu

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
								K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1					2	3	4	5			6		7		8 = 6+7		9 = 8/5*100		**10**	11
5	5.02	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	222	2,656,550,000	1,070,000,000	37	297.242.637	18	104.401.231	55	401.643.868	35,03	37,54	BAPENDA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	5.02	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	1	63,225,000	117,000,000	0	0	0	1.087.516	0	1.087.516	0,00	0,93	BAPENDA	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5	**5.02**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang dan Peralatan Mesin Lainnya dalam Kondisi Baik**	**Persen**	**100**	634,889,800	1,359,495,400	**3,17**	**0**	**173 7,**	**416.440.000**	**30,54**	**416.440.000**	**30,54**	**30,63**	BAPENDA	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
5	5.02	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	Unit	86	634,889,800	1,359,495,400	22	0	29	416.440.000	51	416.440.000	30,54	30,63	BAPENDA	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5	**5.02**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik**	**Persen**	**100**	**3,606,429,140**	**3,732,034,740**	**12,22**	**343.053.501**	**34,44**	**526.932.810**	**46,67**	**869.968.311**	**46,67**	**23,31**	BAPENDA	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
5	5.02	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Laporan	12	2,190,629,140	2,416,434,740	2	220.753.501	4	396.632.810	6	617.386.311	50,00	25,55	BAPENDA	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5	5.02	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	227,500,000	227,500,000	0	0	1	8.000.000	1	8.000.000	50,00	3,52	BAPENDA	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
								K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1					2	3	4	5			6		7		8 = 6+7		9 = 8/5*100		**10**	11
5	5.02	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	5	1,188,300,000	1,088,100,000	1	122.300.000	1	123.300.000	2	244.600.000	40,00	22,48	BAPENDA	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5	**5.02**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik**	**Persen**	**100**	**4,399,339,150**	**8,154,912,400**	**1,21**	**134,507.266**	**9,82**	**144.047.825**	**15,20**	**278.555.091**	**15,20**	**3,42**	BAPENDA	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
5	5.02	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	39,609,500	39,609,500	0	5.306.000	1	4.507.300	0,5	9.813.300	50,00	24,78	BAPENDA	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5	5.02	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	220	2,478,212,450	2,436,172,000	15	129.201.266	45	139.540.525	60	268.741.191	29,13	11,03	BAPENDA	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5	5.02	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	362	28,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	BAPENDA	Pemeliharaan Mabel
5	5.02	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	563	705,429,900	723,727,900	0	0	68	0	68	0	12,08	0,00	BAPENDA	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
								K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1					2	3	4	5			6		7		8 = 6+7		9 = 8/5*100		10	11
5	5.02	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Unit	1	1,122,627,300	4,913,283,000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	BAPENDA	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5	5.02	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	680	24,500,000	42,120,000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	BAPENDA	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												**17,91**	**21,35**		
					Predikat Kinerja												**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
5	**5.02**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**RASIO PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Persen**	**53,04**	**36,504,024,675**	**36,523,589,756**	**35,98**	**1.625.042.620**	**38,98**	**3.278.138.966**	**38,98**	**4.903.181.586**	**73,49**	**13,42**	**BAPENDA**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**
						DEVIASI REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP ANGGARAN PAD DALAM APBD	**Persen**	**100**			**89,60**		**94,20**		**94,20**			**BAPENDA**	
5	**5.02**	**4**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**PERSENTASE REALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**	**Persen**	**100**	**36,504,024,675**	**36,523,589,756**	**86,48**	**1.625.042.620**	**87,56**	**3.278.138.966**	**87,56**	**4.903.181.586**	**87,56**	**13,42**	**BAPENDA**	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
								K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1					2	3	4	5			6		7		8 = 6+7		9 = 8/5*100		**10**	11
5	5.02	04	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	827,518,980	645,398,980	0	389.140.408	1	137.824.000	1	526.964.408	100,00	81,65	BAPENDA	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
5	5.02	04	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Dokumen	5	1,676,826,768	566,346,768	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	BAPENDA	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
5	5.02	04	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kabijakan pajak daerah	Laporan	3	25,624,875,115	26,441,359,480	1	1.071.502.212	0	2.629.379.926	1	3.700.882.138	33,33	14,00	BAPENDA	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
5	5.02	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	566,474,300	696,474,300	3	0	3	22.674.000	6	22.674.000	50,00	3,26	BAPENDA	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
5	5.02	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Laporan	16	1,152,222,000	1,246,722,000	0	96.000.000	4	9.325.000	4	105.325.000	25,00	8,45	BAPENDA	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
								K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1					2	3	4	5			6		7		8 = 6+7		9 = 8/5*100		**10**	11
5	5.02	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah data obyek pajak bumi dan bangunan yang akan dimutakhirkan	Objek pajak	51000	3,586,197,000	3,394.469,000	0	0	0	179.954.840	0	179.954.840	0,00	5,30	BAPENDA	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
5	5.02	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	21600	264,984,768	962,121,728	533	0	2901	145.695.700	3434	145.695.700	15,90	15,14	BAPENDA	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
5	5.02	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Laporan	1620	115,817,764	119,334,520	148	0	562	50.685.500	710	50.682.500	43,83	42,47	BAPENDA	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
5	5.02	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	50	37,622,028	124,42,028	10	0	10	0	20	0	40,00	0,00	BAPENDA	Penagihan Pajak Daerah
5	5.02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian pengawasan pajak daerah	Dokumen	7	2,513,317,952	2,235,852,952	0	68.400.000	1	102.600.000	1	171.000.000	14,29	7,65	BAPENDA	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*) / Kegiatan (*Output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA SKPD Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
								K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	K	Rp. (000)	K	Rp. (000	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1					2	3	4	5			6		7		8 = 6+7		9 = 8/5*100		**10**	11
5	5.02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	3	138,168,000	90,768,000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	BAPENDA	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
															Rata-rata Capain Kinerja		**83,85**	**13,42**		
															Predikat Kinerja		**Tinggi**	**Sangat Rendah**		
					JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM					**133.578.731.182**		**9.680.094.129**		**19.813.238.624**		**26.493.332.752**				
															Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh Program		**50,88**	**22,08**		
															Predikat Kinerja dari Seluruh Program		**Renda h**	**Sangat Rendah**		

Sementara itu, persentase capaian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024. Untuk memudahkan perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Perhitungan Peningkatan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO.	JENIS PENDAPATAN	REALISASI		PENINGKATAN (%)
		Triwulan II 2024	Triwulan II 2025	
A	**PAJAK DAERAH**	**620.193.956.808,00**	**700.913.486.955,10**	**13,02**
1	**Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**			
a	Makanan dan/atau Minuman	113.370.011.996,00	114.742.907.119,10	1,21
b	Tenaga Listrik	126.748.185.899,00	119.131.716.837,00	(6,01)
c	Jasa Perhotelan	65.753.826.533,00	50.727.109.617,00	(22,85)
d	Jasa Parkir	4.849.310.494,00	3.958.173.409,00	(18,38)
e	Jasa Kesenian dan Hiburan	16.931.732.156,00	17.748.653.956,00	4,82
	NON PBJT			
2	Pajak Reklame	23.819.317.417,00	22.338.694.398,00	(6,22)
3	Pajak Air Bawah Tanah	3.051.911.931,00	3.124.026.488,00	2,36
4	Pajak Sarang Burung Walet	2.031.750,00	0,00	(100)
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	75.585.710.682,00	54.375.625.987,00	(28,06)
6	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	190.081.917.950,00	155.219.581.069,00	(18,34)
	OPSEN			
7	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	100.472.316.681,00	-
8	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB)	-	59.074.681.394,00	-
B	**RETRIBUSI DAERAH**	**2.898.992.622,00**	**2.941.906.286,00**	**1,48**
9	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.898.992.622,00	2.941.906.286,00	1,48

Dari tabel di atas, dengan membandingkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar pada Triwulan II Tahun 2024 dan 2025 diketahui terdapat peningkatan pada Pajak Daerah sebesar 13,02% dan Retribusi Daerah sebesar 1,48%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar memiliki peran penting dalam mengoptimalkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang khusunya bersumber dari Pajak Daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah menjadi suatu keharusan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan tersebut.

Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tertuang pada Tabel 2.3 di bawah. Pada tabel tersebut di bawah, juga ditampilkan capaian dan proyeksi berdasarkan Rancangan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2025 – 2029 mengingat bahwa pada Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan transisi dari Renstra lama ke Renstra yang baru.

Tabel 2.3
T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

No.	Indikator Kinerja Utama	SPM/ standar nasional	Indikator Kinerja Kunci	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	√	√	45,21	47,43	50,46	53,59	38,72	38,28	53,59	57,22	IKU Berdasarkan RENSTRA 2021-2026
			Persentase Peningkatan Pajak Daerah	10,62	14,00	15,00	16,00	14,85	3,61	16,00	18,00	IKK Berdasarkan RENSTRA 2021-2026
			Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	10,62	14,00	15,00	16,00	(4,88)	24,43	16,00	18,00	IKK Berdasarkan RENSTRA 2021-2026
2.	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	√	√	-	-	-	0,59	-	-	0,59	0,61	IKU Berdasarkan RENSTRA 2025-2029
	Nilai SAKIP	√	√	-	-	-	(79,91)	-	-	(79,91)	(79,93)	IKU Berdasarkan RENSTRA 2025-2029
	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	√	√	-	-	-	95,00	-	-	95,00	96,00	IKU Berdasarkan RENSTRA 2025-2029
			Rasio PAD	-	-	-	45,01	-	-	45,01	45,46	IKK Berdasarkan RENSTRA 2025-2029
			Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-	-	-	-25,00	-	-	-25,00	-24,00	IKK Berdasarkan RENSTRA 2025-2029

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2021 – 2026 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, dengan target di tahun 2023 sebesar 47,43% dan tahun 2024 sebesar 50,46%, sehingga diperoleh realisasi capaian IKU di tahun 2023 sebesar 38,72% dan mengalami sedikit penurunan pada capaian tahun 2024 sebesar 38,28%.

Bapenda Kota Makassar menetapkan tiga IKU pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029. Pertama adalah Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB dengan target di tahun 2025 sebesar 0,59% dan proyeksi pada tahun 2026 sebesar 0,61%. Kedua, Nilai SAKIP dengan target di tahun 2025 adalah 79,91 dan proyeksi pada tahun 2026 adalah 79,93. Ketiga, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2025 sebesar 95,00% dan proyeksi pada tahun 2026 sebesar 96,00%.

Tinjauan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Renstra Bapenda Kota Makassar Tahun 2021 – 2026, yaitu (1) Persentase Peningkatan Pajak Daerah, dimana persentase peningkatan yang terlihat lebih rendah pada tahun 2024 berbanding tahun 2023 yang disebabkan oleh penurunan tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dan jumlah Objek Pajak baru yang terdaftar pada tahun 2024 lebih sedikit dibanding tahun 2023. Pada tahun 2023, persentase penerimaan Pajak Daerah meningkat sebesar 14,85% dibandingkan tahun 2022, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan dimana persentase peningkatan hanya sebesar 3,61% jika dibandingkan tahun 2023. Meskipun demikian, secara nilai/nominal pagu realisasi pendapatan dari Pajak Daerah mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Sementara itu, persentase peningkatan Retribusi Daerah, di mana tampak dari tabel bahwa pada tahun 2024 terjadi peningkatan persentase realisasi dari Retribusi Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yakni Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dengan persentase sebesar 24,43%.

Bapenda Kota Makassar menetapkan IKK pada Rancangan Renstra Tahun 2025 – 2029 yaitu Rasio PAD dengan target di tahun 2025 sebesar 45,01% dan proyeksi pada tahun 2026 sebesar 45,46%, serta Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD dengan target sebesar -25,00% pada tahun 2025 dan -24,00% pada tahun 2026.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Permasalahan dan isu strategis yang berkaitan dengan keberadaan serta fungsi dan tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Makssar dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya dihadapkan pada beberapa hal berikut:

1. Kompetensi sumber daya manusia atau aparatur yang masih memerlukan penguatan dari sisi keterampilan teknis, integritas, moralitas, serta profesionalisme dalam mendukung kinerja institusi secara berkelanjutan;
2. Kesesuaian regulasi daerah dengan kondisi perkembangan aktivitas perekonomian, dunia usaha dan perilaku pelaku usaha sebagai Wajib Pajak yang dinamis sebagai sumber-sumber pendapatan khususnya dalam hal peningkatan PAD;
3. Konektivitas dan aksesibilitas sistem dan perangkat dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas antara Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pungut Pajak

Daerah dengan Bapenda Kota Makassar dalam rangka terlaksananya manajemen sistem informasi pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT);

4. Tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pungut Pajak Daerah dalam pemenuhan kewajiban Pajak Daerah masih perlu ditingkatkan, baik dari aspek waktu pembayaran, jumlah yang tepat, maupun pemahaman atas kewajiban pemungutan;
5. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemeriksaan Pajak Daerah oleh Bapenda Kota Makassar melalui pendampingan internal dan eksternal berbasis data valid sebagai pencegahan dan penindakan terjadinya potential loss Pajak Daerah;
6. Infrastruktur di dan sekitar Kota Makassar semakin berkembang dan memadai sebagai pendukung mobilitas dan aktivitas perekonomian Kota Makassar khususnya dalam skema pembangunan dan pengembangan akses dan kawasan lokal dan regional serta pulau-pulau yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha baru.

Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi untuk meningkatkan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar pada Tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

Tantangan

1. Fluktuasi ekonomi yang dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat hingga akhirnya berdampak pada pendapatan Pajak Daerah;
2. Rendahnya tingkat literasi pajak;
3. Masih ada beberapa Wajib Pajak yang menghindari kewajiban pajak;
4. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam pengelolaan Pajak Daerah.

Peluang

1. Terdapat potensi peningkatan investasi di Kota Makassar karena merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di KTI;
2. Pelaku usaha yang terus meningkat berpotensi meningkatkan kontribusi Pajak Daerah;
3. Perkembangan *fintech* dan *e-payment* yang dapat mempermudah pembayaran secara *online*;
4. Dukungan dari Pemerintah Pusat untuk percepatanan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
5. Semakin banyaknya sarana untuk melakukan sosialisasi tentang Pajak Daerah.

Dengan memperhatikan dampak dari isu-isu, tantangan dan peluang yang ada, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar harus mampu melakukan upaya-upaya dalam rangka mengoptimalkan realisasi PAD yang utamanya bersumber dari Pajak Daerah.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya, dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2025, dilakukan reviu terhadap Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025, dengan membandingkan antara Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, sebagaimana tersaji pada tabel 2. 4 berikut.

Tabel 2.4
Perubahan Target Pendapatan
Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2025

NO	Jenis Pendapatan	Target 2025	Perubahan Target 2025	Selisih
A	**PAJAK DAERAH**	**2.125.300.000.000**	**1.869.102.441.000**	**(256.197.559.000)**
1	**Pajak Reklame**	**68.000.000.000**	**65.000.000.000**	**(3.000.000.000)**
2	**Pajak Air Tanah**	**8.000.000.000**	**6.500.000.000**	**(1.500.000.000)**
3	**Pajak Sarang Burung Walet**	**50.000.000**	**22.660.000**	**(27.340.000)**
4	**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**	**325.000.000.000**	**275.000.000.000**	**(50.000.000.000)**
5	**Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**440.300.000.000**	**370.000.000.000**	**(70.300.000.000)**
6	**Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**	**755.000.000.000**	**687.000.000.000**	**(68.000.000.000)**
a	Makanan dan/atau Minuman	245.000.000.000	230.000.000.000	(15.000.000.000)
b	Tenaga Listrik	300.000.000.000	277.000.000.000	(23.000.000.000)
c	Jasa Perhotelan	150.000.000.000	140.000.000.000	(10.000.000.000)
d	Jasa Parkir	25.000.000.000	10.000.000.000	(15.000.000.000)
e	Jasa Kesenian dan Hiburan	35.000.000.000	30.000.000.000	(5.000.000.000)
7	**Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**	**335.000.000.000**	**281.369.781.000**	**(53.630.219.000)**
8	**Opsen Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB)**	**193.950.000.000**	**184.210.000.000**	**(9.740.000.000)**
B	**RETRIBUSI DAERAH**	**21.355.000.000**	**9.100.000.000**	**(12.255.000.000)**
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	21.355.000.000	9.100.000.000	(12.255.000.000)
C	**LAIN-LAIN PAD YANG SAH**	**0**	**7.000.000.000**	**7.000.000.000**
	Total	**2.146.655.000.000**	**1.885.202.441.000**	**(261.452.559.000)**

verifikasi

Dari tabel di atas, dapat dilihat adanya perubahan target pendapatan yang mengalami penurunan sebesar Rp261.452.559.000,00. Penurunan target pendapatan ini disebabkan beberapa faktor. Pertama, adanya pelemahan ekonomi nasional yang berdampak pada penerimaan Pajak Daerah. Ekonomi nasional mengalami perlambatan, yang mempengaruhi daya beli masyarakat dan aktivitas usaha, sehingga berimbas pada penerimaan Pajak Daerah. Kedua, adanya implementasi kebijakan yang mempengaruhi sektor pendapatan, seperti perubahan regulasi yang mengubah tarif jenis pajak tertentu dan menghapus beberapa jenis retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian turut juga berdampak kepada kemampuan Pemerintah Kota Makassar dalam mencapai target pendapatan daerah. Faktor-faktor tersebut menjadi landasan bagi Bapenda Kota Makassar untuk melakukan rasionalisasi perubahan target pendapatan.

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar berupaya memaksimalkan tercapainya target Perubahan Renja Tahun 2025 dengan optimalisasi capaian realisasi target sampai dengan akhir Tahun 2025. Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar optimis dapat mencapai target yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Sebagai tambahan, beberapa upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam melakukan penyempurnaan-penyempurnaan pada segi pelayanan, seperti:

1. Mengoptimalkan pelayanan dengan melakukan pemeliharaan-pemeliharaan/ perbaikan sarana/ prasarana yang menunjang proses pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
2. *Updating* data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Pengembangan platform digital pengelolaan Pajak Daerah untuk efektivitas dan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dalam mendukung percepatan perluasan digitalisasi daerah;
4. Menjalin kerjasama dengan pihak retail dalam pembayaran pajak seperti Indomaret dan Alfamart;
5. Perluasan kanal pembayaran pajak digital baik melalui *QRIS, fintech, e-commerce*, maupun *virtual account*,
6. Koneksi *Host to Host* sistem Badan Pendapatan Daerah dengan DPM-PTSP;
7. Memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak secara berkesinambungan;
8. Peningkatan upaya Penertiban dan Penindakan guna memberikan teguran danperingatan terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban pajaknya;
9. Optimalisasi penagihan pajak dan piutang pajak / retribusi kepada Wajib Pajak / Retribusi;
10. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perpajakan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Tabel 2.5
T-C.31 - Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD Perubahan Kota Makassar Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kota Makassar**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**90%**	**87.715.616.144,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Makassar**	**Persentase ketersedian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**87.715.616.144,00**	**-**
			Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	**100%**				**Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**	**100%**		
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	**90%**				**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur**	**90%**		
1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**113.773.340,00**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**113.773.340,00**	**-**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	47.792.955,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	47.792.955,00	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.578.795,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.578.795,00	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.053.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	11.053.400,00	-

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.035.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.035.000,00	-
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.970.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.970.000,00	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	18.404.535,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	18.404.535,00	-
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.938.655,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.938.655,00	-
2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Persentase ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan**	**100%**	**75.118.741.368,00**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Persentase ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan**	**100%**	**75.118.741.368,00**	-
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	241 Orang	73.902.733.568,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	241 Orang	73.902.733.568,00	-
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	724.800.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	724.800.000,00	-

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	397.372.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	397.372.000,00	-
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	93.835.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	93.835.800,00	-
3	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas**	**100%**	**508.500.000,00**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Persentase Sarana dan Prasarana yang Tersedia**	**100%**	**508.500.000,00**	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	-
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37 Orang	508.500.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang	508.500.000,00	-
4	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**3.448.616.440,00**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Makassar**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik**	**100%**	**3.448.616.440,00**	-
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	87.523.400,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	87.523.400,00	-

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	356.736.840,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	356.736.840,00	-
3	Penyediaan Peralatan dan Rumah Tangga	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	127.369.200,00	Penyediaan Peralatan dan Rumah Tangga	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	127.369.200,00	-
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	222.510.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	222.510.000,00	-
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.190.037.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.190.037.000,00	-
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	160.440.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	160.440.000,00	-
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Makassar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	59.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Makassar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	59.000.000,00	-
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101 Laporan	1.164.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157 Laporan	1.164.000.000,00	-
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	81.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	81.000.000,00	-
5	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**1.228.990.400,00**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Makassar**	**Persentase Barang dan Peralatan Mesin Lainnya dalam Kondisi Baik**	**100%**	**1.228.990.400,00**	-

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	136 Unit	1.228.990.400,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	167 Unit	1.228.990.400,00	-
6	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**3.461.146.196,00**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik**	**100%**	**3.461.146.196,00**	-
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.232.546.196,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.232.546.196,00	-
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	152.500.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	152.500.000,00	-
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang DIsediakan	5 Laporan	1.076.100.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang DIsediakan	5 Laporan	1.076.100.000,00	-
7	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100%**	**3.835..848.400,00**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Makassar**	**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik**	**100%**	**3.835..848.400,00**	-

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.109.500,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.109.500,00	-
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	220 Unit	2.132.822.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200 Unit	2.132.822.000,00	-
3	Pemeliharaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	362 Unit	0	Pemeliharaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	-
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	563 Unit	723.727.900,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	566 Unit	723.727.900,00	-
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor/bangunan lainnya	1 Unit	910.479.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	910.479.000,00	-
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	680 Unit	29.710.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29.710.000,00	-

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Kota Makassar**	**Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**53,04%**	**26.329.751.328,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Kota Makassar**	**Presentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah**	**38,17**	**26.329.751.328,00**	**-**
			Deviasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**100%**							
1	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**	**100%**	**26.329.751.328,00**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**Persentase Realisasi Pajak Daerah**	**100%**	**26.329.751.328,00**	**-**
								Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	**50%**		
								Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	**92,50%**		
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	634.298.980,00	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	634.298.980,00	-
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 Dokumen	566.346.768,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	566.346.768,00	-
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	22.793.629.280,00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 Laporan	22.793.629.280,00	-

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	532.398.800,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	532.398.800,00	-
5	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	16 Laporan	1.271.722.000,00	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	1.271.722.000,00	-
6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Makassar	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	51.000 Obyek Pajak	3.363.719.000,00	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Makassar	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	51.000 Obyek Pajak	3.363.719.000,00	-
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Makassar	Jumlah Layanan Dan Konsultasi Pajak Daerah	21.600 Layanan	789.814.528,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Makassar	Jumlah Layanan Dan Konsultasi Pajak Daerah	22.000 Layanan	789.814.528,00	-
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Makassar	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1.620 Laporan	100.790.520,00	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Makassar	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	100.790.520,00	-
9	Penagihan Pajak Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	50 Dokumen	114.742.028,00	Penagihan Pajak Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	114.742.028,00	-

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP.000)	
10	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	7 Dokumen	1.587.544.952,00	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	1.587.544.952,00	-
11	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3 Laporan	86.468.000,00	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan	86.468.000,00	-

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah akan memberikan pandangan berbeda untuk menyusun program dan kegiatan. Karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar perlu mengakomodir usulan program dan kegiatan dari kelompok masyarakat yang didapatkan dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Kota Makassar.

Adapun usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan untuk Tahun 2025, dapat dikemukakan bahwa tidak terdapat usulan yang bersumber dari para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Tabel 2.6
T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tidak Ada				

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, dalam upaya pencapaian Sasaran dan Tujuan yang ditetapkan. Anggaran perubahan ditetapkan karena adanya efisiensi anggaran sehingga perlu penyesuaian anggaran pada seluruh Perangkat Daerah Kota Makassar. Dengan berdasar pada pertimbangan tersebut, maka Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian program ini adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD;
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD;
e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD;
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
g. Fasilitas Kunjungan Tamu;
h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Adapun kegiatan yang diusulkan pada pelaksanaan program ini sebagai berikut:

8) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan

a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
e. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
f. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
g. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
h. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
i. Penagihan Pajak Daerah;
j. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
k. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Makassar pada Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar merumuskan program dan kegiatan berdasarkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, juga tetap berpedoman pada RKPD Kota Makassar pada Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar hingga Triwulan II, maka diperlukan penyesuaian dalam program, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1 Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp.103.363.900,00 menjadi Rp47.792.955,00 karena adanya penyesuaian terhadap ketentuan ASB (Analisis Standar Belanja) Non Fisik.

1.2 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp8.811.500,00 menjadi Rp11.578.795,00 karena adanya penyesuaian terhadap ketentuan ASB (Analisis Standar Belanja) Non Fisik.

1.3 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp8.815.000,00 menjadi Rp11.053.400,00 karena adanya penyesuaian terhadap ketentuan ASB (Analisis Standar Belanja) Non Fisik.

1.4 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD, pagu anggaran tidak mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp8.594.000,00 menjadi Rp7.035.000,00 karena adanya penyesuaian terhadap ketentuan ASB (Analisis Standar Belanja) Non Fisik.

1.5 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp9.230.400,00 menjadi Rp6.970.000,00 karena adanya penyesuaian terhadap ketentuan ASB (Analisis Standar Belanja) Non Fisik.

1.6 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp9.233.040,00 menjadi Rp18.404.535,00 karena adanya penyesuaian terhadap ketentuan ASB (Analisis Standar Belanja) Non Fisik.

1.7 Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp3.294.000,00 menjadi Rp10.938.655,00 karena adanya penyesuaian terhadap ketentuan ASB (Analisis Standar Belanja) Non Fisik.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1 Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp82.131.888.555,00 menjadi Rp73.902.733.568,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan dan jumlah pegawai.

2.2 Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp737.040.000,00 menjadi Rp724.800.000,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

2.3 Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD,

pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp386.667.000,00 menjadi Rp397.372.000,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

2.4 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp97.596.800,00 menjadi Rp93.835.800,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3.1 Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dari pagu anggaran Rp164.250.000,00 mengalami perubahan menjadi Rp0,00 akibat rasionalisasi dan efisiensi.

3.2 Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp1.777.000.000,00 menjadi Rp508.500.000,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

4.1 Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp133.032.800,00 menjadi Rp87.523.400,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

4.2 Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp552.644.440,00 menjadi Rp356.736.840,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

4.3 Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp154.161.800,00 menjadi Rp127.369.200,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

4.4 Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesarRp465.212.000,00 menjadi Rp222.510.000,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

4.5 Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp1.215.267.000,00 menjadi Rp1.190.037.000,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

4.6 Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, pagu anggaran tidak mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp160.440.000,00.

4.7 Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp92.000.000,00 menjadi Rp59.000.000,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

4.8 Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp2.656.550.000,00 menjadi Rp1.164.000.000,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

4.9 Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, pagu anggaran mengalami

perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp63.225.000,00 menjadi Rp81.000.000,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

5. Kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

5.1 Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp634.889.800,00 menjadi Rp1.228.990.400,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp2.190.629.140,00 menjadi Rp2.232.546.196,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

6.2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp227.500.000,00 menjadi Rp152.500.000,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

6.3 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp1.188.300.000,00 menjadi Rp1.076.100.000,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp39.609.500,00 menjadi Rp39.109.500,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

7.2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp2.478.212.450,00 menjadi Rp2.132.822.000,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

7.3 Subkegiatan Pemeliharaan Mebel dari pagu anggaran Rp28.960.000,00 mengalami perubahan menjadi Rp0,00 akibat rasionalisasi dan efisiensi.

7.4 Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp705.429.900,00 menjadi Rp723.727.900,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

7.5 Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp1.122.627.300,00 menjadi Rp910.479.000,00. karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

7.6 Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp24.500.000,00 menjadi Rp29.710.000,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1.1 Subkegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp827.518.980,00 menjadi 634.298.980,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

1.2 Subkegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp1.676.826.768,00 menjadi Rp566.346.768,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

1.3 Subkegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp25.624.875.115,00 menjadi Rp22.793.629.280,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

1.4 Subkegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp566.474.300,00 menjadi Rp532.398.800,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

1.5 Subkegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp1.152.222.000,00 menjadi Rp1.271.722.000,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

1.6 Subkegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp3.506.197.000,00 menjadi Rp3.363.719.000,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

1.7 Subkegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp264.984.768,00 menjadi Rp789.814.528,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

1.8 Subkegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp115.817.764,00 menjadi Rp100.790.520,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

1.9 Subkegiatan Penagihan Pajak Daerah, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp37.622.028,00 menjadi Rp114.742.028,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

1.10 Subkegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp2.513.317.952,00 menjadi Rp1.587.544.952,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

1.11 Subkegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, pagu anggaran mengalami perubahan dari anggaran pokok sebesar Rp138.168.000,00 menjadi Rp86.468.000,00 karena adanya penyesuaian terhadap kebutuhan.

Pelaksanaan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah diperlukan untuk mengakomodasi perubahan prioritas dan kebutuhan dalam pengelolaan keuangan untuk efisiensi dan optimalisasi dalam pelaksanaan program-program di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dan dalam mendukung program prioritas pemerintah. Penyesuaian-penyesuaian dalam program, kegiatan dan subkegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dapat dilihat pada Matriks Perubahan yang merupakan cetakan dari sistem SIPD-RI (terlampir).

verifikasi

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini menjadi acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pengelolaan pendapatan daerah untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Fokus utama Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2025 adalah peningkatan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar akan melaksanakan beberapa langkah-langkah strategis.

Pertama, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar akan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap potensi pajak yang belum terpungut serta mendorong pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar juga akan memperkuat sistem informasi dan teknologi dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga proses pembayaran dan pelaporan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Kedua, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan sistem informasi yang terintegrasi dan inovatif. Pelayanan yang terintegrasi dan inovatif diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pengurusan administrasi perpajakan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Ketiga, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar akan melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam pengelolaan Pendapatan Daerah melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta memperkuat tata kelola organisasi yang efektif dan efisien. Dengan demikian, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dapat mewujudkan sistem pengelolaan Pendapatan Daerah yang profesional dan akuntabel.

Catatan Penting

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2025, terdapat beberapa catatan penting yang perlu dilakukan rasionalisasi dengan mengacu kondisi realita pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Rasionalisasi pagu anggaran ini dilakukan berdasarkan pertimbangan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada sisa masa tahun anggaran 2025. Catatan penting lainnya terkait belanja pegawai yang disesuaikan berdasarkan analisis jabatan pada masing-masing Perangkat Daerah serta belanja modal yang sudah harus dilaksanakan pembeliannya melalui *e-catalog* LKPP. Fokus utama terhadap sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur kebijakan insentif pemungutan dan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025.

Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Unsur pemerintah, masyarakat serta Wajib Pajak yang akan mendukung pelaksanaan program/kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025;
2. Pemerintah Kota Makassar berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan sesuai dengan kebutuhan Pembangunan Daerah Tahun 2025;
3. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 memuat kebijakan serta rencana program/kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dengan keselarasan dan konsistensi antara Perubahan RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang terdiri dari program/kegiatan, indikator dan target;

Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dipedomani oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut atau langkah langkah yang akan diambil agar Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar ini dapat terlaksana secara baik dan target kinerja dapat tercapai secara maksimal antara lain adalah:

1. Penyusunan *time schedule* dan pelaksanaan terhadap program/kegiatan secara tepat waktu;
2. Melaksanakan setiap program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas;
3. Identifikasi permasalahan-permasalahan di lapangan secara dini, agar dapat melakukan antisipasi lebih awal dan memperkecil risiko kegagalan dalam mencapai target kinerja;
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit kerja dalam Badan Pendapatan Daerah serta dengan *stakeholder* eksternal, termasuk instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
5. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala capaian kinerja serta melakukan perbaikan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika lingkungan.

Melalui Perubahan Rencana Kerja ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar merumuskan langkah-langkah konkret dalam menghadapi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjalankan fungsi utamanya. Adanya perubahan kebijakan, penyesuaian prioritas, dan peningkatan efisiensi di dalamnya menjadi cerminan dari semangat kami untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, merangsang pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

verifikasi

Perubahan Rencana Kerja diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam menghadapi dinamika ke depan. Kami percaya bahwa dengan mengikuti rencana yang terperinci dan terukur, serta dengan komitmen kuat, tujuan-tujuan yang kami canangkan akan dapat tercapai dengan sukses. Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini juga diharapkan membawa dampak positif bagi perkembangan Kota Makassar dan kesejahteraan masyarakatnya.

Makassar, 12 Agustus 2025

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR



ANDI ASMINULLAH, S.STP.
Pembina, IV/a
NIP. 19810827 199912 1 001

LAMPIRAN I:
MATRIKS PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025
(Sumber: SIPD-RI 2025)

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA MAKASSAR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**136.083.000.000,00**	**135.979.929.182,00**	**119.557.091.000,00**	**-16.525.909.000,00**							**144.327.589.328,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**136.083.000.000,00**	**135.979.929.182,00**	**119.557.091.000,00**	**-16.525.909.000,00**							**144.327.589.328,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**136.083.000.000,00**	**135.979.929.182,00**	**119.557.091.000,00**	**-16.525.909.000,00**							**144.327.589.328,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah** **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik**				**100** **90 %** **%**	**100** **90 %** **%**	**99.578.975.325,00**	**98.237.449.426,00**	**87.715.616.144,00**	**8.388.431.128,00**							**107.967.406.453,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	151.341.840,00	113.773.340,00	113.773.340,00	-37.568.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kota Makassar		323.803.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	103.363.900,00	47.792.955,00	47.792.955,00	-55.570.945,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			259.002.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.811.500,00	11.578.795,00	11.578.795,00	2.767.295,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			11.081.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.815.000,00	11.053.400,00	11.053.400,00	2.238.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			10.720.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.594.000,00	7.035.000,00	7.035.000,00	-1.559.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			10.852.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.230.400,00	6.970.000,00	6.970.000,00	-2.260.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			10.348.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	9.233.040,00	18.404.535,00	18.404.535,00	9.171.495,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			14.152.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.294.000,00	10.938.655,00	10.938.655,00	7.644.655,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			7.644.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat perangkat daerah*				100 %	100 %	83.353.192.355,00	78.841.450.506,00	75.118.741.368,00	-8.234.450.987,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kota Makassar		82.085.030.521,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				169 Orang/ bulan	241 Orang/ bulan	82.131.888.555,00	77.613.802.706,00	73.902.733.568,00	-8.229.154.987,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			80.808.246.221,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	737.040.000,00	736.440.000,00	724.800.000,00	-12.240.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			781.920.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	386.667.000,00	397.372.000,00	397.372.000,00	10.705.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			390.419.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	97.596.800,00	93.835.800,00	93.835.800,00	-3.761.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			104.444.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN Perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapsitas*				100 %	100 %	1.941.250.000,00	1.583.500.000,00	508.500.000,00	-1.432.750.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kota Makassar		1.712.970.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	164.250.000,00	0,00	0,00	-164.250.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			168.470.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				443 Orang	37 Orang	1.777.000.000,00	1.583.500.000,00	508.500.000,00	-1.268.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			1.544.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik*				100 %	100 %	5.492.533.040,00	4.452.283.040,00	3.448.616.440,00	-2.043.916.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kota Makassar		4.737.487.540,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	133.032.800,00	96.342.800,00	87.523.400,00	-45.509.400,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			91.846.540,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	552.644.440,00	447.745.040,00	356.736.840,00	-195.907.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			553.152.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	154.161.800,00	149.450.200,00	127.369.200,00	-26.792.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			483.428.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	465.212.000,00	222.510.000,00	222.510.000,00	-242.702.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			120.950.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.215.267.000,00	1.194.987.000,00	1.190.037.000,00	-25.230.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			868.744.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	8 Dokumen	160.440.000,00	160.440.000,00	160.440.000,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			160.440.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				500 Laporan	100 Laporan	92.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	-33.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			92.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				222 Laporan	101 Laporan	2.656.550.000,00	2.004.808.000,00	1.164.000.000,00	-1.492.550.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			2.305.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	63.225.000,00	117.000.000,00	81.000.000,00	17.775.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			61.425.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik*				100 %	100 %	634.889.800,00	1.359.495.400,00	1.228.990.400,00	594.100.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kota Makassar		7.974.372.574,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			101.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				86 Unit	136 Unit	634.889.800,00	1.359.495.400,00	1.228.990.400,00	594.100.600,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			7.873.372.574,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik*				100 %	100 %	3.606.429.140,00	3.732.034.740,00	3.461.146.196,00	-145.282.944,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kota Makassar		3.279.524.068,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.190.629.140,00	2.416.434.740,00	2.232.546.196,00	41.917.056,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			2.116.524.068,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	227.500.000,00	227.500.000,00	152.500.000,00	-75.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			221.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	1.188.300.000,00	1.088.100.000,00	1.076.100.000,00	-112.200.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			941.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik*				100 %	100 %	4.399.339.150,00	8.154.912.400,00	3.835.848.400,00	-563.490.750,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kota Makassar		7.854.217.650,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.609.500,00	39.609.500,00	39.109.500,00	-500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			38.691.950,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				220 Unit	220 Unit	2.478.212.450,00	2.436.172.000,00	2.132.822.000,00	-345.390.450,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			2.553.106.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				362 Unit	362 Unit	28.960.000,00	0,00	0,00	-28.960.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			28.960.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				563 Unit	563 Unit	705.429.900,00	723.727.900,00	723.727.900,00	18.298.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			692.030.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.122.627.300,00	4.913.283.000,00	910.479.000,00	-212.148.300,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			4.517.469.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				680 Unit	680 Unit	24.500.000,00	42.120.000,00	29.710.000,00	5.210.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			23.960.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Deviasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran PAD dalam APBD Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)**				**100 53.04 % %**	**100 53.04 % %**	**36.504.024.675,00**	**37.742.479.756,00**	**31.841.474.856,00**	**-143.841.800,00**							**36.360.182.875,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase realisasi pajak daerah dan retribusi daerah*				100 %	100 %	36.504.024.675,00	37.742.479.756,00	31.841.474.856,00	-4.662.549.819,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kota Makassar		36.360.182.875,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	827.518.980,00	695.398.980,00	634.298.980,00	-193.220.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			665.096.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	1.676.826.768,00	634.346.768,00	566.346.768,00	-1.110.480.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			1.618.365.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	25.624.875.115,00	27.255.549.480,00	22.793.629.280,00	-2.831.245.835,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			25.695.770.475,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	566.474.300,00	785.474.300,00	532.398.800,00	-34.075.500,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			128.712.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1620 Dokumen	1620 Dokumen	115.817.764,00	119.334.520,00	100.790.520,00	-15.027.244,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			120.836.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				50 Dokumen	50 Dokumen	37.622.028,00	134.742.028,00	114.742.028,00	77.120.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			32.077.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	2.513.317.952,00	2.380.752.952,00	1.587.544.952,00	-925.773.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			2.541.426.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT PELAYANAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH							**136.083.000.000,00**	**135.979.929.182,00**	**119.557.091.000,00**	**-16.525.909.000,00**							**144.327.589.328,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**136.083.000.000,00**	**135.979.929.182,00**	**119.557.091.000,00**	**-16.525.909.000,00**							**144.327.589.328,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**136.083.000.000,00**	**135.979.929.182,00**	**119.557.091.000,00**	**-16.525.909.000,00**							**144.327.589.328,00**	
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Deviasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran PAD dalam APBD Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)**				**100 53.04 % %**	**100 53.04 % %**	**36.504.024.675,00**	**37.742.479.756,00**	**31.841.474.856,00**	**-143.841.800,00**							**36.360.182.875,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase realisasi pajak daerah dan retribusi daerah*				100 %	100 %	36.504.024.675,00	37.742.479.756,00	31.841.474.856,00	-4.662.549.819,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kota Makassar		36.360.182.875,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				16 Laporan	16 Laporan	1.152.222.000,00	1.246.722.000,00	1.271.722.000,00	119.500.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			1.600.810.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				3 Laporan	3 Laporan	138.168.000,00	96.768.000,00	86.468.000,00	-51.700.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			145.423.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT PAJAK BUMI BANGUNAN							**136.083.000.000,00**	**135.979.929.182,00**	**119.557.091.000,00**	**-16.525.909.000,00**							**144.327.589.328,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**136.083.000.000,00**	**135.979.929.182,00**	**119.557.091.000,00**	**-16.525.909.000,00**							**144.327.589.328,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**136.083.000.000,00**	**135.979.929.182,00**	**119.557.091.000,00**	**-16.525.909.000,00**							**144.327.589.328,00**	
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Deviasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran PAD dalam APBD Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)**				**100 53.04 % %**	**100 53.04 % %**	**36.504.024.675,00**	**37.742.479.756,00**	**31.841.474.856,00**	**-143.841.800,00**							**36.360.182.875,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase realisasi pajak daerah dan retribusi daerah*				100 %	100 %	36.504.024.675,00	37.742.479.756,00	31.841.474.856,00	-4.662.549.819,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kota Makassar		36.360.182.875,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				51000 Obyek Pajak	51000 Obyek Pajak	3.384.037.000,00	3.229.109.000,00	3.199.759.000,00	-184.278.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			3.235.431.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT BPHTB							**136.083.000.000,00**	**135.979.929.182,00**	**119.557.091.000,00**	**-16.525.909.000,00**							**144.327.589.328,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**136.083.000.000,00**	**135.979.929.182,00**	**119.557.091.000,00**	**-16.525.909.000,00**							**144.327.589.328,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**136.083.000.000,00**	**135.979.929.182,00**	**119.557.091.000,00**	**-16.525.909.000,00**							**144.327.589.328,00**	
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Deviasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran PAD dalam APBD Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)**				**100 53.04 % %**	**100 53.04 % %**	**36.504.024.675,00**	**37.742.479.756,00**	**31.841.474.856,00**	**-143.841.800,00**							**36.360.182.875,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase realisasi pajak daerah dan retribusi daerah*				100 %	100 %	36.504.024.675,00	37.742.479.756,00	31.841.474.856,00	-4.662.549.819,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kota Makassar		36.360.182.875,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				51000 Obyek Pajak	51000 Obyek Pajak	202.160.000,00	202.160.000,00	163.960.000,00	-38.200.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			358.768.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPT PELAYANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH							**136.083.000.000,00**	**135.979.929.182,00**	**119.557.091.000,00**	**-16.525.909.000,00**							**144.327.589.328,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**136.083.000.000,00**	**135.979.929.182,00**	**119.557.091.000,00**	**-16.525.909.000,00**							**144.327.589.328,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**136.083.000.000,00**	**135.979.929.182,00**	**119.557.091.000,00**	**-16.525.909.000,00**							**144.327.589.328,00**	
1.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Deviasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran PAD dalam APBD Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)**				**100 53.04 % %**	**100 53.04 % %**	**36.504.024.675,00**	**37.742.479.756,00**	**31.841.474.856,00**	**-143.841.800,00**							**36.360.182.875,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase realisasi pajak daerah dan retribusi daerah*				100 %	100 %	36.504.024.675,00	37.742.479.756,00	31.841.474.856,00	-4.662.549.819,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Kota Makassar		36.360.182.875,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				21600 Layanan	21600 Layanan	264.984.768,00	962.121.728,00	789.814.528,00	524.829.760,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			217.464.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		J U M L A H							**136.083.000.000,00**	**135.979.929.182,00**	**119.557.091.000,00**	**26.546.450.000,00**							**144.327.589.328,00**	



PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Dinas Perpustakaan



RENCANA KERJA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) Dinas Perpustakaan Kota Makassar untuk Tahun 2025. Shalawat serta Salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Keluarga Beliau yang suci, dan para Sahabatnya yang setia.

Dokumen ini disusun sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dalam rangka meningkatkan kualitas Layanan Perpustakaan kepada masyarakat Kota Makassar. Perubahan Rencana Kerja ini mencakup berbagai Perubahan Program dan Kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, dan rekreasi masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan berkomitmen terhadap inovasi, kami berupaya untuk mewujudkan Perpustakaan yang bertaraf Internasional (World Class Library) Sehingga dapat Mendukung Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan hingga Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Dokumen Perubahan ini juga memuat analisis kinerja pelayanan perpustakaan, isu-isu penting yang dihadapi, serta strategi dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kami berharap, dengan adanya Perubahan Rencana Kerja ini, Dinas Perpustakaan Kota Makassar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sehingga Nilai Tingkat Gemar Membaca (TGM) menjadi indikator utama yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kebiasaan membaca telah tumbuh dan berkembang di masyarakat Kota Makassar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Dokumen Perubahan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan dalam pelaksanaan Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan Kota Makassar pada tahun 2025.

Makassar, 28 Juli 2025
Kepala Dinas Perpustakaan
Kota Makassar

Dr. Aryati Puspasari Abady, S.Pi., M.Si.
NIP. 19730617 199803 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja (RENJA) 5
A. Maksud 5
B. Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Hasil Triwulan II Tahun 2025 7
A. Faktor Pendorong Tercapainya Target Kinerja 27
B. Faktor Penghambat Tecapainya Target Kinerja 27
C. Tindak Lanjut dalam upaya Pencapaian Kinerja Program 28
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 29
A. Menghimpun Informasi 29
B. Mengelola Informasi 29
C. Pemberdayakan dalam Memberikan Layanan 29
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Kota Makassar 33
A. Digitalisasi Koleksi 34
B. Integrasi Teknologi Informasi 34
C. Pengembangan Fasilitas Modern 34
D. Koleksi yang Beragam dan Berkualitas 34
E. Layanan Perpustakaan yang Profesional 34
F. Kolaborasi dan Jaringan Global 35
G. Program Pendidikan dan Literasi Informasi 35
H. Sustainabilitas dan Inovasi 35
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 35
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN 44
BAB IV. PENUTUP 53
4.1 Catatan Ketersediaan Anggaran 53
4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 54
4.3 Rencana Tindak Lanjut 54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel e-81 11
Tabel T-C.29 17
Tabel 2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program Utama 30
Tabel T-C.30 32
Tabel 2.3 Evaluasi IKK 33
Tabel T-C.31 37
Tabel T-C.33 45

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dipandang perlu untuk diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, dengan menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana di maksud Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan.:
1. Wakil Wali Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
7.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
9.	Dinas Sosial Kota Makassar
10.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
12.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
13.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Makassar
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
22.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
23.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
24.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
25.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
26.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
27.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
28.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
29.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar

31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
32.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
34.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
35.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
36.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
37.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
38.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
39.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
40.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
43.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
44.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
45.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
46.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
47.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
58.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
49.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
50.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar
51.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

WALIKOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perpustakaan Kota Makassar memiliki Peran Strategis dalam mendukung Pendidikan Formal maupun Informal dan Meningkatkan Literasi Masyarakat Kota Makassar serta menyediakan Akses Informasi yang luas bagi seluruh Warga Kota Makassar.

Dinas Perpustakaan sebagai Penanggung Jawab Teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Bidang Perpustakaan mempunyai tugas utama dalam menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) Tahun 2025 sebagai Acuan dalam Pelaksanaan Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan untuk mendukung Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintahan Kota Makassar Tahun 2025, Oleh karena itu Pemerintah Kota Makassar dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) Dinas Perpustakaan Tahun 2025 ini disusun untuk memperkuat peran Pemerintah Kota Makassar melalui berbagai Perubahan Program dan Kegiatan yang inovatif berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan Tahun 2021-2026 dimana Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kota Makassar Tahun 2026-2029 dijadikan Acuan demi mendukung untuk tercapainya Visi dan Misi Walikota Makassar yaitu Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan dengan cara Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Dimana Dinas Perpustakaan mempunyai Sasaran Yaitu Membantu Meningkatkan Kualitas dan Aksebilitas Pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang "Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah", penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN-PD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) SKPD yang Definitif.

Dengan demikian setiap Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD), dan selanjutnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) pada tahun berjalan, Dokumen tersebut dijadikan sebagai Pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Perubahan) dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-Perubahan) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P).

Perubahan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) mempunyai Fungsi yang sangat penting dalam Sistem Perencanaan Daerah karena memuat Perencanaan Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dituangkan ke dalam Perencanaan Program dan Penganggaran Tahun berjalan. Perubahan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) akan menunjukkan Aksi Kerja Rencana Strategis (RENSTRA) untuk setiap akhir tahunnya secara Nyata dan Terukur.

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-R) dimana kebijakan umum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) ditetapkan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dinas Perpustakaan dalam menangani kewajiban dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) dengan maksud tersedianya Dokumen Perubahan Perencanaan Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tahun berjalan.

Penyusunan RENJA dan PERUBAHAN RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun Perubahan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan, Capaian Kinerja serta penyerapan anggaran pada RENJA perangkat daerah sampai dengan Triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Perkembangan keadaan yang memang harus dilakukan karena untuk dilakukan perubahan dan pergerseran sehingga dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;

- Terjadinya Perubahan Peraturan Perundang-Undangan terbaru
- Hasil Evaluasi Kinerja SKPD Hingga Triwulan I Pada Tahun Berjalan
- Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;

Disamping beberapa pertimbangan tersebut, mengingat Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RENSTRA Perangkat Daerah Tahun perencanaan. Program atau Kegiatan alternatif baru dapat digunakan jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Mempercepat Capaian Target Sasaran RKPD SKPD;
- Adanya Kebijakan Pemerintah yang menjadi Prioritas Nasional yang mendukung Perecepatan Pembangunan Daerah;

- Dilakukan jika Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan Keluaran dan Hasil yang sesuai dengan sasaran RENSTRA SKPD.

Dengan kata lain Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2025 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2025 dimulai dari Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi dasar bagi Rancangan Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2025, hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan I, Masalah yang dihadapi serta usulan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025. Rancangan Perubahan Rencana Kerja tersebut kemudian melalui proses Verifikasi dengan tujuan untuk memastikan Indikator Kinerja yang akan menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah dalam Program dan Kegiatan Prioritas pada Rancangan Perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada Perubahan RENJA perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses Verifikasi dan Penyelarasan akhir dengan Perubahan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota, maka rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah dapat ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah mendapat Pengesahan dari Walikota.

Perubahan RENJA Perangkat Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Perpustakaan Kota Makassar Kota Makassar Tahun 2025.

Dokumen Rencana Kerja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk mensikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikan dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Rencana Kerja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja SKPD sangat ditentukan kemampuan SKPD dalam mengidentifikasi, menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi SKPD. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Renja sering kali diperlukan perubahan, baik dari perubahan anggaran, peralihan, maupun penambahan yang terjadi selama pelaksanaannya dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja yang telah ditargetkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2025 adalah :

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2007 Nomor 129); dan Penjelaan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang "Perpustakaan" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4774);
E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
G. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6323);
H. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

K. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

L. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 8) Ditetapkan Tanggal 30 Desember 2024;

M. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 57) Ditetapkan Tanggal 31 Desember 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja (RENJA)

Perubahan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) Dinas Perpustakaan disusun dengan Maksud dan Tujuan sebagai berikut :

A. Maksud

Untuk mewujudkan Sinergitas antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan dalam Pembangunan Daerah, dalam merancang Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan Tahun 2021-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kota Makassar serta memperhatikan Isu-isu Strategis dan Permasalahan yang harus diselesaikan pada Tahun 2025;

Perubahan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) sebagai pedoman bagi Dinas Perpustakaan Kota Makassar dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada Tahun berjalan;

B. Tujuan

- Untuk memberikan arah bagi Dimensi Kebijakan dan Program Kerja Tahunan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya dalam Perencanaan dan Pengelolaan pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar;
- Menyediakan Dokumen Resmi bagi Dinas Perpustakaan Kota Makassar dalam rangka menyusun perencanaan untuk menentukan Prioritas dan Menyusun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan Kota Makassar pada Tahun 2025;
- Sebagai Pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-P) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA-P) Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Perpustakaan adalah sebagai berikut :

Bab i. Pendahuluan

Berisi uraian mengenai :

1.1 Latar Belakang

Berisikan latar Belakang penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN);

1.2 Landasan Hukum

Berisikan Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN),

1.3 Maksud dan Tujuan

Berisikan penjelasan mengenai Maksud dan Tujuan dari Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN),

1.4 Sistematika Penulisan

Berisikan penjelasan tata cara penulisan dan aturan baku dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) yang membahas tiap BAB dalam Dokumen.

Bab ii. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Hasil Triwulan II Tahun 2025

Dimana pada bagian ini menjelaskan Capaian dan Progres Pelaksanan Rencana Kerja dilihat dari capaian hasil yang ditargetkan sampai Triwulan Ke-Dua tahun berjalan dilihat pada aplikasi e-Monev BAPPEDA Kota Makassar;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan Analisis Kinerja Dinas Perpustakaan berdasarkan dari Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat serta tindak lanjut SKPD dari hasil Analisis Capaian Program dan Kegiatan dilihat dengan melihat IKU dan IKK Dinas Perpustakaan pada Tahun berjalan sampai Triwulan II;

2.3 Isu-isu Penting Perangkat Daerah

Berisikan Isu-isu Strategis Bidang perpustakaan dengan mengacu pada Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD SDGs);

2.4 Hasil Analisis Kebutuhan yang ditetapkan Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2026-2029

Berisikan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat yang melihat Hasil dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2026-2029

Bab iii. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan secara utuh tentang Perubahan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) yang sajikan dalam Bentuk Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025, baik Pendanaannya dan Matriks Perubahan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) Dinas Perpustakaan Tahun Anggaran 2025.

Bab iv. Penutup

Berisikan Uraian Penutup, berupa Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan maupun dalam Ketersediaan Anggaran yang sesuai dengan kebutuhan, serta mengikuti Kaidah-kaidah Pelakasanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Hasil Triwulan I Tahun 2025

Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah hingga Triwulan II disusun dalam Aplikasi e-Monev BAPPEDA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Seluruh pencapaian realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun dalam Realisasi Fisik Kinerja dan Persentase Capaian Kinerja.

Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat tercapai jika pelaksanaan dilakukan secara rutin maupun setiap triwulan berdasarkan Laporan Kegiatan Bidang masing-masing pada Perangkat Daerah. Untuk itu, diwajibkan bagi seluruh aktivitas pelaksanaan kinerja bidang untuk menyusun dokumen pelaporan pelaksanaan kinerja sebagai bahan evaluasi dan monitoring setiap Triwulannya. Begitupun dengan Persentase Capaian Kinerja.

Realisasi Kinerja dapat berupa kegiatan, dokumen maupun laporan berdasarkan indikator output dari masing-masing Sub Kegiatan. Target Kinerja merupakan Indikator pencapaian dari seluruh aktivitas penyelenggaraan kinerja bidang untuk mengukur kemampuan pencapaian hasil aktivitas pencapaian masing-masing bidang. Maka perlu diingat bahwa indikator kinerja maupun indikator output sangat berperan penting untuk menentukan keberhasilan pencapaian realisasi dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Begitupun dengan persentase realisasi anggaran/pagu indikatif Program dan Kegiatan.

Untuk mempertanggungjawabkan Keberhasilan atau Kegagalan Pelaksanaan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) Dinas Perpustakaan Kota Makassar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar selama tahun 2025

Pada tahun 2025 Dinas Perpustakaan Kota Makassar telah melaksanakan 3 Program yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang dan 2 (dua) Program Utama yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan;
- Program Pembinaan Perpustakaan yang terdiri dari 2 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan;
- Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno terdiri dari 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.

Dengan besar pagu anggaran Rp. 13.244.940.038,- (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Keuangan Triwulan I tahun 2025 pada Program dan Kegiatan yaitu dari bulan Januari sampai bulan Maret 2025. Adapun Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan Kota Makassar yaitu sebesar 12,46% dari Relalisasi Anggaran sebesar Rp. 1.654.008.224,- dapat dilihat dari Tabel e-81 sebagai berikut :

Tabel 2.1

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN (Tabel e-81)

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN I		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)	
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5	6			7		10		11	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**43.818.336.115**	**12.619.610.078**		**1.654.008.224**		**1.654.008.224**		**13,11**
	2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**43.818.336.115**	**12.619.610.078**		**1.654.008.224**		**1.654.008.224**		**13,11**
	2	**23**				**Dinas Perpustakaan**				**43.818.336.115**	**12.619.610.078**		**1.654.008.224**		**1.654.008.224**		**13,11**
	2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**%**	**90,0**	**38.556.547.379**	**7.983.151.302**	**11,41**	**1.359.908.224**	**11,41**	**1.359.908.224**	**12,68**	**17,03**
							Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	**%**	**90,0**			**10,68**		**10,68**		**11,87**	
							Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	**%**	**100,0**			**19,47**		**19,47**		**19,47**	
	2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100,0**	**93.882.800**	**85.356.400**	**14,94**	**12.752.000**	**14,94**	**12.752.000**	**14,94**	**14,94**
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3,0	26.734.600	30.742.400	1,0	7.382.000	1,0	7.382.000	33,33	24,01
	2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,0	10.460.000	8.194.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
	2	23	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,0	12.100.000	8.427.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
	2	23	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,0	11.098.000	9.284.000	1,0	5.370.000	1,0	5.370.000	100,0	57,84
	2	23	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,0	10.466.400	9.224.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4,0	8.316.800	8.174.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2,0	14.707.000	11.311.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
	2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**100,0**	**13.005.308.443**	**6.395.481.382**	**24,0**	**1.144.486.159**	**24,0**	**1.144.486.159**	**24,0**	**17,90**
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32,0	11.939.543.243	6.086.232.182	8,0	1.058.116.159	8,0	1.058.116.159	25,0	17,39

48 + 9

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN I		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)	
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5	6			7		10		11	
	2	23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,0	690.120.000	178.440.000	3,0	54.870.000	3,0	54.870.000	25,0	30,75
	2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,0	109.215.000	127.162.200	3,0	31.500.000	3,0	31.500.000	25,0	24,77
	2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2,0	1.115.000	3.647.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
	2	23	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,0	265.315.200		0,0		0,0		0,0	
	2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persen**	**100,0**	**1.841.176.000**	**78.491.800**	**9,45**	**6.000.000**	**9,45**	**6.000.000**	**9,45**	**7,64**
	2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	51,0	133.845.000		0,0		0,0		0,0	
	2	23	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	24,0	915.331.000	6.491.800	6,0	0	6,0	0	25,0	
	2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6,0	792.000.000	72.000.000	2,0	6.000.000	2,0	6.000.000	33,33	8,33
	2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100,0**	**2.262.801.136**	**286.014.520**	**13,36**	**34.972.351**	**13,36**	**34.972.351**	**13,36**	**12,23**
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7,0	6.760.000	14.896.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10,0	216.520.336	58.343.320	0,0	0	0,0	0	0,0	
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10,0	92.540.800	10.301.200	0,0	0	0,0	0	0,0	
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8,0	17.280.000	16.440.000	2,0	0	2,0	0	25,0	
	2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4,0	69.000.000	5.000.000	1,0	0	1,0	0	25,0	
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	35,0	1.368.160.000	159.034.000	10,0	34.972.351	10,0	34.972.351	28,57	21,99
	2	23	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,0	492.540.000	25.000.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
	2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**0,0**	**18.408.588.000**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	
	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	17,0	15.206.740.000		0,0		0,0		0,0	
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30,0	3.201.848.000		0,0		0,0		0,0	
	2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100,0**	**1.748.132.000**	**865.507.200**	**17,46**	**151.099.124**	**17,46**	**151.099.124**	**17,46**	**17,46**
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,0	18.000.000	16.636.000	3,0	0	3,0	0	25,0	

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN I		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)	
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5	6			7		10		11	
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,0	231.172.000	135.792.000	3,0	19.849.124	3,0	19.849.124	25,0	14,62
	2	23	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12,0	227.500.000		0,0		0,0		0,0	
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,0	1.271.460.000	713.079.200	3,0	131.250.000	3,0	131.250.000	25,0	18,41
	2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**Persen**	**100,0**	**1.196.659.000**	**272.300.000**	**3,89**	**10.598.590**	**3,89**	**10.598.590**	**3,89**	**3,89**
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,0	44.380.000	44.380.000	0,0	3.696.000	0,0	3.696.000	0,0	8,33
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11,0	171.240.000	190.670.000	1,0	6.902.590	1,0	6.902.590	9,09	3,62
	2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1,0	16.000.000		0,0		0,0		0,0	
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	46,0	43.450.000	37.250.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,0	921.589.000		0,0		0,0		0,0	
	2	**23**	**01**			**RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)**										**14,67**	**44,39**
	2	**23**	**01**			**PREDIKAT KINERJA**										**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**
	2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Angka Budaya Baca Kota Makassar**	**%**	**65,0**	**4.636.458.776**	**4.636.458.776**	**0,0**	**294.100.000**	**0,0**	**294.100.000**	**0,0**	**6,34**
							Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	**Orang/ Tahun**	**560.000**			**77.165**		**77.165,0**		**13,78**	
							Jumlah Koleksi Judul Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	**Eksemplar**	**32.212**			**33**		**33,0**		**0,10**	
							Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	**Pustakawan**	**27**			**0,0**		**0,0**		**0,0**	
							Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	**Tenaga Teknis**	**147**			**0,0**		**0,0**		**0,0**	
	2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah KabupatenKota**	**Persen**	**100,0**	**855.993.776**	**855.993.776**	**35,0**	**294.100.000**	**35,0**	**294.100.000**	**35,0**	**34,36**
	2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO:20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Bulan	2,0			0,0		0,0		0,0	
	2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	142,0	47.502.856		0,0		0,0		0,0	

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN I		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)	
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5	6			7		10		11	
	2	23	02	2.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Set	4,0			0,0		0,0		0,0	
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	10,0	72.088.000	72.088.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
	2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	50,0	119.342.400		0,0		0,0		0,0	
	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	700,0	601.070.520		33,0		33,0		4,71	
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah KabupatenKota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	142,0		47.502.856	0,0	0	0,0	0	0,0	
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah KabupatenKota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	50,0		119.342.400	0,0	0	0,0	0	0,0	
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	0,0		601.070.520	0,0	294.100.000	0,0	294.100.000	0,0	48,93
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan	2,0	15.990.000	15.990.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
	2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah KabupatenKota**	**Persen**	**100,0**	**3.780.465.000**	**3.780.465.000**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	
	2	23	02	2.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Lokus	1.000,0	3.083.885.000		0,0		0,0		0,0	
	2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	9,0	453.521.000		0,0		0,0		0,0	
	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	15,0	243.059.000		0,0		0,0		0,0	
	2	23	02	2.02	0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Orang	9,0			0,0		0,0		0,0	
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Perpustakaan	15,0		243.059.000	0,0	0	0,0	0	0,0	

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA TRIWULAN I		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2025) (Tahun n-1)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD TAHUN n-1 (%)	
									K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5	6			7		10		11	
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	0,0		453.521.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Lokus	5,0		3.083.885.000	0,0	0	0,0	0	0,0	
	2	**23**	**02**			**RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)**										**2,78**	**39,96**
	2	**23**	**02**			**PREDIKAT KINERJA**										**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**
	2	**23**	**04**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Jumlah Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Yang Dilestarikan**	**Judul Koleksi**	**707**	**625.329.960**	**625.329.960**	**704**	**0**	**704,0**	**0**	**99,58**	
	2	**23**	**04**	**2.01**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah KabupatenKota**	**Persen**	**100,0**	**608.338.760**	**608.338.760**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	
	2	23	04	2.01	0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	2,0	484.691.960		0,0		0,0		0,0	
	2	23	04	2.01	0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang dilakukan Pengembangan, Pengelolaan, Pengalihmediaan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Eksemplar	2,0	123.646.800		0,0		0,0		0,0	
	2	**23**	**04**	**2.02**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah KabupatenKota**	**Persen**	**100,0**	**16.991.200**	**16.991.200**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	
	2	23	04	2.02	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Eksemplar	2,0			0,0		0,0		0,0	
	2	23	04	2.02	0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	Eksemplar	2,0	16.991.200		0,0		0,0		0,0	
	2	**23**	**04**			**RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)**										**99,58**	**24,37**
	2	**23**	**04**			**PREDIKAT KINERJA**										**SANGAT TINGGI**	**SANGAT RENDAH**
						RATA-RATA CAPAIAN KINERJA OPD (%)										**12,20**	**12,49**
						PREDIKAT KINERJA OPD										**SANGAT RENDAH**	**SANGAT RENDAH**

Capaian Target Table e-81 diatas merupakan Evaluasi Renja Tahun 2025 sampai Triwulan Ke-I yang tidak terlepas dari Evaluasi RENSTRA Sampai Tahun 2025 yang dapat dilihat dari Tabel T-C.29 berikut :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan

Capaian Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kota Makassar

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2				Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayana Dasar										
2.23				Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan										
2.23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100%	100	300	75
					Indek Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	Persen	90	90	90	90	100%	90	270	67,5
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Persen	90	90	90	90	100%	90	270	67,5

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.23	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	7	7	7	7	100%	7	21	5,25
2.23	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun	Dokumen	2	1	1	1	100%	1	3	0,75
2.23	1	2.01	2	koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
2.23	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
2.23	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
2.23	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
2.23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	1	1	1	100%	1	3	0,75

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.23	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	2	1	1	1	100%	1	3	0,75
2.23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tersedia	Persen	100	100	100	100	100%	100	300	75
2.23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	Bulan	14	14	14	14	100%	14	42	10,5
2.23	1	2.02	2	Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	100%	12	36	9
2.23	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	100%	12	36	9
2.23	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan keuangan Akhir tahun SKPD yang disusun	Dokumen	1	4	4	4	100%	4	12	3
2.23	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	0	10	10	10	100%	10	30	7,5

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.23	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100%	0	200	50
2.23	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jenis	2	2	2	2	100%	0	4	1
2.23	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Miik Daerah SKPD	Termanfaatkannya Barang Milik Daerah SKPD	Jenis	2	2	2	2	100%	0	4	1
2.23	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Pakaian kerja dan Peningkatan Kapasitas SDM	Persen	90	90	90	90	100%	90	270	67,5
2.23	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya yang diadakan	Stel	52	46	46	46	100%	55	147	36,75
2.23	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Hasil Kinerja Pegawai	Kali	6	6	6	6	100%	6	18	4,5
2.23	1	2.05	9	Pendidkan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Hasil Kinerja Pegawai	Orang	6	6	6	6	100%	10	22	5,5

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.23	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Administrasi umum yang tersedia	Persen	90	90	90	90	100%	90	270	67,5
2.23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik /Penerangan yang tersedia	Jenis	7	7	2	2	100%	8	17	4,25
2.23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	7	7	7	7	100%	7	21	5,25
2.23	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	Tahun	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
2.23	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	Koran	8	8	8	8	100%	10	26	6,5
2.23	1	2.06	8	Fasilitas Kunungan Tamu	Jumlah makan dan Minum yang disediakan	Orang	200	200	200	200	100%	200	600	150
2.23	1	2.06	9	Penyelengaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah yang disediakan	Orang	29	29	29	29	100%	50	108	27
2.23	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pengadaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Aplikasi	1	1	1	1	100%	1	3	0,75

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.23	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	90	90	90	100%	90	270	67,5
2.23	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1	1	1	100%	0	2	0,5
2.23	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	1	1	1	100%	0	2	0,5
2.23	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Unit	1	1	1	1	100%	0	2	0,5
2.23	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	Jenis	5	3	1	1	100%	10	14	3,5
2.23	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	12	12	100%	12	36	9
2.23	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat dan Ekspedisi yang disediakan	Bulan	12	12	8	8	100%	12	32	8
2.23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	Jenis	2	2	2	2	100%	3	7	1,75
2.23	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	3	3	3	3	100%	3	9	2,25

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4			6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	3	3	3	100%	3	9	2,25
2.23	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	Persen	100	90	90	90	100%	90	270	67,5
2.23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	Unit	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
2.23	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	Unit	14	14	14	14	100%	14	42	10,5
2.23	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	Jenis	3	3	3	3	100%	3	9	2,25
2.23	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	1	1	1	100%	1	3	0,75

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.23	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Tahun	1	1	1	1	100%	0	2	0,5
2.23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
2.23	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung	1	1	1	1	100%	0	2	0,5
2.23	**2**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Angka Budaya Baca Kota Makassar**	**Persen**	**65**	**45**	**50**	**64**	**128%**	**50**	**159**	**39,75**
					Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	**Pengunjung**	**580.000**	**485.569**	**520.000**	**872,039**	**0%**	**520**	**486.961**	**121740**
					Jumlah Koleksi perpustakaan yag tersesdia Diperpustakaan Daerah	**Judul**	**31.212**	**102.125**	**272.212**	**113.293**	**42%**	**272.212**	**487.630**	**121908**
					Jumlah Pustakawan, tenaga Tekhnis, dan Pemilaia yang meiliki Sertfikat	**Orang**	**27 Pustakawan, 47 Tenaga Teknis**	**10**	**12**	**11**	**92%**	**17**	**38**	**9,5**

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Tingkat Kota Makassar yang dikelola	Perpustakaan	142	142	142	142	100%	1	285	71,25
2.23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dan mendapat pemeliharaan	Aplikasi	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
2.23	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan di Tingkat Daerah Kota Makassar yang dikembangkan	Perpustakaan	142	142	142	142	100%	142	426	106,5
2.23	2	2.01	3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Kab/Kota	Jenis	4	4	4	4	100%	4	12	3
2.23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kab/Kota sesuai Standar Nasional Pperpustakaan	Perpustakaan yang Terakreditasi	10	10	10	19	190%	10	39	9,75

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.23	2	2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Kota Makassar yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kegiatan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
2.23	2	2.01	7	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Peprpustakaan dan Pustakawan	Dokumen	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
2.23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka yang dikelola dan Dikembangkan	Jenis	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
2.23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pembudayaan Gemar Membaca Pada Tingkat Kota Makassar yang dilaksanakan	Persen	65	50	50	1	2%	150	201	50,25
2.23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar	Kegiatan	5	5	5	5	100%	5	15	3,75

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.23	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah pemberian Penghargaan gerakan Budaya Gemar Membaca	Juara Lomba	5	3	1	1	100%	6	10	2,5
2.23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial yang dikembangkan	Kegiatan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
2.23	2	2.02	5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kota	Jumlah Peserta Duta Baca yang Terpilih pada Tingkat Provinsi	Kegiatan	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
2.23	2	2.02	8	Pembagunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan ditempat-tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Pembagunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan ditempat-tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Gedung	1	1	1	1	100%	1	3	0,75
2.23	**3**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan**	**Judul**	**707**	**1**	**1**	**1**	**100%**	**704**	**706**	**176,5**
2.23	3	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno Milik Kota Makassar yang dilestasikan	Judul	707	1	1	1	100%	20	22	5,5

48 8'24

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.23	3	2.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	1	1	100%	2	5	1,25
2.23	3	2.01	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat yang dikelola dan dialihmediakan untuk pelestarian dan pendayagunaan	Kegiatan	2	2	1	1	100%	2	5	1,25
2.23	3	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Kota Makassar yang dikembangkan	Persen	100	50	50	50	100%	20	120	30

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Satuan Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.23	3	2.02	1	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	2	2	2	2	100%	2	6	1,5
2.23	3	2.02	2	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dilaksanakan	Jenis	2	2	2	2	100%	2	6	1,5

Makassar, 28 Juli 2025
Kepala Dinas Perpustakaan
Kota Makassar

Dr. Aryati Puspasari Abady, S.Pi., M.Si.
NIP. 19730617 199803 2 007

Dalam Hal ini pelaksanaan Program, Kegiatan perlu dilakukan review untuk selalu melakukan Penyempurnaan Aktifitas Kegiatan Harian, Mingguan dan Bulanan pada bulan-bulan berikutnya, dengan memanfaatkan Faktor-faktor yang mendorong tercapainya Kinerja Program SKPD serta memperhatikan Faktor-faktor yang menghambat terlaksananya Capaian Kinerja Program SKPD sehingga Kita dapat menganalisa sehingga mampu melakukan Tindak Lanjut Pelaksanaan Program yang akan dilaksanakan kedepannya sehingga semua Program, Kegiatan, dan Sub Program dalam RENJA dapat terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan.

Berikut beberapa Faktor Pendorong, Penghambat serta Tindak Lanjut Capaian Kinerja Program Dinas Perpustakan Kota Makassar Tahun 2025.

A. Faktor Pendorong Tercapainya Target Kinerja

1. Program Penunjang/Pendukung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
   - Intensitas Aktif dari Staff Administrasi Sekretariat Dinas Perpustakaan;
   - Motivasi serta Arahan dari Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan;
   - Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan yang Akuntabel;
   - Jaringan Akses Internet yang kurang.
2. Program Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
   - Intensitas Aktif dari Staff Bidang Dinas Perpustakaan;
   - Intensitas Aktif dari Pustakawan Dinas Perpustakaan;
   - Terdatanya Kondisi Koleksi Jumlah Judul Buku dan Jumlah Eksamplar Buku yang dimiliki Pemerintah Daerah Baik Fisik maupun Non Fisik;
   - Komitmen Tinggi dari Seluruh Staf Baik Pejabat Struktural dan Fungsional untuk meningkatkan Pelayanan Perpustakaan dalam Melakukan Peningkatan Literasi serta Pembudayaan Gemar Membaca tiap Hari bahkan Hari Libur Kantor (Minggu);
   - Motivasi serta Arahan dari Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan;
   - Adanya Kerjasama dengan Pihak Lain yang terkait dengan Dinas Perpustakaan.

B. Faktor Penghambat Tecapainya Target Kinerja

1. Program Penunjang/Pendukung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
   - Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sekretariat Dinas, dengan banyaknya Aplikasi SKPD yang terkait pada Pemerintahan Kota Makassar sehingga setiap Staff Administrasi Sekretariat bertanggung jawab menjadi Operator beberapa Aplikasi beserta Pelaporannya;
   - Sarana dan Prasarana yang masih kurang baik Gedung yang masih sementara proses pembangunan dan masih dalam proses hukum serta Komputer yang masih menggunakan teknologi lama;
   - Adanya beberapa beberapa penggunaan Aplikasi yang baru diterapkan sehingga perlu waktu penyesuaian;
   - Tidak adanya Data Center Dinas Perpustakaan sehingga dalam pengumpulan Data sebagai bahan pembuatan laporan butuh kehadiran serta penjelasan dari Bidang terkai;

- Proses Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan Penyesuaian dengan e-Catalog Versi 6.0;
- Terjadinya Efisiensi Anggaran Tahun 2025.

2. Program Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
   - Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Fungsional Pustakawan Dinas Perpustakaan, dengan Rasio Kebutuhan dan Ketersediaan tidak memadai;
   - Dengan adanya SK Walikota Makassar Nomor 1187/131/KEP/VIII/2017 Tertanggal 02 Agustus 2017 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Kepada Camat dalam rangka Pelaksanaan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, sehingga Perpustakaan Kecamatan, Kelurahan, dan Kepulauan tidak tersentuh langsung oleh kebijakan Dinas Perpustakaan menyebabkan pengumpulan Data Perpustakaan tidak terakses secara umum;
   - Masih Kurangnya Penganggaran Pengadaan Bahan Pustaka serta Koleksi dan Pelestarian Naskah Kuno;
   - Belum Mendapatkan Persetujuan SPD dari BPKAD untuk Anggaran Kegiatan yang melibatkan Pihak Hotel;
   - Adanya Kesalahan Rekening dalam Sub Kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
   - Masih Kurangnya Penganggaran Kegiatan Peningkatan Akrerditasi Perpustakaan Sekolah, mengingat akan pentingnya kegiatan tersebut;
   - Lamaya Proses Pembentukan Surat Keputusan (SK) Kegiatan yang ingin dilaksanakan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar;
   - Adanya Rasionalisasi Anggaran bagi semua SKPD sehingga kegiatan yang rencananya dilaksanakan triwulan III dan Triwulan IV terpaksa dihilangkan;
   - Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam Perawatan serta Digitalisasi Naskah Kuno.

C. Tindak Lanjut dalam upaya Pencapaian Kinerja Program

1. Program Penunjang/Pendukung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
   - Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sekretariat Dinas namun dengan Motivasi serta Arahan Pejabat Struktural untuk terus meningkatkan Intensitas Staff dalam percepatan menyelesaikan Berkas Pelaporan;
   - Membuat Permohonan Penambahan Staff dengan mempersiapakan Anggaran pada Anggaran Perubahan dan Anggaran Pokok Tahun selanjutnya;
   - Berupaya Perampungan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan serta Memohon Penambahan Komputer Teknologi terbaru;
   - Mengembang Data Center Internal Dinas Perpustakaan terkhususnya Data untuk Bahan pembuatan Laporan.

2. Program Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
   - Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Fungsional Pustakawan namun dengan adanya Penambahan Pustakawan PPPK pada Dinas Perpustakaan serta Motivasi dan Arahan dari Pejabat Struktural dan Kordinator Pustakawan untuk terus meningkatkan Intensitas Pustakawan dalam percepatan menyelesaikan Pembinaan dan Peningkatan Perpustakaan Hingga sesuai dengan Standar Nasional dalam Lingkup Kota Makassar;
   - Dengan tidak lancarnya pengumpulan data Perpustakaan Kecamatan, Kelurahan, dan Kepulauan Pustakawan Berupaya Meningkatkan Intensitas Pembinaan dan Peningkatan Perpustakaan Kecamatan, Kelurahan, dan Kepulauan;
   - Dalam Kurangnya Penganggaran Pengadaan Bahan Pustaka terbarukan, dengan melibatkan Masyarakat dalam Meningkatkan Jumlah Koleksi Bahan Pustaka;
   - Melakukan Sosialisasi Pentingnya Pelestarian Naskah Kuno kepada Masyarakan Kota Makassar hingga bisa diakuisisi untuk menyelamatkan Peradaban Masyarakat Kota Makassar;
   - Melakukan Perbaikan Rekening Belanja pada masa RENJA Perubahan Tahun 2025 hingga Kegiatan yang terkait dapat dilaksanakan setelah terbit DPA Perubahan 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Perpustakaan Kota Makassar memiliki tiga tugas utama yang meliputi :

A. Menghimpun Informasi

Dalam Menghimpun Informasi Dinas Perpustakaan akan Mencari, menyeleksi, dan mengisi perpustakaan dengan sumber informasi yang memadai dan lengkap, baik dari segi jumlah, jenis, maupun mutu, dengan tujuan Menyediakan koleksi yang sesuai dengan kebijakan organisasi, ketersediaan dana, dan kebutuhan pemakai, serta selalu memperbarui informasi agar tetap relevan.

B. Mengelola Informasi

Dalam Mengelola Informasi Dinas Perpustakaan melakukan penengolaan, penyusunan, penyimpanan, dan pengemasan informasi sehingga tersusun rapi, mudah ditelusuri kembali (temu balik informasi), dan mudah diakses oleh Masyarakat, dengan tujuan memastikan informasi yang tersedia di perpustakaan dapat diakses dengan mudah oleh Pemustaka serta merawat bahan pustaka agar tetap dalam kondisi baik.

C. Pemberdayakan dalam Memberikan Layanan

Dalam memberikan layanan informasi secara optimal kepada masyarakat Dinas Perpustakaan memberdayakan sumber daya perpustakaan dalam meningkatkan akses dan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat

Untuk mengukur upaya Dinas Perpustakaan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan. Berikut adalah Analisis Pencapaian IKU Dinas Perpustakaan Kota Makassar :

Tabel 2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program Utama

No.	Program		Kegiatan dan Sub Kegiatan		Capaian Kinerja
	Indikator	Target	Uraian	Realisasi TW I	
1	Angka Budaya Baca	65 %	Hasil Survei Pembudayaan Gemar Membaca Tahun 2025	0 %	Survei dilakukan pada akhir Tahun
2	Jumlah Koleksi Judul Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	30.212 Judul	Jumlah Koleksi Judul Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	116.250 Judul	$x = \frac{K}{K} \times 100\ \%, x = \frac{116.250}{30.212} \times 100\ \%, x = 384{,}78\ \%$
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	580.000 Orang	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2025 TW II	142.645 Orang	$x = \frac{K}{K} \times 100\ \%, x = \frac{142.645}{580.000} \times 100\ \%, x = 24{,}59\ \%$
4	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	27 Orang dan 47 Tenaga Teknis	Jumlah Pustakawan yang Memiliki Sertifikat Tahun 2025 TW II	19 Orang	$x = \frac{K}{K} \times 100\ \%, x = \left(\frac{19}{27} + \frac{244}{47}\right) \times 100\ \%, x = 589{,}52\ \%$
			Jumlah Tenaga Teknis yang Memiliki Sertifikat Tahun 2025 TW II	244 Orang	
5	Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	707 Judul	Jumlah Koleksi Kuno yang dilestarikan Tahun 2025	704 Judul	$x = \frac{K}{K} \times 100\ \%, x = \frac{704}{706} \times 100\ \%, x = 99{,}7\ \%$

Untuk mengukur upaya Dinas Perpustakaan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan yang berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan Kota Makassar. yang setiap tahunnya selalu ditargetkan untuk mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terus dilakukan agar Dinas Perpustakaan Kota Makassar selalu berupaya memberikan pelayanan yang

semakin baik setiap tahunnya. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Perpustakaan Kota Makassar terdapat dalam Tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan

Kota Makassar

No	Indikator	SPM / Standar Nasional IKK	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Angka Budaya Baca Kota Makassar		%	50%	55%	60%	65%	70%	54,65%	64,56%	74,14%	60%	65%	
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun		Orang	520.000 Orang	540.000 Orang	560.000 Orang	580.000 Orang	600.000 Orang	682.142 Orang	872.039 Orang	645.990 Orang	560.000 Orang	580.000 Orang	
3	Jumlah Koleksi Judul Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah		Judul	27.212 Judul	28.212 Judul	29.712 Judul	30.212 Judul	31.712 Judul	196.785 Judul	252.624 Judul	113.734 Judul	29.212 Judul	30.212 Judul	Pada Tahun 2024 tidak memiliki Alokasi Anggaran
4	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat		Orang	15 Pustakawan, 138 Tenaga Teknis	17 Pustakawan, 141 Tenaga Teknis	22 Pustakawan, 144 Tenaga Teknis	27 Pustakawan, 147 Tenaga Teknis	32 Pustakawan, 150 Tenaga Teknis	10 Pustakawan, 22 Tenaga Teknis	11 Pustakawan, 140 Tenaga Teknis	19 Pustakawan, 142 Tenaga Teknis	22 Pustakawan, 144 Tenaga Teknis	27 Pustakawan, 150 Tenaga Teknis	Pada Tahun 2024 tdk memiliki Alokasi Anggaran
5	Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan		Judul	705	705	706	707	707	704	704	704	707	707	Pada Tahun 2024 tdk memiliki Alokasi Anggaran

Dalam Pengawasan dan Pengendalian berdasarkan Permendagri Nomor : 86 Tahun 2017, Dinas Perpustakaan Kota makassar mempunyyai Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Tahun 2024 dapat dilihat dari table beriku :

Tabel 2.3 Evaluasi *IKK*

Indikator Capaian Kinerja Pembangunan Daerah							
Aspek :	Pelayanan Umum (Layanan Urusan Wajib Non Dasar)						
Bidang Urusan :	Perpustakaan						
SKPD Penanggung Jawab :	Dinas Perpustakaan						
NO.	**INDIKATOR KINERJA**	**TAHUN 2025**				**REALISASI**	**KETERANGAN**
		TRIWULAN I	**TRIWULAN II**	**TRIWULAN III**	**TRIWULAN IV**		
1	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun (1.1 /1. 2)	0.06	0.04	0.00	0.00	0.10	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani berdasarkan Data Sensus Penduduk dari BPS Untuk Tahun 2024 dari Umur 5 Thn. Keatas
1,1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	84,226	51,204			135,430	
1,2	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	1,368,481	1,368,481	1,368,481	1,368,481	1,368,481	
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (2.1/2.2)	0.28	0.35			0.28	
2,1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	30,675	1,231			31,906	
2,2	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	110,194	3,495			113,689	
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (3.1 / 3.2 x 1000)	0.38	0.38	0.00	0.00	0.38	Jumlah Penduduk Kota Makassar Data Sensus Penduduk dari BPS Untuk Tahun 2024
3,1	Jumlah perpustakaan	558	558			558	
3,2	Jumlah penduduk	1,474,393	1,474,393	1,474,393	1,474,393	1,474,393	
4	Jumlah rata-rata jumlah pengunjung pepustakaan/tahun	28,075	17,068	0	0	11,286	
5	Jumlah Koleksi judul buku perpustakaan	30,675	1,231			31,906	
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (6.1 / 6.2 x 100)	0.38	0.38	0.38		0.38	
6,1	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang bersertifikat	12	12	12		12	
6,2	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	3,179	3,179	3,179		3,179	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Kota Makassar

Melihat dari Visi Walikota Makassar yaitu yaitu Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan dengan cara Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Dimana Dinas

Perpustakaan mempunyai Sasaran Yaitu Membantu Meningkatkan Kualitas dan Aksebilitas Pendidikan maka Pengelolaan perpustakaan saat ini mengalami perubahan signifikan seiring dengan tuntutan untuk mencapai standar internasional. Konsep Perpustakaan bertaraf Internasional atau "World Class Library" mengacu pada perpustakaan yang memiliki Kualitas Layanan, Koleksi, Fasilitas, dan Teknologi Informasi yang setara dengan Perpustakaan-perpustakaan terkemuka di Dunia. Berikut adalah beberapa perkembangan dan langkah yang diambil untuk menuju konsep tersebut:

A. Digitalisasi Koleksi

Proses Digitalisasi Koleksi memungkinkan Pemustaka untuk mengakses informasi secara online dengan mengimplementasikan Pengembangan Perpustakaan Digital yang menyediakan akses ke e-Book, Jurnal Elektronik, dan Database Online sehingga dapat mempermudah Pemustaka mengakses informasi kapan saja dan di mana saja, serta melestarikan Koleksi fisik dari kerusakan.

B. Integrasi Teknologi Informasi

Penerapan Teknologi Informasi yang canggih dalam manajemen perpustakaan. Dengan cara menggunakan Sistem Manajemen Perpustakaan Terintegrasi (Integrated Library System/ILS), RFID untuk Peminjaman dan Pengembalian Buku, serta Aplikasi Mobile Perpustakaan. Sehingga dapat Meningkatkan Efisiensi Operasional, memudahkan Pengelolaan Koleksi, dan memberikan Layanan yang lebih cepat serta akurat kepada Pemustaka.

C. Pengembangan Fasilitas Modern

Dalam Penyediaan Fasilitas yang nyaman dan modern untuk Pemustaka perpustakaan dengan cara penyediaan ruang baca yang nyaman, ruang diskusi, area komputer dengan akses internet cepat, dan fasilitas untuk penyandang Disabilitas, sehingga memberikan Manfaat untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan Pemustaka, serta menarik lebih banyak pengunjung ke Perpustakaan.

D. Koleksi yang Beragam dan Berkualitas

Berbicara tentang Perpustakaan berbicara tentang Koleksi dalam menyediakan Koleksi yang beragam dan berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan Pemustaka saat ini, dapat dilakukan dengan mengakuisisi Buku-buku terbaru, Jurnal Ilmiah, Materi Audiovisual, dan Sumber Daya Digital dari berbagai Bidang Ilmu, ini dapat memenuhi Kebutuhan Informasi dan Penelitian Pemustaka dari berbagai latar belakang dan kepentingan.

E. Layanan Perpustakaan yang Profesional

Untuk Melakukan pemberian layanan yang profesional dan ramah kepada Pemustaka, Peningkatan SDM dengan cara Pelatihan berkelanjutan bagi Staf Perpustakaan dalam penerapan Standar Layanan yang tinggi, dan menggunakan teknologi untuk mendukung interaksi dengan Pemustaka, sehingga dapat Meningkatkan Kepuasan Pemustaka dan Memperkuat citra Perpustakaan sebagai Institusi yang profesional.

F. Kolaborasi dan Jaringan Global

Makassar menuju menjadi Kota Dunia Dinas Perpustakaan dapat melakukan kolaborasi dengan Perpustakaan lain dan Institusi Pendidikan di seluruh dunia, dengan cara Partisipasi dalam Jaringan Perpustakaan Internasional, Pertukaran Koleksi dan Informasi, serta Kerjasama dalam Proyek-proyek Penelitian dan Pendidikan, sehingga dapat Memperluas akses ke sumber daya Informasi Global dan meningkatkan reputasi Perpustakaan di kancah Internasional.

G. Program Pendidikan dan Literasi Informasi

Menyediakan Program Pendidikan dan Literasi Informasi untuk meningkatkan kemampuan Pemustaka dalam memanfaatkan Informasi, dengan cara Mengadakan Workshop, Seminar, dan Kursus tentang Literasi Informasi, Keterampilan Penelitian, dan Penggunaan Teknologi Informasi, sehingga dapat Meningkatkan kemampuan Pemustaka dalam mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif.

H. Sustainabilitas dan Inovasi

Mengadopsi praktik keberlanjutan dan inovasi dalam operasional perpustakaan dengan cara Menggunakan energi terbarukan, praktik ramah lingkungan, dan pengembangan layanan inovatif seperti makerspace dan lab kreatif, dapat Mendukung keberlanjutan lingkungan dan menginspirasi inovasi dalam penggunaan perpustakaan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Dinas Perpustakaan Kota Makassar dapat menuju konsep perpustakaan bertaraf Internasional. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan Kualitas Layanan Perpustakaan tetapi juga memperkuat peran Perpustakaan sebagai Pusat Informasi, Pendidikan, dan Kebudayaan yang relevan di era digital.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Pengembangan pelayanan umum berbasis aplikasi dan jaringan internet, agar informasi perpustakaan dapat diakses secara online. Hal ini pada akhirnya menjadi poin penting untuk mendorong proses pembangunan masyarakat di Kota Makassar menjadikan Masyarakat Makassar dapat Meningkatkan Kualitas dan Aksebilitas Pendidikan, ini menjadi motivasi dan medorong Dinas perpustakaan Kota Makassar untuk sinergis dengan RKPD Kota makassar.

Program Tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan Kota Makassar terdiri atas dua Program Utama dan Satu Program Pendukung, yang dapat dilihat pada tabel T-C.31 dalam pencapaian Tujuan dan Target Sustainable Development Goals (SDGs).

Tabel T-C.31

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Dinas Perpustakaan Kota Makassar

No.	APBD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Perubahan 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DINAS PERPUSTAKAAN				13.244.940.038					13.242.413.358	
1.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Makassar**	**Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**7.983.151.302**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Makassar**	**Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**7.994.217.302**	
			Indek Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	**90%**				**Indek Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)**	**90%**		
			Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	**90%**				**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik**	**90%**		
1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	jumlah Dokumen yang tersedia Jumlah Persentase Ketersediaan Laporan keuangan dan laporan Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	85.356.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	jumlah Dokumen yang tersedia Jumlah Persentase Ketersediaan Laporan keuangan dan laporan Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	49.796.400	
1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	30.742.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	21.502.400	
1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.194.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.694.000	
1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.427.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.927.000	

No.	APBD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Perubahan 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.284.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.784.000	
1.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.224.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.724.000	
1.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	8.174.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2.014.000	
1.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	11.311.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.151.000	
1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Persentase Laporan Keuangan	100%	6.395.481.382	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Persentase Laporan Keuangan	100%	6.435.921.382	
1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/Bulan	6.086.232.182	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/Bulan	6.086.232.182	
1.1.2.2	Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Bulan	178.440.000	Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Bulan	218.880.000	
1.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Bulan	127.162.200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Bulan	127.162.200	
1.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	

No.	APBD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Perubahan 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	3.647.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	3.647.000	
1.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Makassar	Persentase Administari Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	78.491.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Makassar	Persentase Administari Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	87.491.800	
1.1.5.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	-	
1.1.5.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makassar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	6.491.800	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makassar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	6.491.800	
1.1.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	72.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	81.000.000	
1.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Makassar	Persentase Sarana dan Prasarana	90%	286.014.520	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Makassar	Persentase Sarana dan Prasarana	90%	287.980.520	
1.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	14.896.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	14.896.000	
1.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	55.343.320	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	55.343.320	
1.1.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.301.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.301.200	
1.1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	16.440.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	16.440.000	
1.1.6.8	Fasilitas Kunungan Tamu	Makassar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	5.000.000	Fasilitas Kunungan Tamu	Makassar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	5.000.000	

No.	APBD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Perubahan 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	159.034.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	161.000.000	
1.1.6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000	
1.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makassar	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makassar	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	-	
1.1.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	-	
1.1.7.3	Pengadaan Mebel	Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	-	Pengadaan Mebel	Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	-	
1.1.7.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	-	
1.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	865.507.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	865.507.200	
1.1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16.636.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16.636.000	
1.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135.792.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135.792.000	
1.1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan Laporan	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan Laporan	-	
1.1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	713.079.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	713.079.200	
1.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	272.300.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	267.520.000	

No.	APBD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Perubahan 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.380.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.880.000	
1.1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	190.670.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	195.390.000	
1.1.9.3	Pemeliharaan Mebel	Makassar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	-	Pemeliharaan Mebel	Makassar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	-	
1.1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	37.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	31.250.000	
1.1.9.8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	
1.2	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Makassar**	**Angka Budaya Baca Kota Makassar**	**65%**	**4.636.458.776**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Makassar**	**Nilai Tingkat Gemar Membaca**	**84,58%**	**4.981.335.096**	
		Makassar	**Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun**	**860.000 Orang**							
		Makassar	**Jumlah Koleksi perpustakaan yag tersesdia Diperpustakaan Daerah**	**30.212 Judul**							
		Makassar	**Jumlah Pustakawan, tenaga Teknis, dan Pemilaia yang meiliki Sertfikat**	**27 Pustakawan, 47 Tenaga Teknis**							
1.2.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Perpustakaan tingkat Kota yang dikelola dan dibina yang akan terakreditasi	50 sekolah yang terakreditasi	855.993.776	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Perpustakaan tingkat Kota yang dikelola dan dibina yang akan terakreditasi	142 Perpustakaan	1.405.209.096	
1.2.1.4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Makassar	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	72.088.000	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Makassar	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	72.088.000	
1.2.1.6	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	10 Eksemplar	-	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	10 Eksemplar	-	

No.	APBD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Perubahan 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.11	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	142 Perpustakaan	47.502.856	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	142 Perpustakaan	327.738.176	
1.2.1.16	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	119.342.400	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	118.742.400	
1.2.1.18	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Makassar	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	601.070.520	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Makassar	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar	881.350.520	
1.2.1.20	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Makassar	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	6 Layanan	15.990.000	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Makassar	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	6 Layanan	5.290.000	
1.2.1.21	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	-	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	-	
1.2.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Makassar	Persentase Jumlah Pengunjung	50 %	3.780.465.000	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Makassar	Persentase Jumlah Pengunjung	50 %	3.576.126.000	
1.2.2.7	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Makassar	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	10 Perpustakaan	243.059.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Makassar	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	10 Perpustakaan	232.559.000	

No.	APBD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Perubahan 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.9	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	9 Orang	453.521.000	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Makassar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	9 Orang	334.682.000	
1.2.2.10	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Makassar	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	4 Lokus	3.083.885.000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Makassar	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	4 Lokus	3.008.885.000	
1.2.2.11	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kota	Makassar	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	9 Orang	-	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kota	Makassar	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	9 Orang	-	
1.3	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Makassar**	**Jumlah Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Yang Dilestarikan**	**706 Judul**	**625.329.960**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Makassar**	**Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki**	**0,14%**	**266.860.960**	
1.3.1	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Naskah Kuno yang dilestariskan Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang dilestarikan	706 Judul	608.338.760	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Makassar	Jumlah Naskah Kuno yang dilestariskan Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang dilestarikan	706 Judul	261.869.760	
1.3.1.3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Makassar	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	10 Orang	484.691.960	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Makassar	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	10 Orang	234.391.960	
1.3.1.4	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Makassar	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	1 Eksemplar	123.646.800	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Makassar	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	1 Eksemplar	27.477.800	
1.3.2	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Makassar	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Kota Makassar yang dikembangkan	706 Judul	16.991.200	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Makassar	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Kota Makassar yang dikembangkan	706 Judul	4.991.200	
1.3.2.1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Makassar	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	10 Eksemplar	-	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Makassar	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	10 Eksemplar	-	

No.	APBD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan RKPD Perubahan 2024					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.4	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Makassar	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	10 Eksemplar	16.991.200	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Makassar	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	2 Jenis	4.991.200	

BAB III.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERPUSTAKAAN

Dalam Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Indikator Kinerjanya yang akan dilaksanakan pada akhir Tahun 2025, dalam merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Indikator Kinerjanya terdapat beberapa pertimbangan yang perli diperhatikan, antara lain yaitu :

- Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2025-2029 yang dijabarakan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Makassar, yaitu Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan dengan cara Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing dimana Dinas Perpustakaan mempunyai Sasaran Yaitu Membantu Meningkatkan Kualitas dan Aksebilitas Pendidikan;
- Mendukung Program Sustainable Development Goals (RAD SDGs) dengan memperhatikan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan sehingga dapat terwujudnya Aksi Nyata dari Program Sustainable Development Goals (RAD SDGs);
- Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon Isu-isu Strategis Dinas Perpustakaan Kota Makassar;

Dalam mengimplementasikan Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan maka dilakukan Prioritisasi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas Program dan Kegiatan tersebut menjadi Pedoman Pelaksanaan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam merealisasikan Perencanaan Pembangunan. Kegiatan merupakan bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari Pencapaian Sasaran yang terukur pada suatu Program menjadi masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam Capaian Kinerja. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2025.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan (RENJA-Perubahan) Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2025 yang disertai Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta sumber pendanaan dapat dilihat pada Tabel T-C.33 berikut :

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan Tahun 2025

dan Prakiraan Perubahan Akhir Tahun 2025

Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Perubahan Rencana Akhir Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23				**Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan**				**13.244.940.038**	**APBD**			**10.772.402.000**
2.23	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**Makassar**	**100%**	**7.983.151.302**	**APBD**		**100%**	**8.150.976.764**
					Indek Kepuasan ASN Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)		**90%**		**APBD**		**90%**	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		**90%**		**APBD**		**90%**	
2.23	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Dokumen yang tersedia Jumlah Persentase Ketersediaan Laporan keuangan dan laporan Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	7 Dokumen	85.356.400	APBD		7 Dokumen	49.796.400
2.23	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar	3 Dokumen	30.742.400	APBD		3 Dokumen	21.502.400

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Perubahan Rencana Akhir Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar	1 Dokumen	8.194.000	APBD		1 Dokumen	4.694.000
2.23	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar	1 Dokumen	8.427.000	APBD		1 Dokumen	4.927.000
2.23	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Makassar	1 Dokumen	9.284.000	APBD		1 Dokumen	5.784.000
2.23	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Makassar	1 Dokumen	9.224.000	APBD		1 Dokumen	5.724.000
2.23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	1 Dokumen	8.174.000	APBD		1 Dokumen	2.014.000
2.23	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	1 Laporan	11.311.000	APBD		1 Laporan	5.151.000
2.23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Laporan Keuangan	Makassar	100%	6.395.481.382	APBD		100%	6.425.972.444
2.23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	27 Orang/Bulan	6.086.232.182	APBD		27 Orang/Bulan	6.086.233.244

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Perubahan Rencana Akhir Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	1	2.02	2	Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Makassar	14 Bulan	178.440.000	APBD		14 Bulan	208.930.000
2.23	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Makassar	14 Bulan	127.162.200	APBD		14 Bulan	127.162.200
2.23	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar	12 Dokumen	3.647.000	APBD		12 Dokumen	3.647.000
2.23	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administari Kepegawaian Perangkat Daerah	Makassar	90%	78.491.800	APBD		90%	183.491.800
2.23	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makassar	4 Dokumen	6.491.800	APBD		4 Dokumen	6.491.800
2.23	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Makassar	8 Orang	72.000.000	APBD		8 Orang	177.000.000
2.23	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana	Makassar	90%	286.014.520	APBD		90%	362.980.520
2.23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Makassar	7 Paket	14.896.000	APBD		7 Paket	14.896.000
2.23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Makassar	2 Paket	55.343.320	APBD		2 Paket	55.343.320
2.23	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Makassar	2 Paket	10.301.200	APBD		2 Paket	10.301.200

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Perubahan Rencana Akhir Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Makassar	8 Dokumen	16.440.000	APBD		8 Dokumen	16.440.000
2.23	1	2.06	8	Fasilitas Kunungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	20 Laporan	5.000.000	APBD		20 Laporan	5.000.000
2.23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar	10 Laporan	159.034.000	APBD		10 Laporan	236.000.000
2.23	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Makassar	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000
2.23	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Makassar	100%	865.507.200	APBD		100%	861.215.600
2.23	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	12 Laporan	16.636.000	APBD		12 Laporan	16.636.000
2.23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Makassar	12 Laporan	135.792.000	APBD		12 Laporan	135.792.000
2.23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Makassar	12 Laporan	713.079.200	APBD		12 Laporan	708.787.600
2.23	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Makassar	100%	272.300.000	APBD		100%	267.520.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Perubahan Rencana Akhir Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Makassar	1 Unit	44.380.000	APBD		1 Unit	40.880.000
2.23	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Makassar	6 Unit	190.670.000	APBD		6 Unit	195.390.000
2.23	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Makassar	4 Unit	37.250.000	APBD		4 Unit	31.250.000
2.23	**2**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Angka Budaya Baca Kota Makassar**	**Makassar**	**65%**	**4.636.458.776**	**APBD**	**Nilai Tingkat Gemar Membaca**	**84,58%**	**2.396.191.776**
					Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	**Makassar**	**860.000 Orang**					
					Jumlah Koleksi perpustakaan yag tersesdia Diperpustakaan Daerah	**Makassar**	**30.212 Judul**					
					Jumlah Pustakawan, tenaga Tekhnis, dan Pemilaia yang meiliki Sertfikat	**Makassar**	**27 Pustakawan, 47 Tenaga Teknis**					
2.23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan tingkat Kota yang dikelola dan dibina yang akan terakreditasi	Makassar	50 sekolah yang terakreditasi	855.993.776	APBD		50 sekolah yang terakreditasi	603.412.576
2.23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Makassar	10 Perpustakaan	72.088.000	APBD		10 Perpustakaan	36.044.000

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Perubahan Rencana Akhir Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	2	2.01	11	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Makassar	142 Perpustakaan	47.502.856	APBD		142 Perpustakaan	25.224.856
2.23	2	2.01	16	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Makassar	100 Orang	119.342.400	APBD		100 Orang	38.491.200
2.23	2	2.01	18	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Makassar	1000 Eksemplar	601.070.520	APBD		1000 Eksemplar	498.362.520
2.23	2	2.01	20	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Makassar	6 Layanan	15.990.000	APBD		6 Layanan	5.290.000
2.23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pengunjung	Makassar	50 %	3.780.465.000	APBD		50 %	1.792.779.200
2.23	2	2.02	7	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Makassar	10 Perpustakaan	243.059.000	APBD		10 Perpustakaan	246.462.600

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Perubahan Rencana Akhir Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	2	2.02	9	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Makassar	9 Orang	453.521.000	APBD		9 Orang	334.682.000
2.23	2	2.02	10	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Makassar	4 Lokus	3.083.885.000	APBD		4 Lokus	1.211.634.600
2.23	**3**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Jumlah Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Yang Dilestarikan**	**Makassar**	**706 Judul**	**625.329.960**	**APBD**	**Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki**	**0,14%**	**225.233.460**
2.23	3	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang dilestariskan Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang dilestarikan	Makassar	100 Persen 706 Judul	608.338.760	APBD		100 Persen 706 Judul	220.242.260
2.23	3	2.01	3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Makassar	10 Orang	484.691.960	APBD		10 Orang	186.360.960
2.23	3	2.01	4	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Makassar	1 Eksemplar	123.646.800	APBD		1 Eksemplar	33.881.300

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegaitan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Perubahan Rencana Akhir Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	3	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Kota Makassar yang dikembangkan	Makassar	1 Kegiatan 706 Judul	16.991.200	APBD		1 Kegiatan 706 Judul	4.991.200
2.23	3	2.02	4	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	Makassar	10 Eksemplar	16.991.200	APBD		10 Eksemplar	4.991.200

BAB IV.

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-Perubahan) Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang meningkatkan Pelayanan pada Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada Akhir Tahun 2025 mendatang. Rencana Kerja Perubahan (RENJA-Perubahan) ini disusun dengan tetap berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan (RKPD-Perubahan) Kota Makassar Tahun 2025.

Kesadaran dari semua pihak untuk mewujudkan Program Dinas Perpustakaan sangat erat hubungannya dengan pembentukan Karakter Masyarakat melalui Budaya Membaca yang dapat menumbuhkembangkan kemandirian serta kebudayaan yang menjurus pada pembentukan mental masyarakat yang pada akhirnya menjadi Individu yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia, Sehat, Berilmu, Cakap, Kreatif, Mandiri, serta menjadi Warga Negara yang Demokratis dan Bertanggung Jawab dalam Mendukung penyelenggaraan Pendidikan Nasional sesui dengan amanat UUD Tahun 1945 yaitu Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Langkah Startegis dalam rangka mendukung Revolusi Mental melalui Perpustakaan adalah Meningkatkan Minat Baca yang dilaksanakan secara baik.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakan Tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan atas Kinerja Tahunan dan Lima Tahun.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Dinas Perpustakaan, penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-Perubahan) diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan zaman.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan (RENJA-Perubahan) Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat, dan mampu mendorong pencapaian Visi Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2025 - 2029 : "Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan" dengan cara Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Dimana Dinas Perpustakaan mempunyai Sasaran Yaitu Membantu Meningkatkan Kualitas dan Aksebilitas Pendidikan. Terkhusus pada Dinas Perpustakaan dalam mewujudnya Masyarakat Cerdas Melalui Gerakan Budaya Gemar Membaca Dengan Memberdayakan Perpustakaan.

4.1 Catatan Ketersediaan Anggaran

Program-program dan Kegiatan-kegiatan Indikatif yang tersusun dalam Rencana Kerja Perubahan (RENJA-Perubahan) Tahun 2025 dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar atau sumber dana lain, terjalinnya Koordinasi dan Mengendalikan Kebijakan di bidang Perpustakaan yang meliputi Analisis Pembinaan Perpustakaan dan Peningkatan Minat Baca serta Pengembangan dan Pemeliharaan Koleksi dan Pemeliharaan Naskah Kuno

bertujuan dapat Meningkatkan Budaya Gemar Membaca serta Peningkatan Minat Baca.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-Perubahan) secara Umum tetap mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku :

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2025-2050
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029
- Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2021-2026
- Rencana Kerta Perangkat Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Makassar Tahun 2025
- Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2025
- Mempertimbangkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar
- Sustainable Development Goals (RAD SDGs)
- Hasil Evaluasi Renja Tahun 2023 dan 2024

Untuk mencapai Target dan Sasaran sesuai dengan arah Kebijakan Pembangunan Kota Makassar Tahun 2025 maka seluruh Program dan Kegiatan diarahkan pada arah tersebut dan menjadi kewajiban dan komitmen untuk menjaga konsistensi agar berjalan sesuai rencana kerja, serta melakukan Pengendalian, Pengawasan, dan Pelaporan yang Akuntabel dan Transparan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-Perubahan) yang telah ditetapkan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Komitmen Pimpinan dan seluruh Staf Dinas Perpustakaan Kota Makassar serta dukungan dari Pimpinan Eksekutif, Pimpinan Legistatif, segenap Aparatur Daerah, Partisipasi Masyarakat, dan Pemerhati Bidang Perpustakaan serta swasta sangat dibutuhkan dalam mengimplemantasikan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-Perubahan) ini, dalam rangka melaksanakan kewenangan dan urusan di Bidang Perpustakaan sehingga dapat berjalan lebih Optimal dalam melaksanakan Pembangunan yang Berkelanjutan (Suistanable Development) di Kota Makassar, maka di perlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Meningkatkan kesadaran Masyarakat akan Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara, sehingga dapat terwujud mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintah;
- Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Upaya yang makin intens dapat dilakukan melalui Pendidikan Formal, Pembinaan Teknis, Pelatihan, Seminar serta Kegiatan lainnya yang menunjang Peningkatan Kinerja Aparatur
- Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang lebih signifikan untuk menunjang penyelenggaran Administrasi dan Teknis dalam lingkup kerja Dinas Perpustakaan Kota Makassar;

- Melakukan Koordinasi dengan SKPD terkait Penyelenggaraan, Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Teknis di Bidang Perpustakaan Berdasarkan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-Perubahan) Tahun 2025.

Makassar, 28 Juli 2025
Kepala Dinas Perpustakaan
Kota Makassar

Dr. Aryati Puspasari Abady, S.Pi., M.Si.
NIP. 19730617 199803 2 007

PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Dinas Kesehatan



RENCANA KERJA

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang 1
1.2.Landasan Hukum 2
1.3.Maksud dan Tujuan 5
1.4.Sistematika Penulisa 5

BAB II. EVALUASI RENJA Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2025

2.1 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program / Kegiatan Renja Dinas Kesehatan Kota Makassar 6

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7
2. Program Penemuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 9
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan 18
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman 19
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 23

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 25
2. Program Penemuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 25
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan 29
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman 30
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 31
6. Rumah Sakit Umum Daya Makassar 31

BAB IV. PENUTUP 32

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dipandang perlu untuk diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2252/188.4.45/TAHUN 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, dengan menetapkan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana di maksud Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan.:
1. Wakil Wali Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 1799/188.4.45/TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 2252/188.4.45/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025.

No.	Perangkat Daerah
1	2
1.	Dinas Pendidikan Kota Makassar
2.	Dinas Kesehatan Kota Makassar
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4.	Dinas Penataan Ruang Kota Makassar
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
7.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
9.	Dinas Sosial Kota Makassar
10.	Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar
12.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar
13.	Dinas Pertanahan Kota Makassar
14.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar
17.	Dinas Perhubungan Kota Makassar
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Makassar
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar
22.	Dinas Kebudayaan Kota Makassar
23.	Dinas Perpustakaan Kota Makassar
24.	Dinas Kearsipan Kota Makassar
25.	Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar
26.	Dinas Pariwisata Kota Makassar
27.	Dinas Perdagangan Kota Makassar
28.	Sekretariat Daerah Kota Makassar
29.	Sekretariat DPRD Kota Makassar
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar

31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar
32.	Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar
33.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD Kota Makassar
34.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
35.	Inspektorat Daerah Kota Makassar
36.	Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
37.	Kecamatan Bontoala Kota Makassar
38.	Kecamatan Makassar Kota Makassar
39.	Kecamatan Mamajang Kota Makassar
40.	Kecamatan Manggala Kota Makassar
41.	Kecamatan Mariso Kota Makassar
42.	Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
43.	Kecamatan Rappocini Kota Makassar
44.	Kecamatan Tallo Kota Makassar
45.	Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
46.	Kecamatan Tamalate Kota Makassar
47.	Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar
58.	Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
49.	Kecamatan Wajo Kota Makassar
50.	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar
51.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

WALIKOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. Pembangunan dibidang kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaan, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan merupakan indikator tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperluas cakupan pembangunan kesehatan dan meningkatkan kualitasnya antara lain melalui upaya mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat luas untuk sehat. Salah satu tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu, merata dan terjangkau oleh setiap individu, keluarga serta masyarakat, dan membangun kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan privat sektor.

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Kota Makassar tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja Dinas Kesehatan, tetapi merupakan kontribusi dari semua sektor, berdasarkan fungsi dan peranannya masing-masing. Pembangunan berwawasan kesehatan mengandung makna bahwa setiap pembangunan harus berkontribusi terhadap derajat kesehatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 merupakan revisi dari Rencana Kerja Pokok Tahun 2025 dengan menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara lebih efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan dan target indikator pembangunan bidang kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka RKPD dan Perubahan RKPD merupakan Pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan APBD maupun APBD perubahan pada tahun berkenaan. Dengan uraian tersebut, maka kedudukan Renja ataupun perubahan Renja SKPD adalah merupakan rincian mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang kesehatan pada SKPD yang menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RenjaSKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2025 antara lain :

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166)
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3046 Tahun 2024 perubahan kedua Atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
25. Peraturan Daerah Kota Makasssar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Walikota Makassar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kunjungan Rumah 24 Jam (home care) di Kota Makassar;
28. Peraturan Walikota Makassar Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 83).
29. Peraturan Walikota Makassar Nomor 123 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 123)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Keschatan Kota Makassar Tahun 2025 adalah :

- Mengevaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebagai salah satu pertimbangan dalam penentuan perubahan rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025
- Menetapkan perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2025 serta anggaran yang akan digunakan
- Menetapkan indikator capaian program/kegiatan yang akan dicapai tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika/susunan penyajian dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini antara lain:

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I 2025

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Pengukuran Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2025 didasarkan pada Pengukuran Kinerja Program sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan juga tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Upaya untuk memperluas cakupan pembangunan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terus dilakukan antara lain dengan mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat luas untuk sehat, pembangunan bidang kesehatan di Kota Makassar juga diselenggarakan dengan membangun kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan privat sektor yang diharapkan meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Makassar, sehingga target Capaian Kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal.

2.1 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan dana Program/Kegiatan Renja Dinas Kesehatan Kota Makassar

Sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan tertuang dalam Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pada Tahun 2025. Dinas Kesehatan Kota makassar melaksanakan sebanyak 5 program terdiri dari 1 program penunjang dan 4 program utama, dengan total anggaran perubahan Tahun 2025 sebesar Rp.647.025.321.335, realisasi sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 adalah sebesar Rp 72.336.995.711.- atau sebesar 11,18% dan untuk realisasi kinerja adalah sebesar 11,19 %.

Dinas Kesehatan memiliki empat program strategis dan satu program penunjang yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Adapun realisasi kinerja maupun kinerja anggaran pada program-program tersebut diurai sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program penunjang urusan pemerintah daerah mencakup 3 indikator:

1) Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas
2) Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
3) Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah

Adapun capaian dari ketiga indikator tersebut di atas sampai dengan triwulan pertama Tahun 2025 tergambarkan dengan tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Target (%)	Realisasi (%)
1	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90	22
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90	25
3	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100	22

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk program penunjang adalah sebesar Rp. 288.117.357.618.- dengan capaian Rp. 58.793.771.530,- atau sebesar 20,41%.

Kegiatan pada Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat aderah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   - Pengamanan Barang Milik Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Faktor Pendukung :

- Koordinasi dengan Puskesmas berjalan dengan baik khususnya terkait pelaporan kinerja, data kepegawaian maupun pelaporan keangan.
- Terbentuknya tim verifikasi dengan pembagian tugas yang jelas

Faktor Penghambat:

- Proses survei lokasi untuk penambahan daya listrik puskesmas yang membutuhkan waktu cukup lama.
- Belanja sewa gedung untuk puskesmas yang akan direnovasi belum dapat direalisasikan karena belum ada kepastian jadwal renovasi

Tindak Lanjut :

- Mengusulkan segera pada tahun berikutnya, pejabat defenitif untuk Puskesmas

- Percepatan proses penambahan daya/instalasi listrik pada beberapa puskesmas
- Pengusulan penghapusan asset untuk yang sudah tidak fungsional atau kendaraan yang sudah tidak beroperasi

2. ***Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat***

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat memuat 13 indikator yaitu :

- Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
- Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan
- Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan
- Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan
- Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan
- Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan
- Persentase usia produktif 15 – 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan
- Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan
- Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan
- Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan
- Persentase Orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan
- Persentase orang dengan resiko tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
- Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan

Adapun capaian dari indikator tersebut di atas pada Tahun 2025 tergambarkan dengan tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Target (%)	Realisasi (%)
1	Capaian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	96	99,32
2	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan	100	23,41
3	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	100	23,08
4	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	100	24,19

No	Indikator Kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Target (%)	Realisasi (%)
5	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan	100	19,20
6	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan	100	22,32
7	Persentase usia produktif 15 – 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan	100	20,45
8	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan	100	23,57
9	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan	100	18,26
10	Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan	100	31,02
11	Persentase Orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan	100	5,16
12	Persentase orang dengan resiko tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan	100	29,05
13	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan	100	23,9

Capaian indikator cakupan Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2025 tercatat sebesar 99.32% dari target 96%, dari sejumlah 1.477.861 jiwa penduduk, yang telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional/ JKN sejumlah 1.467.839 orang, dengan perincian kepesertaan sebagai berikut:

- PBI PEMDA = 236.810 peserta
  PBI JK = 324.443 peserta
  BP (Bukan Pekerja : Investor, pemberi kerja, veteran, perintis kemerdekaan dan pensiunan) = 61.160 peserta
- PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah / Pekerja Informal) = 362.994 peserta
  PPU BU = 301.502 peserta
  PPU PN (Pekerja Penerima Upah: ASN, TNI, POLRI, Pekerja Swasta, BUMN dan BUMD) = 181.630 peserta

Adapun terkait 12 indikator lainnya yang juga merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal, capaian pada sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil, dari sejumlah 27.684 sasaran ibu hamil, yang telah mendapatkan pelayanan pada Tahun 2025 sejumlah 6430 atau 23,41%.
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin, capaian pada tahun 2025 sebesar 23,08%, telah dilayani sejumlah 6.100 ibu bersalin dari sasaran sejumlah 26.428 ibu.

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, dari sasaran sejumlah 25.168 pada Tahun 2025, yang mendapatkan pelayanan kesehatan sejumlah 6.089 atau 24,19%.
4. Pelayanan kesehatan balita, dari target capaian sasaran tahun 2025 sebanyak 112.481, sasaran yang telah capai adalah sebanyak 21.594 atau sebesar 19,20% balita yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan.
5. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar akan dilakukan pengukuran sampai dengan Tahun 2025, dari sejumlah 197.812 sasaran tahun 2025, yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sejumlah 44.146 diperoleh capaian sebesar 22,32%.
6. Pelayanan kesehatan usia 15-59 tahun, dari sejumlah 971.476 sasaran tahun 2025, yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sejumlah 198.674 atau 20.45% dari taget sebesar 100%.
7. Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan, diperoleh capaian sebesar 23,51% pada Tahun 2025, dengan sejumlah 35.924 usia lanjut mendapatkan skrining kesehatan dari sejumlah 152.427 sasaran.
8. Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan diperoleh capaian pada Tahun 2025 sebesar 18,26% dengan sejumlah 60.328 penderita hipertensi yang dilayani dari sejumlah 330.427 sasaran.
9. Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan diperoleh capaian pada Tahun 2025 sebesar 31 02% dengan sejumlah 8.366 penderita DM yang dilayani dari sejumlah 26.974 sasaran.
10. Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan, telah dilayani sejumlah 176 ODGJ dari sejumlah 3.398 sasaran atau 5,17%.
11. Persentase orang dengan resiko Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan, diperoleh capaian pada Tahun 2025 29,05% dengan sejumlah 11.253 yang dilayani dari sejumlah 38.736 sasaran.
12. Persentase orang dengan resiko HIV mendapatkan pelayanan kesehatan, dari sejumlah 42.487 sasaran, yang telah dilayani sejumlah 10.156 atau 23,09%.

Adapun kegiatan-kegiatan pada Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) adalah:

1) Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

- Pembangunan puskesmas.
- Pembangunan fasilitas keschatan lainnya.
- Pengembangan Puskesmas

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi.

Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Media Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan.

Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan.

Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan

Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibarasi

2) Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi dengan sub kegiatan
   - Pengelolaan Sistem Informasi kesehatan.
3) Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota dengan beberapa sub kegiatan yaitu :
   - Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
   - Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
   - Pengelolaaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
   - Pengelolaan pelayanan kesehatan ballita
   - Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

     Pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif
   - Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut

     Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi

     Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
   - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan ganggunan jiwa berat

     Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
   - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV
   - Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
   - Pengelolaan pelayanan keschatan gizi masyarakat
   - Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
   - Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
   - Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
   - Pengelolaan pelayanan keschatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya
   - Pengelolaan surveilans kesehatan

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Pengelolaan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
- Pengelolaan jaminan keschatan masyarakat
- Deteksi Dini penyalahgunaan Narkotika, Priskotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah
Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional
- Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat
Penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan
Operasional pelayanan rumah sakit
- Operasional pelayanan puskesmas
- Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya
- Pelaksanann akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota
- Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)
Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah
- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
- Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria
- Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
- Koordinasi dan Sinkronisasi penerapan SDM bidang Kesehatan Kabupaten/Kota.

4) Penertiban izin rumah sakit kelas C,D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten yang terdiri dari sub kegiatan yaitu :
- Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C,D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
Peningkatan tata kelola rumah sakit kelas C,D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
- Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan
- Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan

Faktor pendukung, penghambat dan rencana tindak lanjut pencapaian program serta pelaksanaan kegiatan pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, terurai sebagai berikut :

Faktor Penghambat:

- Adanya Kebijakan terkait Pergeseran Pagu Anggaran Kegiatan, SPD Kegiatan yang belum ada pada sub kegiatan (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga).
- Belum masuk Anggaran Kas Pelaksanaan Kegiatan pada sub kegiatan (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK), Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, dan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah).
- Adanya beberapa item obat mengalami kenaikan harga pada sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan.
- Armada Distribusi Kurang Efektif (Rusak) dan adanya rencana pemindahan kantor ke Gedung Baru pada sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan.
- Keterlambatan perencanaan dan koordinasi diawal tahun terkait pelaksanaan kegiatan dan Terkendala masalah administratif serta anggaran pad sub kegiatan (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB),Pengelolaan Surveilans Kesehatan, Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional, Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) dan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah).
- Masih ada tenaga kesehatan yang belum paham tentang tata laksana program, masih perlu kolaborasi lintas sektor dalam penanganan TB pada sub kegiatan (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis).
- Di awal tahun masih pembenahan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV.

- Di awal tahun masih pembenahan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV).
- Masih ada tenaga kesehatan yang belum paham ttg tata laksana program pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria.
- Dalam pelaksanaan program Kawasan tanpa Rokok yang menjadi hambatan adalah belum adanya pengawasan dan pemantauan yang aktif serta sanksi tegas terhadap implementasi Kawasan Tanpa Rokok di 7 tatanan pada sub kegiatan Pengelolaan kawasan tanpa rokok).
- Dikarenakan peralihan sistem e-catalog dari versi 5 ke versi 6 sehingga terjadi permasalahan pada pengadaan seluruh sub kegiatan yang menggunakan e-catalog.

Faktor Pendorong :

- Untuk mendukung Capaian SPM bidang Kesehatan dan Kinerja Pemerintah Kota pada sub kegiatan (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat).
- Masih bisa menggunakan catalog versi 5 yang lebih mudah pada sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Dilakukan penyesuaian harga pada sub kegaiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan.
- Dilakukan perbaikan terhadap armada distribusi pada sub kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan.
- Ketersediaan sumberdaya (tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker yang kompeten pada sub kegiatan (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus)
- Puskesmas dan klinik yang menyediakan layanan skrining dan pemantauan hipertensi secara rutin pada sub kegiatan (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus).

- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengendalian tekanan darah pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengendalian Diabetes Melitus pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus).
- Terdapat beberapa kegiatan dengan support penganggaran lain yang bisa dilaksanakan terkait layanan skrining HIV pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV).
- Tersedianya SDM yang berkompeten & sesuai skill pada sub kegiatan (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB), Pengelolaan Surveilans Kesehatan, Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan, Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional, Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) dan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah).
- Adanya dukungan dan kerjasama yang baik dengan petugas epidemiologi puskesmas dan lintas program pada sub kegiatan (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB), Pengelolaan Surveilans Kesehatan, Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan, Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional, Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) dan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah).
- Terdapat beberapa kegiatan dengan support penganggaran lain yang bisa dilaksanakan, terkait pengobatan ODHIV pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV).

Tindak lanjut:

- Sudah dijadwalkan untuk proses Pelaksanaan Kegiatan, Perubahan metode Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada sub kegiatan (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi

Masyarakat, dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga).

- Dilakukan penyesuaian sesuai dengan nilai pagu pada sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan.
- Dilakukan perbaikan terhadap armada sesuai dengan anggaran yang tersedia pada sub kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan.
- Dilakukan penyesuaian sesuai dengan nilai pagu pada sub kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan.
- Dilakukan perbaikan terhadap armada sesuai dengan anggaran yang tersedia pada sub kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan.
- Akan dimaksimalkan pelaksanaan kegiatan ditriwulan selanjutnnya dengan : 1. Menyusun jadwal kegiatan Program pengelolaan Diabetes Melitus 2 Melengkapi administrasi pengajuan kegiatan pada sub kegiatan (Pengelolaan Pelavanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus).
- Melaksanakan pertemuan terkait program TB pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.
- Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan bersumber APBD TA 2025, untuk kegiatan terkait pencegahan dan skrining HIV.
- Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB).
- Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan pada sub kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan.
- Memaksimalkan pelaksanaan kegiatanPengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan.
- Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan.
- Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal).
- Memaksimalkan pelaksanaan kegiatanKewaspadaan Dini dan Respon Wabah.
- Melaksanakan pertemuan terkait program TB pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis.
- Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan bersumber APBD TA 2025, terkait pengobatan ODHIV.

- Melaksanakan pertemuan terkait sosialisasi program malaria.
- Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam penerapan implementasi Kawasan Tanpa Rokok.

Untuk mendukung pencapaian kinerja Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat pada Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp.348.779 230.037,00- dan realisasi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp.26.794.469.776,00,- atau sebesar 7,68%. Program ini memuat proporsi anggaran terbesar untuk kegiatan Operasional Puskesmas, Operasional Rumah Sakit serta Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang merupakan pembayaran premi Jaminan Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran atau masyarakat kurang mampu. Pada prinsipnya pelayanan Puskesmas maupun Rumah Sakit Umum Daerah berjalan sebagaimana mestinya sekalipun secara keuangan belum optimal dalam realisasi.

3. ***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan***

Pelaksanaan berbagai kegiatan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan Tahun 2025 didukung alokasi anggaran sebesar Rp.309.538.160,00, untuk realisasi sampai dengan triwulan 1 belum ada.

Indikator kinerja program peningkatan kapasitas sumber data manusia kesehatan adalah persentase sumber daya manusia keehatan yang mendapat Pendidikan dan pelatihan teknis. Adapun target capaian dari indikator tersebut adalah 95% sedangkan capaian sampai dengan triwulan pertama belum ada.

Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga yang bertanggung jawab dan kewenangan harus terus ditingkatkan melalui pembinaan dan pengawasan dengan melakukan monitoring data tenaga kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan melalui kerjasama dengan organisasi profesi dan kredensialing atau proses untuk melihat pemenuhan standar dan mengukur apakah telah memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dilakukan tim Dinas Kesehatan bersama BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial).

Faktor Penghambat :

- Perubahan kebijakan sehingga dilakukan pergeseran rekening belanja pada sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Pelaksanaan Uji Kompetensi Fungsional Bidang Kesehatan per tahun 2025 sdh berbasis CAT sehingga butuh penyesuaian dan

koordinasi dengan Dinkes Provinsi dan Kemenkes pada sub kegiatan.

Tindak lanjut:

- Koordinasi yang kontinyu dengan Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan dan Kemenkes pada sub kegiatan pada sub kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yaitu:

1) Pemberian izin praktik tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan:
   - Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan
2) Perencanaan kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
   - Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan
3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan sub kegiatan :
   - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Indikator kinerja program terdiri dari :

- Persentase ketersediaan kebutuhan farmasi pada RSUD dan Puskesmas.
- Persentase ketersediaan kebutuhan alat kesehatan pada RSUD dan Puskesmas

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.528.820.320,00, dimana capaian tahun 2025 belum ada.

Adapun capaian dari indikator tersebut di atas sampai dengan Triwulan Pertama Tahun 2025 tergambarkan dengan tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Target (%)	Realisasi (%)
1	Persentase ketersediaan kebutuhan farmasi pada RSUD dan Puskesmas	100	93.14
2	Persentase ketersediaan kebutuhan alat kesehatan pada RSUD dan Puskesmas	64	78,10

Terkait persentase ketersediaan kebutuhan farmasi pada RSUD dan Puskesmas selama Triwulan Pertama tahun 2025, RSUD dan puskesmas telah melakukan belanja obat dan Bahan Habis Pakai/BHP untuk memenuhi kebutuhan farmasi baik melalui penganggaran APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mekanisme BLUD dan dana JKN, dengan capaian persentase ketersediaan kebutuhan farmasi (obat dan bahan habis pakai) sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 93.13% dari target 100%, nilai tersebut merupakan rata-rata capaian ketersediaan kebutuhan farmasi di seluruh puskesmas dan pada RSUD dengan rincian: persentase ketersediaan kebutuhan obat di puskesmas sebesar 97.52% dan BMHP sebesar 100%, adapun pada RSUD untuk persentase ketersediaan obat sebesar 93.44% dan BMHP 81.60%. Ketersediaan obat yang direncanakan Dinas Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan puskesmas, terealisasi 118 item jenis obat dari 121 item jenis obat yang direncanakan atau 97.52%. Untuk bahan habis pakai Puskesmas, yang terealisasi 100%. Pada RSUD, sampai akhir Tahun 2024 dari target sebanyak 488 item jenis obat yang terealisasi sebanyak 456 jenis obat atau 93.44% dan untuk Bahan Medis Habis Pakai/BMHP dari yang direncanakan oleh RSUD sebanyak 375 yang terealisasi atau dapat dipenuhi sebanyak 306 atau 62.58%.

Adapun pengukuran indikator persentase ketersediaan alat kesehatan pada RSUD dan puskesmas dengan target 60%, diperoleh capaian 78.10%. Berdasarkan data pada aplikasi sarana, prasarana dan alat Kesehatan (Aspak), ketersediaan alat kesehatan pada seluruh puskesmas diketahui 76.19% dan persentase ketersediaan alat kesehatan rumah sakit sebesar 80% (sesuai data pada aspak) sehingga jika dihitung rata-rata persentase ketersediaan alat kesehatan pada RSUD dan Puskesmas tahun 2024 adalah 78.10%.

Berbagai faktor yang menjadi kendala maupun pendukung pencapaian program serta rencana tindak lanjut pelaksanaan

kegiatan dan pencapaian indikator pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yaitu :

Faktor pendorong:

- Perlu dilakukan percepatan penerbitan SK Walikota dan DPA Perubahan pada sub kegaiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
- Perlu dilakukan percepatan penerbitan SK Walikota pada sub kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.

Faktor Penghambat :

- Adanya efesiensi Anggaran dan Sekaligus menunggu SK Walikota terbit pada sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
- Efisiensi Anggaran untuk Binwas Toko Alkes dan Optikal Pada sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
- Efisiensi Anggaran untuk Binwas PRT PKRT pada sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga.
- Adanya efesiensi anggaran dan Menunggu DPA Perubahan Terbit pada sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

Tindak lanjut:

- Sementara proses penandatanganan pada sub kegaiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
- Akan dilaksanakan segera jika DPA perubahan sudah terbit pada sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

- Sementara proses penandatanganan pada sub kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.

Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman antara lain :

1. Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional(UMOT)
   - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
2. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
   - Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga
3. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai legal izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
   - Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
4. Perbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan sentra Makanan Jajanan.
   - Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan.
5. Penerbitan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pusat Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah tangga.
   - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.

5. ***Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan***

Indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan mencakup 2 indikator yaitu:

(1) Persentase posyandu aktif

(2) Cakupan bayi mendapat ASI Eksklusif.

Pencapaian target kinerja program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan untuk tahun 2025 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.290.375.200.00, dimana terkait capaian belum ada samapi triwulan pertama tahun 2025.

Adapun capaian dari ketiga indikator tersebut di atas sampai dengan triwulan ketiga Tahun 2025 tergambarkan dengan tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Target (%)	Realisasi (%)
1	Persentase posyandu aktif	100	100
2	Cakupan bayi mendapat ASI Eksklusif	65	71,44

Capaian indikator posyandu aktif yaitu 100% dengan jumlah posyandu se kota Makassar adalah 1012 dengan rincian sebanyak 453 posyandu purnama dan 559 posyandu mandiri dengan sejumlah 5060 kader.

Adapun cakupan bayi yang mendapatkan Asi Eksklusif adalah 71,44% dengan sejumlah 2.861 bayi yang masih memperoleh ASI eksklusif dari sejumlah 4.005 bayi yang direcall.

Beberapa sub Kegiatan yang dilaksanakan pada program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran, serta Masyarakat dan Lintas Sektor Daerah Kabupaten/Kota
  - Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
- Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

Faktor pendukung:

- SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan pada sub kegiatan (Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi,

Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat).

Faktor Penghambat:

- Adanya efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan berubah rincian anggaran dan kegiatan pada sub kegiatan (Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat).

Rencana Tindak Lanjut:

- Akan segera dilaksanakan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan (Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat).

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dari sejumlah 5 program yang dilaksanakan Dinas Kesehatan pada Tahun 2025, keseluruhan mengalami perubahan pada beberapa sub kegiatab sebagaumana tertuang dalam Renja Perubahan ini. Beberapa sub kegiatan yang mengalami perubahan dari Anggaran Pokok Dinas Kesehatan Tahun 2024, tertuang menurut program sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**
   Total anggaran pokok Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp. 210.193.406.838.00,- dan total anggaran perubahan termasuk yang sudah mengalami pergeseran pada perubahan parsial adalah sejumlah Rp. 209.814.906.838.00,- atau secara total mengalami pengurangan sejumlah Rp. 378.500.000,- . Kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan:

   1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, jumlah anggaran pokok sejumlah Rp.49.828.000,- berkurang sejumlah Rp.39.000.000,- sehingga anggaran berubah menjadi Rp.10.828.000,-

   1.2 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, jumlah anggaran pokok Rp.528.300.000,-, berkurang sejumlah Rp.235.800.000,- karena adanya efisiensi pada pergeseran, kemudian mengalami penambahan anggaran pada perubahan sebanyak Rp.450.000.000,- untuk kegiatan bimbingan teknis pada petugas gizi sehingga anggaran menjadi Rp.742.500.000,-

   1.3 Sosialisasi peraturan perundang-undangan, jumlah anggaran pokok sebesar Rp.108.000.000,- berubah menjadi Rp.0,-.

   1.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Anggaran pokok Rp.250.000.000,- berkurang anggaran sejumlah Rp.64.000.000,-, dan berubah anggarannya menjadi Rp.186.000.000,-.

2. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**
   Anggaran pokok untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat adalah Rp 309.059.828.727,- dan jumlah anggaran perubahan Rp.342 792.321.727,- atau bertambah sejumlah Rp.33.732.493.000,-

Berbagai sub kegiatan yang telah mengalami perubahan pada parsial dan diusulkan untuk anggaran perubahan yaitu:

2.1 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengalami penambahan anggaran sejumlah Rp. 971.850.000,- untuk pengadaan dental unit sebagai perangkat untuk melakukan pemeriksaan, perawatan dan tindakan pada poli gigi di puskesmas sehingga dari anggaran pokok sebesar Rp. 1.335.981.950,- mengalami perubahan menjadi Rp. 2.307.831.950,-.

2.2 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi dilakukan rasionalisasi dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan Dinas Kesehatan Kota Makassar, dianggarkan sebesar Rp. 506.528.000,- pada anggaran pokok dan berkurang sejumlah Rp. 23.500.000,- untuk anggaran pada perubahan menjadi Rp. 483.028.000,-.

2.3 Pengadaan Obat, Bahan Medis, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan mengalami penambahan anggaran dari DAK pada parsial DAK dari anggaran pokok Rp.21.315.116.712,- menjadi Rp.34.467.397.312,-.

2.4 Distribusi alat kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya mengalami penambahan anggaran pokok Rp.303.578.200,- menjadi Rp.247.178.200,- atau berkurang sejumlah Rp.56.400.000,- terkait adanya rasionalisasi anggaran.

2.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil mengalami pengurangan anggaran sejumlah Rp. 3.500.000 dari anggarapan pokok Rp. 683.886.000,- menjadi Rp. 680. 386.000,-.

2.6 Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin mengalami pengurangan anggaran sejumlah Rp. 2.044.250.000,- dari anggaran pokok yang sebesar Rp. 2.071.364.000,- mengalami perubahan menjadi Rp. 27.114.000,-. Hal ini disebabkan karena sudah teranggarkan hibah terkait kegiatan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) dimana Kota Makassar menjadi lokus.

2.7 Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 269.100.000,- sehingga berubah dari anggaran pokok Rp. 423.501.000,- mengalami perubahan menjadi Rp. 154.401.000,-

2.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, mengalami pengurangan sejumlah Rp. 4.700.000,- dari anggaran pokok, Rp. 119.154.000,- menjadi Rp. 114.4544.000.

2.9 Pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif mengalami pengurangan anggaran sejumlah Rp.31.720.000,- dari anggaran pokok Rp.1.415.898.000,- sehingga sisa anggaran menjadi Rp.1.384.178.000,- yang digunakan pada usia produktif.

2.10 Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia lanjut, berkurang sebesar, Rp. 12.600.000, dari anggaran pokok Rp. 34.800.000,- menjadi Rp. 22.200.000,-.

2.11 Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi mengalami pengurangan anggaran sejumlah Rp.10.800.000,- dari anggaran pokok Rp.21.835.000,- sehingga sisa anggaran menjadi Rp.11.035.000,- yang digunakan pada penderita hipertensi.

2.12 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis mengalami pengurangan anggaran sejumlah Rp.19.000.000,- dari anggaran pokok Rp. 78.114.600,- sehingga perubahan anggaran menjadi Rp. 59.114.600,-.

2.13 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinveksi HIV, mengalami pengurangan anggaran sejumlah Rp.15.000.000,- dari anggaran pokok Rp.339.850.000,- sehingga pada parsial DAK mengalami perubahan menjadi Rp. 342.850.000,- .

2.14 Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dari anggaran pokok Rp.19 830.000,- mengalami pengurangan sebesar Rp.2.500.000,- sehingga menjadi Rp.17.330.000,-

2.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, mengalami perubahan dari Rp.3.335.314.960,- menjadi Rp.2.098.494.960,- sehingga berkurang sejumlah Rp. 1.236.820.000,- karena mengalami efisiensi pada pergeseran. Kemudian pada perubahan bertambah Rp. 48.820.000,- untuk penganggaran kegiatan penyuluhan terkait stunting kepada istri ASN tingkat Kota Makassar sehingga menjadi Rp 2.147.314.960,-

2.16 Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga, dari anggaran pokok sejumlah Rp.136.898.000,- dan adanya pengurangan anggaran pokok sebesar Rp.16.050.000,- sehingga anggaran menjadi Rp.120.846.000,-.

2.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, pada angggaran pokok jumlah anggaran sebesar Rp.661.551.000,- dan berkurang sejumlah Rp.46.000.000,- sehingga pada parsial DAK menjadi Rp.615.551.000,-.

2.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, dari anggaran pokok sejumlah Rp. 12.302.800,- berubah pada anggaran parsial DAK menjadi Rp. 230.627.800,- atau bertambah anggaran menjadi sejumlah Rp. 218.325.000,-.

2.19 Pengelolaan Surveilans Kesehatan, mengalami perubahan pada parsial menyesuaikan DAK Non Fisik, pengurangan sejumlah Rp. 1.700.000,- dari anggaran pokok Rp. 44.711.800,- menjadi Rp. 43.011.800,-.

2.20 Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA mengalami pengurangan anggaran karena adanya penyesuaian anggaran DAK Non Fisik sebesar Rp.5.500.000,- dari anggaran pokok Rp.43.814.000., menjadi Rp.38.314.000,-.

2.21 Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular mengalami perubahan pada parsial menyesuaikan DAK Non Fisik, penambahan sejumlah Rp.1.180.000,- dari anggaran pokok Rp.3.176.532.000,- menjadi Rp.3.177.712.000,-. Kemudian penambahan anggaran sebesar Rp.732.950.000,- sehingga anggarannya menjadi Rp.3.910.662.000,-.

2.22 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, mengalmi perubahan anggaran sejumlah Rp. 16.000.000,-, dari anggaran pokok Rp. 102.154.321.600,- menjadi Rp. 118.154.608.000,-.

2.23 Deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di faskes dan sekolah, mengalami pengurangan anggaran dari Rp. 16.852.000,-, menjadi Rp. 14.102.000,- sehingga berkurang sejumlah Rp. 2.750.000,-.

2.24 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, mengalami perubahan anggaran sejumlah Rp. 130.100.000,-, dari anggaran pokok 806.124.600,- menjadi Rp. 676. 024.600,-.

2 25 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengalami perubahan dari anggaran pokok sejumlah Rp.2.468.537.400,- menjadi Rp.1.484.137.400,- dan berkurang sejumlah Rp.984.400.000,-.

2 26 Operasional Pelayanan Puskesmas, mengalami perubahan pada parsial DAK karena adanya penyesuaian anggaran DAK Non Fisik, tercatat jumlah anggaran pokok sebesar Rp.19.314.081.690,- dan pada parsial DAK menjadi Rp.5.210.196.000,- atau berkurang sejumlah Rp.14.940.089.000,-. Kemudian bertambah Rp.2.170.955.600,- untuk penganggaran jasa tenaga kesehatan di puskesmas sehingga anggaran menjadi Rp.7.381.151.600,-

2.27 Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota, mengalami pengurangan pada parsial DAK karena adanya penyesuaian anggaran DAK Non Fisik sebesar Rp.360.000.000,- dari anggaran pokok sebesar Rp.784.800.000,- menjadi Rp.424.800.000,-.

2 28 Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberiaan obat massal) karena adanya penyesuaian anggaran DAK Non Fisik mengalami pengurangan

sebesar Rp.17.200.000,- sehingga dari anggaran pokok Rp.48.867.200,- menjadi Rp.31.667.200,-.

2.29 Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah berubah dari Rp.19.030.000,- menjadi Rp.14.330.000,- karena adanya rasionalisasi anggaran.

2.30 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosis dari anggaran pokok Rp.170.854.000,- berkurang sebesar Rp.34.150.000,- karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga menjadi Rp.136.704.000,-.

2.31 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) mengalami pengurangan karena adanya rasionalisasi anggaran dari anggaran pokok Rp.209.960.000,- menjadi Rp.202.460.000 sehingga berkurang sejumlah Rp. 7.500.000,-.

2.32 Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria karena adanya penyesuaian anggaran DAK Non Fisik mengalami pengurangan sebesar Rp.20.600.000,- sehingga dari anggaran pokok Rp.85.561.000,- menjadi Rp.64.961.000,-.

2.33 Pengelolaan kawasan tanpa rokok dari anggaran pokok Rp.168.783.400,- berkurang sebesar Rp.45.700.000,- karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga menjadi Rp.123.083.400,-.

2.34 Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak dianggarkan Rp.110.800.000,- untuk kegiatan pendampingan tim ahli dan rapat pembentukan dan evaluasi jejaring yang bersumber dari DAK Non Fisik.

2.35 Pengelolaan sistem Informasi Kesehatan, pada anggaran pokok jumlah dana Rp. 2.084.851.000,- dan pengurangan anggaran sejumlah Rp.55.700.000,- sehingga menjadi Rp.2.029.151.000,-

2.36 Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan, pada anggaran pokok jumlah dana Rp. 314 482.000,-, berkurang karena adanya rasionalisasi anggaran sebesar Rp 7.200.000,- dan bertambah anggaran sejumlah Rp. 1.900.000.000,-, karena adanya pengadaan *speed boat* ambulance laut 1 unit sehingga anggaran menjadi Rp.2.207.282.000,-

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Anggaran pokok untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sejumlah Rp.309.538.160.000,- dan jumlah anggaran perubahan Rp.1.166.441.160,- atau bertambah sejumlah Rp.856.903.000,- Adapun sub kegiatan yang telah mengalami perubahan anggaran yaitu:

3.1 Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan dianggarkan sejumlah Rp.148.757.160,- pada anggaran pokok

dan bertambah sejumlah Rp.19.800.000,- sehingga jumlah anggaran pada perubahan menjadi Rp.128 957.160,-.

3.2 Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan pada anggaran pokok sejumlah Rp.49.832.000,- pada parsial DAK dan adanya pertambahan anggaran dana Rp.122.223.000,- sehingga anggaran perubahan menjadi Rp.172.055.000,-.

3.3 Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota pada anggaran pokok sejumlah Rp.110.949.000,- pada parsial DAK dan adanya pertambahan anggaran dana Rp.754.480.000,- sehingga anggaran perubahan menjadi Rp.865.429.000,-.

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Alokasi Anggaran pokok untuk Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sejumlah Rp.528.820.320,- dan jumlah anggaran perubahan Rp.725.844.320,- atau bertambah sejumlah Rp.197.024.000,- Adapun sub kegiatan yang telah mengalami perubahan anggaran yaitu:

4.1 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh industri Rumah Tangga yang dianggarkan sejumlah Rp.122.909.000,- pada anggaran pokok dan bertambah sejumlah Rp.2.400.000,- sehingga jumlah anggaran pada perubahan menjadi Rp.125.309.000,-.

4.2 Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas I tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu perusahaan Rumah Tangga, mengalami pengurangan dikarenakan efisiensi anggaran sebesar Rp.48.640.000,- dari anggaran pokok Rp.100.162.000,- menjadi Rp.51.522.000,-.

4.3 Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga, mengalami penambahan anggaran sejumlah Rp.67.399.000,- menjadi Rp.296.165.000,- dari anggaran pokok sejumlah Rp.228.766.000,-.

4 4 Pemeriksaan Post Market pada produk makanan-minuman industry rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan, mengalami perubahan anggaran, bertambah sejumlah Rp.175.865.000,- menjadi Rp.193.508.000,- dari anggaran Rp.17.643.000,-.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Alokasi Anggaran pokok untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sejumlah Rp.8.896.542.600,- dan jumlah anggaran perubahan Rp.4.930.542.600,- atau berkurang sejumlah Rp.3.966.000.000,- Adapun sub kegiatan yang telah mengalami perubahan anggaran yaitu:

5.1. Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pembercayaan masyarakat karena adanya penyesuaian anggaran DAK Non Fisik mengalami pengurangan sebesar Rp.24.800.000,- dari anggaran pokok Rp.8,759.644.040,- menjadi Rp.8.734.844.040,-.

5.2. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat dianggarkan sejumlah Rp.136.898.560,- pada anggaran pokok dan berkurang sejumlah Rp.9.700.000,- sehingga jumlah anggaran pada perubahan menjadi Rp.127.198.560,- .

5.3. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dianggarkan sejumlah Rp.120.500.000,- pada anggaran parsial DAK.

6. Rumah Sakit Umum Daya Makassar

Anggaran Rumah Sakit Umum Daya Makassar juga mengalami perubahan karena adanya penyesuaian anggaran DAK Fisik bertambah Rp.2.285.000.000,- sehingga dari anggaran pokok sebesar Rp.113.341.159.940,- menjadi Rp.115.626.159.940,-. Kemudian ada penambahan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- untuk penyediaan obat-obatan.

BAB
IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar ini diharapakan meningkatan efektifitas maupun efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di Kota Makassar dan juga telah disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025 sehingga akan menjadi pedoman dan acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi segala kegiatan yang dilakukan sehingga nantinya diharapkan agenda pembangunan bidang kesehatan untuk mewujudkan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna baik di tingkat daerah (provinsi maupun kota) dan tingkat nasional dapat tercapai dengan baik.

Beberapa indikator yang masih perlu mendapat perhatian akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan Kota Makassar di triwulan selanjutnya maupun tahun selanjutnya sehingga dukungan pendanaan yang optimal diharapkan guna mendorong pencapaian indikator-indikator program kesehatan, begitupula dukungan ketenagaan terutama dari segi kualitas diharapkan dapat semakin baik sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program kesehatan, beban ganda bagi tenaga kesehatan dalam pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan khususnya di unit pelayanan kesehatan dapat semakin diminimalisir utamanya dengan adanya penambahan tenaga di masing-masing puskesmas sehingga kinerja bisa semakin baik.

Tenaga kesehatan yang ada perlu dimotivasi terus menerus dan didukung pelatihan-pelatihan terstandarisasi guna pemberian pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan masalah yang ada serta sesuai perkembangan di bidang kesehatan seperti pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan yang semakin maju.

Perubahan Rencana Kerja ini memuat perubahan pada 5 program atau keseluruhan program yang telah direncanakan Dinas Kesehatan di Tahun 2025, dengan total perubahan anggaran sejumlah Rp.46.672.176.600,- (dari total anggaran pada DPA Pokok Rp.592.929.362.177,- menjadi Rp.639.601.538.777,-). Selanjutnya perubahan rencana kerja ini akan menjadi acuan dalam monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

Selain itu pembangunan bidang kesehatan di Kota Makassar selanjutnya juga lebih diarahkan kepada perubahan paradigma, yang selama ini pelayanan kesehatan masih lebih bersifat paradigma sakit dalam artian pemberian pelayanan kesehatan berfokus pada

penyembuhan masyarakat/ pasien yang sakit dan datang berobat ke pusat pelayanan kesehatan, diharapkan program kesehatan selanjutnya bisa mengarah kepada paradigma sehat dengan mengupayakan agar masyarakat yang sehat bisa tetap sehat dan tidak mengalami gangguan kesehatan serta produktif melalui langkah-langkah preventif atau pencegahan serta promotif atau promosi kesehatan sehingga puskesmas betul-betul menjadi pusat kesehatan masyarakat sesuai akronimnya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2025 ini disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Makassar,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MAKASSAR

dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes
Pangkat : Pembina Tk.I/IVb
Nip : 19730112 200604 2012

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Makassar
Tahun 2025

Unit Organisasi : Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			Makassar	98%	98%					Rp210,193,486,818.00	Rp212,567,945,756.00	APBD		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	98%	Rp218,345,383,187.80
					Persentase keterseditaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah			Makassar	100%	100%									Persentase keterseditaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas			Makassar	90%	90%									Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	100%	
	04	01	0401	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Makassar					100%	100%	Rp154,122,680.00	Rp1,111,732,882.86			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		Rp589,374,348.00
			040101	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		Makassar			1 Dokumen	1 Dokumen			Rp91,424,000.00	Rp55,924,000.00	APBD		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	Rp259,592,140.00
			040102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Makassar			1 Dokumen	1 Dokumen			Rp8,488,400.00	Rp8,488,400.00	APBD		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Rp 8,948,000.00
			040103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		Makassar			1 Dokumen	1 Dokumen			Rp5,638,640.00	Rp5,638,640.00	APBD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp6,229,000.00
			040104	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD		Makassar			1 Dokumen	1 Dokumen			Rp8,091,200.00	Rp8,091,200.00	APBD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp33,684,200.00
			040105	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Makassar			1 Dokumen	1 Dokumen			Rp7,897,440.00	Rp7,897,440.00	APBD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	Rp8,328,000.00
			040106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Makassar			2 Dokumen	2 Dokumen			Rp9,828,000.00	Rp10,828,000.00	APBD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
			040107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Makassar							Rp42,865,000.00	Rp42,865,000.00	APBD		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Rp42,865,000.00
			040108	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Sesuai Renstra PD dan Renja PD		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Sesuai Renstra PD dan Renja PD yang disusun													Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Sesuai Renstra PD dan Renja PD yang disusun		
	04	02	0402	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	Makassar					100%	100%	Rp202,941,210,778.80	Rp202,541,210,778.80			Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun		Rp212,127,559,067.80

Kode			Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Capaian Program	Kelaluran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja					Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
								Program		Kegiatan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				Tolak Ukur	Target	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunangan ASN yang disediakan		Makassar			1.816 Orang/Bulan	1.816 Orang/Bulan		Rp.700,564,558,778.00	Rp.700,564,558,778.00	APBD		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	1816 orang/bulan	Rp209,691,460,417.00
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan		Makassar			12 Dokumen	12 Dokumen		Rp1,968,744,000.00	Rp1,968,744,000.00	APBD		Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	12 Dokumen	Rp2,011,993,350.00
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguasan/Verifikasi keuangan SKPD		Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasi yang disiapkan		Makassar										Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasi yang disiapkan		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun		Makassar			1 Dokumen	1 Dokumen		Rp807,908,000.00	Rp807,908,000.00	APBD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	Rp812,105,950.00
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelola		Makassar										Jumlah dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelola		
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun		Makassar										Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Anggaran Pelaporan Prognosis Realisasi yang disusun		Makassar										Jumlah Anggaran Pelaporan Prognosis Realisasi yang disusun		
			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			**Jumlah jasa administrasi barang milik daerah yang tersedia**							**Rp108,000,000.00**	**Rp108,000,000.00**					
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				Makassar						Rp108,000,000.00	Rp108,000,000.00	APBD				
			Administrasi Kegiatan Perangkat Daerah			**Jumlah jasa administrasi kegiatanan yang tersedia**	**Makassar**					**100%**	**100%**	**Rp770,145,000.00**	**Rp3,238,778,838.00**			**Jumlah jasa administrasi umum yang tersedia**		**Rp4,011,111,380.00**
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		Makassar			2 Paket	2 Paket		Rp133,845,000.00	Rp133,845,000.00	APBD		Jumlah Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	Rp35,446,000.00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Makassar						Rp528,300,000.00	Rp742,500,000.00	APBD		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-[illegible]		Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan		Makassar						Rp108,300,000.00	Rp0.00	APBD		Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan		Rp1,262,477,760.00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			**Jumlah jasa administrasi umum yang tersedia**	**Makassar**					**100%**	**100%**	**Rp1,473,506,000.00**	**Rp1,909,906,868.00**			**Jumlah jasa administrasi umum yang tersedia**		**Rp1,848,154,760.00**
			Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		Makassar			2 Paket	2 Paket		Rp35,446,000.00	Rp35,446,000.00	APBD		Jumlah Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 paket	Rp35,446,000.00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Makassar										Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan		Makassar						Rp918,280,960.00	Rp913,280,960.00	APBD		Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan		Rp1,262,477,760.00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		Makassar										Jumlah Bahan Logistik Kantor disediakan		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		Makassar			14 Paket	14 Paket		Rp253,700,000.00	Rp253,700,000.00	APBD		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	14 paket	Rp254,750,000.00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan		Makassar						Rp20,880,000.00	Rp20,880,000.00	APBD		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan		Rp20,880,000.00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksanannya rapat-rapat koordinasi		Makassar			105 Laporan	105 Laporan		Rp250,000,000.00	Rp186,000,000.00	APBD		Terlaksanannya rapat-rapat koordinasi	105 Laporan	Rp250,000,000.00
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**Makassar**					**100%**	**100%**	**Rp0.00**	**Rp0.00**					**Rp1,000,000,000.00**

Hlm 4

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi/ Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan dinas yang diadakan		Makassar											Jumlah kendaraan dinas yang diadakan		
					Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah kendaraan dinas lapangan yang diadakan		Makassar											Jumlah kendaraan dinas lapangan yang diadakan	1 unit	Rp1,000,000,000.00
					Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan		Makassar											Jumlah mebel yang diadakan		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah alat dan Mesin yang diadakan		Makassar											Jumlah alat dan Mesin yang diadakan		
					Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**Makassar**					**100%**	**100%**	**Rp3,252,887,420.00**	**Rp3,280,887,420.00**					**Rp1,829,559,500.00**
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Jasa Surat Menyurat dan ekspedisi yang disediakan		Makassar							Rp18,000,000.00	Rp0.00	APBD		Jumlah Jasa Surat Menyurat dan ekspedisi yang disediakan		Rp18,000,000.00
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		Makassar			12 Laporan	12 Laporan			Rp760,403,500.00	Rp760,403,500.00	APBD		Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	Rp947,230,000.00
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Makassar							Rp218,121,520.00	Rp218,121,520.00	APBD		Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Rp218,649,500.00
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Makassar			12 Laporan	12 Laporan			Rp2,236,362,400.00	Rp2,302,362,400.00	APBD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12laporan	Rp1,092,680,000.00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**100%**	**100%**	**Rp1,453,424,000.00**	**Rp1,453,424,000.00**					**Rp934,736,600.00**
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Makassar			1 Unit	1 Unit			Rp44,380,000.00	Rp44,380,000.00	APBD		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	Rp33,500,000.00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Makassar			286 unit	286 unit			Rp999,460,000.00	Rp999,460,000.00	APBD		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	286 unit	Rp667,210,000.00
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Makassar			222 unit	222 unit			Rp208,680,000.00	Rp208,680,000.00	APBD		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	222 unit	Rp28,000,000.00
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Makassar			3 Unit	3 Unit			Rp200,904,000.00	Rp200,904,000.00	APBD		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Rp207,926,600.00
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Angka Kematian Ibu**										**Rp309,059,828,727.00**	**Rp327,223,499,237.00**	**APBD**		**Angka Kematian Ibu**		**Rp593,343,894,780.00**
						Prevalensi Stunting														**Prevalensi Stunting**		
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota			**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Kota Makassar yang disediakan**	Makassar					**100%**	**100%**	**Rp46,979,410,537.00**	**Rp61,023,541,137.00**			**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Kota Makassar yang disediakan**		**Rp189,500,165,180.00**
					Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Basic Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		Makassar											Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Basic Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		
					Pembangunan Puskesmas		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun		Makassar			5 Unit	5 Unit			Rp12,900,988,475.00	Rp12,900,988,475.00	APBD		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 unit	Rp48,825,326,280.00

Hm 4

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Makassar			13 Unit	13 Unit			Rp582.080.400.00	Rp582.080.400.00	APBD		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	13 unit	Rp109.931.836.800.00
					Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun		Makassar											Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun		
					Pengembangan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Makassar			21 Unit	21 Unit							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		
					Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		Makassar											Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit		Makassar											Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit		
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		Makassar											Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		Makassar											Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		Rp741.780.000,00
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan		Makassar											Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan		
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		Makassar			877 Unit	880 unit			Rp1.375.981.950,00	Rp2.307.831.950,00	APBD		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	877 Unit	Rp1.422.000.885,00
					Pengadaan Alat Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center		Makassar							Rp606.528.000,00	Rp683.028.000,00	APBD		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center		Rp941.710.510,00
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		Makassar			368 Unit	368 Unit							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	368 Unit	Rp941.711.000,00
					Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1.1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		Makassar							Rp10.041.046.800,00	Rp10.035.046.800,00	APBD		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1.1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		Rp10.596.788.640,00

Attn 4

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		Makassar			7 Paket	7 Paket			Rp23.425.116.717,00	Rp34.867.397.312,00	APBD		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	7 paket	Rp2.184.980.870,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pendekatan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diberikan Materi Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		Makassar										Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diberikan Materi Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di DTPK Pelayanan Kesehatan Bergerak Gugus Pulau Pelayanan Kesehatan (berbasis Telemedicine)		Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapat pemeliharaan		Makassar										Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapat pemeliharaan		
	Distribusi Alat Kesehatan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		Jumlah Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan		Makassar			47 Paket	47 Paket			Rp 903.578.200,00	Rp747.178.200,00	APBD		Jumlah Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	47 paket	Rp313.167.695,00
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah dan Jenis Alat Kesehatan Obat, Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		Makassar										Jumlah dan Jenis Alat Kesehatan Obat, Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kota Makassar yang disediakan**	Makassar					**100%**	**100%**	**Rp258,518,775,250.00**	**Rp381,793,134,986.00**			**Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kota Makassar yang disediakan**		**Rp401,260,647,350.00**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Makassar			27.254 Orang	27.254 Orang			Rp683.686.000,00	Rp680.386.000,00	APBD/DAK		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	237.76 orang	Rp3.616.096.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Makassar			25.145 Orang	25.145 Orang			Rp2.073.364.000,00	Rp27.334.000,00	APBD/DAK		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26.514 orang	Rp2.965.314.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Makassar			25.106 Orang	25.106 Orang			Rp423.501.000,00	Rp154.401.000,00	APBD/DAK		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25.251 orang	Rp426.971.000,00
	Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Makassar			94.804 Orang	94.804 Orang			Rp119.154.000,00	Rp114.454.000,00	APBD/DAK		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	117.491 orang	Rp119.154.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Makassar			194.719 Orang	194.719 Orang			Rp597.678.460,00	Rp597.839.460,00	APBD/DAK		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	197812 orang	Rp597.839.460,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Makassar			969.234 Orang	969.234 Orang			Rp. 415.896.000,00	Rp1.384.178,000,00	APBD/DAK		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	971.476 orang	Rp1.416.312.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Makassar			138.998 Orang	138.998 Orang			Rp34.881.000,00	Rp27,300,000,00	APBD/DAK		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	153.971 orang	Rp127.980.000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Makassar			327.234 Orang	327.234 Orang			Rp21,835.000,00	Rp11.035.000,00	APBD/DAK		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	333.663 orang	Rp55,423,000,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Makassar			26.710 Orang	26.710 Orang			Rp9.839.000,00	Rp8.849.000,00	APBD/DAK		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27.238 orang	Rp1.758.662.500,00

Kode				Uraian Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Jangan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Makassar			1.376 Orang	1.376 Orang			Rp22.547.600.00	Rp22.547.600.00	APBD/DAK		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.567 orang	Rp135.748.860.00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Makassar			41.119 Orang	43.219 Orang			Rp78.114.600.00	Rp59.114.600.00	APBD/DAK		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	43.327 orang	Rp6.722.454.860.00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Jangan Rutin Terhadap HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Makassar			42.475 Orang	42.475 Orang			Rp399.850.000.00	Rp324.850.000.00	APBD/DAK		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	43.267 orang	Rp1,023.535.000.00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Makassar			3 Dokumen	3 Dokumen			Rp19.830.000.00	Rp17.530.000.00	APBD/DAK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	3 dokumen	Rp22.961.000.00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Makassar			6 Dokumen	6 Dokumen			Rp3,335.314.960.00	Rp2.147.914.460.00	APBD, DAK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 dokumen	Rp3,609,015.000.00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lansia dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lansia dan Olahraga		Makassar			7 Dokumen	7 Dokumen			Rp136.896.000.00	Rp120.846.000.00	APBD/DAK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lansia dan Olahraga	7 dokumen	Rp430.300.000.00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Makassar			6 Dokumen	6 Dokumen			Rp661.551.000.00	Rp615.551.000.00	APBD/DAK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 dokumen	Rp242,514.200.00
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Makassar			12 Dokumen	12 Dokumen			Rp12.302.800.00	Rp230.637.000.00	APBD/DAK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	Rp449.426.000.00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Makassar			2 Dokumen	2 Dokumen			Rp79.801.000.00	Rp79.801.000.00	APBD/DAK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2 dokumen	Rp79.801.000.00
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Makassar			6 Dokumen	6 Dokumen			Rp68.711.800.00	Rp43.011.800.00	APBD/DAK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 dokumen	Rp65.513.600.00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Makassar			240 Dokumen	240 Dokumen			Rp33.800.000.00	Rp28.050.000.00	APBD/DAK		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	240 dokumen	Rp1,981.652.000.00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Napza dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Makassar			58 Dokumen	58 Dokumen			Rp61.814.000.00	Rp48.814.000.00	APBD/DAK		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	58 dokumen	Rp125.918.400.00
				Pengelolaan Upaya Penanggulangan Pasca Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Penanggulangan Pasca Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan		Makassar			3 Dokumen	3 Dokumen			Rp19.249.000.00	Rp18.749.000.00	APBD/DAK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Penanggulangan Pasca Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	3 dokumen	Rp31.700.000.00
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Makassar			10 Dokumen	10 Dokumen			Rp3.176.582.000.00	Rp3,910.662.000.00	APBD/DAK		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 dokumen	Rp1.344.870.400.00
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Makassar			1 Dokumen	1 Dokumen			Rp102.154.913.600.00	Rp118.154.608.000.00	APBD/DAK		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	Rp162,154.321,600.00
				Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah		Makassar			800 Orang	800 Orang			Rp16.352.000.00	Rp14.102.000.00	APBD/DAK		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	800 orang	Rp106.050.000.00

Data 64

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		Makassar			50 Paket	50 Paket			Rp8,632,000.00	Rp8,632,000.00	APBD/DAK		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	50 paket	Rp10,509,000.00
					Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat		Makassar			15 Dokumen	15 Dokumen			Rp806,124,600.00	Rp676,024,600.00	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat	15 dokumen	Rp777,250,800.00
					Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		Makassar			47 Unit	47 Unit			Rp2,468,537,400.00	Rp1,484,137,400.00	APBD		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	47 unit	Rp2,468,537,400.00
					Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Makassar			100%	100%			Rp113,341,159,940.00	Rp115,776,159,940.00	APBD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100%	Rp133,341,159,940.00
					Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Makassar			47 Dokumen	47 Dokumen			Rp19,314,081,690.00	Rp7,381,151,600.00	APBD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	47 dokumen	Rp130,590,552,050.00
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Makassar			1 Dokumen	1 Dokumen			Rp6,502,040,000.00	Rp6,502,040,000.00	APBD		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 dokumen	Rp6,502,040,000.00
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Makassar			20 Unit	20 Unit			Rp784,800,000.00	Rp424,800,000.00	APBD		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	20 unit	Rp813,600,000.00
					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Makassar			12 Laporan	12 Laporan			Rp48,867,200.00	Rp31,667,200.00	APBD		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	Rp18,648,000.00
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Jumlah laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (SKDR)		Makassar			52 Dokumen	52 Dokumen			Rp19,030,000.00	Rp14,330,000.00	APBD		Jumlah laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (SKDR)	52 dokumen	Rp30,719,000.00
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Makassar			14.898 Orang	14.898 Orang			Rp170,854,000.00	Rp136,704,000.00	APBD/DAK		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14.898 orang	Rp109,187,000.00
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Makassar			1.083 Orang	1.083 Orang			Rp209,960,000.00	Rp202,460,000.00	APBD/DAK		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.083 orang	Rp236,305,000.00
					Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		Makassar			135 Orang	135 Orang			Rp85,561,000.00	Rp64,961,000.00	APBD/DAK		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	135 orang	Rp127,637,000.00
					Pengelolaan Kawasan tanpa rokok		Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok		Makassar			10 Tatanan	10 Tatanan			Rp168,783,400.00	Rp123,083,400.00	APBD/DAK		Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	10 tatanan	Rp285,748,000.00
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		Makassar			6 Dokumen	6 Dokumen							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota		Makassar			4 Dokumen	4 Dokumen			Rp28,939,000.00	Rp28,939,000.00	APBD		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	4 dokumen	Rp28,939,000.00
					Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		Makassar			4 Dokumen	4 Dokumen			Rp0.00	Rp110,800,000.00	APBD		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		
					Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		Makassar											Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		
					Pengelolaan Layanan Imunisasi		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		Makassar											Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		Rp23,957,000.00

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja		Rincian Tahun 2025									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Data	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
				Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Makassar											Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		Makassar											Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		Rp71 976,000.00
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			**Jumlah Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi yang dikembangkan**	Makassar					100%	100%	**Rp2,894,80 1,000.00**	**Rp2,829,151,800.00**			**Jumlah Sistem informasi Kesehatan secara Terintegrasi yang dikembangkan**		**Rp576,004,680.00**
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi kesehatan		Makassar							Rp2,084,851,000.00	Rp2,029,151,000.00	APBD		Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikembangkan, Dipelihara dan Ditindaklanjuti Pemanfaatannya		Rp118 145 200.00
				Pengelolaan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**Jumlah izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang diterbitkan**	Makassar					100%	100%	**Rp884,883,148.00**	**Rp1,372,812,148.00**			**Jumlah Sistem informasi Kesehatan secara Terintegrasi yang dikembangkan**		**Rp888,883,200.00**
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		Jumlah Rumah Sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikembangkan, Dipelihara dan Ditindaklanjuti Pemanfaatannya		Makassar							Rp118 145 140.00	Rp118 145 140.00	APBD		Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikembangkan, Dipelihara dan Ditindaklanjuti Pemanfaatannya		Rp118 145 200.00
				Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Menerapkan Manajemen Tata Kelola Sesuai Standar		Makassar							Rp54 822,000.00	Rp54,822 000.00	APBD		Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Menerapkan Manajemen Tata Kelola Sesuai Standar		Rp54 822 000.00
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		Makassar							Rp314 482,000.00	Rp3 207 282,000.00	APBD		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		Rp314 482 000.00
				Penyiapan Perumusan dan Penetapan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Penetapan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Makassar							Rp97 443,000.00	Rp97,443,000.00	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Penetapan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Rp97 443 000.00
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase Peningkatan Kompetensi SDM bidang Kesehatan**			Makassar							**Rp309,510,160.00**	**Rp1,186,441,160.00**			**Persentase Peningkatan Kompetensi SDM bidang Kesehatan**		**Rp383,173,880.00**
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota			**Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kota Makassar yang diterbitkan**	Makassar						**Rp140,757,160.00**	**Rp139,957,160.00**			**Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kota Makassar yang diterbitkan**		**Rp152,479,880.00**
				Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Makassar											Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		
				Pembinaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Makassar							Rp148 757 160.00	Rp139 957 160.00	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Rp152 479,080.00
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota			**Jumlah Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Makassar yang mendapat Pembinaan Teknis dan Pengawasan**	Makassar						**Rp99,832,800.00**	**Rp172,863,800.00**			**Jumlah Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Makassar yang mendapat Pembinaan Teknis dan Pengawasan**		**Rp51,072,800.00**

Hal 4

Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Capaian Program	Indikator Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja: Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025: Target Capaian Kinerja: Program: Sebelum	Rencana Tahun 2025: Target Capaian Kinerja: Program: Sesudah	Rencana Tahun 2025: Target Capaian Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2025: Target Capaian Kinerja: Keluaran Sub Kegiatan: Sesudah	Rencana Tahun 2025: Target Capaian Kinerja: Hasil Kegiatan: Sebelum	Rencana Tahun 2025: Target Capaian Kinerja: Hasil Kegiatan: Sesudah	Rencana Tahun 2025: Pagu Indikatif (Rp.): Sebelum	Rencana Tahun 2025: Pagu Indikatif (Rp.): Sesudah	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026: Target Capaian Kinerja: Teknis Utama	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026: Target Capaian Kinerja: Target	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026: Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Pemerataan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pemerataan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Makassar											Jumlah Dokumen Hasil Pemerataan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Makassar											Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Makassar			1 Dokumen	2 Dokumen			Rp49,837,000.00	Rp172,056,000.00	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Rp5,072,800.00
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kota Makassar yang mendapat Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis**	Makassar							**Rp110,049,000.00**	**Rp865,429,000.00**			**Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kota Makassar yang mendapat Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis**		**Rp1,79,6,20,000.00**
	Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mendapat Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Makassar			162 Orang	162 Orang			Rp110 049,000.00	Rp865 429 000 00	APBD		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mendapat Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	162 orang	Rp1 79 620,000.00
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat		Makassar											Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat		
	Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal		Jumlah kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal yang meningkat		Makassar											Jumlah kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal yang meningkat		
	PROGRAM KEFARMASIAN, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**			Makassar							**Rp630,820,320.00**	**Rp725,894,320.00**			**Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**		**Rp303,373,900.00**
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			**Jumlah Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan**	Makassar							**Rp122,900,000.00**	**Rp125,309,000.00**			**Jumlah Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang**		**Rp125,981,725.00**
				Jumlah Toko Alat Kesehatan (Baru) yang mendapatkan rekomendasi	Makassar											**Jumlah Toko Alat Kesehatan (Baru) yang mendapatkan rekomendasi**		
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Makassar			6 Dokumen	6 Dokumen			Rp122 909,000.00	Rp125 309,000.00	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6 dokumen	Rp125 981 725.00
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Apotek, Toko Obat Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapat rekomendasi penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin		Makassar											Persentase Apotek, Toko Obat Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapat rekomendasi penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin		
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase Apotek, Toko Obat Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapat fasilitasi pemenuhan komitmen		Makassar											Persentase Apotek Toko Obat, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapat fasilitasi pemenuhan komitmen		

Kode				Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Lembar Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
				Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perizinan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga			Jumlah Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perizinan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu yang diterbitkan	Makassar						Rp100,162,000.00	Rp51,522,000.00			Jumlah Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perizinan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu yang diterbitkan		Rp80,362,000.00
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Makassar			1 Dokumen	2 Dokumen			Rp100,162,000.00	Rp51,522,000.00	APBD		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Rp80,362,000.00
				Pengendalian dan Pengawasan Serta tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Jumlah Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapat pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut		Makassar											Jumlah Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapat pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut		
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan	Makassar						Rp228,758,000.00	Rp296,185,000.00			Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan		Rp8,875,600.00
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Makassar			4 Dokumen	4 Dokumen			Rp228,766,000.00	Rp296,165,000.00	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	4 Dokumen	Rp8,875,600.00
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan	Makassar						Rp8,300,320.00	Rp0,300,320.00			[redacted] Sertifikat Laik Higiene [redacted] Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan		Rp9,630,300.00
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum [redacted]		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum [redacted]		Makassar							Rp9,300,320.00	Rp9,300,320.00	APBN		Jumlah [redacted] Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat [redacted] Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan [redacted] Air Minum (DAM)		Rp9,630,300.00

Kode					Uraian/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolak Ukur	Target	
					Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			**Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan**	Makassar						**Rp50,040,000.00**	**Rp50,040,000.00**			**Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan**		**Rp50,040,000.00**
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Makassar			12 Dokumen	12 Dokumen			Rp50,040,000.00	Rp50,040,000.00	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Rp50,040,000.00
					Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			**Jumlah Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang mendapat pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan**	Makassar						**Rp17,643,000.00**	**Rp193,508,000.00**			**Jumlah Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang mendapat pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan**		**Rp18,084,075.00**
					Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		Makassar			8 Unit	9 Unit			Rp17,643,000.00	Rp193,508,000.00	APBD		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	9 unit	Rp18,084,075.00
					Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga		Jumlah Perizinan Industri Rumah Tangga yang mendapat penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut		Makassar											Jumlah Perizinan Industri Rumah Tangga yang mendapat penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut		
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan**			Makassar							**Rp8,896,542,600.00**	**Rp8,982,542,600.00**			**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan**		**Rp7,896,349,000.00**
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			**Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota Makassar yang dilaksanakan**	Makassar						**Rp8,759,644,040.00**	**Rp8,734,844,040.00**			**Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota Makassar yang dilaksanakan**		**Rp7,597,289,200.00**
					Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Makassar			6 Dokumen	6 Dokumen			Rp8,759,644,040.00	Rp8,734,844,040.00	APBD		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat	6 dokumen	Rp7,597,289,200.00
					Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengaminan kualitas air minum dan sanitasi aman		Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman		Makassar											Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman		
					Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			**Jumlah Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Kota Makassar yang dilaksanakan**	Makassar						**Rp136,898,560.00**	**Rp137,198,560.00**			**Jumlah Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Kota Makassar yang dilaksanakan**		**Rp299,059,800.00**
					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Makassar			6 Dokumen	6 Dokumen			Rp136,898,560.00	Rp137,198,560.00	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	6 dokumen	Rp299,059,800.00

Bidang Urusan/ Urusan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Telah Ukur	Target	
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
...esadaran Keluarga ...dan Derajat ...arga dan ...gan Menerapkan ...Bersih dan Sehat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat		Makassar											Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat		
...n dan Pelatihan ...dan Bersumber ...dat (UKBM) ...h Kabupaten/Kota			**Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kota Makassar yang dibentengkan dan dikembangkan**	Makassar							**Rp0.00**	**Rp138,569,800.00**					**Rp0.00**
...nis dan Supervisi ...dan Pelaksanaan ...an Bersumber Daya ...BM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Makassar			1 Kegiatan	1 Kegiatan			Rp0.00	Rp120,500,000.00	APBD		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
...P PUSKESMAS	**Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Dibersdayakan**			Makassar							**Rp118,037,170,137.00**	**Rp118,037,170,137.00**					
	Total Anggaran										*Rp687,095,306,772.00*	*Rp668,708,858,387.00*					*Rp830,173,177,305.00*

Makassar, 6 Mei 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Makassar

dr. Nursaidah Sirajuddin, M. Kes
NIP : 19730112 200604 2 012
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I/ IV b


KOTA MAKASSAR
BERSAU LAYAR TERKEMBANG
PANTANG BIDUK SURUT KE PANTAI

PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

RENJA

SEKRETARIAT DPRD
KOTA MAKASSAR
TAHUN 2025



makassar i♥MC

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan hingga Kota, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Penyusunan Renja SKPD berpedoman pada arah kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

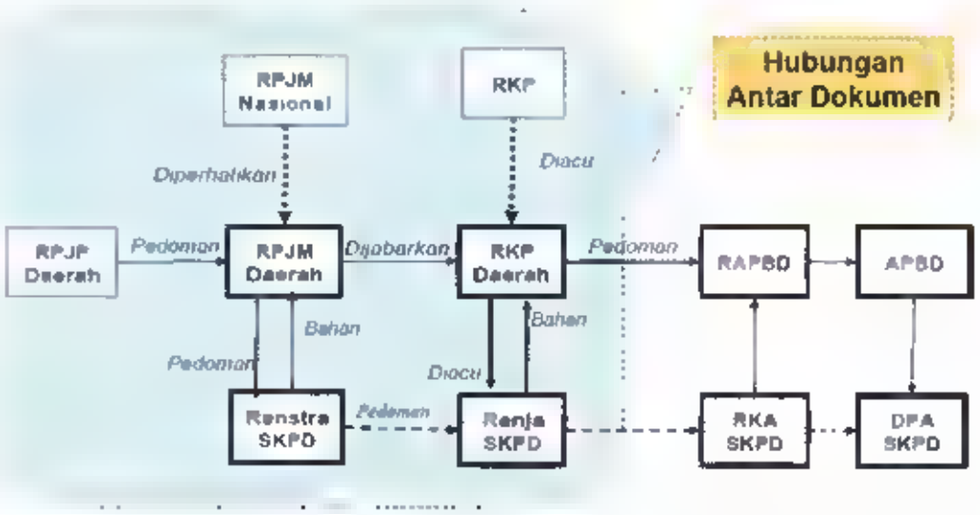
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksistensi SKPD, evaluasi pelaksana Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya daan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Tahap penetapan rancangan Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dilingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rancangan pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Gambar 1.1.1

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



Proses Penetapan Renja SKPD dilakukan 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah Penetapan Renja SKPD, maka akan dilanjutkan dengan proses penyusunan RAPBD sehingga Renja SKPD merupakan dasar dalam Penyusunan RKA SKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Makassar 2025 sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencaa Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023);
20. Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015, Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 tanggal 26 Agustus 2021 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 tanggal 28 September 2021 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55);
23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dengan dasar Hukum ini, memberikan konsekuensi terhadap semua Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dapat menyusun Rencana Kerjanya. Program dan kegiatan setiap tahun dengan parameter yang terukur dan dapat

dilaksanakan untuk menjawab berbagai permasalahan sesuai dengan kemampuan anggaran yang diselaraskan dengan Rencana Strategis yang telah disusun sebelumnya. Oleh karena itu dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kota Makassar maka disusunlah Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Maksud penyusunan Sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Periodesasi ke-4 dari RENSTRA 2021-2026 serta mengevaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2025 ini adalah :

a. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Sekretariat DPRD dan RPJMD Kota Makassar di tahun 2025.
b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintah daerah dan laporan kinerja.
c. Sebagai Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD tahun 2025.
d. Sebagai Parameter keberhasilan maupun ketidak berhasilan Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2025 melalui indicator kinerja yang ditetapkan.
e. Sebagai parameter penilaian Kinerja SKPD dalam rangka

melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam rangka urusan SKPD

f. Menjadi instrument bagi Masyarakat dan stakeholder dalam pengawasan terhadap kinerja SKPD

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Merupakan kumpulan yang memuat tentang undang-undang serta peraturan yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berisi penjelasan yang memuat tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Makassar 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta memuat susunan secara garis besar dari dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Makassar tahun lalu dan perkiraan yang akan dicapai pada tahun ini, mengacu pada APBD ini.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Poin ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Makassar berdasarkan pada indikator kinerja yang telah ditentukan dalam NSPK dan terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Sekretariat DPRD

Berisikan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tupoksi Sekretariat DPRD Kota Makassar.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Berisikan uraian terkait proses penyandingan analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta temuan-temuan yang didapat setelah proses tersebut dilakukan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Poin ini mengurai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan, LSM, Asosiasi-Asosiasi, serta Perguruan Tinggi.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisi Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tupoksi dari Sekretariat DPRD Kota Makassar.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Poin ini membahas terkait penetapan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi Kota Makassar 2021-2026.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Makassar yang berdasarkan pada faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

serta garis besar rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup yang meliputi catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Makassar merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Makassar. Sebagaimana amanat Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievualuasi dalam pelaksanaan. Gambaran realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel T-C 29 Evaluasi hasil pelaksanaan renja Sekretariat DPRD Kota Makassar tahun 2023 dan pencapaian rencana kerja tahun 2023, tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel. 2.1
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi Keuangan	%
1	2	3	4
Program Utama	Rp. 63.641.860.732.-	Rp. 46.391.240.987.-	62,79%
Program Penunjang	Rp. 143.332.931.993.-	Rp. 129.115.280.891.-	94,98%
Total Jumlah	Rp. 206.974.792.725.-	Rp. 175.506.521.878,-	84,08%

Hasil Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Makassar dan capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Makassar berdasarkan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Realisasi Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan :

   1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota, target Rencana Kerja (Renja) 2023 senilai Rp. 143.332.931.993.- terealisasi senilai Rp. 129.115.280.891.- atau 94,98%

Program ini terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target Rp. 297.654 000,- realisasi Rp. 156.047.000,- atau 52,43%.
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target Rp. 9.896.853.910,- realisasi Rp. 8.418.012.948,- atau 85,06%
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, target Rp. 54.678.833.065,- realisasi Rp. 50.274.140 780,- atau 91.94%.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, target Rp. 4.123.557.884,- realisasi Rp. 2.276.460.394,- atau 55.21%
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target Rp. 4.471.702.000,- realisasi Rp. 4.426.340.000,- atau 98,99%.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target Rp. 4.555.433.287,- realiasi Rp. 3.971.852.777,- atau 87,19%.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target Rp. 5.724.843.050,- realisasi Rp. 5.026.976.078,- atau 87,81%.
8. Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD, target Rp. 36.080.170.943,- realisasi Rp. 34.872.713.496,- atau 88,32%.

1.2 Layanan Administrasi DPRD, target Rp 23.503.883.854,- realisasi Rp. 19.692.737.418,- atau 83,79%. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, target dari Rencana Kerja 2023 Rp. 63.641.860.732.-terealisasi Rp. 46.391.240.987.- atau 62,79%,

Program ini yang terdiri dari 8 kegiatan yaitu :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, target Rp. 8.545.649.828,- realisasi Rp. 4.547.112.109,- atau 53,21%. Pembahasanan Kebijakan Anggaran, target Rp. 267.300.000,- realisasi Rp. 128.529.000,- atau 48,08%.
2. Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan, target Rp. 1.779.600.000,- realisasi Rp. 717.357.500,- atau 40,31%.
3. Peningkatan Kapasitas DPRD, target Rp. 13.023.496.000,- realisasi Rp. 8.888.898.000,- atau 68,25%.
4. Penyerapan dan Penghimpunan aspirasi Masyarakat, target Rp. 39.388.314.904,- realisasi Rp. 31.825.354.378,- atau 80,80%
5. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, target Rp. 2.400.000,- realisasi Rp. 280.000,- atau 11,67 %.
6. Pembahasan Kerja Sama Daerah, target Rp. 216.000.000,- realisasi Rp. 216.000.000,- atau 100%.
7. Fasilitasi Tugas DPRD, target Rp. 419.100.000,- realisasi Rp. 67.710.000,- atau 16,16%.

Pada Tahun 2023 telah dihasilkan 11 (Sebelas) Perda dan 3 (Tiga) Non Perda dari 22 Ranperda yang diusulkan dan sebagian Perda yang dihasilkan telah disosilisasikan. Adapun Perda dan non perda yaitu sebagai berikut :

a. Perda :
   1. Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pennyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;

2. Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perda Kerjasama Daerah;
3. Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
4. Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Makassar tahun 2023-2025;
6. Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung;
8. Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Perda Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Inovasi Daerah
10. Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan
11. Perda Nomor 11 Tahun 2023 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

b. Non Perda :

1. Rencana Kerja DPRD Kota Makassar Tahun 2024;
2. Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Makassar Tahun 2022.
3. Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

2. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja Berdasarkan data tersebut diatas dari semua program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tahun 2023 sudah memenuhi target kinerja.

3. Faktor faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai kebutuhan.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai kebutuhan.
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai kebutuhan.
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai kebutuhan.
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai kebutuhan.
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan sesuai kebutuhan.
   g. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai kebutuhan.
   h. Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD, dilaksanakan sesuai kebutuhan.
   i. Layanan Administrasi DPRD dilaksanakan sesuai kebutuhan.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja Program Renstra Perangkat daerah dan renja tahun 2023 adalah Implikasi yang ditimbulkan hanya menjadi silpa tahun berikutnya.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor tersebut adalah dilakukan penjadwalan ulang untuk melaksanakan kegiatan, dan harus selalu diupayakan untuk merencanakan dan menyusun jadwal waktu pelaksanaan dengan cermat dan terukur sesuai volume kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Makassar, mengintensifkan koordinasi dan

konsultasi serta mengadakan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan secara rutin.

Berikut ini kami sajikan tabel tentang perkiraan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2023 Sekretariat DPRD Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kota Makassar

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Makassar **Lembar :**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	4.02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%	90%	106%	1,2%	90%	90%	
					Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	90%	70%	0,78%	100%	100%	

						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%					90%	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**	**297.654.000**	**156.047.000**	52%	**287.094.500**	-	**0%**
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan Perangkat daerah	2	2	26.820 000	24 005 000	90%	20 539 500	-	0%
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKSKPD	jumlah dokumen RKA-SKSKPD	1	1	9 250 000	9 070 000	98%	6 888 000	-	0%
					Koordinasi dan Penyusunan perubahan Dokumen RKA-SKSKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKSKPD	1	1	10.104 000	10 104 000	100%	7 857 900	-	0%
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKSKPD	jumlah dokumen DPA SKSKPD	1	1	14.245 000	9 660 000	68%	17 424 100	-	0%
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKSKPD	jumlah dokumen Perubahan DPA-SKSKPD	1	1	10 875 000	10 645.000	98%	10 540 000	-	0%
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang di evaluasi	6	6	226 360 000	92 563 000	41%	223.845.000	-	0%
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah sub kegitan pada kegatan administrasi keuangan perangkat daerah	**100**	**100**	**9.896.853.910**	**8.418.012.948**	85%	**10.597.500.318**	**1.624.731.135**	**159%**

					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN	90	90	7.951.269 410	7.044 113 346	89%	8.828.300 890	1.229 074.135	13%
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9	9	930.120.000	551 050 000	59%	747 360 000	161.790 000	21%
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKSKPD	Jumlah administrasi perkantoran yang dtkelola	12	12	566 367 000	436 983 000	77%	606 162 428	86.740.000	14%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKSKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKSKPDangan Akhir	1	1	14 482 500	14 309 000	99%	7.674 000	-	0%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKSKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran	4	4	434 615.000	371.557 602	85%	408 003 000	77.127.000	18%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**54.678.833.065**	**50.274.140.780**	**92%**	**36.403.016.000**	**1.143.019.705**	3%
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah kebutuhan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang tersedia	250	250	340.500.000	329 252 500	97%	182 341.000	-	0%

					Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	jumlah Peserta dan informasi yang disebarluaskan ke pada masyarakat	15	15	47 754 850.000	45.981 978 500	96%	30.851 175 000	902.000 000	2%
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah peseta bimbingan teknisi implementasi peraturan perundang undangan	100	100	6 583 483 065	3.962 909 780	60%	5 369.500.000	241 019 705	4%
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**4.123.557.884**	**2.276.460.394**	**55%**	**3.079.632.390.000**	-	0%
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang di sediakan	10	10	111.761.800	82 166 000	74%	114 804 040	-	0%
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100	100	1 537.477 900	658 193.900	43%	661.407.000	-	0%
					Penyediaan Peralatan Rumh Tangga	Jumlah peralatan alat rumah tangga yang diadakan	10	10	279.610.000	155 547 500	56%	850.626.200	-	0%
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik yang diadakan	100	100	1 126 579.184	749.992 494	61%	573.981 000	-	0%
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan	100	100	408 699 000	90.508 000	52%	346 071 200	-	0%
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	10	10	335 080 000	329.192 500	90%	353.742 950	-	0%
					fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah fasilitasi Tamu	6	1	324 350 000	210.860.000	58%	295.000 000		0%

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**17**	**1**	**4.471.702.000**	**4.426.340.000**	90%	**986.102.000**	-	0%
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah komputer beserta kelengkapannya pendukungnya yang diadakan	1	14	4 273 702 000	4 228 440.000	70%	836.102 000	-	0%
					Pengadaan Aset tak Berwujud	Jumlah Aset yang tak berwujud	0	3	198 000 000	197 900.000	78%	-	-	0%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**17**	**100**	**4 555.433.287**	**3.971.852.777**	90%	**5.464.169.312**	**847535.562**	**15%**
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Surat Menyurat	21	1500	2 279 898.000	2 007 510.920	75%	2 634 385.200	536.607 000	20%
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Listrik, Telepon dan Air	1	3	1 337.185.287	1.129.691 857	75%	2.107 184.112	294 428 562	13%
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	6	938 350.000	834.650.000	75%	722 600.000	16.500.000	2%

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20**	**100**	**5 724.843.050**	**5.026.976.078**	**65%**	**3.466.697.300**	**-**	**0%**
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa jaminan barang milik daerah, Jumlah jasa perizinan dan sertifikasi yang diadakan, jumlah mobil jabatan yang dipelihara	2	12	231 945.850	148 832.125	80%	307.525 300	-	0%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak , dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Angkutan darat bermobil dan bermotor yang mendapat pemeliharaan rutin / berkal	19	94	1 304.015 200	964 747.321	80%	758 282 000	-	0%
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50	250	20 000.000	19 760.000	98%	16 000 000	-	0%
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	350	538.440 000	336 419 650	60%	204.340 000	-	0%
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	0	75.000 000	75.000.000	100%	100 000 000	-	0%

					Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	22	3.555.442 000	3 482 216 982	97%	2 080 550.000	-	0%
					Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD	**Jumlah Website Yang Dikelola**	20	100	**36.080.170.943**	**37.872.713.496**	96%	39 437 604 900	8.585.738.673	21%
					Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD	jumlah gaji dan tunjangan Ketua, wakil dan anggota DPRD	10	50	35 205 955.800	34.312.101.596	89%	35 866 555 800	8.585 738.673	21%
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	tersedianya pakaian dinas DPRD	1	4	162 500.000	160.975.000	99%	2 890 000 000	-	0%
					Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	tersedianya medical check up bagi DPRD	10	53	711.715 143	399 636 900	56%	681 049 100	-	0%
					Layanan Administrasi DPRD	**Jumlah kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD dan staf sekretariat**	20	2	**23.503.883.854**	**19.692.737.418**	83%	23.730 044 280	918 772 816	3%
					Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	58	290	11 737 471 837	9 215 285 283	78%	15.214.000 000	592 540 816	3%
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	20	110	11 766.412 017	5 517 941 325	65%	10 477 452 135	326.232 000	0%

					Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Terintegrasinya Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan pembentukan	ada	ada	63 641 860 732	46.391 240 987	90%	69.340 145 100		
						Perda dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD								
						Tersedianya Renja Tahunan pada setiap alat-alat kelangkapan DPRD Kota Makassar	ada	ada			100%			
						Tersusun dan Terintegrasinya Program- program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKSKPD)	ada	ada			90%			

					Pembentukan Perda Dan Peraturan DPRD	**Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat fraksi DPRD**	20	100	**8.545.649.828**	**4.547.112.109**	53%	6 814 299 300	196 108.940	2%
					Penyusunan dn Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4	24	45 000 000	9 245.000	20%	1 114 965.700	-	0%
					Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3	16	7.246 767 828	3 364.680 909	50%	4 362 800 400	43.777.940	1%
					Penyelenggara an Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3	100	693 882 000	613 186 200	88%	709 533 200	152.331 000	21%
					fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ketera ngan dan/ atau naskah akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2	8	560.000.000	560.000.000	100%	627 000 000	-	0%
					penyusunan tata tertib DPRD	jumlah dokumen yang tersusun	1	10	-	-	0%	-	-	0%

					Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Jumlah Hasil Pembahasan Kebijkan Anggaran**	20	100	**267.300.000**	**128.529.000**	48%	1 797 300.000	-	0%
					Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4	30	80 000 000	56 500 000	70%	113 700 000		0%
					Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4	30	32.000.000	19 482 000	60%	147.000 000	-	0%
					Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4	25	55 150 000	7.800 000	14%	506 800.000	-	0%
					Pembahas an APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4	25	55 150.000	17.947 000	32%	513.800.000	-	0%
					Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawab an APBD		10	45.000 000	26 800 000	59%	516.000 000	-	0%
					Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Jumlah Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah**	17	100	**1.779.600.000**	**717.357.500**	40%	5 666 515.600	-	0%
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintah dan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	5	50	377 400 000	113 863.000	30%	1.329 628.900	-	0%

					Hukum								
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	S	50	317 400 000	120 928 000	38%	1 269 628.900	-	0%
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	S	50	455 400 000	138 762 500	30%	1 485.628.900	-	0%
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	S	50	317 400 000	116 404 000	36%	1 269 628 900	-	0%
					Pengawasan Pengguna Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		15	-		0%	-	-	0%

					Pembahasan Laporan keterangan Pertanggungj awaban kepala daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaba n Kepala Daerah		20	312 000.000	227 400.000	72%	312 000.000	-	0%
					Peingkatan Kapasitas DPRD	**Jumlah Sub Kegiatan Pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	17	100	**13.023.496.000**	**8.888.898.000**	68%	10 920.576 000	-	0%
					Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	5	60	7.352 496 000	6.966 700 000	94%	4 700 000 000	-	0%
					Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3	100	1 154.000 000	110 000 000	9%	1.312 400.000	-	0%
					Penyediaan Tenaga Ahli FRAKSI	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	25	100	475.200 000	154.800 000	32%	475 200 000	-	0%
					Penyelenggaraan Humas	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3	16	4 013 900.000	1.656 698.000	41%	4 426 376 800	-	0%

					Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	3	9.900.000	700 000	7%	6.599.200	-	0%
					Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Jumlah Sub Kegiatan Pada Kegiatan Penyerapan Dan**	17	100	39 388 314.904	31 825 354 378	80%	42 254 489.600	9.011 980.210	21%
						Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								
					Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah 85pimpinan, anggota DPRD dan staf sekretariat	1	5	16 234 284 904	9 484.215 378	58%	2 258 000 000	73 911 250	3%
					Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	3	7 500 000	7 500 000	100%	7.499 100	-	0%
					Pelaksanaan RESES	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1	4	23.146 530 000	22 333 639 000	96%	39.988 990 500	-	0%
					Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Jumlah Capaian Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pngawasan DPRD**	17	98	2 400 000	280 000	11%	9.712 400	-	0%
					Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kode Etik DPRD	1	20			0%		-	0%
					Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	8	2.400.000	280 000	11%	9 712 400	-	0%

					Pembahasan Kerja Sama Daerah	**Jumlah Capaian Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah**	17	50	216 000 000	216 000 000	100%	110 299 700	-	0%
					Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	0	2	216.000 000	216 000.000	100%	110.299 700	-	0%
					Fasilitasi Tugas DPRD	**Jumlah Capaian Sub Kegiatan Pada Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD**	17	55	419 100 000	67 710.000	16%	1 766 952.500	-	0%
					Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10	25	274 500 000	44.520.000	16%	274.499 800	-	0%
					Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan kinerja Anggota DPRD	0	0	-	-	0%	-	-	0%
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	5	25	105 000.000	18.690.000	17%	1 452 628.900		0%
					Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4	5	39 600 000	4 500.000	11%	39 923 800	-	0%

2.1 .1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Makassar melaksanakan 2 (dua) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan. Dari keseluruhan total program, terdapat 1 (Satu) program utama dan 1 (satu) program penunjang/pendukung. Besaran anggaran yang dikelolah Sekretariat DPRD Kota Makassar pada Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 131.041.479.000,- pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sedangkan Rp. 69.340.145.000,- pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan angka realisasi dijabarkan pada penjelasan berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Target Rp. 131.041.479.000,- realisasi Rp. 34.427.133.963,- atau 39% dari yang direncanakan, dengan kegiatan diantaranya :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target Rp. 287.094.000,- realisasi sampai Triwulan II Rp. 8.568.500.- atau 2,98% dari yang direncanakan sampai Triwulan II.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target Rp 10.597.500.318,- terealisasi Rp. 5.156.169.360,- atau 49% dari yang direncanakan sampai Triwulan II
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah target Rp 36.403.016.000,- terealisasi Rp. 16.923.053.622,- atau 46% dari yang direncanakan sampai Triwulan II.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah target Rp. 3.079.632.390,- terealisasi Rp. 320.524.650.,- atau 10% dari target yang direncanakan di Triwulan II.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah target Rp. 8.575.720.000,- teralisasi Rp. 0- atau 0% dari yang direncanakan sampai Triwulan II.

6. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah. target Rp5.464.169.312,- realisasi Rp. 1.988 279.526,- atau 36% dari yang direncanakan sampai Triwulan II.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. target Rp. 3.466.697.300.- realisasi Rp. 248,666,250,-. atau 7% dari yang direncanakan.
8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraaan DPRD target Rp. 39.437.604.900,- realisasi Rp. 16,970,023,814.,- atau 43% dari yang direncanakan sampai Triwulan II.
9. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD Rp. 23.730.044.280,- realisasi Rp. 8,950,850,484.,- atau 38% dari target yang direncanakan sampai dengan Triwulan II.

B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Target Rp. 69.340.145.100,- realisasi Rp. 17.394.420.851,- atau 25% dari target yang direncanakan dengan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, target Rp. 6.814.299.300,- realisasi Rp 1.162.513.202,- atau 17% dari yang direncanakan sampai Triwulan II.

2 Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran target Rp. 1.797.300.000,- realisasi Rp. 0,- atau 0% dari yang direncanakan sampai Triwulan I.

3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah, target Rp. 5.666.515.600,- realisasi Rp. 758.181.660,- atau 13% dari yang direncanakan sampai Triwulan II.
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, target Rp. 10.920.576.000,- realisasi Rp. 1.966.674.400,- atau 18% dari target yang direncanakan sampai Triwulan II.
5. Kegiatan Penyerapan dan Perhimpunan aspirasi masyarakat, target Rp. 42.254.489.600,- realisasi Rp. 13,125,381,362,- atau 31% dari yang direncanakan sampai Triwulan II.

6. Kegiatan Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD target Rp. 9.712.400,- realisasi Rp. 0,- atau 0% dari yang direncanakan sampai Triwulan II.
7. Kegiatan Pembahasan Kerja sama Daerah, target Rp. 110.299.700,- realisasi Rp. 17.850.000,- atau 16% dari yang direncanakan sampai Triwulan II.
8. Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD, target Rp. 1.766.952.500,- realisasi Rp. 363.820.227,- atau 20% dari yang direncanakan sampai Triwulan II.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Untuk mengukur pencapaian kinerja tahun 2023 pada Sekretariat DPRD Kota Makassar didasarkan pada pengukuran kinerja sasaran dan bukan kepada kinerja hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Sekretariat DPRD Kota Makassar telah menyusun formulasi indikator-indikator kinerja serta merumuskan Indikator Kinerja Utama berdasarkan rangkaian Indikator Kinerja/kegiatan yang telah tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2016. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Makassar didasarkan pada keberhasilan memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Sekretaris DPRD Kota Makassar dengan Bapak Walikota Makassar.

Berdasar sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Makassar maka ditentukan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Utama (diliat iku skpd)

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	2	3
1.	Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam menfasilitasi kegiatan.	Jumlah Dewan yang puas x 100% Jumlah Anggota DPRD
2.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi

3.	Persentase fasilitas rapat-rapat dewan tepat waktu	Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi
4	Indeks kepuasan masyarakat	Jumlah kriteria IKM yang dipenuhi x 100% Jumlah kriteria IKM
5.	Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti x 100% Jumlah pengaduan
6	Nilai hasil evaluasi AKIP	Angka nilai dari Inspektorat
7.	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti.	Jumlah temuam BPK x 100% Jumlah temuan yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Adapun capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Makassar yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam peningkatan kualitas pelayanan, Integritas Aparatur, serta Akutantabilitas dalam melayani tugas dan fungsi Pimpinanan Anggota DPRD Kota Makassar.

Seiring dengan berkembangnya Kota Makassar menjadi Kota Metropolitan dan makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, Sekretariat DPRD Kota Makassar dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas dan kualifikasi aparatur dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang semakin rumit dan kompleks sehingga target capaian Kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Segala daya dan upaya dengan integritas dan kapabilitas yang tinggi serta sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD Kota Makassar telah dikerahkan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai SOP guna memenuhi target capaian Kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian Kinerja tersebut diketahui bahwa ada realisasi program dan kegiatan yang direncanakan telah memenuhi target dan adapula target yang belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dari program pada tahun 2023 adalah :

1.1 Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota target yang tercapai 94,98%, tertinggi Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sebesar 98,99% sedangkan kegiatan yang lainnya cukup memuaskan.

1.2 Untuk Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD target yang tercapai 62,79%. Adapun Kegiatan yang tercapai sesuai target yaitu Pengawasan Pembahasan Kerja sama Daerah 100%, dan Penyerapan dan Perhimpunan aspirasi masyarakat 80,80% sedangkan kegiatan yang sedang dan terendah ada 5 (Lima) kegiatan yaitu :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 53,21%
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran 48,08%
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 40,31%
4. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD 11,67%
5. Fasilitasi Tugas DPRD 16,16%

Adapun faktor faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program kegiatan adalah :

1. Efesiensi penggunaan anggaran dan hasil negoisasi melalui proses pengadaan barang dan jasa.
2. Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Makassar sangat tergantung dari agenda Pimpinan dan Anggota DPRD serta alat kelengkapan.
3. Dinamika politik yang berkembang di DPRD sulit diprediksi secara pasti.
4. Pembahasan Anggaran dan Peraturan Daerah lebih cepat selesai dari yang direncanakan sehingga anggaran yang telah disediakan tidak terserap seratus persen.
5. Beberapa target kinerja kegiatan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan riil yang berkembang.

Dalam perjalanan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Makassar tentu saja ada kendala yang dihadapi, namun harus ada upaya untuk dilakukan pemecahan masalah yang ada yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan, bimbingan teknis dan konsultasi.
2. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan kesemua Pimpinan Fraksi dan Alat kelengkapan DPRD.
3. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-udangan yang berlaku.
4. Memperbarui dan meningkatkan saran dan prasarana pendukung secara kualitas sehingga mendukung kondusifitas kerja DPRD Kota Makassar.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, untuk perencanan kegiatan dan anggaran diusahakan memperhatikan baik realisasi keuangan maupun hasil yang dicapai ditahun tahun sebelumnya. Hanya saja kesulitan di Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam pelaksanaan kegiatan sangat tergantung dengan Dewan sehingga ada beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah disesuai dengan tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Makassar

No.	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja					Realisasi capaian		proyeksi		Catatan analisis	Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8						9
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	-	ada	ada		ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKSKPD)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	-	ada	ada		ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk Melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	-	ada	ada		ada

2.3 ISU—ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUPOKSI SKPD

Sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Makassar mempunyai fungsi Penyelenggaraan kesekretariatan DPRD, Sekretariat DPRD Kota Makassar menghadapi berbagai permasalahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana kerja Daerah yang telah dirumuskan.

Penyusunan arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala serta ancaman yang mungkin timbul selama periode Pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang di pilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Adapun arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Makassar pada tahun 2025 adalah :

- Meningkatkan kualitas penyusunan kajian Perundang-perundangan
- Meningkatkan kualiatas penyelenggaraan pembahasan Ranperda/ Keputusan DPRD/Peraturan DPRD
- Meningkatkan pelayanan kehumasan dan publikasi kegiatan DPRD
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembahasan penganggaran
- Meningkatkan kualitas penyelenggaran fungsi pengawasan DPRD
- Meningkatkan pengembangan kerjasama dan penjaringan aspirasi Masyarakat.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Makassar mempunyai fungsi Penyelenggaraan kesekretariatan DPRD, Sekretariat DPRD Kota Makassar menghadapi berbagai permasalahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana kerja Daerah yang telah dirumuskan.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka peran Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangatlah penting, karena kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD selaku entitas penting dalam pembangunan Daerah juga ditentukan oleh kenyaman dan kelancaran fasilitas

terhadap pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perhatian atau fokus utama dalam penentuan isi-isu strategis (penting) pada Sekretariat DPRD Kota Makassar adalah :

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya serta untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi bersinergi secara menyeluruh.
3. Tingkat kedisiplinan dan tanggungjawab pegawai masih kurang.
4. Tidak meratanya pembebanan pekerjaan, serta tidak adanya bakc up jika terjadi sesuatu pada orang yang diberi tugas serta tanggung jawab.
5. Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten.
6. Belum sinergi dan sinkronnya peraturan pengelolaan keuangan daerah serta dinamisnya aturan yang mengakibatkan multitafsir sehingga menimbulkan kesulitan dalam mengimplementasikan dan optimalisasikan tertib admnistrasi keuangan daerah.
7. Adanya Peralihan Anggota DPRD Kota Makassar hasil pemilihan legislatif tahun 2024
8. Kebutuhan akan penyusunan tata tertib DPRD yang baru
9. Pemilihan alat kelengkapan DPRD
10. Target – target kinerja untuk penunjang tugas dan fungsi DPRD ...

A. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sekretariat DPRD Kota Makassar berfokus pada misi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN. Untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Sekretariat

DPRD Kota Makassar sebagai pembantu Walikota Makassar dibidang ke Sekretariatan DPRD dengan berbagai masalah diatas, maka dalam pelaksanaan misi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menjadi hambatan pencapaiannya. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD.
2. Peningkatan kualitas SDM Sekretariat DPRD.
3. Ketersediaannya SDM yang kurang berkualitas di SKPD yang menduduki jabatan sesuai dengan keahliannya.
4. Adanya kebebasan informasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan etika pejabat.
5. Adanya sifat individualistis dan kurangnya etika berorganisasi yang menghambat terjalinnya kerjasama.

B. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Analisis lingkungan strategis dalam Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD menggunakan tekhnik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yaitu suatu tehnik analisis dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari suatu organisasi yang selanjutnya dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Lingkup Internal meliputi :

1. Kekuatan (Strengths) yaitu faktor yang pada organisasi yang bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan.
2. Kelemahan (Weaknesses) segala sesuatu yang menjadi masalah didalam organisasi dan melemahkan posisi organisasi.

Lingkup Eksternal meliputi :

1. Peluang (Opportunities) Faktor faktor diluar organisasi yang memberikan kemungkinan organisasi untuk dapat eksis, tumbuh dan berkembang serta menjadi potensi bagi organisasi agar mampu bersaing dengan pihak luar.
2 Ancaman (Threats) yaitu faktor faktor diluar organisasi yang membahayakan atau mengancam eksistensi suatu organisasi.

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Makassar agar dapat ditetapkan secara cermat dan tepat perlu didukung akurasi analisis lingkungan dan asumsi yang terkait dengan faktor faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor Internal

1. Kekuatan
   a. Tersedianya Sarana dan Prasarana kerja;
   b. Tersedianya anggaran/Dana;
   c. Adanya struktur organisasi kelembagaan yang jelas.
2. Kelemahan
   a. Masih adanya Pegawai yang belum memahami tugas dan fungsi;
   b. Adanya penempatan sumber daya manusia yang belum sesuai kebutuhan serta tingkat kedisiplinan masih kurang; dan
   c. Masih adanya pegawai yang belum mengetahui dalam pelaksanaan tugas fungsinya.

Faktor Eksternal

1. Peluang
   a. Adanya upaya pembinaan karyawan untuk meningkatkan disiplin.
   b. Adanya hubungan koordinasi dengan instansi terkait dan
   c. Adanya hubungan kerja yang baik antara Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD.
2. Ancaman
   a. Adanya kepentingan kepentingan pribadi atau partai diluar kelembagaan DPRD.

b. Adanya kegiatan DPRD yang dilaksanakan diluar jam kerja.
c. Adanya kebebasan informasi dan keterbukaan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitasi dan etika pejabat negara.

Dengan adanya faktor internal dan eksternal sebagaimana tersebut di atas, sebagai input untuk ditetapkan sebagai faktor kunci serta landasan kritis dalam penyusunan rencana stratejik instansi, sehingga dokumen ini mampu menjadi dasar pijakan penyusunan kinerja tahunan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan hasil review terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD Sekretariat DPRD Kota Makassar dengan hasil analisis kebutuhan untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD. Disamping itu review terhadap rancangan awal RKPD juga menunjukkan bahwa besaran anggaran setelah dianalisis dengan kebutuhan mengalami perubahan yang disesuaikan dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku. Perbedaan setelah dilakukan analisis kebutuhan terhadap rancangan awal RKPD disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan tahun yang akan datang serta adanya perubahan-perubahan kebijakan dan lain-lain.

Mengenai perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C .31.

Review Terhadap Rancangan Awal RKSKPD Tahun 2025

Kota Makassar

Nama Perangkat Daerah :
Sekretariat DPRD

Lembar .....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Set. DPRD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	120.639.363 000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Set. DPRD	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	106.595 977 000,00		
			Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%			
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%			
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Set. DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	100%	337 049.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Set DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	100%	114 888 400,00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Set. DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	19 098 400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Set DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	31 459 400,00		

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKSKPD	Set DPRD	Jumlah Dokumen RKA SKSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKSKPD	1 Dokumen	7 297 000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKSKPD	Set DPRD	Jumlah Dokumen RKA SKSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKSKPD	3 Dokumen	16.093 000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKSKPD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKSKPD	1 Dokumen	7.753 000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKSKPD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKSKPD	3 Dokumen	17 141 000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKSKPD	Set. DPRD	Jumlah Dokumen DPA-SKSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKSKPD	1 Dokumen	10.276 000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKSKPD	Set. DPRD	Jumlah Dokumen DPA-SKSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKSKPD	3 Dokumen	11 961 000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKSKPD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKSKPD	1 Dokumen	9 200.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKSKPD	Set. DPRD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKSKPD	3 Dokumen	12 043 000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Set DPRD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	283 423 600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Set DPRD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	26 191 000,00	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Set. DPRD**	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	100%	21.053.227 464	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Set DPRD**	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	**21.155 930.192,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Set. DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang	**19.438.125.164**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Set DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/Bulan	**19 102.241 013,00**	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Set. DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	801 157 000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	**808.452.379,00**	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKSKPD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKSKPD	12 Dokumen	389 264.700	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKSKPD	Set. DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKSKPD	3 Dokumen	820 556 200,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKSKPD	Set DPRD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKSKPD	1 Laporan	11 147 600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKSKPD	Set DPRD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKSKPD	3 Laporan	11.147 600,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKSKPD	Set. DPRD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKSKPD dan laporan koordinasi penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeteran SKSKPD	4 Laporan	413.533.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKSKPD	Set DPRD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKSKPD dan laporan koordinasi penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKSKPD	4 Laporan	413 533.000,00	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Set DPRD**	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	**11.241.335.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Set DPRD**	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	**8 257.835 000,00**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Set DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	250 Paket	276 335.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Set DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	250 Paket	**276.335.000,00**	
	Bimbingan Teknis Implementasi	Sat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	100 Orang	10 965.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi	Set DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	100 Orang	7.981.500 000,00	

	Peraturan Perundang Undangan		Peraturan Perundang Undangan			Peraturan Perundang-Undangan		Peraturan Perundang Undangan			
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Set. DPRD**	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	**4.026.490.988**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Set. DPRD**	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	**9.537.402.180,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Set DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	114.678.568	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Set. DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	101 348.260,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Set DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	681.923 720	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Set. DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	1 313 477.200,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Set DPRD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	1 086 712 000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Set. DPRD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	364.068.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Set DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	1.213 099 580	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Set. DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	656 262.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Set DPRD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	358 736 720	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Set DPRD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	450 906.720,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Set. DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	317 640 000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Set DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	317 640 000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Set. DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	253 700 000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Set DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	333 700 000,00	

5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Set. DPRD**	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	**1.015 502.200**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Set. DPRD**	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	**73.209 000,00**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Set. DPRD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1.015 502.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Set DPRD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	63 Unit	73 209 000,00	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Set DPRD**	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**1 Tahun**	**5.463.076.352**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Set DPRD**	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	**6.103.961 552,00**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Set. DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2 627.500 000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Set DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	**2.627.385.200,00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Set DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2 106 976.352	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Set DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2 106.976.352,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Set. DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	728 600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Set. DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.369 600 000,00	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Set. DPRD**	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	**2.791.180.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Set. DPRD**	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	**6.642.738.000,00**	

	Pemerintahan Daerah					Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Set DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	316 260 000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Set DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	3 949 662.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Set DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	773 080 000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Set DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	591.236 000,00	
	Pemeliharaan Mebel	Set DPRD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	16 000000	Pemeliharaan Mebel	Set. DPRD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150	16 000 000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Set DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	336 340 000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Set. DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	336 340 000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Set. DPRD	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Set DPRD	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	100 000 000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Set. DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 249 500 000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Set DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 249 500 000	

8	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Set. DPRD**	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	**38 836.780.228**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Set. DPRD	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	**38 181.094.308,00**	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Set. DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang	35.258.644 228	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Set. DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	36 503.453 308,00 K	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Set. DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	50 Paket	2.896 203 000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Set. DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	50 Paket	890 203 000,0	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Set. DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	100 Orang	681 933 000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Set DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	100 Orang	787 438 000,00	
9	**Layanan Administrasi DPRD**	**Set DPRD**	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	**25.874.722 768**	**Layanan Administrasi DPRD**	**Set. DPRD**	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**100%**	**22 528 918.368,00**	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Set. DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	200 Laporan	16 404 000.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Set DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	200 Laporan	12 945 500 000,0	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Set. DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	9 470 722.768	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Set DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	9 583 418.368,00	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**Set. DPRD**	**Terintegrasinya Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan**	**ADA**	**107.036 139.000**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Set. DPRD**	**Terintegrasinya Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan**	**ADA**	76.240 023 000.00	

			Dokumen Anggaran Setwan DPRD					Dokumen Anggaran Setwan DPRD			
			Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota Makassar	ADA				Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota Makassar	ADA		
			Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan Fungsi Pembentukan Perda Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKSKPD)	ADA				Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan Fungsi Pembentukan Perda Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKSKPD)	ADA		
10	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Set. DPRD	Terintegrasinya Program - Program DPRD Untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD	100%	37 813.205.000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Set DPRD	Terintegrasinya Program - Program DPRD Untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD	100%	18 467 905 000 00	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Set. DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	1 115.081 000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	738 081 000,00	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	25 Dokumen	4 365.209.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Set. DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	3.671 208 000,00	
	Penyelenggaraan Kajian	Set DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang Undangan	20 Dokumen	729 415.000	Penyelenggaraan Kajian	Set. DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang Undangan	20 Dokumen	729 415 000,00	

	Perundang Undangan					Perundang Undangan					
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Set. DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	627.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Set. DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 Dokumen	627.000.000,00	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	2 Dokumen							
	Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Set DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peratura Daerah yang dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	50 orang	30 976 500 000	Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Set DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peratura Daerah yang dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	50 orang	12 702 200 000,00	
11	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Set DPRD**	**Terintegrasinya Program - Program DPRD Untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD**	**100%**	**1.867.607.000**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Set DPRD**	**Terintegrasinya Program - Program DPRD Untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD**	**100%**	**1.867.607.000,00**	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	114 470 500	Pembahasan KUA dan PPAS	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	114.470 500,00	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	214 114.500	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	214 114 500,00	
	Pembahasan APBD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	20 Dokumen	496 951 000	Pembahasan APBD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	496.951 000,00	
	Pembahasan APBD Perubahan	Set. DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	20 Dokumen	525 940 500	Pembahasan APBD Perubahan	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	525.940 500,00	

	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	100%	516.130.500	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	516 130 500,00	
12	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Set. DPRD**	**Terintegrasinya Program - Program DPRD Untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD**	**100%**	**5.255.910.000**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Set DPRD**	**Terintegrasinya Program - Program DPRD Untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD**	**100%**	3 888 910 000,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Set. DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	10 Laporan	1 322 735.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Set DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	952 735 000,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Set. DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	10 Laporan	1 262 735 000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Set DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2 Laporan	892 735 000,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Set DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	10 Laporan	1 478 735 000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Set DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2 Laporan	1 082 735 000,00	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Set DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	10 Laporan	879 705 000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Set DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2 Laporan	648 705 000,00	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Set. DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	12 Dokumen	312.000 000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Set DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	312.000.000,00	
13	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Set. DPRD**	**Terintegrasinya Program - Program DPRD Untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD**	**100%**	**11.042.426.000**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Set. DPRD**	**Terintegrasinya Program - Program DPRD Untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD**	**100%**	10 431 974.000,00	

	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Set. DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9-30 Orang	1 312 400 000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Set DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	50 Orang	1.312 400.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Set. DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	12 Orang	475 200 000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Set DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	50 Orang	475.200.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Set. DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	50 Dokumen	4 445 096 000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	50 Dokumen	. 3.834 644 000,00	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Set. DPRD	Jumlah Dokumen Rancana Kerja DPRD	1 Dokumen	9 730 000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	9 730 000,00	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Set DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	12 Dokumen	4 800.000.000	Publikasi dan Dokumentasi Dawan	Set. DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Publikasi	12 Dokumen	4 800 000.000,00	
14	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Set. DPRD**	**Terintegrasinya Program - Program DPRD Untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD**	**100%**	**49 183.069.000**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Set DPRD**	**Terintegrasinya Program - Program DPRD Untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD**	**100%**	**40.210 705.000,00**	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Set. DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	100 Laporan	5 826 300.000	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Set. DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	100 Laporan	5 788 236.000,00	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Set. DPRD	Jumlah Dokumen Pokok Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	7.205.000	Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD	Set. DPRD	Jumlah Dokumen Pokok Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	7.205 000	
	Pelaksanaan Reses	Set. DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	41.049 364.000	Pelaksanaan Reses	Set. DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	32 062.764.000,00	
	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Set. DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancanga Peraturan Daerah	50-75 orang	2 300 200.000	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Set. DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancanga Peraturan Daerah	50-75 orang	2 352 500.000,00	

15	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Set DPRD**	**Terintegrasinya Program - Program DPRD Untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD**	**100%**	**9 984 000**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Set. DPRD**	**Terintegrasinya Program - Program DPRD Untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD**	**100%**	**9 984.000,00**	
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Set DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	-	Penyusunan Kode Etik DPRD	Set DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD			
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Set. DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	9 984 000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Set. DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	9 984.000,00	
16	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Set. DPRD**	**Terintegrasinya Program - Program DPRD Untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD**	**100%**	**103.317.000**	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Sat. DPRD**	**Terintegrasinya Program - Program DPRD Untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD**	**100%**	**103.317 000,00**	
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Set DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	2 Dokumen	103.317 000	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Set DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	2 Dokumen	103.317 000,00	
17	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Sat. DPRD**	**Terintegrasinya program-Program DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD**	**100%**	**1.760.621.000**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Set. DPRD**	**Terintegrasinya program-Program DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD**	**100%**	**1.259.621.000,00**	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	50 Dokumen	268 038.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sat. DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	50 Dokumen	233 038 000,00	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Set DPRD	Jumlah Laporan Fraksi Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	25 Laporan	-	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Set. DPRD	Jumlah Laporan Fraksi Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	25 Laporan		
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Set. DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	50 Dokumen	-	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	50 Dokumen	986 715 000,00-	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Set. DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	39 868 000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Set DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	39 868 000,00	

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sekretariat DPRD Kota Makassar merupakan SKPD yang bertugas sebagai fasilitator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan unsur pelayanan dan dukungan terhadap Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, terkait dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Sekretariat DPRD tidak berhubungan langsung dengan Masyarakat dan tidak bisa mengakomodasi usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung, sehingga di dalam dokumen perencanaannya Sekretariat DPRD tidak dapat mencantumkan usulan program dan kegiatan Masyarakat.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025
Kota Makassar

Sekretariat DPRD Kota Makassar

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran Volume	catatan
1	2	3	4	5	6
	PERENCANAAN,PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	SKSKPD	Indeks capaian kinerja Perangkat Daerah	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKSKPD	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan Perangkat daerah	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKSKPD	SKSKPD	jumlah dokumen RKA SKSKPD	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan perubahan Dokumen RKA-SKSKPD	SKSKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKSKPD	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKSKPD	SKSKPD	jumlah dokumen DPA SKSKPD	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKSKPD	SKSKPD	jumlah dokumen Perubahan DPA-SKSKPD	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKSKPD	Jumlah Dokumen yang di evaluasi	-	-
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	SKSKPD	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah	-	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKSKPD	jumlah gaji dan tunjangan ASN	-	-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SKSKPD	Jumlah administrasi tugas ASN	-	-

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKSKPD	SKSKPD	jumlah penatausahaan keuangan	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKSKPD	SKSKPD	jumlah dokumen penyusunan akhir tahun	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKSKPD	SKSKPD	jumlah laporan pertriwulan	-	-
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	SKSKPD	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	SKSKPD	jumlah pakaian dinas yang tersedia	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	SKSKPD	jumlah yang mengikuti bimtek	-	-
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	SKSKPD	**Jumlah administrasi pelaksanaan umum**	-	-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKSKPD	tersedianya komponen intalasi listrik	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKSKPD	Tersedianya alat perlengkapan kantor	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumh Tangga	SKSKPD	tersedianya alat rumah tangga	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKSKPD	tersedianya kebutuhan logistik kantor	-	-
	Penyediaan Bahan Cetaakan dan Penggandaan	SKSKPD	jumlah bahan yang ingin di cetak	-	-
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKSKPD	tersedianya bahan bacaan	-	-
	fasilitasi kunjungan tamu	SKSKPD	terlaksanya fasilitasi kunjungan tamu	-	-
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SKSKPD	Jumlah pengadaan yang terlaksana	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKSKPD	tersedianya peralatan dan mesin	-	-
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SKSKPD	**Jumlah ketersediaan jasa pemerintah daerah**	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKSKPD	Jumlah Dokumen dan jasa	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKSKPD	Jumlah pembayaran air dan lainnya yg tersedia dikantor	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKSKPD	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	-	-
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SKSKPD	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	-	-

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKSKPD	Jumlah Unit Kendaraan dinas dan pemeliharaanya	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak , dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKSKPD	Jumlah Unit pajak kendaraan	-	-
	Pemeliharaan Mebel	SKSKPD	Jumlah Unit mebel	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKSKPD	Jumlah Unit peralatan mesin	-	-
	Pemeliharaan Aset TaK Berwujud	SKSKPD	Jumlah aset	-	-
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		tersedianya rehabilitasi bagunan kantor	-	-
	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	SKSKPD	**Indeks kepuasan layanan keuangan pimpinan, wakil dan anggota DPRD**	-	-
	Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD	SKSKPD	jumlah gaji dan tunjangan Ketua, wakil dan anggota DPRD	-	-
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		tersedianya pakaian dinas DPRD	-	-
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	SKSKPD	tersedianya medical check up bagi DPRD	-	-
	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	SKSKPD	Jumlah layanan administrasi DPRD	-	-
	FaSILITASI Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	SKSKPD	Jumlah peserta	-	-
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	SKSKPD	jumlah unit	-	-
	PEMBENTUKAN PERDA DAN PERATURAN DPRD	SKSKPD	**Jumlah perda dan peraturan DPRD**	-	-
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SKSKPD	jumlah perda , non perda	-	-
	Pembahasan Rancangan Perda	SKSKPD	jumlah perda , non perda yang di bahas	-	-
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	SKSKPD	jumlah perda yang terselenggara	-	-
	fasilitasi Penyusunan Penjelasan/keterangan dan/ atau naskah akademik	SKSKPD	tersedianya fasilitasi penyusunan naskah akademik	-	-
	Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	SKSKPD	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan bersama DPRD dan Perda	-	-
	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	SKSKPD	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-

	Pembahasan KUA dan PPAS	SKSKPD	tersedianya rapat kua-ppas	-	-
	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	SKSKPD	tersedianya rapat kua-ppas perubahan	-	-
	Pembahasan APBD	SKSKPD	tersedianya rapat APBD	-	-
	Pembahasan APB Perubahan	SKSKPD	tersedianya rapat APBD Perubahan	-	-
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	SKSKPD	tersedianya rapat pertanggungjawaban APBD	-	-
	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	SKSKPD	**Jumlah pengawasan pemerintah yang terselenggara**	-	-
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintah dan Hukum	SKSKPD	tersedianya rapat komisi	-	-
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	SKSKPD	tersedianya rapat komisi	-	-
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	SKSKPD	tersedianya rapat komisi	-	-
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	SKSKPD	tersedianya rapat komisi	-	-
	Pembahasan Laporan Pertanggunjawaban Kepala Daerah	SKSKPD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-	-
	PEINGKATAN KAPASITAS DPRD	SKSKPD	**Jumlah tingkat kapasitas DPRD**	-	-
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	SKSKPD	jumlah publikasi dan dokumen	-	-
	Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli	SKSKPD	jumlah penyediaan tim ahli	-	-
	Penyediaan Tenaga Ahli FRAKSI	SKSKPD	jumlah penyediaan tim ahli fraksi	-	-
	Penyelenggaraan Humas	SKSKPD	tersedianya penyelenggaraan Humas	-	-
	Penyusunan Program Kerja DPRD	SKSKPD	jumlah dokumen Program Kerja DPRD	-	-

	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	SKSKPD	**Jumlah aspirasi dari masyarakat**	-	-
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	SKSKPD	jumlah Kunker dalam daerah DPRD	-	-
	Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD	SKSKPD	Jumlah Pokir yang tersusun	-	-
	Pelaksanaan RESES	SKSKPD	terlaksanya reses	-	-
	Sosialisasi Rancangan Perda	SKSKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	-	-
	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	SKSKPD	**Jumlah pelaksanaan kode etik bagi anggota DPRD**	-	-
	Pengawasan Kode Etik DPRD	SKSKPD	jumlah pengawasan	-	-
	PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH	SKSKPD	**Jumlah Pembahasan kerja sama anggota DPRD**	-	-
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	SKSKPD	Komunikasi sesama Anggota DPRD dan Staf	-	-
	FASILITASI TUGAS DPRD	SKSKPD	**Jumlah tugas DPRD yang difasilitasi**	-	-
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	SKSKPD	Komunikasi sesama Anggota DPRD dan Staf	-	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	SKSKPD	Komunikasi sesama Anggota DPRD dan Staf	-	-
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	SKSKPD	Komunikasi sesama Anggota DPRD dan Staf	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan Pembangunan Nasional sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang diarah untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan diseluruh Indonesia. Adapun tema yang diangkat pada RKP tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang meliputi :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan;

Dengan memperhatikan mandat undang-undang terkait maka dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ini menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045 sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap pertama Pembangunan 5 Tahunan.

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025-2029 sangat strategis untuk meletakan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan

berikutnya sekaligus menjadi window opportunity bagi kita semua untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Karena itu RKP 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dengan terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan kita telah mengubah berbagai tatanan kehidupan bangsa dalam bermasyarakat dan bernegara, kesadaran masyararakat akan hak dan kewajibanya semakin tinggi tuntutan kelompok masyarakat terhadap demokratisasi, dan tranparansi dalam penyelenggaraan negara semakin kuat dan kritis oleh karena itu lembaga perwakilan sebagai lembaga penyalur aspirasi mau atau tidak mau dituntut tidak hanya aktif tapi juga harus antisipatif, oleh karena itu Sekretariat DPRD Kota Makassar yang secara struktur dan teknis operasional mendukung dan memfasilitasi kegiatan DPRD harus dapat mengikuti irama kinerja DPRD, sehingga di tetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) 2025 Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025
Peningkatan Kualitas pelayanan Kesekretariatan DPRD Kota Makassar	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD Kota Makassar	Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD	74%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber saya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam penyusunan Renja 2025 ini terbagi dalam 2 (dua) program, 1 (satu) program utama dengan 8 (delapam) kegiatan dan 1 (satu) program pendukung dengan 9 (sembilan) kegiatan program. Berikut pembagian program dan kegiatan tahun 2025 :

A. Program pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ;
   3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   8. Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD;
   9. Layanan Administrasi DPRD.

B. Program Utama yaitu Program Dukungan PelaksanaanTugas dan Fungsi DPRD dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
   1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
   2. Pembahasan Kebijakan Anggaran;
   3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
   4. Peningkatan Kapasitas DPRD;
   5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
   6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
   7. Pembahasan Kerja Sama Daerah;
   8. Fasilitasi Tugas DPRD;

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Makassar

Lembar .....

Nama Perangkat Daerah :
Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas**	**Set DPRD**	**90%**	106.595 977 000,00	**APBD**			**103.600.703.500**
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah		**100%**					
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		**90%**					
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun**	**Set DPRD**	**100%**	**114.888.400,00**	**APBD**			**498.094.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Set DPRD	2 Dokumen	31.459.400,00	APBD			21.539.500

					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKSKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKSKPD	Set DPRD	3 Dokumen	16 093.000,00	APBD			15.125.000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKSKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKSKPD	Set DPRD	3 Dokumen	17.141.000,00	APBD			15.979.000
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKSKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKSKPD	Set DPRD	3 Dokumen	11 961.000,00	APBD			20 120.000
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKSKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKSKPD	Set DPRD	3 Dokumen	12 043 000,00	APBD			16 750 000
					Evauasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Set DPRD	8 Laporan	16 181 999,00	APBD			436.943.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Set DPRD**	**100%**	21.155 930 192,00	**APBD**			**12.512.879.346**
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Set DPRD	64 Orang/Bulan	19 102 241.013,00	APBD			10 181.704 846
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Set DPRD	10 Dokumen	808.452 379,00	APBD			930.120.000

					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKSKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKSKPD	Set DPRD	3 Dokumen	820.556 200,00	APBD			752 175 500
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKSKPD	Set DPRD	3 Laporan	11 147 600,00	APBD			13 474 000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKSKPD dan laporan koordinasi penyusunan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKSKPD	Set DPRD	4 Laporan	413.533.000,00	APBD			635 405.000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Set DPRD**	**100%**	8 257 835 000,00	**APBD**			**38.289.215.000**
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Set DPRD	250 Paket	276 335 000,00	APBD			358.700.000
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Set DPRD	20 kali Orang	2 352 500 000,00	APBD			31 162.015 000
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Set DPRD	100 Orang	7 981 500 000,00	APBD			6 768 500.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Set DPRD**	**100%**	3 537 402 180,00	**APBD**			**3.994.909.280**

					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Set DPRD	10 Paket	101 348 260,00	APBD			101 640.800
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Set DPRD	100 Paket	1.313.477.200,00	APBD			1.243 806.400
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Set DPRD	10 Paket	364 068 000,00	APBD			129 610 000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Set DPRD	100 Paket	656 262 000,00	APBD			1.512.108 080
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Set DPRD	100 Paket	450 806 720,00	APBD			408.699.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Set DPRD	10 Dokumen	317 640.000,00	APBD			304.045.000
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Set DPRD	12 Laporan	338 700.000,00	APBD			295.000 000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Set DPRD**	**100%**	73 209.000,00	**APBD**			**836.102.000**
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Set DPRD	63 Unit	73 209.000,00	APBD			**836.102.000**
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Set DPRD**	**100%**	6 103 961.552,00	**APBD**			**6.133.618.360**

					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Set DPRD	12 Laporan	2 627.385 200,00	APBD			3 889 282 000
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Set DPRD	12 Laporan	2.106 976 352,00	APBD			1 185 336 360
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Set DPRD	12 Laporan	1.369 600 000,00	APBD			1.059.000.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Set DPRD**	**100%**	6.642 738 000,00	**APBD**			**4.595.818.800**
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Set DPRD	50 Unit	3.949 662 000,00	APBD			509 068 000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Set DPRD	50 Unit	991 236 000,00	APBD			2 170 930 800
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Set DPRD	150	16 000 000,00	APBD			20 000 000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Set DPRD	60 Unit	336.340 000 00	APBD			513 440.000
					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Set DPRD	4 Unit	100.000 000 00	APBD			100 000.000

					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Set DPRD	2 Unit	1 249 500.000,00	APBD			1 282.380.000
					Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Set DPRD**	**100%**	38 181 094 308,00	**APBD**			**36.764.541.738**
					Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Set DPRD	50 Orang/Bulan	36 503.453 308,00	APBD			35 866 555 800
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Set DPRD	50 Paket	890.203 000,00	APBD			162.500.000
					Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Set DPRD	100 Orang	787.438 000,00	APBD			735 485.938
					Layanan Administrasi DPRD	**Terintegrasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Set DPRD**	**100%**	22.528 918 368,00	**APBD**			**24,088.927.976**
					Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Set DPRD	200 Laporan	12 945 500.000,00	APBD			15 219 000.000
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Set DPRD	4 Paket	9 583 418.368,00	APBD			8 869.927.976
					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**Terintegrasinya Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD**	**Set DPRD**	**ADA**	76 240 023 000,00	**APBD**			**64.324.694.800**
						Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat		**ADA**					

						Kelengkapan DPRD Kota Makassar							
						Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan Fungsi Pembentukan Perda Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKSKPD)		**ADA**					
					Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Terintegrasinya Program - Program DPRD Untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD**	Set DPRD	**100%**	18 467 905.000,00	**APBD**			**7.747.238.000**
					Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Set DPRD	2 Dokumen	738 081 000,00	APBD			45.000.000
					Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Set DPRD	10 Dokumen	3 671.209 000,00	APBD			6.433 900.000
					Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Set DPRD	20 Dokumen	729.415 000,00	APBD			732.738 000
					Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Set DPRD	8 Dokumen	627 000 000,00	APBD			535.600 000
					Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daera	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Set DPRD	50 Orang	12.702.200 000,00				40 851.175 000,00

					Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Terintegrasinya Program - Program DPRD Untuk**	**Set DPRD**	**100%**	1 867 607 000,00	**APBD**		**606.300.000**
						melaksanakan tugas dan fungsi DPRD						
					Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Set DPRD	1 Dokumen	114.470 500,--	APBD		180 000 000
					Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Set DPRD	1 Dokumen	214 114 500,00	APBD		180.000 000
					Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Set DPRD	2 Dokumen	496 951 000,00	APBD		100.650 000
					Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Set DPRD	2 Dokumen	525 940 500,00	APBD		100.650.000
					Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Set DPRD	1 Dokumen	516 130 500,00	APBD		45.000 000
					Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Terintegrasinya Program - Program DPRD Untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD**	**Set DPRD**	**100%**	3 888 910 000,00	**APBD**		**2.407.230.800**
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Set DPRD	12 Laporan	892 735 000,00	APBD		483.600.000
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Set DPRD	2 Laporan	892 735 000,00	APBD		423.600 000
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Set DPRD	2 Laporan	1 082 735 000,00	APBD		577.200 000
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Set DPRD	2 Laporan	648 705.000,00	APBD		423.600 000

					Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Set DPRD	1 Dokumen	312 000.000	APBD			312 000 000
					Peningkatan Kapasitas DPRD	**Terintegrasinya Program - Program DPRD Untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD**	**Set DPRD**	**100%**	**10.431.974.000**	**APBD**			**13.154.416.800**
					Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Set DPRD	12 Dokumen	4 800.000.000,00	APBD			6.230 000.000
					Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Set DPRD	50 Orang	1 312 400 000,00	APBD			1.154.000 000
					Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Set DPRD	50 Orang	475.200.000	APBD			475.200.000
					Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Set DPRD	50 Dokumen	3.834 644 000,00	APBD			5.234 416 800
					Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Set DPRD	1 Dokumen	9 730.000,00	APBD			10.800 000
					Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Terintegrasinya Program - Program DPRD Untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD**	**Set DPRD**	**100%**	40 210 705 000,00	**APBD**			**39.853.640.000**
					Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Set DPRD	100 Laporan	5.788 236 000,00	APBD			17 352 000.000
					Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Set DPRD	3 Dokumen	7 205 000,00	APBD			7 500.000

					Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Set DPRD	3 Dokumen	32 062 764.000,00	APBD			22 494 140 000
					Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Terintegrasinya Program - Program DPRD Untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD**	**Set DPRD**	**100%**	**9.984 000,00**	**APBD**			**9.600.000**
					Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Set DPRD			APBD			
					Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Set DPRD	1 Laporan	**9.984.000,00**	APBD			9.600.000
					Pembahasan Kerja Sama Daerah	**Terintegrasinya Program - Program DPRD Untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD**	**Set DPRD**	**100%**	**103.317.000,00**	**APBD**			**314.400.000**
					Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Set DPRD	2 Dokumen	103.317 000,000	APBD			314 400 000
					Fasilitasi Tugas DPRD	**Terintegrasinya program-Program DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD**	**Set DPRD**	**100%**	**1.259.621.000,00**	**APBD**			**419.100.000**
					Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Set DPRD	50 Dokumen	233.038 000,00	APBD			274.500 000
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Set DPRD	50 Dokumen	986 715 000,00	APBD			105.000.000
					Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Set DPRD	1 Dokumen	39.868 000,00	APBD			39.600.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat DPRD Kota Makassar akan melaksanakan 17 (tujuh belas) program pada tahun 2025 dengan rincian 8 (delapan) program utama dan 9 (sembilan) program penunjang. Penjelasan singkat mengenai pelaksanaan program Sekretariat DPRD pada tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

A. Program Utama yaitu Program Dukungan PelaksanaanTugas dan Fungsi DPRD sebagai berikut :
   1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
   2. Pembahasan Kebijakan Anggaran;
   3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
   4. Peningkatan Kapasitas DPRD;
   5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
   6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
   7. Pembahasan Kerja Sama Daerah;
   8. Fasilitasi Tugas DPRD.

B. Program pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   8. Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD,
   9. Layanan Administrasi DPRD.

Rincian rencana kerja dan pendanaan pada Sekretariat DPRD Kota Makassar tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**106.595.977.000,00**
	PERENCANAAN,PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**114.888.400,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.459.400,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKSKPD	16.093 000,00
	Koordinasi dan Penyusunan perubahan Dokumen RKA-SKSKPD	17.141.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKSKPD	11 961.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKSKPD	12.043.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.191.000,00
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**21.155.930.192,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19 102.241.013,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	808.452.379,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKSKPD	820.556.200,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKSKPD	11.147.600,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKSKPD	413.533.000,00
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**8.257.835.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	276.335 000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	7.981.500.000,00
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**3.537.402.180,00**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	101.348.260,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.313.477.200,00
	Penyediaan Peralatan Rumh Tangga	364.068 000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	656.262.000,00
	Penyediaan Bahan Cetaakan dan Penggandaan	450.906.720,00
	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	317.640.000,00
	fasilitasi kunjungan tamu	333.700.000,00
	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**73.209.000,00**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.209.000,00

	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**6.103.961.552,00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.627.385.200,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.106.976.352,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.369.600.000,00
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**6.642.738.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.949.662.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak , dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	991.236.000,00
	Pemeliharaan Mebel	16.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	336.340.000,00
	Pemeliharaan Aset TaK Berwujud	100.000.000,00
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.249.500.000,00
	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	**38.181.094.308,00**
	Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD	36.503.453.308,00
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	890.203.000,00
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	787.438 000,00
	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	22.528.918.368,00
	FaSILITASI Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12.945.500 000,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	9.583.418.368,00
2.	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**76.240.023.000,00**
	PEMBENTUKAN PERDA DAN PERATURAN DPRD	18.467.905.000,00
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	738.081.000,00
	Pembahasan Rancangan Perda	3 671.209.000,00
	Penyelenggaraan Kajian Perundang undangan	729.415.000,00
	fasilitasi Penyusunan Penjelasan/keterangan dan/ atau naskah akademik	627.000 000,00
	Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	12.702.200.000,00
	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	**1.867.607.000,00**
	Pembahasan KUA dan PPAS	114.470.500,00

	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	214.114 500,00
	Pembahasan APBD	496.951.000,00
	Pembahasan APB Perubahan	525 940.500,00
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	516.130 500,00
	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	**3.888.910.000,00**
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintah dan Hukum	952.735.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	892.735 000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.082.735.000,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	648.705.000,00
	Pembahasan Laporan Pertanggunjawaban Kepala Daerah	312.000.000,00
	PEINGKATAN KAPASITAS DPRD	**10.431.974.000,00**
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4.800.000.000,00
	Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli	1.312.400 000,00
	Penyediaan Tenaga Ahli FRAKSI	475.200 000,00
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3.834.644.000,00
	Penyusunan Program Kerja DPRD	9.730.000,00
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4 800.000.000,00
	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	**40.210.705.000,00**
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	5.788.236.000,00
	Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD	7.205.000,00
	Pelaksanaan RESES	32.062.764 000,00
	Sosialisasi Rancangan Perda	2.352.500.000,00
	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	**9.984.000,00**
	Pengawasan Kode Etik DPRD	9.984.000,00
	PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH	**103.317.000,00**
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	103.317.000,00
	FASILITASI TUGAS DPRD	**1.259.621.000,00**
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	233.038.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	986 715.000,00
	Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	39 868 000,00

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2025 disusun melalui pembahasan bersama baik dengan seluruh komponen organisasi maupun stakeholder lain yang bersifat koordinatif dengan Sekretariat DPRD. Saran dan masukan dari seluruh pihak terkait akan menjadikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Makassar pada tahun 2025 terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dokumen Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman kerja oleh seluruh unsur pada Sekretariat DPRD Kota Makassar sehingga dapat terbangun komitmen bersama dalam mencapai Visi Misi Pemerintah Kota Makassar. Melalui dokumen renja ini diharapkan para pegawai dapat melaksanakan tupoksinya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

Selanjutnya, dokumen renja ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat DPRD yang diharapkan dapat konsisten sesuai dengan yang telah tertuang dalam dokumen ini. Selain itu, diharapkan kinerja-kinerja maksimal dari seluruh sumber daya yang terdapat pada Sekretariat DPRD untuk mengaktualisasikan renja ini.

Makassar, 22 Juli 2025

H. DAHYAL, S.Sos., M.Si

“

MAKASSAR
KOTA YANG BAIK
UNTUK SEMUA

PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR

TAHUN 2025



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017);

9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
8. Rencana Panjang Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) RKPD Tahun 2025 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Sistematika RKPD Tahun 2025 terdiri atas:
   a. BAB I PENDAHULUAN;
   b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
   c BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
   d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
   e BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
   f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
   g. BAB VII PENUTUP.

(2) Sistematika RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025 dan penyusunan RAPBD Tahun 2025

Pasal 4

(1) Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan, dapat dilakukan Perubahan RKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau;
   b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

(3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 08 Juli 2024
WALI KOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 08 Juli 2024
Pj SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

FIRMAN HAMID PAGARRA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 36

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan Kehadirat Allah SWT. atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Penyusunan Renja ini dalam rangka tindak lanjut Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan strategis sebagai penjabaran program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 merupakan periode ke 4 tahun 2025 dan 5 periodesasi dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 untuk melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan yang menjadi Urusan dan Kewenangan Sekteteriat Daerah Kota Makassar serta dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik *(Good Governance)* dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa *(Clean Goverment)* serta untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar dalam mencapai target indikator yang telah ditetapkan dan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah ikut serta berperan aktif dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini kami ucapkan terima kasih Semoga dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat lebih terarah dan berkualitas serta bermanfaat bagi pembangunan Kota Makassar.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat menjadi pedoman bagi Unit Kerja Lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar

Makassar, 09 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Firman Hamid Pagarra, SSTP., M.PUB.POL
Pangkat: Pembina TK I
NIP. 19810702 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR TABEL 3
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2. Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistimatika Penulisan 7
BAB II 9
EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Makassar 9
2.2 1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023 53
2 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024 54
2 3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 65
2 4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD 67
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 77
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 82
3 1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 82
3 2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 82
3.3 Program dan Kegiatan 82
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR 114
BAB V PENUTUP 142

DAFTAR TABEL

1. Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 .. 45
2. Tabel Realisasi Triwulan I Tahun Anggarn 2024 54
3. Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Makassar.. 55
4. Tabel T-C 31 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Makassar..... 68
5. Tabel T-C 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025..... 78
6. Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kota Makassar . 97
6. Tabel Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 (Sekretariat Daerah Kota Makassar dari Aplikasi SIPD) 121

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2025, yang merupakan tahun ke-4 tahun 2025 dan Rencana Strategis Sekretaris Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026.

Dokumen Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 sebagai dasar penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk tahun perencanaan 2025 dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2025 beserta pendanaan indikatif yang juga memuat partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan (baik hasil Musrembang maupun hasil Reses/pokok pikiran Anggota DPRD Kota Makassar). Adapun penodesasi Renstra 2021-2026 yang telah dijalankan adalah Renstra periode Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023, sedangkan Renstra penode Tahun 2024 sementara berjalan sampai dengan semester I (Triwulan I) tahun 2024.

Sinkronisasi Program dan Kegiatan dalam dokumen Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dengan Pemerintahan diatasnya baik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupaun Pemerintah Pusat yang sejalan dengan Prioritas Pembangunan Nasional. Selanjutnya Dokumen Rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 akan menjadi Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggarann (RKA) Sekretariat Daerah Kota Makassar yang akan bermuara menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025

1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822),

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahas Batas-Batas Daerah Kolamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Salawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Penenntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323),
12 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312),
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5859 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015, Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar sebagaima yang telah diubah dengan perda nomor 8 tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN LALU

Merupakan kajian atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2023/tahun n-2 dan perkiraan capaian tahun 2024/tahun n-1, yang selanjutnya merupakan gambaran pencapaian realisasi target Renstra 2021-2026 Sekretariat Daerah Kota Makassar yang dijelaskan dalam sub bab ; Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Makassar, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Makassar, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Makassar, Review terhadap Rancangan Akhir RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Merupakan telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Makassar serta Program dan Kegiatan yang dijelaskan dalam sub bab ; Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Merupakan penjelasan dan gambaran atas rencana kerja Sekretariat Daerah Kota Makassar yang akan dilakukan pada tahun 2025, serta prognosis rencana kerja Sekretariat Daerah Kota Makassar tahun 2025

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembangunan tahun 2025, maka diperlukan evaluasi hasil capaian Renja tahun 2023 dan perkiraan pencapaian Triwulan I Renja Tahun 2024

Dalam mengukur pencapaian Kinerja Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Makassar didasarkan pada pengukuran kinerja sasaran dan program serta kinerja hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan.

Capaian target kinerja dan penyerapan atas dana pagu program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kota Makassar terdiri atas 4 program, dan 20 kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan .

1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
10. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
11 Kegiatan Penataan Organisasi
12. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

b. **Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**

Terdiri dari 4 (empat) kegiatan :

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
2. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
4 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah

2) Sub Kegiatan **Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan(RT,RW,PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat** dengan anggaran sebesar Rp.6.565.957.200 dan realisasi anggaran sebesar Rp.6.483.312.264 atau 98,74%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 153 Kelurahan atau 100%; dan
3) Sub Kegiatan **Fasilitasi Pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna** dengan anggaran sebesar Rp.2.548.113.400 dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.503.912.517 atau 98,27%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 153 Kelurahan atau 100%.

Indikator ke 2 kinerja program adalah **Persentase PKK Aktif** dengan realisasi capaian kinerja sebesar **100%** yang dilaksankan dalam Kegiatan ;

Kegiatan **Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** dengan realisasi capaian kinerja kegiatan 100% melalui 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu ;

Sub Kegiatan **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK. Posyandu. LPM. dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat** dengan anggaran **hibah PKK** sebesar Rp.8.000.000.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp.8.000.000.000 atau 100%.

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan dalam tabel realisasi Kegiatan **Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023				
	Target		Realisasi		Capaian kinerja (fisik %)
			%	RP	
Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan RT/RW dan PKK	153	Lembaga	89,63	20.350.109.802	100
Terselenggaranya Pembinaan LPM dan Peningkatan Peran Kelembagaan dalam kegiatan Pengembangan Kelurahan	153	Lembaga			100
Terselenggaranya Sayembara dan Pembinaan Kelompok TTG	153	Kelompok TTG			100

a. Tingkat rata-rata capaian kinerja $\left(x = \frac{300}{3} x\ 100\% \right) = 100\%$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ pembinaan\ yang\ dilaksanakan}{jumlah\ pembinaan\ yang\ ditargetkan} x\ 100\% \right)$

Rincian target fisik (target kinerja kegiatan/output) :

- Pembinaan Kelembagaan.RT/RW dan PKK di 153 Lembaga dengan realisasi keuangan sebesar Rp11.362.885.021,00 atau 83,61%;
- Pembinaan LPM dan Peningkatan Peran Kelembagaan dalam kegiatan Pengembangan Kelurahan di 153 Lembaga dengan realisasi keuangan sebesar Rp6 483.312.264,00 atau 98,74%;
- Sayembara dan Pembinaan Kelompok TTG di 153 kelurahan dengan realisasi keuangan sebesar Rp2.503 912 517,00 atau 98,27%.

b Alokasi anggaran sebesar Rp.22.704.059.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.20.350.109.802 atau sebesar 89,63%

Faktor pendorong :

- Koordinasi dengan para Stakeholder dan Lembaga kemasyarakatan tetap berjalan dengan baik

Faktor penghambat :

- Pemilu raya RT/RW secara digital belum dilaksanakan karena masih menuai pro kontra di masyarakat

Tindak lanjut yang disarankan :

- Melakukan koordinasi yang efektif dengan para stakeholder dan lembaga kemasyarakatan

II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Realisasi dan **Capaian Indikator Kinerja Program** Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.233.202.360.003,-** atau **87,62%** dari jumlah pagu anggaran TA 2023 sebesar **Rp.266.143.240.204,-**, sedangkan rata-rata capaian kinerja/fisik rata-rata sebesar **93,75%** yang dijabarkan kedalam 12 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. Adapun indikator kinerja program dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator ke 1 kinerja program **Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, Laporan Kinerja dan keuangan Perangkat Daerah**, yang dilaksankan dalam kegiatan .

   Kegiatan **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar **100%** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.292.040.004,-** atau **79,97%** dan jumlah pagu sebesar **Rp.365.183.570** yang dilaksanakan melalui 5 (lima) Sub Kegiatan sebagai berikut :

   1) Sub Kegiatan **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.191.570.004 atau 86,23%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 2 Dokumen atau 100%;
   2) Sub Kegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** dengan realisasi anggaran sebesar Rp 19.766.000 atau 58,65%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 60 Dokumen atau 100%. Perlu dijelaskan bahwa 60 dokumen sebagai target kinerja sesungguhnya adalah 2 dokumen saja yaitu, 1 dokumen RKA anggaran Pokok dan 1 dokumen RKA anggaran Perubahan dan/atau DPA Parsial, sedangkan yang dimaksud 60 dokumen hanya merupakan penggandaan/fotocopy dan 2 dokumen dimaksud;
   3) Sub Kegiatan **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.32.344.000 atau 70,94%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 25 Dokumen atau 100%. Perlu dijelaskan bahwa 25 dokumen sebagai target kinerja sesungguhnya adalah 2 dokumen saja yaitu, 1 dokumen DPA anggaran Pokok dan 1 dokumen DPA anggaran Perubahan, sedangkan yang dimaksud 25 dokumen hanya merupakan penggandaan/fotocopy dari 2 dokumen dimaksud;
   4) Sub Kegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.19 173 500 atau 78,51%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 3 Dokumen atau 100%

5) Sub Kegiatan **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.29.186.500 atau 74,28%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 4 Dokumen atau 100%.

Dan penjelasan diatas dapat digambarkan dalam tabel realisasi Kegiatan **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023			
	Target	Realisasi		Capaian kinerja (fisik %)
		%	RP	
Jumlah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah yang disusun	2 dokumen			100
Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	60 dokumen			100
Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	25 dokumen	79,97	292.040.004	100
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang di susun	3 dokumen			100
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	4 dokumen			100

a. Tingkat rata-rata capaian kinerja $\left(x = \frac{500}{5} x\ 100\%\right) = 100\%$

Rumus .$\left(x = \frac{jumlah\ dokumen\ yang\ disusun}{jumlah\ dokumen\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rincian target fisik (target kinerja kegiatan/output) :

- 2 dokumen perencanaan-SKPD (1 dokumen Rencana Kerja Pokok, dan 1 dokumen Rencana Kerja Perubahan) realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp191 570.004,00 atau 86,23%;
- 60 dokumen RKA-SKPD (1 dokumen RKA-SKPD namun dicetak dalam 60 rangkap dokumen yang terdiri dari 30 rangkap RKA Pokok dan 30 Rangkap RKA Perubahan) realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp19.766 000,00 atau 58,65%;
- 25 dokumen DPA-SKPD (1 dokumen DPA-SKPD namun dicetak dalam 25 rangkap dokumen yang terdiri 15 rangkap DPA Pokok dan 10 Rangkap DPA Perubahan) realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp32 344 000,00 atau 70,94%;
- 4 dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD (1 dokumen LKjIP, 1 dokumen Perjanjian Kinerja Pokok, 1 dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan, dan 1 Dokumen PNPRB/SAKIP) realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp19.173.500,00 atau 78,51%;

- 4 dokumen laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (4 dokumen laporan Evaluasi Renja yang terdiri dari TRW I, TRW II, dan TRW IV) realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp29 186.500,00 atau 74,28%.

Faktor pendorong

- Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Tracking Dokumen Keuangan (SIITAKA) yang berbasis internet maka, sangat membantu dalam proses pencairan anggaran lingkup Sekretariat daerah Kota Makassar.
- Sistem Operasional dan Prosedur (SOP) dan alokasi anggaran yang terencana dalam anggaran kas serta dukungan sumber daya pegawai yang cukup tersedia.

Faktor Penghambat

- Bagian atau Unit Kerja kurang konsisten dalam menjalankan Anggaran Kas yang telah ditetapkan;
- Terdapat perubahan anggaran atau pergeseran anggaran (DPA Parsial) yang menunjukkan kurang optimal dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Tindak lanjut yang disarankan

Untuk Renja tahun 2025 yang akan datang akan lebih diupayakan peningkatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan berkolaborasi dan bersinergi kepada semua elemen penyelenggara pemerintahan untuk Kota Makassar yang lebih baik.

2. Indikator ke 2 kinerja program **Indeks kepuasan pelayanan yang difasilitasi dan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah**, dengan realisasi capaian kinerja rata-rata sebesar **87%** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.135.076.315.078,-** atau **88,59%** dari jumlah pagu anggaran sebesar **Rp.152.466.129.522** yang dilaksankan dalam 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :
   1) Kegiatan **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar **91%**, dan realisasi keuangan sebesar **Rp.32.686.448.873,-** atau **74,85%**, yang dilaksanakan melalui 6 (enam) Sub Kegiatan sebagai berikut .
      a) Sub Kegiatan **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** dengan realisasi anggaran sebesar Rp 29 640.244.783 atau 74,39%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 14 Bulan atau 100%;
      b) Sub Kegiatan **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1 918.683.978 atau 84,71%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 12 Bulan atau 100%,

c) Sub Kegiatan **Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD** dengan realisasi anggaran sebesar Rp 773.865 146 atau 83,18%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 100%;

d) Sub Kegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.927.500 atau 68,85%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 5 Laporan atau 100%;

e) Sub Kegiatan **Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.99.024 600 atau 33,49%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 4 Kegiatan atau 50%,

f) Sub Kegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD** dengan realisasi anggaran sebesar Rp 230.702.866 atau 77,70%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 12 Laporan atau 100%.

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan dalam tabel realisasi Kegiatan **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023				
	Target		Realisasi		Capaian kinerja (fisik %)
			%	RP	
Jumlah Bulan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	12	Bulan			100
Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	14	Bulan			100
Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bulanan yang Tersusun	12	laporan	74,85	32 686.448.873	100
% Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian yang Terverifikasi	100	Persen			100
Jumlah Kegiatan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4	Kegiatan			50
Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang tersusun	5	Laporan			100

Tingkat rata-rata capaian kinerja $\left(x = \frac{550}{6} x\ 100\%\right) = 91\%$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ dokumen\ yang\ susun}{jumlah\ dokumen\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ kegiatan\ yang\ dilaksanakan}{jumlah\ kegiatan\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rincian target fisik (target kinerja kegiatan/output) :

- 12 dokumen pencairan berupa 12 bulan penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (honorarium bulanan pengelolaan/penatausahan keuangan) realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp29.640 244 783.00 atau 74,39%;

- 14 dokumen pencairan berupa 14 bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN (12 bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, 1 bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN untuk THR, dan 1 bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN untuk gaji ke 13) realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.918.683.978,00 atau 84,71%;
- 12 dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD, dengan realisasi fisik 100% (12 dokumen laporan untuk laporan bulan/triwulanan/Semesteran) dengan realisasi keuangan sebesar Rp773.865.146,00 atau 83,18%,
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, realisasi fisik 100% dokumen yang diverifikasi dengan realisasi keuangan sebesar Rp23.927 500,00 atau 68,85%;
- 4 kegiatan dan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (1 keg. Untuk Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BPK-RI, 1 keg Untuk Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar, 1 keg. Untuk Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulsel, dan 1 keg Untuk Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan BPKP) realisasi fisik 50% (bahan untuk BPK-RI dan Inspektorat Kota Makassar) dengan realisasi keuangan sebesar Rp99 024.600,00 atau 33,49%;
- 5 dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 dokumen LRA, 1 dokumen LAK, 1 dokumen LO, 1 dokumen LPE, dan 1 dokumen CALK) realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp230.702 866.00 atau 77,70%.

Faktor pendorong

- Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Tracking Dokumen Keuangan (SIITAKA) yang berbasis internet maka, sangat membantu dalam proses pencairan anggaran lingkup Sekretariat daerah Kota Makassar.
- Sistem Operasional dan Prosedur (SOP) dan alokasi anggaran yang terencana dalam anggaran kas serta dukungan sumber daya pegawai yang cukup tersedia;

Faktor Penghambat

- Bagian atau Unit Kerja kurang konsisten dalam menjalankan Anggaran Kas yang telah ditetapkan;
- Terdapat perubahan anggaran atau pergeseran anggaran (DPA Parsial) yang menunjukkan kurang optimal dalam proses perencanaan dan penganggaran,

Tindak lanjut yang disarankan

Untuk Renja tahun 2025 yang akan datang akan lebih diupayakan peningkatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan berkolaborasi dan bersinergi kepada semua elemen penyelenggara pemerintahan untuk Kota Makassar yang lebih baik.

2) Kegiatan **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar **88%** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.30.094.460.785,-** atau **94,45%**, yang dilaksanakan melalui 5 (lima) Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a) Sub Kegiatan **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.839.764.530 atau 66,13%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 36 jenis atau 100%;
   b) Sub Kegiatan **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** tidak dilakukan pelaksanaan atas sub kegiatan ini;
   c) Sub Kegiatan **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan** dengan realisasi anggaran sebesar Rp 307 300.000 atau 50,21%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 1791 bahan bacaan atau 84,79%;
   d) Sub Kegiatan **Fasilitasi Kunjungan Tamu** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.27.815.384.031 atau 99,75%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 292 kunjungan atau 100%;
   e) Sub Kegiatan **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** realisasi anggaran sebesar Rp.1.132.032.224 atau 54,05%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 84 perjalanan atau 59,84%.

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan dalam tabel realisasi Kegiatan **Administrasi Umum Perangkat Daerah** sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023					Capaian kinerja (fisik %)
	Target		Realisasi			
			%	RP		
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung yang diadakan	36	Jenis	94,45	30 094 480 785		100
Jumlah bahan bacaan yang disediakan	2112	eksemplar				100
Jumlah Kunjungan Tamu Pemerintah Kota Makassar yang Difasilitasi	200	Kunjungan				100
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	141	Perjalanan				100

Tingkat rata-rata capaian kinerja $\left(x = \frac{400}{4} x\ 100\%\right) = 100\%$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ jenis\ yang\ dilaksanakan}{jumlah\ jenis\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ eksemplar\ yang\ dilaksanakan}{jumlah\ eksemplar\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ kunjungan\ tamu\ yang\ dilaksanakan}{jumlah\ kunjungan\ tamu\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ orang\ rapat\ yang\ dilaksanakan}{jumlah\ orang\ rapat\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rincian target fisik (target kinerja kegiatan/output) :

- 36 jenis Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp839 764 530,00 atau 66,13;
- 2112 eksemplar bahan bacaan, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp307.300 000,00 atau 50,21,
- 500 kunjungan Tamu Pemerintah Kota Makassar, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp27.815.384.031,00 atau 99,75%;
- 192 perjalanan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.132.032 224,00 atau 54,05%.

Faktor pendorong

Tersedianya alokasi anggaran dalam bentuk penyediaan surat penyediaan dana (SPD)

Faktor penghambat

Proses pengadaan barang dan jasa (RUP) di aplikasi Sipabaji baru diterapkan.

Tindak lanjut yang disarankan

Akan ditingkatkan kelancaran proses RUP melalui aplikasi Sipabaji.

3) Kegiatan **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar **89%** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.31.674.553.048,-** atau **92,20%** yang dilaksanakan melalui 4 (empat) Sub Kegiatan sebagai berikut
   a) Sub Kegiatan **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** dengan realisasi anggaran sebesar Rp 325.802.000 atau 86,19%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 10500 surat atau 79%;
   b) Sub Kegiatan **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3 617 934.998 atau 60,30%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 12 bulan atau 100%;
   c) Sub Kegiatan **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dengan realisasi anggaran sebesar Rp 25 474 692 050 atau 99,30%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 8 jenis atau 75%,

d) Sub Kegiatan **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.256.124.000 atau 97,30%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 300 orang atau 100%

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan dalam tabel realisasi Kegiatan **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023				Capaian kinerja (fisik %)
	Target		Realisasi		
			%	RP	
Jumlah surat masuk dan surat keluar yang tersedia	10500	Surat			64
Jumlah penyediaan Kebutuhan jasa telepon, air dan listrik	12	Bulan	92,20	31.674 553.048	100
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10	Jenis			52
Jumlah tenaga kebersihan yang terlibat dalam kebersihan kantor	300	Orang			100

Tingkat rata-rata capaian kinerja $\left(x = \frac{316}{4} x\ 100\%\right) = 79\%$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ surat\ yang\ dibuat}{jumlah\ surat\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ bulan\ yang\ dibayarkan}{jumlah\ bulan\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ jenis\ yang\ dilaksanakan}{jumlah\ jenis\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ orang\ yang\ dilayani}{jumlah\ orang\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rincian target fisik (target kinerja kegiatan/output) :

- 10500 surat masuk dan surat keluar, dengan output kinerja 64% dengan realisasi keuangan sebesar Rp325.802.000,00 atau 86,19%;
- 12 Bulan penyedian jasa telepon,air dan listrik yang dibayarkan setiap bulan, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp3.617.934.998,00 atau 60,30%;
- 10 Jenis perlatan dan perlengkapan kantor, dengan output kinerja 52% dengan realisasi keuangan sebesar Rp25.474.692 050,00 atau 99,30%;
- 300 Orang tenaga kebersihan kantor, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp2.256.124.000,00 atau 97,24%.

Faktor pendorong

Tersedianya alokasi anggaran dalam bentuk penyediaan surat penyediaan dana (SPD).

Faktor penghambat

Proses pengadaan barang dan jasa (RUP) di aplikasi Sipabaji baru diterapkan.

Tindak lanjut yang disarankan

Akan ditingkatkan kelancaran proses RUP melalui aplikasi Sipabaji.

4) Kegiatan **Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar **67%** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.2.450.130.710,-** atau **74,18%** yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan **Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.164.965.710 atau 89,11%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 12 bulan atau 100%;

b) Sub Kegiatan **Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0 atau 0%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini sebesar 0%, hal terjadi disebabkan KDH dan WKDH beserta keluarga belum menggunakannya;

c) Sub Kegiatan **Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.285.165.000 atau 75,22%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 12 bulan atau 100%.

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan dalam tabel realisasi Kegiatan **Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023				
	Target		Realisasi Keu		Capaian kinerja (fisik %)
			%	RP	
Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Bulan	74,18	2.450.130.710	100
Jumlah Pimpinan dan keluarga yang mendapatkan jasa perawatan kesehatan (Medical Check Up)	8	Bulan			0
Jumlah Bulan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	12	Orang			100

Tingkat rata-rata capaian kinerja $\left(x = \frac{200}{3} x\ 100\%\right) = 66\%$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ bulan\ yang\ dilaksanakan}{jumlah\ bulan\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ orang\ yang\ diperiksa\ jasa\ medical\ check\ up}{jumlah\ orang\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rincian target fisik (target kinerja kegiatan/output) :

- 12 bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (gaji dan tunjangan bulan Januari s/d Desember 2023) realisasi fisik 100% (12 kali pembayaran gaji dan tunjangan KDH & WKDH, 1 Kali kali pembayaran gaji dan tunjangan KDH & WKDH untuk THR, dan 1 Kali kali pembayaran gaji dan tunjangan KDH & WKDH untuk gaji ke 13) dengan realisasi keuangan sebesar Rp164.965.710 atau 89,11%;

- 8 orang pelaksanaan medical check up KDH/WKDH dan keluarga yang mendapatkan jasa medical check up (1 KDH, 1 isteri KDH, 2 anak KDH, 1 WKDH, 1 suami WKDH, 2 anak WKDH) realisasi fisik 0%. Hal ini dikarenakan KDH dan WKDH belum menggunakan anggaran ini dengan realisasi keuangan sebesar Rp0,00 atau 0,00%;
- 12 bulan Penyediaan Penunjang Operasional Kepala Darah dan Wakil Kepala Daerah (12 kali pembayaran Penunjang Operasional Kepala Darah dan Wakil Kepala Daerah) realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp2.285.165.000 atau 75,22%.

Faktor pendorong

- Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Tracking Dokumen Keuangan (SIITAKA) yang berbasis internet maka, sangat membantu dalam proses pencairan anggaran lingkup Sekretariat daerah Kota Makassar.
- Sistem Operasional dan Prosedur (SOP) dan alokasi anggaran yang terencana dalam anggaran kas serta dukungan sumber daya pegawai yang cukup tersedia;

Faktor Penghambat

- Pada sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan realisasi sebesar 0%, yang mana beliau belum menggunakan anggaran tersebut. Sedangkan penganggaran pada sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan *mandatory spending* atas Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tindak lanjut yang disarankan

Untuk Renja tahun 2025 yang akan datang akan lebih diupayakan peningkatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan berkolaborasi dan bersinergi kepada semua elemen penyelenggara pemerintahan untuk Kota Makassar yang lebih baik.

5) Kegiatan **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar **100%** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.38.170.701.662,-** atau **97,18%** yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a) Sub Kegiatan **Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.555.722.000 atau 97,46%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 1 rumah jabatan atau 100%;

b) Sub Kegiatan **Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.830.202 055 atau 93.47%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 1 rumah jabatan atau 100%;

c) Sub Kegiatan **Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.784.777.607 atau 98,78%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 1 rumah jabatan atau 100%.

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan dalam tabel realisasi Kegiatan **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** sebagai berikut .

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023				
	Target		Realisasi		Capaian kinerja (fisik %)
			%	RP	
Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1	Rumah Jabatan			100
Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1	Rumah Jabatan	97,18	38.170.701 662	100
Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1	Rumah Dinas			100

Tingkat rata-rata capaian kinerja $\left(x = \frac{300}{3} x\ 100\%\right) = 100\%$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ fasilitasi\ yang\ dilaksanakan}{jumlah\ fasilitasi\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rincian target fisik (target kinerja kegiatan/output) :

- 1 rumah jabatan Kepala Daerah, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp13.555.722.000,00 atau 97,46%;
- 1 rumah jabatan Wakil Kepala Daerah, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp7.830.202.055,00 atau 93,47%,
- 1 rumah dinas Sekretariat Daerah, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp16.784.777.607,00 atau 98,78%.

Faktor pendorong

Tersedianya alokasi anggaran dalam bentuk penyediaan surat penyediaan dana (SPD).

Faktor penghambat

Proses pengadaan barang dan jasa (RUP) di aplikasi Sipabaji baru diterapkan

Tindak lanjut yang disarankan

Akan ditingkatkan kelancaran proses RUP melalui aplikasi Sipabaji.

3. Indikator ke 3 kinerja program **Persentase Pengelolaan BMD dan Aset Lainnya yang mendukung Produktivitas Sekretariat Daerah**, dengan realisasi capaian kinerja rata-rata sebesar **96%** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.66.764.213.401,-** atau **85,17%** dari jumlah pagu sebesar **Rp80.764.825.292,-** yang dilaksankan dalam 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut .

1) Kegiatan **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar **100%** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.6.149.993.478,-** atau **91,97%** yang dilaksanakan melalui 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut .

a) Sub Kegiatan **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.315.685.958 atau 86,52%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 1 Laporan atau 100%;

b) Sub Kegiatan **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD** dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.834.307.520 atau 93,57%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 4 Dokumen atau 100%.

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan dalam tabel realisasi Kegiatan **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023			
	Target	Realisasi		Capaian kinerja (fisik %)
		%	RP	
Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Laporan	91,97	6 149 993 478	100
Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	4 Dokumen			100

Tingkat rata-rata capaian kinerja $\left(x = \frac{200}{2} x\ 100\%\right) = 100\%$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ unit\ yang\ dilaksanakan}{jumlah\ unit\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rincian target fisik (target kinerja kegiatan/output) :

- 1 laporan prognosis penatausahaan barang milik daerah atau output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp1 315 685.958,00 atau 86,52%,
- 4 dokumen penatausahaan barang milik daerah atau output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp4.834.307.520,00 atau 93,57%.

Faktor pendorong

Tersedianya alokasi anggaran dalam bentuk penyediaan surat penyediaan dana (SPD).

Faktor penghambat

Proses pengadaan barang dan jasa (RUP) di aplikasi Sipabaji baru diterapkan.

Tindak lanjut yang disarankan

Akan ditingkatkan kelancaran proses RUP melalui aplikasi Sipabaji.

2) Kegiatan **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar **100%** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.44.345.221.747,-** atau **88,05%** yang dilaksanakan melalui 4 (empat) Sub Kegiatan sebagai berikut .
   a) Sub Kegiatan **Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan** tidak dilakukan pelaksanaan atas sub kegiatan ini;
   b) Sub Kegiatan **Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.32.015.045.627 atau 87,09%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 100%;
   c) Sub Kegiatan **Pengadaan mebel** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.021.393.330 atau 93,93%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 10 jenis atau 100%,
   d) Sub Kegiatan **Pengadaan peralatan dan mesin lainnya** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.308.782.790 atau 90,01%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 10 jenis atau 100%.

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan dalam tabel realisasi Kegiatan **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023				
	Target		Realisasi		Capaian kinerja (fisik %)
			%	RP	
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100	Persen	88,05	44 345.221.747	90
Jumlah Mebeleur yang diadakan	10	Jenis			100
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	17	Jenis			100

Tingkat rata-rata capaian kinerja $\left(x = \frac{290}{3} x\ 100\%\right) = 96\%$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ unit/jenis\ yang\ dilaksanakan}{jumlah\ unit/jenis\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rincian target fisik (target kinerja kegiatan/output) :

- 20% pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan output kinerja 90% dengan realisasi keuangan sebesar Rp32.015 045.627,00 atau 87,09%;
- 10 jenis mebeulair, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp2 021.393 330,00 atau 93,93%;
- 10 jenis peralatan dan mesin lainnya, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp10.308.782.790,00 atau 90,01%.

Faktor pendorong

Tersedianya alokasi anggaran dalam bentuk penyediaan surat penyediaan dana (SPD).

Faktor penghambat

Proses pengadaan barang dan jasa (RUP) di aplikasi Sipabaji baru diterapkan.

Tindak lanjut yang disarankan

Akan ditingkatkan kelancaran proses RUP melalui aplikasi Sipabaji.

3) Kegiatan **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar **89%** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.18.288.998.176,-** atau **77,13%** yang dilaksanakan melalui 5 (lima) Sub Kegiatan sebagai berikut :
   a) Sub Kegiatan **Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan** tidak dilakukan pelaksanaan atas sub kegiatan ini;
   b) Sub Kegiatan **Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.984.854.489 atau 74,86%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 189 unit atau 43%;
   c) Sub Kegiatan **Pemeliharaan Mebel** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.843.476.783 atau 69,42%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 3 gedung kantor atau 100%;
   d) Sub Kegiatan **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.333.344.120 atau 87,80%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 6 banguan/ gedung atau 100%;
   e) Sub Kegiatan **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.127.322.784 atau 87,53%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 6 banguan/ gedung atau 100%.

   Dari penjelasan diatas dapat digambarkan dalam tabel realisasi Kegiatan **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023					
	Target		Realisasi			Capaian kinerja (fisik %)
			%	RP		
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang pajaknya diperpanjang dan dipelihara	10	Unit				100
jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajaknya dibayar dan dipelihara	439	Unit	77,13	18 288.998 176		68
Jumlah Bangunan/Gedung yang peralatan dan mesinnya mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	6	Bangunan/Gedung				100
Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	6	Bangunan/Gedung				100

Tingkat rata-rata capaian kinerja $\left(x = \frac{368}{4} x\ 100\%\right) = 92\%$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ jenis\ yang\ dilaksanakan}{jumlah\ jenis\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ unit\ yang\ dipelihara}{jumlah\ unit\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ gedung/bangunan\ yang\ direhab}{jumlah\ gedung/bangunan\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rincian target fisik (target kinerja kegiatan/output) :

- 10 unit Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang pajaknya di perpanjang dan dipelihara, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp984.854.489,00 atau 74,86%;
- 439 Unit jumlah kendaraan dinas/oprasional yang pajaknya dibayar dan dipelihara, dengan output kinerja 68% dengan realisasi keuangan sebesar Rp8 843 476 783,00 atau 69,42%;
- 6 Bangunan yang peralatan dan mesinnya yang dilakukan pemeliharaan, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp2.333.344 120,00 atau 87,80%;
- 6 Bangunan kantor yang dilakukan pemeliharaan, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp6.127.322 784,00 atau 87,53%.

Faktor pendorong

Tersedianya alokasi anggaran dalam bentuk penyediaan surat penyediaan dana (SPD).

Faktor penghambat

Proses pengadaan barang dan jasa (RUP) di aplikasi Sipabaji baru diterapkan

Tindak lanjut yang disarankan

Akan ditingkatkan kelancaran proses RUP melalui aplikasi Sipabaji.

4 Indikator ke 4 kinerja program **Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Perangkat Daerah**, yang dilaksankan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu, Kegiatan **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar **100%** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.3.686.078.287,-** atau **79,46%** dari jumlah pagu sebesar **Rp.4.638.830.000,-** yang dilaksankan dalam 2 (dua) Sub kegiatan sebagai berikut

1) Sub Kegiatan **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.569.032.000 atau 93,26%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 2192 stel atau 100%;
2) Sub Kegiatan **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1 117.046 287 atau 59.29%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 104 orang atau 87%.

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan dalam tabel realisasi Kegiatan **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** sebagai berikut

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023			
	Target	Realisasi		Capaian kinerja (fisik %)
		%	RP	
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	2192 Stel	79,46	3 686.078.287	100
Jumlah Pegawai Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan Tugas dan fungsi	120 orang			100

Tingkat rata-rata capaian kinerja $\left(x = \frac{200}{2} x\ 100\%\right) = 100\%$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ Stel/Pasang\ yang\ dilaksanakan}{jumlah\ Stel/Pasang\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ peserta\ diklat\ yang\ dilaksanakan}{jumlah\ peserta\ diklat\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rincian target fisik (target kinerja kegiatan/output) :

- 2192 stel Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp2.569.032 000,00 atau 93,26%,
- 120 orang Pegawai Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan Tugas dan fungsi, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp1 117.046.287,00 atau 59,29%.

Faktor pendorong

Tersedianya alokasi anggaran dalam bentuk penyediaan surat penyediaan dana (SPD).

Faktor penghambat

Proses pengadaan barang dan jasa (RUP) di aplikasi Sipabaji baru diterapkan

Tindak lanjut yang disarankan

Akan ditingkatkan kelancaran proses RUP melalui aplikasi Sipabaji.

5 Indikator ke 5 kinerja program **Persentase penataan organisasi dan ketatalaksanaan**, yang dilaksankan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu, Kegiatan **Penataan Organisasi**. dengan capaian kinerja rata-rata sebesar **100%** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.2.003.273.589,-** atau **88,40%** dari jumlah pagu sebesar **Rp.2.266.205.600** yang dilaksankan dalam 3 (tiga) Sub kegiatan sebagai berkut :

1) Sub Kegiatan **Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan** dengan realisasi anggaran sebesar Rp 622 755.996 atau 95,80%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 5 dokumen atau 100%,
2) Sub Kegiatan **Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.682.497.349 atau 75,64%. serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 5 dokumen atau 100%;
3) Sub Kegiatan **Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.698 020.244 atau 97,79%. serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 2 dokumen atau 100%.

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan dalam tabel realisasi Kegiatan **Penataan Organisasi** sebagai berkut

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023				
	Target		Realisasi		Capaian kinerja (fisik %)
			%	RP	
Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan yang dilaksanakan	5	Dokumen			100
Jumlah dokumen fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana yang dilaksanakan	5	Dokumen	88,40	2 003 273 589	100
Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan	2	Dokumen			100

Tingkat rata-rata capaian kinerja $\left(x = \frac{300}{3} x\ 100\%\right) = 100\%$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ dokumen\ yang\ disusun}{jumlah\ dokumen\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rincian target fisik (target kinerja kegiatan/output) :

- 5 dokumen pengelolaan kelembagaan dan anelisis jabatan, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp622.755.996,00 atau 90,18%,
- 5 dokumen fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp682.497 349,00 atau 44,70%.

- 2 dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp698.020.244,00 atau 97,71%

Faktor pendorong

- Kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang menginstruksikan percepatan penyesuaian struktur kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan.
- Agenda reformasi birokrasi yang menginstruksikan penyederhanaan birokrasi di tataran Pemerintah Daerah
- Sinergitas dalam penyusunan analisa jabatan, standarisasi jabatan, kompetensi jabatan dan analisis beban kerja dengan Perangkat Daerah terkait.
- Ketersediaan data pendukung dari perangkat daerah.
- Komitmen Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah dalam perbaikan layanan melalui kepatuhan dalam penerapan standar standar pelayanan publik

Faktor penghambat

- Tenggak waktu implementasi kebijakan dari pemerintah pusat yang relatif singkat, dengan mekanisme/sistematika yang cukup panjang dan kompleks.
- Ketidak sinkronan regulasi yang diterbitkan oleh masing masing Kementrian dan Lembaga terkait analisa jabatan, standarisasi jabatan, kompetensi jabatan dan analisis beban kerja
- Belum adanya keseriusan Kepala Perangkat Daerah dalam perbaikan layanan melalui kepatuhan dalam penerapan standar standar pelayanan publik

Tindak lanjut yang disarankan

Melakukan penyesuaian terhadap regulasi-regulasi terkait dengan kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kinerja perangkat daerah, dan pelaksanaan reformasi birokrasi

6. Indikator ke 6 kinerja program **Cakupan pelayanan kedinasan Pimpinan,** yang dilaksankan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu, Kegiatan **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar **100%** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.23.360.439.644,-** atau **91,10%** dari jumlah pagu sebesar **Rp.25.642.066.220,-** yang dilaksankan dalam 3 (tiga) Sub kegiatan sebagai berikut:
   1) Sub Kegiatan **Fasilitasi Keprotokolan** dengan realisasi anggaran sebesar Rp 12 005 442.956 atau 86,78 %, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 805 pelayanan atau 95,83%;

2) Sub Kegiatan **Fasilitasi Komunikasi Pimpinan** dengan realisasi anggaran sebesar Rp 435.237.750 atau 98,75%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 311 pelayanan atau 97,19%;
3) Sub Kegiatan **Pendokumentasian Tugas Pimpinan** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.919.758.938 atau 96,07%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 217 pelayanan atau 90,42%.

Dan penjelasan diatas dapat digambarkan dalam tabel realisasi Kegiatan **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** sebagai berikut.

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023				
	Target		Realisasi		Capaian kinerja (fisik %)
			%	RP	
Jumlah pelayanan Fasilitasi Keprotokolan Pemerintah Kota Makassar yang mendapat layanan ke protokoleran	860	Pelayanan			93
Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Yang Dilaksanakan	320	Pelayanan	91,10	23.360.439.644	92
Jumlah Pendokumentasian Kegiatan/Tugas Pimpinan Daerah yang Dilaksanakan	240	Dokumen			97

Tingkat rata-rata capaian kinerja $\left(x = \frac{282}{3} x\ 100\%\right) = 94\%$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ pelayanan\ yang\ disediakan}{jumlah\ pelayanan\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rincian target fisik (target kinerja kegiatan/output) :

- 720 pelayanan Keprotokolan Pemerintah Kota Makassar, dengan output kinerja 93% dengan realisasi keuangan sebesar Rp12.005.442.956,00 atau 86,78%,
- 320 pelayanan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dengan output kinerja 92% dengan realisasi keuangan sebesar Rp435.237.750,00 atau 98,75%;
- 240 dokumen pendokumentasian Kegiatan/Tugas Pimpinan Daerah, dengan output kinerja 97% dengan realisasi keuangan sebesar Rp10.919.758 938,00 atau 96,07%

Faktor pendorong

Ketersediaan dana serta kerjasama pimpinan dan staf yang tetap efektif dalam menjalankan pelayanan keprotokoleran dan komunikasi pimpinan

Faktor penghambat

Adanya rekening belanja yang belum bisa kami cairkan dan belum terealisasi sepenuhnya hingga akhir triwulan IV Tahun 2023

Tindak lanjut yang disarankan

Untuk mempercepat kegiatan ini yaitu mengoptimalkan percepatan penyerapan anggaran untuk jenis belanja lainnya

III. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, dengan realisasi capaian kinerja rata-rata sebesar **97%** dan capaian realisasi keuangan sebesar **Rp.76.784.574.599,-** atau **91,44%** dari jumlah pagu sebesar **Rp.83.973.055.100,-** yang terdapat dalam 12 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan. Adapun indikator kinerja program dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Indikator ke 1 kinerja program Cakupan Penataan Administrasi Tata Pemerintahan dengan realisasi capaian kinerja rata-rata sebesar **100%** yang dilaksankan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu, Kegiatan **Administrasi Tata Pemerintahan** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.7.298.760.519,-** atau **86,70%** yang dilaksankan dalam 3 (tiga) Sub kegiatan sebagai berikut :
   a) Sub Kegiatan **Penataan Administrasi Pemerintahan** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.201.888.324 atau 87,63%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 2 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Kebijakan dan 2 Laporan Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan atau 100%;
   b) Sub Kegiatan **Pengelolaan Administrasi Kewilayahan** dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3 670 980.923 atau 91,92%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 168 Kec/Kel yang dilakukan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah, 42 kec/kel yang dilakukan penegasan batas wilayah, dan 15 Laporan monitoring dan evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan atau 100%;
   c) Sub Kegiatan **Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3 425.891 272 atau 81,69%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 1 Dokumen Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), 1 Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang tersusun, dan 1 Laporan Keterangan Pertangung Jawaban Akhir Tahun Walikota atau 100%.

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan dalam tabel realisasi Kegiatan **Administrasi Tata Pemerintahan** sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023				
	Target		Realisasi		Capaian kinerja (fisik %)
			%	RP	
Persentase Jumlah Administrasi pemerintahan yang mendapat penataan	30	Dokumen			100
Persentase Jumlah kecamatan dan kelurahan yang dilaksanakan tertib administrasi pemerintahan	30	Dokumen	86,70	7 298.760.519	100
Persentase Jumlah pelaksanaan Fasilitasi otonomi daerah	30	Dokumen			100

Tingkat rata-rata capaian kinerja $\left(\lambda = \frac{300}{3} x\ 100\%\right) = 100\%$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ dokumen\ yang\ dilaksanakan}{jumlah\ dokumen\ yang\ ditargetkan}\ x\ 100\%\right)$

Rincian target fisik (target kinerja kegiatan/output) :

- 30 Dokumen Administrasi pemerintahan yang mendapat penataan, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp201.888.324 00 atau 71,71%;
- 30 Dokumen kecamatan dan kelurahan yang dilaksanakan tertib administrasi pemerintahan, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp3.670.980.923,00 atau 86,25%;
- 30 Dokumen pelaksanaan Fasilitasi otonomi daerah, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp3.425.891.272,00 atau 82,88%.

a Alokasi anggaran sebesar Rp.8 418.205.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.7.298.760.519,- atau sebesar 86,70%.

Faktor pendorong

- Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.

Faktor penghambat

- Pada Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan ada 2 (dua) indikator capaian kinerja yang harus dicapai Namun DPA tahun 2023 terdapat 4 Header, sehingga pada triwulan I sudah ada pencairan anggaran namun belum ada laporan kegiatan. Anggaran yang cair pada triwulan I adalah pencairan Belanja Jasa Tenaga Administrasi;
- Salah satu indikator capaian kinerja pada Sub Kegiatan Penataan Admnistrasi Pemerintahan yaitu Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan ditetapkan sebanyak 4 (empat) laporan. Namun yang seharusnya hanya ada satu laporan kegiatan karena hanya ada 1 (satu) kali pelaksanaan kegiatan rapat;
- Ada beberapa anggaran yang tidak terealisasi yaitu belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp 50 406.756 yang merupakan sisa dari pembayaran Jasa Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas yang dianggarkan untuk 12 orang namun yang ada hanya 9 orang.
- Salah satu indikator capaian kinerja pada Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan yaitu Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dilakukan Penegasan Batas Wilayah ditetapkan sebanyak 42 (empat puluh dua) Kecamatan/Kelurahan. Namun yang dapat terealisasi/terlaksana hanya 20 (dua puluh) Kelurahan yang ada di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Manso dan Kecamatan Tamalate;

- Jumlah target indikator capaian kinerja yang semula 42 Kecamatan Kelurahan tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya anggaran yang diberikan pada saat asistensi yang hanya dianggarkan untuk 2 (dua) kecamatan sehingga hanya 20 Kelurahan yang dapat dilakukan Penegasan Batas Wilayahnya, namun tidak dirubah target capaiannya menjadi 2 Kecamatan, 20 Kelurahan setelah asistensi DPA Perubahan Tahun 2023;
- Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah ada beberapa anggaran yang tidak cair diantaranya belanja Aplikasi Ciniki LPPD ta Rp 150.000.000 namun yang diambil hanya Rp.100.000.000 dan hasil nego Rp97.236.000 sehingga masih tersisa Rp 52.764.000;
- Demikian pula halnya belanja Pengembangan SIM LPPD Rp.50.000 000 yang tidak dapat terealisasi pada anggaran perubahan karena dalam anggaran pokok sudah ada anggaran pemeliharaan SIM LPPD

Tindak lanjut yang disarankan

Akan melakukan cek and re-cek dalam rangka finalisasi anggaran sehingga anggaran dapat dihasilkan anggaran yang tervalidasi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

2) Indikator ke 2 kinerja program **Cakupan Pembinaan dan Pelayanan Kegiatan Keagamaan**, dengan realisasi capaian kinerja sebesar **100%** yang dilaksankan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu, Kegiatan **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.56.137.264.496,-** atau **94,80%** yang dilaksankan dalam 3 (tiga) Sub kegiatan sebagai berikut:
   a) Sub Kegiatan **Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.55.256.804.378 atau 94,93%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 22 kegiatan atau 100%;
   b) Sub Kegiatan **Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.468.388 602 atau 84,30%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 5 Kebijakan atau 100%;
   c) Sub Kegiatan **Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.412.071.516 atau 89,97%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 5 Kebijakan atau 100%.

Dan penjelasan diatas dapat digambarkan dalam tabel realisasi Kegiatan **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** sebagai berikut.

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023 Target		Realisasi %	Realisasi RP	Capaian kinerja (fisik %)
Jumlah Pelaksanaan kegiatan pengelolaan bina mental spiritual	22	Kegiatan			100
Jumlah pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	5	Kebijakan	94,80	56 137 264 496	100
Jumlah pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	5	Kebijakan			100

Tingkat rata-rata capaian kinerja $\left(x = \frac{300}{3} x\ 100\%\right) = 100\%$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ kebijakan\ yang\ dilaksanakan}{jumlah\ kebijakan\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rincian target fisik (target kinerja kegiatan/output) :

- 22 Kegiatan pengelolaan bina mental spiritual, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp55.256.804.378,00 atau 94,93%;
- 5 kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp468 388.602,00 atau 84,30%,
- 5 kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp412.071.516,00 atau 84,30%.

Faktor pendorong

- Ketersediaan dana dan intensnya koordinasi antara pimpinan dan staf

Faktor penghambat

- Adanya beberapa Kegiatan yang pelaksanaannya melibatkan masyarakat umum (pekerja keagamaan) yang mengharuskan menggunakan rekening bank sulselbar yang dimana tidak semua pekerja keagamaan tersebut memiliki rekening yang dimaksud serta keterlambatan administrasi proses pencairan dokumen keuangan

Tindak lanjut yang disarankan

Mempercepat proses administrasi tersebut adalah perlunya koordinasi yang intensif dari pejabat serta koordinasi dengan para pengelola keuangan.

3) Indikator ke 3 kinerja program **Cakupan Produk Hukum Daerah** dengan realisasi capaian kinerja sebesar **91%** yang dilaksankan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu, Kegiatan **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.3.705.017.870,-** atau **94,66%** yang dilaksankan dalam 3 (tiga) Sub kegiatan sebagai berikut

a) Sub Kegiatan **Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.184.787 267 atau 94,23%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 115 Produk Hukum atau 96%;

b) Sub Kegiatan **Fasilitasi Bantuan Hukum** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1 741.335.102 atau 95,20%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 10 Perkara atau 83%;

c) Sub Kegiatan **Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.778.895.501 atau 94,12%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 115 Produk Hukum atau 96%.

Dan penjelasan diatas dapat digambarkan dalam tabel realisasi Kegiatan **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023			
	Target	Realisasi		Capaian kinerja (fisik %)
		%	RP	
Jumlah Penyusunan Produk Hukum Daerah	120 Produk Hukum			96
Jumlah Penanganan Perkara dan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Perkara	94,66	3 705 017 870	83
Jumlah Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	120 Produk Hukum			96

Tingkat rata-rata capaian kinerja $\left(x = \frac{275}{3} x\ 100\%\right) = 91\%$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ dokumen\ yang\ dilaksanakan}{jumlah\ dokumen\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rincian target fisik (target kinerja kegiatan/output) :

- 120 Produk Hukum Daerah, dengan output kinerja 96% dengan realisasi keuangan sebesar Rp1 184 787.267,00 atau 94,23%;
- 12 Perkara dan Fasilitasi Bantuan Hukum, dengan output kinerja 83% dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.741.335.102,00 atau 95,20%,
- Pendokumentasian 120 Produk Hukum Daerah, dengan output kinerja 96% dengan realisasi keuangan sebesar Rp778 895.501,00 atau 94,12%

Faktor pendorong

- pelaksanaan kegiatan penyusunan produk hukum daerah adanya kerjasama dengan unsur Tenaga Ahli Selaku Narasumber , SKPD terkait selaku pengusul dan Percepatan Fasilitasi di Biro Hukum Pemprov Sul-Sel, sehingga proses tetap berjalan;
- pelaksanaan kegiatan penanganan perkara adanya kerjasama dengan unsur Advokasi sebagai tim narasumber dan unsur dari pihak tim ahli dalam setiap penanganan perkara terhadap Pemerintah Kota Makassar dan dengan berkolaborasi bersama SKPD terkait, sehingga proses kegiatan tetap berjalan,

- pelaksanaan kegiatan rapat, proses penyebarluasan Produk Hukum dan kegiatan tetap berjalan.

Faktor penghambat

- kurangnya bukti pendukung dalam penanganan perkara asset pemerintah kota makassar;
- target 120 produk hukum tidak dapat terpenuhi dikarenakan sesuai usulan dari SKPD ke Bagian Hukum untuk difasitasi sebanyak 78 produk hukum.

Tindak lanjut yang disarankan

Untuk lebih meningkatkan koordinasi kepada SKPD dalam melakukan penyusunan produk hukum.

4) Indikator ke 4 kinerja program **Persentase Perjanjian Kerjasama Daerah Yang Direalisasikan** dengan realisasi capaian kinerja sebesar **100%** yang dilaksankan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu, Kegiatan **Fasilitasi Kerjasama Daerah** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.9.643.531.714,-** atau **77,63%** yang dilaksankan dalam 3 (tiga) Sub kegiatan sebagai berikut .
   a) Sub Kegiatan **Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6 418.091.698 atau 81,32%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 20 dokumen kerjasama atau 100%;
   b) Sub Kegiatan **Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2 906 612.544 atau 76,45%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 2 Forum Kerjasama atau 100%;
   c) Sub Kegiatan **Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 318 827.472 atau 43,83%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 1 Laporan atau 100%.

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan dalam tabel realisasi Kegiatan **Fasilitasi Kerjasama Daerah** sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023				
	Target		Realisasi		Capaian kinerja (fisik %)
			%	RP	
Jumlah Dokumen Kerjasama Dalam Negeri yang di tanda tangani	20	Dokumen Kerjasama	77,55	9 633.181 706	100
Forum Investasi Luar Negeri	1	Forum Kerjasama			100
Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri	1	Laporan			100

Tingkat rata-rata caparan kinerja $\left(x = \frac{300}{3} x\ 100\%\right) = 100\%$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ fasilitasi\ yang\ dilaksanakan}{jumlah\ fasilitasi\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$



Rincian target fisik (target kinerja kegiatan/output) :

- 20 dokumen Kerjasama Dalam Negeri, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp6 412.741.698,00 atau 81,25%;
- 1 forum Kerjasama Investasi Luar Negeri, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp2.901.612.536,00 atau 76,32%;
- 1 Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri, dengan output kinerja 96% dengan realisasi keuangan sebesar Rp318 827.472,00 atau 43,83%.

Faktor pendorong

- Tersedianya alokasi anggaran yang cukup, kerjasama pimpinan dan staf yang efektif serta koordinasi yang intensif dengan calon *mitra*/mitra kerjasama dan stakeholder lainnya

Faktor penghambat

- Tidak tersedianya alokasi anggaran dan kurangnya komunikasi antara pimpinan dan staf.

Tindak lanjut yang disarankan

- Menganlisipasi hal-hal yang menjadi kekurangan di tahun sebelumnya dengan mempersiapkan SDM yang ada mampu memahami dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan serta tetap aktif berkoordinasi baik antar perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Makassar maupun instansi di luar Pemerintah Kota Makassar.



IV. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja **Program Perekonomian Dan Pembangunan**, dengan realisasi capaian kinerja rata-rata sebesar **99%** dan capaian realisasi keuangan sebesar **Rp.9.334.696.475,-** atau **82,51%** dari jumlah pagu sebesar **Rp.11.313.060.700,-** yang terdapat dalam 9 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan. Adapun indikator kinerja program dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Indikator ke 1 kinerja program **Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama** dengan realisasi jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang di tandatangani pada kuartal pertama adalah sebanyak **0 paket** dan total pekerjaan konstruksi untuk tahun 2023 adalah sebanyak **423 paket**, dengan capaian indikator kinerja program adalah sebesar **0%** (Bagian Pengadaan Barang/Jasa);
2) Indikator ke 2 kinerja program **Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif** dengan realisasi jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif sampai dengan bulan Desember 2023 adalah sebanyak **143 paket** berbanding jumlah pengadaan yang tidak dilakukan dengan metode kompetitif sampai dengan bulan Desember sebanyak **1453 paket** dengan persentase kinerja rata-rata sebesar **82%** yang dilaksankan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu, Kegiatan **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.4.506.783.495**,- atau **79,89%** yang dilaksankan dalam 3 (tiga) Sub kegiatan sebagai berikut
   a) Sub Kegiatan **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.097.996.933 atau 82,03%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 143 paket atau 72%;
   b) Sub Kegiatan **Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik** dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.224.434.492 atau 77,48%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 7 fungsi layanan atau 100%;
   c) Sub Kegiatan **Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.184.352.070 atau 78,76%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 6 kegiatan dan 15 SKPD atau 100%

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan dalam tabel realisasi Kegiatan **Fasilitasi Kerjasama Daerah** sebagai berikut .

INDIKATOR KINERJA	Target		Tahun 2023 Realisasi %	RP	Capaian kinerja (fisik %)
Jumlah Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilayani	150	Paket			72
Jumlah Fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang Dilaksanakan	7	Fungsi Layanan	79,89	4.506 783.495	100
Jumlah SKPD Yang mendapatkan Pendampingan Pengadaan Barang/jasa	15	SKPD			100

Tingkat rata-rata capaian kinerja $\left(x = \frac{300}{3} x\ 100\%\right) = 100\%$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ layanan\ yang\ dilaksanakan}{jumlah\ layanan\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rincian target fisik (target kinerja kegiatan/output) :

- 150 paket Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp2.097.996.933,00 atau 82,03%;
- 7 Fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.224.434 492,00 atau 77,48%;
- 15 SKPD Yang mendapatkan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.184.352.070,00 atau 78,76%

Faktor pendorong

- Tersedianya alokasi anggaran yang cukup serta terencana dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang tersusun dengan baik;
- Didukung oleh sumber daya Pegawai yang cukup tersedia.

Faktor penghambat

- Adanya alokasi anggaran yang tidak terealisasi untuk sisa tahun anggaran 2023 yaitu pada pembiayaan Lembaga Pemantau Independen pengadaan Barang/Jasa (LPI-PBJ) yang mana pada tahun 2023 telah berakhir masa kerjanya Selain itu ada beberapa kegiatan yang belum bisa d laksanakan karena belum ada petunjuk lebih lanjut dari instansi terkait (LKPP).

Tindak lanjut yang disarankan

Melakukan Koordinasi yang efektif antar skpd.

3) Indikator ke 2 kinerja program **Persentase Perusahaan Daerah Yang Berkinerja Baik**, dengan realisasi capaian kinerja rata-rata sebesar **95%** yang dilaksankan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu, Kegiatan **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**, dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.3.026.790.741,-** atau **80,49%** yang dilaksankan dalam 3 (tiga) Sub kegiatan sebagai berikut

a) Sub Kegiatan **Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.891.354.787 atau 76,58%. serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 26 laporan BUMD/ BLUD Laporan kinerja manajemen dan Keuangan BUMD dan BLUD atau 100%.

b) Sub Kegiatan **Pengendalian dan Distribusi Perekonomian** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.552 420.844 atau 86,19%. serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 2 Kegiatan Sosialisasi/ FGD terkait pengendalian dan distribusi perekonomian atau 100%;

c) Sub Kegiatan **Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.583.015.110 atau 89,78%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 2 Laporan Informasi dan Rekomendasi terkait Perencanaan dan Pengawasan Usaha Mikro Kecil atau 91%.

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan dalam tabel realisasi Kegiatan **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023				
	Target		Realisasi		Capaian kinerja (fisik %)
			%	RP	
Jumlah Laporan kinerja manajemen dan Keuangan BUMD dan BLUD	26	Laporan BUMD/BLUD	80,49	3 026 790 741	100
Jumlah Kegiatan Sosialisasi/ FGD terkait pengendalian dan distribusi perekonomian	2	Kegiatan			100
Jumlah Laporan Informasi dan Rekomendasi terkait Perencanaan dan Pengawasan Usaha Mikro Kecil	2	Laporan			91

Tingkat rata-rata capaian kinerja $\left(x = \frac{291}{3} x\ 100\%\right) = 97\%$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ dokumen\ yang\ dilaksanakan}{jumlah\ dokumen\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rincian target fisik (target kinerja kegiatan/output) :

- 26 Laporan kinerja manajemen dan Keuangan BUMD dan BLUD, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.891.354 787,00 atau 76,58%;
- 2 kegiatan Sosialisasi/ FGD terkait pengendalian dan distribusi perekonomian, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp552 420.844,00 atau 86,19%.
- 2 laporan Informasi dan Rekomendasi terkait Perencanaan dan Pengawasan Usaha Mikro Kecil, dengan output kinerja 91% dengan realisasi keuangan sebesar Rp583.015.110,00 atau 89,78%.

Faktor pendorong

- Kerjasama pimpinan dan staf yang efektif dalam menjalankan kegiatan yang dilaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan BUMD/BLUD dan stakeholder lainnya yang terjalin dengan baik Sedangkan faktor penghambat masih rendahnya SDM aparat pelaksanaan dalam pemahaman tugas pokok dan fungsinya dan beban tugas yang akan dikerjakan dan juga keterlambatan pencairan anggaran kas dan kelengkapan dokumen pendukung

Faktor penghambat

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pada bagian perekonomian, salah satu program prioritas pemerintahan kota yang penganggaranya cukup besar yaitu pembentukan Makassar Incorporate yang masih menunggu hasil kajian dari kementerian terkait. Masih belum optimalnya koordinasi yang dilakukan beberapa SKPD terkait dalam mempedomani dan realisasi sasaran yang akan dilaksanakan.

Tindak lanjut yang disarankan

Agar pencairan dana kegiatan dapat dipercepat sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, dan melakukan koordinasi dengan instansi internal dan eksternal guna mengoptimalisasi pencapaian target dan realisasi perencanaan serta mendayagunakan sumber daya manusia dan aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempercepat kelengkapan berkas yang akan di ajukan serta mengoptimalkan koordinasi komitmen SKPD dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan

4) Indikator ke 2 kinerja program **Persentase Penyerapan realisasi anggaran melalui Sistem Monitoring Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (SISMONTEPRA)**, dengan realisasi capaian kinerja sebesar **100%** yang dilaksankan dalam 1 (satu) kegiatan yaitu, Kegiatan **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**, dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.1.790.129.933** atau **93,66%** yang dilaksankan dalam 3 (tiga) Sub kegiatan sebagai berikut :
   a) Sub Kegiatan **Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan** dengan realisasi anggaran sebesar Rp.923.433.981 atau 91,89%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 1 Dokumen atau 100%;
   b) Sub Kegiatan **Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan** dengan realisasi anggaran sebesar Rp 425.201.015 atau 93,92%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini adalah 1 Dokumen atau 100%;
   c) Sub Kegiatan **Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan** dengan realisasi anggaran sebesar Rp 441 494 937 atau 97,34%, serta realisasi kinerja sub kegiatan ini sebesar 100%;

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan dalam tabel realisasi Kegiatan **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** sebagai berikut .

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023			
	Target	Realisasi		Capaian kinerja (fisik %)
		%	RP	
Jumlah dokumen penyusunan program pembangunan yang difasilitasi	1 Dokumen			100
Jumlah dokumen program pembangunan yang dikendalikan dan dievaluasi	1 Dokumen	94,24	1.801.122 239	100
% SKPD Yang mengisi Laporan Evaluasi dan Pengawasan Anggaran pada Aplikasi Sismontepra Tepat Waktu	100 Persen			100

Tingkat rata-rata capaian kinerja $\left(x = \frac{300}{3} x\ 100\%\right) = 100\%$

Rumus $\left(x = \frac{jumlah\ dokumen\ yang\ dilaksanakan}{jumlah\ dokumen\ yang\ ditargetkan} x\ 100\%\right)$

Rincian target fisik (target kinerja kegiatan/output) :

- 1 dokumen penyusunan program pembangunan yang difasiltasi dan telah tersusun 1 dokumen evaluasi program Pembangunan, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp923.433.981,00 atau 91.89%,
- 1 dokumen program pembangunan yang dikendalikan dan dievaluasi yang berupa laporan monitoring Dana Alokasi Khusus selama 4 triwulan, dengan output kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp436.193.321,00 atau 96,35%;
- 100% SKPD Yang mengisi Laporan Evaluasi dan Pengawasan Anggaran pada Aplikasi Sismontepra Tepat Waktu. Sebanyak 52 SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar secara aktif menyampaikan laporan realisasi keuangan dan fisik setiap bulan selama 12 bulan sehingga realisasi jumlah SKPD yang mengisi laporan monev tepat waktu, dengan output kinerja 97,34% dengan realisasi keuangan sebesar Rp441.494 937,00 atau 97,34%;

Faktor pendorong

- Koordinasi-koordinasi yang intensif baik antar perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Makassar maupun instansi di luar Pemerintah Kota Makassar.

Faktor penghambat

- Kurangnya Koordinasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Makassar maupun instansi di luar Pemerintah Kota Makassar

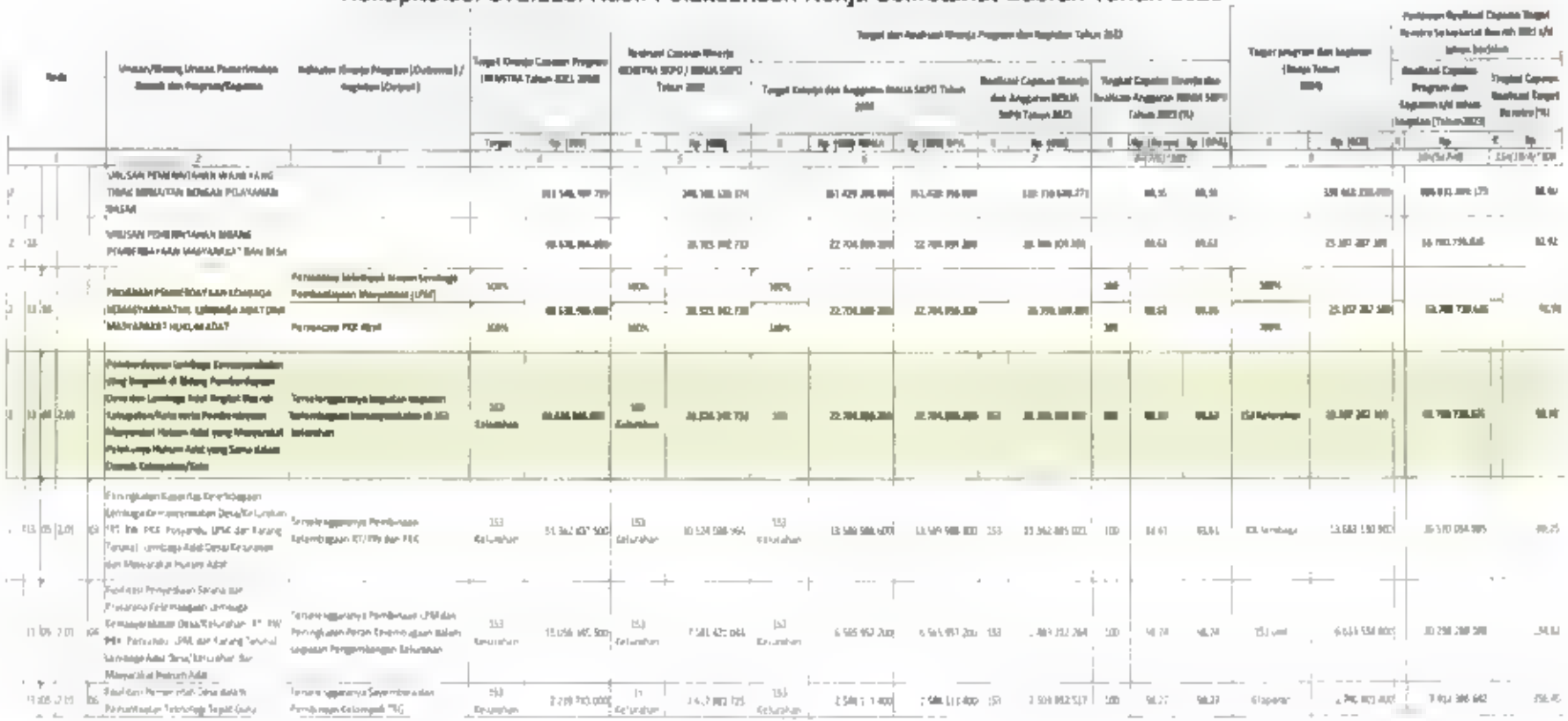
Tindak lanjut yang disarankan

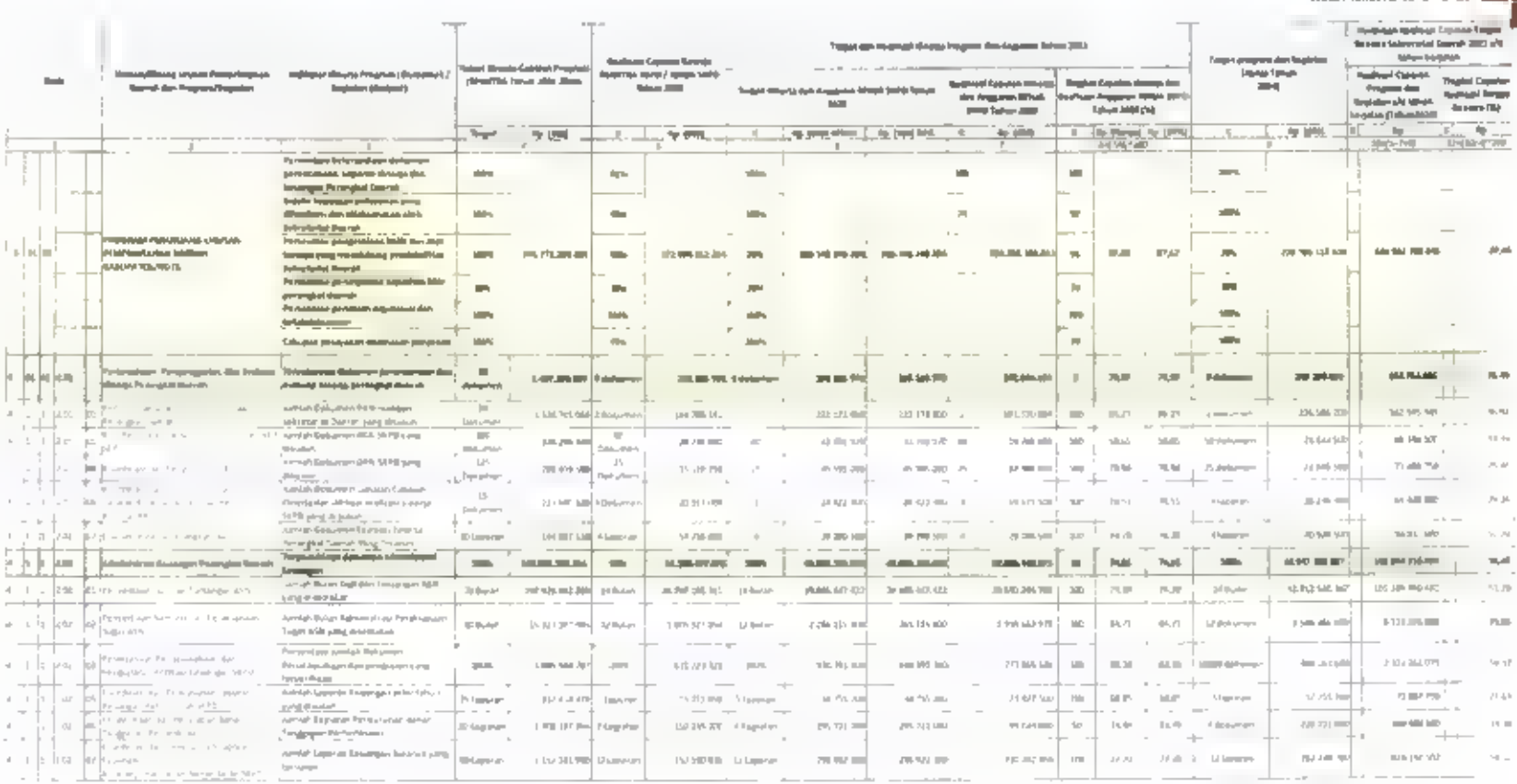
- Mengantisipasi hal-hal yang menjadi kekurangan di tahun sebelumnya dengan mempersiapkan SDM yang ada mampu memahami dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan serta tetap aktif berkoordinasi baik antar perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Makassar maupun instansi di luar Pemerintah Kota Makassar.

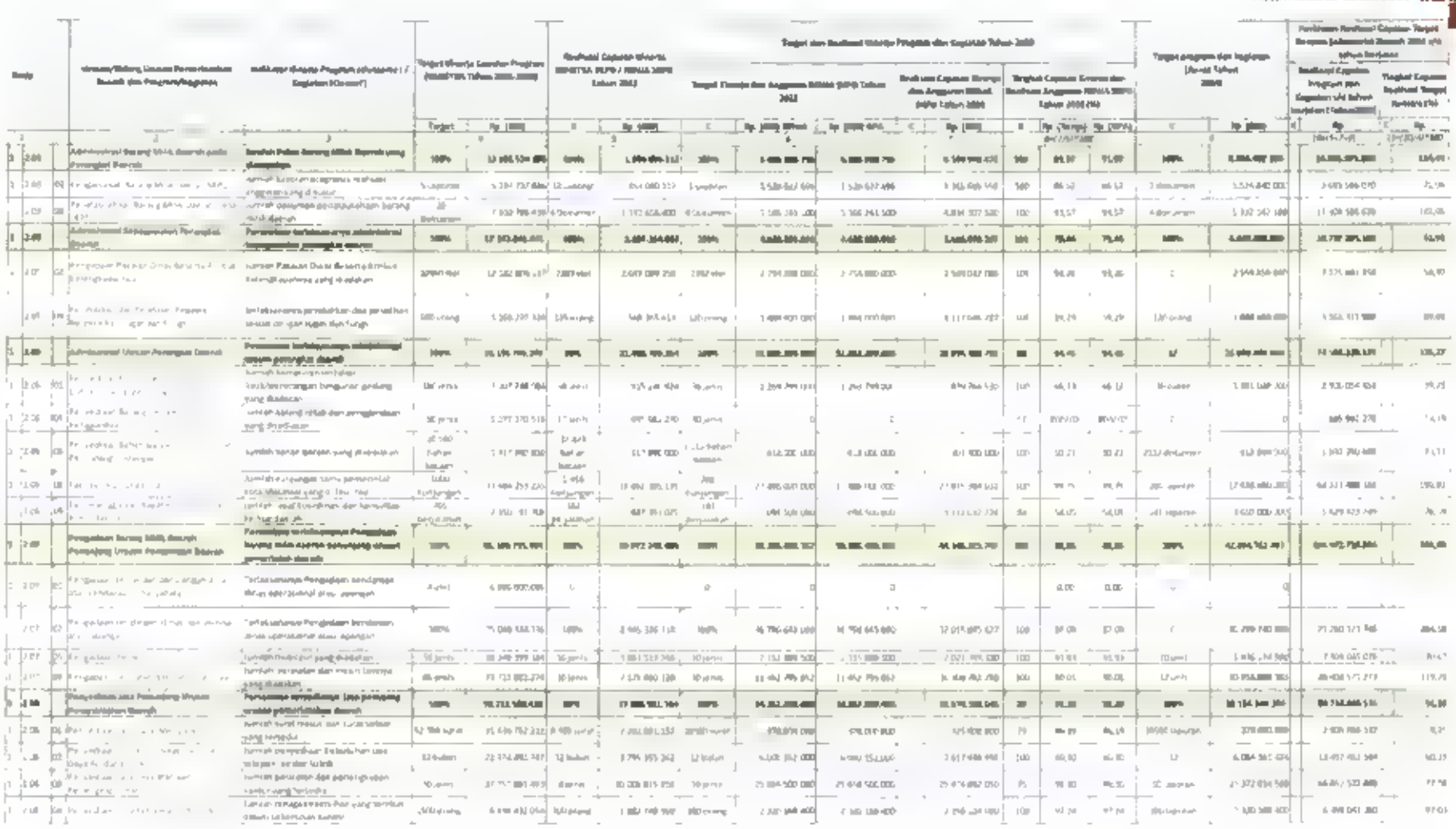
Secara keseluruhan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah, tahun lalu dilihat pada tabel berikut:

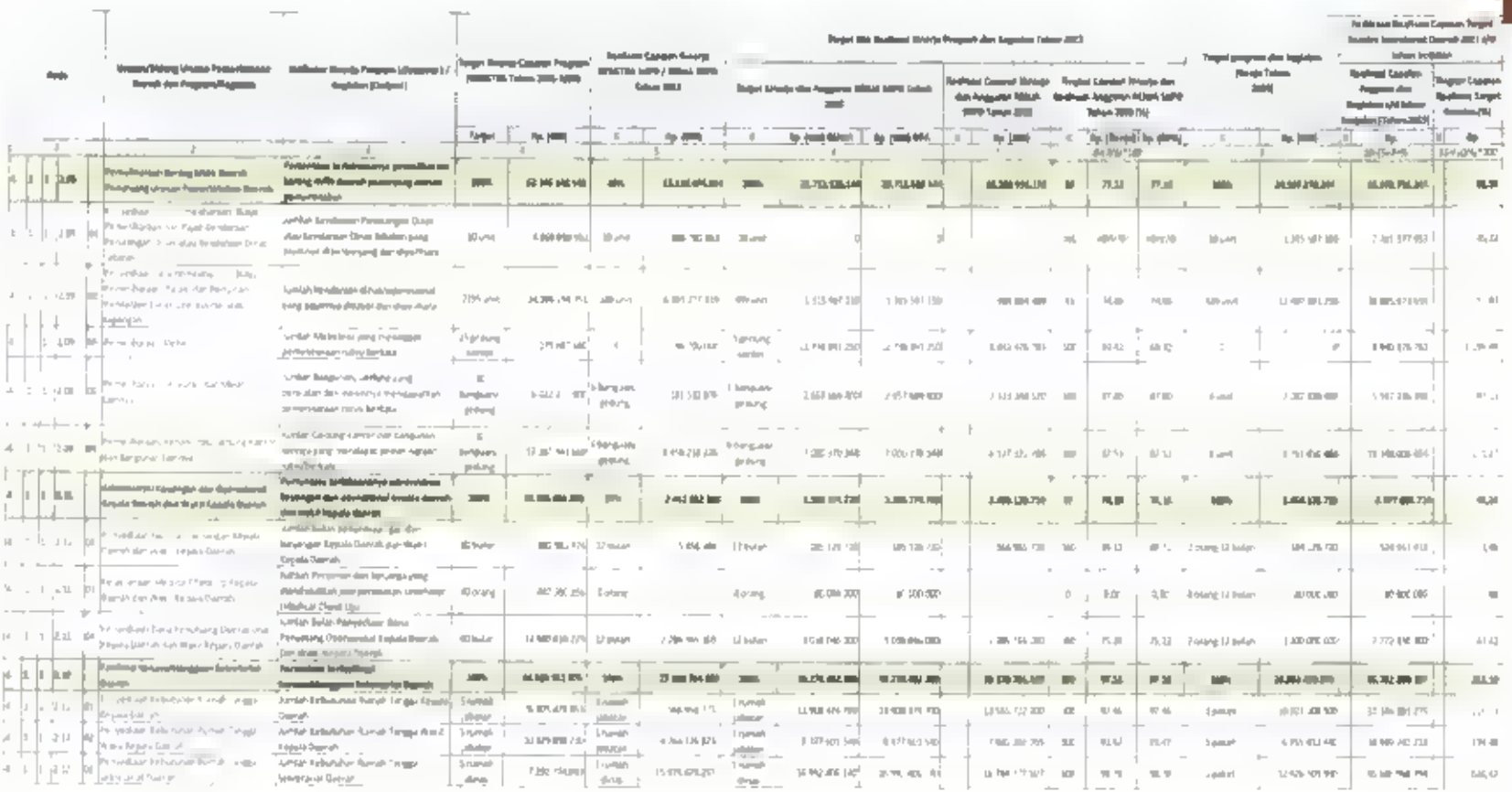
Tabel B.II-1(T-C.29)

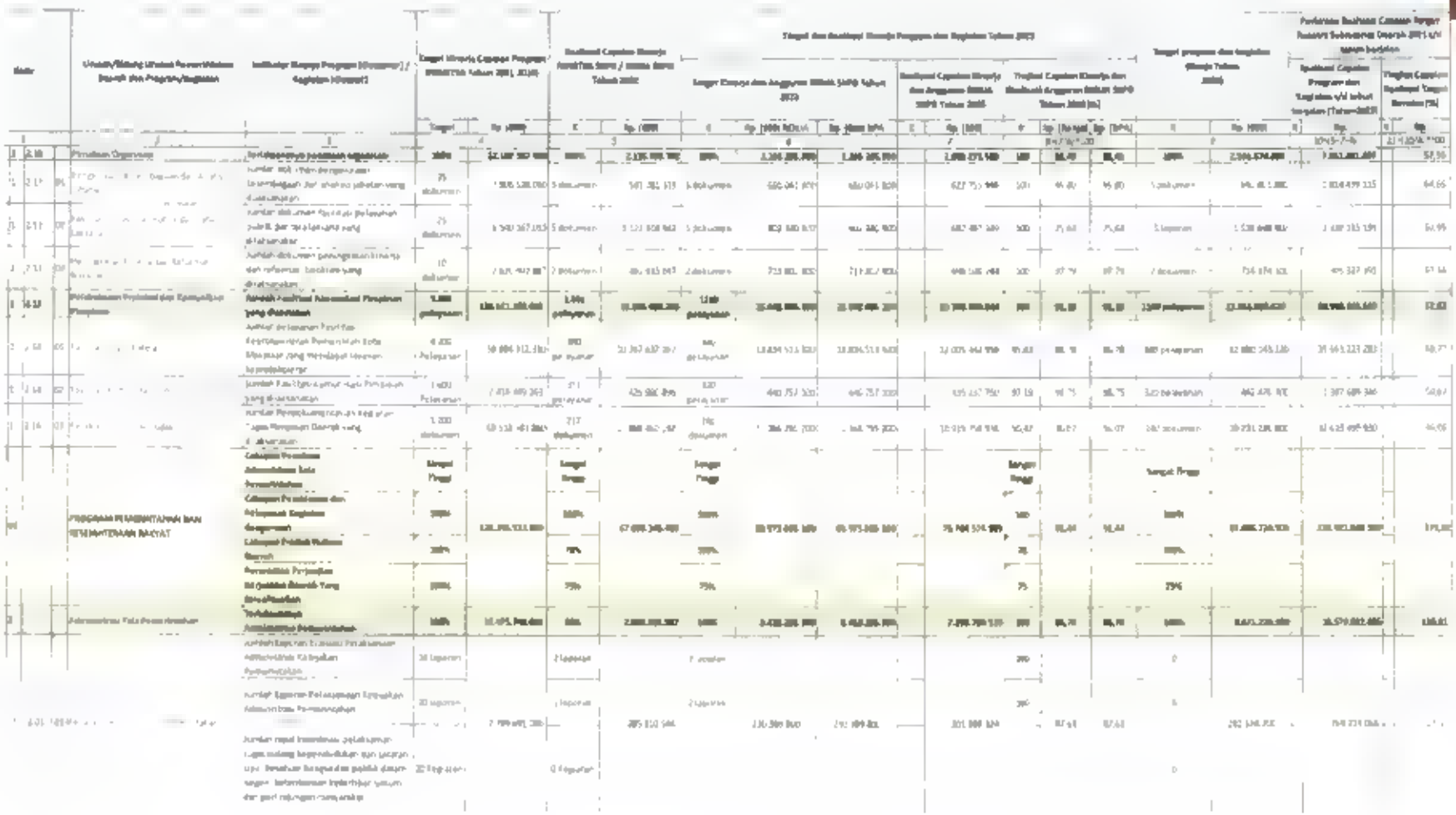
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023

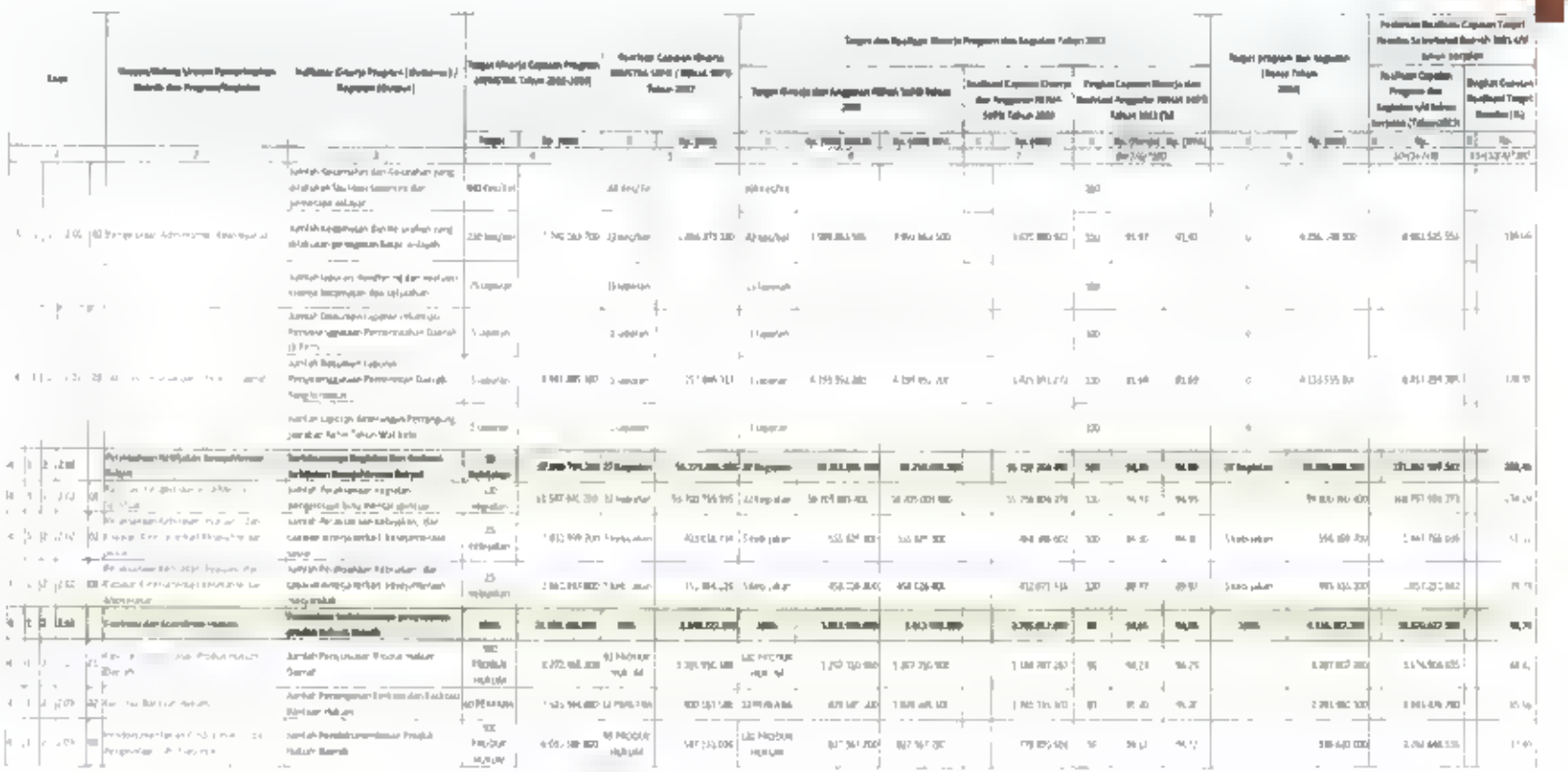


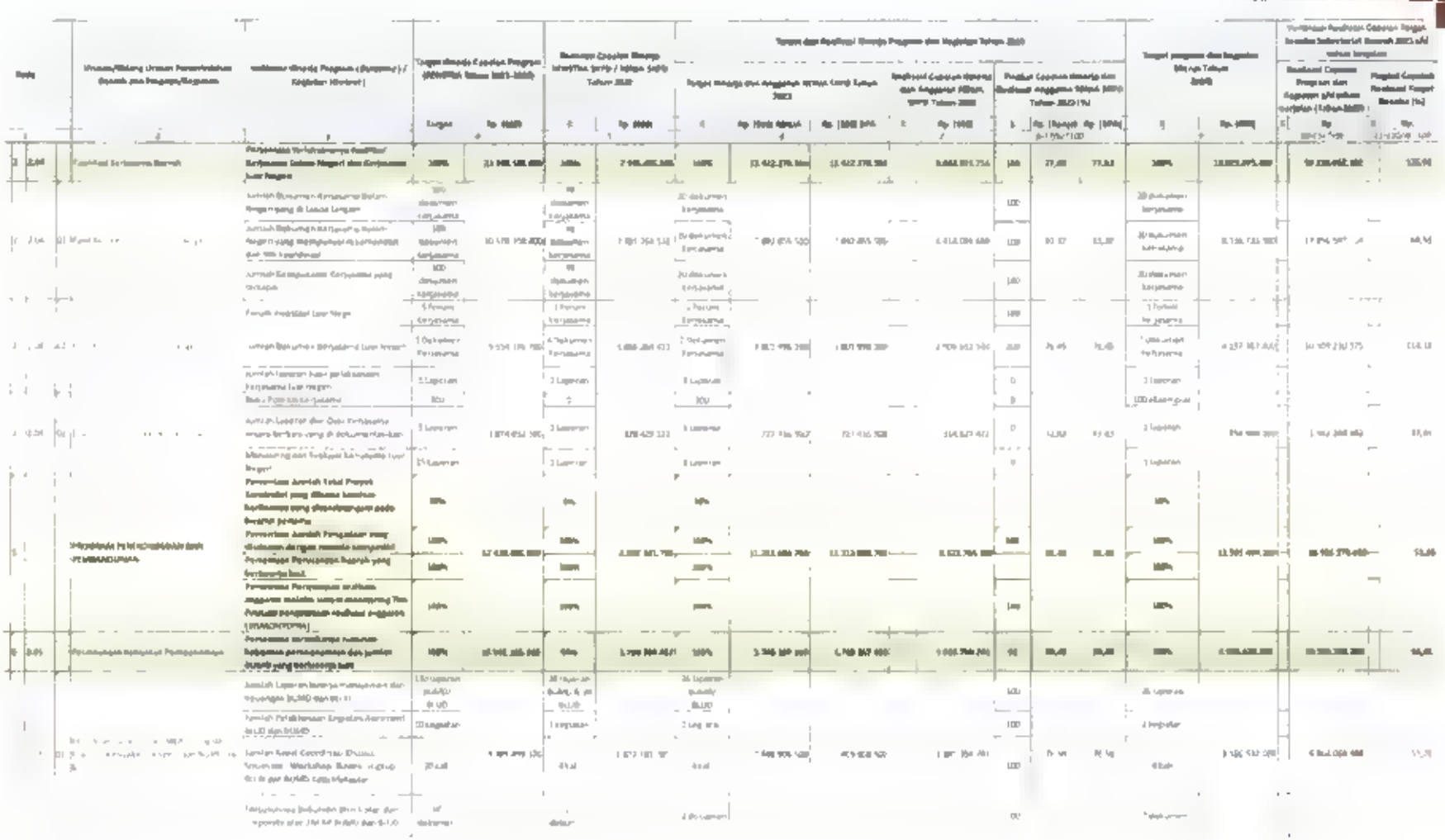


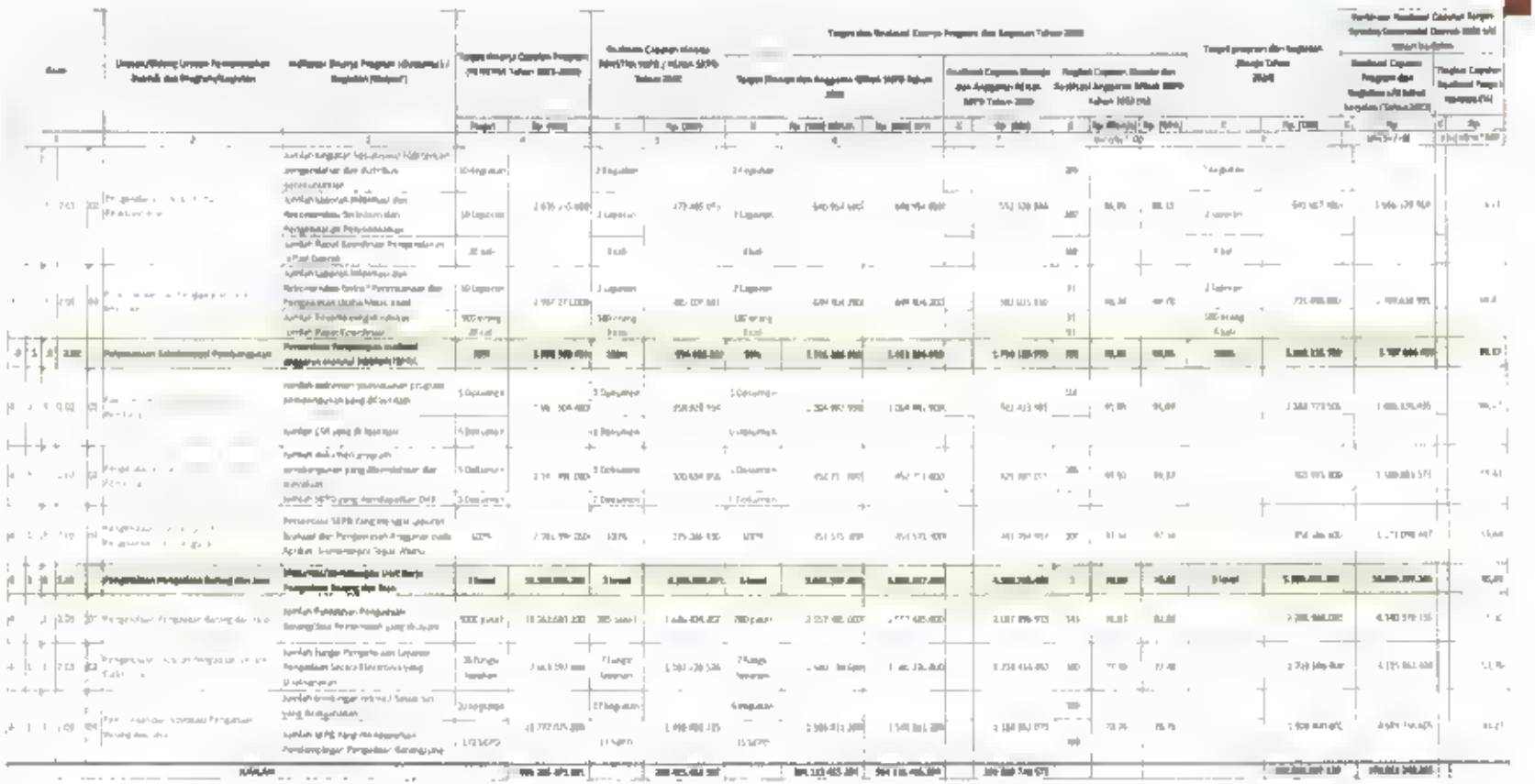












2.2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi.

Mengacu pada tugas dan fungsi sekretariat Daerah, SKPD ini merupakan unsur staf yang melaksanakan fungsi pengendalian administrasi terhadap tugas perangkat daerah serta penyusunan dan perumusan kebijakan daerah. Dalam mengukur kinerja Sekretariat Daerah indikator yang dipergunakan mengacu pada hasil outcome/output program dan kegiatan Adapun Skala Nilai Peringkat Kinerja Sekretariat Daerah Kota Makassar untuk Tahun 2023 rata-rata sebesar **97%** dapat di kategorikan **sangat tinggi** sebagaimana kategori Skala Nilai Peringkat Kinerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD pada Tabel T-E.1, hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut .

1. Bagian Pemberdayaan Masyarakat rata-rata sebesar 100%,
2. Bagian Perencanaan dan Keuangan rata-rata sebesar 85%;
3. Bagian Umum rata-rata sebesar 95%;
4. Bagian Organisasi rata-rata sebesar 100%;
5. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan rata-rata sebesar 94%;
6. Bagian Tata Pemerintahan rata-rata sebesar 100%,
7. Bagian Kesejahteraan Rakyat rata-rata sebesar 100%;
8. Bagian Hukum rata-rata sebesar 91%;
9. Bagian Kerja sama rata-rata sebesar 91%;
10. Bagian Perekonomian rata-rata sebesar 97%;
11. Bagian Administrasi Pembangunan rata-rata sebesar 100%,
12. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa rata-rata sebesar 100%.

Sedangkan untuk realisasi keuangan sebesar **88,42%** atau **Rp.339.660.748.573,-** dari pagu anggaran sebesar **Rp.384.133.415.204,-**.

Predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja sebagaian besar telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja sebagaimana tergambar dalam Tabel T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023.

2.2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2024

Sedangkan untuk kinerja pada Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 Sampai dengan **Triwulan I Tahun 2024** masih sama dengan Tahun 2023 yaitu terdapat 4 program dengan 20 Kegiatan, yang terbagi ke dalam 66 Sub Kegiatan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.29.397.520.260,- atau 9,17% dari pagu anggaran sebesar Rp.320.618.913.486,-. Sedangkan realisasi capaian kinerja per unit kerja/bagian Sekretariat Daerah Kota Makassar dapat dilihat melalui *lmk bit ly/E81_ 2024randal* , sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut

Tabel Realisasi Triwulan I Tahun Anggarn 2024

NO.	UNIT KERJA	TAHUN ANGGARAN 2024			
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI KINERJA (%)
			Rp	%	
1	Bagian Pemberdayaan Masyarakat	16 459 472 300	8.821.526.490	53,60	40
2	Bagian Perencanaan dan Keuangan	48 042 717 408	6.241.926.570	12,99	32
3	Bagian Umum	132.077 223 024	8 420 327.027	6,38	8
4	Bagian Organisasi	1.764 684 100	90.000 000	5,10	30
5	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	22 853 982 800	1.558 772.390	6,82	10
6	Bagian Tata Pemerintahan	2 399 920 700	232 106 620	9,67	13
7	Bagian Kesejahteraan Rakyat	65 411 276 600	3 229 000.000	4,94	-
8	Bagian Hukum	4 792 667.000	176 235 824	3,68	8
9	Bagian Kerja sama	7.486.132.600	233 050 373	3,11	18
10	Bagian Perekonomian	3.166 129.200	130 550 516	4,12	-
11	Bagian Administrasi Pembangunan	3 805.005.600	88.690 400	2,33	8
12	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12 359 702.154	175 334 050	1,42	48
SEKRETARIAT DAERAH		**320.618.913.486**	**29.397.520.260**	**9,17**	**18**

Sehingga rata-rata realisasi capaian kinerja pada **Triwulan I** tahun 2024 pada Sekretariat Daerah Kota Makassar adalah sebesar **18%** maka, diharapkan seiring dengan berjalannya waktu sampai dengan **Triwulan IV** kami optimis akan tercapai target yang telah ditetapkan.

Adapun analisis capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 Triwulan I dapat dilihat pada table berikut:

Tabel B II-2 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Makassar

Triwulan I Tahun 2024

No.	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Bagian pemberdayaan masyarakat**											
	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan kelembagaan kemasyarakatan di 153 kelurahan			**153 Kelurahan**	**153 Kelurahan**	**153 Kelurahan**	**153 Kelurahan**	**100**	**40**	**153 Kelurahan**	**153 Kelurahan**	
	Terselenggaranya Pembinaan Kelembagaan,RT/ RW dan PKK			153 Kelurahan	153 Kelurahan	153 Kelurahan	153 Kelurahan	100	84	153 Lembaga	153 Kelurahan	
	Terselenggaranya Pembinaan LPM Peningkatan Peran Kelembagaan Dalam kegiatan Pengembangan keuangan			153 Kelurahan	153 Kelurahan	153 Kelurahan	153 Kelurahan	100	25	153 Unit	153 Kelurahan	
	Terselenggaranya Sayembara Dan pembinaan kelompok TTG			153 Kelurahan	153 Kelurahan	153 Kelurahan	153 Kelurahan	100	13	153 Laporan	153 Kelurahan	
2	**Bagian Perencanaan Dan Keuangan**							**86**	**41**			
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**100**	**67**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	
	Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah yang disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	50	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun			60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	100	0	60 Dokumen	60 Dokumen	
	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun			25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	100	60	25 Dokumen	25 Dokumen	
	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun			3 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	67	3 Laporan	3 Laporan	
	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	25	4 Laporan	4 Laporan	

No.	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	UOM	Target Renstra perangkat daerah				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Terpenuhinya dokumen administrasi keuangan			**18 Dokumen**	**18 Dokumen**	**18 Dokumen**	**18 Dokumen**	**92**	**38**	**18 Dokumen**	**18 Dokumen**	
	Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan			14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100	21	14 Bulan	14 Bulan	
	Jumlah Bulan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan			12 Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	25	12 Dokumen	12 Dokumen	
	Persentase Jumlah dokumen penatausahaan dan penguiran yang terverifikasi			100%	100%	100%	100%	100	8	100%	100%	
	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun			5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100	100	5 Laporan	5 Laporan	
	Jumlah kegiatan penyusunan bahan tanggapan pemeriksaan			4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	50	50	4 Dokumen	4 Kegiatan	
	Jumlah laporan keuangan bulanan yang tersusun			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		100	25	12 Laporan		
	Persentase terlaksanannya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**67**	**17**	**100%**	**100%**	
	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	25	12 Bulan	12 Bulan	
	Jumlah pimpinan dan keluarga yang mendapatkan jasa perawatan kesehatan (Medical check up)			8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	0	0	8 Orang	8 Orang	
	Jumlah bulan penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	25	12 Bulan	12 Bulan	
3	**Bagian Umum**							**9%**	**9**			
	Persentase terlaksananya Administarasi barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**0**	**100%**	**100%**	
	Jumlah dokumen pengamanan BMD SKPD			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	0	1 Dokumen	1 laporan	
	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	0	4 Laporan	4 Dokumen	

Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra perangkat daerah				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025	Tahun 2026	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**0**	**100%**	**100%**	
Jumlah pakain dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan			2192 Stel	2192 Paket	2192 Paket	2192 Stel	100	0	2192 Paket	2192 Stel	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	100	0	120 Orang	120 Orang	
Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**22**	**100%**	**100%**	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			36 Jenis	36 Jenis	36 Jenis	36 Jenis	100	0	36 Paket	36 Jenis	
Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan			30 Jenis	30 Jenis	30 Jenis	30 Jenis	0	0	30 Paket	30 Jenis	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan			2112 bahan bacaan	2112 bahan bacaan	2112 bahan bacaan	2112 bahan bacaan	100	0	2112 Dokumen	2112 bahan bacaan	
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			200 Kunjungan	200 Kunjungan	200 Kunjungan	200 Kunjungan	100	86	200 Laporan	200 Kunjungan	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			141 Perjalanan	141 Perjalanan	141 Perjalanan	141 Perjalanan	100	0	141 Laporan	141 Perjalanan	
Persentase terlaksananya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**0**	**100%**	**100%**	
Jumlah kendaraan perotangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan			2 Unit	0	2 Unit	0 Unit	0	0	2 Unit	0 Unit	
Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan			100%	100%	100%	100%	100	0	20 Unit	100%	
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			10 Jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100	0	10 Unit	10 Jenis	
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan			17 Jenis	17 Jenis	17 Jenis	17 Jenis	100	0	17 Unit	17 Jenis	

No.	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	MK	Target Renstra perangkat daerah				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**79**	**25**	**100%**	**100%**	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10,500 Surat	10,500 Surat	10,500 Surat	10,500 Surat	64	0	10,500 Laporan	10,500 Surat	
	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa telepon, air dan listrik			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	25	12 Laporan	12 Bulan	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	52	75	10 Laporan	10 Jenis	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	100	0	300 Laporan	300 Orang	
	Persentase terlaksanannya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**92**	**0**	**100%**	**100%**	
	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang pajaknya diperpanjang dan dipelihara			10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100	0	10 Unit	10 Unit	
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajaknya dibayar dan dipelihara			439 Unit	439 Unit	439 Unit	439 Unit	68	0	439 Unit	439 Unit	
	Jumlah mesin/eselon yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala			3 Gedung	3 Gedung	3 Gedung	3 Gedung	0	0	3 Unit	3 Gedung	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			6 Bangunan/ gedung	6 Bangunan/ gedung	6 Bangunan/ gedung	6 Bangunan/ gedung	100	0	6 Unit	6 Bangunan/ gedung	
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala			6 Bangunan/ gedung	6 Bangunan/ gedung	6 Bangunan/ gedung	6 Bangunan/ gedung	100	0	6 Unit	6 Bangunan/ gedung	
	Persentase terlaksananya kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**17**	**100%**	**100%**	
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			1 Rumah jabatan	1 Rumah jabatan	1 Rumah jabatan	1 Rumah jabatan	100	25	1 Paket	1 Rumah jabatan	
	Jumlah kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah			1 Rumah jabatan	1 Rumah jabatan	1 Rumah jabatan	1 Rumah jabatan	100	0	1 Paket	1 Rumah jabatan	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			1 Rumah dinas	1 Rumah dinas	1 Rumah dinas	1 Rumah dinas	100	25	1 Paket	1 Rumah dinas	

Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra perangkat daerah				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025	Tahun 2026	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bagian Organisasi											
Terlaksanannya penataan organisasi			100%	100%	100%	100%	100	30	100%	100%	
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	20	5 Dokumen	5 Dokumen	
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	30	5 Laporan	5 Dokumen	
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	50	2 Dokumen	2 Dokumen	
Bagian Protokol											
Jumlah pelayanan, fasilitasi keprotokoleran & Komunikasi Pimpinan Kota Makassar			**1160 Pelayanan**	**1160 Pelayanan**	**1160 Pelayanan**	**1160 Pelayanan**	**94**	**10**	**1160 Pelayanan**	**1160 Pelayanan**	
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Keprotokoleran			840 Pelayanan	840 Pelayanan	840 Pelayanan	840 Pelayanan	93	13	840 Laporan	840 Pelayanan	
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			320 Pelayanan	320 Pelayanan	320 Pelayanan	320 Pelayanan	92	7	320 Laporan	320 Pelayanan	
Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			240 kegiatan	240 kegiatan	240 kegiatan	240 kegiatan	97	11	240 Laporan	240 kegiatan	
Bagian Tata Pemerintahan											
Persentase terlaksananya Administrasi Pemerintahan			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**13**	**100%**	**100%**	
Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	0	4 Dokumen	4 Dokumen	
Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0	0	0	2 Laporan	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	0	0	0	4 Laporan	
Jumlah Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan Instansi/Lembaga/Perangkat Daerah			12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 kegiatan	0	0	0	12 Kegiatan	
Jumlah Rapat Koordinasi pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ketentraman dan ketertiban umum dan lainn			4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 kegiatan	4 Kegiatan	0	0	0	4 Kegiatan	

No.	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra perangkat daerah				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	0	1 Dokumen	1 laporan	
	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dilakukan Fasilitasi Toponimi dan Pemetaan Wilayah			168 Kecamatan / Kelurahan	168 Kecamatan / Kelurahan	168 Kecamatan / Kelurahan	168 Kecamatan / Kelurahan	0	0	0	168 Kecamatan / Kelurahan	
	Jumlah Kecamatan dan kelurahan yang dilakukan pembinaan wilayah			5 Kecamatan / Kelurahan	5 Kecamatan / Kelurahan	5 Kecamatan / Kelurahan	5 Kecamatan / Kelurahan	0	0	0	5 Kecamatan / Kelurahan	
	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang dilakukan Penegasan Batas Wilayah			42 Kecamatan / Kelurahan	42 Kecamatan / Kelurahan	42 Kecamatan / Kelurahan	42 Kecamatan / Kelurahan	0	0	0	42 Kecamatan / Kelurahan	
	Jumlah Kelurahan yang dilakukan Pemantapan penyelenggaraan dana kelurahan			153 kelurahan	153 kelurahan	153 kelurahan	153 kelurahan	0	0	0	153 kelurahan	
	Jumlah Keputusan pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Kelurahan			15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	0	0	0	15 Laporan	
	Jumlah Dokumen Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0			
	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang tersusun			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	1 Laporan	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	40	0	1 Laporan	
	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Akhir Tahun Walikota			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	1 Laporan	
	Jumlah Peralatan Komputer Jaringan Sistem Informasi E LPPD dan E Eppd			4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	0	0	0	4 Unit	
	Jumlah usul dan keputusan pergantian antar waktu pimpinan dan OPAD Kota			6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	0	0	0	6 dokumen	
	Jumlah usul dan surat izin/cuti Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	0	0	0	6 dokumen	

Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra perangkat daerah				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025	Tahun 2026	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bagian Kesejahteraan Rakyat											
Terlaksananya Kegiatan Dan Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			**27 Kegiatan**	**27 Kegiatan**	**27 Kegiatan**	**27 Kegiatan**	**100**	**0**	**27 Kegiatan**	**27 Kegiatan**	
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			22 Kegiatan	22 Kegiatan	22 Kegiatan	22 Kegiatan	100	0	27 Dokemen	22 Kegiatan	
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	100	0	5 Dokumen	5 Kebijakan	
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	5 Kebijakan	100	0	5 Dokumen	5 Kebijakan	
Bagian Hukum											
Persentase Terlaksananya penyusunan produk hukum daerah			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**92**	**8**	**100%**	**100%**	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			120 Produk Hukum	120 Produk Hukum	120 Produk Hukum	120 Produk Hukum	96	3	120 Dokumen	120 Produk Hukum	
Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum			12 Perkara	12 Perkara	12 Perkara	12 Perkara	83	17	12 Kasus	12 Perkara	
Jumlah pendokumentasian Produk Hukum daerah			120 Produk Hukum	120 Produk Hukum	120 Produk Hukum	120 Produk Hukum	96	3	120 Dokumen	120 Produk Hukum	

No.	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	BGK	Target Renstra perangkat daerah				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Bagian Kerjasama											
	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**18**	**100%**	**100%**	
	Jumlah dokumen kerjasama dalam negeri yang ditandatangani			20 Dokumen kerjasama	20 Dokumen kerjasama	20 Dokumen kerjasama	20 Dokumen kerjasama	0	0	20 Dokumen	20 Dokumen kerjasama	
	Jumlah dokumen kerjasama dalam negeri yang mempunyai rekomendasi dan tim koordinasi			20 Dokumen kerjasama	20 Dokumen kerjasama	20 Dokumen kerjasama	20 Dokumen kerjasama	0	0	0	20 Dokumen kerjasama	
	Jumlah kesepakatan kerjasama yang tercapai			20 Dokumen kerjasama	20 Dokumen kerjasama	20 Dokumen kerjasama	20 Dokumen kerjasama	0	0	0	20 Dokumen kerjasama	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri							100	55			
	Forum investasi luar negeri			1 Forum Kerjasama	1 Forum Kerjasama	1 Forum Kerjasama	1 Forum Kerjasama	0	0	0	1 Forum Kerjasama	
	Jumlah dokumen kerjasama luar negeri			1 Dokumen kerjasama	1 Dokumen kerjasama	1 Dokumen kerjasama	1 Dokumen kerjasama	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen kerjasama	
	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kerjasama luar negeri			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0	0	1 Laporan	1 laporan	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri							100	0			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			0	0	0	0	100	0	2 Dokumen	0	
	Buku Potensi Kerjasama			100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	0	0	0	100 Eksemplar	
	Jumlah laporan dan data kerjasama secara berkala yang didokumentasikan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0	0	0	1 laporan	
	Monitoring dan evaluasi kerjasama luar negeri			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	0	0	0	1 laporan	

	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra perangkat daerah				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Bagian Perekonomian											
	Persentase tersedianya rumusan kebijakan perekonomian dan jumlah BUMD yang berkinerja baik			**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	97	0	**100%**	**100%**	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			0	0	0	0	100	0	26 Dokumen	0	
	Jumlah Laporan Kinerja Manajemen dan Keuangan BUMD dan BLUD			26 Laporan BUMD/BLUD	26 Laporan BUMD/BLUD	26 Laporan BUMD/BLUD	26 Laporan BUMD/BLUD	0	0	0	26 Laporan BUMD/BLUD	
	Jumlah pelaksanaan kegiatan asesment BLUD dan BUMD			2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0	0	0	2 Kegiatan	
	Jumlah rapat koordinasi khusus, sosialisasi, workshop, bimtek lingkup BLUD dan BUMD Kota Makassar			4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	0	0	0	4 kali	
	Tersusunnya dokumen bisnis plan dan corporate plan/RKAP BUMD dan BLUD			12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	0	0	0	12 dokumen	
	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian			0	0	0	0	100	0	2 Laporan	0	
	Jumlah laporan informasi dan rekomendasi distribusi dan pengendalian perekonomian			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0	0	0	2 Laporan	
	Jumlah Rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah			4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	0	0	0	4 kali	
	Jumlah kegiatan sosialisasi/FGD terkait pengendalian dan distribusi perekonomian			2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0	0	0	2 Kegiatan	
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			0	0	0	0	91	0	2 Dokumen	0	
	Jumlah Rapat koordinasi			4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	0	0	0	4 kali	
	Jumlah peserta yang diedukasi			180 orang	180 orang	180 orang	180 orang	0	0	0	180 orang	
	Jumlah Laporan Informasi dan rekomendasi terkait perencanaan dan pengawasan usaha mikro kecil			2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	0	0	2 Dokumen	2 laporan	



No.	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra perangkat daerah				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
11	**Bagian Administrasi Pembangunan**											
	Persentase Penyerapan realisasi anggaran melalui SISMONTEPRA			**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**100**	**8**	**90%**	**90%**	
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusuanan Program Pembangunan Daerah			0	0	0	0	100	0	2 Dokumen	0	
	Jumlah dokumen penyusunan program pembangunan yang di fasilitasi			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	
	Jumlah CSR yang difasilitasi			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen	
	Jumlah lapuran hasil pengendalian dan evaluasi program pembagunan			0	0	0	0	100	0	4 Laporan	0	
	Jumlah dokumen program pembangunan yang dikendalikan dan dievaluasi			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	
	Jumlah SKPD yang mendapatkan DAK			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	
	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksaan pembangunan			0	0	0	0	100	25	12 Laporan	0	
	Persentase SKPD yang mengisi laporan evaluasi dan pengawasan anggaran pada aplikasi SISMONTEPRA tepat waktu			100%	100%	100%	100%	0	0	0	100%	
12	**Bagian Pengadaan barang Dan Jasa**											
	Maturitas/kematangan unit kerja pengadaan barang dan jasa			**3 level**	**3 level**	**3 level**	**3 level**	**100**	**48**	**3 level**	**3 level**	
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa			0	0	0	0	100	11	50 Dokumen	0	
	Jumlah pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilayani			200 Paket	200 Paket	200 Paket	200 Paket	0	0	0	200 Paket	
	Jumlah doukmen hasil layanan pengadaan secara elektronik			0	0	0	0	100	14	70 Dokumen	0	
	Jumlah fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang dilaksanakan			7 Fungsi Layanan	7 Fungsi Layanan	7 Fungsi Layanan	7 Fungsi Layanan	0	0	0	7 Fungsi Layanan	
	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa			0	0	0	0	100	120	300 Orang	0	
	Jumlah bimbingan teknis/sosialisasi yang dilaksanakan dan Jumlah SKPD yang mendapatkan pendampingan barang			6 kegiatan dan 15 SKPD	6 kegiatan dan 15 SKPD	6 kegiatan dan 15 SKPD	6 kegiatan dan 15 SKPD	0	0	0	6 kegiatan dan 15 SKPD	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selaku institusi yang memberikan supporting system kepada Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran sentral mengkoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, penatalaksanaan organisasi, serta memberikan fasilitasi administrasi kepada seluruh perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunanan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Sekretariat Daerah (SOTK-SKPD).

Adapun Isu Pentinng Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berupa usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 baik dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Tingkat Kota Makassar serta Pokok-Pokok pikiran baik dari Anggota DPRD Kota Makassar Dan Para Pemangku Kepentingan di Kota Makassar dan pelayanan yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kota Makassar secara umum terdapat keterkaitan dengan pelayanan Sekretariat Daerah baik keterkaitan yang kuat secara langsung maupun keterkaitan yang bersifat supporting atau dukungan pada SKPD lain selaku leading sektor pemangku kepentingan atas pelaksanaan program prioritas dimaksud, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Insentif kinerja RT/RW Rp. 2 Juta dan perkuat fungsi RT/RW serta para Local Influencer;
b. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Makassar berupa belanja Hibah Uang kepada Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Makassar;
c. Penguatan Keimanan Ummat berupa belanja Hibah Uang kepada Rumah Ibadah yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
d. Bantuan hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia seperti lembaga Sosial, Kepemudaan, dan Yayasan Keagamaan,
e Program priontas penataan total Sistem BUMD dan Pembentukan Makassar incorporation;
f Program Priontas Pembuatan Perda Omnibus Makassar Kota Dunia, serta

g Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan **Tahun 2025** baik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar serta Pokok-Pokok pikiran baik dari Anggota DPRD Kota Makassar; dan

h Hal-hal yang terkait adanya kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih periode tahun 2024-2029 yang membutuh pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk itu Sekretariat Daerah harus mampu mengukur kinerja pelayanan yang sudah dilaksanakan, mengidentifikasi **permasalahan** dan **hambatan**, serta mengetahui tantangan atau peluang yang dimiliki dan memformulasikan isu-isu penting yang merupakan rekomendasi atau catatan stretegis untuk diaplikasikan dalam program dan kegiatan akan dilaksanakan. Adapun beberapa **permasalahan** diantaranya sebagai berikut :

a) Terbatasnya Kemampuan keuangan Daerah Dalam Melakukan Pembinaan Organisasi dan Lembaga Keagamaan termasuk Rumah Ibadah;
b) Belum Optimalnya Perumusan Kebijakan Perekonomian terkait BUMD yang memiliki kinerja yang baik dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap PAD; dan
c) Lemahnya Kordinasi terhadap stakeholder terkait perumusan Kebijakan Daerah.

Sedangkan **hambatan** yang dihadapi diantaranya sebagai berikut .

a) Terbatasnya Sumber Pendanaan;
b) Rendahnya Profesionalitas Manajemen Perusahaan Daerah; dan
c) Belum Optimalnya koordinasi dengan SKPD selaku Stakeholder.

Dari isu-isu penting ini menjadi rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan priontas tahun 2025. Rekomendasi dan catatan antara lain ;

a. Perbaikan Kualitas Penyelenggaraan pemenntahan melalui evaluasi kinerja/ perbaikan struktur Organisasi dan peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan.
b. Penyusunan Perda Omnibus LAW Lingkup Kota Makassar
c. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, berupa Hibah Uang kepada Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Makassar
d Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagai berikut :

1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan berupa Bantuan Hibah kepada Lembaga/Badan.
2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar diantaranya :
   - Lembaga Keagamaan dan Kepemudaan; dan
   - Bantuan Rumah Ibadah.

e. Perbaikan Kualitas Penyelenggaraan dalam melaksanakan Assessment terhadap jajaran direksi BUMD/BLUD Kota Makassar.

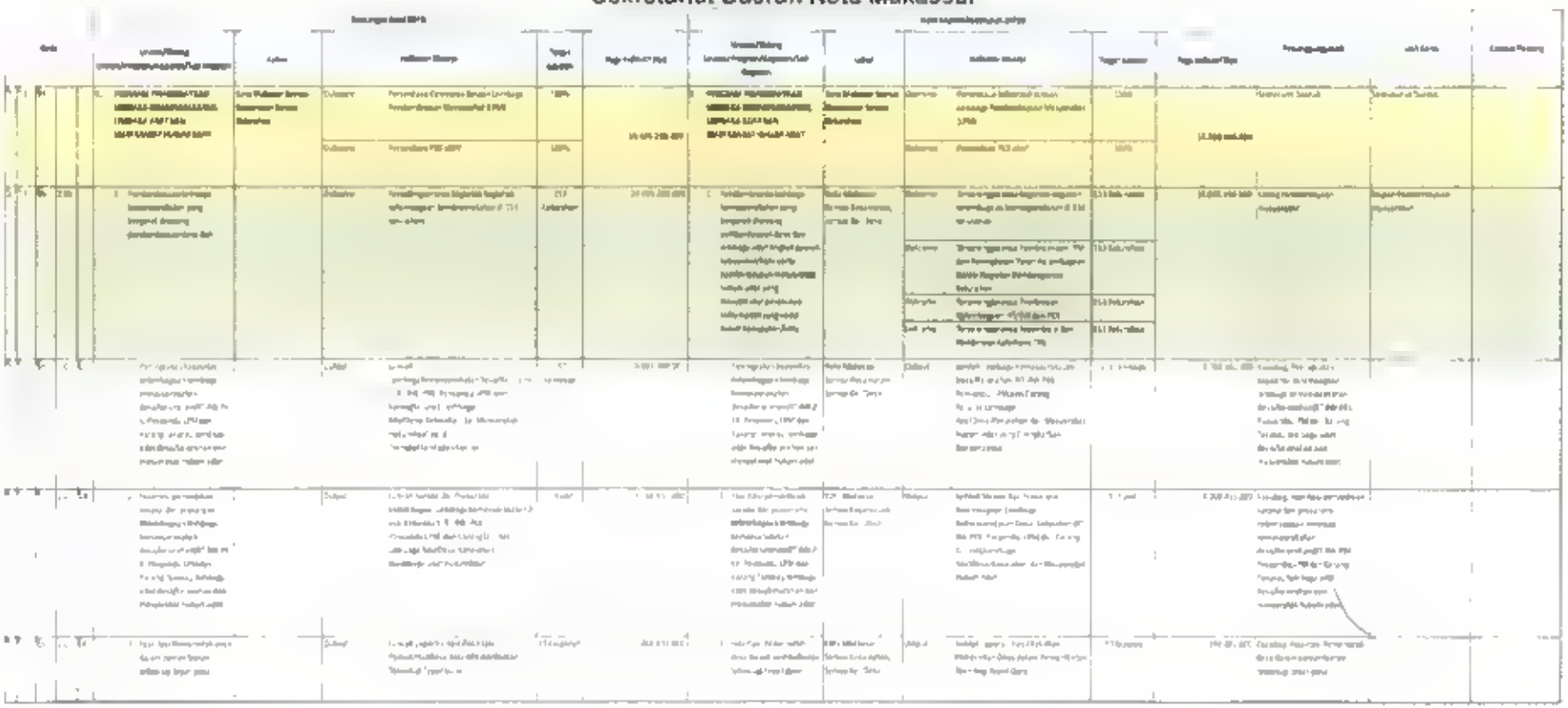
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

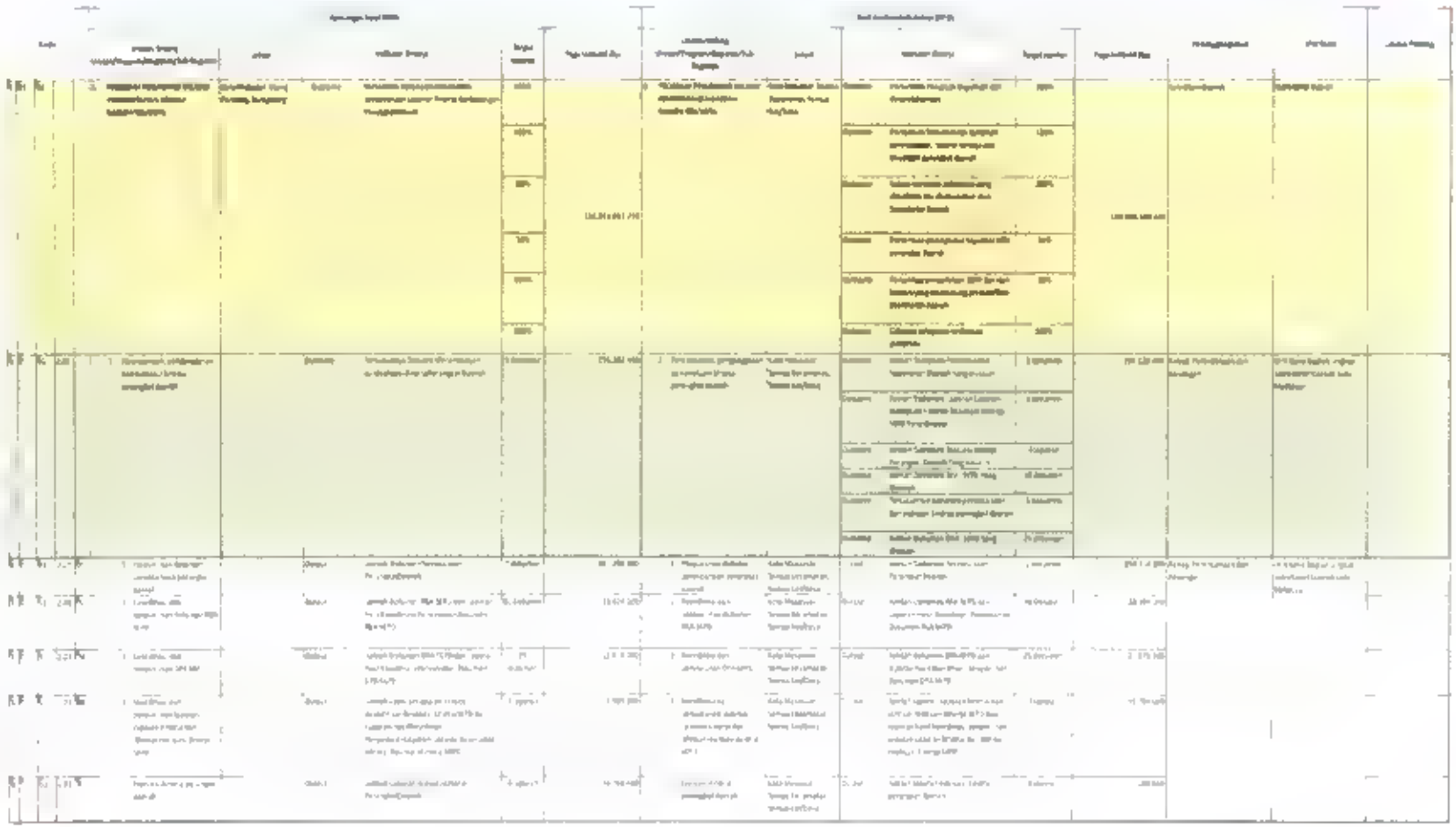
Penyempurnaan rancangan Akhir Renja Sekretariat Daerah **Tahun 2025** mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 dan rancangan Akhir Renja yang dilakukan setelah mendapat masukan dari usulan masyarakat melalui musrenbang. Penyempurnaan rancangan Renja dilakukan dengan menyajikan daftar kegiatan yang ada pada masing-masing Bagian. Telaahan terhadap rancangan Akhir Renja dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan kinerja yang dicapai oleh masing-masing Bagian serta pagu indikatif yang disediakan berdasarkan rancangan Akhir Renja.

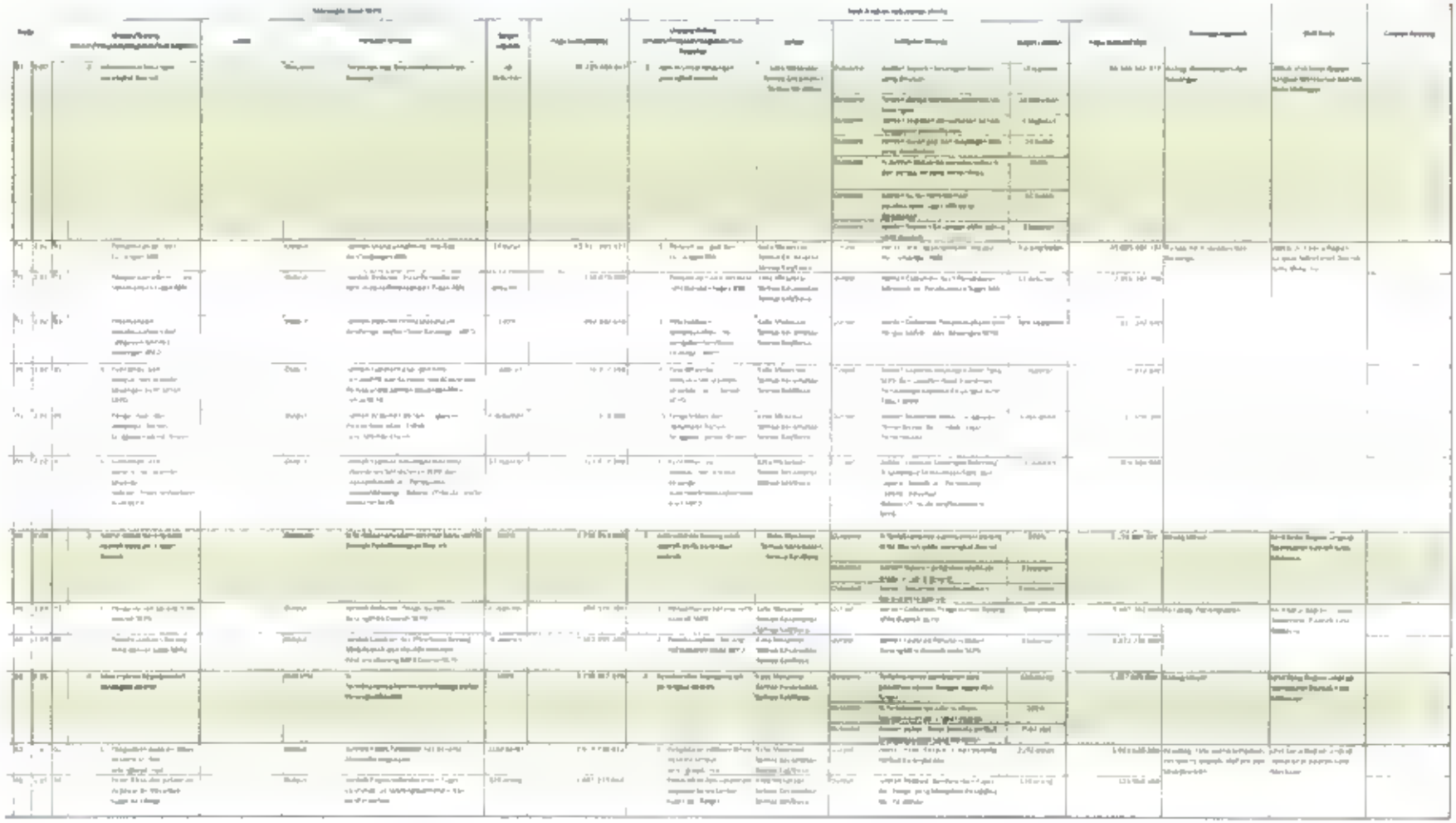
Hasil review terhadap rancangan Akhir Renja yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator dan target kinerja program/kegiatan (outcome dan output) serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk masing-masing Bagian yang bersangkutan, dapat disimpulkan **secara umum**, usulan program dan kegiatan dalam Renja tidak berbeda secara signifikan dengan rancangan Akhir Renja. Secara keseluruhan, usulan program dan kegiatan Sekretariat Daerah untuk **Tahun 2025** telah berkesesuaian dengan **RKPD Tahun 2025** dalam Aplikasi SIPD Kemendagri dapat dilihat pada tabel berikut :

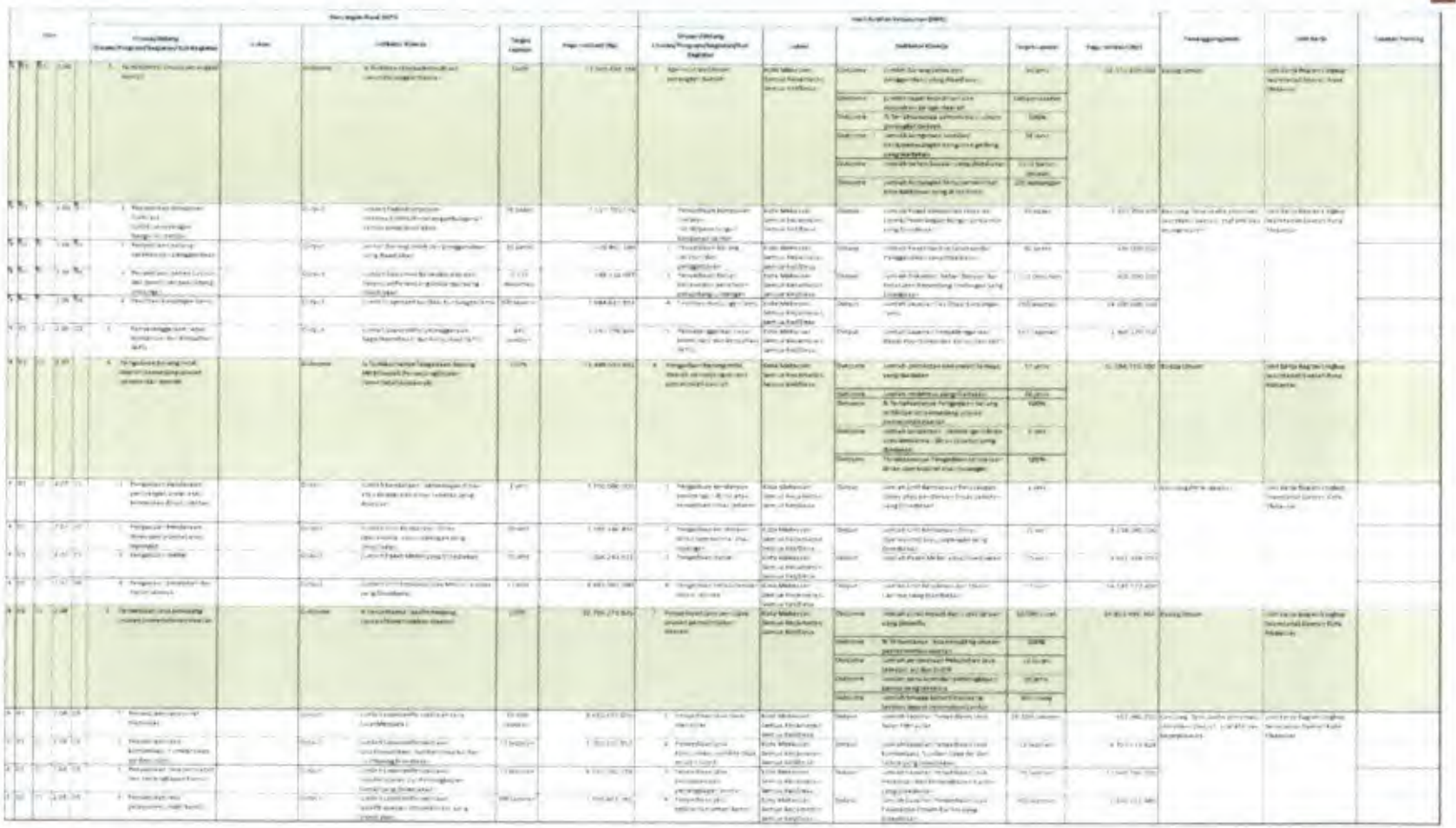
Tabel B II-3 (T-C.31)

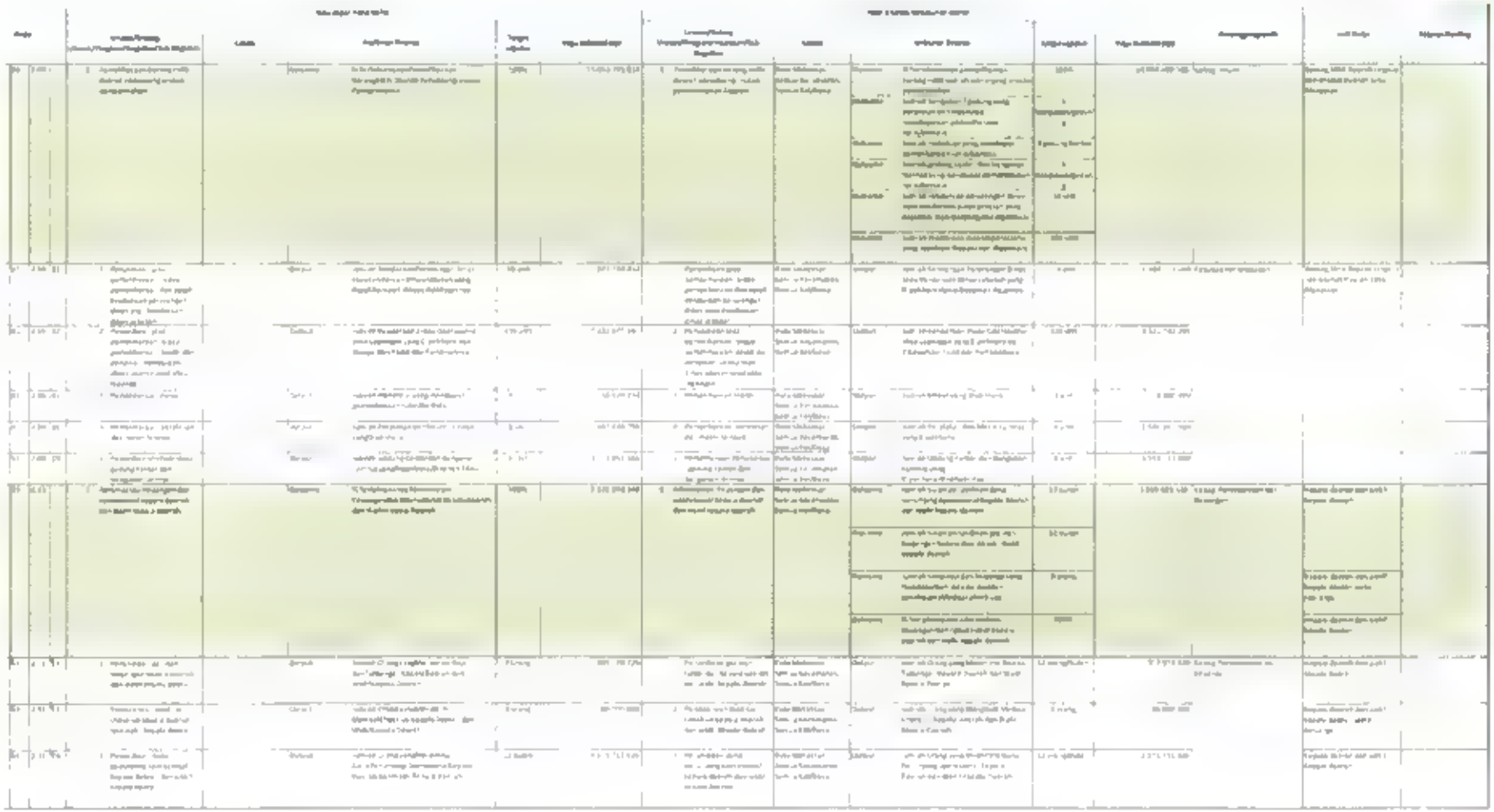
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kota Makassar

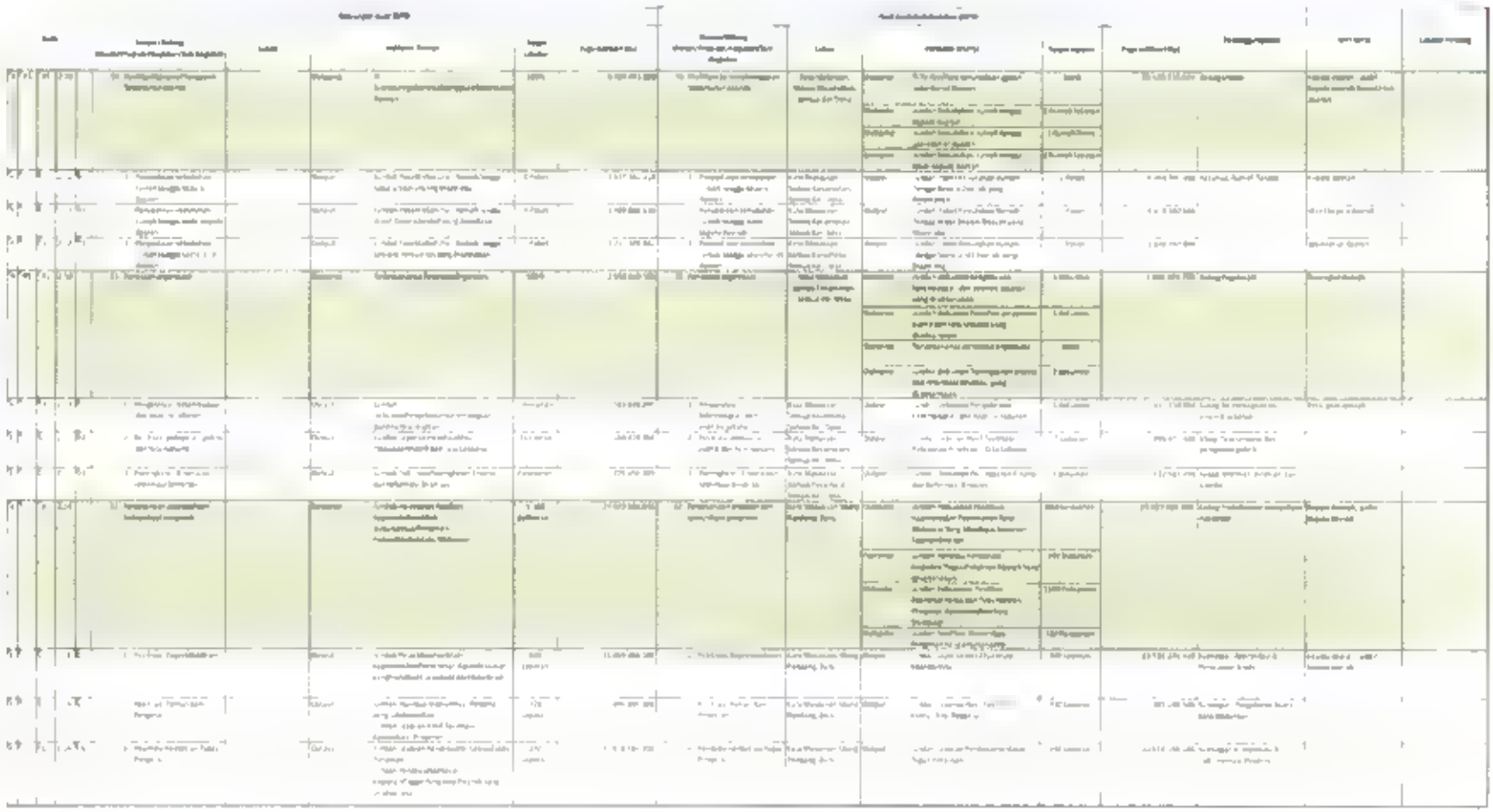


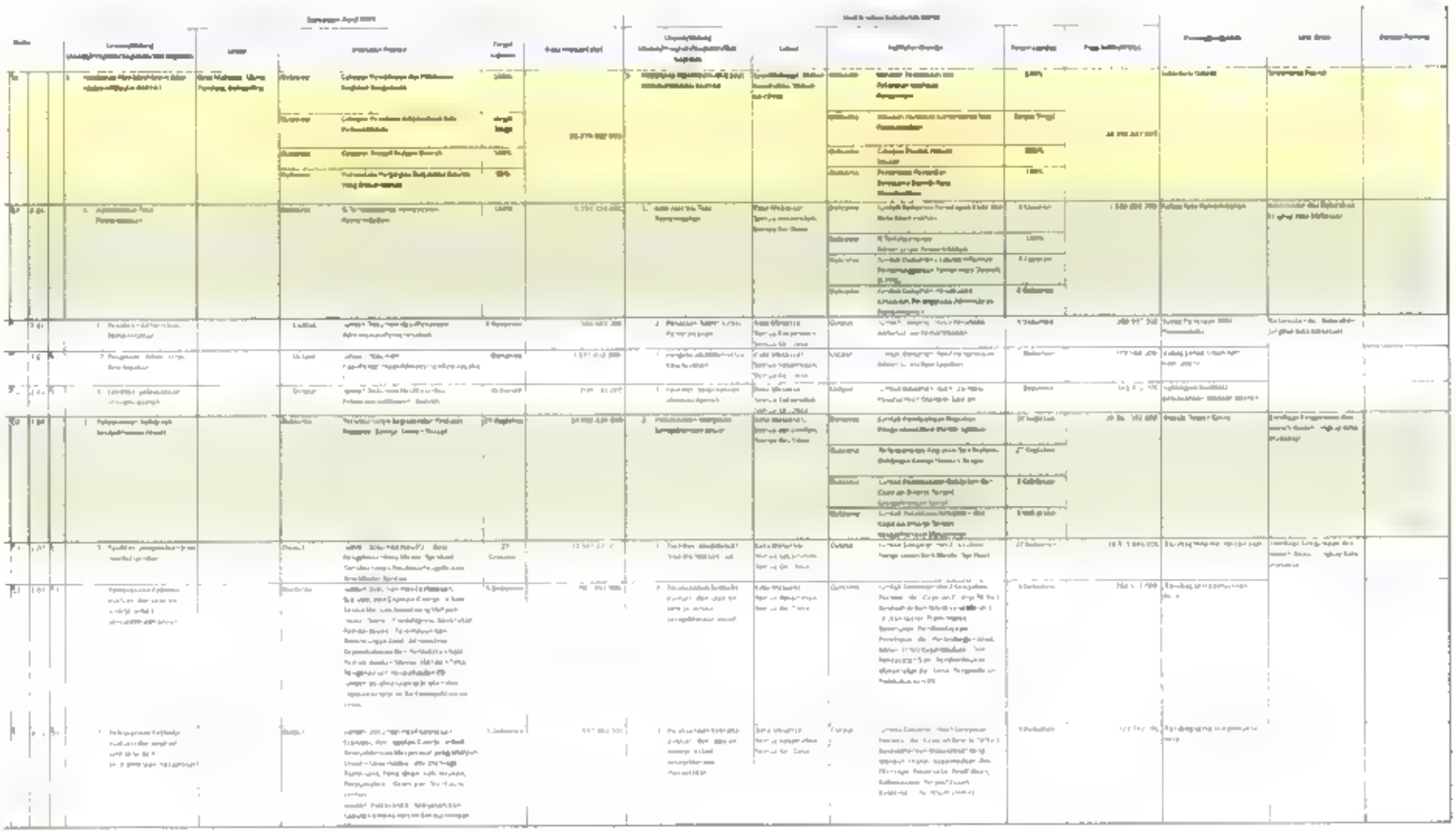


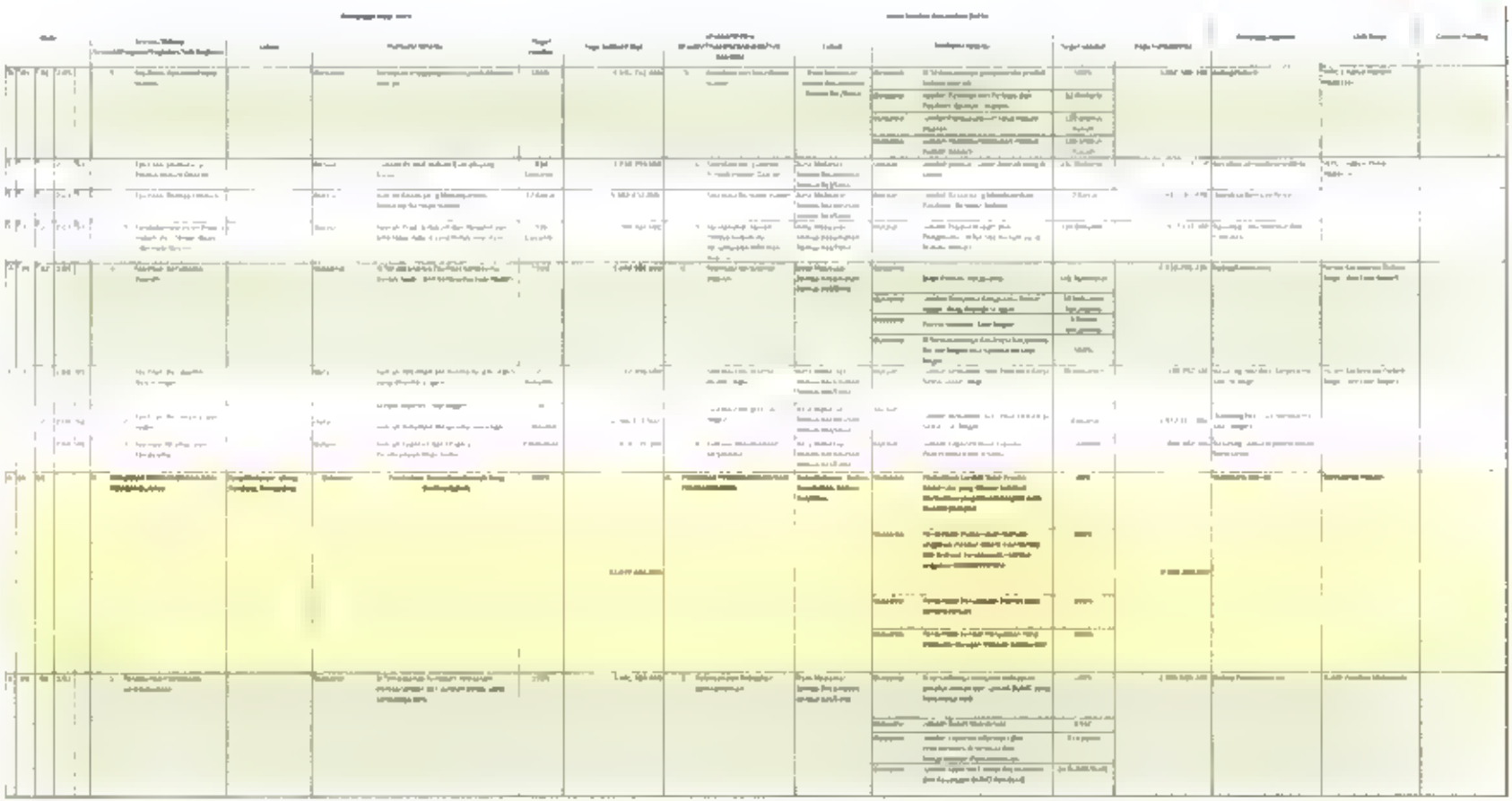


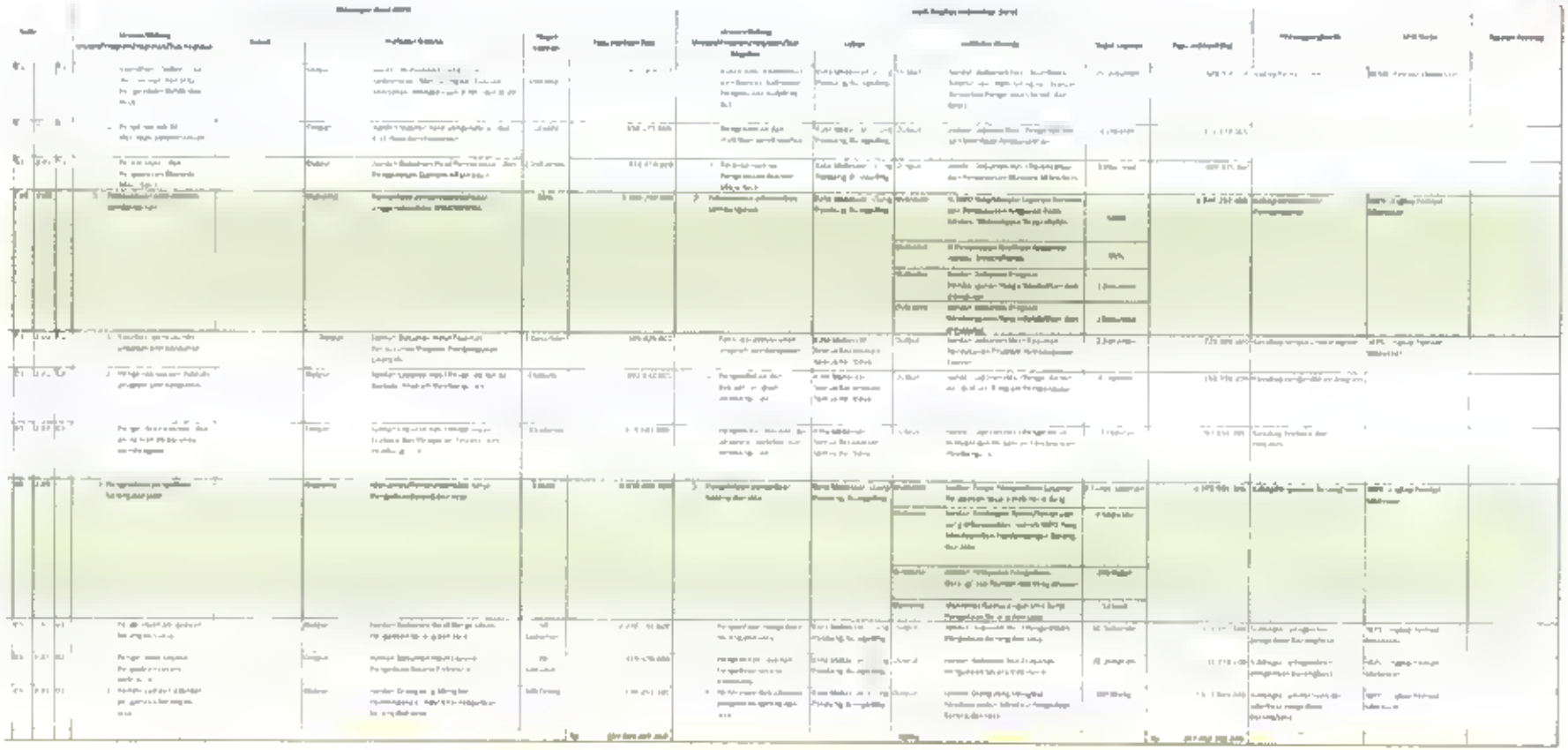












2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Setiap tahunnya Pemerintah Kota Makassar mendorong penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di tingkat kecamatan dan di tingkat kota. Ini dimaksudkan untuk melakukan sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat yang mesti diblayal dengan APBD dengan kebijakan yang termuat di dalam RPJMD Kota Makassar dengan usulan yang berasal dari masyarakat.

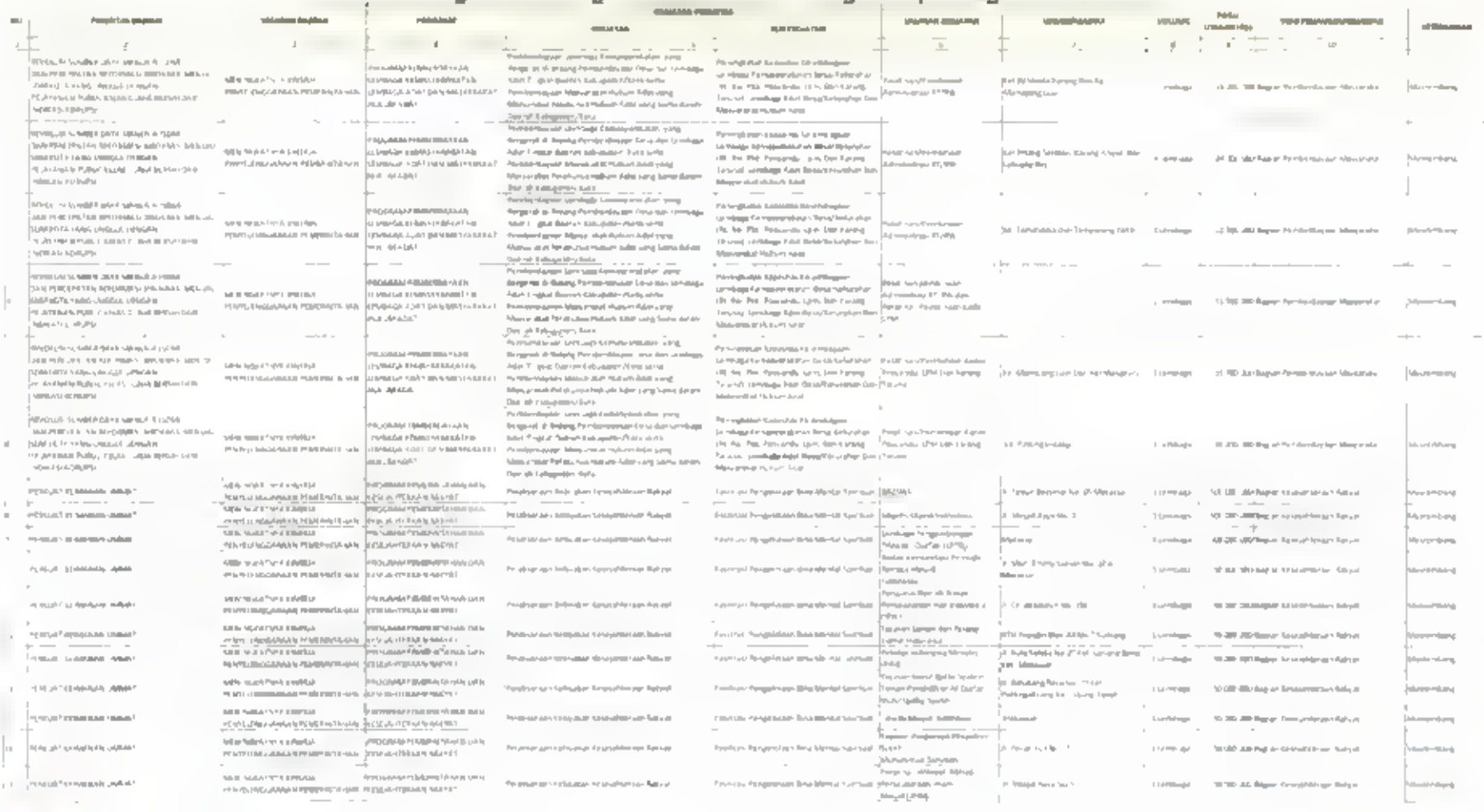
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut memberi ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai masalah yang dihadapi, dimana masalah-masalah tersebut masuk dalam domain tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam hal ini Sekretariat Daerah.

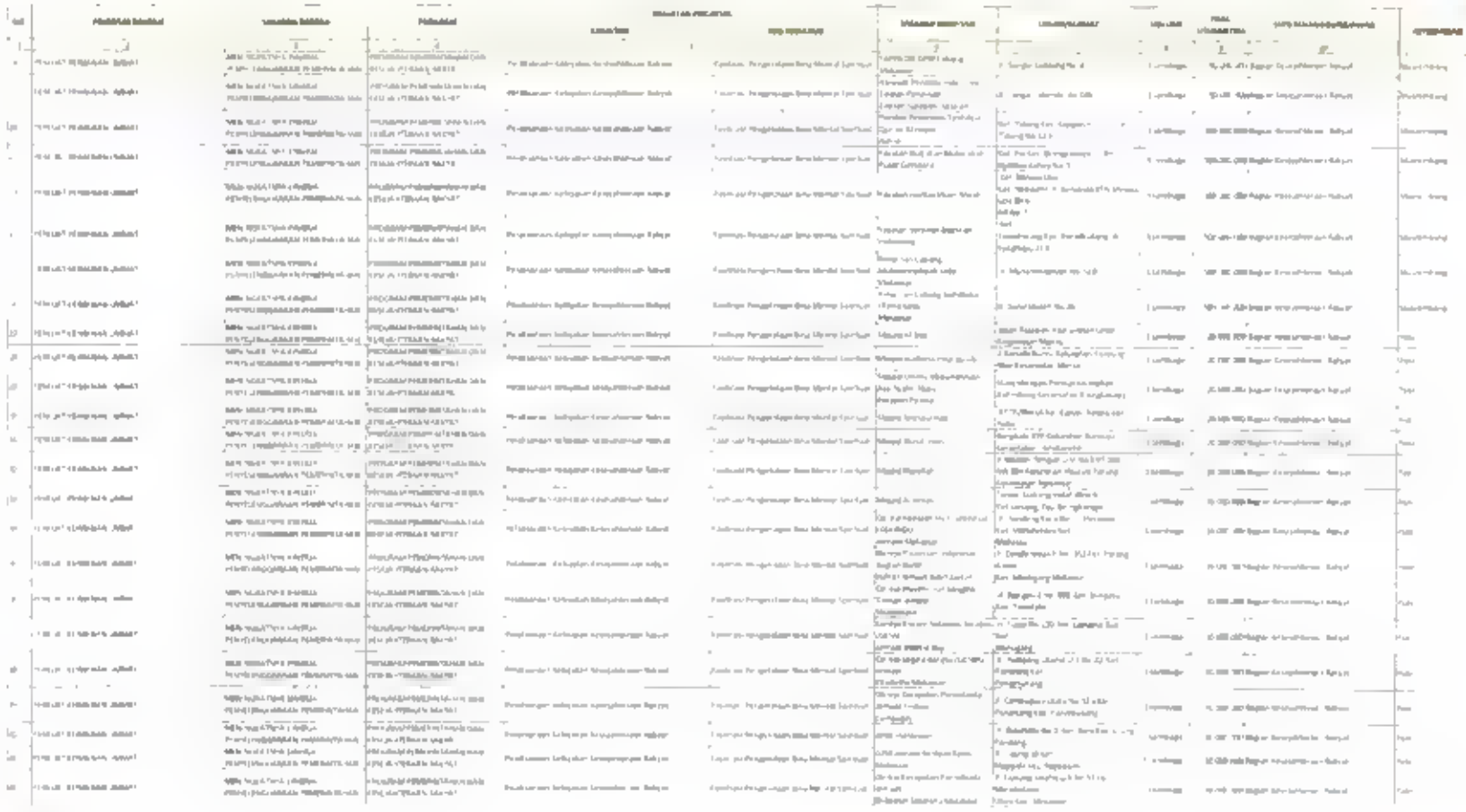
Dalam kaitan itu serta mencermati berbagal usulan masyarakat yang berkembang dalam Musrembang Kota maka terdapat beberapa usulan yang secara substansi menjadi ranah dan domain Sekretariat Daerah Kota Makassar untuk di telaah dan disinkronkan kedalam program dan kegiatan Sekretariat Daerah untuk **tahun 2025**. Adapun usulan dimaksud sebagian besar berada pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada Unit Kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat.

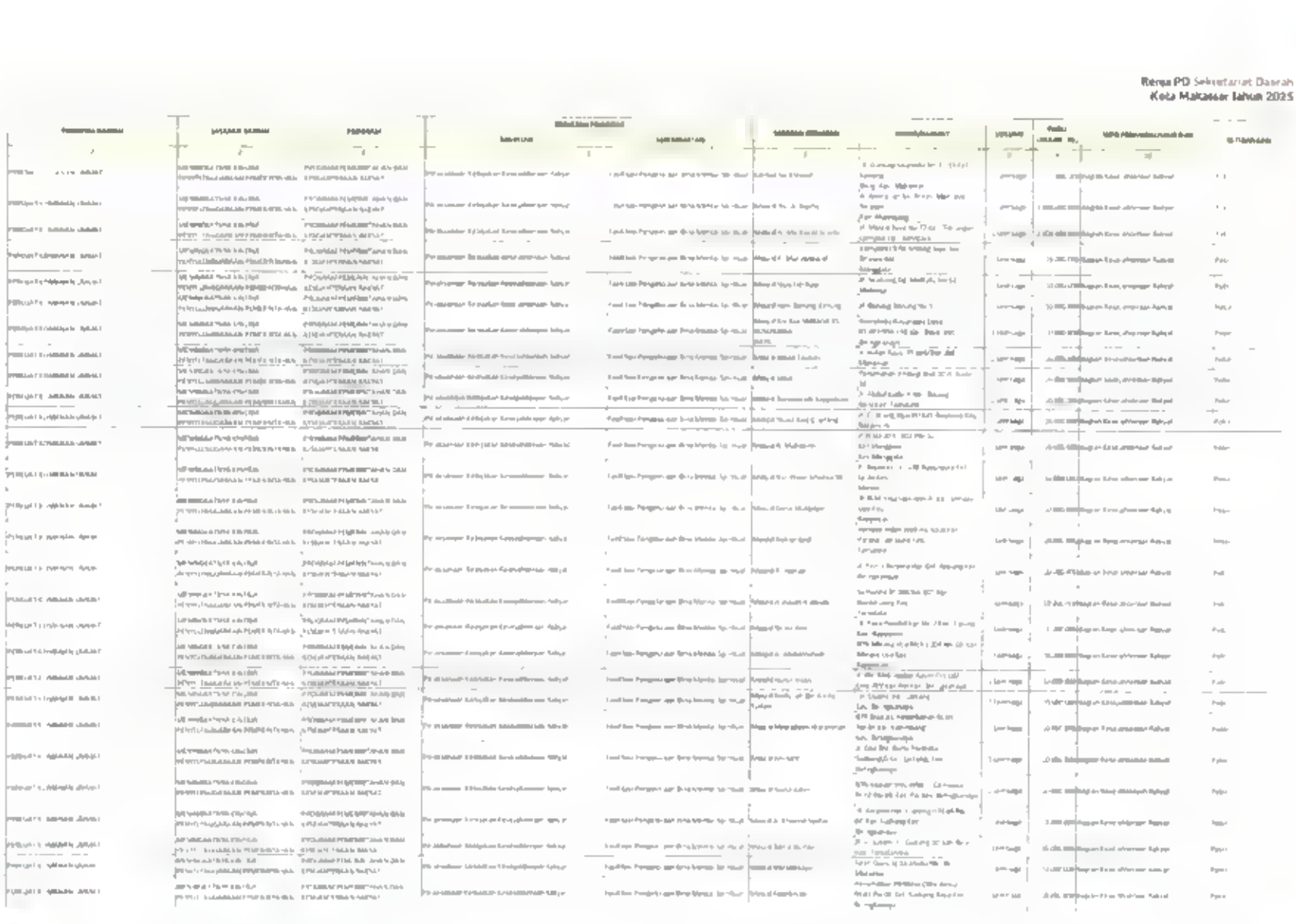
Sub Kegitan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual merupakan sub kegiatan yang difokuskan untuk pembangunan kehidupan beragama yang kondusif. Sub Kegiatan ini sangat bersesuaian dengan visi misi Bapak Walikota dan Wakil Walikota Makassar dengan penajaman pada program Strategis Perkuat Keimanan Ummat. Hal ini penting karena disadari bahwa membangun daerah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik semata, melainkan juga berkaitan dengan pembangunan perilaku yang religius yang di dalamnya membutuhkan peningkatan kualitas mental dan spiritual. Upaya fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual ini terkait dengan berbagai aspek pembinaan seperti bantuan Rumah Ibadah dan Lumbaga, peningkatan kesejahteraan guru mengaji dan imam rawatib, pembinaan muballigh, penyelenggaraan Taman Baca Al-Qur'an dan lain-lain. Adapun usulan bantua hibah ke masyarakat (bantua rumah ibadah,lembaga masyarakat,dan lainnya) telah dilengkapi dengan usulan proposal dari masyrakat/lembaga yang mengusulkan.

Secara keseluruhan, kajian usulan program dan kegiatan masyarakat **Tahun 2025** dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel B II-4 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025









BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tema RKP Tahun 2025 yaitu *"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan"* maka, arah kebijakan pembangunan nasional untuk tahun 2025 meliputi :

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan

Dari ketiga arah kebijakan Pembangunan nasional untuk tahun 2025 jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah maka Sekretariat daerah berada dan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025 yakni memperkuat Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui pembinaan BUMD/BLUD Kota Makassar yang menyeluruh melibatkan semua orang dari berbagai kelompok tanpa sekalipun meninggalkan salah satu unsur dimasyarakat, serta penggunaan produk-produk yang ramah lingkungan dalam lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan .

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dari kondisi faktual dan hasil analisis lingkungan strategis, baik menyangkut potensi, kemampuan, keterbatasan dan isu-isu strategis yang masih harus diselesaikan Sekretariat Daerah Kota Makassar, maka untuk menyelenggarakan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan maka, perlu dilakukan perumusan tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah dengan memperhatikan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar maka, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Makassar dirumuskan sebagai berikut:

1 Tujuan .

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Efektif.

2. Sasaran .

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

3.3. Program dan Kegiatan

Peran strategis Kota Makassar, menuntut adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan baik lokal, regional maupun nasional. Untuk

merespon tuntutan tersebut dilakukan upaya reformasi manejemen sektor publik dengan melakukan re-engineering revitalisasi, restrukturisasi birokrasi ke arah organisasi yang lebih modern, dengan mendesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah re-orientasi ke arah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis Guna menghadapi tantangan termasuk perlu melakukan sejumlah regulasi dan deregulasi terutama terhadap aturan dan prosedur yang berlaku

Jumlah kebijakan yang dikembangkan meliputi kebijakan publik yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan publik dan kebijakan teknis serta kebijakan SDM, keuangan dan kebijakan pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana yang dituangkan dalam kebijakan strategis, selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan dalam program yang akan dilaksanakan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan susaran diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Dan setiap strategi menunjukan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah untuk **Tahun 2025** dan **Perkiraan Maju Tahun 2026**. diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2025

A. **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp,13.008.499 800

Terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:

Kegiatan **Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp,13.008.499.800, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai benkut .

1 **Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan(RT,RW,PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 8.700.162.800.

2. **Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan(RT,RW,PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp.4.009.455.000;

3 **Fasilitasi Pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 298.882.000.

B. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp.188.096.586.680.

Terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan **Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 290.226 440, yang terdiri dan 5 Sub Kegiatan Sebagai berikut

   a **Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 194.714.800

   b. **Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 28.564.000.

   c. **Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 21.870 000.

   d **Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 19 789.000.

   e **Evaluasi kinerja perangkat daerah** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 25.288.640

2. Kegiatan **Administrasi keuangan perangkat daerah** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp, 46.326.432.277, yang terdiri dari 6 Sub Kegiatan Sebagai berikut :

   a **Penyediaan gaji dan tunjangan ASN** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 43 083.664 197.

   b. **Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2.076.384.000.

   c. **Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 821.342.640.

d **Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 20.372 640.

e. **Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 15.504.000.

f. **Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 309.164.800.

3. Kegiatan **Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp, 8.159.604 000, yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

   a. **Pengamanan barang milik daerah SKPD** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1 487.352 000.

   b **Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 6.672.252.000.

4. Kegiatan **Administrasi kepegawaian perangkat daerah** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp, 1.457.020.000, yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut

   a **Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1.025.020.000

   b. **Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 432 000.000.

5. Kegiatan **Administrasi Umum perangkat daerah** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp, 18.570.879.900, yang terdiri dari 5 Sub Kegiatan sebagai berikut .

   a. **Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1.557 709 900.

   b **Penyediaan barang cetakan dan penggandaan** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 436 000.000

   c. **Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 408.000.000.

   d. **Fasilitasi kunjungan tamu** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 14 200 000.000.

   e. **Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1.969 170.000.

6. Kegiatan **Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp, 18.570.879.900, yang terdiri dari 4 Sub Kegiatan sebagai berikut .

a **Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 0

b. **Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 4 138 080.000.

c. **Pengadaan mebel** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3.911 108.000.

d. **Pengadaan peralatan dan mesin lainnya** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 14 135.522.400.

7. Kegiatan **Penyediaan jasa penujang urusan pemerintahan daerah** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 24.812 496.304, yang terdiri dari 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. **Penyediaan jasa surat menyurat** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 412 080 000

b **Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 8.353.513.824

c **Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 12.946.780 000.

d. **Penyediaan jasa pelayanan umum kantor** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3.100.122.480.

8. Kegiatan **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 14 993.400 700, yang terdiri dari 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a **Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1.269.725.000.

b. **Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 8.521.742.200.

c. **Pemeliharaan mebel** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 58.800.000.

d. **Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1.591.862.500.

e. **Pemeiharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3.551 271.000.

9. Kegiatan **Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3.969 685 540, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. **Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 317.973.920.
b. **Pelaksanaan medical check-up kepala daerah dan wakil kepala daerah** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 80.000.000.
c. **Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3.571.711.620.

10. Kegiatan **Fasilitasi kerumahtanggaan Sekertariat daerah** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 22.423.110.000, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :
    a. **Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 6.494.690.000.
    b. **Penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 4.079.660.000.
    c. **Penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 11.848.760.000.
11. Kegiatan **Penataan organisasi** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1.881.491.779, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :
    a. **Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 352.254.800.
    b. **Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 996.671.480.
    c. **Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 532.565.499.
12. Kegiatan **Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 23.027.529.340, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :
    a. **Fasilitasi Keprotokoleran** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 12.516.246.660.
    b. **Fasilitasi Komunikasi Pimpinan** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 495.096.480.
    c. **Pendokumentasian Tugas Pimpinan** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 10.016.186.200.

C. **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp,38.192.607.020. Terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan **Administrasi Tata Pemerintahan** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1.630 858 700, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut
   a. **Penataan Administrasi Pemerintahan** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 308.997.500.
   b. **Pengelolan Administrasi Kewilayahan** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 779.988.500.
   c. **Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 541.872.700
2. Kegiatan **Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan rakyat** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 28.581.392.000, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :
   a **Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 26.971.688 000.
   b. **Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan social** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 286.112 000.
   c. **Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1.323.592.000.
3. Kegiatan **Fasilitasi dan koordinasi hukum** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3.060.580.100, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :
   a **Fasilitasi penyusunan Produk Hukum Daerah** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1.141.153.100.
   b **Fasilitasi Bantuan Hukum** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1.442 281 440.
   c. **Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 477.145.560.
4. Kegiatan **Fasilitasi Kerjasama Daerah** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 4 919.776 220, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut.
   a **Fasilitasi Kerjasama dalam negeri** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2 139.192.360.
   b. **Fasilitasi Kerjasama luar negeri** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 1 972.101.500.
   c. **Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 808.482.360

D. **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 8.562.206 500. Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan **Pelaksanaan Kebijakan perekonomian** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 4.919 776.220, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a **Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1.428.360 500.
   b. **Pengendalian dan distribusi perekonomian** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 501 274.500.
   c. **Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 409 375 800.
2. Kegiatan **Pelaksanaan administrasi Pembangunan** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1.244 252 400, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut.
   a. **Fasilitasi penyusunan program Pembangunan** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 722 006.000.
   b. **Pengendalian dan evaluasi program Pembangunan** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 258.596.200.
   c. **Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 263 650.200
3. Kegiatan **Pengelolaan pengadaan barang dan jasa** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 4.978.943.300, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a. **Pengelolaan pengadaan barang dan Jasa** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1.176.147.600.
   b **Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1.731.776.100
   c. **Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa** dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 2.071 019.600.

Tahun 2026

A. **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp 15.763.550 000

Terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:

Kegiatan **Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp.15 763.550.000, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. **Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan(RT,RW,PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp 11 795.934 000;
2. **Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan(RT,RW,PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp 3.457.823.000;
3. **Fasilitasi Pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 509 793 000.

B. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp, 170.554 414.003
Terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan **Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 559 726.803, yang terdiri dari 5 Sub Kegiatan Sebagai berikut :
   a. **Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 351.080.779.
   b. **Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 55.186.227.
   c. **Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 64 410.053.
   d. **Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp 51.365.662.
   e. **Evaluasi kinerja perangkat daerah** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp 37.684 082.
2. Kegiatan **Administrasi keuangan perangkat daerah** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 50 533.768.563, yang terdiri dari 6 Sub Kegiatan Sebagai berikut :

a. **Penyediaan gaji dan tunjangan ASN** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp 45.455.470 496.
b. **Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 3.519.088.675.
c **Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 894.876.312.
d. **Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 76.341.932.
e **Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp 323.391.444.
f. **Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp 264 599.704

3. Kegiatan **Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp, 3 010.489.746, yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :
   a. **Pengamanan barang milik daerah SKPD** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 1.193.706.944.
   b. **Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 1.816.782 802.
4. Kegiatan **Administrasi kepegawaian perangkat daerah** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp, 4 104.859.425, yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut .
   a. **Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 2.919.764 811.
   b. **Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp 1.185.094 614
5. Kegiatan **Administrasi Umum perangkat daerah** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 12.862.646.022, yang terdiri dari 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :
   a. **Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 1.701.140.691.
   b. **Penyediaan barang cetakan dan penggandaan** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 1.211 995.298
   c **Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 525.583 067.

d. **Fasilitasi kunjungan tamu** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 7.735.889.760

e. **Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp 1.688.037.206.

6. Kegiatan **Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp, 13.410 444.722, yang terdiri dari 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

   a **Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 0

   b. **Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp 3.925.964.845.

   c. **Pengadaan mebel** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp 3 147.173 049.

   d. **Pengadaan peralatan dan mesin lainnya** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 6.337.306 828

7. Kegiatan **Penyediaan jasa penujang urusan pemerintahan daerah** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp, 22.677.141.178, yang terdiri dari 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

   a. **Penyediaan jasa surat menyurat** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 7.218.355.410.

   b. **Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 5.138.502.199

   c. **Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 8.791.574 465

   d. **Penyediaan jasa pelayanan umum kantor** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 1.528 709.104

8. Kegiatan **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp, 15 531.005 699, yang terdiri dari 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

   a **Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 1.117.991.409.

   b. **Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 7 897.556 128

   c. **Pemeliharaan mebel** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 64.232 770.

d. **Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 2.072.758 221.

e. **Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 4.378.467 171.

9. Kegiatan **Administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 4 439.190.995, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. **Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp 225.521 257

b. **Pelaksanaan medical check-up kepala daerah dan wakil kepala daerah** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 102.772.433.

c. **Penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp 4.110 897 305.

10. Kegiatan **Fasilitasi kerumahtanggaan Sekertariat daerah** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 10.632.379.893, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a **Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 6.156.209 802.

b. **Penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 2 608.700.452.

c. **Penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 1.867.469.639.

11. Kegiatan **Penataan organisasi** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 2.794 397.602, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a **Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 644 544.248

b. **Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 1.502 007.798

c. **Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 647.845.556.

12. Kegiatan **Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 29.998.363.355, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a **Fasilitasi Keprotokoleran** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 13.477.376.730.

4. Kegiatan **Fasilitasi Kerjasama Daerah** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp, 5.511.489.000, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a **Fasilitasi Kerjasama dalam negeri** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 2.427.577.000.
   b **Fasilitasi Kerjasama luar negeri** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 2.194.206.000.
   c **Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 889.706.000.

D. **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp, 13.189.004.000. Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu.
1. Kegiatan **Pelaksanaan Kebijakan perekonomian** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp, 4.347.976.000, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut.
   a **Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 3.075 018.000
   b **Pengendalian dan distribusi perekonomian** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 605.278.000.
   c. **Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 667.680.000.
2. Kegiatan **Pelaksanaan administrasi Pembangunan** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp, 1.376.206.000, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut.
   a. **Fasilitasi penyusunan program Pembangunan** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 381.580 000.
   b. **Pengendalian dan evaluasi program Pembangunan** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 493.190.000.
   c. **Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 501.436.000.
3. Kegiatan **Pengelolaan pengadaan barang dan jasa** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp, 7.464.822.000, yang terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut.
   a. **Pengelolaan pengadaan barang dan Jasa** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 2.540.874.000.
   b. **Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 1.759 920.000.

b. **Fasilitasi Komunikasi Pimpinan** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 555.423.078.
c. **Pendokumentasian Tugas Pimpinan** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 15 965.563.547.

C. **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp,38.192.607.020. Terdin dan 4 (empat) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan **Administrasi Tata Pemerintahan** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp, 3.553.681.000, yang terdin dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut
   a **Penataan Administrasi Pemerintahan** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 640 677.000
   b. **Pengelolan Administrasi Kewilayahan** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 1.777.597.000.
   c. **Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 1.135.407 000.
2. Kegiatan **Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan rakyat** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp, 15.404.515.000, yang terdin dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :
   a. **Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 14 135.010.000.
   b. **Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan social** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp 658.380.000.
   c **Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 611.125.000.
3. Kegiatan **Fasilitasi dan koordinasi hukum** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp, 5.014.231 000, yang terdin dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut
   a. **Fasilitasi penyusunan Produk Hukum Daerah** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 1.899.844 000.
   b. **Fasilitasi Bantuan Hukum** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 1.728 262.000
   c. **Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 1.386.125.000.

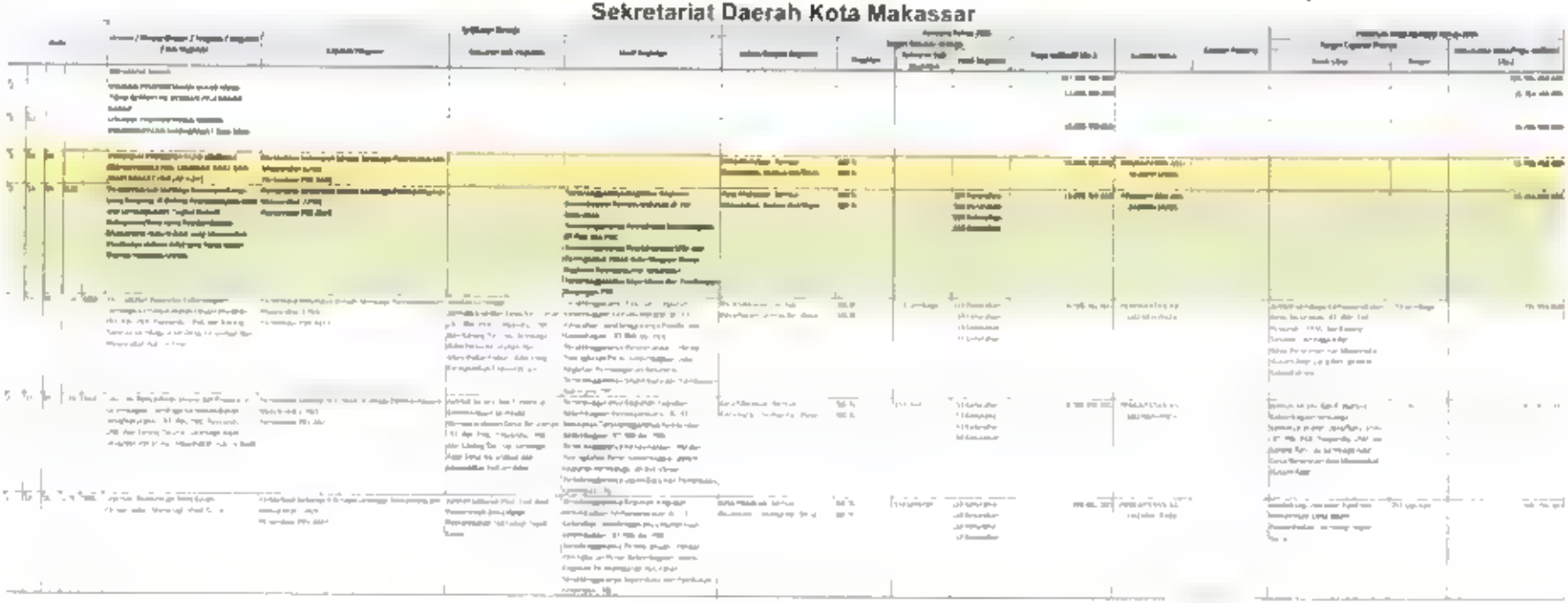
c. **Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa** dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 3.164.028.000.

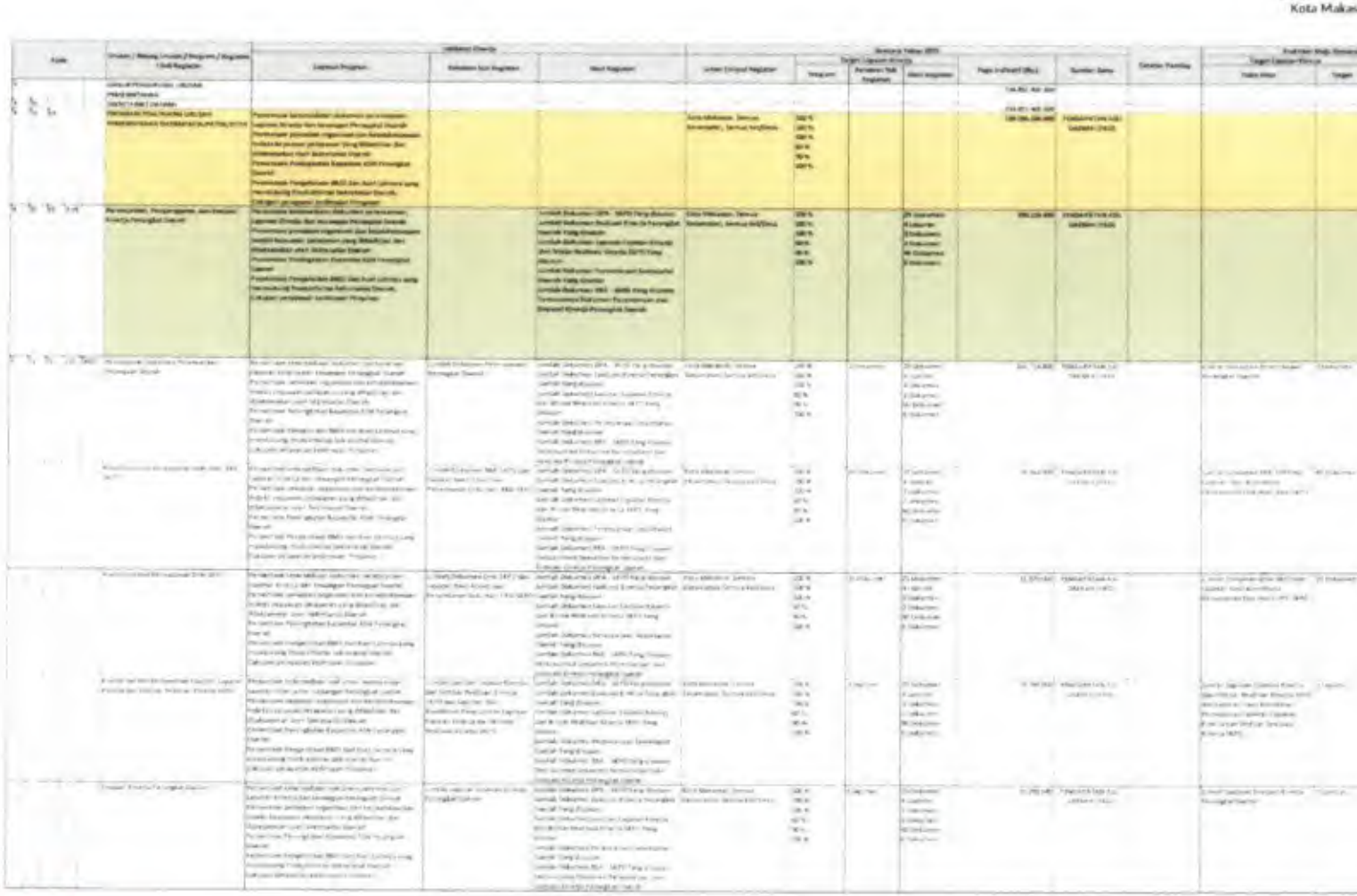
Adapun gambaran atas perencanaan dan penganggaran Program, Kegiatan sampai dengan Sub Kegiatan untuk Renja Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

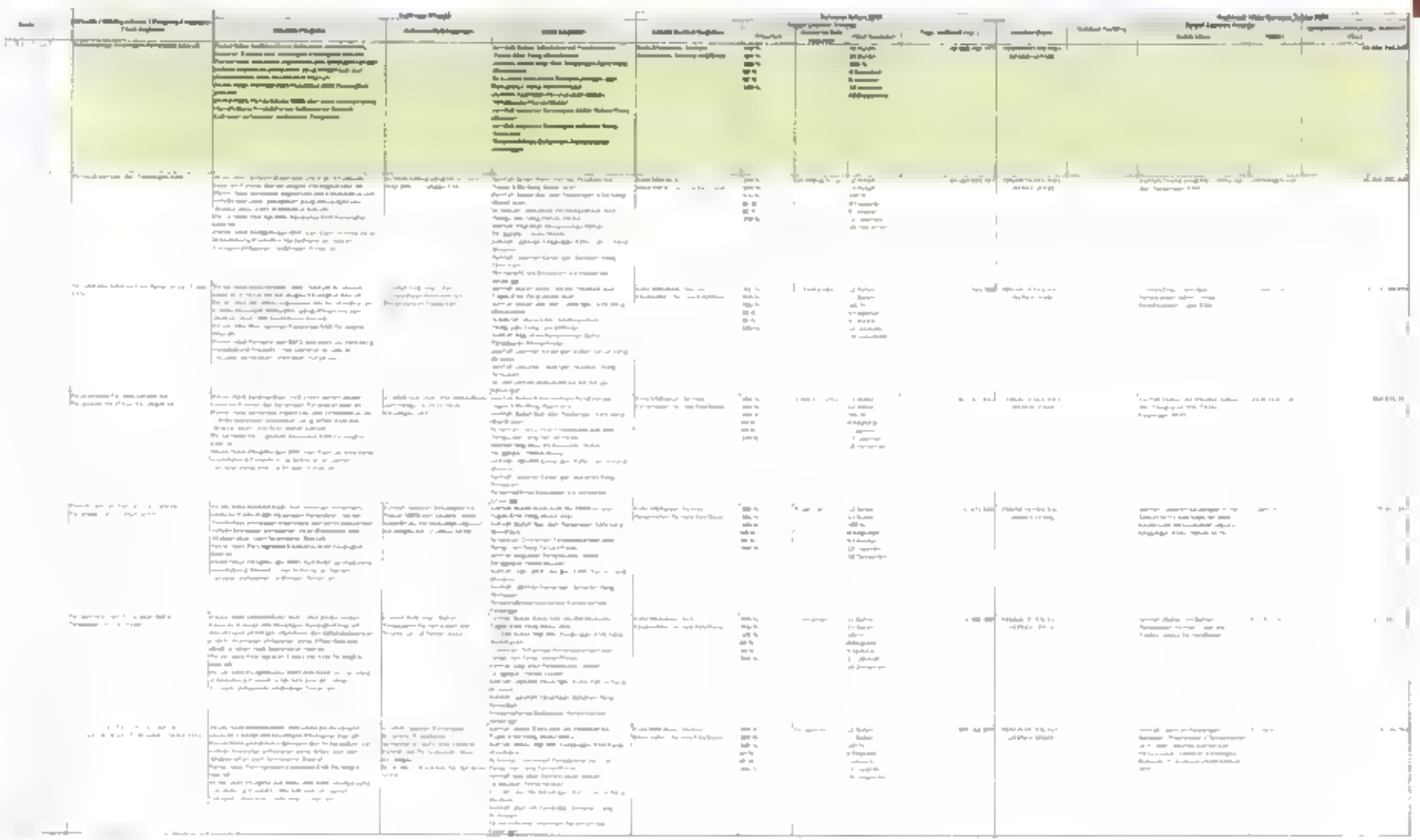
Tabel B III-1 (T-C.33)

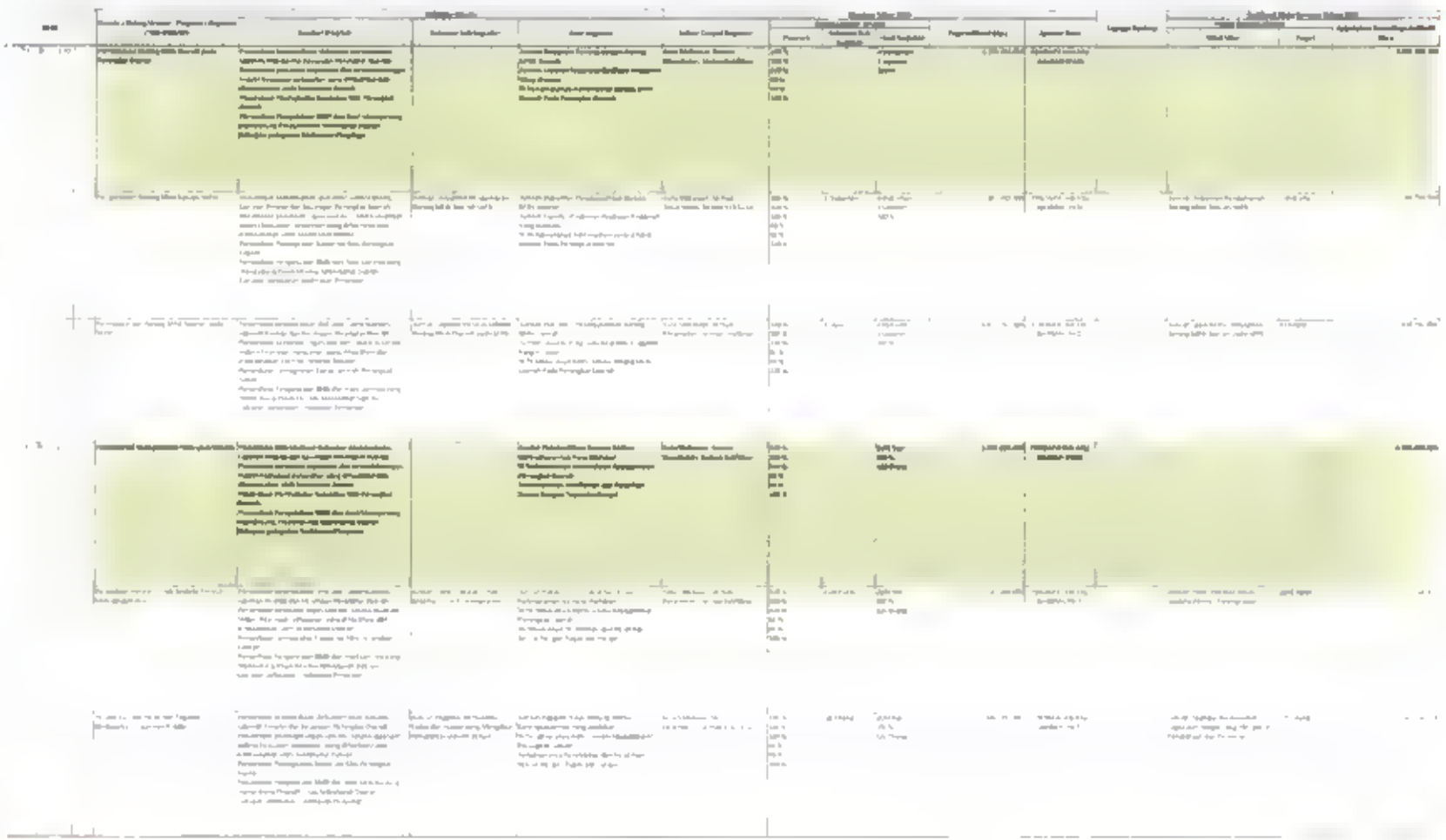
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

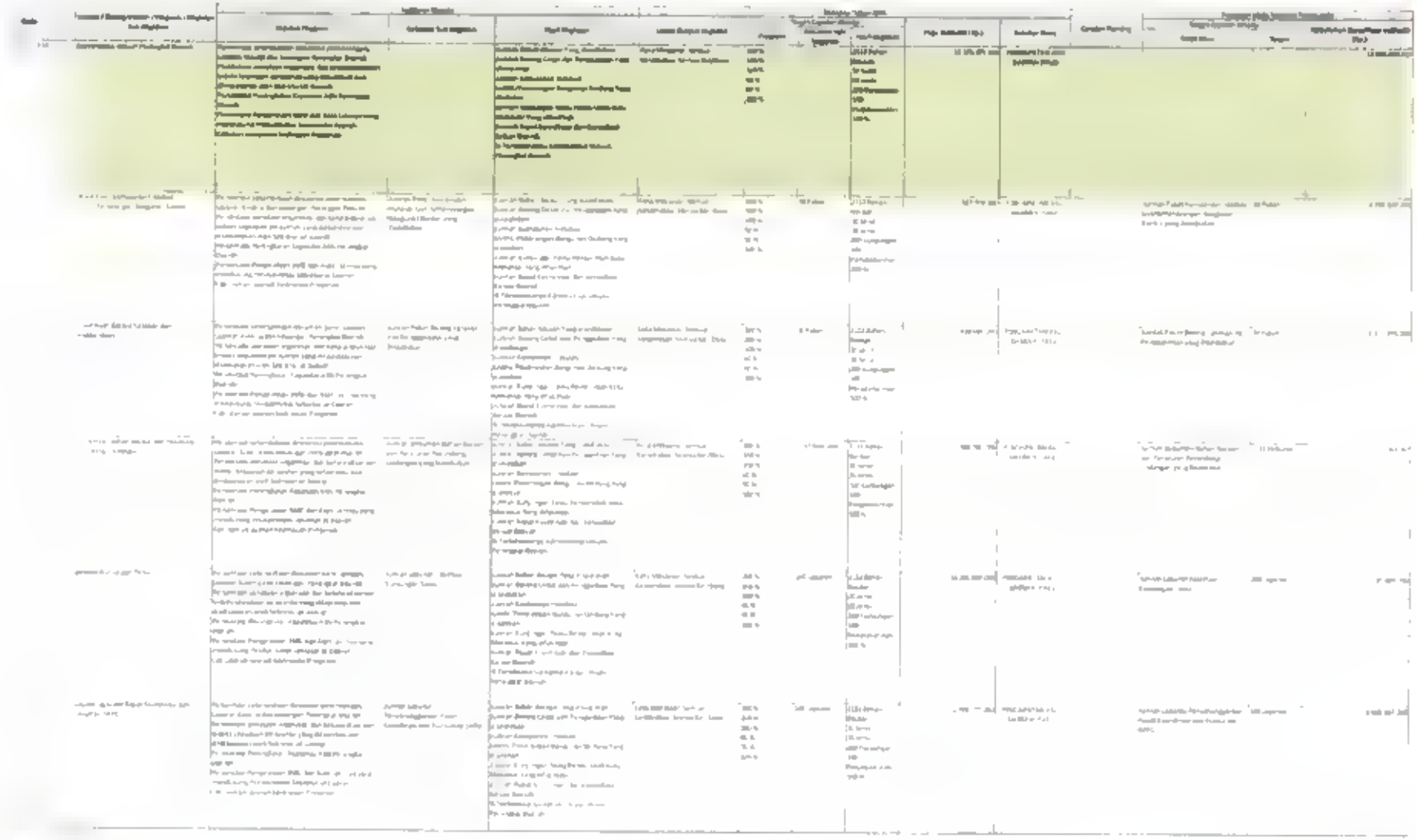
Sekretariat Daerah Kota Makassar

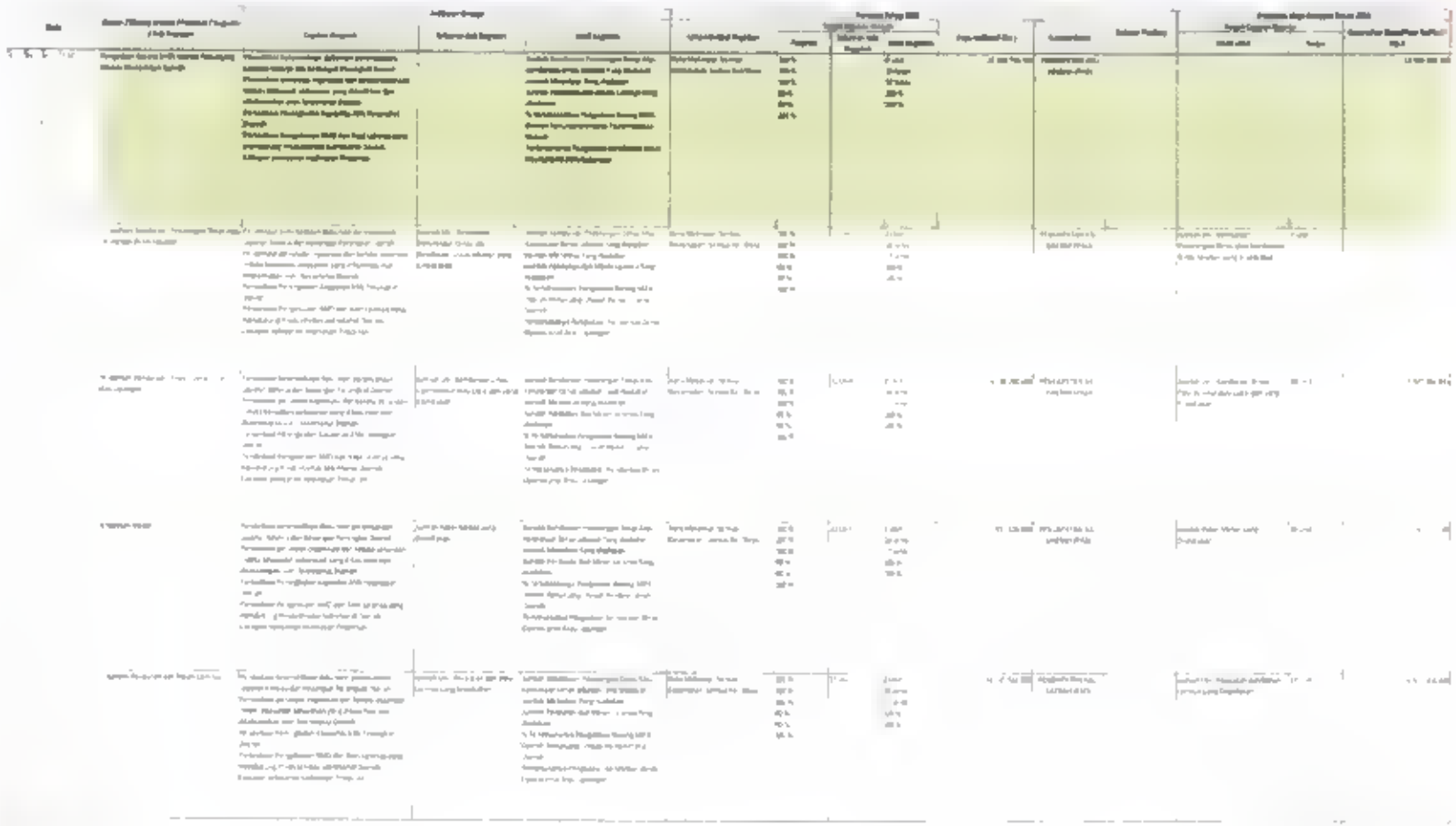


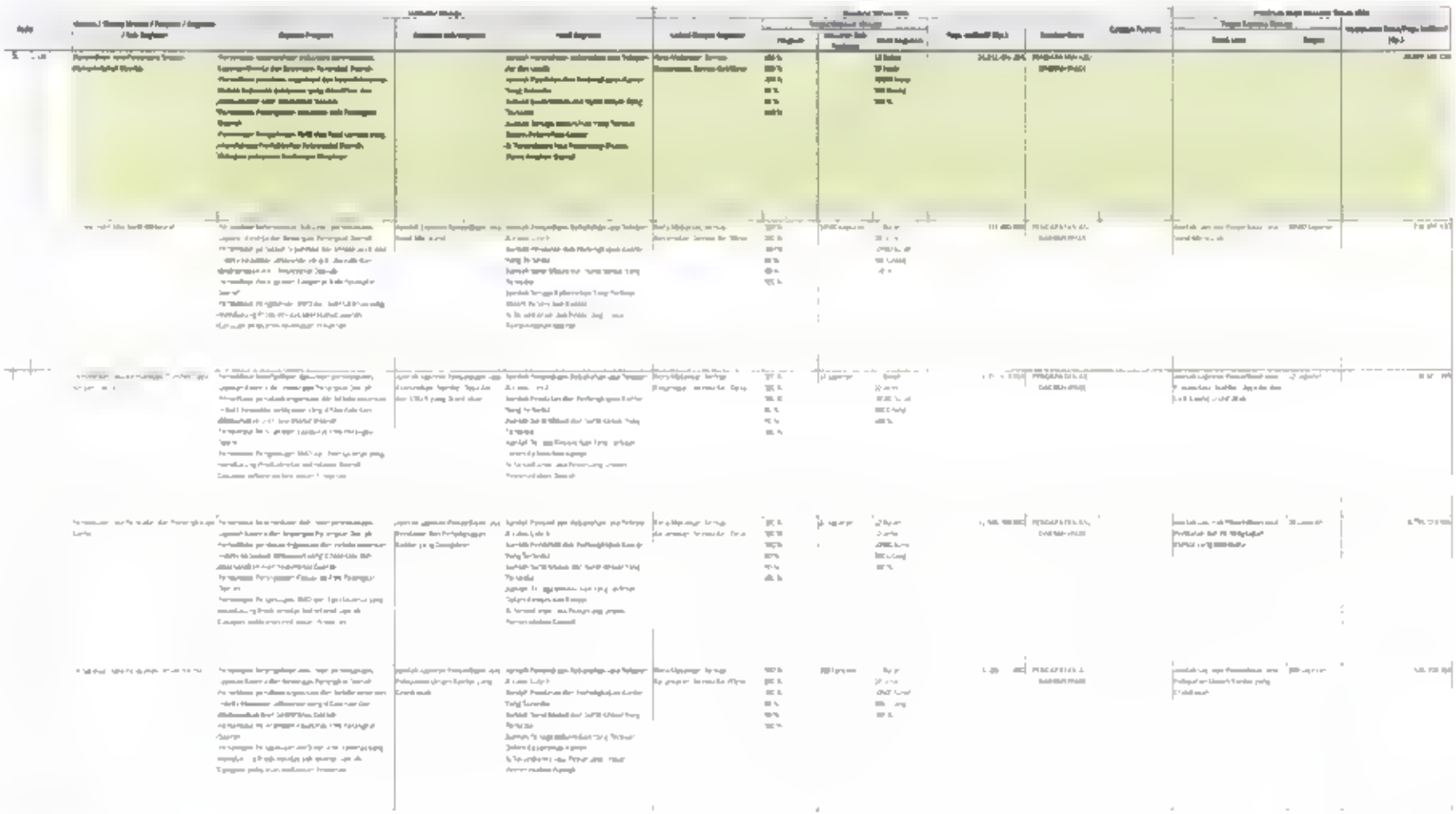


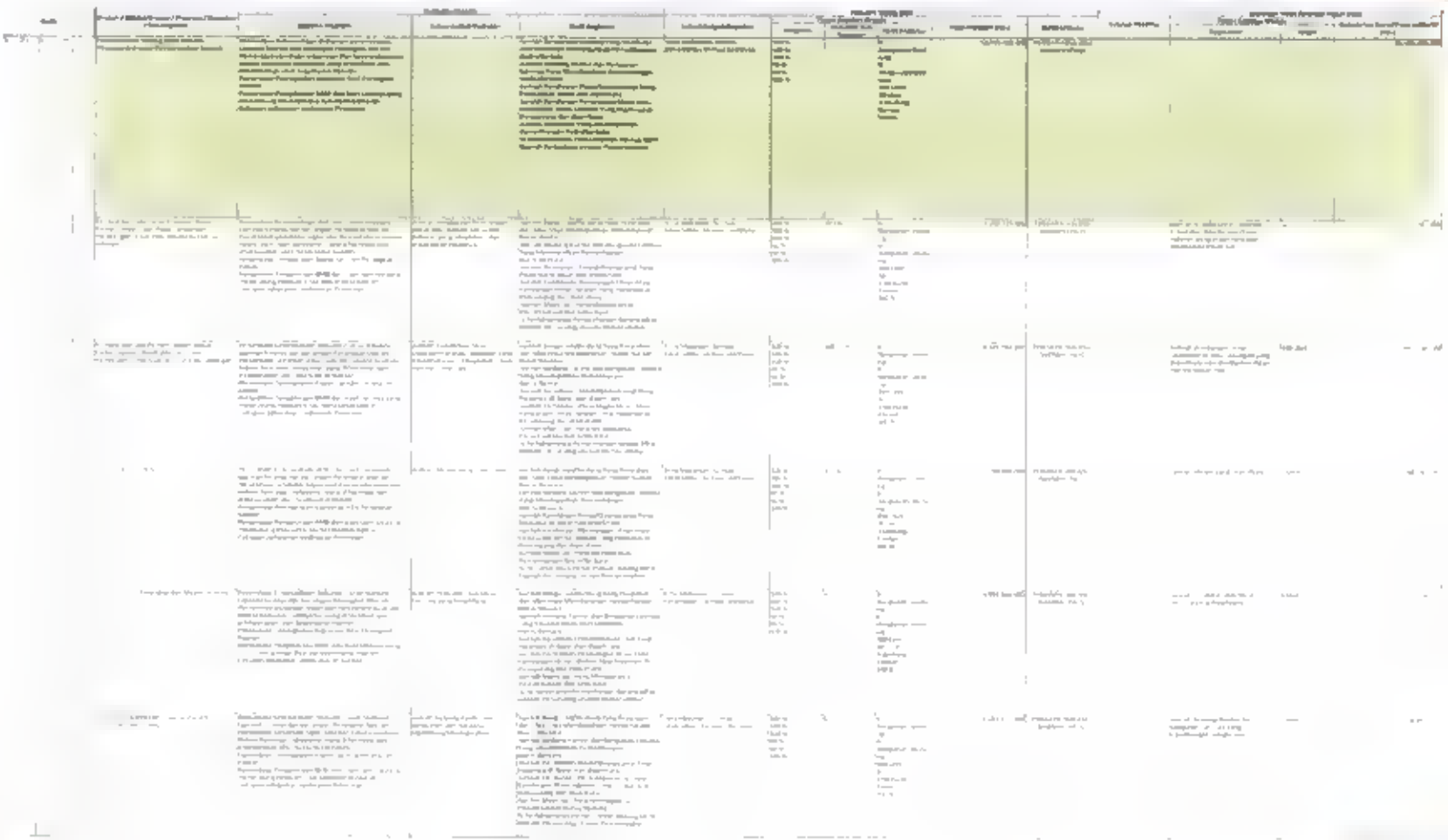


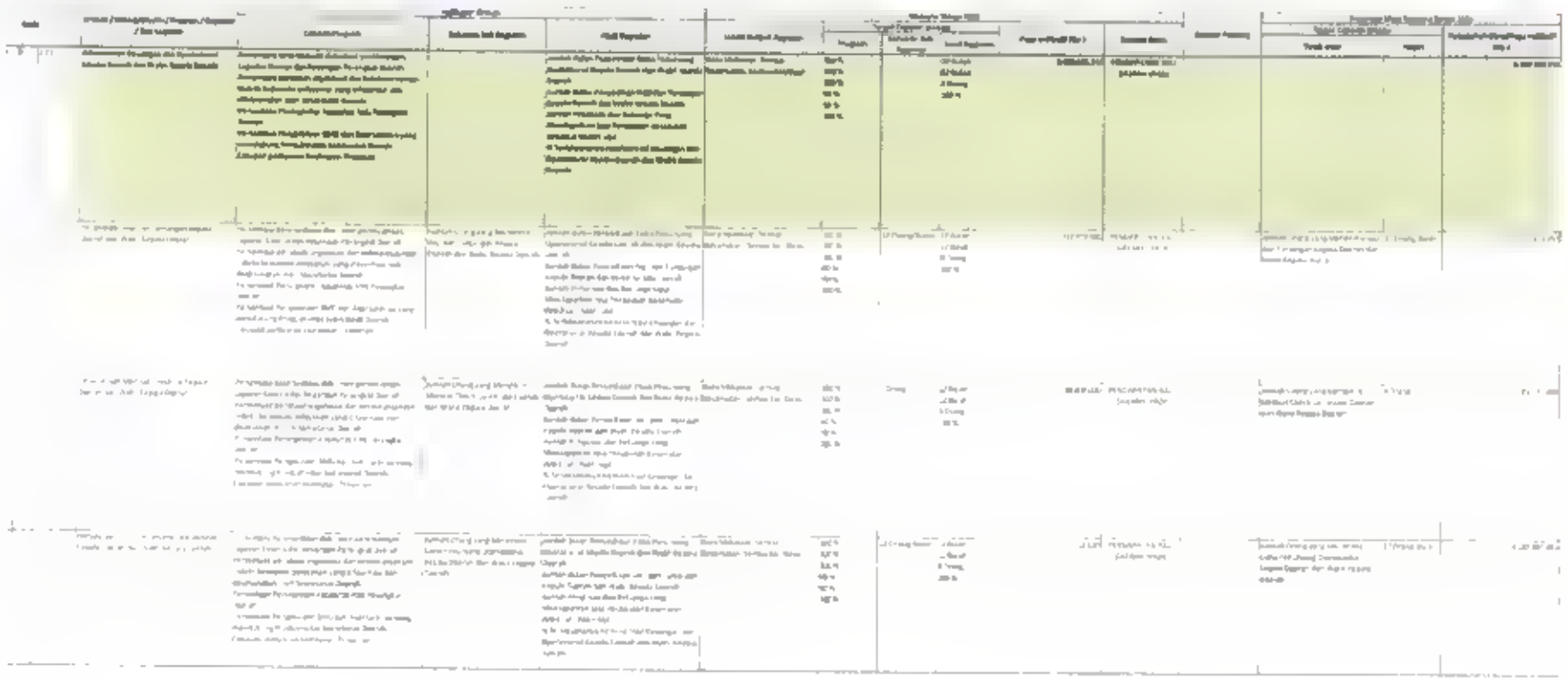


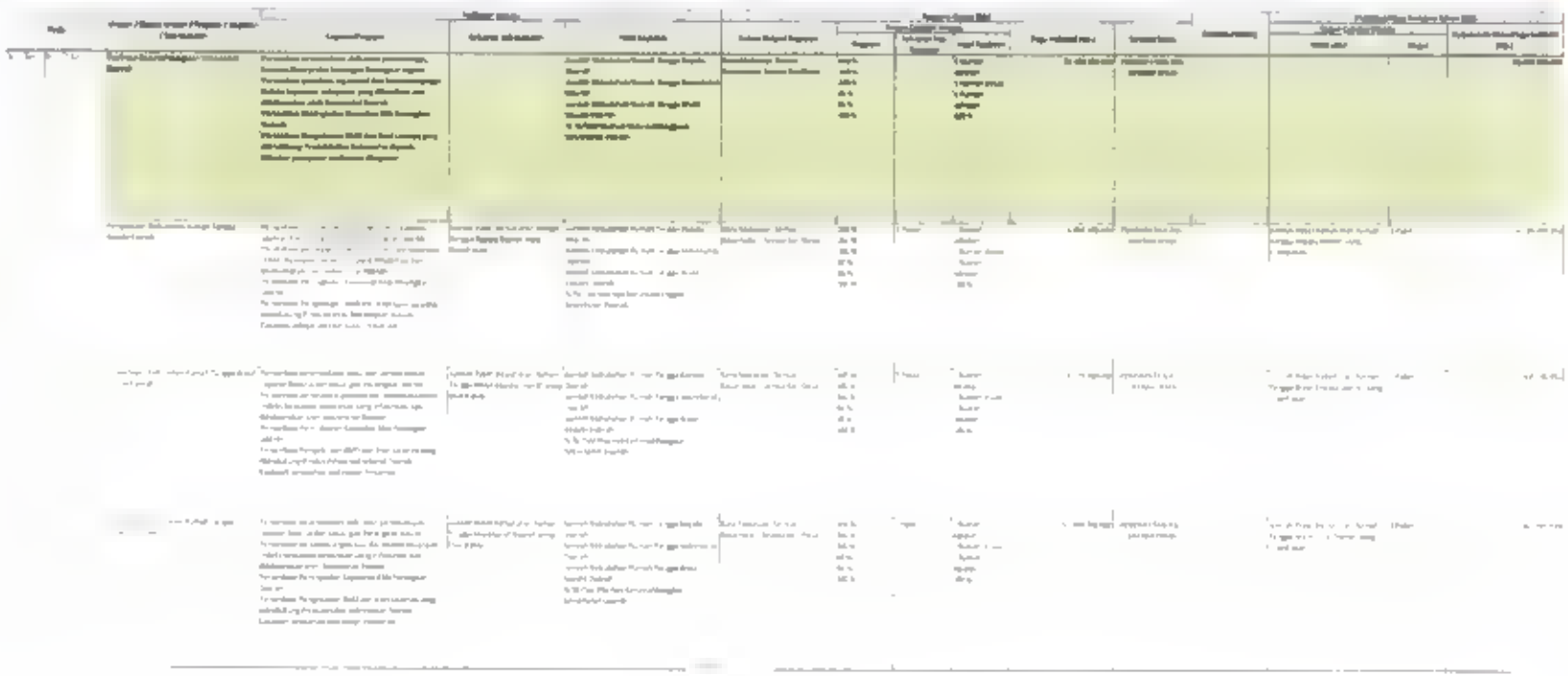


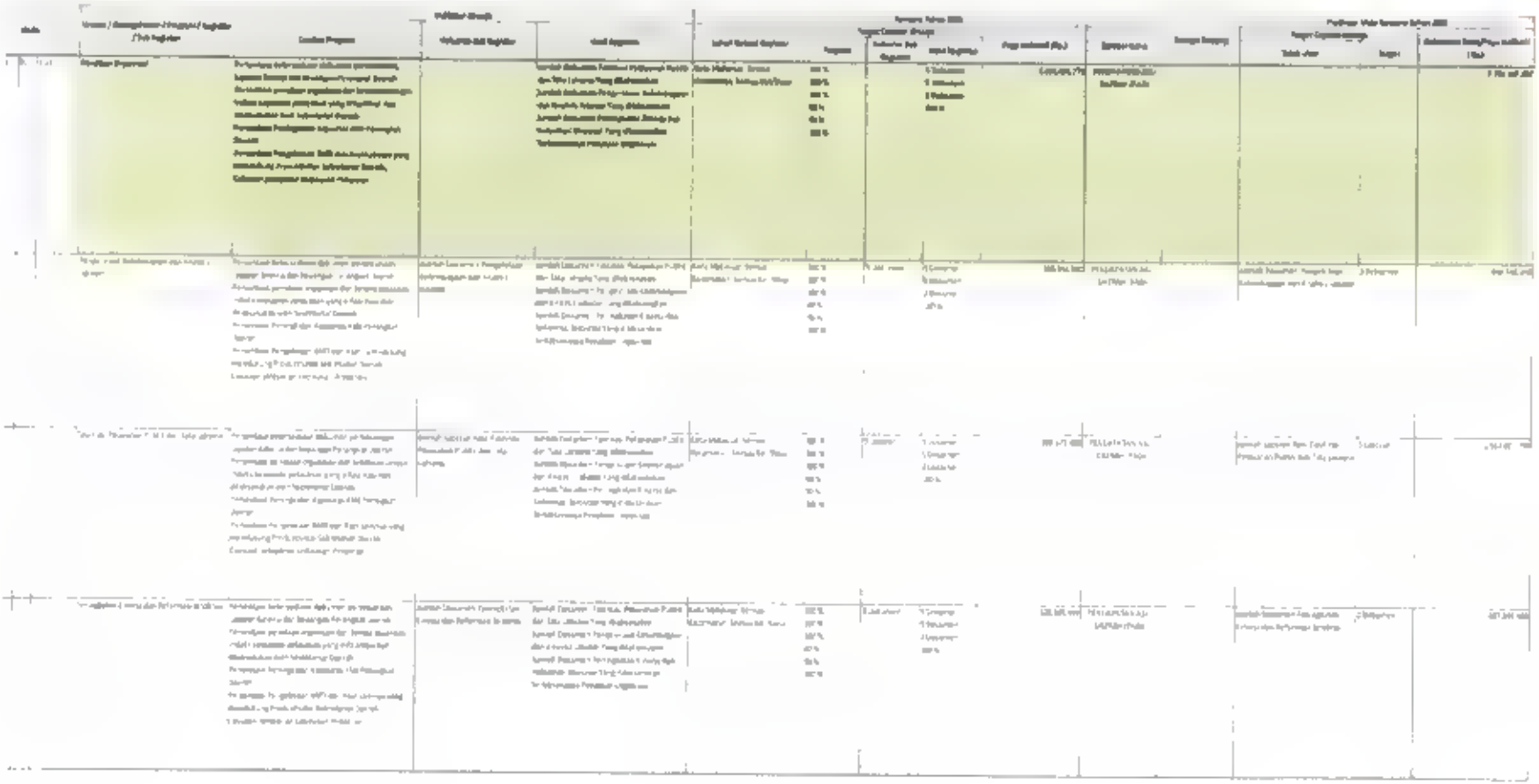


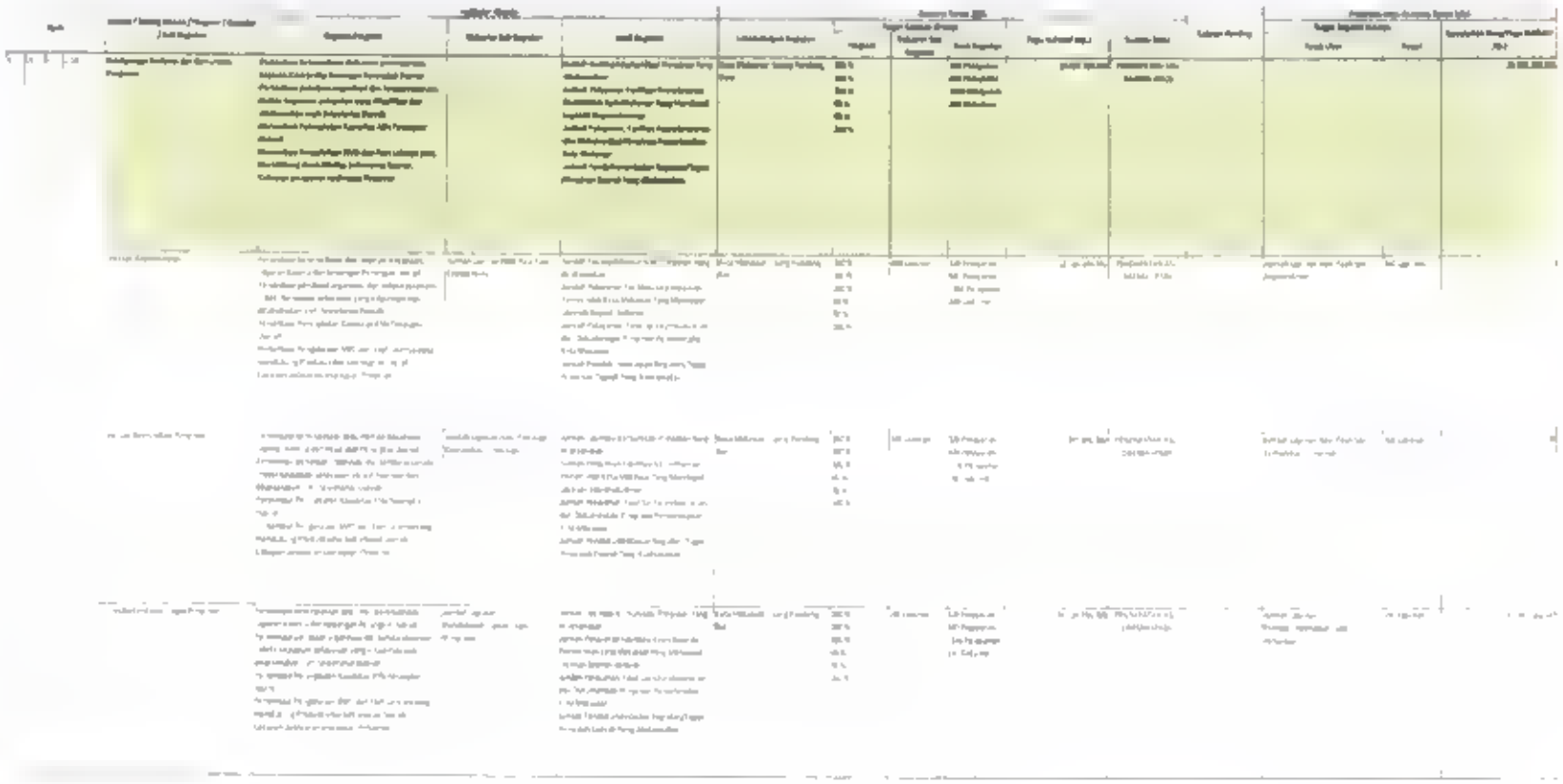


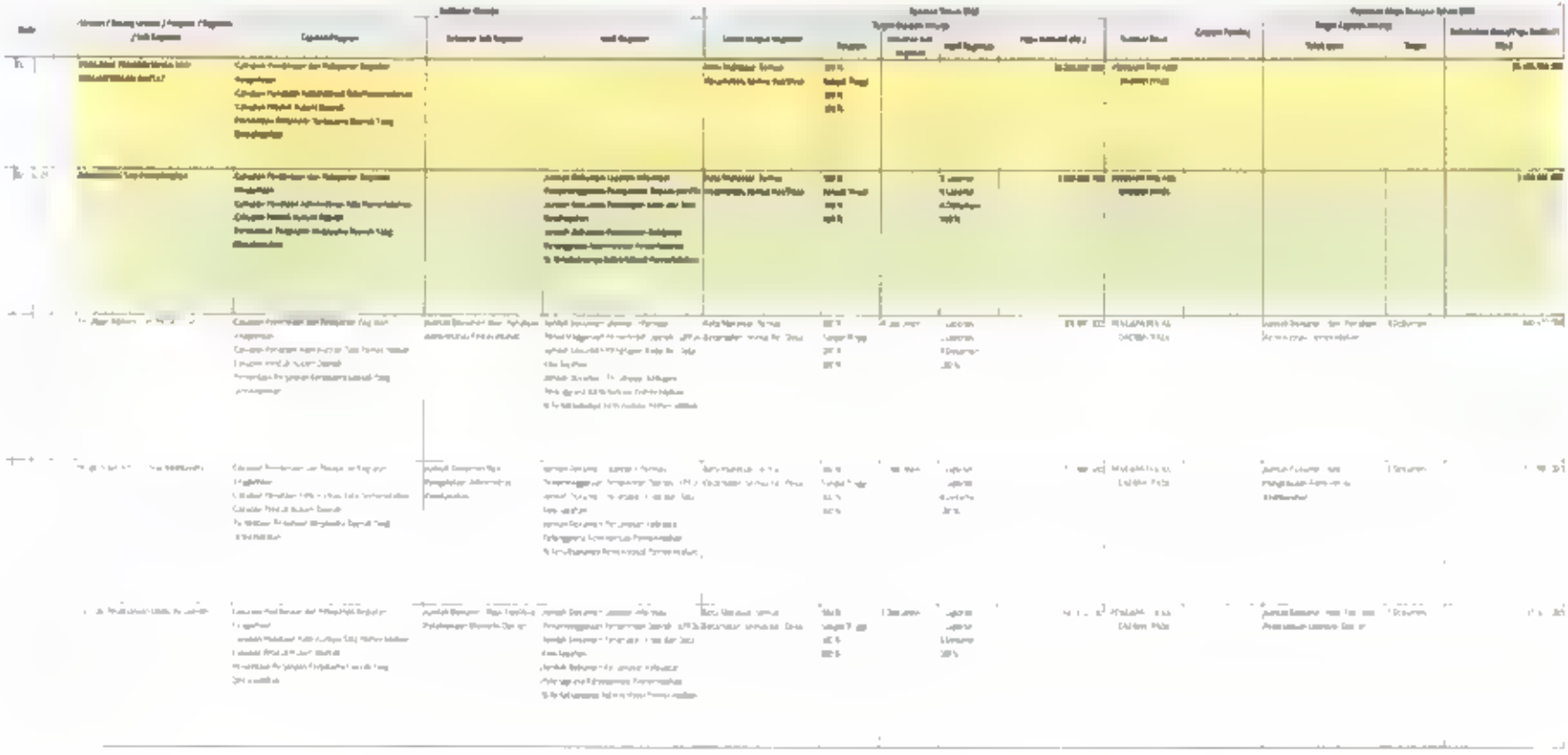


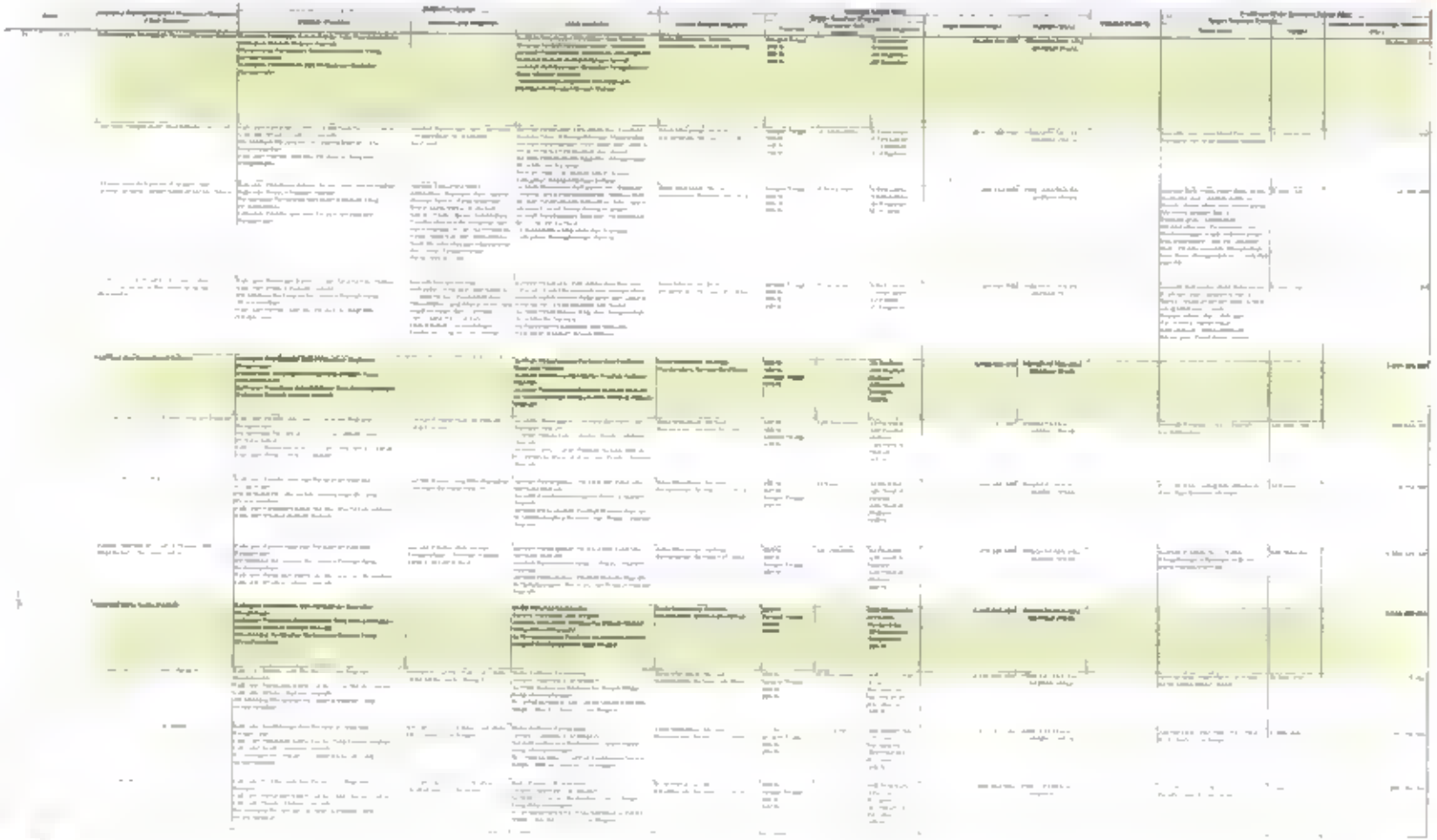


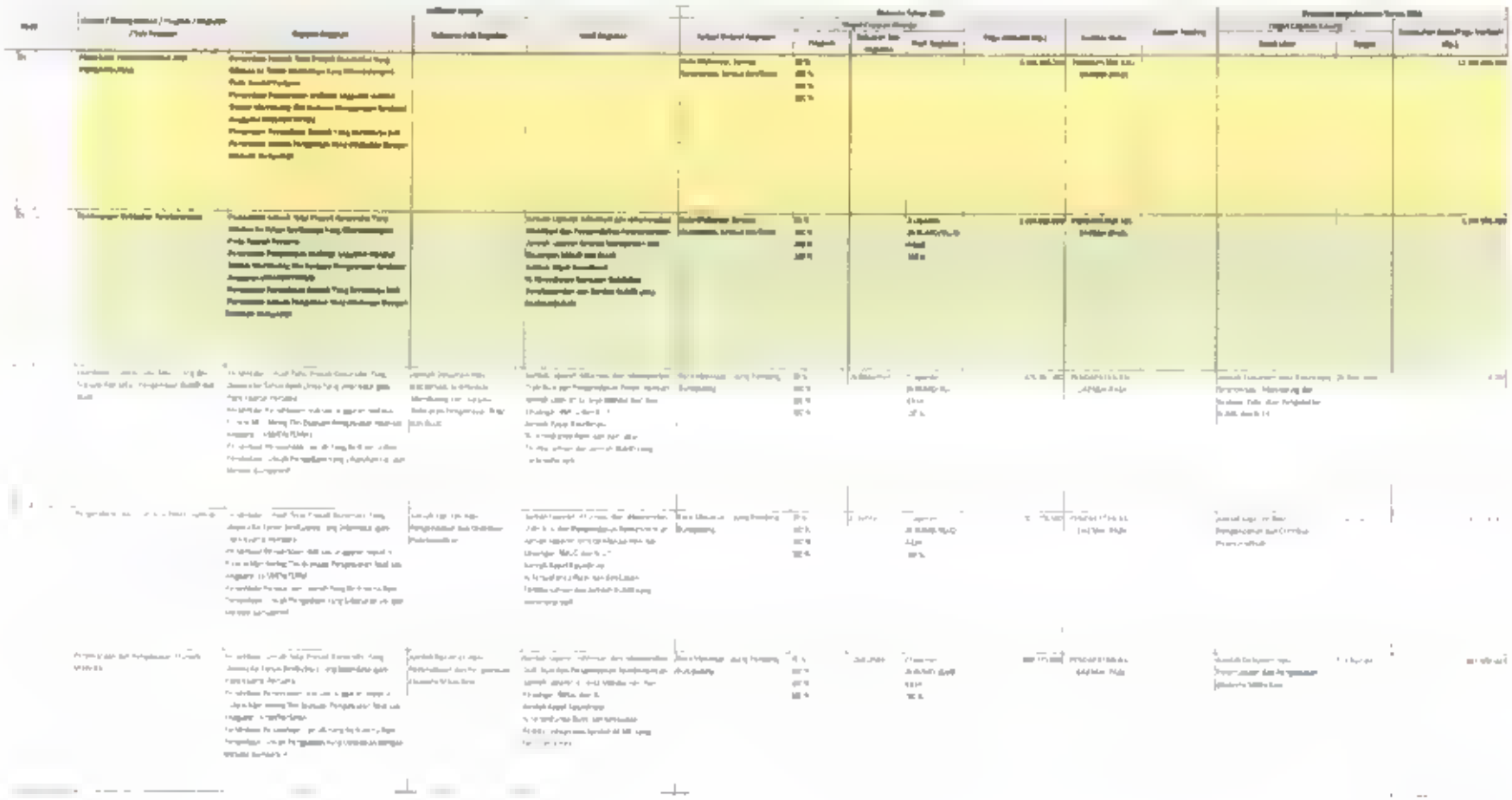


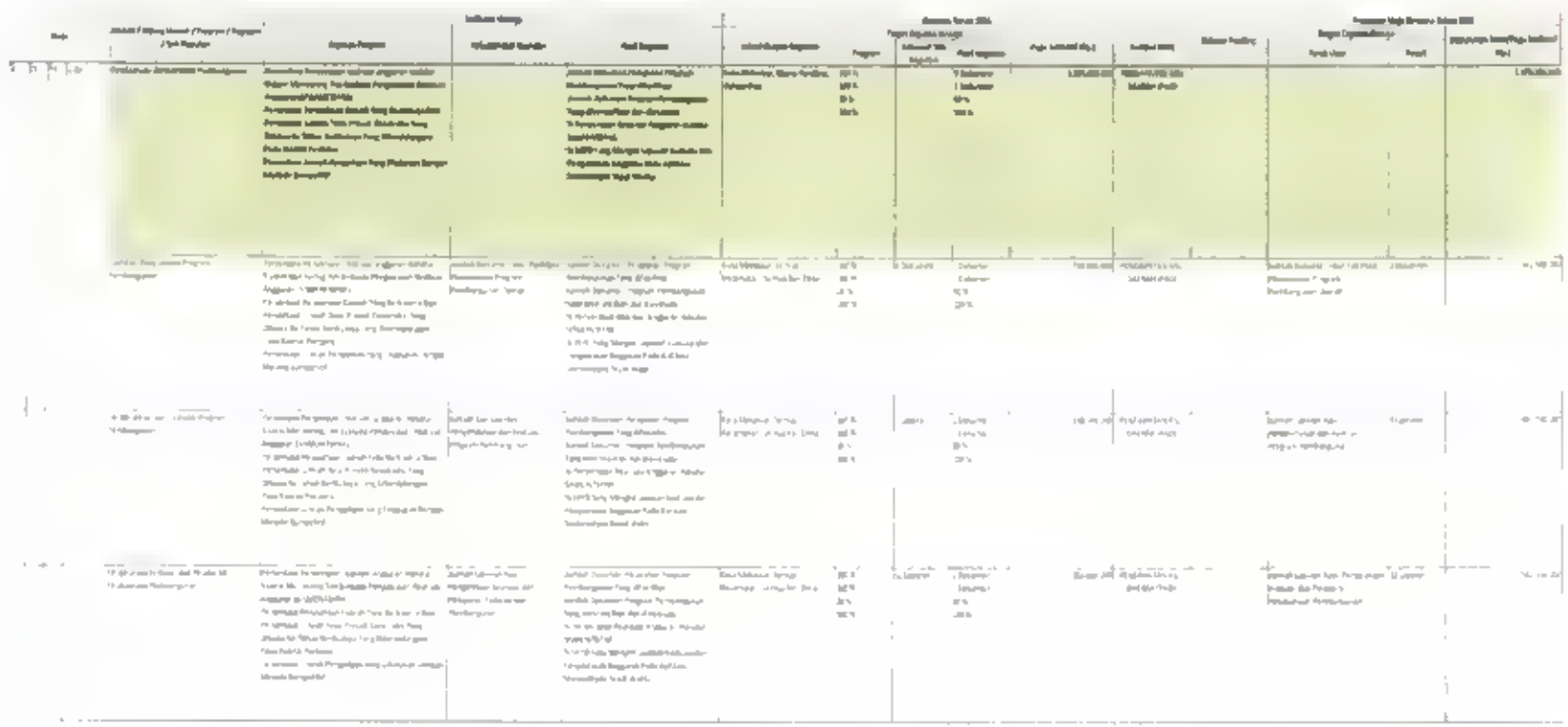


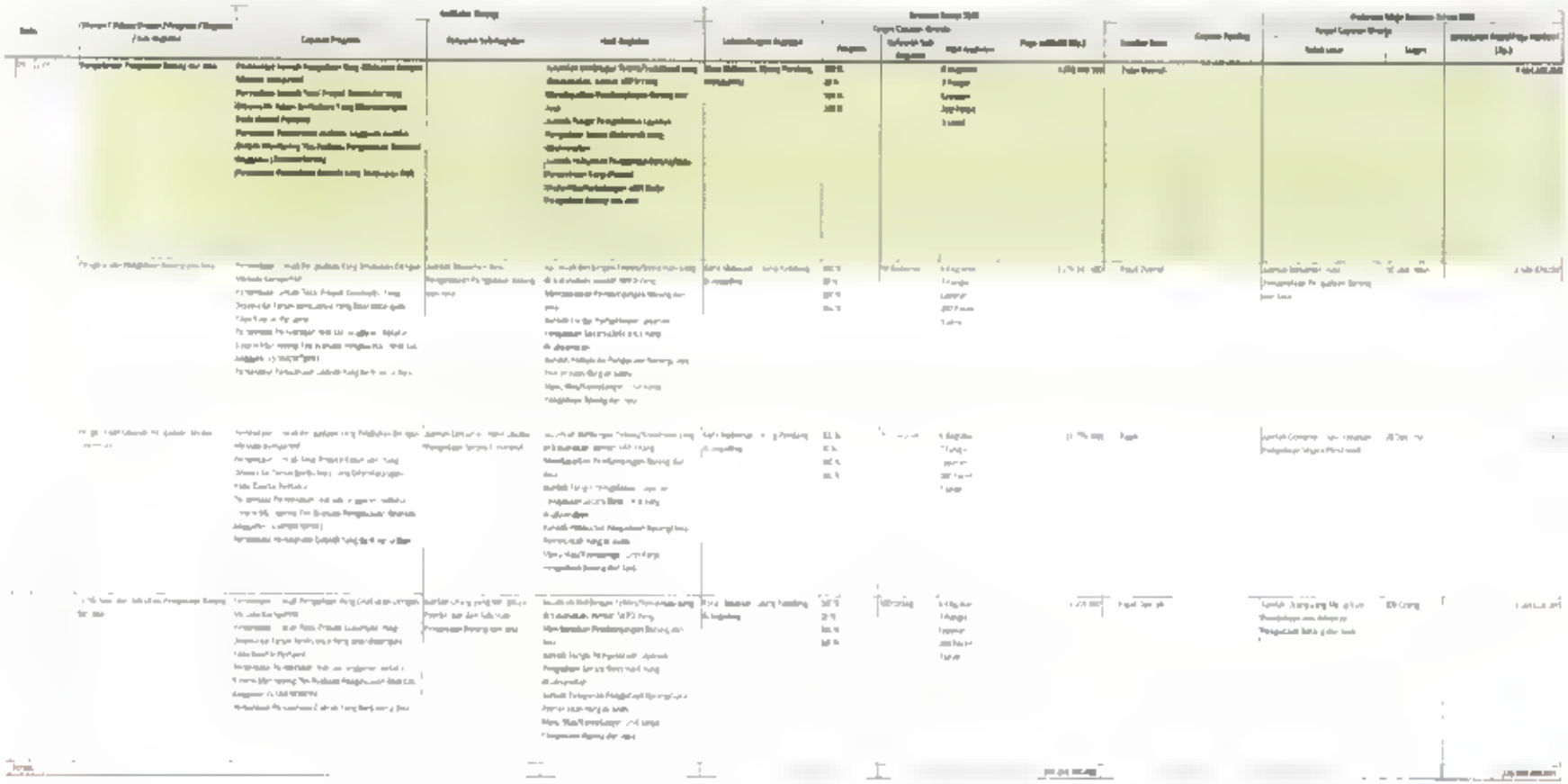












BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Program Sekretariat Daerah merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, rencana program beserta Indikator dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Sekretariat daerah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah ada disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif dan masing macing program yang telah disusun dan ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Makassar **Tahun 2025** sebanyak 4 program, 20 kegiatan dan **69 sub kegiatan**. Total kebutuhan anggaran **Tahun 2025** sebagai pagu indikatif sebesar **Rp.176.213 247.895,-**

Secara rinci Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dimaksud dapat diurai sebagai berikut .

1. **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**, sumber dana dari APBD sebesar **Rp.13.035.556.800,-** yang dijabarkan kedalam **1 kegiatan** sebagai benkut:
   1) **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**, dengan pagu sebesar **Rp.13.035.556.800,-,-** yang dirinci kedalam 3 Sub Kegiatan sebagai benkut .

a Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan pagu sebesar Rp 8.723.259 800,-;

b. Sub Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan pagu sebesar Rp. 4.009.455.000,-;

c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna, dengan pagu sebesar Rp.302.842.000,-.

2 Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, sumber dana dari APBD sebesar **Rp.134.385.462.035,-** yang dijabarkan kedalam **12 kegiatan** sebagai berikut ,

1) Kegiatan **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dengan pagu sebesar Rp.308 644.440,- yang dirinci kedalam 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan pagu sebesar Rp 203 627.800,-;

b Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dengan pagu sebesar Rp 33 264.000,-,

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dengan pagu sebesar Rp 22 595 000,-,

d Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan pagu sebesar Rp.21.109.000,-;

e Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan pagu sebesar Rp.28.048.640,-.

2) Kegiatan **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan pagu sebesar Rp.46.419.228.186,- yang dirinci kedalam 6 Sub Kegiatan sebegai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dengan pagu sebesar Rp.43.083.653 606,-;

b. Sub Kegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, dengan pagu sebesar Rp 2 096.079 000,-;

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan pagu sebesar Rp.867.342 640,-.

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan pagu sebesar Rp 24 857 640,-;

e Sub Kegiatan Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, dengan pagu sebesar Rp.21.478.000,-;

f. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD, dengan pagu sebesar Rp 325.817.300,-

3) Kegiatan **Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah,** dengan pagu sebesar Rp.2 756.813.490,- yang dirinci kedalam 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a Pengamanan barang milik daerah SKPD, dengan pagu sebesar Rp.1.093 032.000,-;

b. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD, dengan pagu sebesar Rp 1 663 693.200,-

4) Kegiatan **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, dengan pagu sebesar Rp.479.000.000,- yang dirinci kedalam 2 Sub Kegiatan sebagai berikut

a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya, dengan pagu sebesar Rp.42.000.000,-;

b. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, dengan pagu sebesar Rp 437.000.000,-.

5) Kegiatan **Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan pagu sebesar Rp.11.275.477 486,- yang dirinci kedalam 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan pagu sebesar Rp.1 557.709.900,-;

b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan pagu sebesar Rp.1.109.867.586,-;

c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan pagu sebesar Rp.298.120.000,-,

d. Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan pagu sebesar Rp.7.084.000.000,-;

e Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan pagu sebesar Rp.1.225.780.000,-.

6) Kegiatan **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,** dengan pagu sebesar Rp.2.380.161.800,- yang dirinci kedalam 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan pagu sebesar Rp.0,-;

b. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan pagu sebesar Rp.42.000.000,-;

c Pengadaan mebel, dengan pagu sebesar Rp.0,-;

d Pengadaan peralatan dan mesin lainnya, dengan pagu sebesar Rp.2.338 161.800,-.

7) Kegiatan **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan pagu sebesar Rp 18 766 127 184,- yang dirinci kedalam 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :
   a. Penyediaan jasa surat menyurat, dengan pagu sebesar Rp.4.610.080.000,-;
   b. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan pagu sebesar Rp.4 705.444.704,-;
   c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu sebesar Rp.8.050.742.000,-,
   d Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan pagu sebesar Rp.1.399.860 480,-.
8) Kegiatan **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan pagu sebesar Rp.13.053.348.900,- yang dirinci kedalam 5 Sub Kegiatan sebagai berikut
   a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan pagu sebesar Rp.1.023.782 000,00,-;
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan pagu sebesar Rp 7.232.071.800,-;
   c Pemeliharaan Mebel, dengan pagu sebesar Rp.58.800 000,-;
   d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu sebesar Rp.1.187.424.100,-;
   e Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan pagu sebesar Rp 3.551.271.000,-.
9) Kegiatan **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,** dengan pagu sebesar Rp 3.866.290.340,- yang dirinci kedalam 3 Sub Kegiatan sebagai berikut .
   a Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan pagu sebesar Rp.214 578 720,-,
   b. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan pagu sebesar Rp.80.000 000,-;
   c. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan pagu sebesar Rp.3.571.711 620,-.

a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, dengan pagu sebesar Rp.9.335.322.000,-;
b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, dengan pagu sebesar Rp.286.112.000,-;
c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat, dengan pagu sebesar Rp.333.592.000,-.

3) Kegiatan **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum,** dengan pagu sebesar Rp.3.208.897.700,- yang dirinci kedalam 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :
a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, dengan pagu sebesar Rp.1.213.293.100,-;
b. Fasilitasi Bantuan Hukum, dengan pagu sebesar Rp.1.491.758.040,-;
c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, dengan pagu sebesar Rp.503.846.560,-.

4) Kegiatan **Fasilitasi Kerjasama Daerah**, dengan pagu sebesar Rp.5.046.984.660,- yang dirinci kedalam 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :
a. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri, dengan pagu sebesar Rp.2.222.935.660,-;
b. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri, dengan pagu sebesar Rp.2.009.313.500;
c. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama, dengan pagu sebesar Rp.814.735.500,-

4. Program **Perekonomian dan Pembangunan**, sumber dana dari APBD sebesar **Rp.8.847.448.500,-** terdiri **3 kegiatan** sebagai berikut :
1) Kegiatan **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**, dengan pagu sebesar Rp.2.486.310.800,- yang dirinci kedalam 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :
a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, dengan pagu sebesar Rp.1.518.360.500,-;
b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dengan pagu sebesar Rp.501.274.500,-;
c. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil, dengan pagu sebesar Rp.466.675.800,-.

2) Kegiatan **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**, dengan pagu sebesar Rp.1.287.884.400,- yang dirinci kedalam 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :
a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, dengan pagu sebesar Rp.692.502.000,-;
b. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, dengan pagu sebesar Rp.303.847.200,-;
c. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, dengan pagu sebesar Rp.291.535.200,-.

10)Kegiatan **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah,** dengan pagu sebesar Rp.9.736.419.000,- yang dirinci kedalam 3 Sub Kegiatan sebagai berikut:

a Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, dengan pagu sebesar Rp.5 637.448.800,-;

b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, dengan pagu sebesar Rp.2 388 870 200,-;

c Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah, dengan pagu sebesar Rp 1.710.100 000,-

11)Kegiatan **Penataan Organisasi** dengan pagu sebesar Rp 2.044.790.159,- yang dirinci kedalam 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dengan pagu sebesar Rp 392.159 800,-;

b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dengan pagu sebesar Rp.1.071.429.860,-;

c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, dengan pagu sebesar Rp.581.200.499,-

12)Kegiatan **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** dengan pagu sebesar Rp 23.299 249.340,- yang dirinci kedalam 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Fasilitasi Keprotokolan, dengan pagu sebesar Rp.12.787.966.660,-;

b Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dengan pagu sebesar Rp 495.096 480,-,

c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan, dengan pagu sebesar Rp.10.016.186 200,-.

3. Program **Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**, sumber dana dari APBD sebesar **Rp.27.219.862.808,-** terdiri **4 kegiatan** sebagai berikut :

1) Kegiatan **Administrasi Tata Pemerintahan**, dengan pagu sebesar Rp.1 733.872.200,- yang dirinci kedalam 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Penataan Administrasi Pemerintahan, dengan pagu sebesar Rp.412 011.000,-,

b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, dengan pagu sebesar Rp.779.988.500,-,

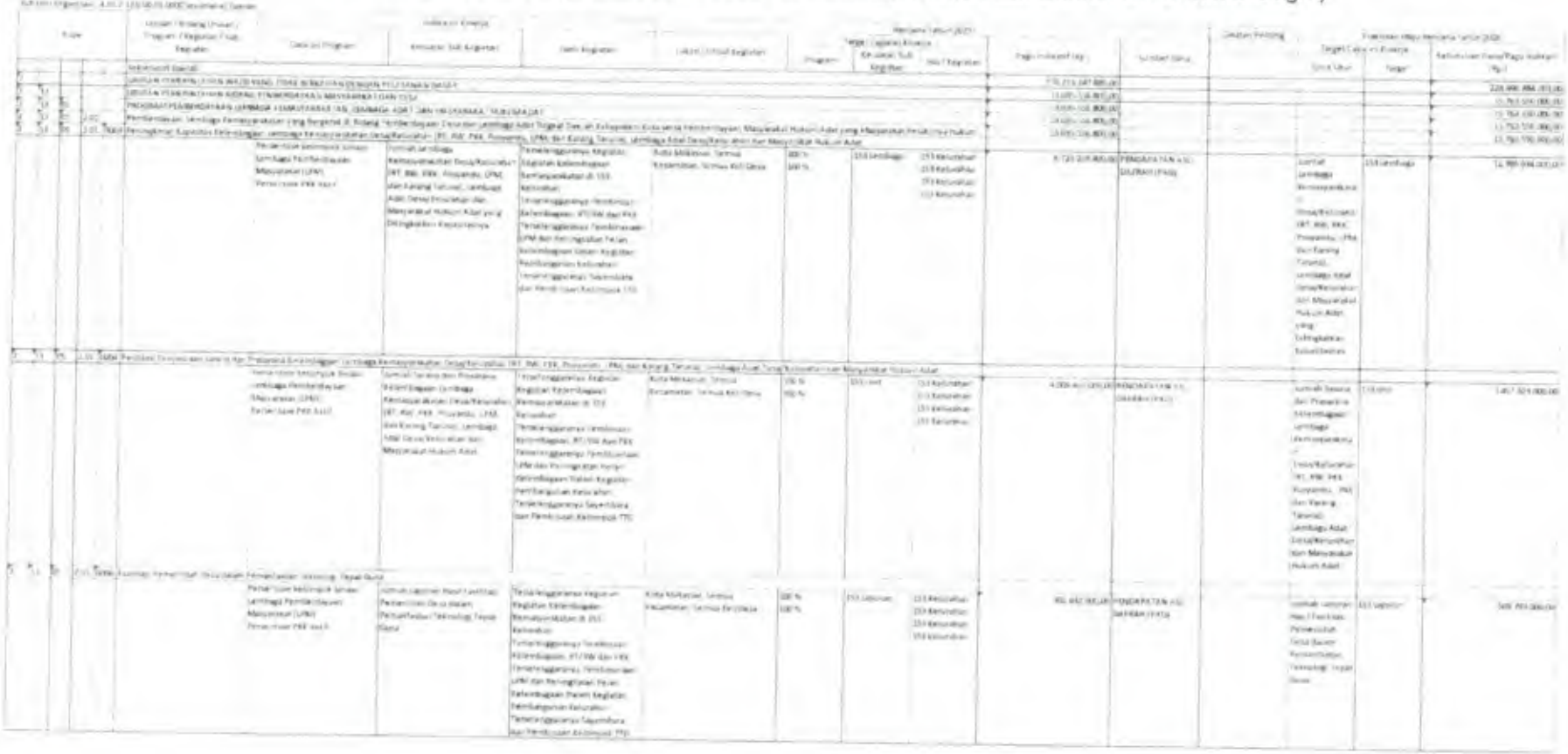
c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, dengan pagu sebesar Rp.541.872.700,-

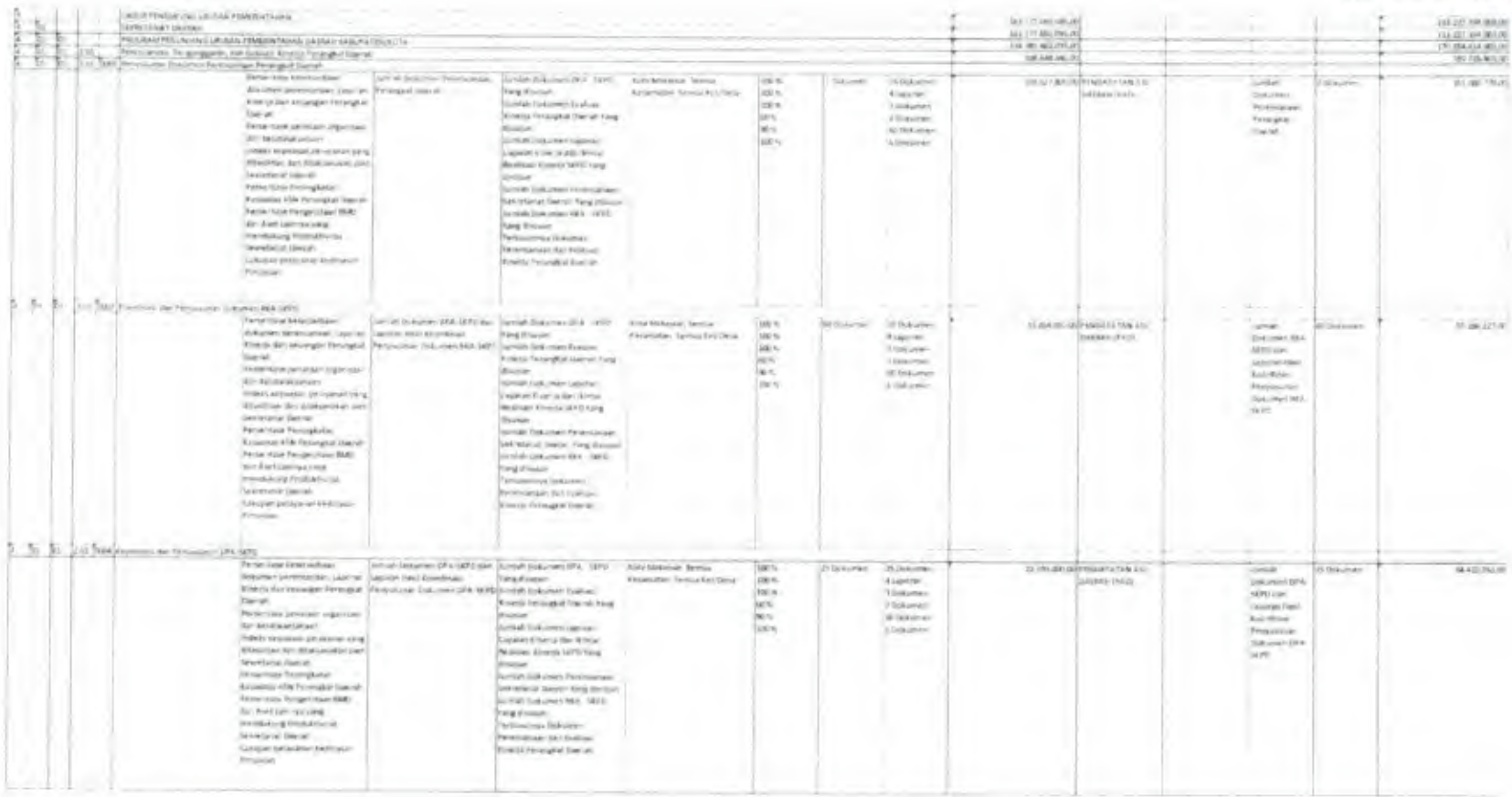
2) Kegiatan **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**, dengan pagu sebesar Rp.9.955.026.000,- yang dirinci kedalam 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

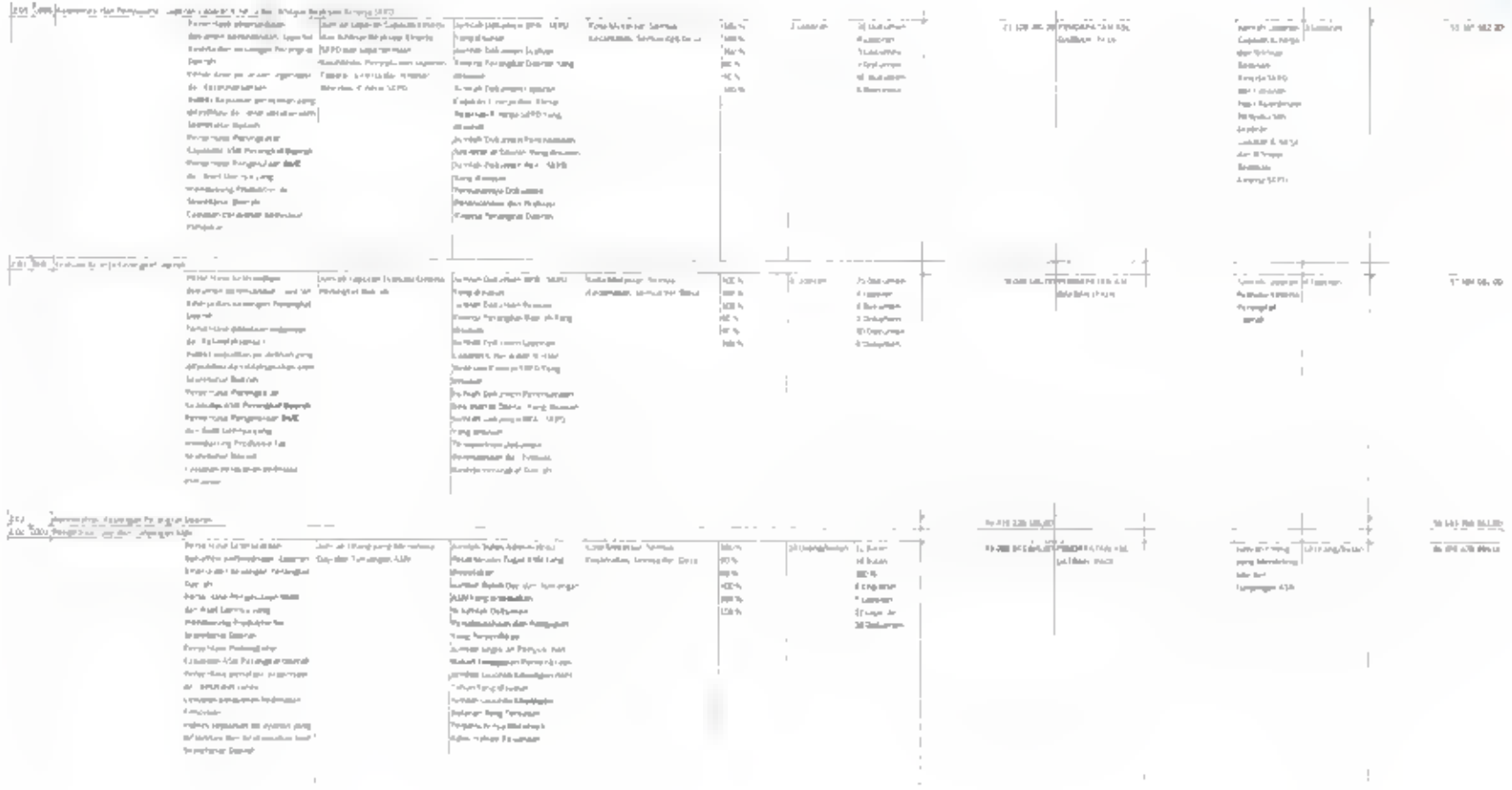
3) Kegiatan **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**, dengan pagu sebesar Rp 5.073.253.300,- yang dirinci kedalam 3 Sub Kegiatan sebagai berikut
   a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan pagu sebesar Rp.1.245.372.600,-;
   b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dengan pagu sebesar Rp.1.731.776.100,-;
   c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan pagu sebesar Rp.2.096.104.600,-.

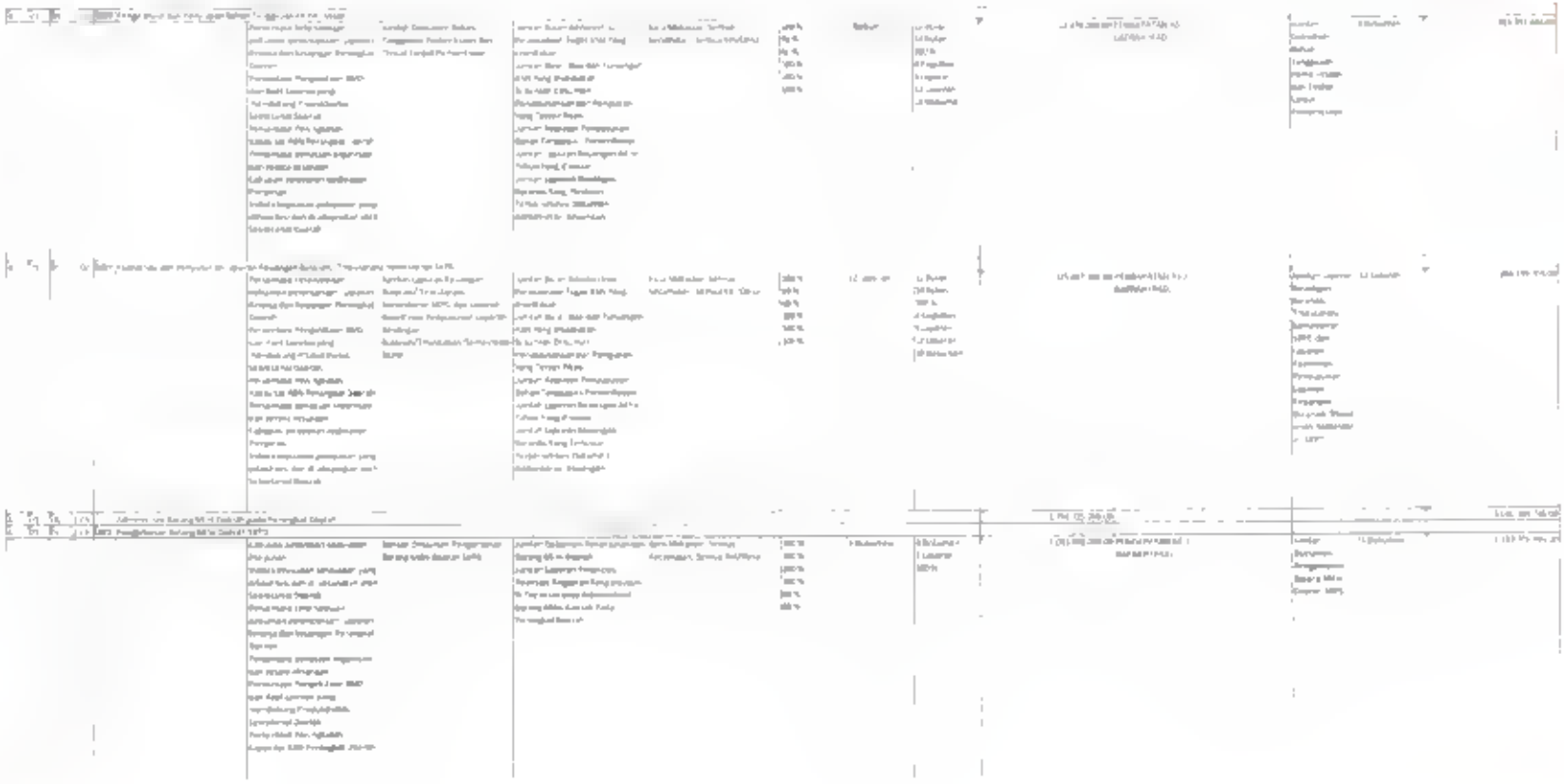
Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel Renja 2025 pada SIPD sebagai berikut

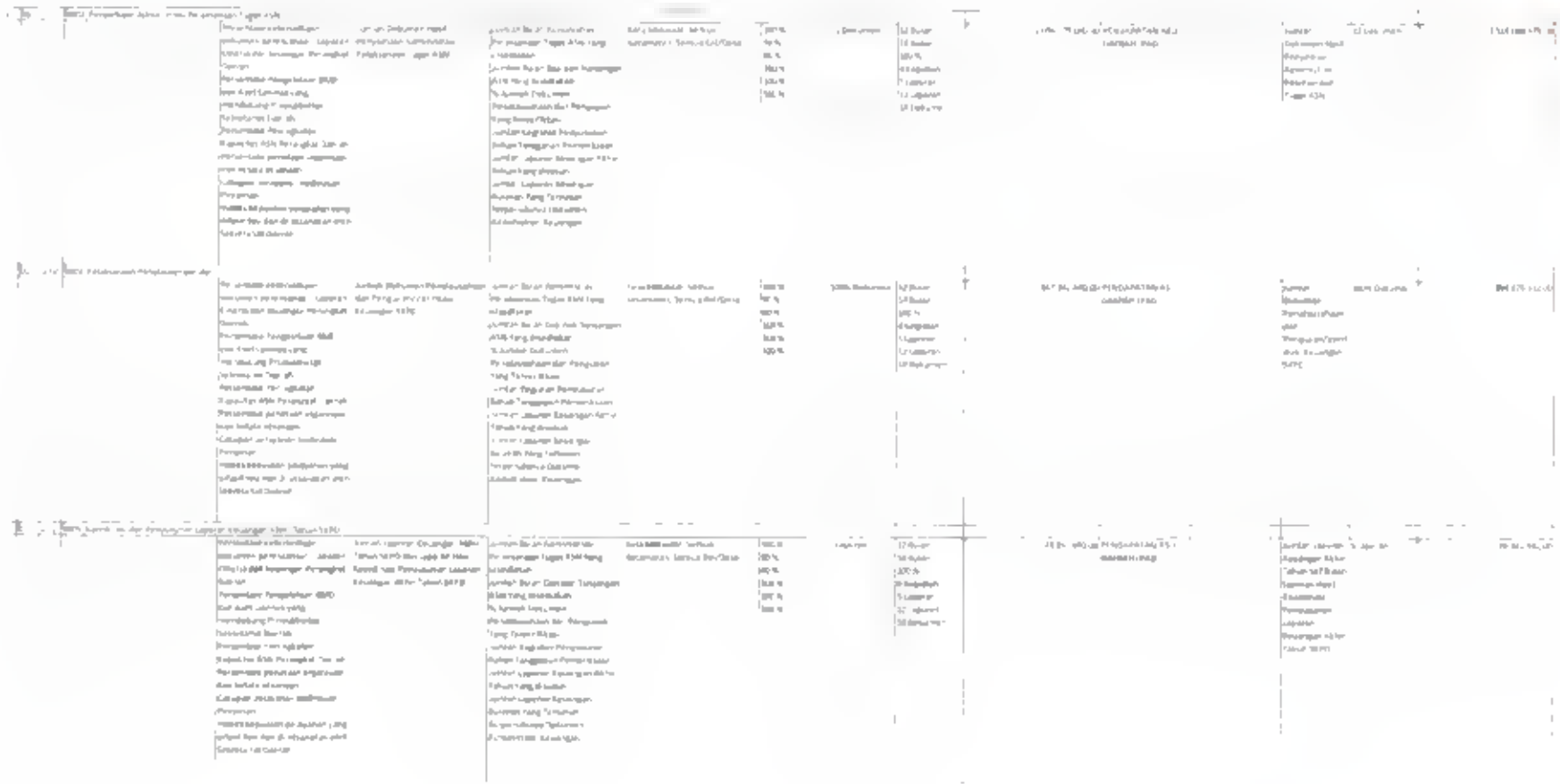
Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju 2026
(Rancangan Akhir Renja 2025 Dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah/SIPD Kemendagri)

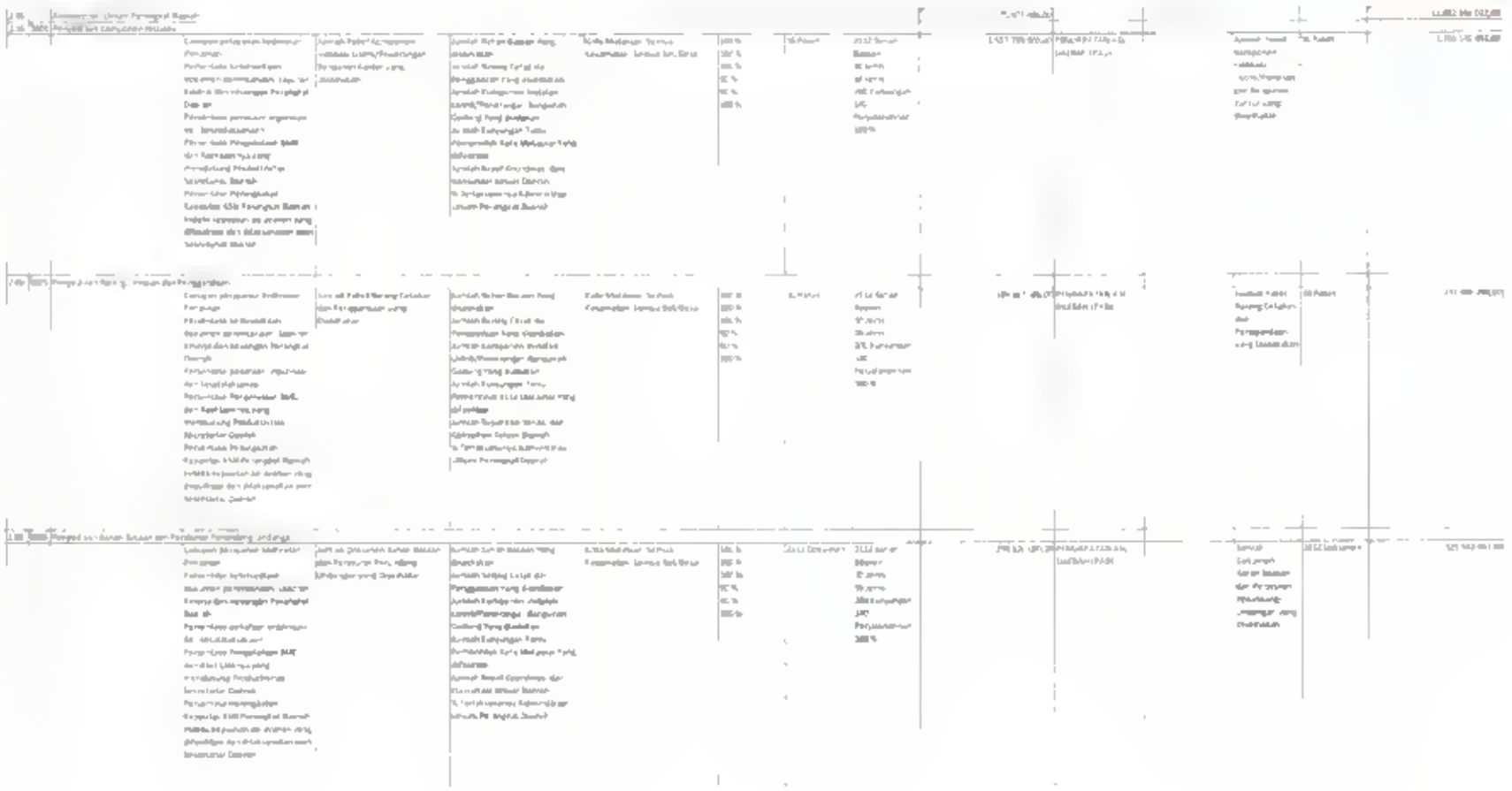


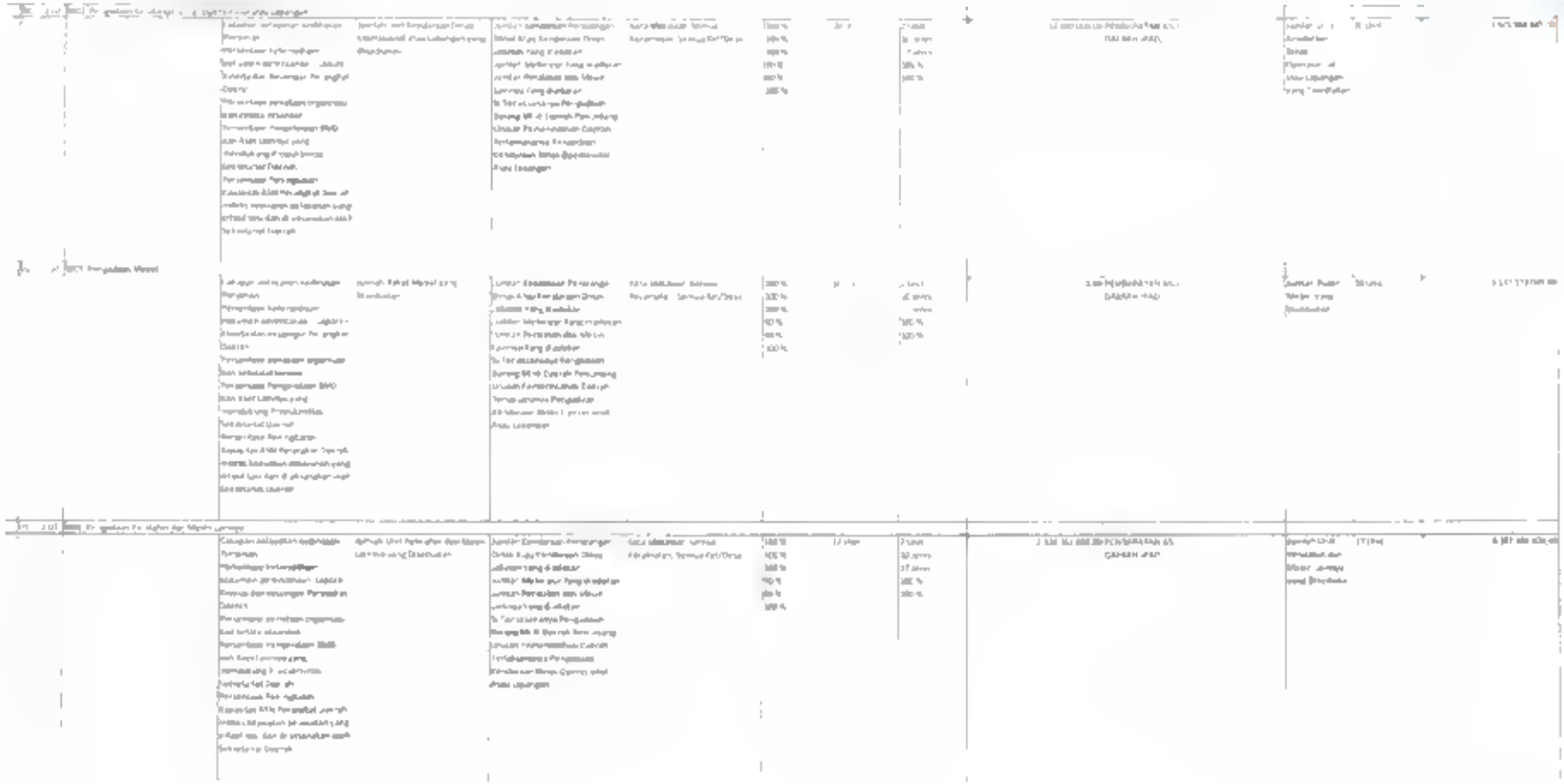


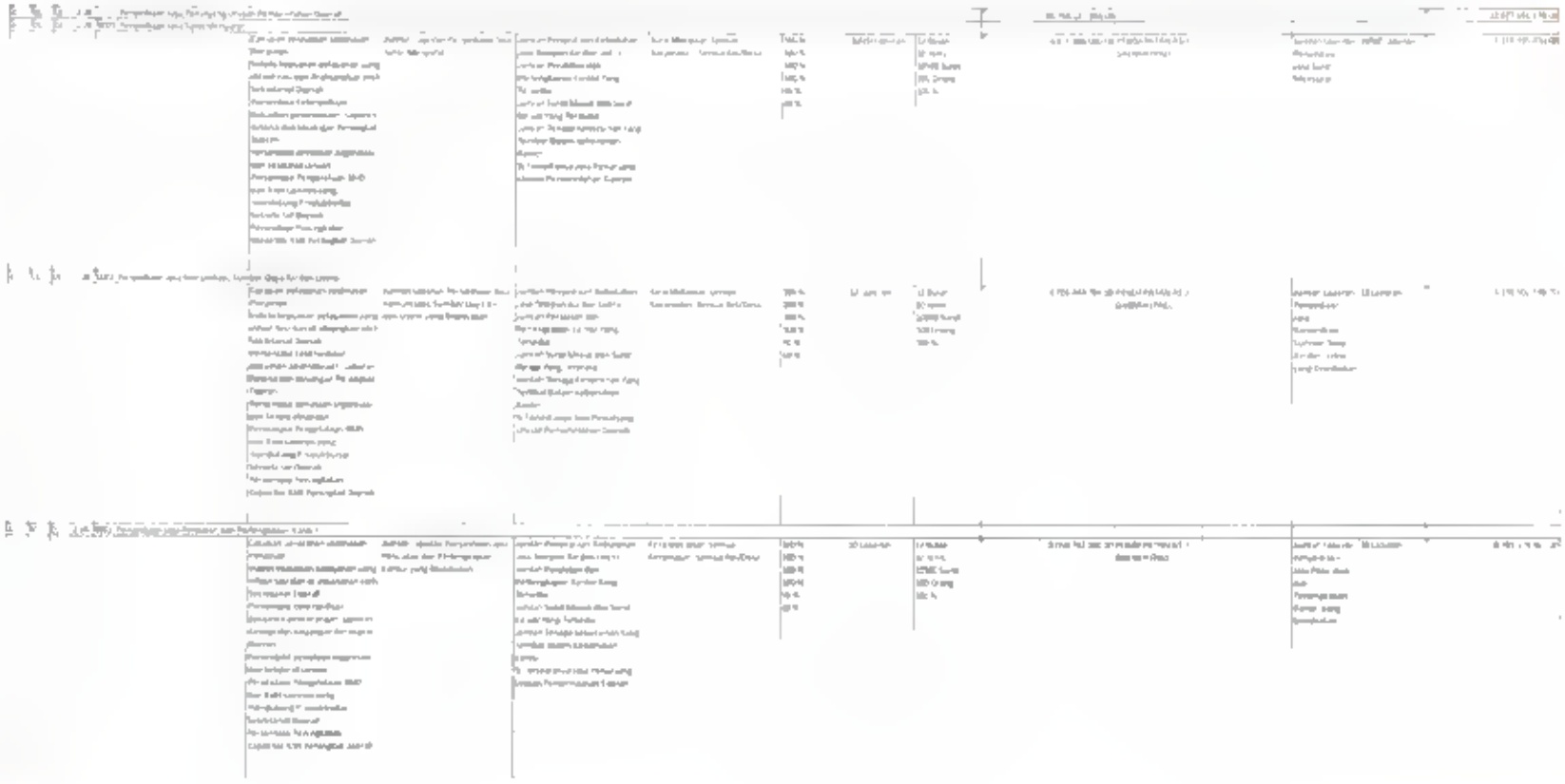


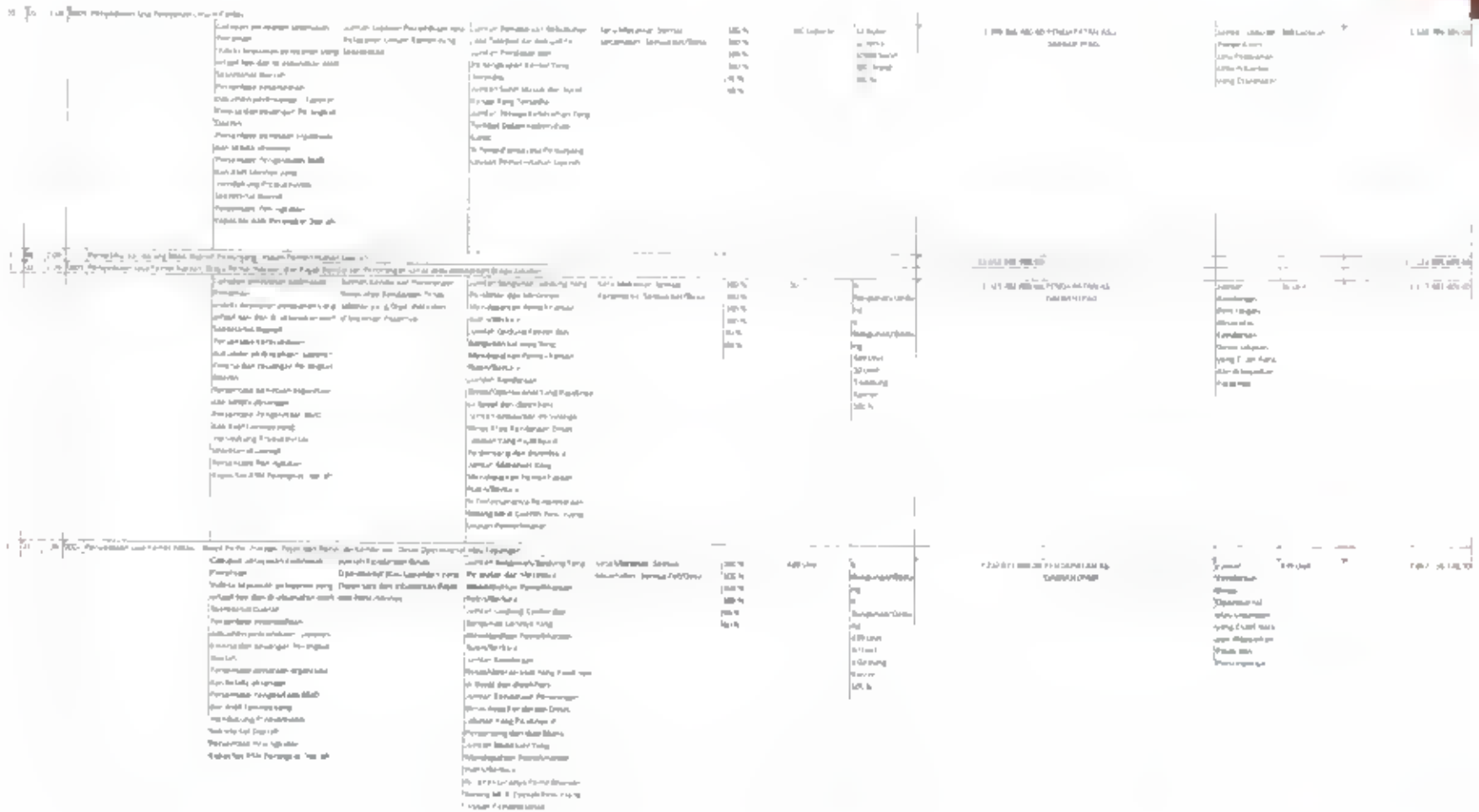


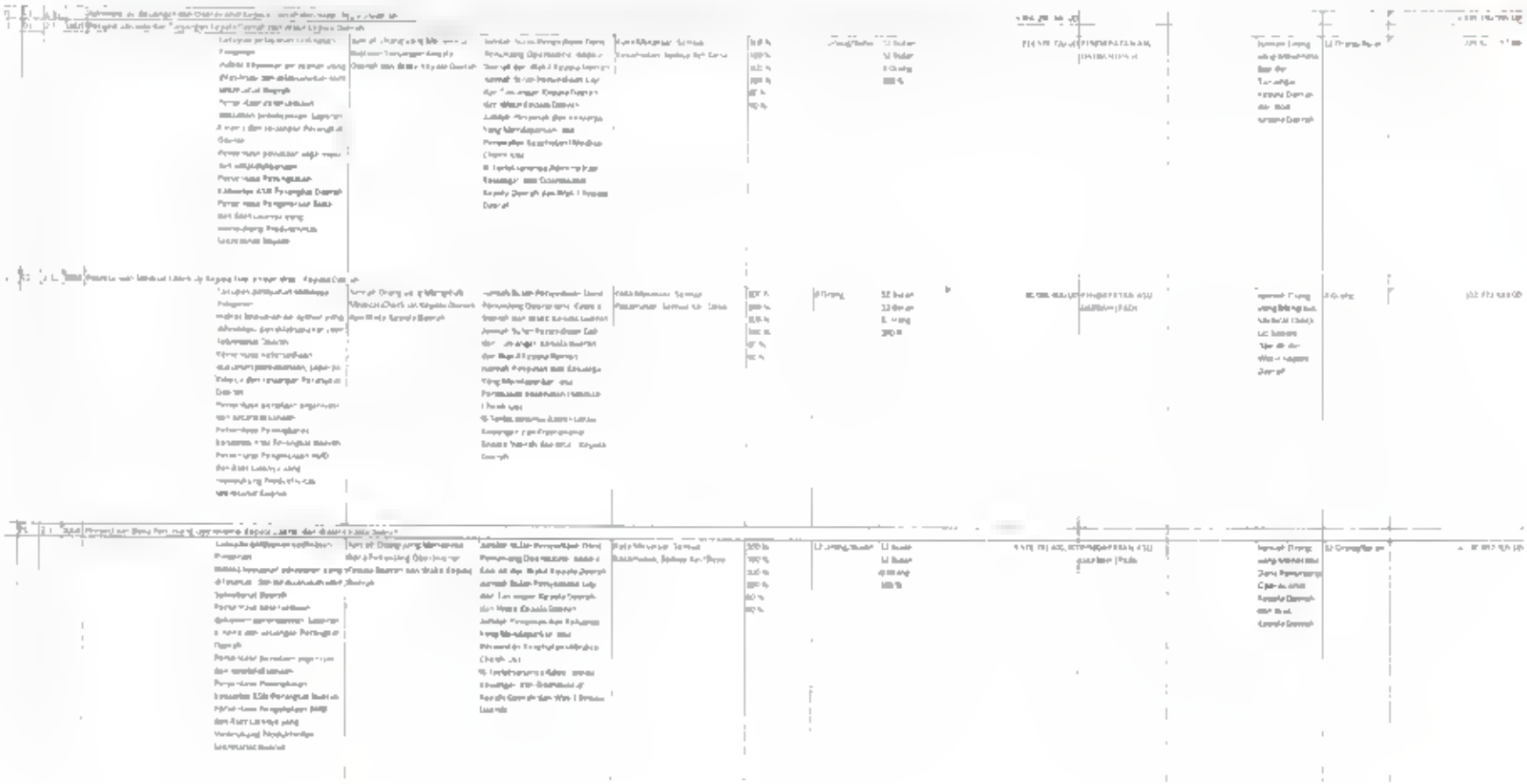


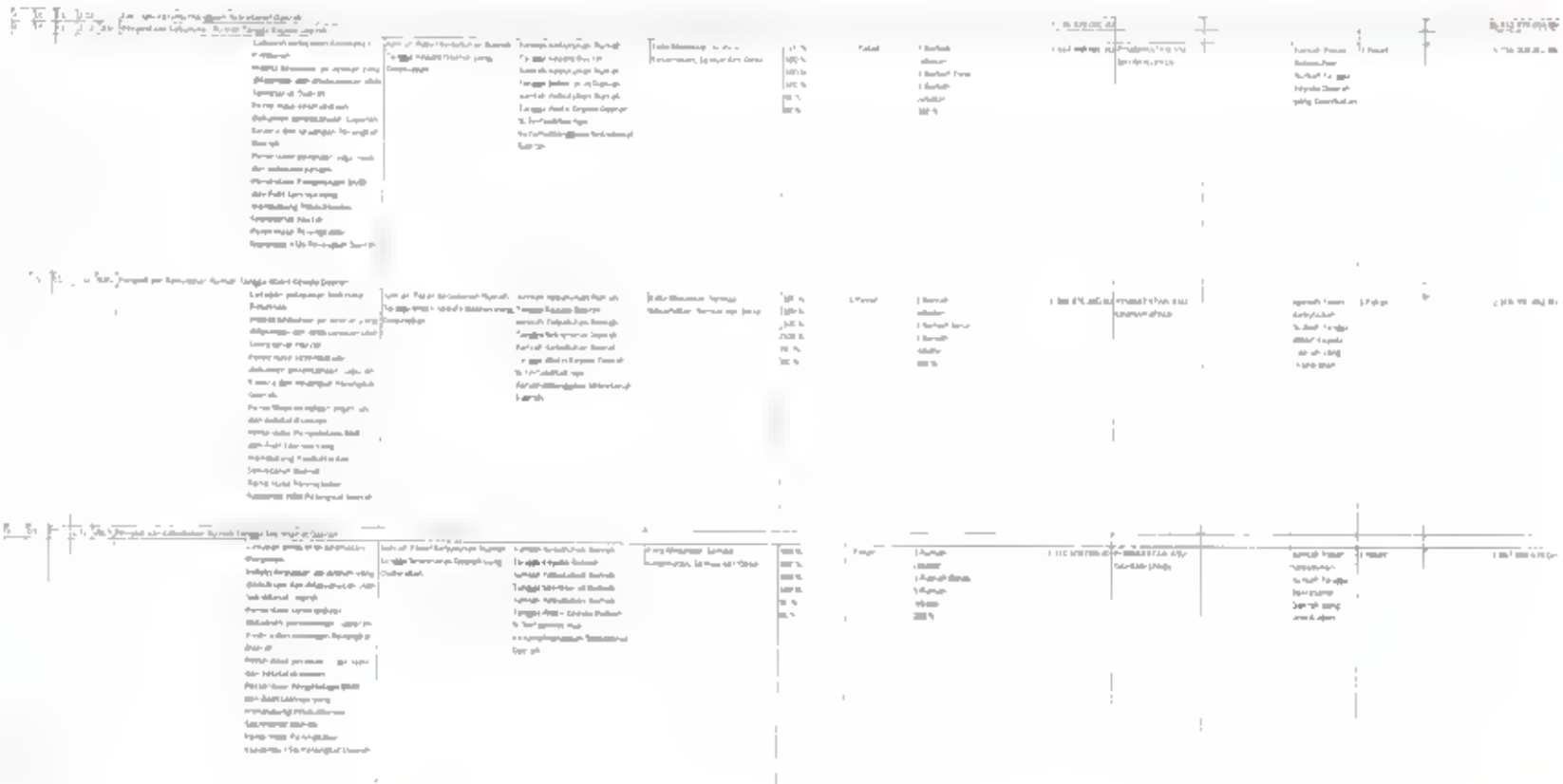


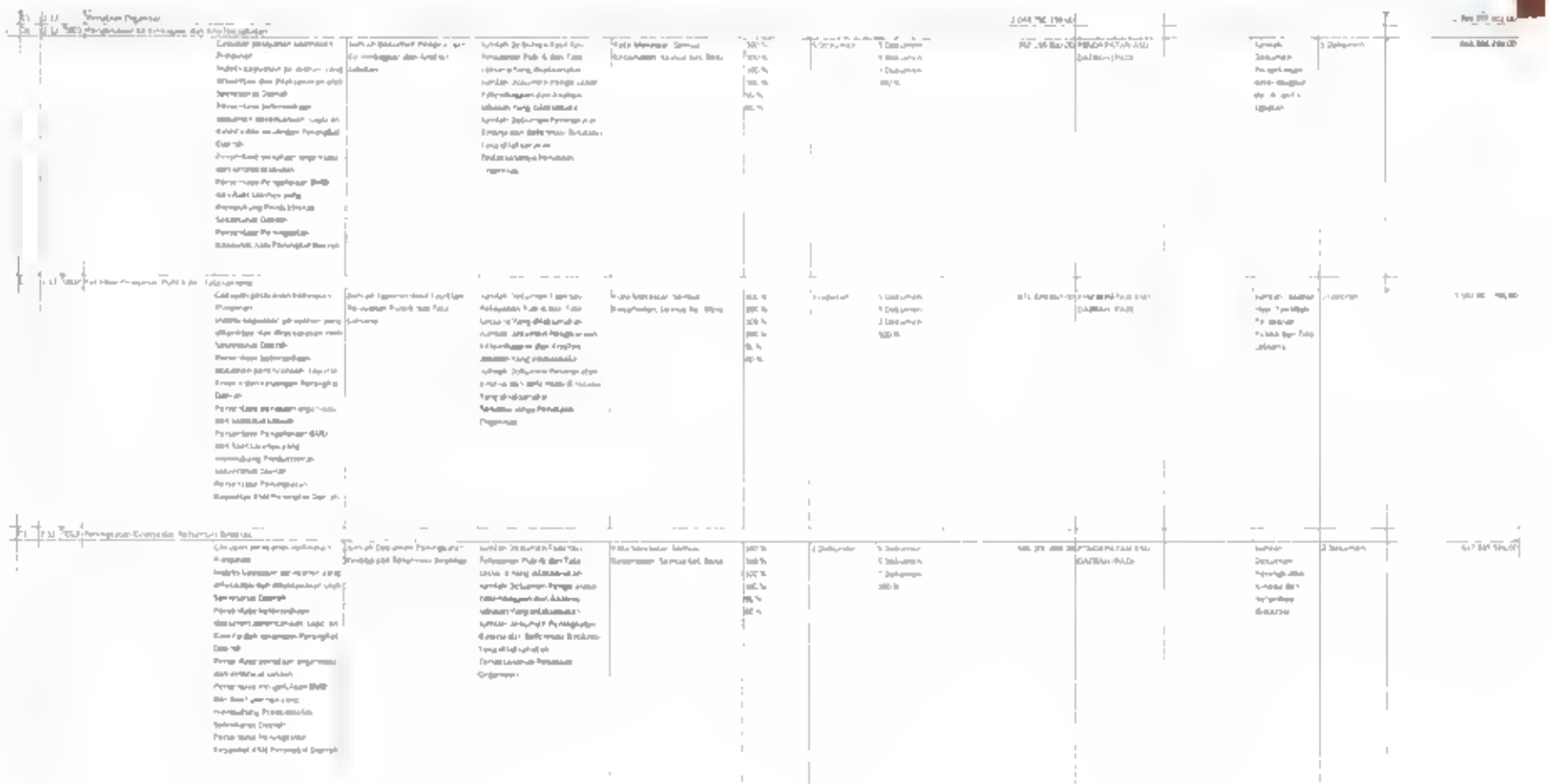


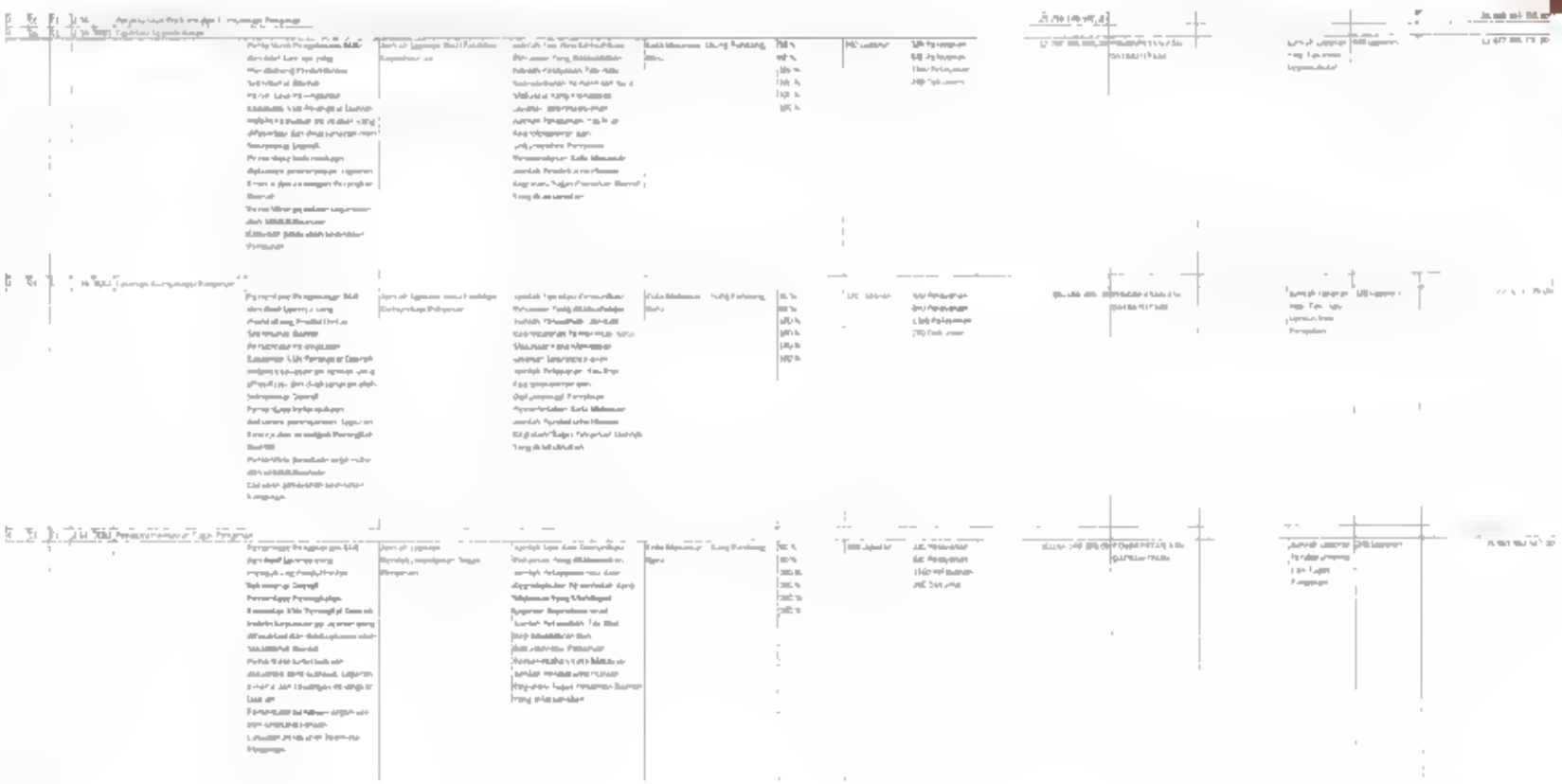


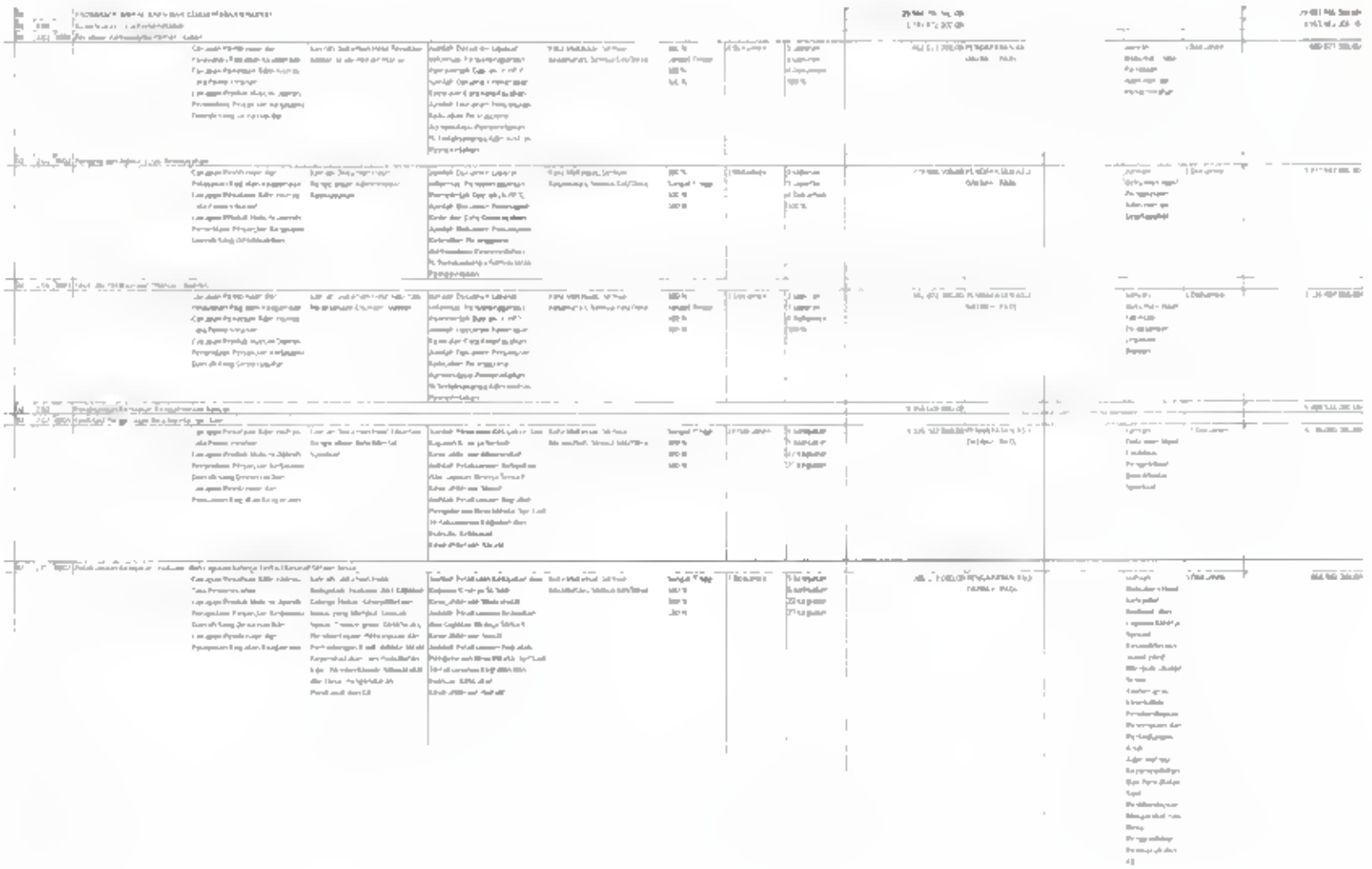


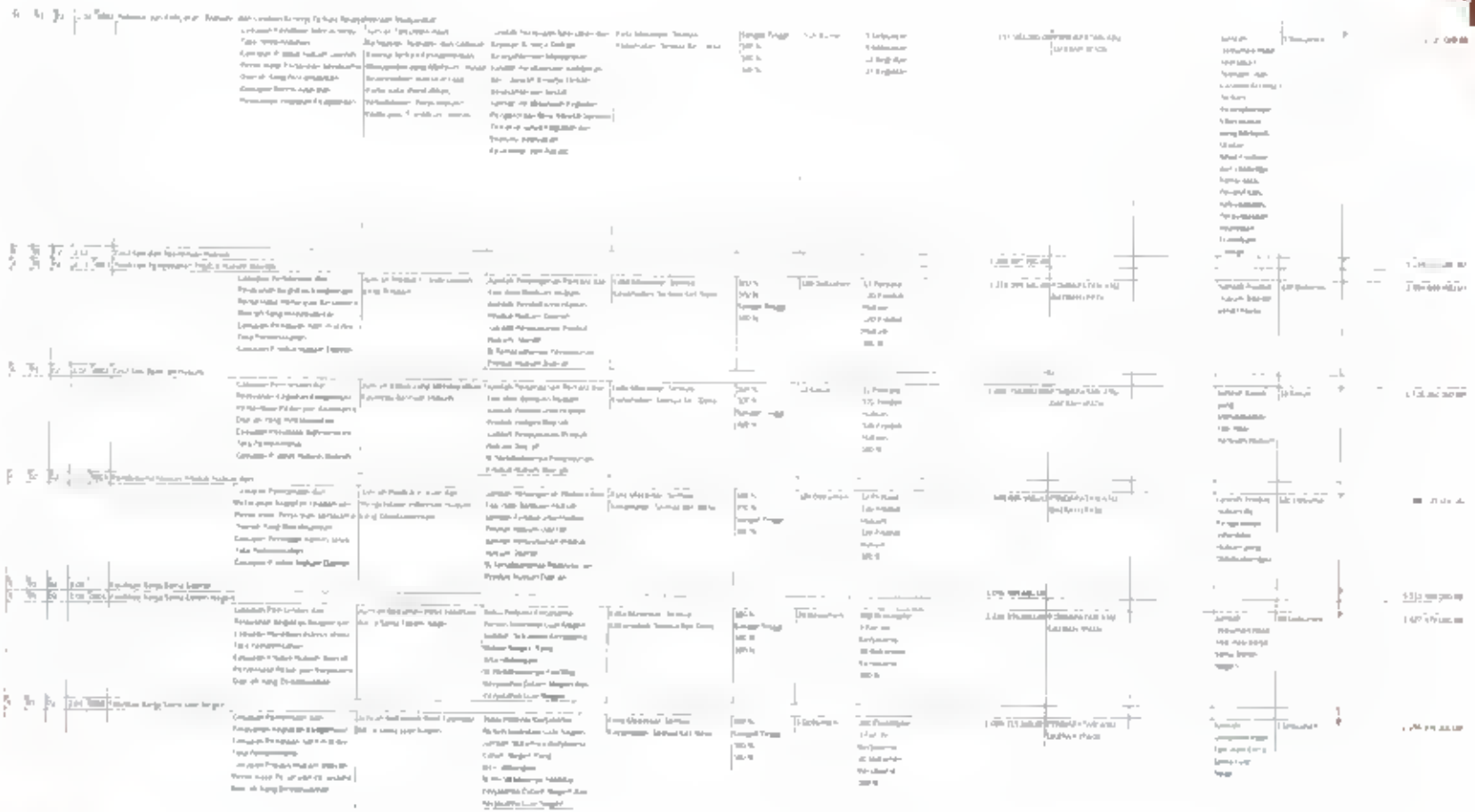


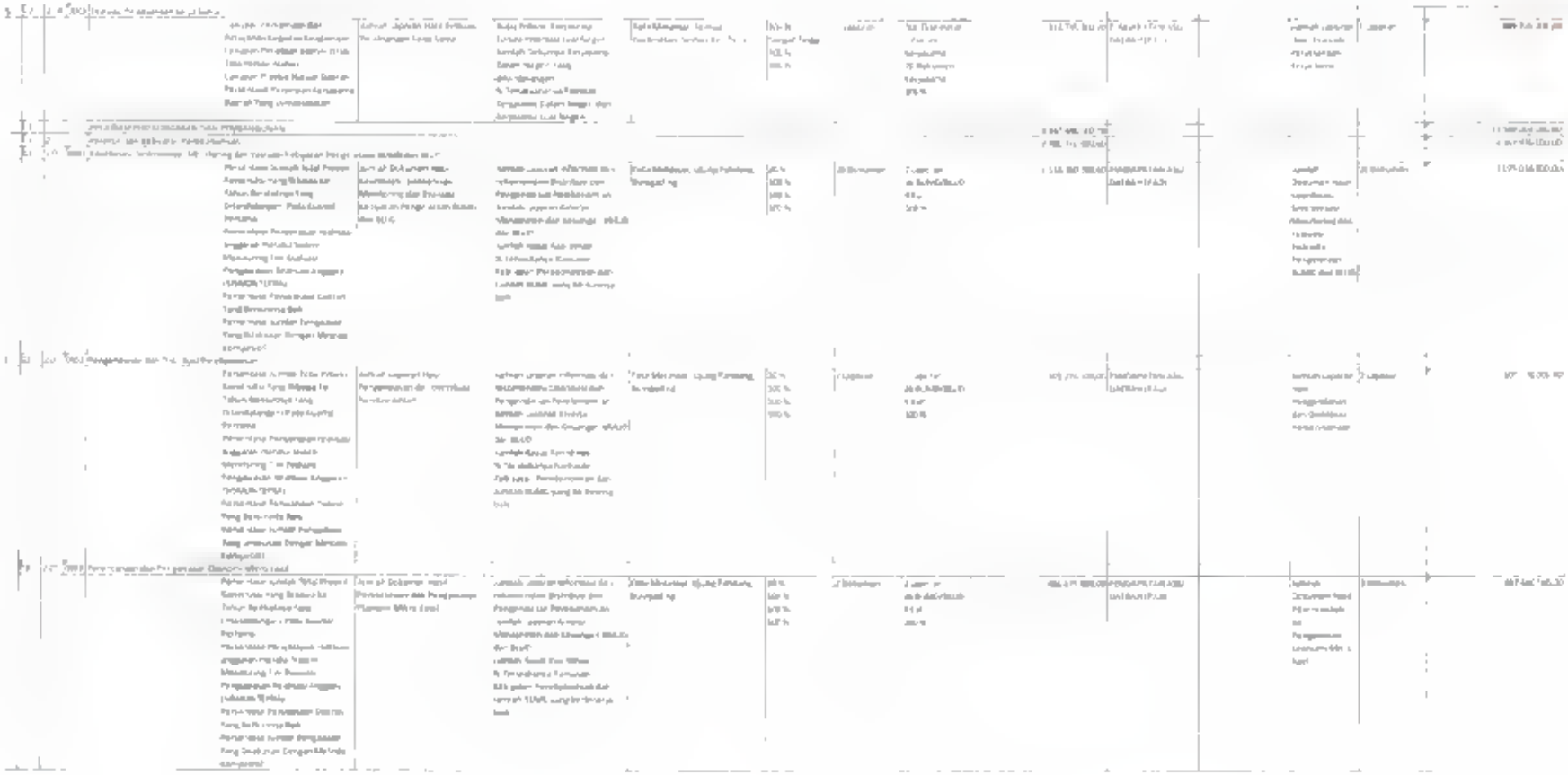


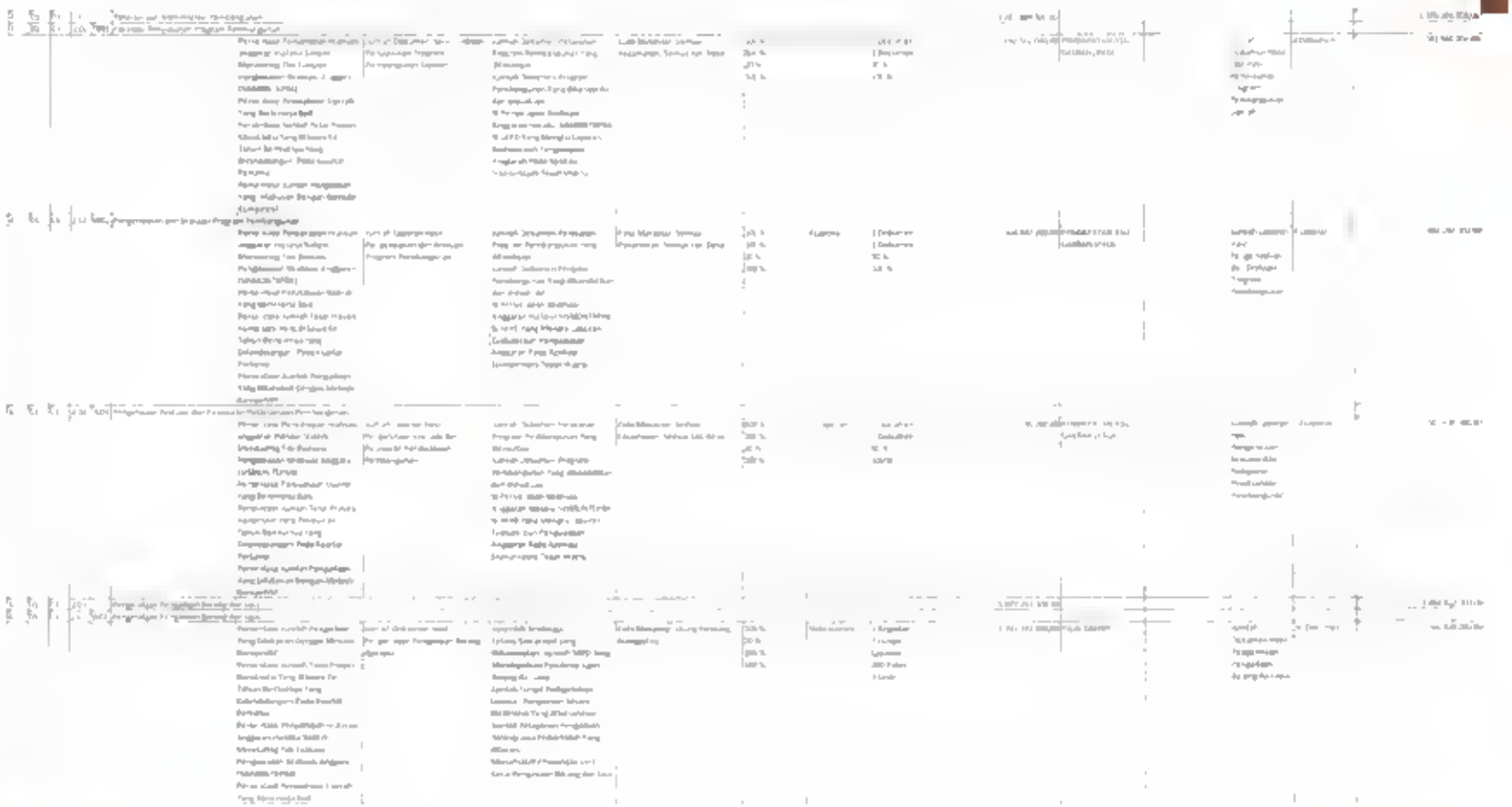


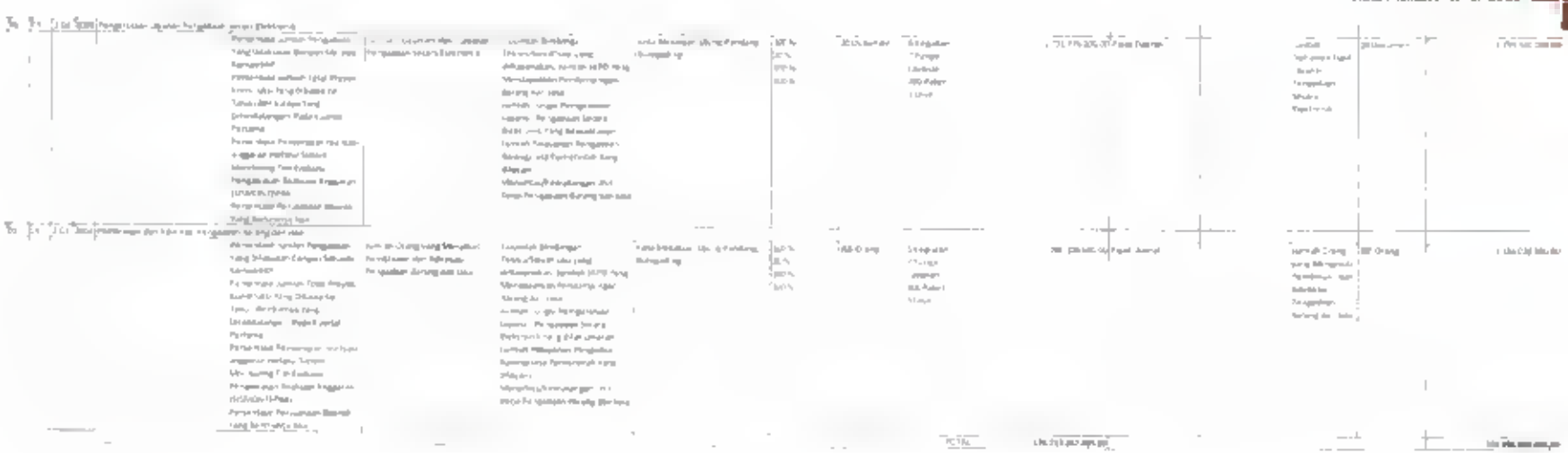












7. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan **Tahun 2025** baik dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar serta Pokok-Pokok pikiran baik dan Anggota DPRD Kota Makassar; serta
8. Hal-hal yang terkait adanya kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih periode tahun 2024-2029 yang membutuh pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku

Mengingat strategisnya peran Sekretariat Daerah dalam koordinasi, fasilitasi advokasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan administrasi dan pembangunan. Untuk itu maka secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan yang lebih terarah dan lebih transparan dalam mengakomodasi dinamika yang terjadi Namun secara lebih jauh adalah untuk menajamkan arah, gerak serta langkah Sekretariat Daerah Kota Makassar dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara proporsional. Arah, gerak dan langkah tersebut akan berkaitan terutama dengan pengelolaan keuangan yang merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dalam implementasinya diperlukan suatu ketentuan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu yang diharapkan memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapan atas Rencana Kerja ini dan juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja selama tahun 2025 dengan berpedoman terhadap pelaksanaan tahun 2023 yang telah dijalankan serta Tahun berjalan (tahun 2024) dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan.

Semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2025 ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi

Makassar, 09 Juli 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Firman Hamid Pagarra, SSTP., M.PUB.POL
Pangkat Pembina TK. I
NIP. 19810702 199912 1 001